SALINAN

BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR: 100.3.3.2/423/KPTS/408.12/2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025

BUPATI PACITAN,

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 dengan daftar Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Padatanggal : 22 - 7 - 2025

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ISRANTO,S.Sos.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690303 198903 1 006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR: 100.3.3.2/423/KPTS/408.12/2025
TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025.

DAFTAR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025

NO	PERANGKAT DAERAH
1.	Sekretariat Daerah
2.	Sekretariat DPRD
3.	Inspektorat Daerah
4.	Dinas Pendidikan
5.	Dinas Kesehatan
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
8.	Dinas Sosial
9.	Dinas Lingkungan Hidup
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13.	Dinas Perhubungan
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika
15.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18.	Dinas Perikanan
19.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
20.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
21.	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja
22.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
23.	Badan Keuangan Daerah
24.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
25.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
26.	Satuan Polisi Pamong Praja
27.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
28.	Kecamatan Donorojo

NO	PERANGKAT DAERAH
29.	Kecamatan Punung
30.	Kecamatan Pringkuku
31.	Kecamatan Pacitan
32.	Kecamatan Kebonagung
33.	Kecamatan Arjosari
34.	Kecamatan Tegalombo
35.	Kecamatan Nawangan
36.	Kecamatan Bandar
37.	Kecamatan Tulakan
38.	Kecamatan Ngadirojo
39.	Kecamatan Sudimoro

BUPATI PACITAN,

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ISRANTO,S.Sos.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690303 198903 1 006

RENCANA KERJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PACITANTAN
JL. JA. SUPRAPTO NO.8 PACITAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan karunia-Nya maka Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan telah menyusun dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 ini disusun sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah pada tahun anggaran 2025 yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi serta menjadi dasar penilaiand alam evaluasi akuntabilitas kinerja.

Diharapkan dokumen Rencana Kerja ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun anggaran 2025 sehingga dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan dalam rangka mewujudkan Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.

Semoga Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitandapat memberikan manfaat bagi pelaksana program dan kegiatan di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen ini masih banyak kekurangan, maka masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan guna meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan sehingga terwujud pemerintahan yang baik dan bersih.

Pacitan, - 7 - 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN

Dr. Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670716 199202 1 002

DAFTAR ISI

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 4

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II 8

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU 8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah. 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah 12

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah 14

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD 16

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. 34

BAB III 36

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH 36

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 36

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kinerja Sekretariat Daerah 36

3.3 Program dan Kegiatan 39

BAB IV 42

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 42

BAB V 59

PENUTUP 59

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pacitan yakni ***"MASYARAKAT PACITAN SEJAHTERA dan BAHAGIA"*** untuk mencapai Misi Keempat yaitu **Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional, dan Melayani**, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan sebagai bagian integral perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan menyelaraskan Rencana Strategis dengan visi dan misi tersebut sebagai dasar penyusunan kerangka acuan kerja penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 dilakukan untuk mengakomodir Perubahan RKPD Tahun 2025, yang dilakukan untuk penyesuaian pagu pendanaan maupun indikator karena regulasi maupun penyesuaian target yang telah tercapai.

Dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok sesuai dengan fungsi yang diemban oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, maka disusunlah Rencana Kerja Sekretariat Daerah sebagai suatu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 disamping sebagai wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 secara proporsional dan terukur, dengan menentukan jenjang tanggung jawab perencanaan, pelaksanaan, hasil dan evaluasi hasil.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disebutkan bahwa Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 189 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan terdiri dari :

a. SEKRETARIS DAERAH
b. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
    1) Bagian Pemerintahan dan Kerjasama
    2) Bagian Hukum
    3) Bagian Kesejahteraan Rakyat
c. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
    1) Bagian Perekonomian
    2) Bagian Administrasi Pembangunan
    3) Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
d. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
    1) Bagian Umum
    2) Bagian Organisasi
    3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
e. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Adapun struktur organisasi Sekretariat Daerah dapat dilihat sebagaimana Tabel berikut :

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 ini berdasarkan peraturan perundang undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
5. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010); dan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan tahun 2016 - 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Struktur Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan.
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 189 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan penyelenggaraan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan pada Tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan ini bertujuan:

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025.
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian Rancangan Rencana Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2025

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kinerja Sekretariat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah.

Kegiatan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun lalu dan capaian renstra Sekretariat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Sekretariat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanan Renstra Sekretariat Daerah dan perkiraan pelaksanaan DPA Sekretariat Daerah tahun berjalan yang baru disahkan.

Telaah hasil evaluasi mencakup :

1. Realisasi indicator sasaran yang memenuhi, kurang maupun melebihi target yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi kurang maupun melebihi target yang direncanakan.
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapaianya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan dan kinerja pelayanan, perencanaan dan

penganggaran serta kebijakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2024 dengan capaian indikator sebagai berikut : indikator sasaran Score Nilai LPPD tercapai 3.2368 lebih tinggi dari, indicator Score Nilai target yang ditentukan sebesar 2.7500, indikator Score Nilai Indek Tata Kelola PBJ tercapai 81,02 lebih tinggi dari target yang ditentukan yaitu 66,00, indikator Score Nilai SAKIP PD tercapai 71,85 lebih rendah dari target 80 dan indikator Score Nilai IKM PD tercapai 83,59 lebih rendah dari target 84.

Matriks review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 terhadap indicator Sasaran yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Matrik Realisasi Capaian Indikator Sasaran Tahun 2021-2024

Sasaran dan Indikator Sasaran														
Uraian		Indikator		Target Renstra PD						Realisasi Renstra PD					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	1.1	Score Nilai LPPD	(Sangat Baik) 2.650	(Sangat Baik) 2.7000	(Sangat Baik) 2.7500	3,2500	3,3000	3,3500	2.8600	2.8600	3.2368	3,2368		
		1.2	Score Nilai Indek Tata Kelola PBJ	(Baik) 45	(Baik) 50	(Baik) 55	66	70	75	41.23	50.60	65.67	81,02		
2	Meningkatnya kualitas tata kelola PD	2.1	Score Nilai SAKIP PD	(>B) 70	(>B) 72	(>B) 74	80	81	82	80.30	80.30	70.35	71,85		
		2.2	Score Nilai IKM PD	83	83.5	84	84.5	85	85.5	78.78	83.18	88.31	83,59		

Sedangkan evaluasi realisasi capaian sasaran Tahun 2024 terhadap target akhir Renstra dapat dilihat sebagaimana table berikut

Tabel 2.2
Realisasi capaian indicator sasaran 2024 terhadap target akhir Renstra

Sasaran		Indikator	Target Akhir RPJMD (2026)	Realisasi sampai dengan Tahun 2024	Tingkat Kemajuan
1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	1.1	Score Nilai LPPD	3,3500	3,2368	96,62%
	1.2	Score Nilai Tata Kelola PBJ	75	81,02	108,03%
Rata - rata capaian sasaran Indikator 1					**102,32%**
2 Meningkatnya kualitas tata kelola PD	2.1	Score Nilai SAKIP PD	81,00	71,85	85,79%
	2.2	Score Nilai IKM PD	85,50	83,59	97,77%
Rata - rata capaian sasaran Indikator 2					**91,78%**
Rata - rata capaian sasaran Indikator 1 & 2					**97,05%**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Dalam bagian ini disajikan capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, tentang Standar Pelayanan Minimal maupun terhadap IKK sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pada pembahasan sub bab ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan PD sebagai berikut :

Tabel 2.3
Realisasi kinerja Program Kegiatan sampai dengan 2024 terhadap target akhir kinerja Program Kegiatan 2026

No	Program	Indikator Kinerja Program		Target Akhir RPJMD (2026)	Realisasi sampai dengan Tahun 2024	Tingkat Kemajuan
1	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	1.1.1	% kebijakan dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerjasama daerah yang terlaksana	100,00%	100,00%	100,00%
		1.1.2	% kebijakan dibidang bina mental dan spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana	100,00%	100,00%	100,00%
		1.1.3	% kebijakan dibidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang terlaksana	100,00%	100,00%	100,00%
2	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	1.2.1	Persentase kebijakan di bidang perekonomian pembangunan dan SDA yang terlaksana	100,00%	100,00%	100,00%
		1.2.2	% kebijakan dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan PBJ secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa yang terlaksana	100,00%	100,00%	100,00%
		1.2.3	% kebijakan dibidang penyusunan program, pengendalian program pembangunan dan evaluasi pelaporan yang terlaksana	100,00%	100,00%	100,00%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.1.1	% kebijakan dibidang kelembagaan dan analisa jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta bidang kinerja dan reformasi birokrasi yang terlaksana	100,00%	100,00%	100,00%
		2.1.2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	71.85	87,94%
		2.1.3	% tata kelola keuangan yang terlaksana	100,00%	100,00%	100,00%
		2.2.1	% kebijakan dibidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi kebijakan dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga yang terlaksana	100,00%	100,00%	100,00%
		2.2.2	Nilai IKM PD	85,5	83,59	97,77%
		2.2.3	% kebijakan dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga yang terlaksana	100,00%	100,00%	100,00%

Dari table tersebut disimpulkan hampir semua indicator program dapat tercapai, kecuali indicator Nilai Sakip dan IKM yang belum memenuhi target, hal tersebut dikarenakan kurangnya koordinasi dalam organisasi dan stage holder terkait, kedepan akan dilakukan koordinasi secara periodic baik dengan intern organisasi maupun stage holder.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

1. Permasalahan yang dihadapi

Dalam pelaksanakan kegiatan guna mencapai indikator kinerja yang sudah ditetapkan pada Tahun 2025 di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan tentunya tidak terlepas dari permasalahan, dan hambatan yang sedikit banyak mempengaruhi pencapaian indikator kinerja. Permasalahan tersebut adalah :

1) Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkup Sekretariat Daerah yang masih belum optimal. Kapasitas dan kompetensi SDM ada yang masih belum sesuai dengan bidang tugasnya di beberapa Bagian bisa mempengaruhi capaian kinerjanya.
2) Beberapa sarana dan prasarana yang dibutuhkan masih kurang, baik kualitas maupun kuantitasnya seperti komputer dan kendaraan dinas serta sarana pendukung lainnya.
3) Alat Teknologi Informasi yang ada belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari.
4) Penyediaan data dan informasi yang kurang baik sehingga pengukuran kinerja belum didukung data-data yang valid dan ini akan berpengaruh pada kualitas analisis capaian kinerja.

2. Tindak lanjut penyelesaian masalah

Dari permasalahan-permasalahan tersebut perlu mendapatkan upaya pemecahan sehingga tidak mempengaruhi kinerja pada tahun berikutnya. Upaya pemecahan masalah tersebut antara lain :

1) Penataan organisasi, personil dan sarana-prasarana terus dilakukan sampai dipandang benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Pengisian dan mutasi pejabat dan staf merupakan salah satu upaya pemecahan yang dilakukan, penambahan sarana dan prasarana baik melalui pengadaan maupun rehabilitasi (pemeliharaan)
2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM (personil) yang ada diantaranya dengan mutasi pejabat dan staf, mengusulkan dengan formasi jabatan yang dibutuhkan di Sekretariat Daerah juga dengan menyelenggarakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan baik di dalam daerah maupun mengikuti di luar daerah.
3) Selalu meningkatkan upaya-upaya koordinasi, konsolidasi dan kerjasama yang harmonis dengan pihak-pihak terkait diantaranya dengan melaksanakan Rapat Kerja baik dengan PD, Kecamatan maupun Instansi Vertikal, Kunjungan Kerja Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah ke PD dalam rangka koordinasi dan pembinaan, membangun kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal.
4) Pemanfaatan Teknologi Informasi perlu dimaksimalkan sehingga lebih mudah dan cepat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

5) Perlu prioritas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan anggaran yang tersedia.
6) Perlu meningkatkan kualitas ketersediaan data dan informasi capaian kinerja dengan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang lebih baik dan tercatat secara valid.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD

Telaah terhadap rancangan akhir RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra PD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh PD, dengan arahan Bupati selaku Kepala Daerah terkait dengan prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap PD berdasarkan Rancangan akhir RKPD.

Review terhadap rancangan akhir RKPD, meliputi identifikasi prioritas program dan kegiatan. Indikator kinerja program/kegiatan. Tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk PD yang bersangkutan.

Berikut adalah Rancangan akhir RKPD Kabupaten Pacitan dengan analisis kebutuhan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025.

Tabel 2.4
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SEKRETARIAT DAERAH KAB. PACITAN
TAHUN 2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Sekretariat Daerah							34.284.545.414,00	34.967.748.598,00	32.595.180.503,00		34.929.597.994,00	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							34.284.545.414,00	34.967.748.598,00	32.595.180.503,00		34.929.597.994,00	
4	1				SEKRETARIAT DAERAH							34.284.545.414,00	34.967.748.598,00	32.595.180.503,00		34.929.597.994,00	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	A	B	A (80)	A (81)	A (81)	26.568.748.598,00	27.077.748.598,00	25.787.471.155,00	A (81)	22.772.613.716,00	
						Persentase kebijakan di bidang kelembagaan dan analisa jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta bidang kinerja dan reformasi birokrasi yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%				100%		

						Persentase kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi yang terlaksana	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**				**100%**		
						Persentase tata kelola keuangan yang terlaksana	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**				**100%**		
						Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Sekretariat Daerah	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**				**100%**		
4	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perencaan PD**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**135.000.000,00**	**192.300.000,00**	**192.300.000,00**	**100%**	**85.000.000,00**	
4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55 Dokumen	13 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	135.000.000,00	192.300.000,00	170.494.604,00	11 Dokumen	85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**13.205.622.253,00**	**13.166.567.253,00**	**13.166.567.253,00**	**100%**	**1.048.637.975,00**	
4	**1**	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ bulan	1240 Orang/ bulan	110 Orang/ bulan	1540 Orang/ bulan	1540 Orang/ bulan	12.047.929.278,00	12.047.929.278,00	11.346.292.466,00			
4	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	70 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	1.048.637.975,00	1.118.637.975,00	1.105.679.803,00	14 Dokumen	1.048.637.975,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	**1**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Presentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kepegawaian PD**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**145.000.000,00**	**145.000.000,00**	**145.000.000,00**	**100%**	**145.000.000,00**	

4	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1000 Dokumen	250 Dokumen	200 Dokumen	200 Dokumen	200 Dokumen	145.000.000,00	145.000.000,00	110.809.808,00	200 Dokumen	145.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana PD**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**3.322.097.810,00**	**3.502.852.810,00**	**3.502.852.810,00**	**100%**	**4.298.097.810,00**	
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	200 Paket	40 Paket	30 Paket	30 Paket	30 Paket	740.361.505,00	831.116.505,00	1.030.514.865,00	30 Paket	1.666.361.505,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	150 Paket	50 Paket	30 Paket	30 Paket	30 Paket	447.004.648,00	447.004.648,00	452.157.852,00	30 Paket	447.004.648,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7500 Paket	8000 Paket	7500 Paket	150 Paket	150 Paket	588.160.000,00	738.160.000,00	819.937.470,00	150 Paket	588.160.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1224 Laporan	1200 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.546.571.657,00	1.486.571.657,00	1.323.374.132,00	12 Laporan	1.596.571.657,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar PD**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**1.146.584.978,00**	**1.146.584.978,00**	**1.146.584.978,00**	**100%**	**1.465.849.778,00**	
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.146.584.978,00	1.146.584.978,00	1.097.112.908,00	12 Laporan	1.465.849.778,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**1.029.738.439,00**	**1.139.738.439,00**	**1.139.738.439,00**	**100%**	**1.529.738.439,00**	

4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	302 Unit	124 Unit	89 Unit	89 Unit	89 Unit	612.256.000,00	722.256.000,00	688.650.093,00	89 Unit	612.256.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	160 Unit	60 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	151.204.733,00	151.204.733,00	185.955.986,00	50 Unit	185.955.986,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	4 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	266.277.706,00	266.277.706,00	290.722.429,00	6 Unit	266.277.706,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	**1**	**1**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase Pemenuhan Gaji dan Penunjang Operasional KDH dan WKDH**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**2.033.374.050,00**	**2.033.374.050,00**	**2.033.374.050,00**			
4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	14 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	2 Orang/ Bulan	28 Orang/Bulan	28 Orang/Bulan	1.433.374.050,00	1.433.374.050,00	1.503.575.625,00	28 Orang/Bulan	1.433.374.050,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.11	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	14 Orang/Bulan	24 Orang/ Bulan	500 Orang/ Bulan	28 Orang/ Bulan	28 Orang/ Bulan	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	28 Orang/Bulan	600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	**1**	**1**	**2.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kerumahtanggaan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**3.351.331.068,00**	**3.401.331.068,00**	**3.401.331.068,00**	**100%**	**3.432.331.068,00**	
4	1	1	2.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala	60 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	2.219.400.000,00	2.219.400.000,00	2.128.630.030,00	12 Paket	2.300.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

						Daerah yang Disediakan											
4	1	1	2.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	60 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	991.653.000,00	1.041.653.000,00	955.814.829,00	12 Paket	991.653.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.12	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	60 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	140.278.068,00	140.278.068,00	156.794.865,00	12 Paket	140.278.068,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	**1**	**1**	**2.13**		**Penataan Organisasi**	**Presentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Penataan Organisasi**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**650.000.000,00**	**650.000.000,00**	**650.000.000,00**	**100%**	**690.000.000,00**	
4	1	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	50 Dokumen	100 Dokumen	39 Dokumen	39 Dokumen	39 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	176.323.000,00	39 Dokumen	170.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	40 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	175.073.438,00	8 Laporan	310.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	34 Dokumen	1 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	144.832.020,00	8 Dokumen	210.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	**1**	**1**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**1.550.000.000,00**	**1.700.000.000,00**	**1.700.000.000,00**	**100%**	**2.086.787.780,00**	
4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1200 Laporan	245 Laporan	240 Laporan	240 Laporan	240 Laporan	1.075.000.000,00	1.075.000.000,00	830.562.387,00	240 Laporan	1.550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	1	2.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1200 Laporan	245 Laporan	240 Laporan	240 Laporan	240 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	172.315.305,00	240 Laporan	200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

4	1	1	2.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1200 Laporan	242 Laporan	240 Laporan	240 Laporan	240 Laporan	275.000.000,00	425.000.000,00	321.847.240,00	240 Laporan	336.787.780,00	SEKRETARIAT DAERAH
		1			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase dibidang Bina Mental dan Spiritual,Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Terlaksana**	100%	100%	100%	100%	100%	**5.413.000.000,00**	**5.583.000.000,00**	**4.839.652.208,00**	100%	**3.050.000.000,00**	
4	**1**					**Persentase Kebijakan di Bidang Perundang-undangan,bantuan Hukum,Dokumentasi dan Informasi yang Terlaksana**	100%	100%	100%	100%	100%				100%		
						Persentase kebijakan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerja sama daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	**750.000.000,00**	**850.000.000,00**	**850.000.000,00**	100%		
4	**1**	**2**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Administrasi Pemerintahan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**750.000.000,00**	**850.000.000,00**	**850.000.000,00**	**100%**	**700.000.000,00**	
4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	29 Dokumen	3 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	98.186.122,00	12 Dokumen	150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	100 Dokumen	4 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	400.000.000,00	400.000.000,00	279.066.562,00	22 Dokumen	350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	100 Dokumen	5 Dokumen	140 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	200.000.000,00	300.000.000,00	197.550.890,00	17 Dokumen	200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

4	**1**	**2**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kesra**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**3.813.000.000,00**	**3.883.000.000,00**	**3.883.000.000,00**	**100%**	**1.500.000.000,00**	
4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	150 Dokumen	235 Dokumen	150 Dokumen	150 Dokumen	150 Dokumen	3.313.000.000,00	3.383.000.000,00	3.166.554.206,00	150 Dokumen	1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	2.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	28 Dokumen	216 Dokumen	200 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	47.694.362,00	12 Dokumen	60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	2.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	80 Dokumen	81 Dokumen	80 Dokumen	80 Dokumen	80 Dokumen	440.000.000,00	440.000.000,00	429.202.876,00	80 Dokumen	440.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

4	**1**	**2**	**2.03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Hukum**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**700.000.000,00**	**700.000.000,00**	**700.000.000,00**	**100%**	**700.000.000,00**	
4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	194 Dokumen	110 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	310.000.000,00	310.000.000,00	232.441.562,00	7 Dokumen	310.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	1 Kasus	1 Kasus	5 Kasus	5 Kasus	5 Kasus	210.000.000,00	210.000.000,00	159.154.480,00	5 Kasus	210.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	3500 Dokumen	732 Dokumen	777 Dokumen	777 Dokumen	777 Dokumen	180.000.000,00	180.000.000,00	131.206.706,00	777 Dokumen	180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	**1**	**2**	**2.04**		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kerja Sama**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**100%**	**150.000.000,00**	
4	1	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	30 Dokumen	60 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	98.594.442,00	10 Dokumen	150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		2			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase fasilitasi dan kebijakan di bidang Perekonomian dan SDA yang terlaksana**	100%	100%	100%	100%	100%	**2.302.796.816,00**	**2.307.000.000,00**	**1.968.057.140,00**	100%	**2.907.796.816,00**	
4	**1**					**Persentase Kebijakan dan fasilitasi bidang Pengadaan Barang dan Jasa yang terlaksana**	100%	100%	100%	100%	100%				100%		
						Persentase Kebijakan dan fasilitasi bidang pembangunan yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%				100%		
4	**1**	**3**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**387.000.000,00**	**387.000.000,00**	**387.000.000,00**	**100%**	**375.000.000,00**	

4	1	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	60 Dokumen	5 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	125.000.000,00	125.000.000,00	106.039.654,00	25 Dokumen	125.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	2.01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	15 Dokumen	5 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	262.000.000,00	262.000.000,00	191.153.082,00	3 Dokumen	250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		2	**2.01**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**600.000.000,00**	**595.000.000,00**	**595.000.000,00**	**100%**	**718.000.000,00**	
4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	40 Dokumen	8 Dokumen	7 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	275.000.000,00	275.000.000,00	246.138.586,00	12 Dokumen	275.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	2.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	60 Laporan	10 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	175.000.000,00	175.000.000,00	135.408.857,00	12 Laporan	175.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	2.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	60 Laporan	10 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	145.000.000,00	98.776.039,00	12 Laporan	267.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		2	**2.02**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pengelolaan Barang dan jasa**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**800.000.000,00**	**800.000.000,00**	**800.000.000,00**	**100%**	**1.274.000.000,00**	
4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	500 Dokumen	101 Dokumen	110 Dokumen	110 Dokumen	110 Dokumen	324.355.000,00	324.355.000,00	281.087.511,00	110 Dokumen	409.650.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	250 Dokumen	45 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	187.605.000,00	187.605.000,00	152.421.515,00	50 Dokumen	324.650.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

4	1	3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1800 Orang	465 Orang	400 Orang	400 Orang	400 Orang	288.040.000,00	288.040.000,00	252.787.295,00	400 Orang	539.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		2	**2.03**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Presentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang SDA**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**515.796.816,00**	**525.000.000,00**	**525.000.000,00**	**100%**	**540.796.816,00**	
4	1	3	2.04	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, ehutanan, Kelautan dan perikanan, perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Naker	60 Dokumen	5 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	440.796.816,00	450.000.000,00	450.000.000,00	12 Dokumen	440.796.816,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	1	3	2.04	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, LH, Kominfo, perhubungan, Statistik, Persandian	60 Dokumen	10 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	54.244.601,00	12 Dokumen	100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		Jumlah										**34.284.545.414,00**	**34.967.748.598,00**	**32.595.180.503,00**		**34.929.597.994,00**	

Pada review terhadap rancangan akhir RKPD Tahun 2025 Sekretariat Daerah terdapat kebijakan Pusat yang berdampak pada pengurangan pagu anggaran yaitu terkait dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yaitu memangkas beberapa belanja pendukung terutama belanja perjalanan dinas yang dilakukan efisiensi sebesar 50 % dan belanja barang jasa lainnya.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, pada Tahun 2025 Sekretariat daerah Kabupaten Pacitan menangani program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun yang langsung ditunjuk kepada PD Kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

Usulan masyarakat tersebut melibuti belanja hibah kepada organisasi masyarakat dan bantuan sosial kepada individu yang kesemuanya diakomodir dalam Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama.

Tabel 2.5
Daftar Usulan Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
Tahun 2025

No	Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan	Besaran Usulan	Keterangan
1	MAJELIS ULAMA INDONESIA (MU) KABUPATEN PACITAN [HIBAH] Alamat : Jl. S.Parman krajan Pucangsewu Pacitan	Rp. 25.000.000	
2	IKATAN PERSAUDARAAN HAJI KAB. PACITAN (IPHI) [HIBAH] Alamat : Lingkungan Barehan Kelurahan Ploso Pacitan	Rp. 25.000.000	
3	DPD MUHAMMADIYAH KABUPATEN PACITAN [HIBAH] Alamat : JL. HOS COKROAMINOTO NO.15 PACITAN	Rp. 25.000.000	
4	PC NAHDLATUL ULAMA (NU) KABUPATEN PACITAN [HIBAH] Alamat : JL. S.PARMAN 44 PACITAN	Rp. 25.000.000	
5	Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kab.Pacitan [HIBAH] Alamat : Jl Let.Jend.Suprapto gang 1 No 1 Tuban Sidoharjo	Rp. 25.000.000	
6	BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PACITAN [HIBAH] Alamat : Jl. Jaksa Agung Suprapto No.8 Pacitan	Rp. 150.000.000	
7	Panitia Pembangunan Masjid Besar AT-TAQWA Kecamatan Arjosari [HIBAH] Alamat : Km 1 Arjosari Pacitan	Rp. 100.000.000	
8	SMK MA"ARIF SUDIMORO Lingkungan Teknologi RT 03 RW 05 Dusun Tlogorejo, Desa Sudimoro Kec.Sudimoro [HIBAH] Alamat : Lingkungan Teknologi RT 03 RW 05 Dusun Tlogorejo, Desa Sudimoro Kec.Sudimoro Kab. Pacitan	Rp. 199.900.000	
9	Yayasan Teknologi Nahdlatul Ulama Sudimoro Lingkungan Teknologi RT 03 Rw 05 Dusun Tlogorejo, Desa Sudimoro, Kec.Sudimoro [HIBAH] Alamat : Lingkungan Teknologi RT 03 Rw 05 Dusun Tlogorejo, Desa Sudimoro, Kec.SudimoroKab. Pacitan	Rp. 200.000.000	
10	Pondok Pesantren Darul Huda RT 01 RW O2 DUSUN NGALURAN, Desa Glinggangan, Kec. Pringkuku, Kab. Pacitan [HIBAH] Alamat : RT 01 RW O2 DUSUN NGALURAN, Desa Glinggangan, Kec. Pringkuku, Kab. Pacitan	Rp. 84.000.000	
11	Pondok Pesantren Terpadu Al Hidayah Dusun Gemah, Desa Ketro Harjo, Kecamatan Tulakan Kab. Pacitan [HIBAH] Alamat : Dusun Gemah, Desa Ketro Harjo, Kecamatan Tulakan Kab. Pacitan	Rp. 25.000.000	
12	PONDOK PESANTREN TEKNOLOGI NU SUDIMORO Lingkungan Teknologi RT 03 RW 05 Dusun Tlogorejo, Desa Sudimoro Kec.Sudimoro [HIBAH] Alamat : Lingkungan Teknologi RT 03 RW 05 Dusun Tlogorejo, Desa Sudimoro Kec. Sudimoro Kab. Pacitan	Rp. 168.750.000	
13	KELOMPOK YASIN NGUDI ILMU RT.03 RW.06 DUSUN SEMPU DESA JATIGUNUNG KEC. TULAKAN [HIBAH] Alamat : RT.03 RW.06 DUSUN SEMPU DESA JATIGUNUNG KEC. TULAKAN	Rp. 25.000.000	
14	MASJID NURUL IMAN RT.01 RW.07 DUSUN SEMPU DESA JATIGUNUNG KEC. TULAKAN KAB. PACITAN [HIBAH] Alamat : RT.01 RW.07 DUSUN SEMPU DESA JATIGUNUNG KEC. TULAKAN KAB. PACITAN	Rp. 25.000.000	

15	MASJID DARUSALLAM RT.02 RW.06 DUSUN SEMPU DESA JATIGUNUNG KEC.TULAKAN [HIBAH] Alamat : RT.02 RW.06 DUSUN SEMPU DESA JATIGUNUNG KEC.TULAKAN	Rp. 25.000.000	
16	MASJID AT-TAUHID RT.03 RW.06 DUSUN SEMPU DESA JATIGUNUNG KEC. TULAKAN [HIBAH] Alamat : RT.03 RW.06 DUSUN SEMPU DESA JATIGUNUNG KEC. TULAKAN	Rp. 25.000.000	
17	MDT Wustho Al-Ma"arif Jl. Raya Sudimoro No. 08, Desa Sudimoro Kec. Sudimoro Kab. Pacitan [HIBAH] Alamat : Jl. Raya Sudimoro No. 08, Desa Sudimoro Kec. Sudimoro Kab. Pacitan	Rp. 82.800.000	
18	MASJID AN NUR RT 01 RW 09 DUSUN PLAPAR 2 DESA JATIGUNUNG DESA JATIGUNUNG KEC.TULAKAN [HIBAH] Alamat : RT 01 RW 09 DUSUN PLAPAR 2 DESA JATIGUNUNG DESA JATIGUNUNG KEC.TULAKAN	Rp. 25.000.000	
19	MADRASAH DINIYAH BAHRUL 'ULUM RT 02 RW 06 DUSUN SEMPU DESA JATIGUNUNG KEC.TULAKAN [HIBAH] Alamat : RT 02 RW 06 DUSUN SEMPU DESA JATIGUNUNG KEC.TULAKAN	Rp. 25.000.000	
20	MASJID BABUTTAUBAH RT 10 RW 05 Dusu Purwoasri, Desa Sembowo Kec. Sudimoro Kab. Pacitan [HIBAH] Alamat : RT 10 RW 05 Dusun Purwoasri ,Desa SEmbowo Kec. Sudimoro Kab. Pacitan	Rp. 26.000.000	
21	Masjid Darul Ulum RT 02 RW 9 Dusun Rejomulyo Desa Sudimoro Kec.Sudimoro [HIBAH] Alamat : RT 02 RW 9 Dusun Rejomulyo Desa Sudimoro Kec. Sudimoro	Rp. 20.000.000	
22	MASJID JAMI' SETROKETIPO RT 02 RW 06 DUSUN KRAJAN LOR DESA NANGGUNGAN KEC. PACITAN [HIBAH] Alamat : RT 02 RW 06 DUSUN KRAJAN LOR DESA NANGGUNGAN KEC. PACITAN	Rp. 25.000.000	
23	RA NU SUDIMORO Lingkungan Teknologi RT 03 RW 05 Dusun Tlogorejo Desa Sudimoro, Kec.Sudimoro Kab. Pacitan [HIBAH] Alamat : Lingkungan Teknologi RT 03 RW 05 Dusun Tlogorejo Desa Sudimoro, Kec.Sudimoro Kab. Pacitan	Rp. 99.550.000	
24	LEMBAGA PENDIDIKAN MA"ARIF NU KORTAN SUDIMORO RT 03 RW 05 Dusun Tlogorejo Desa Sudimoro, Kec.Sudimoro Kab. Pacitan [HIBAH] Alamat : RT 03 RW 05 Dusun Tlogorejo Desa Sudimoro, Kec.Sudimoro Kab. Pacitan	Rp. 112.000.000	
25	MASJID AT TAQWA RT 004 RW 004 DUSUN BENGKAL DESA TANJUNGSARI KEC.PACITAN [HIBAH] Alamat : RT 004 RW 004 DUSUN BENGKAL DESA TANJUNGSARI KEC.PACITAN	Rp. 24.000.000	
26	MASJID HAJAR FATIMAH RT 05 RW 08 DUSUN MEKARSARI DESA SUDIMORO, Kec.Sudimoro Kab. Pacitan [HIBAH] Alamat : RT 05 RW 08 DUSUN MEKARSARI DESA SUDIMORO, Kec.Sudimoro Kab. Pacitan	Rp. 25.000.000	
27	MUSHOLA AN NABAWI RT 05 RW 08 DUSUN MEKARSARI DESA SUDIMORO, Kec. Sudimoro Kab. Pacitan [HIBAH] Alamat : RT 05 RW 08 DUSUN MEKARSARI DESA SUDIMORO, Kec. Sudimoro Kab. Pacitan	Rp. 20.000.000	

28	MUSHOLA SABILLAL MUTAQIM RT 03 RW 11 Dusun Sepang Desa Tulakan Kec. Tulakan [HIBAH] Alamat : RT 03 RW 11 Dusun Sepang Desa Tulakan Kec. Tulakan	Rp. 15.000.000	
29	Masjid Nurul Huda RT 001 RW 004 Dusun Krajan Kidul Desa Nanggungan, Kec. Pacitan Kab. Pacitan [HIBAH] Alamat : RT 001 RW 004 Dusun Krajan Kidul Desa Nanggungan, Kec. Pacitan Kab. Pacitan	Rp. 25.000.000	
30	MUSOLA AL FATAH Lingkungan Mbangteklok Dusun Sidorejo Desa Sudimoro, Kec.Sudimoro Kab. Pacitan [HIBAH] Alamat : Lingkungan Mbangteklok Dusun Sidorejo Desa Sudimoro, Kec.Sudimoro Kab. Pacitan	Rp. 26.000.000	
31	Masjid AL-MUHAJIRIN [HIBAH] Alamat : RT. 005 RW. 001 Dusun Krajan Desa Widoro, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan, Kab. Pacitan	Rp. 30.000.000	
32	YAYASAN JANAIZ JANNAH Jl.Basuki Rahmat 39 Pacitan [HIBAH] Alamat : Jl. Basuki Rahmat No.39 Pacitan	Rp. 30.000.000	
		Rp. 1.763.000.000	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan belum melaksanakan telaahan Kebijakan Nasional yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah- Daerah RKPD (rancangan awal) maupun pengaruhnya terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang direncanakan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kinerja Sekretariat Daerah

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang menjadi hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik.

Tujuan yang akan dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan adalah **”Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel”**

Sedangkan sasaran yang akan dicapai secara nyata oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran yang akan dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dengan indikator kinerja :
   a. Score Nilai LPPD
   b. Score Nilai Indek Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

2. Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah Dengan indikator kinerja :
   a. Score Nilai SAKIP Perangkat Daerah
   b. Score Nilai IKM Perangkat Daerah

Matriks tujuan dan sasaran serta indikator maupun target yang Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Matriks Tujuan dan Sasaran
Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

TUJUAN										SASARAN									
TUJUAN		INDIKATOR		Target						URAIAN		INDIKATOR		TARGET					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Tata Kelola Pemerintah-an yang Efektif dan Akuntabel	1	Score Nilai SAKIP Daerah	72	75	77	79	82	84	1.1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	1.1.1	Score Nilai LPPD	(Sangat Baik) 2.650	(Sangat Baik) 2.7000	(Sangat Baik) 2.7500	3,2500	3,3000	3,3500
		2	Score Nilai IKM Daerah	83	83.5	84	84.5	85	85.5			1.1.2	Score Nilai Indeks Tata Kelola PBJ	(Baik) 45	(Baik) 50	(Baik) 55	66	70	75
										1.2	Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah	1.2.1	Score Nilai Sakip PD	(>B) 70	(>B) 72	(>B) 74	80	81	82
												1.2.2	Score Nilai IKM PD	83	83.5	84	84.5	85	85.5

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana, yang penjabarannya secara rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan, dapat bersifat jangka panjang dan menengah antara 3-5 tahun atau bersifat tahunan saja. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematik dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa organisasi ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pada rencana kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 ini mengikuti perubahan regulasi yang sangat frontal terkait dengan nomenklatur Program, Kegiatan dan Penambahan Sub Kegiatan sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beberapa program dan kegiatan yang mengalami perubahan pagu indikatif anggaran, hal ini disebabkan karena kebijakan serta pertimbangan agar program dan kegiatan dimaksud dapat berjalan dengan baik dan agar target yang ditetapkan dapat tercapai.

Tabel 3.2
SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
4	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
4	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4	**01**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4	**01**	**01**	**2.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
4	**01**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
4	**01**	**01**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**
4	**01**	**02**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**

4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
4	**01**	**02**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
4	**01**	**02**	**2.03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
4	**01**	**02**	**2.04**		**Fasilitasi Kerjasama Daerah**
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**
4	**01**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
4	**01**	**03**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
4	**01**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
4	**01**	**03**	**2.04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pacitan serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan antar Bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Semoga Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 ini dapat dijadikan pedoman bagi pengelola program dalam menyusun pelaksanaan kegiatan sehingga berhasil guna dan berdaya guna serta mencapai sasaran sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Tabel 4.1
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
SEKRETARIAT DAERAH
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA PENDANAAN TAHUN 2025

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan																
Kode					Uraian	Tahun N										Tahun + 1
						Sebelum					Sesudah					
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
Sekretariat Daerah																
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**34.260.686.189**	**707.062.409**			**34.967.748.598**	**32.666.534.811**	**918.645.692**			**33.585.180.503**	**34.929.597.994,00**
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**	**34.260.686.189**	**707.062.409**			**34.967.748.598**	**32.666.534.811**	**918.645.692**			**33.585.180.503**	**34.929.597.994,00**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**26.444.074.505**	**633.674.093**			**27.077.748.598**	**26.067.584.606**	**709.886.549**			**26.777.471.155**	**28.971.801.178,00**
4	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**192.300.000**				**192.300.000**	**170.494.604**				**170.494.604**	**85.000.000,00**
4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	192.300.000				192.300.000	170.494.604				170.494.604	85.000.000,00
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**13.166.567.253**				**13.166.567.253**	**12.453.172.269**				**12.453.172.269**	**13.205.622.253,00**
4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.047.929.278				12.047.929.278	11.346.292.466				11.346.292.466	12.156.984.278,00

4	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.118.637.975				1.118.637.975	1.106.879.803				1.106.879.803	1.048.637.975,00
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**145.000.000**				**145.000.000**	**110.809.808**				**110.809.808**	**145.000.000,00**
4	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	145.000.000				145.000.000	110.809.808				110.809.808	145.000.000,00
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.894.944.259**	**607.908.551**			**3.502.852.810**	**3.285.663.312**	**684.121.007**			**3.969.784.319**	**4.298.097.810,00**
4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	443.078.086	388.038.419			831.116.505	610.667.275	463.647.590			1.074.314.865	1.666.361.505,00
4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	227.134.516	219.870.132			447.004.648	231.684.435	220.473.417			452.157.852	447.004.648,00
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	738.160.000				738.160.000	1.119.937.470				1.119.937.470	588.160.000,00
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.486.571.657				1.486.571.657	1.323.374.132				1.323.374.132	1.596.571.657,00
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.146.584.978**				**1.146.584.978**	**1.097.112.908**				**1.097.112.908**	**1.465.849.778,00**
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.146.584.978				1.146.584.978	1.097.112.908				1.097.112.908	1.465.849.778,00
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.139.738.439**				**1.139.738.439**	**1.465.328.508**				**1.465.328.508**	**1.529.738.439,00**
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	722.256.000				722.256.000	988.650.093				988.650.093	612.256.000,00
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	151.204.733				151.204.733	185.955.986				185.955.986	651.204.733,00

4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	266.277.706				266.277.706	290.722.429				290.722.429	266.277.706,00
4	**01**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**2.033.374.050**				**2.033.374.050**	**2.103.575.625**				**2.103.575.625**	**2.033.374.050,00**
4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.433.374.050				1.433.374.050	1.503.575.625				1.503.575.625	1.433.374.050,00
4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000				600.000.000	600.000.000				600.000.000	600.000.000,00
4	**01**	**01**	**2.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**3.401.331.068**				**3.401.331.068**	**3.586.239.724**				**3.586.239.724**	**3.432.331.068,00**
4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2.219.400.000				2.219.400.000	2.348.630.030				2.348.630.030	2.300.400.000,00
4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.041.653.000				1.041.653.000	1.045.814.829				1.045.814.829	991.653.000,00
4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	140.278.068				140.278.068	191.794.865				191.794.865	140.278.068,00
4	**01**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**	**624.234.458**	**25.765.542**			**650.000.000**	**470.462.916**	**25.765.542**			**496.228.458**	**690.000.000,00**
4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	150.000.000				150.000.000	176.323.000				176.323.000	170.000.000,00
4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	274.234.458	25.765.542			300.000.000	149.307.896	25.765.542			175.073.438	310.000.000,00
4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	200.000.000				200.000.000	144.832.020				144.832.020	210.000.000,00

4	**01**	**01**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**1.700.000.000**				**1.700.000.000**	**1.324.724.932**				**1.324.724.932**	**2.086.787.780,00**
4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	1.075.000.000				1.075.000.000	830.562.387				830.562.387	1.550.000.000,00
4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	200.000.000				200.000.000	172.315.305				172.315.305	200.000.000,00
4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	425.000.000				425.000.000	321.847.240				321.847.240	336.787.780,00
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**5.538.689.466**	**44.310.534**			**5.583.000.000**	**4.795.341.674**	**44.310.534**			**4.839.652.208**	**3.050.000.000,00**
4	**01**	**02**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**	**850.000.000**				**850.000.000**	**574.803.574**	**0**			**574.803.574**	**700.000.000,00**
4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	150.000.000				150.000.000	98.186.122				98.186.122	150.000.000,00
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	400.000.000				400.000.000	279.066.562	0			279.066.562	350.000.000,00
4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	300.000.000				300.000.000	197.550.890				197.550.890	200.000.000,00
4	**01**	**02**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**3.853.773.700**	**29.226.300**			**3.883.000.000**	**3.614.225.144**	**29.226.300**			**3.643.451.444**	**1.500.000.000,00**
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3.353.773.700	29.226.300			3.383.000.000	3.137.327.906	29.226.300			3.166.554.206	1.000.000.000,00
4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan. Evaluasi. dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	60.000.000				60.000.000	47.694.362				47.694.362	60.000.000,00
4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan. Evaluasi. dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	440.000.000				440.000.000	429.202.876				429.202.876	440.000.000,00
4	**01**	**02**	**2.03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**684.915.766**	**15.084.234**			**700.000.000**	**507.718.514**	**15.084.234**			**522.802.748**	**700.000.000,00**

4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	310.000.000				310.000.000	232.441.562				232.441.562	310.000.000,00
4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	210.000.000				210.000.000	159.154.480				159.154.480	210.000.000,00
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	164.915.766	15.084.234			180.000.000	116.122.472	15.084.234			131.206.706	180.000.000,00
4	**01**	**02**	**2.04**		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**150.000.000**				**150.000.000**	**98.594.442**				**98.594.442**	**150.000.000,00**
4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	150.000.000				150.000.000	98.594.442				98.594.442	150.000.000,00
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**2.277.922.218**	**29.077.782**			**2.307.000.000**	**1.803.608.531**	**164.448.609**			**1.968.057.140**	**2.907.796.816,00**
4	**01**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**387.000.000**				**387.000.000**	**297.192.736**				**297.192.736**	**375.000.000,00**
4	01	03	2.01	0001	Koordinasi. Sinkronisasi. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	125.000.000				125.000.000	106.039.654				106.039.654	125.000.000,00
4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	262.000.000				262.000.000	191.153.082				191.153.082	250.000.000,00
4	**01**	**03**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**595.000.000**				**595.000.000**	**447.395.554**	**32.927.928**			**480.323.482**	**718.000.000,00**
4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	275.000.000				275.000.000	221.795.398	24.343.188			246.138.586	275.000.000,00
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	175.000.000				175.000.000	126.824.117	8.584.740			135.408.857	175.500.000,00
4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	145.000.000				145.000.000	98.776.039				98.776.039	267.500.000,00
4	**01**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**785.697.761**	**14.302.239**			**800.000.000**	**597.896.809**	**88.399.512**			**686.296.321**	**1.274.000.000,00**

4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	310.052.761	14.302.239			324.355.000	208.038.522	73.048.989			281.087.511	409.650.000,00
4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	187.605.000				187.605.000	152.421.515				152.421.515	324.650.000,00
4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	288.040.000				288.040.000	237.436.772	15.350.523			252.787.295	539.700.000,00
4	**01**	**03**	**2.04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**510.224.457**	**14.775.543**			**525.000.000**	**461.123.432**	**43.121.169**			**504.244.601**	**540.796.816,00**
4	01	03	2.04	0001	Koordinasi. Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian. Kehutanan. Kelautan. dan Perikanan	435.224.457	14.775.543			450.000.000	406.878.831	43.121.169			450.000.000	440.796.816,00
4	01	03	2.04	0002	Koordinasi. Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	75.000.000				75.000.000	54.244.601				54.244.601	100.000.000,00
Jumlah						**34.260.686.189**	**707.062.409**			**34.967.748.598**	**32.666.534.811**	**918.645.692**			**33.585.180.503**	**34.929.597.994,00**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pacitan serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan antar Bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Semoga Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 ini dapat dijadikan pedoman bagi pengelola program dalam menyusun pelaksanaan kegiatan sehingga berhasil guna dan berdaya guna serta mencapai sasaran sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Sekretariat DPRD
Kabupaten Pacitan

RENJA

RENCANA KERJA PERUBAHAN

TAHUN 2025

dprd.pacitankab.go.id
setwan@pacitankab.go.id
@pacitankabdprd
DPRD Pacitan

Jalan A. Yani No. 22 Pacitan

Sekretariat DPRD
Kabupaten Pacitan

RENJA

RENCANA KERJA PERUBAHAN

TAHUN 2025

dprd.pacitankab.go.id
setwan@pacitankab.go.id
@pacitankabdprd
DPRD Pacitan

Jalan A. Yani No. 22 Pacitan

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
SEKRETARIAT DPRD
Jalan A. Yani No. 22 Telp. (0357) 881018 Pacitan
PACITAN

SURAT KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 100.3.3/ 720 /408.25/2025
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN

Menimbang :

a. Bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan 2021-2026, perlu menyusun Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025;
b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 137 Permendagri Nomor 54 tahun 2010, Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 disahkan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan dalam bentuk Keputusan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2025 dalam bentuk Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587) sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan ke 2 Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2012;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 2007;
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
19. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan;
20. Surat Edaran Bupati Pacitan Nomor 000.7/499/408.53/2024 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025;
21. Surat Edaran Bupati Pacitan Nomor 900.1.1.2/626/408.55/2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengesahan ini digunakan sebagai dasar bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan dalam :

a. Menyusun program kegiatan kedalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan KUA-PPAS) Tahun 2025 dilingkup Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan;

b. Menyusun Perencanaan Program Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA P-SKPD) dilingkup Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Pacitan
Pada tanggal : 16 Juli 2025

SEKRETARIS DPRD
KABURATEN PACITAN

DIDIK ALIH WIBOWO, S.T., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19680325 199202 1 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulilah segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) ini merupakan salah satu bentuk penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026. Renja Perubahan ini disusun untuk lebih meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan agar lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai target yang sudah ditetapkan di tahun 2025.

Kepada semua pihak yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran demi tersusunnya Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025 ini, kami ucapkan terima kasih dan semoga Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) ini dapat bermanfaat bagi semua pihak serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Pacitan.

Pacitan, Juli 2025

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PACITAN

DIDIK ALIH WIBOWO, S.T., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19680325 199202 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **4**

1.1. Latar Belakang 4

1.2. Landasan Hukum 6

1.3. Maksud dan Tujuan 7

1.4. Sistematika Penulisan 8

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 ..... **9**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II 9

2.2. Analisis Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan 12

2.3. Tindak Lanjut Analisis Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan 12

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 12

2.5. Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD 2025 13

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **25**

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 25

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 25

3.3. Program dan Kegiatan 27

BAB IV PENUTUP **42**

4.1. Catatan Penting 42

4.2. Kaidah Pelaksanaan 43

4.3. Rencana Tindak Lanjut 43

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II 10
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan 12
Tabel 2.3 Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan 14
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan 27
Tabel 3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 29

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatanan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 dibuat dalam rangka penyusunan pelaporan kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksudkan pada :

1. Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Perubahan RKPD; dan
4. Hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II.

Penyusunan Rencana Kerja sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan

pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penjabaran dari Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tersebut telah diterbitkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) sebagai wujud akuntabilitas instansi pemerintah. Pedoman ini juga diharapkan dapat membantu penyusunan rencana strategis dan rencana kerja, serta pelaksanaan pengukuran kinerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SAKIP secara keseluruhan.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu memberikan layanan administrasi terhadap pelaksanaan tugas anggota DPRD yang meliputi pelayanan administrasi umum, persidangan dan perundang-undangan, serta keuangan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan yang meliputi Bagian Umum, Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan serta Bagian Keuangan akan diimplementasikan melalui berbagai program kegiatan yang direncanakan untuk periode tahunan, lima tahunan maupun jangka panjang. Rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 merupakan penjabaran dari rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan yang telah disusun dengan prinsip manfaat, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien yang terukur melalui indikator keberhasilan serta dapat dipertanggungjawabkan pada periode akhir tahun.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan, adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pebinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
h. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

k. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;

l. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;

m. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 157 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;

n. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan merealisasikan misi yang telah dirumuskan, perlu ditetapkan maksud dan tujuan untuk suatu periode sebagai ukuran keadaan yang ingin diwujudkan dalam skala periode terbatas. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten Pacitan secara keseluruhan.

a. Maksud dilaksanakan penyusunan Rencana Kerja Perubahan adalah untuk dapat merealisasikan kegiatan yang ditetapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan agar dalam pelaksanaannya dapat lebih terarah dan terukur. Rencana kerja perubahan ini merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama periode satu tahun yang diambil dari Rencana Stratergis yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan.

b. Tujuan

   Adapun tujuan yang ditetapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan adalah :

a. Rencana Kerja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan pada Tahun Anggaran 2025 dengan tetap memperhatikan RKPD.
b. Rencana Kerja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025 yang mengacu pada Renstra dan RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rencana kerja perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Pada bagian ini berisi evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan perkiraan capaian tahun berjalan atau tahun 2025 dengan mengacu APBD 2025 yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja PD sudah disahkan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini berisi telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian mengenai kaidah-kaidah pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan selama tahun 2025 dan perkiraan target tahun 2025.

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan *(input)*, keluaran *(output)*, hasil *(outcome)*, manfaat *(benefit)* dan dampak *(impact)*. Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dokumen dan indikator lainnya. Penetapan indikator ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Triwulan II Tahun 2025

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 realisasi keuangan seluruh kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan adalah Rp. 23.420.769.997,00 *(Dua Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah)* atau 51,50% dan capaian kinerja mencapai 42,27% Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan hingga triwulan II secara lengkap tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg Dievaluasi Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan			
														I		II	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
402	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	B>	26.072.863.917,00	73.00	31.086.913.083,00	73.10	30.986.561.809,00	0.00	7.228.788.556,00	75.20	14.442.331.029,00
402	1	2.01	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	24.00	232.666.597,00	26.00	237.551.100,00	25.00	240.564.556,00	4.00	23.513.000,00	6.00	64.792.867,00
402	1	2.02	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Dearah	Dokumen	59.00	2.787.903.241,00	59.00	3.549.909.328,00	59.00	3.502.610.921,00	10.00	738.045.605,00	23.00	1.538.167.865,00
402	1	2.05	1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian	Persentase	100.00	421.148.093,00	95.00	427.675.200,00	100.00	281.361.353,00	0.00	0,00	80.00	211.705.117,00
402	1	2.06	1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pperasional Dasar Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Persentase	100.00	740.497.666,00	96.00	996.244.460,00	100.00	896.777.708,00	10.00	286.006.250,00	34.00	351.676.250,00
402	1	2.07	1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan	Persentase	100.00	0,00	89.00	1.556.862.790,00	100.00	1.227.438.600,00	0.00	101.640.000,00	21.00	196.633.745,00
402	1	2.08	1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perangkat Daerah yang Dibutuhkan	Persentase	0.00	1.508.151.677,00	95.00	1.235.464.647,00	100.00	1.547.154.500,00	0.00	337.465.449,00	24.00	671.156.460,00
402	1	2.09	1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Persentase	100.00	743.920.943,00	85.00	1.005.686.250,00	100.00	1.057.340.195,00	0.00	185.133.000,00	24.00	336.613.000,00
402	1	2.15	1		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Pemenuhan Layanan Kesejahteraaan DPRD	Bulan/Orang	45.00	20.110.535.392,00	25.00	20.979.233.138,00	45.00	21.353.640.947,00	45.00	5.313.671.252,00	45.00	10.594.783.350,00
402	1	2.16	1		Layanan Administrasi DPRD	Fasilitasi Kegiatan DPRD	Bulan	12.00	468.049.153,00	12.00	1.098.286.170,00	12.00	879.673.029,00	2.00	243.314.000,00	6.00	476.802.375,00
402	2				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	% Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi	%	100.00	44.961.833.233,00	96.00	23.024.244.796,00	100.00	23.028.040.945,00	12.00	5.539.248.893,00	50.00	8.978.438.968,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg Dievaluasi Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan			
														I		II	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
402	2	2.01	1		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pembahasan Raperda yang Difasilitasi	Persentase	100.00	3.722.931.389,00	88.00	104.892.900,00	100.00	362.130.500,00	0.00	0,00	7.00	4.496.055,00
402	2	2.02	1		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Dokumen Anggaran yang Dibahas	Persentase	100.00	4.019.159.634,00	99.00	81.239.650,00	100.00	108.293.300,00	0.00	0,00	10.00	17.367.745,00
402	2	2.03	1		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah	Persentase	100.00	5.176.828.553,00	90.00	1.805.373.700,00	100.00	2.354.317.100,00	12.00	31.686.958,00	30.00	600.862.409,00
402	2	2.04	1		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD yang Difasilitasi	Persentase	100.00	4.588.050.700,00	87.00	2.995.732.070,00	100.00	2.696.561.113,00	0.00	609.989.000,00	24.00	1.082.953.674,00
402	2	2.05	1		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang Difasilitasi	Persentase	100.00	4.189.431.940,00	97.00	2.927.802.650,00	100.00	3.842.302.300,00	10.00	1.407.957.960,00	26.00	1.453.392.015,00
402	2	2.06	1		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang Difasilitasi	Persentase	100.00	646.146.161,00	90.00	80.692.900,00	100.00	33.977.100,00	0.00	0,00	50.00	0,00
402	2	2.08	1		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase	100.00	22.240.433.600,00	96.00	15.028.510.926,00	100.00	13.630.459.532,00	0.00	3.489.614.975,00	65.00	5.819.367.070,00

Sumber : Data Simolek Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan

2.2. Analisis Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan

No	Indikator	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Perkiraan Pencapaian Realisasi Capaian	Catatan Analisa
		2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024		
1	Hasil Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	>B	>B	>B	>B	>B	74,00	74,75	73,00	73,10	
2	% Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,00	99,00	96,00	100,00	

Sumber : Data Simolek Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan

Sampai dengan tahun 2025 kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan sesuai tabel diatas ada 1 (satu) indikator program yang tidak tercapai pada program Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dikarenakan masih terdapat tugas dan fungsi DPRD yang belum terfasilitasi secara optimal.

2.3. Tindak Lanjut Analisis Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan

Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan mengupayakan agar target program yang telah ditetapkan dapat tercapai di laporan kinerja periode berikutnya, melalui penguatan kegiatan antara lain :

1. Evaluasi kinerja secara berkala;
2. Melakukan rapat internal secara berkala untuk menentukan strategi pencapaian target kinerja internal dalam memenuhi fasilitasi tugas dan fungsi DPRD yang paling tepat.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat secara teknis yang terkait dengan fungsi pelayanan di Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan hampir tidak ada. Namun Usulan dari masyarakat biasanya berupa masukan pada saat Kegiatan Reses yang dilaksanakan oleh Pimpinan & Anggota DPRD yang dilaksanakan di setiap tahunnya. Kemudian Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan akan merangkum usulan-usulan tersebut untuk kemudian akan

dibacakan oleh Pimpinan & Anggota DPRD pada saat Paripurna Hasil Reses dan setelah itu usulan yang telah diubah menjadi Pokok Pikiran DPRD akan disampaikan kepada Bappelitbang Kabupaten Pacitan. Sehingga didalam dokumen perencanaannya di Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan tidak dapat mencantumkan usulan program dan kegiatan yang berasal langsung dari masyarakat.

2.5. Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD 2025

Rencana kerja perubahan tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rancangan Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) tahun 2025 dan evaluasi hasil pelaksanaan renja sampai dengan triwulan II dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat Daerah.

Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan telah melakukan reviu dan analisa kebutuhan terhadap dokumen rancangan perubahan tahun 2025 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2025 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap rancangan perubahan tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025
Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Hasil Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah**	**73.10**	**30.448.162.784,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Hasil Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah**	**73.10**	**30.448.162.784,00**	
i	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah**	**25.00**	**240.564.556,00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah**	**25.00**	**240.564.556,00**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.00	112.214.326,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.00	112.214.326,00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1.00	18.001.600,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1.00	18.001.600,00	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	16.432.364,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00	16.432.364,00	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1.00	28.523.500,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1.00	28.523.500,00	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	14.683.875,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00	14.683.875,00	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.00	34.774.579,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.00	34.774.579,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	7.00	24.918.312,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	7.00	24.918.312,00	
ii	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Dearah**	**59.00**	**3.502.610.921,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Dearah**	**59.00**	**3.502.610.921,00**	
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pacitan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28.00	2.957.375.761,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pacitan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28.00	2.957.375.761,00	
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.00	59.991.631,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.00	59.991.631,00	
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8.00	32.542.833,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8.00	32.542.833,00	
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.00	9.759.861,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.00	9.759.861,00	
12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1.00	13.853.739,00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1.00	13.853.739,00	
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12.00	61.691.254,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12.00	61.691.254,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
iii	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian**	**100.00**	**281.361.353,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian**	**100.00**	**281.361.353,00**	
14	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2.00	63.305.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2.00	63.305.000,00	
15	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pacitan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	29.00	156.136.353,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pacitan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	29.00	156.136.353,00	
iv	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Pperasional Dasar Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**100.00**	**896.777.708,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Pperasional Dasar Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**100.00**	**896.777.708,00**	
16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14.00	57.955.200,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14.00	57.955.200,00	
17	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4.00	52.114.108,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4.00	52.114.108,00	
18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4.00	159.472.100,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4.00	159.472.100,00	
19	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7.00	315.668.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7.00	315.668.000,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
20	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.00	219.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.00	219.000.000,00	
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.00	121.565.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.00	121.565.000,00	
v	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan**	**100.00**	**1.227.438.600,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan**	**100.00**	**1.227.438.600,00**	
22	Pengadaan Mebel	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40.00	86.642.600,00	Pengadaan Mebel	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40.00	86.642.600,00	
23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	32.00	389.711.500,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	32.00	389.711.500,00	
24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8.00	374.325.300,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8.00	374.325.300,00	
25	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pacitan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	7.00	442.013.100,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pacitan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	7.00	442.013.100,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
vi	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perangkat Daerah yang Dibutuhkan**	**100.00**	**1.547.154.500,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perangkat Daerah yang Dibutuhkan**	**100.00**	**1.547.154.500,00**	
26	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.00	12.600.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.00	12.600.000,00	
27	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00	386.278.500,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00	386.278.500,00	
28	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00	1.102.776.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00	1.102.776.000,00	
vii	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik**	**100.00**	**1.057.340.195,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik**	**100.00**	**1.057.340.195,00**	
29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pacitan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5.00	522.037.600,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pacitan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5.00	522.037.600,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pacitan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35.00	184.900.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pacitan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35.00	184.900.000,00	
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3.00	199.665.170,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3.00	199.665.170,00	
32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	220.00	152.381.800,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	220.00	152.381.800,00	
viii	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**		**Pemenuhan Layanan Kesejahteraaan DPRD**	**45.00**	**21.353.640.947,00**	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**		**Pemenuhan Layanan Kesejahteraaan DPRD**	**45.00**	**21.353.640.947,00**	
33	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kab. Pacitan	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45.00	20.538.440.789,00	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kab. Pacitan	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45.00	20.538.440.789,00	
34	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6.00	454.850.000,00	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6.00	454.850.000,00	
35	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kab. Pacitan	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45.00	54.300.000,00	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kab. Pacitan	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45.00	54.300.000,00	
ix	**Layanan Administrasi DPRD**		**Fasilitasi Kegiatan DPRD**	**12.00**	**879.673.029,00**	**Layanan Administrasi DPRD**		**Fasilitasi Kegiatan DPRD**	**12.00**	**879.673.029,00**	
36	Fasilitasi Fraksi DPRD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12.00	14.503.029,00	Fasilitasi Fraksi DPRD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12.00	14.503.029,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
37	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	11.00	1.002.758.000,00	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	11.00	1.002.758.000,00	
II	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**		**% Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi**	**100.00**	**16.239.126.328,00**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**		**% Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi**	**100.00**	**16.239.126.328,00**	
x	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**		**Persentase Pembahasan Raperda yang Difasilitasi**	**100.00**	**362.130.500,00**	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**		**Persentase Pembahasan Raperda yang Difasilitasi**	**100.00**	**362.130.500,00**	
38	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	4.00	10.465.900,00	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	4.00	10.465.900,00	
39	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2.00	40.326.400,00	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2.00	40.326.400,00	
40	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	4.00	115.512.900,00	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	4.00	115.512.900,00	
41	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1.00	20.275.300,00	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1.00	20.275.300,00	
xi	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**		**Persentase Dokumen Anggaran yang Dibahas**	**100.00**	**108.293.300,00**	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**		**Persentase Dokumen Anggaran yang Dibahas**	**100.00**	**108.293.300,00**	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
42	Pembahasan KUA dan PPAS	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1.00	36.679.500,00	Pembahasan KUA dan PPAS	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1.00	36.679.500,00	
43	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1.00	13.574.700,00	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1.00	13.574.700,00	
44	Pembahasan APBD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1.00	11.057.500,00	Pembahasan APBD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1.00	11.057.500,00	
45	Pembahasan APBD Perubahan	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1.00	13.618.600,00	Pembahasan APBD Perubahan	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1.00	13.618.600,00	
46	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1.00	23.763.000,00	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1.00	23.763.000,00	
xii	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**		**Persentase Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah**	**100.00**	**2.354.317.100,00**	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**		**Persentase Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah**	**100.00**	**2.354.317.100,00**	
47	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	11.00	194.949.400,00	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	11.00	194.949.400,00	
48	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	11.00	248.093.400,00	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	11.00	248.093.400,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
49	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	11.00	202.964.400,00	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	11.00	202.964.400,00	
50	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	11.00	194.321.400,00	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	11.00	194.321.400,00	
51	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1.00	12.149.100,00	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1.00	12.149.100,00	
52	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1.00	23.973.400,00	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1.00	23.973.400,00	
xiii	**Peningkatan Kapasitas DPRD**		**Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD yang Difasilitasi**	**100.00**	**2.696.561.113,00**	**Peningkatan Kapasitas DPRD**		**Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD yang Difasilitasi**	**100.00**	**2.696.561.113,00**	
53	Pendalaman Tugas DPRD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2.00	1.432.251.813,00	Pendalaman Tugas DPRD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2.00	1.432.251.813,00	
54	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab. Pacitan	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	128.00	150.000.000,00	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab. Pacitan	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	128.00	150.000.000,00	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
55	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Pacitan	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5.00	150.000.000,00	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Pacitan	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5.00	150.000.000,00	
56	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	20.00	541.800.000,00	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	20.00	541.800.000,00	
57	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	11.00	531.097.300,00	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	11.00	531.097.300,00	
xiv	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**		**Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang Difasilitasi**	**100.00**	**3.842.302.300,00**	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**		**Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang Difasilitasi**	**100.00**	**3.842.302.300,00**	
58	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	0.00	8.947.900,00	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	0.00	8.947.900,00	
59	Pelaksanaan Reses	Kab. Pacitan	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2.00	4.883.754.400,00	Pelaksanaan Reses	Kab. Pacitan	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2.00	4.883.754.400,00	
xv	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**		**Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang Difasilitasi**	**100.00**	**33.977.100,00**	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**		**Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang Difasilitasi**	**100.00**	**33.977.100,00**	
60	Penyusunan Kode Etik DPRD	Kab. Pacitan	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1.00	6.875.100,00	Penyusunan Kode Etik DPRD	Kab. Pacitan	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1.00	6.875.100,00	
61	Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1.00	15.582.000,00	Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1.00	15.582.000,00	
xvi	**Fasilitasi Tugas DPRD**		**Persentase Fasilitasi Tugas DPRD**	**100.00**	**13.630.459.532,00**	**Fasilitasi Tugas DPRD**		**Persentase Fasilitasi Tugas DPRD**	**100.00**	**13.630.459.532,00**	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
62	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi 0Pelaksanaan Tugas DPRD	10.00	6.707.443.425,00	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi 0Pelaksanaan Tugas DPRD	10.00	6.707.443.425,00	
63	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1.00	8.363.900,00	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1.00	8.363.900,00	
64	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12.00	7.991.590,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12.00	7.991.590,00	
65	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	10.00	633.294.000,00	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	10.00	633.294.000,00	
JUMLAH					**46.687.289.112,00**	**JUMLAH**				**46.687.289.112,00**	

Sumber : Data SIPD RI Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas ganda yaitu selain melaksanakan perintah dari Pemerintah Daerah secara operasional juga memfasiltasi Tugas dan Fungsi DPRD. Telaahan terhadap kebijakan nasional untuk rencana tahun 2025 mengacu pada RPJMN tahun 2021-2026, RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2021-2026, dokumen RPJMD Kabupaten Pacitan tahun 2021-2026.

Menelaah Kebijakan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan kebijakan Kabupaten Pacitan yang bersumber dari RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMD Kabupaten Pacitan di atas dapat dilihat bahwa kebijakan Pemerintah Kabupaten Pacitan di bidang pelayanan umum telah selaras dan sinkron dengan kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Timur atau dengan kata lain bahwa fungsi layanan di Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan telah mendukung kebijakan Nasional dan Provinsi di bidang pelayanan umum.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perencanaan strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan merupakan perencanaan yang bersifat jangka menengah yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) perangkat daerah. Renstra itu sendiri merupakan turunan dari induk perencanaan jangka menengah daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan Rencana Strategis sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pacitan sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Sekretariat DPRD sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026.

Visi Kabupaten Pacitan:

" MASYARAKAT PACITAN SEJAHTERA DAN BAHAGIA "

Misi Kabupaten Pacitan:

Sesuai dengan visi "Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia", maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Pacitan 2021 - 2026 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup.

Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak Pada Nilai-Nilai Agama dan Budaya Bangsa.

Misi 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, serta Sektor Unggulan Lainnya.

Misi 4 : Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional, dan Melayani.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan, hal ini ditunjukkan melalui:

- Pernyataan misi ke 4: **Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional, dan Melayani.**

Pada misi keempat ini Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan berperan dalam memberikan layanan administrasi terhadap pelaksanaan tugas anggota DPRD.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada layanan administrasi terhadap pelaksanaan tugas anggota DPRD di Kabupaten Pacitan.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan Tahun 2021–2026 adalah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif, Profesional Dan Responsif.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang yaitu:

a. Meningkatnya Pelayanan Perangkat Daerah;
b. Meningkatnya Ketepatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD; dan
c. Meningkatnya Pelayanan Fasilitasi Pengembangan DPRD.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tahun ke-					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif, Profesional Dan Responsif	Indeks Reformasi Birokrasi	79.81	80.21	80.61	81.01	81.41	81.81

Sumber : Data Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun ke-					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fasilitasi Pembahasan Raperda	Prosentase Raperda yang di tetapkan	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : Data Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dengan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan seperti yang tertuang dalam Renstra 2021-2026, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 dimaksud disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja
Sekretariat DPRD Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Sekretariat DPRD							51.929.002.754,00	54.014.602.754,00	46.687.289.112,00							52.028.206.220,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							51.929.002.754,00	54.014.602.754,00	46.687.289.112,00							52.028.206.220,00	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD							51.929.002.754,00	54.014.602.754,00	46.687.289.112,00							52.028.206.220,00	
1	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah Nilai SAKIP perangkat daerah				81,41 >B Nilai Nilai	81,41 >B Nilai Nilai	30.762.924.388,00	30.986.561.809,00	30.448.162.784,00							30.750.329.166,00	
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	-			24 Dokumen	24 Dokumen	197.995.356,00	240.564.556,00	240.564.556,00			-	-	-		200.038.890,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	9 Dokumen	49.301.726,00	96.201.726,00	112.214.326,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			50.077.115,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	18.001.600,00	18.001.600,00	18.001.600,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			18.018.265,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	16.432.364,00	16.432.364,00	16.432.364,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			16.649.530,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	23.123.500,00	23.123.500,00	28.523.500,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			23.123.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12.414.675,00	14.683.875,00	14.683.875,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			13.047.920,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	44.109.579,00	37.509.579,00	34.774.579,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			43.814.495,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	7 Laporan	34.611.912,00	34.611.912,00	24.918.312,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			35.308.565,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	3.544.360.921,00	3.502.610.921,00	3.502.610.921,00			-	-	-		3.644.240.114,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	29 Orang/bulan	3.381.005.403,00	3.348.605.403,00	2.957.375.761,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			3.480.209.649,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	35.785.231,00	37.785.231,00	59.991.631,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			35.798.230,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				8 Dokumen	9 Dokumen	35.592.833,00	41.062.833,00	32.542.833,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			35.725.920,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	12 Laporan	9.759.861,00	9.759.861,00	9.759.861,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			9.796.275,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	13.853.739,00	13.853.739,00	13.853.739,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			14.020.415,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	68.363.854,00	51.543.854,00	61.691.254,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			68.689.625,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	173.350.853,00	281.361.353,00	281.361.353,00			-	-	-		174.699.910,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	47.414.500,00	63.305.000,00	63.305.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			48.595.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	29 Orang	125.936.353,00	218.056.353,00	156.136.353,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			126.104.910,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	855.182.408,00	896.777.708,00	896.777.708,00			-	-	-		807.404.330,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	14 Paket	40.120.200,00	49.835.500,00	57.955.200,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			40.157.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	43.434.108,00	52.114.108,00	52.114.108,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			43.539.330,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	110.897.100,00	110.897.100,00	159.472.100,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			110.912.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	7 Paket	298.668.000,00	315.668.000,00	315.668.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			298.683.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	10 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	219.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			102.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	10 Laporan	212.063.000,00	218.263.000,00	121.565.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			212.113.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	1.021.090.900,00	1.227.438.600,00	1.227.438.600,00			-	-	-		1.079.211.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	7 Unit	173.285.200,00	303.249.100,00	86.642.600,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			186.930.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				58 Unit	40 Unit	354.370.200,00	202.172.500,00	389.711.500,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			354.511.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				22 Unit	32 Unit	182.192.400,00	289.695.100,00	374.325.300,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			183.364.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	311.243.100,00	432.321.900,00	442.013.100,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			354.405.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	1.420.254.500,00	1.547.154.500,00	1.547.154.500,00			-	-	-		1.432.769.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			12.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	282.578.500,00	386.278.500,00	386.278.500,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			282.578.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.125.076.000,00	1.148.276.000,00	1.102.776.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.137.590.800,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	1.053.298.895,00	1.057.340.195,00	1.057.340.195,00			-	-	-		1.064.229.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	494.037.600,00	494.037.600,00	522.037.600,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			494.061.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				35 Unit	35 Unit	184.900.000,00	184.900.000,00	184.900.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			184.900.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	3 Unit	184.479.495,00	188.520.795,00	199.665.170,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			184.528.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				36 Unit	220 Unit	189.881.800,00	189.881.800,00	152.381.800,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.740.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Pemenuhan layanan kesejahteraan DPRD	-			45 Orang	45 Orang	21.686.717.526,00	21.353.640.947,00	21.353.640.947,00			-	-	-		21.536.752.632,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																	
							Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				45 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	21.220.869.526,00	20.819.832.447,00	20.538.440.789,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			21.152.024.632,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				2 Paket	6 Paket	411.548.000,00	479.508.500,00	454.850.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			330.428.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				45 Orang	45 Orang	54.300.000,00	54.300.000,00	54.300.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			54.300.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	-	-			-	-	810.673.029,00	879.673.029,00	879.673.029,00			-	-	-		810.983.990,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				12 Laporan	12 Laporan	14.503.029,00	14.503.029,00	14.503.029,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			14.813.990,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				12 Laporan	12 Laporan	796.170.000,00	865.170.000,00	1.002.758.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			796.170.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	21.166.078.366,00	23.028.040.945,00	16.239.126.328,00							21.277.877.054,00	
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-			-	-	413.510.500,00	362.130.500,00	362.130.500,00			-	-	-		413.511.355,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				8 Dokumen	4 Dokumen	9.845.900,00	10.465.900,00	10.465.900,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			9.846.220,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				8 Dokumen	2 Dokumen	223.876.400,00	165.876.400,00	40.326.400,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			223.876.425,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																	
							Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				4 Dokumen	4 Dokumen	59.512.900,00	65.512.900,00	115.512.900,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			59.513.290,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				4 Dokumen	1 Dokumen	120.275.300,00	120.275.300,00	20.275.300,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			120.275.420,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-			-	-	95.093.300,00	108.293.300,00	108.293.300,00			-	-	-		95.094.820,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	24.179.500,00	36.679.500,00	36.679.500,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			24.179.885,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	13.574.700,00	13.574.700,00	13.574.700,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			13.574.855,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	11.057.500,00	11.057.500,00	11.057.500,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.057.725,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	13.618.600,00	13.618.600,00	13.618.600,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			13.618.850,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	32.663.000,00	33.363.000,00	23.763.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			32.663.505,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-			-	-	2.377.015.700,00	2.354.317.100,00	2.354.317.100,00			-	-	-		2.377.016.450,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				12 Laporan	12 Laporan	547.529.400,00	537.263.400,00	194.949.400,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			547.529.415,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				1 Laporan	12 Laporan	651.045.400,00	683.567.400,00	248.093.400,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			651.045.415,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																	
							Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				12 Laporan	12 Laporan	587.088.400,00	555.608.400,00	202.964.400,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			587.088.415,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				12 Laporan	12 Laporan	547.529.400,00	532.155.400,00	194.321.400,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			547.529.415,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.949.700,00	12.149.100,00	12.149.100,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.950.150,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																	
							Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	32.873.400,00	33.573.400,00	23.973.400,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			32.873.640,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-			-	-	2.377.707.513,00	2.696.561.113,00	2.696.561.113,00			-	-	-		2.377.886.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				3 Dokumen	2 Dokumen	1.481.031.813,00	1.481.031.813,00	1.432.251.813,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.481.210.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																	
							Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				9 Orang	128 Orang	170.000.000,00	228.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			170.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																	
							Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				6 Orang	5 Orang	180.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			180.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				2 Dokumen	20 Dokumen	104.000.000,00	340.000.000,00	541.800.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			104.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																	
							Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	442.675.700,00	497.529.300,00	531.097.300,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			442.675.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-			-	-	3.904.702.300,00	3.842.302.300,00	3.842.302.300,00			-	-	-		4.018.287.535,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				2 Laporan	0 Laporan	403.147.900,00	412.747.900,00	8.947.900,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			404.111.515,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses																	
							Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	2 Dokumen	3.501.554.400,00	3.429.554.400,00	4.883.754.400,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.614.176.020,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Prosentase pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-			-	100 %	10.937.100,00	33.977.100,00	33.977.100,00			-	-	-		10.895.205,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD																	
							Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.875.100,00	6.875.100,00	6.875.100,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.832.880,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				1 Laporan	1 Laporan	4.062.000,00	27.102.000,00	15.582.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.062.325,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	-	-			-	-	11.987.111.953,00	13.630.459.532,00	13.630.459.532,00			-	-	-		11.985.185.389,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	11.059.667.163,00	12.557.566.042,00	6.707.443.425,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.058.677.174,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD																	
							Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	8.363.900,00	8.363.900,00	8.363.900,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			7.426.845,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				12 Dokumen	12 Dokumen	7.991.590,00	7.991.590,00	7.991.590,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			7.991.590,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																	
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	911.089.300,00	1.056.538.000,00	633.294.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-			911.089.780,00	SEKRETARIAT DPRD
												J U M L A H	**51.929.002.754,00**	**54.014.602.754,00**	**46.687.289.112,00**							**52.028.206.220,00**	

Sumber : Data SIPD RI Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Paciten Tahun Anggaran 2025 merupakan terjemahan dan operasionalisasi sebagaimana yang tercantum dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah yang berkontribusi untuk pencapaian tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja dibuat terkait dengan Visi dan Nisi Organisasi untuk memenuhi target kinerja dari program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Paciten selama Tahun Anggaran 2025, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun organisasi. Di samping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreativitas aparatur dalam pelaksanaan disiplin dan loyalitas yang tinggi demi mengemban Visi dan Misi Organisasi untuk menuju Aparatur Pemerintah yang profesional, bersih dan berwibawa sebagai pelayan masyarakat yang terbaik. Dari uraian-uraian yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa hal sebagai berikut:

4.1. Catatan Penting

Rencana Kerja Perubahan merupakan salah satu dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi pencapaian tujuan yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan. Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 merupakan arah dan pedoman umum bagi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

4.2. Kaidah Pelaksanaan

1. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 ini mengacu pada RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
2. Seluruh perangkat daerah berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 sesuai ketentuan yang berlaku dan wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.
3. Dokumen Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 menjadi pedoman untuk menyusun Rancangan APBD Perubahan yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Perubahan Tahun 2025.
4. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah yang memberikan kewenangan, baik dari aspek administrasi keuangan, administrasi pelaksanaan kegiatan, maupun dari segi manfaat.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan ini, diharapkan seluruh Aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan dapat menjabarkan lebih lanjut segala kebijaksanaan dan program-program yang telah ditetapkan melalui kegiatan lanjutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
2. Sebagai dokumen perencanaan, Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan ini dalam pelaksanaannya membutuhkan upaya dan langkah-langkah secara terkoordinasi dari seluruh perangkat Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan dan berbagai pihak terkait agar dapat berjalan sesuai dengan harapan yang dicita-citakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
3. Rencana kerja Perubahan ini diharapkan dapat benar-benar dipedomani sebagai arah pelaksanaan pembangunan di Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan.

4. Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 ini akan dapat terwujud jika seluruh Aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan berkomitmen, berperan serta mendukung terlaksananya kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi petunjuk kepada kita semua dan memberi kekuatan dan kemampuan untuk dapat pmenjalankan semua kebijakan dan program serta memberi ridlo atas terwujudnya Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan Tahun 2025.

Pacitan, Juli 2025

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PACITAN

DIDIK ALIH WIBOWO, S.T., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19680325 199202 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
INSPEKTORAT DAERAH

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Jalan A. Yani Nomor 56 A Pacitan

inspektoratpacitan2@gmail.com

(0357) 881164 Fax. 884879

DAFTAR ISI

Daftar isi	Halaman
DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1 Latar Belakang	3
2 Landasan Hukum	4
3 Maksud & Tujuan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah dan Capaian Renstra	7
Tabel 2.1	15
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah	19
Tabel 2.2	20
2.3 Rencana Strategis Inspektorat Daerah	22
Tabel 2.3	22
2.4 Laporan Realisasi dan Capaian Kinerja Semester I	22
2.5 Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah	25
Tabel 2.5	30
2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	36
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGAM DAN KEGIATAN	38
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	38
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah	38
3.3 Progam dan Kegiatan	39
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PACITAN	40
BAB V PENUTUP	41

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan Rahmat-NYA, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025 yang memuat Rencana Kerja, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan Sistem Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025 ini yang akan menjadi pedoman bagi seluruh APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan tugasnya dibidang pembinaan dan pengawasan sampai dengan akhir tahun 2025.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan Renja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan yang konduktif dari semua pihak.

Semoga Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025 ini dapat bermanfaat.

Pacitan, Agustus 2025

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATENPACITAN

MAHMUD,S.Pd.,M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196612261989011002

BAB I
PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pada pada pasal 21 ayat (3) disampaikan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perubahan tahun 2025, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD tahun 2025. Sedangkan RKPD tahun 2025 dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan. Dalam rangka penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, diawali dengan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari perangkat daerah. Proses perencanaan tahunan perangkat daerah diawali dengan menyusun rancangan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta mempertimbangkan kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah / lembaga lainnya. Hal ini dimaksudkan agar sasaran dan tujuan serta alokasi anggaran / kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah dapat bersinergi dalam pencapaiannya.

Sebagaimana Peraturan Bupati Pacitan Nomor 191 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 132 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Daerah Daerah Kabupaten Pacitan, Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah dan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 adalah :

1) Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2) Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah ;

13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomen klatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah;
16) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pacitan;
17) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan ;
18) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 170 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026;
19) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 132 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan maksud penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025 antara lain adalah :

1) Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026.
2) Mengoptimalkan tugas dan fungsi serta peranan Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan selaku perangkat daerah yang melaksanakan

pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1) Sebagai pedoman seluruh APIP dalam menentukan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2025.
2) Sebagai tolok ukur untuk mengukur kinerjadan mengevaluasi kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah

Sebagaimana diketahui pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

Evaluasi kinerja dimulai dengan perhitungan pengukuran kinerja untuk kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024, evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian visi dan misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi denan cara membandingkan antara output dengan input untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh unit organisasi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya

Berikut disampaikan pengukuran capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 sesuai dengan program dan kegiatan baik yang telah dicapai sesuai target, tidak memenuhi target maupun yang melebihi target yang telah ditetapkan :

2.1.1 NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.

Penilaian dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Kinerja; dan Capaian Kinerja.

Capaian kinerja program penunjang dengan indikator nilai SAKIP tahun 2024 adalah 80,35 dengan kategori A dari target yang di rencanakan 83,35 atau 96 %. Pada Indikator program penunjang tidak 100 % tercapai karena beberapa hal diantarnya **:**

1) Kurangnya komitmen dalam mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja sehingga akuntabilitas kinerja belum mendapat perhatian yang besar, pada semua elemen SKPD;
2) Adanya beberapa peraturan perundang-undangan di bidang akuntabilitas kinerja yang kurang selaras;
3) Belum adanya penetapan sanksi yang tegas bagi instansi pemerintah yang tidak menerapkan akuntabilitas kinerja;
4) Masih belum tersosialisasikannya ke seluruh karyawan tentang kebijakan di bidang akuntabilitas;
5) Adanya keterbatasan kapabilitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintah daerah serta;
6) Masih belum terintegrasinya Sistem AKIP dengan sistem perencanaan daerah dan sistem penganggaran.

Untuk strategi ke depan dilaksanakan melalui:

1) Menyusun dan mendorong penyusunan Peraturan perundang-undangan mengenai akuntabilitas Kinerja;
2) Sosialisasi sekaligus bimbingan teknis terhadap penerapan Sistem AKIP kepada seluruh karyawan APIP inspektorat daerah yang dilaksanakan

secara terus menerus dan berkelanjutan untuk lebih meningkatkan kualitas dan memperkuat implementasi Sistem AKIP;

3) Melaksanakan evaluasi LAKIP dengan tujuan menilai kualitas implementasi Sistem AKIP dan menilai kinerja instansi pemerintah serta mendorong perbaikan kualitas implementasi sistem AKIP;

Pencapaian Nilai Sakip didukung dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten,yang sejalan dengan KUA PPAS dengan output yang dihasilkan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Output :

   a. Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 9 dokumen
   b. Jumlah laporan kinerja perangkat daerah 14 dokumen

   Realisasi:

   a. Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 9 dokumen
   b. Jumlah laporan kinerja perangkat daerah 14 dokumen

   Capaian kinerja 100 %

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Output :

   a. Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah 20 dokumen
   b. Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 14 Dokumen
   c. Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah 25 dokumen

   Realisasi

   a. Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah 20 dokumen
   b. Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 14 Dokumen
   c. Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah 25 dokumen

   Capaian kinerja 100 %

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

   Output

   Jumlah dokumen laporan barang milik daerah sesuai ketentuan perundangan 6 dokumen

   Realisasi

   Jumlah dokumen laporan barang milik daerah sesuai ketentuan perundangan 6 dokumen

Capaian kinerja 100 %.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

   Output :

   a. Jumlah studi komparasi yang dilaksanakan 1
   b. Jumlah APIP yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan 29 kali
   c. Jumlah Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) 3 kali

   Realisasi

   a. Jumlah studi komparasi yang dilaksanakan 1 kali
   b. Jumlah APIP yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan 26 kali
   c. Jumlah Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) 3 kali

   Capaian kinerja 89 %

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

   Output :

   a. Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 100 %
   b. Persentase penyediaan bahan logistik kantor 100 %
   c. Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan 100 %
   d. Persentase penyediaan bahan/material100 %
   e. Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 12 kali
   f. Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE pada SKPD 100 %

   Realisasi

   a. Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 100 %
   b. Persentase penyediaan bahan logistik kantor 100 %
   c. Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan 100 %
   d. Persentase penyediaan bahan/material100 %
   e. Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD12 kali
   f. Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE pada SKPD100 %

   Capaian kinerja 100 %

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

   Output

   a. Persentase terpenuhinya kebutuhan mebeler 100 %
   b. Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin lainnya 100 %

c. Persentase terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya 100 %

Realisasi

a. Persentase terpenuhinya kebutuhan mebeler 100 %
b. Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin lainnya 100 %
c. Persentase terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya 100 %

Capaian kinerja 100 %

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Persentase penyediaan jasa surat menyurat 100 %
b. Persentase penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 100 %
c. Persentase tercukupinya penyediaan jasa pelayanan umum kantor 100 %

Realisasi

a. Persentase penyediaan jasa surat menyurat 100 %
b. Persentase penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 100 %
c. Persentase tercukupinya penyediaan jasa pelayanan umum kantor 100 %

Capaian kinerja 100 %

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Output

Persentase barang milih daerah dalam kondisi baik 80 %

Realisasi

Persentase barang milih daerah dalam kondisi baik 80 %

Capaian kinerja 100 %

2.1.2 PERSENTASE REKOMENDASI TEMUAN YANG DI TINDAK LANJUTI

Indikator Kinerja Pengawasan sebagaimana target PKPT / Non PKPT pada tahun 2024 sebesar 90 % atau mencapai 90 % dari target RPJMD tahun 2024, adapun kendala atas ketidak tercapain tersebut adalah :

a) Pejabat/ASN terkait temuan belum sepenuhnya berkomitmen terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.
b) Lemahnya pengendalian internal SKPD, Tim SPI belum optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan sehingga kejadian-kejadian yang sama terulang kembali pada pelaksanaan APBD tahun berikutnya.
c) Adanya ketidaksepakatan hasil pemeriksaan dapat terjadi karena auditor kurang cermat dan kurang memiliki kualitas teknis dan profesi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pemeriksaan.

Capaian Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan indikator Persentase Rekomendasi Temuan Yang Di Tindak Lanjuti di dukung oleh kegiatan dengan output yang dihasilkan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

   Output :

   a. Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan : 42 LHP
   b. Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Desa : 96 LHP
   c. Jumlah Laporan Hasil Reviu atas LKPD : 1 LHR
   d. Jumlah Laporan Hasil Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran APBD : 9 LHR
   e. Jumlah Laporan Hasil Reviu LKj.IP Pemda dan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah : 44 laporan
   f. Jumlah koordinasi kerjasama APIP dan APH : 4 kali kegiatan
   g. Jumlah dokumen ikhtisar hasil pengawasan evaluasi TLHP APIP : 2 dokumen
   h. Jumlah laporan TLHP BPK dan Rakorwas : 4 laporan

   Realisasi :

   a. Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan : 42 LHP
   b. Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Desa : 96 LHP
   c. Jumlah Laporan Hasil Reviu atas LKPD : 1 LHR
   d. Jumlah Laporan Hasil Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran APBD : 9 LHR
   e. Jumlah Laporan Hasil Reviu LKj.IP Pemda dan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah : 44 laporan

f. Jumlah koordinasi kerjasama APIP dan APH : 4 kali kegiatan
g. Jumlah dokumen ikhtisar hasil pengawasan evaluasi TLHP APIP : 2 dokumen
h. Jumlah laporan TLHP BPK dan Rakorwas : 4 laporan

Capaian kinerja : 100%

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Output

Jumlah laporan penanganan pengaduan masyarakat/kasus 6 laporan

Realisasi :

Jumlah laporan penanganan pengaduan masyarakat/kasus 6 laporan

Capaian kinerja : 100 %

2.1.3 PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG DI DAMPINGI

Untuk pencapaian kinerja prosetase perangkat daerah yang didampingi ,pada tahun 2024 adalah 100 %. Hal ini sama dengan target capaian yang di rencanakan tahun 2024 yaitu 100 %, Indikator ini mendukung Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi. Program tersebut di dukung oleh kegiatan sebagai berikut :

1. Pendampingan dan Asistensi

Out put :

a. Terlaksananya asistensi dan pendampingan pelaksanaan SPIP ke perangkat daerah12 bulan
b. Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan PMPRB tervalidasi/terverifikasi MENPANRB40 OPD
c. Jumlah unit kerja yang diusulkan menuju WBK/WBBM 5 unit kerja
d. Terselenggaranya kegiatan operasionalisasi saber pungli 12 bulan
e. Terselenggaranya koordinasi MCP dan Stranas PK12 kali
f. Jumlah sosialisasi Penegakan Integritas (Benturan Kepentingan, WBS, UPG, LHKSN) 2 kali

Realisasi

a. Terlaksananya asistensi dan pendampingan pelaksanaan SPIP ke perangkat daerah 12 bulan
b. Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan PMPRB tervalidasi/terverifikasi MENPANRB40 OPD
c. Jumlah unit kerja yang diusulkan menuju WBK/WBBM 5 unit kerja

d. Terselenggaranya kegiatan operasionalisasi saber pungli 12 bulan
e. Terselenggaranya koordinasi MCP dan Stranas PK12 kali
f. Jumlah sosialisasi Penegakan Integritas (Benturan Kepentingan, WBS, UPG, LHKSN) 2 kali

Capaian kinerja 100 %

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH s/d TAHUN 2024 KABUPATEN PACITAN

Kode				Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan IV tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2025	Perkiraan Realiasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2025	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11
6	01	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil Nilai Sakip Perangkat Daerah	82,95	80,65	82,95	80,05	96%	83,35	80,35	96%
6	01	01	2.01	Perencanaan,Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah	**15 dok**	15 dok	15 dok	15 dok	100 %	15 dok	15 dok	100 %
6	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100 %
6	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah sesuai ketentuan perundangan	6 dok	6 dok	6 dok	6 dok	100 %	6 dok	6 dok	100 %
6	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Kode				Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan IV tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2025	Perkiraan Realiasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2025	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11
6	**01**	**01**	**2.06**	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase operasional dasar perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %
6	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah yang dibutuhkan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milih daerah dalam kondisi baik	80 %	80 %	80 %	80 %	100 %	80 %	80 %	100 %
6	01	02		**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**Persentase Rekomendasi**	**92.5%**	**92.5%**	**92.5%**	**92.5%**	**100 %**	**92.5%**	**92.5%**	**100 %**

Kode				Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan IV tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2025	Perkiraan Realiasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2025	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11
					Temuan Yang Ditindaklanjuti								
6	01	02	2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Presentase perangkat daerah dan pemerintah desa tanpa temuan keuangan dan aset yang material	92.5%	92.5%	92.5%	92.5%	100 %	92.5%	92.5%	100 %
6	01	02	2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	**01**	**03**		**Program Perumusan Kebijakan,Pendampingan Dan Asistensi**	**Persentase Pelaksanaan Pendampingan Dan Asistensi**	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	01	03.	2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase rumusan kebijakan pengawasan yang disusun	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Kode				Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan IV tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2025	Perkiraan Realiasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2025	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11
6	01	03	2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi Reformasi Birokrasi, Pencegahan Korupsi dan Penegakan Integritas	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok Inspektorat Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah dan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka untuk mengetahui kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

TABEL 2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PACITAN

TAHUN 2025

TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL/ FORMULA PERHITUNGAN	TARGET INDIKATOR SASARAN						PROGRAM
			2021	2024	2025	2024	2025	2026	
Mwwujudkan Pengawasan yang profesioanl dan Akuntable	Terselesaikannya tindak lanjut atas temuan BPK	Jumlah penyelesaian tindak lanjut atas temuan BPK dan Inspektorat Provinsi / jumlah Tindak Lanjut atas temuan BPK							
Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Nilai IKM Perangkat Daerah	Berdasarkan Permenpanrb no.14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik	83,66	84,66	85,66	86,66	87,66	88,66	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Terwujudnya peran APIP sebagai Quality Assurance dan Consulting	Level Kapabilitas APIP	Berdasarkan Peraturan BPK RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP Pada Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah Kapabilitas APIP adalah kemampuan yang harus dimiliki APIP agar melaksanakan tugas-tugas pengawasan secara efektif	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	**Program Penyelenggaraan Pengawasan** **Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**

2.3 Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan

Matriks Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 Disusun berdasarkan hasil bimbingan teknis dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada bulan Februari 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-					
			2021	2024	2025	2024	2025	2026
Mewujudkan Pengawasan yang Profesional dan Akuntabel	Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Nilai IKM perangkat daerah	83,66	84,66	85,66	86,66	87,66	88,66
	Terwujudnya peran APIP sebagai Quality Assurance dan Consulting	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

2.4 Laporan realisasi dan capaian kinerja sampai dengan semester 1 2025

No	Program , Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase Realisasi
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.313.428.935,00	3.310.480.109,00	40%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96.910.000,00	35.664.000,00	37%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.261.849.097,00	2.588.374.659,00	49%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.786.400.000,00	246.695.345,00	14%

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	574.523.038,00	247.604.978,00	43%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.931.943.826,00	0	0%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	272.729.100,00	93.472.277,00	34%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.305.469.645,00	197.203.000,00	6%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	889.640.000,00	393.657.325,00	44%
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	735.720.000,00	301.397.325,00	41%
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	153.920.000,00	92.260.000,00	60%
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.501.829.800,00	177.474.842,00	12%
	Pendampingan dan Asistensi	1.501.829.800,00	177.474.842,00	12%
JUMLAH		17.621.294.506,00	3.980.146.426,00	23%

Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PACITAN

No.	Indikator Sasaran	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-				
				2021	2022	2023	2024	Proyeksi 2025
1	Nilai SAKIP sangat baik			81,75	80,30	80,65	80,05	80,35
2	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah yang ditindaklanjuti			92,5%	92,5%	92,5%	92,5%	92,5%
3	Persentase Perangkat Daerah Yang di dampingi			100%	100%	100%	100%	100%

2.6 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/Badan/Kantor, Lembaga Teknis Daerah) juga dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah maupun eksternal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada saat ini selain melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Inspektorat Daerah Kabupaten juga dituntut untuk meningkatkan pelayanan publik, meminimalkan kerugian daerah, dan sebagai *quality assurance*. Salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik adalah melalui peningkatan pembinaan dan pengawasan secara lebih intensif terhadap unit kerja/satuan kerja yang melaksanakan tugas pelayanan publik. Sedangkan upaya meminimalkan kerugian daerah dilakukan melalui peningkatan pengawasan/pemeriksaan secara lebih intensif terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan oleh unit kerja/perangkat daerah, juga perlu adanya sinergi antara Inspektorat Daerah Kabupaten dengan Inspektorat Daerah Propinsi, Inspektorat Daerah Jendral Kementerian dan BPKP.

Peran baru yang diemban oleh Inspektorat Daerah adalah sebagai *quality assurance* pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD, terutama dalam hal kinerja dan akuntabilitas laporan keuangan. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 dinyatakan bahwa APIP melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Dengan peran baru ini, Inspektorat Daerah lebih menjadi supervisor atau pendampingan bagi OPD.

Permasalahan beserta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan di Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan menghadapi beberapa permasalahan, yaitu :

1) Dukungan sebagian pimpinan/ manajemen Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

masih kurang memadai. Tanpa komitmen pimpinan agenda yang telah ditetapkan akan sulit diinternalisasikan kepada seluruh pegawai. Saat ini masih banyak kepala OPD yang berpendapat bahwa SPIP merupakan beban tugas tambahan dan formalitas, dan belum menjadi kebutuhan organisasi.

2) Kualitas dan kuantitas SDM aparat pengawas belum sebanding dengan beban tugas dan kewenangannya, masih adanya kesenjangan jumlah riil auditor bersertifikasi masih terlalu kecil dibanding dengan jumlah ideal berdasar analisa jabatan,jumlah ideal menurut analisa jabatan 80 auditor , jumlah riil saat ini baru ada 25 auditor, tidak sesuai dengan beban kerja pemeriksaan dan ketugasan mandatori yang semakin banyak dari Pemerintah Pusat.

3) Kepatuhan sebagian auditan masih rendah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan terutama bila terkait dengan pihak ketiga (rekanan).

4) Kualitas SDM yang mengelola Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada OPD kurang memadai karena mutasi kerja dari SDM yang telah menerima pelatihan / pembinaan hal SPIP dimutasi ke OPD lain , sulit untuk dapat kaderisasi karena keterbatasan personil.

5) Kendala dari segi peraturan , belum adanya peraturan tentang Mekanisme dan Prosedur Pengawasan yang terbaru untuk pencapaian sasaran peningkatan kapabilitas APIP, serta peraturan tentang Panduan Pemetaan Risiko bagi Perangkat Daerah (unit Kerja) yang terkait dengan maturitas SPIP masih dalam proses.

6) Dalam penanganan pengaduan masyarakat, permasalahan kesulitan mencari bukti audit karena sumber informasi sulit diidentifikasi, hal tersebut juga menyebabkan ketugasan pemeriksaan melebihi waktu penugasan dalam surat tugas karena kondisi di lapangan.

7) Kedisplinan /ketelitian auditor dan SDM pendukung dalam pengisian format kendali mutu pada saat proses pemeriksaan/audit dan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (Audit) masih perlu ditingkatkan.

8) Sarana prasarana penyimpanan arsip penting pemeriksaan masih perlu

ditingkatkan.

Inspektorat Daerah dituntut untuk mereposisi fungsi dan perannya, sebagai tuntutan profesionalisme lembaga dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Beberapa hal yang akan menjadi tantangan bagi Inspektorat Daerah adalah :

a) Pergeseran paradigma peran dan fungsi Inspektorat Daerah dari peran sekedar mencari-cari kesalahan (*watch dog*) menjadi penjamin mutu(*quality assurance*). Peran ini menuntut banyak hal yang "lebih" daripada masa sebelumnya. Selain peningkatan kualitas SDM, kinerja Inspektorat Daerah haruslah menunjukkan peran baru ini, bukan hanya sekedar menjadi 'yang ditakuti'.
b) Pengawalan akuntabilitas pelaksanaan keuangan daerah melalui Laporan Keuangan Daerah, yang setiap tahun diaudit dan diberikan opini oleh BPK. Pada tahun 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021,dan 2024 mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini tentunya menjadi pemicu bagi Inspektorat Daerah untuk senantiasa meningkatkan kinerja agar Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dapat dipertahankan untuk tahun-tahun mendatang.
c) Peningkatan kapabilitas level APIP lebih baik, bahkan lebih sempurna dibanding SDM pada OPD lain. Mengingat posisi Inspektorat Daerah sebagai institusi pengawas, sehingga stigma ini tidak bisa dilepaskan begitu saja. Untuk itu pengembangan diri mutlak diperlukan dan menjadi prioritas.
d) Adanya perkembangan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan didukung dengan pengembangan e-government yang menuntut peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia.
e) Adanya peningkatan jumlah obyek serta kegiatan pembinaan dan pengawasan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan tugas- tugas nya ada banyak hal yang perlu diperhatikan, diantaranya :

a) Harus mampu mengikuti dan memahami regulasi yang sering berubah
b) Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan menyusun program kerja pengawasan tahunan berbasis priorotas dan resiko

c) Pelatihan dan Bimbingan Teknis yang diselenggarakan BPKP, Inspektorat Daerah Propinsi, maupun Perguruan Tinggi dan Lembaga-lembaga lain sehingga secara langsung dapat meningkatkan SDM Aparat Pengawasan.

d) Adanya kenaikan prosentase penyelesaian temuan dan tindak lanjut dari obyek pemeriksa, sehingga dapat menambah kepercayaan dan mengembangkan diri sebagai instansi yang dipercaya obrik dalam mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bebas dari KKN *(clean government and good governance).*

e) Pembentukan pejabat fungsional, yang akan membawa nilai-nilai profesionalisme.

f) Adanya penyelenggaraan pengawasan secara efektif dengan waktu yang efisien melalui sistem berbasis teknologi informasi.

g) Penerapan SPIP di masing-masing Perangkat Daerah.

Seiring dengan tuntutan masyarakat, khususnya masyarakat Pacitan yang sangat menginginkan adanya pemerintahan yang lebih bersih dan berwibawa guna mendorong tercapainya kemakmuran yang berkeadilan sosial, dan untuk mendukung amanat yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang mengharuskan organisasi pemerintahan untuk menjadi organisasi yang lebih transparan, efektif dan akuntabel, serta untuk menindaklanjuti isu-isu terkini yang berkembang Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan menetapkan isu-isu strategis sebagaimana tersebut dibawah ini :

a) *Good Government and Clean Governance*

Adanya dorongan yang sangat kuat agar APIP berperan besar dalam mempraktikkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme melalui pengawasan Reformasi Birokrasi.

b) Peningkatan Kapabilitas APIP

RPJMN 2016-2021 telah menargetkan kapabilitas APIP di tahun 2019 berada pada Level 3 dari skor Level 1 - 5. APIP dengan Level 3 (*integrated*) diharapkan telah menerapkan praktik profesional audit internal secara seragam dan telah selaras sepenuhnya dengan standar audit.

c) Pelayanan Publik

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik adalah melalui peningkatan pengawasan atau pemantauan secara lebih insentif terhadap unit kerja/satuan kerja yang melaksanakan tugas pelayanan publik. Hal ini disebabkan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan serta mendapatkan pelayanan yang optimal dari penyelenggara pemerintahan.

d) Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Perangkat Daerah

Pada pelaksanaan TLHP diharapkan bagi Perangkat Daerah yang kurang datanya segera menyampaikan data setelah pemeriksaan.

TABEL 2.5.
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2025
KABUPATEN PACITAN

Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Anggaran sebelum	Target	Anggaran setelah
	Output / Kegiatan	Target	Perubahan	Kegiatan	Perubahan
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			**18.343.298.506**		**18.166.456.627**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**83,35**	**15.302.348.706,00**	**83,35**	**15.998.226.827,00**
Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun**	100 % **15 Dokumen**	**71.925.000,00**	**100%**	**119.710.000,00**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	15 Dokumen	71.925.000,00	15 Dokumen	119.710.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah**	**12 Bulan 59 Dokumen**	**5.261.849.097,00**	**12 Bulan 59 Dokumen**	**5.235.011.218,00**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 orang/bulan	5.177.309.097,00	49 orang/bulan	5.150.471.218,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	84.540.000,00	12 Dokumen	84.540.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase APIP yang mendapatkan pendidikan dan**	**100 % 70 %**	**2.187.860.000,00**	**100%**	**1.829.800.000,00**

	pelatihan teknik pengawasan Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian				
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 orang	879.010.000,00	40 orang	711.900.000,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 orang	1.308.850.000,00	40 orang	1.117.900.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Operasional Dasar Perangkat Daerah yang Terpenuhi Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah**	**100 % 12 bulan**	**734.929.038**	**100 % 12 bulan**	**649.013.883**
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	222.892.038,00	12 Paket	265.707.183,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tercukupinya penyediaan bahan logistik kantor	12 paket	73.974.000,00	12 paket	74.349.700,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	86.345.000,00	12 paket	86.345.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 laporan	351.718.000,00	28 laporan	222.612.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Ketersediaan Sarana**	**100 % 12 bulan**	**3.931.943.826,00**	**100% 12 Bulan**	**4.488.181.463,00**

	dan Prasarana yang Dibutuhkan Terselenggaranya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 unit	330.662.921,00	93 unit	330.662.921,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 unit	3.601.280.905,00	63 unit	4.157.518.542,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perangkat Daerah yang Dibutuhkan Terselenggaranya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100% 12 Bulan**	**272.729.100,00**	**100% 12 Bulan**	**271.175.100,00**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	8.430.000,00	12 laporan	8.430.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	162.955.500,00	12 laporan	157.201.500,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	101.343.600,00	12 laporan	105.543.600,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**12 bulan**	**2.841.112.645,00**	**12 bulan**	**3.405.335.163,00**

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	64.962.700,00	1 unit	97.960.700,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 unit	165.153.000,00	31 unit	248.057.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 unit	2.610.996.945,00	1 unit	3.059.317.463,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	**Persentase Rekomendasi Temuan yang ditindaklanjuti Nilai SAKIP perangkat daerah**	**100 >B % Nilai**	**1.412.960.000,00**	**100 >B % Nilai**	**867.080.000,00**
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	**-Hasil penilaian evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kab. Pacitan -Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Kab.Pacitan -Persentase perangkat daerah dan pemerintahan desa tanpa temuan keuangan dan aset yang material -Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa tanpa temuan keuangan dan aset yang material**	**100 % BB BB Unit**	**1.174.110.000,00**	**100 % BB BB Unit**	**717.160.000,00**

	-Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat yang ditindak lanjuti				
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	37 Laporan	317.200.000,00	25 Laporan	212.200.000,00
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	48 Laporan	135.600.000,00	15 Laporan	135.600.000,00
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	109.000.000,00	1 Laporan	79.000.000,00
Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	60 Laporan	181.560.000,00	69 Laporan	123.600.000,00
Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 kesepakatan	36.800.000,00	2 kesepakatan	22.400.000,00
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	393.950.000,00	4 Dokumen	144.360.000,00
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	**Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan Persentase Rekomendasi Temuan Yang diTindaklanjuti**	**100 %**	**238.850.000,00**	**100 %**	**149.920.000,00**
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	53.650.000,00	2 Laporan	9.600.000,00
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10 Laporan	185.200.000,00	10 Laporan	140.320.000,00
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	**Persentase Pedoman Sisdur Pengawasan yang disusun**	100%	**1.627.989.800,00**	100%	**1.301.149.800,00**

Pendampingan dan Asistensi	**Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi Reformasi Birokrasi, Pencegahan Korupsi dan penegakan integritas**	100%	**1.627.989.800,00**	100%	**1.301.149.800,00**
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	38 Perangkat Daerah	738.800.000,00	38 Perangkat Daerah	679.920.000,00
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	38 Perangkat Daerah	87.800.000,00	38 Perangkat Daerah	46.840.000,00
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6 Kegiatan	738.189.800,00	6 Kegiatan	567.189.800,00
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	38 Perangkat Daerah	63.200.000,00	38 Perangkat Daerah	7.200.000,00

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan tidak secara langsung terlibat dengan masyarakat, LSM serta Organisasi lainnya. Oleh karena itu sampai dengan saat ini Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan belum pernah mendapatkan usulan program atau kegiatan dari para *stakeholders*.

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	83,35	
1.1	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100 % 15 Dokumen	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan 59 Dokumen	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Persentase APIP yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan teknik pengawasan Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian	100 % 70 %	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Persentase Operasional Dasar Perangkat Daerah yang Terpenuhi Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 % 12 bulan	
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pacitan	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan Terselenggaranya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 12 bulan	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pacitan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perangkat Daerah yang Dibutuhkan Terselenggaranya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 12 bulan	

1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pacitan	Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	
2	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**		**Persentase Rekomendasi Temuan yang ditindaklanjuti Nilai SAKIP perangkat daerah**	**100 >B % Nilai**	
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Pacitan	Hasil penilaian evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kab. Pacitan Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat Kab.Pacitan Persentase perangkat daerah dan pemerintahan desa tanpa temuan keuangan dan aset yang material Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa tanpa temuan keuangan dan aset yang material Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat yang ditindak lanjuti	100 % BB BB Unit	
2.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Pacitan	Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan Persentase Rekomendasi Temuan Yang diTindaklanjuti	100%	
3	**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**		**Persentase Pedoman Sisdur Pengawasan yang disusun**	**100%**	
3.2	Pendampingan dan Asistensi	Kab. Pacitan	Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi Reformasi Birokrasi, Pencegahan Korupsi dan penegakan integritas	100%	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Seperti telah diketahui bahwa Pemerintah Pusat sekarang ini sedang menggalakkan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratif, dan terpercaya. Sejalan dengan hal tersebut dan sesuai dengan tugas Inspektorat Daerah yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah maka Inspektorat Daerah mempunyai kewajiban untuk:

1. Melaksanakan pengawasan secara intensif atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan.
2. Menunjang peningkatan kinerja manajemen pemerintahan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur , Sarana dan Prasarana.
4. Meningkatkan pelaksanaan sistem pengendalian intern secara berkelanjutan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan pembangunan daerah diharapkan mampu mengawal setiap regulasi dan kebijakan yang ditetapkan Bupati supaya berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Untuk itu, disusunlah tujuan dan sasaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah melalui pelaksanaan kegiatan.

Tujuan Rencana Kerja Inspektorat Daerah adalah:

1. Peningkatan Kinerja Pengawasan.
2. Peningkatan Profesionalisme aparat pengawasan internal Pemerintah Daerah
3. Peningkatan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan.

   Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

   1. Meningkatnya kinerja pengawasan
   2. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparat Pengawasan
   3. Tercapainya tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan

3.3. Program dan Kegiatan

A. Program

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

b) Program Penyelenggaraan Pengawasan

c) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

B. Kegiatan

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan:

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b) Program Penyelenggaraan Pengawasan

Kegiatan:

1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal
2) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

c) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan:

1) Pendampingan dan Asistensi.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025

Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Tahun 2025 merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 berpedoman pada renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Inspektorat Daerah merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan tahun 2025.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025. Pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan tersebut tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan semua pihak baik dari pimpinan dan seluruh staf Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan. Dukungan berupa kerja sama yang baik sangat diharapkan, sehingga terwujudnya Pemerintah Kabupaten Pacitan yang bersih dan berwibawa akan lebih cepat tercapai.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 diharapkan kesinambungan pelaksanaan pengawasan di Kabupaten Pacitan dapat terlaksana secara sinergis.

Pacitan, 06 Agustus 2025

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATENPACITAN

MAHMUD,S.Pd.,M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196612261989011002

RENJA PERUBAHAN

2025

DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN

JLN. DEWI SARTIKA 17
PACITAN

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenanNya kami dapat menuntaskan Renja Perubahan tahun 2025 dengan tepat waktu.

Renja merupakan rencana jangka pendek tahunan yang akan dicapai oleh Organisasi Perangkat Daerah. Terselesaikannya Renja Perubahan ini tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak dan stakeholder terkait, melalui forum diskusi dan berbagai macam bentuk dukungan lainnya. Maka dari itu, Penyusun Renja mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Dilihat dari segi materi maupun teknik penulisannya, Renja ini masih harus terus disempurnakan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati diharapkan adanya saran demi kesempurnaannya.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pacitan, 15 Juli 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN

Ir. BUDIYANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196505081990031012

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana kerja Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 merupakan tindak lanjut atas ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 pasal 15 ayat 1 yaitu Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Tahapan penyusunan Renja diatur dalam pasal 16 ayat 2, terdiri dari (a) persiapan penyusunan, (b) penyusunan rancangan awal, (c) penyusunan rancangan (d) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, (e) perumusan rancangan akhir, dan (f) penetapan.

Perencanaan pembangunan di bidang pendidikan harus memperhitungkan faktor administrasi Pemerintah Kabupaten Pacitan, demografi, geografi, ekonomi dan sosial budaya. Selain itu dalam perencanaannya juga harus mengacu pada arah dan kebijakan pengembangan Pendidikan Nasional yaitu ketersediaan layanan pendidikan, keterjangkauan layanan pendidikan, kualitas/ mutu dan relevansi layanan pendidikan, kesetaraan dalam memperolah layanan pendidikan, kepastian/ keterjaminan memperoleh layanan pendidikan. Dengan adanya rencana kerja ini diharapkan Dinas Pendidikan dapat merencanakan perubahan secara proaktif terhadap perkembangan informasi yang lebih cepat, tuntutan pelayanan yang semakin beragam, kebutuhan pelayanan masyarakat yang lebih prima, berkomitmen terhadap kegiatan di masa yang akan datang dan meningkatkan komunikasi antar unit kerja

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 63 tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 133 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan menyatakan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten Pacitan menyelenggaraan urusan wajib bidang pendidikan dengan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan urusan pendidikan. Secara garis besar permasalahan pendidikan yang dihadapi adalah :

1. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah;
2. Masih rendahnya harapan lama sekolah;
3. Belum maksimalnya penataan kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menurut pemilahan kelompok usia (Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Satuan PAUD Sejenis, dan Taman Kanak- Kanak)

4. Belum semua tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memiliki sertifikat sesuai kompetensinya;
5. Masih kurangnya kesejahteraan guru khususnya jenjang PAUD;
6. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan kesetaraan;
7. Angka literasi dan numerasi meskipun mengalami kenaikan namun belum maksimal
8. Masih Tingginya angka Anak Tidak Sekolah

Dengan tersusunnya Rencana kerja setelah perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, diharapkan dapat disusun tahapan pencapaian hasil secara lebih obyektif untuk memberikan komitmen dan orientasi target serta sasaran di masa depan pada masing-masing kegiatan serta dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaan pendidikan dalam satu tahun kedepan yang efektif, efisien serta profesional.

1.2. Landasan Hukum

Adapun peraturan-peraturan terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026
6. Peraturan Bupati Pacitan nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 133 tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan kabupaten Pacitan;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan Kab. Pacitan dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan. Selain itu, penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Perubahan tahun 2025 juga dimaksudkan sebagai penjabaran jangka pendek dari Rencana Strategis Dinas Pendidikan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan tahun 2025 adalah sebagai bagian penyesuaian anggaran untuk mendukung target target Dinas Pendidikan Tahun 2025

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja setelah Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan kerja PD perubahan agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan
capaian tahun berjalan (n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ini memuat tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas pendidikan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra PD.

Bab IV Penutup

Bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Kinerja

Evaluasi Kinerja Sasaran sampai dengan triwulan II , dan berbandingan dengan pencapaian sasaran tahun sebelumnya adah sebagi berikut :

Tabel 1 Sasaran Strategis PD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	2	3	
1	Terjaminnya kualitas dan aksesbilitas pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	**12,70** Tahun
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	**7,94** tahun
2	Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Hasil nilai IKM PD	90,00

2.2. Evaluasi Kinerja Keuangan

Gambaran kinerja keuangan sampai dengan tri bulan II adalah sebagai berikut :

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN JUNI 2025

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja			
		Operasi		Modal	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Dinas Pendidikan	567.502.761.883	224.597.287.479	9.786.479.737	1.980.634.854
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**491.420.487.193**	**194.867.420.844**	**297.302.939**	**191.625.900**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja			
		Operasi		Modal	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	212.974.002	25.122.625	0	0
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	108.308.120	19.364.875	0	0
1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.147.200	0	0	0
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96.518.682	5.757.750	0	0
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	489.181.790.309	194.037.450.347	0	0
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	488.995.210.709	193.948.998.422	0	0
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	145.359.900	72.888.425	0	0
1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	41.219.700	15.563.500	0	0
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	271.300.870	86.446.000	0	0
1.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	271.300.870	86.446.000	0	0
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	195.278.588	169.539.000	0	0
1.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	7.173.933	0	0	0
1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	26.918.000	26.460.000	0	0
1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	161.186.655	143.079.000	0	0
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	293.283.436	111.918.621	0	0
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86.271.450	29.547.004	0	0
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.001.986	36.678.148	0	0
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000	26.339.250	0	0
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97.010.000	19.354.219	0	0
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	634.010	0	297.302.939	191.625.900
1.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	634.010	0	297.302.939	191.625.900
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	928.282.516	393.591.645	0	0
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.494.516	8.179.035	0	0
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	344.400.000	117.812.610	0	0
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	561.388.000	267.600.000	0	0
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	336.943.462	43.352.606	0	0

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja			
		Operasi		Modal	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.997.266	15.812.906	0	0
1.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	296.946.196	27.539.700	0	0
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**66.914.608.179**	**25.620.735.301**	**9.489.176.798**	**1.789.008.954**
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	32.919.907.636	12.026.102.785	8.202.970.473	1.693.877.468
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	295.000.000	56.504.610	1.343.000.000	58.028.450
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	25.000.000	25.000.000	50.000.000	0
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	200.792.463	0	0	0
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	348.710.148	113.965.263	0	0
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	3.495.719.853	58.284.900	0	0
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	24.958.029.527	11.495.160.012	5.049.970.473	1.558.589.828
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	34.161.000	0	0	0
1.01.02.2.01.0042	Penyediaan infrastruktur TIK	25.000.000	25.000.000	0	0
1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	21.727.203	0	0	0
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	298.000.000	202.188.000	100.000.000	6.419.655
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	53.768.041	0	0	0
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	50.000.000	50.000.000	1.475.000.000	70.839.535
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	3.113.999.400	0	0	0
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	0	0	185.000.000	0
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	19.222.606.968	7.075.058.880	736.000.000	27.131.286
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	160.000.000	160.000.000	280.000.000	7.548.000
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	100.000.000	100.000.000	300.000.000	12.587.400
1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	0	0	100.000.000	6.995.886
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	0	0	50.000.000	0
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	155.000.000	0	0	0
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	161.443.932	87.902.000	0	0
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	506.388.300	30.199.400	6.000.000	0

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja			
		Operasi		Modal	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	17.615.100.000	6.371.361.860	0	0
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	29.343.820	3.434.340	0	0
1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	150.000.000	0	0	0
1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	47.850.749	41.509.465	0	0
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	37.480.167	20.651.815	0	0
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	200.000.000	200.000.000	0	0
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	60.000.000	60.000.000	0	0
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	12.273.264.900	5.431.032.826	206.965.000	0
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	670.280.000	323.120.977	0	0
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	17.593.900	0	0	0
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	227.340.000	27.980.171	0	0
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	9.558.235.000	4.799.938.000	15.965.000	0
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	30.715.000	3.840.000	0	0
1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	108.485.000	106.651.638	0	0
1.01.02.2.03.0031	Penyediaan infrastruktur TIK	48.860.000	0	25.000.000	0
1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	12.000.000	0	0	0
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	80.000.000	52.111.170	0	0
1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	50.000.000	0	0	0
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	1.124.181.000	20.000.000	0	0
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	57.120.000	0	0	0
1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	288.455.000	97.390.870	166.000.000	0
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.498.828.675	1.088.540.810	343.241.325	68.000.200
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	359.990.000	10.939.500	0	0
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.944.000.000	994.100.000	0	0

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja			
		Operasi		Modal	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	15.680.000	1.600.000	0	0
1.01.02.2.04.0033	Penyediaan infrastruktur TIK	0	0	207.400.000	0
1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	40.000.000	38.198.430	0	0
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	60.000.000	14.551.000	0	0
1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	79.158.675	29.151.880	135.841.325	68.000.200
1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**14.752.928**	**0**	**0**	**0**
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	7.386.228	0	0	0
1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	7.386.228	0	0	0
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	7.366.700	0	0	0
1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	7.366.700	0	0	0
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**9.145.950.000**	**4.109.131.334**	**0**	**0**
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	9.145.950.000	4.109.131.334	0	0
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	8.845.950.000	3.809.131.334	0	0
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	300.000.000	300.000.000	0	0
1.01.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**6.963.582**	**0**	**0**	**0**
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	6.963.582	0	0	0
1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	6.963.582	0	0	0
	Jumlah	567.502.761.883	224.597.287.479	9.786.479.737	1.980.634.854

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan mandat dari perangkat peraturan dan undang- undang terhadap tugas dan fungsi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, maka visi Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah :

"Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global".

Misi Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah :

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari Rentra Dinas Pendidikan. Penetapan tujuan dalam Rencana Rencana didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Dinas Pendidikan di Kabupaten Pacitan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah;
2. Masih rendahnya harapan lama sekolah;
3. Masih kurangnya ketersediaan guru PNS khususnya pada jenjang SD;
4. Belum maksimalnya penataan kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menurut pemilahan kelompok usia (Kelompok

Bermain, Taman Penitipan Anak, Satuan PAUD Sejenis, dan Taman Kanak-Kanak)

5. Belum semua tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memiliki sertifikat sesuai kompetensinya;
6. Masih kurangnya kesejahteraan guru khususnya jenjang PAUD;
7. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan kesetaraan;
8. Masih rendahnya tingkat literasi digital guru dan peserta didik

3.3.. Analisis Kinerja OPD

a) Program Pengelolaan Pendidikan

Akses dan dan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar tetap menjadi isu strategis dengan faktor hambatan dan pendorong sebagai berikut

1) faktor pendorong
   - Tingkat kesadaran masyarakat sudah sangat tinggi.
   - biaya pendidikan yang relatif terjangkau terutama untuk sekolah negeri
   - ketercukupan ruang kelas untuk menampung seluruh penduduk usia sekolah jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan anak usia dini
   - Meningkatnya peran serta pendidikan non formal dalam mengatasi keterbatasan akses terhadap sekolah formal

2) faktor penghambat
   - Masih adanya anak putus sekolah dengan berbagai macam sebab
   - Ada ada keluhan masyarakat terhadap adanya beberapa pungutan yang dirasakan sangat memberatkan bagi sebagian masyarakat
   - Belum semua akses jalan menuju sekolah dengan kondisi baik, karena kondisi geografis
   - transportasi publik terkaitan dengan akses menuju sekolah belum tersedia secara baik

b) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1) Faktor Pendorong
   - Meningkatnya jumlah ASN dengan bertambahnya penerimaan PPPK

untuk mengatasi kekurangan guru ASN di sekolah negeri

- Meningkatnya jumlah guru pengerak dengan inisitif mandiri
- Meningkatnya jumlah guru Sertifikat
- Meningkatnya ketersediaan Dana untuk menunjang insentif guru Non PNS baik dari APBD Kabupaten maupaun APBD Propinsi

2) Faktor Penghambat

- Masih ditemukan guru indisipliner dengan berbagai macam kondisi
- Indisipliner karena tidak masuk kerja
- Indisipliner karena kasus perselingkuhan
- Indispliner karena kasus kekerasan terhadap anak
- Indisipliner karena kasus korupsi
- Indispliner karena kasus Ketidaknetralan pada Pilkades, Pileg, pilkada
- Penempatan Guru PPPK yang berulangkali mengalami perubahan menyebabkan pendistribusian guru terhambat
- Angka Literasi yang rendah karena disebabkan angka distribusi guru rendah

c) Program Pengembangan Kurikulum

1) Faktor Pendorong

- sudah dilakukan identifikasi kebutuhan kurikulum muatan lokal dengan materi kebencanaan, kebudayaan sosial

2) Faktor Penghambat

- muatan lokal belum diregulasikan dan belum di sosialisasikan
- adanya materi insersi tambahan terhadap muatan kurikulum utama yang dirasakan memberatkan bagi satuan pendidikan

d) Program Pengendalian Perijinan

1) Faktor Pendorong

- Sudah dilakukan perijinan terintergrasi dengan menggunakan OSS terintergrasi
- Semua lembaga pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar sudah memiliki ijin operasional

- Ijin operasional dan pendirian terpantau minimal 2 kali dalam satu tahun dengan system pendataan dapodik

2) Faktor Penghambat

- OSS diharapkan dapat mempermudah proses perijinan lembaga swasta masih ada beberapa persyaratan yang dirasakan justru memberatkan dan mempersulit proses perijinan
- Masih ditemukan lembaga swasta yang sudah berijin namun habis masa ijinnya, namun tidak segera memperbarui perijinannya
- Perijinan yang harus terupload dalam system dapodik masih ada yang terlewatkan sehingga lembaga tidak mendapatkan bantuan operasional dari APBN

e) Program Penunjang Urusan Daerah

1) Faktor Pendorong

- Sudah tersedia SOP dan SP yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas
- Sudah tersedia sarana –prasarana penunjang
- Sudah tersedia petugas pelayanan dengan SK Kepala Dinas
- Sudah tersedia petugas pengaduan dengan SK kepala Dinas

2) Faktor Penghambat

- Beberapa SOP dan SP yang sudah waktunya direvisi disesuaikan
- dengan kondisi terbaru namun SOP dan SP tersebut belum dilakukan revisi
- Meskipun telah ada SOP dan SP, namun petugas belum memahami sepenuhnya, sehingga memeerlukan peningkatan kapasitas pengelola layanan dan pengelola aduan

3.4. Program dan Kegiatan Anggaran setelah Perubahan Tahun 2025

Rencana program dan kegiatan setelah Perubahan Dinas pendidikan tahun 2025 adalah

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
2					3	4	8	9	10	11	12	14	17
					Dinas Pendidikan				572.222.685.468	574.475.342.909	620.614.520.672		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				572.222.685.468	574.475.342.909	620.614.520.672		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				572.222.685.468	574.475.342.909	620.614.520.672		
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Saki OPD Nilai SKM OPD	72,6 90	74,4 90	466.018.774.268	491.943.510.572	533.169.524.664,83		
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaa enggaraan dan Evaluasi Kinerjas PD	24 Dokumen	24 Dokumen	210.000.000	300.000.000	300.000.000		Dokumen Perencanaan
1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24 Dokumen	24Dokumen	100.000.000	140.000.000	108.308.120	Pajak Daerah	
1	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000	10.000.000	8.146.600	Pajak Daerah	
1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000	150.000.000	196.518.682	Pajak Daerah	
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	463.495.374.268	489.195.210.709	489.195.210.709		Dokumen Penatausahaan Keuangan
1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3989 Orang/bulan	3989 Orang/bulan	463.295.374.268	0	0	Pajak Daerah DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
2					3	4	8	9	10	11	12	14	17
												Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3989	3989 Orang/bulan	0	488.995.210.709	530.146.945.841	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	
1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	5 Dokumen	150.000.000	150.000.000	145.359.900	Pajak Daerah	
1	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000	50.000.000	41.219.700	Pajak Daerah	
1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Barang Miliki Daerah pada Perangkat Daerah	12 lapora	12 laporan	300.000.000	300.000.000	300.000.000		Barang Milik Daerah
1	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD								
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	300.000.000	300.000.000	271.300.870	Pajak Daerah	
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Administasi Kepegawaian Perangkat daerah	1 DOkumen	1 Dokumen	245.000.000	271.938.000	271.938.000		Pegawai Dinas Pendidikan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
2					3	4	8	9	10	11	12	14	17
1	01	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai								
						Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1 Unit	10.000.000	10.000.000	7.173.933	Pajak Daerah	
1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	100 Paket	0	26.938.000	26.918.000	Pajak Daerah	
1	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	235.000.000	235.000.000	361.186.655	Pajak Daerah	
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunya adinistrasi Perangkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	340.000.000	400.000.000	400.000.000		-
1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100.000.000	100.000.000	86.271.450	Pajak Daerah	
1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100.000.000	100.000.000	70.001.986	Pajak Daerah	
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	50.000.000	50.000.000	40.000.000	Pajak Daerah	
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	90.000.000	150.000.000	97.010.000	Pajak Daerah	
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersusunnya Dokumen Pengadan Aset Tetap lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	297.961.863	297.961.863		Kantor Dinas Pendidikan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
2					3	4	8	9	10	11	12	14	17
1	01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya								
						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	25 Unit	25 Unit	250.000.000	297.961.863	297.936.949	Pajak Daerah	
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Dokumen Jasa Penunjang Urusan PD	12 Laporan	12 Lapora	938.400.000	938.400.000	938.400.000		Kantor Dinas Pendidikan
1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	30.000.000	30.000.000	22.494.516	Pajak Daerah	
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	344.400.000	344.400.000	344.400.000	Pajak Daerah	
1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	564.000.000	564.000.000	561.388.000	Pajak Daerah	
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Miliki daerah Penunjang PD	10 Unit	10 Unit	240.000.000	240.000.000	240.000.000		Seluruh aset Dinas Pendidika
1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit	40.000.000	40.000.000	39.997.266	Pajak Daerah	
1	01	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya								
						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit	200.000.000	200.000.000	296.946.196,83	Pajak Daerah	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatya Akses layanan Pendidikan	-	-	97.424.111.200	73.652.032.337	78.097.329.497,17		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
2					3	4	8	9	10	11	12	14	17
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka melanjutkan dari SD ke SLTP Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SD Prosentase Bangunan Dalam Kondisi Baik	0,015 % 103,22 % 80 % 99,56 %	0,015 % 103,22 % 80 % 99,56 %	63.981.871.000	38.636.250.000	38.636.250.000		Penduduk Usia 7-12 tahun
1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	37 Unit	50 Unit	1.593.000.000	1.538.000.000	3.551.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU								
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	100.000.000	0	0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah								
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	75.000.000	0	100.000.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah								
						Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	90.000.000	75.000.000	75.000.000	Pajak Daerah DAU yang Ditentukan Penggunaannya	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
2					3	4	8	9	10	11	12	14	17
												Bidang Pendidikan	
1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah								
						Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	418 Paket	420 Paket	220.000.000	251.000.000	200.792.463,01	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	7000 Peserta Didik	7000 Peserta Didik	350.000.000	450.000.000	448.710.148,60	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah								
						Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	418 Satuan Pendidikan	518 Satuan Pendidikan	1.012.250.000	1.012.250.000	3.495.719.853	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar								
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	418 Satuan Pendidikan	419 Satuan Pendidikan	31.823.600.000	30.008.000.000	30.008.000.000	DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja	
1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar								
						Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	418 Orang	418 Orang	50.000.000	50.000.000	34.161.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
1	01	02	2.01	0042	Penyediaan infrastruktur TIK								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
2					3	4	8	9	10	11	12	14	17
						Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	100 Paket	2 Paket	23.275.021.000	25.000.000	25.000.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	
1	01	02	2.01	0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi								
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	30.000.000	30.000.000	21.727.203,56	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru								
						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	25 Ruang	25 Ruang	298.000.000	398.000.000	498.000.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik								
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	418 Satuan Pendidikan	419 Satuan Pendidikan	75.000.000	75.000.000	53.768.041	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah								
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	25 Ruang	54 Ruang	4.830.000.000	1.425.000.000	1.762.200.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
2					3	4	8	9	10	11	12	14	17
1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar								
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	110 Peserta Didik	110 Peserta Didik	0	3.114.000.000	114.000.000	Pajak Daerah DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik								
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	45 Paket	45 Paket	160.000.000	185.000.000	498.343.920	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka melanjutkan dari SMP ke SLTA Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMP Prosentase Sekolah SMP kondisi bangunan baik	0,18 % 90,81 % 95,63 % 99,15 %	0,18 % 90,81 % 95,63 % 99,15 %	19.549.559.300	19.539.150.300	19.539.150.300		Penduduk Usia 13-15 Tahun
1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	7 Unit	10 Unit	415.000.000	340.000.000	550.000.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah								
						Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	4 Ruang	260.000.000	400.000.000	400.000.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
2					3	4	8	9	10	11	12	14	17
												Bidang Pendidikan-Reguler-SD	
1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah								
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	75.000.000	0	75.000.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium								
						Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	1 Ruang	0	0	100.000.000	Pajak Daerah	
1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	0 Unit	75.000.000	0	0	Pajak Daerah DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah								
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	-	1 Paket	0	50.000.000	50.000.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah								
						Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	50 Paket	620 Paket	0	155.000.000	205.000.000	Pajak Daerah	
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1500 Peserta Didik	1500 Peserta Didik	200.000.000	200.000.000	196.443.932	Dana Alokasi Umum (DAU)	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
2					3	4	8	9	10	11	12	14	17
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah								
						Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	71 Satuan Pendidikan	115 Satuan Pendidikan	201.050.300	226.050.300	547.388.300	Dana Alokasi Umum (DAU)	
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama								
						Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	72 Satuan Pendidikan	71 Satuan Pendidikan	17.630.500.000	17.615.100.000	17.615.100.000	DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja	
1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama								
						Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	72 Orang	72 Orang	38.000.000	38.000.000	29.343.820	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
1	01	02	2.02	0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan								
						Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	50 Orang	150.000.000	150.000.000	150.000.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
1	01	02	2.02	0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi								
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	55.000.000	55.000.000	47.850.749	Dana Alokasi Umum (DAU)	
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik								
						Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	71 Satuan Pendidikan	71 Satuan Pendidikan	50.000.000	50.000.000	82.480.167	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
2					3	4	8	9	10	11	12	14	17
1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru								
						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	4 Ruang	220.000.000	200.000.000	270.000.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik								
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	120 Paket	0 Paket	120.009.000	0	0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik								
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	75 Paket	2 Paket	60.000.000	60.000.000	220.000.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Prosentase PAUD yang terakrediatasi minimal B	-	46,21 % 86,81 %	11.402.280.900	12.390.232.037	12.390.232.037		Penduduk Usia 5-6 Tahun
1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD								
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	10 Unit	15 Unit	681.841.000	656.000.000	850.280.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	
1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
2					3	4	8	9	10	11	12	14	17
						Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	71.119.900	89.119.900	72.593.900	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD								
						Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	840 Satuan Pendidikan	840 Satuan Pendidikan	210.000.000	260.000.000	227.340.000	Pajak Daerah	
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD								
						Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	810 Satuan Pendidikan	810 Satuan Pendidikan	9.720.600.000	9.574.200.000	9.574.200.000	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	
1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD								
						Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	810 Orang	810 Orang	40.000.000	40.000.000	30.715.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru								
						Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	6 Ruang	10 Ruang	235.000.000	110.000.000	578.485.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
1	01	02	2.03	0031	Penyediaan infrastruktur TIK								
						Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	20Paket	5 Paket	0	50.000.000	103.860.000	Pajak Daerah	
1	01	02	2.03	0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi								
						Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk	1 Kegiatan	1 Kegiatan	15.000.000	15.000.000	12.000.000	DAU yang Ditentukan	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
2					3	4	8	9	10	11	12	14	17
						pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						Penggunaannya Bidang Pendidikan	
1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik								
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1000 Paket	1000 Paket	80.000.000	80.000.000	54.000.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
1	01	02	2.03	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD								
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	1 Unit	50.000.000	50.000.000	50.000.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD								
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	200 Paket	24 Paket	138.000.000	1.110.000.000	1.144.181.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD								
						Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	840 Satuan Pendidikan	810 Satuan Pendidikan	60.000.000	60.000.000	208.120.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
1	01	02	2.03	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah								
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	11 Ruang	100.720.000	295.912.137	774.455.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
2					3	4	8	9	10	11	12	14	17
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	-	2.490.400.000	3.086.400.000	3.086.400.000		Penduduk Usia Sekolah yang tidak sekolah
1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan								
						Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	165 Satuan Pendidikan	19 Satuan Pendidikan	145.000.000	645.000.000	409.990.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan								
						Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	19 Satuan Pendidikan	19 Satuan Pendidikan	2.105.400.000	1.944.000.000	1.944.000.000	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	
1	01	02	2.04	0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan								
						Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	40 Orang	40 Orang	20.000.000	20.000.000	15.680.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
1	01	02	2.04	0033	Penyediaan infrastruktur TIK								
						Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	100 Paket	11 Paket	0	207.400.000	207.400.000	Pajak Daerah	
1	01	02	2.04	0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik								
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	727 Paket	1000 Paket	40.000.000	40.000.000	40.000.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
2					3	4	8	9	10	11	12	14	17
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	727 Peserta Didik	1000 Peserta Didik	80.000.000	80.000.000	160.000.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
1	01	02	2.04	0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal								
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	1 unit	3 unit	100.000.000	150.000.000	215.000.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Muatan Lokal yang tersusun Kurikulumnya	-	80 %	20.000.000	20.000.000	14.752.928		
1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar yang disusun sesuai standar	-	1 dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000		Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar
1	01	03	2.01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar								
						Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	7.386.228	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000		Satuan Pendidikan Jenjang PAUD
1	01	03	2.02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal								
						Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	7.366.700	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
2					3	4	8	9	10	11	12	14	17
												Bidang Pendidikan	
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Proporsi Guru Bersertifikat Pendidikan	90%	90%	8.749.800.000	8.849.800.000	9.325.950.000		
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Proporsi Guru Bersertifikat Pendidikan	90%	90%	8.749.800.000	8.849.800.000	8.849.800.000		Pendidik Tenaga Kependidikan
1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								
						Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	5 Dokumen	8.549.800.000	8.549.800.000	9.025.950.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	1 Laporan	200.000.000	300.000.000	300.000.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	
1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Tersusunnya Pengendalian Perijianan	100 %	100%	10.000.000	10.000.000	6.963.582		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025		
2					3	4	8	9	10	11	12	14	17
1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Tersusunnya Pengendalian Perijianan	100 %	100%	10.000.000	10.000.000	10.000.000		Satuan Pendidikan Jenjang PAUD dan Pendidikan Non Formal
1	01	05	2.02	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat								
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	10 Dokumen	10 Dokumen	10.000.000	10.000.000	6.963.582	Pajak Daerah	
								J U M L A H	**572.222.685.468**	**574.475.342.909**	**620.614.520.672**		

BAB IV
P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Setelah Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Pendidikan tahun 2021 – 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati Pacitan serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2025.

Rencana Kerja Setelah Perubahan Dinas pendidikan kabupaten Pacitan tahun 2025 sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sebelum perubahan.

Dengan adanya Rencana Kerja Setelah Perubahan Dinas pendidikan kabupaten Pacitan Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.

Pacitan, 15 Juli 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN

Ir. BUDIYANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196505081990031012

Lampiran

- Capaian Kinerja Berdasarkan Aplikasi Simolek

LAPORAN EVALUASI APBD KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN
PERIODE : JUNI

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 01				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**Nilai**	**73.00**	**491.943.510.572,00**	**0.00**	**195.047.422.042,00**	**0%**	**39.65%**
1 01		**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**	**dokumen**	**58.00**	**300.000.000,00**	**60.00**	**25.122.625,00**	**103.45%**	**8.37%**
1 01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	24.00	140.000.000,00	36.00	19.364.875,00	150%	13.83%
			0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	8.00	10.000.000,00	14.00	0,00	175%	0%
			0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	26.00	150.000.000,00	29.00	5.757.750,00	111.54%	3.84%
										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	145,51	5,89
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
1 01		**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah**	**laporan**	**5.00**	**489.195.210.709,00**	**2.00**	**194.054.150.645,00**	**40%**	**39.67%**
1 01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	3993	488.995.210.709,00	7986.00	193.965.698.720,00	200%	39.67%
			0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	2.00	150.000.000,00	2.00	72.888.425,00	100%	48.59%
			0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	laporan	12.00	50.000.000,00	7.00	15.563.500,00	58.33%	31.13%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											119,44	39,80
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Rendah
101	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan barang milik daerah sesuai ketentuan perundangan**	**%**	**100.00**	**300.000.000,00**	**80.00**	**86.446.000,00**	**80%**	**28.82%**
101	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	4.00	300.000.000,00	1.00	86.446.000,00	25%	28.82%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											25,00	28,82
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
101	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian**	**%**	**100**	**271.938.000,00**	**80.00**	**169.539.000,00**	**80%**	**62.34%**
101	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	2.00	26.938.000,00	3.00	26.460.000,00	150%	98.23%
			0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Peningkatan Sarana Prasarana Disiplin Pegawai	kegiatan	1.00	10.000.000,00	2.00	0,00	200%	0%
			0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	laporan	1.00	235.000.000,00	1.00	143.079.000,00	100%	60.88%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											150,00	53,04
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Rendah
101	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**%**	**100**	**400.000.000,00**	**80.00**	**111.918.621,00**	**80%**	**27.98%**
101	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	5	100.000.000,00	1.00	29.547.004,00	20%	29.55%
			0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	12.00	100.000.000,00	5.00	36.678.148,00	41.67%	36.68%
			0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	4	50.000.000,00	4.00	26.339.250,00	100%	52.68%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	150.000.000,00	5.00	19.354.219,00	41.67 %	12.9%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											50,84	32,95
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Rendah	Sangat Rendah
101	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**%**	**100**	**297.961.863,00**	**80.00**	**163.300.900,00**	**80%**	**54.81 %**
101	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	unit	4	297.961.863,00	0.00	163.300.900,00	0%	54.81 %
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											0,00	54,81
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Rendah
101	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan**	**%**	**100**	**938.400.000,00**	**120.00**	**393.591.645,00**	**120%**	**41.94 %**
101	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	unit	21.00	30.000.000,00	4.00	8.179.035,00	19.05 %	27.26 %
			0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	344.400.000,00	5.00	117.812.610,00	41.67 %	34.21 %
			0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	564.000.000,00	5.00	267.600.000,00	41.67 %	47.45 %
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											34,13	36,31
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
101	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**%**	**80**	**240.000.000,00**	**160.00**	**43.352.606,00**	**200%**	**18.06 %**
101	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	4.00	40.000.000,00	2.00	15.812.906,00	50%	39.53 %

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Dinas Jabatan								
			0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya	paket	4.00	200.000.000,00	0.00	27.539.700,00	0%	13.77 %
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											25,00	26,65
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
101	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**APM SMP/MTS**	**Prosentase**	**89.00**	**86.910.486.787,00**	**0.00**	**2.190.594.555,00**	**0%**	**2.52 %**
					APM PAUD	**Prosentase**	**79.60**		**0.00**		**0%**	
					APM SD/MI	**Prosentase**	**85.42**		**0.00**		**0%**	
101	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI**	**Prosentase**	**99.25**	**50.243.304.450,00**	**0.00**	**666.230.413,00**	**0%**	**1.33 %**
101	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	paket	8	1.538.000.000,00	16.00	114.533.060,00	200%	7.45%
			0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	paket	3.00	75.000.000,00	6.00	25.000.000,00	200%	33.33 %
			0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	jenis lomba	100.00	450.000.000,00	185.00	113.965.263,00	185%	25.33 %
			0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	kegiatan	418	1.012.250.000,00	836.00	58.284.900,00	200%	5.76%
			0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	lembaga	418.00	30.008.000.000,00	836.00	0,00	200%	0%
			0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	lembaga	418	50.000.000,00	836.00	0,00	200%	0%
			0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang Kelas Baru yang dibangun	paket	10.00	1.013.760.000,00	20.00	208.607.655,00	200%	20.58 %
			0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				877.620.000,00		0,00	0%	0%
			0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Proses Belajar Bagi Peserta Didik	kegiatan	100.00	165.000.000,00	200.00	0,00	200%	0%
			0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	paket	10.00	11.448.674.450,00	20.00	120.839.535,00	200%	1.06%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Sekolah								
			0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan sekolah	paket	250.00	251.000.000,00	500.00	0,00	200%	0%
			0042	Penyediaan infrastruktur TIK	jumlah Intrastruktur TIK yang tersedia	paket	1.00	25.000.000,00	2.00	25.000.000,00	200%	100%
			0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah Laporan layanan Pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan kekerasan dan intoleransi	kegiatan	1.00	30.000.000,00	2.00	0,00	200%	0%
			0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang mendapat Bantuan	siswa	500.00	3.114.000.000,00	1000.00	0,00	200%	0%
			0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga siswa tersedia	paket	100.00	185.000.000,00	200.00	0,00	200%	0%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											174,06	12,90
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Rendah
101	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs**		**99**	**20.002.750.300,00**	**198.00**	**730.828.306,00**	**200%**	**3.65 %**
			0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	paket	4.00	340.000.000,00	8.00	167.548.000,00	200%	49.28 %
			0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	paket	4.00	400.000.000,00	8.00	112.587.400,00	200%	28.15 %
			0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	paket	1.00	50.000.000,00	2.00	0,00	200%	0%
			0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa	1500.00	200.000.000,00	3000.00	87.902.000,00	200%	43.95 %
			0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	71.00	226.050.300,00	142.00	30.199.400,00	200%	13.36 %
			0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	71.00	17.615.100.000,00	142.00	0,00	200%	0%
			0043	Peningkatan Kapasitas	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pengelolaan	Satuan Pendidik	71.00	38.000.000,00	142.00	3.434.340,00	200%	9.04%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	an						
			0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan sekolah	paket	620.00	50.000.000,00	1240.00	0,00	200%	0%
			0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah sekolah Menerima Pelatihan Aplikasi PPDB	Satuan Pendidikan	50.00	150.000.000,00	100.00	0,00	200%	0%
			0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah Dokumen PEmberian Layanan Pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan kekerasan dan intoleransi	Dokumen	4.00	30.000.000,00	0.00	41.509.465,00	0%	138.36%
			0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah sekolah Melaksanakan ANBK	Satuan Pendidikan	71.00	50.000.000,00	0.00	20.651.815,00	0%	41.3%
			0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	paket	2.00	793.600.000,00	4.00	200.000.000,00	200%	25.2%
			0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktikdan Peraga Peserta didik tersedia	paket	1.00	60.000.000,00	0.00	60.000.000,00	0%	100%
										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	164,71	34,51
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
101	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD**	**%**	**87**	**13.573.032.037,00**	**174.00**	**631.094.826,00**	**200%**	**4.65%**
101	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	paket	66.00	656.000.000,00	0.00	323.120.977,00	0%	49.26%
			0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	paket	1.00	89.119.900,00	0.00	0,00	0%	0%
			0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	lembaga	868.00	9.574.200.000,00	1736.00	0,00	200%	0%
			0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	orang	806.00	40.000.000,00	1612.00	3.840.000,00	200%	9.6%
			0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang terbangun	paket	100.00	1.302.800.000,00	0.00	106.651.638,00	0%	8.19%
			0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	kegiatan	1.00	5.000.000,00	0.00	0,00	0%	0%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			0031	Penyediaan infrastruktur TIK	jumlah Tersedianya infrastruktur TIK	paket	100.00	50.000.000,00	0.00	0,00	0%	0%
			0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	pak	1000.00	80.000.000,00	0.00	52.111.170,00	0%	65.14%
			0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	paket	100.00	50.000.000,00	0.00	0,00	0%	0%
			0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	paket	23	1.110.000.000,00	0.00	20.000.000,00	0%	1.8%
			0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Satuan Pendidikan	501	60.000.000,00	0.00	0,00	0%	0%
			0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	paket	100.00	295.912.137,00	0.00	97.390.870,00	0%	32.91%
			0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Dokumen	4.00	260.000.000,00	0.00	27.980.171,00	0%	10.76%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											30,77	13,67
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
101	**02**	**2.04**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Angka Melek Huruf**		**95**	**3.091.400.000,00**	**190.00**	**162.441.010,00**	**200%**	**5.25%**
			0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	lembaga	19.00	645.000.000,00	0.00	10.939.500,00	0%	1.7%
			0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	lembaga	19	1.944.000.000,00	0.00	0,00	0%	0%
			0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	orang	40.00	20.000.000,00	0.00	1.600.000,00	0%	8%
			0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	500.00	50.000.000,00	0.00	38.198.430,00	0%	76.4%
			0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Peserta Didik	621.00	75.000.000,00	0.00	14.551.000,00	0%	19.4%
			003	Penyediaan	Jumlah Penyediaan	paket	10.00	207.400.000,00	0.00	0,00	0%	0%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			3	infrastruktur TIK	infrastruktur TIK							
			0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	paket	1.00	150.000.000,00	0.00	97.152.080,00	0%	64.77 %
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											0,00	24,32
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
101	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Prosentase Muatan Lokal PAUD yang tersusun Kurikulumnya**	**Prosentase**	**100.00**	**20.000.000,00**	**60.00**	**0,00**	**60%**	**0%**
					Prosentase Muatan Lokal Sekolah Dasar yang tersusun Kurikulumnya	**Prosentase**	**100.00**		**0.00**		**0%**	
101	**03**	**2.01**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**Jumlah kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar yang disusun sesuai standar**		**1**	**10.000.000,00**	**2.00**	**0,00**	**200%**	**0%**
101	03	2.01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	kegiatan	1	10.000.000,00	0.00	0,00	0%	0%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											0,00	0,00
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
101	**03**	**2.02**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	**Jumlah kurikulum muatan lokal PAUD dan PNF yang disusun sesuai sandart**	**dokumen**	**3.00**	**10.000.000,00**	**0.00**	**0,00**	**0%**	**0%**
101	03	2.02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	Dokumen	1	10.000.000,00	0.00	0,00	0%	0%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											0,00	0,00
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
101	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik**	**Prosentase**	**56.30**	**8.849.800.000,00**	**0.00**	**5.737.831.334,00**	**0%**	**64.84 %**
101	**04**	**2.01**		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	**Guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV**	**%**	**85.00**	**8.849.800.000,00**	**0.00**	**5.737.831.334,00**	**0%**	**64.84 %**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								
101	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	dokumen	2	8.549.800.000,00	0.00	5.437.831.334,00	0%	63.6%
					Jumlah Penerima Insentif GTT	orang	507.00		0.00		0%	
					Jumlah Penerima Insentif Tutor	orang	377.00		0.00		0%	
					Jumlah Penerima Insentif PTT	orang	60.00		0.00		0%	
					Jumlah Penerima Insentif PAUD	orang	1320.00		0.00		0%	
			0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	dokumen	2	300.000.000,00	0.00	300.000.000,00	0%	100%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											0,00	81,80
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Tinggi
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											0,00	64,84
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Rendah	Rendah
101	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**Persentase lembaga pendidikan yang memiliki ijin penyelenggaraan pendidikan**	**Prosentase**	**100**	**10.000.000,00**	**0.00**	**0,00**	**0%**	**0%**
101	**05**	**2.02**		**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	**Jumlah ijin PAUD dan PNF yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan**	**lembaga**	**814.00**	**10.000.000,00**	**0.00**	**0,00**	**0%**	**0%**
101	05	2.02	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan	Dokumen	1.00	10.000.000,00	0.00	0,00	0%	0%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat							
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											0,00	0,00
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											0,00	0,00
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja seluruh program(%)											7,50	14,01
Predikat kinerja seluruh program(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Total								**587.733.797.359,00**		**202.975.847.931,00**		
Persentase Realisasi Anggaran										**34.54%**		
Predikat										**Sangat Rendah**		

Pacitan, 15 Juli 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN PACITAN

Ir. BUDIYANTO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19650806 199003 1 012

RENCANA KINERJA (RENJA) PERUBAHAN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

DINAS KESEHATAN

KABUPATEN PACITAN

JL. SASUIT TUBUN NO.01 PACITAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat serta hidayah-Nya, maka dapat diselesaikan penyusunan Rencana Kinerja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2025.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana pencapaiannya (target) serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Rencana Kinerja ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pengelola program dalam melaksanakan kegiatan pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Pacitan pada tahun 2025 sehingga dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Semoga Rencana Kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi pelaksana program dan tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan ini.

Pacitan, Juli 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PACITAN

dr. DARU MUSTIKOAJI
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19730628 200604 1 005

DAFTAR ISI

			Halaman
Kata pengantar			i
Daftar Isi			ii
BAB I	Pendahuluan		1
	A.	Latar Belakang	1
	B.	Landasan Hukum	4
	C.	Maksud dan Tujuan	6
	D.	Sistematika Penulisan	6
BAB II	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Tahun Lalu		8
	A.	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	8
	B.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan	11
	C.	Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan	33
	D.	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan	37
	E.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	42
	F.	Penelaahan Unsur Program dan Kegiatan Masyarakat	63
BAB III	Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan		65
	A.	Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	67
	B.	Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan	68
	C.	Program dan Kegiatan	69
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah		73
BAB V	Penutup		194

BAB I
PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya. Dengan demikian ke depan anggaran Negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui *cost efficiency* dan *cost effectiveness* anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam

rangka mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita – cita bangsa dan negara.

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Pacitan dilaksanakan sejalan dengan pelaksanaan pembangunan kesehatan nasional secara bertahap dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang memiliki derajat kesehatan yang optimal. Pembangunan kesehatan di Kabupaten Pacitan diarahkan untuk makin meningkatkan kualitas, jangkauan dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat serta ditujukan untuk menciptakan dan mempertahankan Kabupaten Pacitan Sehat dan Mandiri dengan menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan.

Dinas Kesehatan Kabupten Pacitan sebagai salah satu unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan sedang aplikasi kegiatannya dituangkan dalam rencana kinerja tahunan.

Perencanaan kinerja sebagai proses penyusunan rencana kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja (Renja) Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2025 dibuat dalam rangka mekanisme penyusunan perencanaan dan penganggaran serta pelaporan kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksudkan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Rencana Kinerja Perubahan dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kerangka dan kebijakan anggaran yang menjadi komitmen organisasi untuk dicapai dalam tahun yang bersangkutan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pada tahun 2023 penyusunan Rencana Kinerja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan mengacu pada Rencana Stratejik (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026. Sedangkan Rencana Stratejik (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan 2021-2026.

Rencana Kinerja (Renja) Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 dirumuskan dalam rangka penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pemerintah. Rencana Kinerja (Renja) Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 ini ditetapkan dengan maksud untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan kegiatan selama tahun anggaran 2025.

Rencana Kinerja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 ini berisi sasaran beserta indikator kinerja sasaran dan target kinerja Peruabhan yang akan dicapai pada tahun 2025 serta rencana program dan kegiatan berikut indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif yang dibutuhkan.

2. LANDASAN HUKUM

Rencana Kinerja (Renja) Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
16. Perda No 09 Tahun 2021 Salinan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 135 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan;

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kinerja (Renja) Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 ditetapkan dengan maksud untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan kegiatan selama tahun anggaran 2025.

Penyusunan Rencana Kinerja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan ini bertujuan :

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan pada tahun 2025.
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan tahun 2025.

4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian Rencana Kinerja (Renja) Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan

3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU

A. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

1. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan adalah sebagai unsur staf yang mempunyai tugas membantu Bupati Pacitan dalam melaksanakan urusan kesehatan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 56 Tahun 2016 Daerah tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang meliputi kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi kesehatan masyarakat.
b. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pencegahan dan pengendalian penyakit.

c. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pelayanan dan sumber daya kesehatan; dan

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan sesuai Peraturan Bupati Pacitan Nomor 135 Tahun 2021 terdiri dari :

a. Sekretariat;
   1) Sub Bagian Umum dan Kepagawaian
   2) Kelompok Jabatan Fungsional
b. Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
d. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional
e. Bidang Pelayanan dan Sumber daya Kesehatan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
f. UOBK Dinas
   1) RSUD
g. UPT Dinas
   1) UPT Laboratorium Kesehatan
   2) UPT Gudang Farmasi
   3) UPT Puskesmas

Dinas Kesehatan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang meliputi kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi kesehatan masyarakat;
b. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pencegahan dan pengendalian penyakit;
c. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan, dan
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Pegawai yang merupakan sumber daya manusia di Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan mempunyai peran sangat vital dalam organisasi. Susunan Pegawai kondisi sampai Januari 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan terdiri dari 1 (satu) jabatan kepala dinas (pejabat eselon II.b) sudah terisi, 1 (satu) sekretaris (pejabat eselon III.a) belum terisi, 4 (Empat) kepala bidang (eselon III.b) sudah terisi 4 (empat) Kepala Bidang, 1 (satu) kepala sub bagian (eselon IV.a). Jabatan

struktural UOBK adalah Direktur RSUD (Pejabat eselon III.a) sedang jabatan struktural UPT terdiri dari dua puluh enam (26) jabatan kepala UPT (eselon IV.a) terisi 2 kepala UPT yaitu 1 Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan 1 Kepala UPT GFK. Jumlah karyawan keseluruhan 1492 orang, terdiri dari ASN sebanyak 1242 orang dan Non ASN 250 orang.

B. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KESEHATAN

Kegiatan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Kesehatan ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Dinas Kesehatan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Kesehatan, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan dan perkiraan pelaksanaan DPA-Dinas Kesehatan tahun berjalan yang baru disahkan. Telaahan hasil evaluasi mencakup :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melabihi target kinerja program/kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Kesehatan.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan pencapaian Renstra Dinas Kesehatan sampai dengan 2024 disajikan pada tabel berikut :

Table II. 1. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan pencapaian Renstra Dinas Kesehatan sampai dengan 2024 disajikan pada tabel berikut

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Rasio pencapaian (%)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2024			Target program/ kegiatan Renja tahun berjalan 2025	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2025	
						Target Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024	Realisasi Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024	Target realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA	Hasil nilai evaluasi SAKIP PD	80.00	78.65	98.31%	80.00	80.00	100	80.1	76.35	95.32
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100	100.00	100%	100	100	100	100	54.54	54.54
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	7	7.00	100%	7	7	100	10	5	50
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1.00	100%	1	1	100	3	2	66.67
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan	2	2.00	100%	2	2	100			
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan PenyusunanDPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan	1	1.00	100%	1	1	100			
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2.00	100%	2	2	100	3	2	66.67
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13	13.00	100%	13	13	100	28	15	53.57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase ketersediaan dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	100	100.00	100%	100.00	100	100	100	48.30	48.30
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	934.00	928.00	99.36%	928.00	934.00	100	1200	1339	100
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (RSUD)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24.00	24.00	100%	24.00	24.00	100	24	24	100
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				84	84	100	12	6	50
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	84	84	100%	12	12	100	1500	616	41,07
1.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	12	100%	3	3	100	6	4	66,67
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir TahunSKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	3	100%	4	4	100	3	0	0
1.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4	4	100%	64.00	64.00	100	4	4	100
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	72	72	100%	72	72	100	144	72	50
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase ketersediaan dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100%	100	100	100	100	0	0
1.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	6	100%	6	6	100	24	12	50
1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Prosentase ketersediaan dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100%	100	100	100	100	0	0
1.02.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	60	60	100%	12	12	100	48	16	33.33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100	100	100%	100	100	100	100	0	0
1.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	12	100%	12	12	100	2	0	0
1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	920	1876	203.91%	920	920	100	124	62	50
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	100	100	100	100	100	100	0	0
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	100%	12	12	100	1	1	100
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	2	100%	2	2	100	2	1	50
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3	3	100%	3	3	100	2	1	50,00
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	5	100%	5	5	100	1	1	100,00
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	47	156.67%	30	30	100	100	60	60,00
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah item Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhi dalam Kondisi Baik	100	100	100	100	100	100	100	0	0
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	3	100%	3	3	100	138	93	67.39
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah item Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhi dalam Kondisi Baik	6	6	100%	0	0	100	19	19	100
1.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pembangunan Gedung Dinkes	1	1	100%	1	1	100	0	0	0
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aktifitas/Operasional Rutin yang dikelola Perangkat Daerah	100	100	100	100.00	100.00	100	100	0	0
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	36	100	36	36	100	36	18	50
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	100	1	1	100	13	6	46.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	80.00	80.00	100%	80.00	80.00	100	80	0	0
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	1.00	100%	1	1	100	59	26	44.07
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Aktifitas/Operasional Rutin yang dikelola Perangkat Daerah	11.00	11.00	100%	13	13	100			
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57	60.00	105.26%	57	57	100	78	38	48.72
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1.00	100%	1	1	100	1	0	0
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**		40.00	40.00	100	40.00	40.00	100	40	40	100
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUD)	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (24 Puskesmas dan RSUD)	40.00	40.00	100	40.00	40.00	100	25	25	100
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase pemenuhan pelayanan kesehatan UKP dan UKM sesuai standar	80	80	100	80	80	100	96	48	50
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Prasarana Fasilitas Kesehatan sesuai standar	64	67,85	106,02	65	65	100	84	84	100
		Persentase Alat Kesehatan Fasilitas Kesehatan sesuai standar							89	71	79.78
		Persentase Sarana Fasilitas Kesehatan sesuai standar							68	32	47.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.02.2.01.02	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				4	4	100	8	3	37.50
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				2	2	100	1	1	100
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit (RSUD)										
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas(Dinas Kesehatan)										
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	12	12	100	7	7	100	19	8	42.11
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1	1	100	12	8	66.67
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan									
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4	4	100						
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah Pengadaan Alat Kesehatan/AlatPenunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	40	40	100						
1.02.01.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center							12	8	66.67
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat,Vaksin	Jumlah pengadaaan Obat, Vaksin	100	100	100	24	24	100			
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan HabisPakai	Jumlah pengadaan bahan habis pakai	50	50	100						
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yg dipelihara							0	0	0
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan dipelihara							0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/AlatPenunjang Medik FasilitasPelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	27	27	100	26	26	100	55	55	100
1.02.02.2.01.0022	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangk	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang							1	0	0
102.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	24	24	100	24	24	100	24	24	100
102.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	288	288	100	288	288	100	288	144	50
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar				91.5	100		90.5	44	48.62
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar				88.5	100		87.5	44.72	51.11
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar				91.5	100		90.5	44.41	49.07
		Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar				91.5	100		90.5	38.27	42.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100	100		100	52	52
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar				78	100		76	46.77	61.54
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar				74	100		72	34.24	47.56
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				51.5	100		51	29,00	56,86
		Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				82	100		80	39,00	76,47
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar				90	100		89	42.08	47.28
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar				100	100		100	60,00	60,00
		Persentase orang dengan resiko Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar				85	100		81	34,00	41,98
		Persentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standar				100			100	100	100
		Persentase kunjungan /visit rate				83			83	42	50,60
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan IbuHamil	Jumlah ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	6678	5406	80,95	6754	6754	89,50%	6513	2.311	35.48
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan IbuBersalin	Jumlah ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	6375	5.280	82,69	6375	6447	86,50%	6217	2.346	37.74
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan	6071	5217	85,93	6071	6071	89,50%	5921	2.321	39.20
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita mendapat pelayanan kesehatan	31301	28.968	92,54	31301	31301	89,50%	30545	11.638	38.10
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan	60493	64.233	106,12	61297	61297	100%	59357	35.220	59.34
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah usia produkitif mendapat pelayanan kesehatan	334653	259221	77,46	329818	329818	70%	299279	147038	49.13
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada UsiaLanjut	Jumlah usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan	130360	107131	86,05	126530	126530	73%	137911	54266	39.35
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan	8325	4572	54,92	181238	181238	50,50%	35075	44014	125.49
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita DiabetesMelitus	Jumlah penderita diabetes melitus mendapat pelayanan kesehatan	375	354	94,4	7635	7635	78%	7320	5109	69.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan JiwaBerat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan	45	43	95,56	1061	1061	88%	920	555	60.33
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	jumlah orang terduga tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan	5154	5467	106,07	5217	5217	100%	1920	2392	124.58
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan kesehatan	6710	6667	99,36	6835	6835	78%	6437	3438	53.41
1.02.01.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah kegiatan penanganan KLB									50
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	1	100	12	12	100	2	1	50
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12	13	108,33	12	12	100	1	1	100
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan KesehatanLingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6	8	133,33	12	12	100	1	0	0
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	2	200	12	12	100	5	5	100
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan KesehatanTradisional, Akupuntur,Asuhan Mandiri,dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12	12	100	12	12	100	12	6	50
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan SurveilansKesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12	12	100	12	12	100	24	12	50
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa(ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100	0	0				100	51	51
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	jumlah kegiatan pelayanan kesehatan jiwa dan napza				10	10	100	0	0	0
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12	12	100	12	12	100	12	6	50

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	1	100	12	12	100	12	6	50
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) **ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan**				10	10	100	24	9	37,5
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	7	91	1300	9	9	100	9	9	100
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (RSUD)		1	1	100	1	1	100	1	1	100
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas		1	24	100	12	12	100	24	24	100
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	jumlah operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	73	73	100	12	12	100	2	2	100
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan diKabupaten/Kota	jumlah puskesmas yang dilakukan pendampingan reakreditasi	24	14	100				0	0	0
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)							24	12	50
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1	1	100	12	12	100	24	12	50
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	1	100	1	1	100	1	1	100
1.02.02.2.02.38	pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	jumlah kelurga yg sudah dikunjungi dan diinvertensi masalah kesehatanya oleh tenaga kesehatan puskesmas				600	600	100	600	240	40
102.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis sesuai standard	24	24	100	12	12	100	0	0	0
1,02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1179	0	0	1079	1079	100	60	37	61,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.02.2.02.44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				0	0	0	1	0	0
1.02.02.2.02.46	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12	12	100	1	0	0
102.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan				0	0	0	1	0	0
102.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				0	0	0	12	6	50
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah dokumen data kesehatan	75.00	57,14	76,19	75.00	75.00	100	80	7	8.75
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	jumlah dokumen data kesehatan	6.00	6	100						
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	jumlah sasaran pengembangan informasi kesehatan	12	12	100	12	12	100	12	6	50
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi ijin sarana kesehatan yang dikeluarkan	60	100	166,67	65	65	100	66	36	54,55
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah rekomendasi ijin sarana kesehatan yang dikeluarkan	26	26	100	26	26	100	24	12	50
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan FasilitasKesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yg Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	24	24	100	24	24	100	30	28	93,33
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	75	100	133,33	100	100	100	100	100	100
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Rasio dokter per satuan penduduk	0.28	0,28	100	0.20	0.20	100	0.21	0	0
1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	jumlah ijin tenaga kesehatan yang diterbitkan	1	1	100	1	1	100	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1	1	100	4	1	100
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	75.00	100	133,33	77	77	100	79	79	100
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	1	100	1	1	100	1	0	0
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuaiStandar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1330	1330	100	900	900	100	200	189	94.50
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	1	100	1	1	100	1	0	0
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Kesehatan yang memenuhi kompetensi	75.00	75	100	75.00	75.00	100	77	77	100
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100	79	79	200	200	100	200	189	94.50
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana farmasi, alat kesehatan dan industri rumah tangga pangan yang sesuai standar kesehatan	75	100	133,33	100	100	100	100	45,45	45,45

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek,Toko Obat,Toko Alat Kesehatan dan Optikal,Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) dibina	72.00	42	58,33	74.00	74.00	100	78	41,45	53,14
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				38	38	100	10	10	100
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan,dan Optikal,Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	jumlah apotek,toko obat,toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang dibina	40.00	45	112,5	0	0	0	0	0	0
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan NomorP-IRTsebagai Izin Produksi,untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase ijin produksi IRTP yang dilakukan pengawasan	75.00	53	70,67	77.00	77.00	100	79	69,78	88,33
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	314.00	335	106,69	1	1	100	225	120	53,33

	yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga										
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase produk IRTP yang diperiksa	75	62	82,67	77	77	100	79	48,67	61,61
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	128.00	130	101,56	150	150	100	48	79	164,58
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**P**ersentase UKBM berstrata PURI	70	88,15	125,93	88,25	88,25	100	80	70	87,50
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan advokasi dan pemberdayaan masyarakat	75.00	56	74,67	75.00	75.00	100	80	50	62,50
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraandan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12.00	13	108,33	12.00	12.00	100	5	3	60
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya media promosi kesehatan	75.00	53	70,67	75.00	75.00	100	80	70	87,50
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1	1	100	12	12	100	4	2	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang dibina	75.00	41	54,67	75.00	75.00	100	80	90	112,5
1.02.05.2.03.01	BimbinganTeknis dan Supervisi Pengembangandan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat(UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	2	200	12	12	100	3	3	100

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PACITAN

dr. DARU MUSTIKOAJI
NIP. 19730628 200604 1 005

Berdasarkan matrik diatas sampai tahun 2024 Dinas Kesehatan melaksanakan 5 program dari 5 program yang menjadi kewenangan Dinas Kesehatan. Tahun 2022 merupakan tahun pertama periode Renstra 2021 – 2026. Dalam perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun 2023 dilakukan Review Renstra kedua yang berdampak pada berubahnya Indikator Kinerja Program dan Kegiatan.

1. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
   1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   4) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
   5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
   6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   9) Peningkatan Pelayanan BLUD
2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
   1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

2) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
   1) Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
   2) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
   3) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
   1) Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
   2) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
   3) Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
   1) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2) Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2. Realisasi program/kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

   a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

      Sub kegiatan yang belum tercapai antara lain pengembangan Puskesmas, Rehab dan pemeliharaan Puskesmas, rehabilitasi faskes lainnya, pemeliharaan alat kalibrasi dan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan. Hal ini dikarenakan kegiatan masih dalam proses kontrak dan proses pekerjaan. Kontrak obat dan distribusi masih dilaksanakan sampai dengan kegiatan akhir tahun. Upaya yang dilakukan dalam memenuhi target antara lain dengan melakukan pengawasan dan monitoring kegiatan secara berkala.

   b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

      1) Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil

         Pelayanan kesehatan ibu hamil belum mencapai target dikarenakan terdapat ibu hamil yang memeriksakan kehamilan setelah trimseter

1 sehingga pelayanan belum memenuhi standar. Pencatatan dan pelaporan ibu hamil yang melakukan pemeriksaan di luar wilayah perlu ditigkatkan. Tindak lanjut yang dilakukan adalah dengan Meningkatkan sosialisasi dan eduksi kepada Masyarakat dan meningkatkan dukungan kebijakan di Tingkat wilayah dan pencatatan sasaran di wilayah.

2) Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin

Sub kegiatan tersebut belum mencapai target dikarenakan Masih tingginya ibu hamil resiko tinggi dan Kekurangan energi kronis. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan Meningkatkan kualitas pelayanan persalinan dan perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan melalui kerjasama dengan jejaring, faskes swasta dan faskes luar daerah.

3) Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Sub kegiatan tersebut belum mencapai target dikarenakan Masih ada kematian neonatal sebelum mendapatkan kunjungan ke 3 kali, terutama BBLR karena prematur dengan penyakit penyerta. Sehingga sasaran tidak tercapai. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan pemantauan ibu dan bayi baru lahir, meningkatkan ketrampilan petugas melalui pelatihan dan melakukan monitoring evaluasi secara rutin.

4) Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan balita

Sub kegiatan tersebut belum tercapai dikarenakan Pencatatan dan pelaporan yang belum optimal. Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pemantauan pertumbuhan balita di posyandu

ILP dan dengan meningkatkan ketrampilan petugas dan kualitas pelaporan melalui bimtek dan monitoring evaluasi secara rutin.

5) Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan usia produktif

Sub kegiatan tersebut belum tercapai dikarenakan Sasaran Proyeksi dihitung berdasarkan wilayah Puskesmas, akan tetapi banyak siswa yang bersekolah diluar wilayah/ luar kota sehingga cakupan tidak memenuhi target. Tindak lanjut yang dilakukan adalah dengan meningkatkan koordinasi petugas antar wilayah dan dilakukan monitoring evaluasi pelaporan secara rutin.

6) Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut

Sub kegiatan tersebut belum tercapai dikarenakan Sasaran Proyeksi dihitung berdasarkan wilayah Puskesmas, akan tetapi banyak siswa yang bersekolah diluar wilayah/ luar kota sehingga cakupan tidak memenuhi target. Tindak lanjut yang dilakukan adalah dengan meningkatkan koordinasi petugas antar wilayah dan dilakukan monitoring evaluasi pelaporan secara rutin.

7) Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan diabetes melitus

Sasaran penderita diabetes melitus belum rutin melakukan pemeriksaan ke Pelayanan kesehatan. Telah dilakukan optimalisasi dan edukasi tentang diabetes melitus dan pentingnya pengobatan secara rutin. Skrining penderita diabetes tetap dilakukan dalam upaya penemuan dan pencegahan penyakit diabtes melitus.

8) Sub kegiatan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Permasalahan yang ditemui dalam upaya pencapaian sasaran

ODGJ adalah diperlukannya kegiatan yang bersifat inovasi dan bersifat mendidik para ODGJ untuk bisa terampil dan mandiri. Pembentukan tim sahabat jiwa dari kader jiwa untuk pendekatan secara personal telah dilakukan dalam Upaya peningkatan pelayanan kepada ODGJ. Rujukan pasien ODGJ yang tidak mampu dan tidak memiliki jaminan kesehatan diakomodir melalui dana Bansos.

9) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target adalah Masih rendahnya kelompok resiko Terinfeksi HIV yang memiliki kesadaran untuk skrining. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan melakukan Kerjasama dengan lintas sektor terkait dan memberikan informasi dengan baik agar sasaran melakukan pemeriksaan secara sukarela.

c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target adalah Pengelolaan sistem informasi kesehatan masih belum optimal dikarenakan jaringan internet di Puskesmas tidak stabil. Upaya yang telah dilakukan adalah Pengoptimalan data satu sehat dan memaksimalkan monev terhadap laporan Puskesmas. Pengoptimalan jaringan internet Puskesmas lebih ditingkatkan sehingga semua kegiatan yang berkaitan dengan aplikasi dapat berjalan dengan lancar.

3. **Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan**.

a. Perencanaan yang kurang matang dalam menyusun rencana kerja yang ditetapkan sehingga target kinerja tidak sesuai dengan yang diharapkan.
b. Adanya kasus yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Seperti angka kematian ibu, bayi, balita dan Timbulnya wabah/penyakit.
c. Partisipasi lintas program dan lintas sektor dalam mendukung program perlu ditingkatkan.
d. Penetapan sasaran yang terlalu tinggi atau terlalu rendah sehingga capaian belum maksimal.
e. Pencatatan dan pelaporan yang belum tersinkronisasi di fasyankes Puskesmas, Rumah sakit , Klinik dan Praktek mandiri.

4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Kesehatan.

a. Target yang telah tercapai membawa dampak positif terhadap capaian kinerja dan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.
b. Target yang belum tercapai baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Pacitan.

5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

a. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pencatatan dan pelaporan baik dari Puskesmas, Rumah sakit , Klinik dan Praktek mandiri.
b. Penyuluhan dan advokasi secara aktif dengan sasaran lintas sektor dan Masyarakat terkait program kesehatan

c. Koordinasi rutin dan monev dengan pengelola program lingkup dinas kesehatan terkait keselarasan program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap bulan.
d. Percepatan pengadaan barang dan jasa serta optimalisasi penggunaan e catalogue dalam proses pengadaan.
e. Peningkatan cakupan sasaran SPM melalui optimalisasi pemeriksaan kesehatan gratis pada semua siklus hidup
f. Pengoptimalan ILP dalam penjaringan sasaran deteksi dini penyakit menular dan tidak menular pada semua siklus hidup.

C. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN

Dalam bagian ini disajikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026. Uraian sasaran yang akan dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan pada tahun 2021-2026 adalah "Terjaminnya Aksesbilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat" . Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator Angka Harapan hidup. Matrik Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Capaian Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel II.2 Tabel Sasaran, Indikator Kinerja,Target Capaian dan Capaian

Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	REALISASI	CAPAIAN
Terjaminnya Aksesbilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	74,78	74,74	99,94
	Nilai Indeks Kapuasan Masyarakat Dinas Kesehatan	83,86	86,05	102,61

Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Pacitan tahun 2024 berdasarkan Berita Resmi Statistik yang diterbitkan BPS Kabupaten Pacitan adalah 74,74. Selama periode 2020 hingga 2024 AHH Kabupaten Pacitan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 AHH ini mengalami peningkatan 0,16 dibandingkan tahun sebelumnya.

Angka Harapan hidup saat lahir diartikan sebagai perkiraan rata-rata tahun yang dapat ditempuh seseorang sejak lahir. Angka harapan hidup dipengaruhi oleh banyak faktor pendukung salah satunya adalah angka kematian bayi, angka kematian ibu dan persalinan di fasilitas tenaga Kesehatan. Jika jumlah kematian bayi dan ibu di suatu wilayah tinggi maka Angka Harapan Hidup di Daerah tersebut rendah begitu pula sebaliknya.

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. AHH juga dapat didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun yang ke-x. pada umumnya ketika membicarakan AHH, yang dimaksud adalah rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak

orang tersebut lahir. Angka Harapan Hidup ditetapkan oleh BPS dengan berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Spesific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara beratahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung Angka Harapan Hidup digunakan cara tidak langsung dengan program Mortpak Lite. Angka harapan hidup dipengaruhi oleh banyak faktor pendukung salah satunya adalah angka kematian bayi, angka kematian ibu dan persalinan di fasilitas tenaga Kesehatan. Jika jumlah kematian bayi dan ibu di suatu wilayah tinggi maka Angka Harapan Hidup di Daerah tersebut rendah begitu pula sebaliknya. Hal inilah menjadi salah satu penyebab angka harapan hidup belum sesuai dengan target yang diharapkan.

AHH kabupaten pacitan belum mencapai target dikarenakan dipengaruhi oleh peningkatan angka kematian bayi dan terdapat kematian ibu. Angka kematian ibu pada tahun 2024 mengalami trend penurunan dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya sebanyak 2 kematian ibu. Persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan tercapai 100% yang artinya semua ibu bersalin ditangani oleh tenaga Kesehatan di fasilitas tenaga Kesehatan. Angka Kematian Bayi di Kabupaten Pacitan dilaporkan sebanyak 51 kematian bayi. Trend angka kematian bayi Menurun dibandingkan tahun 2023 sebanyak 55 bayi namun meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 sebanyak 49 bayi. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan AHH antara lain dengan meningkatkan akses dan kualitas Kesehatan sesuai standar, pemberian jaminan Kesehatan untuk Masyarakat miskin, meningkatkan kompetensi tenaga Kesehatan, meningkatkan cakupan pelayanan gizi balita dan anak, Meningkatkan

fasilitas pelayanan Kesehatan, tenaga Kesehatan dan obat obatan dan Menggiatkan kampanye PHBS dan GERMAS.

Pencapaian angka harapan hidup yang lebih tinggi memerlukan perbaikan di berbagai sektor, termasuk kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam meningkatkan angka harapan hidup antara lain dengan menurunkan angka kematian bayi, menurunkan perkawinan usia remaja, meningkatkan cakupan pemberian ASI eksklusif dan meneruskan pemberian ASI selama 2 tahun, Persalinan di Fasilitas Kesehatan dan ditolong oleh Tenaga Kesehatan, Pemanfaatan fasilitas Kesehatan, Meningkatkan kualitas pelayanan, Peningkatan Jamban sehat, Peningkatan cakupan Imunisasi Bayi dan balita, Peningkatan cakupan jaminan pelayanan kesehatan dan tidak ada angka kematian ibu.

Nilai indeks kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan pada tahun 2024 adalah 86,05 dengan capaian 102,61%. Nilai IKM dinas Kesehatan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 2,01. Peningkatan Nilai indeks kepuasan Masyarakat menunjukkan bahwa kepuasan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan semakin meningkat. Baik dari persyaratan, system mekanisme/prosedur, biaya/tarif yang dibebankan,spesifikasi produk yang ditawarkan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penaganan pengaduan saran dan masukan dan sarana prasana sesuai dengan harapan penerima layanan

D. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Dinas Kesehatan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Dinas Kesehatan serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Dinas Kesehatan, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Kesehatan.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Kesehatan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Kesehatan.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional dan internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustanable Developmnet Goals)
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kesehatan.
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi di Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan adalah :

1. Pada tahun 2024 total penyerapan belanja langsung Dinas Kesehatan dari APBD Kabupaten baru mencapai 96,77%, dari total APBD Kabupaten Pacitan.
2. Di Kabupaten Pacitan pada tahun 2024 jumlah dokter umum baik pemerintah maupun swasta tercatat sebanyak 110 orang, sedangkan jumlah penduduk adalah 588.569 jiwa sehingga rasio dokter per 1.000 penduduk adalah 0,18. Atau rasio 1 orang dokter melayani 5.350 penduduk. Jumlah dokter gigi sebanyak 25 orang dengan rasio dokter gigi 0,042 atau 1 dokter gigi melayani 23.542 penduduk dan jumlah dokter spesialis tercatat sebanyak 32 atau 0,054 atau 1 dokter malayani 18.392 penduduk. Sedangkan standar nasional dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Di Tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota Serta Rumah Sakit adalah 1 orang dokter spesialis melayani 16.000 penduduk dan 1 orang dokter umum melayani 2.500 penduduk, sedangkan 1 orang dokter gigi melayani 9.000 penduduk. Secara umum jumlah tenaga medis di Kabupaten Pacitan sampai tahun 2023 masih kurang sehingga perlu perhatian dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Upaya yang sudah dilakukan Dinas Kesehatan adalah mengusulkan penambahan formasi tenaga dokter baik dokter umum maupun dokter gigi kepada Badan Kepegawaian Daerah.
3. Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara substansi sangat baik namun dalam pelaksanaan masih ada kesulitan di tingkat Puskesmas maupun Dinas Kesehatan dalam kaitan penganggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangannya. Selain itu pelaksanaan Program JKN masih kurang promosi, masyarakat yang mendaftar secara mandiri sebagai peserta BPJS

Kesehatan belum maksimal hal tersebut mempengaruhi ketercapaian UHC di Kabupaten Pacitan.

4. Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah penduduk yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Angka Kematian Bayi tahun 2024 mencapai 7,44% menurun dibandingakn tahun 2023 dengan capaian 9,05% Terjadinya kematian bayi menunjukkan rendahnya kualitas perawatan selama masa kehamilan, saat persalinan dan masa nifas, status gizi dan penyakit infeksi ibu. Peningkatan kematian bayi terjadi karena BBLR (berat bayi lahir rendah) disebabkan antara lain :
   a. Status gizi ibu bayi sebelum hamil
   b. Berat badan ibu bayi saat sedang hamil
   c. Usia Ibu saat sedang hamil
   d. Jarak waktu melahirkan anak
   e. Kondisi kesehatan ibu meliputi anemia, riwayat keguguran dan melahirkan BBLR, penyakit infeksi, komplikasi kehamilan dan pregnancy blues.
5. Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator penting menentukan angka harapan hidup. AKI juga dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait dengan kehamilan. Capaian AKI Kabupaten Pacitan Tahun 2024 yaitu 29,16% meningkat dibandingkan capaian tahun 2023 yaitu 98,83%. Indikator ini dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan dan pelayanan kehamilan dan melahirkan. Kematian ibu di Kabupaten Pacitan antara lain disebabkan oleh beberapa factor antara lain akses pelayanan Kesehatan, perilaku, penyebab kematian langsung dan penyebab

kematian tidak langsung dan determinan proksi yang meliputi pelayanan Kesehatan masternal, akses ke pelayanan Kesehatan maternal,Tingkat Pendidikan dan ekonomi, Tingkat Pendidikan ibu, Cakupan ANC, Cakupan PNC, jarak kelahiran, paritas, usia ibu, dan kondisi Kesehatan ibu.

6. Balita stunting masih menjadi masalah di Masyarakat. *stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 mencatat prevalensi stunting di Kabupaten Pacitan sebesar 22,7% dan tahun 2022 terdapat penurunan prevalensi stunting menjadi 20,6%. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024 yang secara resmi telah dilaunching oleh Kementerian Kesehatan pada Mei 2025 Prevalensi stunting di Kabupaten Pacitan yaitu 11,8%. Angka stunting mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 20,9% namun perlu Upaya lebih lanjut dalam menurunkan stunting.

E. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang ada di Dinas Kesehatan. Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program-program prioritas.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KESEHATAN KAB. PACITAN
TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19
						Dinas Kesehatan				347,766,415,574	329,852,939,774	336,985,573,632.34	220.654.325.785
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				347,766,415,574	329,852,939,774	336,985,573,632.34	220.654.325.785
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				347,766,415,574	329,852,939,774	336,985,573,632.34	220.654.325.785
1	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	80 Nilai	138.913.897.342	137.529.037.022,10	144.141.317.686,82	132.298.292.823
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	336.232.000,00	430.842.091,30	430.842.091,30	335.406.000,00
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	10 Dokumen	115.284.000,00	201.009.091,30	136.861.312,58	116.244.000,00
	1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3 Dokumen	18.740.000,00	18.740.000,00	13.640.000,00	26.000.000,00
	1	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							

							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3 Dokumen	13.190.000,00	13.190.000,00	6.260.000,00	13.190.000,00
	1	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Laporan	28 Laporan	189.018.000,00	197.903.000,00	151.745.251,00	179.972.000,00
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase ketersediaan dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	95.231.687.197,00	93.760.987.197,00	93.760.987.197,00	92.198.619.719,00
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1032 Orang/bulan	1200 Orang/bulan	94.946.592.197,00	93.475.892.197,00	91.473.070.474,72	91.893.124.719,00
	1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Dokumen	12 Dokumen	102.468.000,00	102.468.000,00	102.468.000,00	102.468.000,00
	1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	84 Dokumen	1500 Dokumen	49.040.000,00	49.040.000,00	15.985.000,00	49.040.000,00
	1	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	6 Dokumen	46.292.000,00	46.292.000,00	28.992.000,00	46.292.000,00
	1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							

							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	3 Laporan	7.615.000,00	7.615.000,00	7.615.000,00	7.615.000,00
	1	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan							
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen	4 Dokumen	8.400.000,00	8.400.000,00	16.280.000,00	8.400.000,00
	1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	64 Laporan	144 Laporan	71.280.000,00	71.280.000,00	64.800.000,00	91.680.000,00
	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase ketersediaan dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	136.560.000,00	136.560.000,00	136.560.000,00	136.560.000,00
	1	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	24 Laporan	136.560.000,00	136.560.000,00	136.560.000,00	136.560.000,00
	1	02	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Prosentase ketersediaan dokumen administrasi pendapatan daerah kewenangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	10.200.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.200.000,00
	1	02	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah							
							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	48 Dokumen	10.200.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.200.000,00
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100 %	100 %	151.521.000,00	126.600.000,00	126.600.000,00	130.000.000,00
	1	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70 Paket	0 Paket	24.921.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							

							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2 Dokumen	54.600.000,00	54.600.000,00	54.600.000,00	54.600.000,00
	1	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	124 Orang	124 Orang	72.000.000,00	72.000.000,00	20.400.000,00	75.400.000,00
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	664.318.092,00	656.764.692,00	656.764.692,00	628.875.900,00
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	25.482.381,00	25.482.381,00	25.482.381,00	36.117.500,00
	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	57.659.521,00	67.350.721,00	130.764.417,00	19.781.000,00
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	77.584.090,00	63.184.090,00	80.439.090,00	77.624.900,00
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	63.520.100,00	63.355.500,00	63.355.500,00	57.336.000,00
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	440.072.000,00	437.392.000,00	276.340.000,00	438.016.500,00
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	100 %	100 %	506.416.600,00	521.236.200,00	521.236.200,00	316.323.000,00
	1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Unit	138 Unit	335.707.600,00	335.707.600,00	639.557.740,00	144.723.000,00

	1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	26 Unit	19 Unit	170.709.000,00	185.528.600,00	647.784.868,00	171.600.000,00
	1	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	0,00	0,00	200.481.250,00	0,00
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	100 %	100 %	328.358.659,00	427.774.007,00	427.774.007,00	361.415.500,00
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	269.468.659,00	368.884.007,00	368.884.007,00	296.415.500,00
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	13 Laporan	58.890.000,00	58.890.000,00	58.890.000,00	65.000.000,00
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100 % 80 %	80 %	513.119.700,00	422.288.740,00	422.288.740,00	377.062.900,00
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	0 Unit	24.514.000,00	0,00	0,00	27.123.000,00
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	71 Unit	59 Unit	241.684.700,00	311.081.500,00	306.331.200,00	241.841.500,00
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							

							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	78 Unit	51.180.000,00	51.180.000,00	51.180.000,00	51.180.000,00
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	195.741.000,00	60.027.240,00	357.356.160,12	56.918.400,00
2	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Hasil Survey IKM Prosentase pemenuhan UKP dan UKM	75 81 % nilai	81 75 nilai %	78.105.916.121,00	68.658.672.771,90	68.429.871.073,90	81.499.264.851,00
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Alat Kesehatan Fasilitas Kesehatan sesuai standar Persentase Prasarana Fasilitas Kesehatan sesuai standar Persentase Sarana Fasilitas Kesehatan sesuai standar	68 % 84 % 89 %	68 % 84 % 89 %	29.315.147.655,00	20.131.260.816,00	20.131.260.816,00	28.302.984.200,00
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas							
							Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	6 Unit	9 Unit	5.500.000.000,00	5.354.706.000,00	5.354.706.000,00	5.354.706.000,00
	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya							
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	0 Unit	8.476.994.537,00	530.536.000,00	0,00	7.651.679.320,00
	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas							
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	7 Unit	16 Unit	6.199.977.781,00	4.348.521.460,00	4.268.553.798,00	6.200.000.000,00
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan							
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	19 Unit	27 Unit	3.191.583.300,00	1.582.703.400,00	2.097.879.400,00	2.300.000.000,00
	1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi							

							Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	10 Unit	49 Unit	206.449.500,00	60.144.800,00	60.144.800,00	206.449.500,00
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan							
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	48 Unit	398 Unit	133.764.800,00	249.071.800,00	205.671.800,00	133.765.000,00
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan							
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	25 Paket	24 Paket	5.442.428.700,00	7.841.628.456,00	8.566.422.300,00	6.292.433.880,00
	1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga							
							Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	-	600 Keluarga	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00
	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan							
							Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	288 Paket	288 Paket	163.949.037,00	163.948.900,00	144.148.900,00	163.950.500,00

	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase FKTP yang terakreditasi Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standar Persentase kunjungan /visit rate Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 % 51 % 72 % 76 % 80 % 81 % 83 % 87,50 % 89 % 90,50 %	100 % 51 % 72 % 76 % 80 % 81 % 83 % 87,50 % 89 % 90,50 %	48.165.768.466,00	47.917.411.955,90	47.917.411.955,90	52.571.280.651,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6513 Orang	4961 Orang	59.500.000,00	59.500.000,00	32.940.000,00	59.500.000,00
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin							
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6217 Orang	4961 Orang	20.710.000,00	157.712.000,00	145.432.000,00	20.710.000,00

	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir							
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5921 Orang	4901 Orang	40.500.000,00	40.500.000,00	29.140.000,00	40.500.000,00
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita							
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30545 Orang	27821 Orang	67.830.000,00	67.830.000,00	56.070.000,00	67.830.000,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	59357 Orang	64980 Orang	75.500.000,00	75.500.000,00	39.620.000,00	75.500.000,00
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif							
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	299.279 Orang	327695 Orang	289.994.320,00	264.999.400,00	124.319.400,00	310.000.000,00
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut							
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	137911 Orang	108763 Orang	842.199.400,00	80.539.400,00	39.979.400,00	1.060.000.000,00
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi							
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35075 Orang	114281 Orang	26.719.560,00	26.719.560,00	13.039.560,00	26.720.000,00
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus							
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7320 Orang	10017 Orang	46.366.200,00	46.366.200,00	26.206.200,00	46.375.700,00
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	920 Orang	973 Orang	42.398.455,00	42.398.455,00	42.398.455,00	42.398.720,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							

							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1920 Orang	4980 Orang	287.289.100,00	188.348.400,00	83.910.800,00	187.289.100,00
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV							
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6437 Orang	6984 Orang	0,00	98.940.000,00	47.100.000,00	100.000.000,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen	243.775.000,00	238.775.000,00	477.695.000,00	243.775.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	79.299.600,00	112.282.200,00	103.362.200,00	112.282.200,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	384.175.300,00	188.385.000,00	121.725.000,00	138.390.500,00
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5 dokumen Dokumen	6 Dokumen	41.209.500,00	386.311.500,00	370.631.500,00	386.311.900,00
	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	13.290.000,00	50.000.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	24 Dokumen	2 Dokumen	189.432.400,00	284.409.500,00	208.688.200,00	284.232.400,00
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA							
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	2 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							

							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	23.357.150.500,00	24.096.350.200,00	24.082.820.000,00	24.096.350.500,00
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional							
							Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	24 Paket	24 Paket	1.830.000,00	117.657.000,00	117.657.000,00	117.657.000,00
	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat							
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	9 Dokumen	9 Dokumen	274.999.800,00	225.005.800,00	153.527.800,00	274.999.800,00
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya							
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5 Dokumen	5 Dokumen	1.345.409.726,00	1.484.087.735,17	1.373.381.855,17	1.436.107.726,00
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)							
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	24 Laporan	2 Laporan	15.422.500,00	15.422.500,00	9.375.000,00	15.590.000,00
	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	24 Dokumen	12 Dokumen	312.009.200,00	312.009.200,00	267.409.200,00	312.009.200,00
	1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)							
							Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	1 Unit	183.168.127,00	183.168.127,00	163.733.127,00	183.168.127,00
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria							

							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1179 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	1 Dokumen	0,00	442.450.000,00	442.450.000,00	442.450.000,00
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi dalam aplikasi satu data kesehatan	80 %	80 %	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	175.000.000,00	175.000.000,00	168.080.000,00	175.000.000,00
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RS rujukan terakreditasi	66 %	66 %	450.000.000,00	435.000.000,00	435.000.000,00	450.000.000,00
	1	02	02	2.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
							Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	24 Unit	5 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan							
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	30 Unit	30 Unit	300.000.000,00	285.000.000,00	149.617.600,00	300.000.000,00
3	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	80 %	80 %	2.754.059.980,00	3.510.361.880,00	3.375.697.230,00	3.510.424.980,00
	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Rasio dokter per satuan penduduk	0,21 Nilai	0,21 Nilai	23.040.000,00	23.040.000,00	23.040.000,00	13.075.000,00
	1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan							

							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	12 Dokumen	4 Dokumen	23.040.000,00	23.040.000,00	17.280.000,00	13.075.000,00
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	79 %	79 %	2.585.611.980,00	2.624.514.980,00	2.624.514.980,00	2.624.514.980,00
	1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	69.000.000,00	69.000.000,00	40.112.000,00	69.000.000,00
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar							
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1000 Orang	200 Orang	2.474.503.980,00	2.474.503.980,00	2.434.313.330,00	2.474.503.980,00
	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokumen	4 Dokumen	42.108.000,00	81.011.000,00	77.771.000,00	81.011.000,00
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Kesehatan yang memenuhi kompetensi	77 %	77 %	145.408.000,00	862.806.900,00	862.806.900,00	872.835.000,00
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	150 Orang	60 Orang	145.408.000,00	862.806.900,00	806.220.900,00	872.835.000,00
4	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase penyediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	80 %	80 %	535.844.000,00	416.769.000,00	407.409.000,00	416.769.000,00

	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) dibina	78 %	78 %	88.730.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	30 Dokumen	10 Dokumen	88.730.000,00	25.000.000,00	18.920.000,00	25.000.000,00
	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase ijin produksi IRTP yang dilakukan pengawasan	79 %	79 %	253.600.000,00	272.369.000,00	272.369.000,00	272.369.000,00
	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	150 Dokumen	225 Dokumen	253.600.000,00	272.369.000,00	269.089.000,00	272.369.000,00
	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase produk IRTP yang diperiksa	79 %	79 %	193.514.000,00	119.400.000,00	119.400.000,00	119.400.000,00
	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan							
							Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	90 Unit	48 Unit	193.514.000,00	119.400.000,00	119.400.000,00	119.400.000,00

5	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM berstrata PURI	80 %	80 %	2.867.898.131,00	1.949.299.100,00	2.190.312.600,00	2.929.574.131,00
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan advokasi dan pemberdayaan masyarakat	80 %	80 %	1.231.668.379,00	1.226.667.900,00	1.226.667.900,00	1.231.668.379,00
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	5 Dokumen	4 Dokumen	1.231.668.379,00	1.226.667.900,00	1.500.081.900,00	1.231.668.379,00
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya media promosi kesehatan	80 %	80 %	412.749.752,00	356.044.300,00	356.044.300,00	412.749.752,00
	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat							
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	4 Dokumen	2 Dokumen	412.749.752,00	356.044.300,00	385.253.800,00	412.749.752,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang dibina	80 %	80 %	1.223.480.000,00	366.586.900,00	366.586.900,00	1.285.156.000,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	128.380.900,00	66.770.900,00	71.676.000,00
RS UD										124,588,800,000.00	117,788,800,000.00	118,440,966,041.62	0
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				124.588.800.000,00	117.788.800.000,00	118.440.966.041,62	0,00
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				124.588.800.000,00	117.788.800.000,00	118.440.966.041,62	0,00

6	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	120.000.000.000,00	110.000.000.000,00	108.488.166.041,62	0,00
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	120.000.000.000,00	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	0,00
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	120.000.000.000,00	110.000.000.000,00	108.488.166.041,62	0,00
7	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase pemenuhan UKP dan UKM Nilai Hasil Survey IKM	75 81 % nilai	75 81 % nilai	2.800.000.000,00	6.000.000.000,00	8.164.000.000,00	0,00
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	2.800.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan							
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3 Unit	13 Unit	2.800.000.000,00	1.385.620.000,00	3.549.620.000,00	0,00
	1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit							

							Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	-	1 Unit	4.614.380.000,00	4.614.380.000,00	4.614.380.000,00	0,00
8	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-	-	1.788.800.000,00	1.788.800.000,00	1.788.800.000,00	0,00
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	-	1.788.800.000,00	1.788.800.000,00	1.788.800.000,00	0,00
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar							
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	65 Orang	65 Orang	1.788.800.000,00	1.788.800.000,00	1.788.800.000,00	0,00
Puskesmas													
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				223.177.615.574	212.064.139.774	218.544.607.590,72	220.654.325.785
9	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	80 Nilai	138.913.897.342	137.529.037.022,10	144.141.317.686,82	132.298.292.823
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Cost Recovery Rate	>40 nilai >40 Nilai	>40 nilai >40 Nilai	41.035.484.094,00	41.035.484.094,80	48.694.694.035,40	37.803.829.804,00
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							

							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	41.035.484.094,00	41.035.484.094,80	48.694.694.035,40	1.208.431.193,00
10	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Hasil Survey IKM Prosentase pemenuhan UKP dan UKM	75 81 % nilai	81 75 nilai %	78.105.916.121,00	68.658.672.771,90	68.429.871.073,90	81.499.264.851,00
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase FKTP yang terakreditasi Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standar Persentase kunjungan /visit rate Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 % 51 % 72 % 76 % 80 % 81 % 83 % 87,50 % 89 % 90,50 %	100 % 51 % 72 % 76 % 80 % 81 % 83 % 87,50 % 89 % 90,50 %	48.165.768.466,00	47.917.411.955,90	47.917.411.955,90	52.571.280.651,00

	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	279 Orang	227 Orang	988.060.000,00	988.060.000,00	987.660.000,00	67.200.000,00
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	261 Orang	0 Orang	48.240.000,00	0,00	0,00	48.240.000,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2491 Orang	2625 Orang	917.760.000,00	917.760.000,00	917.280.000,00	19.680.000,00
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	39 Orang	201.720.000,00	201.720.000,00	230.280.000,00	5.040.000,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	112 Orang	205 Orang	270.960.000,00	270.960.000,00	275.640.000,00	3.600.000,00
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	265 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.970.000,00	5.500.970.000,00	5.487.830 .000,00	216.106.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	110.480.000,00	110.480.000,00	110.480.000,00	5.940.000,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	503.780.000,00	503.780.000,00	503.780.000,00	14.640.000,00

	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	536.967.000,00	536.967.000,00	532.242.000,00	41.820.000,00
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	100 Orang	324.240.000,00	324.240.000,00	291.600.000,00	11.520.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	2.309.438.000,00	2.309.438.000,00	2.322.143.000,00	143.880.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas							
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	5.915.100.779	5.915.100.779	3.733.986.000,00	309.520.000,00
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya							
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	19.106.000,00	19.106.000,00	19.106.000,00	5.640.000,00
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)							
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0 Laporan	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis							
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang	0 Orang	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)							
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	0 Orang	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria							
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	60 Orang	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	283.660.000,00	283.660.000,00	283.660.000,00	33.600.000,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	18.103.000,00	18.103.000,00	17.263.000 ,00	52.920.000,00
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	150.480.000,00	150.480.000,00	159.840.000,00	4.800.000,00
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	580.320.000,00	580.320.000,00	580.320.000,00	27.840.000,00
11	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM berstrata PURI	80 %	80 %	238.206.000,00	238.206.000,00	238.206.000,00	2.929.574.131,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang dibina	80 %	80 %	1.223.480.000,00	0	0	1.285.156.000,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	238.206.000,00	238.206.000,00	237.126.000,00	52.800.000,00
	J U M L A H									**347,766,415,574**	**329,852,939,774**	**336,985,573,632.34**	**220.654.325.785**

F. PENELAAHAN UNSUR PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang disahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat Desa sampai Musrenbang tingkat Kabupaten. Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan renja dibahas dalam forum Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda. Tujuan pembahasan rancangan renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisai pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dari kegiatan Musrenbang yang dibahas dalam forum perangkat daerah disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel II.4
Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Pembangunan Puskesmas Pembantu Kelurahan Pacitan	Kelurahan Pacitan, Kecamatan Pacitan	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	
1	Pembangunan Gedung Rawat Inap Puskesmas Nawangan	Desa Nawangan, Nawangan	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	
2	Rehabilitasi Gedung Rawat Inap Puskesmas Nawangan	Desa Nawangan, Nawangan	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	
3	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas/Pustu Guinungrerjo	Desa Gunungrejo Sudimoro	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1 paket	
4	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas/Pustu	Desa Wareng, Kecamatan Punung	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1 paket	
5	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas/Pustu	Bolosingo , Pacitan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1 paket	

BAB III
TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN

A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagainya dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan. Menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal). Di samping itu juga penelaahan tentang pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD yang direncanakan. Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten. Untuk penyusunan RKPD kabupaten perlu melakukan telaahan atas kebijakan propinsi. Tahap ini menguraikan kebijakan propinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah propinsi. Kesemuanya itu tertuang dalam RPJMD propinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD propinsi (rancangan awal) dan penelaahan pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD Kabupaten/Kota yang direncanakan.

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan kesehatan yang saat ini sedang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Tabel III.1.

IDENTIFIKASI KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROPINSI

KABUPATEN PACITAN

NO	KEBIJAKAN NASIONAL/PROPINSI	SUMBER	KETERANGAN
A	NASIONAL	APBN	
1	Peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi;		
	percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda		
	peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit		
	pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);		
B	PROPINSI JAWA TIMUR		
	PROGRAM IKON GUBERNUR	APBD Prop.	Bantuan Keuangan
	Percepatan penurunan kematian ibu dan anak		
	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin, daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan		
	Penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada bayi, anak balita, ibu hamil dan menyusui		
	Pemenuhan ketersediaan dan pengendalian obat, perbekalan kesehatan dan makanan.		
	Peningkatan pembiayaan kesehatan dan pengembangan kebijakan dan manajemen kesehatan		

B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN

1. TUJUAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang menjadi hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi yang berhubungan dengan layanan dan tugas fungsi SKPD. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi SKPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah stratejik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya.

Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Berbudaya dan Bahagia

2. SASARAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran sebagai hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Sedangkan uraian sasaran yang akan dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan pada tahun 2021 – 2026 adalah :

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator Indeks Kesehatan. Sedangkan target indikator sasaran untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel III.2.

Target Indikator Kinerja Sasaran

Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TAHUN 2025	SATUAN
1	Meningkatnya derajat kesehatan kepada masyarakat	1	Angka Harapan Hidup (AHH)	76,48	%
		2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan	90	Indeks

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

1. PROGRAM

Program-program yang sesuai tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan berdasarkan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 ada ada 1 Program Wajib dan 4 program kesehatan, sebagai berikut :

Program Wajib semua OPD

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Kesehatan

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

2. KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang kesehatan yang direncanakan untuk dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan dan jajaran pendukungnya yang diusulan untuk dibiayai dari APBD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
    a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
    e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    f. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    j. Peningkatan Pelayanan BLUD
    a. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
    b. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
    c. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    d. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

e. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
   a. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
   b. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
   c. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
   a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
   b. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
   c. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
   a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   b. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

c. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan melaksanakan 5 Program dan 23 kegiatan pada tahun 2025 dengan total anggaran sebesar Rp. 336.945.573.632,34 Rencana Program dan Pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan disajikan pada tabel di bawah ini:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS KESEHATAN KAB. PACITAN

TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	19
						Dinas Kesehatan				347,766,415,574.00	329,852,939,774.00	336,985,573,632.34	220.654.325.785,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				347,766,415,574.00	329,852,939,774.00	336,985,573,632.34	220.654.325.785,00
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				347,766,415,574.00	329,852,939,774.00	336,985,573,632.34	220.654.325.785,00
1	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	80 Nilai	138.913.897.342,00	137.529.037.022,10	144.141.317.686,82	132.298.292.823,00
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	336.232.000,00	430.842.091,30	430.842.091,30	335.406.000,00
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	10 Dokumen	115.284.000,00	201.009.091,30	136.861.312,58	116.244.000,00
	1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3 Dokumen	18.740.000,00	18.740.000,00	13.640.000,00	26.000.000,00
	1	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							

							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3 Dokumen	13.190.000,00	13.190.000,00	6.260.000,00	13.190.000,00
	1	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Laporan	28 Laporan	189.018.000,00	197.903.000,00	151.745.251,00	179.972.000,00
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase ketersediaan dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	95.231.687.197,00	93.760.987.197,00	93.760.987.197,00	92.198.619.719,00
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1032 Orang/bulan	1200 Orang/bulan	94.946.592.197,00	93.475.892.197,00	91.433.070.474,72	91.893.124.719,00
	1	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Dokumen	12 Dokumen	102.468.000,00	102.468.000,00	102.468.000,00	102.468.000,00
	1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	84 Dokumen	1500 Dokumen	49.040.000,00	49.040.000,00	15.985.000,00	49.040.000,00
	1	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							

							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	6 Dokumen	46.292.000,00	46.292.000,00	28.992.000,00	46.292.000,00
	1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	3 Laporan	7.615.000,00	7.615.000,00	7.615.000,00	7.615.000,00
	1	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan							
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen	4 Dokumen	8.400.000,00	8.400.000,00	16.280.000,00	8.400.000,00
	1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	64 Laporan	144 Laporan	71.280.000,00	71.280.000,00	64.800.000,00	91.680.000,00
	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase ketersediaan dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	136.560.000,00	136.560.000,00	136.560.000,00	136.560.000,00
	1	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	24 Laporan	136.560.000,00	136.560.000,00	136.560.000,00	136.560.000,00
	1	02	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Prosentase ketersediaan dokumen administrasi pendapatan daerah kewenangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	10.200.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.200.000,00
	1	02	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah							
							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	48 Dokumen	10.200.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.200.000,00
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100 %	100 %	151.521.000,00	126.600.000,00	126.600.000,00	130.000.000,00

	1	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70 Paket	0 Paket	24.921.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2 Dokumen	54.600.000,00	54.600.000,00	54.600.000,00	54.600.000,00
	1	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	124 Orang	124 Orang	72.000.000,00	72.000.000,00	20.400.000,00	75.400.000,00
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	664.318.092,00	656.764.692,00	656.764.692,00	628.875.900,00
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	25.482.381,00	25.482.381,00	25.482.381,00	36.117.500,00
	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	57.659.521,00	67.350.721,00	130.764.417,00	19.781.000,00
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	77.584.090,00	63.184.090,00	80.439.090,00	77.624.900,00
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	63.520.100,00	63.355.500,00	63.355.500,00	57.336.000,00
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	440.072.000,00	437.392.000,00	276.340.000,00	438.016.500,00
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	100 %	100 %	506.416.600,00	521.236.200,00	521.236.200,00	316.323.000,00

	1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Unit	138 Unit	335.707.600,00	335.707.600,00	639.557.740,00	144.723.000,00
	1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	26 Unit	19 Unit	170.709.000,00	185.528.600,00	647.784.868,00	171.600.000,00
	1	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	0,00	0,00	200.481.250,00	0,00
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	100 %	100 %	328.358.659,00	427.774.007,00	427.774.007,00	361.415.500,00
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	269.468.659,00	368.884.007,00	368.884.007,00	296.415.500,00
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	13 Laporan	58.890.000,00	58.890.000,00	58.890.000,00	65.000.000,00
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100 % 80 %	80 %	513.119.700,00	422.288.740,00	422.288.740,00	377.062.900,00
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	0 Unit	24.514.000,00	0,00	0,00	27.123.000,00

	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	71 Unit	59 Unit	241.684.700,00	311.081.500,00	306.331.200,00	241.841.500,00
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	78 Unit	51.180.000,00	51.180.000,00	51.180.000,00	51.180.000,00
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	195.741.000,00	60.027.240,00	357.356.160,12	56.918.400,00
2	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Hasil Survey IKM Prosentase pemenuhan UKP dan UKM	75 81 % nilai	81 75 nilai %	78.105.916.121,00	68.658.672.771,90	68.429.871.073,90	81.499.264.851,00
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Alat Kesehatan Fasilitas Kesehatan sesuai standar Persentase Prasarana Fasilitas Kesehatan sesuai standar Persentase Sarana Fasilitas Kesehatan sesuai standar	68 % 84 % 89 %	68 % 84 % 89 %	29.315.147.655,00	20.131.260.816,00	20.131.260.816,00	28.302.984.200,00
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas							
							Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	6 Unit	9 Unit	5.500.000.000,00	5.354.706.000,00	5.354.706.000,00	5.354.706.000,00
	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya							
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	0 Unit	8.476.994.537,00	530.536.000,00	0,00	7.651.679.320,00
	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas							

							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	7 Unit	16 Unit	6.199.977.781,00	4.348.521.460,00	4.268.553.798,00	6.200.000.000,00
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan							
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	19 Unit	27 Unit	3.191.583.300,00	1.582.703.400,00	2.097.879.400,00	2.300.000.000,00
	1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi							
							Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	10 Unit	49 Unit	206.449.500,00	60.144.800,00	60.144.800,00	206.449.500,00
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan							
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	48 Unit	398 Unit	133.764.800,00	249.071.800,00	205.671.800,00	133.765.000,00
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan							
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	25 Paket	24 Paket	5.442.428.700,00	7.841.628.456,00	8.566.422.300,00	6.292.433.880,00
	1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga							
							Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	-	600 Keluarga	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00
	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan							
							Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	288 Paket	288 Paket	163.949.037,00	163.948.900,00	144.148.900,00	163.950.500,00

	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase FKTP yang terakreditasi Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standar Persentase kunjungan /visit rate Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 % 51 % 72 % 76 % 80 % 81 % 83 % 87,50 % 89 % 90,50 %	100 % 51 % 72 % 76 % 80 % 81 % 83 % 87,50 % 89 % 90,50 %	48.165.768.466,00	47.917.411.955,90	47.917.411.955,90	52.571.280.651,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							

							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6513 Orang	4961 Orang	59.500.000,00	59.500.000,00	32.940.000,00	59.500.000,00
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin							
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6217 Orang	4961 Orang	20.710.000,00	157.712.000,00	145.432.000,00	20.710.000,00
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir							
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5921 Orang	4901 Orang	40.500.000,00	40.500.000,00	29.140.000,00	40.500.000,00
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita							
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30545 Orang	27821 Orang	67.830.000,00	67.830.000,00	56.070.000,00	67.830.000,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	59357 Orang	64980 Orang	75.500.000,00	75.500.000,00	39.620.000,00	75.500.000,00
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif							
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	299.279 Orang	327695 Orang	289.994.320,00	264.999.400,00	124.319.400,00	310.000.000,00
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut							
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	137911 Orang	108763 Orang	842.199.400,00	80.539.400,00	39.979.400,00	1.060.000.000,00
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi							
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35075 Orang	114281 Orang	26.719.560,00	26.719.560,00	13.039.560,00	26.720.000,00
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus							
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7320 Orang	10017 Orang	46.366.200,00	46.366.200,00	26.206.200,00	46.375.700,00

	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	920 Orang	973 Orang	42.398.455,00	42.398.455,00	42.398.455,00	42.398.720,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1920 Orang	4980 Orang	287.289.100,00	188.348.400,00	83.910.800,00	187.289.100,00
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV							
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6437 Orang	6984 Orang	0,00	98.940.000,00	47.100.000,00	100.000.000,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen	243.775.000,00	238.775.000,00	477.695.000,00	243.775.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	79.299.600,00	112.282.200,00	103.362.200,00	112.282.200,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	384.175.300,00	188.385.000,00	121.725.000,00	138.390.500,00
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5 dokumen Dokumen	6 Dokumen	41.209.500,00	386.311.500,00	370.631.500,00	386.311.900,00
	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	13.290.000,00	50.000.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	24 Dokumen	2 Dokumen	189.432.400,00	284.409.500,00	208.688.200,00	284.232.400,00
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA							
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	2 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	23.357.150.500,00	24.096.350.200,00	24.082.820.000,00	24.096.350.500,00
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional							
							Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	24 Paket	24 Paket	1.830.000,00	117.657.000,00	117.657.000,00	117.657.000,00
	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat							
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	9 Dokumen	9 Dokumen	274.999.800,00	225.005.800,00	153.527.800,00	274.999.800,00
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya							
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5 Dokumen	5 Dokumen	1.345.409.726,00	1.484.087.735,17	1.373.381.855,17	1.436.107.726,00
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)							
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	24 Laporan	2 Laporan	15.422.500,00	15.422.500,00	9.375.000,00	15.590.000,00
	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah							

							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	24 Dokumen	12 Dokumen	312.009.200,00	312.009.200,00	267.409.200,00	312.009.200,00
	1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)							
							Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	1 Unit	183.168.127,00	183.168.127,00	163.733.127,00	183.168.127,00
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria							
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1179 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	1 Dokumen	0,00	442.450.000,00	442.450.000,00	442.450.000,00
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi dalam aplikasi satu data kesehatan	80 %	80 %	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	175.000.000,00	175.000.000,00	168.080.000,00	175.000.000,00
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RS rujukan terakreditasi	66 %	66 %	450.000.000,00	435.000.000,00	435.000.000,00	450.000.000,00
	1	02	02	2.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
							Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	24 Unit	5 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan							

							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	30 Unit	30 Unit	300.000.000,00	285.000.000,00	149.617.600,00	300.000.000,00
3	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	80 %	80 %	2.754.059.980,00	3.510.361.880,00	3.375.697.230,00	3.510.424.980,00
	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Rasio dokter per satuan penduduk	0,21 Nilai	0,21 Nilai	23.040.000,00	23.040.000,00	23.040.000,00	13.075.000,00
	1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	12 Dokumen	4 Dokumen	23.040.000,00	23.040.000,00	17.280.000,00	13.075.000,00
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	79 %	79 %	2.585.611.980,00	2.624.514.980,00	2.624.514.980,00	2.624.514.980,00
	1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	69.000.000,00	69.000.000,00	40.112.000,00	69.000.000,00
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar							
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1000 Orang	200 Orang	2.474.503.980,00	2.474.503.980,00	2.434.313.330,00	2.474.503.980,00
	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokumen	4 Dokumen	42.108.000,00	81.011.000,00	77.771.000,00	81.011.000,00

	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Kesehatan yang memenuhi kompetensi	77 %	77 %	145.408.000,00	862.806.900,00	862.806.900,00	872.835.000,00
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	150 Orang	60 Orang	145.408.000,00	862.806.900,00	806.220.900,00	872.835.000,00
4	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase penyediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	80 %	80 %	535.844.000,00	416.769.000,00	407.409.000,00	416.769.000,00
	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) dibina	78 %	78 %	88.730.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	30 Dokumen	10 Dokumen	88.730.000,00	25.000.000,00	18.920.000,00	25.000.000,00
	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase ijin produksi IRTP yang dilakukan pengawasan	79 %	79 %	253.600.000,00	272.369.000,00	272.369.000,00	272.369.000,00

	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	150 Dokumen	225 Dokumen	253.600.000,00	272.369.000,00	269.089.000,00	272.369.000,00
	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase produk IRTP yang diperiksa	79 %	79 %	193.514.000,00	119.400.000,00	119.400.000,00	119.400.000,00
	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan							
							Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	90 Unit	48 Unit	193.514.000,00	119.400.000,00	119.400.000,00	119.400.000,00
5	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM berstrata PURI	80 %	80 %	2.867.898.131,00	1.949.299.100,00	2.190.312.600,00	2.929.574.131,00
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan advokasi dan pemberdayaan masyarakat	80 %	80 %	1.231.668.379,00	1.226.667.900,00	1.226.667.900,00	1.231.668.379,00
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	5 Dokumen	4 Dokumen	1.231.668.379,00	1.226.667.900,00	1.500.081.900,00	1.231.668.379,00

	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya media promosi kesehatan	80 %	80 %	412.749.752,00	356.044.300,00	356.044.300,00	412.749.752,00
	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat							
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	4 Dokumen	2 Dokumen	412.749.752,00	356.044.300,00	385.253.800,00	412.749.752,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang dibina	80 %	80 %	1.223.480.000,00	366.586.900,00	366.586.900,00	1.285.156.000,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	128.380.900,00	66.770.900,00	71.676.000,00
						RSUD dr. Darsono				124.588.800.000,00	117.788.800.000,00	118.440.966.041,62	0,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				124.588.800.000,00	117.788.800.000,00	118.440.966.041,62	0,00
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				124.588.800.000,00	117.788.800.000,00	118.440.966.041,62	0,00
6	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	120.000.000.000,00	110.000.000.000,00	108.488.166.041,62	0,00
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	120.000.000.000,00	110.000.000.000,00	110.000.000.000,00	0,00

	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	120.000.000.000,00	110.000.000.000,00	108.488.166.041,62	0,00
7	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase pemenuhan UKP dan UKM Nilai Hasil Survey IKM	75 81 % nilai	75 81 % nilai	2.800.000.000,00	6.000.000.000,00	8.164.000.000,00	0,00
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	2.800.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan							
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3 Unit	13 Unit	2.800.000.000,00	1.385.620.000,00	3.549.620.000,00	0,00
	1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit							
							Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	-	1 Unit	0,00	4.614.380.000,00	4.614.380.000,00	0,00
8	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-	-	1.788.800.000,00	1.788.800.000,00	1.788.800.000,00	0,00

	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	-	1.788.800.000,00	1.788.800.000,00	1.788.800.000,00	0,00
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar							
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	65 Orang	65 Orang	1.788.800.000,00	1.788.800.000,00	1.788.800.000,00	0,00
						Puskesmas Pacitan				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
9	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	80 Nilai	138.913.897.342,00	137.529.037.022,10	144.141.317.686,82	132.298.292.823,00
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Cost Recovery Rate	>40 nilai >40 Nilai	>40 nilai >40 Nilai	41.035.484.094,00	41.035.484.094,80	41.035.484.094,80	37.803.829.804,00
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.290.322.637,00	1.290.322.637,00	1.488.848.540,00	1.208.431.193,00
10	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Hasil Survey IKM Prosentase pemenuhan UKP dan UKM	75 81 % nilai	81 75 nilai %	78.105.916.121,00	68.658.672.771,90	68.429.871.073,90	81.499.264.851,00

	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase FKTP yang terakreditasi Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standar Persentase kunjungan /visit rate Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 % 51 % 72 % 76 % 80 % 81 % 83 % 87,50 % 89 % 90,50 %	100 % 51 % 72 % 76 % 80 % 81 % 83 % 87,50 % 89 % 90,50 %	48.165.768.466,00	47.917.411.955,90	47.917.411.955,90	52.571.280.651,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							

							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	279 Orang	227 Orang	67.200.000,00	48.800.000,00	48.800.000,00	67.200.000,00
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin							
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	261 Orang	0 Orang	48.240.000,00	0,00	0,00	48.240.000,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2491 Orang	2625 Orang	19.680.000,00	34.560.000,00	34.560.000,00	19.680.000,00
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	39 Orang	0,00	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	112 Orang	205 Orang	3.600.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	3.600.000,00
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV							
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	265 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	216.106.000,00	211.360.000,00	211.360.000,00	216.106.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	5.940.000,00	5.940.000,00	5.940.000,00

	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	14.640.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	14.640.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	41.820.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	41.820.000,00
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	100 Orang	0,00	11.520.000,00	11.520.000,00	11.520.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	143.880.000,00	107.400.000,00	107.400.000,00	143.880.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas							
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	309.520.000,00	244.144.041,00	244.144.041,00	309.520.000,00
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya							
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	5.640.000,00	4.680.000,00	4.680.000,00	5.640.000,00
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)							
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0 Laporan	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis							
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang	0 Orang	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)							

							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	0 Orang	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	33.600.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	33.600.000,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	52.920.000,00	900.000,00	900.000,00	52.920.000,00
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	27.840.000,00	27.840.000,00	27.840.000,00
11	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM berstrata PURI	80 %	80 %	2.867.898.131,00	1.949.299.100,00	2.190.312.600,00	2.929.574.131,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang dibina	80 %	80 %	1.223.480.000,00	366.586.900,00	366.586.900,00	1.285.156.000,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	52.800.000,00	8.570.000,00	8.570.000,00	52.800.000,00
						Puskesmas Tanjungsari				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00

	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
12	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	80 Nilai	138.913.897.342,00	137.529.037.022,10	144.141.317.686,82	132.298.292.823,00
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Cost Recovery Rate	>40 nilai >40 Nilai	>40 nilai >40 Nilai	41.035.484.094,00	41.035.484.094,80	41.035.484.094,80	37.803.829.804,00
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.218.816.548,00	2.218.816.548,00	2.484.606.459,00	2.142.500.000,00
13	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Hasil Survey IKM Prosentase pemenuhan UKP dan UKM	75 81 % nilai	81 75 nilai %	78.105.916.121,00	68.658.672.771,90	68.429.871.073,90	81.499.264.851,00

	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase FKTP yang terakreditasi Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standar Persentase kunjungan /visit rate Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 % 51 % 72 % 76 % 80 % 81 % 83 % 87,50 % 89 % 90,50 %	100 % 51 % 72 % 76 % 80 % 81 % 83 % 87,50 % 89 % 90,50 %	48.165.768.466,00	47.917.411.955,90	47.917.411.955,90	52.571.280.651,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							

							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	611 Orang	531 Orang	38.400.000,00	61.800.000,00	61.800.000,00	38.400.000,00
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin							
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	582 Orang	0 Orang	45.300.000,00	0,00	0,00	45.300.000,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5237 Orang	5513 Orang	48.000.000,00	63.960.000,00	63.960.000,00	48.000.000,00
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	81 Orang	0,00	11.520.000,00	11.520.000,00	11.520.000,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	64 Orang	427 Orang	14.160.000,00	27.600.000,00	27.600.000,00	14.160.000,00
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV							
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1276 Orang	0 Orang	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	359.308.000,00	413.980.000,00	413.980.000,00	359.308.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	5.220.000,00	5.220.000,00	5.220.000,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	24.720.000,00	28.200.000,00	28.200.000,00	24.720.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	54.960.000,00	74.640.000,00	74.640.000,00	54.960.000,00
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	100 Orang	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	198.720.000,00	146.940.000,00	146.940.000,00	198.720.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas							
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	440.982.000,00	349.061.527,00	349.061.527,00	440.982.000,00
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya							
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	16.680.000,00	14.426.000,00	14.426.000,00	16.680.000,00
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)							
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0 Laporan	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis							
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11 Orang	0 Orang	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)							

							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0 Orang	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	21.840.000,00	26.100.000,00	26.100.000,00	21.840.000,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	124.320.000,00	900.000,00	900.000,00	124.320.000,00
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	50.400.000,00	50.400.000,00	50.400.000,00
14	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM berstrata PURI	80 %	80 %	2.867.898.131,00	1.949.299.100,00	2.190.312.600,00	2.929.574.131,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang dibina	80 %	80 %	1.223.480.000,00	366.586.900,00	366.586.900,00	1.285.156.000,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	114.840.000,00	9.540.000,00	9.540.000,00	114.840.000,00

						Puskesmas Kebonagung				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
15	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	80 Nilai	138.913.897.342,00	137.529.037.022,10	144.141.317.686,82	132.298.292.823,00
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Cost Recovery Rate	>40 nilai >40 Nilai	>40 nilai >40 Nilai	41.035.484.094,00	41.035.484.094,80	41.035.484.094,80	37.803.829.804,00
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.547.151.843,00	1.547.151.843,00	1.796.980.269,00	1.508.657.676,00
16	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase pemenuhan UKP dan UKM Nilai Hasil Survey IKM	81 75 nilai %	75 81 % nilai	78.105.916.121,00	68.658.672.771,90	68.429.871.073,90	81.499.264.851,00

	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase FKTP yang terakreditasi Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standar Persentase kunjungan /visit rate Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 % 51 % 72 % 76 % 80 % 81 % 83 % 87,50 % 89 % 90,50 %	100 % 51 % 72 % 76 % 80 % 81 % 83 % 87,50 % 89 % 90,50 %	48.165.768.466,00	47.917.411.955,90	47.917.411.955,90	52.571.280.651,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							

							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	265 Orang	214 Orang	17.280.000,00	20.160.000,00	20.160.000,00	17.280.000,00
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin							
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	239 Orang	0 Orang	100.800.000,00	0,00	0,00	100.800.000,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2665 Orang	2803 Orang	19.200.000,00	26.160.000,00	26.160.000,00	19.200.000,00
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	41 Orang	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	17.280.000,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	41 Orang	216 Orang	8.640.000,00	12.480.000,00	12.480.000,00	8.640.000,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	164.948.000,00	257.460.000,00	257.460.000,00	164.948.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	21.600.000,00	25.800.000,00	25.800.000,00	21.600.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	47.880.000,00	26.520.000,00	26.520.000,00	47.880.000,00
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							

							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	100 Orang	0,00	12.240.000,00	12.240.000,00	20.880.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	123.840.000,00	97.260.000,00	97.260.000,00	123.840.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas							
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	298.680.000,00	252.643.845,00	252.643.845,00	298.680.000,00
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)							
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0 Laporan	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis							
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	7 Orang	0 Orang	5.760.000,00	0,00	0,00	5.760.000,00
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)							
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0 Orang	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	31.200.000,00	60.480.000,00	60.480.000,00	31.200.000,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	63.000.000,00	720.000,00	720.000,00	63.000.000,00
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	12.240.000,00	12.240.000,00	12.240.000,00
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi							

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	22.320.000,00	22.320.000,00	22.320.000,00
17	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM berstrata PURI	80 %	80 %	2.867.898.131,00	1.949.299.100,00	2.190.312.600,00	2.929.574.131,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang dibina	80 %	80 %	1.223.480.000,00	366.586.900,00	366.586.900,00	1.285.156.000,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	38.820.000,00	11.638.000,00	11.638.000,00	38.820.000,00
						Puskesmas Ketrowonojoyo				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
18	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	80 Nilai	138.913.897.342,00	137.529.037.022,10	144.141.317.686,82	132.298.292.823,00
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Cost Recovery Rate	>40 nilai >40 Nilai	>40 nilai >40 Nilai	41.035.484.094,00	41.035.484.094,80	41.035.484.094,80	37.803.829.804,00
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.031.926.441,00	1.031.926.441,00	1.127.811.068,52	978.162.198,00
19	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Hasil Survey IKM Prosentase pemenuhan UKP dan UKM	75 81 % nilai	81 75 nilai %	78.105.916.121,00	68.658.672.771,90	68.429.871.073,90	81.499.264.851,00

	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase FKTP yang terakreditasi Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standar Persentase kunjungan /visit rate Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 % 51 % 72 % 76 % 80 % 81 % 83 % 87,50 % 89 % 90,50 %	100 % 51 % 72 % 76 % 80 % 81 % 83 % 87,50 % 89 % 90,50 %	48.165.768.466,00	47.917.411.955,90	47.917.411.955,90	52.571.280.651,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							

							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	246 Orang	197 Orang	15.680.000,00	20.200.000,00	20.200.000,00	15.680.000,00
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin							
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	223 Orang	0 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2026 Orang	2161 Orang	36.720.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00	36.720.000,00
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	31 Orang	0,00	12.240.000,00	12.240.000,00	12.240.000,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	28 Orang	167 Orang	7.200.000,00	8.520.000,00	8.520.000,00	7.200.000,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	178.260.000,00	237.120.000,00	237.120.000,00	178.260.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	4.320.000,00	4.320.000,00	4.320.000,00

	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	22.480.000,00	19.680.000,00	19.680.000,00	22.480.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	29.280.000,00	11.880.000,00	11.880.000,00	29.280.000,00
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	100 Orang	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	75.480.000,00	113.040.000,00	113.040.000,00	75.480.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas							
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	249.955.000,00	235.989.059,00	235.989.059,00	249.955.000,00
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)							
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0 Laporan	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis							
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3 Orang	0 Orang	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)							
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0 Orang	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00

	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	37.800.000,00	6.440.000,00	6.440.000,00	37.800.000,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	67.560.000,00	720.000,00	720.000,00	67.560.000,00
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	26.880.000,00	26.880.000,00	26.880.000,00
20	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM berstrata PURI	80 %	80 %	2.867.898.131,00	1.949.299.100,00	2.190.312.600,00	2.929.574.131,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang dibina	80 %	80 %	1.223.480.000,00	366.586.900,00	366.586.900,00	1.285.156.000,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	59.120.000,00	7.560.000,00	7.560.000,00	59.120.000,00
						Puskesmas Arjosari				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00

21	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	80 Nilai	138.913.897.342,00	137.529.037.022,10	144.141.317.686,82	132.298.292.823,00
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Cost Recovery Rate	>40 nilai >40 Nilai	>40 nilai >40 Nilai	41.035.484.094,00	41.035.484.094,80	41.035.484.094,80	37.803.829.804,00
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.582.110.875,00	2.582.110.875,00	3.253.533.712,39	2.382.061.360,00
22	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Hasil Survey IKM Prosentase pemenuhan UKP dan UKM	75 81 % nilai	81 75 nilai %	78.105.916.121,00	68.658.672.771,90	68.429.871.073,90	81.499.264.851,00

	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase FKTP yang terakreditasi Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standar Persentase kunjungan /visit rate Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 % 51 % 72 % 76 % 80 % 81 % 83 % 87,50 % 89 % 90,50 %	100 % 51 % 72 % 76 % 80 % 81 % 83 % 87,50 % 89 % 90,50 %	48.165.768.466,00	47.917.411.955,90	47.917.411.955,90	52.571.280.651,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							

							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	354 Orang	296 Orang	53.760.000,00	88.800.000,00	88.800.000,00	53.760.000,00
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin							
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	325 Orang	0 Orang	25.440.000,00	0,00	0,00	25.440.000,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3215 Orang	3388 Orang	41.280.000,00	72.120.000,00	72.120.000,00	41.280.000,00
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	50 Orang	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	47 Orang	265 Orang	7.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	7.200.000,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	356.360.000,00	364.236.000,00	364.236.000,00	356.360.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	27.600.000,00	37.200.000,00	37.200.000,00	27.600.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	49.380.000,00	40.620.000,00	40.620.000,00	49.380.000,00
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							

							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	100 Orang	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	117.600.000,00	101.980.000,00	101.980.000,00	117.600.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas							
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	358.269.000,00	312.280.260,00	312.280.260,00	358.269.000,00
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)							
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0 Laporan	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis							
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8 Orang	0 Orang	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)							
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0 Orang	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	12.960.000,00	11.040.000,00	11.040.000,00	12.960.000,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	94.140.000,00	360.000,00	360.000,00	94.140.000,00
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	9.480.000,00	9.480.000,00	9.480.000,00
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi							

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	38.520.000,00	38.520.000,00	38.520.000,00
23	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM berstrata PURI	80 %	80 %	2.867.898.131,00	1.949.299.100,00	2.190.312.600,00	2.929.574.131,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang dibina	80 %	80 %	1.223.480.000,00	366.586.900,00	366.586.900,00	1.285.156.000,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	47.400.000,00	9.678.000,00	9.678.000,00	47.400.000,00
						Puskesmas Kedungbendo				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
24	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	80 Nilai	138.913.897.342,00	137.529.037.022,10	144.141.317.686,82	132.298.292.823,00
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Cost Recovery Rate	>40 nilai >40 Nilai	>40 nilai >40 Nilai	41.035.484.094,00	41.035.484.094,80	41.035.484.094,80	37.803.829.804,00
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	509.782.314,00	509.782.314,00	537.731.820,00	507.300.000,00
25	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Hasil Survey IKM Prosentase pemenuhan UKP dan UKM	75 81 % nilai	81 75 nilai %	78.105.916.121,00	68.658.672.771,90	68.429.871.073,90	81.499.264.851,00

	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase FKTP yang terakreditasi Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standar Persentase kunjungan /visit rate Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 % 51 % 72 % 76 % 80 % 81 % 83 % 87,50 % 89 % 90,50 %	100 % 51 % 72 % 76 % 80 % 81 % 83 % 87,50 % 89 % 90,50 %	48.165.768.466,00	47.917.411.955,90	47.917.411.955,90	52.571.280.651,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							

							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	107 Orang	70 Orang	31.200.000,00	24.400.000,00	24.400.000,00	31.200.000,00
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin							
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	105 Orang	0 Orang	36.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	975 Orang	1038 Orang	13.920.000,00	34.800.000,00	34.800.000,00	13.920.000,00
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	15 Orang	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	11 Orang	81 Orang	7.200.000,00	9.240.000,00	9.240.000,00	7.200.000,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	108.572.000,00	132.800.000,00	132.800.000,00	108.572.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	32.880.000,00	29.760.000,00	29.760.000,00	32.880.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	19.020.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	19.020.000,00
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	100 Orang	0,00	8.640.000,00	8.640.000,00	8.640.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	62.040.000,00	114.320.000,00	114.320.000,00	62.040.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas							
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	198.226.000,00	202.125.517,00	216.125.517,00	198.226.000,00
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)							
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis							
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6 Orang	6 Orang	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)							
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0 Orang	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	18.000.000,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							

							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	51.000.000,00	360.000,00	360.000,00	51.000.000,00
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	10.080.000,00	10.080.000,00	10.080.000,00
26	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM berstrata PURI	80 %	80 %	2.867.898.131,00	1.949.299.100,00	2.190.312.600,00	2.929.574.131,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang dibina	80 %	80 %	1.223.480.000,00	366.586.900,00	366.586.900,00	1.285.156.000,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	39.000.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	39.000.000,00
						Puskesmas Punung				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
27	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	80 Nilai	138.913.897.342,00	137.529.037.022,10	144.141.317.686,82	132.298.292.823,00
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Cost Recovery Rate	>40 nilai >40 Nilai	>40 nilai >40 Nilai	41.035.484.094,00	41.035.484.094,80	41.035.484.094,80	37.803.829.804,00

	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.552.258.309,00	1.552.258.309,00	2.321.385.049,00	1.461.700.000,00
28	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Hasil Survey IKM Prosentase pemenuhan UKP dan UKM	75 81 % nilai	81 75 nilai %	78.105.916.121,00	68.658.672.771,90	68.429.871.073,90	81.499.264.851,00

	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase FKTP yang terakreditasi Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standar Persentase kunjungan /visit rate Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 % 51 % 72 % 76 % 80 % 81 % 83 % 87,50 % 89 % 90,50 %	100 % 51 % 72 % 76 % 80 % 81 % 83 % 87,50 % 89 % 90,50 %	48.165.768.466,00	47.917.411.955,90	47.917.411.955,90	52.571.280.651,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							

							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	239 Orang	191 Orang	40.320.000,00	52.200.000,00	52.200.000,00	40.320.000,00
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin							
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	244 Orang	0 Orang	48.600.000,00	0,00	0,00	48.600.000,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2302 Orang	2394 Orang	31.200.000,00	58.860.000,00	58.860.000,00	31.200.000,00
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	36 Orang	0,00	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	34 Orang	34 Orang	11.760.000,00	9.720.000,00	9.720.000,00	11.760.000,00
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV							
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	138 Orang	0 Orang	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	185.240.000,00	222.222.000,00	222.222.000,00	185.240.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	4.860.000,00	4.860.000,00	4.860.000,00

	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	14.520.000,00	13.980.000,00	13.980.000,00	14.520.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	31.860.000,00	26.760.000,00	26.760.000,00	31.860.000,00
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	100 Orang	0,00	17.760.000,00	17.760.000,00	17.760.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	68.040.000,00	100.980.000,00	100.980.000,00	68.040.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas							
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	274.685.307,00	240.524.115,00	240.524.115,00	274.685.307,00
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)							
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0 Laporan	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis							
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10 Orang	0 Orang	30.240.000,00	0,00	0,00	30.240.000,00
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)							
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0 Orang	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00

	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	56.160.000,00	8.280.000,00	8.280.000,00	56.160.000,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	49.280.000,00	360.000,00	360.000,00	49.280.000,00
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	8.880.000,00	8.880.000,00	8.880.000,00
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	12.360.000,00	12.360.000,00	12.360.000,00
29	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM berstrata PURI	80 %	80 %	2.867.898.131,00	1.949.299.100,00	2.190.312.600,00	2.929.574.131,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang dibina	80 %	80 %	1.223.480.000,00	366.586.900,00	366.586.900,00	1.285.156.000,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	61.620.000,00	16.520.000,00	16.520.000,00	61.620.000,00
						Puskesmas Gondosari				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00

	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
30	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	80 Nilai	138.913.897.342,00	137.529.037.022,10	144.141.317.686,82	132.298.292.823,00
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Cost Recovery Rate	>40 nilai >40 Nilai	>40 nilai >40 Nilai	41.035.484.094,00	41.035.484.094,80	41.035.484.094,80	37.803.829.804,00
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.475.017.141,00	1.475.017.140,53	1.348.080.027,73	1.189.250.143,00
31	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase pemenuhan UKP dan UKM Nilai Hasil Survey IKM	81 75 nilai %	75 81 % nilai	78.105.916.121,00	68.658.672.771,90	68.429.871.073,90	81.499.264.851,00

	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase FKTP yang terakreditasi Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standar Persentase kunjungan /visit rate Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 % 51 % 72 % 76 % 80 % 81 % 83 % 87,50 % 89 % 90,50 %	100 % 51 % 72 % 76 % 80 % 81 % 83 % 87,50 % 89 % 90,50 %	48.165.768.466,00	47.917.411.955,90	47.917.411.955,90	52.571.280.651,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							

							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	114 Orang	76 Orang	35.200.000,00	36.960.000,00	36.960.000,00	35.200.000,00
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin							
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127 Orang	0 Orang	34.560.000,00	0,00	0,00	34.560.000,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1378 Orang	1451 Orang	12.960.000,00	22.560.000,00	22.560.000,00	12.960.000,00
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	21 Orang	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	37 Orang	37 Orang	12.000.000,00	12.120.000,00	12.120.000,00	12.000.000,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	144.628.000,00	102.888.000,00	102.888.000,00	144.628.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	13.320.000,00	22.400.000,00	22.400.000,00	13.320.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	39.000.000,00	23.520.000,00	23.520.000,00	39.000.000,00

	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	100 Orang	0,00	5.760.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	73.960.000,00	43.120.000,00	43.120.000,00	73.960.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas							
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	199.200.000,00	190.988.912,00	190.988.912,00	211.450.000,00
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)							
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis							
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10 Orang	10 Orang	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)							
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0 Orang	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	50.400.000,00	8.960.000,00	8.960.000,00	50.400.000,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	34.680.000,00	120.000,00	120.000,00	34.680.000,00
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi							

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	8.520.000,00	8.520.000,00	8.520.000,00
32	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM berstrata PURI	80 %	80 %	2.867.898.131,00	1.949.299.100,00	2.190.312.600,00	2.929.574.131,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang dibina	80 %	80 %	1.223.480.000,00	366.586.900,00	366.586.900,00	1.285.156.000,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	23.100.000,00	8.380.000,00	8.380.000,00	23.100.000,00
						Puskesmas Pringkuku				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
33	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	80 Nilai	138.913.897.342,00	137.529.037.022,10	144.141.317.686,82	132.298.292.823,00
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Cost Recovery Rate	>40 nilai >40 Nilai	>40 nilai >40 Nilai	41.035.484.094,00	41.035.484.094,80	41.035.484.094,80	37.803.829.804,00
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.077.127.983,00	1.077.127.983,00	1.103.470.142,00	1.077.127.983,00
34	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase pemenuhan UKP dan UKM Nilai Hasil Survey IKM	81 75 nilai %	75 81 % nilai	78.105.916.121,00	68.658.672.771,90	68.429.871.073,90	81.499.264.851,00

	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase FKTP yang terakreditasi Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standar Persentase kunjungan /visit rate Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 % 51 % 72 % 76 % 80 % 81 % 83 % 87,50 % 89 % 90,50 %	100 % 51 % 72 % 76 % 80 % 81 % 83 % 87,50 % 89 % 90,50 %	48.165.768.466,00	47.917.411.955,90	47.917.411.955,90	52.571.280.651,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							

							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	215 Orang	170 Orang	10.080.000,00	23.040.000,00	23.040.000,00	10.080.000,00
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin							
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	193 Orang	0 Orang	42.240.000,00	0,00	0,00	42.240.000,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2198 Orang	2320 Orang	15.600.000,00	23.760.000,00	23.760.000,00	15.600.000,00
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	34 Orang	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	48 Orang	178 Orang	4.800.000,00	10.320.000,00	10.320.000,00	4.800.000,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	174.476.000,00	204.720.000,00	204.720.000,00	174.476.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	13.800.000,00	25.320.000,00	25.320.000,00	13.800.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	32.760.000,00	21.132.000,00	21.132.000,00	32.760.000,00

	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	100 Orang	0,00	13.920.000,00	13.920.000,00	13.920.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	102.660.000,00	104.760.000,00	104.760.000,00	102.660.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas							
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	266.020.000,00	230.309.248,00	230.309.248,00	266.020.000,00
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)							
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0 Laporan	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis							
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang	0 Orang	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	30.720.000,00	7.680.000,00	7.680.000,00	30.720.000,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	86.240.000,00	360.000,00	360.000,00	86.240.000,00
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	9.120.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	12.780.000,00	12.780.000,00	12.780.000,00

35	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM berstrata PURI	80 %	80 %	2.867.898.131,00	1.949.299.100,00	2.190.312.600,00	2.929.574.131,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang dibina	80 %	80 %	1.223.480.000,00	366.586.900,00	366.586.900,00	1.285.156.000,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	55.040.000,00	12.720.000,00	12.720.000,00	55.040.000,00
						Puskesmas Candi				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
36	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	80 Nilai	138.913.897.342,00	137.529.037.022,10	144.141.317.686,82	132.298.292.823,00
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Cost Recovery Rate	>40 nilai >40 Nilai	>40 nilai >40 Nilai	41.035.484.094,00	41.035.484.094,80	41.035.484.094,80	37.803.829.804,00
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	700.317.202,00	700.317.201,54	753.240.645,66	656.500.000,00
37	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase pemenuhan UKP dan UKM Nilai Hasil Survey IKM	81 75 nilai %	75 81 % nilai	78.105.916.121,00	68.658.672.771,90	68.429.871.073,90	81.499.264.851,00

	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase FKTP yang terakreditasi Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standar Persentase kunjungan /visit rate Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 % 51 % 72 % 76 % 80 % 81 % 83 % 87,50 % 89 % 90,50 %	100 % 51 % 72 % 76 % 80 % 81 % 83 % 87,50 % 89 % 90,50 %	48.165.768.466,00	47.917.411.955,90	47.917.411.955,90	52.571.280.651,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							

							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	121 Orang	84 Orang	33.600.000,00	37.420.000,00	37.420.000,00	33.600.000,00
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin							
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127 Orang	0 Orang	24.180.000,00	0,00	0,00	24.180.000,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1112 Orang	1178 Orang	25.440.000,00	27.720.000,00	27.720.000,00	25.440.000,00
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	17 Orang	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	140 Orang	93 Orang	5.400.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00	5.400.000,00
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV							
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	93 Orang	0 Orang	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	152.752.000,00	130.560.000,00	130.560.000,00	152.752.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00

	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	19.200.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	19.200.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	27.060.000,00	14.480.000,00	14.480.000,00	27.060.000,00
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	100 Orang	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	78.900.000,00	77.590.000,00	77.590.000,00	78.900.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas							
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	226.774.000,00	198.646.084,00	198.646.084,00	226.774.000,00
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)							
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0 Laporan	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis							
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang	0 Orang	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)							
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0 Orang	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00

	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	34.560.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	34.560.000,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	56.700.000,00	724.000,00	724.000,00	56.700.000,00
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	12.840.000,00	12.840.000,00	12.840.000,00
38	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM berstrata PURI	80 %	80 %	2.867.898.131,00	1.949.299.100,00	2.190.312.600,00	2.929.574.131,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang dibina	80 %	80 %	1.223.480.000,00	366.586.900,00	366.586.900,00	1.285.156.000,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	43.200.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00	43.200.000,00

						Puskesmas Donorojo				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
39	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	80 Nilai	138.913.897.342,00	137.529.037.022,10	144.141.317.686,82	132.298.292.823,00
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Cost Recovery Rate	>40 nilai >40 Nilai	>40 nilai >40 Nilai	41.035.484.094,00	41.035.484.094,80	41.035.484.094,80	37.803.829.804,00
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.397.575.433,00	1.397.575.433,00	2.036.190.323,59	1.350.655.000,00
40	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Hasil Survey IKM Prosentase pemenuhan UKP dan UKM	81 75 nilai %	81 75 nilai %	78.105.916.121,00	68.658.672.771,90	68.429.871.073,90	81.499.264.851,00

	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase FKTP yang terakreditasi Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standar Persentase kunjungan /visit rate Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 % 51 % 72 % 76 % 80 % 81 % 83 % 87,50 % 89 % 90,50 %	100 % 51 % 72 % 76 % 80 % 81 % 83 % 87,50 % 89 % 90,50 %	48.165.768.466,00	47.917.411.955,90	47.917.411.955,90	52.571.280.651,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							

							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	234 Orang	186 Orang	17.920.000,00	47.600.000,00	47.600.000,00	17.920.000,00
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin							
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	219 Orang	219 Orang	33.600.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2326 Orang	2447 Orang	16.320.000,00	32.520.000,00	32.520.000,00	16.320.000,00
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	36 Orang	0,00	8.640.000,00	8.640.000,00	8.640.000,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	33 Orang	189 Orang	3.000.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00	3.000.000,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	146.300.000,00	190.350.000,00	190.350.000,00	146.300.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	3.960.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	15.720.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	15.720.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	46.560.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	46.560.000,00
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							

							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	100 Orang	0,00	16.080.000,00	16.080.000,00	16.080.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	76.540.000,00	79.980.000,00	79.980.000,00	76.540.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas							
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	263.380.000,00	239.267.063,00	239.267.063,00	263.380.000,00
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)							
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis							
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4 Orang	4 Orang	4.440.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)							
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0 Orang	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	18.480.000,00	21.840.000,00	21.840.000,00	18.480.000,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	70.880.000,00	360.000,00	360.000,00	70.880.000,00
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	12.120.000,00	12.120.000,00	12.120.000,00

41	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM berstrata PURI	80 %	80 %	2.867.898.131,00	1.949.299.100,00	2.190.312.600,00	2.929.574.131,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang dibina	80 %	80 %	1.223.480.000,00	366.586.900,00	366.586.900,00	1.285.156.000,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	61.620.000,00	13.220.000,00	13.220.000,00	61.620.000,00
						Puskesmas Kalak				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
42	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	80 Nilai	138.913.897.342,00	137.529.037.022,10	144.141.317.686,82	132.298.292.823,00
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Cost Recovery Rate	>40 nilai >40 Nilai	>40 nilai >40 Nilai	41.035.484.094,00	41.035.484.094,80	41.035.484.094,80	37.803.829.804,00
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	848.047.580,00	848.047.580,00	750.371.701,51	790.000.000,00
43	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase pemenuhan UKP dan UKM Nilai Hasil Survey IKM	81 75 nilai %	75 81 % nilai	78.105.916.121,00	68.658.672.771,90	68.429.871.073,90	81.499.264.851,00

	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase FKTP yang terakreditasi Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standar Persentase kunjungan /visit rate Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 % 51 % 72 % 76 % 80 % 81 % 83 % 87,50 % 89 % 90,50 %	100 % 51 % 72 % 76 % 80 % 81 % 83 % 87,50 % 89 % 90,50 %	48.165.768.466,00	47.917.411.955,90	47.917.411.955,90	52.571.280.651,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							

							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	144 Orang	104 Orang	15.600.000,00	62.400.000,00	62.400.000,00	15.600.000,00
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin							
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	136 Orang	136 Orang	25.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1490 Orang	1566 Orang	21.120.000,00	27.960.000,00	27.960.000,00	21.120.000,00
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	23 Orang	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00	9.360.000,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	57 Orang	119 Orang	15.600.000,00	11.520.000,00	11.520.000,00	15.600.000,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	122.636.000,00	164.902.000,00	164.902.000,00	122.636.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	5.040.000,00	5.040.000,00	3.600.000,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.080.000,00	5.220.000,00	5.220.000,00	10.080.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	31.080.000,00	11.520.000,00	11.520.000,00	31.080.000,00

	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	100 Orang	0,00	4.080.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	66.360.000,00	101.460.000,00	101.460.000,00	66.360.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas							
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	206.120.000,00	207.530.211,00	207.530.211,00	206.120.000,00
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)							
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis							
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang	5 Orang	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)							
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0 Orang	360.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	11.100.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	11.100.000,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	62.160.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	62.160.000,00
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	6.720.000,00	6.720.000,00	6.750.000,00
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi							

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00
44	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM berstrata PURI	80 %	80 %	2.867.898.131,00	1.949.299.100,00	2.190.312.600,00	2.929.574.131,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang dibina	80 %	80 %	1.223.480.000,00	366.586.900,00	366.586.900,00	1.285.156.000,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	54.480.000,00	13.740.000,00	13.740.000,00	54.480.000,00
						Puskesmas Ngadirojo				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
45	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	80 Nilai	138.913.897.342,00	137.529.037.022,10	144.141.317.686,82	132.298.292.823,00
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Cost Recovery Rate	>40 nilai >40 Nilai	>40 nilai >40 Nilai	41.035.484.094,00	41.035.484.094,80	41.035.484.094,80	37.803.829.804,00
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.040.183.531,00	3.040.183.531,52	4.526.504.172,93	2.826.205.000,00
46	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Hasil Survey IKM Prosentase pemenuhan UKP dan UKM	75 81 % nilai	81 75 nilai %	78.105.916.121,00	68.658.672.771,90	68.429.871.073,90	81.499.264.851,00

	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase FKTP yang terakreditasi Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standar Persentase kunjungan /visit rate Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 % 51 % 72 % 76 % 80 % 81 % 83 % 87,50 % 89 % 90,50 %	100 % 51 % 72 % 76 % 80 % 81 % 83 % 87,50 % 89 % 90,50 %	48.165.768.466,00	47.917.411.955,90	47.917.411.955,90	52.571.280.651,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							

							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	338 Orang	281 Orang	67.200.000,00	55.440.000,00	55.440.000,00	67.200.000,00
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin							
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	351 Orang	351 Orang	48.960.000,00	0,00	0,00	48.960.000,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3288 Orang	3461 Orang	21.600.000,00	53.280.000,00	53.280.000,00	21.600.000,00
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	51 Orang	0,00	8.640.000,00	8.640.000,00	8.640.000,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	79 Orang	270 Orang	4.320.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	4.320.000,00
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV							
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	340 Orang	340 Orang	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	0 Dokumen	230.267.000,00	391.700.000,00	391.700.000,00	230.267.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	8.820.000,00	8.820.000,00	8.820.000,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	28.800.000,00	21.960.000,00	21.960.000,00	28.800.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 0	0 0	48.360.000,00	27.360.000,00	27.360.000,00	48.360.000,00

	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	100 Orang	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	130.223.000,00	93.240.000,00	93.240.000,00	130.223.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas							
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	359.780.000,00	314.295.601,00	314.295.601,00	359.780.000,00
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)							
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis							
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	17 Orang	17 Orang	2.880.000,00	0,00	0,00	2.880.000,00
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)							
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	340 Orang	340 Orang	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	11.040.000,00	26.640.000,00	26.640.000,00	11.040.000,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	97.080.000,00	579.000,00	579.000,00	97.080.000,00
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	5.880.000,00	5.880.000,00	5.880.000,00
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi							

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	0 0	0,00	38.640.000,00	38.640.000,00	38.640.000,00
47	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM berstrata PURI	80 %	80 %	2.867.898.131,00	1.949.299.100,00	2.190.312.600,00	2.929.574.131,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang dibina	80 %	80 %	1.223.480.000,00	366.586.900,00	366.586.900,00	1.285.156.000,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	73.200.000,00	9.540.000,00	9.540.000,00	73.200.000,00
						Puskesmas Wonokarto				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
48	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	80 Nilai	138.913.897.342,00	137.529.037.022,10	144.141.317.686,82	132.298.292.823,00
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Cost Recovery Rate	>40 nilai >40 Nilai	>40 nilai >40 Nilai	41.035.484.094,00	41.035.484.094,80	41.035.484.094,80	37.803.829.804,00
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	765.810.329,00	765.810.329,00	1.079.204.108,24	737.112.181,00
49	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Hasil Survey IKM Prosentase pemenuhan UKP dan UKM	81 75 nilai %	81 75 nilai %	78.105.916.121,00	68.658.672.771,90	68.429.871.073,90	81.499.264.851,00

	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase FKTP yang terakreditasi Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standar Persentase kunjungan /visit rate Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 % 51 % 72 % 76 % 80 % 81 % 83 % 87,50 % 89 % 90,50 %	100 % 51 % 72 % 76 % 80 % 81 % 83 % 87,50 % 89 % 90,50 %	48.165.768.466,00	47.917.411.955,90	47.917.411.955,90	52.571.280.651,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							

							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	177 Orang	134 Orang	14.880.000,00	32.280.000,00	32.280.000,00	14.880.000,00
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin							
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	169 Orang	169 Orang	29.160.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1610 Orang	1696 Orang	20.880.000,00	29.880.000,00	29.880.000,00	20.880.000,00
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	25 Orang	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	7.200.000,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	114 Orang	130 Orang	4.320.000,00	10.680.000,00	10.680.000,00	4.320.000,00
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV							
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	251 Orang	251 Orang	240.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	134.668.000,00	154.620.000,00	154.620.000,00	134.668.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	18.720.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	18.720.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	40.920.000,00	27.285.000,00	27.285.000,00	40.920.000,00

	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	100 Orang	0,00	11.760.000,00	11.760.000,00	11.760.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	58.320.000,00	71.058.000,00	71.058.000,00	58.320.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas							
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	229.746.756,00	205.218.839,00	205.218.839,00	229.746.756,00
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)							
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	12 Laporan	720.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis							
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang	5 Orang	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)							
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0 Orang	360.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	23.040.000,00	5.580.000,00	5.580.000,00	23.040.000,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	62.640.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	62.640.000,00
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi							

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	14.640.000,00	14.640.000,00	14.640.000,00
50	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM berstrata PURI	80 %	80 %	2.867.898.131,00	1.949.299.100,00	2.190.312.600,00	2.929.574.131,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang dibina	80 %	80 %	1.223.480.000,00	366.586.900,00	366.586.900,00	1.285.156.000,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	64.620.000,00	8.820.000,00	8.820.000,00	64.620.000,00
						Puskesmas Tulakan				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
51	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	80 Nilai	138.913.897.342,00	137.529.037.022,10	144.141.317.686,82	132.298.292.823,00
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Cost Recovery Rate	>40 nilai >40 Nilai	>40 nilai >40 Nilai	41.035.484.094,00	41.035.484.094,80	41.035.484.094,80	37.803.829.804,00
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	4.777.263.319,00	4.777.263.319,00	4.651.075.115,01	4.461.500.000,00
52	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Hasil Survey IKM Prosentase pemenuhan UKP dan UKM	75 81 % nilai	81 75 nilai %	78.105.916.121,00	68.658.672.771,90	68.429.871.073,90	81.499.264.851,00

	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase FKTP yang terakreditasi Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standar Persentase kunjungan /visit rate Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 % 51 % 72 % 76 % 80 % 81 % 83 % 87,50 % 89 % 90,50 %	100 % 51 % 72 % 76 % 80 % 81 % 83 % 87,50 % 89 % 90,50 %	48.165.768.466,00	47.917.411.955,90	47.917.411.955,90	52.571.280.651,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							

							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	671 Orang	576 Orang	26.880.000,00	63.440.000,00	63.440.000,00	26.880.000,00
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin							
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	675 Orang	0 Orang	27.900.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6015 Orang	6331 Orang	44.960.000,00	35.940.000,00	35.940.000,00	44.960.000,00
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	99 Orang	0,00	8.640.000,00	8.640.000,00	8.640.000,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	229 Orang	491 Orang	17.280.000,00	24.120.000,00	24.120.000,00	17.280.000,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	467.947.000,00	434.418.000,00	434.418.000,00	467.947.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	18.600.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00	18.600.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	61.920.000,00	25.440.000,00	25.440.000,00	61.920.000,00
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							

							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	100 Orang	0,00	36.720.000,00	36.720.000,00	36.720.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	188.400.000,00	159.360.000,00	159.360.000,00	188.400.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas							
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	414.614.910,00	335.550.591,73	335.550.591,73	414.614.910,00
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)							
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0 Laporan	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis							
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9 Orang	0 Orang	18.720.000,00	0,00	0,00	18.720.000,00
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)							
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0 Orang	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	23.040.000,00	13.440.000,00	13.440.000,00	23.040.000,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	57.600.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	57.600.000,00
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00	9.360.000,00
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	48.960.000,00	48.960.000,00	48.960.000,00

53	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM berstrata PURI	80 %	80 %	2.867.898.131,00	1.949.299.100,00	2.190.312.600,00	2.929.574.131,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang dibina	80 %	80 %	1.223.480.000,00	366.586.900,00	366.586.900,00	1.285.156.000,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	76.800.000,00	9.540.000,00	9.540.000,00	76.800.000,00
						Puskesmas Bubakan				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
54	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	80 Nilai	138.913.897.342,00	137.529.037.022,10	144.141.317.686,82	132.298.292.823,00
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Cost Recovery Rate	>40 nilai >40 Nilai	>40 nilai >40 Nilai	41.035.484.094,00	41.035.484.094,80	41.035.484.094,80	37.803.829.804,00
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.294.726.895,00	2.294.726.895,49	2.222.987.406,10	2.007.820.000,00
55	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase pemenuhan UKP dan UKM Nilai Hasil Survey IKM	81 75 nilai %	75 81 % nilai	78.105.916.121,00	68.658.672.771,90	68.429.871.073,90	81.499.264.851,00

	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase FKTP yang terakreditasi Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standar Persentase kunjungan /visit rate Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 % 51 % 72 % 76 % 80 % 81 % 83 % 87,50 % 89 % 90,50 %	100 % 51 % 72 % 76 % 80 % 81 % 83 % 87,50 % 89 % 90,50 %	48.165.768.466,00	47.917.411.955,90	47.917.411.955,90	52.571.280.651,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							

							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	393 Orang	332 Orang	22.400.000,00	43.400.000,00	43.400.000,00	22.400.000,00
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin							
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	353 Orang	0 Orang	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2642 Orang	2780 Orang	24.000.000,00	32.280.000,00	32.280.000,00	24.000.000,00
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	41 Orang	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	44 Orang	216 Orang	13.440.000,00	11.760.000,00	11.760.000,00	13.440.000,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	239.552.000,00	236.490.000,00	236.490.000,00	239.552.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	5.220.000,00	5.220.000,00	5.220.000,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	7.520.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	7.520.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	48.360.000,00	23.880.000,00	23.880.000,00	48.360.000,00
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	100 Orang	0,00	15.840.000,00	15.840.000,00	15.840.000,00

	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	108.720.000,00	142.620.000,00	142.620.000,00	108.720.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas							
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	242.420.000,00	249.039.504,00	249.039.504,00	242.420.000,00
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)							
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0 Laporan	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis							
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4 Orang	0 Orang	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)							
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0 Orang	600.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	10.500.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	10.500.000,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	28.200.000,00	540.000,00	540.000,00	28.200.000,00
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	3.480.000,00	3.480.000,00	3.480.000,00
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	40.980.000,00	40.980.000,00	40.980.000,00

56	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM berstrata PURI	80 %	80 %	2.867.898.131,00	1.949.299.100,00	2.190.312.600,00	2.929.574.131,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang dibina	80 %	80 %	1.223.480.000,00	366.586.900,00	366.586.900,00	1.285.156.000,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	35.340.000,00	8.340.000,00	8.340.000,00	35.340.000,00
						Puskesmas Sudimoro				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
57	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	80 Nilai	138.913.897.342,00	137.529.037.022,10	144.141.317.686,82	132.298.292.823,00
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Cost Recovery Rate	>40 nilai >40 Nilai	>40 nilai >40 Nilai	41.035.484.094,00	41.035.484.094,80	41.035.484.094,80	37.803.829.804,00
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.200.565.957,00	1.200.565.957,00	1.428.054.462,34	1.001.534.025,00
58	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase pemenuhan UKP dan UKM Nilai Hasil Survey IKM	75 81 % nilai	75 81 % nilai	78.105.916.121,00	68.658.672.771,90	68.429.871.073,90	81.499.264.851,00

	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase FKTP yang terakreditasi Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standar Persentase kunjungan /visit rate Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 % 51 % 72 % 76 % 80 % 81 % 83 % 87,50 % 89 % 90,50 %	100 % 51 % 72 % 76 % 80 % 81 % 83 % 87,50 % 89 % 90,50 %	48.165.768.466,00	47.917.411.955,90	47.917.411.955,90	52.571.280.651,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							

							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	230 Orang	183 Orang	15.360.000,00	44.400.000,00	44.400.000,00	15.360.000,00
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin							
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	173 Orang	0 Orang	36.240.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2306 Orang	2426 Orang	19.680.000,00	39.600.000,00	39.600.000,00	19.680.000,00
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	36 Orang	0,00	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	40 Orang	189 Orang	2.400.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	2.400.000,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	160.184.000,00	231.690.000,00	231.690.000,00	160.184.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	5.580.000,00	5.580.000,00	5.580.000,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	18.960.000,00	26.040.000,00	26.040.000,00	18.960.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	35.460.000,00	9.430.000,00	9.430.000,00	35.460.000,00
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							

							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	100 Orang	0,00	13.680.000,00	13.680.000,00	13.680.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	106.800.000,00	91.410.000,00	91.410.000,00	106.800.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas							
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	238.045.534,00	234.678.281,00	234.678.281,00	238.045.534,00
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)							
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0 Laporan	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis							
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4 Orang	0 Orang	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)							
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0 Orang	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	0 Dokumen	25.320.000,00	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	60.240.000,00	720.000,00	720.000,00	60.240.000,00
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	4.080.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	18.480.000,00	18.480.000,00	18.480.000,00

59	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM berstrata PURI	80 %	80 %	2.867.898.131,00	1.949.299.100,00	2.190.312.600,00	2.929.574.131,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang dibina	80 %	80 %	1.223.480.000,00	366.586.900,00	366.586.900,00	1.285.156.000,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	25.260.000,00	9.540.000,00	9.540.000,00	25.260.000,00
						Puskesmas Sukorejo				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
60	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	80 Nilai	138.913.897.342,00	137.529.037.022,10	144.141.317.686,82	132.298.292.823,00
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Cost Recovery Rate	>40 nilai >40 Nilai	>40 nilai >40 Nilai	41.035.484.094,00	41.035.484.094,80	41.035.484.094,80	37.803.829.804,00
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	755.625.217,00	755.625.216,85	1.147.127.922,14	662.695.047,00
61	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase pemenuhan UKP dan UKM Nilai Hasil Survey IKM	81 75 nilai %	75 81 % nilai	78.105.916.121,00	68.658.672.771,90	68.429.871.073,90	81.499.264.851,00

	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase FKTP yang terakreditasi Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standar Persentase kunjungan /visit rate Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 % 51 % 72 % 76 % 80 % 81 % 83 % 87,50 % 89 % 90,50 %	100 % 51 % 72 % 76 % 80 % 81 % 83 % 87,50 % 89 % 90,50 %	48.165.768.466,00	47.917.411.955,90	47.917.411.955,90	52.571.280.651,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							

							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 0	125 0	22.400.000,00	32.800.000,00	32.800.000,00	22.400.000,00
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin							
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	173 Orang	0 Orang	13.320.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1159 Orang	1226 Orang	9.600.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	9.600.000,00
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	12 Orang	0,00	5.760.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	13 Orang	97 Orang	9.000.000,00	5.520.000,00	5.520.000,00	9.000.000,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	143.068.000,00	190.058.000,00	190.058.000,00	143.068.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	5.820.000,00	5.820.000,00	5.820.000,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	35.520.000,00	21.120.000,00	21.120.000,00	35.520.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	39.240.000,00	11.040.000,00	11.040.000,00	39.240.000,00
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							

							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	100 Orang	0,00	14.880.000,00	14.880.000,00	14.880.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	70.680.000,00	63.180.000,00	63.180.000,00	70.680.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas							
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	213.060.000,00	198.049.063,00	198.049.063,00	213.060.000,00
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)							
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0 Laporan	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis							
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6 Orang	0 Orang	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)							
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0 Orang	360.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	9.360.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00	9.360.000,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	84.240.000,00	900.000,00	900.000,00	84.240.000,00
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	5.520.000,00	5.520.000,00	5.520.000,00
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi							

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	11.880.000,00	11.880.000,00	11.880.000,00
62	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM berstrata PURI	80 %	80 %	2.867.898.131,00	1.949.299.100,00	2.190.312.600,00	2.929.574.131,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang dibina	80 %	80 %	1.223.480.000,00	366.586.900,00	366.586.900,00	1.285.156.000,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	31.920.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00	31.920.000,00
						Puskesmas Tegalombo				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
63	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	80 Nilai	138.913.897.342,00	137.529.037.022,10	144.141.317.686,82	132.298.292.823,00
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Cost Recovery Rate	>40 nilai >40 Nilai	>40 nilai >40 Nilai	41.035.484.094,00	41.035.484.094,80	41.035.484.094,80	37.803.829.804,00
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.963.060.608,00	2.963.060.608,00	3.353.056.768,00	2.947.176.378,00
64	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase pemenuhan UKP dan UKM Nilai Hasil Survey IKM	75 81 % nilai	75 81 % nilai	78.105.916.121,00	68.658.672.771,90	68.429.871.073,90	81.499.264.851,00

	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase FKTP yang terakreditasi Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standar Persentase kunjungan /visit rate Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 % 51 % 72 % 76 % 80 % 81 % 83 % 87,50 % 89 % 90,50 %	100 % 51 % 72 % 76 % 80 % 81 % 83 % 87,50 % 89 % 90,50 %	48.165.768.466,00	47.917.411.955,90	47.917.411.955,90	52.571.280.651,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	357 Orang	298 Orang	57.120.000,00	47.600.000,00	47.600.000,00	57.120.000,00

	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin							
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	317 Orang	0 Orang	33.960.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3437 Orang	3617 Orang	30.600.000,00	56.280.000,00	56.280.000,00	30.600.000,00
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	53 Orang	0,00	8.520.000,00	8.520.000,00	8.520.000,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	54 Orang	281 Orang	14.400.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	14.400.000,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	0 Dokumen	238.220.000,00	234.390.000,00	234.390.000,00	238.220.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00	2.700.000,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	25.080.000,00	21.960.000,00	21.960.000,00	25.080.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	36.180.000,00	18.960.000,00	18.960.000,00	36.180.000,00
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	100 Orang	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							

							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	131.000.000,00	98.940.000,00	98.940.000,00	131.000.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas							
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	316.887.658,00	277.388.686,00	277.388.686,00	316.887.658,00
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)							
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0 Laporan	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis							
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3 Orang	0 Orang	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)							
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0 Orang	360.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria							
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	60 Orang	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	32.400.000,00	17.660.000,00	17.660.000,00	32.400.000,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	34.680.000,00	900.000,00	900.000,00	34.680.000,00
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	9.120.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	32.400.000,00	32.400.000,00	32.400.000,00

65	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM berstrata PURI	80 %	80 %	2.867.898.131,00	1.949.299.100,00	2.190.312.600,00	2.929.574.131,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang dibina	80 %	80 %	1.223.480.000,00	366.586.900,00	366.586.900,00	1.285.156.000,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	61.380.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	61.380.000,00
						Puskesmas Gemaharjo				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
66	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	80 Nilai	138.913.897.342,00	137.529.037.022,10	144.141.317.686,82	132.298.292.823,00
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Cost Recovery Rate	>40 nilai >40 Nilai	>40 nilai >40 Nilai	41.035.484.094,00	41.035.484.094,80	41.035.484.094,80	37.803.829.804,00
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.613.767.229,00	1.613.767.229,00	2.642.570.536,00	1.580.291.120,00
67	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Hasil Survey IKM Prosentase pemenuhan UKP dan UKM	75 81 % nilai	81 75 nilai %	78.105.916.121,00	68.658.672.771,90	68.429.871.073,90	81.499.264.851,00

	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase FKTP yang terakreditasi Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standar Persentase kunjungan /visit rate Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 % 51 % 72 % 76 % 80 % 81 % 83 % 87,50 % 89 % 90,50 %	100 % 51 % 72 % 76 % 80 % 81 % 83 % 87,50 % 89 % 90,50 %	48.165.768.466,00	47.917.411.955,90	47.917.411.955,90	52.571.280.651,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							

							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	191 Orang	191 Orang	17.920.000,00	29.600.000,00	29.600.000,00	17.920.000,00
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin							
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	179 Orang	0 Orang	9.840.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1864 Orang	1965 Orang	11.040.000,00	24.840.000,00	24.840.000,00	11.040.000,00
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	29 Orang	0,00	5.040.000,00	5.040.000,00	5.040.000,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	32 Orang	151 Orang	12.960.000,00	10.080.000,00	10.080.000,00	12.960.000,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	215.484.000,00	203.092.000,00	203.092.000,00	215.484.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	5.760.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	13.440.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	10.800.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	37.560.000,00	15.720.000,00	15.720.000,00	37.560.000,00

	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	100 Orang	0,00	10.320.000,00	10.320.000,00	10.320.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	68.147.000,00	99.300.000,00	99.300.000,00	64.200.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas							
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	245.248.805,00	230.797.627,00	230.797.627,00	245.248.805,00
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)							
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0 Laporan	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis							
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	0 Orang	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)							
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0 Orang	240.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	21.600.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00	21.600.000,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	42.400.000,00	540.000,00	540.000,00	42.400.000,00
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	20.640.000,00	20.640.000,00	20.640.000,00

68	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM berstrata PURI	80 %	80 %	2.867.898.131,00	1.949.299.100,00	2.190.312.600,00	2.929.574.131,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang dibina	80 %	80 %	1.223.480.000,00	366.586.900,00	366.586.900,00	1.285.156.000,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	82.080.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00	82.080.000,00
						Puskesmas Nawangan				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
69	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	80 Nilai	138.913.897.342,00	137.529.037.022,10	144.141.317.686,82	132.298.292.823,00
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Cost Recovery Rate	>40 nilai >40 Nilai	>40 nilai >40 Nilai	41.035.484.094,00	41.035.484.094,80	41.035.484.094,80	37.803.829.804,00
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.561.334.607,00	2.561.334.607,30	2.383.864.703,35	2.100.000.000,00
70	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Hasil Survey IKM Prosentase pemenuhan UKP dan UKM	75 81 % nilai	81 75 nilai %	78.105.916.121,00	68.658.672.771,90	68.429.871.073,90	81.499.264.851,00

	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase FKTP yang terakreditasi Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standar Persentase kunjungan /visit rate Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 % 51 % 72 % 76 % 80 % 81 % 83 % 87,50 % 89 % 90,50 %	100 % 51 % 72 % 76 % 80 % 81 % 83 % 87,50 % 89 % 90,50 %	48.165.768.466,00	47.917.411.955,90	47.917.411.955,90	52.571.280.651,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							

							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	343 Orang	343 Orang	45.600.000,00	20.600.000,00	20.600.000,00	20.600.000,00
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin							
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	309 Orang	0 Orang	27.540.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2845 Orang	2997 Orang	16.800.000,00	28.560.000,00	28.560.000,00	16.800.000,00
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	44 Orang	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	26 Orang	232 Orang	22.200.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	22.200.000,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	269.132.000,00	268.440.000,00	268.440.000,00	269.132.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	4.620.000,00	4.620.000,00	4.620.000,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	16.920.000,00	16.920.000,00	16.920.000,00	16.920.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	46.200.000,00	18.060.000,00	18.060.000,00	46.200.000,00

	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	100 Orang	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	77.580.000,00	51.360.000,00	51.360.000,00	77.580.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas							
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	282.080.000,00	262.023.407,00	262.023.407,00	282.080.000,00
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)							
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0 Laporan	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis							
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	7 Orang	0 Orang	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)							
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0 Orang	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	11.040.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	11.040.000,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	45.760.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	45.760.000,00
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	4.680.000,00	4.680.000,00	4.320.000,00

	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00
71	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM berstrata PURI	80 %	80 %	2.867.898.131,00	1.949.299.100,00	2.190.312.600,00	2.929.574.131,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang dibina	80 %	80 %	1.223.480.000,00	366.586.900,00	366.586.900,00	1.285.156.000,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	30.600.000,00	8.960.000,00	8.960.000,00	30.600.000,00
						Puskesmas Pakisbaru				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
72	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	80 Nilai	138.913.897.342,00	137.529.037.022,10	144.141.317.686,82	132.298.292.823,00
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Cost Recovery Rate	>40 nilai >40 Nilai	>40 nilai >40 Nilai	41.035.484.094,00	41.035.484.094,80	41.035.484.094,80	37.803.829.804,00
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.774.927.213,00	1.774.927.212,99	2.710.988.404,63	1.470.900.000,00
73	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Hasil Survey IKM Prosentase pemenuhan UKP dan UKM	75 81 % nilai	81 75 nilai %	78.105.916.121,00	68.658.672.771,90	68.429.871.073,90	81.499.264.851,00

	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase FKTP yang terakreditasi Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standar Persentase kunjungan /visit rate Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 % 51 % 72 % 76 % 80 % 81 % 83 % 87,50 % 89 % 90,50 %	100 % 51 % 72 % 76 % 80 % 81 % 83 % 87,50 % 89 % 90,50 %	48.165.768.466,00	47.917.411.955,90	47.917.411.955,90	52.571.280.651,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							

							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	292 Orang	292 Orang	36.480.000,00	29.280.000,00	29.280.000,00	36.480.000,00
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin							
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	274 Orang	0 Orang	13.200.000,00	0,00	0,00	13.200.000,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2286 Orang	2409 Orang	11.520.000,00	28.920.000,00	28.920.000,00	11.520.000,00
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	36 Orang	0,00	10.080.000,00	10.080.000,00	10.080.000,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	20 Orang	189 Orang	7.680.000,00	8.280.000,00	8.280.000,00	7.680.000,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	161.060.000,00	156.680.000,00	156.680.000,00	161.060.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	21.600.000,00	24.400.000,00	24.400.000,00	21.600.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	22.560.000,00	10.440.000,00	10.440.000,00	22.560.000,00
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							

							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	100 Orang	0,00	21.120.000,00	21.120.000,00	21.120.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	99.360.000,00	87.480.000,00	87.480.000,00	99.360.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas							
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	246.540.000,00	246.566.975,00	246.566.975,00	246.540.000,00
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)							
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0 Laporan	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis							
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang	0 Orang	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)							
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0 Orang	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	10.080.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00	10.080.000,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	57.280.000,00	720.000,00	720.000,00	57.280.000,00
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	35.280.000,00	35.280.000,00	35.280.000,00

74	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM berstrata PURI	80 %	80 %	2.867.898.131,00	1.949.299.100,00	2.190.312.600,00	2.929.574.131,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang dibina	80 %	80 %	1.223.480.000,00	366.586.900,00	366.586.900,00	1.285.156.000,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	7.980.000,00	7.980.000,00	21.000.000,00
						Puskesmas Bandar				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
75	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	80 Nilai	138.913.897.342,00	137.529.037.022,10	144.141.317.686,82	132.298.292.823,00
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Cost Recovery Rate	>40 nilai >40 Nilai	>40 nilai >40 Nilai	41.035.484.094,00	41.035.484.094,80	41.035.484.094,80	37.803.829.804,00
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.812.825.364,00	1.812.825.364,41	2.266.851.999,28	1.638.100.500,00
76	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Hasil Survey IKM Prosentase pemenuhan UKP dan UKM	75 81 % nilai	81 75 nilai %	78.105.916.121,00	68.658.672.771,90	68.429.871.073,90	81.499.264.851,00

	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase FKTP yang terakreditasi Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standar Persentase kunjungan /visit rate Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 % 51 % 72 % 76 % 80 % 81 % 83 % 87,50 % 89 % 90,50 %	100 % 51 % 72 % 76 % 80 % 81 % 83 % 87,50 % 89 % 90,50 %	48.165.768.466,00	47.917.411.955,90	47.917.411.955,90	52.571.280.651,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							

							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	204 Orang	204 Orang	25.600.000,00	29.440.000,00	29.440.000,00	25.600.000,00
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin							
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	207 Orang	0 Orang	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2311 Orang	2431 Orang	20.160.000,00	59.160.000,00	59.160.000,00	20.160.000,00
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	36 Orang	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	22 Orang	189 Orang	13.200.000,00	12.360.000,00	12.360.000,00	13.200.000,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	188.696.000,00	195.934.000,00	195.934.000,00	188.696.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	3.780.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000,00	24.680.000,00	24.680.000,00	18.000.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	28.740.000,00	16.440.000,00	16.440.000,00	28.740.000,00
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	100 Orang	0,00	12.720.000,00	12.720.000,00	12.720.000,00

	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	84.600.000,00	89.520.000,00	89.520.000,00	84.600.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas							
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	237.660.000,00	234.680.212,00	234.680.212,00	237.660.000,00
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)							
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0 Laporan	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis							
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4 Orang	0 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)							
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0 Orang	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	18.600.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00	18.600.000,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	66.600.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	66.600.000,00
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
77	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM berstrata PURI	80 %	80 %	2.867.898.131,00	1.949.299.100,00	2.190.312.600,00	2.929.574.131,00

	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang dibina	80 %	80 %	1.223.480.000,00	366.586.900,00	366.586.900,00	1.285.156.000,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	35.160.000,00	7.220.000,00	7.220.000,00	35.160.000,00
						Puskesmas Jeruk				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				223.177.615.574,00	212.064.139.774,00	218.544.607.590,72	220.654.325.785,00
78	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	80 Nilai	138.913.897.342,00	137.529.037.022,10	144.141.317.686,82	132.298.292.823,00
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Cost Recovery Rate	>40 nilai >40 Nilai	>40 nilai >40 Nilai	41.035.484.094,00	41.035.484.094,80	41.035.484.094,80	37.803.829.804,00
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.244.939.519,00	1.244.939.519,17	1.280.158.678,98	1.118.150.000,00
79	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Hasil Survey IKM Prosentase pemenuhan UKP dan UKM	75 81 % nilai	81 75 nilai %	78.105.916.121,00	68.658.672.771,90	68.429.871.073,90	81.499.264.851,00

	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase FKTP yang terakreditasi Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase KLB skala kabupaten yang ditangani sesuai standar Persentase kunjungan /visit rate Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 % 51 % 72 % 76 % 80 % 81 % 83 % 87,50 % 89 % 90,50 %	100 % 51 % 72 % 76 % 80 % 81 % 83 % 87,50 % 89 % 90,50 %	48.165.768.466,00	47.917.411.955,90	47.917.411.955,90	52.571.280.651,00
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							

							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	220 Orang	220 Orang	17.920.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	17.920.000,00
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin							
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	230 Orang	0 Orang	7.620.000,00	0,00	0,00	7.620.000,00
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2179 Orang	2300 Orang	31.680.000,00	60.240.000,00	60.240.000,00	31.680.000,00
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	34 Orang	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00	9.360.000,00
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	30 Orang	178 Orang	9.360.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	9.360.000,00
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	192.944.000,00	170.860.000,00	170.860.000,00	192.944.000,00
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0,00	5.760.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000,00	29.040.000,00	29.040.000,00	18.000.000,00
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	25.080.000,00	15.240.000,00	15.240.000,00	25.080.000,00
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	100 Orang	0,00	11.760.000,00	11.760.000,00	11.760.000,00
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	88.440.000,00	73.140.000,00	73.140.000,00	88.440.000,00
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas							
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	232.686.808,00	223.302.110,00	223.302.110,00	232.686.808,00
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)							
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0 Laporan	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis							
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3 Orang	0 Orang	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	1 Dokumen	77.520.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00	77.520.000,00
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	34.080.000,00	720.000,00	720.000,00	34.080.000,00
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan							

							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	12 Dokumen	0,00	20.760.000,00	20.760.000,00	20.760.000,00
80	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM berstrata PURI	80 %	80 %	2.867.898.131,00	1.949.299.100,00	2.190.312.600,00	2.929.574.131,00
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase UKBM yang dibina	80 %	80 %	1.223.480.000,00	366.586.900,00	366.586.900,00	1.285.156.000,00
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	25.080.000,00	11.180.000,00	11.180.000,00	25.080.000,00
	J U M L A H									**347.766.415.574**	**329.852.939.774**	**336.945.573.632,34**	**220.654.325.785,00**

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PACITAN

dr. DARU MUSTIKOAJI
NIP. 19730628 200604 1 005

BAB V
PENUTUP

Rencana Kinerja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 ini disusun berdasarkan kebutuhan kegiatan dan anggaran di jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan dan berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan kesehatan selama tahun 2025.

Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Perubahan Kabupaten Pacitan merupakan suatu dokumen perencanaan kegiatan yang berisi tujuan, sasaran, indikator kinerja serta target sasaran serta program dan kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2025.

Dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan diharapkan kegiatan–kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Kinerja Perubahan Dinas Kesehatan tahun 2025 dapat dilaksanakan dengan baik sehingga mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat di bidang pelayanan kesehatan

Semoga Rencana Kinerja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 ini dapat dijadikan pedoman bagi pengelola program dalam menyusun pelaksanaan kegiatan sehingga berhasil guna dan berdaya guna serta mencapai sasaran sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2025

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PACITAN

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami masih diberikan kemampuan untuk menyusun Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025.

Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini disusun sebagai implementasi dari tahapan kegiatan tahunan berdasarkan Rencana Strategis lima tahunan. Rencana kerja ini bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman pelaksanaan program serta kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan selama Tahun 2025. Di dalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi kebijakan, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Rencana kerja ini merupakan bentuk komitmen dari seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan dalam mewujudkan tujuan serta sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sebagai perangkat daerah yang menangani urusan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, kami berupaya secara optimal mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, kontribusi, dan partisipasi. Besar harapan kami agar pelaksanaan program dan kegiatan ini dapat berjalan lancar, terealisasi dengan baik, serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pacitan.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan berupa saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak, guna penyempurnaan dan perbaikan di masa mendatang.

Semoga Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

Pacitan, Juli 2025
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN PACITAN

SUPARLAN, S.Sos, ST, MM
Pembina Utama Muda / IV/c
NIP. 19670504 199202 1 004

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang Undang no 25 tahun 2004 dan permendagri no 86 tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan Pengendalian dan evaluasi Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan tahap nyusunan , tahap penyusunan rancangan, dan penetapan renja OPD. Penyusunan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang Definitif.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Yang mengamanatkan untuk menyusun kelembagaan baru paling lambat 6 bulan setelah peraturan pemerintah tersebut diundangkan dan Intruksi Mendagri Nomor 061/2911/ SJ Tahun 2016 Poin kedua mengintruksikan segera melakukan penyesuaian Dokumen rencana Pembangunan Daerah Sesuai dengan kelembagaan perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No, 18 Tahun 2016 maka Kabupaten Pacitan segera melaksanakan penyesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang diawali dengan melakukan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025.

1. Renja Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program /kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2025.

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja Perubahan harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Sejalan dengan Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 yakni ***"MASYARAKAT PACITAN SEJAHTERA DAN BAHAGIA"*** dan Misi Pembangunan ***"MEWUJUDKAN PERCEPATAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP***" yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan. Adapun sasaran yang akan dicapai adalah Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Perekonomian dan Aksesibilitas yang ditunjukkan dengan IKM baik di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, terpeliharanya serta meningkatnya daya dukung, kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana jalan dan jembatan untuk daerah yang berpeluang berkembang, berkurangnya prasarana jalan dan jembatan yang berada dalam kondisi rusak berat dan sedang, tersedianya data jalan yang update sebagai bahan perencanaan dan pengambilan tindakan dalam penanganannya, meningkatnya kondisi sarana prasarana kebinamargaan yang difokuskan pada alat berat dan alat – alat ukur laboratorium, tercukupinya jaringan irigasi yang dibutuhkan, tersedianya data jaringan irigasi yang update sebagai bahan dalam perencanaan dan bahan tindakan penanganan, tersedianya kualitas dan kuantitas kondisi jalan perdesaan yang baik dan tersedianya kualitas dan kuantitas kondisi jembatan perdesaan yang baik. Sedangkan kebijakan strategi pembangunan bidang infrastruktur jalan dan sumber daya air Tahun 2025 yaitu menabulasikan kelompok zona pengembangan yang berpotensi, menumbuhkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi dan SDM bidang penyelenggaraan prasarana, meningkatkan kapasitas dan daya dukung jalan, meningkatkan fungsi alat – alat berat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pekerjaan umum, meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi guna meningkatkan hasil pertanian, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya air, meningkatkan pengelolaan penanggulangan bahaya banjir, meningkatkan

pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pedesaan guna meningkatkan perekonomian masyarakat.

Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan menyusun Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025. Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan penjabaran akhir dari RPJMD 2021-2026. Renja OPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran OPD.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan dalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana elah diubah dengan Undang – undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tahun 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
8. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ tqhun 2016 Tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026
13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 145 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi srta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan jangka Daerah (RPJPD) Kabupaten PAcitan Tahun 2005 -2025
16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 170 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan 2021 – 2026
17. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 170 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026
18. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerag Tahun 2022

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini adalah sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun 2025, serta sebagai acuan dalam perencanaan program dan kegiatan yang akan dituangkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) ini adalah untuk mengakomodasi program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan Tahun 2025, meliputi:

- BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini memuat penjelasan mengenai latar belakang, landasan hukum, serta sistematika penulisan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025, sehingga substansi pada bab-bab selanjutnya dapat dipahami secara utuh, termasuk maksud dan tujuan penyusunannya.

- BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Hasil evaluasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun sebelumnya memuat informasi mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran hingga Triwulan II Tahun 2025.

- BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah memiliki tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pacitan, yang telah dijabarkan ke dalam program pembangunan dan program prioritas sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah untuk periode lima tahun (RPJMD). Oleh karena itu, diperlukan identifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang guna mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dalam rangka mendukung pencapaian misi Bupati di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Pada bagian ini disajikan permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang memengaruhinya.

- BAB IV PENUTUP

Kesimpulan dari Rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan Tahun 2025. Tindak lanjut penangananyang tepat sasaran.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai dengan Triwulan II

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis hingga Triwulan II Tahun 2025 menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, yang mencakup pengelolaan sumber daya air, penanganan jalan dan jembatan, penyediaan air bersih, sanitasi, pengelolaan persampahan, drainase kota, serta penataan ruang.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut merupakan bagian dari upaya pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan Tahun 2021–2026.

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan Tahun 2025 ini menyajikan capaian keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran strategis hingga Triwulan II Tahun Anggaran 2025.

Faktor-faktor pendukung keberhasilan antara lain adalah perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang efektif, serta koordinasi dan kerja sama yang baik antar pelaksana kegiatan. Adapun faktor penghambat dalam pencapaian kinerja adalah perubahan proses pengadaan barang dan jasa.

Tindak lanjut yang diperlukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel 2.1

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Triwulan II

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada		Realisasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan			
										I		II	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9	
103.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**Nilai**	**75,2**	**0**	**0.00**	**0**	**75.20**	**10.031.556.467,06**	**0**	**1.809.778.793,00**	**0**	**2.166.391.833,00**
103.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**23.00**	**0**	**0.00**	**0**	**23.00**	**696.089.200,06**	**3**	**33.257.419,00**	**5**	**31.491.128,00**
103.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12.00	0	0.00	0	12.00	98.277.000,00	3	21.269.419,00	15	0
103.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12.00	0	0.00	0	12	158.817.200,00	3	6.580.000,00	15	19.655.828,00
103.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12.00	0	0.00	0	13.00	438.995.000,06	3	5.408.000,00	15	11.835.300,00
103.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**59.00**	**0**	**0.00**	**0**	**59.00**	**6.208.107.967,00**	**3**	**1.356.513.467,00**	**27**	**1.502.243.546,00**
103.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	58.00	0	0.00	0	58.00	6.051.390.967,00	58	1.334.613.467,00	0	1.502.243.546,00
		Jumlah laporan keuangan gaji dan tunjangan	Laporan	58.00	0	0.00	0	24.00		6		3	
103.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Se mesteran SKPD	Laporan	58.00	0	0.00	0	12.00	156.717.000,00	2	21.900.000,00	2	0
103.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan barang milik daerah sesuai ketentuan perundangan**	**Dokumen**	**12.00**	**0**	**0.00**	**0**	**12.00**	**34.060.000,00**	**1**	**2.960.000,00**	**2**	**2.895.040,00**
103.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12.00	0	0.00	0	12.00	34.060.000,00	1	2.960.000,00	2	2.895.040,00
103.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**%**	**100.00**	**0**	**0.00**	**0**	**100.00**	**2.055.143.227,00**	**0**	**358.343.076,00**	**30**	**465.776.637,00**
103.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12.00	0	0.00	0	12.00	2.055.143.227,00	2	358.343.076,00	2	465.776.637,00
		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0.00	0	0.00	0	122.00		1		10	
		Jumlah pegawai non ASN yang di kelola	Orang	0.00	0	0.00	0	71.00		71		0	
103.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**%**	**100.00**	**0**	**0.00**	**0**	**100.00**	**59.045.340,00**	**0**	**0**	**0**	**31.118.850,00**

103.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5.00	0	0.00	0	5	59.045.340,00	0	0	1	31.118.850,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada		Realisasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan			
										I		II	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
103.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan**	**%**	**100.00**	**0**	**0.00**	**0**	**100.00**	**352.004.602,00**	**10,74**	**44.971.427,00**	**15**	**43.545.928,00**
103.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12.00	0	0.00	0	12	256.822.850,00	3	35.860.027,00	2	40.943.770,00
103.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	5.00	0	0.00	0	5.00	95.181.752,00	0	9.111.400,00	1	2.602.158,00
103.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**%**	**80.00**	**0**	**0.00**	**0**	**80.00**	**627.106.131,00**	**0**	**13.733.404,00**	**0**	**89.320.704,00**
103.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	64.00	0	0.00	0	64.00	349.363.845,00	0	13.733.404,00	4	28.152.616,00
103.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah laporan operasional Alat Besar	Laporan	12.00	0	0.00	0	12.00	177.063.066,00	3	0	2	61.168.088,00
		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	15.00	0	0.00	0	15.00		0		2	
103.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1.00	0	0.00	0	1	100.679.220,00	0	0	0	0

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Perkembangan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Proses pengadaan barang dan jasa yang belum efektif
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

103.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase tersedianya bangunan penampung air di daerah rawan kekeringan**	**%**	**80,56**	**0**	**0.00**	**3**	**71.30**	**10.920.000.000,00**	**57,41**	**379.602.409,00**	**0**	**1.260.913.090,00**
.		**Persentase luasan Daerah Irigasi dalam kondisi baik**	**%**	**69,59**		**0.00**	**3**	**67.49**		**65,85**		**0**	
103.02.2.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah infrastruktur penyediaan air baku yang dibangun**	**Unit**	**87.00**	**0**	**0.00**	**3**	**77.00**	**7.278.971.000,00**	**67**	**145.460.584,00**	**0**	**572.361.750,00**
103.02.2.01.0019	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Dibangun	Unit	3.00	0	0.00	3	2.00	105.000.000,00	0	0	0	2.170.000,00
103.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang sungai yang dioperasikan dan dipelihara	Km	3.00	0	0.00	0	2.54	2.090.426.000,00	0	87.958.584,00	0	330.711.000,00
103.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Dibina dan Diberdayakan	Lembaga	3.00	0	0.00	0	4.00	75.000.000,00	0	13.575.000,00	3	9.000.000,00
103.02.2.01.0088	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun	Unit	3.00	0	0.00	0	10.00	1.107.420.000,00	0	2.040.000,00	0	48.479.250,00
103.02.2.01.0114	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Unit	3.00	0	0.00	0	2.00	625.000.000,00	0	7.577.000,00	1	2.100.000,00
103.02.2.01.0116	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Direhabilitasi	Titik	3.00	0	0.00	0	3.00	205.000.000,00	0	0	0	2.310.000,00

PUPR KABUPATEN PACITAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada		Realisasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan			
										I		II	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
103.02.2.01.0119	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	Titik	3.00	0	0.00	0	6.00	645.000.000,00	0	1.720.000,00	3	2.262.000,00
103.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen	3.00	0	0.00	0	1.00	105.000.000,00	0	0	1	100.377.000,00
103.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Unit	3.00	0	0.00	0	3.00	1.553.000.000,00	0	17.495.000,00	0	5.000.000,00
103.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Dokumen	1.00	0	0.00	0	1.00	75.000.000,00	0	0	1	0
103.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	6.00	0	0.00	0	6.00	693.125.000,00	0	15.095.000,00	0	69.952.500,00
103.02.2.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Luas daerah irigasi dalam kondisi baik**	**Ha**	**5757.87**	**0**	**0.00**	**0**	**5584.12**	**3.641.029.000,00**	**5.448,00**	**234.141.825,00**	**0**	**688.551.340,00**
103.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Km	3.00	0	0.00	0	0.33	1.589.949.000,00	0	4.290.000,00	0	800.000,00
103.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km	1.00	0	0.00	0	0.80	1.741.080.000,00	0	229.851.825,00	0	486.712.690,00
103.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Dokumen	3.00	0	0.00	0	2.00	310.000.000,00	0	0	3	201.038.650,00
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : - Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan SDA, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.													
Faktor penghambat pencapaian kinerja : - Perubahan iklim, ketidakseimbangan antara ketersediaan air dan kebutuhan air, terutama pada musim kemarau													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :													
103.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota**	**%**	**81,4**	**0**	**0.00**	**0**	**80.40**	**2.367.000.000,00**	**80,33**	**174.996.800,00**	**0**	**7.419.500,00**
103.03.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten**	**Rumah Tangga**	**119883.00**	**0**	**0.00**	**0**	**118395.00**	**2.367.000.000,00**	**118.207,00**	**174.996.800,00**	**0**	**7.419.500,00**
103.03.2.01.0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	3.00	0	0.00	0	1.00	49.000.000,00	0	0	0	639.000,00

PUPR KABUPATEN PACITAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada		Realisasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan			
										I		II	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
103.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen	1.00	0	0.00	0	1.00	42.000.000,00	0	0	0	639.800,00
103.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Ditingkatkan	Liter/detik	3.00	0	0.00	0	2.00	1.758.000.000,00	0	174.996.800,00	0	2.375.200,00
103.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Dibangun	Liter/detik	0.10	0	0.00	0	0.10	131.000.000,00	0	0	0	1.437.100,00
103.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Dioptimalisasi	Unit	4.00	0	0.00	0	4.00	257.000.000,00	0	0	0	1.531.800,00
103.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	10.00	0	0.00	0	10.00	130.000.000,00	0	0	0	796.600,00
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan air bersih yang cukup dan berkualitas sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat													
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Keterbatasan dana untuk operasional, pemeliharaan, dan pengembangan SPAM													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :													
103.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Persentase tersedianya bangunan sistem pengelolaan persampahan regional**	**%**	**100**	**0**	**0.00**	**0**	**100**	**1.633.000.000,00**	**0**	**180.000,00**	**0**	**13.420.700,00**
103.04.2.01	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah bangunan pengelolaan sampah yang dibangun/ dikembangkan**	**Unit**	**3.00**	**0**	**0.00**	**0**	**3.00**	**1.633.000.000,00**	**0**	**180.000,00**	**0**	**13.420.700,00**
103.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Dibangun	Ton/hari	0.50	0	0.00	0	0.50	1.633.000.000,00	0	180.000,00	0	13.420.700,00
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Tersedianya infrastruktur bangunan persampahan yang memadai													
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurang kesadaran masyarakat akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :													
103.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik**	**%**	**98,5**	**0**	**0.00**	**0**	**98.00**	**14.729.212.000,00**	**97,68**	**3.962.125,00**	**0**	**79.856.900,00**
103.05.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD**	**Rumah tangga**	**145068.00**	**0**	**0.00**	**0**	**144331.00**	**14.729.212.000,00**	**143.856,00**	**3.962.125,00**	**0**	**79.856.900,00**
103.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Rumah Tangga	3.00	0	0.00	0	297.00	14.729.212.000,00	0	3.962.125,00	0	79.856.900,00
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan sanitasi yang cukup dan berkualitas sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat													
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurang tersedianya anggaran untuk mencukupi fasilitas sanitasi di pelosok desa													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :													
103.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota**	**%**	**84**	**0**	**0.00**	**0**	**82.00**	**2.973.000.000,00**	**81,1**	**251.312.452,00**	**0**	**298.716.944,00**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada		Realisasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan			
										I		II	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
103.06.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Panjang Drainase Kota dalam Kondisi Baik**	**Meter**	**48661.55**	**0**	**0.00**	**0**	**52285.80**	**2.973.000.000,00**	**52.135,80**	**251.312.452,00**	**0**	**298.716.944,00**
103.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Sistem Drainase Perkotaan	3.00	0	0.00	0	2.00	2.281.000.000,00	0	251.312.452,00	0	297.184.144,00
103.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sistem Drainase Perkotaan	3.00	0	0.00	0	2.00	650.000.000,00	0	0	0	815.800,00
103.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	Dokumen	1.00	0	0.00	0	1.00	42.000.000,00	0	0	0	717.000,00
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pemanfaatan teknologi dalam perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan sistem drainase untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas													
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Masalah finansial, kurangnya kesadaran masyarakat, pertumbuhan penduduk, dan kondisi lingkungan													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :													
103.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase gedung pemerintah kabupaten yang dibangun dan dipelihara sesuai standar bangunan gedung negara**	**%**	**88**	**0**	**0.00**	**0**	**86.80**	**4.883.140.000,00**	**85,75**	**24.284.000,00**	**85,9**	**258.690.112,00**
.		**Rasio Kepatuhan IMB/ PBG Kab./ Kota**	**%**	**87**		**0.00**	**0**	**86.50**		**0,05**		**86,2**	
103.08.2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Jumlah dokumen PBG/SLF yang direkomendasi/ diterbitkan**	**Dokumen**	**70.00**	**0**	**0.00**	**0**	**70.00**	**4.883.140.000,00**	**11**	**24.284.000,00**	**9**	**258.690.112,00**
		Jumlah Gedung Pemerintah/ Sarana Prasarana yang Dibangun/ Direhab	**Unit**	**8.00**	**0**	**0.00**	**0**	**21.00**		**14**		**14,5**	
103.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Bangunan Gedung	3.00	0	0.00	0	3.00	444.603.000,00	0	19.584.000,00	0,5	128.907.707,00
103.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3.00	0	0.00	0	7.00	4.311.200.000,00	1	0	1	123.234.255,00
103.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penili	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pen	Dokumen	70.00	0	0.00	0	70.00	127.337.000,00	11	4.700.000,00	9	6.548.150,00
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : - Diperlukan segera pemeliharaan gedung pemerintah -Meningkatnya kesadaran masyarakat perlunya perijinan PBG/SLF													
Faktor penghambat pencapaian kinerja : - Dalam tahap perencanaan - Kurangnya pemahaman masyarakat dalam proses SIMBG													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :													
103.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Jumlah penataan kawasan yang dibangun**	**Unit**	**17**	**0**	**0.00**	**0**	**17.00**	**4.613.800.000,00**	**17**	**0**	**17**	**0**
103.09.2.01	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kawasan yang ditata**	**Unit**	**17.00**	**0**	**0.00**	**0**	**17.00**	**4.613.800.000,00**	**17**	**0**	**17**	**0**

PUPR
KABUPATEN PACITAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada		Realisasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan			
										I		II	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
103.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Kawasan	4.00	0	0.00	0	4.00	4.613.800.000,00	0	0	0	0
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Diperlukan penataan kawasan untuk meningkatkan kualitas lingkungan													
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Dalam tahap perencanaan													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :													
103.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/ kota**	**%**	**65,04**	**0**	**0.00**	**0**	**62.87**	**83.395.499.499,94**	**61,09**	**1.405.986.737,00**	**0**	**2.445.619.392,00**
103.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap**	**Km**	**893.60**	**0**	**0.00**	**0**	**863.80**	**83.395.499.499,94**	**839,35**	**1.405.986.737,00**	**0,07**	**2.445.619.392,00**
103.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	3.00	0	0.00	0	2.00	745.147.500,00	2	0	0	188.300.400,00
103.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Km	3.00	0	0.00	0	7.00	11.469.035.000,23	0	5.780.000,00	0	570.454.086,00
103.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Km	3.00	0	0.00	0	2.00	49.522.541.999,68	0	4.811.737,00	0	2.880.000,00
103.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Jembatan	1.00	0	0.00	0	1.00	200.000.000,67	0	0	0	640.000,00
103.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Jembatan	3.00	0	0.00	0	5.00	4.133.512.507,07	0	0	0	1.440.000,00
103.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Km	3.00	0	0.00	0	1374.00	510.000.000,00	0	0	0	0
103.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	3.00	0	0.00	0	4.00	5.265.044.300,29	0	3.360.000,00	0	10.569.231,00
103.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Km	3.00	0	0.00	0	5.00	11.550.218.192,00	0	1.392.035.000,00	4,1	1.671.335.675,00
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi yang baik antar lembaga terkait akan menghindari tumpang tindih dan mempercepat pelaksanaan program													
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Keterbatasan sumber daya (manusia, peralatan, dan dana)													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :													
103.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi**	**%**	**67**	**0**	**0.00**	**0**	**66.00**	**53.060.000,00**	**65**	**3.600.000,00**	**65**	**0**
103.11.2.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK)**	**Orang**	**15.00**	**0**	**0.00**	**0**	**20.00**	**53.060.000,00**	**0**	**3.600.000,00**	**0**	**0**
103.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	20.00	0	0.00	0	20.00	53.060.000,00	5	3.600.000,00	10	0
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Diperlukan tenaga operator/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi													
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Dalam tahap perencanaan													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :													
103.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase ketaatan terhadap rencana tata ruang**	**%**	**89,5**	**0**	**0.00**	**0**	**89.00**	**1.690.000.000,00**	**0,06**	**13.356.634,00**	**88,9**	**500.016.150,00**
103.12.2.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen RTRW/RRTR yang Dilaksanakan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan**	**Dokumen**	**4.00**	**0**	**0.00**	**0**	**4.00**	**545.000.000,00**	**0**	**4.309.684,00**	**0**	**153.951.850,00**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada		Realisasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun		Realisasi Kinerja Pada Triwulan			
										I		II	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
103.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	4.00	0	0.00	0	4.00	545.000.000,00	0	4.309.684,00	0	153.951.850,00
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)													
Predikat kinerja(%)													
103.12.2.02	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen RTRW dan RRTR yang telah dilaksanakan koordinasi dan sinkronisasi**	**Dokumen**	**3.00**	**0**	**0.00**	**0**	**3.00**	**695.000.000,00**	**0**	**720.000,00**	**0**	**146.140.050,00**
103.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	3.00	0	0.00	0	3.00	365.000.000,00	0	0	0	0
103.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	Peta	3.00	0	0.00	0	3.00	330.000.000,00	0	720.000,00	0	146.140.050,00
103.12.2.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang**	**Dokumen**	**2.00**	**0**	**0.00**	**0**	**2.00**	**295.000.000,00**	**0**	**4.506.950,00**	**0**	**100.412.750,00**
103.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Layanan	30.00	0	0.00	0	30.00	295.000.000,00	17	4.506.950,00	12	100.412.750,00
103.12.2.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang**	**Dokumen**	**2.00**	**0**	**0.00**	**0**	**1.00**	**155.000.000,00**	**0**	**3.820.000,00**	**0**	**99.511.500,00**
103.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1.00	0	0.00	0	1.00	155.000.000,00	0	3.820.000,00	1	99.511.500,00

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pentingnya penataan ruang yang baik untuk kesejahteraan bersama dan pembangunan berkelanjutan

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Proses panjang dengan pemangku kepentingan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

PUPR
KABUPATEN PACITAN

2.2 Permasalahan dan Penyelesaian Masalah dalam Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2025

Isu-isu permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa yang akan datang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi permasalahan adalah keadaan apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan dimasa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu permasalahan dan penyelesaian berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Permasalahan dan Penyelesaian Masalah

No.	Permasalahan	Penyelesaian Masalah
1.	Belum optimalnya jalan dalam kondisi mantap.	Optimalisasi pembangunan/rehabilitasi/ pemeliharaan jalan Kabupaten untuk kondisi mantap
2.	Belum optimalnya penyediaan jaringan air minum pada daerah kekeringan	Optimalisasi jaringan air minum untuk daerah rawan kekeringan
3.	Belum optimalnya penyediaan sarana sanitasi	Optimalisasi sarana sanitasi di daerah yang masuk kategori stunting
4.	Belum optimalnya saluran drainase kota dalam mengatasi banjir kota	Optimalisasi pembangunan/rehabilitasi saluran drainase kota dalam mengatasi banjir kota
5.	Belum optimalnya kinerja jaringan irigasi	Pembangunan/rehabilitasi/operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi

Tabel 2.2

Permasalahan dan Penyelesaian Masalah (Lanjutan)

No.	Permasalahan	Penyelesaian Masalah
6.	Banyaknya daerah mengalami kekurangan air	Pembangunan/rehabilitasi bangunan penampung air, sumber mata air dan sumur air baku di daerah rawan kekeringan
7.	Kerusakan infrastruktur dan sedimentasi sungai	Pemeliharaan infrastruktur sungai dan normalisasi sungai
8.	Masih terdapat bangunan gedung pemerintah yang belum terselesaikan secara konstruksi	Menyelesaikan bangunan gedung pemerintah termasuk kawasannya sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal
9.	Terdapat bangunan gedung pemerintah yang mengalami kerusakan karena umur bangunan	Pemeliharaan/ Rehabilitasi bangunan gedung pemerintah sesuai tingkat kerusakan
10.	Penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis, pariwisata, cagar budaya belum maksimal	Penataan bangunan dan lingkungannya pada kawasan strategis dengan memeperhatikan kondisi kawasan dan memperhatikan lingkungan
11	Pengajuan PBG/SLF dari masyarakat maupun pemerintah belum maksimal	Meningkatkan sosialisasi PBG/SLF kepada masyarakat dan pemerintah
12	Masyarakat masih kurang mengetahui dan memahami rencana tata ruang dan perizinan yang terkait tata ruang	Pemberian informasi kepada masyarakat melalui berbagai media dan sistem informasi tata ruang yang diintensifkan
	Ada potensi konflik kepentingan terhadap pemanfaatan ruang	Pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang diintensifkan

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran

Sesuai Perencanaan Strategis Tahun 2025 telah ditetapkan tujuan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan yaitu:

"Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Perekonomian Dan Aksesibilitas"

Sedangkan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan yang sesuai dengan Perencanaan Strategis Tahun 2024 adalah:

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur dalam kondisi mantap, yang didukung dengan program :
   a. Program Penyelenggaraan Jalan
   b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
   c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
   d. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
   e. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
   f. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
   g. Program Penataan Bangunan Gedung
   h. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
   i. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

2. Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang, yang didukung dengan program :
   a. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

PUPR KABUPATEN PACITAN

3.2 Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan yang direncanakan untuk Tahun 2024 meliputi :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

Indikator Program: Hasil Nilai Evaluasi SAKIP PD

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kegiatan: Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah

1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kegiatan: Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator kegiatan: Jumlah dokumen laporan barang milik daerah sesuai ketentuan perundangan

1.3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

1.4 Kegiatan Umum Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan : Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi

1.4.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Kegiatan : Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan

1.5.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.5.2 Pengadaan Alat Besar

1.5.3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kegiatan: Prosentase jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan

1.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.6.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kegiatan : Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik

1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.7.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar

1.7.4 Pemeliharaan/ Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Indikator Program:

a. Persentase Luasan Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik

b. Persentase Tersedianya Bangunan Penampung Air Di Daerah Rawan Kekeringan

2.1 Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Kegiatan: Jumlah infrastruktur penyediaan air baku yang dibangun

2.1.1 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya

2.1.2 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai

2.1.3 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya

2.1.4 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku

2.1.5 Pembangunan *Flood Forecasting and Warning System* (FFWS)

2.1.6 Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya

2.1.7 Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air

2.1.8 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan kabupaten/ Kota

2.1.9 Operasi dan Pemeliharaan Sungai

2.2 Kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Dibawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan : Luas daerah irigasi dalam kondisi baik

2.2.1 Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa

2.2.2 Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan

2.2.3 Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan

3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Indikator Program: Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan

3.1 Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Di Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Kegiatan: Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum selalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten

3.1.1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM

3.1.2 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum SPAM

3.1.3 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan

3.1.4 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan

3.1.5 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan

3.1.6 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

4 PROGRAM PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

Indikator Program: Persentase Tersedianya Bangunan Sistem Pengelolaan Persampahan Regional

4.1 Kegiatan Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Kegiatan: Jumlah bangunan pengelolaan sampah yang dibangun/ dikembangkan

4.1.1 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

5 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Indikator Program: Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik

5.1 Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Kegiatan: Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD

5.1.1 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat

6 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Indikator Program: Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS

6.1 **Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/ Kota**

Indikator Kegiatan: Panjang drainase kota dalam kondisi baik

6.1.1 Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase perkotaan

6.1.2 Pembangunan sistem drainase perkotaan

6.1.3 Rehabilitasi saluran drainase perkotaan

7 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Indikator Program: Persentase Gedung Pemerintah Kabupaten yang Dibangun dan Dipelihara sesuai Standar Bangunan Gedung Negara Rasio Kepatuhan IMB/PBG Kab/ Kota

7.1 Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Indikator Kegiatan:

a. Jumlah dokumen PBG/ SLF yang direkomendasi/ diterbitkan
b. Jumlah gedung pemerintah/ sarana prasarana yang dibangun/ direhab

7.1.1 Pembangunan, pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah Kabupaten/ Kota

7.1.2 Penyelenggaraan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertfikat laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan gedung melalui SIMBG

8 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

Indikator Program: Jumlah Penataan Kawasan yang Dibangun

8.1 Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Di Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Kegiatan: Jumlah kawasan yang ditata

8.1.1 Penataan Bangunan dan Lingkungan kawasan cagar budaya, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya8.1.2 Penataan bangunan dan lingkungan

9 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Indikator Program: Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/ Kota

9.1 Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota

Indikator Kegiatan: Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi mantap

9.1.1 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

9.1.2 Survey kondisi jalan/ jembatan

9.1.2 Pembangunan jalan

9.1.3 Rehabilitasi jalan

9.1.4 Pemeliharaan berkala jalan

9.1.5 Pemeliharaan rutin jalan

9.1.6 Pembangunan jembatan

9.1.7 Rehabilitasi jembatan

10 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Indikator Program: Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi

10.1 Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

Indikator Kegiatan: Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan

10.1.1 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi

11 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Indikator Program: Persentase Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang

11.1 Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota

Indikator Kegiatan: Jumlah dokumen RTRW/RRTR yang dilaksanakan persetujuan substansi, evaluaso, konsultasi evaluasi dan penetapan

11.1.1 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/ Kota

11.2 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Kegiatan: Jumlah dokumen tata ruang yang disusun dan disinkronisasikan

11.2.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/ Kota

11.3 Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan: Persentase kepatuhan terhadap kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR)

11.3.1 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

11.4 Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan

Ruang Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator kegiatan: Jumlah dokumen sinkronisasi pemanfaatan ruang

11.4.1 Koordinasi pelaksanaan penataan ruang

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Dinas pada kurun waktu 1 (satu) tahun. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai.

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Adapun review terhadap Rancangan RKPD Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan sesuai tabel sebagai berikut :

Pagu anggaran APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 72.362.668.680,65, terdiri dari :

a. Program : 11 Program
b. Kegiatan : 21 Kegiatan
c. Sub Kegiatan : 56 Kegiatan

Review terhadap RKPD tahun 2025 tertuang pada tabel di bawah ini :

PUPR
KABUPATEN PACITAN

Tabel 3.1
Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025

REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD

Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp. 43.930.321.817	Rp. 93.358.946.150			Rp. 137.289.267.967	Rp. 38.894.588.033	Rp. 33.468.080.648			Rp. 72.362.668.681	Rp. 144.068.118.588,00
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				Rp. 43.930.321.817	Rp. 93.358.946.150			Rp. 137.289.267.967	Rp. 38.894.588.033	Rp. 33.468.080.648			Rp. 72.362.668.681	Rp. 144.068.118.588,00
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 9.906.997.956	Rp. 124.558.511			Rp. 10.031.556.467	Rp. 9.246.936.845	Rp. 179.517.164			Rp. 9.426.454.009	Rp. 10.595.618.588,00
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 696.089.200				Rp. 696.089.200	Rp. 291.041.140				Rp. 291.041.140	Rp. 700.000.000,00
1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 98.277.000				Rp. 98.277.000	Rp. 73.876.862				Rp. 73.876.862	Rp. 100.000.000,00
1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 158.817.200				Rp. 158.817.200	Rp. 70.537.212				Rp. 70.537.212	Rp. 200.000.000,00
1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 438.995.000				Rp. 438.995.000	Rp. 146.627.066				Rp. 146.627.066	Rp. 400.000.000,00
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 6.208.107.967				Rp. 6.208.107.967	Rp. 5.948.183.575				Rp. 5.948.183.575	Rp. 6.420.095.588,00
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 6.051.390.967				Rp. 6.051.390.967	Rp. 5.829.506.575				Rp. 5.829.506.575	Rp. 6.220.095.588,00
1	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 156.717.000				Rp. 156.717.000	Rp. 118.677.000				Rp. 118.677.000	Rp. 200.000.000,00
1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Rp. 34.060.000				Rp. 34.060.000	Rp. 22.016.234				Rp. 22.016.234	Rp. 50.000.000,00
1	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 34.060.000				Rp. 34.060.000	Rp. 22.016.234				Rp. 22.016.234	Rp. 50.000.000,00
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 1.958.374.665	Rp. 96.768.562			Rp. 2.055.143.227	Rp. 1.933.470.139	Rp. 151.727.215			Rp. 2.085.197.354	Rp. 2.275.523.000,00
1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.958.374.665	Rp. 96.768.562			Rp. 2.055.143.227	Rp. 1.933.470.139	Rp. 151.727.215			Rp. 2.085.197.354	Rp. 2.275.523.000,00
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp. 31.255.391	Rp. 27.789.949			Rp. 59.045.340	Rp. 31.255.391	Rp. 27.789.949			Rp. 59.045.340	Rp. 150.000.000,00
1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 31.255.391	Rp. 27.789.949			Rp. 59.045.340	Rp. 31.255.391	Rp. 27.789.949			Rp. 59.045.340	Rp. 150.000.000,00
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 352.004.602				Rp. 352.004.602	Rp. 333.817.397				Rp. 333.817.397	Rp. 350.000.000,00
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 256.822.850				Rp. 256.822.850	Rp. 256.822.850				Rp. 256.822.850	Rp. 200.000.000,00
1	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 95.181.752				Rp. 95.181.752	Rp. 76.994.547				Rp. 76.994.547	Rp. 150.000.000,00
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 627.106.131				Rp. 627.106.131	Rp. 687.152.969				Rp. 687.152.969	Rp. 650.000.000,00
1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 349.363.845				Rp. 349.363.845	Rp. 229.749.242				Rp. 229.749.242	Rp. 250.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 177.063.066				Rp. 177.063.066	Rp. 272.030.691				Rp. 272.030.691	Rp. 250.000.000,00
1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 100.679.220				Rp. 100.679.220	Rp. 185.373.036				Rp. 185.373.036	Rp. 150.000.000,00
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				Rp. 7.524.161.438	Rp. 3.395.838.562			Rp. 10.920.000.000	Rp. 6.089.686.029	Rp. 1.678.318.942			Rp. 7.768.004.971	Rp. 8.972.500.000,00
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 5.461.530.880	Rp. 1.817.431.120			Rp. 7.278.971.000	Rp. 4.323.389.531	Rp. 1.027.267.520			Rp. 5.350.657.051	Rp. 6.272.500.000,00
1	03	02	2.01	0019	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 105.000.000			Rp. 105.000.000		Rp. 54.760.000			Rp. 54.760.000	Rp. 100.000.000,00
1	03	02	2.01	0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.090.426.000				Rp. 2.090.426.000	Rp. 1.968.960.031				Rp. 1.968.960.031	Rp. 1.212.500.000,00
1	03	02	2.01	0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 75.000.000				Rp. 75.000.000	Rp. 53.395.620				Rp. 53.395.620	Rp. 100.000.000,00
1	03	02	2.01	0088	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 11.976.900	Rp. 1.095.443.100			Rp. 1.107.420.000	Rp. 11.976.900	Rp. 755.339.500			Rp. 767.316.400	Rp. 700.000.000,00
1	03	02	2.01	0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 693.125.000				Rp. 693.125.000	Rp. 684.545.000				Rp. 684.545.000	Rp. 500.000.000,00
1	03	02	2.01	0114	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 8.011.980	Rp. 616.988.020			Rp. 625.000.000	Rp. 8.011.980	Rp. 217.168.020			Rp. 225.180.000	Rp. 600.000.000,00
1	03	02	2.01	0116	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 205.000.000				Rp. 205.000.000	Rp. 203.080.000				Rp. 203.080.000	Rp. 200.000.000,00
1	03	02	2.01	0119	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 645.000.000				Rp. 645.000.000	Rp. 614.820.000				Rp. 614.820.000	Rp. 1.500.000.000,00
1	03	02	2.01	0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 105.000.000				Rp. 105.000.000	Rp. 178.080.000				Rp. 178.080.000	Rp. 100.000.000,00
1	03	02	2.01	0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.553.000.000				Rp. 1.553.000.000	Rp. 545.280.000				Rp. 545.280.000	Rp. 1.110.000.000,00
1	03	02	2.01	0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 75.000.000				Rp. 75.000.000	Rp. 55.240.000				Rp. 55.240.000	Rp. 150.000.000,00
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 2.062.621.558	Rp. 1.578.407.442			Rp. 3.641.029.000	Rp. 1.766.296.498	Rp. 651.051.422			Rp. 2.417.347.920	Rp. 2.700.000.000,00
1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 11.541.558	Rp. 1.578.407.442			Rp. 1.589.949.000	Rp. 11.541.558	Rp. 464.983.373			Rp. 476.524.931	Rp. 1.500.000.000,00
1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.741.080.000				Rp. 1.741.080.000	Rp. 1.545.114.940	Rp. 186.068.049			Rp. 1.731.182.989	Rp. 1.000.000.000,00
1	03	02	2.02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 310.000.000				Rp. 310.000.000	Rp. 209.640.000				Rp. 209.640.000	Rp. 200.000.000,00
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				Rp. 2.367.000.000				Rp. 2.367.000.000	Rp. 1.437.300.000				Rp. 1.437.300.000	Rp. 11.100.000.000,00
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 2.367.000.000				Rp. 2.367.000.000	Rp. 1.437.300.000				Rp. 1.437.300.000	Rp. 11.100.000.000,00
1	03	03	2.01	0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 49.000.000				Rp. 49.000.000	Rp. 6.200.000				Rp. 6.200.000	Rp. 100.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
1	03	03	201	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 42.000.000				Rp. 42.000.000	Rp. 126.000.000				Rp. 126.000.000	Rp. 100.000.000,00
1	03	03	201	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.758.000.000				Rp. 1.758.000.000	Rp. 800.500.000				Rp. 800.500.000	Rp. 10.000.000.000,00
1	03	03	201	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 131.000.000				Rp. 131.000.000	Rp. 126.500.000				Rp. 126.500.000	Rp. 100.000.000,00
1	03	03	201	0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 257.000.000				Rp. 257.000.000	Rp. 251.600.000				Rp. 251.600.000	Rp. 400.000.000,00
1	03	03	201	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 130.000.000				Rp. 130.000.000	Rp. 126.500.000				Rp. 126.500.000	Rp. 400.000.000,00
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				Rp. 1.247.520.000	Rp. 385.480.000			Rp. 1.633.000.000	Rp. 1.249.680.000	Rp. 427.070.000			Rp. 1.676.750.000	Rp. 600.000.000,00
1	03	04	201		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 1.247.520.000	Rp. 385.480.000			Rp. 1.633.000.000	Rp. 1.249.680.000	Rp. 427.070.000			Rp. 1.676.750.000	Rp. 600.000.000,00
1	03	04	201	0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.247.520.000	Rp. 385.480.000			Rp. 1.633.000.000	Rp. 1.249.680.000	Rp. 427.070.000			Rp. 1.676.750.000	Rp. 600.000.000,00
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				Rp. 5.221.167.803	Rp. 9.508.044.197			Rp. 14.729.212.000	Rp. 4.997.166.000	Rp. 9.414.216.000			Rp. 14.411.382.000	Rp. 8.000.000.000,00
1	03	05	201		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 5.221.167.803	Rp. 9.508.044.197			Rp. 14.729.212.000	Rp. 4.997.166.000	Rp. 9.414.216.000			Rp. 14.411.382.000	Rp. 8.000.000.000,00
1	03	05	201	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.221.167.803	Rp. 9.508.044.197			Rp. 14.729.212.000	Rp. 4.997.166.000	Rp. 9.414.216.000			Rp. 14.411.382.000	Rp. 8.000.000.000,00
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				Rp. 1.436.544.156	Rp. 1.536.455.844			Rp. 2.973.000.000	Rp. 1.467.531.199	Rp. 744.048.801			Rp. 2.211.580.000	Rp. 2.100.000.000,00
1	03	06	201		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 1.436.544.156	Rp. 1.536.455.844			Rp. 2.973.000.000	Rp. 1.467.531.199	Rp. 744.048.801			Rp. 2.211.580.000	Rp. 2.100.000.000,00
1	03	06	201	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.394.544.156	Rp. 886.455.844			Rp. 2.281.000.000	Rp. 1.371.531.199	Rp. 526.248.801			Rp. 1.897.780.000	Rp. 1.500.000.000,00
1	03	06	201	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 650.000.000			Rp. 650.000.000		Rp. 217.800.000			Rp. 217.800.000	Rp. 500.000.000,00
1	03	06	201	0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 42.000.000				Rp. 42.000.000	Rp. 96.000.000				Rp. 96.000.000	Rp. 100.000.000,00
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				Rp. 1.596.463.932	Rp. 3.286.676.068			Rp. 4.883.140.000	Rp. 2.527.206.682	Rp. 1.130.462.927			Rp. 3.657.669.609	Rp. 5.350.000.000,00
1	03	08	201		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Lak Fungsi Bangunan Gedung				Rp. 1.596.463.932	Rp. 3.286.676.068			Rp. 4.883.140.000	Rp. 2.527.206.682	Rp. 1.130.462.927			Rp. 3.657.669.609	Rp. 5.350.000.000,00
1	03	08	201	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 183.888.455	Rp. 260.714.545			Rp. 444.603.000	Rp. 376.516.467	Rp. 282.854.542			Rp. 659.371.009	Rp. 3.500.000.000,00
1	03	08	201	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.285.238.477	Rp. 3.025.961.523			Rp. 4.311.200.000	Rp. 2.049.528.255	Rp. 847.608.385			Rp. 2.897.136.640	Rp. 1.700.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 127.337.000				Rp. 127.337.000	Rp. 101.161.960				Rp. 101.161.960	Rp. 150.000.000,00
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				Rp. 55.902.275	Rp. 4.557.897.725			Rp. 4.613.800.000	Rp. 26.437.208	Rp. 1.600.145.812			Rp. 1.626.583.020	Rp. 10.000.000.000,00
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 55.902.275	Rp. 4.557.897.725			Rp. 4.613.800.000	Rp. 26.437.208	Rp. 1.600.145.812			Rp. 1.626.583.020	Rp. 10.000.000.000,00
1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 55.902.275	Rp. 4.557.897.725			Rp. 4.613.800.000	Rp. 26.437.208	Rp. 1.600.145.812			Rp. 1.626.583.020	Rp. 10.000.000.000,00
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				Rp. 12.831.504.257	Rp. 70.563.995.243			Rp. 83.395.499.500	Rp. 10.196.698.602	Rp. 18.294.301.002			Rp. 28.490.999.605	Rp. 84.700.000.000,00
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				Rp. 12.831.504.257	Rp. 70.563.995.243			Rp. 83.395.499.500	Rp. 10.196.698.602	Rp. 18.294.301.002			Rp. 28.490.999.605	Rp. 84.700.000.000,00
1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 745.147.500				Rp. 745.147.500	Rp. 320.131.200				Rp. 320.131.200	Rp. 500.000.000,00
1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 11.469.035.000			Rp. 11.469.035.000		Rp. 9.232.737.500			Rp. 9.232.737.500	Rp. 25.000.000.000,00
1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 29.706.000	Rp. 49.492.842.000			Rp. 49.522.542.000	Rp. 34.815.000	Rp. 4.109.272.000			Rp. 4.144.087.000	Rp. 25.000.000.000,00
1	03	10	2.01	0039	Rehabilitasi Jembatan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 200.000.001			Rp. 200.000.001		Rp. 198.560.001			Rp. 198.560.001	Rp. 2.000.000.000,00
1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 4.133.512.507			Rp. 4.133.512.507		Rp. 648.706.001			Rp. 648.706.001	Rp. 2.000.000.000,00
1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 510.000.000				Rp. 510.000.000	Rp. 582.240.000				Rp. 582.240.000	Rp. 200.000.000,00
1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan	- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Umum (DAU) - DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 5.265.044.300			Rp. 5.265.044.300		Rp. 4.105.025.500			Rp. 4.105.025.500	Rp. 15.000.000.000,00
1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Ruas Jalan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 11.546.656.757	Rp. 3.561.435			Rp. 11.550.218.192	Rp. 9.250.512.402	Rp. 0			Rp. 9.250.512.402	Rp. 15.000.000.000,00
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				Rp. 53.060.000				Rp. 53.060.000	Rp. 40.350.098				Rp. 40.350.098	Rp. 150.000.000,00
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				Rp. 53.060.000				Rp. 53.060.000	Rp. 40.350.098				Rp. 40.350.098	Rp. 150.000.000,00
1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 53.060.000				Rp. 53.060.000	Rp. 40.350.098				Rp. 40.350.098	Rp. 150.000.000,00
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				Rp. 1.690.000.000				Rp. 1.690.000.000	Rp. 1.615.595.370				Rp. 1.615.595.370	Rp. 2.500.000.000,00
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				Rp. 545.000.000				Rp. 545.000.000	Rp. 520.712.710				Rp. 520.712.710	Rp. 500.000.000,00
1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 545.000.000				Rp. 545.000.000	Rp. 520.712.710				Rp. 520.712.710	Rp. 500.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 695.000.000				Rp. 695.000.000	Rp. 671.826.710				Rp. 671.826.710	Rp. 1.000.000.000,00
1	03	12	2.02	0004	Penyusunan Peta Dasar	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 330.000.000				Rp. 330.000.000	Rp. 320.777.640				Rp. 320.777.640	Rp. 400.000.000,00
1	03	12	2.02	0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 365.000.000				Rp. 365.000.000	Rp. 351.049.070				Rp. 351.049.070	Rp. 600.000.000,00
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 295.000.000				Rp. 295.000.000	Rp. 279.348.780				Rp. 279.348.780	Rp. 500.000.000,00
1	03	12	2.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 295.000.000				Rp. 295.000.000	Rp. 279.348.780				Rp. 279.348.780	Rp. 500.000.000,00
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 155.000.000				Rp. 155.000.000	Rp. 143.707.170				Rp. 143.707.170	Rp. 500.000.000,00
1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 155.000.000				Rp. 155.000.000	Rp. 143.707.170				Rp. 143.707.170	Rp. 500.000.000,00
							Jumlah		**Rp. 43.930.321.817**	**Rp. 93.358.946.150**			**Rp. 137.289.267.967**	**Rp. 38.894.588.033**	**Rp. 33.468.080.648**			**Rp. 72.362.668.681**	**Rp. 144.068.118.588,00**

Kab. Pacitan, ...
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

SUPARLAN, S.Sos, ST, M.M.
NIP. 196705041992021004

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2025

Permasalahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan yaitu masih ada program/kegiatan yan belum sepenuhnya terselesaikan baik, dimana data tersebut dilihat dari capaian pengukuran indikator kinerja SKPD sejalan dengan dinamika masalah infrastruktur yang semakin kompleks. Hal tersebut tidak saja karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM), dana, sarana dan prasarana, faktor masyarakat serta nilai-nilai sosial yang beragam. Rancangan Akhir Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan Tahun 2025, dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down. Program/kegiatan yang diusulkan pada pemangku kepentingan didapatkan dari usulan masyarakat melalui mekanisme Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD, dan Usulan Teknokratis. Adapun perubahan Renja ini karena adanya penambahan anggaran dari sub kegiatan untuk mencapai target RPJMD Kemudian usulan-usulan tersebut diinventarisasi berdasarkan program yang ada pada tingkat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan. Usulan yang datang dari masyarakat pada umumnya terkait dengan pembangunan fisik serta pengadaan sarana infrastruktur lainnya.

PUPR
KABUPATEN PACITAN

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pacitan serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2025. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan disusunnya Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang Tahun 2025 Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah urusan Pekerjaan Umum diharapkan dapat berjalan sinergis. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja merupakan acuan dan pedoman dalam melaksanakan program dan Kegiatan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang tahun 2025
2. Dalam upaya pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Program dan kegiatan Prioritas menjadi sasaran utama dan alokasi pendanaanya sesuai dengan Program pembangunan daerah yang telah tertuang dalam RKPD
3. Program dan kegiatan prioritas dalam renja Dinas Pekerjaan umum Tahun 2025 diakomodir dalam dokumen kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan plafon prioritas anggaran sementara (PPAS) hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Kabupaten Pacitan.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Visi dan Misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain.

Pacitan, Juli 2025
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PACITAN

SUPARLAN, S.Sos, ST, MM
Pembina Utama Muda / IV/c
NIP. 19670504 199202 1 004

PUPR
KABUPATEN PACITAN

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
Jln.Dr. Sutomo No. 37 Pacitan 63512, Telp. (0357) 881140, Fax. (0357) 881557
Website : www.perkimtan.pacitankab.go.id, e-mail : perkimtan.pacitan@gmail.com, instagram: perkimtan_pacitan

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT. kami telah dapat menyusun Dokumen Rencana Kerja Perubahan Perangkat (Renja Perubahan SKPD) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Pacitan Tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Ranwal Renja Perubahan SKPD) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja Perubahan SKPD) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan tahun 2025 memuat Tujuan, Sasaran Strategis, Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun sebelumnya, Indikator Kinerja yang diselaraskan dengan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Anggaran yang akan dilaksanakan dan dicapai pada Tahun Anggaran 2025.

Materi Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja Perubahan SKPD) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2025–2029 dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029, sehingga diharapkan sasaran pembangunan dapat sinergis dalam perencanaan kinerjanya.

Akhirnya semoga Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja Perubahan SKPD) Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi yang membaca dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan Rencana Kinerja Perubahan Tahunan ini.

Pacitan, 14 Juli 2025
KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PACITAN

HERU TUNGGUL WIDODO, ST., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710122 199603 1 004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN 1

I.1. Latar Belakang 1

I.2. Landasan Hukum 2

I.3. Maksud dan Tujuan 7

I.4. Sistematika Penulisan 7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN 2 **9**

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan. 9

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD **24**

III.1. Perubahan Tujuan dan sasaran Rencana Kerja SKPD 24

III.2. Perubahan Belanja SKPD Tahun 2025 25

III.3. Rencana Program dan Kegiatan SKPD 26

BAB IV PENUTUP **34**

DAFTAR TABEL **iii**

Tabel 2.1 Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan RENJA sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2025 10

Tabel 3.1 Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025 27

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2025. Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan sampai dengan triwulan II menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2025;
4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

I.2 . LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja SKPD) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan Tahun 2025, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

10. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

13. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

14. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

15. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

18. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
19. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gerbangkertosusilo, Kawasan Bromo Tengger Semeru Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
31. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2019 Tentang Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jawa Timur;
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (Lembaran daerah Kabupaten Pacitan No. 10 Tahun 2021);
48. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Pacitan;
49. Peraturan Bupati Pacitan Nomor Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 adalah mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan.

Adapun tujuan penyusunan Rancangan Perubahan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan ini adalah untuk :

1. Memberikan gambaran informasi mengenai regulasi serta kebijakan dan strategi yang menjadi landasan penyusunan program pembangunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Pacitan;
2. Memberikan gambaran informasi kondisi capaian pelayanan dan permasalahan yang terkait dalam ruang lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Pacitan sampai dengan Triwulan 2;
3. Memberikan gambaran Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan untuk mencapai target pelayanan pada tahun 2025 dengan memperhatikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Sebagai pedoman untuk penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Sementara (PPPAS) penunjang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun 2025 serta pedoman penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPA-SKPD) Tahun 2025.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 ini secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang.

I.2. Landasan Hukum.

I.3. Maksud dan Tujuan.

I.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan.

BAB III Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja SKPD TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PACITAN

III.1. Perubahan Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

III.2. Perubahan Belanja SKPD Tahun 2025

III.3. Rencana Program dan Kegiatan SKPD

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025.

Untuk memantapkan hasil penyusunan perubahan rencana kerja (Perubahan RENJA) tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil pelaksanaan renja sampai dengan triwulan 2 tahun 2025. Pada tahun 2025 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan melaksanakan sebanyak 2 (dua) urusan, 8 (delapan) program, 17 (tujuh belas) Kegiatan, 38 (tiga puluh delapan) Sub Kegiatan dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sejumlah Rp. 55.651.513.768 (lima puluh lima milyar enam ratus lima puluh satu juta lima ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah). Dalam pelaksanaannya program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut, sampai dengan triwulan 2 dapat di realisasi sebesar Rp. 4.961.660.730 (empat milyar sembilan ratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 Daerah Dinas Perumahan Kawasan Permukimaan dan Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Pacitan sampai dengan triwulan II Tahun 2025 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1 berikut :

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
KABUPATEN PACITAN
Triwulan 2 Tahun 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
1	**104.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah**	**Nilai**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**74.85**	**5.629.390.797,00**	**0,00**	**1.058.053.474,00**	**0,00**	**906.298.022,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.964.351.496,00**	**0,00**	**34,89**	**0,00**	**1.964.351.496,00**	**0**	**0**	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
	104.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**24.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**24.00**	**65.000.000,00**	**6,00**	**5.553.000,00**	**6,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,00**	**5.553.000,00**	**50,00**	**8,54**	**12,00**	**5.553.000,00**	**50**	**0**	
	104.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Document Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	11.00	45.000.000,00	3,00	3.953.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	3.953.000,00	45,45	8,78	5,00	3.953.000,00	0	0	
	104.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0.00	0,00	0.00	0,00	12.00	20.000.000,00	3,00	1.600.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1.600.000,00	41,67	8,00	5,00	1.600.000,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	43,56	8,39					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah		2	2		
	104.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**36.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**36.00**	**3.521.067.868,00**	**9,00**	**764.722.961,00**	**9,00**	**695.534.716,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,00**	**1.460.257.677,00**	**50,00**	**41,47**	**18,00**	**1.460.257.677,00**	**50**	**0**	
	104.01.2.	Penyediaan Gaji dan	Jumlah Orang yang	Orang	26.00	0,00	0.00	0,00	26.00	2.812.090.	70,00	603.490.0	46,0	537.088.8	0,00	0,00	0,00	0,00	116,	1.140.578.	446,1	40,56	116,0	1.140.578.	446.	0	

	02.0001	Tunjangan ASN	Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	/Bulan						268,00		74,00	0	38,00					00	912,00	5		0	912,00	15		
	104.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12.00	0,00	0.00	0,00	12.00	632.517.600,00	3,00	146.502.887,00	2,00	143.715.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	290.218.765,00	41,67	45,88	5,00	290.218.765,00	41.67	0	
	104.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12.00	0,00	0.00	0,00	12.00	76.460.000,00	3,00	14.730.000,00	2,00	14.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	29.460.000,00	41,67	38,53	5,00	29.460.000,00	41.67	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					176,50	41,66					F
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Rendah		3	3		
	104.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan barang milik daerah**	**Laporan**	**6.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**6.00**	**10.000.000,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**33,33**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**33.33**	**0**	
	104.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12.00	0,00	0.00	0,00	6.00	10.000.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	16,67	0,00	1,00	0,00	8.33	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					16,67	0,00					F
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah		1	1		
	104.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian**	**%**	**100.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100.00**	**63.183.400,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100**	**0**	
	104.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1.00	0,00	0.00	0,00	1.00	39.683.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	104.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12.00	0,00	0.00	0,00	12.00	23.500.000,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	50,00	0,00	6,00	0,00	50	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					25,00	0,00					F
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah		2	2		
	104.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**%**	**100.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100.00**	**1.065.585.600,00**	**100,00**	**120.503.000,00**	**100,00**	**64.161.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**184.664.150,00**	**100,00**	**17,33**	**100,00**	**184.664.150,00**	**100**	**0**	
	104.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	Paket	12.00	0,00	0.00	0,00	2.00	57.962.800,00	1,00	37.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	37.950.000,00	50,00	65,47	1,00	37.950.000,00	8.33	0	

		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan																								
	104.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1.00	0,00	0.00	0,00	4.00	221.632.800,00	1,00	35.540.000,00	1,00	55.849.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	91.389.650,00	50,00	41,23	2,00	91.389.650,00	200	0	
	104.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1.00	0,00	0.00	0,00	4.00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	104.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12.00	0,00	0.00	0,00	4.00	40.000.000,00	1,00	4.350.000,00	2,00	8.311.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	12.661.500,00	75,00	31,65	3,00	12.661.500,00	25	0	
	104.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12.00	0,00	0.00	0,00	4.00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	104.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Laporan	12.00	0,00	0.00	0,00	12.00	440.000.000,00	1,00	27.913.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	27.913.000,00	8,33	6,34	1,00	27.913.000,00	8.33	0	
	104.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12.00	0,00	0.00	0,00	12.00	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	104.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12.00	0,00	0.00	0,00	12.00	125.990.000,00	0,00	14.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.750.000,00	0,00	11,71	0,00	14.750.000,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					22,92	19,55					F
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah		8	8		
	104.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**%**	**100.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100.00**	**353.392.032,00**	**100,00**	**125.150.000,00**	**100,00**	**80.265.321,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**205.415.321,00**	**100,00**	**58,13**	**100,00**	**205.415.321,00**	**100**	**0**	
	104.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4.00	0,00	0.00	0,00	7.00	257.475.045,00	2,00	125.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	125.150.000,00	28,57	48,61	2,00	125.150.000,00	50	0	
	104.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	1.00	0,00	0.00	0,00	1.00	95.916.987,00	0,00	0,00	1,00	80.265.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	80.265.321,00	100,00	83,68	1,00	80.265.321,00	100	0	

			Disediakan																									
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					64,29	66,15						F

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV											
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
Predikat kinerja(%)																					Rendah	Sedang		2	2			
	104.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan**	**%**	**100.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100.00**	**222.244.000,00**	**100,00**	**37.474.513,00**	**100,00**	**30.993.745,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**68.468.258,00**	**100,00**	**30,81**	**100,00**	**68.468.258,00**	**100**	**0**	
	104.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12.00	0,00	0.00	0,00	12.00	222.244.000,00	3,00	37.474.513,00	3,00	30.993.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	68.468.258,00	50,00	30,81	6,00	68.468.258,00	50	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					50,00	30,81						F
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah		1	1			
	104.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik**	**%**	**80.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**80.00**	**328.917.897,00**	**80,00**	**4.650.000,00**	**80,00**	**35.343.090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,00**	**39.993.090,00**	**100,00**	**12,16**	**80,00**	**39.993.090,00**	**100**	**0**	
	104.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	55.00	0,00	0.00	0,00	18.00	114.505.400,00	3,00	4.650.000,00	3,00	35.343.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	39.993.090,00	33,33	34,93	6,00	39.993.090,00	10.91	0	
	104.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	55.00	0,00	0.00	0,00	72.00	49.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	104.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan	Unit	1.00	0,00	0.00	0,00	1.00	165.092.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

		Kantor dan Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																								
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					11,11	11,64					F
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah		3	3		
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					79,17	21,06					
Predikat kinerja(%)																					Tinggi	Sangat Rendah					
2	**104.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Penanganan rumah korban bencana tiap Tahun**	**%**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100**	**8.578.780.000,00**	**24,00**	**7.800.000,00**	**0,00**	**128.424.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,00**	**136.224.000,00**	**24,00**	**1,59**	**24,00**	**136.224.000,00**	**0**	**0**	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
	104.02.2.01	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	**12.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**12.00**	**83.200.000,00**	**2,00**	**7.800.000,00**	**2,00**	**9.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**17.000.000,00**	**33,33**	**20,43**	**4,00**	**17.000.000,00**	**33.33**	**0**	
	104.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Laporan	12.00	0,00	0.00	0,00	12.00	41.600.000,00	2,00	7.800.000,00	2,00	9.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	17.000.000,00	33,33	40,87	4,00	17.000.000,00	33.33	0	
	104.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Laporan	12.00	0,00	0.00	0,00	12.00	41.600.000,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	33,33	0,00	4,00	0,00	33.33	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					33,33	20,44					F
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah		2	2		
	104.02.2.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Jumlah Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten**	**Unit**	**12.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**10.00**	**8.433.580.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.224.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.224.000,00**	**0,00**	**1,41**	**0,00**	**119.224.000,00**	**0**	**0**	

	104.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	1.00	0,00	0.00	0,00	2.00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	104.02.2.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	1.00	0,00	0.00	0,00	8.00	8.378.580.000,00	0,00	0,00	0,00	119.224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.224.000,00	0,00	1,42	0,00	119.224.000,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					0,00	0,71					F
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah		2	2		
	104.02.2.06	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**Jumlah Dokumen Kegiatan Pemantauan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**Dokumen**	**12.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**12.00**	**62.000.000,00**	**2,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**33,33**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**33.33**	**0**	
	104.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan	12.00	0,00	0.00	0,00	12.00	62.000.000,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	33,33	0,00	4,00	0,00	33.33	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					33,33	0,00					F
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah		1	1		
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					22,22	7,28					
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah					
3	**104.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh**	**%**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**78.66**	**767.120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.864.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.864.000,00**	**0,00**	**3,24**	**0,00**	**24.864.000,00**	**0**	**0**	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
	104.03.2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan**	**Luas Peningkatan kawasan permukiman kumuh yang dilaksanakan**	**Ha**	**1.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**3.80**	**767.120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.864.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.864.000,00**	**0,00**	**3,24**	**0,00**	**24.864.000,00**	**0**	**0**	

		Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																									
	104.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	1.00	0,00	0.00	0,00	6.00	112.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	104.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	Ha	3.70	0,00	0.00	0,00	4.00	655.120.000,00	0,00	0,00	0,00	24.864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.864.000,00	0,00	3,80	0,00	24.864.000,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					0,00	1,90					F
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah		2	2		
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					0,00	3,24					
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
4	**104.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase Rumah Layak Huni**	**%**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**91.42**	**394.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
	104.04.2.01	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah rumah layak huni diluar kawasan permukiman kumuh yang terverifikasi**	**Unit**	**151707.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**129914.00**	**394.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	
	104.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	1.00	0,00	0.00	0,00	14.00	289.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	104.04.2.01.0007	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	12.00	105.280.000,00	3,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	41,67	0,00	5,00	0,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					20,84	0,00					F
Predikat kinerja(%)																					Sang	Sangat		2	2		

																					at Rendah	Rendah					
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					0,00	0,00					
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah					
5	**104.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Kondisi Aman dan Layak**	**%**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**94.21**	**35.819.562.971,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**191.830.402,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**191.830.402,00**	**0,00**	**0,54**	**0,00**	**191.830.402,00**	**0**	**0**	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
	104.05.2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Panjang PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terbangun**	**Km**	**447.15**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**609.75**	**35.819.562.971,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**191.830.402,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**191.830.402,00**	**0,00**	**0,54**	**0,00**	**191.830.402,00**	**0**	**0**	
	104.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Laporan	5.00	0,00	0.00	0,00	12.00	100.000.000,00	3,00	0,00	0,00	79.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	79.476.000,00	25,00	79,48	3,00	79.476.000,00	60	0	
	104.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	5.00	0,00	0.00	0,00	348.00	33.784.507.971,00	0,00	0,00	0,00	101.454.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.454.250,00	0,00	0,30	0,00	101.454.250,00	0	0	
	104.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	0.00	0,00	0.00	0,00	12.00	50.000.000,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	33,33	0,00	4,00	0,00	0	0	
	104.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lokasi	166.00	0,00	0.00	0,00	14.00	1.885.055.000,00	0,00	0,00	0,00	10.900.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900.152,00	0,00	0,58	0,00	10.900.152,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					14,58	20,09					F
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah		4	4		
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					0,00	0,54					
Predikat kinerja(%)																					Sangat	Sangat Rendah					

																					Rendah						
6	**210.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase Penanganan Permasalahan Pertanahan**	**%**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100.00**	**100.000.000,00**	**60,00**	**0,00**	**35,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,00**	**0,00**	**95,00**	**0,00**	**95,00**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
	210.04.2.01	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Sengketa Pertanahan yang Difasilitasi**	**%**	**100.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100.00**	**100.000.000,00**	**225,00**	**0,00**	**110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**335,00**	**0,00**	**335,00**	**0,00**	**335,00**	**0,00**	**335**	**0**	
	210.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	20.00	100.000.000,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	70,00	0,00	14,00	0,00	0	0	
																					Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	70,00	0,00					F
																					Predikat kinerja(%)	Sedang	Sangat Rendah		1	1		
																					Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	335,00	0,00					
																					Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah					
7	**210.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Kepentingan Umum dalam Tahun Berjalan**	**%**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100.00**	**5.595.644.000,00**	**100,00**	**3.594.401.800,00**	**100,00**	**41.962.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**3.636.363.800,00**	**200,00**	**64,99**	**200,00**	**3.636.363.800,00**	**0**	**0**	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**
	210.05.2.01	**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan**	**Lokasi**	**4.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**2.00**	**5.595.644.000,00**	**1,00**	**3.594.401.800,00**	**0,00**	**41.962.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**3.636.363.800,00**	**50,00**	**64,99**	**1,00**	**3.636.363.800,00**	**25**	**0**	
	210.05.2.01.0005	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian	Laporan	4.00	0,00	0.00	0,00	2.00	5.595.644.000,00	2,00	3.594.401.800,00	2,00	41.962.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3.636.363.800,00	200,00	64,99	4,00	3.636.363.800,00	100	0	

		Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	tanah untuk pembangunan																								
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				200,00	64,99					F	
Predikat kinerja(%)																				Sangat Tinggi	Rendah		1	1			
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																				50,00	64,99						
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Rendah						
8	**210.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase Aset Tanah Pemerintah Daerah yang Bersertifikat**	**%**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**98.18**	**550.000.000,00**	**92,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,66**	**0,00**	**94,38**	**0,00**	**92,66**	**0,00**	**0**	**0**	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
	210.10.2.01	**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Tanah Pemerintah Daerah Bersertifikat**	**Bidang**	**1778.00**	**0,00**	**1678.00**	**0,00**	**1778.00**	**550.000.000,00**	**3.462,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.462,00**	**0,00**	**194,71**	**0,00**	**5.140,00**	**0,00**	**289.09**	**0**	
	210.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1.00	0,00	0.00	0,00	4.00	550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					0,00	0,00					F
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah		1	1		
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					194,71	0,00					
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Rendah					
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)																					51,67	13,16					
Predikat kinerja(%)																					Rendah	Sangat Rendah					
Total																					**57.435.097.768,00**			**5.953.633.698,00**			
Persentase Realisasi Anggaran																										**10.37%**	
Predikat																										**Sangat Rendah**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1. Tersedianya waktu pelaksanaan yang cukup. 2. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai. 3. Kepemimpinan yang kuat.

Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1. Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan teknis. 2. Kondisi geografis yang sulit di saat musim penghujan.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : 1. Percepat penyusunan dokumen perencanaan teknis. 2. Penyediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : 1. Pengadaan sarana dan prasarana kerja yang optimal. 2. Perencaan ulang jadwal pelaksanaan pekerjaan, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan.

Dari matrik rekapitulasi pelaksanaan RENJA tersebut dapat diperoleh data-data sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

   Capain kinerja nilai hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh inspektorat sebesar 0,00 dari target 74,85%

   Capaian realisasi keuangan 34,89%. Capaian relisasi anggaran ini adalah dari gaji, penyusunan dokumen laporan kinerja, penyusunan dokumen perencanaan kinerja, dan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor serta pengadaan barang milik daerah.

2. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN.

   Capaian kinerja mencapai 24,00% dari target 100% hal ini disebabkan karena 1 unit atas nama Arif Wicaksono yang beralamat di RT 04/RW 02, Dusun Krajan, Desa Purworejo, Kecamatan Pacitan sudah mendapatkan bantuan relokasi rumah untuk kawasan bahaya.

   Capaian realisasi keuangan 1,59%. Capaian realisasi anggaran ini di gunakan untuk proses perencanaan dan proses monitoring pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni.

3. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN.

   Capaian kinerja mencapai 0,00% dari target 78,66% hal ini disebabkan karena pembangunan PSU dikawasan kumuh masih dalam tahap pemilihan penyedia, belum masuk ke tahap konstruksi.

   Capaian realisasi keuangan 3,24%. Capaian realisasi anggaran ini di gunakan untuk proses perencanaan dan penyusunan DED.

4. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH.

   Capaian kinerja mencapai 0,00% dari target 91,42% hal ini disebabkan karena perencanaan pembangunan rumah layak huni belum seluruhnya diselesaikan, sehingga belum seluruhnya masuk dalam tahap konstruksi.

   Capaian realisasi keuangan 0,00%. Capaian realisasi anggaran ini di gunakan untuk proses perencanaan dan penyusunan DED, serta monitoring proses pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni di luar kawasan permukiman kumuh.

5. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU).

Capaian kinerja mencapai 0,00% dari target 94,21% hal ini disebabkan karena pembangunan PSU di luar kawasan kumuh sebagian masih dalam tahap pemilihan penyedia, dan sebagian masuk ke tahap konstruksi.

Capaian realisasi keuangan 0,54%. Capaian realisasi anggaran ini di gunakan untuk proses perencanaan dan penyusunan DED, serta monitoring proses pembangunan PSU di Luar Kawasan kumuh.

6. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

Capaian kinerja mencapai 95% dari target 100% hal ini disebabkan karena masih minimnya data kepimilikan tanah dari aset aset tanah pemerintah daerah yang dilakukan penyelesaian pelepasan hak atas tanah dari pemilik yang lama, karena beberapa faktor, salah satunya pemilik yang terdaftar di sertifikat sudah meninggal, sehingga masih perlu proses waris yang panjang.

Capaian realisasi keuangan 0,00%. Capaian realisasi anggaran ini di gunakan untuk proses identifikasi dan verifikasi data kepemilikan tanah dan data dukung lainnya.

7. PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN.

Capaian kinerja mencapai 200% dari target 100%, pengadaan tanah untuk pembangunan di dua lokasi sudah dilaksanakan seluruhnya.

Capaian realisasi keuangan 64,99%. Capaian realisasi anggaran ini di gunakan untuk proses pembayaran pengadaan tanah untuk pembangunan di dua lokasi.

8. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH

Capaian kinerja mencapai 92,66% dari target 98,18%, capaian ini diperoleh dari pelaksanaan pendataan aset tanah pemerintah daerah di seluruh kecamatan di Kabupaten Pacitan.

Capaian realisasi keuangan 0,00%. Capaian realisasi anggaran ini di gunakan untuk proses pendataan, identifikasi dan verifikasi aset tanah pemerintah daerah di 12 wilayah kecamatan.

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD

III. 1. Perubahan Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

a. Tujuan.

Tujuan yang akan di capai oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian dan aksesibilitas;

b. Sasaran.

Sasaran yang akan di capai oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyediaan hunian yang layak;
2. Meningkatnya Luasan Kawasan Permukiman yang Tertata;
3. Meningkatnya Fasilitasi Administrasi Pertanahan;
4. Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran di Perangkat Daerah.

c. Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama
1. Meningkatnya penyediaan hunian yang layak	1. Rasio Rumah Layak Huni
	2. Persentase Rumah Layak Huni
2. Meningkatnya Luasan Kawasan Permukiman yang Tertata	3. Persentase Permukiman Layak Huni
	4. Persentase Perumahan dan Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasana, Sarana dan Utilitas Umum)
3. Meningkatnya Fasilitasi Administrasi Pertanahan	5. Persentase Administrasi Pertanahan yang difasilitasi
	6. Persentase Aset Tanah Pemerintah Daerah yang Bersertifikat
4. Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran di Perangkat Daerah	7. Prosentase Layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah
	8. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) PD

d. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target
1. Meningkatnya penyediaan hunian yang layak	1. Rasio Rumah Layak Huni	0,2039
	2. Persentase Rumah Layak Huni	87,59
2. Meningkatnya Luasan Kawasan Permukiman yang Tertata	3. Persentase Permukiman Layak Huni	99,092
	4. Persentase Perumahan dan Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasana, Sarana dan Utilitas Umum)	69,09
3. Meningkatnya Fasilitasi Administrasi Pertanahan	5. Persentase Administrasi Pertanahan yang difasilitasi	100
	6. Persentase Aset Tanah Pemerintah Daerah yang Bersertifikat	53,79
4. Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran di Perangkat Daerah	7. Prosentase Layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100,00
	8. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) PD	80,21

III. 2. Perubahan Belanja SKPD Tahun 2025.

Belanja SKPD dalam Perubahan APBD Tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 55.109.291.388,00 mengalami pengurangan sebesar Rp. 542.222.380,00 (216,10%) dari APBD Induk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 55.651.513.768,00,- terdiri dari :

a. Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp 48.442.424.059,- atau berkurang sebesar Rp 654.302.380,- (1,35 %) dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 49.096.726.439,-
b. Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp 6.666.867.329,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp 112.080.000,- (1,68%) dari APBD Induk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 6.554.787.329,-

Belanja Operasi dan Belanja Modal dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Pertanahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan.

III. 3. Rencana Perubahan Program dan Kegiatan SKPD

Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan tahun 2025 adalah terinci dalam Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN							**29.609.313.768,00**	**55.651.513.768,00**	**67.234.910.249,00**	**37.625.596.481,00**							**24.459.100.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**24.479.313.768,00**	**51.189.453.768,00**	**62.765.104.697,00**	**38.285.790.929,00**							**22.748.100.000,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**24.479.313.768,00**	**51.189.453.768,00**	**62.765.104.697,00**	**38.285.790.929,00**							**22.748.100.000,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**# Prosentase Layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah # Hasil Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah ## Hasil Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah**				**>B 100 73 Nilai % Nilai**	**100 >B 73 % Nilai Nilai**	**5.517.813.768,00**	**5.629.390.797,00**	**5.638.241.491,46**	**390.186.232,00**							**5.908.000.000,00**	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*## Jumlah penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah*				24 Dokumen	24 Dokumen	30.000.000,00	65.000.000,00	58.356.000,00	28.356.000,00			-	Pengembangan Internet of Things (IOT) Dalam Segala Bidang Pembangunan Pengembangan Internet of Things (IOT) Dalam Segala Bidang Pembangunan	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah		26.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	10.000.000,00	45.000.000,00	43.779.700,00	33.779.700,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Internet of Things (IOT) Dalam Segala Bidang Pembangunan Pengembangan Internet of Things (IOT) Dalam Segala Bidang Pembangunan			10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				13 Laporan	13 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	14.576.300,00	-5.423.700,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			16.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah penyusunan dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah*				59 Dokumen	59 Dokumen	3.520.195.068,00	3.521.067.868,00	3.431.427.929,46	-88.767.138,54			-	Pengembangan Internet of Things (IOT) Dalam Segala Bidang Pembangunan Pengembangan Internet of Things (IOT) Dalam Segala Bidang Pembangunan	Jumlah penyusunan dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah		3.721.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	2.876.890.268,00	2.812.090.268,00	2.720.709.129,46	-156.181.138,54	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Internet of Things (IOT) Dalam Segala Bidang Pembangunan Pengembangan Internet of Things (IOT) Dalam Segala Bidang Pembangunan			3.100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	593.304.800,00	632.517.600,00	632.517.600,00	39.212.800,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			570.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	76.460.000,00	78.201.200,00	28.201.200,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Internet of Things (IOT) Dalam Segala Bidang Pembangunan Pengembangan Internet of Things (IOT) Dalam Segala Bidang Pembangunan			51.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*# Jumlah laporan barang milik daerah*				6 Dokumen	6 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	9.731.200,00	-268.800,00			-	Pengembangan Internet of Things (IOT) Dalam Segala Bidang Pembangunan Pengembangan Internet of Things (IOT) Dalam Segala Bidang Pembangunan	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah		19.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	9.731.200,00	-268.800,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Internet of Things (IOT) Dalam Segala Bidang Pembangunan Pengembangan Internet of Things (IOT) Dalam Segala Bidang Pembangunan			19.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*## Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian*				100 %	100 %	47.183.400,00	63.183.400,00	57.434.100,00	10.250.700,00			-	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian		77.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	39.683.400,00	39.683.400,00	39.683.400,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			51.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	23.500.000,00	17.750.700,00	10.250.700,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Internet of Things (IOT) Dalam Segala Bidang Pembangunan Pengembangan Internet of Things (IOT) Dalam Segala Bidang Pembangunan			26.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*## Persentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi*				100 %	100 %	981.632.800,00	1.065.585.600,00	897.878.540,00	-83.754.260,00			-	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi		1.015.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	57.962.800,00	51.034.240,00	31.034.240,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			21.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	146.632.800,00	221.632.800,00	200.204.781,00	53.571.981,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			133.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	38.579.800,00	-1.420.200,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			56.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	34.735.800,00	-5.264.200,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			41.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	12.426.600,00	-2.573.400,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Internet of Things (IOT) Dalam Segala Bidang Pembangunan Pengembangan Internet of Things (IOT) Dalam Segala Bidang Pembangunan			16.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	440.000.000,00	440.000.000,00	317.161.499,00	-122.838.501,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			466.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	125.000.000,00	119.075.200,00	-30.924.800,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			151.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	130.000.000,00	125.990.000,00	124.660.620,00	-5.339.380,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			131.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*## Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan*				100 %	100 %	406.172.821,00	353.392.032,00	479.700.851,00	73.528.030,00			-	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan		502.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	296.865.904,00	257.475.045,00	383.783.864,00	86.917.960,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			351.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	109.306.917,00	95.916.987,00	95.916.987,00	-13.389.930,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			151.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*## Persentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan*				100 %	100 %	146.244.000,00	222.244.000,00	211.724.974,00	65.480.974,00			-	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan		121.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	146.244.000,00	222.244.000,00	211.724.974,00	65.480.974,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			121.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*## Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik*				80 %	80 %	376.385.679,00	328.917.897,00	491.987.897,00	115.602.218,00			-	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik		427.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				22 Unit	22 Unit	132.812.100,00	114.505.400,00	114.505.400,00	-18.306.700,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			151.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	22 Unit	80.000.000,00	49.320.000,00	49.320.000,00	-30.680.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			86.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	163.573.579,00	165.092.497,00	328.162.497,00	164.588.918,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			190.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**# Persentase Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat**				**100 %**	**100 %**	**282.700.000,00**	**8.578.780.000,00**	**11.501.522.822,00**	**55.300.000,00**							**338.000.000,00**	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*# Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Terdata*				500 Unit	500 Unit	83.200.000,00	83.200.000,00	62.002.285,00	-21.197.715,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	Masyarakat korban bencana dan atau relokasi program kabupaten		102.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				1 Dokumen	4 Dokumen	41.600.000,00	41.600.000,00	30.797.538,00	-10.802.462,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			51.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Dokumen	4 Dokumen	41.600.000,00	41.600.000,00	31.204.747,00	-10.395.253,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			51.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*# Jumlah Rumah Bagi Korban Bencana Yang Layak Huni*				12 unit	12 unit	137.500.000,00	8.433.580.000,00	11.408.636.813,00	11.271.136.813,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	Masyarakat korban bencana dan atau relokasi program kabupaten		160.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				4 Unit Rumah	4 Unit Rumah	82.500.000,00	0,00	0,00	-82.500.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota				2 Unit Rumah	2 Unit Rumah	55.000.000,00	55.000.000,00	51.622.938,00	-3.377.062,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			60.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				-	4 Unit Rumah	0,00	8.378.580.000,00	11.357.013.875,00	11.357.013.875,00	Kab. Pacitan, Bandar, Bandar Kab. Pacitan, Ngadirojo, Pagerejo Kab. Pacitan, Tulakan, Wonosidi Kab. Pacitan, Pringkuku, Tamanasri	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	*# Jumlah Pembangunan Bidang Perumahan Yang Di Monitoring dan Dievaluasi*				180 Unit	180 Unit	62.000.000,00	62.000.000,00	30.883.724,00	-31.116.276,00			-	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	Masyarakat pelaku usaha pengembang perumahan		76.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				1 Laporan	1 Laporan	62.000.000,00	62.000.000,00	30.883.724,00	-31.116.276,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			76.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
3.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**# Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh**				**7,79 %**	**7,79 %**	**753.800.000,00**	**767.120.000,00**	**744.105.853,00**	**-149.800.000,00**							**604.000.000,00**	
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*# Luas Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani*				7,79 Ha	7,79 Ha	753.800.000,00	767.120.000,00	744.105.853,00	-9.694.147,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	Luas Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani		604.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				5 Unit Rumah	5 Unit Rumah	112.000.000,00	112.000.000,00	91.904.698,00	-20.095.302,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			103.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh																		
			Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar				4 Ha	4 Ha	641.800.000,00	655.120.000,00	652.201.155,00	10.401.155,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Internet of Things (IOT) Dalam Segala Bidang Pembangunan Pengembangan Internet of Things (IOT) Dalam Segala Bidang Pembangunan			501.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
4.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**# Persentase Rumah Layak Huni**				**88,16 %**	**88,16 %**	**411.000.000,00**	**394.600.000,00**	**367.627.763,00**	**125.100.000,00**							**536.100.000,00**	

	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	*# Jumlah Rumah Layak Huni Diluar Kawasan Permukiman Kumuh Yang Terverifikasi*				121085 Unit	121085 Unit	411.000.000,00	394.600.000,00	367.627.763,00	-43.372.237,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Internet of Things (IOT) Dalam Segala Bidang Pembangunan Pengembangan Internet of Things (IOT) Dalam Segala Bidang Pembangunan	Jumlah rumah layak huni diluar kawasan permukiman kumuh yang terverifikasi		536.100.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				15 Unit Rumah	15 Unit Rumah	307.500.000,00	289.320.000,00	312.595.701,00	5.095.701,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Internet of Things (IOT) Dalam Segala Bidang Pembangunan Pengembangan Internet of Things (IOT) Dalam Segala Bidang Pembangunan			361.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.04.2.01.0007	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru				4 Laporan	4 Laporan	103.500.000,00	105.280.000,00	55.032.062,00	-48.467.938,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			175.100.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
5.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**# Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman**				**72,69 %**	**72,69 %**	**17.514.000.000,00**	**35.819.562.971,00**	**44.513.606.767,54**	**-2.152.000.000,00**							**15.362.000.000,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*# Panjang Penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terbangun*				462,68 Km	462,68 Km	17.514.000.000,00	35.819.562.971,00	44.513.606.767,54	26.999.606.767,54			-	Pengembangan Internet of Things (IOT) Dalam Segala Bidang Pembangunan Pengembangan Internet of Things (IOT) Dalam Segala Bidang Pembangunan	PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terbangun		15.362.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				50 Dokumen	12 Dokumen	93.000.000,00	100.000.000,00	91.246.500,00	-1.753.500,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Internet of Things (IOT) Dalam Segala Bidang Pembangunan Pengembangan Internet of Things (IOT) Dalam Segala Bidang Pembangunan			101.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				100 Lokasi	349 Lokasi	16.078.000.000,00	33.784.507.971,00	41.576.457.267,54	25.498.457.267,54	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			14.700.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				1 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	28.848.000,00	-21.152.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Internet of Things (IOT) Dalam Segala Bidang Pembangunan Pengembangan Internet of Things (IOT) Dalam Segala Bidang Pembangunan			61.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		
			Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan				3 Lokasi	15 Lokasi	1.293.000.000,00	1.885.055.000,00	2.817.055.000,00	1.524.055.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.130.000.000,00**	**4.462.060.000,00**	**4.469.805.552,00**	**-660.194.448,00**							**1.711.000.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**5.130.000.000,00**	**4.462.060.000,00**	**4.469.805.552,00**	**-660.194.448,00**							**1.711.000.000,00**	
1.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**# Persentase Sengketa Pertanahan yang Difasilitasi**				**100 %**	**100 %**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**88.116.774,00**	**1.000.000,00**							**101.000.000,00**	

	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*# Persentase Sengketa Pertanahan yang Difasilitasi*				100 %	100 %	100.000.000,00	100.000.000,00	88.116.774,00	-11.883.226,00			-	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	Persentase Sengketa Pertanahan yang Difasilitasi		101.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	88.116.774,00	-11.883.226,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			101.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**# Persentase Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Kepentingan Umum dalam Tahun Berjalan**				**100 %**	**100 %**	**4.480.000.000,00**	**3.812.060.000,00**	**3.947.060.000,00**	**-3.380.000.000,00**							**1.100.000.000,00**	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*# Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan*				4 Lokasi	4 Lokasi	4.480.000.000,00	3.812.060.000,00	3.947.060.000,00	-532.940.000,00			-	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan		1.100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.05.2.01.0005	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	4.480.000.000,00	3.812.060.000,00	3.947.060.000,00	-532.940.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			1.100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
3.	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**# Persentase Aset Tanah Pemerintah Daerah yang Bersertifikat**				**87 %**	**87 %**	**550.000.000,00**	**550.000.000,00**	**434.628.778,00**	**-40.000.000,00**							**510.000.000,00**	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Penataan Aset Tanah Pemerintah Daerah*				200 Bidang	200 Bidang	550.000.000,00	550.000.000,00	434.628.778,00	-115.371.222,00			-	Pengembangan Internet of Things (IOT) Dalam Segala Bidang Pembangunan Pengembangan Internet of Things (IOT) Dalam Segala Bidang Pembangunan	Tanah aset Pemerintah Daerah		510.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	550.000.000,00	550.000.000,00	434.628.778,00	-115.371.222,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengembangan Internet of Things (IOT) Dalam Segala Bidang Pembangunan Pengembangan Internet of Things (IOT) Dalam Segala Bidang Pembangunan			510.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	J U M L A H								**29.609.313.768,00**	**55.651.513.768,00**	**67.234.910.249,00**	**28.979.860.221,87**							**24.459.100.000,00**	

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 merupakan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Triwulan 2 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan. Perubahan Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan SKPD tahun 2025.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Pacitan tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh pegawai Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan serta peran aktif *stakeholder* yang bersangkutan.

Pacitan, 14 Juli 2025
KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PACITAN

HERU TUNGGUL WIDODO, ST., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710122 199603 1 004

RENCANA KINERJA PERUBAHAN

DINAS SOSIAL KABUPATEN PACITAN

Tahun

2025

085967072035

dinsos.pacitankab.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Tahun 2025 merupakan tindak lanjut atas ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 pasal 15 ayat 1 yaitu Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Tahapan penyusunan Renja diatur dalam pasal 16 ayat 2, terdiri dari (a) persiapan penyusunan, (b) penyusunan Rancangan akhir, (c) penyusunan rancangan (d) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, (e) perumusan rancangan akhir, dan (f) penetapan.

Pembangunan sosial hakekatnya merupakan upaya merealisasikan amanat konstitusi yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan pembangunan kesejahteraan sosial sebagai bagian dari pembangunan nasional pada hakekatnya merupakan "pembangunan manusia seutuhnya" yang meliputi pembangunan fisik/lahiriah, sosial dan mental/batiniah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan, baik secara perorangan, keluarga maupun kelompok masyarakat secara bermartabat dengan menempatkan mereka sebagai pelaku utama di dalam pembangunan. Pembangunan kesejahteraan sosial sejatinya adalah segenap strategi dan aktivitas yang dilakukan pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang bermatra pelayanan sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Secara garis besar permasalahan Sosial yang dihadapi adalah :

1) Masih terbatasnya akses Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terhadap pelayanan sosial dasar;

2) Masih rendahnya kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial;
3) Masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial;
4) Belum serasinya kebijakan kesejahteraan sosial antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pacitan, diharapkan dapat disusun tahapan pencapaian hasil secara lebih obyektif untuk memberikan komitmen dan orientasi target serta sasaran di masa depan pada masing- masing kegiatan serta dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaan Sosial dalam satu tahun kedepan yang efektif, efisien serta profesional.

1.2 Landasan Hukum

Adapun peraturan-peraturan terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini adalah :

a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025;
c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

k. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri;

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1447);

n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

o. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
p. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
q. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
r. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
s. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;
t. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
u. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;
v. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 195 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 136 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pacitan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kab. Pacitan dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan. Selain itu, penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial tahun 2025 juga dimaksudkan sebagai penjabaran jangka pendek dari rencana strategis Dinas Sosial.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Tahun 2025 menyesuaikan rencana kerja tahunan dengan

kondisi dan permasalahan yang ada, serta mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dokumen ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Pacitan tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renja, serta sistematika penulisan dokumen Renja Dinas Sosial Kabupaten Pacitan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ini memuat tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renja PD.

Bab IV Penutup

Bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Pacitan sampai dengan Tahun 2025 (tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.I

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Semester 1 Tahun 2025

Kabupaten Pacitan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		-11		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
1	106.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Nilai SAKIP PD	0	0	0.00	0	75.00	3.598.717.239,00	0	731.976.847,00	0	695.321.119,00	0	107.073.262,00	0	0	0	1.534.371.228,00	0	42,64	0	1.534.371.228,00	0	0	Dinas Sosial
	106.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah		0	0.00	0	24.00	65.000.000,00	9	1.280.000,00	0	3.844.250,00	0	0	0	0	9	5.124.250,00	37,5	7,88	9	5.124.250,00	0	0	
	106.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0	0.00	0	24.00	65.000.000,00	9	1.280.000,00	0	3.844.250,00	0	0	0	0	9	5.124.250,00	37,5	7,88	9	5.124.250,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				37,5	7,88					F
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah		1	1		
	106.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah		0	0.00	0	59.00	2.618.482.189,00	15	533.759.068,00	5	542.150.525,	0	104.353.762,00	0	0	20	1.180.263.355,00	33,9	45,07	20	1.180.263.355,00	0	0	

														00														
	106.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0.00	0	0.00	0	26.00	2.588.830.689,00	21	522.272.068,00	20	535.902.965,00	0	104.353.762,00	0	0	20	1.162.528.795,00	76,92	44,91	20	1.162.528.795,00	0	0	
	106.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0.00	0	0.00	0	12.00	29.651.500,00	0	11.487.000,00	1	6.247.560,00	0	0	0	0	1	17.734.560,00	8,33	59,81	1	17.734.560,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					42,63	52,36					F
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Rendah		2	2		
	106.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase operasional dasar perangkat daerah yang terpenuhi**			**0**	**0.00**	**0**	**100.00**	**446.445.250,00**	**24**	**112.392.625,00**	**8**	**64.786.512,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32**	**177.179.137,00**	**32**	**39,69**	**32**	**177.179.137,00**	**0**	**0**	
	106.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			0	0.00	0	12.00	167.583.750,00	0	11.260.000,00	1	43.557.199,00	0	0	0	0	1	54.817.199,00	8,33	32,71	1	54.817.199,00	0	0	
	106.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			0	0.00	0	12.00	16.559.500,00	2	146.000,00	1	266.400,00	0	0	0	0	3	412.400,00	25	2,49	3	412.400,00	0	0	
	106.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0	0.00	0	24.00	262.302.000,00	6	100.986.625,00	2	20.962.913,00	0	0	0	0	8	121.949.538,00	33,33	46,49	8	121.949.538,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					22,22	27,23					F
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah		3	3		
	106.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**			**0**	**0.00**	**0**	**100.00**	**3.248.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	106.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan			0	0.00	0	10.00	3.248.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					0	0					F

																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah		1	1		
	106.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah**			**0**	**0.00**	**0**	**100.00**	**344.456.000,00**	**24**	**72.455.154,00**	**8**	**68.511.832,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32**	**140.966.986,00**	**32**	**40,92**	**32**	**140.966.986,00**	**0**	**0**	
	106.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			0	0.00	0	12.00	105.220.000,00	3	22.322.810,00	1	20.187.740,00	0	0	0	0	4	42.510.550,00	33,33	40,4	4	42.510.550,00	0	0	
	106.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			0	0.00	0	12.00	239.236.000,00	3	50.132.344,00	1	48.324.092,00	0	0	0	0	4	98.456.436,00	33,33	41,15	4	98.456.436,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	33,33	40,78					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah		2	2		
	106.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik**			**0**	**0.00**	**0**	**80.00**	**121.085.100,00**	**18**	**12.090.000,00**	**5**	**16.028.000,00**	**0**	**2.719.500,00**	**0**	**0**	**23**	**30.837.500,00**	**28,75**	**25,47**	**23**	**30.837.500,00**	**0**	**0**	
	106.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0.00	0	0.00	0	22.00	69.975.100,00	1	3.280.000,00	0	8.638.000,00	0	2.719.500,00	0	0	1	14.637.500,00	4,55	20,92	1	14.637.500,00	0	0	
	106.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0	0.00	0	20.00	41.110.000,00	0	8.810.000,00	0	7.390.000,00	0	0	0	0	0	16.200.000,00	0	39,41	0	16.200.000,00	0	0	
	106.01.2.09.0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0	0.00	0	1.00	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	1,52	20,11					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah		3	3		
																				Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	27,36	26,51					

																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
2	**106.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**		**0**	**0**	**0.00**	**0**	**83.00**	**524.200.000,00**	**5**	**43.692.900,00**	**0**	**33.255.002,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**76.947.902,00**	**6,02**	**14,68**	**5**	**76.947.902,00**	**0**	**0**	**Dinas Sosial**
	106.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang dikembangkan**			**0**	**0.00**	**0**	**125.00**	**524.200.000,00**	**15**	**43.692.900,00**	**0**	**33.255.002,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15**	**76.947.902,00**	**12**	**14,68**	**15**	**76.947.902,00**	**0**	**0**	
	106.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		0.00	0	0.00	0	32.00	70.000.000,00	5	1.245.000,00	0	2.935.000,00	0	0	0	0	5	4.180.000,00	15,63	5,97	5	4.180.000,00	0	0	
	106.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		0.00	0	0.00	0	14.00	414.200.000,00	2	42.447.900,00	0	30.320.002,00	0	0	0	0	2	72.767.902,00	14,29	17,57	2	72.767.902,00	0	0	
	106.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota		0.00	0	0.00	0	20.00	40.000.000,00	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	1	0	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	11,64	7,85					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah		3	3		
																				Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	12	14,68					
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
3	**106.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase PPKS yang mendapatkan bantuan**		**0**	**0**	**0.00**	**0**	**83.00**	**812.400.000,00**	**38**	**148.794.300,00**	**20**	**168.312.997,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58**	**317.107.297,00**	**69,88**	**39,03**	**58**	**317.107.297,00**	**0**	**0**	**Dinas Sosial**

	106.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang mendapatkan pelayanan**			**0**	**0.00**	**0**	**250.00**	**734.850.000,00**	**55**	**137.057.300,00**	**12**	**163.271.997,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67**	**300.329.297,00**	**26,8**	**40,87**	**67**	**300.329.297,00**	**0**	**0**	
	106.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan kabupaten/kota	orang	0.00	0	0.00	0	20.00	14.209.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	106.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		0.00	0	0.00	0	33.00	125.550.000,00	0	16.541.000,00	4	71.793.650,00	0	0	0	0	4	88.334.650,00	12,12	70,36	4	88.334.650,00	0	0	
	106.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/kota	orang	0.00	0	0.00	0	15.00	15.720.000,00	11	3.122.000,00	1	0	0	0	0	0	12	3.122.000,00	80	19,86	12	3.122.000,00	0	0	
	106.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		0.00	0	0.00	0	270.00	388.829.600,00	0	75.900.000,00	0	64.397.947,00	0	0	0	0	0	140.297.947,00	0	36,08	0	140.297.947,00	0	0	
	106.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi penyandang disabilitas	orang	0.00	0	0.00	0	25.00	4.200.000,00	5	600.000,00	1	0	0	0	0	0	6	600.000,00	24	14,29	6	600.000,00	0	0	
	106.04.2	Pemberian Layanan Data	Jumlah orang yang	or	0.	0	0.	0	30.00	5.100.00	13	400.000,00	4	0	0	0	0	0	17	400.000,00	56,67	7,84	17	400.000,00	0	0	

	.01.0009	dan Pengaduan	mendapatkan layanan data dan pengaduan	ang	00		00			0,00																	
	106.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	orang	0.00	0	0.00	0	20.00	13.100.000,00	5	0	1	0	0	0	0	0	6	0	30	0	6	0	0	0	
	106.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan			0	0.00	0	10.00	168.141.200,00	9	40.494.300,00	1	27.080.400,00	0	0	0	0	10	67.574.700,00	100	40,19	10	67.574.700,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					37,85	23,58					F
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah		8	8		
	106.04.2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Jumlah PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti yang mendapatkan bantuan**			**0**	**0.00**	**0**	**100.00**	**77.550.000,00**	**18**	**11.737.000,00**	**30**	**5.041.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48**	**16.778.000,00**	**48**	**21,64**	**48**	**16.778.000,00**	**0**	**0**	
	106.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota			0	0.00	0	100.00	77.550.000,00	18	11.737.000,00	30	5.041.000,00	0	0	0	0	48	16.778.000,00	48	21,64	48	16.778.000,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					48	21,64					F
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah		1	1		
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					37,4	31,26					
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah					
4	**106.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial**		**0**	**0**	**0.00**	**0**	**86.00**	**10.566.230.000,00**	**67**	**617.189.000,00**	**0**	**167.210.950,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67**	**784.399.950,00**	**77,91**	**7,42**	**67**	**784.399.950,00**	**0**	**0**	**Dinas Sosial**
	106.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan**	**Persentase DTKS yang terverifikasi**			**0**	**0.00**	**0**	**75.00**	**10.566.230.000,0**	**15**	**617.189.000,00**	**0**	**167.210.950,**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15**	**784.399.950,00**	**20**	**7,42**	**15**	**784.399.950,00**	**0**	**0**	

		Daerah Kabupaten/Kota								**0**				**00**														
	106.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota			0	0.00	0	121909.00	661.830.000,00	9.347,27	272.610.000,00	0	114.611.000,00	0	0	0	0	9.347,27	387.221.000,00	7,67	58,51	9.347,27	387.221.000,00	0	0	
	106.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan KeluargaÂ	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			0	0.00	0	30812.00	9.904.400.000,00	6.362,45	344.579.000,00	0	52.599.950,00	0	0	0	0	6.362,45	397.178.950,00	20,65	4,01	6.362,45	397.178.950,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					14,16	31,26					F
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah		2	2		
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					20	7,42					
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah					
5	**106.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase korban bencana yang menerima bantuan**		**0**	**0**	**0.00**	**0**	**100.00**	**244.170.000,00**	**13**	**69.727.000,00**	**3**	**5.469.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16**	**75.196.200,00**	**16**	**30,8**	**16**	**75.196.200,00**	**0**	**0**	**Dinas Sosial**
	106.06.2.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Jumlah korban bencana yang mendapatkan bantuan**			**0**	**0.00**	**0**	**150.00**	**68.000.000,00**	**20**	**41.145.000,00**	**5**	**400.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**41.545.000,00**	**16,67**	**61,1**	**25**	**41.545.000,00**	**0**	**0**	
	106.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota			0	0.00	0	50.00	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	106.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota			0	0.00	0	75.00	58.000.000,00	20	41.145.000,00	5	400.000,00	0	0	0	0	25	41.545.000,00	33,33	71,63	25	41.545.000,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					16,67	35,82					F
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah		2	2		

	106.06.2.02	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Jumlah peningkatan kemampuan masyarakat dalam penanganan bencana**			**0**	**0.00**	**0**	**150.00**	**176.170.000,00**	**0**	**28.582.000,00**	**0**	**5.069.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.651.200,00**	**0**	**19,1**	**0**	**33.651.200,00**	**0**	**0**	
	106.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			0	0.00	0	6.00	30.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	106.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		0.00	0	0.00	0	60.00	145.670.000,00	62	28.582.000,00	1	5.069.200,00	0	0	0	0	63	33.651.200,00	105	23,1	63	33.651.200,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					52,5	11,55					F
Predikat kinerja(%)																					Rendah	Sangat Rendah		2	2		
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					8,34	40,1					
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah					
6	**106.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola**		**0**	**0**	**0.00**	**0**	**100.00**	**25.000.000,00**	**13**	**0**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21**	**0**	**21**	**0**	**21**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Sosial**
	106.07.2.01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Jumlah taman makam pahlawan yang dipelihara**			**0**	**0.00**	**0**	**1.00**	**25.000.000,00**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**200**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	
	106.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota		0.00	0	0.00	0	1.00	25.000.000,00	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	100	0	1	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					100	0					F
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Rend		1	1		

		Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah**											**0,00**				**00**		**000,00**	**,83**	**,50**
	106.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen					24.00	20.000.000,00	7,00	1.574.000,00	4,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	2.699.000,00	45,83	13,50
																			Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	45,83	13,50	
																			Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	106.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah**	**dokumen**					**59.00**	**2.613.825.263,00**	**15,00**	**166.699.322,00**	**17,00**	**514.043.352,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,00**	**680.742.674,00**	**54,24**	**26,04**
	106.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang					26.00	2.586.225.263,00	26,00	165.947.322,00	26,00	509.649.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	675.596.674,00	100,00	26,12
	106.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	dokumen					59.00	27.600.000,00	15,00	752.000,00	15,00	4.394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	5.146.000,00	50,85	18,64
																			Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	75,43	22,38	
																			Predikat kinerja(%)	Tinggi	Sangat Rendah	
	106.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase operasional dasar perangkat daerah yang terpenuhi**	**persen**					**100.00**	**301.799.370,00**	**24,00**	**11.965.959,00**	**24,00**	**29.824.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,00**	**41.790.359,00**	**48,00**	**13,85**
	106.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket					12.00	70.469.870,00	3,00	5.083.000,00	2,00	7.502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	12.585.000,00	41,67	17,86
	106.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket					12.00	16.675.000,00	2,00	0,00	3,00	9.089.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	9.089.900,00	41,67	54,51
	106.01.2.06.09	Penyelenggaraa	Jumlah Laporan	laporan					24.00	214.654.500,0	5,00	6.882.959,00	9,00	13.232.5	0,00	0,00	0,00	0,	14,00	20.115	58	9,

		n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							0				00,00				00		.459,00	,33	37
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				47,22	27,25	
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	106.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**persen**					**100.00**	**15.261.390,00**	**24,00**	**0,00**	**8,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,00**	**0,00**	**32,00**	**0,00**
	106.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	unit					10.00	15.261.390,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	10,00	0,00
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				10,00	0,00	
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	106.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah**	**persen**					**100.00**	**323.410.790,00**	**24,00**	**29.298.464,00**	**24,00**	**48.827.875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,00**	**78.126.339,00**	**48,00**	**24,16**
	106.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan					12.00	105.268.790,00	3,00	5.428.580,00	2,00	12.580.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	18.008.687,00	41,67	17,11
	106.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan					12.00	218.142.000,00	3,00	23.869.884,00	1,00	36.247.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	60.117.652,00	33,33	27,56
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				37,50	22,34	
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	106.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang**	**Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**persen**					**80.00**	**133.827.000,00**	**22,00**	**3.187.000,00**	**24,00**	**5.072.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,00**	**8.259.000,00**	**57,50**	**6,17**

		Urusan Pemerintahan Daerah																				
	106.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit					20.00	67.195.000,00	0,00	3.187.000,00	0,00	5.072.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.259.000,00	0,00	12,29
	106.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit					20.00	46.640.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	10,00	0,00
	106.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	lokasi					1.00	19.992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				3,33	4,10	
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																				47,60	13,95	
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah	
3	**106.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**persen**	**77,50**	**390.275.942,00**			**74.20**	**354.200.000,00**	**0,00**	**12.195.000,00**	**58,00**	**37.788.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,00**	**49.983.000,00**	**78,17**	**14,11**
	106.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang dikembangkan**	**orang**					**125.00**	**354.200.000,00**	**0,00**	**12.195.000,00**	**75,00**	**37.788.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,00**	**49.983.000,00**	**60,00**	**14,11**
	106.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	orang					100.00	93.420.000,00	0,00	4.100.000,00	0,00	22.228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.328.000,00	0,00	28,18
	106.02.2.03.03	Peningkatan	Jumlah Keluarga	keluarga					25.00	22.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	0,00	0,00	0,	0,

		Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota															00			00	00
	106.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	lembaga					17.00	215.000.000,00	0,00	8.095.000,00	12,00	15.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	23.655.000,00	70,59	11,00
	106.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	sertifikat					20.00	22.955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				17,65	9,80	
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																				60,00	14,11	
Predikat kinerja(%)																				Rendah	Sangat Rendah	
4	**106.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase PPKS yang mendapatkan bantuan**	**Persen**	**0,00**	**1.951.379.709,00**			**76.00**	**380.642.000,00**	**42,00**	**20.493.900,00**	**28,00**	**52.171.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,00**	**72.665.400,00**	**92,11**	**19,09**
	106.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang mendapatkan pelayanan**	**orang**					**250.00**	**289.321.000,00**	**122,00**	**13.196.000,00**	**48,00**	**46.458.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170,00**	**59.654.500,00**	**68,00**	**20,62**
	106.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat	orang					10.00	37.000.000,00	0,00	0,00	10,00	19.153.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	19.153.500,0	100,	51,7

			Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota																	0	00	7
	106.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	orang					250.00	124.900.000,00	103,00	10.373.000,00	31,00	23.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	33.383.000,00	53,60	26,73
	106.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan	orang					10.00	127.421.000,00	11,00	2.823.000,00	0,00	4.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	7.118.000,00	110,00	5,59
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				87,87	28,03	
Predikat kinerja(%)																				Tinggi	Sangat Rendah	
	106.04.2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**							**100.00**	**91.321.000,00**	**0,00**	**7.297.900,00**	**60,00**	**5.713.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,00**	**13.010.900,00**	**60,00**	**14,25**
	106.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota						100.00	91.321.000,00	0,00	7.297.900,00	60,00	5.713.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	13.010.900,00	60,00	14,25
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				60,00	14,25	
Predikat kinerja(%)																				Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																				64,00	17,44	

																			Predikat kinerja(%)	Rendah	Sangat Rendah	
5	**106.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial**	**persen**	**0,00**	**3.902.759.418,00**			**78.00**	**8.574.127.200,00**	**0,00**	**27.885.000,00**	**46,00**	**42.663.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,00**	**70.548.200,00**	**58,97**	**0,82**
	106.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase DTKS yang terverifikasi**	**persen**					**75.00**	**8.574.127.200,00**	**0,00**	**27.885.000,00**	**35,00**	**42.663.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,00**	**70.548.200,00**	**46,67**	**0,82**
	106.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	keluarga					26317.00	464.000.000,00	0,00	0,00	23.215,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.215,00	2.900.000,00	88,21	0,63
	106.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan KeluargaÂ	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	keluarga					30812.00	8.110.127.200,00	0,00	27.885.000,00	24.217,00	39.763.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.217,00	67.648.200,00	78,60	0,83
																			Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	83,41	0,73	
																			Predikat kinerja(%)	Tinggi	Sangat Rendah	
																			Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	46,67	0,82	
																			Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
6	**106.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase korban bencana yang menerima bantuan**	**persen**	**100,00**	**650.459.903,00**			**100.00**	**207.636.000,00**	**0,00**	**4.596.975,00**	**100,00**	**11.356.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**15.953.575,00**	**100,00**	**7,68**
	106.06.2.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Jumlah korban bencana yang mendapatkan bantuan**	**orang**					**150.00**	**116.000.000,00**	**0,00**	**4.596.975,00**	**163,00**	**1.788.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163,00**	**6.385.875,00**	**108,67**	**5,51**
	106.06.2.01.01	Penyediaan	Jumlah Orang yang	orang					50.00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.788.90	0,00	0,00	0,00	0,	0,00	1.788.	0,	3,

		Makanan	Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota											0,00				00		900,00	00	58
	106.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	orang					75.00	66.000.000,00	0,00	4.596.975,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	4.596.975,00	217,33	6,97
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				108,67	5,28	
Predikat kinerja(%)																				Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	106.06.2.02	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Jumlah peningkatan kemampuan masyarakat dalam penanganan bencana**	**orang**					**150.00**	**91.636.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.567.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.567.700,00**	**0,00**	**10,44**
	106.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	kampung					6.00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	106.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	orang					70.00	61.636.000,00	0,00	0,00	0,00	9.567.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.567.700,00	0,00	15,52
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				0,00	7,76	
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																				54,34	7,98	

Predikat kinerja(%)																				Rendah	Sangat Rendah	
7	**106.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola**	**persen**	**100,00**	**65.045.990,00**			**100.00**	**24.522.000,00**	**0,00**	**1.877.250,00**	**100,00**	**2.996.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**4.873.250,00**	**100,00**	**19,87**
	106.07.2.01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Jumlah taman makam pahlawan yang dipelihara**	**lokasi**					**1.00**	**24.522.000,00**	**0,00**	**1.877.250,00**	**0,00**	**2.996.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.873.250,00**	**0,00**	**19,87**
	106.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	makam					1.00	24.522.000,00	0,00	1.877.250,00	1,00	2.996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4.873.250,00	100,00	19,87
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				100,00	19,87	
Predikat kinerja(%)																				Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																				0,00	19,87	
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)																				42,93	8,54	
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial memiliki tujuan yaitu terjaminnya ketenangan Masyarakat dalam menjalankan kehidupan, untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Sosial memiliki sasaran yaitu meningkatnya pelayanan pada masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Untuk mencapai target sasaran dan mencapai tujuan dari Dinas Sosial, pada tahun 2025 Dinas Sosial telah melaksanakan 6 program, 13 kegiatan dan 31 sub kegiatan.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Pacitan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024
	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan	SPM Bidang Sosial		75%	77%	87%	89%	85,14%	86,95 %	89,29 %

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkup Dinas Sosial yang masih kurang, baik kualitas maupun kuantitasnya. Kapasitas dan kompetensi SDM yang ada yang masih belum sesuai harapan dan tuntutan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.
2. Sarana dan prasarana pelayanan Sosial masih kurang memenuhi standart, baik kualitas maupun kuantitasnya. Baik gedung pelayanan sosial, sarana penunjang, dan sarana transportasi pelayanan.

3. Sistem Informasi Data Sosial yang ada belum sepenuhnya memanfaatkan tehnologi secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari, sehingga mempengaruhi kecepatan dan ketepatan pelaporan.
4. Anggaran pembiayaan Dinas Sosial masih sangat minim perlu ditingkatkan lagi dalam rangka pengembangan pelayanan, peningkatan kualitas SDM Sosial dan peningkatan sarana prasarana Sosial.
5. Belum optimalnya kerjasama lintas program dan lintas sektor yang mendukung peningkatan pembangunan pelayanan sosial. Peran serta masyarakat dan dunia usaha masih perlu ditingkatkan, hal ini penting mengingat keterbatasan sumber dana pembangunan kesejahteraan sosial yang disediakan pemerintah
6. Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Pacitan dan semakin berkembangnya variansi permasalahan kesejahteraan sosial, yang belum sebanding dengan kapasitas pelayanan social.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Perubahan tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Dinas Sosial. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.4

Review terhadap RKPD Perubahan 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										8.857.856.254	13.350.000.000	
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										3.857.856.254	5.400.000.000	
1	6	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										35.000.000	65.000.000	

1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Layanan Prima Berbasis Teknologi Informasi	Terwujudnya birokrasi yang akuntabel dan Transparan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Hasil Nilai Evaluasi SAKIP	>B	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	11 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	11 dokumen	20.000.000	40.000.000	
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Layanan Prima Berbasis Teknologi Informasi	Terwujudnya birokrasi yang akuntabel dan Transparan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Hasil Nilai Evaluasi SAKIP	>B	Jumlah koordinasi dan konsultasi perencanaan	12 bulan	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	11 dokumen	15.000.000	25.000.000	
1	6	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2.783.133.804	4.075.000.000	

1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Layanan Prima Berbasis Teknologi Informasi	Terwujudnya birokrasi yang akuntabel dan Transparan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Hasil Nilai Evaluasi SAKIP	>B	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	Tersedianya Dokumen Keuangan	10 dokumen	2.748.133.804	4.000.000.000	
1	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Layanan Prima Berbasis Teknologi Informasi	Terwujudnya birokrasi yang akuntabel dan Transparan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Hasil Nilai Evaluasi SAKIP	>B	Jumlah koordinasi dan konsultasi keuangan	12 bulan	Tersedianya Dokumen Keuangan	10 dokumen	35.000.000	75.000.000	
1	6	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										340.000.000	415.000.000	
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Layanan Prima Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya layanan publik yang inovatif	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Hasil Nilai IKM	Baik	Jumlah bahan logistik kantor yang terpenuhi	12 bulan	Terpenuhinya Operasional PD	12 bulan	115.000.000	125.000.000	

1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Layanan Prima Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya layanan publik yang inovatif	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Hasil Nilai IKM	Baik	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	12 bulan	Terpenuhinya Operasional PD	12 bulan	25.000.000	40.000.000	
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Layanan Prima Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya layanan publik yang inovatif	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Hasil Nilai IKM	Baik	Jumlah koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	Terpenuhinya Operasional PD	12 bulan	200.000.000	250.000.000	
1	6	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										65.000.000	100.000.000	
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Layanan Prima Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya layanan publik yang inovatif	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Hasil Nilai IKM	Baik	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	8 unit	Terpenuhinya Operasional PD	12 bulan	65.000.000	100.000.000	
1	6	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										539.722.450	600.000.000	

1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan Prima Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya layanan publik yang inovatif	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Hasil Nilai IKM	Baik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan	Terpenuhinya Operasional PD	12 bulan	115.000.000	150.000.000	
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Layanan Prima Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya layanan publik yang inovatif	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Hasil Nilai IKM	Baik	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	Terpenuhinya Operasional PD	12 bulan	424.722.450	450.000.000	
1	6	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										95.000.000	145.000.000	
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Layanan Prima Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya layanan publik yang inovatif	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Hasil Nilai IKM	Baik	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	12 bulan	Terpenuhinya Operasional PD	12 bulan	55.000.000	75.000.000	

1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Layanan Prima Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya layanan publik yang inovatif	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Hasil Nilai IKM	Baik	Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan	12 bulan	Terpenuhinya Operasional PD	12 bulan	20.000.000	35.000.000	
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Layanan Prima Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya layanan publik yang inovatif	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Hasil Nilai IKM	Baik	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	12 bulan	Terpenuhinya Operasional PD	12 bulan	20.000.000	35.000.000	
1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL										300.000.000	425.000.000	
1	6	2	2,03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota										300.000.000	425.000.000	
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/	Penanganan Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19	Menigkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase(%) PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan	62%	Jumlah pekerja sosial masyarakat yang meningkat kemampuan	100 orang	PSKS yang diberdayakan	300 orang	75.000.000	100.000.000	

					Kota				kesejahteraan sosial		potensinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial						
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Penanganan Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19	Menigkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase(%) PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	62%	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan yang meningkat kemampuannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100 orang	PSKS yang diberdayakan	300 orang	75.000.000	100.000.000	

1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Penanganan Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19	Menigkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase(%) PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	62%	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga yang meningkat kemampuannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100 orang	PSKS yang diberdayakan	300 orang	75.000.000	125.000.000	
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Penanganan Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19	Menigkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase(%) PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	62%	Jumlah SDM LK3 yang meningkat kemampuannya	50 orang	PSKS yang diberdayakan	300 orang	75.000.000	100.000.000	
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL												

															3.275.000.000	5.350.000.000	
1	6	4	2,01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial										1.200.000.000	3.000.000.000	
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Penanganan Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19	Menigkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan	75,00 %	Jumlah PPKS yang menerima alat bantu	35 orang	Terpenuhinya kebutuhan penyandang disabilitas, anak dan lanjut usia serta gelandangan dan pengemis	200 orang	400.000.000	1.000.000.000	
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak	Penanganan Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19	Menigkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan	75,00 %	Jumlah PPKS yang mendapatkan bimbingan sosial	150 orang	Terpenuhinya kebutuhan penyandang disabilitas, anak dan	200 orang	400.000.000	1.000.000.000	

					Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat								lanjut usia serta gelandangan dan pengemis				
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Penanganan Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19	Menigkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan	75,00 %	Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	15 orang	Terpenuhinya kebutuhan penyandang disabilitas, anak dan lanjut usia serta gelandangan dan pengemis	200 orang	400.000.000	1.000.000.000	
1	6	4	2,02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial										2.075.000.000	2.350.000.000	

1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Penanganan Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19	Menigkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan	75,00 %	Jumlah PPKS yang mendapatkan bantuan permakanan	2000 orang	Terpenuhinya pelayanan rehabilitasi PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza diluar panti	1700 orang	2.000.000.000	2.250.000.000	
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Penanganan Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19	Menigkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan	75,00 %	Jumlah kelompok fakir miskin yang dibina	40 kelompok	Terpenuhinya pelayanan rehabilitasi PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza diluar panti	1700 orang	75.000.000	100.000.000	
1	6	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL												

															1.050.000.000	1.675.000.000	
1	6	5	2,02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota										1.050.000.000	1.675.000.000	
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Penanganan Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19	Menigkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	70,00 %	Jumlah DTKS yang terverifikasi	42892 RUTA	Terlaksananya verval DTKS Kabupaten Pacitan	75%	900.000.000	1.500.000.000	
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Penanganan Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19	Menigkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	70,00 %	Jumlah KPM PKH dan Rastrada yang terfasilitasi	25000 KPM	Terlaksananya verval DTKS Kabupaten Pacitan	75%	150.000.000	175.000.000	
1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA										325.000.000	650.000.000	
1	6	6	2,0		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota												

			1												150.000.000	350.000.000	
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Penanganan Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19	Menigkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	Persentase korban bencana yang menerima bantuan	65,00 %	Jumlah paket makanan yang diterima oleh korban bencana	150 paket	Terpenuhinya perlindungan untuk korban bencana	250 paket	100.000.000	250.000.000	
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Penanganan Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19	Menigkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	Persentase korban bencana yang menerima bantuan	65,00 %	Jumlah paket sandang yang diterima oleh korban bencana	100 paket	Terpenuhinya perlindungan untuk korban bencana	250 paket	50.000.000	100.000.000	
1	6	6	2,02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota										175.000.000	300.000.000	
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Penanganan Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19	Menigkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	Persentase korban bencana yang menerima bantua	65,00 %	Jumlah peserta koordinasi dan sosialisasi KSB	200 orang	Terlaksananya pemberdayaan terhadap kesiapsiagaan	12 bulan	75.000.000	150.000.000	

									n				bencana				
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Penanganan Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19	Menigkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	Persentase korban bencana yang menerima bantuan	65,00 %	Jumlah peserta koordinasi dan sosialisasi tagana	71 orang	Terlaksananya pemberdayaan terhadap kesiapsiagaan bencana	12 bulan	100.000.000	150.000.000	
1	6	7			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN										50.000.000	100.000.000	
1	6	7	2,01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota										50.000.000	100.000.000	
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Penanganan Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19	Menigkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	1 Lokasi	Jumlah taman makam pahlawan yang dipelihara	1 lokasi	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	1 lokasi	50.000.000	100.000.000	

TOTAL	8.857.856.254	13.350.000.000	

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan perencanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan dengan kolaborasi yang melibatkan koordinasi dalam sinergitas vertikal, baik dari pemerintahan pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Serta hubungan horizontal yang melibatkan masyarakat sipil dan aktor-aktor dunia usaha dalam pelaksanaan Musrenbang Kabupaten.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1.	Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti	Se - Kabupaten Pacitan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang mendapatkan pelayanan	100 alat bantu	Alokasi disesuaikan dengan Pagu Anggaran

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 dikemukakan bahwa perkembangan kemiskinan yang menggambarkan dinamika kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan, dipengaruhi oleh berbagai faktor secara simultan termasuk perkembangan perekonomian Indonesia, integrasi perekonomian Indonesia secara global, perubahan demografi, dan kebijakan afirmatif yang dilaksanakan. Selama kurun waktu beberapa tahun terakhir tingkat kemiskinan berhasil diturunkan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan dalam bentuk 4 kelompok program (klaster), yaitu : bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha mikro-kecil dan program-program pro-rakyat, telah berjalan dengan cukup baik. Meskipun demikian, kecepatan penurunan kemiskinan dalam beberapa tahun belakangan ini mengalami perlambatan. Oleh karena itu, melalui sinergi keseimbangan ekonomi makro dan pelaksanaan kebijakan afirmatif yang optimal diharapkan tingkat kemiskinan ini dapat diturunkan lebih jauh.

Dalam kerangka penurunan kemiskinan tersebut, pertumbuhan dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat serta perubahan struktur perekonomian Indonesia memiliki 2 konsekuensi penting, yaitu :

1. Penduduk golongan menengah kebawah akan semakin membutuhkan sistem perlindungan yang komprehensif, dan
2. Adanya potensi meningkatnya kesenjangan antar kelompok miskin dan non miskin yang menjadikan masalah sosial semakin kompleks.

Perlindungan sosial diperlukan agar penduduk miskin dan rentan dilindungi pemenuhan kebutuhannya, terutama pelayanan kesehatan dan kebutuhan bahan pokok, apabila terjadi goncangan ekonomi maupun sosial. Dalam mengurangi potensi kesenjangan antar kelompok dimasyarakat maka perlu dilakukan upaya perluasan akses terhadap pemanfaatan pelayanan dasar. Sedangkan upaya yang bisa dilakukan untuk mengurai kompleksitas permasalahan kemiskinan adalah dengan pembekalan keterampilan wirausaha maupun keterampilan teknis praktis kepada penduduk miskin dan rentan, sehingga dapat meningkatkan daya saing mereka melalui kegiatan ekonomi produktif.

Dengan demikian, untuk mampu mempercepat laju penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan, reformasi menyeluruh terhadap kebijakan penanggulangan kemiskinan sangat diperlukan dan dituangkan dalam 3 kebijakan afirmatif yang lebih komperehensif, integratif dan bertarget spesifik, yaitu :

1. Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif,
2. Meningkatkan pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk miskin dan rentan, serta
3. Mengembangkan penghidupan yang berkelanjutan. Sasaran yang diharapkan dapat diwujudkan melalui kebijakan afirmatif yang lebih komprehensif integratif dan bertarget spesifik terkait dengan upaya mempercepat laju penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu pada

tujuan dan sasaran target kinerja Rencana Strategis Perubahan tahun 2021-2026. Berikut merupakan target tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Pacitan tahun 2025 :

Tujuan: terjaminnya ketenangan Masyarakat dalam menjalankan kehidupan; Sasaran yang akan dicapai dalam mendukung tujuan tersebut adalah Meningkatnya Pelayanan pada masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

3.3. Program dan Kegiatan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Dinas Sosial							13.581.444.439,00	15.770.717.239,00	15.091.183.746,00							14.330.000.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							13.581.444.439,00	15.770.717.239,00	15.091.183.746,00							14.330.000.000,00	
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							13.581.444.439,00	15.770.717.239,00	15.091.183.746,00							14.330.000.000,00	
1	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				-	>B Baik	3.634.717.239,00	3.598.717.239,00	3.142.056.674,00							4.230.000.000,00	

						DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			-	24 dokumen	25.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00			-	-	-		35.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				24 Dokumen	24 Dokumen	25.000.000,00	65.000.000,00	57.117.300,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah dokumen keuangan perangkat	-			-	59 dokumen	2.672.482.189,00	2.618.482.189,00	2.618.482.189,00			-	-	-		3.055.000.000,00	DINAS SOSIAL

						Daerah	daerah															
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	2.642.830.689,00	2.588.830.689,00	2.086.225.012,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			3.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi				59 Laporan	59 Laporan	29.651.500,00	29.651.500,00	27.858.243,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Sem	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			55.000.000,00	DINAS SOSIAL

							Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD									ua Kel/ Desa							
	1	0 6	0 1	2. 0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase operasional dasar perangkat daerah yang terpenuhi	-			-	100 persen	456.445 .250,00	446.445 .250,00	446.445 .250,00			-	-	-		495.000 .000,00	DINAS SOSIAL
	1	0 6	0 1	2. 0 6	0 0 0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	167.584 .150,00	167.583 .750,00	278.203 .799,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			185.000 .000,00	DINAS SOSIAL
	1	0 6	0 1	2. 0 6	0 0 0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	

					5																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	16.559.500,00	16.559.500,00	14.673.500,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	24 Laporan	272.301.600,00	262.302.000,00	161.188.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			275.000.000,00	DINAS SOSIAL

	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	-			-	100 persen	3.248.700,00	3.248.700,00	3.248.700,00			-	-	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	3 Unit	3.248.700,00	3.248.700,00	48.314.970,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang	-			-	100 persen	356.456.000,00	344.456.000,00	344.456.000,00			-	-	-		375.000.000,00	DINAS SOSIAL

							dibutuhkan																
	1	0 6	0 1	2. 0 8	0 0 0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Lapo ran	12 Lapo ran	105.220 .000,00	105.220 .000,00	107.703 .860,00	Kab. Pacit an, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	-	-			100.000 .000,00	DINA S SOSI AL
	1	0 6	0 1	2. 0 8	0 0 0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Lapo ran	12 Lapo ran	251.236 .000,00	239.236 .000,00	226.040 .000,00	Kab. Pacit an, Sem ua Keca mata n,	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	-	-			275.000 .000,00	DINA S SOSI AL

																Semua Kel/ Desa							
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	-			-	80 persen	121.085.100,00	121.085.100,00	121.085.100,00			-	-	-		220.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				25 Unit	21 Unit	69.975.100,00	69.975.100,00	69.725.100,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			80.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	

					6																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	41.110.000,00	41.110.000,00	34.510.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			65.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	30.496.890,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.000.000,00	DINAS SOSIAL

2	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial				-	80 persen	474.200.000,00	524.200.000,00	369.175.256,00							530.000.000,00	
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	-			-	12 PSKS	474.200.000,00	524.200.000,00	524.200.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat		530.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.0	00	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																	

				3	01																		
							Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				32 Orang	32 Orang	70.000.000,00	70.000.000,00	45.522.580,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			95.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																	

							Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Lembaga	12 Lembaga	364.200.000,00	414.200.000,00	299.810.636,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			400.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)																		

							Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Sertifikat	20 Sertifikat	40.000.000,00	40.000.000,00	23.842.040,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			35.000.000,00	DINAS SOSIAL
3	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan bantuan				-	80,66 persen	675.400.000,00	812.400.000,00	749.162.740,00							660.000.000,00	

	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas, anak, lanjut usia serta gelandangan dan pengemis yang mendapatkan bantuan	-			-	150 Orang	597.850.000,00	734.850.000,00	734.850.000,00			-	-	Masyarakat		535.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	002	Penyediaan Sandang																	
							Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan				-	20 Orang	0,00	14.209.200,00	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS SOSIAL

							Kabupaten/Kota									Semua Kel/ Desa							
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	125.550.000,00	125.550.000,00	100.386.880,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan	-			125.000.000,00	DINAS SOSIAL

																		gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.						
	1	06	04	2.01	004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi				-	10 Orang	0,00	15.720.000,00	7.860.000,00	Semua Kota/Kab,	PENDAPATAN ASLI DAER	-	-			20.000.000,00	DINAS SOSIAL

							Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota									Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	AH (PAD)						
	1	06	04	2.01	006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat																	

							Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	150 Orang	301.750.000,00	388.829.600,00	320.326.320,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	-			185.000.000,00	DINAS SOSIAL

																		pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.						
	1	06	04	2.01	007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak																		

							Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota				-	10 Orang	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				-	10 Orang	0,00	5.100.000,00	3.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS SOSIAL

																n, Semua Kel/ Desa							
	1	0 6	0 4	2. 0 1	0 0 1 1	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				-	10 Orang	0,00	13.100.000,00	7.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	0 6	0 4	2. 0 1	0 0 1 2	Pemberian Layanan Rujukan																	

							Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	170.550.000,00	168.141.200,00	156.969.790,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	-			125.000.000,00	DINAS SOSIAL

																		pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.						

	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial yang mendapatkan pelayanan	-			-	100 Orang	77.550.000,00	77.550.000,00	77.550.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat		125.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	003	Penyediaan Permakanan																	

							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	77.550.000,00	77.550.000,00	57.869.750,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			125.000.000,00	DINAS SOSIAL
4	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-				-	-	8.527.957.200,00	10.566.230.000,00	10.652.942.516,00							8.625.000.000,00	
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin	-	-			-	-	8.527.957.200,00	10.566.230.000,00	10.566.230.000,00			-	-	-		8.625.000.000,00	DINAS SOSIAL

						Cakupan Daerah Kabupaten /Kota																
	1	0 6	0 5	2. 0 2	0 0 0 2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																
							Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				121067 Keluarga	121067 Keluarga	661.830.000,00	661.830.000,00	734.601.180,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	-	-			625.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	0 6	0 5	2. 0 2	0 0 0 3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																
							Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan				27726 Keluarga	29783 Keluarga	7.866.127.200,00	9.904.400.000,00	9.918.341.336,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamata	Dana Bagi Hasil (DBH) DBH Cukai Hasil	-	-			8.000.000.000,00	DINAS SOSIAL

							Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota									n, Semua Kel/ Desa	Tembakau (CHT)						
5	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan				-	100 persen	244.170.000,00	244.170.000,00	154.946.660,00							240.000.000,00	
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang mendapatkan bantuan	-			-	100 orang	68.000.000,00	68.000.000,00	68.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan	-	Masyarakat		125.000.000,00	DINAS SOSIAL

																		kemiskinan.						
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan																		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				75 Orang	75 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekono	-			50.000.000,00	DINAS SOSIAL

																			mi dan pemberantasan kemiskinan.					
	1	06	06	2.01	005	Pelayanan Dukungan Psikososial																		
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	150 Orang	58.000.000,00	58.000.000,00	48.636.540,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekono	-			75.000.000,00	DINAS SOSIAL

																		mi dan pemberantasan kemiskinan.					
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten /Kota	Jumlah pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	-			-	100 Orang	176.170.000,00	176.170.000,00	176.170.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan	-	Masyarakat		115.000.000,00	DINAS SOSIAL

																		kemiskinan.						
	1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana																		
							Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Kampung	6 Kampung	30.500.000,00	30.500.000,00	8.328.680,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekono	-			35.000.000,00	DINAS SOSIAL

																			mi dan pemberantasan kemiskinan.					
	1	06	06	2.02	002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																		
							Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	60 Orang	145.670.000,00	145.670.000,00	90.981.440,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekono	-			80.000.000,00	DINAS SOSIAL

																		mi dan pemberantasan kemiskinan.						
6	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	-				-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	22.899.900,00							45.000.000,00	

	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten /Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	-			-	1 lokasi	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang	-	Taman Makam Pahlawan		45.000.000,00	DINAS SOSIAL

																		adil dan makmur.						
	1	06	07	2.01	002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		

							Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				1 Makam	1 Makam	25.000.000,00	25.000.000,00	22.899.900,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang	-			45.000.000,00	DINAS SOSIAL

																		adil dan makmur.						
	J U M L A H												**13.581.444.439,00**	**15.770.717.239,00**	**15.091.183.746,00**							**14.330.000.000,00**	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Pacitan dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Perubahan. Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Pacitan merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Pacitan. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam Rencana Kerja Tahun 2025.

Rumusan rencana kerja perubahan dan pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

de			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Prioritas					
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Dinas Sosial							13.581.444.439,00	15.770.717.239,00	15.091.183.746,00							14.330.000.000,00	
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							13.581.444.439,00	15.770.717.239,00	15.091.183.746,00							14.330.000.000,00	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							13.581.444.439,00	15.770.717.239,00	15.091.183.746,00							14.330.000.000,00	

0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				-	>B Baik	3.634.717.239,00	3.598.717.239,00	3.142.056.674,00							4.230.000.000,00	
0 1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			-	24 dokumen	25.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00			-	-	-		35.000.000,00	DINAS SOSIAL
0 1	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				24 Dokumen	24 Dokumen	25.000.000,00	65.000.000,00	57.117.300,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.000.000,00	DINAS SOSIAL
0 1	2.0		Administrasi	Jumlah dokumen	-			-	59 doku	2.672.482.189,	2.618.482.189,	2.618.482.189,			-	-	-		3.055.000.000,	DINAS SOSIAL

	2		Keuangan Perangkat Daerah	keuangan perangkat daerah					men	00	00	00							00	
0	2. 0 2	0 0 0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	2.642.830.689,00	2.588.830.689,00	2.086.225.012,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			3.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
0	2. 0 2	0 0 0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan				59 Laporan	59 Laporan	29.651.500,00	29.651.500,00	27.858.243,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			55.000.000,00	DINAS SOSIAL

				Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD																		
0 1	2. 0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase operasional dasar perangkat daerah yang terpenuhi	-			-	100 persen	456.445.250,00	446.445.250,00	446.445.250,00			-	-	-		495.000.000,00	DINAS SOSIAL
0 1	2. 0 6	0 0 0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	167.584.150,00	167.583.750,00	278.203.799,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			185.000.000,00	DINAS SOSIAL
0 1	2. 0 6	0 0 0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			

				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	16.559.500,00	16.559.500,00	14.673.500,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			35.000.000,00	DINAS SOSIAL
0	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	24 Laporan	272.301.600,00	262.302.000,00	161.188.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			275.000.000,00	DINAS SOSIAL
0	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	-			-	100 persen	3.248.700,00	3.248.700,00	3.248.700,00			-	-	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
0	2.	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

	0 7	0 0 6																			
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	3 Unit	3.248.700,00	3.248.700,00	48.314.970,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
0 1	2. 0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	-			-	100 persen	356.456.000,00	344.456.000,00	344.456.000,00			-	-	-		375.000.000,00	DINAS SOSIAL
0 1	2. 0 8	0 0 0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Laporan	12 Laporan	105.220.000,00	105.220.000,00	107.703.860,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-			100.000.000,00	DINAS SOSIAL

				yang Disediakan									Kel/Desa	(PAD)							
0	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	251.236.000,00	239.236.000,00	226.040.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			275.000.000,00	DINAS SOSIAL
0	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	-			-	80 persen	121.085.100,00	121.085.100,00	121.085.100,00			-	-	-		220.000.000,00	DINAS SOSIAL
0	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				25 Unit	21 Unit	69.975.100,00	69.975.100,00	69.725.100,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			80.000.000,00	DINAS SOSIAL
0 1	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	41.110.000,00	41.110.000,00	34.510.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			65.000.000,00	DINAS SOSIAL
0 1	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
				Jumlah Gedung Kantor dan				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	30.496.890,00	Kab. Pacitan,	PENDAPATA	-	-			75.000.000,00	DINAS SOSIAL

				Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi									Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	N ASLI DAERAH (PAD)							
0 2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial				-	80 persen	474.200.000,00	524.200.000,00	369.175.256,00								530.000.000,00	
0 2	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	-			-	12 PSKS	474.200.000,00	524.200.000,00	524.200.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerata	-	Masyarakat			530.000.000,00	DINAS SOSIAL

															an ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.						
0 2	2. 0 3	0 0 0 1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
				Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				32 Orang	32 Orang	70.000.000,00	70.000.000,00	45.522.580,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,	-			95.000.000,00	DINAS SOSIAL

															pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.						
0 2	2. 0 3	0 0 0 4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
				Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Lembaga	12 Lembaga	364.200.000,00	414.200.000,00	299.810.636,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan	-			400.000.000,00	DINAS SOSIAL

															ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.						
0 2	2. 0 3	0 0 0 5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)																		
				Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Ko				20 Sertifikat	20 Sertifikat	40.000.000,00	40.000.000,00	23.842.040,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertu	-			35.000.000,00	DINAS SOSIAL

				ta											mbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.						
0 4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan bantuan				-	80,66 persen	675.400.000,00	812.400.000,00	749.162.740,00							660.000.000,00	
0 4	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas	Jumlah penyandang disabilitas, anak, lanjut usia serta gelandangan	-			-	150 Orang	597.850.000,00	734.850.000,00	734.850.000,00			-	-	Masyarakat		535.000.000,00	DINAS SOSIAL

			Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	dan pengemis yang mendapatkan bantuan																		
4	2.01	0002	Penyediaan Sandang																			
				Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				-	20 Orang	0,00	14.209.200,00	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS SOSIAL
4	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu																			

				Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	125.550.000,00	125.550.000,00	100.386.880,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gend	-			125.000.000,00	DINAS SOSIAL

															er, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
0 4	2. 0 1	0 0 0 4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																			

				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				-	10 Orang	0,00	15.720.000,00	7.860.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS SOSIAL
0 4	2. 0 1	0 0 0 6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat																		

				Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			150 Orang	150 Orang	301.750.000,00	388.829.600,00	320.326.320,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gend	-			185.000.000,00	DINAS SOSIAL

															er, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
0 4	2. 0 1	0 0 0 7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak																		

				Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota				-	10 Orang	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS SOSIAL
4	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				-	10 Orang	0,00	5.100.000,00	3.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS SOSIAL

0 4	2. 0 1	0 0 1 1	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				-	10 Orang	0,00	13.100.000,00	7.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS SOSIAL
0 4	2. 0 1	0 0 1 2	Pemberian Layanan Rujukan																			

				Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	170.550.000,00	168.141.200,00	156.969.790,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gend	-			125.000.000,00	DINAS SOSIAL

														er, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					

0 4	2. 0 2		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial yang mendapatkan pelayanan	-			-	100 Orang	77.550.000,00	77.550.000,00	77.550.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat		125.000.000,00	DINAS SOSIAL
0 4	2. 0	0 0	Penyediaan Permakanan																		

	2	0 3																			
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	77.550.000,00	77.550.000,00	57.869.750,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			125.000.000,00	DINAS SOSIAL

0 5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-				-	-	8.527.957.200,00	10.566.230.000,00	10.652.942.516,00							8.625.000.000,00	
0 5	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	8.527.957.200,00	10.566.230.000,00	10.566.230.000,00			-	-	-		8.625.000.000,00	DINAS SOSIAL
0 5	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																	
				Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				121067 Keluarga	121067 Keluarga	661.830.000,00	661.830.000,00	734.601.180,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	-	-			625.000.000,00	DINAS SOSIAL
0 5	2.0	00	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																	

	2	03																				
				Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				27726 Keluarga	29783 Keluarga	7.866.127.200,00	9.904.400.000,00	9.918.341.336,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	-			8.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan				-	100 persen	244.170.000,00	244.170.000,00	154.946.660,00							240.000.000,00	
06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang mendapatkan bantuan	-			-	100 orang	68.000.000,00	68.000.000,00	68.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk	-	Masyarakat		125.000.000,00	DINAS SOSIAL

															pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.						
0 6	2. 0 1	0 0 0 1	Penyediaan Makanan																			

				Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				75 Orang	75 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
0 6	2. 0	0 0	Pelayanan Dukungan Psikososial																		

	1	05																			
				Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	150 Orang	58.000.000,00	58.000.000,00	48.636.540,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			75.000.000,00	DINAS SOSIAL

0 6	2. 0 2		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten /Kota	Jumlah pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	-			-	100 Orang	176.170.000,00	176.170.000,00	176.170.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat		115.000.000,00	DINAS SOSIAL
0 6	2. 0	0 0	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana																		

	2	0 1																			
				Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Kampung	6 Kampung	30.500.000,00	30.500.000,00	8.328.680,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			35.000.000,00	DINAS SOSIAL

0 6	2. 0 2	0 0 0 2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																		
				Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	60 Orang	145.670.000,00	145.670.000,00	90.981.440,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemi	-			80.000.000,00	DINAS SOSIAL

															skinan.							
0 7			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	-				-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	22.899.900,00							45.000.000,00	

0 7	2. 0 1		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten /Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	-			-	1 lokasi	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untu	-	Taman Makam Pahlawan		45.000.000,00	DINAS SOSIAL

																k men capai masy araka t yang adil dan mak mur.							
0 7	2. 0 1	0 0 0 2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																				

			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				1 Makam	1 Makam	25.000.000,00	25.000.000,00	22.899.900,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untu	-			45.000.000,00	DINAS SOSIAL

																k men capai masy araka t yang adil dan mak mur.						
										J U M L A H	**13.581. 444.439 ,00**	**15.770. 717.239 ,00**	**15.091. 183.746 ,00**							**14.330. 000.000 ,00**	

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Perubahan Dinas Sosial tahun 2021- 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati Pacitan serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Pacitan Tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Pacitan tahun 2025 sebagai bahan dalam rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial kabupaten Pacitan Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.

Pacitan, Juli 2025
Plt. KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN PACITAN

KHEMAL PANDU PRATIKNA, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 198505202003121003

RENJA PERUBAHAN

2025

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PACITAN

dlh@pacitankab.go.id
dlh@pacitankab.go.id
(0357) 881750
Jl. R.A Kartini No.05 Pacitan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini merupakan penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 - 2026, sebagai pedoman utama pembangunan di Kabupaten Pacitan selama kurun waktu 1 tahun mendatang. Pencapaian tujuan RENSTRA tersebut kemudian dibagi menjadi tahapan-tahapan pembangunan dengan kurun waktu lebih pendek, yaitu satu tahunan.

Dengan demikian diharapkan kegiatan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan pengembangan RTH secara bertahap dapat dilakukan dengan lebih baik dan sesuai dan dapat mendukung pembangunan yang ramah lingkungan dan berkesinambungan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Renja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan disampaikan terima kasih.

Pacitan, 22 Juli 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PACITAN

CICIK ROUDLOTUL JANNAH, S.T., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740408 199803 2 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **6**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup 33
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi Dinas Lingkungan Hidup 35
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 36
2.5 Penelaahan usulan Program & Kegiatan Masyarakat 49

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN **50**

3.1 Indikator Tujuan dan Formula Perhitungan 51
3.2 Sasaran, Program dan Kegiatan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 52
3.1 Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan 56

BAB VI PENUTUP **66**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Juni Tahun 2025 Kabupaten Pacitan 7

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan 34

Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun 2025 38

Tabel 3.1. Indikator Sasaran dan Formula Perhitungan 51

Tabel 3.3. Program dan Kegiatan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 52

BAB. I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatanan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja PD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun 2024 dibuat dalam rangka penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksudkan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penjabaran dari Inpres Nomor : 7 Tahun 1999 tersebut telah diterbitkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud akuntabilitas instansi pemerintah. Pedoman ini juga diharapkan dapat membantu penyusunan rencana strategis dan rencana kerja, serta pelaksanaan pengukuran kinerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SAKIP secara keseluruhan.

Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup merupakan bidang pembangunan yang langsung menyentuh aspek kehidupan masyarakat dan hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dikaji, direncanakan dan dilaksanakan secara bertahap, terukur, dan berkesinambungan yang diselaraskan dengan kemampuan anggaran pemerintah dan potensi masyarakat.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan yang meliputi Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun, serta Bidang Pengelolaan dan Peningkatan Kapsitas Lingkungan akan diimplementasikan melalui berbagai program kegiatan yang direncanakan untuk periode tahunan, lima tahunan maupun jangka panjang. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup yang telah disusun dengan prinsip manfaat, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien yang terukur melalui indikator keberhasilan serta dapat dipertanggungjawabkan pada periode akhir tahun.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja PD, adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pebinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
i. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
k. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2009 tentang Program Adipura;
l. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;

m. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;
n. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
o. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021;
p. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 148 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan merealisasikan misi yang telah dirumuskan, perlu ditetapkan maksud dan tujuan untuk suatu periode sebagai ukuran keadaan yang ingin diwujudkan dalam skala periode terbatas. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten Pacitan secara keseluruhan.

a. Maksud dilaksanakan penyusunan Rencana Kerja adalah untuk dapat merealisasikan kegiatan yang ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup agar dalam pelaksanaannya dapat lebih terarah dan terukur. Rencana kerja ini merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama periode satu tahun yang diambil dari Rencana Stratergis yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan.
b. Tujuan

   Adapun tujuan yang ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup adalah :

   a. Menyelenggarakan tugas-tugas dibidang Lingkungan Hidup Daerah.
   b. Melaksanakan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan pengelolaan limbah.

c. Melaksanakan pengendalian kerusakan, pemulihan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan.
d. Melaksanakan fasilitas, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang tata lingkungan dan amdal.
e. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan selama tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran PD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB. II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 mengacu pada pencapaian indikator sasaran program yang tertuang dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 maupun dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan hasil evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 sebagaimana termuat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup 2021-2026 terdapat 10 program, 14 kegiatan dan 29 Sub Kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renja Perubahan pada tahun 2025. Adapun capaian target Renja Tahun 2025 sampai bulan Juni Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Juni Tahun 2025
Kabupaten Pacitan

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Juni Tahun Berjalan 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Juni Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10*	*11=(10/9)*
						Urusan Wajib									
						Bidang Urusan Lingkungan Hidup									
02	**01**	**01**				**Program Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Hasil Nilai SAKIP PD**	**75**	**73,15**	**73,20**	**72,60**	**99,18**	**74,10**	**74,85**	**101,01**
02	**01**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**	**23**	**23**	**23,00**	**23,00**	**100,00**	**23,00**	**10,00**	**43,48**

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Juni Tahun Berjalan 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Juni Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10*	*11=(10/9)*
02	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4	4,00	4,00	100,00	4,00	4,00	100,00
02	01	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0	1,00	1,00	100,00	1,00	0,00	0,00
02	**01**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah**	**59**	**59**	**59,00**	**59,00**	**100,00**	**59,00**	**21,00**	**35,59**
02	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN		12						
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			54,00	49,00	90,74	54,00	49,00	90,74
02	01	01	2	02	04	Koordinasi dan	Jumlah dokumen		2						

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Juni Tahun Berjalan 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Juni Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10*	*11=(10/9)*
						Pelaksanaan Akuntasi SKPD	laporan keuangan bulanan dan akhir tahun								
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			2,00	2,00	100,00	2,00	0,00	0,00
02	**01**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**18,38**	**18,38**
02	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguanan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik penerangan		9						
							Jumlah Paket Komponen Instalasi			1,00	1,00	100,00	1,00	0,00	0,00

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Juni Tahun Berjalan 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Juni Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10*	*11=(10/9)*
							Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan								
02	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan		20						
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			20,00	20,00	100,00	20,00	0,00	0,00
02	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistic kantor		325						
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			13,00	13,00	100,00	13,00	0,00	0,00
02	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang	Jumlah jenis barang		30						

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Juni Tahun Berjalan 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Juni Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10*	*11=(10/9)*
						Cetak dan Penggandaan	cetak dan penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			3,00	3,00	100,00	3,00	2,00	66,67
02	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		45						
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			50,00	50,00	100,00	50,00	14,00	28,00
02	**01**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**50,00**	**50,00**

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Juni Tahun Berjalan 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Juni Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10*	*11=(10/9)*
							Perangkat Daerah yang dibutuhkan								
02	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12,00	12,00	100,00	12,00	8,00	66,67
02	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dokumen jasa pelayanan umum kantor		12						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang			12,00	12,00	100,00	12,00	8,00	66,67

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Juni Tahun Berjalan 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Juni Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10*	*11=(10/9)*
							Disediakan								
02	**01**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**12,90**	**12,90**
02	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara		60						
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan			60,00	60,00	100,00	60,00	12,00	20,00

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Juni Tahun Berjalan 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Juni Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10*	*11=(10/9)*
							dibayarkan Pajaknya								
02	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara		7						
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			7,00	7,00	100,00	7,00	4,00	57,14
02	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara		20						

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Juni Tahun Berjalan 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Juni Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10*	*11=(10/9)*
						Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			20,00	20,00	100,00	25,00	0,00	0,00
02	01	01	2	09	09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Banguanan Lainnya	Jumlah item/ ruang kantor Dinas Lingkungan yang dipelihara		1						
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1,00	1,00	100,00	1,00	0,00	0,00
02	**01**	**02**				**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**Persentase Dokumen Informasi Lingkungan Hidup yang Terpenuhi**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Juni Tahun Berjalan 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Juni Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10*	*11=(10/9)*
02	**01**	**02**	**2**	**01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen perencanaan dan kajian lingkungan hidup**	**3**	**3**	**3,00**	**3,00**	**100,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**
02	01	02	2	01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten		3						
							Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH			6,00	6,00	100,00	6,00	0,00	0,00

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Juni Tahun Berjalan 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Juni Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10*	*11=(10/9)*
							Provinsi								
02	**01**	**03**				**Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Persentase Status Mutu Air Permukaan**	**50,65**	**50**	**50,60**	**52.50**	**103.75**	**52,60**	**0,00**	**0,00**
							Persentase Pemenuhan Kualitas Tutupan Lahan	**34,52**	**36,34**	**36,34**	**36.05**	**99.20**	**36,34**	**0,00**	**0,00**
							Persentase Pemenuhan Kualitas Udara	**84,50**	**91,89**	**91,89**	**92.06**	**100.19**	**92.06**	**0,00**	**0,00**
02	**01**	**03**	**2**	**01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Prosentase Pencegahan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
02	01	03	2	01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan	Jumlah koordinasi pelaksanaan		100						

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Juni Tahun Berjalan 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Juni Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10*	*11=(10/9)*
						Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	pencegahan pencemaran lingkungan								
							Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			28,00	28,00	100,00	28,00	0,00	0,00
02	01	03	2	01	15	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan		0	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Juni Tahun Berjalan 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Juni Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10*	*11=(10/9)*
02	**01**	**03**	**2**	**02**		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Prosentase penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	
02	01	03	2	02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah upaya penghentian pencemaran		12						
02	**01**	**04**				**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**	**Luas Area Keanekaragaman Hayati yang meningkat**	**156.107,40**	**108.149,60**	**124.135,20**	**124.135,20**	**100,00**	**140.120,80**	**124.135,20**	**88,59**
02	**01**	**04**	**2**	**01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**% ruang terbuka hijau di luar kawasan hutan**	**44,85**	**43,55**	**43,95**	**43,95**	**100,00**	**44,45**	**44,14**	**99,3**

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Juni Tahun Berjalan 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Juni Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10*	*11=(10/9)*
02	01	04	2	01	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	% taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan		65						
							Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola			242,00	242,00	100,00	242,00	89,00	36,78
02	01	04	2	01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati	% taman kota dan jalur hijau yang terpelihara		84,33						
							Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota			8,00	8,00	100,00	8,00	3,00	37,5

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Juni Tahun Berjalan 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Juni Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10*	*11=(10/9)*
02	**01**	**05**				**Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)**	**Jumlah sarana dan prasarana Limbah B3 sekala Kabupaten**	**4**	**4**	**5,00**	**5,00**	**100,00**	**5,00**	**4,00**	**80,00**
02	**01**	**05**	**2**	**01**		**Penyimpanan Sementara Limbah B3**	**Jumlah rekomendasi teknis penyimpanan dan pengumpulan sementara limbah B3**	**5**	**9**	**5,00**	**5,00**	**100,00**	**5,00**	**5,00**	**100,00**
02	01	05	2	01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan	Jumlah usaha dan atau kegiatan penghasil Limbah B3		40						

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Juni Tahun Berjalan 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Juni Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10*	*11=(10/9)*
						Sementara Limbah B3									
							Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3			40,00	40,00	100,00	45,00	7,00	15,56
02	**01**	**06**				**Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan**	**Indeks Kepuasan Pelaku Usaha**	**85**	**77,14**	**80,00**	**81,00**	**101,25**	**81,00**	**0,00**	**0,00**

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Juni Tahun Berjalan 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Juni Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10*	*11=(10/9)*
						Lingkungan Hidup (PPLH)									
02	**01**	**06**	**2**	**01**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang memiliki Izin Lingkungan dan Izin PPLH dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
02	01	06	2	01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Prosentase izin lingkungan Hidup, izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang		100						

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Juni Tahun Berjalan 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Juni Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10*	*11=(10/9)*
							terfasilitasi								
							Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan			100,00	100,00	100,00	100,00	16,00	16,00
02	**01**	**08**				**Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**	**Presentase Kader Lingkungan**	**47,66**	**44,72**	**45,03**	**45,06**	**100,07**	**46,20**	**0,00**	**0,00**
02	**01**	**08**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan**	**Jumlah pendidikan dan pelatihan masyarakat**	**130**	**90**	**110,00**	**150,00**	**136,36**	**150,00**	**86,00**	**57,33**

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Juni Tahun Berjalan 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Juni Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10*	*11=(10/9)*
						Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
02	01	08	2	01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kader lingkungan		150						
							Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas			154,00	155,00	100,65	158,00	180,00	113,92

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Juni Tahun Berjalan 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Juni Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10*	*11=(10/9)*
							dan kompetensinya terkait PPLH								
02	**01**	**09**				**Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**	**Prosentase perolehan penghargaan lingkungan untuk masyarakat**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
02	**01**	**09**	**2**	**01**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah penghargaan lingkungan hidup**	**200**	**175**	**186,00**	**186,00**	**100,00**	**196,00**	**186,00**	**94,9**
02	01	09	2	01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan	Jumlah penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi		37						

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Juni Tahun Berjalan 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Juni Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10*	*11=(10/9)*
						dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup								
							Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH			5,00	5,00	100,00	5,00	0,00	0,00
02	**01**	**10**				**Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**	**Jumlah laporan verifikasi pengaduan dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup**	**1**	**1**	**1,00**	**1,00**	**100,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**
02	**01**	**10**	**2**	**01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang**	**Persentase Pengaduan Masyarakat Dibidang**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**24,99**	**24,99**

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Juni Tahun Berjalan 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Juni Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10*	*11=(10/9)*
						Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	**PPLH Kab./Kota Yang Terselesaikan Dalam 1 Tahun**								
02	01	10	2	01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kab./Kota yang Dikelola/Terfasilitasi dalam 1 Tahun		14						
							Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti/			12,00	12,00	100,00	12,00	5,00	41,67

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Juni Tahun Berjalan 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Juni Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10*	*11=(10/9)*
							ditangani								
02	**01**	**11**				**Program Pengelolaan Persampahan**	**Prosentase sampah yang terkelola di wilayah kota**	**100**	**99**	**99,00**	**99,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
02	**01**	**11**	**2**	**01**		**Pengelolaan Sampah**	**Prosentase sarana dan prasarana pengangkutan yang layak fungsi**	**100**	**100**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**33,00**	**33,00**
02	01	11	2	01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Jakstrada		1						
02	01	11	2	01	04	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota			6,00	6,00	100,00	6,00	0,00	0,00

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Juni Tahun Berjalan 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Juni Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10*	*11=(10/9)*
							termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan								
02	01	11	2	01	03	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan	Jumlah sarana dan prasarana pengumpulan yang layak fungsi		23						

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Juni Tahun Berjalan 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Juni Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10*	*11=(10/9)*
						perundangan									
							Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan			12.152,00	12.152,00	100,00	12.152,00	7.137,13	58,73
02	01	11	2	01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat	Jumlah kegiatan sosialisasi dan rakor		2						

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Juni Tahun Berjalan 2025	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Juni Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10*	*11=(10/9)*
						dalam Pengelolaan Persampahan									
							Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat			12,00	12,00	100,00	12,00	0,00	0,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Dalam rangka mendukung dan mencapai tujuan sasaran daerah Kabupaten Pacitan ditetapkan beberapa strategi dan kebijakan yang merupakan ketentuan – ketentuan yang dijadikan pedoman pelaksanaan merupakan alat untuk mencapai kinerja pelayanan sesuai tupoksi yang dimandatkan ke Dinas Lingkungan Hidup.

Adapun capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 serta indikator kinerja RPJMD Kabupaten Pacitan yang bmenggambarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup.

Tolok ukur dan indikator kinerja didasarkan pada perhitungan teknis, selanjutnya hasil analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan

NO.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Capaian Setiap Tahun						Realisasi Capaian					Proyeksi	Catatan
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*15*	*16*
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	√		58,94	59,33	59,72	60,09	60,46	60,83	71,68	64,96	62,14	60,09	60,46	60,83	
2	Hasil Nilai SAKIP PD			70,50	71,40	72,30	73,20	74,10	75	70,50	78,65	73,15	73,20	74,10	75,00	
3	Persentase Dokumen Informasi Lingkungan Hidup yang Terpenuhi			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Status Mutu Air Permukaan		√	50,5	50,55	50,6	50,6	50,65	50,65	50,5	60	50	50,6	50,65	50,65	
5	Persentase Pemenuhan Kualitas Tutupan Lahan			26,99	28,49	30,02	31,52	33,02	34,52	26,99	29,49	36,34	31,52	36,34	36,34	
6	Persentase Pemenuhan Kualitas Udara		√	84,05	84,15	84,25	84,35	84,45	84,5	84,05	88,74	91,89	84,35	91,89	91,89	
7	Luas Area Keanekaragaman Hayati yang meningkat		√	76.178,35	92.163,95	108.149,60	124.135,20	140.120,80	156.107,40	76.178,35	92.163,95	108.149,60	124.135,20	140.120,80	156.107,40	
8	Jumlah sarana dan prasarana Limbah B3 sekala Kabupaten			2	4	4	4	4	4	2	7	4	4	4	4	
9	Indeks Kepuasan Pelaku Usaha			70	75	75	80	80	85B	70	80	77,14	80	80	85	
10	Presentase Kader Lingkungan			42,11	42,98	43,86	45,03	46,20	47,66	42,11	43,27	44,72	45,03	46,20	47,66	
11	Prosentase perolehan penghargaan lingkungan untuk masyarakat			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
12	Jumlah laporan verifikasi pengaduan dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
13	Prosentase sampah yang terkelola di wilayah kota		√	98	99	99	99	100	100	98	97,96	99	99	100	100	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Pelayanan yang diharapkan dan menjadi tuntutan pelayanan publik oleh organisasi publik yaitu pemerintah lebih mengarah pada pemberian layanan publik yang lebih profesional, efektif, efisien, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif (Widodo, 2001:75). Terkait dengan hal tersebut maka tingkat kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup masih perlu untuk diperbaiki dan ditingkatkan sedangkan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup adalah koordinasi dan sinergisitas dengan dinas instansi terkait yang mempunyai hubungan dalam mewujudkan pemberdayaan pengelolaan lingkungan, pemantauan dan pengawasan lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas dan fungsi lingkungan hidup.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup ditemui beberapa permasalahan dan hambatan seperti keterbatasan sarana dan prasarana kerja dan terbatasnya data informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Permasalahan dan hambatan tersebut diusahakan untuk dapat diatasi dengan memafaatkan sumberdaya yang ada sehingga tidak berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup adalah bahwa isu lingkungan hidup belum ditempatkan sebagai faktor utama dalam pembangunan ekonomi padahal saat ini masalah lingkungan merupakan isu global sehingga mau tidak mau masalah lingkungan hidup akan menjadi salah satu pusat perhatian karena meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik (good environmental governance). Permasalah yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi antara lain :

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan dengan kondisi yang baik serta masih rendahnya penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) sedangkan volume timbulan sampah pertahun yang meningkat.

2. Meningkatnya jumlah usaha dan/atau kegiatan pada operasionalnya menimbulkan penurunan kualitas lingkungan serta belum melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Meningkatnya alih fungsi lahan untuk kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dan mengancam jumlah keanekaragaman hayati serta meningkatkan pemanasan global.
4. Masih ada ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan ketentuan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Perkotaan.
5. Belum optimalnya pendampingan dan pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada usaha dan/atau kegiatan sesuai kewenangannya sehingga dalam operasional usaha dan/atua kegiatannya berpotensi terjadi penurunan kualitas air, kualitas udara dan kualitas tanah.
6. Meningkatnya penggunaan sumber daya alam yang berlebihan dan pelepasan limbah tanpa treatment ke badan air permukaan, udara maupun ke tanah yang menyebabkan pencemaran lingkungan.
7. Belum optimalnya penanganan air limbah baik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan maupun rumah tangga/domestik secara terpadu sesuai dengan baku mutu masing-masing karakteristik air limbah.
8. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun, yang memuat daftar Program dan Kegiatan seluruh PD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan RENJA PD serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Rancangan awal RKPD Kabupaten Pacitan tahun 2026 telah disusun pada akhir bulan Juni 2025. Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap

rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan PD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD.

Dalam Rancangan Awal RKPD terdapat 10 nomenklatur program yang dicantumkan dalam RENJA Dinas Lingkungan Hidup, yaitu :

1. Program Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3);
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup; dan
10. Program Pengelolaan Persampahan.

Tabel 2.3.

Review Terhadap Rancangan Awal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Hasil nilai evaluasi SAKIP PD**	74,10	**6.669.817.368,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**Hasil nilai evaluasi SAKIP PD**	74,10	**6.378.227.263,00**	
i	**Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja PD**	**23,00**	**145.000.000,00**	**Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja PD**	**23,00**	**145.000.000,00**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen Perencanaan PD	4,00	45.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen Perencanaan PD	4,00	45.000.000,00	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen evaluasi	1,00	100.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen evaluasi	1,00	100.000.000,00	
ii	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen laporan keuangan PD**	**59,00**	**5.228.732.287,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen laporan keuangan PD**	**59,00**	**4.975.369.891,00**	
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN	54,00	5.222.653.247,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN	54,00	4.969.290.851,00	
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan dan akhir tahun	2,00	6.079.040,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan dan akhir tahun	2,00	6.079.040,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
iii	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100,00**	**367.279.134,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100,00**	**310.201.425,00**	
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah jenis komponen listrik/ penerangan	1,00	5.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah jenis komponen listrik/ penerangan	1,00	5.000.000,00	
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan	20,00	236.279.134,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan	20,00	237.340.223,00	
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah bahan logistic kantor	13,00	50.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah bahan logistic kantor	13,00	8.519.500,00	
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pacitan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	3,00	5.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pacitan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	3,00	12.470.100,00	
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50,00	65.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50,00	49.621.900,00	
iv	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan**	**100,00**	**537.415.947,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan**	**100,00**	**539.215.947,00**	
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pacitan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12,00	87.942.875,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pacitan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12,00	87.942.875,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
10	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen jasa pelayanan umum kantor	12,00	449.473.072,00	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen jasa pelayanan umum kantor	12,00	451.273.072,00	
v	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**100,00**	**391.390.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**100,00**	**408.440.000,00**	
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pacitan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	60,00	118.255.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pacitan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	60,00	134.255.000,00	
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pacitan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dipelihara	7,00	158.135.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pacitan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dipelihara	7,00	158.135.000,00	
13	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pacitan	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	25,00	15.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pacitan	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	25,00	21.069.000,00	
14	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan	Jumlah item/ ruang kantor Dinas Lingkungan yang dipelihara	1,00	100.000.000,00	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan	Jumlah item/ ruang kantor Dinas Lingkungan yang dipelihara	1,00	94.981.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
II.	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**		**Persentase Dokumen Informasi Lingkungan Hidup yang Terpenuhi**	**100,00**	**600.000.000,00**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**		**Persentase Dokumen Informasi Lingkungan Hidup yang Terpenuhi**	**100,00**	**561.020.520,00**	
vi	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**		**Jumlah dokumen perencanaan dan kajian lingkungan hidup**	**3,00**	**600.000.000,00**	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**		**Jumlah dokumen perencanaan dan kajian lingkungan hidup**	**3,00**	**561.020.520,00**	
15	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	Jumlah koordinasi penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten	6,00	600.000.000,00	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	Jumlah koordinasi penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten	6,00	561.020.520,00	
III	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**		**Persentase Status Mutu Air Permukaan**	**52,50**	**282.411.000,00**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**		**Persentase Status Mutu Air Permukaan**	**52,50**	**274.668.000,00**	
			Persentase Pemenuhan Kualitas Tutupan Lahan	**36,34**				**Persentase Pemenuhan Kualitas Tutupan Lahan**	**36,34**		
			Persentase Pemenuhan Kualitas Udara	**92,06**				**Persentase Pemenuhan Kualitas Udara**	**92,06**		
vii	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**		**Prosentase Pencegahan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan**	**100,00**	**282.411.000,00**	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**		**Prosentase Pencegahan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan**	**100,00**	**274.668.000,00**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
16	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Kab. Pacitan	Jumlah koordinasi pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan	28,00	234.151.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Kab. Pacitan	Jumlah koordinasi pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan	28,00	230.518.000,00	
17	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Pacitan	Penurunan Intensitas Emisi GRK	1,00	35.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Pacitan	Penurunan Intensitas Emisi GRK	1,00	35.000.000,00	
18	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Kab. Pacitan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh Laboratprium Lingkungan	1,00	13.260.000,00	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Kab. Pacitan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh Laboratprium Lingkungan	1,00	9.150.000,00	
IV	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**		**Luas Area Keanekaragaman Hayati yang meningkat**	**140.120, 80**	**2.228.233.000,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**		**Luas Area Keanekaragaman Hayati yang meningkat**	**140.120, 80**	**2.286.143.000,00**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
viii	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**		**% ruang terbuka hijau di luar kawasan hutan**	**44,45**	**2.228.233.000,00**	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**		**% ruang terbuka hijau di luar kawasan hutan**	**44,45**	**2.286.143.000,00**	
19	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati	Kab. Pacitan	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	242,00	1.863.233.000,00	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati	Kab. Pacitan	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	242,00	2.040.898.000,00	
20	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kab. Pacitan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	8,00	365.000.000,00	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kab. Pacitan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	8,00	245.245.000,00	
V	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**		**Jumlah sarana dan prasarana Limbah B3 sekala Kabupaten**	**5,00**	**15.250.000,00**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**		**Jumlah sarana dan prasarana Limbah B3 sek ala Kabupaten**	**5,00**	**6.442.219,00**	
ix	**Penyimpanan Sementara Limbah B3**		**Jumlah rekomendasi teknis penyimpanan dan pengumpulan sementara limbah B3**	**5,00**	**15.250.000,00**	**Penyimpanan Sementara Limbah B3**		**Jumlah rekomendasi teknis penyimpanan dan pengumpulan sementara limbah B3**	**5,00**	**6.442.219,00**	
21	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi	45,00	15.250.000,00	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi	45,00	6.442.219,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3		Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3			Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3		Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3			
VI	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**		**Indeks Kepuasan Pelaku Usaha**	**81,00**	**50.830.000,00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**		**Indeks Kepuasan Pelaku Usaha**	**81,00**	**28.364.980,00**	
x	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**Prosentase pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang memiliki Izin Lingkungan dan Izin PPLH dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**100,00**	**50.830.000,00**	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**Prosentase pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang memiliki Izin Lingkungan dan Izin PPLH dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**100,00**	**28.364.980,00**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
22	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kab. Pacitan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	100,00	50.830.000,00	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kab. Pacitan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	100,00	28.364.980,00	
VII	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**		**Presentase Kader Lingkungan**	**46,20**	**25.000.000,00**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**		**Presentase Kader Lingkungan**	**46,20**	**14.148.000,00**	
xi	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah pendidikan dan pelatihan masyarakat**	**150,00**	**25.000.000,00**	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah pendidikan dan pelatihan masyarakat**	**150,00**	**14.148.000,00**	
23	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup	Kab. Pacitan	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	158,00	25.000.000,00	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup	Kab. Pacitan	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat	158,00	14.148.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	untuk Lembaga Kemasyarakatan		yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH			untuk Lembaga Kemasyarakatan		yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH			
VIII	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**		**Prosentase perolehan penghargaan lingkungan untuk masyarakat**	**100,00**	**45.000.000,00**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**		**Prosentase perolehan penghargaan lingkungan untuk masyarakat**	**100,00**	**28.420.000,00**	
xii	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah penghargaan lingkungan hidup**	**196,00**	**45.000.000,00**	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah penghargaan lingkungan hidup**	**196,00**	**28.420.000,00**	
24	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Pacitan	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5,00	45.000.000,00	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Pacitan	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5,00	28.420.000,00	
IX	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**		**Jumlah laporan verifikasi pengaduan dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup**	**1,00**	**25.000.000,00**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**		**Jumlah laporan verifikasi pengaduan dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup**	**1,00**	**17.386.000,00**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
xiii	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**		**Persentase Pengaduan Masyarakat Dibidang PPLH Kab./Kota Yang Terselesaikan Dalam 1 Tahun**	**100,00**	**25.000.000,00**	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**		**Persentase Pengaduan Masyarakat Dibidang PPLH Kab./Kota Yang Terselesaikan Dalam 1 Tahun**	**100,00**	**17.386.000,00**	
25	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	12,00	25.000.000,00	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	12,00	17.386.000,00	
X	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**		**Prosentase sampah yang terkelola**	**100,00**	**2.648.640.419,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**		**Prosentase sampah yang terkelola**	**100,00**	**2.584.141.139,00**	
xiv	**Pengelolaan Sampah**		**Prosentase sarana dan prasarana pengangkutan yang layak fungsi**	**100,00**	**2.648.640.419,00**	**Pengelolaan Sampah**		**Prosentase sarana dan prasarana pengangkutan yang layak fungsi**	**100,00**	**2.584.141.139,00**	
26	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kab. Pacitan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis	12,00	46.500.000,00	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kab. Pacitan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah	12,00	23.095.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Masyarakat					Berbasis Masyarakat			
27	Penanganan Sampah Melalui Pemilahan Dan Pengolahan Sampah Di Instansi Pengolahan Sampah TPS3R, PDU, TPST,TPS, SPA,PSEL/PLTSa, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigeter, Bank Sampah, Dan Fasilitas Lainnya Sesuai Dengan Peraturan Perundangan	Kab. Pacitan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	12.152,00	2.587.140.419,00	Penanganan Sampah Melalui Pemilahan Dan Pengolahan Sampah Di Instansi Pengolahan Sampah TPS3R, PDU, TPST,TPS, SPA,PSEL/PLTSa, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigeter, Bank Sampah, Dan Fasilitas Lainnya Sesuai Dengan Peraturan Perundangan	Kab. Pacitan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	12.152,00	2.553.918.139,00	
28	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen Kerjasama penanganan sampah di TPS/TPSTkabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	6,00	15.000.000,00	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen Jakstrada	6,00	7.128.000,00	
	JUMLAH				**12.590.181.787,00**	**JUMLAH**				**12.178.961.121,00**	

2.5 Penelaahan usulan Program & Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.

Pada Forum Perangkat Daerah, usulan program kegiatan dari pemangku kepentingan secara spesifik tidak ada yang ditujukan langsung ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB. III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan mengacu pada kebijakan Nasional dan Provinsi, agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat Nasional dan Provinsi dengan kata lain bahwa fungsi layanan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan telah mendukung kebijakan Nasional dan Provinsi di bidang lingkungan hidup.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Berdasarkan hasil analisis terhadap perkembangan kondisi dan kebutuhan organisasi, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Dinas lingkungan hidup Kabupaten Pacitan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari Renstra yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang lingkungan hidup di Kabupaten Pacitan. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun 2021–2026 adalah Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup. Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang yaitu:

a. Terwujudnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang Optimal;

b. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup; dan

c. Terjaganya Kebersihan di Wilayah Pacitan.

Tabel 3.1

Indikator Tujuan dan Formula Perhitungan

No	Indikator	Formula Perhitungan
1.	Hasil Nilai SAKIP PD	Nilai
2.	Persentase Dokumen Informasi Lingkungan Hidup yang Terpenuhi	$\frac{Jumlah\ dok.\ perencanaan\ dan\ dok.\ kajian\ lingkungan}{Jumlah\ seluruh\ dokumen\ lingkungan}$ x 100%
3.	Persentase Status Mutu Air Permukaan	$IP = \sqrt{\frac{(Ci/Lij)^2 Rata\ rata\ + (Ci/Lij)^2\ Maksimum}{2}}$
4.	Persentase Pemenuhan Kualitas Tutupan Lahan	$100 - \{984{,}3 - \left(\left(\frac{ltl}{lw} - \mathrm{DKK}\right) \mathrm{x}\ 100\right) \mathrm{x}\ \frac{50}{54{,}3}\}$
5.	Persentase Pemenuhan Kualitas Udara	100 – { 50 / 0.9 x (leu – 0,1)}
6.	Luas Area Keanekaragaman Hayati yang meningkat	Luas area keanekaragaman hayati yang terbangun/ terpelihara tahun yang bersangkutan
7.	Jumlah sarana dan prasarana Limbah B3 sekala Kabupaten	Jumlah TPS Limbah B3 dan IPAL
8.	Indeks Kepuasan Pelaku Usaha	Indeks Kepuasan
9.	Presentase Kader Lingkungan	$\frac{Jumlah\ kader\ lingkungan\ ada}{Jumlah\ seluruh\ kader\ lingkungan\ se\ kabupaten\ Pacitan}$ x 100%
10.	Prosentase perolehan penghargaan lingkungan untuk masyarakat	$\frac{Jumlah\ penghargaan\ yang\ diperoleh}{Jumlah\ penghargaan}$ x 100%
11.	Jumlah laporan verifikasi pengaduan dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup	Jumlah laporan verifikasi
12.	Prosentase sampah yang terkelola di wilayah kota	$\frac{Jumlah\ sampah\ terkelola}{Jumlah\ timbulan\ sampah}$ x 100%

Tabel 3.2
Sasaran, Program dan Kegiatan Rencana Kerja
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rp.
1.	Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Hasil Nilai IKM Dinas Lingkungan Hidup	78,61	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45.000.000,00
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000,00
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.969.290.851,00
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD	6.079.040,00
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	237.340.223,00
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.519.500,00
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.719.802,00
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.621.900,00
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	87.942.875,00
						Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	451.273.072,00
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	134.255.000,00

						Jabatan	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	158.135.000,00
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.069.000,00
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	94.981.000,00
2.	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	50,65	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	561.020.520,00
		Indeks Kualitas Udara	91,89	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	230.518.000,00
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	35.000.000,00
		Indeks Tutupan Lahan	36,34			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	9.150.000,00
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati	2.040.898.000,00
						Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	250.000.000,00

						Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	350.000.000,00
						Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	245.245.000,00
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	6.442.219,00
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	14.148.000,00
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	28.420.000,00
		Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	100	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	28.364.980,00
						Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang	45.000.000,00

						diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
		Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	12	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	17.386.000,00
		Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	100	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	23.095.000,00
						Penanganan Sampah Melalui Pemilahan Dan Pengolahan Sampah Di Instansi Pengolahan Sampah TPS3R, PDU, TPST,TPS, SPA,PSEL/PLTSa, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigeter, Bank Sampah, Dan Fasilitas Lainnya Sesuai Dengan Peraturan Perundangan	2.553.918.139,00
						Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	7.128.000,00
TOTAL							**12.178.961.121,00**

3.3 Program & Kegiatan

Daftar Program dan Kegiatan beserta indikator dan kebutuhan anggaran indikatif Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel. 3.3.

Tabel 3.3
Program dan Kegiatan Rencana Kerja
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**													
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**								**12.307.323.517**					**11.582.378.778**
2	**11**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**								**6.606.589.659**					**6.506.681.613**
2	**11**	1	**####**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**145.000.000**					**21.565.400**
2	11	1	####	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil Nilai SAKIP	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhiny a dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	74,10	4 Dokumen	100	45.000.000	DAU		Hasil Nilai SAKIP	75	21.565.400
2	11	1	####	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Nilai SAKIP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhiny a laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	74,10	1 laporan	100	100.000.000	DAU				
2	**11**	1	**####**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**5.228.732.287**					**5.534.402.783**

2	11	1	####	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil Nilai SAKIP	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya laporan gaji dan tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,10	12 Dokumen	100	5.222.653.247	DAU		Hasil Nilai SAKIP	75	5.526.902.783
2	11	1	####	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil Nilai SAKIP	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan dan akhir tahun	Terpenuhiny a laporan keuangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,10	2 Dokumen	100 %	6.079.040	DAU		Hasil Nilai SAKIP	75	7.500.000
2	**11**	1	**####**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**210.000.000**					**197.932.983**
2	11	1	####	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil Nilai SAKIP	Jumlah jenis komponen listrik penerangan	Terpenuhiny a Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguanan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,10	1 paket	100%	5.000.000	DAU		Hasil Nilai SAKIP	75	5.000.000
2	11	1	####	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil Nilai SAKIP	Jumlah jenis peralatan kantor yang disediakan	Berfungsinya peralatan dan perlengkapan kerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,10	20 paket	100%	231.190.223	DAU		Hasil Nilai SAKIP	75	107.650.068
2	11	1	####	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Hasil Nilai SAKIP	Jumlah bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik di Dinas Lingkungan Hidup	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,10	13 paket	100%	8.519.500	DAU		Hasil Nilai SAKIP	75	10.000.000

2	11	1	####	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil Nilai SAKIP	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	Pemenuhan cetak dan penggandaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,10	3 Paket	100%	9.719.802	DAU		Hasil Nilai SAKIP	75	10.282.915
2	11	1	####	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil Nilai SAKIP	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terpenuhiny a rapat - rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,10	50 Kali	100%	49.621.900	DAU		Hasil Nilai SAKIP	75	65.000.000
2	**11**	1	**####**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**537.415.947**					**495.776.047**
2	11	1	####	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil Nilai SAKIP	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhiny a jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,10	12 Bulan	100%	87.942.875	DAU		Hasil Nilai SAKIP	75	87.942.875
2	11	1	####	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil Nilai SAKIP	Jumlah dokumen jasa pelayanan umum kantor	Terpenuhiny a Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,10	12 Bulan	100%	449.473.072	DAU		Hasil Nilai SAKIP	75	407.833.072
2	**11**	1	**####**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**391.390.000**					**257.004.400**

2	11	1	####	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil Nilai SAKIP	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	Terpenuhiny a kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	74,10	60 unit	100%	118.255.000	DAU		Hasil Nilai SAKIP	75	93.850.000
2	11	1	####	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil Nilai SAKIP	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	Terpenuhiny a kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	74,10	7 unit	100%	158.135.000	DAU		Hasil Nilai SAKIP	75	95.743.400
2	11	1	####	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil Nilai SAKIP	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	Terpenuhiny a peralatan dan mesin yang dipelihara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	74,10	25 unit	100%	15.000.000	DAU		Hasil Nilai SAKIP	75	20.000.000
2	11	1	####	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil Nilai SAKIP	Jumlah item/ ruang kantor Dinas Lingkungan yang dipelihara	Terpenuhiny a pemeliharaa n gedung kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	74,10	1 paket	100%	100.000.000	DAU		Hasil Nilai SAKIP	75	47.411.000
2	**11**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**								**561.020.520**					**532.969.494**

2	**11**	2	**####**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**								**561.020.520**					**532.969.494**
2	11	2	####	1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Presentase Dokumen Informasi Lingkungan Hidup Yang Terpenuhi	Jumlah koordinasi penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten	Tersusunnya dokumen pemantauan kerusakan tanah untuk produksi biomassa dan IKPLHD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	6 Dokumen	100	561.020.520	DAU		Presentase Dokumen Informasi Lingkungan Hidup YangTerpenuhi	100%	532.969.494
2	**11**	**3**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**								**274.668.000**					**260.934.600**
2	**11**	3	**####**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**								**274.668.000**					**260.934.600**
2	11	3	####	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Presentase Status Mutu Air Permukaan, Presentase Pemenuhan Kualitas Tutupan Lahan, Presentase Pemenuhan Kualitas Udara	Jumlah koordinasi pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan	Terlaksananya koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	28	100 %	230.518.000	DAU		Presentase Status Mutu Air Permukaan, Presentase Pemenuhan Kualitas Tutupan Lahan, Presentase Pemenuhan Kualitas Udara	100	210.934.600

2	11	3	####	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Presentase Status Mutu Air Permukaan, Presentase Pemenuhan Kualitas Tutupan Lahan, Presentase Pemenuhan Kualitas Udara	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca daei sector LH yang dilaksanakan	Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	1 dokumen	100 %	35.000.000	DAU		Presentase Status Mutu Air Permukaan, Presentase Pemenuhan Kualitas Tutupan Lahan, Presentase Pemenuhan Kualitas Udara	100	35.000.000
2	11	3	####	15	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Presentase Status Mutu Air Permukaan, Presentase Pemenuhan Kualitas Tutupan Lahan, Presentase Pemenuhan Kualitas Udara	Jumlah pengujian yang dilaksanajan oleh Laboratorium Lingkungan	Terlaksananya pengujian yang dilaksanajan oleh Laboratorium Lingkungan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	1 dokumen	100 %	9.150.000	DAU		Presentase Status Mutu Air Permukaan, Presentase Pemenuhan Kualitas Tutupan Lahan, Presentase Pemenuhan Kualitas Udara	100	15.000.000
2	**11**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**								**2.186.143.000**					**2.091.835.850**
2	**11**	4	**####**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**								**2.186.143.000**					2.091.835.850
2	11	4	####	7	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Luas Area Keanekaragaman Hayati Yang Meningkat	% taman kota dan jalur hijau yang terpelihara	Terkelolanya Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	140.120,80	242 unit	100	1.841.955.000	DAU		Luas Keanekaragaman Hayati Yang Meningkat	156.107,40	1.926.835.850
2	11	4	####	9	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan		% taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan	Terkelolanya Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 unit	100	344.188.000	DAU				165.000.000

2	**11**	**5**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**								**6.442.219**					**6.120.108**
2	**11**	5	**####**		**Penyimpanan Sementara Limbah B3**								**6.442.219**					**6.120.108**
2	11	5	####	2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah sarana dan prasarana Limbah B3 sekala Kabupaten	Jumlah usaha dan atau kegiatan penghasil Limbah B3	Terlaksananya pengelolaan limbah B3	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5	45 laporan	100%	6.442.219	DAU		Jumlah sarana dan prasarana Limbah B3 sekala Kabupaten	5	6.120.108
2	**11**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**								**28.364.980**					**26.946.731**
2	**11**	6	**####**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**								**28.364.980**					**26.946.731**
2	11	6	####	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Indeks Kepuasan Pelaku Usaha	Jumlah izin lingkungan Hidup, izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	Terlayaninya permohonan rekomendasi dokumen lingkungan, izin lingkungan dan izin PPLH	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80	100 dokumen	100 %	28.364.980	DAU		Indeks Kepuasan Pelaku Usaha	85	26.946.731
2	**11**	**8**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**								**14.148.000**					**13.440.600**
2	**11**	8	**####**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**14.148.000**					**13.440.600**

2	11	8	####	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Presentase Kader Lingkungan	Jumlah kader lingkungan	Terlaksananya peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46,20	150 orang	100%	14.148.000	DAU		Presentase Kader Lingkungan	47,80	13.440.600
2	**11**	**9**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**								**28.420.000**					**26.999.000**
2	**11**	9	**####**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**								**28.420.000**					**26.999.000**
2	11	9	####	1	Penilaian Kinerja Masyarakat /Lembaga Masyarakat /Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan / Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Prosentase Perolehan Penghargaan Lingkungan Untuk Masyarakat	Jumlah penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5 entitas	100%	28.420.000	DAU		Prosentase Perolehan Penghargaan Lingkungan Untuk Masyarakat	100%	26.999.000
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**								**17.386.000**					**16.516.700**
2	**11**	10	**####**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**								**17.386.000**					**16.516.700**

2	11	10	####	4	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Vrifikasi Pengaduan Dugaan Pencemaran dan atau Perusak Lingkungan Hidup	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kab./Kota yang Dikelola/Terfasilitasi dalam 1 Tahun	Terlaksananya pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1	12 Aduan	100%	17.386.000	DAU		Jumlah Laporan Vrifikasi Pengaduan Dugaan Pencemaran dan atau Perusak Lingkungan Hidup	1	16.516.700
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**								**2.584.141.139**					**2.099.934.082**
2	**11**	11	**####**		**Pengelolaan Sampah**								**2.584.141.139**					**2.099.934.082**
2	11	11	####	4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Prosentase Sampah Yang Terkelola di Wilayah Kota	Jumlah kegiatan sosialisasi dan rakor	Terlaksananya sosialisasi/ koordinasi dan pembinaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	12 kelompok	100%	23.095.000	DAU		Prosentase Sampah Yang Terkelola di Wilayah Kota	100	23.095.000
2	11	11	####	17	Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan		Jumlah sarana dan prasarana pengumpulan yang layak fungsi	Terangkutnya sampah dari sumber ke TPA	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12.152 ton	100%	2.553.918.139	DAU				1.983.486.082
2	11	11	####	21	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota		Jumlah dokumen Jakstrada	Terkumpulnya data Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 dokumen	100%	7.128.000	DAU				7.128.000

2	11	11	####	2 1	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional		Jumlah dokumen Jakstrada	Terkumpulnya data Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 dokumen	100%		DAU				86.225.000
TOTAL													**12.307.323.517**					**11.582.375.778**

BAB. IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025. Sebagai penjabaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan 2025. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Tahun 2024.

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja Perubahan Tahun 2025 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 pada Dinas Lingkungan Hidup.

Akhirnya, Renja Perubahan ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan Tahun 2025. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam rangka mewujudkan *good governance*.

PEMERINTAH
KABUPATEN PACITAN

RENJA PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

dispendukcapilpacitan@gmail.com

JL. Veteran No.15 Pacitan

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025.

Rencana Kerja Perubahan ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan aspirasi stakeholder yang disinkronkan dengan Program Strategis Nasional Kementrian Dalam Negeri khususnya di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021–2026 serta Perubahan Ketiga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026.

Kami menyadari atas keterbatasan dan kekurangan kami, sehingga dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan Tahun 2025 mungkin masih terdapat kekurangan dan kelemahan, maka kami dengan kerendahan hati mengharapkan koreksi dan masukan untuk penyempurnaan lebih lanjut, agar dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 (satu) tahun kedepan agar lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan.

Pacitan, 21 Juli 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PACITAN

TRI MUDJIHARTO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680524 199603 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL..... iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Rancangan Akhir Rencana Kerja PD Tahun 2023... 6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025..... 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Tw. II Tahun 2025 dan Capaian Renstra PD 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD 14

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 16

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 18

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 21

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 22

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional 22

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD 23

3.3 Program dan Kegiatan 24

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.. 28

4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kebutuhan Dana 28

4.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Pacitan….. 30

BAB IV PENUTUP 38

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan 38

5.2 Rencana Tindak Lanjut 38

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (PD) dan Pencapaian Renstra Perangka Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Pacitan..... 8

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (PD) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan..... 14

Tabel 2.3 Capaian Indikator Kinerja RPJMD 2021-2026 dan RPJMN Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan……... 15

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Pacitan..... 19

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Pacitan..... 21

Tabel 4.1 Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kebutuhan Dana 27

Tabel 4.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Pacitan..... 29

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja (RENJA) perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana kerja perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman kepada rencana strategis (renstra) perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan Tahun 2025 disusun untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan yang komprehensif berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan program dan kegiatan yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Hal ini sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Sementara itu sesuai dengan pasal 7 Undang- Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan Tahun 2025 menjabarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pacitan dan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Ketiga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan.

Renja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, propinsi maupun kabupaten/kota serta dengan pemerintah kabupaten/kota yang berbatasan. Oleh karena itu substansi penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2025 harus selaras dengan dokumen perencanaan baik di tingkat pusat, dokumen perencanaan di tingkat

provinsi dan tidak terlepas memperhatikan pula dokumen perencanaan Pembangunan Kabupaten di Pacitan sehingga akan terjadi sinergitas perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
b. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
d. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang PedomanPenyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
i. Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;
j. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 92 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025;
k. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negra dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 adalah menetapkan program/kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai acuan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang masing-masing yang diemban oleh seluruh aparatur dan dilaksanakan secara koordinasi terpadu agar terwujudnya sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam mewujudkan efisiensi dalam pembangunan daerah, meningkatkan kemandirian serta kesejahteraraan masyarakat di Kabupaten Pacitan.

2. Tujuan :

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai dokumen perencanaan teknis strategis dan sebagai alat koordinasi sinkronisasi pelaksanaan Pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Menjaga konsistensi rencana kerja Pengelola Daerah dengan anggaran kerja Pengelola Daerah;
3. Mencapai visi, misi, tujuan dan strategi kelembagaan serta kebijakan berdasarkan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dijabarkan dari rancangan awal RKPD Kabupaten Pacitan tahun 2025;
4. Mengarahkan kekuatan dan peluang yang telah diidentifikasi untuk mengatasi kelemahan dan tantangan dalam suatu strategi penyelenggaraan pelayaan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.4 SISTEMATIKA

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kebutuhan Dana

4.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Pacitan

BAB V **PENUTUP**

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

5.2 Rencana Tindak Lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja dalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja uang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran / hasil dari kegiatan / program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Adapun hasil evaluasi terhadap target dan realisasi capaian indikator kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2025 sebagaimana disajikan dalam Laporan Kinerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan:
   Rata-rata pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan pada saat ini sampai dengan triwulan II (bulan juni) tahun 2025 untuk realisasi program/kegiatan belum mencapai target yang telah di tetapkan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan:
   Untuk perubahan RKPD tahun 2025 diharapkan untuk triwulan selanjutnya dapat menyelesaikan target yang sudah ditetapkan dan dianggarkan sesuai dengan perencanaan RKPD Perubahan tahun 2025.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan:

Pada Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan capaian sampaidengan triwulan II (bulan juni) tahun 2025 sudah melebihi dari target yaitu sudah mencapai 105%.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

   Pelaksanaan kegiatan pelayanan yang telah direncanakan dapat mencapai target dengan melakukan kegiatan pelayanan terpadu jemput bola ke desa-desa dan sekolah yang dirasa cukup efektif dalam pencapaian target.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah:

   Implikasi capaian program Renstra Perangkat Daerah diproyeksikan dapat tercapai sesuai dengan target kinerja perencanaan, walaupun untuk mencapai kriteria maksimal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat kekurangan SDM. Selain itu adanya efisiensi anggaran dapat membuat kinerja pada pelayanan kependudukan kurang optimal.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penyelenggaraan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut:

   a. Dengan adanya efisiensi anggaran sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan lebih memprioritaskan anggaran yang urgent/penting dan mengoptimalkan serapan anggaran yang ada untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
   b. Melaksanakan dan melanjutkan pelayanan permohonan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara online maupun offline yang sudah berjalan baik di dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan maupun pelayanan yang berada di Kecamatan dan di MPP.
   c. Melakukan Koordinasi dengan BKPSDM Kabupaten Pacitan untuk pengusulan penambahan SDM untuk pengadaan CPNS maupun PPPK.

Capaian pelaksanaan program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (PD) dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2025
Kabupaten Pacitan

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 atau (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2024 atau n-1)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun berjalan		REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025
					Target Renja PD Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2024 atau (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**										
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**										
2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**> B**	**72,75**	**73,00**	**74,25**	**101,71**	**74,25**	**74,55**	**100,40**	**76,40**
2.12.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah dokumen perangkat daerah yang disusun***	***100%***	***10***	***10***	***10***	***100***	***10***	***10***	***100***	***5***
2.12.01.2.01.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	12	10	10	100	10	10	100	5

2.12.01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah***	***100%***	***12***	***10***	***10***	***100***	***10***	***10***	***100***	***3***
		Gaji dan tunjangan ASN yang Tersedia	***14 Bulan***	***14***	***14***	***14***	***100***	***14***	***14***	***100***	***6***
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang	21	26	20	76,92	26	18	69,23	19
2.12.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10 Dokumen	12	10	10	100	10	10	100	3
2.12.01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terpenuhi***	***100%***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***0***
2.12.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1	1	1	100	1	1	100	0
2.12.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi***	***100%***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***28,27***
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	1	1	100	1	1	100	1
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4	4	4	100	4	5	125	6
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	1	1	100	1	1	100	2
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1	1	1	100	1	1	100	2

2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30	30	30	100	30	30	100	6
2.12.01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah***	***100%***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***93,13***
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	3	3	3	100	3	3	100	18
2.12.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 laporan	7	7	7	100	7	7	100	6
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	11	11	11	100	11	11	100	6
2.12.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik***	***80%***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***23,01***
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	14	14	14	100	14	14	100	7
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5	5	5	100	5	5	100	70
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1	1	1	100	1	1	100	0
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Presentase Perekaman KTP Elektronik**	**94,60%**	**99,81**	**96,50**	**99,82**	**103,44**	**99,82**	**99,83**	**102,86**	**99,83**
		Persentase anak usia 01-17 tahun kurang (satu) hari yang memiliki KIA Presentase	**30,00%**	**46,00**	**46,82**	**48,62**	**150,25**	**48,62**	**56,68**	**170,67**	**68,02**

		Presentase Penerbitan KK	**97,75%**	**100**	**98,25**	**100**	**101,78**	**97,25**	**100**	**101,52**	**100**
2.12.02.2.01	***Pelayanan Pendaftaran Penduduk***	***Persentase cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk***	***100%***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	16 Dokumen	1	16	16	100	16	16	100	19
2.12.02.2.03	***Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk***	***Persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk***	***100%***	***-***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***80***
2.12.02.2.03.02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	10 Dokumen	-	10	10	100	10	10	100	18
2.12.02.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	50 Orang	-	60	60	100	50	60	120	30
2.12.02.2.04	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	***100%***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***-***	***0***
	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	0
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase Penerbitan Akta Kelahiran**	**86,35%**	**87,00**	**87,65**	**87,75**	**100,00**	**88,15**	**88,16**	**100,01**	**88,40**
		Persentase Penerbitan Akta Kematian	**56,40%**	**100**	**57,15**	**100**	**174,98**	**57,60**	**100**	**173,61**	**100**

		Persentase Penerbitan Akta Perkawinan	**100 %**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Presentase Penerbitan Akta Perceraian	**100 %**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
2.12.03.2.01	***Pelayanan Pencatatan Sipil***	***Persentase terlaksanannya pelayanan pencatatan sipil***	***100%***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	1 Paket	1	1	1	100	330	639	193	357
2.12.03.2.02	***Penyelenggaraan Pencatatan Sipil***	***Persentase penyelenggaraan pencatatan sipil***	***100 %***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
2.12.03.2.02.06	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	1	16	16	100	23	23	100	8
2.12.03.2.02.08	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	2 Laporan	2	1	1	100	2	2	100	1
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase Sarana Prasarana Penunjang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Dalam Kondisi Baik**	**85,71%**	**94,66**	**89,85**	**98,39**	**109,50**	**90.05**	**100**	**111,05**	**100**
2.12.04.2.01	***Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan***	***Tersedianya Data Kependudukan Per Bulan/Semester***	***100%***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***50***
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dokumen	5	5	5	100	5	5	100	0
2.12.04.2.03	***Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan***	***Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan***	***100%***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***50***

2.12.04.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	3 Dokumen	3	3	3	100	3	3	100	5
2.12.04.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	1 Dokumen	1	1	1	100	1	1	100	0
2.12.04.2.04	***Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan***	***Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan***	***100%***	***-***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***105***
2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	15 Laporan	-	12	12	100	15	15	100	9
2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Tersedianya Buku Profil Kependudukan**	**90 Buku**	**100**	**90**	**90**	**100**	**90**	**90**	**100**	**0**
2.12.05.2.01	***Penyusunan Profil Kependudukan***	***Jumlah Buku Profil Perkembangan Kependudukan***	***90 Buku***	***100***	***90***	***90***	***100***	***90***	***90***	***100***	***0***
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	1	1	1	100	1	1	**100**	**0**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (PD)

Tabel 2.2.1

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH (PD)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PACITAN

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD TAHUN 2021	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI TAHUN 2024	CAPAIAN TAHUN 2024	REALISASI TRIWULAN II TAHUN 2025
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	**Indeks Kepemilikan Dokumen Kependudukan :**	**80,73**	**81,34**	**81,70**	**82,07**	**82.41**	**85.50**	**92,10**	**112,21**	**93,75**
	Persentase Perekaman KTP Elektronik	94,60	95,95	96,5	97,05	97,65	98.15	99,83	102,86	**99,83**
	Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang (satu) Hari yang memiliki KIA	30,00	31,61	32,36	33,21	33,86	34.21	56,68	170,67	
	Persentase Penerbitan Kartu Keluarga	97,75	98	98,25	98,5	98,75	99,00	100	101,52	100
	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	86.,35	87	87,65	88,15	88,65	89.00	88,16	100,01	88,40
	Persentase Penerbitan Akta Kematian	56,40	56,8	57,15	57,6	57,95	58.20	100	173,61	100
	Persentase Penerbitan Akte Perkawinan	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Penerbitan Akte Perceraian	100	100	100	100	100	100	100	100	100
II.	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Layanan Kependudukan**	**84,03**	**85,99**	**86,63**	**87,27**	**87.27**	**87.91**	**87,64**	**101,16**	**87,90**

Tabel 2.2.2

Capaian Indikator Kinerja RPJMD 2021-2026 dan RPJMN Tahun 2024
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan

No.	ASPEK/FOKUS/URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET RPJMN 2024	% REALISASI RPJMN s/d SEMESTER II TAHUN 2024	TARGET RPJMD SEMESTER I TAHUN 2024	%REALISASI RPJMD CAPAIAN SEMESTER I TAHUN 2024	TARGET RPJMD SEMESTER II TAHUN 2024	%REALISASI RPJMD CAPAIAN SEMESTER II TAHUN 2024	STATUS CAPAIAN S/D SEMESTER II 2022 PER INDIKATOR		
									TERCAPAI	BELUM TERCAPAI	TIDAK TERCAPAI
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6	7	8
ASPEK PELAYANAN UMUM											
Fokus Layanan Urusan Wajib RPJMD											
1	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**										
1.	Indeks Kepemilikan Dokumen Kependudukan	**80,73**			**82,07**	**91,34**	**91,53**	**92,10**	Tercapai	-	-
	- Kartu Tanda Penduduk (KTP)	94,60			97,05	99,82	99,82	99,83	**Tercapai**	-	-
	- Kartu Keluarga (KK)	97,75			98,50	100	100	100	Tercapai	-	-
	- Kartu Identitas Anak (KIA)	30,00			33,21	51,76	52,76	56,68	Tercapai	-	-
	- Akta Kelahiran	86,35			88,15	87,81	88,15	88,16	Tercapai	-	-
	- Akta Kematian	56,40			57,60	100	100	100	Tercapai	-	-
	- Akta Perkawinan	100			100	100	100	100	Tercapai	-	-
	- Akta Perceraian	100			100	100	100	100	Tercapai	-	-
2.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Layanan Kependudukan	**84,03**			**86,63**	**87,2**	**87,2**	**87,64**	Tercapai	-	-
Fokus /Aspek Layanan Urusan Wajib RPJMN											
3501	**Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**										
1	Perekaman KTP el		**99,78**	**99,83**					Tercapai		
2	Kartu Identitas Anak (KIA)		**67,97**	**56,68**						**Belum Tercapai**	
3	Kepemilikan Akte Kelahiran 0-18 Tahun		**99,65**	**99,01**						**Belum Tercapai**	
4	Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)		**7,30**	**3,01**						**Belum Tercapai**	
5	Penggunaan kertas putih		**18 Dok**	**18 Dok**					Tercapai		
6	Penggunaan TTE		**20 Dok**	**20 Dok**					Tercapai		
7	Layanan Online		**Sudah**	**Sudah**					Tercapai		
8	Layanan Terintegrasi		**Sudah**	**Sudah**					Tercapai		
9	Perjanjian Kerjasama (PKS)		**10 OPD**	**10**					Tercapai		
10	Akses Data		**Sudah**	**Sudah**					Tercapai		
11	Buku Pokok Pemakaman		**250**	**220**						**Belum Tercapai**	
12	Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan Mitra		**8 Mitra**	**8**					Tercapai		
13	Integrasi Pemanfaatan Data dan Dok Kependudukan dengan OPD		**5 OPD**	**5**					Tercapai		

KETERANGAN RPJMD :

1	Jumlah Indikator			**2**		**2**
2	Jumlah Indikator Tercapai			2		2
3	Jumlah Indikator Belum Tercapai			0		0
4	Jumlah Indikator Tidak Tercapai			0		0
5	Tingkat Capaian			100		100

KETERANGAN RPJMN :

1	Total Point			13	
2	Level			Level 3	
3	Jumlah Indikator Tercapai				9
4	Jumlah Indikator Belum Tercapai				4
5	Jumlah Indikator Tidak Tercapai				0

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam hal pencapaian kinerja pembangunan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan sering melakukan koordinasi baik di tingkat Provinsi maupun tingkat pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia terkait dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Seiring dengan perkembangan pembangunan saat ini ruang lingkup dan capaian tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah serta dampak terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka analisis terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah dengan kondisi lingkungan strategis dapat dijabarkan dengan pendekatan analisa kekuatan dan kelemahan yang meliputi kekuatan dan kelemahan, serta lingkungan eksternal dimana peluang dan ancaman yang berpengaruh terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan serta isu-isu berupa rekomendasi dan catatatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun yang direncanakan adalah capaian kinerja program kegiatan dengan melihat sejauhmana masukan, hasil dan dampak dari program kegiatan tersebut.

Sebagai langkah tindak lanjut tersebut dalam pelaksanaan strategi kebijakan secara teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan berusaha melakukan analisa terhadap faktor-faktor kunci keberhasilan dengan pendekatan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) sebagai media untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal maupun eksternal pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan.

Berdasarkan analisis SWOT, maka faktor-faktor di maksud adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor eksternal

Faktor ekternal terdiri dari peluang (opportunity) dan ancaman (Threats) yang secara spesifik dapat di gambarkan pada tabel berikut ini :

FAKTOR FAKTOR EKSTERNAL

PELUANG (OPPORTUNITY)	ANCAMAN (THREAT)
1. Keinginan kuat dari berbagai pihak untuk mendukung Sistem Administrasi Kependudukan. 2. Semakin meningkatnya pendidikan masyarakat sehingga kepemilikan dan pemahaman akan pentingnya dokumen kependudukan. 3. Adanya keinginan kuat dari masyarakat untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelayanan.	1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan 2. Adanya persepsi masyarakat tentang sulit pengurusan administrasi kependudukan. 3. Adanya potensi tindak kejahatan penyalahgunaan hak akses database kependudukan dan manipulasi data dan dokumen kependudukan.

2. Faktor-faktor Internal

Faktor internal terdiri dari kekuatan dan Weakness yang secara spesifik dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

FAKTOR-FAKTOR INTERNAL

KEKUATAN (STRENGTH)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
1. Tersedianya UU, PP dan Perpres 2. Tersedianya PERDA dan PERBUP tentang administrasi kependudukan 3. Adanya komitmen pimpinan dan seluruh karyawan dan memberikan pelayanan prima 4. Tersedianya SDM yang memadai,di bidang tehnologi Informasi	1. Belum optimalnya sosialisasi tentang administrasi kependudukan 2. Belum optimalnya kebutuhan tenaga ASN untuk pelayanan 3. Kondisi geografis, topografis Kabupaten Pacitan yang kurang mendukung, sehingga muncul tuntutan akan pendekatan dan pelayanan masyarakat yang prima 4. Kurang terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana untuk

	pelayanan, sehingga kinerja pelayanan belum optimal

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Pacitan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				**4.603.889.325**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**4.826.643.100**	
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Nilai SAKIP Perangkat Daerh**	**> B**	**4.285.889.325**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Nilai SAKIP Perangkat Daerh**	**> B**	**4.453.643.100**	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	15.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	20.000.000	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Laporan keuangan PD	10 Dokumen	2.663.282.225	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Laporan keuangan PD	10 Dokumen	2.720.000.000	
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100 %	77.767.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100 %	85.000.000	
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Persentase Operasional Dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	398.079.100	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Persentase Operasional Dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	418.079.100	
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pacitan	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Yng dibutuhkan	100 %	20.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pacitan	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Yng dibutuhkan	100 %	25.000.000	
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pacitan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	100 %	993.761.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pacitan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	100 %	1.052.564.000	
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pacitan	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	80 %	118.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pacitan	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	80 %	133.000.000	
II	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**		**-% anak usia 01-17 tahun kurang (satu)hari yang memiliki KIA** **-% Penerbitan KK**	**33,21%** **98,50%**	**85.000.000**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**		**-% anak usia 01-17 tahun kurang (satu)hari yang memiliki KIA** **-% Penerbitan KK**	**34,21%** **98,75%**	**100.000.000**	

			-% Perekaman KTP Elektronik	**97,05%**				**-% Perekaman KTP Elektronik**	**97,65%**		
1.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Pacitan	Persentase Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100%	25.000.000	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Pacitan	Persentase Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100%	30.000.000	
2.	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kab. Pacitan	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	25.000.000	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kab. Pacitan	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	70.000.000	
II	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**		-% Penerbitan Akta Kelahiran -% Penerbitan Akta Kematian -% Penerbitan Akta Perceraian -% Penerbitan Akta Perkawinan	88,15% 57,60% 100% 100%	**80.000.000**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**		-% Penerbitan Akta Kelahiran -% Penerbitan Akta Kematian -% Penerbitan Akta Perceraian -% Penerbitan Akta Perkawinan	88,65% 57,95% 100% 100%	**95.000.000**	
1.	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Pacitan	Persentase Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil	100 %	25.000.000	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Pacitan	Persentase Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil	100 %	30.000.000	
2.	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kab. Pacitan	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100 %	55.000.000	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kab. Pacitan	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100 %	65.000.000	

III	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Kab. Pacitan	**Persentase sarana prasarana penunjang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalamkondisi baik**	90,05 %	**128.295.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**		**Persentase sarana prasarana penunjang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalamkondisi baik**	90,25 %	**148.295.000**	
1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kab. Pacitan	Tersedianya Data Kependudukan per bulan / semester	100%	20.000.000	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kab. Pacitan	Tersedianya Data Kependudukan per bulan / semester	100%	25.000.000	

2.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Pacitan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	100%	79.450.000	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Pacitan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	100%	89.450.000	
3.	Pembinaan dan Pengawasan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Pacitan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	28.845.000	Pembinaan dan Pengawasan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Pacitan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	33.845.000	
IV	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**		**Tersedianya Buku Profil Kependudukan**		**24.705.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**		**Tersedianya Buku Profil Kependudukan**		**29.705.000**	
1.	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Kab. Pacitan	Jumlah Buku Profil Perkembangan Kependudukan	90 Buku	24.705.000	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Kab. Pacitan	Jumlah Buku Profil Perkembangan Kependudukan	90 Buku	29.705.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan catatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, setiap penyusunan rencana kerja senantiasa memperhatikan usulan atau aspirasi masyarakat. Namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak mengakomodir usulan program/kegiatan masyarakat melalui musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Hal ini mengingat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tugas menerbitkan dokumen kependudukan atas terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting di seluruh wilayah Kabupaten Pacitan.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	-

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta berbagai aturan di bawahnya, penyelenggaraan administrasi kependudukan pada tahun 2020 merupakan kegiatan berkesinambungan dari kegiatan sebelumnya.

Kebijakan Nasional dalam pengelolaan administrasi kependudukan adalah :

1. Pemutakhiran Data Penduduk;
2. Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK);
3. Penerapan KTP elektronik;
4. Rencana Strategis Nasional Pencatatan Sipil ”Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya”.

Pemutakhiran data penduduk dan pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah dilaksanakan, sedangkan penerapan KTP elektronik memasuki tahap pelayanan reguler. Diawali pada tahun 2012 dengan langkah-langkah persiapan. Penerapan KTP elektronik akan berjalan sampai semua penduduk, terutama wajib KTP memiliki KTP elektronik dan selanjutnya pelayanan reguler kepada wajib KTP pemula serta penggantian dokumen yang rusak atau hilang.

Untuk menunjang tercapainya pencatatan kelahiran seluruh anak Indonesia, diperlukan sosialisasi melalui berbagai media dan komitmen yang kuat dari para pengelola program administrasi kependudukan dari mulai tingkat kabupaten sampai di tingkat desa/kelurahan sehingga masyarakat menyadari akan pentingnya memiliki akta kelahiran.

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan dimaksud, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan memiliki fungsi strategis dalam pencapaian Misi keempat Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu ***“Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional, dan Melayani”***, dengan

tujuan ***"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif, Profesional dan Responsif".***

Secara singkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan memiliki mandat yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka terwujudnya kualitas pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu :

1. Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan
2. Meningkatnya cakupan kepemilikan akta catatan sipil
3. Meningkatnya kualitas database kependudukan dan pencatatan sipil yang valid, akuntabel dan akurat

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah (PD)

A. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategi didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pacitan.

Tujuan	:	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan
Indikator Tujuan	:	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

B. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang.

Sasaran :` Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Indikator Sasaran :
1. Indeks Kepemilikan Dokumen Kependudukan
2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Layanan Kependudukan

3.3 Program dan Kegiatan

Beberapa faktor permasalahan yang di hadapi dan menjadi landasan dalam perumusan dan penetapan program kegiatan dan sasaran / target dalam menetapkan indikator kinerja adalah sebagai berikut :

a) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Berdasar pada kondisi daerah, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang dalam pembangunan daerah dan mengacu pada visi kepala daerah terpilih dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah, maka dalam periode 2021-2026, Visi Kabupaten Pacitan adalah: " Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA " Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia bermakna bahwa visi pembangunan dalam periode 2021-2026 bertujuan mewujudkan masyarakat Pacitan yang sejahtera tidak hanya dari sisi ekonomi, namun juga sisi lainnya yaitu kualitas masyarakat yang meningkat dan nantinya akan berujung pada terwujudnya kebahagiaan masyarakat Pacitan lahir dan batin.

Berdasarkan Misi Pemerintah Kabupaten Pacitan maka Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pacitan masuk dalam misi ke empat yaitu: "Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional, dan Melayani". Dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kabupaten Pacitan diharapkan dapat melayani masyarakat kabupaten pacitan dalam pemenuhan administrasi dokumen kependudukan dengan profesional sesuai SOP yang ada dan membuat inovasi pelayanan kependudukan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan dokumen kependudukan.

b) Pencapaian MDGS

Pencapaian MDGS menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk perencanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan.

c) Pengembangan Pusat data base kependudukan

Pengembangan Pusat data base kependudukan merupakan prioritas utama dan target sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan dimana data base kependudukan diperlukan dalam pengambilan strategis kebijakan kependudukan yang terpadu terhadap pengendalian kuantitas, kualitas dan pengarahan mobilitas yang di dukung dengan penyediaan data dan informasi yang akurat sebagai rujukan dasar

dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

d) Pengurangan Kemiskinan

Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam upaya program pengentasan kemiskinan akan terus berupaya menurunkan angka kemiskinan penduduk, terkait dengan hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk melalui perekaman KTP elektronik dengan melakukan kegiatan pelayanan jemput bola ke Desa-Desa baik perekaman regular maupun bagi penduduk rentan (Lansia, ODGJ dan Disabilitas), serta Perekaman KIA dan penerbitan KIA untuk usia anak 0-17 tahun kurang satu hari dengan melakukan kegiatan jemput bola perekaman ke desa-desa maupun ke sekolah-sekolah. Pencatatan Sipil dengan kegiatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Kematian serta Pemanfaatan data kependudukan dalam rangka penanganan kemiskinan untuk kebutuhan data pembangunan lintas sektor seperti Bappeda, Dinas Sosial Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Transmigrasi, BPJS dan lain-lain.

e) Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dalam rangka memenuhi target Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kabupaten Pacitan melaksanakan program dan kegiatan yang terkait untuk memenuhi target yang telah ditetapkan, antara lain :

1. Penyelesaian perekaman KTP-el pemula maupun penduduk rentan (Lansia/sakit, ODGJ dan Penyandang Disabilitas) serta aktivasi IKD melalui petugas pelayanan terpadu dengan kegiatan jemput bola door to door ataupun ke desa-desa dan kegiatan/event yang diadakan oleh pemerintah atau Lembaga tertentu di Kabupaten Pacitan;
2. Pelayanan terintegrasi di Dinas, Kecamatan dan MPP dan kegiatan jemput bola penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Kerjasama pelayanan dan pemanfaatan data dengan Perangkat Daerah dan atau Lembaga lainnya;

4. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi baik melalui iklan, website, media social maupun sosialisasi secara langsung dengan melibatkan masyarakat atau[un pemangku kemepntingan;
5. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana;
6. Penambahan SDM baik melalui pengadaan CPNS maupun PPPK;

Rencana Kerja Prubahan Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan mengacu pada rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Pemerintah Daerah yang memuat Program dan kegiatan dengan pagu pendanaan yang dibutuhkan.

Dalam melaksanakan Program perlu didukung kegiatan yang didasarkan pada sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah antara program Prioritas dan indikator sasaran dalam mendukung RPJMD. Tentunya Program dan Kegiatan yang diusulkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan yang berpengaruh dan berimplikasi langsung terhadap pencapaian atas sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Dalam rangka mendukung Program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan pada Tahun 2025 merencanakan untuk kegiatan/pengadaan : Printer, Scanner KIA, Iris mata, Monitor, Alat Perekaman KTP, Alat Pencetakan KTP, Server KTP dan Tinta/Ribbon KTP melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan dan Perlengkapan Kantor, dan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Untuk menjaga kualitas pelayanan publik, dan untuk mendukung program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengusulkan pagu anggaran sebagimana tertera pada Matrik rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah pada Rencana Kerja Perubahan 2025.

Uraian pelaksanaan program kegiatan, penyebaran lokasi program kegiatan serta rumusan program kegiatan dan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dapat dilihat pada Tabel 4.1.1.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kebutuhan Dana

Program dan Kegiatan Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program dan kegiatan dirumuskan dengan melakukan penyesuaian antara kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis kinerja dengan arah prioritas program dan kegiatan menurut Rancangan Awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telahaan Kebijakan Nasional.

Kebijakan yang menjadikan dasar perubahan anggaran tahun 2025 dengan munculnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negra dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dimana semua anggaran yang telah dilaksanakan pada awal tahun 2025 terjadi pemotongan anggaran sebagaimana penetapan telah di atur pada Inpres tersebut, dengan demikian Pemerintah Daerah kabupaten Pacitan juga harus mengikuti aturan yang ada untuk itu dari anggaran induk tahun 2025 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar **Rp. 4.573.727.989,00** juga melakukan efisiensi sesuai dengan ketentuan yang ada, meskipun demikian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuaten Pacitan tetap melaksanakan kegiatan pelayanan sesuai target yang telah ditetapkan.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan pada tahun 2025 merencanakan : 5 Program, 15 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4.1.1
Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kebutuhan Dana

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	**4.040.453.339**
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.784.083.644**
1.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**49.937.944**
	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.937.944
2.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.111.511.666**
	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.102.335.990
	2) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	9.175.676
3.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**27.750.000**
	1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	27.750.000
4.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**203.331.825**
	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.125.585
	2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.820.258
	3) Penyediaan bahan logistik kantor	27.604.444
	4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.878.278
	5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.903.260
5.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.291.827.735**
	1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	162.473.028
	2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	726.623.222
	3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	402.731.485
6.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**99.724.474**
	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	28.125.234
	2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	71.599.240
	3) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0
II.	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**62.378.770**
1.	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**13.160.000**
	1) Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	13.160.000
2.	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**25.193.478**
	1) Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	12.249.600
	2) Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	12.943.878
3.	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**24.025.292**
	1) Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	24.025.292

III.	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**70.422.789**
1.	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**31.643.834**
	1) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	31.643.834
2.	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**38.778.955**
	1) Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	12.772.323
	2) Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	26.006.632
IV.	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**101.610.451**
1.	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**11.408.892**
	1) Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	11.408.892
2.	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**66.019.559**
	1) Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	22.399.533
	2) Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	43.620.026
3.	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**24.182.000**
	1) Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Administrasi Kependudukan	24.182.000
V.	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**21.957.685**
1.	**Penyusunan Profil Kependudukan**	**21.957.685**
	1) Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	21.957.685

4.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Pacitan

Sedangkan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Pacitan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Rencana PrubahanTahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**4.040.453.339**				**4.717.187.834**
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerh**		**74,75**	**3.784.083.644**			**75,25**	**4.326.328.033**
2	**12**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan**	**Kab. Pacitan**	**10 Dokumen**	**49.937.944**			**10 Dokumen**	**15.000.000**
2	**12**	**01**	**2.01**	**02**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		10 Dokumen	49.937.944	PAD		10 Dokumen	15.000.000
2	**12**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Pacitan**	**10 Dokumen**	**2.111.511.666**			**10 Dokumen**	**2.175.435.761**
						Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia		**14 Bulan**				**14 Bulan**	
2	**12**	**01**	**2.02**	**01**	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		24 Orang	2.102.335.990	DAU		26 Orang	2.165.435.761
2	**12**	**01**	**2.02**	**04**	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		10 Dokumen	9.175.676	PAD		10 Dokumen	10.000.000
2	**12**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi**	**Kab. Pacitan**	**100 %**	**27.750.000**			**100 %**	**85.000.000**

2	12	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1 Dokumen	27.750.000	DAU		1 Dokumen	85.000.000
2	**12**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase Operasional Dasar Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**Kab. Pacitan**	**100 %**	**203.331.825**			**100 %**	**320.000.000**
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	6.125.585	PAD		1 Paket	8.000.000
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		6 Paket	89.820.258	PAD		6 Paket	165.000.000
2	12	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang Disediakan		4 Paket	27.604.444	PAD		4 Paket	41.496.348
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4 Paket	13.878.278	PAD		4 Paket	35.000.000
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	65.903.260	DAU		12 Laporan	157.662.718
2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Pacitan**	**100 %**	**1.291.827.735**			**100 %**	**1.300.000.000**
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		36 Laporan	162.473.028	PAD		36 Laporan	177.659.131
2	12	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Laporan	726.623.222	DAU		12 Laporan	971.074.075
2	12	01	2.08	04	Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	402.731.485	PAD		12 Laporan	400.000.000

2	**12**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik**	**Kab. Pacitan**	**80 %**	**99.724.474**			**80 %**	**95.000.000**
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diperihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		14 Unit	28.125.234	PAD		14 Unit	35.000.000
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		137 Unit	71.599.240	PAD		137 Unit	40.000.000
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi		-	-	-		1 Unit	20.000.000
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase anak usia 01-17 tahun kurang (satu) hari yang memiliki KIA**		**95,00 %**	**62.378.770**			**70,00 %**	**105.000.000**
						Persentase Penerbitan KK		**100 %**				**100 %**	
						Persentase Perekaman KTP Elektronik		**99,83 %**				**99,00 %**	
2	**12**	**02**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Kab. Pacitan**	**100 %**	**13.160.000**			**100 %**	**25.000.000**
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		16 Dokumen	13.160.000	DAU		16 Dokumen	25.000.000
2	**12**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Kab. Pacitan**	**100 %**	**25.193.478**			**100 %**	**50.000.000**
2	12	02	2.01	02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasiln Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk		12 Dokumen	12.249.600	DAU		10 Dokumen	25.000.000

2	12	02	2.01	07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan masyarakat yang mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk		60 Orang	12.943.878	DAU		60 Orang	25.000.000
2	**12**	**02**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendafataran Penduduk**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Kab. Pacitan**	**100 %**	**24.025.292**			**100 %**	**30.000.000**
2	12	02	2.04	03	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Bimbingan Teknis Tekait Pendaftaran Penduduk		1 Laporan	24.025.292	DAU		1 Laporan	**30.000.000**
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase Penerbitan Akta Kelahiran**		**88,65%**	**70.422.789**			**98,83 %**	**100.000.000**
						Persentase Penerbitan Akta Kematian		**100 %**				**100 %**	
						Persentase Penerbitan Akta Perceraian		**100 %**				**100 %**	
						Persentase Penerbitan Akta Perkawinan		**100 %**				**100 %**	
2	**12**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Persentase terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Kab. Pacitan**	**100 %**	**31.643.834**			**100 %**	**40.000.000**
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting		544 Dokumen	31.643.834	DAU		528 Dokumen	**40.000.000**
2	**12**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Kab. Pacitan**	**100 %**	**38.778.955**			**100 %**	**60.000.000**
2	12	03	2.02	06	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Hasil Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil		15 Laporan	12.772.323	DAU		2 Laporan	25.000.000
2	12	03	2.02	08	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil		1 Laporan	26.006.632	DAU		1 Laporan	35.000.000

2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMIISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase sarana prasarana penunjang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam kondisi baik**		**95,00 %**	**101.610.451**			**95,00 %**	**165.000.000**
2	**12**	**04**	**2.01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Tersedianya Data Kependudukan per Bulan / Semester**	**Kab. Pacitan**	**100%**	**11.408.892**			**100%**	**95.000.000**
2	12	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan		5 Dokumen	11.408.892	DAU		5 Dokumen	95.000.000
2	**12**	**04**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan**	**Kab. Pacitan**	**100%**	**66.019.559**			**100%**	**38.000.000**
2	12	04	2.03	07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat		2 Dokumen	22.399.533	DAU		3 Dokumen	28.000.000
2	12	04	2.03	08	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat dipertanggungjawabkan		1 Dokumen	43.620.026	DAU		2 Dokumen	10.000.000
2	**12**	**04**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Kab. Pacitan**	**100 %**	**24.182.000**			**100 %**	**32.000.000**
2	12	04	2.04	01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Administrasi Kependudukan		15 Laporan	24.182.000	DAU		15 Laporan	32.000.000
2	**12**	**05**			**PPROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Tersedianya Buku Profil Kependudukan**		**90 buku**	**21.957.685**			**100 %**	**20.859.801**

2	**12**	**05**	**2.01**		**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Jumlah Buku Profil Perkembangan dan kependudukan**	**Kab. Pacitan**	**90 buku**	**21.957.685**			**90 buku**	**20.859.801**
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain		1 Dokumen (90 buku)	21.957.685	DAU		1 Dokumen (90 buku)	20.859.801

BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan Tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah selama dua triwulan kedepan. Dimana Renja Perubahan ini disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 dan berkesinambungan dari Rencana Kerja Induk tahun 2025. Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, serta kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan, serta mengacu pada prioritas dan sasaran daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan diupayakan agar terjadi sinkronisasi dan sinergitas antar program dan kegiatan. Dimana Renja Perubahan yang dibuat harus berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten, dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan).

Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Perubahan Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangnannya menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut dengan ditetapkannya Renja Perubahan Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) dengan berpedoman pada Kebijakan

Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan berupaya melaksanakan semua program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga dapat bermanfaat dan membahagiakan masyarakat serta stakeholder yang membutuhkan data kependudukan. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguan Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Demikian Rancangan awal Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perubahan dan Perubahan Anggaran Tahun 2025.

Pacitan, 21 Juli 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PACITAN

TRI MUDJIHARTO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680524 199603 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Letjend. Suprapto No.46 Pacitan, Telp/Fax (0357)881070

RENJA 2025

RENCANA KERJA PERUBAHAN

Nomor : 000.7.2.4 / 20.1 / 408.48 / 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAAT DAN DESA
KABUPATEN PACITAN

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan sistematika Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen Renja ini telah mengacu pada RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan.

Dinamika perubahan lingkungan strategis yang bergerak dengan cepat dan sesuai dengan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan senada dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Pacitan terpilih periode 2025-2029, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan menyelaraskan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2025 secara terpadu dan terukur. Dengan demikian seluruh program kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renja tersebut.

Akhirnya dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala upaya dari seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan, kami berharap agar Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) ini pada akhirnya dapat direalisasikan dan sekaligus berkontribusi positif terhadap upaya-upaya pembangunan di Kabupaten Pacitan dalam pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pacitan, 31 Juli 2025
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PACITAN

HERI SETIJONO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730803 199302 1 002

Pendahuluan 1

1.1 Latar Belakang

Perencanaan menempati peranan yang sangat penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), pada Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM), dan rencana pembagunan tahunan/Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan di tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di tingkat pusat maupun propinsi.

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholders atau pemangku kepentingan di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanan makro di daerah yangn berupa RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Oleh karena itu, Perangkat Daerah sebagai stakeholders di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunanrencana strategis sesuai dengan tugas pokoknya.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Perangkat Daerah merupakan kegiatan yang tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD lima tahunan Perangkat Daerah, kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan yang disusun sebagai perwujudan bentuk pelaksanaan teknis visi dan misi yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pacitan yaitu “Pacitan Semakin Sejahtera dan Bahagia” sedangkan misi nya adalah:

Misi 1	:	Pemberantasan Kemiskinan
Misi 2	:	Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Misi 3	:	Memajukan Pariwisata untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
Misi 4	:	Memperkuat Birokrasi yang Profesional dan Melayani

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan Tahun 2025 mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1): Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pemabngunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2005-2025, khususnya pada Bab IV Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang, yang terkait dengan reformasi birokrasi disebutkan bahwa pembangunan aparatur Negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur Negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
11. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembagunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010); dan
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan;
26. Peraturan Daerah No …. Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025–2029.
27. Peraturan Bupati Pacitan Nomor: 139 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan Tahun 2025 dimaksudkan sebagai berikut:

a. Sebagai panduan dalam menyusun dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan Tahun 2025;

b. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2025.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan Tahun 2025 adalah:

a. Rencana Kerja (Renja) menjadi acuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya sesuai dengan RKPD;
b. Renja sebagai dokumen yang berisikan program-program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan yang mengacu pada Renstra dan RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perubahan 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan Tahun 2025 secara garis besar disusun sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra PD Tahun 2025 s.d Triwulan II
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Hasil Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

2

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025 Triwulan II dan Capaian Renstra PD

Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan yang dilaksanakan pada tahun 2025 mengacu pada RPJMD tahun 2021-2026. Alokasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan pada tahun 2025 sesuai rencana kerja sebagaimana yang telah dituangkan dalam DPA-PD Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan sebesar Rp. 7.574.723.963,00

Alokasi anggaran tersebut dipergunakan untuk pelaksanaan 5 program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Penataan Desa
3. Program Peningkatan Kerjasama Desa
4. Program Administrasi Pemerintahan Desa
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Untuk Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan RENJA dan Pencapaian RENSTRA
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan s/d Triwulan II Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
										Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapian	
										Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**72.40**	**75.20**	**72.00**	**3.389.469.447,00**	**72.75**	**1.716.402.105,00**	**101.04 %**	**50.64%**
	2	**13**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**	**23 Dokumen**	**23 Dokumen**	**23 Dokumen**	**64.000.000,00**	**11 Dokumen**	**14.836.280,00**	**44%**	**23.18%**
	2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	52.000.000,00	4 Dokumen	13.562.000,00	30.77%	26.08%
	2	13	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Laporan	13 Dokumen	13 Laporan	12.000.000,00	7 Dokumen	1.274.280,00	58.33%	10.62%
	2	**13**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah**	**32 Dokumen**	**49 Dokumen**	**32 Dokumen**	**2.617.622.981,00**	**13 Dokumen**	**1.411.564.379,00**	**35.14%**	**53.93%**
	2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	26 orang/bulan	25 Orang/bulan	2.571.755.311,00	25 Orang/bulan	1.388.219.179,00	100%	53.98%

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
										Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapian	
										Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	13	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	31 Dokumen	35 Dokumen	31 Dokumen	45.867.670,00	12 Dokumen	23.345.200,00	48%	50,9%
	2	**13**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian**	**100%**	**100%**	**100%**	**19.700.000,00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**0%**
	2	13	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	2 Paket	2 Paket	19.700.000,00	0.00	0.00	0%	0%
	2	**13**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100%**	**100%**	**100%**	**284.000.903,00**	**48.15**	**121.170.244,00**	**48.15%**	**42.67%**
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	12 Paket	2 Paket	19.000.000,00	0.00	11.283.990,00	0%	59.39%
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	20.000.000,00	6 Paket	9.717.000,00	50%	48.59%

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
										Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapian	
										Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	13	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	1 paket	43.286.590,00	100%	86.57%
	2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	195.000.903,00	6 Laporan	56.882.664,00	50%	29.17%
	2	**13**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**76.853.340,00**	**166.70**	**32.478.600,00**	**166.7%**	**42.26%**
	2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 Unit	22 Unit	12 Unit	76.853.340,00	20.00	32.478.600,00	166.7%	42.6%
	2	**13**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat daerah yang dibutuhkan**	**100%**	**100%**	**100%**	**268.016.400,00**	**48.15**	**111.926.802,00**	**48.15%**	**41.76%**
	2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	21.219.000,00	6.00	10.930.120,00	50%	51.51%

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
										Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapian	
										Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	6.00	30.093.067,00	50%	30.09%
	2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	146.797.400,00	6.00	70.903.615,00	50%	48.3%
	2	**13**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**80%**	**80%**	**80 %**	**59.275.823,000**	**41.67**	**24.425.800,00**	**52.09%**	**41.21%**
	2	13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	17 Unit	12 Unit	34.200.000,00	5.00	14.071.800,00	41.6%	41.15%
	2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	13 Unit	12 Unit	25.075.823,00	5.00	10.354.000,00	41.67%	41.29%

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
										Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapian	
										Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	**2**	**13**	**02**			**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa**	**0.60%**	**67%**	**50.3%**	**30.000.000,00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**0%**
	2	**13**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi penyelenggaraan penataan desa**	**1 Desa**	**54 Desa**	**12 Desa**	**30.000.000,00**	**0.00**	**0.00**	**0%**	**0%**
	2	13	02	2.01	0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa									
							Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	1 Desa	54 Desa	12 Desa	30.000.000,00	0.00	0.00	0%	0%
3	**2**	**13**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**Persentase Kerjasama Desa**	**100%**	**21%**	**100%**	**50.000.000,00**	**66.66**	**22.991.960,00**	**66.67%**	**45.98%**
	2	**13**	**03**	**2.01**		**Fasilitasi Kerja Sama antar Desa**	**Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi Kerjasama desa**	**167 Desa**	**20 Desa**	**167 Desa**	**50.000.000,00**	**76**	**22.991.960,00**	**66.67%**	**45.98%**
	2	13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	1.00	22.991.960,00	100%	45.98%
4	**2**	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Kapasitas SDM Aparatur Pemerintahan Desa yang berkualitas**	**100%**	**100%**	**100%**	**3.064.483.832,00**	**100%**	**1.547.036.972,00**	**100%**	**50.48%**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
										Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapian	
										Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	**13**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Jumlah desa yang melaksanakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku**	**167 Desa**	**167 Desa**	**167 Desa**	**3.064.483.832,00**	**167.00**	**1.547.036.972,00**	**100%**	**50.48%**
							Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas SDM Pemerintahan Desa	**167 Desa**	**167 Desa**	**167 Desa**		**0.00**		**0%**	
							Persentase Peningkatan Klasifikasi BUMDesa	**24,99%**	**14%**	**19.23%**		**10%**		**52%**	
	2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa									
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	13 Dokumen	1 Dokumen	2.590.483.832,00	1.00	1.343.830.492,00	100%	51.88%
	2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa									
							Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	167 Orang	167 Orang	167 Orang	100.000.000,00	0.00	39.329.020,00	0%	39.33%

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
										Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapian	
										Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa									
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	4 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	144.000.000,00	2.00	67.714.700,00	50%	47.02%
	2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa									
							Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0.00	15.263.800,00	0%	50.88%
	2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa									
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	12 Dokumen	1 Dokumen	12 Dokumen	75.000.000,00	12.00	15.190.630,00	100%	20.25%
	2	13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD									
							Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	167 Orang	191 orang	167 Orang	75.000.000,00	167.00	35.108.400,00	100%	46.81%
	2	13	04	2.01	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa									
							Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa	0	0	30.00	50.000.000,00	29.00	30.599.930,00	96.67%	61.2%

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
										Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapian	
										Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	**2**	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang terlibat dalam Pembangunan desa**	**59%**	**49%**	**87.84%**	**1.040.770.684,00**	**40.00**	**172.291.126,00**	**45.54%**	**16.55%**
	2	**13**	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa yang Mendapatkan Pembinaan**	**4.121 Lembaga**	**97 Lembaga**	**6.132 Lembaga**	**1.040.770.684,00**	**1.015 Lembaga**	**172.291.126,00**	**42.31%**	**16.55%**
							Jumlah usaha ekonomi Masyarakat yang mendapatkan pembinaan	**13 usaha**	**2 Usaha**	**13 usaha**		**0.00**		**0%**	
							Jumlah desa yang memanfaatkan Tekonologi Tepat Guna secara optimal	**0 desa**	**0 Desa**	**0 Desa**		**0.00**		**0%**	
	2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
										Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapian	
										Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6.815 Lembaga	2 Lembaga	6.815 Lembaga	138.261.000,00	991 Lembaga	20.121.000,00	14,54%	14.55%
	2	13	05	2.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	1.00	16.282.000,00	100%	10.85%
	2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
										Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapian	
										Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	32.509.684,00	0.00	0.00	0%	0%
	2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat									
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	1.00	566.100,00	100%	1.42%
	2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga									
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	680.000.000,00	0.00	135.322.026,00	0%	19.9%
										TOTAL	**7.574.723.963,00**		**3.458.722.163,00**		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan mengacu pada Peraturan Bupati Pacitan Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan.

Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:

a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pemerintahan desa;
b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pemberdayaan masyarakat;
c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pembangunan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 139 Tahun 2021 terdiri dari:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pemerintahan Desa;
d. Bidang Pengembangan Ekonomi Perdesaan;
e. Bidang Pemberdayaan Lembaga Desa; dan
f. UPT Dinas.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan

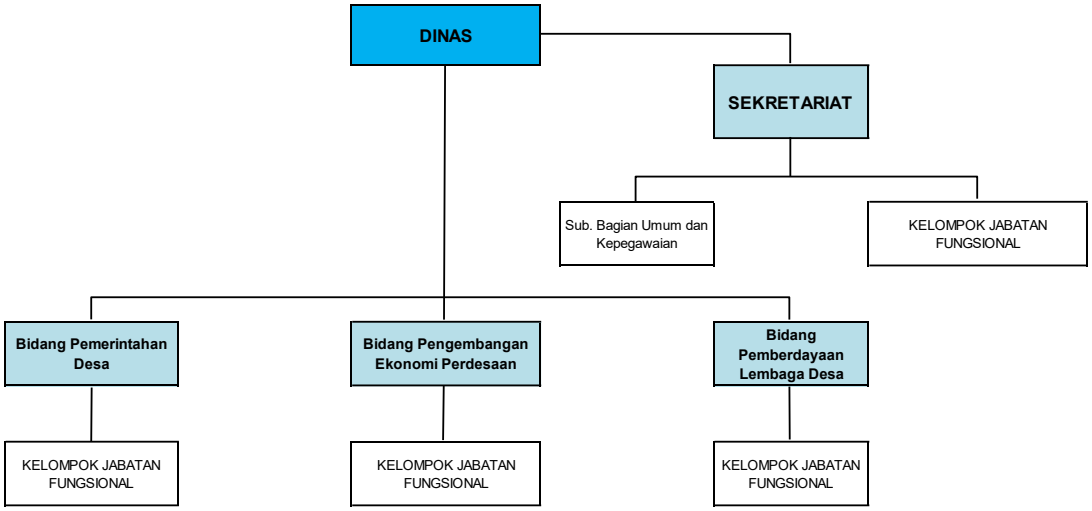

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

1. Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi PD

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang merupakan permasalahan dan hambatan pada Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut:

- Terbatasnya jumlah SDM/aparatur pelaksana program/ kegiatan;
- Masih kurangnya fasilitas penunjang (Sarpras) guna mobilitas pelaksanaan kegiatan;
- Rendahnya kapasitas aparatur Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- Belum terintegrasinya data di tingkat desa;
- Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset desa.
- Kurangnya inovasi dan keberanian desa untuk berkomitmen dalam pengembangan BUMDesa;
- Belum adanya penetapan kawasan perdesaan serta pengelolaan potensi Sumber Daya Alam (SDA) sehingga kerjasama desa belum optimal dilaksanakan.
- Kurang optimalnya peran Lembaga Keuangan Desa dan Lembaga Adat Desa dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa;
- Rendahnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa;

- Minimnya data Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

2. **Dampak Terhadap Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah, Terhadap Capaian Program Nasional/ Internasional**

   Akibat terbatasnya anggaran/ kegiatan pendukung maka realisasi pelaksanaan kegiatan masih ada yang belum sesuai perencanaan.

3. **Tantangan Dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan PD**.

   Tantangan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meningkatkan pelayanan PD sangat komplek antara lain:

   1. SDM Aparatur Pemerintah Desa yang masih rendah sehingga perlu adanya peningkatan SDM melalui pelatihan-pelatihan.
   2. Era globalisasi atau pasar bebas, membutuhkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan usaha, posisi tawar dan daya saingnya;
   3. Sumberdaya alam yang melimpah, belum secara optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat;
   4. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, melahirkan banyak regulasi yang perlu ditindaklanjuti secara operasional dalam pengelolaan pemerintahan desa;

   Sedangkan peluang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam meningkatkan pelayanan PD adalah sebagai berikut:

   1. Perubahan paradigma pembangunan yang menitik beratkan pada menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki rakyat, dan memberdayakan mengandung pula arti melindungi masyarakat
   2. Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;
   3. Keterbukaan Informasi dan Teknologi Informasi yang terus berkembang.

   Dalam menyikapi tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menerapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

   - Strategi

Untuk mencapai tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan merumuskan strategi sebagai berikut:

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, BPD dan Kerjasama Desa.

- Kebijakan

  Dalam rangka mencapai tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan, ditempuh kebijakan sebagai berikut:

  1. Mengoptimalkan upaya penataan desa yang efektif dan efisien;
  2. Mengoptimalkan penyediaan sarpras Siskeudes;
  3. Mengupayakan penerapan pengelolaan dan pelayanan Desa dengan Teknologi Informasi agar dapat lebih cepat mudah dan murah;
  4. Memfasilitasi penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa, lembaga adat dan pendamping masyarakat;
  5. Memfasilitasi peningkatan lembaga ekonomi desa dan usaha ekonomi masyarakat.

4. Rekomendasi dan Catatan Yang Strategis

Menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan, mohon kepada pihak yang berkepentingan antara lain: Pemerintah Daerah, TAPD, Pembina Kepegawaian untuk memberi perhatian dan solusi dan memberikan solusi terbaik guna mengatasi permasalahan dimaksud.

1. Kepada TAPD Kabupaten Pacitan untuk menyediakan/ menambah anggaran pelaksanaan kegiatan;
2. Kepada Pembina Kepegawaian Daerah untuk meningkatkan SDM aparatur;
3. Kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan;
4. Kepada Camat di 12 Kecamatan di Kabupaten Pacitan untuk meningkatkan peran sebagai jembatan antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan desa-desa di Kabupaten Pacitan.

Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan 3

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi dijadikan acuan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan dengan upaya menyelaraskan dari salah satu agenda prioritas nasional dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.

Sebagaimana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren (wajib dan pilihan) yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah diwadahi dalam kelembagaan dinas daerah. Sedangkan kelembagaan badan daerah adalah untuk melaksnakan fungsi penunjang urusan pemerintahan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta fungsi lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan UU 23 Tahun 2014, pasal 12, point g, merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan satu kesatuan (i) Tata Kelola Pemerintahan Desa, (ii) Tata Kelola Lembaga Kemasyarakatan dan (iii) Tata Kelola Ekonomi dan Lingkungan, adapun lokus pemberdayaan masyarakat dan desa adalah desa.

Desa yang beberapa dekade menjadi obyek pembangunan, dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi memiliki banyak keistimewaan sebagai subyek pembangunan. Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang bersumber dari APBN menjadi salah satu sumber APBDesa yang menjanjikan bergeraknya roda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa menjadi lebih aktif dan dinamis. Kewenangan kepala desa dan perangkat desa yang diimbangi dengan peroleha gaji serta penghasilan tetap yang diatur dalam undang-undang desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para pamong desa ini sehingga dapat lebih kerja dalam melayani masyarakatnya.

Kewenangan dan alokasi dana yang besar diamanatkan UU Desa itu, tidak ada satu pasal pun yang mengisyaratkan monopoli kebijakan kepala desa, Kepala desa akan memikul tanggung jawab yang lebih besar untuk mempertanggungjawabkan semua kewenangan dan pengelolaan dana dimaksud.

Undang-Undang Desa membuka ruang selebar-lebarnya bagi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, tidak hanya dana dan kewenangan kepala desa yang istimewa, tetapi undang-undang ini melengkapi dengan pengaturan penguatan kapasitas masyarakat desa dan pembangunan desa melalui pilar-pilar lembaga kemasyarakatan di desa, lembaga ekonomi desa dan peluang kerjasama antar desa, sehingga memungkinkan desa untuk terbuka berkembang lebih pesat secara bersama.

Dari sekian banyak Undang-undang yang mengatur tentang Desa sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dapat menjadi pilihan yang sangat partisipatif mengedepankan desa. Desa sebagai ujung tombak pemerintahan terbawah memiliki otonomi dalam mengatur pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan pnyalahgunaan wewenang. Badan Permusyawaratan Desa sebagi unsure pemerintahan desa harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat Undang-Undang agar Kepala Desa tidak terjebak dalam jeratan hokum. Masyarakat desa diharapkan juga ikut mengawasi dan mengambil peran aktif melalui musyawarah desa agar pelaksanaan pembangunan bisa benar-benar efektif dan tepat sasaran serta dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kewenangan dalam bimbingan dan pengawasan melekat pada Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, hal ini menjadikan organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan konkuren terkait dengan desa menjadi penting.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan ini

bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, secara Nasional, Provinsi maupun di tingkat Kabupaten.

- **Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Propinsi Jawa Timur**

VISI : Terwujudnya Keberdayaan dan Kemandirian Masyarakat Desa/ Kelurahan di Jawa Timur

MISI 1 : Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pendayagunaan dan pemanfaatan SDA-TTG serta pengembangan perekonomian masyarakat

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		KEBIJAKAN	
1	Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan lembaga ekonomi desa dan pemberdayaan masyarakat miskin	1	Meningkatnya kelompok usaha ekonomi masyarakat, lembaga ekonomi masyarakat di desa/kel dan pemberdayaan masyarakat miskin	1	Pengurangan beban hidup dan peningkatan pendapatan melalui peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat	1	Mempermudah akses UEM, menguatkan fungsi lembaga perekonomian masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar RTM
2	Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pendayagunaan SDA untuk pemenuhan kebutuhan sarpras dasar dan pengembangan TTG	2	Meningkatnya pusat layanan informasi TTG dan aksesbilitas masyarakat miskin terhadp pengelolaan SDA dan sarana prasarana dasar	2	Peningkatan pemanfaatan TTG dan pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan	2	Peningkatan kemampuan masyarakt dalam pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar dan peningkatan akses masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi tepat guna

MISI 2 : Meningkatkan kapasitas SDM, lembaga kemasyarkatan, partisipasi dan soisal budaya masyarakat

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		KEBIJAKAN	
3	Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendampingan pemberdayaan masyarakat	3	Meningkatnya kapasitas SDM dan lembaga kemasyarakatan desa/kel.	3	Penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan SDM	3	Penguatan fungsi kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pelatihan SDM dalam pemberdayaan masyarakat

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		KEBIJAKAN	
4	Meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat serta pemberdayaan adat dan nilai-nilai sosial buidaya lokal masyarakat	4	Terwujudnya peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat	4	Peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan serta pelestarian nilai-nilai adat dan sosial budaya lokal	4	Mempermudah akses UEM, menguatkan fungsi lembaga perekonomian masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar RTM

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Pacitan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan, maka dapat ditelaah dari Misi ke 1 (dua) yaitu “Pemberantasan Kemiskinan“ dari RPJMD Kabupaten Pacitan. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat daerah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rencana Strategis Dinas PMD Tahun 2025 – 2029 seperti pada tabel di bawah ini:

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Strategis selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN
1	Berkurangnya kantong-kantong kemiskinan	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Pertumbuhan Desa Mandiri

Dalam rangka mencapai visi, misi daerah, tujuan, dan sasaran strategis telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukuran capaian kinerja yang direncanakan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerjanya. Indikator sasaran dimaksud sebagaimana tabel berikut:

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR		TARGET 2025
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa	1.1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	1.1.1	Persentase Pertumbuhan Desa Mandiri	16,95%

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Program ini mendukung pencapaian kinerja sasaran Hasil nilai IKM Perangkat Daerah:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah;
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

(2) Program Penataan Desa

Program ini mendukung pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa, dengan kegiatan yang dilaksanakan meliputi: Penyelenggaraan Penataan Desa.

(3) Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini mendukung pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa, dengan kegiatan yang dilaksanakan meliputi: Fasilitasi Kerjasama Antar Desa

(4) Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini mendukung pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa, dengan kegiatan yang dilaksanakan meliputi: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.

(5) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini mendukung pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa, dengan kegiatan yang dilaksanakan meliputi: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

4

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan Tahun 2025 untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Selengkapnya Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
Tahun 2025

NO.	Uraian	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Satuan	Anggaran (Rp.)		
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih Tambah/ Kurang
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**7.574.723.963,00**	**8.873.162.733,00**	**1.298.438.770,00**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				**7.574.723.963,00**	**8.873.162.733,00**	**1.298.438.770,00**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**			**3.389.469.447,00**	**3.371.584.083,00**	**-17.885.364,00**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**	**23**	**Dok**	64.000.000,00	61.010.080,00	-2.989.920,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	Dok	52.000.000,00	50.199.200,00	-1.800.800,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	Lap	12.000.000,00	10.810.880,00	-1.189.120,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah**			2.617.622.981,00	2.569.857.887,00	-47.765.094,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28	Org/bulan	2.571.755.311,00	2.525.903.751,00	-45.851.560,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25	Dok	45.867.670,00	43.954.136,00	-1.913.534,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian**			19.700.000,00	19.325.080,00	-374.920,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	Paket	19.700.000,00	19.325.080,00	-374.920,00

NO.	Uraian	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Satuan	Anggaran (Rp.)		
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih Tambah/ Kurang
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**			284.000.903,00	193.163.856,00	-90.837.047,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	19.000.000,00	18.397.160,00	-602.840,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	20.000.000,00	17.957.040,00	-2.042.960,00
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	Paket	50.000.000,00	68.977.625,00	18.977.625,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Lap	195.000.903,00	87.832.031,00	-107.168.872,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Perangkat Daerah**			76.853.340,00	207.067.552,00	130.214.212,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	unit	76.853.340,00	207.067.552,00	130.214.212,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan**			268.016.400,00	249.442.970,00	-18.573.430,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Lap	21.219.000,00	22.645.780,00	1.426.780,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka	12	Lap	100.000.000,00	79.999.790,00	-20.000.210,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Lap	146.797.400,00	146.797.400,00	0
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik**			59.275.823,00	71.716.658,00	12.440.835,00

NO.	Uraian	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Satuan	Anggaran (Rp.)		
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih Tambah/ Kurang
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	unit	34.200.000,00	45.184.000,00	10.984.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	unit	25.075.823,00	26.532.658,00	1.456.835,00
2	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa**	**67**	**%**	**7.574.723.963,00**	**8.873.162.733,00**	**1.298.438.770,00**
	Penyelenggaraan Penataan Desa	**Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi penyelenggaraan penataan desa**	**54**	**Desa**	7574723963,00	8873162733,00	1.298.438.770,00
	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	12	Desa	3.389.469.447,00	3.371.584.083,00	-17.885.364,00
3	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**Persentase Kerjasama Desa**	**21**	**%**	**64.000.000,00**	**61.010.080,00**	**-2.989.920,00**
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	**Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi kerjasama desa**	**20**	**Desa**	52.000.000,00	50.199.200,00	-1.800.800,00
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1	Dok	12.000.000,00	10.810.880,00	-1.189.120,00
4	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Kapasitas SDM Aparatur Pemerintahan Desa yang Berkualitas**			**2.617.622.981,00**	**2.569.857.887,00**	**-47.765.094,00**
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	**Jumlah desa yang melaksanakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa sesuai peraturan perundangan yang berlaku**	**167**	**Desa**	**2.571.755.311,00**	**2.525.903.751,00**	**-45.851.560,00**
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1	Dok	45.867.670,00	43.954.136,00	-1.913.534,00

NO.	Uraian	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Satuan	Anggaran (Rp.)		
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih Tambah/ Kurang
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	167	Orang	19.700.000,00	19.325.080,00	-374.920,00
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	4	Dok	19.700.000,00	19.325.080,00	-374.920,00
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1	Lap	284.000.903,00	193.163.856,00	-90.837.047,00
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1	Dok	19.000.000,00	18.397.160,00	-602.840,00
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1	Dok	20.000.000,00	17.957.040,00	-2.042.960,00
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	167	Orang	50.000.000,00	68.977.625,00	18.977.625,00
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa	13	Desa	195.000.903,00	87.832.031,00	-107.168.872,00
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang terlibat dalam pembangunan desa**			**76.853.340,00**	**207.067.552,00**	**130.214.212,00**
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembagunan Desa yang Mendapatkan Pembinaan**			**76.853.340,00**	**207.067.552,00**	**130.214.212,00**

NO.	Uraian	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Satuan	Anggaran (Rp.)		
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih Tambah/ Kurang
	yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	26	Lembaga	268.016.400,00	249.442.970,00	-18.573.430,00
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	12	Unit	21.219.000,00	22.645.780,00	1.426.780,00
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1	Dok	100.000.000,00	79.999.790,00	-20.000.210,00
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1	Lap	40.000.000,00	576.000,00	-39.424.000,00
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1	Dok	680.000.000,00	465.162.980,00	-214.837.020,00
JUMLAH					**7.574.723.963,00**	**8.873.162.733,00**	**1.298.438.770,00**

Penutup 5

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku (Stakeholders) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah (*rickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan, selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan dengan seluruh jajarannya.

Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

Pacitan, 31 Juli 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PACITAN

HERI SETIJONO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730803 199302 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Letjen Suprapto No.46, Pacitan, Jawa Timur 63512
Telp. (0357) 881070

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PACITAN
Nomor : 000.7.2.4 / 20.1 / 408.48 / 2025
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PACITAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PACITAN

Menimbang :

a. Bahwa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) merupakan Dokumen Perencanaan selama periode 1 (satu) tahun;
b. bahwa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja- SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan disusun sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Perubahan (Renja-SKPD) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan Tahun 2025 bertujuan untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan program dan kegiatan selama periode 1 (satu) tahun.

KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan Tahun 2025 sebagaimana Diktum Pertama merupakan landasan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan.

KETIGA : Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Periode 1 (satu) Tahun yang akan menjadi Pedoman dalam Pelaksanaan Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan.

KEEMPAT : Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 31 Juli 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PACITAN

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

HERI SETIJONO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730803 199302 1 002

Pemerintah Kabupaten Pacitan
Dinas Pengendalian Penduduk
Kelurga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak

RENCANA KERJA PERUBAHAN
Tahun 2025

Jl. K. Umar No. 1 Pacitan
Telp. 0357-881315 Fax. 0357- 881134

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
JL. K. Umar No. 1 TELP. (0357) 881315 Fax.(0357) 881134

PACITAN

Pacitan,18 Juli 2025

Nomor : 400.13/310/408.47/2025
Sifat : Penting/Segera
Lampiran :
Perihal : Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025

Kepada
Yth. Kepala BAPPEDALITBANG
Kabupaten Pacitan
di
P A C I T A N

-

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor :000.7.4/3034/408.53/2025 Tanggal 13 Juli 2025, Perihal Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan 2025.

Bersama ini kami kirimkan Rencana Kerja Perubahan Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan Tahun 2025 sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PPKB DAN PPPA
KABUPATEN PACITAN

Dra. JAYUK SUSILANINGTYAS, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199312 2 002

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK

JL. K. Umar No. 1 TELP. (0357) 881315 Fax.(0357) 881134

PACITAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 400.13.1/311/408.47/2025

TENTANG
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PACITAN

Menimbang :

a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengadilan, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 152 ayat (4) dan Pasal 154 ayat (1), Rancangan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disahkan oleh Bupati dengan Keputusan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas PPKB dan PPPA tentang Pengesahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pembangunan Kependudukan dan pembangunan Keluarga;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembatan Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undnag Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 tahun 2007 tentang Sistem Organisasi dan tata kerja Badan Daerah Kabupaten Pacitan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
25. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 196 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nimor 137 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan
26. Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Pacitan Nomor: 188/016/408.53/2025 Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan,

KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengesahan ini digunakan sebagai dasar bagi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan dalam :

a. Menyusun program kegiatan kedalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA P APBD) dan Prioritas Program dan Kegiatan dalam Penetapan Pagu Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 dilingkup Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan;

b. Menyusun Perencanaan Program Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Pacitan
Pada tanggal : 18 Juli 2025

KEPALA DINAS PPKB DAN PPPA
KABUPATEN PACITAN

Dra. JAYUK SUSILANINGTYAS, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199312 2 002

Kata Pengantar

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan Tahun 2025 ini adalah dokumen rencana operasional tahunan pembangunan yang merupakan fase kedua dari penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026 sekaligus merupakan turunan dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan 2021 – 2026. Selanjutnya, dokumen Renja ini akan menjadi acuan pelaksanaan pembangunan bagi segenap pemangku kepentingan pembangunan selama Tahun 2025. Renja Tahun 2025 ini memuat substansi pokok tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja OPD tahun lalu, penelaahan usulan program/kegiatan masyarakat, serta memuat rumusan pokok program/kegiatan Tahun 2025. Dengan tersusunnya Renja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan Tahun 2025 ini diharapkan seluruh proses pelaksanaan kebijakan pembangunan akan menjadi lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna, serta berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pacitan secara berkesinambungan.

Pacitan, 18 Juli 2025

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PACITAN

Dra. JAYUK SUSILANINGTYAS, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199312 2 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum..... 2
1.3. Maksud dan Tujuan 5
1.4. Sistematika Penulisan..... 6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU 8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu & Capaian Rencana Renstra SKPD..... 8
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan 16
2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 23
2.4. Permasalahan dan Hambatan..... 24

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN..... 25
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 25
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja 27
3.3. Program dan Kegiatan 37

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 45
BAB V PENUTUP..... 56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai upaya menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tuntutan pertanggung jawaban yang merupakan kewajiban penyelenggara negara untuk melaporkan pelaksanaan pemerintahan terakomodasi dalam Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka pengelolaan keuangan harus direncanakan, disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kinerja, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun berbasis kinerja harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Rencana Kinerja Perubahan Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026. Rencana Kinerja Perubahan Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan Tahun 2025 dirumuskan dalam rangka penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pemerintah. Rencana Kinerja Perubahan Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan Tahun 2025 ini ditetapkan dengan maksud untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan kegiatan selama tahun berjalan.

Dan Rencana Kinerja Perubahan ini berisi sasaran beserta indikator kinerja sasaran dan target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2025 serta rencana program dan kegiatan berikut indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif yang dibutuhkan.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kinerja Perubahan Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan Tahun 2025 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/l998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor : 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mena telah dirubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengan Daerah serta Tata Cara

Perubahan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah.

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 5).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 Nomor 10 Tahun 2021.
21. Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Pacitan Nomor: 188/016/408.53/2025 Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja (Renja) Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan Tahun 2025 ditetapkan dengan maksud untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan kegiatan selama tahun anggaran 2025.

Penyusunan Rencana Kinerja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan ini bertujuan :

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dilingkup Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan pada tahun 2025.
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Renja Dinas PPKB dan PPPA Tahun Lalu

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas PPKB dan PPPA Tahun Lalu

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan

2.4. Review terhadap Rencana Kerja Perubahan

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan

3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V. Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PPKB & PPPA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Renstra SKPD

Evaluasi dalam pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan tahun lalu dan pencapaian kinerja rencana strategis, ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas PPKB dan PPPA dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan didalam Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang meliputi 34 urusan pemerintahan, yang terdiri atas 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan.

Dalam pelaksanaan review/evaluasi program selalu didasarkan pada laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra dan perkiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berjalan.

Adapun telaahan hasil evaluasi mencakup :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melabihi target kinerja program/kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas PPKB dan PPPA dan kinerja pelayanan Dinas PPKB dan PPPA, kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun Matrik Pembahasan Hasil Evaluasi RKPD Triwulan II tahun 2025 berdasarkan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 disajikan pada Tabel II.I. tersebut dibawah ini : (Lampiran Tabel II.1)

Berdasarkan matrik tersebut sampai dengan tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak sudah melaksanakan 10 (sepuluh) program sebagai kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dari 10 (sepuluh) program yang menjadi kewenangannya. Adapun 10 (sepuluh) program dimaksud adalah sebagai berikut;

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program Perlindungan Perempuan
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
5. Program Pemenuhan Hak Anak
6. Program Perlindungan Khusus Anak
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
8. Program Pengendalian Penduduk
9. Program Pembinaan Keluarga Berencana
10. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan

Dalam bagian ini disajikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 01 tahun 2010 dan peraturan Kepala Badan Kependudukan

dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 dan renstra Tahun 2021-2026 dalam tabel II.2. berikut; (Lampiran table II.2)

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas PPKB dan PPPA

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Dinas PPKB dan PPPA, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Dinas PPKB dan PPPA serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Dinas PPKB dan PPPA, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas PPKB dan PPPA, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas PPKB dan PPPA berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas PPKB dan PPPA tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas PPKB dan PPPA.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas PPKB dan PPPA dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas PPKB dan PPPA.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas PPKB dan PPPA.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional dan internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals).
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas PPKB dan PPPA.

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan adalah :

1. Pentingnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pola asuh, pola makan, pola hidup bersih terutama dalam 1000 HPK agar terhindar dari stunting untuk membangun ketahanan keluarga menuju keluarga Bahagia Sejahtera
2. Pentingnya pemahaman terhadap Gender dan PUG
3. Pentingnya sosialisasi, KIE dan ketersediaan sarana prasarana KB MKJP (MOW dan MOP)
4. Perlunya memahami pemenuhan hak anak melalui 5 cluster
5. Masih adanya pernikahan dibawah umur

2.4 Permasalahan dan Hambatan

1. Permasalahan stunting
2. Kesetaraan Gender
3. Rendahnya kesertaan KB MKJP (MOP dan MOW)
4. Pemenuhan Hak Anak
5. Pernikahan Anak

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
KABUPATEN PACITAN
Triwulan II Tahun 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		-10		-11		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
1	**208.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**	**Persen**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**80.97**	**495.000.000,00**	**0**	**29.833.000,00**	**0**	**61.079.333,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.912.333,00**	**0**	**18,37**	**0**	**90.912.333,00**	**0**	**0**	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak**
	208.02.2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi PUG dan Peningkatan Kapasitas Penyusunan PPRG**	**Orang**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**171**	**80.000.000,00**	**0**	**2.460.000,00**	**0**	**4.140.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.600.600,00**	**0**	**8,25**	**0**	**6.600.600,00**	**0**	**0**	
	208.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0.00	0	0.00	0	2.00	50.000.000,00	1	2.460.000,00	0	3.525.000,00	0	0	0	0	1	5.985.000,00	50	11,97	1	5.985.000,00	0	0	
	208.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kabupaten/Kota	Orang	0.00	0	0.00	0	90.00	30.000.000,00	0	0	0	615.600,00	0	0	0	0	0	615.600,00	0	2,05	0	615.600,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	25	7,01					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah		2	2		
	208.02.2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina**	**Organisasi**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**27**	**415.000.000,00**	**2**	**27.373.000,00**	**14**	**56.938.733,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16**	**84.311.733,00**	**59,26**	**20,32**	**16**	**84.311.733,00**	**0**	**0**	
	208.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0.00	0	0.00	0	5.00	415.000.000,00	3	27.373.000,00	1	56.938.733,00	0	0	0	0	4	84.311.733,00	80	20,32	4	84.311.733,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	80	20,32					F
																				Predikat kinerja(%)	Tinggi	Sangat Rendah		1	1		
																				Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	29,63	14,29					
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
2	**208.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan**	**Persen**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**70.00**	**75.600.000,00**	**100**	**9.900.000,00**	**100**	**9.900.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**19.800.000,00**	**142,86**	**26,19**	**100**	**19.800.000,00**	**0**	**0**	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak**
	208.03.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah peserta sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak**	**Orang**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**58.00**	**20.000.000,00**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**344,83**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	
	208.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0.00	0	0.00	0	4.00	20.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	0					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah		1	1		
	208.03.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan**	**Lembaga**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**1**	**55.600.000,00**	**1**	**9.900.000,00**	**0**	**9.900.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**19.800.000,00**	**100**	**35,61**	**1**	**19.800.000,00**	**0**	**0**	
	208.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	0.00	0	0.00	0	3	55.600.000,00	3	9.900.000,00	3	9.900.000,00	0	0	0	0	3	19.800.000,00	100	35,61	3	19.800.000,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	100	35,61					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah		1	1		
																				Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	222,42	17,81					
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah					
3	**208.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Rasio KDRT**	**Nilai**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0.01**	**40.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**1.493.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.493.000,00**	**0**	**3,73**	**0**	**1.493.000,00**	**0**	**0**	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak**
	208.04.2.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase kasus KDRT yang tertangani**	**Persen**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**100**	**40.000.000,00**	**100**	**0**	**100**	**1.493.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**1.493.000,00**	**100**	**3,73**	**100**	**1.493.000,00**	**0**	**0**	
	208.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang	Dokumen	0.00	0	0.00	0	2	10.000.000,00	0	0	0	1.493.000,00	0	0	0	0	0	1.493.000,00	0	14,93	0	1.493.000,00	0	0	
	208.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten Kota	Dokumen	0.00	0	0.00	0	1.00	30.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	7,47					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah		2	2		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		-10		-11		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
																				Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	100	3,73					
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah					
4	**208.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase tersedianya data Gender dan anak**	**Persen**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**100**	**10.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak**
	208.05.2.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya data gender dan anak**	**Laporan**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**1**	**10.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	208.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	0.00	0	0.00	0	1	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	0					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah		1	1		
																				Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	0	0					
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
5	**208.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Strata Kabupaten Layak Anak**	**Skor**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**750.00**	**100.000.000,00**	**650**	**4.720.000,00**	**0**	**9.330.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650**	**14.050.000,00**	**86,67**	**14,05**	**650**	**14.050.000,00**	**0**	**0**	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak**
	208.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga Pemerhati PHA**	**Lembaga**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**1**	**100.000.000,00**	**1**	**4.720.000,00**	**1**	**9.330.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**14.050.000,00**	**100**	**14,05**	**1**	**14.050.000,00**	**0**	**0**	
	208.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	0.00	0	0.00	0	13	100.000.000,00	4	4.720.000,00	1	9.330.000,00	0	0	0	0	5	14.050.000,00	38,46	14,05	5	14.050.000,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	38,46	14,05					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah		1	1		
																				Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	100	14,05					
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah					
6	**208.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase anak korban kekerasan yang tertangani secara komprehensif**	**Persen**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**72.36**	**100.000.000,00**	**100**	**26.945.000,00**	**100**	**1.994.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**28.939.000,00**	**138,2**	**28,94**	**100**	**28.939.000,00**	**0**	**0**	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak**
	208.07.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Anak yang mendapatkan sosialisasi pencegahan dan penanganan korban kekerasan**	**Orang**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**27**	**50.000.000,00**	**1.027,00**	**19.375.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.027,00**	**19.375.000,00**	**3.803,70**	**38,75**	**1.027,00**	**19.375.000,00**	**0**	**0**	
	208.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KTA terpadu	Kegiatan	0.00	0	0.00	0	1.00	50.000.000,00	0	19.375.000,00	1	0	0	0	0	0	1	19.375.000,00	100	38,75	1	19.375.000,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	100	38,75					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah		1	1		
	208.07.2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Standart Operasional Pelayanan Perlindungan Khusus Anak**	**SOP**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**1**	**50.000.000,00**	**1**	**7.570.000,00**	**4**	**1.994.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**9.564.000,00**	**500**	**19,13**	**5**	**9.564.000,00**	**0**	**0**	
	208.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Orang	0.00	0	0.00	0	30.00	50.000.000,00	2	7.570.000,00	12	1.994.000,00	0	0	0	0	14	9.564.000,00	46,67	19,13	14	9.564.000,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	46,67	19,13					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah		1	1		
																				Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	2.151,85	28,94					
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah					
7	**214.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**Nilai**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**76.70**	**2.415.669.071,00**	**0**	**504.847.517,00**	**77,7**	**533.485.963,00**	**0**	**82.718.652,00**	**0**	**0**	**77,7**	**1.121.052.132,00**	**101,3**	**46,41**	**77,7**	**1.121.052.132,00**	**0**	**0**	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak**
	214.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**23**	**54.440.000,00**	**10**	**5.099.000,00**	**2**	**1.280.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12**	**6.379.000,00**	**52,17**	**11,72**	**12**	**6.379.000,00**	**0**	**0**	
	214.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0.00	0	0.00	0	9	46.814.900,00	4	3.184.000,00	0	0	0	0	0	0	4	3.184.000,00	44,44	6,8	4	3.184.000,00	0	0	
	214.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	0.00	0	0.00	0	2	3.440.700,00	2	1.120.000,00	0	680.000,00	0	0	0	0	2	1.800.000,00	100	52,31	2	1.800.000,00	0	0	
	214.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0.00	0	0.00	0	12	4.184.400,00	3	795.000,00	3	600.000,00	0	0	0	0	6	1.395.000,00	50	33,34	6	1.395.000,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	64,81	30,82					F
																				Predikat kinerja(%)	Rendah	Sangat Rendah		3	3		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		-10		-11		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	214.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**59**	**1.919.820.271,00**	**16**	**412.845.589,00**	**15**	**476.260.406,00**	**0**	**82.718.652,00**	**0**	**0**	**31**	**971.824.647,00**	**52,54**	**50,62**	**31**	**971.824.647,00**	**0**	**0**	
	214.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	0.00	0	0.00	0	14.00	1.748.641.071,00	13	365.932.425,00	13	437.590.406,00	0	82.718.652,00	0	0	13	886.241.483,00	92,86	50,68	13	886.241.483,00	0	0	
	214.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	0.00	0	0.00	0	12	156.739.200,00	3	40.661.664,00	3	38.670.000,00	0	0	0	0	6	79.331.664,00	50	50,61	6	79.331.664,00	0	0	
	214.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0.00	0	0.00	0	2.00	6.628.000,00	0	5.351.500,00	0	0	0	0	0	0	0	5.351.500,00	0	80,74	0	5.351.500,00	0	0	
	214.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	0.00	0	0.00	0	37.00	7.812.000,00	3	900.000,00	9	0	0	0	0	0	12	900.000,00	32,43	11,52	12	900.000,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	43,82	48,39					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah		4	4		
	214.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**Persen**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**100**	**283.098.000,00**	**16**	**58.031.303,00**	**34**	**29.580.109,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**87.611.412,00**	**50**	**30,95**	**50**	**87.611.412,00**	**0**	**0**	
	214.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0.00	0	0.00	0	12	70.302.600,00	3	23.776.500,00	3	2.964.400,00	0	0	0	0	6	26.740.900,00	50	38,04	6	26.740.900,00	0	0	
	214.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0.00	0	0.00	0	12	212.795.400,00	3	34.254.803,00	3	26.615.709,00	0	0	0	0	6	60.870.512,00	50	28,61	6	60.870.512,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	50	33,33					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah		2	2		
	214.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan**	**Persen**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**100**	**59.915.500,00**	**10**	**15.023.378,00**	**40**	**13.598.648,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**28.622.026,00**	**50**	**47,77**	**50**	**28.622.026,00**	**0**	**0**	
	214.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0.00	0	0.00	0	12	59.915.500,00	3	15.023.378,00	3	13.598.648,00	0	0	0	0	6	28.622.026,00	50	47,77	6	28.622.026,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	50	47,77					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah		1	1		
	214.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**Persen**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**82.00**	**98.395.300,00**	**13**	**13.848.247,00**	**27**	**12.766.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**	**26.615.047,00**	**48,78**	**27,05**	**40**	**26.615.047,00**	**0**	**0**	
	214.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0.00	0	0.00	0	79.00	69.478.000,00	3	13.848.247,00	2	12.766.800,00	0	0	0	0	5	26.615.047,00	6,33	38,31	5	26.615.047,00	0	0	
	214.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara atau Direhabilitasi	Gedung	0.00	0	0.00	0	2	28.917.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	3,17	19,16					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah		2	2		
																				Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	50,7	33,62					
																				Predikat kinerja(%)	Rendah	Sangat Rendah					
8	**214.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Total Fertility Rate (TFR)**	**Niai**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**1.80**	**427.260.300,00**	**1,79**	**66.947.640,00**	**0**	**38.991.240,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,79**	**105.938.880,00**	**99,44**	**24,79**	**1,79**	**105.938.880,00**	**0**	**0**	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak**
	214.02.2.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal informal dan non formal yang melakukan pendidikan kependudukan**	**Kerjasama**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**6**	**77.460.300,00**	**0**	**26.488.300,00**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**26.488.300,00**	**50**	**34,2**	**3**	**26.488.300,00**	**0**	**0**	
	214.02.2.01.0018	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	Kegiatan	0.00	0	0.00	0	1.00	27.305.300,00	0	7.857.000,00	0	0	0	0	0	0	0	7.857.000,00	0	28,77	0	7.857.000,00	0	0	
	214.02.2.01.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	Kegiatan	0.00	0	0.00	0	3.00	50.155.000,00	0	18.631.300,00	2	0	0	0	0	0	2	18.631.300,00	66,67	37,15	2	18.631.300,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	33,34	32,96					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah		2	2		
	214.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Laporan Data dan Informasi Keluarga**	**Laporan**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**1.00**	**349.800.000,00**	**1**	**40.459.340,00**	**0**	**38.991.240,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**79.450.580,00**	**100**	**22,71**	**1**	**79.450.580,00**	**0**	**0**	
	214.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	0.00	0	0.00	0	1	60.000.000,00	0	11.180.000,00	0	0	0	0	0	0	0	11.180.000,00	0	18,63	0	11.180.000,00	0	0	
	214.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	0.00	0	0.00	0	12	145.800.000,00	3	0	3	10.500.000,00	0	0	0	0	6	10.500.000,00	50	7,2	6	10.500.000,00	0	0	
	214.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	0.00	0	0.00	0	12	144.000.000,00	3	29.279.340,00	3	28.491.240,00	0	0	0	0	6	57.770.580,00	50	40,12	6	57.770.580,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	33,33	21,98					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah		3	3		
																				Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	75	28,46					
																				Predikat kinerja(%)	Sedang	Sangat Rendah					
9	**214.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Unmet need**	**Persen**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**7.82**	**8.038.387.000,00**	**7,1**	**1.141.148.990,00**	**6,91**	**1.354.244.590,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,91**	**2.495.393.580,00**	**88,36**	**31,04**	**6,91**	**2.495.393.580,00**	**0**	**0**	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		-10		-11		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	.		Persentase peserta KB aktif (CPR)	Persen	0		0.00	0	67.64		73,3		72,77		0		0		72,77		107,58		72,77		0		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
	.		Age Specific Fertility Rate 15-19 (ASFR 1519)	Nilai	0		0.00	0	29.70		27		0		0		0		27		90,91		27		0		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
	214.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah laporan data keluarga yang beresiko stunting	Laporan	0.00	0	0.00	0	1	1.262.170.000,00	0	138.198.990,00	0	201.371.610,00	0	0	0	0	0	339.570.600,00	0	26,9	0	339.570.600,00	0	0	
	214.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	0.00	0	0.00	0	12.00	59.170.000,00	3	456.000,00	3	11.040.000,00	0	0	0	0	6	11.496.000,00	50	19,43	6	11.496.000,00	0	0	
	214.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga	Laporan	0.00	0	0.00	0	12.00	588.000.000,00	3	81.294.990,00	3	129.258.610,00	0	0	0	0	6	210.553.600,00	50	35,81	6	210.553.600,00	0	0	
	214.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Loka karya (Minilok)	Laporan	0.00	0	0.00	0	12.00	240.000.000,00	3	2.601.000,00	3	26.548.000,00	0	0	0	0	6	29.149.000,00	50	12,15	6	29.149.000,00	0	0	
	214.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Dokumen	0.00	0	0.00	0	16.00	125.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	214.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	0.00	0	0.00	0	2.00	250.000.000,00	1	53.847.000,00	1	34.525.000,00	0	0	0	0	2	88.372.000,00	100	35,35	2	88.372.000,00	0	0	
																					Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)						F
																					Predikat kinerja(%)		Sangat Rendah	Sangat Rendah		5	5		
	214.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Tenaga Penyuluh KB yang dibina	Orang	0.00	0	0.00	0	21.00	4.565.850.000,00	20	958.391.000,00	17	1.009.042.000,00	0	0	0	0	17	1.967.433.000,00	80,95	43,09	17	1.967.433.000,00	0	0	
	214.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	0.00	0	0.00	0	1763.00	4.565.850.000,00	408	958.391.000,00	1.763,00	1.009.042.000,00	0	0	0	0	1.763,00	1.967.433.000,00	100	43,09	1.763,00	1.967.433.000,00	0	0	
																					Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		100	43,09					F
																					Predikat kinerja(%)		Sangat Tinggi	Sangat Rendah		1	1		
	214.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pelayanan KB	Event	0.00	0	0.00	0	8	1.616.767.000,00	2	34.095.000,00	4	51.062.980,00	0	0	0	0	6	85.157.980,00	75	5,27	6	85.157.980,00	0	0	
	214.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	0.00	0	0.00	0	33.00	29.700.000,00	30	8.960.000,00	8	5.920.000,00	0	0	0	0	38	14.880.000,00	115,15	50,1	38	14.880.000,00	0	0	
	214.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	orang	0.00	0	0.00	0	1950.00	1.558.717.000,00	614	25.135.000,00	498	45.142.980,00	0	0	0	0	1.112,00	70.277.980,00	57,03	4,51	1.112,00	70.277.980,00	0	0	
	214.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan	Laporan	0.00	0	0.00	0	1	28.350.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																					Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		57,39	18,2					F
																					Predikat kinerja(%)		Rendah	Sangat Rendah		3	3		
	214.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan tingkat Daerah Kab Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan berKB	Organisasi	0.00	0	0.00	0	6	593.600.000,00	1	10.464.000,00	4	92.768.000,00	0	0	0	0	5	103.232.000,00	83,33	17,39	5	103.232.000,00	0	0	
	214.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga ,Kependudukan dan Keluarga Berencana)	Kampung	0.00	0	0.00	0	17.00	593.600.000,00	3	10.464.000,00	7	92.768.000,00	0	0	0	0	10	103.232.000,00	58,82	17,39	10	103.232.000,00	0	0	
																					Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		58,82	17,39					F
																					Predikat kinerja(%)		Rendah	Sangat Rendah		1	1		
																					Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)		59,82	23,16					
																					Predikat kinerja(%)		Rendah	Sangat Rendah					
10	214.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kelompok kegiatan yang mendapatkan materi pembinaan 8 fungsi keluarga	Persen	0	0	0.00	0	84.15	3.275.919.700,00	20	138.600.000,00	25,43	412.680.000,00	0	0	0	0	25,43	551.280.000,00	30,22	16,83	25,43	551.280.000,00	0	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		-10		-11		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
	214.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapatkan sosialisasi atau pembinaan**	**Kelompok**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**74.00**	**292.719.700,00**	**3**	**3.000.000,00**	**18**	**5.880.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21**	**8.880.000,00**	**28,38**	**3,03**	**21**	**8.880.000,00**	**0**	**0**	
	214.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan ketahanan keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan	0.00	0	0.00	0	1.00	48.000.000,00	0	0	0	2.880.000,00	0	0	0	0	0	2.880.000,00	0	6	0	2.880.000,00	0	0	
	214.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR, BKL,,PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Unit	0.00	0	0.00	0	25.00	132.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	214.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah laporan hasil orientasi dan pelatihan teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, OIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Laporan	0.00	0	0.00	0	1.00	112.719.700,00	0	3.000.000,00	0	3.000.000,00	0	0	0	0	0	6.000.000,00	0	5,32	0	6.000.000,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	3,77					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah		3	3		
	214.04.2.02	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Organisasi**	**2098.00**	**0**	**0.00**	**0**	**2098.00**	**2.983.200.000,00**	**498**	**135.600.000,00**	**766**	**406.800.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.264,00**	**542.400.000,00**	**60,25**	**18,18**	**1.264,00**	**542.400.000,00**	**60.25**	**0**	
	214.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan pemantauan data dan informasi keluarga beresiko stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon PUS,Ibu hamil, pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Laporan	0.00	0	0.00	0	12.00	1.356.000.000,00	3	135.600.000,00	3	406.800.000,00	0	0	0	0	6	542.400.000,00	50	40	6	542.400.000,00	0	0	
	214.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah keluarga beresiko stunting (termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Laporan	0.00	0	0.00	0	3379.00	1.627.200.000,00	3.543,00	0	1.389,00	0	0	0	0	0	4.932,00	0	145,96	0	4.932,00	0	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	97,98	20					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah		2	2		
																				Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	44,32	10,61					
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
																				Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)	73,8	17,53					
																				Predikat kinerja(%)	Sedang	Sangat Rendah					
																				Total		**14.977.836.071,00**				**4.428.858.925,00**	
																				Persentase Realisasi Anggaran						**29.57%**	
																				Predikat						**Sangat Rendah**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pelaksanaan program dan kegiatan telah sesuai dengan yang direncanakan

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Penyerapan anggaran kurang maksimal, Petunjuk Teknis yang baru disahkan serta banyaknya perubahan kebijakan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Perencanaan yang lebih matang dan lebih fokus pada pelaksanaan program dan kegiatan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Perencanaan program dan kegiatan tepat waktu dan tepat sasaran (terukur) agar tercapai target kinerja

Pacitan, 15 Juli 2025

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PACITAN

Dra. JAYUK SUSILANINGTYAS, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19661110 199312 2 002

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PPKB dan PPPA

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra PD					Realisasi Capaian					Catatan Analisa
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan			80,89	80,92	80,94	80,97	81,00%	80,90	94,65	81,98			
2.	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan			69,41	69,62	69,89	70	71,6	100,00	100	100			
3.	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)			0,0086	0,0088	0,0089	0,009	0,0091	0,0083	0,0007	0,0042			
4.	Persentase tersedianya data gender dan anak			100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100			
5.	Strata Kabupaten Layak Anak			Madya	Madya	Nindya	Nindya	Nindya	Pratama	Madya	Madya			
6.	Persentase Anak Korban Kekerasan yang tertangani secara komprehensif			71,72%	71,95%	72,20%	72,36%	72,54%	100,00	100	100			
7.	Total Fertility Rate (TFR)			1,87	1,85	1,83	1,8	1,79	1,98	1,86	1,77			
8.	Age Spesific Rate 15-19 (ASFR 15-19)			31,2%	30,8	30,3	29,70%	29,30%	36,20	31,8	25,2			
9.	Persentase peserta KB aktif (CPR)			66,46%	66,88%	67,42%	67,64%	68,09%	75,52	77,15	73,22			
10.	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) %			8,34%	8,16%	8,00%	7,82%	7,72%	10,93	10,08	7,97			
11.	Persentase kelompok kegiatan yang mendapatkan materi pembinaan 8 fungsi keluarga			80,23	81,53%	82,84%	84,15%	85.,45%	97,21	84,75	100			

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagainya dimaksud, adalah penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PPKB dan PPPA.

Menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal). Di samping itu juga penelaahan tentang pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD yang direncanakan. Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten. Untuk penyusunan RKPD kabupaten perlu melakukan telaahan atas kebijakan propinsi. Tahap ini menguraikan kebijakan propinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah propinsi. Kesemuanya itu tertuang dalam RPJMD propinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD propinsi (rancangan awal) dan penelaahan pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD Kabupaten/Kota yang direncanakan.

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang saat ini sedang dikembangkan oleh BKKBN, Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur

adalah sebagai berikut :

Tabel III.1.

Identifikasi Kebjakan Nasional Dan Provinsi

NO	KEBIJAKAN NASIONAL/PROVINSI	KETERANGAN /PROVINSI
1	2	4
1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR)	1,83
2	Prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraseptive Prevalence Rate/mCPR)	67,04 (all method)
3	Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need %)	6,84
4	Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (Age Spesific Fertility Rate 15-19 tahun)	22 per 1000 perempuan 15-19 tahun
5	Median Usia Kawin Pertama (MUKP) seluruh wanita usia 25-49 tahun	21
6	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	58,2
7	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat pembinaan GenRe	2684 PIK R 1638 BKR
8	Persentase Kabupaten Kota yang melaksanakan Pembinaan GenRe (PIK R/M dan BKR)	100%
9	Cakupan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang telah terbentuk dan teregistrasi	832 Rumah Data Kependudukan
10	Persentase Fasilitas Kesehatan yang siap melayanI KB MKJP	81,04%
11	Persentase kesertaan KB Di Kabupaten/Kota dengan Kesertaan Rendah	58,48%
12	Persentase Pelayanan KB Pasca Persalinan	44,1%
13	Persentase Masyarakat yang Terjangkau Program Bangga Kencana	75%

14	Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	38 Kabupaten Kota

Sumber : Matrik kinerja dan kerangka pendanaan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2024

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan

3.2.1. Tujuan

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang menjadi hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi yang berhubungan dengan layanan dan tugas fungsi OPD. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi OPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah stratejik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan

kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya.

Adapun rumusan tujuan didalam Rencana Strategis Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pembangunan keluarga dan keluarga berencana
2. Meningkatnya Peran Gender dalam Pembangunan
3. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang Inovatif, Profesional dan Responsif

3.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran sebagai hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Sasaran yang akan dicapai Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten

Pacitan adalah :

1. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
2. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan
3. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak
4. Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif
5. Terwujudnya Birokrasi yang Akuntabel dan Transparan

Sedangkan Indikator sasarannya adalah :

1. Laju Pertumbuhan Penduduk

   Keberhasilan capaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator

   a. Jumlah jiwa tahun sekarang

   b. Jumlah jiwa tahun kemarin

   Dan didalam sasaran ini terdapat indikator program yang berpengaruh terhadap keberhasilan sasaran pertama ini yaitu:

   1) Total Fertility Rate (TFR)

      Keberhasilan capaian indikator program ini dapat diukur dengan:

      a. Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu

      b. Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama

      c. Kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, i=2 untuk kelompok umur 20-24, ……., i=7 untuk kelompok umur 45-49)

   2) Age Spesific Rate 15-19 (ASFR 15-19)

      Keberhasilan capaian indikator program ini dapat diukur dengan:

a. Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15 – 19 tahun

b. Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15-19 tahun pada pertengahan tahun yang sama

3) Cakupan peserta KB Aktif (CPR)

Keberhasilan capaian indikator program ini dapat diukur dengan:

a. Jumlah akseptor KB,

b. Jumlah Pasangan Usia Subur.

4) Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)

Keberhasilan capaian indikator program ini dapat diukur dengan:

a. Jumlah Unmet Need,

b. Jumlah Pasangan Usia Subur.

5) Persentase Kelompok Kegiatan yang mendapatkan materi pembinaan 8 Fungsi Keluarga

Keberhasilan capaian indikator program ini dapat diukur dengan:

a. Jumlah kelompok kegiatan yang mendapatkan pembinaan 8 Fungsi Keluarga

b. Jumlah Kelompok Kegiatan yang ada

2. Persentase keterlibatan perempuan dalam bidang ekonomi, social dan politik

Keberhasilan capaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator

a. Jumlah perempuan di bidang ekonomi, sosial dan politik

b. Jumlah perempuan

Dan didalam sasaran ini terdapat indikator program yang berpengaruh terhadap keberhasilan sasaran kedua ini yaitu:

1) Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan

   Keberhasilan capaian indikator program ini dapat diukur dengan:

   a. Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan,

   b. Jumlah pekerja usia 15 tahun keatas

2) Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan

   Keberhasilan capaian indikator program ini dapat diukur dengan:

   a. Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti oleh pelayanan terpadu,

   b. Jumlah pelayanan yang dilaporkan ke Unit Pelayanan Terpadu

3) Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

   Keberhasilan capaian indikator program ini dapat diukur dengan:

   b. Jumlah KDRT,

   c. Jumlah kepala keluarga

3. Persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan

   Keberhasilan capaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator

   a. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang terlayani

   b. Jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan yang masuk

   Dan didalam sasaran ini terdapat indikator program yang berpengaruh terhadap keberhasilan sasaran ketiga ini yaitu:

1) Persentase tersedianya data gender dan anak

   Keberhasilan capaian indikator program ini dapat diukur dengan:

a. Data Gender

4. Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan

Keberhasilan capaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator

a. Jumlah kasus kekerasan pada anak yang mendapatkan pelayanan
b. Jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap anak yang masuk

Dan didalam sasaran ini terdapat indikator program yang berpengaruh terhadap keberhasilan sasaran ketiga ini yaitu:

1) Strata Kabupaten Layak Anak

Keberhasilan capaian indikator program ini didapat dari perolehan hasil evaluasi Kota Layak Anak dan dapat diukur dengan:

a. 1 Kelembagaan yaitu Jumlah Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak (PHPA), Persentase Anggaran PHPA, SDM Terlatih Konvensi Hak Anak (KHA), Keterlibatan lemabaga masyarakat dan media massa dalam PHPA, Keterlibatan dunia usaha dalam PHPA dan Jumlah Kegiatan Inovatif.
b. 6 Klaster yaitu :
   - Klaster 1 : Hak Sipil dan Kebebasan
   - Klaster 2 : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Anak
   - Klaster 3 : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
   - Klaster 4 : Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
   - Klaster 5 : Perlindungan Khusus

Sehingga mendapatkan Tingkatan Kategori KLA :

- Mentor : 901-1000 → 31 komponen tidak ada angka di bawah 70% nilai maksimal dan komponen tertentu harus mencapai angka mutlak
- Utama : 801-900 → 28 komponen tidak ada angka di bawah 70% nilai maksimal dan komponen tertentu harus mencapai angka mutlak
- Nindya : 701-800 → 25 komponen tidak ada angka di bawah 70% nilai maksimal dan komponen tertentu harus mencapai angka mutlak
- Madya : 601-700 → 21 komponen tidak ada angka di bawah 70% nilai maksimal dan komponen tertentu harus mencapai angka mutlak
- Pratama : 501-600 → 17 komponen tidak ada angka di bawah 70% nilai maksimal dan komponen tertentu harus mencapai angka mutlak

2) Persentase anak korban kekerasan yang tertangani secara komprehensif

Keberhasilan capaian indikator program ini dapat diukur dengan:

a. Jumlah kasus kekerasan pada anak yang mendapatkan pelayanan secara komprehensif
b. Jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap anak yang masuk

5. Nilai Hasil Suvey IKM

Keberhasilan capaian sasaran ini dapat diukur dengan menghitung beberapa unsur dalam survey yaitu :

No	Unsur Pelayanan
U1	Persyaratan
U2	Prosedur
U3	Waktu Pelayanan
U4	Biaya/Tarif
U5	Produk Pelayanan
U6	Kompetensi Pelaksana
U7	Perilaku Pelaksana
U8	Sarana dan Prasarana
U9	Penanganan Pengaduan

Dan didalam sasaran ini terdapat indikator program yang berpengaruh terhadap keberhasilan sasaran keempat ini yaitu:

1) Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional
2) Tingkat Pemenuhan Kebutuhan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kerja Sesuai Standar Daerah

6. Nilai Hasil SAKIP

Keberhasilan capaian sasaran ini dapat diukur dengan menghitung beberapa unsur dalam survey yaitu :

No	Komponen
a.	Perencanaan
b.	Pengukuran
c.	Pelaporan
d.	Evaluasi

e.	Pencapaian

Dan didalam sasaran ini terdapat indikator program yang berpengaruh terhadap keberhasilan sasaran kelima ini yaitu:

1) Hasil Nilai Evaluasi Sakip PD

Sedangkan target indikator sasaran untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut

Tabel III.1

Target Indikator Kinerja Sasaran

Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan Tahun 2025

NO	***SASARAN***	***INDIKATOR***	***TAHUN 2025***
			TARGET
1	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	0.69
2	Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase keterlibatan perempuan dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik	57.71
3	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan.	100
		Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan	100

Sedangkan target indikator Program untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel III.2

Target Indikator Kinerja Program

Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan Tahun 2025

PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1		*2*		*3*
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.1	Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	80,97 %
2	Program Perlindungan Perempuan	2.1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	70 %
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	3.1	Rasio KDRT	0,009 %
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	4.1	Persentase Tersedianya Data Gender dan Anak	100 %
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	5.1	Strata Kabupaten Layak Anak	Nindya
6	Program Perlindungan Khusus Anak	6.1	Persentase Anak korban kekerasan yang tertangani secara komprehensif	72,36 %
7	Program Pengendalian Penduduk	7.1	Total Fertility Rate (TFR)	1,8 %
8	Program Pembinaan keluarga berencana (KB)	8.1	Age Specific Fertility Rate 15-19 (ASFR 15-19)	29,7 %
		8.2	Unmet need	7,82 %
		8.3	Persentase peserta KB aktif (CPR)	67,64 %

9	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	9.1	Persentase kelompok kegiatan yang mendapatkan materi pembinaan 8 fungsi keluarga	84,15 %

3.3. Program Dan Kegiatan

3.3.1. Program

Program-program yang sesuai tugas dan fungsi Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan berdasarkan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 dan Renstra 2021-2026 ada 10 (sepuluh) program, sebagai berikut :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program Perlindungan Perempuan
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
5. Program Pemenuhan Hak Anak
6. Program Perlindungan Khusus Anak
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
8. Program Pengendalian Penduduk
9. Program Pembinaan Keluarga Berencana
10. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

3.3.2. Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang direncanakan untuk dilaksanakan

dan yang diusulan untuk Pembiayaannya dari APBD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
   a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
      - Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
      - Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota
   b. Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
      - Sosialisasi Peningkatan Patisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
2. Program Perlindungan Perempuan
   a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
      - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
   b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
   a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
      - Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota
      - Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
   a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
      - Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
5. Program Pemenuhan Hak Anak
   a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
      - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
6. Program Perlindungan Khusus Anak
   a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- Penguatan Kerja Sama Lintas Perangkat Daerah untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak, Kecamatan Layak Anak

b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tribulanan/Semesteran SKPD

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah-Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perjalanan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

8. Program Pengendalian Penduduk

a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitias Penduduk

- Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal
- Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal

b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

- Pembinaan dan Pengawasan Sistem Informasi Keluarga
- Pencatatan dan Pengumpulan data keluarga
- Pengolahan dan Pelaporan data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

9. Program Pembinaan Keluarga Berencana

a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
   - Pengendalian Program KKBPK
   - Pengelolan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana
   - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Loka Karya (Minilok)
   - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
   - Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja Advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
   - Penggerakan kader institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi sera Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
   - Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Faskes Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
   - Peningkatan Kesertaan Penggunan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

- Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya

d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber KB.

- Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas

10. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
- Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
- Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

b. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
- Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN

PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2025 ditempuh melalui 10 program 22 kegiatan dan 47 sub kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan ini bersumber dari berbagai pendanaan yaitu dana Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pajak Rokok dengan total anggaran sebesar Rp. 14.840.751.639,00. Adapun untuk lebih jelasnya rencana kerja dan penganggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. PACITAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							**15.696.586.071,00**	**14.977.836.071,00**	**14.840.751.639,00**	**-855.834.432,00**							**15.620.800.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**15.696.586.071,00**	**14.977.836.071,00**	**14.840.751.639,00**	**-855.834.432,00**							**15.620.800.000,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**720.600.000,00**	**820.600.000,00**	**603.083.940,00**	**-117.516.060,00**							**2.215.000.000,00**	
1.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**				**80,97 %**	**80,97 %**	**395.000.000,00**	**495.000.000,00**	**357.960.140,00**	**90.000.000,00**							**485.000.000,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi PUG dan Peningkatan Kapasitas Penyusunan PPRG*				171 Orang	171 Orang	80.000.000,00	80.000.000,00	50.726.100,00	-29.273.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	Kab. Pacitan		120.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Dokumen	30 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	30.827.900,00	-19.172.100,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			80.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																		
			Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota				222 Orang	90 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	19.898.200,00	-10.101.800,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina*				27 Organisasi	27 Organisasi	315.000.000,00	415.000.000,00	307.234.040,00	-7.765.960,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	Kab. Pacitan		365.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	315.000.000,00	415.000.000,00	307.234.040,00	-7.765.960,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			365.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan**				**70 7 % nilai**	**70 7 % nilai**	**75.600.000,00**	**75.600.000,00**	**67.891.200,00**	**64.400.000,00**							**140.000.000,00**	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*				58 Orang	58 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	12.775.600,00	-7.224.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	Kab. Pacitan		30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	12.775.600,00	-7.224.400,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan*				1 Lembaga	1 Lembaga	55.600.000,00	55.600.000,00	55.115.600,00	-484.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	Kab. Pacitan		110.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				3 Orang	3 Orang	55.600.000,00	55.600.000,00	55.115.600,00	-484.400,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			110.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Rasio KDRT**				**0,009 rasio**	**0,009 rasio**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**29.335.140,00**	**445.000.000,00**							**485.000.000,00**	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kasus KDRT yang tertangani*				100 %	100 %	40.000.000,00	40.000.000,00	29.335.140,00	-10.664.860,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	Kab. Pacitan		485.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	7.628.000,00	-2.372.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			45.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	21.707.140,00	-8.292.860,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			440.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase tersedianya data Gender dan anak**				**100 %**	**100 %**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**6.571.500,00**	**55.000.000,00**							**65.000.000,00**	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya data gender dan anak*				1 buku	1 buku	10.000.000,00	10.000.000,00	6.571.500,00	-3.428.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	Kab. Pacitan		65.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	6.571.500,00	-3.428.500,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			65.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Strata Kabupaten Layak Anak**				**Nindya Strata**	**Nindya Strata**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**70.894.060,00**	**250.000.000,00**							**350.000.000,00**	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Pemerhati PHA*				1 Lembaga	1 Lembaga	100.000.000,00	100.000.000,00	70.894.060,00	-29.105.940,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	Kab. Pacitan		350.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				13 Organisasi	13 Organisasi	100.000.000,00	100.000.000,00	70.894.060,00	-29.105.940,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			350.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase anak korban kekerasan yang tertangani secara komprehensif**				**72,36 %**	**72,36 %**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**70.431.900,00**	**590.000.000,00**							**690.000.000,00**	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Anak yang mendapatkan sosialisasi pencegahan dan penanganan korban kekerasan*				27 Orang	27 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	34.980.900,00	-15.019.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	Kab. Pacitan		525.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA																		
			Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu				1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	34.980.900,00	-15.019.100,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			525.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Standart Operasional Pelayanan Perlindungan Khusus Anak*				1 SOP	1 SOP	50.000.000,00	50.000.000,00	35.451.000,00	-14.549.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	Kab. Pacitan		165.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				27 Orang	30 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	35.451.000,00	-14.549.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			165.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**14.975.986.071,00**	**14.157.236.071,00**	**14.237.667.699,00**	**-738.318.372,00**							**13.405.800.000,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**				**>B Nilai**	**>B Nilai**	**2.408.069.071,00**	**2.415.669.071,00**	**2.270.135.024,00**	**483.980.929,00**							**2.892.050.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah*				23 Dokumen	23 Dokumen	14.440.000,00	54.440.000,00	52.092.460,00	37.652.460,00			-	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-		82.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	6.832.400,00	46.814.900,00	43.258.300,00	36.425.900,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			27.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4.213.400,00	3.440.700,00	2.525.800,00	-1.687.600,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			27.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	3.394.200,00	4.184.400,00	6.308.360,00	2.914.160,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			27.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah*				59 Dokumen	59 Dokumen	1.939.620.271,00	1.919.820.271,00	1.855.006.484,00	-84.613.787,00			-	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemelihaaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-		2.089.550.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.781.041.071,00	1.748.641.071,00	1.682.490.164,00	-98.550.907,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			1.900.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	144.139.200,00	156.739.200,00	156.739.200,00	12.600.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			156.550.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				8 Dokumen	8 Dokumen	6.628.000,00	6.628.000,00	5.754.300,00	-873.700,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			16.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				16 Laporan	16 Laporan	7.812.000,00	7.812.000,00	10.022.820,00	2.210.820,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			16.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi*				100 %	100 %	294.093.300,00	283.098.000,00	192.246.280,00	-101.847.020,00			-	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-		435.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	88.583.100,00	70.302.600,00	66.801.580,00	-21.781.520,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			170.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	205.510.200,00	212.795.400,00	125.444.700,00	-80.065.500,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			265.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan*				100 %	100 %	59.915.500,00	59.915.500,00	59.395.500,00	-520.000,00			-	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-		80.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	59.915.500,00	59.915.500,00	59.395.500,00	-520.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			80.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik*				80 %	80 %	100.000.000,00	98.395.300,00	111.394.300,00	11.394.300,00			-	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	-		205.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				80 Unit	80 Unit	60.000.000,00	69.478.000,00	77.477.000,00	17.477.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			95.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	40.000.000,00	28.917.300,00	33.917.300,00	-6.082.700,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			110.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Total Fertility Rate (TFR)**				**1,8 Nilai**	**1,8 Nilai**	**355.260.300,00**	**427.260.300,00**	**512.150.700,00**	**164.739.700,00**							**520.000.000,00**	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal informal dan nonformal yang melakukan pendidikan kependudukan*				6 kerjasama	6 kerjasama	77.460.300,00	77.460.300,00	51.850.700,00	-25.609.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	Kab. Pacitan		150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0018	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal				1 Kegiatan	1 Kegiatan	27.305.300,00	27.305.300,00	19.637.440,00	-7.667.860,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			75.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal																		
			Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan				3 Kegiatan	3 Kegiatan	50.155.000,00	50.155.000,00	32.213.260,00	-17.941.740,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			75.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Laporan Data dan Informasi Keluarga*				1 Laporan	1 Laporan	277.800.000,00	349.800.000,00	460.300.000,00	182.500.000,00			-	- -	Kab. Pacitan		370.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				-	12 Laporan	0,00	60.000.000,00	70.500.000,00	70.500.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				12 Laporan	12 Laporan	145.800.000,00	145.800.000,00	245.200.000,00	99.400.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			160.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																		
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				12 Dokumen	12 Dokumen	132.000.000,00	144.000.000,00	144.600.000,00	12.600.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase peserta KB aktif (CPR) Unmet Need Age Specific Fertility Rate 15-19 (ASFR 1519)**				**67,64 29,7 7,82 % Nilai Nilai**	**67,64 7,82 29,7 % Nilai Nilai**	**8.930.727.750,00**	**8.038.387.000,00**	**8.173.071.135,00**	**-2.316.977.750,00**							**6.613.750.000,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Jumlah laporan data keluarga yang beresiko stunting*				1 Laporan	1 Laporan	1.374.870.000,00	1.262.170.000,00	1.268.033.895,00	-106.836.105,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	Kab. Pacitan		1.375.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				12 Laporan	12 Laporan	199.170.000,00	59.170.000,00	31.423.000,00	-167.747.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				12 Laporan	12 Laporan	595.700.000,00	588.000.000,00	588.000.000,00	-7.700.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			600.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				12 Laporan	12 Laporan	180.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			195.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				16 Dokumen	16 Dokumen	150.000.000,00	125.000.000,00	158.610.895,00	8.610.895,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			165.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				2 Organisasi	2 Organisasi	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			265.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*Jumlah Tenaga Penyuluh KB yang dibina*				30 Orang	30 Orang	6.408.066.000,00	4.565.850.000,00	4.642.600.800,00	-1.765.465.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	Kab. Pacitan		4.000.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				1763 Orang	1763 Orang	3.856.850.000,00	4.565.850.000,00	4.642.600.800,00	785.750.800,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			4.000.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)																		
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				12 Laporan	0 Laporan	2.551.216.000,00	0,00	0,00	-2.551.216.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pelaksanaan pelayanan KB*				8 Event	8 Event	876.541.750,00	1.616.767.000,00	1.668.836.440,00	792.294.690,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	Kab. Pacitan		934.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				33 Laporan	33 Laporan	32.400.000,00	29.700.000,00	29.700.000,00	-2.700.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			36.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				1950 Orang	1950 Orang	815.201.000,00	1.558.717.000,00	1.610.786.440,00	795.585.440,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			800.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Laporan	1 Laporan	17.550.000,00	28.350.000,00	28.350.000,00	10.800.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			18.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria																		
			Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria				15 Orang	0 Orang	4.230.750,00	0,00	0,00	-4.230.750,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			35.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB																		
			Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB				36 Orang	0 Orang	7.160.000,00	0,00	0,00	-7.160.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			45.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daaerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB*				6 Organisasi	6 Organisasi	271.250.000,00	593.600.000,00	593.600.000,00	322.350.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	Kab. Pacitan		304.250.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB																		
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				1 Dokumen	0 Dokumen	3.750.000,00	0,00	0,00	-3.750.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			4.250.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				17 Kampung	17 Kampung	267.500.000,00	593.600.000,00	593.600.000,00	326.100.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			300.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase kelompok kegiatan yang mendapatkan materi pembinaan 8 fungsi keluarga**				**84,15 %**	**84,15 %**	**3.281.928.950,00**	**3.275.919.700,00**	**3.282.310.840,00**	**98.071.050,00**							**3.380.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapatkan sosialisasi/pembinaan*				74 Kelompok	74 Kelompok	434.328.950,00	292.719.700,00	299.110.840,00	-135.218.110,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	Kab. Pacitan		480.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)																		
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				1 Laporan / Dokumen	1 Laporan / Dokumen	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			55.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				25 Unit	25 Unit	300.000.000,00	132.000.000,00	131.024.000,00	-168.976.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			320.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)				1 Laporan	1 Laporan	86.328.950,00	112.719.700,00	120.086.840,00	33.757.890,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			105.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-				-	-	2.847.600.000,00	2.983.200.000,00	2.983.200.000,00	135.600.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	Kab. Pacitan		2.900.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				12 laporan	12 laporan	1.356.000.000,00	1.356.000.000,00	1.356.000.000,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			1.400.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				3379 laporan	3379 laporan	1.491.600.000,00	1.627.200.000,00	1.627.200.000,00	135.600.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			1.500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	J U M L A H								**15.696.586.071,00**	**14.977.836.071,00**	**14.840.751.639,00**	**28.979.860.221,87**							**15.620.800.000,00**	

Target dan Capaian Kinerja
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan
Triwulan II Tahun 2025

No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					TARGET CAPAIAN 2025	REALISASI CAPAIAN TRIWULAN II TAHUN 2025	PERSENTASE CAPAIAN	STATUS CAPAIAN TRIWULAN II TAHUN 2025 PER INDIKATOR		Rumus Perhitungan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026				TERCAPAI	BELUM TERCAPAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		14	15	16
Fokus Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar													
2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**												
2.1	Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	80,84	80,89	80,92	80,94	80,97	81,00%	80,97	0,00	0,00			Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dibanding Jumlah pekerja usia 15 tahun-69 tahun (usia produktif) x 100
2.2	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	69,23	69,41	69,62	69,89	70	71,6	70	100,00	142,86			Jumlah perempuan korban kekerasan yang melaporkan dibagi pengaduan perempuan korban kekerasan yang ditindaklanjuti oleh pelayanan terpadu x 100
2.3	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	0,0085	0,0086	0,0088	0,0089	0,009	0,0091	0,009	0,0000	0,00			Jumlah KDRT dibagi Jumlah Rumah Tangga x 100
2.4	Persentase tersedianya data gender dan anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00			Buku data gender dan anak yang tersusun dibagi Buku data gender dan anak yang direncanakan tersusun x 100
2.5	Strata Kabupaten Layak Anak	Madya	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	0	0,00			Perolehan hasil evaluasi KLA
2.6	Persentase Anak Korban Kekerasan yang tertangani secara komprehensif	71,43%	71,72%	71,95%	72,20%	72,36%	72,54%	72,36%	100,00	13819,79			Jumlah pengaduan anak korban kekerasan yang ditindaklanjuti/ditangani oleh pelayanan terpadu dibagi jumlah pengaduan anak korban kekerasan yang masuk x 100
8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**												
8.1	Total Fertility Rate (TFR)	1,89	1,87	1,85	1,83	1,8	1,79	1,8	0	0,00			Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya
8.2	Age Spesific Rate 15-19 (ASFR 15-19)	31,60	31,2%	30,8	30,3	29,70%	29,30%	29,70%	0	0,00			Jumlah Kelahiran dalam kelompok umur 15-19 dibagi jumlah wanita dalam kelompok umur 15-19 dikali 1000
8.3	Persentase peserta KB aktif (CPR)	79,78	66,46%	66,88%	67,42%	67,64%	68,09%	67,64%	72,77	10758,43			Jumlah akseptor KB dibagi PUS x 100
8.4	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) %	8,52%	8,34%	8,16%	8,00%	7,82%	7,72%	7,82%	6,91	1,13			Jumlah unmeet need dibagi PUS x 100
8.5	Persentase kelompok kegiatan yang mendapatkan materi pembinaan 8 fungsi keluarga	78,93	80,23	81,53%	82,84%	84,15%	85.,45%	84,15%	25,43	3021,98			Jumlah kelompok kegiatan yang mendapatkan materi pembinaan 8 fungsi keluarga dibagi jumlah kelompok kegiatan yang ada * 100%

Pacitan, 1 Juli 2025
KEPALA DINAS PPKB DAN PPPA
KABUPATEN PACITAN

Dra. JAYUK SUSILANINGTYAS, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19661110 199312 2 002

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan Tahun 2025 ini disusun berdasarkan kebutuhan kegiatan dan anggaran dari pengelola program dimasing-masing Bidang, lingkup Dinas PPKB dan PPPA Kabupaten Pacitan sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai kewenangan yang diembannya, Rencana Kerja ini sekaligus juga sebagai acuan dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan dalam urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak di Kabupaten Pacitan selama tahun 2025.

Rencana Kinerja juga merupakan suatu dokumen perencanaan kegiatan yang berisi tujuan, sasaran, indikator kinerja serta target sasaran serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2025.

Dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki oleh aparatur Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak diharapkan kegiatan–kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kinerja ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat di

bidang pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan serta pelayanan pembangunan keluarga dan keluarga berencana di Kabupaten Pacitan

Semoga Rencana Kinerja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan Tahun 2025 ini dapat dijadikan pedoman bagi pengelola program dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparatur pemerintah, sehingga bisa berhasil dalam mengemban amanah masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan yang hakiki serta dapat mencapai sasaran yang optimal sesuai indikator standar pelayanan minimal yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten pacitan.

Pacitan, 18 Juli 2025

Kepala Dinas PPKB dan PPPA
Kabupaten Pacitan

Dra. JAYUK SUSILANINGTYAS, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199312 2 002

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) 2025

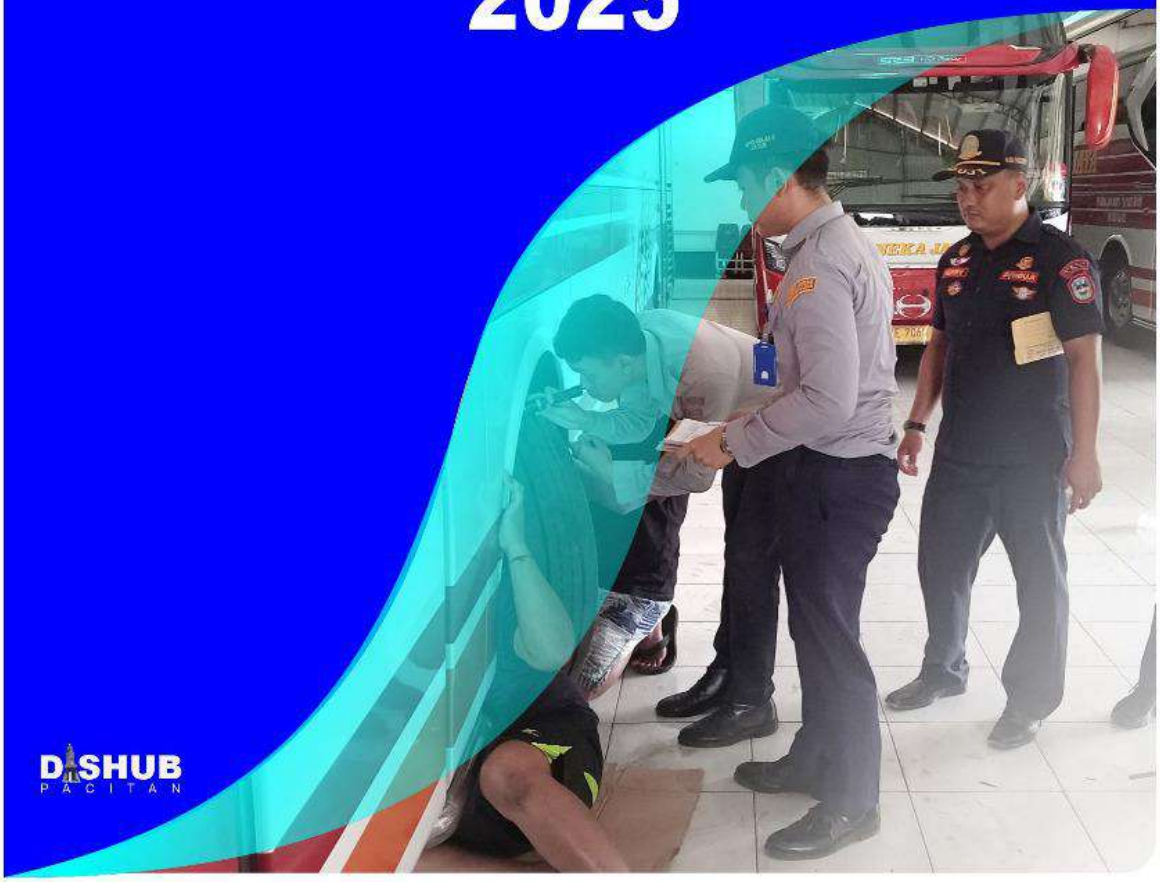

DISHUB PACITAN

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN

Jl. Gatot Subroto (Terminal Bus Pacitan) Pacitan
www.dishub.pacitankab.go.id
dishub@pacitankab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Gatot Subroto No. – (Komplek Terminal Bus Tipe A) Pacitan 63515
Telp/Fax. (0357) 882006 *e-mail*: dishub@pacitankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 000.3.1/301/408.39/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
KABUPATEN PACITAN

Menimbang : a. Bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini

Kedua : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum **"KESATU"** Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Mengumpulkan data dan informasi;
b. Menyusun dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan sesuai tahapan dan tata cara yang terdiri dari :
    1) Rancangan dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2025
    2) Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2025; dan
    3) Rancangan awal Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2026
c. Melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

Ketiga : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PACITAN
Pada tanggal : 22 Juli 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PACITAN,

Dr. PUTRO UTOMO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19691012 198809 1 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Illahi Rabbi, atas segenap ilmu dan karunia-Nya, akhirnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 telah dapat diselesaikan.

Untuk mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan pada tahun 2025 perlu disusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan yang disusun ini merupakan acuan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan Kabupaten Pacitan sektor transportasi pada Tahun 2025, sehingga dapat tercapai sistem transportasi yang efektif, efisien, dan berkualitas yang merupakan tuntutan masyarakat Kabupaten Pacitan.

Kami sangat menyadari bahwa Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2025.

Sebagai akhir kata, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada segenap jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan dan semua pihak terkait yang telah membantu sepenuhnya dalam penyelesaian Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini, semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Pacitan, 22 Juli 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PACITAN

Dr. DJOKO PUTRO UTOMO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19691012 198809 1 001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

1. LATAR BELAKANG 1
2. DASAR HUKUM 2
3. MAKSUD DAN TUJUAN 3
4. SISTEMATIKA PENULISAN 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu (2021) dan Capaian Renstra 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 37
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 39
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 42

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 43

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 43
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan 45
3.3 Program dan Kegiatan 46

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 56

BAB V PENUTUP..... 69

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan berkewajiban menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang ada di Dinas Perhubungan.

Perencanaan kinerja sebagai proses penyusunan rencana kerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2025 dibuat dalam rangka mekanisme penyusunan perencanaan dan penganggaran serta pelaporan kinerja instansi pemerintah. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kerangka dan kebijakan anggaran yang menjadi komitmen organisasi untuk dicapai dalam tahun yang bersangkutan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan dapat dikerjakan secara simultan/parallel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting pada Dinas Perhubungan, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan 2021 - 2026.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 berisi sasaran beserta indikator kinerja sasaran dan target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2025 serta rencana program dan kegiatan berikut indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif yang dibutuhkan.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;

12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan.
17. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026
18. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 49 Tahun 2022 tentang rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023
19. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Perhubungan.

Adapun tujuan dari Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui kondisi umum pembangunan Kabupaten Pacitan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025.

2. Untuk mengetahui kebijakan pembangunan Kabupaten Pacitan yang dilaksankan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2025;
3. Sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2025.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan kerja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perubahan PD sudah disahkan.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab ini memuat tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra PD.

Bab IV Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

Bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun Lalu dan capaian Renja

Pagu anggaran yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 7.959.859.059,- sedangkan prosentase penggunaan anggaran belanja di Tahun 2024 sebesar 96,50% atau sebesar Rp. 7.681.364.568,38 dengan realisasi fisik sebesar 100%

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan telah melaksanakan 2 program. Terhadap masing-masing program tersebut akan di analisis sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dengan target Rp**.** 5.220.195.059,- realisasi anggaran sebesar Rp. 4.997.521.528,-, proporsi realisasi anggaran sebesar 95,73%

   Dengan indikator programnya adalah Hasil Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target 71,00.

   Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah indikatornya adalah Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 29.912.100,- atau sebesar 97,80%
   b. Administrasi keuangan Perangkat Daerah. Indikator outputnya adalah Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 3.655.348.955,- atau sebesar 94,67%
   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Indikator outputnya adalah Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 46.640.000,- atau sebesar 99,34%
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah. Indikator outputnya adalah Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 391.624.680,- atau sebesar 98,78%

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Indikator outputnya adalah Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Indikator outputnya adalah Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 456.871.351,- atau sebesar 93,92%
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Indikator outputnya adalah Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 105.336.320,- atau sebesar 99,85%

2. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) dengan target Rp**.** 2.415.564.400,- realisasi anggaran sebesar Rp. 2.392.225.370,-. Proporsi realisasi anggaran sebesar 99,03%

   Dengan indikator Programnya Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan dengan target 100%

   Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

   a. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota. Indikator Outputnya adalah Tersusunnya Dokumen Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) yang representatif. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%
   b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota. Indikator Outputnya adalah Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 610.326.702,- atau sebesar 99,92%
   c. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C. Indikator Outputnya adalah Tersedianya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 129.365.000,- atau sebesar 100%
   d. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir. Indikator Outputnya adalah Terlaksananya Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 865.289.200,- atau sebesar 99,05%

e. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Indikator Outputnya adalah Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 388.487.200,- atau sebesar 98,85%
f. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota. Indikator Outputnya adalah Tersedianya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 271.517.268,- atau sebesar 96,82%
g. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota. Indikator Outputnya adalah Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%
h. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan. Indikator Outputnya adalah Terlaksananya peningkatan jumlah pelayanan bidang perhubungan yang berkeselamatan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 118.840.000,- atau sebesar 99,28%
i. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Indikator Outputnya adalah Terlaksananya jumlah pelayanan bidang perhubungan yang berkeselamatan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 8.400.000,- atau sebesar 98,82%

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD

KABUPATEN PACITAN TRIWULAN TAHUN 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
1	**215.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**73.55**	**4.831.237.156,00**	**0,00**	**933.079.689,00**	**70,95**	**1.225.664.995,00**	**0,00**	**191.004.555,00**	**0,00**	**0,00**	**70,95**	**2.349.749.239,00**	**96,46**	**48,64**	**70,95**	**2.349.749.239,00**	**0**	**0**	**Dinas Perhubungan**
	215.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**		**0,00**	**0.00**	**0,00**	**23**	**66.000.000,00**	**6,00**	**6.708.000,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,00**	**6.708.000,00**	**34,78**	**10,16**	**8,00**	**6.708.000,00**	**0**	**0**	
	215.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan		0,00	0.00	0,00	9	50.000.000,00	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	55,56	0,00	5,00	0,00	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
		Perencanaan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah																							
	215.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0,00	0.00	0,00	14	16.000.000,00	5,00	6.708.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	6.708.000,00	50,00	41,93	7,00	6.708.000,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				52,78	20,97					F
Predikat kinerja(%)																				Rendah	Sangat Rendah		2	2		
	215.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah**		**0,00**	**0.00**	**0,00**	**59**	**3.929.167.156,00**	**15,00**	**862.192.800,00**	**8,00**	**1.007.263.698,00**	**0,00**	**191.004.555,00**	**0,00**	**0,00**	**23,00**	**2.060.461.053,00**	**38,98**	**52,44**	**23,00**	**2.060.461.053,00**	**0**	**0**	
	215.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0.00	0,00	0.00	0,00	35.00	3.919.167.156,00	35,00	857.194.800,00	35,00	1.007.263.698,00	0,00	191.004.555,00	0,00	0,00	35,00	2.055.463.053,00	100,00	52,45	35,00	2.055.463.053,00	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
		ASN																								
	215.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0,00	0.00	0,00	45	10.000.000,00	11,00	4.998.000,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	4.998.000,00	44,44	49,98	20,00	4.998.000,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				72,22	51,22					F
Predikat kinerja(%)																				Sedang	Rendah		2	2		
	215.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pegawai yang mendapatkan layanan**		**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100**	**86.184.000,00**	**24,00**	**0,00**	**8,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,33**	**0,00**	**32,33**	**0,00**	**32,33**	**0,00**	**0**	**0**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
			kepegawaian																							
	215.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0.00	0,00	0.00	0,00	3.00	86.184.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	33,33	0,00	1,00	0,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				33,33	0,00					F
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah		1	1		
	215.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**		**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100**	**345.691.000,00**	**24,00**	**2.360.000,00**	**16,66**	**149.085.118,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,66**	**151.445.118,00**	**40,66**	**43,81**	**40,66**	**151.445.118,00**	**0**	**0**	
	215.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	0.00	0,00	0.00	0,00	2.00	5.000.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	50,00	0,00	1,00	0,00	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
		gan Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan																							
	215.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0.00	0,00	0.00	0,00	5.00	126.707.300,00	1,00	0,00	1,0	38.405.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	38.405.118,00	40,00	30,31	2,00	38.405.118,00	0	0	
	215.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0.00	0,00	0.00	0,00	2.00	110.323.700,00	0,00	0,00	1,0	106.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	106.100.000,00	50,00	96,17	1,00	106.100.000,00	0	0	
	215.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0.00	0,00	0.00	0,00	12.00	103.660.000,00	3,00	2.360.000,00	3,0	4.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6.940.000,00	50,00	6,69	6,00	6.940.000,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				47,50	33,29					F
Predikat kinerja(%)																				Sangat	Sangat		4	4		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
																				Rendah	Rendah					
	215.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100**	**15.000,00**	**24,00**	**0,00**	**8,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,33**	**0,00**	**32,33**	**0,00**	**32,33**	**0,00**	**0**	**0**	
	215.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		0,00	0.00	0,00	1	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				0,00	0,00					F
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah		1	1		
	215.01.2.	**Penyediaan**	**Persentase**		**0,**	**0.**	**0,**	**100**	**357.165.0**	**24,0**	**61.818.8**	**16,**	**68.988.17**	**0,**	**0,00**	**0,**	**0,**	**40,6**	**130.807.0**	**40,6**	**36,6**	**40,6**	**130.807.0**	**0**	**0**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
	08	**Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan**		**00**	**00**	**00**		**00,00**	**0**	**89,00**	**66**	**9,00**	**00**		**00**	**00**	**6**	**68,00**	**6**	**2**	**6**	**68,00**			
	215.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0,00	0.00	0,00	12	138.317.000,00	3,00	35.868.673,00	3,00	35.206.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	71.074.894,00	50,00	51,39	6,00	71.074.894,00	0	0	
	215.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0,00	0.00	0,00	12	218.848.000,00	3,00	25.950.216,00	3,00	33.781.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	59.732.174,00	50,00	27,29	6,00	59.732.174,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				50,00	39,34					F
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rend	Sangat Ren		2	2		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
																				ah	dah					
	215.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**80.00**	**47.015.000,00**	**20,00**	**0,00**	**14,00**	**328.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,00**	**328.000,00**	**42,50**	**0,70**	**34,00**	**328.000,00**	**0**	**0**	
	215.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0,00	0.00	0,00	16	47.000.000,00	4,00	0,00	5,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	328.000,00	56,25	0,70	9,00	328.000,00	0	0	
	215.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0.00	0,00	0.00	0,00	1.00	15.000,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	4.000,00	0,00	40,00	0,00	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
		dan Bangunan Lainnya	yang Dipelihara/Direhabilitasi																							
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				2.028,13	0,35					F
Predikat kinerja(%)																				Sangat Tinggi	Sangat Rendah		2	2		
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																				37,46	20,53					
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah					
2	**215.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN**	**Persentase peningkatan pelayanan bidang perhubungan**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100**	**1.872.442.500,00**	**24,99**	**293.312.600,00**	**24,99**	**439.543.970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,98**	**732.856.570,00**	**49,98**	**39,14**	**49,98**	**732.856.570,00**	**0**	**0**	**Dinas Perhubungan**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
		ANGKUTAN JALAN (LLAJ)																								
	215.02.2.01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**Peningkatan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**		**0,00**	**0.00**	**0,00**	**1**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	
	215.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		0,00	0.00	0,00	1	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				0,00	0,00					F
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah		1	1		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
	215.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah titik peningkatan sarana dan prasarana perhubungan**		**0,00**	**0.00**	**0,00**	**1087**	**206.400.000,00**	**678,00**	**14.800.000,00**	**451,00**	**118.747.970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.129,00**	**133.547.970,00**	**103,86**	**64,70**	**1.129,00**	**133.547.970,00**	**0**	**0**	
	215.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun		0.00	0,00	0.00	0,00	1.00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	215.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		0.00	0,00	0.00	0,00	600.00	206.280.000,00	345,00	14.800.000,00	357,00	118.747.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	133.547.970,00	117,00	64,74	702,00	133.547.970,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				58,50	32,37					F
Predikat kinerja(%)																				Rendah	Sangat Rendah		2	2		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
	215.02.2.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Jumlah peningkatan sarana dan prasarana perhubungan**		**0,00**	**0.00**	**0,00**	**4**	**217.800.000,00**	**1,00**	**40.920.000,00**	**4,00**	**39.460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**80.380.000,00**	**125,00**	**36,91**	**5,00**	**80.380.000,00**	**0**	**0**	
	215.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang		0.00	0,00	0.00	0,00	1.00	13.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	215.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara		0.00	0,00	0.00	0,00	5.00	204.280.000,00	1,00	40.920.000,00	4,00	39.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	80.380.000,00	100,00	39,35	5,00	80.380.000,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				50,00	19,68					F

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
																		Predikat kinerja(%)		Sangat Rendah	Sangat Rendah		2	2		
	215.02.2.04	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Jumlah pelayanan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir**		**0,00**	**0.00**	**0,00**	**1**	**878.497.500,00**	**0,00**	**173.922.600,00**	**0,00**	**176.275.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.198.000,00**	**0,00**	**39,86**	**0,00**	**350.198.000,00**	**0**	**0**	
	215.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		0.00	0,00	0.00	0,00	12.00	878.497.500,00	3,00	173.922.600,00	3,00	176.275.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	350.198.000,00	50,00	39,86	6,00	350.198.000,00	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				50,00	39,86					F
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah		1	1		
	215.02.2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Jumlah alat uji yang representatif dan peningkatan pelayanan pengujian**		**0,00**	**0.00**	**0,00**	**9**	**206.400.000,00**	**0,00**	**32.300.000,00**	**0,00**	**19.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.700.000,00**	**0,00**	**25,05**	**0,00**	**51.700.000,00**	**0**	**0**	
	215.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		0.00	0,00	0.00	0,00	3500.00	31.500.000,00	1.098,00	25.000.000,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,00	25.000.000,00	55,80	79,37	1.953,00	25.000.000,00	0	0	
	215.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan			0,00	0.00	0,00	9	174.900.000,00	0,00	7.300.000,00	0,00	19.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700.000,00	0,00	15,27	0,00	26.700.000,00	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
		Berkala Kendaraan Bermotor	Bermotor yang Terpelihara																							
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				27,90	47,32					F
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah		2	2		
	215.02.2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah manajemen dan rekayasa**		**0,00**	**0.00**	**0,00**	**3**	**250.115.000,00**	**0,00**	**22.470.000,00**	**2,00**	**51.264.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**73.734.100,00**	**66,67**	**29,48**	**2,00**	**73.734.100,00**	**0**	**0**	
	215.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka		0.00	0,00	0.00	0,00	3.00	250.100.000,00	0,00	22.470.000,00	0,00	51.264.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.734.100,00	0,00	29,48	0,00	73.734.100,00	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
		Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan																							
	215.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	0.00	0,00	0.00	0,00	1.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				0,00	14,74					F
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah		2	2		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
	215.02.2.07	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin**		**0,00**	**0.00**	**0,00**	**1**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	
	215.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin		0.00	0,00	0.00	0,00	1.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				0,00	0,00					F
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah		1	1		
	215.02.2.08	**Audit dan Inspeksi Keselamatan**	**Peningkatan jumlah pelayanan bidang**		**0,00**	**0.00**	**0,00**	**130**	**107.200.000,00**	**30,00**	**7.620.000,00**	**66,00**	**33.436.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,00**	**41.056.500,00**	**73,85**	**38,30**	**96,00**	**41.056.500,00**	**0**	**0**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
		LLAJ di Jalan	**perhubungan yang berkeselamatan**																							
	215.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	0.00	0,00	0.00	0,00	12.00	107.200.000,00	3,00	7.620.000,00	3,00	33.436.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	41.056.500,00	50,00	38,30	6,00	41.056.500,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				50,00	38,30					F
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah		1	1		
	215.02.2.12	**Penetapan Rencana**	**Peningkatan jumlah pelayanan**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**1.00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**1.280.000,00**	**0,00**	**960.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.240.000,00**	**0,00**	**37,33**	**0,00**	**2.240.000,00**	**0**	**0**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
		Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**bidang perhubungan yang berkeselamatan**																							
	215.02.2.12.0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota		0,00	0.00	0,00	1	6.000.000,00	0,00	1.280.000,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240.000,00	0,00	37,33	0,00	2.240.000,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				0,00	37,33					F
Predikat kinerja(%)																				Sangat	Sangat		1	1		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
																				Rendah	Rendah					
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																				41,04	30,18					
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah					
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)																				73,22	43,89					
Predikat kinerja(%)																				Sedang	Sangat Rendah					
Total																				**6.703.679.656,00**			**3.082.605.809,00**			
Persentase Realisasi Anggaran																				**45.98%**						
Predikat																				**Sangat Rendah**						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Tersedianya Waktu Pelaksanaan yang cukup																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kondisi geografis dengan 10 % dataran dan 90% pegunungan																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Percepat Realisasi kinerja dan anggaran																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																										

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Adapun analisis kinerja pelayanan perhubungan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Rekapitulasi Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)
1	Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan	Persentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan	89,20	64,14	71,90%
		Persentase Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang	0,08%	1,19%	1.485,09%
		Persentase tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	60,30%	61,32%	101,69%
2	Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Hasil nilai IKM PD	81,60	84,20	103,19%

Pelayanan transportasi mulai dari perekayasaan lalu lintas, pengoperasian terminal tipe c, perparkiran, manajemen angkutan umum, manajemen keselamatan, pelayanan uji berkala kendaraan bermotor dan ijin trayek serta KPS untuk angkutan pedesaan, dan pengoperasian kendaraan wajib uji di Kabupaten Pacitan masih mengalami berbagai permasalahan baik dari segi

proses, substansi, pelaksanaan dan pengawasannya, hal ini disebabkan oleh :

1. Masih kurangnya sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan yang memiliki basis pengetahuan di bidang transportasi dan kelalulintasan;
2. Belum optimalnya legalitas yang mendukung pelaksanaan di lapangan;
3. Kondisi terminal dan halte sebagai tempat pemberhentian dan pemberangkatan angkutan masih belum sesuai dengan standar yang ditetapkan;
4. Kurang tercukupinya fasilitas jalan seperti rambu-rambu, marka dan guardrail pada ruas jalan khususnya di daerah rawan kecelakaan dan belum tersedianya sarana pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas yang memadai.
5. Adanya pergantian system Online Single Submission (OSS) dalam proses pengurusan ijin angkutan sehingga tidak ada angkutan umum yang memiliki ijin usaha angkutan umum
6. Belum diaturnya petunjuk pelaksana (juklak/juknis) atas perubahan beberapa aturan perundangan di tingkat Nasional yang mengatur tentang Perhubungan.

Akan tetapi, meskipun ada permasalahan pelayanan transportasi juga memberikan hasil yang positif antara lain; semakin baiknya prasarana lalu lintas, semakin meningkatnya komitmen dari pengguna jalan di Kabupaten Pacitan untuk tertib berlalu lintas.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Pembentukan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan sedangkan kedudukan,

tugas dan fungsi, susunan organisasi, serta tata kerja telah diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 147 Tahun 2021.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan tugas urusan perhubungan memiliki penyelenggaraan fungsi:

(1) Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Lalu Lintas dan Angkutan;
(2) Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi prasarana transportasi;
(3) Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengembangan dan keselamatan transportasi;dan
(4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
   1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
   2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri dari :
   1. Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan; dan
   2. Seksi Perparkiran.
d. Bidang Prasarana Transportasi terdiri dari :
   1. Seksi Pembangunan dan Pengoperasian Prasarana Transportasi; dan
   2. Seksi Penerangan Jalan Umum (PJU).
e. Bidang Pengendalian dan Keselamatan Transportasi, terdiri dari :
   1. Seksi Pengendalian dan Transportasi; dan
   2. Seksi Keselamatan Pemaduan Moda dan Teknologi Transportasi.

f. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Analisis terhadap lingkungan internal Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut :

- Kekuatan
  1. Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendasari kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan;
  2. Tersedianya sumber daya manusia yang telah mengikuti diklat teknis fungsional/struktural;
  3. Terdapat sistem informasi yang mendukung pelayanan publik di Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan;
  4. Motivasi dan dedikasi karyawan cukup tinggi;
- Kelemahan
  1. Kurang optimalnya SDM pelaksana dari segi kualitas dan kuantitas;
  2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai;
  3. Mekanisme dan perencanaan kerja kurang optimal
  4. Belum optimalnya sistem pengelolaan administrasi dan pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi

Analisis terhadap lingkungan eksternal Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan memperlihatkan peluang dan tantangan sebagai berikut :

- Peluang
  1. Wilayah jaringan transportasi di wilayah Kabupaten Pacitan cukup luas;
  2. Adanya dukungan stacke holder (organda, BPTD, Paguyuban dll);
  3. Adanya dukungan dari APBD II, APBD I dan APBN;
  4. Berkembangnya pusat perekonomian di wilayah;

5. Berkembangnya jumlah kendaraan sehingga meningkatkan PAD
6. Adanya perintisan transportasi laut dan udara.

❖ Tantangan

1. Kondisi geografis yang bergunung-gunung sehingga sistem transportasi tidak efektif dan efisien ;
2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengujian kendaraan bermotor, perijinan angkutan dan ketertiban lalu lintas;
3. Sering terjadinya kecelakaan lalu lintas;
4. Kemacetan lalu lintas di pasar tumpah dan tanah longsor
5. Meningkatnya jumlah kendaraan

Bertolak pada isu-isu strategis diatas maka Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan menetapkan program/kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); dan
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra PD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh PD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap PD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran

program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk PD yang bersangkutan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dari Kementerian Perhubungan

Rencana strategis Kementerian Perhubungan 2019-2014 mengusung visi :

"KESELAMATAN JALAN TANGGUNG JAWAB KITA BERSAMA"

Yang dijabarkan ke dalam 3 (tiga) misi :

1. Peningkatan pelayanan keselamatan transportasi dan kelengkapan sarana prasarana jalan mendukung keselamatan.
2. Peningkatan penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK dalam rangka pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan dan berkeselamatan.
3. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dan restrukturisasi/reformasi kelembagaan dan regulasi.

Isu Strategis Bidang Perhubungan :

Salah satu program agenda prioritas pembangunan yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional dijabarkan kembali ke dalam agenda pembangunann nasional, khususnya agenda Pembangunan tarnsportasi nasional, diantaranya adalah membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan Pembangunan dan membangun transportasi masal perkotaan.

Isu strategis 1 : Membangun Konektivitas Nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan

Infrastruktur penunjang konektivitas nasional baik berupa jaringan transportasi dan jaringan telekomunikasi, perlu diintegrasikan dengan pelayanan sarana intermoda transportasi yang terhubung secara efisien dan efektif, termasuk mendorong pembangunan konektivitas antar

wilayah, sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia. Penyediaan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi yang mendorong konektivitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, dan mempercepat gerak ekonomi.

Kebijakan strategis untuk mewujudkan konektivitas nasional adalah :

1. Mempercepat Pembangunan system transportasi multimoda;
2. Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung sistem logistic nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung Kerjasama regional dan global;
3. Menjaga keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan;
4. Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada koridor ekonomi, kawasan industri khusus, kompleks industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi;
5. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun peningkatan keselamatan dan kualitas kondisi lingkungan;
6. Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi;
7. Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pengembangan sumber daya manusia.

Isu strategis 2 : Membangun Transportasi Umum Massal Perkotaan

Pembangunan perkotaan Indonesia kedepan diarahkan pada peningkatan peran perkotaan sebagai basis Pembangunan dan kehidupan yang layak huni, berkeadilan, mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan, sesuai dengan karakter potensi dan budaya lokal. Arah

kebijakan Pembangunan perkotaan berfokus pada pengembangan kota sebagai suatu kesatuan kawasan/wilayah, yaitu kota sebagai pendorong pertumbuhan nasional dan regional serta kota sebagai tempat tinggal yang berorientasi pada kebutuhan penduduk kota. Walaupun demikian, Pembangunan perkotaan ke depan akan lebih difokuskan pada pelaksanaan pengendalian pembangunan kota-kota besar dan metropolitan serta percepatan pembangunan kota-kota menengah dan kecil. Oleh karena itu, dalam rangka mengembangkan transportasi umum masal perkotaan, pembangunan sistem angkutan umum modern yang saling terintegrasi seperti BRT dan MRT diharapkan dapat meningkatkan peran angkutan umum dalam melayani kebutuhan perjalanan penduduk perkotaan serta menciptakan transportasi perkotaan yang praktis, efisien, ramah lingkungan dan berkeadaban. Arah kebijakan dan strategi yang disusun lima tahun kedepan adalah :

1. Mengembangkan sistem angkutan umum massal yang modern dan maju dengan orientasi kepada bus maupun rel serta dilengkapi dengan fasilitas alih moda terpadu;
2. Mengembangkan manajemen transportasi perkotaan yang berimbang dengan memperhatikan interaksi antara transportasi and tata guna lahan;
3. Meningkatkan integrasi kelembagaan transportasi perkotaan.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dikelompokkan menjadi 3 aspek, meliputi keselamatan dan keamanan, pelayanan, serta kapasitas transportasi.

1. Keselamatan dan Keamanan

Keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman pengguna transportasi serta menurunkan jumlah dan Tingkat kecelakaan transportasi yang meliputi transportasi jalan, kereta api, pelayaran, dan penerbangan. Tingkat keselamatan dan keamanan transportasi diwujudkan melalui dua sasaran yaitu menurunnya angka kecelakaan

trasnportasi, dan menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi.

2. Pelayanan Transportasi

Dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi ditetapkan 7 sasaran, yaitu

1) Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi;
2) Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan,
3) Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan
4) Meningkatnya kinerja Kementerian Perhubungan dalam Mewujudkan good governance,
5) Meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan,
6) Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi, dan
7) Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan clean governance.

3. Kapasitas Trasnportasi

Dalam rangka meningkatkan kapasitas transportasi, Kementerian Perhubungan menetapkan 5 (lima) sasaran, Yaitu :

1) Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda
2) Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang,
3) Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya diwilayah timur Indonesia,
4) Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan, dan
5) Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan

Arah Kebijakan Umum Perhubungan Darat 2015-2019

Arah kebijakan pengembangan Transportasi Darat untuk Tahun 2015-2019 disesuaikan dengan arah kebijakan RPJMN Tahun 2015-2019 serta dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi perkembangan lingkungan dan isu-isu strategis yang ada, maka secara umum arah dan kebijakan pengembangan transportasi darat dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Penguatan konektivitas system transportasi darat;
2. Keterpaduan antarmoda pendukung logistic nasional;
3. Revitalisasi sistem transportasi perkotaan;
4. Penerapan kebijakan keselamatan LLAJ;
5. Penguatan sistem pengendalian keselamatan transportasi sungai, danau dan penyeberangan,
6. Modernisasi sistem pelayanan transportasi darat;
7. Optimalisasi penyelenggaraan angkutan hari libur nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan

Isu-isu strategis dapat berasal dari skala lokal, regional maupun nasional. Sesuai Peraturan Bupati Pacitan No. 147 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan, bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan bertanggung jawab atas pelaksanaan otonomi daerah pada bidang urusan perhubungan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun peraturan perundangan yang mengatur urusan perhubungan adalah UU Nomor 14 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perubahan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut mengakibatkan perubahan kewenangan yang sangat mendasar.

Visi merupakan suatu pandangan jauh ke depan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapainya. Visi juga merupakan cita-cita atau impian atau gambaran di masa depan yang akan dicapai oleh

organisasi atau instansi daerah. Sedangakan misi merupakan pernyataan-pernyataan yang mendefinisikan apa yang sedang/akan dilakukan atau ingin dicapai saat ini. Misi juga merupakan hal-hal yang akan dilakukan agar visi yang direncanakan tercapai.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pacitan sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Perhubungan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021–2026.

Visi Kabupaten Pacitan:

"MASYARAKAT PACITAN SEJAHTERA DAN BAHAGIA"

Misi Kabupaten Pacitan:

Sesuai dengan visi "Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia", maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Pacitan 2016-2021 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut :

Misi 1 : Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup

Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang kukuh Berpijak Pada Nilai-Nilai Agama dan Budaya Bangsa

Misi 3 : Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi Melaui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, serta Sektor Unggulan Lainnya

Misi 4 : Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional, dan Melayani

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan. Hal ini ditunjukkan melalui Pernyataan misi ke 1 yaitu "Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan hidup". Pada misi pertama ini Dinas Perhubungan berperan dalam peningkatan aksesibilitas antar wilayah sehingga arus barang dan jasa di Kabupaten Pacitan dapat lancar sehingga pertumbuhan di berbagai bidang dapat meningkat.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan yang mengampu urusan di bidang Perhubungan mendukung misi 1 "Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup

MATRIK TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Definisi operasional	Formula	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
Meningkatnya pelayanan dan keselamatan sarana dan prasarana perhubungan	Indeks Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Merupakan indikator pengukuran kinerja meliputi lima indikator 1. Kualitas layanan 2. Responsivitas 3. Produktivitas 4. Akuntabilitas 5. Responsibilitas Kualitas layanan meliputi : A. Pengadaan fasilitas publik B. Optimalisasi C. Pengembangan Sarana dan Prasarana dan koordinasi Responsivitas Meliputi ; Produktivitas meliputi : Produktivitas meliputi : A. Teralisasinya program-program mengatasi kemacetan lalu lintas b. hasil sesuai target Akuntabilitas meliputi : A. Penyelenggaraan lalu lintas yang aman dan lancar B. Kebijakan yang berpihak kepada masyarakat luas Responsibiltas meliputi : A. Pengendalian Birokrasi B. Kordinasi dengan lintas sektor	$\frac{IKM + \frac{V}{C} rasio + prosentase\ tersedianya\ sarana\ dan\ prasarana\ perhubungan}{3}$	26,57%	27,01%

PENYELARASAN TUJUAN DAN SASARAN, DEFINISI OPERASIONAL, FORMULASI, SUMBER DATA, DAN PENETAPAN TARGET

Sasaran	Inidikator Sasaran	Formulasi	Sumber Data	Kondisi Awal	Target					
					2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan	% Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang	$\frac{Kejadian\ kecelakaan\ angkutan\ orang/barang}{Jumlah\ kendaraan\ wajib\ uji} x100$	Survey Dinas Perhubungan	0,11%	0,10%	0,09%	0,08%	0,07%	0,07%	0,07%
	% angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan	$\frac{Jumlah\ angkutan\ orang\ yang\ berstandar\ pelayanan\ keselamatan\ minimal}{Jumlah\ angkutan\ orang} x100$		82,99%	85,1%	87,1%	89,2%	91,3%	93,4%	93,4%

Sasaran	Inidikator Sasaran	Formulasi	Sumber Data	Kondisi Awal	Target					
					2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
	% tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	$Rata - rata\ (\ Presentase\ pemenuhan\ sarana\ dan\ prasrana\ perhubungan\ dan$ Presentase $tersedianya\ sarana\ pengendali\ dan\ pengamanan\ lalu\ lintas)$		28,6%	39,1%	49,7%	60,3%	70,9%	81,5%	81,5%
		Presentase pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan $\frac{jumlah\ pemeliharaan\ sarana\ dan\ prasarana\ perhubungan}{jumlah\ sarana\ dan\ prasarana\ perhubungan} x100$								
		Presentase tersedianya sarana pengendali dan pengamanan lalu lintas $\frac{jumlah\ sarana\ perlengkapan\ jalan}{jumlah\ kebutuhan\ perlengkapan\ jalan} x100$								

Sasaran	Inidikator Sasaran	Formulasi	Sumber Data	Kondisi Awal	Target					
					2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Hasil nilai IKM PD	IKM Internal Dinas	Survey Dinas Perhubungan	79,20	79.99	80,79	81,60	82,42	83,24	83,24

3.3 Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2025

Sasaran, indikator sasaran dan program dalam Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sasaran, indikator sasaran dan program yang telah ditetapkan pada renstra, yang dipilih sesuai dengan sasaran untuk tahun yang bersangkutan. Dari uraian diatas, Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan menetapkan sasaran, indikator sasaran dan program sebagai berikut :

A. SASARAN

Rencana Kerja (Renja) merupakan materi penjabaran Rencana Strategis, yang berisi sasaran, program dan kegiatan selama satu tahun. Pada tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan menetapkan sasaran sebagai berikut : **"Meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana perhubungan yang berkeselamatan"**

B. INDIKATOR KINERJA SASARAN

Indikator kinerja sasaran yang dimaksud disini adalah indikator kinerja yang diukur dari masing-masing sasaran yang telah ditetapkan, dimana untuk indikator sasaran terdiri dari :

1. Prosentase Penurunan Jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang
2. Prosentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan
3. Prosentase tersedianya sarana dan prasarana perhubungan

C. PROGRAM

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dituangkan dalam 2 program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 menjelaskan mengenai rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator, target dan pagu indikatif untuk tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2025. Hal ini digunakan untuk mengetahui capaian program dan kegiatan Dinas Perhubungan dalam mendukung nilai dan tujuan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 yang berkaitan dengan Dinas Perhubungan yaitu Misi 1 **"Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup",** dengan tujuan **"Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Wilayah Perbatasan, Dan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Akseleratif Dan Adil"**

Berikut rencana kerja dan pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 :

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025												
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan												
Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan												
Kode					**Uraian**	**Tahun N**						**Tahun + 1**
						Sebelum			**Sesudah**			
						Belanja Operasi	**Belanja Modal**	**Jumlah (Rp)**	**Belanja Operasi**	**Belanja Modal**	**Jumlah (Rp)**	
Dinas Perhubungan												
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Rp. 6.648.652.556	Rp. 55.027.100	Rp. 6.703.679.656	Rp. 6.421.524.128	Rp. 138.084.000	Rp. 6.559.608.128	Rp. 12.120.000.000,00
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Rp. 6.648.652.556	Rp. 55.027.100	Rp. 6.703.679.656	Rp. 6.421.524.128	Rp. 138.084.000	Rp. 6.559.608.128	Rp. 12.120.000.000,00
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 4.781.460.056	Rp. 49.777.100	Rp. 4.831.237.156	Rp. 4.620.506.728	Rp. 50.113.900	Rp. 4.670.620.628	Rp. 7.215.000.000,00
2	15	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 66.000.000		Rp. 66.000.000	Rp. 76.692.000		Rp. 76.692.000	Rp. 85.000.000,00

2	15	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 50.000.000		Rp. 50.000.000	Rp. 55.172.000		Rp. 55.172.000	Rp. 45.000.000,00
2	15	01	2,01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 16.000.000		Rp. 16.000.000	Rp. 21.520.000		Rp. 21.520.000	Rp. 40.000.000,00
2	15	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 3.929.167.156		Rp. 3.929.167.156	Rp. 3.755.329.697		Rp. 3.755.329.697	Rp. 4.200.000.000,00
2	15	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 3.919.167.156		Rp. 3.919.167.156	Rp. 3.740.109.697		Rp. 3.740.109.697	Rp. 4.150.000.000,00
2	15	01	2,02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp. 10.000.000		Rp. 10.000.000	Rp. 15.220.000		Rp. 15.220.000	Rp. 50.000.000,00
2	15	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 86.184.000		Rp. 86.184.000	Rp. 86.184.000		Rp. 86.184.000	Rp. 60.000.000,00
2	15	01	2,05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 86.184.000		Rp. 86.184.000	Rp. 86.184.000		Rp. 86.184.000	Rp. 60.000.000,00
2	15	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 295.913.900	Rp. 49.777.100	Rp. 345.691.000	Rp. 269.825.731	Rp. 50.113.900	Rp. 319.939.631	Rp. 450.000.000,00
2	15	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 5.000.000		Rp. 5.000.000	Rp. 6.513.200		Rp. 6.513.200	Rp. 25.000.000,00
2	15	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 76.930.200	Rp. 49.777.100	Rp. 126.707.300	Rp. 106.735.001	Rp. 50.113.900	Rp. 156.848.901	Rp. 140.000.000,00
2	15	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 110.323.700		Rp. 110.323.700	Rp. 110.129.000		Rp. 110.129.000	Rp. 170.000.000,00

2	15	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 103.660.000		Rp. 103.660.000	Rp. 46.448.530		Rp. 46.448.530	Rp. 115.000.000,00
2	15	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 15.000		Rp. 15.000	Rp. 15.000		Rp. 15.000	Rp. 1.700.000.000,00
2	15	01	2,07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 15.000		Rp. 15.000	Rp. 15.000		Rp. 15.000	Rp. 1.700.000.000,00
2	15	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 357.165.000		Rp. 357.165.000	Rp. 344.498.600		Rp. 344.498.600	Rp. 505.000.000,00
2	15	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 138.317.000		Rp. 138.317.000	Rp. 138.317.000		Rp. 138.317.000	Rp. 165.000.000,00
2	15	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 218.848.000		Rp. 218.848.000	Rp. 206.181.600		Rp. 206.181.600	Rp. 340.000.000,00
2	15	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 47.015.000		Rp. 47.015.000	Rp. 87.961.700		Rp. 87.961.700	Rp. 215.000.000,00
2	15	01	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 47.000.000		Rp. 47.000.000	Rp. 87.946.700		Rp. 87.946.700	Rp. 125.000.000,00
2	15	01	2,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 15.000		Rp. 15.000	Rp. 15.000		Rp. 15.000	Rp. 90.000.000,00

2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp. 1.867.192.500	Rp. 5.250.000	Rp. 1.872.442.500	Rp. 1.801.017.400	Rp. 87.970.100	Rp. 1.888.987.500	Rp. 4.905.000.000,00
2	15	02	2,01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rp. 15.000		Rp. 15.000	Rp. 15.000		Rp. 15.000	Rp. 190.000.000,00
2	15	02	2,01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rp. 15.000		Rp. 15.000	Rp. 15.000		Rp. 15.000	Rp. 190.000.000,00
2	15	02	2,02		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 206.400.000		Rp. 206.400.000	Rp. 185.730.000	Rp. 60.000.000	Rp. 245.730.000	Rp. 1.920.000.000,00
2	15	02	2,02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 120.000		Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 60.000.000	Rp. 60.120.000	Rp. 1.150.000.000,00
2	15	02	2,02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rp. 206.280.000		Rp. 206.280.000	Rp. 185.610.000		Rp. 185.610.000	Rp. 770.000.000,00
2	15	02	2,03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rp. 212.550.000	Rp. 5.250.000	Rp. 217.800.000	Rp. 187.899.100	Rp. 11.040.900	Rp. 198.940.000	Rp. 800.000.000,00
2	15	02	2,03	0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Rp. 13.520.000		Rp. 13.520.000	Rp. 120.000		Rp. 120.000	Rp. 180.000.000,00
2	15	02	2,03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Rp. 199.030.000	Rp. 5.250.000	Rp. 204.280.000	Rp. 187.779.100	Rp. 11.040.900	Rp. 198.820.000	Rp. 620.000.000,00
2	15	02	2,04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Rp. 878.497.500		Rp. 878.497.500	Rp. 811.412.500		Rp. 811.412.500	Rp. 380.000.000,00

2	15	02	2,04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 878.497.500		Rp. 878.497.500	Rp. 811.412.500		Rp. 811.412.500	Rp. 380.000.000,00
2	15	02	2,05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp. 206.400.000		Rp. 206.400.000	Rp. 232.400.000		Rp. 232.400.000	Rp. 690.000.000,00
2	15	02	2,05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp. 31.500.000		Rp. 31.500.000	Rp. 69.500.000		Rp. 69.500.000	Rp. 270.000.000,00
2	15	02	2,05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp. 174.900.000		Rp. 174.900.000	Rp. 162.900.000		Rp. 162.900.000	Rp. 420.000.000,00
2	15	02	2,06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 250.115.000		Rp. 250.115.000	Rp. 233.100.800	Rp. 16.929.200	Rp. 250.030.000	Rp. 505.000.000,00
2	15	02	2,06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Rp. 250.100.000		Rp. 250.100.000	Rp. 233.085.800	Rp. 16.929.200	Rp. 250.015.000	Rp. 450.000.000,00
2	15	02	2,06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 15.000		Rp. 15.000	Rp. 15.000		Rp. 15.000	Rp. 55.000.000,00
2	15	02	2,07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 15.000		Rp. 15.000	Rp. 15.000		Rp. 15.000	Rp. 60.000.000,00
2	15	02	2,07	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Rp. 15.000		Rp. 15.000	Rp. 15.000		Rp. 15.000	Rp. 60.000.000,00

2	15	02	2,08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Rp. 107.200.000		Rp. 107.200.000	Rp. 147.445.000		Rp. 147.445.000	Rp. 300.000.000,00
2	15	02	2,08	0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Rp. 107.200.000		Rp. 107.200.000	Rp. 147.445.000		Rp. 147.445.000	Rp. 300.000.000,00
2	15	02	2,12		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.000.000		Rp. 6.000.000	Rp. 3.000.000		Rp. 3.000.000	Rp. 60.000.000,00
2	15	02	2,12	00 01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 6.000.000		Rp. 6.000.000	Rp. 3.000.000		Rp. 3.000.000	Rp. 60.000.000,00
					Jumlah	**Rp. 6.648.652.556**	**Rp. 55.027.100**	**Rp. 6.703.679.656**	**Rp. 6.421.524.128**	**Rp. 138.084.000**	**Rp. 6.559.608.128**	**Rp. 12.120.000.000,00**

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan tahun 2021 – 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati Pacitan serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2025.

Rencana Kerja Dinas perhubungan kabupaten Pacitan tahun 2025 sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Dinas perhubungan kabupaten Pacitan Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkanakan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan

Pacitan, 22 Juli 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PACITAN

Dr. DJOKO PUTRO UTOMO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19691012 198809 1 001

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap alhamdulillah dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmad-Nya, dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan Tahun 2025 disusun sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Rancangan Akhir Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Diharapkan dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai rencana program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025, sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan di wilayah Kabupaten Pacitan.

Pacitan, 23 Juli 2025

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PACITAN

DODIK SOEMARSONO, AP. M.Sc
Pembina Utama Muda
NIP. 197610151996021002

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas, dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
3. Pergeseran pagu kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
4. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam perubahan RKPD

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan tahun 2025 adalah dokumen peencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan perubahan yang merupakan hasil evaluasi pada pencapaian pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan. Dokumen ini diperlukan untuk mengakselerasi capaian sasaran pembangunan

Urusan Komunikasi dan Informatika,Statistik serta Persandian selama tahun 2025 dalam bentuk penentuan target kinerja, kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
20. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 ;
28. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 203 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
29. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
30. SE Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2025;
31. SE Bupati Pacitan Nomor: 188/076/408.53/2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2025 Kabupaten Pacitan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkannya Rencana Kerja (Renja) Perubahan adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 adalah :

a. Sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah serta program kegiatan yang belum terakomodir pada APBD Tahun Anggaran 2025.
b. Sinkronisasi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam OPD.
c. Mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat prioritas/mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran.
d. Tercapainya target pembangunan dengan mengunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan Tahun 2025, meliputi:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat/menjelaskan latar belakang, maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini memuat evaluasi Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Pacitan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

BAB III. TUJUAN dan SASARAN PD

Bab ini memuat tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Pacitan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat rencana kerja beserta pendanaan program,kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Inormatika Kabupaten Pacitan.

BAB V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah sampai Triwulan II Tahun 2025

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan melaksanakan 3 (tiga) yaitu urusan pemerintah daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Dalam tugas pokok dan fungsi sesuai urusan tersebut telah ditetapkan indikator untuk mengukur keberhasilan capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan .

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan 2025, selain itu juga memperhatikan dokumen Renstra sebagai bahan acuan. Dan pada bulan Maret 2025 terjadi efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025. Yang menginstruksikan kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk : 1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial,kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar/FGD, 2.Mengurangi belanja perjalanan dinas 50 %, 3.Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Perpres menngenai Standar Harga Satuan Regional. 4.Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur. 5.Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan public serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelunnya. 6.Lebih selektif dalam memberikan hadiah langsung baik dalam bentuk uang barang maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga. 7.Melalukan penyesuaian belanja APBD TA.2025 yang bersumber dari transfer ke daerah .Pada tabel 2.1.1 dapat dilihat pagu anggaran yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebelum dan sesudah adanya efisiensi anggaran Tahun 2025

Tabel.2.1.1. PAGU ANGGARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TAHUN 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Induk	Pagu Efisiensi	bertambah/berkurang	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	216.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.375.636.429,00**	**4.199.009.174,00**	**176.627.255,00**	
	216.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**74.981.700,00**	**72.951.700,00**	**2.030.000,00**	
	216.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.244.600,00	65.244.600,00		
	216.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.737.100,00	7.707.100,00	2.030.000,00	Pengurangan anggaran pada belanja perjalanan dinas
	216.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.934.251.065,00**	**2.930.650.910,00**	**3.600.155,00**	
	216.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.880.834.865,00	2.880.834.865,00		
	216.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.725.000,00	4.124.845,00	3.600.155,00	Pengurangan anggaran pada belanja mamin
	216.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	45.691.200,00	45.691.200,00		
	216.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**231.778.000,00**	**188.778.000,00**	**43.000.000,00**	
	216.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	20.178.000,00	20.178.000,00		

	216.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	211.600.000,00	168.600.000,00	43.000.000,00	Pengurangan anggaran pada belanja jasa penyelenggaraan acara dan mamin
	216.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**336.934.224,00**	**235.012.724,00**	**101.921.500,00**	
	216.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.143.400,00	15.143.400,00		
	216.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.209.624,00	52.209.624,00		
	216.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.064.000,00	34.064.000,00		
	216.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.032.200,00	12.380.700,00	21.651.500,00	Pengurangan anggaran pada belanja cetak dan ATK
	216.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	201.485.000,00	121.215.000,00	80.270.000,00	Pengurangan anggaran pada belanja perjalanan dinas
	216.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**34.890.600,00**	**8.815.000,00**	**26.075.600,00**	
	216.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	4.816.000,00	4.816.000,00		
	216.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.074.600,00	3.999.000,00	26.075.600,00	Pengurangan anggaran pada belanja modal
	216.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**635.879.840,00**	**635.879.840,00**		
	216.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	115.799.240,00	115.799.240,00		
	216.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	520.080.600,00	520.080.600,00		

	216.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**126.921.000,00**	**126.921.000,00**		
	216.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	57.292.000,00	57.292.000,00		
	216.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.420.000,00	14.420.000,00		
	216.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.209.000,00	55.209.000,00		
2	**216.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**1.487.200.000,00**	**1.460.706.560,00**	**26.493.440,00**	
	216.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**1.487.200.000,00**	**1.460.706.560,00**	**26.493.440,00**	
	216.02.2.01.0014	Relasi Media	231.795.000,00	221.595.000,00	10.200.000,00	Pengurangan anggaran pada belanja jasa iklan
	216.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	32.995.000,00	27.091.560,00	5.903.440,00	Pengurangan anggaran pada belanja cetak dan ATK
	216.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	30.000.000,00	21.000.000,00	9.000.000,00	Pengurangan anggaran pada belanja mamin
	216.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi	509.190.000,00	507.800.000,00	1.390.000,00	Pengurangan anggaran pada belanja perjalanan dinas
	216.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	400.000.000,00	400.000.000,00		
	216.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	283.220.000,00	283.220.000,00		

3	216.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**1.699.495.000,00**	**1.675.788.840,00**	**23.706.160,00**	
	216.03.2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**63.500.000,00**	**63.500.000,00**		
	216.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	63.500.000,00	63.500.000,00		
	216.03.2.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**1.635.995.000,00**	**1.612.288.840,00**	**23.706.160,00**	
	216.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	230.825.000,00	230.825.000,00		
	216.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	1.034.952.000,00	1.034.455.840,00	496.160,00	Pengurangan anggaran pada belanja ATK
	216.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	370.218.000,00	347.008.000,00	23.210.000,00	Pengurangan anggaran pada belanja mamin dan perjalanan dinas
4	**220.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**240.000.000,00**	**217.179.990,00**	**22.820.010,00**	
	220.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**240.000.000,00**	**217.179.990,00**	**22.820.010,00**	
	220.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	140.000.000,00	128.101.500,00	11.898.500,00	Pengurangan anggaran pada belanja perjalanan dinas,mamin dan ATK

	220.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	100.000.000,00	89.078.490,00	10.921.510,00	Pengurangan anggaran pada belanja perjalanan dinas, mamin dan cetak
5	221.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	16.240.000,00	8.360.000,00	7.880.000,00	
	221.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16.240.000,00	8.360.000,00	7.880.000,00	
	221.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16.240.000,00	8.360.000,00	7.880.000,00	Pengurangan anggaran pada belanja perjalanan
	TOTAL		7.818.571.429,00	7.561.044.564,00	257.526.865,00	

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 sampai dengan triwulan II ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.1.2. dibawah ini :

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD

KABUPATEN PACITAN

Triwulan Tahun 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2025 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		-10		-11		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
1	216.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai	77,66	0	0,00	0	77,28	4.199.009.174,00	0	828.724.503,00	0	828.307.002,00	0	134.898.885,00	0	0	0	1.789.930.390,00	0	42,63	0	1.789.930.390,00	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	216.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah	Dokumen	23.00	0	0.00	0	23	72.951.700,00	3	7.115.504,00	3	5.741.640,00	0	0	0	0	6	13.857.144,00	26,09	18,99	6	13.857.144,00	26.09	0	
	216.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0.00	0	0.00	0	15.00	65.244.600,00	5	4.235.504,00	1	4.978.000,00	0	0	0	0	6	9.213.504,00	40	14,12	6	9.213.504,00	0	0	
	216.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	0.00	0	0.00	0	8	7.707.100,00	2	2.880.000,00	3	1.763.640,00	0	0	0	0	5	4.643.640,00	62,5	60,25	5	4.643.640,00	0	0	
																			Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		51,25	37,19					F
																			Predikat kinerja(%)		Rendah	Sangat Rendah		2	2		
	216.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	59.00	0	0.00	0	69	2.930.650.910,00	10	559.762.169,00	14	628.869.499,00	0	134.898.885,00	0	0	24	1.323.530.553,00	40,68	45,16	24	1.323.530.553,00	40.68	0	
	216.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	ASN	0.00	0	0.00	0	20.00	2.880.834.865,00	0	545.558.918,00	0	618.419.499,00	0	134.898.885,00	0	0	0	1.298.875.302,00	0	45,09	0	1.298.875.302,00	0	0	
	216.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	0.00	0	0.00	0	2	4.124.845,00	0	2.375.251,00	0	1.600.000,00	0	0	0	0	0	3.975.251,00	0	96,37	0	3.975.251,00	0	0	
	216.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	0.00	0	0.00	0	30	45.091.200,00	0	11.830.000,00	0	8.850.000,00	0	0	0	0	0	20.680.000,00	0	45,26	0	20.680.000,00	0	0	
																			Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		0	62,24					F
																			Predikat kinerja(%)		Sangat Rendah	Rendah		3	3		

	216.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase Pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian**	**%**	**100.00**	**0**	**0.00**	**0**	**100**	**188.778.000,00**	**24**	**2.460.000,00**	**24**	**3.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48**	**5.460.000,00**	**48**	**2,89**	**48**	**5.460.000,00**	**48**	**0**	
	216.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	0.00	0	0.00	0	1.00	20.178.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	216.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0.00	0	0.00	0	20.00	168.600.000,00	0	2.460.000,00	5	3.000.000,00	0	0	0	0	5	5.460.000,00	25	3,24	5	5.460.000,00	0	0	
	Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				12,5	1,62					F
	Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah		2	2		
	216.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase Operasional Dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**%**	**100.00**	**0**	**0.00**	**0**	**100**	**235.012.724,00**	**24**	**38.387.680,00**	**24**	**29.011.115,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48**	**67.398.795,00**	**48**	**28,68**	**48**	**67.398.795,00**	**48**	**0**	
	216.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	0.00	0	0.00	0	1	15.143.400,00	1	9.340.650,00	0	0	0	0	0	0	1	9.340.650,00	100	61,68	1	9.340.650,00	0	0	
	216.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0.00	0	0.00	0	7	52.209.624,00	2	20.722.330,00	0	4.191.115,00	0	0	0	0	2	24.913.445,00	28,57	47,72	2	24.913.445,00	0	0	
	216.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	0.00	0	0.00	0	4.00	34.064.000,00	1	4.850.700,00	1	6.094.000,00	0	0	0	0	2	10.944.700,00	50	32,13	2	10.944.700,00	0	0	
	216.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	0.00	0	0.00	0	5.00	12.380.700,00	0	0	2	4.440.000,00	0	0	0	0	2	4.440.000,00	40	35,86	2	4.440.000,00	0	0	
	216.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0.00	0	0.00	0	12.00	121.215.000,00	1	3.474.000,00	1	14.286.000,00	0	0	0	0	2	17.760.000,00	16,67	14,65	2	17.760.000,00	0	0	
	Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				47,05	38,41					F
	Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah		5	5		

	216.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**%**	**100.00**	**0**	**0.00**	**0**	**100**	**8.815.000,00**	**24**	**0**	**24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48**	**0**	**48**	**0**	**48**	**0**	**48**	**0**	
	216.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0.00	0	0.00	0	10.00	4.816.000,00	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	10	0	1	0	0	0	
	216.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0.00	0	0.00	0	3.00	3.999.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	5	0					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah		2	2		
	216.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah yang dibutuhkan**	**%**	**100.00**	**0**	**0.00**	**0**	**100**	**635.873.840,00**	**24**	**157.919.641,00**	**24**	**148.929.648,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48**	**306.649.289,00**	**48**	**48,26**	**48**	**306.649.289,00**	**48**	**0**	
	216.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0.00	0	0.00	0	12	115.799.240,00	2	29.059.477,00	2	26.431.448,00	0	0	0	0	4	55.490.925,00	33,33	47,92	4	55.490.925,00	0	0	
	216.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0.00	0	0.00	0	12	520.080.600,00	2	128.860.164,00	2	122.498.200,00	0	0	0	0	4	251.358.364,00	33,33	48,33	4	251.358.364,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	33,33	48,13					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah		2	2		

	216.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	%	80.00	0	0.00	0	80	126.921.000,00	6	61.079.569,00	0	11.755.100,00	0	0	0	0	6	72.834.609,00	7,5	57,39	6	72.834.609,00	7,5	0	
	216.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0.00	0	0.00	0	17.00	57.292.000,00	1	21.199.900,00	1	5.195.000,00	0	0	0	0	2	26.394.900,00	11,76	46,07	2	26.394.900,00	0	0	
	216.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0.00	0	0.00	0	22.00	14.420.000,00	1	0	5	6.560.100,00	0	0	0	0	6	6.560.100,00	27,27	45,49	6	6.560.100,00	0	0	
	216.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0.00	0	0.00	0	3.00	55.209.000,00	2	39.879.609,00	0	0	0	0	0	0	2	39.879.609,00	66,67	72,23	2	39.879.609,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	35,23	54,6					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Rendah		3	3		
																				Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	38,04	28,77					
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
2	216.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	85	0	0.00	0	80.00	1.460.706.560,00	35	387.067.800,00	80	326.561.520,00	0	0	0	0	115	713.629.320,00	143,75	48,86	115	713.629.320,00	135,29	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	216.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP	%	0.00	0	0.00	0	86.00	1.460.706.560,00	34	387.067.800,00	85	326.561.520,00	0	0	0	0	123	713.629.320,00	143,02	48,86	123	713.629.320,00	0	0	
			Prosentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	%	0.00	0	0.00	0	100.00		25		90		0		0		115		115		115	0	0	0	
			Prosentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kab/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah	%	0.00	0	0.00	0	74.00		80		90		0		0		170		229,73		170	0	0	0	

	216.02.2.01.0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegatan relasi media	laporan	0.00	0	0.00	0	1.00	221.595.000,00	0	71.604.000,00	2	43.605.000,00	0	0	0	0	2	115.669.000,00	200	52,2	2	115.669.000,00	0	0	
	216.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	0.00	0	0.00	0	25.00	27.091.560,00	0	15.122.000,00	0	9.945.600,00	0	0	0	0	0	25.068.500,00	0	92,53	0	25.068.500,00	0	0	
	216.02.2.01.0019	Monitoring informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	0.00	0	0.00	0	50.00	21.000.000,00	3	20.973.700,00	7	0	0	0	0	0	10	20.973.700,00	20	99,87	10	20.973.700,00	0	0	
	216.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	%	0.00	0	0.00	0	30.00	507.800.000,00	5	1.480.000,00	5	99.522.600,00	0	0	0	0	10	100.982.600,00	33,33	19,89	10	100.982.600,00	0	0	
	216.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	0.00	0	0.00	0	36.00	400.000.000,00	0	142.657.200,00	101	61.828.320,00	0	0	0	0	101	204.485.520,00	280,56	51,12	101	204.485.520,00	0	0	
	216.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Konten	0.00	0	0.00	0	100.00	283.220.000,00	47	135.050.000,00	60	111.400.000,00	0	0	0	0	107	246.450.000,00	107	87,02	107	246.450.000,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	100,82	67,11					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sedang		6	6		
3	216.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	70	0	0.00	0	65.00	1.675.768.840,00	16,3	377.005.560,00	16	420.318.990,00	0	0	0	0	32,5	797.324.550,00	50,03	47,58	32,5	797.324.550,00	48,48	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	216.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau mengunakan akses internet yang diamankan, yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	0.00	0	0.00	0	63,87	63.500.000,00	20,7	34.996.640,00	21	0	0	0	0	0	41,4	34.996.640,00	49,36	55,11	41,4	34.996.640,00	0	0	
	216.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Dokumen	0.00	0	0.00	0	2.00	63.500.000,00	0	34.996.640,00	0	0	0	0	0	0	0	34.996.640,00	0	55,11	0	34.996.640,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	55,11					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Rendah		1	1		

	216.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase layanan SPBE (layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	%	0.00	0	0.00	0	31.25	1.612.288.840,00	7,8	342.008.920,00	7,8	420.318.990,00	0	0	0	0	15,6	762.327.910,00	49,92	47,28	15,6	762.327.910,00	0	0	
	216.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Laporan	0.00	0	0.00	0	2.00	230.825.000,00	0	0	0	42.837.750,00	0	0	0	0	0	42.837.750,00	0	18,66	0	42.837.750,00	0	0	
	216.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perangkat Daerah	0.00	0	0.00	0	18.00	1.034.455.840,00	0	333.722.920,00	0	219.180.040,00	0	0	0	0	0	552.902.960,00	0	53,45	0	552.902.960,00	0	0	
	216.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	0.00	0	0.00	0	18.00	347.006.000,00	0	8.298.000,00	0	155.301.200,00	0	0	0	0	0	166.587.200,00	0	48,01	0	166.587.200,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	40,01					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah		3	3		
																				Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	49,64	51,2					
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Rendah					
4	220.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	0	0.00	0	100	217.179.990,00	20	150.899.500,00	30	38.886.050,00	0	0	0	0	50	189.785.550,00	50	87,39	50	189.785.550,00	50	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	220.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kompilasi Statistik Sektoral yang terdigitalisasi	OPD	0.00	0	0.00	0	23.00	217.179.990,00	6	150.899.500,00	2	38.886.050,00	0	0	0	0	8	189.785.550,00	34,78	87,39	8	189.785.550,00	0	0	
	220.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen	0.00	0	0.00	0	1.00	128.101.500,00	0	110.722.500,00	0	5.080.000,00	0	0	0	0	0	115.802.500,00	0	90,4	0	115.802.500,00	0	0	
	220.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah memenuhi rekomendasi dan Pembina Data Statistik	Dokumen	0.00	0	0.00	0	6.00	89.078.490,00	0	40.177.000,00	0	33.806.050,00	0	0	0	0	0	73.983.050,00	0	83,05	0	73.983.050,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	86,73					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Tinggi		2	2		
																				Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	34,78	87,39					
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Tinggi					

5	221.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah		81	0	0.00	0	65.00	8.360.000,00	16,3	0	16	0	0	0	0	0	32,5	0	50,03	0	32,5	0	40.16	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	221.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip-prinsip menegement keamanan informasi (SMKI) dan atau Aplikasi Persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada Pemerintah Daerah	%	0.00	0	0.00	0	33.33	8.360.000,00	8,1	0	8,1	0	0	0	0	0	16,2	0	48,6	0	16,2	0	0	0	
	221.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	0.00	0	0.00	0	3.00	8.360.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					0	0					F
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah		1	1		
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					48,6	0					
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah					
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)																					58,76	45,29					
Predikat kinerja(%)																					Rendah	Sangat Rendah					
Total																					7.561.044.564,00			3.490.669.810,00			
Persentase Realisasi Anggaran																									46.17%		
Predikat																									Sangat Rendah		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1.Terwujudnya pelayanan data statistik secara elektronik.2. Ketersediaan infrastruktur TIK yang belum merata.

Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1. Belum optimalnya pengintegrasian sistem informasi dan data statistik sektoral PD.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : 1. Sosialisasi terhadap OPD terkait metadata,keamanan informasi

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : 1. Komitmen bersama antar pimpinan OPD terkait statistik sektoral2. Menjalin komunikasi yang intensif dengan provider3. Komitmen pimpinan OPD terkait integrasi sistem elektronik dan pentingnya keamanan informasi

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

   Pada program penunjang dengan indikator nilai Sakip perangkat daerah sampai dengan triwulan II masih dalam proses penilaian dari inspektorat baru akan keluar nilai pada bulan Juli 2025 .Program penunjang ini terdapat 7 kegiatan dengan 19 sub kegiatan yang berkontribusi untuk pencapaian kinerja dengan pagu anggaran setelah efisiensi sebesar Rp 4.199.009.174,00. Sampai dengan triwulan II realisasi fisik keuangan sebesar Rp. 1.789.930.390,- (42,63%) dengan rincian sebagai berikut :

   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdapat 2 sub kegiatan dengan pagu efisiensi sebesar Rp. 72.951.700,- sampai dengan triwulan II realisasi fisik keuangan Rp. 13.857.144,- (18.99%) dengan jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja PD yang tersusun sebanyak 11 dokumen yaitu Renja, DPA Induk, RKA Induk, Laporan Monitoring Evaluasi triwulan 1 dan 2, Dok.PK, Laporan SPIP.
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdapat 3 sub kegiatan dengan pagu efisiensi sebesar Rp. 2.930.650.910,-, sampai dengan triwulan II realisasi fisik keuangan sebesar Rp. 1.323.530.553,-(45.16%) dengan jumlah dokumen laporan keuangan PD yang tersusun sebanyak 24 dokumen yaitu laporan bulanan keuangan, laporan triwulan keuangan dan laporan semesteran keuangan.
   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdapat 2 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 188.778.000,-, sampai dengan triwulan II realisasi fisik keuangan sebesar Rp. 5.460.000,- (2.89%) dengan indicator prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian sebesar 48 %. Dari 2 sub kegiatan ini digunakan untuk pembelian pakaian dinas beserta atributnya serta untuk pelaksanaan peningkatan kapasitas pegawai Dinas Kominfo sebanyak 55 orang yang akan dilaksanakan pada triwulan 3.
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah terdapat 5 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 235.012.724,- sampai dengan triwulan II realisasi fisik keuangan sebesar Rp. 67.398.795,- (28,68%) dengan

prosentase operasional dasar PD yang terpenuhi sebesar 48%.Dari capaian tersebut digunakan untuk penyediaan komponen penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan logistic kantor dan biaya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi PD.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdapat 2 sub kegiatan dengan pagu induk sebesar Rp. 34.890.600,- efisiensi sebesar Rp.26.075.600,- sehingga pagu anggaran menjadi Rp. 8.815.000,- . Sampai dengan triwulan II belum ada realisasi, yang memang direncanakan terealisasi pada bulan Juli 2025.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdapat 2 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.670.323.950,- sampai dengan triwulan II realisasi fisik keuangan sebesar Rp. 306.849.289,- (48.26%) dengan prosentase penyediaan jasa penunjang operasional PD yang dibutuhkan sebesar 48%, yang digunakan untuk pembayaran Listrik,telpon serta pembayaran honor tenaga teknis.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdapat 3 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 126.921.000,- sampai dengan triwulan II realisasi fisik keuangan sebesar Rp. 72.834.609,- (57.39%) dengan prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik sebesar 56%. Pada sub kegiatan pemeliharaan ini digunakan untuk pembayaran pajak pada kendaraan dinas, dan untuk pemeliharaan gedung kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Pacitan

2. Program Informasi Dan Komunikasi Publik, dengan 1 kegiatan dan 6 sub kegiatan yang berkontribusi untuk pencapaian kinerja dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.460.706.560,- .Sampai dengan triwulan II realisasi fisik keuangan sebesar Rp. 713.629.320,- (48.86%). Indikator kinerja pada program ini adalah persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota dari target 80 % terealisasi 115 %. Dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan 6 sub kegiatan. Capaian kinerja untuk indikator kegiatan ini terdapat 3 indikator yaitu 1. Prosentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) terealisasi sebesar 95 %. 2. Prosentase komunitas masyarkat /mitra strategis pemerintah daerah kab/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah tercapai 36%. 3. Presentse desiminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM dan SOP) sebesar 59%. Anggaran untuk kegiatan ini digunakan untuk pembayaran honorarium wartawan, Kerjasama dengan awak media, penyebaran informasi ,

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, ada 2 kegiatan dengan 4 sub kegiatan yang berkontribusi untuk pencapaian kinerja dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.675.788.840,- . Sampai dengan triwulan II realisasi fisik keuangan sebesar Rp. 797.324.550,- (47,58%) dan realisasi kinerja sebesar 46,15%. Dengan kegiatan sebagai berikut:
   a. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan 1 sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 63.500.000,- sampai dengan triwulan II realisasi fisik keuangan sebesar Rp. 34.996.640,- (55,11%) dengan prosentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau mengunakan akses internet yang diamankan, yang disediakan oleh Dinas Kominfo sebesar 45,15 %.
   b. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan 3 sub kegiatan dan pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 1.612.288.840,- sampai dengan triwulan II realisasi fisik keuangan sebesar Rp. 762.327.910,-(47,28%) dengan indikator prosentase Layanan SPBE (Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintah) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik sebesar 15,6 %.

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dengan 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan yang berkontribusi untuk pencapaian kinerja dengan pagu anggaran program sebesar Rp. 217.179.990,- dengan indikator kinerja adalah persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Sampai dengan triwulan II realisasi fisik keuangan sebesar Rp. 189.785.550,- (87,39%), dan realisasi capaian kinerja 50 %.
   a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan 2 sub kegiatan. Dengan indikator kegiatan adalah jumlah kompilasi statistik sektoral yang terdigitalisasi terealisasi 8 OPD.
5. Program Penyelenggaran Persandian untuk Pengamanan Informasi, dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Pagu anggaran program sebesar Rp. 8.360.000,-, sampai dengan triwulan II belum ada realisasi keuangan maupun realisasi kinerja. Hal ini disebabkan karena penyesuaian jadwal kegiatan dari Badan Siber dan Sandi Negara yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober di BSSN Sawangan.

Dari uraian diatas bahwa capaian anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 3.490.669.810,- (46,17%) dengan predikat sangat rendah. Untuk itu perlu dilakukan langkah – langkah agar target yang telah ditetapkan dari masing – masing program dapat tercapai, yaitu :

- Mengadakan evaluasi internal untuk mengetahui permasalahan dan melihat program dan kegiatan mana saja yang capaiannya belum sesuai dengan yang diharapkan, sehingga diperlukan perhatian khusus guna menjamin keberhasilan realisasi program kegiatan tersebut;
- Melakukan koordinasi dengan para stakeholder, terkait dengan program kegiatan yang perlu terlaksana untuk memastikan program kegiatan tersebut nantinya dapat terealisasi dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya;
- Melakukan kerjasama,koordinasi serta pendampingan dengan perangkat daerah dalam penyelenggaraan statistic sectoral;
- Melakukan perencanaan ulang bagi program kegiatan yang belum terlaksana (baik yang dijadwalkan pada triwulan I dan II, mau pun yang akan dilaksanakan

pada triwulan III dan IV), khususnya terkait dengan penganggaran pada anggaran perubahan tahun ini.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

3.1.1 Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan pada Tahun 2025 adalah ***"Meningkatkan Layanan Publik Yang Inovatif"*** dengan indikator tujuan adalah : *Indeks SPBE*

3.1.2 Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Adapun sasaran yang ingin diwujudkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan adalah " ***Meningkatnya Layanan Publik berbasis elektronik*** " dengan indikator sasaran adalah : Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara on line dan terintegrasi dan ***" Terwujudnya kinerja pelayanan Dinas Kominfo yang optimal "*** dengan indikator sasaran adalah Hasil nilai IKM Dinas Kominfo.

Tabel 3.1.1
Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan

Tujuan	Indikator Tujuan	Formulasi	Target Kinerja Pada Tahun Ke-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Layanan Publik Yang Inovatif	Indeks SPBE	Indeks SPBE Domain Kebijakan SPBE - Kebijakan tata kelola SPBE - Kebijakan layanan SPBE Domain Tata Kelola SPBE - Kelembagaan - Strategi & Perencanaan - Teknologi Informasi & komunikasi Domain Layanan SPBE - Layanan Administrasi Pemerintah berbasis elektronik	1.8	1.85	1,9	1,95	3,7	2,5

		- Layanan publik berbasis elektronik						

Tabel 3.1.2
Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan

Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Formulasi	Target Kinerja Pada Tahun Ke-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Layanan Publik berbasis elektronik	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara on line dan terintegrasi		51,61 %	58,06 %	64,52 %	87,50 %	100 %	100 %
Terwujudnya kinerja pelayanan Dinas Kominfo yang optimal	Hasil nilai IKM Dinas Kominfo	Hasil nilai IKM Dinas Kominfo atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat	85,43	85,83	86,23	86,63	90	90

3.1.3 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.1.3
Indikator Kinerja Utama
Dinas Komunikasi dan Informatika

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Layanan Publik berbasis elektronik	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara on line dan terintegrasi	100 %	Bidang Teknologi Informatika dan Persandian
2.	Terwujudnya kinerja pelayanan Dinas Kominfo yang optimal	Hasil nilai IKM Dinas Kominfo	90%	Sekretariat

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Rencana kerja (Renja) Perubahan Perangkat daerah dilakukan karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi perkembangan yang tidak sesuai untuk mengakomodir dinamika perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Uraian Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disajikan pada bab ini adalah bersifat menyeluruh, yang didanai oleh APBD perubahan Kabupaten Pacitan tahun 2025. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan tahun 2025 direncanakan antara lain untuk penyesuaian gaji ASN,pengembangan Aplikasi SIAPP, pelatihan Aplikasi SIAPP, pengurangan pada honor jasa teknis, penambahan pada sumber dana DBHCHT untuk Sub Keg. Pengelolaan Media Komunikasi Publik, pembelian Wall Panel Minimalis untuk ruang pertemuan. Secara rincian perubahan target kinerja dan pengangaran dalam Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Pacitan dapat dilihat pada Tabel 4.1. sebagai berikut:

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. PACITAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KEL SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							7.039.971.429,00	7.818.571.429,00	7.677.276.322,00	637.304.893,00							400.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.039.971.429,00	7.818.571.429,00	7.677.276.322,00	637.304.893,00							400.000.000,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							6.794.971.429,00	7.562.331.429,00	7.451.336.332,00	656.764.903,00							400.000.000,00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah				-	77,26 Nilai	4.425.036.429,00	4.375.636.429,00	4.018.966.493,00	-4.425.036.429,00							0,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah				-	23 Dokumen	34.931.700,00	74.901.700,00	70.787.700,00	43.856.000,00			-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				15 Dokumen	15 Dokumen	25.244.600,00	65.244.600,00	70.600.600,00	44.856.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	8 Laporan	9.737.100,00	9.737.100,00	8.707.100,00	-1.030.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah				-	59 Dok	3.023.661.629,00	2.934.251.065,00	2.629.335.219,00	-394.326.410,00			-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	29 Orang/bulan	2.967.245.429,00	2.808.934.865,00	2.575.792.184,00	-391.453.245,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	7.725.000,00	7.725.000,00	7.851.835,00	126.835,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				36 Laporan	36 Laporan	48.691.200,00	45.691.200,00	45.691.200,00	-3.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.10.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian				-	100 %	215.347.500,00	231.778.900,00	229.878.900,00	14.530.620,00			-	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.10.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				2 Paket	1 Paket	22.297.500,00	28.178.400,00	26.178.400,00	-3.880.900,00	Kab. Paciran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.10.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai																			
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai				44 Dokumen	20 Dokumen	192.950.100,00	217.500.000,00	209.500.000,00	16.550.000,00	Kab. Paciran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Operasional Dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi				-	100 %	328.223.024,00	338.834.224,00	181.878.224,00	-147.345.800,00			-	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.10.01.2.06.0010	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.152.894,00	15.143.400,00	15.143.400,00	990.506,00	Kab. Paciran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.10.01.2.06.0012	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	7 Paket	57.965.320,00	52.299.624,00	55.926.224,00	3.153.904,00	Kab. Paciran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.10.01.2.06.0014	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	4 Paket	34.483.840,00	34.864.300,00	38.954.800,00	-5.729.640,00	Kab. Paciran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.10.01.2.06.0015	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	5 Paket	24.011.550,00	34.432.300,00	10.314.700,00	-14.340.450,00	Kab. Paciran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.10.01.2.06.0019	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	203.410.000,00	201.435.300,00	68.400.300,00	-135.009.700,00	Kab. Paciran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1.0.01.2.97	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase [illegible] yang [illegible]				-	100 %	34.720.[illegible]	34.290.[illegible]	19.[illegible]	-10.[illegible]			-	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.1.0.01.2.97.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Layanan																			
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Layanan yang Dioperasikan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.1.0.01.2.97.0005	Pengadaan Mebel																			
		Jumlah Paket Mebel yang Dioperasikan				2 Unit	10 Unit	5.545.760,00	4.819.000,00	4.396.800,00	-523.760,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.1.0.01.2.97.0004	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dioperasikan				2 Unit	3 Unit	33.382.510,00	30.074.400,00	13.923.100,00	-19.459.[illegible]	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.1.0.01.2.98	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah yang dilayani				-	100 %	637.279.340,00	635.371.340,00	636.371.340,00	1.200.000,00			-	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.1.0.01.2.98.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dilayani				12 Laporan	12 Laporan	115.799.240,00	115.799.240,00	115.799.240,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.1.0.01.2.98.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dilayani				12 Laporan	12 Laporan	521.[illegible]	521.[illegible]	522.[illegible]	1.200.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.1.0.01.2.99	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik				-	100 %	146.013.100,00	129.921.040,00	242.269.310,00	96.255.120,00			-	-	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.1.0.01.2.99.0002	Pemeliharaan Jasa Perkantoran, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Layanan																			
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Layanan yang Dipelihara dan dilengkapi Pajak dan Perizinannya				24 Unit	17 Unit	66.723.[illegible]	57.202.[illegible]	54.299.900,00	-14.[illegible]	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.1.0.01.2.99.0004	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	22 Unit	16.[illegible]	14.[illegible]	14.[illegible]	-1.[illegible]	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.1.0.01.2.99.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	61.[illegible]	55.[illegible]	173.[illegible]	112.[illegible]	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

7.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Permenkominfo yang menjadi sumber penyusunan informasi publik, mengatasi hambatan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota				-	80 %	982.200.000,00	1.497.200.000,00	1.554.997.899,00	-562.200.000,00							400.000.000,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pemetaan dimensi dan layanan informasi publik yang terintegrasi secara dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP Pemetaan kemampuan sumber daya manusia pemerintah daerah dan cara yang menyusun informasi dan kebijakan pemerintah Pemetaan sumber informasi berbasis program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota secara dengan strategi komunikasi (STRAKOM)				-	100 % 74 % 98 %	982.200.000,00	1.497.200.000,00	1.554.997.899,00	-554.700.899,00			Mempertimbangkan pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, produksi ekonomi, kesetaraan gender, serta pengaruh pola pemerintahan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Internet of Things (IOT) Dalam Sepda Bidang Pembangunan Pengembangan Internet of Things (IOT) Dalam Sepda Bidang Pembangunan	-		400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media																		
			Jumlah artikel atau berita berita yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dengan pers, dan 2. terdaftar di Dewan Kemedia, dan 3. ada di dalam kanal atau media				1 Laporan	1 Laporan	294.850.000,00	211.785.000,00	223.385.000,00	17.395.000,00	Kab. Pacitan, Bernas Kecamatan, Bernas Kab/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Mempertimbangkan pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, produksi ekonomi, kesetaraan gender, serta pengaruh pola pemerintahan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Internet of Things (IOT) Dalam Sepda Bidang Pembangunan Pengembangan Internet of Things (IOT) Dalam Sepda Bidang Pembangunan			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah permintaan informasi Publik yang dan telah sesuai prosedur pendaftaran				25 Permohonan	25 Permohonan	50.200.000,00	32.995.000,00	43.201.500,00	29.001.500,00	Kab. Pacitan, Bernas Kecamatan, Bernas Kab/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Mempertimbangkan pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, produksi ekonomi, kesetaraan gender, serta pengaruh pola pemerintahan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

	2.10.02.2.01.0018	Pembinaan Informasi Kabupaten, Optimal, dan Aspirasi Publik																		
			[illegible]				50 Rekomendasi	50 Rekomendasi	30.000.000,00	30.000.000,00	21.000.000,00	-9.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatnya pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, serta pengarusutamaan pemuda, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.10.02.2.01.0020	Fasilitasi Informasi																		
			[illegible]				30 Pemantauan	30 Pemantauan	540.000.000,00	500.000.000,00	107.000.000,00	-433.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatnya pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, serta pengarusutamaan pemuda, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.10.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			[illegible]				2 Media	2 Media	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatnya pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, serta pengarusutamaan pemuda, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.10.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik					-	36 Media	0,00	400.000.000,00	400.270.433,00	400.270.433,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	- -			400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.10.02.2.01.0023	Penyediaan Kantor																		
			[illegible]				104 Kantor	109 Kantor	139.200.000,00	283.220.000,00	623.220.000,00	484.120.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatnya pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, serta pengarusutamaan pemuda, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.	2.10.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Terwujudnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses Internet yang disediakan oleh Dinas Kom Info				-	66 %	1.407.216.000,00	1.878.498.000,00	1.878.798.840,00	-4.407.796.000,00							0,00	
	2.10.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Diadopsi oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau mempunyai akses Internet yang dimanfaatkan yang disediakan oleh Dinas Kominfo				-	83,17 %	62.715.000,00	63.500.000,00	63.500.000,00	715.000,00			Mempercepat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengakuan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.10.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	62.715.000,00	63.500.000,00	63.500.000,00	715.000,00	Kab. Pasiran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	Mempercepat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengakuan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.10.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase layanan SPBE (layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan) yang terintegrasi dalam dokumen rencana kerja yang telah dimplementasikan secara elektronik				-	31,25 %	1.345.020.100,00	1.815.995.100,00	1.812.298.840,00	457.298.840,00			Mempercepat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengakuan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

	2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda																		
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda				2 Laporan	2 Laporan	280.501.000,00	256.825.000,00	498.775.000,00	341.275.000,00	Kab. Paciran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kompetensi pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, pemasaran dan lain, kesetaraan gender, sadar pengaturan pesan penempatan, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota																		
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	1.921.610.000,00	1.434.552.000,00	1.964.505.000,00	42.275.000,00	Kab. Paciran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kompetensi pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, pemasaran dan lain, kesetaraan gender, sadar pengaturan pesan penempatan, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Internet of Things (IOT) Dalam Segala Bidang Pembangunan. Pengembangan Internet of Things (IOT) Dalam Segala Bidang Pembangunan.			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0029	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang menyediakan akses Internet yang disediakan oleh Dinas				10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	82.010.000,00	320.210.000,00	347.005.000,00	264.995.000,00	Kab. Paciran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Kompetensi pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, pemasaran dan lain, kesetaraan gender, sadar pengaturan pesan penempatan, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Internet of Things (IOT) Dalam Segala Bidang Pembangunan. Pengembangan Internet of Things (IOT) Dalam Segala Bidang Pembangunan			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							240.000.000,00	240.000.000,00	217.179.990,00	-22.820.010,00							0,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah				-	100 %	240.000.000,00	240.000.000,00	217.179.990,00	-240.000.000,00							0,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kompilasi Statistik Sektoral yang terdigitalisasi*				-	23 OPD	240.000.000,00	240.000.000,00	217.179.990,00	-22.820.010,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	- -	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia																		
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				1 Dokumen	1 Dokumen	140.000.000,00	140.000.000,00	128.101.500,00	-11.898.500,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar																		
			Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik				6 Dokumen	6 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	89.078.490,00	-10.921.510,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	- -			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							5.000.000,00	16.240.000,00	8.360.000,00	3.360.000,00							0,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah				-	65 %	5.000.000,00	16.240.000,00	8.360.000,00	-5.000.000,00							0,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau Aplikasi Persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada Pemerintah Daerah				-	33,33 %	5.000.000,00	16.240.000,00	8.360.000,00	3.360.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Internet of Things (IOT) Dalam Segala Bidang Pembangunan Pengembangan Internet of Things (IOT) Dalam Segala Bidang Pembangunan	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	5.000.000,00	16.240.000,00	8.360.000,00	3.360.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Internet of Things (IOT) Dalam Segala Bidang Pembangunan Pengembangan Internet of Things (IOT) Dalam Segala Bidang Pembangunan			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	JUMLAH								7.035.571.429,00	7.819.571.429,00	7.677.276.322,00	29.979.860.221,97							400.000.000,00	

BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan Tahun 2025 merupakan bagian dari upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Melalui Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan Tahun 2025 ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Pacitan.

Dalam implementasi dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan Tahun 2025, diperlukan konsistensi dan komitmen OPD dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga tercapai sinkronisasi dan sinergitas guna mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Pacitan terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 **"Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA "**.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna dan membutuhkan kritik, saran untuk dapat membantu penyempurnaannya di masa mendatang. Diharapkan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan Tahun 2025 ini dapat di laksanakan sebaik– baiknya dan pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik serta berguna untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pacitan, 23 Juli 2025

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PACITAN

DODIK SOEMARSONO, AP. M.Sc
Pembina Utama Muda
NIP. 197610151996021002

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PACITAN

RENJA PERUBAHAN

2025

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-NYA kepada kita sekalian, Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan telah dapat diselesaikan sebagai amanat setiap tahun pelaksanaan rencana kerja OPD. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini merupakan acuan utama bagi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan untuk melaksanakan program pembangunan di sektor Koperasi, Usaha Mikro dan Perindsutrian selama tahun 2025 dalam mendukung pembangunan Kabupaten Pacitan.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini memuat rencana program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan yang rencananya akan dilaksanakan Tahun 2025 penentuan target dan sasaran yang akan di capai pada tahun 2025 yang didasarkan pada sasaran dan indikator yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Periode 2021 – 2026. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan ini di susun sebagai pedoman, arah dan tujuan penyelenggaraan pembangunan di bidang koperasi, usaha mikro dan perindustrian.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini, kami harapkan dapat menjadi pedoman bagi para pelaksana di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan dalam melakukan tugasnya dan semoga Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 dapat berguna bagi kita semua terlebih bagi kesejahteraan seluruh masyarakat. Aamiin.

Pacitan, Juli 2025

KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PACITAN

PRAYITNO, ST. MT.
Pembina Tk. I
NIP. 19680610 199202 1 002

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan serta pelaksanaan Pembangunan dalam suatu Daerah dibutuhkan suatu perencanaan yang berupa Rencana Kinerja dan Rencana Kinerja Perubahan dengan kata lain perencanaan adalah suatu kegiatan mempunyai kedudukan atau peran yang paling penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat seperti yang tertuang dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP),Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencaan wilayah diatasnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP, RPJM dan RKPD. Oleh karena itu, SKPD sebagai stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan SKPD, kemudian di terjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD dan Rencana Kinerja Perubahan . Hal ini mengacu pada UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan

setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD,yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan melakukan penyusunan Kerja (RENJA) tahun 2025.

Rancangan Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2024 adalah:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4421); KEPRES RI Nomor : 27 Tahun 1980, tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
g. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 9;
h. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 201 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja (Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2025 disusun dengan maksud sebagai berikut :

a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2025.
b. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2025.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Renja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan pada tahun 2025 dengan tetap memperhatikan RKPD.

Renja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan tahun 2025 yang mengacu pada Renstra dan RKPD

2. SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2025, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN II TAHUN 2025

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024 dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Sesuai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan

RKPD Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun berjalan

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut

BAB II
EVALUASI RENJA TRIWULAN II TAHUN 2025

Pada bagian ini akan dibahas mengenai evaluasi pelaksanaan renja triwulan II tahun 2025 dan capaian atas Rencana Strategis tahun 2021-2026. Selain itu akan disajikan pula analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi serta Review terhadap rancangan awal Renja.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan 2025, selain itu juga memperhatikan dokumen Renstra sebagai bahan acuan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian kinerja.

Evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah dilakukan sebagai bentuk kontrol dan evaluasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat diketahui faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian kinerja yang telah direncanakan untuk tahun 2021-2026. Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustria Kabupaten Pacitan sampai dengan triwulan II Tahun 2025 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini :

TABEL 2.1. LAPORAN EVALUASI APBD KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
PERIODE : JUNI (TRIWULAN II)

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
-1				-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9
217	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**nilai**	**80.5**	**3.499.700.083,00**	**76.2**	**1.571.974.762,00**	**94.66%**	**44.92%**
217	**1**	**2**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**laporan**	**19**	**47.738.785,00**	**11**	**12.646.676,00**	**57.89%**	**26.49%**
217	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	laporan	19	47.738.785,00	11	12.646.676,00	57.89%	26.49%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											28,95	26,49
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
217	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan ladministrasi keuangan Perangkat Daerah**	**laporan**	**53**	**2.758.366.238,00**	**24**	**1.347.794.873,00**	**45.28%**	**48.86%**
217	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	21	2.719.615.238,00	21	1.327.524.077,00	100%	48.81%
			2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	53	38.751.000,00	24	20.270.796,00	45.28%	52.31%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											48,43	50,56
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Rendah
217	**1**	**2.1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian**	**%**	**100**	**106.000.000,00**	**100**	**11.900.000,00**	**100%**	**11.23%**
			11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	52	106.000.000,00	52	11.900.000,00	100%	11.23%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											50,00	11,23
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
217	**1**	**2.1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**%**	**100**	**218.766.500,00**	**48.34**	**80.008.058,00**	**48.34%**	**36.57%**

217	1	2.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	8	45.705.800,00	4	23.994.878,00	50%	52.50%
			5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	12.794.300,00	0	7.587.500,00	0%	59.30%
			9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	160.266.400,00	6	48.425.680,00	50%	30.22%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											33,33	47,34
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
217	**1**	**2.1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**%**	**100**	**33.987.100,00**	**30**	**0,00**	**30%**	**0%**
			6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	3	33.987.100,00	1	0,00	33.33%	0%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											11,11	0,00
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
217	**1**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan**	**%**	**100**	**230.428.660,00**	**48**	**95.606.120,00**	**48%**	**41.49%**
217	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	95.803.060,00	6	30.837.928,00	50%	32.19%
			4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	134.625.600,00	6	64.768.192,00	50%	48.11%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											50,00	40,15
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
217	**1**	**2.1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**%**	**80**	**104.412.800,00**	**45.14**	**24.019.035,00**	**56.43%**	**23%**
217	1	2.1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	10	4.500.000,00	0	0,00	0%	0%
			6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	14	77.829.200,00	8	22.409.035,00	57.14%	28.79%
			9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	paket	1	22.083.600,00	1	1.610.000,00	100%	7.29%

										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	52,38	12,03
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Rendah	Sangat Rendah
217	**2**			**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Persentase koperasi yang memiliki izin usaha**	**%**	**7.5**	**20.000.000,00**	**7.4**	**47.441.800,00**	**98.67%**	**237.21%**
217	**2**	**2**		**Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase izin usaha simpan pinjam koperasi yang diterbitkan**	**%**	**69.25**	**20.000.000,00**	**49.4**	**47.441.800,00**	**71.34%**	**237.21%**
217	2	2	1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi perizinan usaha simpan pinjam bagi koperasi	orang	70	20.000.000,00	70	47.441.800,00	100%	237.21%
					Jumlah Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang terbentuk	unit usaha	172		0		0%	
										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	50,00	237,21
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Rendah	Sangat Tinggi
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)	71,34	237,21
										Predikat kinerja Per Program(%)	Sedang	Sangat Tinggi
217	**3**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**persentase koperasi yang dikelola secara akuntabel**	**%**	**36**	**55.000.000,00**	**27**	**11.663.840,00**	**75%**	**21.21%**
217	**3**	**2**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase koperasi yg diperiksa dan diawasi**	**%**	**34.89**	**55.000.000,00**	**3.77**	**11.663.840,00**	**10.81%**	**21.21%**
217	3	2	4	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yng telah dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan (monev)	unit usahaa	40	55.000.000,00	20	11.663.840,00	50%	21.21%
										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	50,00	21,21
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)	10,81	21,21
										Predikat kinerja Per Program(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
217	**4**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase Koperasi Sehat**	**%**	**4.29**	**35.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0%**	**0%**

217	**4**	**2**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya**	**%**	**4.29**	**35.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0%**	**0%**
217	4	2	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	koperasi	25	35.000.000,00	0	0,00	0%	0%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											0,00	0,00
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											0,00	0,00
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
217	**5**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase koperasi dengan SDM terlatih**	**%**	**21.44**	**75.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0%**	**0%**
217	**5**	**2**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pengelola dan anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian**	**%**	**0.15**	**75.000.000,00**	**0**	**0,00**	**0%**	**0%**
217	5	2	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	orang	45	75.000.000,00	0	0,00	0%	0%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											0,00	0,00
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											0,00	0,00
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
217	**6**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase peningkatan modal koperasi**	**%**	**6**	**103.500.000,00**	**0**	**26.943.590,00**	**0%**	**26.03%**
217	**6**	**2**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase KUMKM yang mengakses fasilitasi pembiayaan**	**%**	**0.45**	**103.500.000,00**	**0.18**	**26.943.590,00**	**40%**	**26.03%**
217	6	2	5	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah unit usaha yang meningkat Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (penagihan piutang macet dana bergulir)	unit usaha	100	103.500.000,00	56	26.943.590,00	56%	26.03%
					Jumlah Laporan Hibah Dekopinda	Laporan	1		0		0%	

										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	28,00	26,03
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)	40,00	26,03
										Predikat kinerja Per Program(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
217	**7**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase usaha mikro yang meningkat legalitas perijinan dan kapasitas aset**	**%**	**2.48**	**509.368.800,00**	**0.15**	**160.507.415,00**	**6.05%**	**31.51%**
					Persentase usaha mikro dengan kerjasama kemitraan	**%**	**0.24**		**0.12**		**50%**	
217	**7**	**2**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Persentase Usaha Mikro yang dibina**	**%**	**2.82**	**509.368.800,00**	**0.77**	**160.507.415,00**	**27.30%**	**31.51%**
217	7	2	2	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Business Matching)	unit usaha	120	60.000.000,00	40	3.368.000,00	33.33%	5.61%
			4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	unit usaha	400	298.825.600,00	245	114.792.634,00	61.25%	38.41%
			15	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui PendidikanÂ danÂ Pelatihan	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan usaha mikro dan Kewirausahaan	orang	143	150.543.200,00	143	42.346.781,00	100%	28.13%
										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	48,65	24,05
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)	27,30	31,51
										Predikat kinerja Per Program(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
217	**8**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase Peningkatan UMKM Naik Kelas dalam pengelolaannya**	**%**	**5**	**100.000.000,00**	**0**	**68.579.000,00**	**0%**	**68.58%**
217	**8**	**2**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Persentase UM yg diberi dukungan fasilitasi pemasaran**	**%**	**0.5**	**100.000.000,00**	**0.23**	**68.579.000,00**	**46%**	**68.58%**
217	8	2	2	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi program pengembangan usaha mikro (pameran)	unit usaha	75	100.000.000,00	75	68.579.000,00	100%	68.58%

										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	100,00	68,58
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Tinggi	Sedang
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)	46,00	68,58
										Predikat kinerja Per Program(%)	Sangat Rendah	Sedang
331	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten**	**%**	**1.53**	**654.734.600,00**	**0.53**	**38.166.987,00**	**34.64%**	**5.83%**
331	**2**	**2**		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen dan Perda RPIK**	**dokumen**	**1**	**654.734.600,00**	**1**	**38.166.987,00**	**100%**	**5.83%**
					Jumlah sentra IKM	**IKM**	**5**		**5**		**100%**	
					Jumlah IKM yang dibina	**IKM**	**200**		**104**		**52%**	
331	2	2	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perbup RPIK	dokumen	1	11.000.000,00	0	1.180.000,00	0%	10.73%
			3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	jumlah kegiatan pengembangan produk IKM	kali	1	143.734.600,00	1	36.086.987,00	100%	25.11%
			5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pada Usaha Industri Hasil Tembakau Kecil dan Menengah	orang	500	500.000.000,00	0	900.000,00	0%	0.18%
										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	33,33	12,01
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)	84,00	5,83
										Predikat kinerja Per Program(%)	Tinggi	Sangat Rendah
331	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas**	**perusahaan**	**20**	**50.000.000,00**	**2**	**3.303.000,00**	**10%**	**6.61%**
331	**4**	**2**		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini**	**%**	**60**	**50.000.000,00**	**57**	**3.303.000,00**	**95%**	**6.61%**
331	4	2	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui	Jumlah peserta pembinaan IKM	orang	20	50.000.000,00	13	3.303.000,00	65%	6.61%

				Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)								
					Jumlah peserta sosialisasi SIINas	orang	25		0		0%	
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											32,50	6,61
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											95,00	6,61
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Tinggi	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja seluruh program(%)											33,55	43,04
Predikat kinerja seluruh program(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Total								**5.102.303.483,00**		**1.928.580.394,00**		
Persentase Realisasi Anggaran										**37.80%**		
Predikat										**Sangat Rendah**		

Tabel 2.2. Tingkat Capaian Kinerja Pelayanan Tahun 2024 s/d Triwulan II

No	Tujuan	Indikator	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kualitas Usaha di Bidang Koperasi, Usaha Mikro	Persentase Koperasi Yang Berkualitas	35.67	30.84
2		Persentase usaha mikro yang berkualitas	4.4	2.89
3	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Sektor unggulan	PDRB Industri Pengolahan	876.29	0
No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Nilai Asset Koperasi	Persentase peningkatan nilai aset koperasi	14	7.81
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :Tata kelola yang baik				
Faktor penghambat pencapaian kinerja :Tidak semua anggotanya memiliki kesadaran yang penuh dan sama dalam menjalankan prinsip-prinsip dan kegiatan berkoperasi dengan baik				
Tindak lanjut yang diperlukan :Meningkatkan pengelolaan manajemen koperasi dengan baik (mempertahankan tata kelola yang baik, membenahi kondisi internal, membuat promosi)				
2	Meningkatnya Kapasitas Usaha Mikro	Persentase usaha mikro yang mandiri	7.77	0
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :- Kemampuan, kemauan, tekad yang kuat dan kerja keras. - Kesempatan dan peluang				
Faktor penghambat pencapaian kinerja :Rendahnya daya saing usaha mikro baik dalam segi kualitas SDM maupun kualitas produk				
Tindak lanjut yang diperlukan :Mengembangkan strategi bisnis usaha mikro				
3	Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Hasil Nilai IKM PD	90	87.04
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :Tersedianya regulasi dan SOP yang jelas				
Faktor penghambat pencapaian kinerja :Kurangnya pemahaman dan kesediaan masyarakat melalui tahapan proses pelayanan sesuai dengan SOP				
Tindak lanjut yang diperlukan :Meningkatkan evaluasi dan sosialisasi pelayanan yang telah terencanakan				
4	Meningkatnya kinerja sektor Industri	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	7.77	7.77
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :Banyaknya jumlah pelaku industri				
Faktor penghambat pencapaian kinerja :â€¢ Masih rendahnya daya saing dan kualitas produk â€¢ Belum optimalnya struktur industri (hulu-hilir) â€¢ Belum optimalnya sistem informasi dan teknologi industri				
Tindak lanjut yang diperlukan :â€¢ Peningkatan daya saing industri melalui penguatan struktur industri (huluantara-hilir) â€¢ optimalisasi peneparan teknologi industri, standarisasi industri, dan peningkatan kualitas â€¢ penguatan sistem informasi dan teknologi industri				

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 berpedoman pada renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan perubahan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi Usaha Mikro dan perindustrian Kabupaten Pacitan. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam Rencana Kerja Tahun 2024.

Rumusan perubahan rencana kerja dan pendanaan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1. berikut ini:

Tabel 3.1. Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Tahun 2025

Uraian	Tahun N						Tahun + 1
	Sebelum			Sesudah			
	Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah (Rp)	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Rp. 4.352.616.383	Rp. 44.952.500	Rp. 4.397.568.883	Rp. 4.426.264.489	Rp. 44.952.500	Rp. 4.471.216.989	Rp. 7.290.412.583,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Rp. 4.352.616.383	Rp. 44.952.500	Rp. 4.397.568.883	Rp. 4.426.264.489	Rp. 44.952.500	Rp. 4.471.216.989	Rp. 7.290.412.583,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 3.465.712.983	Rp. 33.987.100	Rp. 3.499.700.083	Rp. 3.312.545.389	Rp. 33.987.100	Rp. 3.346.532.489	Rp. 4.200.528.500,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 47.738.785		Rp. 47.738.785	Rp. 51.726.165		Rp. 51.726.165	Rp. 150.000.000,00

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 47.738.785		Rp. 47.738.785	Rp. 51.726.165		Rp. 51.726.165	Rp. 75.000.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.758.366.238		Rp. 2.758.366.238	Rp. 2.697.034.701		Rp. 2.697.034.701	Rp. 2.775.000.000,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 2.719.615.238		Rp. 2.719.615.238	Rp. 2.655.331.701		Rp. 2.655.331.701	Rp. 2.650.000.000,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 38.751.000		Rp. 38.751.000	Rp. 41.703.000		Rp. 41.703.000	Rp. 50.000.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 106.000.000		Rp. 106.000.000	Rp. 77.200.000		Rp. 77.200.000	Rp. 139.528.500,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 106.000.000		Rp. 106.000.000	Rp. 77.200.000		Rp. 77.200.000	Rp. 90.000.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 218.766.500		Rp. 218.766.500	Rp. 158.538.243		Rp. 158.538.243	Rp. 325.000.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 45.705.800		Rp. 45.705.800	Rp. 44.091.443		Rp. 44.091.443	Rp. 115.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 12.794.300		Rp. 12.794.300	Rp. 12.126.300		Rp. 12.126.300	Rp. 30.000.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 160.266.400		Rp. 160.266.400	Rp. 102.320.500		Rp. 102.320.500	Rp. 180.000.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Rp. 33.987.100	Rp. 33.987.100		Rp. 33.987.100	Rp. 33.987.100	Rp. 350.000.000,00

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp. 33.987.100	Rp. 33.987.100		Rp. 33.987.100	Rp. 33.987.100	Rp. 150.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 230.428.660		Rp. 230.428.660	Rp. 204.516.680		Rp. 204.516.680	Rp. 270.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 95.803.060		Rp. 95.803.060	Rp. 74.091.080		Rp. 74.091.080	Rp. 120.000.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 134.625.600		Rp. 134.625.600	Rp. 130.425.600		Rp. 130.425.600	Rp. 150.000.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 104.412.800		Rp. 104.412.800	Rp. 123.529.600		Rp. 123.529.600	Rp. 185.000.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 4.500.000		Rp. 4.500.000	Rp. 3.500.000		Rp. 3.500.000	Rp. 5.000.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 77.829.200		Rp. 77.829.200	Rp. 66.828.200		Rp. 66.828.200	Rp. 30.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 22.083.600		Rp. 22.083.600	Rp. 53.201.400		Rp. 53.201.400	Rp. 150.000.000,00
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Rp. 20.000.000		Rp. 20.000.000	Rp. 417.526.100		Rp. 417.526.100	Rp. 65.045.990,00

Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 20.000.000		Rp. 20.000.000	Rp. 417.526.100		Rp. 417.526.100	Rp. 65.045.990,00
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 20.000.000		Rp. 20.000.000	Rp. 417.526.100		Rp. 417.526.100	Rp. 65.045.990,00
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Rp. 55.000.000		Rp. 55.000.000	Rp. 31.201.000		Rp. 31.201.000	Rp. 292.706.956,00
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 55.000.000		Rp. 55.000.000	Rp. 31.201.000		Rp. 31.201.000	Rp. 292.706.956,00

Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 55.000.000		Rp. 55.000.000	Rp. 31.201.000		Rp. 31.201.000	Rp. 292.706.956,00
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Rp. 35.000.000		Rp. 35.000.000	Rp. 13.353.700		Rp. 13.353.700	Rp. 227.660.966,00
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 35.000.000		Rp. 35.000.000	Rp. 13.353.700		Rp. 13.353.700	Rp. 227.660.966,00
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 35.000.000		Rp. 35.000.000	Rp. 13.353.700		Rp. 13.353.700	Rp. 227.660.966,00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Rp. 64.034.600	Rp. 10.965.400	Rp. 75.000.000	Rp. 61.769.600	Rp. 10.965.400	Rp. 72.735.000	Rp. 279.332.200,00
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 64.034.600	Rp. 10.965.400	Rp. 75.000.000	Rp. 61.769.600	Rp. 10.965.400	Rp. 72.735.000	Rp. 279.332.200,00
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Rp. 64.034.600	Rp. 10.965.400	Rp. 75.000.000	Rp. 61.769.600	Rp. 10.965.400	Rp. 72.735.000	Rp. 279.332.200,00

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Rp. 103.500.000		Rp. 103.500.000	Rp. 80.056.000	Rp. 0	Rp. 80.056.000	Rp. 225.137.971,00
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 103.500.000		Rp. 103.500.000	Rp. 80.056.000	Rp. 0	Rp. 80.056.000	Rp. 225.137.971,00
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Rp. 103.500.000		Rp. 103.500.000	Rp. 80.056.000	Rp. 0	Rp. 80.056.000	Rp. 195.137.971,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp. 509.368.800		Rp. 509.368.800	Rp. 435.884.100		Rp. 435.884.100	Rp. 1.500.000.000,00
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Rp. 509.368.800		Rp. 509.368.800	Rp. 435.884.100		Rp. 435.884.100	Rp. 1.500.000.000,00
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Rp. 60.000.000		Rp. 60.000.000	Rp. 41.000.000		Rp. 41.000.000	Rp. 250.000.000,00

Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Rp. 298.825.600		Rp. 298.825.600	Rp. 272.409.600		Rp. 272.409.600	Rp. 250.000.000,00
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 150.543.200		Rp. 150.543.200	Rp. 122.474.500		Rp. 122.474.500	Rp. 750.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rp. 100.000.000		Rp. 100.000.000	Rp. 73.928.600		Rp. 73.928.600	Rp. 500.000.000,00
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Rp. 100.000.000		Rp. 100.000.000	Rp. 73.928.600		Rp. 73.928.600	Rp. 500.000.000,00
Pengembangan Usaha Mikro	Rp. 100.000.000		Rp. 100.000.000	Rp. 73.928.600		Rp. 73.928.600	Rp. 500.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Rp. 704.734.600		Rp. 704.734.600	Rp. 675.958.700	Rp. 15.000.000	Rp. 690.958.700	Rp. 790.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Rp. 704.734.600		Rp. 704.734.600	Rp. 675.958.700	Rp. 15.000.000	Rp. 690.958.700	Rp. 790.000.000,00
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp. 654.734.600		Rp. 654.734.600	Rp. 637.270.400	Rp. 15.000.000	Rp. 652.270.400	Rp. 760.000.000,00
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Rp. 654.734.600		Rp. 654.734.600	Rp. 637.270.400	Rp. 15.000.000	Rp. 652.270.400	Rp. 760.000.000,00

Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Rp. 11.000.000		Rp. 11.000.000	Rp. 4.508.000		Rp. 4.508.000	Rp. 100.000.000,00
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Rp. 143.734.600		Rp. 143.734.600	Rp. 132.762.400	Rp. 15.000.000	Rp. 147.762.400	Rp. 160.000.000,00
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Rp. 500.000.000		Rp. 500.000.000	Rp. 500.000.000		Rp. 500.000.000	Rp. 500.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Rp. 50.000.000		Rp. 50.000.000	Rp. 38.688.300		Rp. 38.688.300	Rp. 30.000.000,00
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 50.000.000		Rp. 50.000.000	Rp. 38.688.300		Rp. 38.688.300	Rp. 30.000.000,00
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Rp. 50.000.000		Rp. 50.000.000	Rp. 38.688.300		Rp. 38.688.300	Rp. 30.000.000,00
	Rp. 5.057.350.983	**Rp. 44.952.500**	**Rp. 5.102.303.483**	**Rp. 5.102.223.189**	**Rp. 59.952.500**	**Rp. 5.162.175.689**	**Rp. 8.080.412.583**

BAB V
PENUTUP

Perubahan Renja Tahun 2024 memuat dan menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan disertai dengan gambaran tentang perubahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II, pergeseran kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman untuk penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus evaluasi jalannya penyelenggaraan perangkat daerah. Keberhasilan pelaksanaan kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian sangat bergantung pada strategi berbagai peran antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam upaya pencapaian tujuan “Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA ”.

Pacitan, Juli 2025

KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRODAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PACITAN

PRAYITNO, ST. MT.
Pembina Tk. I
NIP. 19680610 199202 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
Jl. P.Gajah Mada No. 1 Pacitan, Jawa Timur 63511
web : dinaskoperasi.pacitankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PACITAN
Nomor : 900.1.1.2 / 183 / 408.53 / 2025
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PACITAN

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PACITAN

Menimbang :

a. Bahwa Rencana Kerja (Renja) Perubahan merupakan Dokumen Perencanaan selama periode 1 (satu) tahun;
b. bahwa Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan disusun sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan tentang Rencana Kerja (Renja PD) Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2026 bertujuan untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan program dan kegiatan selama periode 1 (satu) tahun.

KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2026 sebagaimana Diktum Pertama merupakan landasan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan

Perindustrian Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangat daerah yang telah ditetapkan.

KETIGA : Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Periode 1 (satu) Tahun yang akan menjadi Pedoman dalam Pelaksanaan Program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan.

KEEMPAT : Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 22 Juli 2025

KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PACITAN

PRAYITNO, ST. MT.
Pembina Tingkat I
NIP. 196806101992021002

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

TAHUN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PACITAN

Jln. Gatot Subroto No. 73 Pacitan, Telp. (0357) 884368 Fax (0357) 885734
Email : dispmptsp@pacitankab.go.id WA Center : 085233618131

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan Tahun 2025, telah dapat disusun sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Rencana Kerja ditetapkan rencana capaian kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 diharapkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan dapat terwujud.

Pacitan, Juli 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PACITAN

Ir. T. ANDI FALIANDRA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670909 199503 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum..... 2

1.3. Maksud Dan Tujuan 5

1.4. Sistematika 5

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 8

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra PD 8

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD 16

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi 0PD.....17

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 17

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 38

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 38

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD 38

3.3. Program dan Kegiatan.....39

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....44

4.1. Rencana Kerja Tahun 2025.....44

4.2. RKPD DPMPTSP Kabupaten Pacitan Tahun 2025 47

BAB V PENUTUP.....59

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan, diperlukan suatu dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan pembangunan, baik dalam jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan pembangunan memiliki posisi yang sangat strategis sebagai instrumen untuk menjamin tercapainya visi dan misi pembangunan daerah yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang dalam Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan secara terpadu terhadap seluruh fungsi pemerintahan di seluruh bidang pembangunan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perencanaan pembangunan tersebut harus mampu menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar tingkat pemerintahan, antar sektor pembangunan, antar wilayah, serta antar waktu perencanaan.

Perencanaan pembangunan nasional yang bersifat makro kemudian menjadi dasar dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan yang lebih operasional, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan di daerah juga dilaksanakan secara berjenjang, yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Seluruh dokumen perencanaan tersebut harus disusun secara selaras dan terpadu dengan dokumen perencanaan yang berada pada level pemerintahan di atasnya.

Dalam konteks pelaksanaan pembangunan daerah, peran aktif perangkat daerah sebagai pelaksana teknis sangat penting dalam menjamin kesesuaian antara perencanaan dan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah wajib menyusun dokumen perencanaan kinerja, baik jangka menengah maupun tahunan, guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD serta mengacu pada dokumen RKPD.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pacitan sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dalam urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan, menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 sebagai instrumen perencanaan tahunan. Penyusunan Renja tersebut bertujuan untuk menjabarkan arah kebijakan dan strategi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kabupaten Pacitan Tahun 2025–2029, yang selanjutnya menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun perencanaan.

Adapun penyusunan Rencana Kerja Perubahan DPMPTSP Kabupaten Pacitan Tahun 2025 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pembangunan, perubahan arah kebijakan, maupun hasil evaluasi capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya. Renja Perubahan ini tetap mengacu pada Renstra DPMPTSP Tahun 2025–2029, dan selaras dengan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025–2029, sehingga diharapkan dapat menjamin kesinambungan, akuntabilitas, serta efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah di sektor penanaman modal dan pelayanan perizinan.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

16. Peraturan Presiden Indonesian Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaandan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Inventarisasi Klasifikasi, Validasi dan Pemutakhiran Kodefikasi Nomenklatur dan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Pacitan;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2045;
28. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Pacitan;
29. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan Tahun 2025.

Adapun Tujuannya adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan pembangunan oleh berbagai pihak yang akan melakukan aktivitas di Kabupaten Pacitan, sehingga terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

1.4. Sistematika

Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan Tahun 2025, disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan Tahun 2025, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024 dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025. Selanjutnya dikaitkan dengan

pencapaian target RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan, berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan Tahun 2025.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD dan lampiran tabel telaahan terhadap rancangan awal RKPD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan tentang hasil penelaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi PD.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja PD

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu–isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor–faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja Sesuai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan

4.2. RKPD DPMPTSP Kabupaten Pacitan Tahun berjalan

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan–catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Pada Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan perumusan, penyusunan, pelaksanaan/pembinaan dan evaluasi kebijakan di bidang Penanaman Modal.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan setelah selesai tahun anggaran berjalan, hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan Tahun 2024 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu Kebijakan perencanaan program, kegiatan & sub kegiatan, Pelaksanaan rencana program dan kegiatan serta hasil rencana program dan kegiatan.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan Tahun 2025, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran–sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan–kebijakan dalam pelaksanaannya;

Disamping itu penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan Tahun 2025, juga memperhatikan hal–hal sebagai berikut:

a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2024 sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan tahun 2025;

b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah–masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan tahun 2024, sebagaimana tersebut tabel 2.1 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja PD dan pencapaian renstra PD sampai dengan Tahun 2024, terlampir.

Dari tabel 2.1 tersebut, terlihat bahwa program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 terealisasi 95.96 persen dari yang ditargetkan pada tahun 2024. Meskipun demikian terdapat beberapa hal yang harus dicermati, yaitu :

a) Efisiensi anggaran;
b) Perencanaan yang kurang optimal, sehingga penyerapan anggaran yang dialokasikan tidak sesuai waktu yang dijadwalkan (kejar tayang di belakang); dan
c) Terbatasnya alokasi anggaran yang diberikan, sehingga tidak semua program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
218	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil Nilai SAKIP PD**	**Nilai**	**79**	**3.980.044.518,00**	**74.75**	**3.803.731.087,00**	**94.62%**	**95.57%**
218	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**20**	**10.000.000,00**	**20**	**9.170.000,00**	**100%**	**91.7%**
218	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	750.000,00	7	750.000,00	100%	100%
			0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	750.000,00	1	750.000,00	100%	100%
			0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	750.000,00	1	750.000,00	100%	100%
			0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	600.000,00	1	600.000,00	100%	100%
			0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	500.000,00	1	500.000,00	100%	100%
			0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	750.000,00	1	750.000,00	100%	100%
			0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8	5.900.000,00	8	5.070.000,00	100%	85.93%
										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	100,00	97,99
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
218	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**69**	**2.644.375.168,00**	**69**	**2.527.970.869,00**	**100%**	**95.6%**
218	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	2.580.791.368,00	12	2.470.469.369,00	100%	95.73%
			0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	57.730.200,00	12	52.440.000,00	100%	90.84%

			0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	1.000.000,00	12	995.000,00	100%	99.5%
			0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	719.000,00	12	654.800,00	100%	91.07%
			0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1.066.000,00	1	980.000,00	100%	91.93%
			0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	1.198.500,00	1	698.800,00	100%	58.31%
			0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	666.000,00	18	590.000,00	100%	88.59%
			0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1.204.100,00	1	1.142.900,00	100%	94.92%
										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	100,00	88,86
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Tinggi	Tinggi
218	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian**	**%**	**100**	**117.055.735,00**	**100**	**114.941.000,00**	**100%**	**98.19%**
218	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	23.360.000,00	2	23.200.000,00	100%	99.32%
			0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	39	93.695.735,00	39	91.741.000,00	100%	97.91%
										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	100,00	98,62
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
218	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**%**	**100**	**271.197.550,00**	**100**	**267.939.086,00**	**100%**	**98.8%**
218	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	7.642.750,00	1	7.531.250,00	100%	98.54%
			0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	16.470.500,00	1	16.141.800,00	100%	98%
			0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	10.092.700,00	1	9.854.000,00	100%	97.63%
			0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	33.027.600,00	12	31.467.500,00	100%	95.28%
			0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	8.139.500,00	1	8.089.800,00	100%	99.39%
			0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Dokumen	2	20.000.000,00	2	19.950.000,00	100%	99.75%

				Perundang-undangan	Undangan yang Disediakan							
			0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	6.906.000,00	5	6.080.000,00	125%	88.04%
			0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10	168.918.500,00	11	168.824.736,00	110%	99.94%
										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	104,38	97,07
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
218	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**%**	**100**	**347.400.445,00**	**100**	**346.972.000,00**	**100%**	**99.88%**
218	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	347.400.445,00	1	346.972.000,00	100%	99.88%
										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	100,00	99,88
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
218	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan**	**%**	**100**	**401.717.120,00**	**100**	**356.861.088,00**	**100%**	**88.83%**
218	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	975.000,00	12	810.000,00	100%	83.08%
			0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	175.120.120,00	12	136.260.415,00	100%	77.81%
			0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	16.044.000,00	12	14.720.000,00	100%	91.75%
			0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	209.578.000,00		205.070.673,00	100%	97.85%
										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	100,00	87,62
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Tinggi	Tinggi
218	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**%**	**100**	**188.298.500,00**	**100**	**179.877.044,00**	**100%**	**95.53%**
218	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	14	6.900.000,00	21	6.016.800,00	150%	87.2%
			0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	14	161.792.000,00	15	154.270.244,00	107.14%	95.35%
			0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	13	15.000.000,00	20	15.000.000,00	153.85%	100%
			0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Unit	1	4.606.500,00	1	4.590.000,00	100%	99.64%

				Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											127,75	95,55
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
218	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Nilai Investasi**	**Milyar**	**96.96**	**5.000.000,00**	**1900.16**	**4.764.000,00**	**1959.74%**	**95.28%**
218	**02**	**2.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Jumlah Informasi Potensi dan Peluang Investasi**	**Dokumen**	**1**	**5.000.000,00**	**1**	**4.764.000,00**	**100%**	**95.28%**
218	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	1	5.000.000,00	1	4.764.000,00	100%	95.28%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	95,28
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											100,00	95,28
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
218	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Investor**	**Investor**	**1452**	**35.000.000,00**	**5786**	**34.647.500,00**	**398.48%**	**98.99%**
218	**03**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Promosi Penanaman Modal**	**Kali**	**2**	**35.000.000,00**	**2**	**34.647.500,00**	**100%**	**98.99%**
218	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	1	35.000.000,00	1	34.647.500,00	100%	98.99%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	98,99
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											100,00	98,99
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
218	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Izin yang diterbitkan**	**%**	**100**	**76.563.000,00**	**100**	**76.162.730,00**	**100%**	**99.48%**
218	**04**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal**	**Izin**	**1300**	**76.563.000,00**	**6117**	**76.162.730,00**	**470.54%**	**99.48%**
218	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	1800	33.705.000,00	5832	33.545.730,00	324%	99.53%

			0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	50	31.563.000,00	354	31.336.000,00	708%	99.28%
			0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha	800	11.295.000,00	844	11.281.000,00	105.5%	99.88%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											379,17	99,56
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											470,54	99,48
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
218	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi**	**%**	**1.50**	**835.942.000,00**	**78.65**	**813.817.800,00**	**5243.33%**	**97.35%**
218	**05**	**2.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Realisasi Penanaman Modal**	**Laporan**	**19**	**835.942.000,00**	**19**	**813.817.800,00**	**100%**	**97.35%**
218	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha.	14	119.391.000,00	17	113.554.300,00	121.43%	95.11%
			0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	625	672.966.000,00	1428	660.583.500,00	228.48%	98.16%
			0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	25	43.585.000,00	54	39.680.000,00	216%	91.04%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											188,64	94,77
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											100,00	97,35
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
218	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Fasilitas Penanaman Modal berkondisi Baik**	**%**	**100**	**9.962.000,00**	**100**	**9.921.700,00**	**100%**	**99.6%**
218	**06**	**2.01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat**	**Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi, kabupaten/kota**	**Laporan**	**14**	**9.962.000,00**	**14**	**9.921.700,00**	**100%**	**99.6%**

				Daerah Kabupaten/Kota								
218	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	1000	9.962.000,00	1237	9.921.700,00	123.7%	99.6%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											123,70	99,60
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											100,00	99,60
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja seluruh program(%)											1.316,03	97,71
Predikat kinerja seluruh program(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Total								**4.942.511.518,00**		**4.743.044.817,00**		
Persentase Realisasi Anggaran										**95.96%**		
Predikat										**Sangat Tinggi**		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana bidang Penanaman Modal. Dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang penanaman modal yang meliputi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.

Bahwa dalam menyusun Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah tetap mengakomodir pelaksanaan urusan bidang penanaman modal sebagaimana Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat, Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu Daerah kabupaten/kota yang melekat pada dinas Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal.
2) Besaran unit pelayanan terpadu satu pintu daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti besaran dari Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal.
3) Pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
4) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu dapat dibentuk tim teknis sesuai kebutuhan.
5) Dalam hal berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal memperoleh nilai kurang dari 401 (empat ratus satu), diwadahi dalam dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tipe C yang membawahi paling banyak 3 (tiga) bidang.
6) Pembinaan unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan 6 (enam) Program RPJMD yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diukur dengan indikator, yaitu:
   - Nilai SAKIP Perangkat Daerah
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal diukur dengan Indikator, yaitu:
   - Nilai Investasi
3. Program Promosi Penanaman Modal diukur dengan Indikator, yaitu:
   - Jumlah Investor
4. Program Pelayanan Penanaman Modal diukur dengan Indikator, yaitu:
   - Persentase Izin yang diterbitkan
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal diukur dengan Indikator, yaitu:
   - Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi
6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal diukur dengan Indikator, yaitu:
   - Persentase Fasilitas Penanaman Modal berkondisi Baik

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berdasarkan hasil telaah dokumen isu KLHS yang relevan dengan DPMPTSP dan isu lingkungan dinamis yang relevan dengan DPMPTSP baik global, nasional ataupun regional maka pada renstra DPMPTSP 2025 – 2030 ditetapkan 5 isu strategis DPMPTSP sebagai berikut :

1. Meningkatnya nilai Realisasi Investasi
2. Perlunya inovasi pengembangan dan promosi penanaman modal.
3. Peningkatan kapasitas SDM penyelenggara pelayanan perizinan berbasis IT.
4. Peningkatan Izin Usaha yang diterbitkan.
5. Meningkatkan Pengolahan data dan pengembangan sistem untuk mendukung investasi.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun yang memuat daftar program dan kegiatan Seluruh PD dengan prediksi pagu anggaran indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan RENJA PD serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal

tersebut untuk mengakomodir kebutuhan PD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD.

Dalam RKPD terdapat 6 (enam) nomenklatur program yang dicantumkan dalam Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3. Program Promosi Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Tabel 2.4.1
REVIU TERHADAP RANCANGAN RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN PACITAN

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu

NO	RANCANGAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	**Kab. Pacitan**			**3.698.857.042**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**Kab. Pacitan**			**3.698.857.042**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kab. Pacitan**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**82**	**3.279.687.292**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Pacitan**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**82**	**3.279.687.292**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	20 Dokumen	45.828.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	20 Dokumen	45.828.000	

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	41.620.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	41.620.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	758.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	758.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	600.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	600.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	600.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	600.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	750.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokume n	750.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	750.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	750.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	750.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	750.000	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	69 Dokumen	2.499.593.608	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	69 Dokumen	2.499.593.608	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pacitan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	2.443.126.438	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pacitan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	2.443.126.438	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	52.800.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	52.800.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	400.810	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	400.810	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	678.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	678.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	636.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Laporan	636.000	

			Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	776.160	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	776.160	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	849.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	849.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	327.200	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	327.200	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100%	84.715.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100%	84.715.000	

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	14.931.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	14.931.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pacitan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	36 Orang	69.784.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pacitan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	36 Orang	69.784.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	174.606.272	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	174.606.272	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.999.380	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.999.380	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.899.280	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.899.280	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	17.333.440	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	17.333.440	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	36.477.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	36.477.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.862.022	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.862.022	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	5.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	5.600.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	370.800	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	370.800	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	54.064.350	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	54.064.350	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pacitan	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	100%	21.793.800	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pacitan	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	100%	21.793.800	

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pacitan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	16.845.300	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pacitan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	16.845.300	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	4.948.500	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	4.948.500	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pacitan	Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	100%	381.892.712	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pacitan	Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	100%	381.892.712	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.039.360	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.039.360	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	138.300.752	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	138.300.752	

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	14.616.200	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	14.616.200	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	227.936.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	227.936.400	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pacitan	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	71.257.900	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pacitan	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	71.257.900	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pacitan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	8.250.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pacitan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	8.250.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pacitan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	40.434.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pacitan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	40.434.400	

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pacitan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	15.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pacitan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	15.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7.573.500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7.573.500	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kab. Pacitan	Nilai Investasi	98,41 M	46.270.690	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kab. Pacitan	Nilai Investasi	98,41 M	46.270.690	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	Jumlah Informasi Potensi dan Peluang Investasi	1 Dokumen	46.270.690	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	Jumlah Informasi Potensi dan Peluang Investasi	1 Dokumen	46.270.690	
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	46.270.690	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	46.270.690	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kab. Pacitan	Jumlah Investor	1.597 Investor	88.266.540	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kab. Pacitan	Jumlah Investor	1.597 Investor	88.266.540	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	Jumlah Promosi Penanaman Modal	2 Kali	88.266.540	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	Jumlah Promosi Penanaman Modal	2 Kali	88.266.540	

	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	88.266.540	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	88.266.540	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kab. Pacitan	Persentase Izin yang diterbitkan	100%	156.796.080	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kab. Pacitan	Persentase Izin yang diterbitkan	100%	156.796.080	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Pacitan	Jumlah Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	1350 Izin	156.796.080	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Pacitan	Jumlah Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	1350 Izin	156.796.080	
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Pacitan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1800 Pelaku Usaha	53.595.020	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Pacitan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1800 Pelaku Usaha	53.595.020	

	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Pacitan	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	50 Pelaku Usaha	30.187.780	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Pacitan	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	50 Pelaku Usaha	30.187.780	
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Pacitan	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	800 Kegiatan Usaha	73.013.280	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Pacitan	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	800 Kegiatan Usaha	73.013.280	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**Kab. Pacitan**	**%Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi**	**1,5%**	**79.769.280**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Kab. Pacitan**	**%Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi**	**1,5%**	**79.769.280**	

	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Pacitan**	**Jumlah Laporan Realisasi Penanaman Modal**	**19 Laporan**	**79.769.280**	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Pacitan**	**Jumlah Laporan Realisasi Penanaman Modal**	**19 Laporan**	**79.769.280**	
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Pacitan	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	14 Kegiatan Usaha	14.040.000	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Pacitan	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	14 Kegiatan Usaha	14.040.000	
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Pacitan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	385 Pelaku Usaha	62.449.280	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Pacitan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	385 Pelaku Usaha	62.449.280	

	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Pacitan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	25 Kegiatan Usaha	3.280.000	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Pacitan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	25 Kegiatan Usaha	3.280.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	**Kab. Pacitan**	**Persentase Fasilitas Penanaman Modal berkondisi Baik**	**100%**	**48.067.160**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Kab. Pacitan**	**Persentase Fasilitas Penanaman Modal berkondisi Baik**	**100%**	**48.067.160**	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Pacitan**	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kab./Kota**	**14 Laporan**	**48.067.160**	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Pacitan**	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kab./Kota**	**14 Laporan**	**48.067.160**	

	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Pacitan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1000 Dokumen	48.067.160	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Pacitan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1000 Dokume n	48.067.160	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Pacitan. Oleh karena itu, Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pacitan, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional maupun di tingkat Provinsi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3.2.1. Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Berkaitan dengan sasaran RPJMD tahun 2025-2029 Kabupaten Pacitan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu termasuk dalam misi Ketiga yang berbunyi **“Memajukan Pariwisata untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi”**. Misi ini menempatkan sektor penanaman modal, infrastruktur, pariwisata, investasi, dan sektor unggulan lainnya seperti pertanian, perikanan, UMKM, dan ekonomi kreatif sebagai penggerak utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata dan sektor unggulan daerah.

Berdasarkan keterkaitan antara sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra Perangkat Daerah dan memperhatikan Inmendagri No. 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025 - 2029, yaitu sasaran RPJMD menjadi tujuan pada Renstra PD dan Renstra PD cukup memiliki 1 (satu) tujuan. Maka, tujuan Rencana Strategis dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan Tahun 2025 – 2029 adalah :

“Meningkatkan Investasi Daerah”.

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus atau aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan PD. Sehingga dalam hal ini, sasaran menggambarkan keluaran *(output/outcome)* berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam jangka menengah 5 (lima) tahun melalui program dan kegiatan perangkat daerah. Sebagai pendukung pencapaian tujuan yaitu **"Meningkatkan Investasi Daerah",** maka sasaran yang ditetapkan adalah **"Meningkatnya Potensi Sektor Investasi"**.

Sasaran ini mencerminkan langkah awal dan mendasar dalam mengembangkan investasi, yaitu dengan melakukan identifikasi, pemetaan, dan penguatan sektor-sektor potensial yang dapat dijadikan objek investasi di Kabupaten Pacitan. Upaya ini akan menghasilkan basis data sektor unggulan, profil komoditas, dan lokus-lokus investasi yang siap dipromosikan secara nasional maupun internasional.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang di koordinasikan oleh OPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Program merupakan rencana tindak (action plan) yang terdiri dari kegiatan – kegiatan spesifik yang harus dilaksanakan untuk mencapai masing – masing sasaran.

Sesuai dengan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan:

A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

D. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7. Fasilitasi Kunjungan Tamu
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

E. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Kegiatan:

A. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Sub kegiatan :

1. Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

3. Program Promosi Penanaman Modal

Kegiatan:

A. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan :

1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan:

A. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Sub kegiatan :

1. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
2. Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Kegiatan:

A. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan :

1. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
2. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
3. Pengawasan Penanaman Modal

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Kegiatan:

A. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan :

1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang telah dirumuskan pada tersebut diatas, selanjutnya dalam mencapai mendukung Visi dan Misi Bapak Bupati Periode 2025-2029. Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka menengah 5 (lima) tahun sebagaimana inti dari Dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan, perlu dijabarkan dalam bentuk riil program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama Tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 .

Adapun uraian Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran, dan Pendanaan Indikatif disampaikan dalam penjelasan berikut :

4.1 RENCANA KERJA TAHUN 2025

Program merupakan kumpulan-kumpulan kegiatan yang nyata dan sistematis serta terpadu dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Program yang ditetapkan merupakan rencana yang lebih konkret yang mencakup berbagai jenis kegiatan yang mengarah kepada misi yang ditetapkan, sehingga program disusun ke dalam program prioritas dan program pendukung. Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dan dapat diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan meliputi 6 (Enam) Program yang terdiri dari beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana dalam tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1 RUMUSAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TUJUAN	*SASARAN*	*PROGRAM*	*KEGIATAN*	*SUB KEGIATAN*
Meningkatkan Investasi Daerah	Meningkatnya Potensi Sektor Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota Penyelenggaraan	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota
		Program Promosi Penanaman Modal	Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
				Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha

				Pengawasan Penanaman Modal
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
				Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
				Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD

				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
				Fasilitas Kunjungan Tamu
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasii dan Konsultasi SKPD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

				Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya

4.2 RKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan Tahun 2025

Adapun program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PACITAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20
						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				4.636.021.394,00	4.036.879.394,00	3.698.857.042,00				7.785.043.325,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.636.021.394,00	4.036.879.394,00	3.698.857.042,00				7.785.043.325,00	
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				4.636.021.394,00	4.036.879.394,00	3.698.857.042,00				7.785.043.325,00	
1	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	-	82 Nilai	3.366.786.394,00	3.435.944.794,00	3.279.687.292,00				4.802.077.325,00	
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	-	20 Dokumen	7.000.000,00	47.000.000,00	45.828.000,00				16.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	1.000.000,00	42.790.000,00	41.620.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	999.900,00	760.000,00	758.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	600.000,00	600.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	998.900,00	600.000,00	600.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	999.900,00	750.000,00	750.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	999.900,00	750.000,00	750.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan	1.001.400,00	750.000,00	750.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	-	59 Dokumen	2.633.795.394,00	2.590.483.944,00	2.590.483.944,00				2.955.999.325,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2.576.068.744,00	2.532.868.744,00	2.443.126.438,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		2.772.999.325,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	52.800.000,00	52.800.000,00	52.800.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	529.000,00	529.000,00	400.810,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	685.500,00	685.500,00	678.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4 Laporan	660.000,00	660.000,00	636.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan											
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	833.700,00	833.700,00	776.160,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	1.698.000,00	1.698.000,00	849.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20
	2	18	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran											
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	520.450,00	409.000,00	327.200,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	-	100 %	110.000.000,00	138.542.300,00	138.542.300,00				255.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	14.931.000,00	14.931.000,00	14.931.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok		35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai											
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	25 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	39 Orang	36 Orang	95.069.000,00	123.611.300,00	69.784.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	-	100 %	180.851.350,00	253.063.850,00	253.063.850,00				410.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20
						Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	24.999.380,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	42.000.000,00	35.697.400,00	29.899.280,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	17.333.900,00	17.333.440,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	1 Paket	17.032.900,00	52.110.000,00	36.477.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.354.950,00	7.330.350,00	5.862.022,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	7.000.000,00	5.600.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	1 Laporan	463.500,00	463.500,00	370.800,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00	108.128.700,00	54.064.350,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	81.237.650,00	21.793.800,00	21.793.800,00				550.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	8 Unit	76.707.000,00	16.845.300,00	16.845.300,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	4.530.650,00	4.948.500,00	4.948.500,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		350.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	294.403.600,00	318.592.000,00	318.592.000,00				394.578.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	1.039.400,00	1.039.400,00	1.039.360,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	138.300.752,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12.786.200,00	14.616.200,00	14.616.200,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	205.578.000,00	227.936.400,00	227.936.400,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		217.578.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	59.498.400,00	66.468.900,00	66.468.900,00				220.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	16 Unit	8.250.000,00	8.250.000,00	8.250.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok		40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	16 Unit	31.645.400,00	35.645.400,00	40.434.400,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok		90.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	5 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	4.603.000,00	7.573.500,00	7.573.500,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi	-	98,41 Milyar	50.000.000,00	50.000.000,00	46.270.690,00				350.000.000,00	
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Potensi dan Peluang Investasi	-	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00				350.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota											
							Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	46.270.690,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		350.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor	-	1.597 Investor	150.000.000,00	150.000.000,00	88.266.540,00				550.000.000,00	
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal	-	2 Kali	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00				550.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	88.266.540,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok		550.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Izin yang diterbitkan	-	100 %	223.293.000,00	223.293.000,00	156.796.080,00				600.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	-	1350 Izin	223.293.000,00	223.293.000,00	223.293.000,00				600.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik											
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1800 Pelaku Usaha	2500 Pelaku Usaha	50.000.000,00	50.000.000,00	53.595.020,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko											
							Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	50.000.000,00	50.000.000,00	30.187.780,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko											
							Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	800 Kegiatan Usaha	200 Kegiatan Usaha	123.293.000,00	123.293.000,00	73.013.280,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok		250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi	-	1,5 %	795.942.000,00	127.641.600,00	79.769.280,00				1.232.966.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Realisasi Penanaman Modal	-	19 Laporan	795.942.000,00	127.641.600,00	127.641.600,00				1.232.966.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya											
							Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	14 Kegiatan Usaha.	4 Kegiatan Usaha.	119.391.000,00	16.200.000,00	14.040.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha											
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	385 Pelaku Usaha	260 Pelaku Usaha	632.966.000,00	105.841.600,00	62.449.280,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		632.966.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal											
							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	28 Kegiatan Usaha	4 Kegiatan Usaha	43.585.000,00	5.600.000,00	3.280.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)		350.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20
6	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Fasilitas Penanaman Modal berkondisi Baik	-	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	48.067.160,00				250.000.000,00	
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi, kabupaten/kota	-	14 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00				250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik											
							Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1000 Dokumen	1000 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	48.067.160,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok		250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
									J U M L A H	**4.636.021.394,00**	**4.036.879.394,00**	**3.698.857.042,00**				**7.785.043.325,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan tahun 2025 – 2029 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati Pacitan serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2025.

Dengan adanya Renja Perubahan maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain.

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dalam Rencana Kinerja Tahun 2025 ini, diperlukan dengan tekat dan semangat untuk mensukseskan pembangunan di Kabupaten Pacitan dengan dukungan dari semua pihak sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Semoga bermanfaat serta perbaikan berkelanjutan amat diperlukan demi suksesnya program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025.

Pacitan, Juli 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PACITAN

Ir. T. ANDI FALIANDRA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670909 199503 1 003

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Pacitan

RENCANA KERJA **PERUBAHAN**

TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jl. A. Yani Nomor 76 Pacitan Kode Pos 63512
Telepon/Faks. (0357) 884748 Laman: perpustakaan.pacitankab.go.id
Surel: disperpusip.pacitan@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PACITAN
NOMOR: 100.3.3.7/16/408.44/2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PACITAN

Menimbang :

a. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan 2021 – 2026, perlu menyusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan Tahun 2025;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 137 Permendagri Nomor 54 tahun 2010, Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 disahkan oleh Kepala Dinas dalam bentuk Keputusan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan tahun 2025 dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan ke 2 Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2012;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 2007;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005 – 2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No. 10 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
20. Surat Edaran Bupati Pacitan Nomor: 000.7/499/408.53/2024 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025;
21. Surat Edaran Bupati Pacitan Nomor: 188/076/408.53/2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan Tentang Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025.
Kesatu	:	Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
Kedua	:	Penetapan ini menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan dalam menyusun rancangan Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan.
Ketiga	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Pacitan
Pada tanggal : 15 Juli 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN KABUPATEN PACITAN

AMAT TAUFAN, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670618 198809 1 001

Lampiran: Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan
Tanggal: 15 Juli 2025
Nomor: 100.3.3.7/16/408.44/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENJA PERUBAHAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2025

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	AMAT TAUFAN, S.Sos.	Ketua	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Pacitan
2.	WAWAN PUJIATMOKO, S.STP., M.Si.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Pacitan
3.	Dra. KUSTIANA, M.M.	Kelompok Kerja	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan
	Ir. DEWA AYU GEDE INDIRA INDIATI, M.M.		Kepala Bidang Layanan dan Koleksi Perpustakaan
	NANANG ENDRAJANTO, S.E., M.M.		Kepala Bidang Kearsipan
	NURBAMBANG SUSIANTO, S.E.		Perencana Ahli Muda

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PACITAN

AMAT TAUFAN, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670618 198809 1 001

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan dapat disusun dengan pedoman dan mekanisme yang ada.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Renja Perubahan ditetapkan rencana capaian kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kerja Perubahan dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dengan adanya Renja Perubahan Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan, diharapkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan dapat terwujud.

Pacitan, Juli 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PACITAN

AMAT TAUFAN, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670618 198809 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 6

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 6

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 14

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 22

BAB IV PENUTUP 36

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 17
Tabel 3.1 Perubahan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan 29
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan Tahun 2022 – 2026 35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perubahan tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan merupakan dokumen perubahan dari Renja tahun 2025 yang telah disusun. Dalam dokumen Renja diuraikan lebih mendetail dari Rencana Strategis (Renstra) yang akan dilaksanakan setiap tahunnya.

Pengukuran kinerja dilakukan pada pelaksanaan Renja di tahun berjalan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Perangkat Daerah serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP).

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan gambaran pelayanan Perangkat Daerah hingga pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (n-1) hingga Triwulan II tahun berjalan. Selain itu dijabarkan pula Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Tahun Anggaran 2025 adalah tahun keempat pelaksanaan Renstra Tahun 2021 – 2026 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

Dalam hal ini, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan perlu menyusun Renja Perubahan tahun 2025 yang merupakan penjabaran tiap tahun dari RPJMD dan RENSTRA Tahun 2021 – 2026 serta memiliki kemampuan merumuskan

kebijakan publik dalam rangka mewujudkan pembangunan di Kabupaten Pacitan.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah R.I No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia (Kepres) No. 67 Tahun 2000 tentang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
10. Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Permendagri No.21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pacitan Tahun 2005 – 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No. 10 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No. 4 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
17. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 210 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan;
18. Peraturan Bupati Pacitan No.92 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2024;
19. Surat Edaran Bupati Pacitan Nomor: 000.7/499/408.53/2024 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025;
20. Surat Edaran Bupati Pacitan Nomor: 188/076/408.53/2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Kabupaten Pacitan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja (Renja) Perubahan tahun 2025 ini disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Sebagai penjabaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan dengan tetap memperhatikan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026;
2. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan tahunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang tertuang dalam Perubahan Kedua Renstra PD Tahun 2021 – 2026;
3. Sebagai tolok ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

1.3.2 Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 ini disusun dengan tujuan:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan melalui penyusunan rencana kerja dalam kerangka anggaran yang bersifat indikatif;
2. Menjamin ketertarikan serta konsistensi antara perencanaan, penganganggaran, pelaksanaan dan pengendalian;
3. Mengoptimalkan partisipatif masyarakat;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
5. Menjaga kesinambungan pembangunan yang dilaksanakan secara tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.2 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pelaksana bidang Perpustakaan dan Kearsipan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan urusan Perpustakaan dan Kearsipan yang meliputi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, Layanan dan Koleksi Perpustakaan, Kearsipan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 210 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pembinaan dan pengembangan perpustakaan;
b. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi layanan dan koleksi perpustakaan;
c. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi kearsipan; dan
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan terdiri dari:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
d. Bidang Layanan dan Koleksi Perpustakaan;
e. Bidang Kearsipan; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Kepala Dinas

   Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan yang meliputi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, Layanan dan Koleksi Perpustakaan serta Kearsipan.

2. Sekretariat

   Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas yang meliputi Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Program, Evaluasi, dan Pelaporan.

   Sekretariat terdiri dari:

   a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1. Subbagian Umum dan Kepegawaian

   Subbagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat yang terkait dengan umum dan kepegawaian.

   Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas meliputi:

a. Menyiapkan dan melaksanakan penatausahaan perkantoran;
b. Menyiapkan dan melaksanakan penatausahaan rumah tangga;
c. Menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
d. Menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
e. Menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kehumasan dan protokol;
f. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kepegawaian;
g. Memfasilitasi pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dipimpin oleh Kepala Bidang, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pembinaan perpustakaan;
b. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengembangan perpustakaan; dan
c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Layanan dan Koleksi Perpustakaan

Bidang Layanan dan Koleksi Perpustakaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dipimpin oleh Kepala Bidang, melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pelayanan dan otomasi perpustakaan serta pengelolaan koleksi perpustakaan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Layanan dan Koleksi Perpustakaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pelayanan dan otomasi perpustakaan;
b. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengelolaan koleksi perpustakaan; dan
c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Kearsipan

Bidang Kearsipan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dipimpin oleh Kepala Bidang, melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pengelolaan dan perlindungan arsip serta pembinaan dan pengawasan kearsipan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Kearsipan menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengelolaan dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengelolaan dan perlindungan arsip;
b. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pembinaan dan pengawasan kearsipan; dan
c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

   a. Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional (JF).
   b. Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya dan dikoordinasikan oleh seorang Pejabat Fungsional yang memiliki jenjang Jabatan Fungsional Tertinggi.
   c. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai Peraturan Perundang-undangan.
   d. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari beberapa pejabat fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
   e. Pejabat Fungsional sebagaimana dimasud pada nomer 4 dapat ditunjuk dan diberikan tugas tambahan sebagai sub koordinator untuk membantu Sekretaris dan Kepala Bidang dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
   f. Ketentuan mengenai nomenklatur dan tugas Sub Koordinator sebagaimana dimasud pada nomer 5 ditetapkan Bupati.
   g. Penugasan Koordinator, Sub Koordinator, Jabatan Fungsional (JF), dan Jabatan Pelaksana (JP) ditetapkan oleh Kepala Dinas melalui Surat Perintah.
   h. Jangka waktu penugasan sebagai sub koordinator ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
   i. Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator jabatan fungsional paling rendah menduduki jabatan fungsional ahli muda.

j. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada nomor 1, maka tugas tambahan dapat dilaksanakan oleh Pejabat fungsional jenjang ahli pratama atau pejabat fungsional keterampilan jenjang penyelia dan pejabat pelaksana.

k. Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai sub koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungional.

II.1.2 Kinerja Pelayanan

II.1.2.1 Pelayanan Perpustakaan

Didukung oleh beberapa Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan antara lain:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/TriwuIanan/Semesteran SKPD

3. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
    a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
4. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
    a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah**
    a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
    a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
    a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

1. **Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
    a. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik

b. Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
c. Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
d. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
e. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan
f. Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan

2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
b. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat
c. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial

II.1.2.2 Pelayanan Tata Kearsipan Daerah

Dalam rangka pengelolaan tata kearsipan daerah didukung Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yaitu:

A. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

1. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota

a. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
b. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota

a. Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis

B. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP

1. Pemusnahan Arsip Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun

a. Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintahan Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 Kabupaten Pacitan juga harus dilakukan evaluasi.

Evaluasi terhadap Rencana Kerja (Renja) Perubahan tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu:

a. Kebijakan Perencanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan;
b. Pelaksanaan Perencanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan;
c. Hasil Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

Sebagai evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 (n-1) sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja:
   a. Hasil Nilai Evaluasi AKIP PD tahun 2024 sebesar 76,10 dengan predikat BB atau 99,09% dari target sebesar 76,80 nilai. Sedangkan nilai di tahun 2025 belum dapat disajikan karena

belum mendapat Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat.

2. Program Pembinaan Perpustakaan dengan 2 (dua) indikator kinerja:
   a. Tahun 2024
      - Persentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan tahun 2024 terealisasi sebesar 8,78% dari target 1,60%.

        Penentuan awal target dihitung pada tahun 2020 di mana tahun tersebut terjadi Pandemi COVID-19.
      - Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan tahun 2024 terealisasi sebesar 5,00% dari target 17,78%.

        Target indikator ini tidak tercapai karena perhitungan awal penentuan target Perpustakaan berstandar menurut kriteria Standar Nasional Perpustakaan adalah tanpa sertifikat. Sedangkan berdasarkan Surat Edaran dan Pedoman Manual LPPD Tahun 2022 yang menjelaskan indikator IKK bahwa Perpustakaan yang berstandar harus dibuktikan dengan sertfikat yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional sehingga mulai tahun 2022 (n-1) perhitungan menggunakan Perpustakaan yang bersertifikat. Untuk tahun 2024 Perpustakaan berstandar yang dibuktikan dengan sertifikat sejumlah 42 Perpustakaan sehingga berakibat penurunan pada capaian indikator.
   b. Tahun 2025
      - Persentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan sampai Triwulan II tahun 2025 belum ada realisasi. Karena perhitungan target indikator kinerja dilakukan pada akhir tahun.
      - Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan sampai Triwulan II tahun 2025 tercapai sebesar 5,00% dari target 19,59%.

3. Program Pengelolaan Arsip, dengan indikator kinerja Persentase tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban Nasional pada tahun 2024 terealisasi sebesar 74,89% dari target 74,39% atau 100,67%. Sedangkan sampai Triwulan II tahun 2025 terealisasi sebesar 74,89% dari target 74,49% atau 100,54%
4. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, dengan indikator kinerja Persentase tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban pada tahun 2024 terealisasi 100% dari target sebesar 84,17% atau 118,81%. Sedangkan sampai Triwulan II tahun 2025 sebesar 16,66% dari target 88,17% atau 18,90%

Evaluasi Pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah
sampai dengan Triwulan II
Tahun 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
1	**223.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Nilai**	**76,90**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**76.85**	**3.674.469.188,00**	**0,00**	**861.035.638,00**	**0,00**	**871.327.645,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.732.363.283,00**	**0,00**	**47,15**	**0,00**	**1.732.363.283,00**	**0**	**0**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
	223.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**19.00**	**65.000.000,00**	**9,00**	**2.450.000,00**	**1,00**	**3.540.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**5.990.500,00**	**52,63**	**9,22**	**10,00**	**5.990.500,00**	**0**	**0**	
	223.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	11.00	58.290.800,00	5,00	1.190.000,00	0,00	3.540.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4.730.500,00	45,45	8,12	5,00	4.730.500,00	0	0	
	223.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0.00	0,00	0.00	0,00	8.00	6.709.200,00	4,00	1.260.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1.260.000,00	62,50	18,78	5,00	1.260.000,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	53,98	13,45					T
	223.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**59.00**	**2.751.441.988,00**	**15,00**	**612.176.985,00**	**15,00**	**725.473.730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**1.337.650.715,00**	**50,85**	**48,62**	**30,00**	**1.337.650.715,00**	**0**	**0**	
	223.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	0.00	0,00	0.00	0,00	23.00	2.731.577.188,00	23,00	612.176.985,00	23,00	720.442.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	1.332.619.715,00	100,00	48,79	23,00	1.332.619.715,00	0	0	
	223.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	1.00	9.010.000,00	0,00	0,00	0,00	3.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450.000,00	0,00	38,29	0,00	3.450.000,00	0	0	
	223.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	0.00	0,00	0.00	0,00	44.00	10.854.800,00	11,00	0,00	11,00	1.581.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	1.581.000,00	50,00	14,56	22,00	1.581.000,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	50,00	33,88					T
	223.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian**	**%**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100.00**	**17.330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	
	223.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0.00	0,00	0.00	0,00	1.00	17.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0,00	0,00					T
	223.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**%**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100.00**	**192.389.277,00**	**11,11**	**22.887.855,00**	**11,11**	**24.755.185,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,22**	**47.643.040,00**	**22,22**	**24,76**	**22,22**	**47.643.040,00**	**0**	**0**	
	223.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0.00	0,00	0.00	0,00	1.00	11.735.000,00	0,00	8.025.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.025.855,00	0,00	68,39	0,00	8.025.855,00	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
	223.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0.00	0,00	0.00	0,00	1.00	20.517.477,00	0,00	0,00	0,00	10.662.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.662.660,00	0,00	51,97	0,00	10.662.660,00	0	0	
	223.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0.00	0,00	0.00	0,00	1.00	21.863.300,00	0,00	800.000,00	0,00	8.022.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.822.525,00	0,00	40,35	0,00	8.822.525,00	0	0	
	223.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0.00	0,00	0.00	0,00	1.00	17.091.500,00	0,00	3.843.000,00	0,00	3.536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.379.000,00	0,00	43,17	0,00	7.379.000,00	0	0	
	223.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0.00	0,00	0.00	0,00	1.00	13.512.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	1,07	0,00	145.000,00	0	0	
	223.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0.00	0,00	0.00	0,00	4.00	107.670.000,00	1,00	10.219.000,00	1,00	2.389.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	12.608.000,00	50,00	11,71	2,00	12.608.000,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	8,33	36,11					T
	223.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**%**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100.00**	**119.091.123,00**	**100,00**	**118.215.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**118.215.000,00**	**100,00**	**99,26**	**100,00**	**118.215.000,00**	**0**	**0**	
	223.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0.00	0,00	0.00	0,00	8.00	119.091.123,00	8,00	118.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	118.215.000,00	100,00	99,26	8,00	118.215.000,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	100,00	99,26					T
	223.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan**	**%**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100.00**	**402.597.800,00**	**23,07**	**92.719.068,00**	**26,91**	**87.548.180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,98**	**180.267.248,00**	**49,98**	**44,78**	**49,98**	**180.267.248,00**	**0**	**0**	
	223.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0.00	0,00	0.00	0,00	2.00	6.840.000,00	0,00	480.000,00	1,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.120.000,00	50,00	16,37	1,00	1.120.000,00	0	0	
	223.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0.00	0,00	0.00	0,00	12.00	132.229.400,00	3,00	30.821.462,00	3,00	27.450.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	58.272.036,00	50,00	44,07	6,00	58.272.036,00	0	0	
	223.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0.00	0,00	0.00	0,00	12.00	263.528.400,00	3,00	61.417.606,00	3,00	59.457.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	120.875.212,00	50,00	45,87	6,00	120.875.212,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	50,00	35,44					T
	223.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**%**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**80.00**	**126.619.000,00**	**8,42**	**12.586.730,00**	**4,21**	**30.010.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,63**	**42.596.780,00**	**15,79**	**33,64**	**12,63**	**42.596.780,00**	**0**	**0**	
	223.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0.00	0,00	0.00	0,00	16.00	84.388.000,00	2,00	12.586.730,00	1,00	14.403.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	26.990.180,00	18,75	31,98	3,00	26.990.180,00	0	0	
	223.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0.00	0,00	0.00	0,00	3.00	42.231.000,00	0,00	0,00	0,00	15.606.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.606.600,00	0,00	36,96	0,00	15.606.600,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	9,38	34,47					T

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					41,64	37,18					
2	**223.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan**	**%**	**1,62**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**1.61**	**864.300.000,00**	**0,00**	**98.840.610,00**	**0,00**	**171.999.941,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270.840.551,00**	**0,00**	**31,34**	**0,00**	**270.840.551,00**	**0**	**0**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
	.		**Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan**	**%**	**21,39**		**0.00**	**0,00**	**19.59**		**5,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**5,00**		**25,52**		**5,00**		**23.38**		**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
	223.02.2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ketermanfaatan perpusatakaan oleh masyarakat**	**%**	**67.40**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**67.30**	**598.081.000,00**	**0,00**	**98.840.610,00**	**0,00**	**64.229.490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163.070.100,00**	**0,00**	**27,27**	**0,00**	**163.070.100,00**	**0**	**0**	
			Persentase Tenaga Perpustakaan yang Memenuhi Kualifikasi Perpustakaan	**%**	**1.90**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**1.68**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	
	223.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	0.00	0,00	0.00	0,00	30.00	24.057.000,00	24,00	3.623.610,00	0,00	1.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	4.868.610,00	80,00	20,24	24,00	4.868.610,00	0	0	
	223.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Layanan	0.00	0,00	0.00	0,00	20000.00	193.600.000,00	5.612,00	26.492.000,00	2.707,00	33.420.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.319,00	59.912.070,00	41,60	30,95	8.319,00	59.912.070,00	0	0	
	223.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	3.00	113.574.000,00	0,00	14.596.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.896.000,00	0,00	15,76	0,00	17.896.000,00	0	0	
	223.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	0.00	0,00	0.00	0,00	150.00	31.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	223.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Eksemplar	0.00	0,00	0.00	0,00	2.00	214.100.000,00	0,00	54.129.000,00	0,00	26.264.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.393.420,00	0,00	37,55	0,00	80.393.420,00	0	0	
	223.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	Perpustakaan	0.00	0,00	0.00	0,00	1.00	21.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					20,27	17,42					T
	223.02.2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat**	**Lokus**	**3.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**3.00**	**266.219.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**107.770.451,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**107.770.451,00**	**133,33**	**40,48**	**4,00**	**107.770.451,00**	**133.33**	**0**	
	223.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Perpustakaan	0.00	0,00	0.00	0,00	3.00	21.282.000,00	0,00	0,00	3,00	2.536.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2.536.845,00	100,00	11,92	3,00	2.536.845,00	0	0	
	223.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang	Perpustakaan	0.00	0,00	0.00	0,00	1.00	19.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
		Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																								
	223.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Lokus	0.00	0,00	0.00	0,00	3.00	225.187.000,00	0,00	0,00	4,00	105.233.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	105.233.606,00	133,33	46,73	4,00	105.233.606,00	0	0	
																			Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		77,78	19,55					T
3	**224.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah danpertanggung jawaban Nasional**	**%**	**74,59**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**74.49**	**181.545.000,00**	**0,00**	**17.391.600,00**	**74,89**	**27.511.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,89**	**44.903.350,00**	**100,54**	**24,73**	**74,89**	**44.903.350,00**	**100.4**	**0**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
	224.02.2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip**	**%**	**100.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100.00**	**156.694.387,00**	**25,00**	**16.980.000,00**	**100,00**	**14.450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125,00**	**31.430.000,00**	**125,00**	**20,06**	**125,00**	**31.430.000,00**	**125**	**0**	
			Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	**%**	**98.37**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**97.96**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	
	224.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	0.00	0,00	0.00	0,00	12.00	136.332.387,00	0,00	16.440.000,00	0,00	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.640.000,00	0,00	21,74	0,00	29.640.000,00	0	0	
	224.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	0.00	0,00	0.00	0,00	27.00	20.362.000,00	0,00	540.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790.000,00	0,00	8,79	0,00	1.790.000,00	0	0	
																			Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		0,00	15,27					T
	224.02.2.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana temu balik**	**%**	**100.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100.00**	**24.850.613,00**	**0,00**	**411.600,00**	**0,00**	**13.061.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.473.350,00**	**0,00**	**54,22**	**0,00**	**13.473.350,00**	**0**	**0**	
	224.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	0.00	0,00	0.00	0,00	4.00	24.850.613,00	0,00	411.600,00	2,00	13.061.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	13.473.350,00	50,00	54,22	2,00	13.473.350,00	0	0	
																			Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		50,00	54,22					T
4	**224.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Persentase tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban**	**%**	**92,50**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**88.17**	**6.255.000,00**	**0,00**	**46.300,00**	**16,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,66**	**46.300,00**	**18,90**	**0,74**	**16,66**	**46.300,00**	**18.01**	**0**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
	224.03.2.01	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**	**Persentase tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK**	**%**	**95.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**90.00**	**6.255.000,00**	**0,00**	**46.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.300,00**	**0,00**	**0,74**	**0,00**	**46.300,00**	**0**	**0**	
	224.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip	0.00	0,00	0.00	0,00	5.00	6.255.000,00	0,00	46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.300,00	0,00	0,74	0,00	46.300,00	0	0	
																			Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		0,00	0,74					T

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																				0,00	0,74					
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)																				28,99	20,79					
Total																				**4.726.569.188,00**			**2.048.153.484,00**			
Persentase Realisasi Anggaran																				**43.33%**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : - Adanya layanan ekstensi perpustakaan daerah yaitu perpustakaan keliling, pojok baca dan titik baca untuk masyarakat- Pembuatan inovasi layanan perpustakaan daerah- Tersedianya peraturan perundang-undangan sebagai dasar dan pedoman dalam menyusun daftar arsip aktif, inaktif, dan statis

Faktor penghambat pencapaian kinerja : - Keterbatasan sarana dan prasarana perpustakaan daerah- Banyaknya lembaga perpustakaan yang tidak mengirim laporan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : - Pelaksanaan layanan ekstensi perpustakaan daerah yaitu perpustakaan keliling, pojok baca dan titik baca secara maksimal- Dilakukan monitoring

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : - Mengusulkan sarana prasarana dan anggaran- Melaksanakan penilaian dan pemusnahan arsip secara rutin

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka menindaklanjuti Inpres Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025 sehingga para Kepala Daerah menginstruksikan mengkaji ulang terhadap anggarannya untuk mewujudkan efisiensi belanja yang bersifat seremonial, perjalanan dinas, honorarium, serta mengurangi belanja yang bersifst pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.

Maka dari itu dilakukan efisiensi belanja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp164.374.926,00 dari semula Rp4.726.569.188,00 menjadi Rp4.562.194.262,00 dan pada perubahan APBD tahun 2025 ini mendapat tambahan angaran sebesar Rp25.000.000,00 serta penyesuaian pengurangan pagu gaji ASN sebesar Rp71.324.356,00. Sehingga anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada perubahan APBD Tahun 2025 sebesar Rp4.515.869.906.

Pagu tersebut terbagi menjadi dua sumber pendanaan yaitu dari APBD sebesar Rp4.015.869.906,00 dan juga dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebesar Rp500.000.000,00. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan perubahan tahun 2025 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebelum perubahan Rp3.674.469.188,00 setelah perubahan menjadi Rp3.591.350.673,00 dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mempunyai anggaran sebelum perubahan sebesar Rp65.000.000,00 setelah perubahan menjadi Rp59.985.826,00 dengan sub kegiatan:
      1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mempunyai anggaran sebelum perubahan sebesar Rp58.290.800,00 setelah perubahan menjadi Rp53.958.426,00 berkurang sebesar Rp4.332.374,00 karena efisiensi belanja.

2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mempunyai anggaran sebelum perubahan sebesar Rp6.709.200,00 setelah perubahan menjadi Rp6.027.400,00 berkurang sebesar Rp681.800,00 karena efisiensi belanja.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah mempunyai anggaran sebelum perubahan sebesar Rp2.751.441.988,00 setelah perubahan mengalami pengurangan menjadi Rp2.676.273.632,00. Berkurang sebesar Rp75.168.356,00. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah mempunyai sub kegiatan:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mempunyai pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp2.731.577.188,00 setelah perubahan menjadi Rp2.660.252.832,00. Berkurang sebesar Rp71.324.356,00 karena efisiensi belanja.
2. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan mempunyai anggaran sebelum perubahan sebesar Rp9.010.000,00 setelah perubahan menjadi Rp7.540.000,00 Berkurang sebesar Rp1.470.000,00 karena efisiensi belanja.
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/TriwuIanan/Semesteran SKPD mempunyai anggaran sebelum perubahan sebesar Rp10.854.800,00 setelah perubahan tetap menjadi Rp8.480.800,00. Berkurang sebesar Rp2.374.000,00 karena efisiensi belanja.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah mempunyai anggaran sebelum perubahan sebesar Rp17.330.000,00 setelah perubahan menjadi Rp18.019.800,00. Bertambah sebesar Rp689.800,00, dengan sub kegiatan:

1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya mempunyai anggaran sebelum perubahan sebesar Rp17.330.000,00 setelah perubahan menjadi Rp18.019.800,00. Bertambah sebesar Rp689.800,00.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah mempunyai anggaran sebelum perubahan sebesar Rp192.389.277,00 setelah

perubahan menjadi Rp186.134.092,00 berkurang sebesar Rp6.255.185,00,00 dengan sub kegiatan:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor mempunyai anggaran sebelum perubahan sebesar Rp11.735.000,00 setelah perubahan tetap menjadi Rp11.735.000,00. Tidak mengalami perubahan anggaran.
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor mempunyai anggaran sebelum perubahan sebesar Rp20.517.477,00 setelah perubahan menjadi Rp17.052.392,00 berkurang sebesar Rp3.465.085,00 karena efisiensi belanja.
3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga mempunyai anggaran sebelum perubahan sebesar Rp21.863.300,00 setelah perubahan menjadi Rp21.060.900,00 berkurang sebesar Rp802.400,00 karena efisiensi belanja.
4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor mempunyai anggaran sebelum perubahan sebesar Rp17.091.500,00 setelah perubahan menjadi Rp15.595.800,00 berkurang sebesar Rp1.495.700,00 karena efisiensi belanja.
5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan mempunyai anggaran sebelum perubahan sebesar Rp13.512.000,00 setelah perubahan menjadi Rp10.810.000,00 berkurang sebesar Rp2.702.000,00 karena efisiensi belanja.
6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mempunyai anggaran sebelum perubahan sebesar Rp107.670.000,00 setelah perubahan menjadi Rp109.880.000,00 bertambah sebesar Rp2.210.000,00 karena efisiensi belanja.

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mempunyai anggaran sebelum perubahan sebesar Rp119.091.123,00 setelah perubahan menjadi Rp135.971.323,00 bertambah sebesar Rp16.880.200,00 dengan sub kegiatan:

1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya mempunyai anggaran sebelum perubahan Rp119.091.123,00

setelah perubahan menjadi Rp135.971.323,00 bertambah sebesar Rp16.880.200,00. Penambahan anggaran digunakan untuk pengadaan 1 buah Smart TV 65inchi.

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mempunyai anggaran sebelum perubahan sebesar Rp402.597.800,00 setelah perubahan menjadi Rp395.426.400,00 berkurang sebesar Rp7.171.400,00, dengan sub kegiatan:
   1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat mempunyai anggaran sebelum perubahan sebesar Rp6.840.000,00 setelah perubahan tetap menjadi Rp5.840.000,00. berkurang sebesar Rp1.000.000,00 karena efisiensi belanja.
   2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik mempunyai anggaran sebelum perubahan sebesar Rp132.229.000,00 setelah perubahan menjadi Rp132.229.000,00 tidak mengalami perubahan anggaran.
   3. Sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor mempunyai anggaran sebelum perubahan sebesar Rp263.528.400,00 setelah perubahan menjadi Rp257.357.000,00 berkurang sebesar Rp6.171.400,00 karena efisiensi belanja.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mempunyai anggaran sebelum perubahan sebesar Rp126.619.000,00 setelah perubahan menjadi Rp119.539.600,00 berkurang sebesar Rp7.079.400,00 dengan sub kegiatan:
   1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan mempunyai anggaran sebelum perubahan sebesar Rp84.388.000,00 setelah perubahan tetap menjadi Rp84.388.000,00 karena efisiensi belanja.
   2. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya mempunyai anggaran sebelum perubahan sebesar Rp42.231.000,00 setelah perubahan menjadi

Rp35.151.600,00 berkurang sebesar Rp7.079.400,00 karena efisiensi belanja.

II. Program Pembinaan Perpustakaan, dengan anggaran sebelum perubahan Rp864.300.000,00 setelah perubahan menjadi Rp784.532.822,00 berkurang sebesar Rp79.767.187,00 dengan kegiatan dan sub kegiatan:

a. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota mempunyai anggaran sebelum perubahan sebesar Rp598.081.000,00 setelah perubahan menjadi Rp530.851.622,00 berkurang sebesar Rp67.229.378,00 dengan sub kegiatan:

1. Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan, anggaran sebelum perubahan sebesar Rp24.057.000,00 setelah perubahan menjadi Rp9.090.200,00 berkurang sebesar Rp14.966,800,00 karena efisiensi belanja.
2. Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota anggaran sebelum perubahan sebesar Rp193.600.000,00 setelah perubahan menjadi Rp167.265.522,00 berkurang sebesar Rp26.334.478,00 karena efisiensi belanja.
3. Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp113.574.000,00 setelah perubahan menjadi Rp105.146.000,00 berkurang sebesar Rp8.428.000,00 karena efisiensi belanja.
4. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp31.500.000,00 setelah perubahan menjadi Rp15.858.000,00 berkurang sebesar Rp15.642.000,00 karena efisiensi belanja.
5. Sub Kegiatan Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota anggaran sebelum perubahan sebesar Rp214.100.000,00 setelah perubahan menjadi Rp212.260.000,00 berkurang sebesar Rp1.840.000,00 karena efisiensi belanja.

6. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik anggaran sebelum perubahan sebesar Rp21.250.000,00 setelah perubahan menjadi Rp21.231.900,00 berkurang sebesar Rp18.100,00 karena efisiensi belanja.

b. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota mempunyai anggaran sebelum perubahan sebesar Rp266.219.000,00 setelah perubahan tetap Rp253.681.200,00 berkurang sebesar Rp12.537.800,00 dengan sub kegiatan:

1. Sub Kegiatan Pengembangan Literasi berbasis Inklusi Sosial mempunyai anggaran sebelum perubahan sebesar Rp21.282.000,00 setelah perubahan menjadi Rp14.568.100,00. Berkurang sebesar Rp6.713.900,00 karena efisiensi belanja.
2. Sub Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota anggaran sebelum perubahan sebesar Rp19.750.000,00 dan tidak mengalami perubahan anggaran karena efisiensi belanja.
3. Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat anggaran sebelum perubahan sebesar Rp225.187.000,00 setelah perubahan menjadi Rp219.363.100,00. Berkurang sebesar Rp5.823.900,00 karena efisiensi belanja.

III. Program Pengelolaan Arsip, dengan anggaran sebelum perubahan Rp181.545.000,00 setelah perubahan menjadi Rp136.657.031,00 berkurang sebesar Rp44.887.969,00 dengan kegiatan dan sub kegiatan:

a. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota mempunyai anggaran sebelum perubahan sebesar Rp156.694.387,00 setelah perubahan menjadi Rp120.158.540,00 dengan sub kegiatan:

1. Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis mempunyai anggaran sebelum perubahan sebesar Rp136.332.387,00 setelah perubahan menjadi Rp106.684.400,00 Berkurang sebesar Rp29.647.987,00 karena efisiensi belanja.

2. Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota mempunyai anggaran sebelum perubahan sebesar Rp20.362.000,00 setelah perubahan menjadi Rp13.474.140,00 Berkurang sebesar Rp6.887.860,00 karena efisiensi belanja.

b. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota mempunyai anggaran sebelum perubahan sebesar Rp24.850.613.000,00 setelah perubahan tetap Rp16.498.491,00 dengan sub kegiatan:

1. Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis mempunyai anggaran sebelum perubahan sebesar Rp24.850.613.000,00 setelah perubahan tetap Rp16.498.491,00 Berkurang sebesar Rp8.352.122,00 karena efisiensi belanja.

IV. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, dengan anggaran sebelum perubahan Rp6.255.000,00 setelah perubahan menjadi Rp3.329.380.000,00 dengan kegiatan dan sub kegiatan:

a. Kegiatan Pemusnahan Arsip Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun mempunyai anggaran sebelum perubahan sebesar Rp6.255.000,00 setelah perubahan menjadi Rp3.329.380.000,00 dengan sub kegiatan:

1. Sub Kegiatan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun mempunyai anggaran sebelum perubahan sebesar Rp6.255.000,00 setelah perubahan menjadi Rp3.329.380.000,00 Berkurang sebesar Rp2.925.620,00 karena efisiensi belanja.

Tabel 3.1

PERUBAHAN RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PACITAN

KODE					PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH PLAFON SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH PLAFON SETELAH PERUBAHAN	BERLEBIH/ (BERKURANG)	
								Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil Nilai SAKIP PD**	**>B 76,85**	**3.674.469.188**	**3.591.350.673**	**(83.118.515)**	**(2,26)**
2	**23**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**	**19 dokumen**	**65.000.000**	**59.985.826**	**(5.014.174)**	**(7,71)**
2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	11 dokumen	58.290.800	53.958.426	(4.332.374)	(7,43)
2	23	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	8 laporan	6.709.200	6.027.400	(681.800)	(10,16)
2	**23**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah**	**59 dokumen**	**2.751.441.988**	**2.676.273.632**	**(75.168.356)**	**(2,73)**
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 orang/bulan	2.731.577.188	2.660.252.832	(71.324.356)	(2,61)
2	23	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	9.010.000	7.540.000	(1.470.000)	(16,32)
2	23	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 laporan	10.854.800	8.480.800	(2.374.000)	(21,87)

KODE					PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH PLAFON SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH PLAFON SETELAH PERUBAHAN	BERLEBIH/ (BERKURANG)	
								Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	**23**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pegawai yangmendapatkan layanan kepegawaian**	**100%**	**17.330.000**	**18.019.800**	**689.800**	**3,39**
2	23	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	17.330.000	18.019.800	689.800	3,39
2	**23**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**100%**	**192.389.277**	**186.134.092**	**25.000.800**	**(3,25)**
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	11.735.000	11.735.000	0	0
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	20.517.477	17.052.392	(3.465.085)	(16,89)
2	23	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	21.863.300	21.060.900	(802.400)	(3,67)
52	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	17.091.500	15.595.800	(1.495.700)	(8,75)
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	13.512.000	10.810.000	(2.702.000)	(20,00)
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	107.670.000	109.880.000	2.210.000	2,05
2	**23**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**100%**	**119.091.123**	**135.971.323**	**16.880.200**	**14,17**
2	23	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 unit	119.091.123	135.971.323	16.880.200	14,17

KODE					PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH PLAFON SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH PLAFON SETELAH PERUBAHAN	BERLEBIH/ (BERKURANG)	
								Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	**23**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan**	**100%**	**402.597.800**	**395.426.400**	**(7.171.400)**	**(1,78)**
2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	6.840.000	5.840.000	(1.000.000)	(14,62)
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	132.229.400	132.229.400	0	0
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	263.528.400	257.357.000	(6.171.400)	(2,34)
2	**23**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**80%**	**126.619.000**	**119.539.600**	**(7.079.400)**	**(5,59)**
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 unit	84.388.000	84.388.000	0	0
2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	42.231.000	35.151.600	(7.079.400)	(16,76)
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan**	**1,61%**	**864.300.000**	**784.532.822**	**(79.767.178)**	**(9,23)**
						Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	**19,59%**				
2	**23**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ketermanfaatan perpusatakaan oleh masyarakat**	**67,30%**	**598.081.000**	**530.851.622**	**(67.229.378)**	**(11,24)**

KODE					PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH PLAFON SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH PLAFON SETELAH PERUBAHAN	BERLEBIH/ (BERKURANG)	
								Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Persentase Tenaga Perpustakaan yang Memenuhi Kualifikasi Perpustakaan	**1,68%**				
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	24 Perpustakaan	24.057.000	9.090.200	(14.966.800)	(62,21)
2	23	02	2.01	12	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	20.000 layanan	193.600.000	167.265.522	(26.334.478)	(13,60)
2	23	02	2.01	17	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan	3 dokumen	113.574.000	105.146.000	(8.428.000)	(7,42)
2	23	02	2.01	18	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	150 eksemplar	31.500.000	15.858.000	(15.642.000)	(49,66)
2	23	02	2.01	19	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang dikembangkan	2 Eksemplar	214.100.000	212.260.000	(1.840.000)	(0,86)
2	23	02	2.01	20	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan	21.250.000	21.231.900	(18.100)	(0,09)
2	**23**	**02**	**2.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat**	**3 lokus**	**266.219.000**	**253.681.200**	**(12.537.800)**	**(4,71)**

KODE					PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH PLAFON SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH PLAFON SETELAH PERUBAHAN	BERLEBIH/ (BERKURANG)	
								Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	23	02	2.02	07	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	2 perpustakaan	21.282.000	14.568.100	(6.713.900)	(31,55)
2	23	02	2.02	08	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 perpustakaan	19.750.000	19.750.000	0	0
2	23	02	2.02	10	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan dan Masyarakat	3 lokus	225.187,000	219.363.100	(5.823.900)	(2.59)
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban Nasional**	**74,49%**	**181.545.000**	**136.657.031**	**(44.887.969)**	**(24,73)**
2	**24**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip**	**100%**	**156.694.387**	**120.158.540**	**(36.535.847)**	**(23,32)**
						Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	**97,96%**				
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	12 berkas	136.332.387	106.684.400	(29.647.987)	(21,75)
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	27 laporan	20.362.000	134.474.140	(6.887.860)	(33,83)
2	**24**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana temu balik**	**100%**	**24.850.613**	**16.498.491**	**(8.352.122)**	**(33,61)**

KODE					PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH PLAFON SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH PLAFON SETELAH PERUBAHAN	BERLEBIH/ (BERKURANG)	
								Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	24	02	2.02	04	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	2 arsip	24.850.613	16.498.491	(8.352.122)	(33,61)
2	**24**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Persentase tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban**	**88,17%**	**6.255.000**	**3.329.380**	**(2.925.620)**	**(46,77)**
2	**24**	**03**	**2.01**		**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun**	**Persentase tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK**	**90%**	**6.255.000**	**3.329.380**	**(2.925.620)**	**(46,77)**
2	24	03	2.01	04	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	5 arsip	6.255.000	3.329.380	(2.925.620)	(46,77)
							TOTAL	**4.726.569.188**	**4.515.869.906**	**(139.374.926)**	**(4,46)**

Tabel 3.2

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 – 2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN					SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
			KE-1	KE-2	KE-3	KE-4	KE-5			KE-1	KE-2	KE-3	KE-4	KE-5
1.	Meningkatnya Pelayanan Prima dan profesionalisme dalam pengelolaan Perpustakaan dan Kearsipan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	1,50	68,39	68,40	68,50	68,60	Meningkatnya Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	55,00	56,70	56,80	57,10	57,00
		Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal	70	70	70	70	70	Terwujudnya Pengelolaan Arsip yang sesuai standar kearsipan	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	35	35	37	48,70	43
		Nilai IKM	85,26	90,20	90,25	90,80	91,00	Terwujudnya kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang optimal	Hasil nilai IKM PD	85,26	90,20	90,25	90,80	91,00

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan tahun 2025 merupakan rencana jangka pendek yang berisikan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun tersebut. Keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang telah dijabarkan dalam rencana kerja tergantung pada sikap, etos/semangat kerja dan disiplin dari seluruh staf. Hal ini harus juga didukung oleh perangkat daerah yang terkait khususnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, monitoring, dan pengendalian dalam perencanaan pembangunan daerah.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 pada dasarnya berfungsi sebagai standar dan pedoman bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam menjalankan kegiatan yang telah dijadwalkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ada beberapa hal yang perlu yang perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan:

a. Rencana Kerja Perubahan tahun 2025 ini harus dijalankan secara konsisten dan konsekuen dengan tetap mempertimbangkan situasi dan kondisi yang berkembang serta harus didukung oleh kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai untuk kelancaran pencapaian tujuan pelayanan prima kepada masyarakat;
b. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan tahun 2025 ini didasarkan penjabaran tahunan Renstra 2021 – 2026 dalam RPJMD Kabupaten Pacitan, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah termasuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan untuk menyusun Renja Perubahan tahun 2025 dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab;

c. Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, penyusunan Rencana Kerja Perubahan diharapkan mampu mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang ada sekaligus dapat dijadikan sebagai rencana tindak lanjut dalam pelaksanaan kegiatan.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pacitan semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Pacitan, Juli 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PACITAN

AMAT TAUFAN, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670618 198809 1 001

DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PACITAN

SSWW PACITAN NYAWIJI

BerAKHLAK

#bangga melayani bangsa

2025

RENCANA KERJA PERUBAHAN

70 - Mile Sea Paradise

dinasperikanan.pacitan perikanan.pacitankab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan ridho-Nya penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 dapat diselesaikan. Rencana kerja yang telah disusun ini merupakan acuan bagi seluruh jajaran Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana kerja yang telah disusun ini tidak berarti banyak tanpa implementasi dengan pelaksanaan yang tuntas, komitmen dan motivasi yang kuat dari seluruh jajaran OPD. Masukan dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan dari semua pihak agar penyusunan Rencana Kerja ini lebih sempurna di masa akan datang. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 ini diucapkan terima kasih.

Pacitan, Juli 2025

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PACITAN,

BAMBANG MARHAENDRAWAN, S.Pt, M.M
Pembina Tingkat I
NIP 19680920 199901 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR…… i
DAFTAR ISI……... ii
BAB I : PENDAHULUAN…… 1
1.1 Latar Belakang…… 1
1.2 Landasan Hukum……... 2
1.3 Maksud Dan Tujuan……... 4
1.4 Sistematika Penulisan…… 4
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2024…… 5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Perikanan……... 5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan…… 19
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan……..… 22
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD……..….. 30
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat…… 84
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERIKANAN…… 88
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional……... 88
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perikanan……... 89
3.3 Program dan Kegiatan…… 90
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERIKANAN…… 92
BAB V : PENUTUP…….. 110

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Perangkat Daerah ditetapkan dengan maksud untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan kegiatan selama tahun anggaran. Perencanaan pembangunan daerah disusun berawal dari penjabaran visi/misi kepala daerah yang dituangkan dalam RPJP maupun RPJM Daerah. Selanjutnya perencanaan tersebut dijabarkan dalam renstra PD dan diuraikan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan dalam Renja PD. Renja PD merupakan bahan / acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu kepada:

a. Renstra Perubahan Perangkat Daerah
b. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya
c. Berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat
d. Rencana Kerja Kementerian / lembaga (Renja –KL)
e. Rencana Kerja Provinsi

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan ini didasarkan pada peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

12. Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencanan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2019-2024;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Bupati Pacitan No.149 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi,Susunan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan;
22. Keputusan Bupati pacitan Nomor: 188.45/25/408.21/2011 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Pacitan;
23. Rencana Strategis Dinas Perikanan No. 188.45/67/408.31/2018 tentang Penetapan Renstra Perubahan Tahun 2021-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Menjabarkan rencana program kegiatan prioritas Tahun 2025
b. Sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan;
c. Sebagai indikator bahwa kinerja yang dilakukan, apakah konsisten dengan proses dan ketentuan dalam rencana kerja

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERIKANAN TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Perikanan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaaha Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERIKANAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perikanan

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERIKANAN

BAB V : PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
DINAS PERIKANAN TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Perikanan

Sesuai dengan Rancangan RPJMD Kabupaten Pacitan 2021-2026, indikator kinerja Sasaran Dinas Perikanan sebanyak 2 sasaran dengan indikator sasaran 2 indikator dan 3 program dengan 3 indikator kinerja program.

Capaian sasaran kinerja rata-rata tahun 2024 sebesar 93,21%. Pencapaian ini termasuk kategori MEMUASKAN. Untuk mencapai target indikator kinerja tersebut,

Dinas Perikanan mempunyai 2 sasaran yaitu:

1. Meningkatnya produksi perikanan
2. Meningkatnya nilai tambah produk olahan hasil perikanan

Didukung 3 (tiga) program antara lain:

1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya ditunjang dengan 2 kegiatan, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan 3 kegiatan dan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan ditunjang 2 kegiatan. Pada tahun 2024 total kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perikanan sebanyak 14 kegiatan termasuk kegiatan dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota yang meliputi Perencanaan, Peganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Realisasi Target Indikator Program Tahun 2024 untuk 3 Program yang mendukung Sasaran Kinerja Tahun 2024 yaitu Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan tercapai 100 %.

Produksi perikanan yang terdiri dari produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya tercapai 12.529,97 ton atau 86,30 % dari target sebesar 14.519 ton. Tidak tercapainya target indikator sasaran produksi perikanan disebabkan tidak tercapainya target indikator program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan capaian sebesar 92,27 % dari target sebesar 12.020 Ton dan tidak tercapainya indikator program Pengelolaan Perikanan Budidaya sebesar 57,57 % dari target sebesar 2.499 Ton.

Produksi perikanan tahun 2024 menurun sebesar 1.863,03 ton atau 12,94 % dibanding produksi perikanan tahun 2023. Penurunan produksi sebesar 12,94 % disebabkan penurunan produksi perikanan nelayan sebesar 14,29 % dari produksi 2024 sebesar 11.091,14 ton dibanding produksi tahun 2023 sebesar 12.940,45 ton dan penurunan produksi perikanan budidaya sebesar 0,95 % dari produksi 2024 sebesar 1.438,83 ton dibanding produksi tahun 2023 sebesar 1.452,56 ton. Sedangkan untuk Indikator Kinerja Sasaran Nilai Tambah Produk Olahan Hasil Perikanan tercapai 33,22 % atau tercapai 100,12 % dari target sebesar 33,18 %. Indikator kinerja sasaran nilai tambah produk olahan hasil perikanan tahun 2024 meningkat sebesar 2 % dibanding tahun 2023 sebesar 32,53 %. Tercapainya indikator kinerja sasaran nilai tambah didukung dengan tercapainya indikator kinerja Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebesar 1.721,97 atau 110,80 %.Adapun penjelasannya sebagai berikut:

A. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Produksi perikanan kelompok nelayan pada tahun 2024 sebesar 11.091,14 ton atau mencapai 92,27% dari target RPJMD tahun 2024, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 produksi perikanan tangkap mengalami penurunan sebesar 1.849,31 ton atau 14,29% dibanding produksi perikanan tahun 2023 sebesar 12.940,45 Penurunan produksi perikanan nelayan disebabkan oleh penurunan produksi perikanan laut. Walaupun produksi PUD meningkat , namun tidak sebanding dengan penurunan produksi perikanan laut. Untuk produksi perikanan laut terjadi penurunan sebesar 15,43% disbanding tahun 2023 dengan produksi Tahun 2024 sebesar 10.219,35 ton dan produksi tahun 2023 sebesar 12.086,63 ton.

Belum optimalnya usaha perikanan tangkap oleh nelayan kecil karena keterbatasan sarana penangkapan ikan.

Capaian Kinerja Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Produksi perikanan kelompok nelayan didukung melalui kegiatan pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), serta kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Kelompok nelayan yang dibina Dinas Perikanan tahun 2024 sebanyak 91 KUB yang merupakan KUB nelayan laut dan KUB nelayan perairan umum daratan (PUD). Pembinaan dilakukan secara langsung dengan pertemuan ataupun sosialisasi. Disamping itu dilakukan fasilitasi terhadap nelayan untuk mengikuti Bimtek/Pelatihan yang dilaksanakan Provinsi maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan di luar kota.

B. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Pada tahun 2024 Produksi Perikanan Budidaya sebesar 1.438,83 ton atau mencapai 57,57% dari target RPJMD tahun 2024 sebesar 2.499 ton. Produksi perikanan budidaya Tahun 2024 terjadi penurunan sebesar 13,73 ton atau turun 0,95% disbanding prosuksi perikanan budidaya Tahun 2023 sebesar 1.452,56 ton.

Terjadi penurunan produksi perikanan budidaya baik budidaya air tawar dan budidaya air payau (tambak). Produksi budidaya air payau (tambak) selama ini memberikan kontribusi terbesar pada produksi perikanan budidaya. Pada Tahun 2024 dengan produksi sebesar 932,488 ton terjadi penurunan produksi perikanan budidaya air payau (tambak) sebesar 17,543 ton atau 1,85% dibanding tahun 2023 950,031 ton. Penyebab turunnya produksi budidaya tambak karena banyak tambak yang terserang wabah penyakit AHPND atau EMS *(Early Mortality Syndrome)* yang menyebabkan kematian hingga 100 % serta menurunnya carrying capacity disebabkan pengelolaan lingkungan yang kurang baik, kesadaran petambak untuk mengelola limbah dengan IPAL masih rendah dan belum menerapkan CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik). Banyak petambak akhirnya menghentikan sementara budidaya tambak udang dan ada yang mengganti komoditas nila

salin sebagai cara memulihkan kolam tambak agar bisa digunakan untuk siklus budidaya udang berikutnya. Penurunan produksi perikanan budidaya juga disebabkan oleh kenaikan harga pakan yang tidak diimbangi dengan harga jual produk sehingga meningkatkan biaya operasional. Banyak pembudidaya yang mengurangi jumlah tebar benih atau malah berhenti tidak melakukan budidaya karena keterbatasan modal untuk membeli pakan**.**

C. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Untuk produksi hasil olahan perikanan di Tahun 2024 terjadi peningkatan dibanding tahun 2023. Produksi hasil olahan perikanan Tahun 2024 sebesar 1.721,97 ton naik sebesar 33,60 ton atau 1,99% dibanding produksi hasil olahan perikanan Tahun 2023 sebesar 1.688,38 ton. Target produksi hasil olahan perikanan Tahun 2024 tercapai 110,81 % dengan target sebesar 1.554 ton.

Produksi Produk Hasil Olahan Perikanan tersebut mencapai target RPJMD tahun 2024, hal ini dikarenakan penambahan dari jenis pengolahan pengesan/pendinginan dan kerupuk ikan. Hal ini dikarenakan semakin tersebar luasnya pemasaran ikan segar di 12 kecamatan di Kabupaten Pacitan dan permintaan luar kota, pada tahun 2024 ini produksi pengesan/pendinginan sebesar 541.780 kg. Ini juga menunjukkan semakin meningkatnya konsumsi ikan di Kabupaten Pacitan. Selain hal tersebut juga dikarenakan upaya pemerintah dalam menumbuhkan usaha pengolahan ikan dengan memberikan pelatihan pengolahan ikan di berbagai wilayah desa sehingga tumbuh pelaku usaha yang menghasilkan produk olahan ikan yang beragam terutama produk kering seperti kerupuk ikan, ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah produksi kerupuk ikan sebesar 18.160 kg. Kenaikan produksi dibanding Tahun 2024 ini juga disebabkan banyaknya event pariwisata yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan yang juga berpengaruh langsung kepada meningkatnya permintaan produk olahan perikanan sebagai oleh - oleh Khas Pacitan. Untuk Nilai tambah produk olahan hasil perikanan pada tahun 2024 tercapai sebesar 33,22 % atau meningkat sebesar 0,12 % dari target tahun 2024 sebesar 33,18 %. Peningkatan nilai tambah disebabkan karena efisiensi produksi dan peningkatan produksi. Peningkatan nilai tambah produk olahan hasil

perikanan Tahun 2024 disebabkan karena semakin meningkatnya jumlah Unit Pengolahan Ikan yang menerapkan GMP (Good Manufacturing Proccess) atau SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan) menyebabkan peningkatan efisiensi produksi olahan hasil perikanan yang berimplikasi pada meningkatnya nilai tambah produk olahan hasil perikanan, utamanya pada jenis pengolahan pelumatan daging (ready to eat) dan selain itu kenaikan produksi juga sangat mempengaruhi kenaikan nilai tambah.

Capaian Kinerja Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Tahun 2024 didukung 2 kegiatan yaitu Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil serta Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

- Terlaksananya Bimtek Peningkatan Mutu Produksi Perikanan
- Terlaksananya Bimtek Diversifikasi Olahan Ikan
- Terlaksananya Bimtek WANI ASAH IKAN
- Terlaksananya Kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)
- Terlaksananya SeHAT Nelayan dan SeHAT Pembudidaya Ikan

Hambatan dan Kendala yang dihadapi dalam mencapai target program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan antara lain :

- Belum tersedianya bahan baku secara kontinu.
- Kurangnya penguasaan teknologi pengolahan hasil perikanan.
- Terbatasnya pemasaran pengolahan hasil perikanan.
- Pengawasan mutu hasil perikanan dan bahan asal ikan belum dapat dilaksanakan secara optimal.
- Pengurusan izin usaha pengolahan terutama produk olahan perikanan basah masih rendah

Untuk mengoptimalkan pencapaian Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya, akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- Optimalisasi pembudidaya ikan terhadap setiap potensi wilayah (baik tawar, payau dan laut) dalam melaksanakan pembudidayaan ikan

dengan menerapkan tehnologi yang dianjurkan sehingga luasan lahan serta produktifitasnya akan lebih meningkat.

- Peningkatan jumlah masyarakat dalam usaha budidaya perikanan untuk mencukupi kebutuhan pangan maupun peningkatan kesejahteraan.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas pakan mandiri untuk mengurangi ketergantungan pada pakan pabrikan yang harganya semakin meningkat
- Pencegahan penyakit ikan melalui penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan pengelolaan limbah (IPAL).
- Peningkatan produksi nelayan lokal melalui upaya inovasi teknologi penangkapan ikan yang memperhatikan kaidah konservasi dan kelestarian ekosistem laut dan restrukturisasi armada perikanan tangkap.
- Peningkatan pasca panen sehingga produk perikanan yang dihasilkan berkualitas dan bernilai tinggi.
- Peningkatan produksi nelayan lokal melalui upaya inovasi teknologi penangkapan ikan yang memperhatikan kaidah konservasi dan kelestarian ekosistem laut dan restrukturisasi armada perikanan tangkap.
- Peningkatan pasca panen sehingga produk perikanan yang dihasilkan berkualitas dan bernilai tinggi.
- Diversifikasi usaha untuk mengantisipasi musim paceklik.

Sedangkan untuk mengoptimalkan pencapaian target program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- Perlu adanya *cold storage* untuk menyimpan stok bahan baku;
- Perlu adanya pelatihan teknologi pengolahan hasil perikanan;
- Melaksanakan terobosan pemasaran hasil pengolahan perikanan (pameran, gemarikan, kerjasama dengan stakeholder);
- Melakukan pembinaan kepada pelaku pengolahan hasil perikanan dan pedagang mengenai pengelolaan ikan secara higienis dan aman;

- Peningkatan pengawasan dan pengendalian produk perikanan.
- Peningkatan kesadaran masyarakat untuk pengurusan izin usaha perikanan dan kerjasama dengan berbagai stake holder terkait.
- Kemudahan akses permodalan didukung dengan adanya berbagai program pemerintah seperti KUR, SeHAT Nelayan dan SeHAT Pembudidaya Ikan dalam rangka fasilitasi akses permodalan.
- Peningkatan pembinaan kepada masyarakat sehingga terbentuk kelembagaan yang kuat dan berkelanjutan.
- Peningkatan sosialisasi atas pemahaman dan penerapan peraturan perikanan

Untuk lebih jelasnya evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan tahun 2024 dan perkiraan pencapaian target 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Tahun 2024
dan Perkiraan Realisasi Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan Z*(Output)*	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 atau (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 atau (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 atau (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025 atau (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8 = (7/6)**	**9**	**10 (7+8+9)**	**11 = (10/4)**
3.01	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Hasil nilai evaluasi SAKIP PD**	**>B**	**>B**	**>B**			**>B**		
	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kinerja perangkat daerah*	*23 dokumen*	*23 dokumen*	*23 dokumen*		*100%*	*23 dokumen*		
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kinerja perangkat daerah	0	12 dokumen	12 dokumen			12 dokumen		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja perangkat daerah	23 dokumen	23 dokumen	11 dokumen		100%	11 dokumen		

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA – SKPD dan Laporann Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen		100%	11 dokumen		
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen keuangan perangkat daerah*	*12 dokumen*	*12 dokumen*	59 dokumen		*100%*	59 dokumen		
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang mendapat gaji dan tunjangan ASN	19 orang	19 orang	23 Orang		*100%*	23 Orang		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen keuangan perangkat daerah	59 dokumen	59 dokumen	59 dokumen		*100%*	59 dokumen		
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*100%*	*100%*	*100%*			*100%*		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian kerja	0	0	0			0		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	125 paket			125 paket		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Belanja jasa kantor, pemeliharaan, perjalanan dinas*	*100%*	*100%*	*100%*		*100%*	*100%*		
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja cetak	0	5 paket	3 paket		*100%*	3 paket		
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belanja alat listrik	11 paket	12 paket	9 paket		*100%*	9 paket		
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja barang jasa kantor	1 paket	6 paket	6 paket		*100%*	6 paket		
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem	Belanja pemeliharaan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen		*100%*	2 dokumen		

	Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja perjalanan dinas	12 laporan	12 laporan	12 laporan		*100%*	12 laporan		
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Belanja bahan bangunan	0	1 paket	2 paket		*100%*	2 paket		
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja makanan dan minuman	0	12 paket	3 paket		*100%*	3 paket		
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah									
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Belanja alat kantor dan rumah tangga	12 unit	12 unit	0		*100%*	0		
	Sub kegiatan Peralatan daan Mesin Lainnya	Belanja Laptop dan Printer	0	0	31 unit			31 unit		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Belanja jasa kantor, dan honorarium*	*100%*	*100%*	100%		*100%*	100%		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya surat menyurat	12 laporan	12 laporan	12 laporan		*100%*	12 laporan		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja jasa kantor	12 laporan	12 laporan	12 laporan		*100%*	12 laporan		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja jasa ASN dan non ASN	12 laporan	12 laporan	12 laporan		*100%*	12 laporan		
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Belanja jasa kantor, pemeliharaan*	*100%*	*100%*	*100%*		*100%*	*100%*		
	Pengadaan Mabel	Belanja alat kantor dan rumah tangga	0	0	0			0		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Laptop Belanja Printer	0	0	0			0		

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja barang jasa kantor, pemeliharaan	30 unit	30 unit	30 unit		*100%*	30 unit		
	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0	2 unit	7 unit		100%	7 unit		
3. 01.01.20	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**Produksi perikanan budidaya**	**2.380**	**1.452,56**	**2.499**		**72,69%**	**2.499**		
	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		**0**	**30 kelompok**	**50 kelompok**			**50 kelompok**		
	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah kelompok pembudidaya yang terbina dan menerima paket bantuan	0	30 kelompok	30 kelompok		*100%*	30 kelompok		
	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok pembudidaya yang terbina dan menerima paket bantuan	30 kelompok	30 kelompok	30 kelompok		*100%*	30 kelompok		
	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**Jumlah Pembudidaya yang Terbina**	**20 kelompok**	**60 kelompok**	**50 kelompok**			**50 kelompok**		
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan sarana dan prasarana budidaya ikan	0	2 unit	10 unit			10 unit		
		Jumlah kelompok pembudidaya skla kecil dan instalasi BBI penerima bantuan; Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam	2 kelompok	2 kelompok			*100%*			

		1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pokdakan yang terlatih	0	0 0 0						
		Pengadaan peralatan laboratorium	0				*0*			
		Uji laboratorium	1 paket				*0*			
		Jumlah Hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan ; Jumlah Penyakit teridentifikasi; Jumlah pokdakan terlatih; Jumlah sampel teruji	12 sampel/tahun	12 sampel/tahun	4 dokumen		100%	4 dokumen		
3.01.01.21	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**	**Produksi perikanan kelompok nelayan**	**12.942,45**	**12.942,45**	**12.020**		**78,33 %**	**12.020**		
	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Produksi perikanan kelompok nelayan*	*12.942,45*	*12.942,45*	*12.020*			*12.020*		
	Sub kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	KUB penerima sarpras perikanan tangkap berupa perahu/API/Pelampung/Kotak pendingin	0	0	1 unit			1 unit		
	Sub kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Paket fasilitasi sarana operasional (Bibit Ikan/Pakan Penyu/Papan Larangan)	0	0	3 unit			3 unit		

		Bibit vegetasi pesisir dan PUD; Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang terjamin dan tersedia; Kelompok masyarakat yang terbina; Konservasi Ikan dilindungi; Restocking Ikan di Perairan Umum	*80 batang*							
	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota		*2.500 orang*	*2.500 orang*	*3000 orang*			*3000 orang*		
	Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan kecil yang mendapatkan pemberdayaan	200 orang	100 orang	3000 orang		*100%*	3000 orang		
	Sub kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Nelayan yang mendapatkan sosialisasi kelembagaan nelayan	3 kelompok	100 kelompok	50 kelompok			50 kelompok		
	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	*Jumlah TPI yang dikelola*	*6 TPI*	*5 TPI*	*5 TPI*			*5 TPI*		
	Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI yang mendapatkan biaya operasional	6 TPI	5 TPI	5 TPI		*100%*	5 TPI		
3.01.01.23	**Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**Produksi produk hasil olahan perikanan**	**1.523 ton**	**1.688,38 ton**	**1.554 ton**			**1.554 ton**		
	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	*jumlah poklahsar dan UKM yang mendapatkan pembinaan*	40 kelompok	40 kelompok	99 unit usaha			99 unit usaha		
	Penyediaaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Poklahsar yang teridentifikasi			0			0		

	Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan perizinan berusaha	*40 poklahsar*	*40 poklahsar*	87 kelompok	540 unit usaha		87 kelompok		
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*tersedianya dan tersalurkannya produk perikanan*	*1.523 ton*	*1.688,38 ton*	*1.554 ton*	*1.722 ton*		*1.554 ton*		
	Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Gemarikan	*1.523 ton*	*1.688,38 ton*	1.554 ton	1.722 ton	*100%*	1.554 ton		
	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	peserta sosialisasi dan finalisasi sehat	100 orang	100 orang	100 pelaku usaha	200 pelaku usaha	*100%*	100 pelaku usaha		
		bedah unit pengolahan ikan	0	0	0	0		0		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan
Kabupaten Pacitan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK (Indikator Kinerja Kunci)	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Produksi Perikanan (ton)			13.596	14.050	14.519	15.005	15.507	10.521,53	14.393	12.529,97	-	-	-	
			Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	11.330	11.670	12.020	12.381	12.752	8.874,35	12.940,45	11.091,14	-	-	-	Proyeksi capaian tahun 2024 mengalami penurunan sekitar 14,29 dari capaian tahun 2023
			Produksi Perikanan Budidaya	2.266	2.380	2.499	2.624	2.755	1.647,18	1.452,56	1.438,83				Proyeksi capaian tahun 2024 mengalami penurunan sekitar 0,95% dari capaian tahun 2023
2	Peningkatan Prosentase Nilai Tambah Sektor Perikanan			2	2	2	2	2	2						
			Produksi produk hasil olahan	1.493	1.523	1.554	1.585	1.616	1.123,97	1.686,37	1.721,97				Proyeksi capaian tahun 2024 naik sekitar 1,99 % dari capaian tahun 2023

			perikanan (ton)												
	Nilai Tambah Produk Olahan Hasil PNILAI TAMBAH PRODUK OLAHAN HASIL PERIKANAN														

Tujuan Dinas Perikanan sesuai dengan visi misi Bupati yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor perikanan. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan prosentase kenikan pendapatan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi difokuskan untuk peningkatan produksi sektor perikanan. Produksi perikanan dalam hal ini bisa diupayakan melalui peningkatan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Serta peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan produk perikanan.

Sasaran strategis pembangunan perikanan berdasarkan tujuan yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatnya produksi perikanan;
2. Meningkatnya nilai tambah produk olahan perikanan;

Sasaran "Meningkatnya Produksi Perikanan" dengan indikator sasaran Produksi Perikanan diarahkan pada peningkatan produksi perikanan budidaya (kolam, karamba, minapadi, tambak), peningkatan jumlah pembudidaya ikan, peningkatan luas areal budidaya, peningkatan produksi perikanan tangkap, peningkatan jumlah nelayan yang bergerak dalam usaha penangkapan ikan, peningkatan jumlah kapal dan peningkatan produksi perairan umum. Dengan peningkatan produksi diharapkan akan meningkatan pendapatan pekerja sektor perikanan. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, diharapkan dapat dicapai melalui 2 (dua) program yaitu program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.

Salah satu faktor yang menentukan daya saing suatu produk pangan dalam perdagangan bebas adalah jaminan mutu dan keamanan pangan bagi konsumen. Jaminan mutu dan keamanan produk tidak hanya untuk melindungi konsumen domestik namun juga untuk mengantisipasi meningkatnya persyaratan dalam perdagangan internasional. Globalisasi memaksa produsen untuk meningkatkan mutu dan keamanan produk yang dihasilkan tidak terkecuali untuk pengelolaan produk perikanan. Dengan meningkatnya mutu produk maka nilai tambah untuk produk perikanan juga akan meningkat. Nilai tambah adalah selisih lebih di antara

harga jual barang dengan harga beli bahan baku, suku cadang, bahan penolong serta jasa yang dibutuhkan dalam proses produksi barang tersebut.

Sasaran "Meningkatnya Nilai Tambah Produk Olahan Hasil Perikanan" dengan Indikator Nilai Tambah Produk Olahan Hasil Perikanan dilaksanakan melalui Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan diarahkan pada peningkatan jumlah unit pengolahan, peningkatan jumlah produk olahan, tingkat konsumsi ikan dan peningkatan kualitas produk perikanan.

2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dalam Pembangunan Perikanan di Kabupaten Pacitan selama Tahun 2024 telah memberikan manfaat maupun dampak positif yang bisa dirasakan oleh nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasaran ikan walaupun belum optimal dikarenakan terjadinya penurunan anggaran kegiatan yang sangat significant dibandingkan tahun – tahun sebelumnya.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut diatas secara umum dapat dikatakan berhasil dengan baik, walaupun ada satu indikator kinerja sasaran yang tidak mencapai target. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan sebesar 86,30 % dan capaian indikator sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Produk Olahan Hasil Perikanan sebesar 100,12 % dengan rata – rata capaian 93,21 %.

Untuk mencapai indikator kinerja sasaran produksi perikanan Tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp. 2.691.408.500,00 dan capaian kinerja 86,30 % tercapai tingkat efisiensi sebesar -12,88 %. Sedangkan untuk mencapai indikator kinerja sasaran nilai tambah produk olahan hasil perikanan Tahun 2024 dengan anggaran sebesar 589.802.000,00 dan capaian kinerja 100,12 % tercapai tingkat efisiensi sebesar 0,26 %.

Untuk mencapai indikator kinerja sasaran produksi perikanan Tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp. 2.691.408.500,00 dan capaian kinerja 86,30 % tercapai tingkat efisiensi sebesar -12,8 %. Sedangkan untuk mencapai indikator kinerja sasaran nilai tambah produk olahan hasil perikanan Tahun 2024 dengan

anggaran sebesar Rp. 589.802.000,00 dan capaian kinerja 100,12 % tercapai tingkat efisiensi sebesar 0,26 %.

Untuk mencapai indikator kinerja sasaran produksi perikanan Tahun 2024 dengan ketersediaan SDM sebesar 51,61 % dan capaian kinerja 86,30 % tercapai tingkat efisiensi sebesar 34,69 %. Sedangkan untuk mencapai indikator kinerja sasaran nilai tambah produk olahan hasil perikanan Tahun 2024 ketersediaan SDM sebesar 51,61 % dan capaian kinerja 100,12 % tercapai tingkat efisiensi sebesar 48,51 %.

Untuk indikator program Pengelolaan Perikanan Budidaya berupa produksi perikanan budidaya hanya tercapai sebesar 57,57 % atau tidak tercapai dari target yang telah ditentukan sebesar 2.499 ton dan untuk indikator Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan capaian produksi perikanan kelompok nelayan sebesar 92,27 % atau tidak tercapai dari target yang telah ditentukan sebesar 12.020 ton. Sedangkan untuk indikator Program Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan tercapai melebihi target dengan capaian produksi olahan hasil perikanan 110,81 %.

Dari hasil capaian kinerja Tahun 2024 menjadi bahan evaluasi dan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sehingga diperlukan perencanaan yang lebih matang, penentuan target kinerja serta analisa yang tepat tentang masalah-masalah dalam lingkungan internal dan eksternal yang dapat menyimpulkan asumsi organisasi, sehingga apa yang menjadi target kinerja di tahun yang akan datang bisa tercapai.

Sejalan dengan Visi, Misi Kepala Daerah diharapkan 5 (lima) tahun kedepan sub sektor perikanan, akan mengalami peningkatan, dengan proyeksi kedepan kondisi masyarakat akan meningkat kemampuan ekonomi dan kesadarannya akan arti pentingnya pelayanan prima yang telah menjadi kebutuhan, maka tantangan bagi pemerintah tidaklah semakin ringan, target capaian kinerja sesuai tugas dan fungsi PD akan menghadapi permasalahan antara lain yaitu:

A. Bidang Perikanan Budidaya

Permasalahan yang ada pada saat ini dalam mencapai kondisi yang diinginkan pada masa mendatang Bidang Budidaya Perikanan adalah sebagai berikut :

a. Rendahnya produktifitas perikanan budidaya dikarenakan pelaku usaha perikanan budidaya adalah skala kecil / tradisional dengan keterbatasan aspek permodalan, SDM, jaringan teknologi dan pasar;
b. Belum optimalnya sarana dan prasarana perikanan budidaya;
c. Terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul;
d. Tingginya harga pakan;
e. Ketidakstabilan harga jual dan keterbatasan pasar;
f. Ketidaksiapan dalam menanggulangi hama dan penyakit;
g. Peningkatan peluang pasar hasil perikanan budidaya;
h. Pencemaran yang mempengaruhi kualitas lingkungan perikanan budidaya;
i. Upaya pembentukan cluster budidaya air tawar kurang didukung anggaran yang memadai karena minimnya APBD untuk bidang perikanan budidaya;
j. Upaya pengembangan pakan alternatif untuk budidaya maggot belum bisa terealisasi;
k. Belum tersedianya laboratorium yang memadai (laboratorium Dinas Level 1) sehingga terkendala dalam melakukan uji lab terkait penyakit dan sebagainya;
l. Banyak petambak yang belum mempunyai IPAL sehingga banyak yang belum memiliki dokumen LH, menjadi target dari APH terkait persyaratan operasional tambak.

B. Bidang Perikanan Tangkap

Berdasarkan kondisi pada saat ini sebagaimana dikemukakan di atas, permasalahan Bidang Perikanan Tangkap pada masa mendatang adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan produksi melalui upaya inovasi teknologi penangkapan ikan yang memperhatikan kaidah konservasi dan kelestarian ekosistem laut dan restrukturisasi armada perikanan tangkap.
b. Penurunan potensi Sumberdaya Ikan (SDI) akibat kerusakan habitat (terumbu karang dan mangrove), padat tangkap (overfishing) dan kerusakan lingkungan akibat pencemaran limbah industri dan limbah rumah tangga, penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, bahan peledak serta Potasium.
c. Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap, baik berupa pembangunan infrastruktur, peningkatan sarana tangkap maupun alat tangkap, dan SDM yang memadai.
d. Rendahnya SDM dan kelembagaan nelayan terkait pengetahuan, ketrampilan, penguasaan teknologi dan aksesibilitas terhadap infrastruktur dan informasi belum memadai;
e. Peningkatan kualitas kawasan pesisir dan laut melalui :
   - Upaya perbaikan pengelolaan ekosistem pesisir yang dilakukan secara lestari, terpadu, dan berbasis masyarakat;
   - Rehabilitasi karena adanya kerusakan lingkungan, bencana dan dampak perubahan iklim serta meningkatnya aktivitas pengelolaan sumberdaya di kawasan pesisir dan pantai yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian lingkungan serta pembuangan limbah industri dan rumah tangga yang mencemari perairan, telah mengakibatkan berbagai kerusakan pada kawasan mangrove, terumbu karang dan menurunnya kualitas perairan. Hal ini menyebabkan menurunnya potensi sumberdaya perikanan pantai dan rendahnya produktivitas perikanan tangkap;
   - Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi bencana alam laut, bagi masyarakat pesisir;
   - Peningkatan ekonomi masyarakat pesisir untuk mencapai kesejahteraan yang diharapkan.
f. Peningkatan pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, melalui lembaga khusus untuk penyelesaian pelanggaran yang terjadi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk didalamnya penegakan

Perda melalui efektifitas kelompok masyarakat pengawas (POKWASMAS) dalam rangka penerapan sistem pengawasan masyarakat (SISWASMAS). Sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Kewenangan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan menjadi Kewenangan Pemerintah Propinsi maka harus terjalin koordinasi aktif antar instansi agar pengawasan dapat berjalan secara efektif dan optimal.

g. Belum semua obyek yang menjadi kewenangan Provinsi diserahkan. Sampai saat ini prosesnya belum selesai.
h. Terjadinya sedimentasi di jalur labuh kapal
i. Fasilitas TPI kurang memadai

C. Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Beberapa permasalahan terkait bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan antara lain:

1. Belum optimalnya integrasi sistem produksi hulu dan hilir;
2. Masih terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana usaha perikanan secara memadai;
3. Rendahnya SDM dan kelembagaan pengolah terkait pengetahuan, ketrampilan, penguasaan teknologi dan aksesibilitas terhadap infrastruktur dan informasi belum memadai.
4. Penumbuhan sentra-sentra pengolahan hasil perikanan baik usaha skala rumah tangga maupun skala besar yang ditunjang dengan dukungan permodalan, pemasaran dan peningkatan sumberdaya manusia.
5. Peningkatan peran kelompok, koperasi, dan lembaga keuangan dalam memberikan; pelayanan kepada kelompok utamanya dalam penyediaan sarana dan prasarana produksi serta modal usaha.
6. Belum adanya perlindungan terhadap pelaku usaha UMK untuk meningkatkan daya saing melalui sinergitas antar sektor termasuk dalam mengakses sumber pembiayaan, perlindungan terhadap pasar domestik dan sertifikasi produk.

7. Peningkatan pembinaan dan bimbingan dibidang pengolahan dan pengawasan mutu serta pengembangan sumberdaya manusia karena banyaknya persyaratan mutu yang telah ditentukan oleh konsumen baik konsumen dalam negeri maupun negara pengimpor seperti Uni Eropa, Asia Timur (Jepang, Korea, Hongkong, Taiwan), dan USA terhadap keamanan pangan bebas dari antibiotik pada produk ekspor hasil perikanan dari Indonesia.
8. Belum terpenuhinya sistem jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan.
9. Pengembangan dan investasi dibidang usaha kelautan dan perikanan.
10. Legalitas usaha utamanya ijin edar MD BPOM bagi produk perikanan beku yang masih sulit diperoleh bagi poklahsar.
11. Bahan baku Ikan yang belum tersedia kontinu, ketika musim paceklik ikan bahan baku menjadi langka.
12. Tempat pengolahan produk perikanan yang sebagian besar masih jadi satu dengan dapur rumah tangga dan belum layak untuk memperoleh ijin edar MD BPOM.
13. Manajemen kelembagaan poklahsar yang masih kurang kuat dan memerlukan pembinaan yang intensif.
14. Distribusi produk perikanan belum bisa terjangkau luas (hanya tergantung trayek bis dan travel).
15. Promosi produk perikanan belum optimal.

Sesuai dengan Rancangan RPJMD Kabupaten Pacitan 2021-2026, indikator kinerja Sasaran Dinas Perikanan tahun 2025 sebanyak 2 sasaran dengan indikator sasaran 2 indikator dan 3 program dengan 3 indikator kinerja program dengan rincian sebagai berikut :

Dinas Perikanan mempunyai 2 sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Produksi Perikanan
2. Meningkatnya Nilai Tambah Hasil Olahan Produk Perikanan

Didukung 3 (tiga) program antara lain :

1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya ditunjang dengan 2 kegiatan, Program Perikanan Tangkap dengan 3 kegiatan dan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan ditunjang 3 kegiatan. Pada tahun 2022 total kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perikanan sebanyak 13 kegiatan termasuk kegiatan dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota yang meliputi Perencanaan, Peganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pengadaan Jasa Penunjang Umum Pemerintah Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Adapun tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perikanan di antaranya:

	TANTANGAN	**PELUANG**
1	Usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya di Kabupaten Pacitan dihadapkan pada kondisi geografis yang sulit (pantai terjal/curam, daratan bergunung-gunung dan sumber air terbatas)	Peningkatan sarana dan prasarana perikanan
2	Terbatasnya kemampuan pelaku usaha perikanan untuk mengembangkan usaha perikanan	Peningkatan kemampuan dan kapasitas pelaku usaha perikanan dalam mengembangkan usahanya
3	Keterbatasan penguasaan IPTEK sehingga produksi perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran belum optimal	Peningkatan peluang kerjasama dengan pihak terkait (Perguruan Tinggi, Swasta, Badan Riset, dll) dalam rangka percepatan penguasaan IPTEK

4	Peningkatan dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume dan keragaman produk perikanan	Inovasi dan diversifikasi usaha perikanan
5	Regulasi yang mengatur pengelolaan sumberdaya perikanan belum sepenuhnya diterapkan	Peningkatan kerjasama dengan pihak terkait baik tingkat daerah, provinsi, dan pusat
6	Legalitas usaha perikanan yang belum optimal	Pendampingan dan fasilitasi dalam proses perijinan
7	Penurunan daya dukung lingkungan dan perairan yang berpengaruh terhadap usaha perikanan	Peningkatan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sumberdaya perikanan

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 diharapkan tidak jauh berbeda dengan tahun 2024. Diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2025 masing-masing indikator kinerja dapat dicapai 100%. Untuk lebih jelasnya Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 3
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan

RANCANGAN AWAL SKPD					RKPD PERUBAHAN				
PROGRAM / KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF**	**PROGRAM / KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**3.836.000.739,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**3.758.990.928,00**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**-**	**80.000.753,00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**23 Dokumen**	**106.450.753,00**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Pacitan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	46.480.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Pacitan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	73.980.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Pacitan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	11 Laporan	33.520.753,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Pacitan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Laporan	32.470.753,00

		Realisasi Kinerja SKPD							
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah**	**59 dokumen**	**2.770.879.349,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab.Pacitan**	**Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**59 dokumen**	**2.663.193.678,00**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Pacitan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	2.765.674.479,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	2.657.988.808,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab.Pacitan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	59 Laporan	5.204.870,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab.Pacitan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	59 Laporan	5.204.870,00

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian**	**-**	**21.000.000,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab.Pacitan**	**Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian**	**100 %**	**25.505.800,00**
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab.Pacitan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	125 paket	21.000.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1paket	25.505.800,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**-**	**163.189.000,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab.Pacitan**	**Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian**	**100 %**	**138.665.260,00**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Pacitan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	2.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Persentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	9 Paket	2.000.220,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Pacitan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	35.204.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Pacitan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	31.541.560,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Pacitan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	54.360.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Pacitan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	61.002.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Pacitan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	9.305.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Pacitan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	8.342.200,00

Penyediaan Bahan/Material	Kab.Pacitan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00	Penyediaan Bahan/Material	Kab.Pacitan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.000.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Pacitan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	55.320.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Pacitan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Laporan	35.603.000,00
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab.Pacitan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	5.000.000,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab.Pacitan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Dokumen	4.390.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**-**	**-**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab.Pacitan**	**Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD**	**100 %**	**3.013.800,00**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Pacitan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	31 Unit	3.013.800,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan**	**-**	**673.088.489,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab.Pacitan**	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	**100 %**	**693.708.489,00**

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.500.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Persentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	12 Laporan	2.500.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	66.160.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	91.190.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	604.428.489,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	600.918.489.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**-**	**127.843.148,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab.Pacitan**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**	**100 %**	**128.453.148,00**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Pacitan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	54.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	30 Unit	54.000.000.00

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Pacitan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	73.843.148,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab.Pacitan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	349,187,580.00
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				54.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		**Produksi perikanan kelompok nelayan**	**-**	**4,954,000,000.00**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Kab.Pacitan**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**	**12.020 Ton**	**973.589.046,00**
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	-	4,150,000,000.00	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**		Produksi perikanan kelompok nelayan	5 Unit	223.909.646,00

Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab.Pacitan	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	-	-	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	2 Unit	-
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab.Pacitan	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	196200 Unit	4,150,000,000.00	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab.Pacitan	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	3 Unit	223.909.646,00
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah nelayan kecil yang mendapatkan pemberdayaan**	**-**	**704.000.000,00**	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab.Pacitan**	**Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia**	**3000 nelayan**	**659.272.600,00**
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kab.Pacitan	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	2500 Orang	647.000.000,00	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		Jumlah nelayan kecil yang mendapatkan pemberdayaan	3000 Orang	622.100.000,00
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kab.Pacitan	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	50 Kelompok	57.000.000,00	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kab.Pacitan	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	50 Kelompok	37.172.600,00
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		**Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**-**	**100.000.000,00**	**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**Kab.Pacitan**	**Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya**	**5 TPI**	**90.406.800,00**

Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kab.Pacitan	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	5 Layanan	100.000.000,00	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	5 Layanan	90.406.800,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		**Produksi perikanan budidaya**	**-**	**950.000.000,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Kab.Pacitan**	**Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**2499 Ton**	**753.563.700,00**
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		**jumlah pembudidaya yang mendapat pemberdayaan**	**-**	**550,00,000,00**	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**		**Produksi perikanan budidaya**	**50 Kelompok**	**360.791.816,00**
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kab.Pacitan	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	10 Kelompok	510,000.000,00	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha		jumlah pembudidaya yang mendapat pemberdayaan	20 Kelompok	338.336.700,00
Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kab.Pacitan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan	10 Kelompok	40,000,000,00	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kab.Pacitan	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	30 Kelompok	22.455.116,00

		Pendidikan dan Pelatihan							
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		**jumlah pembudidaya yang terbina**	**-**	**400,000.000,00**	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Kab.Pacitan**	**Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan**	**50 Kelompok**	**392.771.884,00**
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit	380.000.000,00	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		jumlah pembudidaya yang terbina	5 Unit	375.973.756,00
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Pacitan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	12 Dokumen	20,000.000,00	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	16.798.128,00

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		**Produksi produk hasil olahan perikanan**	**-**	**1,100,000,000.00**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Kab.Pacitan**	**Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan**	**1554 Ton**	**276.086.270,00**
					Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil				**20.000.000,00**
					Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko				20.000.000,00
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		**jumlah poklahsar dan UKM yang mendapatkan pembinaan**	**-**	**950,000,000,00**	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**		**Produksi produk hasil olahan perikanan**	**87 Kelompok**	**151.752.200,00**
Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kab.Pacitan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha	60 Unit Usaha	950,000,000,00	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko		jumlah poklahsar dan UKM yang mendapatkan pembinaan	142 Unit Usaha	151.752.200,00

		pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko							
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		**tersedianya dan tersalurkannya produk perikanan**	**-**	**-**	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kab.Pacitan**	**Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko**	**1554 ton**	**104.334.070,00**
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Pacitan	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1554 Ton	100.000.000,00	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		tersedianya dan tersalurkannya produk perikanan	1554 Ton	69.176.230,00

Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Pacitan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	100 Pelaku Usaha	50.000.000,00	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Pacitan	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	200 Pelaku Usaha	35.157.840,00
				10.840.000.739,00					**5,761,729,943.96**

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah				
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Dinas Perikanan						10,840,000,739.00								
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						10,840,000,739.00								
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						10,840,000,739.00								
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**>B Nilai**	**>B Nilai**	**>B Nilai**	**>B Nilai**	**3,836,000,739.00**						**>B Nilai**	**3,925,234,763.00**	
3	**25**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**23Dokumen**	**23Dokumen**	**23Dokumen**	**23 Dokumen**	**80,000,753.00**			**-**	**PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif**	**Dinas Perikanan**	**23Dokumen**	**10,049,740.00**	**DINAS PERIKANAN**

															Pelaku Ekonomi Lokal				
3	25	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	46,480,000.00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	Dinas Perikanan	12 Dokumen	3,190,270.00	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	33,520,753.00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisat	Dinas Perikanan	11 laporan	4,429,570.00	DINAS PERIKANAN

						Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									a; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal				
3	25	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
												Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						1,829,900.000	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
												Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						600,000.00	DINAS PERIKANAN

3	**25**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah**	**59 Dokumen**	**59 Dokumen**	**59 Dokumen**	**59 Dokumen**	**2,770,879,349.00**			**-**	**PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal**	**-**	**59 Dokumen**	**3,033,158,046.00**	**DINAS PERIKANAN**
3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	21 orang/bulan	21 Orang/bulan	2,765,674,349.00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	-	26 Orang/bulan	3,029,953,176.00	DINAS PERIKANAN

3	25	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	59 Laporan	59 Laporan	59 Laporan	59 Laporan	5,204,870.00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	-	59 Laporan	3,204,870.00	DINAS PERIKANAN
3	**25**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**21,000,000.00**			**-**	**PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal**	**-**	**100%**	**43,047,200.00**	**DINAS PERIKANAN**

3	25	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	59 Laporan	2 paket	2 paket	1 Paket	21,000,000.00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	-	1 paket	43,047,200.00	DINAS PERIKANAN
3	**25**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase operasional dasar perngkat daerah yang terpenuhi**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**163,189,000.00**			**-**	**PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal**	**-**	**100%**	**147,450,700.00**	**DINAS PERIKANAN**

3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 paket	11 paket	9 paket	9 paket	2,000,000.00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	-	11 paket	1,995.000.00	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	5 Paket	6 Paket	6 Paket	35,204,000.00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif	-	1 paket	24,733,200.00	DINAS PERIKANAN

															Pelaku Ekonomi Lokal				
3	25	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	12 Paket	2 Paket	2 Paket	54,360,000.00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	-	2 paket	67,295,130.00	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	5 Paket	2 Paket	2 Paket	9.305.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	-	2 paket	4,027.000.00	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material														
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2,000,000.00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	-	1 paket	1,995,400.00	DINAS PERIKANAN

3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	55,320,000.00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	-	12 Laporan	44,004,970.00	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000.00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku	-	2 Dokumen	3,400,000.00	DINAS PERIKANAN

															Ekonomi Lokal				
3	**25**	**01**	**2. 07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**-**			**-**	**PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal**	**-**	**100%**	**42,889,050.00**	
3	25	01	2. 07	00 05	Pengadaan Mebel														

						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		-	-	-	-	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	-	10 unit	21,866,850.00	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		16 Unit	28 Unit		-	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	-	16 unit	21,022,200.00	DINAS PERIKANAN

3	**25**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah yang dibutuhkan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**673,088,489.00**			**-**	**PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal**	**-**	**100%**	**614,833,100.00**	
3	25	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2,500,000.00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	-	12 laporan	1,500,040.00	DINAS PERIKANAN

3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	66,160,000.00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	-	12 laporan	53,719,060.00	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	604,428,489.00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku	-	12 laporan	559,614,000.00	DINAS PERIKANAN

															Ekonomi Lokal				
3	**25**	**01**	**2. 09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**127,843,148.00**			**-**	**PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal**	**-**	**100%**	**33,806,927.00**	
3	25	01	2. 09	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	54,000,000.00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	-	30 Unit	26,796,927.00	DINAS PERIKANAN
3	25	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
												Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					4,200,000.00	
3	25	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	2 unit	4 unit	1 Unit	73,843,148.00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	-	1 unit	2,200,000.00	DINAS PERIKANAN
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (ton)**	**12.752 ton**	**12940.45 Ton**	**12381 TON**	**12381 Ton**	**4,954,000,000.00**						**12.752 ton**	**704,000,000.00**	

3	**25**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang terjamin dan tersedia**	**12.752 ton**	**12940.45 Ton**	**12381 TON**	**12.381 Ton**	**4,150,000,000.00**			**-**	**PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal**	**-**	**12.752 ton**	**50,000,000.00**	
3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap														

						Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	1 unit	-	1 Unit	1 Unit	0,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	-		-	DINAS PERIKANAN
3	25	03	2.01	0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap														
						Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	3 unit	-	3 unit	3 unit	4,150,000,000.00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	-	4 unit	50,000,000.00	DINAS PERIKANAN

												Kel/Desa Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Tegalombo, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa							
3	**25**	**03**	**2.02**		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Nelayan Kecil yang mendapat pemberdayaan**	**3000nelayan**	**3000nelayan**	**3000nelayan**	**3.000 nelayan**	**704,000,000.00**			**-**	**PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunde**	**-**	**3000nelayan 2500orang/nelayan**	**634,000,000.00**	

															r dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal				
3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil														
						Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	2.500 Orang	3000 Orang	3000 Orang	3.000 Orang	647,000,000.00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Tegalombo, Semua Kel/Desa Kab.	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	-	3000 Orang	614,000,000.00	DINAS PERIKANAN

												Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa							
3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil														

						Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	50 Kelompok	50 Kelompok	50 Kelompok	50 Kelompok	57,000,000.00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Tegalombo, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	-	50 Kelompok	20,000,000.00	DINAS PERIKANAN

												Kel/Desa Kab. Pacitan, Tulakan, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa							
3	**25**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**-**	**5Layanan**	**5Layanan**	**5Layanan**	**5Layanan**	**100,000,000.00**			**-**	**PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunde**	**-**	**5 Layanan**	**20,000,000.00**	

															r dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal				
3	25	03	2.03	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)														
						Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		5 Layanan	5 Layanan	5 Layanan	100,000,000.00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Kebonagung, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	-	5 Layanan	20,000.000,00	DINAS PERIKANAN

												, Sudimoro, Semua Kel/Desa							
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Produksi Perikanan Budidaya (ton)**	**2755 Ton**	**1452.56 Ton**	**2499 Ton**	**2.624 Ton**	**950,000,000.00**						**2.755 Ton**	**392,000,000.00**	
3	**25**	**04**	**2.02**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Jumlah pembudidaya yang mendapatkan pemberdayaan**	**172 kelompok**	**172 kelompok**	**176 kelompok**	**176 kelompok**	**550,000,000.00**			**-**	**PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal**	**-**	**172 kelompok**	**21,000,000.00**	
3	25	04	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha														

						Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	40 Kelompok	22 Kelompok	40 Kelompok	20 Kelompok	510.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	-	40 Kelompok	-	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan														
						Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	660 orang	40orang	150orang	30 kelompok	40.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	-	150 orang	21,000,000.00	DINAS PERIKANAN

3	**25**	**04**	**2.04**		**Pengelolaan Pembudidaya an Ikan**	**Jumlah pembudiday a yang terbina**	**176 kelompo k**	**176 kelompo k**	**176 kelompok**	**176 kelompo k**	**400.000.000,00**			**-**	**PP1 - Pemuliha n Ekonomi Kerakyat an melalui Peningka tan Nilai Tambah Sektor Sekunde r dan Pariwisat a; Menjaga Ekosiste m Produktif Pelaku Ekonomi Lokal**	**-**	**176 kelompo k**	**371,385,515.00**	
3	25	04	2.04	00 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
						Jumlah Prasarana Pembudiday aan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K ota	5 paket	4 paket	4 paket	8 unit	380.000.000,00	Kab. Pacitan , Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA TRAN SFER UMU M-DANA ALOK ASI UMU M	-	PP1 - Pemuliha n Ekonomi Kerakyat an melalui Peningkat an Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisat a; Menjaga Ekosiste m Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	-	5 paket	200,000,000.00	DINA S PERIK ANAN

					Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
												Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM						38,000,000.000	DINAS PERIKANAN
					Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
												Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM						8,000,000.00	DINAS PERIKANAN
					Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

												Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					125,385,515.00	DINAS PERIKANAN
3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
						Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	4 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	4 dokumen	20.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	-	4 dokumen	-	DINAS PERIKANAN
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Produksi Olahan hasil perikanan (ton)**	**1616Ton**	**1688.38 Ton**	**1545 Ton**	**1.585 Ton**	**1,100,000,000.00**						**1.616 Ton**	**245,781,957**	

3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah poklahsar dan UKM yang mendaptkan pembinaan	97 kelompok	75 kelompok	93 kelompok	95 kelompok	950.000.000,00			-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	-	97 kelompok	125,781,957.00	
3	25	06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko														
						Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala	60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	950.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	-	60 Unit Usaha	125,781,957.00	DINAS PERIKANAN

						Usaha dan Risiko													
3	**25**	**06**	**2.03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Tersediaanya dan tersalurnya produk perikanan**	**1.616 Ton**	**1688.38 Ton**	**1554 Ton**	**1.585 Ton**	**150.000.000,00**			**-**	**PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal**	**-**	**1.616 Ton**	**120.000.000,00**	
3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
						Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.616 ton	1688.38 Ton	1554 Ton	1585 Ton	100.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisat	-	1.616 ton	120,000.000,00	DINAS PERIKANAN

															a; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal				
3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
						Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	100 pelaku usaha	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	50.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	-	100 pelaku usaha	-	DINAS PERIKANAN
J U M L A H											**10,840,000,739.00**							**5,267,402,235.000**	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
PROGRAM / KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF**	**PROGRAM / KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									**4.013.895.838**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Pacitan**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**23 dokumen**	**80,000,753.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Pacitan**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**23 dokumen**	**75.029.462**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 dokumen	46,480,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 dokumen	6.480.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	11 dokumen	33,520,753.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	11 dokumen	68.549.462
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kab. Pacitan**	**Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian**	**100%**	**21.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Pacitan**	**Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian**	**100%**	**23.362.500**
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	21.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	23.362.500

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
PROGRAM / KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF**	**PROGRAM / KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF**
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Pacitan**	**Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah**	**59 Dokumen**	**2,770,879,349.00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Pacitan**	**Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah**	**59 Dokumen**	**2.723.911.420**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pacitan	jumlah pegawai yang mendapat gaji dan tunjangan	21 orang/bulan	2,765,674,479	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pacitan	jumlah pegawai yang mendapat gaji dan tunjangan	21 orang/bulan	2.718.706.550
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Pacitan	jumlah dokumen keuangan perangkat daerah	59 laporan	5,204,870.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	Kab. Pacitan	jumlah dokumen keuangan perangkat daerah	12 laporan	5.204.870
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kab. Pacitan**	**Prosentase operasional dasar perngkat daerah yang terpenuhi**		**163,189,000.00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Pacitan**	**Prosentase operasional dasar perngkat daerah yang terpenuhi**		**150.841.500**
Penyediaan Komponen Instalasi	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 paket	2,000,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 paket	2.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	35,204,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlen gkapan Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	35.983.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	54,360,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	47.422.500
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	9,305,000.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	9.305.000

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
PROGRAM / KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF**	**PROGRAM / KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF**
Penyediaan Bahan/Material	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	2,000,000.00	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Pacitan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	2.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	55,320,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	52.031.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dokumen	5,000,000.00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Pacitan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dokumen	2.100.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kab. Pacitan**	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**0**	**0**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Pacitan**	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**100%**	**163.698.000**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pacitan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pacitan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28 unit	163.698.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Pacitan**	**Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah yang dibutuhkan**	**100%**	**673,088,489.00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Pacitan**	**Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah yang dibutuhkan**	**100%**	**674.812.818**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,500,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.600.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	12 Laporan	66,160,00.00	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	12 Laporan	64.280.600

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
PROGRAM / KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF**	**PROGRAM / KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF**
		Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Sumber Daya Air dan Listrik		Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	604,428,489	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	608.932.218
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**100%**	**127,843,148.00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**100%**	**202.240.138**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pacitan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 unit	54.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pacitan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 unit	51.050.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	73.843.148	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	151.190.138
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**Kab. Pacitan**	**Produksi Perikanan**	**12.381 Ton**	**4,945,000,000.00**	**PROGRAM PENGELOLAAN**	**Kab. Pacitan**	**Produksi Perikanan**	**12.381 Ton**	**1.351.983.000**

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
PROGRAM / KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF**	**PROGRAM / KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF**
		Kelompok Nelayan (ton)			**PERIKANAN TANGKAP**		**Kelompok Nelayan (ton)**		
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	**Kab. Pacitan**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang terjamin dan tersedia**	**3 Unit**	**510.000,000**	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota**	**Kab. Pacitan**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang terjamin dan tersedia**	**4 Unit**	**420.000.000**
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Pacitan	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan yang Tersedia	0	0	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Pacitan	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan yang Tersedia	1 unit	52.000.000
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Pacitan	Jumlah Sarana Usaha Perikanan yang Terjamin dan Tersedia	3 Unit	200.000.000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Pacitan	Jumlah Sarana Usaha Perikanan yang Terjamin dan Tersedia	3 Unit	368.000.000
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten / Kota	**Kab. Pacitan**	**Jumlah Nelayan Kecil yang mendapat pemberdayaan**	**3.000 nelayan**	**704.000.000**	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten / Kota**	**Kab. Pacitan**	**Jumlah Nelayan Kecil yang mendapat pemberdayaan**	**3.000 nelayan**	**712.258.000**
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kab. Pacitan	Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasistasnya	3.000 orang	647.000.000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kab. Pacitan	Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasistasnya	3.000 orang	638.515.500
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kab. Pacitan	Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya	50 kelompok	57.000.000	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kab. Pacitan	Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya	50 kelompok	73.742.500

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
PROGRAM / KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF**	**PROGRAM / KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF**
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	**Kab. Pacitan**	**Jumla layanan dalam rangka penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**5 layanan**	**100.000.000**	**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**Kab. Pacitan**	**Jumla layanan dalam rangka penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**5 layanan**	**219.725.000**
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kab. Pacitan	Jumlah layanan dalam rangka penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	5 layanan	100.000.000	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kab. Pacitan	Jumla layanan dalam rangka penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	5 layanan	219.725.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**Kab. Pacitan**	**Produksi Perikanan Budidaya (ton)**	**2.624 Ton**	**950.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Kab. Pacitan**	**Produksi Perikanan Budidaya (ton)**	**2.624 Ton**	**672.494.500**
Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	**Kab. Pacitan**	**Jumlah pembudidaya yang mendapatkan pemberdayaan**	**176 kelompok**	**550.000.000**	**Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil**	**Kab. Pacitan**	**Jumlah pembudidaya yang mendapatkan pemberdayaan**	**176 kelompok**	**250.494.500**
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kab. Pacitan	Jumlah kelompok usaha yang terfasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiyaan, kemitraan usahanya	20 kelompok	510.000.000	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kab. Pacitan	Jumlah kelompok usaha yang terfasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiyaan, kemitraan usahanya	20 kelompok	204.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
PROGRAM / KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF**	**PROGRAM / KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF**
Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Pacitan	Jumlah kelompok usaha yang pereroleh pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan	30 kelompok	40.000.000	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Pacitan	Jumlah kelompok usaha yang pereroleh pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan	30 kelompok	46.494.500
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**Kab. Pacitan**	**Jumlah pembudidaya yang terbina**	**176 kelompok**	**400.000.000**	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Kab. Pacitan**	**Jumlah pembudidaya yang terbina**	**176 kelompok**	**422.000.000**
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	8 unit	380.000.000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	8 unit	400.000.000
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	Jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang teruji melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	4 dokumen	20.000.000	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	Jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang teruji melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	4 dokumen	22.000.000
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	**Kab. Pacitan**	**Produksi Olahan hasil perikanan (ton)**	**1.585 Ton**	**1.100.000.000**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN**	**Kab. Pacitan**	**Produksi Olahan hasil perikanan (ton)**	**1.585 Ton**	**429.802.000**

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
PROGRAM / KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF**	**PROGRAM / KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF**
					HASIL PERIKANAN				
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	**Kab. Pacitan**	**Jumlah poklahsar dan UKM yang mendaptkan pembinaan**	**95 kelompok**	**950.000.000**	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro Kecil**	**Kab. Pacitan**	**Jumlah poklahsar dan UKM yang mendaptkan pembinaan**	**95 kelompok**	**279.802.000**
Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kab. Pacitan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha	60 unit usaha	950.000.000	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kab. Pacitan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha	60 unit usaha	279.802.000
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		**Tersediaanya dan tersalurnya produk perikanan**	**1.585 Ton**	**150.000.000**	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota**		**Tersediaanya dan tersalurnya produk perikanan**	**1.585 Ton**	**150.000.000**
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.585 ton	100.000.000	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.585 ton	100.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
PROGRAM / KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF**	**PROGRAM / KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF**
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	100 pelaku usaha	50.000.000	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pacitan	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	100 pelaku usaha	50.000.000
JUMLAH				**10,840,000,739.0**					**5.946.574.012**

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 4
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan

NO	KECAMATAN	DESA	JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	PAGU INDIKATIF	PROGRAM	KEGIATAN
1	Kebonagung	Klesem	Peningkatan sarana prasarana pengolahan (Perikanan/Kelautan)	Klesem	1 Paket	20.000.000	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	Sudimoro	Ketanggung	Sarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin, gabus)	Ketanggung	1 Paket	10.000.000	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
3	Tegalombo	Tegalombo	Sarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin, gabus)	Tegalombo	1 Paket	10.000.000	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha

4	Sudimoro	Pager Kidul	Sarana dan prasarana produksi perikanan (Jalan produksi, Saluran irigasi, perpipaan)	Pager Kidul	1 Paket	30.000.000	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
5	Arjosari	Jetis Kidul	Pelatihan / Bimbingan Teknis Usaha Perikanan Tangkap	Jetis Kidul	1 Paket	10.000.000	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
6	Kebonagung	Karangnongko	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Kabupaten Ruas 148-Karangnongko-Pantai Bakung,Kecamatan Kebonagung	Karangnogko	1 Paket	30.000.000	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
7	Pacitan	Baleharjo	Sarana dan prasarana produksi perikanan (Jalan produksi, Saluran irigasi, perpipaan)	Baleharjo	1 Paket	50.000.000	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha

8	Arjosari	Jetis Kidul	Pelatihan ketrampilan teknis pelaku UM	Jetis Kidul	1 Paket	20.000.000	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
9	Nawangan	Nawangan	Sarana dan prasarana produksi perikanan (Jalan produksi, Saluran irigasi, perpipaan)	Nawangan	1 Paket	50.000.000	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
10	Bandar	Bangunsari	Sarana Prasarana Produksi Pakan Mandiri Perikanan	Bangunsari	1 Paket	25.000.000	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
11	Punung	Tinatar	Sarana dan prasarana produksi perikanan (Jalan produksi, Saluran irigasi, perpipaan)	Tinatar	1 Paket	35.000.000	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha

12	Pacitan	Widoro	Sarana dan prasarana produksi perikanan (Jalan produksi, Saluran irigasi, perpipaan)	Widoro	1 Paket	30.000.000	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERIKANAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk membidangi urusan Kelautan dan perikanan, maka visi Kementerian Kelautan dan Perikanan ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia yaitu Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong. Sedangkan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDMKP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional.
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah

1 Peningkatan Daya Saing, Pengembangan Inovasi dan Riset KP.
2 Peningkatan Kontribusi Sektor KP terhadap Perekonomian Nasional.
3 Peningkatan Kelestarian Sumber Daya KP.
4 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :

1. Kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan meningkat.
2. Ekonomi sektor Kelautan dan Perikanan meningkat.
3. Sumberdaya kelautan dan perikanan berkelanjutan.

4. Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat.
5. Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan.
6. Tata kelola SDKP bertanggungjawab.
7. Industrialisasi KP berdaya saing.
8. Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang integrative.
9. Tata kelola pemerintahan yang baik.

Arah kebijakan sektor kelautan dan perikanan:

1. Mengoptimalkan dan memperkuat industrialisasi perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat.
2. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan.
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil.
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau – pulau kecil, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan Perikanan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERIKANAN

3.2.1 Tujuan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Visi Misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD, tugas fungsi Dinas Perikanan tercantum pada Misi ke 3 :

"Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, serta Sektor Unggulan Lainnya" .

Dengan tujuan meningkatkan daya saing perekonomian melalui pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan dan sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan. Indikator PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Maka tujuan pembangunan Perikanan Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 yaitu

"Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan"

Tujuan Dinas Perikanan sesuai dengan Visi Misi Bupati yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor perikanan. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan prosentase kenaikan pendapatan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi difokuskan untuk peningkatan produksi sektor perikanan. Produksi perikanan dalam hal ini bisa diupayakan melalui peningkatan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Serta peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan produk perikanan.

3.2.2 Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Sasaran strategis pembangunan perikanan berdasarkan tujuan yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatkan Produksi Perikanan;
2. Meningkatnya Nilai Tambah Produk Olahan Hasil Perikanan

Untuk mewujudkan visi pembangunan perikanan kabupaten Pacitan Tahun 2021 - 2026 tersebut, maka misi Dinas dan Perikanan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 - 2026 adalah :

1. Mengembangkan kawasan perikanan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Meningkatkan mutu dan pemasaran hasil olahan perikanan;
3. Memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan secara optimal dan berkelanjutan.

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah terpilih, Dinas Perikanan memiliki keterkaitan langsung dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dalam bentuk program-program pembangunan, Program dan Kegiatan Dinas Perikanan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   - 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

2.1 Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

2.2 Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota

2.3 Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

3.1 Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

3.2 Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

4.1 Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

4.2 Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan pembangunan perikanan Kabupaten Pacitan pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Perikanan merencanakan program dan kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang direncanakan sebagai berikut Program Pengelolaan Perikanan Budidaya ditunjang dengan 2 kegiatan, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan 3 kegiatan dan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan ditunjang 2 kegiatan. Pada tahun 2024 total kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perikanan sebanyak 14 kegiatan termasuk kegiatan dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota yang meliputi Perencanaan, Peganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Pengadaan Jasa Penunjang Umum Pemerintah Daerah; dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 diharapkan tidak jauh beda dengan tahun 2024 menggunakan pendanaan APBD Kabupaten Pacitan. Diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2025 indikator kinerja dapat dicapai 100 %. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 dari Dinas Perikanan sebagai berikut :

Tabel 5
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN PACITAN

Dinas Perikanan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Dinas Perikanan							5.443.575.549,00	6.468.175.338,00	7.468.588.412,00							10.840.000.739,00	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							5.443.575.549,00	6.468.175.338,00	7.468.588.412,00							10.840.000.739,00	
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							5.443.575.549,00	6.468.175.338,00	7.468.588.412,00							10.840.000.739,00	
1	**3**	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**> B Nilai**	**> B Nilai 75,95 Nilai**	**> B Nilai**	**>B Nilai**	**>B Nilai**	**3,659,575,549.00**	**4.013.895.838,00**	**4,342,377,912.00**						**>B Nilai**	**3.836.000.739**	
	3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23 Dokumen	23 Dokumen	23 Dokumen	23 Dokumen	23 Dokumen	68.480.000,00	75.029.462,00	124,982,025.00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekon	-	23 Dokumen	80.000.753,00	DINAS PERIKANAN

																		Berkualitas dan Berkeadilan	omi lokal				
	3	25	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	23 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	12 Dokumen	6.480.000,00	6.480.000,00	56,434,936.00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal		12 Dokumen	46.480.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan			11 Laporan	11 Laporan	62.000.000,00	68.549.462,00	68,547,089.00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal		11 Laporan	33.520.753	DINAS PERIKANAN

	3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	59 dokumen	59 dokumen	59 dokumen	59 dokumen	59 dokumen	2.705.189.849,00	2.723.911.420,00	2,721,184,211.00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal	-	59 dokumen	2.770.879.349,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	23 Orang/bulan	19 Orang/bulan	21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	2.699.984.979,00	2.718.706.550,00	2,716,059,842.00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal		26 Orang/bulan	2.765.674.479,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	59 Laporan	59 Laporan	12 Laporan	59 Laporan	59 Laporan	5.204.870,00	5.204.870,00	5,124,369.00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal		59 Laporan	5.204.870,00	DINAS PERIKANAN

	3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100%	0	0	100%	100 %	23.362.500,00	23.362.500,00	29,362,500.00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal	-	100%	46.423.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	1	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan														75 paket	21.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	0	0	0 0	75 Paket	23.362.500,00	23.362.500,00	29,362,500.00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal				DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	137.227.500,00	150,841,500.00	210,975,628.00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal	-	100 %	149.269.000,00	DINAS PERIKANAN

																			dan Berkea dilan					
	3	2 5	0 1	2. 0 6	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	11 Paket	9 Paket	9 Paket	2.000.000,00	2,000,000.00	1,996,128.00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal		9 Paket	2.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	2 5	0 1	2. 0 6	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		6 Paket	6 Paket	5 Paket	29.600.000,00	35,983,000.00	38,413,000.00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal		6 Paket	35.204.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	2 5	0 1	2. 0 6	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Tahun	12 Paket	2 Paket	2 Paket	47.422.500,00	47,422,500.00	66,900,000.00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal		12 Paket	54.360.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5 paket	5 Paket	2 Paket	2 Paket	9.305.000,00	9,305,000.00	11,424,500.00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal		2 Paket	9.305.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																	
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	2,000,000.00	3,998,000.00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal		1 Paket	2.000.000,00	DINAS PERIKANAN

	3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	44.800.000,00	52,031,000.00	86,174,000.00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal		12 Laporan	5.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Paket	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2.100.000,00	2,100,000.00	2,070,000.00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal		2 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	66.657.500,00	163.698.000,00	168,494,000.00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal	-	100 %	127.843.143,00	DINAS PERIKANAN

	3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	2 Unit	0	28 Unit	29 Unit	66.657.500,00	163.698.000,00	168,494,000.00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal				
	3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	666.418.200,00	674,812,818.00	686,666,968.00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal	-	100 %	687.008.489,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.600.000,00	1,600,000.00	2,125,000.00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal		12 Laporan	2.500.000,00	DINAS PERIKANAN

	3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	60.380.600,00	64,280,600.00	58,277,412.00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal		12 Laporan	66.160.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	604.437.600,00	608,932,218.00	626,264,556.00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal		12 Laporan	618.348.489,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100 %	80%	100 %	100 %	52.240.000,00	202,240,138.00	400,712,580.00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal	-	100 %	127.843.148,00	DINAS PERIKANAN

	3	25	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	51.050.000,00	51,050,000.00	51,525,000.00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal		30 Unit	54.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	20 hari	2 Unit	4 Unit	4 Unit	1.190.000,00	151,190,138.00	349,187,580.00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal		1 unit	73.843.148,,00	DINAS PERIKANAN
2	**3**	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Produksi perikanan kelompok nelayan**	**12.752 ton**	**8.874,35 ton**	**11.670 ton**	**12.020 Ton**	**12.020 Ton**	**1.074.000.000,00**	**1.351.983.000,00**	**1,623,914,000.00**						**12.752 ton**	**4.954.000.000,00**	
	3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	4 paket	3 Paket	11.670 ton	4 Unit	4 Unit	250.000.000,00	420.000.000,00	615,000,000.00			-	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekon	-	4 paket	4.150.000.000,00	DINAS PERIKANAN

						Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota												omi lokal				
	3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap																	
							Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	0	0	0	1 Unit	1 Unit	0,00	52.000.000,00	77.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal				
	3	25	03	2.01	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																	
							Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	3 Paket	3 Paket	96.000 ekor	3 Unit	3 Unit	250.000.000,00	368.000.000,00	538.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal		3 paket	4.150.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah nelayan kecil yang mendapatkan pemberdayaan	4.000 nelayan	4000 nelayan	4000 nelayan	3.000 nelayan	3000 nelayan	624.000.000,00	712.258.000,00	744,189,000.00			-	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal	-	3.000 nelayan	704.000.000.00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																	

							Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	975 Orang	0	100 orang	3.000 Orang	3000 Orang	608.583.500,00	638.515.500,00	638.515.500,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal		975 Orang	647.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil																	
							Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	114 Kelompok	40 Kelompok	100 orang	50 Kelompok	50 Kelompok	15.416.500,00	73.742.500,00	105.673.500,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal		114 Kelompok	57,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	6 TPI	5 TPI	6 TPI	6 TPI	6 TPI	200.000.000,00	219.725.000,00	264,725,000.00			-	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal	-	5 TPI	100,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3	25	03	2.03	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)																	
							Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	6 Layanan	5 TPI	6 Layanan	6 Layanan	6 Layanan	200.000.000,00	219.725.000,00	264.725.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	-	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal		5 Layanan	100,000,000.00	DINAS PERIKANAN

																Kel/Desa	Umum						
3	**3**	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Produksi perikanan budidaya**	**2.755 Ton**	**1.647,18 ton**	**2.380 ton**	**2.499 ton**	**2499 Ton**	**400.000.000,00**	**672.494.500,00**	**922,494,500.00**						**2.755 Ton**	**950,000,000.00**	
	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	jumlah pembudidaya yang mendapat pemberdayaan	176 kelompok	40 Kelompok	176 kelompok	50 Kelompok	50 Kelompok	110.000.000,00	250.494.500,00	340,494,500.00			-	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal	-	176 kelompok	550,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha																	
							Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	200 kelompok	40 Kelompok	30 Kelompok	20 Kelompok	20 Kelompok	90.000.000,00	204.000.000,00	294,000,000.00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal		200 kelompok	510,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																	

							Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	660 orang	60 orang	30 Kelompok	30 Kelompok	30 Kelompok	20.000.000,00	46.494.500,00	46,494,500.00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal		660 orang	40,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	jumlah pembudidaya yang terbina	176 kelompok	40 Kelompok	176 kelompok	50 Kelompok	50 Kelompok	290.000.000,00	422.000.000,00	582,000,000.00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal	-	176 kelompok	400,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25 unit	5 Paket	2 Unit	8 Unit	5 Unit	275.000.000,00	400.000.000,00	560,000,000.00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal		25 unit	380,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	

							Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	4 Dokumen	4 Paket	12 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000,00	22.000.000,00	22,000,000.00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal		4 Dokumen	20,000,000.00	DINAS PERIKANAN
4	**3**	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Produksi produk hasil olahan perikanan**	**1.616 ton**	**1.123,97 ton**	**1.523 ton**	**1.554 ton**	**1554 Ton**	**250.000.000,00**	**429.802.000,00**	**579,802,000.00**						**1.616 ton**	**1.100,000,000.00**	
	3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	jumlah poklahsar dan UKM yang mendapatkan pembinaan	97 kelompok	87 Kelompok	76 kelompok	87 Kelompok	87 Kelompok	100.000.000,00	279.802.000,00	379,802,000.00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal	-	97 kelompok	950,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3	25	06	2.02	0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil																	

							Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	60 Unit Usaha	76 0rang	40 Unit Usaha	60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	100.000.000,00	279.802.000,00	379,802,000.00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal		60 Unit Usaha	950,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya dan tersalurkannya produk perikanan	1.616 ton	1.123,97 ton	1.523 ton	1554 ton	1554 ton	150.000.000,00	150.000.000,00	200,000,000.00			-	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal	-	1.616 ton	150,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.616 ton	2 kegiatan	1.523 ton	1554 Ton	1554 Ton	100.000.000,00	100.000.000,00	123,000,000.00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal		1.616 ton	100,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	

							Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	100 Pelaku Usaha	2 UPI	40 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	50.000.000,00	50.000.000,00	77,000,000.00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Menjaga ekosistem produktif pelaku ekonomi lokal		100 Pelaku Usaha	50,000,000.00	DINAS PERIKANAN
	JUMLAH													**5.443.575.549,00**	**6.468.175.338,00**	**7.468.588.412,00**							**10.840.000.739,00**	

BAB V
PENUTUP

Dalam rangka penjabaran rencana kerja lima tahunan disusunlah rencana kerja (Renja) Perubahan tahunan Dinas Perikanan Tahun 2025, Renja ini memuat evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Perencanaan dalam Renja Perubahan Tahun 2025 difokuskan pada pencapaian indikator kinerja Dinas Perikanan dengan target utama peningkatan produksi perikanan dan peningkatan nilai tambah hasil perikanan. Program dan kegiatan disesuaikan dengan kemampuan anggaran, dinamika situasi, kondisi kebutuhan terkini dan potensi wilayah. Perencanaan tahunan ini akan ditindaklanjuti dengan evaluasi pencapaian indikator kinerja dan perencanaan kegiatan selanjutnya apabila masih diperlukan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 harapannya pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat di Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan akan lebih optimal.

Pacitan, Juli 2025

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PACITAN,

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN DINAS PERIKANAN

BAMBANG MARHAENDRAWAN, S.Pt, M.M
Pembina Tingkat I
NIP 19680920 199901 1 001

Renja Perubahan

Tahun 2025

Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pacitan

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan WR. Supratman No. 20A Telephon 884535
P A C I T A N

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 500.13/ 585 / 408.35/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH
PADA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025

KEPALA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PACITAN

Menimbang :

a. Bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun 2025

Mengingat :

1. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksuud dalam diktum **"KESATU"** Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Mengumpulkan data dan informasi;
b. Menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai tahapan dan tata cara yang terdiri dari :
   1) Rancangan dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024
   2) Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025; dan
   3) Rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026
c. Melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 21 - 07 - 2025

KEPALA DINAS PARIWISATA
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PACITAN

TURMUDI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670325 199003 1 008

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
NOMOR : 500.13/ 585 /408.35/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH PADA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERUBAHAN
PERANGKAT DAERAH PADA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Turmudi, S.Sos, M.Si	Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	Basuki Rachmad, SP, M.Sc	Sekretaris Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan
3.	Sekretaris	Yuyun Wahyu Setyawati. S.Sos	Perencana Ahli Muda Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan
4.	Anggota	a. Dona Cahyanti, S.M	Perencana Ahli Pertama Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan
		b. Bagas Bangkit Sanjaya, A.Md	Pranata Komputer Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan
		c. Bayu Renggar Pamungkas. A.Md	Tenaga Non ASN

KEPALA DINAS PARIWISATA
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PACITAN

TURMUDI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670325 199003 1008

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN

PEMUDA DAN OLAHRAGA

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KEPALA DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PACITAN
Nomor : 500.13 / 586 / 408.35 / 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

KEPALA DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PACITAN

KEPALA DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PACITAN

Menimbang :

a. Bahwa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Perubahan merupakan Dokumen Perencanaan selama periode 1 (satu) tahun;

b. bahwa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan disusun sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun 2025 bertujuan untuk

menjamin adanya konsistensi perencanaan program dan kegiatan selama periode 1 (satu) tahun.

KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun 2025 sebagaimana Diktum Pertama merupakan landasan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan.

KETIGA : Rencana Kerja Perubahan (Renja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Periode 1 (satu) Tahun yang akan menjadi Pedoman dalam Pelaksanaan Program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan.

KEEMPAT : Rencana Kerja (Renja Perubahan) Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 21 Juli 2025

Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pacitan

TURMUDI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670325 199003 1 008

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat-Nya, Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan dapat tersusun dengan baik.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan ini dibuat berisi Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2025 sebagai rencana kerja atau pedoman dalam pembuatan usulan program dan Kegiatan Dinas yang sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi serta sebagai media peningkatan akuntabilitas instansi yang dapat dipakai sebagai umpan balik dalam peningkatan kinerja maupun bagi pengambil keputusan.

Dengan segala keterbatasan, kami dengan senang hati menerima masukan dan saran yang membangun guna perbaikan kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan di mana Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak atas sumbangan pemikiran serta bantuan moril dan materiil.

Demikian semoga Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi instansi kami dan pihak terkait.

Pacitan, Juli 2025
KEPALA DINAS PARIWISATA,
KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PACITAN

TURMUDI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670325 199003 1 008

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan serta pelaksanaan Pembangunan dalam suatu Daerah dibutuhkan suatu perencanaan yang berupa Rencana Kinerja dan Rencana Kinerja Perubahan dengan kata lain perencanaan adalah suatu kegiatan mempunyai kedudukan atau peran yang paling penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat seperti yang tertuang dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP),Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencaan wilayah diatasnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP, RPJM dan RKPD. Oleh karena itu, SKPD sebagai stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan SKPD, kemudian di terjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD dan Rencana Kinerja Perubahan . Hal ini mengacu pada UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD,yang disusun dengan berpedoman

kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan melakukan penyusunan Kerja (RENJA) tahun 2025.

Rancangan Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pasal 10 dinyatakan bahwa Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud, Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

Perencanaan Strategis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga disusun berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5059;)
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
12. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Presiden Indonesian Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
24. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuata dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaandan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
31. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuata dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten PacitanTahun 2005-2025;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
45. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Pacitan.
46. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No. 9 Tahun 2007 tentang Usaha Pariwisata.
47. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No. 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Rekreasi dan Olahraga

48. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan.
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
50. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja (Renja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun 2025 disusun dengan maksud sebagai berikut :

a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun 2025.
b. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2025.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Renja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan pada tahun 2025 dengan tetap memperhatikan RKPD.
b. Renja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan tahun 2025 yang mengacu pada Renstra dan RKPD.

1.4. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun 2025, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPARPORA TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024 dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun 2025.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD dan lampiran tabel telaahan terhadap rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD, berisikan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja Sesuai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan

4.1. RKPD Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun berjalan

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPARBUDPORA TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPARBUDPORA TAHUN 2024 DAN CAPAIAN RENSTRA DISPARBUDPORA

Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan selama tahun 2024

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2024 Sampai dengan Triwulan IV

Pada Tahun 2024 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan OLahraga Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan menerima anggaran sesudah PAK tahun 2024 sebesar Rp. 30,531,498,584,- setelah Perubahan Anggaran Kinerja (PAK) yang dialokasikan untuk pelaksanaan 12 program 21 kegiatan dengan Sub Kegiatan sebanyak 46 sub, serta target PAD PAK Sebesar Rp. 10.971.644.800,- dengan capaian PAD Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kebupaten Pacitan Tahun 2024 dapat kita dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 2.1
TABEL PENDAPATAN ASLI DAERAH
DINAS PARBUDPORA KAB PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Uraian	Target PAK	Realisasi	Presentase %
1	Kontribusi PAD dari Sektor Pariwisata	10.971.644.800,-	8.587.629.500,-	78%

Tabel 2.2
ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2024
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2024

Program Kegiatan	Anggaran Awal (Rp.)	Anggaran PAK (Rp.)
(1)	(2)	(3)
1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	58.000.000,-	58.000.000,-
1. Perencanaan, Pengenggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.058.999.096,-	4.026.721.840,-
2. Adminsitrasi Keuangan	514.180.810,-	561.745.205,-
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah		
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	270.891.365,-	281.047.349,-
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.192.676.170,-	1.304.310.960,-
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	213.258.050,-	228.859.755,-
2. Program pemasaran Pariwisata		
Kegiatan :		
1. Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri, Dayatarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Pacitan	808.349.975,-	1.383.349.975,-
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif		
Kegiatan :		
1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	2.382.517.500,-	2.500.517.500,-
4. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		
Kegiatan :		
1. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	362.500.000,-	2.112.500.000,-
2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata kabupaten/kota	6.809.626.000,-	7.569.426.000,-
3. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota	1.282.800.000,-	1.123.000.000,-
5. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		
Kegiatan :		
1. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	525.000.000,-	700.000.000,-
6. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan		
1. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	350.000.000,00,-	400.000.000,-

7.	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan** Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Kejuaraan Olah Raga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Propinsi 3. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	745.000.000,- 1.800.000.000,- 455.000.000,-	300.000.000,- 1.760.000.000,- 695.000.000,-
8	**Program Pengembangan Kebudayaan** Kegiatan : 1. Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	1.625.000.000,-	2.245.000.000,-
9	**Program Pengembangan Kesenian Tradisional** Kegiatan : 1. Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	100.000.000,-	463.320.000,-
10	**Program Pembinaan Sejarah** Kegiatan : 1. Pembinaan sejarah lokal dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota	230.000.000,-	468.700.000,-
11	**Program Pelestarian dan Pengelolaan cagar Budaya** Kegiatan : 1. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota	200.000.000,-	200.000.000,-
12	**Program Pengelolaan Permuseuman** Kegiatan : 1. Pengelolaan museum kabupaten/kota	100.000.000,-	100.000.000,-
	Jumlah Anggaran PAK	**24.083.798.966,-**	**30.531.498.584,-**

Dari tabel di atas hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan sampai dengan Semester II Tahun 2024 telah melaksanakan kegiatan baik penerimaan PAD maupun melaksanakan kegiatan sesuai dengan progam dan Kegiatan yang ada di Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan.

Selain evaluasi dalam bentuk penyerapan anggaran dan realisasi fisik berbentuk output pada tahun 2024 maka perlu dicermati kembali hasil evaluasi pelaksanaan RENJA tahun 2025 berdasarkan pada outcome setiap program berdasarkan formulir evaluasi pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

REKAPITULASI EVALUASI APBD KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PERIODE : DESEMBER

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
-1				-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9
219	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Jumlah Pemuda Pelopor dan Berprestasi**	**Orang**	**180**	**700.000.000,00**	**181**	**699.749.640,00**	**100.56%**	**99.96%**
219	**2**	**2.02**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten Yang Dibina**	**Organisasi**	**8**	**700.000.000,00**	**8**	**699.749.640,00**	**100%**	**99.96%**
219	2	2.02	2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen	1	700.000.000,00	1	699.749.640,00	100%	99.96%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	99,96
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											100,00	99,96
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
219	**3**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Prosentase Cabang Olah Raga yang mendapatkan Prestasi**	**%**	**67**	**4.805.000.000,00**	**71**	**4.795.581.902,00**	**105.97%**	**99.80%**
219	**3**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyelenggaraan**	**Kegiatan**	**4**	**1.760.000.000,00**	**4**	**1.758.813.936,00**	**100%**	**99.93%**

					Kejuaraan Tingkat Kabupaten							
219	3	2.02	3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Orang	200	1.760.000.000,00	200	1.758.813.936,00	100%	99.93%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	99,93
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
219	**3**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah Olah raga Prestasi Tingkat Daerah Yang Dibina**	**Cabor**	**20**	**2.350.000.000,00**	**20**	**2.343.579.898,00**	**100%**	**99.73%**
219	3	2.03	3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	Orang	125	2.350.000.000,00	125	2.343.579.898,00	100%	99.73%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	99,73
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
219	**3**	**2.05**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Olah Raga Yang Terpelihara**	**Kegiatan**	**3**	**695.000.000,00**	**3**	**693.188.068,00**	**100%**	**99.74%**
219	3	2.05	3	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi yang memadai	Kegiatan	1	695.000.000,00	1	693.188.068,00	100%	99.74%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	99,74
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
219	**4**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase Peningkatan Event / Kegiatan Kepramukaan**	**%**	**40**	**400.000.000,00**	**45**	**399.999.950,00**	**112.50%**	**100%**
219	**4**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat**	**Kegiatan**	**1**	**400.000.000,00**	**1**	**399.999.950,00**	**100%**	**100%**

					Kabupaten Yang Dibina							
219	4	2.01	5	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Laporan	1	400.000.000,00	1	399.999.950,00	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	100,00
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											100,00	100,00
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
222	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase penyelenggaraan festival budaya yang difasilitasi**	**%**	**70**	**2.245.000.000,00**	**76**	**2.236.804.725,00**	**108.57%**	**99.63%**
222	**2**	**2.02**		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Pagelaran Kesenian Tradisional Kabupaten**	**Kali**	**8**	**2.245.000.000,00**	**8**	**2.236.804.725,00**	**100%**	**99.63%**
222	2	2.02	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	7	2.245.000.000,00	7	2.236.804.725,00	100%	99.63%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	99,63
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											100,00	99,63
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
222	**3**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Persentase Peningkatan Kreativitas Pengembangan Kesenian Tradisional**	**%**	**91**	**463.320.000,00**	**95**	**461.323.400,00**	**104.40%**	**99.57%**

222	**3**	**2.01**		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksannya Pembinaan Pelaku Kesenian Tradisional Kabupaten**	**Orang**	**80**	**463.320.000,00**	**80**	**461.323.400,00**	**100%**	**99.57%**
222	3	2.01	1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang	45	463.320.000,00	45	461.323.400,00	100%	99.57%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	99,57
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											100,00	99,57
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
222	**4**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Prosentase Peningkatan Pembinaan SDM Pelestari Sejarah Lokal**	**%**	**55**	**468.700.000,00**	**57**	**461.782.211,00**	**103.64%**	**98.52%**
222	**4**	**2.01**		**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pelestarian Sejarah Lokal Kabupaten**	**Kegiatan**	**3**	**468.700.000,00**	**3**	**461.782.211,00**	**100%**	**98.52%**
222	4	2.01	2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Unit	2	468.700.000,00	2	461.782.211,00	100%	98.52%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	98,52
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											100,00	98,52
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
222	**5**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase Pemeliharaan**	**%**	**68**	**200.000.000,00**	**68**	**190.812.500,00**	**100%**	**95.41%**

					BendaSitus dan Kawasan Cagar Budaya							
222	**5**	**2.01**		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Terpeliharanya Cagar Budaya Kabupaten**	**Kegiatan**	**5**	**200.000.000,00**	**5**	**190.812.500,00**	**100%**	**95.41%**
222	5	2.01	2	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	13	200.000.000,00	13	190.812.500,00	100%	95.41%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	95,41
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											100,00	95,41
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
222	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Prosentase Peningkatan Pemeliharaan Benda Museum Kabupaten**	**%**	**71**	**100.000.000,00**	**94**	**90.735.500,00**	**132.39%**	**90.74%**
222	**6**	**2.01**		**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pemeliharaan Museum Kabupaten**	**Kegiatan**	**1**	**100.000.000,00**	**1**	**90.735.500,00**	**100%**	**90.74%**
222	6	2.01	4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	1	100.000.000,00	1	90.735.500,00	100%	90.74%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	90,74
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											100,00	90,74
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
326	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**	**Satuan**	**77.3**	**6.460.685.109,00**	**73**	**5.959.434.128,00**	**94.44%**	**92.24%**
326	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan**	**Dokumen**	**23**	**58.000.000,00**	**23**	**57.027.800,00**	**100%**	**98.32%**

326	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	23.000.000,00	6	22.934.900,00	100%	99.72%
			2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	12.000.000,00	2	11.703.000,00	100%	97.53%
			7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	15	23.000.000,00	15	22.389.900,00	100%	97.35%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	98,20
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
326	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**59**	**4.026.721.840,00**	**59**	**3.761.966.381,00**	**100%**	**93.43%**
326	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	41	4.001.721.840,00	41	3.738.232.781,00	100%	93.42%
			3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	5.000.000,00	12	4.811.900,00	100%	96.24%
			4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	5.500.000,00	12	5.219.000,00	100%	94.89%
			5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7.500.000,00	1	6.918.000,00	100%	92.24%
			6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2	7.000.000,00	2	6.784.700,00	100%	96.92%

										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	100,00	94,74
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
326	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pemenuhan Belanja Barang/Jasa Modal dan Belanja Lainnya**	**%**	**100**	**561.745.205,00**	**100**	**556.013.656,00**	**100%**	**98.98%**
326	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	26.574.510,00	2	26.040.600,00	100%	97.99%
			2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	57.835.225,00	2	56.450.715,00	100%	97.61%
			3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	18.166.260,00	1	17.630.561,00	100%	97.05%
			4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	78.191.730,00	12	77.302.780,00	100%	98.86%
			5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	176.110.180,00	12	174.271.295,00	100%	98.96%
			9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	204.867.300,00	12	204.317.705,00	100%	99.73%
										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	100,00	98,37
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
326	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pemenuhan Kebutuhan Kantor**	**%**	**100**	**281.047.349,00**	**100**	**269.560.330,00**	**100%**	**95.91%**
326	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan	Unit	5	242.365.775,00	5	231.135.300,00	100%	95.37%

					Mesin Lainnya yang Disediakan							
			11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	7	38.681.574,00	7	38.425.030,00	100%	99.34%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	97,36
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
326	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor**	**%**	**100**	**1.304.310.960,00**	**100**	**1.092.394.949,00**	**100%**	**83.75%**
326	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	111.788.110,00	12	111.172.599,00	100%	99.45%
			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	406.402.706,00	12	363.801.350,00	100%	89.52%
			3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	6	17.944.000,00	6	17.360.400,00	100%	96.75%
			4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	768.176.144,00	12	600.060.600,00	100%	78.11%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	90,96
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
326	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pemenuhan Pemeliharaan Kantor**	**%**	**80**	**228.859.755,00**	**80**	**222.471.012,00**	**100%**	**97.21%**
326	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Unit	35	113.200.408,00	35	112.481.912,00	100%	99.37%

				Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							
			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	15.350.000,00	11	11.310.100,00	100%	73.68%
			6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	9	100.309.347,00	6	98.679.000,00	66.67%	98.37%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											88,89	90,47
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Tinggi	Sangat Tinggi
326	**2**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase Pengelolaan Destinasi Wisata**	**%**	**78**	**10.804.926.000,00**	**90**	**10.246.272.690,30**	**115.38%**	**94.83%**
326	**2**	**2.02**		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Destinasi**	**DTW**	**10**	**2.112.500.000,00**	**10**	**2.087.480.291,30**	**100%**	**98.82%**
326	2	2.02	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Unit	9	2.112.500.000,00	9	2.087.480.291,30	100%	98.82%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	98,82
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
326	**2**	**2.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Sarana dan Prasarana Pariwisata Yang Ditingkatkan**	**DTW**	**3**	**7.569.426.000,00**	**3**	**7.134.032.689,00**	**100%**	**94.25%**
326	2	2.03	3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan	Lokasi	3	7.569.426.000,00	3	7.134.032.689,00	100%	94.25%

					Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)							
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	94,25
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
326	**2**	**2.04**		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pembinaan Pelaku Industri dan Usaha Pariwisata**	**Orang**	**250**	**1.123.000.000,00**	**250**	**1.024.759.710,00**	**100%**	**91.25%**
326	2	2.04	11	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	Laporan	6	1.123.000.000,00	6	1.024.759.710,00	100%	91.25%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	91,25
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
326	**3**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase Peningkatan Jumlah Wisata**	**%**	**37**	**1.383.349.975,00**	**27**	**1.311.336.350,00**	**72.97%**	**94.79%**
326	**3**	**2.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Obyek Pariwisata yang dipasarkan**	**DTW**	**38**	**1.383.349.975,00**	**38**	**1.311.336.350,00**	**100%**	**94.79%**
326	3	2.01	3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	3	275.000.000,00	3	204.649.200,00	100%	74.42%
			4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	2	8.349.975,00	2	7.722.000,00	100%	92.48%

			7	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	4	1.100.000.000,00	4	1.098.965.150,00	100%	99.91%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	88,94
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Tinggi
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											100,00	94,79
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
326	**5**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase Peningkatan Event Pariwisata dan Ekraf Yang diselenggarakan**	**%**	**37**	**2.500.517.500,00**	**45**	**2.384.644.017,00**	**121.62%**	**95.37%**
326	**5**	**2.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Jumlah SDM Pelaku Pariwisata Yang Dibina**	**Orang**	**365**	**2.500.517.500,00**	**365**	**2.384.644.017,00**	**100%**	**95.37%**
326	5	2.01	5	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan	1	87.500.000,00	2	85.294.400,00	200%	97.48%
			6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Orang	450	2.413.017.500,00	450	2.299.349.617,00	100%	95.29%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											150,00	96,39
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											100,00	95,37
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Rata-rata capaian kinerja seluruh program(%)			106,04	96,74
Predikat kinerja seluruh program(%)			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Total	**30.531.498.584,00**	**29.238.477.013,30**		
Persentase Realisasi Anggaran		**95.76%**		
Predikat		**Sangat Tinggi**		

C. Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2025

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran PAK tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp. 23.981.424.391,- terurai dalam 12 program dan 20 kegiatan,dengan 42 sub kegiatan diestimasikan capaian kinerja fisik dan keuangan mencapai 100%, dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi anggaran.

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 maupun perkiraan capaian tahun 2025, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

a. Besarnya keinginan masyarakat terhadap pembangunan di Kabupaten Pacitan tidak diiringi dengan peningkatan pembiayaan, sehingga pencapaian pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan perlu dilakukan bertahap dengan pembagian yang proporsional di antara SKPD;
b. Koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan antara pemerintah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat masih mengalami keterlambatan;
c. Sebagian besar usulan program/kegiatan yang diinventarisasi tidak sesuai dengan rencana program/kegiatan yang telah dicanangkan pada RENJA maupun RENSTRA SKPD.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kabupaten Pacitan tahun 2021 – 2026, maka pada tahun 2025 Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan menyusun strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia bagi Aparat Perencana dan teknis, dengan arah kebijakan :
   - Pendidikan Formal, Informal dan Pelatihan teknologi infromasi maupun media instansi;
2. Meningkatkan dan mengembangkan mekanisme perencana dan pelaksana tekhnis serta pelaksanaan pembangunan, dengan arah kebijakan:
   - Pelibatan stakeholder dalam proses Perencana dan Kebijaksanaan Politik.
   - Meningkatkan peran dokumen RENJA SKPD dalam perumusan pembiayaan pembangunan.
3. Meningkatkan Konsultasi dan Konfirmasi Program Pembangunan secara terpadu, dengan arah kebijakan:
   - Meningkatkan Sinkronisasi, Konsultasi dan Koordinasi di Instansi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan secara periodik dalam mendukung percepatan penyerapan anggaran, baik yang bersumber APBD murni maupun Bantuan Provinsi Jawa Timur;

- Pemutakhiran data dan informasi untuk pembangunan yang cepat, tepat dan akurat khususnya dalam mendukung capaian indikator program prioritas Kabupaten Pacitan dalam RPJMD serta RKPD;
- Pembangunan data base perencana, evaluasi dan pembiayaan baik yang dengan sistem yang eksisting di SKPD pemerintah Kabupaten Pacitan maupun sistem yang dimiliki pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Keberhasilan suatu pembangunan tidak lepas dari perencanaan hal ini dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten antara lain kebijakan perencanaan yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal sebagai proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Meskipun sistem Musrenbang telah dikembangkan lebih baik, dalam rangka menerpadukan perencanaan pembangunan nasioanal dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten masih belum optimal.

Melihat kondisi tersebut di atas Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan selaku Dinas Tekhnis mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Berikut kami sajikan tabel keterkaitan antara visi, misi tujuan dan sasaran renstra tahun 2021-2026 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan.

TABEL. 2.2.1

KETERIKATAN (INTERELASI) VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah pelayanan Perangkat Daerah (MATRIKS RENSTRA)

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	TAHUN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		2022	2023	2024	2025	2026
1	Terselenggaranya tata kelola dibidang Kebudayaan, Pariwisata, kepemudaan dan olah raga	Meningkatnya Pelayanan PD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Hasil Nilai IKM Perangkat Daerah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	75	76	77,08	78	78, 50
2.	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	Jumlah Kunjungan Wisata	Meningkatnya Sarana dan prasarana Pariwisata dan usaha disektor pariwisata	1. Lenght of Stay 2. % Peningkatan Desa Wisata dan POKDARWIS	Lama Hari Tinggal Wisatawan yang beraktifitas di DTW Kab.Pacitan berdasarkan Survey/ Pengamatan $\frac{\text{Jumlah Desa Wisata yang mendapat SK Bupati}}{\text{Jumlah Potensi Desa Wisata yang ada}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah POKDARWIS yang mendapatkan SK dari Kadis}}{\text{Jumlah Potensi POKDARWIS yang ada}} \times 100\%$	1,2 hari 40 %	1,3 hari 45 %	1,3 hari 57%	1,4 hari 57%	1,5 hari 58%

					❖ Dari hasil ke 2 perhitungan tersebut di bagi 2=….%					
3.	Meningkatkan pelestarian nilai seni, budaya dan sejarah serta Prestasi Pemuda dan Olah Raga	Prosentase Peningkatan SDM Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatnya Pelestarian Nilai Seni, Budaya dan sejarah	Prosentase Peningkatan pagelaran seni dan budaya yang diselenggarakan	Jumlah Pegelaran seni yang diselenggarakan tahun ini – Tahan Kemarin: Tahun kemarin x 100	45 %	47 %	59%	60%	60%
			Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam event kepemudaan dan Olah Raga	Prosentase peningkatan keikutsertaan pemuda dalam event kepemudaan	Jumlah Event Pemuda pemuda yang di ikuti/ selenggarakan tahun ini-Jumlah event Pemuda Tahun Kemarin: Jumlah Event tahun kemarin x 100	20 %	25 %	37%	45%	50%
				Prosentase peningkatan keikutsertaan Atlet dalam Event Keolahragaan	Jumlah event Olahraga yang diikuti tahun ini- tahun kemarin : Tahun kemarin x 100	55 %	60 %	63%	63%	63,5%

Tabel Capaian Kinerja Disparpora
Tahun 2017 s/d 2024

Urusan Pariwisata

No	Indikator	Capaian Kinerja								
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Jumlah Kunjungan Wisata	1.750.537	1.659.731	2.305.119	860.397	834.419	1.566.186	1.306.817	1.144.302	Turun
2.	Konstribusi PAD dari Sektor Pariwisata	9.985.077.500	8.707.909.000	1.305.9630.000	5.278.178.000	4.835.091.000	11.254.475.000	9.163.025.700	8.587.629.500	Turun
3.	Prosentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	30 %	44,8 %	71.71	32,47	27,8	87,6	37%	27%	Turun
4.	Prosentase Pengelolaan Destinasi Wisata di Kabupaten Pacitan	46 %	81 %	63	63	63	67	78%	90%	Tercapai

Urusan Pemuda dan Olahraga

No	Indikator	Capaian Kinerja								Ket
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Jumlah Organsasi Olahraga	25	27	27	27	28	28	28	29	Naik
2.	Jumlah Kegiatan Olahraga	32	33	33	32	34	36	36	60	Naik
3.	Jumlah Gelanggang/balai remaja selain milik swasta	186	186	187	188	190	190	190	190	Tetap
4.	jumlah Lapangan Olah Raga	175	175	176	177	181	181	181	182	Tetap
5	Prosentase Cabang Olahraga yang berprestasi	62	68	66	64,28	67	67.8	67	71	Nalk

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi serta Strategi dan Kebijakan Pemerintah Daerah

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

1. **Permasalahan Bidang Pengembangan Pariwisata**

   Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang pengembangan adalah sebagai berikut :

   a. Pengembangan fasilitas destinasi pariwisata masih belum optimal.
   b. Sarana dan prasarana pendukung pariwisata seperti akses jalan menuju destinasi dan amenitas belum memadai.
   c. Beberapa obyek dan daya tarik wisata masih belum terjangkau oleh sarana telekomunikasi.
   d. Pembinaan pelaku pariwisata belum maksimal terutama dalam hal Sapta Pesona, Pelayanan Prima maupun Kesadaran terhadap Pelestarian Lingkungan
   e. Minimnya sarana dan prasarana di obyek dan daya tarik wisata.

2. **Permasalahan Bidang Pengembangan SDM dan Pemasaran Pariwisata**

   Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang promosi adalah sebagai berikut :

   a. Minimnya fasilitas website sebagai media promosi.
   b. Minimnya sarana penunjang promosi seperti leaflet dan booklet
   c. Kurangnya promosi melalui media cetak dan media elektronik.
   d. Kurangnya pameran produksi unggulan dan obyek daya tarik wisata ke luar daerah.
   e. Rendahnya Sumber Daya Manusia di bidang promosi, disamping juga rendahnya penguasaan di bidang Teknologi Informasi.
   f. Kemitraan antar pemangku kepentingan dalam melakukan pemasaran dan promosi belum optimal.
   g. Kurangnya tenaga pemandu wisata yang bersertifikasi.
   h. Masih rendahnya SDM Pelaku Wisata yang ada di Kabupaten Pacitan
   i. Penataan PKL yang belum maksimal. Masih Kurang minat dari masyarakat untuk membentuk Desa Wisata
   j. Belum Optimalnya peranserta POKDARWIS dalam pembangunan kepariwisataan.
   k. Belum tertanam jiwa SAPTA PESONA para pelaku wisata di Kabupaten Pacitan

3. Permasalahan Bidang Kebudayaan

1. Masih Banyak terdapat situs/Cagar budaya yang belum terpelihara
2. Pelestarian Budaya yang kurang maksimal
3. Kurangnya pembinaan pelaku Seni

4. Permasalahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang pemuda adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya kualitas pemuda, baik dari sisi rendahya pendidikan dan ketrampilan hidup maupun tingginya tingkat pengangguran usia produktif.
2. Terbatasnya penyelenggaraan kegitan guna peningkatan peran serta kepemudaan.
3. Koordinasi antar organisasi pemuda dan pemberdayaan organisasi pemuda belum maksimal.
4. Pendataan organisasi kepemudaan masih terbatas.
5. Belum memadainya sarana dan prasarana bagi pemuda untuk mengembangkan bakat, minat dalam berkreasi dan berprestasi.

5. Permasalahan Bidang Olahraga

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang olahraga adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olah Raga yang dilakukan oleh Bidang Olah Raga masih belum maksimal.
2. Pemeliharaan sarana dan prasarana Olah Raga sering berbenturan dengan berbagai pihak, terkesan diabaikan.
3. Perijinan sarana dan prasarana Olah Raga belum bisa dilaksanakan secara maksimal oleh karena masih ditangani oleh Kantor Pelayanan dan Perijinan Kabupaten Pacitan.
4. Pembinaan Olah Raga Prestasi dan Olah Raga Masyarakat kurang maksimal karena kurang proaktifnya Cabang Olahraga dalam pembinaan dan pelaporan kegiatannya.
5. Terbatasnya pendanaan dari pemerintah daerah dan masyarakat yang mengakibatkan keikutsertaan olahragawan dalam kejuaran di tingkat daerah maupun regional sangat kurang sehingga berakibat kurangnya pengalaman, fisik, mental, teknik dan taktik bertanding dibanding olahragawan di daerah lain.
6. Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar organisasi yang menangani olahraga

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

No	Permasalahan	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi	
		Internal	Eksternal
A.	**Permasalahan Bidang Pengembangan Pariwisata**		
	1. Pengembangan fasilitas destinasi pariwisata masih belum optimal. 2. Sarana dan prasarana pendukung pariwisata seperti akses jalan menuju destinasi dan amenitas belum memadai. 3. Beberapa obyek dan daya tarik wisata masih belum terjangkau oleh sarana telekomunikasi. 4. Pembinaan pelaku pariwisata belum maksimal terutama dalam hal Sapta Pesona, Pelayanan Prima maupun Kesadaran terhadap Pelestarian Lingkungan 5. Minimnya sarana dan prasarana di obyek dan daya tarik wisata	1. Memiliki Obyek Wisata yang Unik 2. Akses jalan menuju DTW 3. Dukungan Pihak terkait 4. Kualitas SDM 5. Perlunya dukungan dari pihak lain	1. Kondisi Pendanaan 2. Bantuan Pemerintah 3. Infrastruktur Komunikasi dan Informasi yang mudah dijangkau 4. Perubahan Minat Wisatawan dalam berkunjung 5. Perlunya Inovasi
B.	**Permasalahan Bidang Pengembangan SDM dan Pemasaran Pariwisata**		
	1. Kurangnya tenaga pemandu wisata yang bersertifikasi. 2. Masih rendahnya SDM Pelaku Wisata yang ada di Kabupaten Pacitan 3. Penataan PKL yang belum maksimal. 4. Masih Kurang minat dari masyarakat untuk membentuk Desa Wisata 5. Belum Optimalnya peranserta POKDARWIS dalam pembangunan kepariwisataan. 6. Belum tertanam jiwa SAPTA PESONA para pelaku wisata di Kabupaten Pacitan 7. Minimnya fasilitas website sebagai media promosi. 8. Minimnya sarana penunjang promosi seperti leaflet dan booklet 9. Kurangnya promosi melalui media cetak dan media elektronik. 10. Kurangnya pameran produksi unggulan dan obyek daya tarik wisata ke luar daerah. 11. Rendahnya Sumber Daya Manusia di bidang promosi, disamping juga rendahnya penguasaan di bidang Teknologi Informasi. 12. Kemitraan antar pemangku kepentingan dalam melakukan pemasaran dan promosi belum optimal.	a. Masih Kurangnya Tenaga Ahli dalam membina SDM Kepariwisataan b. Kurangnya Inovasi dalam Promosi wisata c. Tenaga IT pada Dinas Budparpora Masih Kurang	d. Sulitnya Koordinasi antara pedagang dan Perangkat Daerah dalam mencapai Kesepakatan dan Kesepahaman e. Kunjungan Wisata
C.	**Permasalahan Bidang Kebudayaan**		
	1. Masih Banyak terdapat situs/Cagar budaya yang belum terpelihara 2. Pelestarian Budaya yang kurang maksimal 3. Kurangnya pembinaan pelaku Seni budaya	1. Masih Kurangnya Tenaga Ahli yang berkaitan dengan situs /cagar budaya 2. Kurangnya Kemamapuan dalam menggali potensi budaya serta kemasan budaya	1. Kurangnya promosi Seni dan Budaya ditingkat propinsi maupun pusat serta internasional

		yang bisa menarik minat para wisatawan	
D.	**Permasalahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**		
	1. Rendahnya kualitas pemuda, baik dari sisi rendahya pendidikan dan ketrampilan hidup maupun tingginya tingkat pengangguran usia produktif. 2. Terbatasnya penyelenggaraan kegitan guna peningkatan peran serta kepemudaan. 3. Koordinasi antar organisasi pemuda dan pemberdayaan organisasi pemuda belum maksimal. 4. Pendataan organisasi kepemudaan masih terbatas. 5. Belum memadainya sarana dan prasarana bagi pemuda untuk mengembangkan bakat, minat dalam berkreasi dan berprestasi	1. Masih Kurangnya kegiatan kepemudaan 2. Kurangnya Kreatifitas Pemuda dalam beriwira usaha	1. Ketrampilan Kepemudaan 2. Banyaknya pemuda yang meratau ke luar kota
	1. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olah Raga yang dilakukan oleh Bidang Olah Raga masih belum maksimal. 2. Pemeliharaan sarana dan prasarana Olah Raga sering berbenturan dengan berbagai pihak, terkesan diabaikan. 3. Perijinan sarana dan prasarana Olah Raga belum bisa dilaksanakan secara maksimal oleh karena masih ditangani oleh Kantor Pelayanan dan Perijinan Kabupaten Pacitan. 4. Pembinaan Olah Raga Prestasi dan Olah Raga Masyarakat kurang maksimal karena kurang proaktifnya Cabang Olahraga dalam pembinaan dan pelaporan kegiatannya. 5. Terbatasnya pendanaan dari pemerintah daerah dan masyarakat yang mengakibatkan keikutsertaan olahragawan dalam kejuaran di tingkat daerah maupun regional sangat kurang sehingga berakibat kurangnya pengalaman, fisik, mental, teknik dan taktik bertanding dibanding olahragawan di daerah lain. 6. Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar organisasi yang menangani olahraga	1. Masih Banyaknya sarana dan prasarana olahraga yang belum mendapatkan pemeliharaan dan ri Pemerintah Daerah	1. Masih kurangnya kesadaran dan minat masyarakan dalam memanfaatkan sarana dan prasarana olah raga

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan akan menambah dan menyesuaikan usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyaraka terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. PACITAN TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA						**26.242.977.731**							**24.839.000.000**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.335.000.000**							**4.960.000.000**
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**2.975.000.000**							**3.435.000.000**
1,	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**-**	**-**			**-**	**75.000.000**						**-**	**625.000.000**

	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	80 Orang			-	75.000.000			-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip pengh ubung akses wisata	-	80 Orang	625.000.000
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota													
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				1 Kegiatan	75.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip pengh ubung akses wisata	-		625.000.000
2,	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**-**	**-**			**-**	**2.550.000.000**						**-**	**2.450.000.000**

	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	50.000.000			-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengemban gan kawasan strategis wisata dan sirip pengh ubung akses wisata	-	-	775.000.000
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota													
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				6 Unit	50.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengemban gan kawasan strategis wisata dan sirip pengh ubung akses wisata	-		775.000.000

	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	5 kegiatan			-	1.000.000.000			-	Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-	5 kegiatan	825.000.000
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				2 Kegiatan	1.000.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		825.000.000
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	23 Cabor			-	1.500.000.000			-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-	22 Cabor	850.000.000
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota													

			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				30 Orang	1.500.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), HIBAH	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		850.000.000
3,	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**-**	**-**			**-**	**350.000.000**						**-**	**360.000.000**

	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	2 kegiatan			-	350.000.000			-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengemban gan kawasan strategis wisata dan sirip pengh ubung akses wisata	-	2 kegiatan	360.000.000
	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah													
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				1 Laporan	350.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengemban gan kawasan strategis wisata dan sirip pengh ubung akses wisata	-		360.000.000

	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**3.360.000.000**							**1.525.000.000**
1,	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**-**	**-**			**-**	**1.935.000.000**						**-**	**675.000.000**
	2.22.02.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	37 Kali 37 Kali			-	1.935.000.000			-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengemban gan kawasan strategis wisata dan sirip pengh ubung akses wisata	-	9 Kali 9 Kali	675.000.000
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya													

			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				10 Objek	1.935.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, HIBAH	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		675.000.000
2,	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**-**	**-**			**-**	**20.000.000**						**-**	**150.000.000**
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	450 Orang 90 orang			-	20.000.000			-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-	90 Orang 90 orang	150.000.000

	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional													
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				105 Orang	20.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		150.000.000
3,	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**-**	**-**			**-**	**1.360.000.000**						**-**	**275.000.000**
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	4 kegiatan 16 Kegiatan			-	1.360.000.000			-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik	-	4 kegiatan 4 Kegiatan	275.000.000
	2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah													

			Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				4 Unit	1.360.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, HIBAH	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik	-		275.000.000
4,	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**-**	**-**			**-**	**20.000.000**						**-**	**250.000.000**
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	6 kegiatan 26 Kegiatan			-	20.000.000			-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-	6 kegiatan 6 Kegiatan	250.000.000
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya													

			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				4 Objek	20.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		250.000.000
5,	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**-**	**-**			**-**	**25.000.000**						**-**	**175.000.000**
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	-	5 Kegiatan 1 kegiatan			-	25.000.000			-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-	1 Kegiatan 1 kegiatan	175.000.000

	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara				1 Unit	25.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		175.000.000
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**19.907.977.731**							**19.879.000.000**
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**19.907.977.731**							**19.879.000.000**
1,	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**6.465.267.731**						**-**	**7.099.000.000**

	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	23 Dokumen			-	55.000.000			-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-	23 Dokumen	68.000.000
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				18 Dokumen	23.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		26.000.000

	3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	14.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		16.000.000
	3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													

			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	18.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		26.000.000
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	59 Dokumen			-	4.031.961.871			-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-	59 Dokumen	4.092.000.000
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	4.011.961.871	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		4.060.000.000
	3.26.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	5.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		7.500.000

	3.26.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	5.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		7.500.000
	3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													

			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	5.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		8.500.000
	3.26.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan													
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	5.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		8.500.000

	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 %			-	492.559.227			-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip pengh ubung akses wisata	-	100 %	597.000.000
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	32.274.582	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip pengh ubung akses wisata	-		25.000.000

	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	53.639.024	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		57.000.000
	3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													

			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	49.930.705	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		25.000.000
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	70.458.516	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		75.000.000

	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	120.836.400	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		190.000.000
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	165.420.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		225.000.000
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 %			-	73.818.478			-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-	100 %	675.000.000
	3.26.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	-	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		310.000.000
	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	36.285.678	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		310.000.000

	3.26.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	37.532.800	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		55.000.000
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %			-	1.262.128.510			-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-	100 %	1.357.000.000

	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	94.325.900	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		155.000.000
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	453.939.550	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		515.000.000
	3.26.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	27.187.800	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		17.000.000

	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	686.675.260	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		670.000.000
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	80 %			-	549.799.645			-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-	80 %	310.000.000

	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	102.730.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		60.000.000
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				45 Unit	40.454.334	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		25.000.000
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	32.450.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		110.000.000

	3.26.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	374.165.311	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		115.000.000
2,	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**-**	**-**			**-**	**9.947.426.000**						**-**	**9.100.000.000**

	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	9 DTW			-	1.855.000.000			-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip pengh ubung akses wisata	-	9 DTW	525.000.000
	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				11 Unit	1.855.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA INSENTIF DAERAH	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip pengh ubung akses wisata	-		525.000.000

	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	9 DTW			-	6.454.426.000			-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip pengh ubung akses wisata	-	9 DTW	7.250.000.000
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota													
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				3 Lokasi	6.454.426.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-PENGUATAN RS RUJUKAN NASIONAL/PROVINSI/REGIONAL/PARIWISATA	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip pengh ubung akses wisata	-		7.250.000.000

	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	-	1250 Orang			-	1.638.000.000			-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip pengh ubung akses wisata	-	300 Orang	1.325.000.000
	3.26.02.2.04.0011	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota													
			Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha				1 Laporan	1.638.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN KE PARIWISATAAN	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip pengh ubung akses wisata	-		1.325.000.000

3,	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**-**	**-**			**-**	**1.100.000.000**						**-**	**1.000.000.000**
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	20 DTW			-	1.100.000.000			-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pen ingkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengemban gan kawasan strategis wisata dan sirip pengh ubung akses wisata	-	20 DTW	1.000.000.000
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri													

			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	50.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		250.000.000
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri													
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				2 Dokumen	25.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		75.000.000

	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri													
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				5 Promosi	1.025.000.000	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	PP1 - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata; Percepatan pengembangan kawasan strategis wisata dan sirip penghubung akses wisata	-		675.000.000
4,	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**-**	**-**			**-**	**2.395.284.000**						**-**	**2.680.000.000**

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Pengembangan destinasi prioritas merupakan bentuk perwujudan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional tahun 2010-2025 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2011[4]. PP inilah yang menjadi dasar dalam pembangunan pariwisata guna meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi dan mewujudkan industri pariwisata yang mampu menjadi penggerak ekonomi nasional.

Pembangunan di lima destinasi super prioritas (DSP) secara umum meliputi pembangunan infrastruktur fisik dan non-fisik. Pembangunan fisik berfokus pada pembangunan amenitas (amenity), aksesibilitas (accessibility), dan daya tarik wisata (attractions). Sementara itu pembangunan non-fisik termasuk pembangunan kompetensi sumber daya manusia (SDM), pengembangan travel pattern untuk upaya promosi hingga ekonomi kreatif di masing-masing destinasi.

Enam poin penting untuk dibenahi di masing-masing DSP, di antaranya:

1. Pengaturan dan pengendalian tata ruang;
2. Pembangunan akses dan konektivitas menuju tujuan wisata;
3. Pembangunan fasilitas di lokasi wisata termasuk penataan pedagang kaki lima hingga peningkatan kualitas dan kebersihan toilet (fasilitas sanitasi) di tempat wisata;
4. Peningkatan kualitas SDM;
5. Pemasaran produk lokal;
6. Promosi besar-besaran.

Untuk mendukung rencana tersebut maka pembangunan infrastruktur di setiap kawasan DSP harus dilakukan secara terpadu melalui sebuah rencana induk pembangunan. Pembangunan jalan, penataan kawasan, penyediaan air baku dan bersih, pembangunan sanitasi, pengelolaan sampah, perbaikan destinasi, hingga hunian penduduk harus dilakukan secara terpadu.

Lima (5) Daerah Super Prioritas di Indonesia yang telah ditentukan oleh KEMENPAREKRAF yaitu:

1. Danau Toba (Sumatera Utara)
2. Likupang (Sulawesi Utara)
3. Borobudur (Jawa Tengah –DIY)
4. Mandalika (NTB)
5. LabuanBajo (NTT)

Dari ke Lima Daerah Super Prioritas tersebut Kabupaten Pacitan mendukung DSP Borobudur(Jawa Tengah_DIY). Untuk itu dalam penerapannya, pariwisata berkelanjutan memiliki prinsip untuk memberdayakan masyarakat melalui kebudayaan dan kearifan lokal yang ada. Sejalan dengan itu melestarikan alam dan meningkatkan kesejahteraan, serta ditambah aspek pengelolaan secara profesional dengan perintisan destinasi pariwisata, pembangunan desa wisata, pembangunan amenitas kawasan wisata, dan pembangunan dalam wilayah dan kawasan.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA PD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang pariwisata, Kebudayaan, Pemudaan dan olahraga di Kabupaten Pacitan.

Tujuan

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 adalah :

1) Terselenggaranya Tata kelola dibidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olah raga dengan indikator tujuan Prosentase Peningkatan SDM Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2) Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisata dengan indikator tujuan Jumlah Kunjungan Wisata.
3) Meningkatkan pelestarian Nilai Seni budaya dan Sejarah Dengan indikator :
   a) Meningkatnya Pelestarian Nilai Seni budaya dan Sejarah
   b) Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam even kepemudaan dan keolahragaan

Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.
Perumusan sasaran harus memiliki kriteria ”SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas.

Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 adalah :

Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 adalah :

1. **Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

   Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

   - **Nilai SAKIP Perangkat Daerah**

   Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini yaitu dengan Peningkatan SDM Dinas Pariwisata, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan sarana penunjangnya., dengan program sebagai berikut :

   1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2. **Sasaran 2 : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pariwisata dan Usaha di Sektor Pariwisata**

   Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

   1. Length of Stay
   2. % Peningkatan Jumlah Desa Wisata dan Pokdarwis

   Adapun kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini yaitu dengan Peningkatan SDM Pariwisata, pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata, Peningkatan sarana dan Prasarana Pariwisata, gelar atraksi wisata. yang diwujudkan dengan Program

   1. Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
   2. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
   3. Program Pemasaran Pariwisata

3. **Sasaran 3 Meningkatnya Pelestarian Nilai Seni Budaya dan Sejarah**

   Untuk menilai keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

   - Prosentase Peningkatan Pagelaran Seni dan Budaya yang diselenggarakan

     Adapun kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi yaitu : Peningkatan SDM Pelaku Seni, Budaya dan sejarah yang ada di Kabupaten Pacitan serta Menggali seni, budaya dan daerah untuk dilestarikan melalui pagelaran seni, pembinaan pelestari budaya dan sejarah, yang diwujudkan dalam Program sebagai berikut :

     1. Pengembangan Kebudayaan
     2. Pengembangan Kesenian Tradisional
     3. Pembinaan Sejarah
     4. Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
     5. Pengelolaan Permuseuman

4. Sasaran 4 Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam event kepemudaan dan olahraga

Untuk menilai keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

1. Prosentase peningkatan keikutsertaan peuda dalam event kepemudaan

   Adapun kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi yaitu : Peningkatan SDM Kepemudaan Melalui Pembinaan dan Pelaksanaan Paskibraka, Lomba-lomba yang bersifat Kepemudaan sehingga menumbuhkan semangat kepemudaan untuk berwirausaha dan berprestasi yang didukung dan diwujudkan dalam Program sebagai berikut :

   1. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
   2. Program Pegembangan Kapasitas Kepramukaan

2. Prosentase Peningkatan keikutsertaan atlet dalam event keolahragaan

   Adapun kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi yaitu : Pemasyarakatan olah raga dan pembinaan olah raga prestasi, yang diwujudkan dalam Program sebagai berikut :

   1. Program Pengembangan Kapasitas daya saing keolahragaan

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator kinerjanya disajikan cascading Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemudaan dan Olah Raga dan dalam tabel T.4.1 sebagaimana berikut :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (MATRIKS RENSTRA)

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	TAHUN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		2022	2023	2024	2025	2026
1	Terselenggaranya tata kelola dibidang Kebudayaan,Pariwisata, kepemudaan dan olah raga	Meningkatnya Pelayanan PD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Hasil Nilai IKM Perangkat Daerah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	75	76	77,08	78	78, 50
2.	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	Jumlah Kunjungan Wisata	Meningkatnya Sarana dan prasarana Pariwisata dan usaha disektor pariwisata	3. Lenght of Stay 4. % Peningkatan Desa Wisata dan POKDARWIS	Lama Hari Tinggal Wisatawan yang beraktifitas di DTW Kab.Pacitan berdasarkan Survey/ Pengamatan Jumlah Desa Wisata yang mendapat SK Bupati / Jumlah Potensi Desa Wisata yang ada X 100% = ... Jumlah POKDARWIS yang mendapatkan SK dari Kadis / Jumlah Potensi POKDARWIS yang ada X 100% = ❖ Dari hasil ke 2 perhitungan tersebut di bagi 2=….%	1,2 hari 40 %	1,3 hari 45 %	1,3 hari 57%	1,4 hari 57%	1,5 hari 58%
3.	Meningkatkan pelestarian nilai seni, budaya dan sejarah serta	Prosentase Peningkatan SDM Kebudayaan	Meningkatnya Pelestarian Nilai Seni, Budaya dan sejarah	Prosentase Peningkatan pagelaran seni dan budaya yang diselenggarakan	Jumlah Pegelaran seni yang diselenggarakan tahun ini – Tahan Kemarin: Tahun kemarin x 100	45 %	47 %	59%	60%	60%

	Prestasi Pemuda dan Olah Raga	, Kepemudaan dan Olahraga								
			Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam event kepemudaan dan Olah Raga	Prosentase peningkatan keikutsertaan pemuda dalam event kepemudaan	Jumlah Event Pemuda pemuda yang di ikuti/ selenggarakan tahun ini-Jumlah event Pemuda Tahun Kemarin: Jumlah Event tahun kemarin x 100	20 %	25 %	37%	45%	50%
				Prosentase peningkatan keikutsertaan Atlet dalam Event Keolahragaan	Jumlah event Olahraga yang diikuti tahun ini-tahun kemarin : Tahun kemarin x 100	55 %	60 %	63%	63%	63,5%

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam RENJA DISPARBUDPORA Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang mengarah ke profesionalisme di Bidang Perencanaan dan teknis;

   Tujuan :

   Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparat Perencana dan Tehnis melalui kursus jangka pendek / fungsional informal.

   Sasaran :

   Tersedianya Sumber Daya Manusia bagi Aparat Perencana dan teknis yang Profesional.

2. Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan ;

   Tujuan :

   Meningkatkan Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan dari semua lini, baik tingkat pemerintahan dan masyarakat.

   Sasaran :

   Tersedianya Perencanaan Pro-aktif dan Antisipasif serta pelaksanaan pembangunan sesuai dengan skala prioritas.

3. Menciptakan Koordinasi yang serasi dan terpadu ;

   Tujuan :

   Meningkatkan Konsultasi dan Konfirmasi Program Pembangunan secaraterpadu, baik antar Instansi, Daerah, Regional dan Nasional.

   Sasaran :

   Meningkatnya keterpaduan Program Pembangunan antar Instansi, Daerah,Regional dan Nasional.

4. Menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam sistem perencanaan dan pengkajian potensi ekonomi ;

   Tujuan :

   Mencari dan menjadikan kekuatan swasta sebagai salah satu pendorong pembangunan Kabupaten.

   Sasaran :

   Mencari dan menjadikan kekuatan swasta sebagai salah satu pendorong pembangunan Kabupaten dengan pola Public-Private Partnerships dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan-kumpulan kegiatan yang nyata dan sistematis serta terpadu dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Program yang ditetapkan merupakan rencana yang lebih konkret yang mencakup berbagai jenis kegiatan yang mengarah kepada misi yang ditetapkan, sehingga program disusun ke dalam program prioritas dan program pendukung. Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dan dapat diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga meliputi 12 (dua belas) Program yang terdiri dari beberapa Kegiatan sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan:**

   A. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan :**

      a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKP-SKPD
      c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   B. **Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**

      Sub Kegiatan :

      a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      b. Pelaksanaan Oenatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
      c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
      d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhit Tahun SKPD
      e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

   C. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

      Sub Kegiatan

      a. Penyediaan Komponen Instalasi Listik/Penerangan Bngunan Kantor
      b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      d. Penyiediaaan Bahan Logistik Kantor
      e. Penyiediaan Barang cetakan dan Penggandaan
      f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
      g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

D. Pengadaan Barang Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

a. Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
b. Pengadaan Mebel
c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya

E. Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor

F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas Operasional dan Lapangan .
c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kentor atau bangunan Lainnya

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing kepemudaan

Kegiatan :

a. Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wira Usaha Muda dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan prasarana dan sarana kepemudaann
b. Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organsasi Pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi

b. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Koordinasi, Singkornisasi dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda aatau organisasi kepemudaan melalui
b. Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota

3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Kegiatan :

A. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yeng menjadi kewenangan Daerah Kabupaten kota

Sub Kegiatan :

a. Koordinasi Singkronisasi dan pelaskanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga Kabupaten/kota

B. Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan:

a. Partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan

C. Pembinaan dan Pengembangan Olah raga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

a. Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota

4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Kegiatan :

A. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

Sub Kegiatan :

a. Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah

5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Kegiatan :

A. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

B. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Pembinaan dan pengawasan Usaha Jasa Pariwisata.
b. Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata

C. Pengelolaan Kawasan Stategis Pariwisata Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

6. Program Pemasaran Pariwisata

Kegiatan

A. Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan kawasan stretegis Pariwisata Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya baik dalam dan Luar Negeri
b. Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota aik dalam dan luar negeri
c. Peningkatan Kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri.

7. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi Kreatfi

Kegiatan :

A. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

Sub Kegiatan :

a. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
b. Peningkatan Peranserta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
c. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif

8. Program Pengembangan Kebudayaan

Kegiatan

A. Pelestarian Kesenian Tradisional yang masyarakat Pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

a. Perlindungan pengembangan,Pemenfaatan Obyek Pemajuan Tradisi Budaya

9. **Program Pengembangan Kesenian Tradisional**

Kegiatan :

A. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/kota

Sub Kegiatan

a. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
b. Standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manjsia Tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan

10. **Program Pembinaan Sejarah**

Kegiatan :

A. Pembinaan Sejarah Lokaldalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Pemberdayaan Sumberdaya Manusia dan Lembaga sejarah lokal Kabupaten/Kota
b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah

11. **Program Pelestarian Pengelolaan Cagar Budaya**

Kegiatan :

A. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

a. Penetapan Cagar Budaya

12. **Program Pengelolaan Permuseuman**

Kegiatan

A. Pengelolaaan Museum Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang telah dirumuskan pada tersebut diatas, selanjutnya dalam mencapai mendukung Visi dan Misi Bapak Bupati Periode 2021-2026. Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemudaan dan Olah Raga sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka menengah 5 (lima) tahun sebagaimana inti dari Dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, perlu dijabarkan dalam bentuk riil program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama Tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 .

Dengan indikator Kinerja, Sasaran, dan Pendanaan Indikatif disampaikan dalam penjelasan berikut :

4.1 Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja disusun sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam memenuhi janjinya. Lebih jauh lagi indikator kinerja akan memberikan informasi mengenai kinerja suatu organisasi apakah berhasil atau gagal, baik atau tidak baik, sesuai ketentuan atau tidak. Indikator kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program.

Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *benegiciaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Seluruh indikator kinerja akan menjadi dasar pengukuran dalam pelaksanaan evaluasi kinerja satuan kerja.

Penetapan indikator kinerja ini sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau ”penentu” keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Untuk itu diperlukan adanya suatu ketentuan atau kriteria dan standar yang dapat disepakati oleh semua pihak agar indikator kinerja suatu instansi dapat digunakan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama. Sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2007, indikator kinerja program menggunakan indikator hasil (*outcome*) dan kegiatan menggunakan indikator keluaran (*output*).

4.2 Sasaran

Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan satuan kerja. Adapun untuk Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan kelompok sasaran ini meliputi :

Kelompok sasaran pembangunan bidang pariwisata :

1. pelaku pariwisata (seperti hotel, restoran/rumah makan, biro perjalanan wisata/travel, warnet dan sebagainya)
2. wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara
3. Pemandu Wisata

Kelompok sasaran pembangunan bidang pemuda :

1. lembaga kepemudaan dan pemuda di Pacitan
2. OSIS, BEM, Gerakan Pramuka, Pondok Pesantren, Remaja Masjid, dan Pecinta Alam di Pacitan
3. Pemuda Pelopor, SP3, dan KUPP di Pacitan
4. Penilik Pemuda

Kelompok sasaram Bidang Kebudayaan :

1. Para Seniman
2. Para Budayawan
3. Para Pelaku Pelestari Sejarah
4. Pengelolaan Museum

Kelompok sasaran pembangunan bidang olahraga :

1. Guru olahraga, pelatih, wasit cabang olahraga prestasi di Pacitan
2. Klub olahraga prestasi di Pacitan
3. Pelajar SD/MI, SMP, SMA mahasiswa di Pacitan
4. Atlet PPLD dan atlet prestasi di Pacitan
2. Penyandang cacat dan masyarakat lanjut usia di Pacitan
3. Pondok pesantren di Pacitan
4. Pengelola organisasi olahraga dan pengurus cabang olahraga di Pacitan
5. Klub-klub olahraga rekreasi yang di masyarakat

6. Penilik Olahraga
7. Industri Olahraga
8. Tokoh Olahraga

3.3 Pendanaan Indikatif

Pendanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, bersumber dari Dana APBD Kabupaten Pacitan dan dana DAK, yang artinya bergantung kepada kemampuan APBD Kabupaten Pacitan dan Dana dari Propinsi, Maupun Pusat

Seperti telah disebutkan pada bab sebelumnya, bahwa seluruh program dan kegiatan tidak akan dapat terlaksana tanpa adanya masukan yang mendukung penyelenggaraannya. Salah satu masukan yang sangat vital adalah adanya dukungan dana operasional terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, pendanaan indikatif selalu dicantumkan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan.

Dengan formulasi penghitungan Program dan Kegiatan seperti tebel dibawah ini:

FORMULASI PERHITUNGAN PROGRAM

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Jumlah Wisata	(Jmlh prosentase Kunjungan wisata Tahun ini: Jml Prosentase Kunjungan wisata Tahun Dasar)x 100
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pengelolaan Destinasi Wisata	(Jmlh DTW yang dikelola PEMDA yang mendapat anggaran rehabilitasi : Jml DTW Yang dikelola Oleh PEMDA)x 100
Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Event Pariwisata dan Ekraf Yang diselenggarakan	(Event Tahun ini – Event tahun lalu : Event tahun lalu)x 100
Program Pengembangan Kebudayaan	Prosentase penyelenggaraan festival budaya yang difasilitasi	(Jumlah Vestifal Yang difasilitasi : Jmlh Festifal yang ada di kabupaten pacitan)x 100
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Prosentase Peningkatan Kreatifitas Pengembangan Kesenian Tradisional	(Jumlah Kreatifitas kesenian tradisional : Jmlh

		Kesenian yang ada di kabupaten pacitan)x 100
Program Pembinaan Sejarah	Prosentase Peningkatan Pembinaan SDM Pelestari Sejarah Lokal	(Pelestari sejarah yang dibina tahun ini- Pelestari sejarah yang dibina tahun lalu : Pelestari sejarah tahun lalu)X 100
Program Pelestarian dan Pengelolaaan Cagar Budaya	Prosentase Pemeliharaan Benda, Situs danKawasan Cagar Budaya	(Objek yang diduga Cagar Budaya- Cagar Budaya yang dilestarikan: Objek diduga Cagar Budaya) x 100
Program Pengelolaan Permuseuman	Prosentase Peningkatan Pemeliharaan Benda Museum Kabupaten	(Benda Museum yang dipelihara tahun ini – Benda Museum yang dipelihara tahun lalu: Benda Museum yang dipelihara tahun lalu) x 100
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Pemuda Pelopor dan Berprestasi	Rekapitulasi Pemuda Pelopor dan Berprestasi
Program Pengembangan KapasitasKepramukaan	Presentase Peningkatan Event / Kegiatan Kepramukaan	(Jumlah Kegiatan Kepramukaan tahun ini - Tahun lalu : Jumlah Kegiatan Kepramukaan Tahun lalu)x 100
Program Pengembangan Kapsitas Daya Saing Keolahragaan	Prosentase Cabang Olahraga Yang Mendapatkan Prestasi	(Jumlah Cabor yang mendapatkan Prestasi : Jumlah Cabor yang ada di kabupaten pacitan)x 100
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Hasil Nilai SAKIP PD	Hasil Penilaian SAKIP dari Inspektorat

Adapun program dan Kegiatan Prioritas Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan perubahan ke 2 rancangan akhir dijelaskan dalam Tabel 4.1 berikut ini :

REKAP RINCIAN BELANJA PERUBAHAN 2025

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025	REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD

Organisasi : 2.22.2.19.1.26.04.0000 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								Tahun - 1	Tahun N											Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)		
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga																				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp. 7.790.101.800	Rp. 1.936.898.208			Rp. 9.734.000.000	Rp. 9.181.190.317	Rp. 2.011.745.200			Rp. 11.190.935.517	Rp. 4.950.000.000,00
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				Rp. 4.771.426.900	Rp. 1.933.575.008			Rp. 6.705.000.000	Rp. 6.160.067.377	Rp. 2.015.588.000			Rp. 8.175.655.377	Rp. 3.435.000.000,00
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				Rp. 585.500.000				Rp. 585.500.000	Rp. 187.250.000				Rp. 187.250.000	Rp. 625.000.000,00
2	19	02	2.01		Pengadaan, Pembinaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelajar Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Cader Kabupaten/Kota				Rp. 585.500.000				Rp. 585.500.000	Rp. 187.250.000				Rp. 187.250.000	Rp. 625.000.000,00
2	19	02	2.01	0010	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 585.500.000				Rp. 585.500.000	Rp. 187.250.000				Rp. 187.250.000	Rp. 625.000.000,00
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				Rp. 3.771.023.900	Rp. 1.933.575.008			Rp. 5.705.000.000	Rp. 5.145.584.202	Rp. 2.015.588.000			Rp. 7.157.084.202	Rp. 2.450.000.000,00
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 95.425.900	Rp. 1.933.575.008			Rp. 2.029.000.000	Rp. 180.812.830	Rp. 2.015.588.000			Rp. 2.201.400.830	Rp. 175.000.000,00
2	19	03	2.01	0000	Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan program olahraga melalui perencanaan, pengawasan, pemantauan, pemeliharaan, dan penyelenggaraan Program Olahraga di tingkat kabupaten/kota	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 95.425.900	Rp. 1.933.575.008			Rp. 2.029.000.000	Rp. 180.812.830	Rp. 2.015.588.000			Rp. 2.201.400.830	Rp. 175.000.000,00
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 1.255.320.140				Rp. 1.255.320.140	Rp. 1.130.680.924				Rp. 1.130.680.924	Rp. 625.000.000,00
2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.255.320.140				Rp. 1.255.320.140	Rp. 1.130.680.924				Rp. 1.130.680.924	Rp. 625.000.000,00
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				Rp. 3.430.879.880				Rp. 3.430.879.880	Rp. 3.126.080.548				Rp. 3.126.080.548	Rp. 150.000.000,00
2	19	03	2.03	0000	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Hibah - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.422.879.880				Rp. 2.422.879.880	Rp. 3.125.080.548				Rp. 3.125.080.548	Rp. 150.000.000,00
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				Rp. 412.300.900				Rp. 412.300.000	Rp. 427.213.050				Rp. 427.213.050	Rp. 150.000.000,00
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				Rp. 412.300.900				Rp. 412.300.000	Rp. 427.213.050				Rp. 427.213.050	Rp. 150.000.000,00
2	19	04	2.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 412.300.900				Rp. 412.300.000	Rp. 427.213.050				Rp. 427.213.050	Rp. 150.000.000,00
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				Rp. 3.021.676.800	Rp. 3.313.208			Rp. 3.025.000.000	Rp. 3.126.192.948	Rp. 3.157.200			Rp. 3.129.350.148	Rp. 1.125.000.000,00

Activate Windows
Go to Settings to activate Wi

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								Tahun - 1	Tahun N											Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)		
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				Rp. 2.760.800.020				Rp. 2.760.000.000	Rp. 2.928.147.800				Rp. 2.928.147.800	Rp. 575.000.000,00
2	22	02	2.02		Pelestarian kesenian Tradisional yang Menyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 2.760.800.020				Rp. 2.760.000.000	Rp. 2.928.147.800				Rp. 2.928.147.800	Rp. 575.000.000,00
2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	- Hibah - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.760.800.020				Rp. 2.760.000.000	Rp. 2.928.147.800				Rp. 2.928.147.800	Rp. 575.000.000,00
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				Rp. 30.800.080				Rp. 30.000.000	Rp. 14.000.000				Rp. 14.000.000	Rp. 150.000.000,00
2	22	03	2.01		Pembinaan kesenian yang Menyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 30.800.080				Rp. 30.000.000	Rp. 14.000.000				Rp. 14.000.000	Rp. 150.000.000,00
2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 20.800.020				Rp. 20.000.000	Rp. 14.000.000				Rp. 14.000.000	Rp. 150.000.000,00
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				Rp. 200.800.080				Rp. 200.000.000	Rp. 250.000.000				Rp. 250.000.000	Rp. 275.000.000,00
2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 200.800.020				Rp. 200.000.000	Rp. 250.000.000				Rp. 250.000.000	Rp. 275.000.000,00
2	22	04	2.01	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Hibah - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 200.800.020				Rp. 200.000.000	Rp. 250.000.000				Rp. 250.000.000	Rp. 275.000.000,00
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				Rp. 20.800.020				Rp. 20.000.000	Rp. 13.361.060				Rp. 13.361.060	Rp. 250.000.000,00
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				Rp. 20.800.020				Rp. 20.000.000	Rp. 13.361.060				Rp. 13.361.060	Rp. 250.000.000,00
2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 20.800.020				Rp. 20.000.000	Rp. 13.361.060				Rp. 13.361.060	Rp. 250.000.000,00
2	22	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				Rp. 21.676.880	Rp. 3.313.280			Rp. 21.000.000	Rp. 20.684.080	Rp. 3.157.200			Rp. 23.841.280	Rp. 175.000.000,00
2	22	05	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota				Rp. 21.676.880	Rp. 3.313.280			Rp. 21.000.000	Rp. 20.684.080	Rp. 3.157.200			Rp. 23.841.280	Rp. 175.000.000,00
2	22	05	2.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 21.676.880	Rp. 3.313.280			Rp. 21.000.000	Rp. 20.684.080	Rp. 3.157.200			Rp. 23.841.280	Rp. 175.000.000,00
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				Rp. 10.263.193.480	Rp. 1.102.758.271			Rp. 11.365.951.731	Rp. 11.021.089.968	Rp. 1.603.429.211			Rp. 12.630.518.879	Rp. 19.875.000.000,00
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				Rp. 10.263.193.480	Rp. 1.102.758.271			Rp. 11.365.951.731	Rp. 11.021.089.968	Rp. 1.603.429.211			Rp. 12.630.518.879	Rp. 19.875.000.000,00
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 6.225.465.268	Rp. 112.255.521			Rp. 6.337.920.789	Rp. 7.862.166.529	Rp. 221.715.551			Rp. 8.083.882.580	Rp. 7.099.000.000,00
3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 101.800.080				Rp. 101.000.000	Rp. 125.448.379				Rp. 125.448.379	Rp. 68.000.000,00
3	26	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Dana Alokasi Umum (DAU) - Pendapatan Transfer Antar Daerah	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 68.800.080				Rp. 68.000.000	Rp. 61.925.500				Rp. 67.925.500	Rp. 26.000.000,00
3	26	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU) - Pendapatan Transfer Antar Daerah	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 14.800.080				Rp. 14.000.000	Rp. 24.484.179				Rp. 24.484.179	Rp. 18.000.000,00
3	26	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Dana Alokasi Umum (DAU) - Pendapatan Transfer Antar Daerah	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 19.800.080				Rp. 19.000.000	Rp. 33.038.600				Rp. 33.038.600	Rp. 26.000.000,00

Activate Windows
Go to Settings to activate Wi

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 3.977.961.871				Rp. 3.977.961.871	Rp. 3.830.512.953				Rp. 3.833.512.953	Rp. 4.090.000.000,00
3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paslian, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.957.961.871				Rp. 3.957.961.871	Rp. 3.816.290.423				Rp. 3.816.290.423	Rp. 4.080.000.000,00
3	26	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU) - Pendapatan Transfer Antar Daerah	- Kab. Paslian, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.000.000				Rp. 5.000.000	Rp. 4.000.000				Rp. 4.000.000	Rp. 7.500.000,00
3	26	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU) - Pendapatan Transfer Antar Daerah	- Kab. Paslian, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.000.000				Rp. 5.000.000	Rp. 4.922.530				Rp. 4.922.530	Rp. 7.500.000,00
3	26	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU) - Pendapatan Transfer Antar Daerah	- Kab. Paslian, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.000.000				Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000				Rp. 5.000.000	Rp. 8.500.000,00
3	26	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	- Dana Alokasi Umum (DAU) - Pendapatan Transfer Antar Daerah	- Kab. Paslian, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.000.000				Rp. 5.000.000	Rp. 3.300.000				Rp. 3.300.000	Rp. 8.500.000,00
3	26	01	2.08		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 584.701.951				Rp. 584.701.951	Rp. 431.286.829				Rp. 431.286.829	Rp. 591.000.000,00
3	26	01	2.08	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paslian, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 32.274.980				Rp. 32.274.980	Rp. 43.293.410				Rp. 43.293.410	Rp. 25.000.000,00
3	26	01	2.08	0003	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paslian, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 126.600.440				Rp. 126.600.440	Rp. 68.755.889				Rp. 68.755.889	Rp. 81.000.000,00
3	26	01	2.08	0005	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paslian, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 49.930.705				Rp. 49.930.705	Rp. 49.930.705				Rp. 49.930.705	Rp. 25.000.000,00
3	26	01	2.08	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paslian, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 70.456.316				Rp. 70.456.316	Rp. 86.131.062				Rp. 86.131.062	Rp. 75.000.000,00
3	26	01	2.08	0006	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paslian, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 139.836.480				Rp. 139.836.480	Rp. 186.270.003				Rp. 186.270.003	Rp. 180.000.000,00
3	26	01	2.08	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paslian, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 180.000.200				Rp. 180.000.200	Rp. 80.800.380				Rp. 80.800.380	Rp. 220.000.000,00
3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp. 10.651.116	Rp. 112.255.521			Rp. 122.906.637	Rp. 10.651.116	Rp. 221.715.951			Rp. 232.367.067	Rp. 670.000.000,00
3	26	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paslian, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 310.000.000,00
3	26	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paslian, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.651.116	Rp. 112.255.521			Rp. 122.906.637	Rp. 10.651.116	Rp. 221.715.951			Rp. 232.367.067	Rp. 310.000.000,00
3	26	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paslian, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 50.000.000,00
3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 1.274.376.829				Rp. 1.274.376.829	Rp. 3.118.471.212				Rp. 3.118.471.212	Rp. 1.351.000.000,00

Activate Windows
Go to Settings to activate Wir

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
1	26	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Kurir/Mengurat	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paslian, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 84.600.000				Rp. 84.600.000	Rp. 73.340.000				Rp. 73.340.000	Rp. 161.000.000,00
1	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paslian, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 417.157.869				Rp. 417.157.869	Rp. 371.762.252				Rp. 371.762.252	Rp. 511.000.000,00
1	26	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paslian, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 12.187.800				Rp. 12.187.800	Rp. 52.187.800				Rp. 52.187.800	Rp. 17.000.000,00
1	26	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paslian, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 719.432.360				Rp. 719.432.360	Rp. 2.622.180.250				Rp. 2.622.180.250	Rp. 670.000.000,00
1	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 210.364.300				Rp. 210.364.300	Rp. 339.790.140				Rp. 339.790.140	Rp. 310.000.000,00
1	26	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paslian, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 163.730.000				Rp. 163.730.000	Rp. 85.530.000				Rp. 85.530.000	Rp. 90.000.000,00
1	26	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paslian, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 62.654.134				Rp. 62.654.134	Rp. 74.018.871				Rp. 74.018.871	Rp. 21.000.000,00
1	26	01	2.09	0005	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paslian, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 32.400.000				Rp. 32.400.000	Rp. 30.400.000				Rp. 30.400.000	Rp. 110.000.000,00
1	26	01	2.09	0013	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paslian, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 18.130.166				Rp. 18.130.166	Rp. 144.737.359				Rp. 144.737.359	Rp. 111.000.000,00
1	26	02			PROGRAM PEMANFAATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				Rp. 542.884.192	Rp. 1.599.562.750			Rp. 2.142.446.942	Rp. 902.761.859	Rp. 1.381.711.260			Rp. 2.284.473.079	Rp. 5.100.000.000,00
1	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				Rp. 418.218.171	Rp. 1.599.562.750			Rp. 2.068.121.121	Rp. 636.253.962	Rp. 1.381.711.260			Rp. 2.017.967.222	Rp. 521.000.000,00
1	26	02	2.02	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	- Dana Alokasi Umum (DAU) - Insentif Fiskal Untuk Pengharpaan Kinerja Tahun Sebelumnya	- Kab. Paslian, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 418.218.171	Rp. 1.599.562.750			Rp. 2.068.121.121	Rp. 636.253.962	Rp. 1.381.711.260			Rp. 2.017.967.222	Rp. 521.000.000,00
1	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				Rp. 124.625.021				Rp. 124.625.021	Rp. 266.447.857				Rp. 266.447.857	Rp. 7.250.000.000,00
1	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paslian, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 124.625.021				Rp. 124.625.021	Rp. 266.447.857				Rp. 266.447.857	Rp. 7.250.000.000,00
1	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota														Rp. 1.321.000.000,00
1	26	02	2.04	0011	Kesesuaian jelas usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	- Dana Alokasi Umum (DAU) - DAK Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisataan	- Kab. Paslian, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 1.321.000.000,00
1	26	03			PROGRAM PENASARAN PARIWISATA				Rp. 1.110.000.000				Rp. 1.110.000.000	Rp. 1.475.664.000				Rp. 1.475.664.000	Rp. 1.000.000.000,00
1	26	03	2.03		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				Rp. 1.110.000.000				Rp. 1.110.000.000	Rp. 1.475.664.000				Rp. 1.475.664.000	Rp. 1.000.000.000,00
1	26	03	2.03	0003	Penyediaan Jasa dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	- Pajak Rokok - Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paslian, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 30.000.000				Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000				Rp. 30.000.000	Rp. 250.000.000,00
1	26	03	2.03	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Paslian, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 15.000.000				Rp. 15.000.000	Rp. 152.580.000				Rp. 152.580.000	Rp. 71.000.000,00

Activate Windows
Go to Settings to activate W

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
3	26	03	2.01	0007	Pengusaha Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.025.000.000				Rp. 1.025.000.000	Rp. 1.288.164.000				Rp. 1.288.164.000	Rp. 675.000.000,00
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				Rp. 2.345.284.000				Rp. 2.345.284.000	Rp. 786.557.220	Rp. 0			Rp. 786.557.220	Rp. 2.680.000.000,00
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				Rp. 2.345.284.000				Rp. 2.345.284.000	Rp. 786.557.220	Rp. 0			Rp. 786.557.220	Rp. 2.680.000.000,00
3	26	05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - Dana Alokasi Umum (DAU) - Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							Rp. 225.000.000				Rp. 225.000.000	Rp. 80.000.000,00
3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.345.284.000				Rp. 2.345.284.000	Rp. 561.557.220	Rp. 0			Rp. 561.557.220	Rp. 2.600.000.000,00
							Jumlah		**Rp. 18.069.895.269**	**Rp. 3.039.656.471**			**Rp. 21.700.551.731**	**Rp. 20414.249.990**	**Rp. 3.617.174.411**			**Rp. 24.031.424.391**	**Rp. 24.839.000.000,00**

Kab. Pacitan, ...
Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

TURMUDI, S.Sos.,M.Si.
NIP. 196703251990031003

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis padamasyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku *(stakeholders)* dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah *(trickle down effect)* sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan

.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 Dinas, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pacitan selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan OLahraga Kabupaten Pacitan. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, Rencana Kerja (RENJA) Perubahan juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh Staf Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan OLahraga Kabupaten Pacitan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Ooooo00000ooooO

RENJA
PERUBAHAN
2025

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kabupaten Pacitan

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Jl. Dewi Sartika No.19A Sidoharjo, Pacitan, Jawa Timur 63514
Telp/Fax. (0357) 881459 Web: www.pertanian.pacitankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PACITAN
NOMOR: 500.6/1790/KPTS/408.30/2025
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2025

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PACITAN

Menimbang :

a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 152 ayat (4) dan Pasal 154 ayat (1), Rancangan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disahkan oleh Bupati dengan Keputusan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tentang Pengesahan Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan Tahun 2025.

Mengingat :

1. INPRES Nomor 1 tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025
2. Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor: 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan
6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 150 Tahun 2021 yang dirubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 209 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan
7. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;
8. Surat Edaran Bupati Pacitan Nomor: 900.1.1.2/626/408.55/2025 Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan Tahun 2025 sebagaimana Diktum Pertama merupakan landasan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan.

KETIGA : Pengesahan ini digunakan sebagai dasar dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas

Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025.

KEEMPAT : Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 23 Juli 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Pacitan

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

SUGENG SANTOSO, S.P., MSc.
Pembina Tingkat I
NIP. 19741129 200003 1 003

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
NOMOR : 400.13.1/ 1790 /KPTS/408.30/2025
TANGGAL : 23 JULI 2025

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN . 2

1.1. Latar Belakang 2
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 3
1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025.. 5

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 23

BAB IV. PENUTUP 61

LAMPIRAN

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2025. Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan sampai dengan triwulan II yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2025;

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah:

1. INPRES Nomor 1 tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025
4. Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor: 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan
7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 150 Tahun 2021 yang dirubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 209 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan
8. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja pemerintah daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025;
10. Surat Edaran Nomor: 188/076/408.53/2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan.

Adapun tujuan dari Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui kondisi umum pembangunan Kabupaten Pacitan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2026 .
2. Untuk mengetahui kebijakan pembangunan Kabupaten Pacitan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan Tahun 2026.
3. Sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ini secara garis besar terbagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

Bab I. Pendahuluan : berisikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

Bab II. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 yang memuat tentang evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2025

Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang berisi tentang tujuan, sasaran, perubahan belanja perangkat daerah serta rencana program dan kegiatan.

Bab IV. Penutup. Berisikan uraian berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

2.1. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap renja perangkat daerah dilaksanakan untuk mengkaji hasil dari pelaksanaan program/ kegiatan renja perangkat daerah dibandingkan dengan capaian target kinerja renstra perangkat daerah. Sebagai dasar penyusunan perubahan rencana kerja tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil pelaksanaan renja sampai dengan triwulan 2. Pada tahun 2025 Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan melaksanakan sebanyak 2 (dua) urusan, 11 (sebelas) program, 23 (duapuluh tiga) kegiatan, 43 (empat puluh tiga) sub Kegiatan dengan rencana anggaran induk sejumlah Rp. 30.289.462.166 dan dilakukan efisiensi dan pergeseran menjadi Rp. 30.288.685.524. Sampai dengan triwulan 2 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan telah direalisasikan sebesar Rp. 8.736.489.102,00

Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan sampai dengan triwulan II Tahun 2025 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**209.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	**Persentase Desa Mandiri Pangan**	**desa**	**5,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**1.00**	**100.000.000,00**	**0,00**	**840.000,00**	**0,00**	**2.899.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.739.400,00**	**0,00**	**3,74**	**0,00**	**3.739.400,00**	**0**	**0**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
	209.02.2.01	**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga Pangan Yang Berkembang**	**Desa**	**1.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**1.00**	**100.000.000,00**	**0,00**	**840.000,00**	**0,00**	**2.899.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.739.400,00**	**0,00**	**3,74**	**0,00**	**3.739.400,00**	**0**	**0**	
	209.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan	12.00	0,00	0.00	0,00	2.00	50.000.000,00	0,00	840.000,00	0,00	2.899.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.739.400,00	0,00	7,48	0,00	3.739.400,00	0	0	
	209.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastrultur logistik	laporan	5.00	0,00	0.00	0,00	2.00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					0,00	3,74					1=1
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah						
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					0,00	3,74	0/1				
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah						
2	**209.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Persentase Meningkatnya Ketersediaan Pangan Beras**	**%**	**94,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**97.00**	**405.000.000,00**	**0,00**	**1.980.000,00**	**0,00**	**180.720.540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182.700.540,00**	**0,00**	**45,11**	**0,00**	**182.700.540,00**	**0**	**0**	**DKPP**
	.		**Persentase meningkatnya**	**%**	**97,00**		**0.00**	**0,00**	**98.00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0**		**DKPP**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			ketersediaan pangan jagung																								
	.		Persentase meningkatnya ketersediaan pangan kedelai	%	93,00		0.00	0,00	96.00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		DKPP
	.		Persentase meningkatnya ketersediaan pangan daging	%	86,00		0.00	0,00	89.00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		DKPP
	.		Persentase meningkatnya ketersediaan pangan telur	%	85,00		0.00	0,00	93.00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		DKPP
	.		Persentase meningkatnya ketersediaan pangan ikan	%	92,00		0.00	0,00	96.00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0		DKPP
	209.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentasae pangan pokok yang disalurkan	%	85.00	0,00	0.00	0,00	90.00	15.000.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00	1.763.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.743.000,00	0,00	24,95	0,00	3.743.000,00	0	0	
	209.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	Dokumen	12.00	0,00	0.00	0,00	2.00	15.000.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00	1.763.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3743000	0,00	24,95	0,00	3.743.000,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					0,00	24,95					1=1
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah						
	209.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan cadangan pangan	Dokumen	1.00	0,00	0.00	0,00	1.00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	164.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.464.000,00	0,00	82,23	0,00	164.464.000,00	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	209.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	100.00	0,00	0.00	0,00	10.60	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	164.464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.464.000,00	0,00	82,23	0,00	164.464.000,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					0,00	82,23					1=2
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Tinggi					
	209.03.2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang**	**Desa**	**3.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**3.00**	**190.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.493.540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.493.540,00**	**0,00**	**7,63**	**0,00**	**14.493.540,00**	**0**	**0**	
	209.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	6.00	0,00	0.00	0,00	1.00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.608.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608.500,00	0,00	16,09	0,00	1.608.500,00	0	0	
	209.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	12.00	0,00	0.00	0,00	2.00	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.885.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12885040	0,00	7,16	0,00	12.885.040,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					0,00	11,63					1=3
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah						
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					0,00	114,81	0/1				
Predikat kinerja(%)																					Sangat	Sangat Tinggi					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																					Rendah						
3	**209.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase tertanganinya kerawanan pangan**	**Desa**	**1,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**1.00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**790.000,00**	**0,00**	**4.285.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.075.500,00**	**0,00**	**10,15**	**0,00**	**5.075.500,00**	**0**	**0**	**DKPP**
	209.04.2.01	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**Analisis desa rawan pangan**	**Dokumen**	**1.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**1.00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.850.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.850.500,00**	**0,00**	**14,25**	**0,00**	**2.850.500,00**	**0**	**0**	
	209.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Dokumen	6.00	0,00	0.00	0,00	1.00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.850.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.500,00	0,00	14,25	0,00	2.850.500,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					0,00	14,25					1=1
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah						
	209.04.2.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Menurunnya Jumlah desa Rawan Pangan**	**Desa**	**1.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**1.00**	**30.000.000,00**	**0,00**	**790.000,00**	**0,00**	**1.435.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.225.000,00**	**0,00**	**7,42**	**0,00**	**2.225.000,00**	**0**	**0**	
	209.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	12.00	0,00	0.00	0,00	2.00	30.000.000,00	0,00	790.000,00	0,00	1.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225.000,00	0,00	7,42	0,00	2.225.000,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					0,00	7,42					1=2
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah						
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					0,00	21,67	0/1				
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	**209.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase pangan yang aman**	**%**	**94,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**94.50**	**20.000.000,00**	**0,00**	**660.000,00**	**0,00**	**14.394.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.054.100,00**	**0,00**	**75,27**	**0,00**	**15.054.100,00**	**0**	**0**	**DKPP**
	209.05.2.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pangan yang aman**	**%**	**95.50**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**94.50**	**20.000.000,00**	**0,00**	**660.000,00**	**0,00**	**14.394.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.054.100,00**	**0,00**	**75,27**	**0,00**	**15.054.100,00**	**0**	**0**	
	209.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Dokumen	12.00	0,00	0.00	0,00	2.00	20.000.000,00	0,00	660.000,00	0,00	14.394.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15054100	0,00	75,27	0,00	15.054.100,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					0,00	75,27					1=1
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Tinggi					
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					0,00	75,27	0/1				
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Tinggi					
5	**327.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**Skor**	**75,92**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**75.92**	**14.538.235.666,00**	**0,00**	**3.223.209.906,00**	**0,00**	**3.572.795.896,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.796.005.802,00**	**0,00**	**46,75**	**0,00**	**6.796.005.802,00**	**0**	**0**	**DKPP**
	327.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**23.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**23.00**	**152.830.000,00**	**0,00**	**2.110.000,00**	**0,00**	**3.808.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.918.000,00**	**0,00**	**3,87**	**0,00**	**5.918.000,00**	**0**	**0**	
	327.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	36.00	0,00	0.00	0,00	4.00	152.830.000,00	0,00	2.110.000,00	0,00	3.808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.918.000,00	0,00	3,87	0,00	5.918.000,00	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Perencanaan Perangkat Daerah																									
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					0,00	3,87					1=1
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah						
	327.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**59.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**59.00**	**12.286.461.566,00**	**0,00**	**2.902.818.271,00**	**0,00**	**3.176.420.899,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.079.239.170,00**	**0,00**	**49,48**	**0,00**	**6.079.239.170,00**	**0**	**0**	
	327.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	0.00	0,00	0.00	0,00	142.00	12.240.381.566,00	0,00	2.902.818.271,00	0,00	3.164.900.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.067.719.170,00	0,00	49,57	0,00	6.067.719.170,00	0	0	
	327.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	12.00	46.080.000,00	0,00	0,00	0,00	11.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11520000	0,00	25,00	0,00	11.520.000,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					0,00	37,29					1=2
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah						
	327.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**%**	**100.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100.00**	**716.324.769,00**	**0,00**	**16.348.000,00**	**0,00**	**81.969.135,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.317.135,00**	**0,00**	**13,73**	**0,00**	**98.317.135,00**	**0**	**0**	
	327.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6.00	0,00	0.00	0,00	1.00	7.525.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	16.67	0	
	327.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6.00	0,00	0.00	0,00	1.00	184.295.900,00	1,00	1.550.000,00	1,00	36.969.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	38519675	100,00	20,90	1,00	38.519.675,00	16.67	0	
	327.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah	Paket	6.00	0,00	0.00	0,00	1.00	19.232.300,00	0,00	0,00	1,00	7.069.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	7069740	100,00	36,76	1,00	7.069.740,00	16.67	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Tangga yang Disediakan																								
	327.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6.00	0,00	0.00	0,00	1	209.051.600,00	1,00	0,00	1,00	17.276.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	17276793	100,00	8,26	1,00	17.276.793,00	16.67	0	
	327.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6.00	0,00	0.00	0,00	1	296.219.969,00	1,00	14.798.000,00	1,00	20.652.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	35450927	100,00	11,97	1,00	35.450.927,00	16.67	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					100,00	15,58					1=3
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Rendah					
	327.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan**	**%**	**600.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100.00**	**1.145.983.831,00**	**0,00**	**286.574.885,00**	**0,00**	**275.708.862,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**562.283.747,00**	**0,00**	**49,07**	**0,00**	**562.283.747,00**	**0**	**0**	
	327.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	6.00	0,00	0.00	0,00	1	8.555.000,00	1,00	480.000,00	1,00	2.867.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3.347.000,00	100,00	39,12	1,00	3.347.000,00	16.67	0	
	327.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	6.00	0,00	0.00	0,00	1	198.231.231,00	1,00	51.919.735,00	1,00	49.201.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	101120851	100,00	51,01	1,00	101.120.851,00	16.67	0	
	327.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	6.00	0,00	0.00	0,00	1	16.970.000,00	0,00	6.837.750,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6837750	100,00	40,29	1,00	6.837.750,00	16.67	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	327.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6.00	0,00	0.00	0,00	1	922.227.600,00	1,00	227.337.400,00	1,00	223.640.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	450978146	100,00	48,90	1,00	450.978.146,00	16.67	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					100,00	44,83					1=5
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Rendah					
	327.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**%**	**600.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100.00**	**236.635.500,00**	**0,00**	**15.358.750,00**	**0,00**	**34.889.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.247.750,00**	**0,00**	**21,23**	**0,00**	**50.247.750,00**	**0**	**0**	
	327.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	30.00	0,00	0.00	0,00	5	123.405.900,00	1,00	15.358.750,00	1,00	31.559.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	46.917.750,00	20,00	38,02	1,00	46.917.750,00	3.33	0	
	327.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	18.00	0,00	0.00	0,00	3.00	84.020.300,00	0,00	0,00	0,00	3.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3330000	0,00	3,96	0,00	3.330.000,00	0	0	
	327.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12.00	0,00	0.00	0,00	2.00	29.209.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					6,67	13,99					1=6
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah						
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					0,00	137,38	0/1				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Tinggi					
6	**327.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase peningkatan kelompok yang mendapatkan sarana tanaman pangan dan perkebunan**	**%**	**43,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**53.00**	**8.706.948.100,00**	**0,00**	**17.092.000,00**	**0,00**	**1.215.382.418,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.232.474.418,00**	**0,00**	**14,16**	**0,00**	**1.232.474.418,00**	**0**	**0**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
	327.02.2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Jumlah kelompok pengguna sarana pendukung pertanian dan perkebunan**	**Kelompok**	**369.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**78.00**	**5.206.948.100,00**	**0,00**	**15.552.000,00**	**0,00**	**1.134.176.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.149.728.000,00**	**0,00**	**22,08**	**0,00**	**1.149.728.000,00**	**0**	**0**	
	327.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	18.00	0,00	0.00	0,00	3.00	3.506.948.100,00	0,00	15.552.000,00	0,00	1.131.576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.128.000,00	0,00	32,71	0,00	1.147.128.000,00	0	0	
	327.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	6.00	0,00	0.00	0,00	1.00	1.700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2600000	0,00	0,15	0,00	2.600.000,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0,00	16,43					1=1
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah						
	327.02.2.02	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Peningkatan populasi ternak**	**%**	**3.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**3.09**	**1.810.000.000,00**	**0,00**	**1.540.000,00**	**1,00**	**78.300.718,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**79.840.718,00**	**32,36**	**4,41**	**1,00**	**79.840.718,00**	**33.33**	**0**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Luas areal tanam pangan dan hortikultura unggulan	**Ha**	**300.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**53.00**		**1,00**		**50,00**		**0,00**		**0,00**		**50,00**		**94,34**		**50,00**	**0,00**	**16.67**	**0**	
	327.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	6.00	0,00	0.00	0,00	1.00	205.000.000,00	0,00	1.540.000,00	0,00	18.984.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.524.325,00	0,00	10,01	0,00	20.524.325,00	0	0	
	327.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	18.00	0,00	0.00	0,00	3.00	1.605.000.000,00	0,00	0,00	1,00	59.316.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	59316393	33,33	3,70	1,00	59.316.393,00	5.56	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					16,67	6,86					1=2
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah						
	327.02.2.04	**Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer**	**Persentase pengecer yang dipantau**	**%**	**75.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**75.00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	
	327.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Laporan	288.00	0,00	0.00	0,00	1.00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					0,00	0,00					1=3
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah						
	327.02.2.06	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**Jumlah budidaya ternak sesuai GFP (Good Farming Practices)**	**Unit**	**60.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**10.00**	**1.675.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**2.905.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**2.905.700,00**	**30,00**	**0,17**	**3,00**	**2.905.700,00**	**5**	**0**	
	327.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah	Ton	1.00	0,00	0.00	0,00	1.00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	1,62	0,00	324.000,00	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kabupaten/Kota Lain																								
	327.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	ekor	198.00	0,00	0.00	0,00	30.00	1.655.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.581.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2581700	0,00	0,16	0,00	2.581.700,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					0,00	0,89					1=4
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah						
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					156,70	26,66	156.7/1				
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Rendah					
7	**327.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Presentase prasarana pertanian yang digunakan**	**%**	**80,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**80**	**4.896.349.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116.161.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116.161.150,00**	**0,00**	**2,37**	**0,00**	**116.161.150,00**	**0**	**0**	**DKPP**
	327.03.2.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Jumlah dokumen LP2B yang tersusun**	**Dokumen**	**6.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**1**	**320.073.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.629.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.629.000,00**	**0,00**	**5,51**	**0,00**	**17.629.000,00**	**0**	**0**	
	327.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	4.00	0,00	0.00	0,00	1.00	160.073.500,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,07	0,00	120.000,00	0	0	
	327.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan	Dokumen	6.00	0,00	0.00	0,00	1.00	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.509.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17509000	0,00	10,94	0,00	17.509.000,00	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Berkelanjutan/LCP 2B yang dikelola																								
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					0,00	5,51					1=1
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah						
	327.03.2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Persentase peningkatan prasarana pertanian**	**%**	**10.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**10.00**	**4.576.276.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.532.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.532.150,00**	**0,00**	**2,15**	**0,00**	**98.532.150,00**	**0**	**0**	
	327.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun/direhab	Unit	36.00	0,00	0.00	0,00	36.00	3.495.000.000,00	0,00	0,00	0,00	98.052.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.052.150,00	0,00	2,81	0,00	98.052.150,00	0	0	
	327.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Unit	6.00	0,00	0.00	0,00	1.00	376.276.400,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480000	0,00	0,13	0,00	480.000,00	0	0	
	327.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Unit	7.00	0,00	0.00	0,00	7.00	705.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					0,00	0,98					1=2
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah						
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					0,00	7,66	0/1				
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah						
8	**327.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular**	**%**	**1,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**1.00**	**135.039.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**83.567.140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**83.567.140,00**	**100,00**	**61,88**	**1,00**	**83.567.140,00**	**100**	**0**	**DKPP**
	.		**Persentase status kesehatan ternak**	**%**	**90,00**		**0.00**	**0,00**	**90.00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0**		**DKPP**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	327.04.2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase status kesehatan ternak**	**%**	**89.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**89.00**	**110.039.300,00**	**60,00**	**0,00**	**65,00**	**77.603.340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,00**	**77.603.340,00**	**73,03**	**70,52**	**65,00**	**77.603.340,00**	**73.03**	**0**	**DKPP**
	327.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Laporan	1.00	0,00	0.00	0,00	1.00	110.039.300,00	0,00	0,00	1,00	77.603.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	77.603.340,00	100,00	70,52	1,00	77.603.340,00	100	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					100,00	70,52					1=1
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sedang					
	327.04.2.03	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan kapasitas pelayanan jasa laboratorium dan medik veteriner**	**%**	**50.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**50.00**	**10.000.000,00**	**40,00**	**0,00**	**45,00**	**1.545.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,00**	**1.545.200,00**	**90,00**	**15,45**	**45,00**	**1.545.200,00**	**90**	**0**	
	327.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	1.00	0,00	0.00	0,00	1.00	10.000.000,00	1,00	0,00	1,00	1.545.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.545.200,00	100,00	15,45	1,00	1.545.200,00	100	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					100,00	15,45					1=2
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Rendah					
	327.04.2.04	**Penerapan dan Pengawasan**	**Persentase unit BAH yang sesuai**	**%**	**540.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**75.00**	**15.000.000,00**	**15,00**	**0,00**	**85,00**	**4.418.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,00**	**4.418.600,00**	**113,33**	**29,46**	**85,00**	**4.418.600,00**	**15.74**	**0**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	**persyaratan teknis**																								
	327.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	1.00	0,00	0.00	0,00	1.00	15.000.000,00	0,00	0,00	1,00	4.418.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4.418.600,00	100,00	29,46	1,00	4.418.600,00	100	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					100,00	29,46					1=3
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Rendah					
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					276,36	115,43	276.36/1				
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
9	**327.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase fasilitasi penanggulangan bencana**	**%**	**75,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**75**	**50.000.000,00**	**25,00**	**0,00**	**25,00**	**19.741.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,00**	**19.741.800,00**	**33,33**	**39,48**	**25,00**	**19.741.800,00**	**33.33**	**0**	**DKPP**
	327.05.2.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Penurunan luas areal serangan OPT tanaman pangan**	**%**	**100.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100.00**	**50.000.000,00**	**25,00**	**0,00**	**30,00**	**19.741.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**19.741.800,00**	**30,00**	**39,48**	**30,00**	**19.741.800,00**	**30**	**0**	
			Penurunan luas areal serangan OPT tanaman perkebunan	**%**	**100.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100.00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	
			Penurunan luas areal serangan OPT tanaman hortikultura	**%**	**100.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100.00**		**25,00**		**30,00**		**0,00**		**0,00**		**30,00**		**30,00**		**30,00**	**0,00**	**30**	**0**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	327.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	3.00	0,00	0.00	0,00	3.00	50.000.000,00	1,00	0,00	3,00	19.741.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	19.741.800,00	100,00	39,48	3,00	19.741.800,00	100	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					100,00	39,48					1=1
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Rendah					
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					60,00	39,48	60/1				
Predikat kinerja(%)																					Rendah	Sangat Rendah					
10	**327.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota yang difasilitasi**	**%**	**100,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100.00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**DKPP**
	327.06.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah usulan yang difasilitasi**	**Usulan**	**15.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**3**	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**DKPP**
	327.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	laporan	1.00	0,00	0.00	0,00	1.00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					0,00	0,00					1=1
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					0,00	0,00	0/1				
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah						
11	**327.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase kelas kelompok utama**	**%**	**3,22**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**3.22**	**1.800.635.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290.515.252,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290.515.252,00**	**0,00**	**16,13**	**0,00**	**290.515.252,00**	**0**	**0**	**DKPP**
	.		**Persentase pelaku usaha pertanian yang didampingi**	**%**	**8,00**		**0.00**	**0,00**	**10.00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0**		**DKPP**
	.		**Persentase pelaku usaha perkebunan yang mendapat pembinaan**	**%**	**20,00**		**0.00**	**0,00**	**25.00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0**		**DKPP**
	.		**Persentase peningkatan kelas kelompok tani**	**%**	**3,26**		**0.00**	**0,00**	**3.26**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0**		**DKPP**
	327.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Persentase peningkatan klas kelompok tani**	**%**	**3.26**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**3.26**	**1.800.635.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290.515.252,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290.515.252,00**	**0,00**	**16,13**	**0,00**	**290.515.252,00**	**0**	**0**	
	327.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	6.00	0,00	0.00	0,00	1.00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	327.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	6.00	0,00	0.00	0,00	6.00	1.272.089.200,00	0,00	0,00	0,00	290.515.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290515252	0,00	22,84	0,00	290.515.252,00	0	0	
	327.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana			0,00	0.00	0,00	0.00	378.546.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyuluhan Pertanian	Penyuluhan Pertanian																								
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					0,00	7,61					1=1
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah						
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					0,00	16,13	0/1				
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah						
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)																					6,67	15,75					
Predikat kinerja(%)																					Sangat Renda						
Total																					**30.717.208.166,00**			**8.745.035.102,00**			
Persentase Realisasi Anggaran																								**28.47%**			
Predikat																								**Sangat Rendah**			

BAB III.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program, kegiatan dan sub kegiatan memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pada pencapaian Visi Kepala Daerah seperti yang tertuang pada RPJMD 2021-2026. Perencanaan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pada tahun 2025 didasarkan pada RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2021-2026. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mendukung misi, tujuan dan sasaran RPJMD. Merujuk visi Bupati Pacitan "MASYARAKAT PACITAN SEJAHTERA DAN BAHAGIA" Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mendukung pada misi kedua dan ketiga yaitu:

1. Mewujudkan pembangunan dan peningkatan daya saing SDM yang kukuh dan berpijak pada nilai-nilai agama dan budaya bangsa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan dan sasaran meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, serta Sektor Unggulan Lainnya dengan tujuan: meningkatnya daya saing perekonomian melalui pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan dan sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan.

Tujuan Dinas Ketahanan Pangan dalam mencapai sasaran meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan yaitu: *Meningkatkan Ketahanan Pangan Rumah Tangga* dan *Meningkatkan PDRB Sektor Pertanian.* Untuk mencapai tujuan dan sasaran disusun program dan kegiatan dengan output yang diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 induk dan perubahan beserta indikator kinerjanya disajikan pada tabel sebagai berikut:

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Kinerja	
				INDUK	PERUBAHAN
	TUJUAN 1				
	Meningkatkan Ketahanan Pangan Rumah Tangga	Indeks Ketahanan Pangan		81	81
	SASARAN 1				
	Meningkatnya Keberagaman Konsumsi Pangan di tingkat Rumah Tangga	Pola Pangan Harapan (PPH)		90,55	90,55
		Prosentase produk pangan segar yang memenuhi standar pangan keamanan dan mutu pangan	%	94,5	94,5
1	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	**Persentase Desa Mandiri Pangan**	**desa**	**1.00**	**1.00**
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Lembaga Pangan Yang Berkembang**	**Desa**	**1.00**	**1.00**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan	2.00	2.00
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastrultur logistik	laporan	2.00	2.00
2	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Persentase Meningkatnya Ketersediaan Pangan Beras**	**%**	**97.00**	**97.00**
		Persentase meningkatnya ketersediaan pangan jagung	**%**	**98.00**	**98.00**
		Persentase meningkatnya ketersediaan pangan kedelai	**%**	**96.00**	**96.00**
		Persentase meningkatnya ketersediaan pangan daging	**%**	**89.00**	**89.00**
		Persentase meningkatnya ketersediaan pangan telur	**%**	**93.00**	**93.00**
		Persentase meningkatnya ketersediaan pangan ikan	**%**	**96.00**	**96.00**
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	**Persentasae pangan pokok yang disalurkan**	**%**	**90.00**	**90.00**
	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	Dokumen	2.00	2.00
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	**Persentase peningkatan cadangan pangan**	**Dokumen**	**1.00**	**1.00**
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	10.60	10.60

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Kinerja	
				INDUK	PERUBAHAN
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	**Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang**	**Desa**	**3.00**	**3.00**
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	1.00	2.00
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	2.00	2.00
3	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase tertanganinya kerawanan pangan**	**Desa**	**1.00**	**1.00**
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	**Analisis desa rawan pangan**	**Dokumen**	**1.00**	**1.00**
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Dokumen	1.00	1.00
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Menurunnya Jumlah desa Rawan Pangan**	**Desa**	**1.00**	**1.00**
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2.00	2.00
4	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase pangan yang aman**	**%**	**94.50**	**94.50**
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pangan yang aman**	**%**	**94.50**	**94.50**
	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Dokumen	2.00	2.00
	TUJUAN 2				
	Meningkatkan PDRB Sektor Pertanian	Persentase Peningkatan PDRB Pertanian	%	1,5	1,5
	SASARAN				
	Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Nilai IKM		84,5	84,5
	Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta populasi ternak	%	3,8	3,8
		Indeks Pertanaman		1,81	1,81

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Kinerja	
				INDUK	PERUBAHAN
	Meningkatnya Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pertanian	Persentase peningkatan jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pertanian yang ditumbuhkan	%	5	5
5	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**Skor**	**75.92**	**75.92**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**23.00**	**23.00**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4.00	4.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**59.00**	**59.00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	142.00	142.00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12.00	12.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**%**	**100.00**	**100.00**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1.00	1.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1.00	1.00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1.00	1.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan**	**%**	**100.00**	**100.00**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	12
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	12

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Kinerja	
				INDUK	PERUBAHAN
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**%**	**100.00**	**100.00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	8
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	3.00	3.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2.00	2.00
6	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase peningkatan kelompok yang mendapatkan sarana tanaman pangan dan perkebunan**	**%**	**53.00**	**53.00**
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	**Jumlah kelompok pengguna sarana pendukung pertanian dan perkebunan**	**Kelompok**	**78.00**	**78.00**
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	3.00	3.00
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1.00	1.00
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	**Peningkatan populasi ternak**	**%**	**3.09**	**3.09**
		Luas areal tanam pangan dan hortikultura unggulan	**Ha**	**53.00**	**53.00**
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	1.00	1.00
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	3.00	3.00
	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	**Persentase pengecer yang dipantau**	**%**	**75.00**	**75.00**
	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Laporan	1.00	1.00
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	**Jumlah budidaya ternak sesuai GFP (Good Farming Practices)**	**Unit**	**10.00**	**10.00**
	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ton	1.00	0,7

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Kinerja	
				INDUK	PERUBAHAN
	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	ekor	30.00	6.249
7	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Presentase prasarana pertanian yang digunakan**	**%**	**80**	**80**
	Pengembangan Prasarana Pertanian	**Jumlah dokumen LP2B yang tersusun**	**Dokumen**	**1**	**1**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	1.00	1.00
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Dokumen	1.00	1.00
	Pembangunan Prasarana Pertanian	**Persentase peningkatan prasarana pertanian**	**%**	**10.00**	**10.00**
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun/direhab	Unit	36.00	36.00
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Unit	1.00	3.00
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Unit	7.00	11.00
8	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular**	**%**	**1.00**	**1.00**
		Persentase status kesehatan ternak	**%**	**90.00**	**90.00**
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	**Persentase status kesehatan ternak**	**%**	**89.00**	**89.00**
	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Laporan	1.00	1.00
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Peningkatan kapasitas pelayanan jasa laboratorium dan medik veteriner**	**%**	**50.00**	**50.00**
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	1.00	1.00
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	**Persentase unit BAH yang sesuai persyaratan teknis**	**%**	**75.00**	**75.00**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Kinerja	
				INDUK	PERUBAHAN
	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	1.00	1.00
9	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase fasilitasi penanggulangan bencana**	**%**	**75**	**75**
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	**Penurunan luas areal serangan OPT tanaman pangan**	**%**	**100.00**	**100.00**
		Penurunan luas areal serangan OPT tanaman perkebunan	**%**	**100.00**	**100.00**
		Penurunan luas areal serangan OPT tanaman hortikultura	**%**	**100.00**	**100.00**
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	3.00	3.00
10	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota yang difasilitasi**	**%**	**100.00**	**100.00**
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah usulan yang difasilitasi**	**Usulan**	**3**	**3**
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	laporan	1.00	1.00
11	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase kelas kelompok utama**	**%**	**3.22**	**3.22**
		Persentase pelaku usaha pertanian yang didampingi	**%**	**10.00**	**10.00**
		Persentase pelaku usaha perkebunan yang mendapat pembinaan	**%**	**25.00**	**25.00**
		Persentase peningkatan kelas kelompok tani	**%**	**3.26**	**3.26**
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	**Persentase peningkatan klas kelompok tani**	**%**	**3.26**	**3.26**
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	1.00	14.00
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	6.00	6.00
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		0.00	80

dengan rencana program kegiatan dan pendanaan sebagai berikut:

No	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian RENJA OPD 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		PD Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
						Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian							21.932.800.166,00	30.289.462.166,00	31.704.607.319,00							37.846.294.754,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							525.000.000,00	525.000.000,00	433.696.850,00							3.008.077.514,00	
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							525.000.000,00	525.000.000,00	433.696.850,00							3.008.077.514,00	
1	2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Desa Mandiri Pangan				-	1 desa %	50.000.000,00	50.000.000,00	40.100.000,00							422.538.753,00	
	2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pangan Yang Berkembang	-			-	2 Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	Stakeholder Pangan, Kab. Pacitan		422.538.753,00	DKPP
	2	09	02	2.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya																	
							Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				2 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal			132.807.872,00	DKPP
	2	09	02	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik																	

No	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian RENJA OPD 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		PD Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik				1 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	40.100.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal			69.730.881,00	DKPP
	2	09	02	2.01	0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia				2 unit	0 unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal			220.000.000,00	DKPP
2	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGA MASYARAKAT	Persentase meningkatnya Ketersediaan Pangan : daging Persentase meningkatnya Ketersediaan Pangan : Jagung Persentase meningkatnya Ketersediaan Pangan : Beras Persentase meningkatnya Ketersediaan Pangan : Ikan				-	89 98 97 96 93 % % % % %	405.000.000,00	405.000.000,00	316.300.100,00							2.030.985.633,00	

No	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian RENJA OPD 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		PD Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
							Persentase meningkatnya Ketersediaan Pangan : Telur																
	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentasae pangan pokok yang disalurkan	-			-	90 %	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	Pedagang bahan pokok		398.485.633,00	DKPP
	2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																	
							Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal			120.000.000,00	DKPP
	2	09	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya																	

No	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian RENJA OPD 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		PD Penang gung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
							Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				1 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal			40.000.000,00	DKPP
	2	09	03	2.01	0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia																	
							Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal			175.000.000,00	DKPP
	2	09	03	2.01	0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan																	
							Informasi Harga dan Pasokan Pangan				1 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	8.316.400,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal			20.000.000,00	DKPP

No	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian RENJA OPD 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		PD Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
																		ekonomi hijau, dan ekonomi biru					
	2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																	
							Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal			43.485.633,00	DKPP
	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan cadangan pangan	-			-	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	KK rawan pangan		1.210.000.000,00	DKPP
	2	09	03	2.02	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal																	

No	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian RENJA OPD 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		PD Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
							Rencana Kebutuhan Pangan Lokal				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal			15.000.000,00	DKPP
	2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				100 Ton	10,6 Ton	200.000.000,00	200.000.000,00	187.207.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal			1.195.000.000,00	DKPP
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	-			-	3 Desa	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	Masyarakat dan anak sekolah		422.500.000,00	DKPP

No	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian RENJA OPD 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		PD Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
																		ekonomi hijau, dan ekonomi biru					
	2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																	
							Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	6.297.400,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal			110.000.000,00	DKPP
	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																	
							Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	2 Laporan	180.000.000,00	180.000.000,00	114.479.300,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal			290.000.000,00	DKPP

No	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian RENJA OPD 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		PD Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah				
	2	09	03	2.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun																	
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				1 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal			22.500.000,00	DKPP
3	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase tertanganinya kerawanan pangan				-	1 Desa %	50.000.000,00	50.000.000,00	60.729.400,00							240.421.393,00	
	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Analisis desa rawan pangan	-			-	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	-		96.168.166,00	DKPP
	2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																	
							Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	36.035.300,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal			96.168.166,00	DKPP

No	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian RENJA OPD 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		PD Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
																		pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru					
	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Menurunnya Jumlah desa Rawan Pangan	-			-	1 Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	Desa Rawan Pangan		144.253.227,00	DKPP
	2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	24.694.100,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal			74.253.227,00	DKPP
	2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																	

No	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian RENJA OPD 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		PD Penanggung Jawab
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
								Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				1 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal			70.000.000,00	DKPP
4	2	09	05				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan yang aman				-	94,5 %	20.000.000,00	20.000.000,00	16.567.350,00							314.131.735,00	
	2	09	05	2.01			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pangan yang aman	-			-	94,5 %	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	Pelaku usaha PSAT		314.131.735,00	DKPP
	2	09	05	2.01	0004		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																	
								Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal			42.000.000,00	DKPP

No	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian RENJA OPD 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		PD Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah				
																		pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru					
	2	09	05	2.01	0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan																	
							Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal			80.000.000,00	DKPP
	2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	16.567.350,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal			50.000.000,00	DKPP
	2	09	05	2.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																	

No	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian RENJA OPD 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		PD Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
							Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal			142.131.735,00	DKPP
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																	
5	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah				-	>B Nilai	14.368.675.666,00	14.538.235.666,00	13.722.361.461,00								15.097.827.021,00	
	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja PD Terlaksananya perencanaan dan penganggaran PD	-			-	1 23 Dokumen	30.000.000,00	152.830.000,00	152.830.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	-		37.114.028,00	DKPP
	3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	

No	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian RENJA OPD 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		PD Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	23 Dokumen	30.000.000,00	152.830.000,00	110.899.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			21.208.000,00	DKPP
	3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			15.906.028,00	DKPP
	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya administrasi keuangan PD	-			-	100 % 59 Dokumen	12.216.901.566,00	12.286.461.566,00	12.286.461.566,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	ASN		12.332.939.817,00	DKPP
	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				142 Orang/bulan	135 Orang/bulan	12.170.821.566,00	12.240.381.566,00	11.586.303.361,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			12.229.779.683,00	DKPP
	3	27	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	

No	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian RENJA OPD 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		PD Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	46.080.000,00	46.080.000,00	46.080.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			103.160.134,00	DKPP
	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	474.714.569,00	716.324.769,00	716.324.769,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Dinas		660.157.605,00	DKPP
	3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.545.000,00	7.525.000,00	7.260.400,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			17.479.664,00	DKPP
	3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	116.626.500,00	184.295.900,00	157.920.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			300.766.019,00	DKPP
	3	27	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	

No	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian RENJA OPD 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		PD Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.608.100,00	19.232.300,00	18.890.300,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			29.911.922,00	DKPP
	3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	43.911.000,00	209.051.600,00	148.033.200,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			12.000.000,00	DKPP
	3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	303.023.969,00	296.219.969,00	94.333.969,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			300.000.000,00	DKPP
	3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	-			-	100 %	0,00	0,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Dinas		189.968.871,00	DKPP
	3	27	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	

No	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian RENJA OPD 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		PD Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			189.968.871,00	DKPP
	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	100 %	1.191.678.631,00	1.145.983.831,00	1.145.983.831,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Dinas		1.124.034.767,00	DKPP
	3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	12 Laporan	8.555.000,00	8.555.000,00	7.486.900,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			21.529.657,00	DKPP
	3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	12 Laporan	198.231.231,00	198.231.231,00	202.731.231,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			260.111.273,00	DKPP
	3	27	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

No	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian RENJA OPD 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		PD Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	16.970.000,00	16.970.000,00	16.970.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			89.084.360,00	DKPP
	3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	967.922.400,00	922.227.600,00	944.354.300,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			753.309.477,00	DKPP
	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah	-			-	1 Kab. Pacitan 80 %	455.380.900,00	236.635.500,00	236.635.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Dinas		753.611.933,00	DKPP
	3	27	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	8 Unit	112.567.500,00	123.405.900,00	153.719.200,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			150.000.000,00	DKPP
	3	27	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																	

No	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian RENJA OPD 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		PD Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah				
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	342.813.400,00	84.020.300,00	83.170.300,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			450.000.000,00	DKPP
	3	27	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	2 Unit	0,00	29.209.300,00	144.209.300,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			153.611.933,00	DKPP
6	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-				-	-	3.825.585.200,00	8.706.948.100,00	10.275.350.020,00							7.626.572.117,00	
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah kelompok pengguna sarana pendukung pertanian dan perkebunan	-			-	78 Kelompok	3.055.585.200,00	5.206.948.100,00	5.206.948.100,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	Kelompok tani		5.270.050.452,00	DKPP
	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																	
							Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				3 Laporan	3 Laporan	2.255.585.200,00	3.506.948.100,00	4.916.736.500,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal			2.115.882.700,00	DKPP

No	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian RENJA OPD 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		PD Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah				
																	Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)						
	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																	
							Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	1 Laporan	800.000.000,00	1.700.000.000,00	1.677.594.020,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal			3.154.167.752,00	DKPP
	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas areal tanam pangan dan hortikultura unggulan Peningkatan populasi ternak	-			-	3,0953 Ha	550.000.000,00	1.810.000.000,00	1.810.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	Kelompok tani		1.218.401.729,00	DKPP
	3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman																	
							Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	205.000.000,00	172.080.600,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal			880.133.538,00	DKPP
	3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																	

No	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian RENJA OPD 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		PD Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
							Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	3 Dokumen	425.000.000,00	1.605.000.000,00	1.566.361.900,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			338.268.191,00	DKPP
	3	27	02	2.04		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase pengecer yang dipantau	-			-	75 %	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	Pengecer obat hewan		30.000.000,00	DKPP
	3	27	02	2.04	0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan																	
							Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	8.348.400,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal			30.000.000,00	DKPP
	3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah budidaya ternak sesuai GFP (Good Farming Practices)	-			-	10	205.000.000,00	1.675.000.000,00	1.675.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	Kelompok tani		1.108.119.936,00	DKPP
	3	27	02	2.06	0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																	

No	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian RENJA OPD 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		PD Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah				
							Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				1 Ton	0,7 Ton	20.000.000,00	20.000.000,00	17.032.900,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal			108.119.936,00	DKPP
	3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																	
							Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				10 Ekor	1649 Ekor	185.000.000,00	1.655.000.000,00	1.917.195.700,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal			1.000.000.000,00	DKPP
7	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase prasarana pertanian yang digunakan				-	80 %	1.738.500.000,00	4.897.149.900,00	5.271.235.372,00							7.601.220.702,00	
	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah dokumen LP2B yang tersusun	-			-	1 Dokumen	267.873.500,00	320.873.500,00	320.873.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kelompok tani		740.114.202,00	DKPP
	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																	
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	1 Laporan	107.873.500,00	160.873.500,00	221.293.500,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			200.000.000,00	DKPP

No	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian RENJA OPD 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		PD Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah				
	3	27	03	2.01	0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota																	
							Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	136.901.200,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal			540.114.202,00	DKPP
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan prasarana pertanian	-			-	10 %	1.470.626.500,00	4.576.276.400,00	4.576.276.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	Kelompok tani		6.861.106.500,00	DKPP
	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																	
							Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				12 Unit	13 Unit	884.000.000,00	3.495.000.000,00	3.426.741.680,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal			2.000.000.000,00	DKPP
	3	27	03	2.02	0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit																	
							Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				23 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan	-			2.147.578.000,00	DKPP

No	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian RENJA OPD 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		PD Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
																		pemberantasan kemiskinan.					
	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																	
							Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	186.626.500,00	376.276.400,00	472.088.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			186.626.500,00	DKPP
	3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani																	
							Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				4 Unit	26 Unit	400.000.000,00	705.000.000,00	1.014.210.992,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal			2.526.902.000,00	DKPP
8	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase status kesehatan ternak Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular				-	89 1 % %	135.039.300,00	135.039.300,00	336.402.900,00							654.824.000,00	

No	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian RENJA OPD 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		PD Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase status kesehatan ternak	-			-	90 %	110.039.300,00	110.039.300,00	110.039.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Peternak		290.798.000,00	DKPP
	3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				1 Laporan	1 Laporan	110.039.300,00	110.039.300,00	320.132.900,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			290.798.000,00	DKPP
	3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	-	-		148.456.000,00	DKPP
	3	27	04	2.02	0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan																	
							Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	-	-			148.456.000,00	DKPP
	3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas pelayanan jasa laboratorium dan medik veteriner	-			-	50 %	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00			-	-	-		185.570.000,00	DKPP

No	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian RENJA OPD 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		PD Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
	3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																	
							Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				1 Laporan	0 Laporan	0,00	10.000.000,00	7.133.800,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			185.570.000,00	DKPP
	3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase unit BAH yang sesuai persyaratan teknis	-			-	90 %	25.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pedagang bahan asal hewan		30.000.000,00	DKPP
	3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																	
							Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	15.000.000,00	9.136.200,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			30.000.000,00	DKPP
9	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana				-	75 %	50.000.000,00	50.000.000,00	39.556.900,00							1.858.798.400,00	

No	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian RENJA OPD 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		PD Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Penurunan luas areal serangan OPT tanaman hortikultura Penurunan luas areal serangan OPT tanaman pangan Penurunan luas areal serangan OPT tanaman perkebunan	-			-	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kelompok tani		1.858.798.400,00	DKPP
	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																	
							Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				1 Ha	3 Ha	50.000.000,00	50.000.000,00	39.556.900,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			215.456.000,00	DKPP
	3	27	05	2.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																	
							Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				1 Ha	0 Ha	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			1.643.342.400,00	DKPP
10	3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota yang difasilitasi				-	100 %	15.000.000,00	15.000.000,00	10.086.116,00							140.000.000,00	

No	Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian RENJA OPD 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		PD Penanggung Jawab
												Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
	3	27	06	2.01			Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usulan yang difasilitasi	-			-	3 Usulan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Pelaku usaha pertanian		140.000.000,00	DKPP
	3	27	06	2.01	0005		Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian																	
								Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	10.086.116,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			140.000.000,00	DKPP
11	3	27	07				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase pelaku usaha pertanian yang didampingi Persentase pelaku usaha perkebunan yang mendapat pembinaan Persentase kelas kelompok utama Persentase peningkatan kelas kelompok tani				-	10 25 3,22 3,26 % % %	1.275.000.000,00	1.422.089.200,00	1.615.917.700,00							1.858.975.000,00	
	3	27	07	2.01			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	-			-	3,26 %	1.275.000.000,00	1.422.089.200,00	1.422.089.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kelompok tani, kelembagaan petani dan penyuluh		1.858.975.000,00	DKPP

No	Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Akhir Periode	Realisasi Capaian RENJA OPD 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		PD Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)					Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah				
	3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																	
							Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Unit	14 Unit	350.000.000,00	150.000.000,00	105.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			400.000.000,00	DKPP
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																	
							Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Unit	6 Unit	925.000.000,00	1.272.089.200,00	1.132.371.700,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			950.000.000,00	DKPP
	3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			130.429.000,00	DKPP
	3	27	07	2.01	0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian																	
							Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				-	73 Orang	0,00	0,00	378.546.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	-	-			378.546.000,00	DKPP
	JUMLAH												21.932.800.166,00	30.289.462.166,00	31.704.607.319,00							37.846.294.754,00	

BAB IV. PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2025 disusun sebagai tindak lanjut perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, adanya saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya dan terjadinya kasus penyakit menular pada ternak yaitu PMK (Penyakit Mulut dan Kuku).

Perubahan terutama pada penanganan PMK, adanya DAK Nonfisik berupa bantuan operasional penyuluh dan beberapa kegiatan dari sisa lebih anggaran tahun sebelumnya yang berfokus pada fasilitasi pada petani. Terbatasnya jangka waktu pelaksanaan Renja perubahan maka perlu dilakukan upaya untuk mempercepat realisasi pelaksanaan kegiatan dengan tetap memperhatikan kondisi dan aturan yang berlaku.

Pacitan, Juli 2025
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kabupaten Pacitan

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

SUGENG SANTOSO, S.P.,M.Sc.
Pembina Tingkat I
NIP. 19741129 200003 1 003

LAMPIRAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KAB. PACITAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN							**21.932.800.166,00**	**30.289.462.166,00**	**31.704.607.319,00**	**9.771.807.153,00**							**37.846.294.754,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**525.000.000,00**	**525.000.000,00**	**433.696.850,00**	**-91.303.150,00**							**3.008.077.514,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**525.000.000,00**	**525.000.000,00**	**433.696.850,00**	**-91.303.150,00**							**3.008.077.514,00**	
1.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	**Persentase Desa Mandiri Pangan**				**-**	**1 desa %**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**40.100.000,00**	**372.538.753,00**							**422.538.753,00**	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Pangan Yang Berkembang*				-	2 Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	40.100.000,00	-9.900.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	Stakeholder Pangan, Kab. Pacitan		422.538.753,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya																		
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				2 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal			132.807.872,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik				1 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	40.100.000,00	-9.900.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal			69.730.881,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.02.2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia				2 unit	0 unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal			220.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Persentase meningkatnya Ketersediaan Pangan : daging Persentase meningkatnya Ketersediaan Pangan : Jagung Persentase meningkatnya Ketersediaan Pangan : Beras Persentase meningkatnya Ketersediaan Pangan : Ikan Persentase meningkatnya Ketersediaan Pangan : Telur**				**-**	**89 98 97 96 93 % % % % %**	**405.000.000,00**	**405.000.000,00**	**316.300.100,00**	**1.625.985.633,00**							**2.030.985.633,00**	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Persentasae pangan pokok yang disalurkan*				-	90 %	15.000.000,00	15.000.000,00	8.316.400,00	-6.683.600,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	Pedagang bahan pokok		398.485.633,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal			120.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				1 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal			40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia																		
			Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal			175.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Informasi Harga dan Pasokan Pangan				1 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	8.316.400,00	-6.683.600,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal			20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																		
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal			43.485.633,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	*Persentase peningkatan cadangan pangan*				-	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	187.207.000,00	-12.793.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	KK rawan pangan		1.210.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal																		
			Rencana Kebutuhan Pangan Lokal				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal			15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				100 Ton	10,6 Ton	200.000.000,00	200.000.000,00	187.207.000,00	-12.793.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal			1.195.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang*				-	3 Desa	190.000.000,00	190.000.000,00	120.776.700,00	-69.223.300,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	Masyarakat dan anak sekolah		422.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																		
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	6.297.400,00	-3.702.600,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal			110.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	2 Laporan	180.000.000,00	180.000.000,00	114.479.300,00	-65.520.700,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal			290.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				1 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal			22.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase tertanganinya kerawanan pangan**				**-**	**1 Desa %**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**60.729.400,00**	**190.421.393,00**							**240.421.393,00**	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	*Analisis desa rawan pangan*				-	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	36.035.300,00	16.035.300,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	-		96.168.166,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																		
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	36.035.300,00	16.035.300,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal			96.168.166,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Menurunnya Jumlah desa Rawan Pangan*				-	1 Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	24.694.100,00	-5.305.900,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	Desa Rawan Pangan		144.253.227,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	24.694.100,00	-5.305.900,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal			74.253.227,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				1 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal			70.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
4.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase pangan yang aman**				**-**	**94,5 %**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**16.567.350,00**	**294.131.735,00**							**314.131.735,00**	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pangan yang aman*				-	94,5 %	20.000.000,00	20.000.000,00	16.567.350,00	-3.432.650,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	Pelaku usaha PSAT		314.131.735,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal			42.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal			80.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	16.567.350,00	-3.432.650,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal			142.131.735,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**21.407.800.166,00**	**29.764.462.166,00**	**31.270.910.469,00**	**9.863.110.303,00**							**34.838.217.240,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**21.407.800.166,00**	**29.764.462.166,00**	**31.270.910.469,00**	**9.863.110.303,00**							**34.838.217.240,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**				**-**	**>B Nilai**	**14.368.675.666,00**	**14.538.235.666,00**	**13.722.361.461,00**	**729.151.355,00**							**15.097.827.021,00**	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja PD Terlaksananya perencanaan dan penganggaran PD*				-	1 23 Dokumen	30.000.000,00	152.830.000,00	110.899.000,00	80.899.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	-		37.114.028,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	23 Dokumen	30.000.000,00	152.830.000,00	110.899.000,00	80.899.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			21.208.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			15.906.028,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya administrasi keuangan PD*				-	100 % 59 Dokumen	12.216.901.566,00	12.286.461.566,00	11.632.383.361,00	-584.518.205,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	ASN		12.332.939.817,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				142 Orang/ bulan	135 Orang/ bulan	12.170.821.566,00	12.240.381.566,00	11.586.303.361,00	-584.518.205,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			12.229.779.683,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	46.080.000,00	46.080.000,00	46.080.000,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			103.160.134,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	474.714.569,00	716.324.769,00	426.437.869,00	-48.276.700,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Dinas		660.157.605,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.545.000,00	7.525.000,00	7.260.400,00	1.715.400,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			17.479.664,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	116.626.500,00	184.295.900,00	157.920.000,00	41.293.500,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			300.766.019,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.608.100,00	19.232.300,00	18.890.300,00	13.282.200,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			29.911.922,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	43.911.000,00	209.051.600,00	148.033.200,00	104.122.200,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			12.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	303.023.969,00	296.219.969,00	94.333.969,00	-208.690.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Terlaksananya pengadaan barang milik daerah*				-	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Dinas		189.968.871,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			189.968.871,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	100 %	1.191.678.631,00	1.145.983.831,00	1.171.542.431,00	-20.136.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Dinas		1.124.034.767,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	12 Laporan	8.555.000,00	8.555.000,00	7.486.900,00	-1.068.100,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			21.529.657,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	12 Laporan	198.231.231,00	198.231.231,00	202.731.231,00	4.500.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			260.111.273,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	16.970.000,00	16.970.000,00	16.970.000,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			89.084.360,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	967.922.400,00	922.227.600,00	944.354.300,00	-23.568.100,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			753.309.477,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah*				-	1 Kab. Pacitan 80 %	455.380.900,00	236.635.500,00	381.098.800,00	-74.282.100,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Dinas		753.611.933,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	8 Unit	112.567.500,00	123.405.900,00	153.719.200,00	41.151.700,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	342.813.400,00	84.020.300,00	83.170.300,00	-259.643.100,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			450.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	2 Unit	0,00	29.209.300,00	144.209.300,00	144.209.300,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			153.611.933,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**-**				**-**	**-**	**3.825.585.200,00**	**8.706.948.100,00**	**10.275.350.020,00**	**3.800.986.917,00**							**7.626.572.117,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Jumlah kelompok pengguna sarana pendukung pertanian dan perkebunan*				-	78 Kelompok	3.055.585.200,00	5.206.948.100,00	6.594.330.520,00	3.538.745.320,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	Kelompok tani		5.270.050.452,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																		
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				3 Laporan	3 Laporan	2.255.585.200,00	3.506.948.100,00	4.916.736.500,00	2.661.151.300,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal			2.115.882.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	1 Laporan	800.000.000,00	1.700.000.000,00	1.677.594.020,00	877.594.020,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal			3.154.167.752,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*Luas areal tanam pangan dan hortikultura unggulan Peningkatan populasi ternak*				-	3,09 53 Ha	550.000.000,00	1.810.000.000,00	1.738.442.500,00	1.188.442.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	Kelompok tani		1.218.401.729,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	205.000.000,00	172.080.600,00	47.080.600,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal			880.133.538,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	3 Dokumen	425.000.000,00	1.605.000.000,00	1.566.361.900,00	1.141.361.900,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			338.268.191,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	*Persentase pengecer yang dipantau*				-	75 %	15.000.000,00	15.000.000,00	8.348.400,00	-6.651.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	Pengecer obat hewan		30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan																		
			Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	8.348.400,00	-6.651.600,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal			30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Jumlah budidaya ternak sesuai GFP (Good Farming Practices)*				-	10	205.000.000,00	1.675.000.000,00	1.934.228.600,00	1.729.228.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	Kelompok tani		1.108.119.936,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																		
			Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				1 Ton	0,7 Ton	20.000.000,00	20.000.000,00	17.032.900,00	-2.967.100,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal			108.119.936,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																		
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				10 Ekor	1649 Ekor	185.000.000,00	1.655.000.000,00	1.917.195.700,00	1.732.195.700,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal			1.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Presentase prasarana pertanian yang digunakan**				**-**	**80 %**	**1.738.500.000,00**	**4.897.149.900,00**	**5.271.235.372,00**	**5.862.720.702,00**							**7.601.220.702,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	*Jumlah dokumen LP2B yang tersusun*				-	1 Dokumen	267.873.500,00	320.873.500,00	358.194.700,00	90.321.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelompok tani		740.114.202,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	1 Laporan	107.873.500,00	160.873.500,00	221.293.500,00	113.420.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota																		
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	136.901.200,00	-23.098.800,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal			540.114.202,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Persentase peningkatan prasarana pertanian*				-	10 %	1.470.626.500,00	4.576.276.400,00	4.913.040.672,00	3.442.414.172,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal	Kelompok tani		6.861.106.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																		
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				12 Unit	13 Unit	884.000.000,00	3.495.000.000,00	3.426.741.680,00	2.542.741.680,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal			2.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit																		
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				23 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			2.147.578.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	186.626.500,00	376.276.400,00	472.088.000,00	285.461.500,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			186.626.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				4 Unit	26 Unit	400.000.000,00	705.000.000,00	1.014.210.992,00	614.210.992,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK ROKOK SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal Menjaga Ekosistem Produktif Pelaku Ekonomi Lokal			2.526.902.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
4.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase status kesehatan ternak Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular**				**-**	**89 1 % %**	**135.039.300,00**	**135.039.300,00**	**336.402.900,00**	**519.784.700,00**							**654.824.000,00**	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	*Persentase status kesehatan ternak*				-	90 %	110.039.300,00	110.039.300,00	320.132.900,00	210.093.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Peternak		290.798.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				1 Laporan	1 Laporan	110.039.300,00	110.039.300,00	320.132.900,00	210.093.600,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			290.798.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		148.456.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.02.0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan																		
			Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	-	- -			148.456.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Peningkatan kapasitas pelayanan jasa laboratorium dan medik veteriner*				-	50 %	0,00	10.000.000,00	7.133.800,00	7.133.800,00			-	- -	-		185.570.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																		
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				1 Laporan	0 Laporan	0,00	10.000.000,00	7.133.800,00	7.133.800,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			185.570.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	*Persentase unit BAH yang sesuai persyaratan teknis*				-	90 %	25.000.000,00	15.000.000,00	9.136.200,00	-15.863.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Pedagang bahan asal hewan		30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																		
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	15.000.000,00	9.136.200,00	-15.863.800,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
5.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase fasilitasi penanggulangan bencana**				**-**	**75 %**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**39.556.900,00**	**1.808.798.400,00**							**1.858.798.400,00**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Penurunan luas areal serangan OPT tanaman hortikultura Penurunan luas areal serangan OPT tanaman pangan Penurunan luas areal serangan OPT tanaman perkebunan*				-	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	39.556.900,00	-10.443.100,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelompok tani		1.858.798.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				1 Ha	3 Ha	50.000.000,00	50.000.000,00	39.556.900,00	-10.443.100,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			215.456.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				1 Ha	0 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			1.643.342.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
6.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota yang difasilitasi**				**-**	**100 %**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**10.086.116,00**	**125.000.000,00**							**140.000.000,00**	
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah usulan yang difasilitasi*				-	3 Usulan	15.000.000,00	15.000.000,00	10.086.116,00	-4.913.884,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Pelaku usaha pertanian		140.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian																		
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	10.086.116,00	-4.913.884,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			140.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase pelaku usaha pertanian yang didampingi Persentase pelaku usaha perkebunan yang mendapat pembinaan Persentase kelas kelompok utama Persentase peningkatan kelas kelompok tani**				**-**	**10 25 3,22 3,26 % % % %**	**1.275.000.000,00**	**1.422.089.200,00**	**1.615.917.700,00**	**583.975.000,00**							**1.858.975.000,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani*				-	3,26 %	1.275.000.000,00	1.422.089.200,00	1.615.917.700,00	340.917.700,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Kelompok tani, kelembagaan petani dan penyuluh		1.858.975.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Unit	14 Unit	350.000.000,00	150.000.000,00	105.000.000,00	-245.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Unit	6 Unit	925.000.000,00	1.272.089.200,00	1.132.371.700,00	207.371.700,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			950.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			130.429.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian																		
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				-	73 Orang	0,00	0,00	378.546.000,00	378.546.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN	-	- -			378.546.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	J U M L A H								**21.932.800.166,00**	**30.289.462.166,00**	**31.704.607.319,00**	**9.771.807.153,00**							**37.846.294.754,00**	

RENCANA KERJA PERUBAHAN

2025

DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERKA

KABUPATEN PACITAN

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rakhmat dan hidayahnya Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan dapat menyelesaikan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja (RENJA) Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan Tahun 2021 -2026.

Dalam Rencana Kerja ini, kami berupaya untuk konsisten terhadap agenda pembangunan Kabupaten Pacitan utamanya “Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia”, guna mendukung agenda tersebut, Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan memiliki tujuan “Membantu Bupati melaksanakan urusan bidang Perdagangan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi yang meliputi Perdagangan dan Kemetrologian, Pengelolaan Pasar Daerah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.”

Semoga dengan telah tersusunnya Renja Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja, pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu tahun 2025 dapat dilaksanakan secara efektif dan se-efisien mungkin, baik dari aspek pengukuran kinerja kegiatan maupun dari aspek keuangan, sehingga dampak yang diharapkan adalah terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan berhubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada yang Kepala Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kab.Pacitan yang telah memberikan motivasi, sehingga penyusunan perencanaan strategis ini dapat terselesaikan dengan baik, disamping itu memberikan penghargaan yang tinggi kepada segenap

pejabat struktural, fungsional dan staf di lingkungan Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan sehingga terwujudnya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Tahun 2025 ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kami memohon dengan harapan agar rencana yang telah dituangkan dapat diwujudkan dalam implementasinya.

Pacitan, Juli 2025

Kepala Dinas
Perdagangan dan Tenaga Kerja
Kabupaten Pacitan

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA

Drs. ACEP SUHERMAN, MM
Pembina Tk. I
NIP.19681222 198803 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 5

1.3. Maksud dan Tujuan 8

1.4. Sistematika Penyusunan 9

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SEBELUMNYA 12

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sebelumnya dan Capaian Restra PD 12

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD 23

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi PD 24

2.4. Telaah Terhadap Rancangan Awal RKPD 27

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 28

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 36

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 36

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD 38

3.3 Program dan Kegiatan 41

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 44

4.1 Rencana Kerja 39

BAB IV PENUTUP 48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perubahan lingkungan mengharuskan setiap lembaga pemerintah untuk melakukan berbagai penyesuaian terutama yang mengarah kepada terselenggaranya tata pemerintahan yang baik serta menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih efisien, efektif, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) maupun Rencana Kerja (Renja) OPD tersebut merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun. Untuk itu, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun.Selanjutnya Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) yang merupakan penjabaran dari Dokumen RPJMD.

Adapun salah satu dokumen perencanaan tersebut yaitu Dokumen Renja yang mempunyai peranan sangat strategis, karena menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja (Renja) OPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari renstra SKPD yang akan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP). Renja OPD memuat tentang sasaran yang akan dicapai, arah kebijakan, program, kegiatan dan kebutuhan pendanaan.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja SKPD, adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD.
2. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
3. Substansi Renja OPD memuat evaluasi status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/ pilihan OPD terhadap Renstra OPD; evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu; rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan; dana indikatif serta sumber dananya dan prakiraan maju.
4. Rumusan program/kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD.
5. Progam/kegiatan dalam RKPD Provinsi dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan untuk didanai APBD Provinsi, APBN dan sumber lainnya, sedangkan untuk RKPD Kabupaten/Kota dirinci menurut sumber dana APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya.
6. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut diatas, maka Penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan juga berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan Tahun 2021 - 2026 dan mengacu pada

RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025. Renja ini disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang program dam kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka menunjang visi dan misi Kabupaten Pacitan Program dan kegiatan dalam Renja Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan Tahun 2025 masih bersifat indikatif karena masih harus diselaraskan dengan program dan kegiatan perioritas daerah. Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah.

Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Renja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja OPD. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD

dan Renja OPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan,program dan kegiatan OPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Pacitan.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD yang dilanjutkan disingkat dengan Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja OPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD. RENSTRA Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan Tahun 2021 - 2026 merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi, didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhan nyata daerah, aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja membuat RKPD yang merupakan rencana kegiatan tahunan dan digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Dengan adanya Renja Perubahan Tahun 2025 yang telah tersusun dengan baik secara sistematis, terarah, terpadu, diharapkan kinerja organisasi dapat semakin baik dan lebih terfokus baik di sektor perdagangan, pengelolaan pasar dan sektor ketenagakerjaan di Kabupaten Pacitan dapat berperan secara optimal sebagai fasilitator, dan katalisator dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Pacitan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014 – 2019;

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015 – 2019;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016);

16. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2021-2026;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat selama satu tahun. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, maka diperlukan langkah-langkah kebijakan yang diprioritaskan dan dimantapkan dalam pembangunan sarana perdagangan dan penyediaan serta fasilitasi ketenagakerjaan secara berkesinambungan diantaranya : Meningkatkan peran Perdagangan dan Pasar dalam perekonomian, serta peningkatan kualitas dan fasilitasi ketenagakerjaan di Kabupaten Pacitan. Untuk itu, pembangunan sektor Perdagangan, Pengelolaan Pasar dan Ketenagakerjaan sebagai motor penggerak perekonomian, akan terus didorong peran dan kontribusinya terhadap pembangunan.

RENJA-SKPD diperinci dalam RKA-SKPD yang memuat pendapatan dan belanja OPD lebih detail. Perumusan RENJA-OPD dilakukan dengan memperhatikan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik diantaranya memperhatikan hasil MUSRENBANG, responsif terhadap permasalahan dan isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kebutuhan OPD saja melainkan juga menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan Industri, Perdagangan. Diharapkan dengan perencanaan yang baik, program dan kegiatan akan berkontribusi pada

pencapaian tujuan dan sasaran OPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam RENSTRA OPD.

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Adapun sistematika Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja OPD dan gambaran umum Organisasi Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan ketentuan peraturan yang mengatur tentang kewenangan Organisasi Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Organisasi Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari peyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan Pokok bahasan dalam penulisan Renja Organisasi Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sebelumnya

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD capaian tahun berjalan.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD

Berisi Kajian terhadap capain kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Berisi uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan, permasalahan dan hambatan dan solusi terhadapa pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

2.4 Review terhadap rancangan Awal RKPD.

Berisikan uraian proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan barang.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan)

BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunannasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PerangkatDaerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

3.3 Program dan Kegiatan yang berisikan Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan.

BAB IV: Rencana Kerja dan Pendanaan

BAB V : Penutup

Berisikan penjelasan uraian penutup berupa catatan penting yang perlumendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SEBELUMNYA

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SEBELUMNYA DAN CAPAIAN RENSTRA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja dalam menjalankan program dan kegiatan yang direncanakan, faktor apa saja yang mendukung terpenuhinya target kinerja program/kegiatan dan hambatan/kendala yang menyebabkan target tidak tercapai. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja, Renstra, faktor pendukung dan penghambat tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai bahan untuk perumusan rencana kebijakan/tindakan yang perlu diambil untuk pencapaian indikator kinerja tahun mendatang. Selanjutnya, hasil dari evaluasi pelaksanaan Renja, target Renstra, target Renja dan perkiraan capaian Renstra disajikan sebagaimana dalam tabel 2.1 berikut :

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan 30 Juni 2025 Renja

Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
207	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang Mengacu Pada Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**persen**	**100.00**	**10.000.000,00**	**40.00**	**0,00**	**40%**	**0%**
207	**02**	**2.01**		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja**	**dokumen**	**1.00**	**10.000.000,00**	**0.00**	**0,00**	**0%**	**0%**
207	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	dokumen	1.00	10.000.000,00	0.00	0,00	0%	0%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											0,00	0,00
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											0,00	0,00
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
207	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase pertumbuhan produktivitas tenaga kerja yang diberi bimbingan konsultasi produktivitas**	**persen**	**20.00**	**3.021.986.600,00**	**6.00**	**291.488.478,00**	**30%**	**9.65%**
					Persentase tenagakerja terampil dan kompeten	**persen**	**45.00**		**0.00**		**0%**	
207	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Jumlah peserta pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja**	**orang**	**340.00**	**3.021.986.600,00**	**0.00**	**291.488.478,00**	**0%**	**9.65%**
207	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	peserta	340.00	2.246.986.600,00	0.00	252.054.752,00	0%	11.22%
			0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	orang	96.00	775.000.000,00	0.00	39.433.726,00	0%	5.09%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											0,00	8,16

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											0,00	9,65
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
207	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase pencari kerja yang ditempatkan melalui AKL dan AKAD**	**persen**	**65.00**	**185.000.000,00**	**31.00**	**78.619.600,00**	**47.69%**	**42.5%**
207	**04**	**2.01**		**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumllah tenaga kerja yang mendapatkan fasiltas pembinaan**	**orang**	**250.00**	**185.000.000,00**	**0.00**	**78.619.600,00**	**0%**	**42.5%**
207	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	orang	200.00	185.000.000,00	0.00	78.619.600,00	0%	42.5%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											0,00	42,50
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											0,00	42,50
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
207	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase perusahaan yang telah memiliki peraturan perusahaan (PP)**	**persen**	**86.00**	**345.000.000,00**	**14.00**	**10.967.300,00**	**16.28%**	**3.18%**
					Persentase perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama (PKB)	**persen**	**30.00**		**4.00**		**13.33%**	
207	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah peserta sosialisasi Hubungan Industrial, penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada perusahaan**	**orang**	**140.00**	**345.000.000,00**	**0.00**	**10.967.300,00**	**0%**	**3.18%**
207	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	perselisihan	3.00	25.000.000,00	0.00	1.790.000,00	0%	7.16%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
			0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	orang	2970.00	320.000.000,00	0.00	9.177.300,00	0%	2.87%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											0,00	5,02
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											0,00	3,18
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
330	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**	**nilai**	**75.00**	**8.223.329.067,00**	**0.00**	**3.801.568.420,00**	**0%**	**46.23%**
330	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah**	**dokumen**	**23.00**	**142.243.128,00**	**4.00**	**27.166.700,00**	**17.39%**	**19.1%**
330	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	7.00	73.397.555,00	0.00	10.017.500,00	0%	13.65%
			0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	2.00	12.235.573,00	1.00	3.000.000,00	50%	24.52%
			0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	2.00	13.000.000,00	1.00	3.163.500,00	50%	24.33%
			0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	12.00	43.610.000,00	0.00	10.985.700,00	0%	25.19%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											25,00	21,92
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
330	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah**	**dokumen**	**51.00**	**5.170.183.002,00**	**4.00**	**2.450.143.900,00**	**7.84%**	**47.39%**
330	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	50.00	5.150.183.002,00	0.00	2.437.057.900,00	0%	47.32%
			0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	1.00	20.000.000,00	0.00	13.086.000,00	0%	65.43%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											0,00	56,38
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Rendah
330	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**persentase operasional dasar perangkat daerah yang terpenuhi**	**persen**	**100.00**	**473.749.946,00**	**4.00**	**150.234.407,00**	**4%**	**31.71%**
330	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	persen	100.00	113.742.174,00	30.00	77.559.987,00	30%	68.19%
			0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase bahan logistik kantor yang tersedia	persen	100.00	60.291.922,00	11.00	24.645.000,00	11%	40.88%
			0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	persen	100.00	27.223.850,00	40.00	12.624.420,00	40%	46.37%
			0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12.00	272.492.000,00	7.00	35.405.000,00	58.33%	12.99%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											34,83	42,11
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
330	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**persen**	**100.00**	**109.767.837,00**	**0.00**	**95.988.915,00**	**0%**	**87.45%**
330	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang disediakan	unit	10.00	109.767.837,00	21.00	95.988.915,00	210%	87.45%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											210,00	87,45
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Tinggi
330	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah yang dibutuhkan**	**persen**	**100.00**	**2.234.099.997,00**	**10.00**	**1.058.479.054,00**	**10%**	**47.38%**
330	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12.00	5.000.000,00	3.00	2.190.000,00	25%	43.8%
			0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12.00	346.263.997,00	3.00	115.421.204,00	25%	33.33%
			0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12.00	1.882.836.000,00	3.00	940.867.850,00	25%	49.97%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											25,00	42,37
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
330	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**persen**	**80.00**	**93.285.157,00**	**0.00**	**19.555.444,00**	**0%**	**20.96%**
330	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional / lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	67.00	51.750.091,00	1.00	19.555.444,00	1.49%	37.79%
			0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1.00	41.535.066,00	0.00	0,00	0%	0%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											0,75	18,90
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
330	**02**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)**	**persen**	**63.09**	**35.000.000,00**	**2.00**	**0,00**	**3.17%**	**0%**
330	**02**	**2.02**		**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	**Persentase penerbitan TDG**	**persen**	**100.00**	**35.000.000,00**	**0.00**	**0,00**	**0%**	**0%**
330	02	2.02	0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	dokumen	5	35.000.000,00	0.00	0,00	0%	0%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											0,00	0,00
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											0,00	0,00
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
330	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase Pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan**	**persen**	**11.33**	**1.090.000.000,00**	**0.00**	**279.446.314,00**	**0%**	**25.64%**
330	**03**	**2.01**		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Jumlah sarana perdagangan yang di bangun/revitalisasi dan dipelihara**	**unit**	**5.00**	**1.090.000.000,00**	**0.00**	**279.446.314,00**	**0%**	**25.64%**
330	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	unit	15.00	1.090.000.000,00	0.00	279.446.314,00	0%	25.64%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											0,00	25,64
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											0,00	25,64
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
330	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase pemantauan bapokting yang diawasi peredarannya**	**persen**	**100.00**	**85.000.000,00**	**0.00**	**47.251.000,00**	**0%**	**55.59%**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
330	**04**	**2.02**		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Jumlah sarana Perdagangan/pasar daerah yang dipantau Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**unit**	**15.00**	**85.000.000,00**	**4.00**	**47.251.000,00**	**26.67%**	**55.59%**
330	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	laporan	365.00	35.000.000,00	0.00	11.380.000,00	0%	32.51%
			0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	paket	4200.00	50.000.000,00	0.00	35.871.000,00	0%	71.74%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											0,00	52,13
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											26,67	55,59
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Rendah	Rendah
330	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir baru**	**persen**	**8.30**	**290.000.000,00**	**0.00**	**86.140.000,00**	**0%**	**29.7%**
330	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyelenggaraan Promosi dagang melalui pameran dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor**	**kali**	**1.00**	**290.000.000,00**	**0.00**	**86.140.000,00**	**0%**	**29.7%**
330	05	2.01	0003	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	pelaku usaha	1.00	290.000.000,00	0.00	86.140.000,00	0%	29.7%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											0,00	29,70
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											0,00	29,70

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
										Predikat kinerja Per Program(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
330	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yangberlaku**	**persen**	**30.43**	**40.000.000,00**	**6.00**	**15.963.500,00**	**19.72%**	**39.91%**
330	**06**	**2.01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang**	**unit**	**700.00**	**40.000.000,00**	**6.00**	**15.963.500,00**	**0.86%**	**39.91%**
330	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	unit	700.00	40.000.000,00	0.00	15.963.500,00	0%	39.91%
										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	0,00	39,91
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)	0,86	39,91
										Predikat kinerja Per Program(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
330	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk**		**13.26**	**92.735.000,00**	**6.00**	**51.782.000,00**	**45.25%**	**55.84%**
330	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Jumlah Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**kali**	**1.00**	**92.735.000,00**	**0.00**	**51.782.000,00**	**0%**	**55.84%**
330	07	2.01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	5.00	92.735.000,00	0.00	51.782.000,00	0%	55.84%
										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	0,00	55,84
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Rendah	Rendah
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)	0,00	55,84

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Rendah	Rendah
332	**03**			**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase Transmigrasi Swakarsa**		**100**	**10.000.000,00**	**0.00**	**0,00**	**0%**	**0%**
332	**03**	**2.01**		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Peserta penyuluhan Tranmigrasi**	**orang**	**50.00**	**10.000.000,00**	**0.00**	**0,00**	**0%**	**0%**
332	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	laporan	1	10.000.000,00	0.00	0,00	0%	0%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											0,00	0,00
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											0,00	0,00
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja seluruh program(%)											15,39	22,93
Predikat kinerja seluruh program(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Total								**13.428.050.667,00**		**4.663.226.612,00**		
Persentase Realisasi Anggaran										**34.73%**		
Predikat										**Sangat Rendah**		

2.1.1 Tindak Lanjut Alternatif Solusi

Indikator kinerja utama Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan dapat terealisasi karena perencanaan yang efektif dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala. Adapun langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Memastikan ketersediaan stok barang di tingkat agen maupun distributor;
b. Melakukan pemantauan harga di seluruh pasar Kabupaten Pacitan dan mengadakan pasar murah pada bulan februari 2025;
c. Menjalin hubungan kerjasama guna memfasilitasi distribusi dan penjualan produk dengan terselenggaranya acara pameran antar kotaa maupun pameran dagang lokal.
d. Menyelenggarakan pelatihan dengan harapan dapat menurunkan tingkat pengangguran;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian/ realisasi kinerja sampai dengan akhir semester pertama tahun 2025 masih sangat rendah. Gambaran analisis tabel tersebut di atas dipadukan dengan kondisi di lapangan adalah sebagai berikut:

a. Realisasi kinerja pada program penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) tergolong sangat rendah karena adanya pergeseran anggaran

dan baru bisa dilaksanakan pada semester dua.

b. Realisasi kinerja pada program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja masih sangat rendah yang dikarenakan pelaksanaan pelatihan dimulai pada bulan Juni sejumlah 4 (empat) pelatihan, jumlah pelatihan pada bulan juni lebih sedikit dibandingkan bulan Juli dan Agustus, oleh karenanya diperlukan dorongan untuk percepatan pelaksanaan pelatihan agar bisa tercapai seperti yang telah direncanakan.

c. Realisasi kinerja pada program penempatan tenaga kerja masih rendah, oleh karenanya masih sedikitnya minat masyrakat untuk pembuatan kartu kuning.

d. Realisasi kinerja pada program hubungan industrial tergolong sangat rendah, rencananya akan dimulai bulan Juli 2025 untuk pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja dan kegiatan pembahasan UMK dilaksanakan sekitar bulan November 2025.

e. Realisasi capaian kinerja pada program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh inspektorat sebesar 75,15. Capaian realisasi keuangan sebesar 46,23% dari target tahunan sebesar 100%.

f. Realisasi kinerja pada program peningkatan sarana distribusi perdagangan tergolong masih sangat rendah karena pelaksaan masih dalam proses dan sebagian besar selesai di semester dua pada bulan

Juli 2025.

g. Realisasi kinerja pada program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam kondisi sangat rendah. Hal ini diperlukan dorongan guna mempercepat capaian agar sesuai yang direncakan.

h. Realisasi kinerja pada program standarisasi dan perlindungan konsumen sebesar 19,72% persen tergolong sangat rendah atau baru sejumlah 107 karena beberapa pelaksanaan tera/tera ulang masal rencananya akan dilaksanakan pada bulan November 2025.

i. Realisasi kinerja pada program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri tergolong sebesar 45,25%.

j. Realisasi kinerja pada program pembangunan kawasan transmigrasi juga tergolong sangat rendah karena rencana pelakasaan di semester dua sekitar bulan September 2025.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan mengalami beberapa permasalahan bagi perwujudan Visi dan pengembangan Misi antara lain sebagai berikut :

a. Bidang Perdagangan
   i. Kurang Optimalnya Pengembangan Produk Unggulan Pacitan
   ii. Kurang lancarnya sirkulasi barang dan bahan pokok
   iii. Belum optimalnya pengembangan UKM

iv. Kurang Optimalnya Pengelolaan Produk Unggulan Pacitan
v. Rendahnya akses pasar
vi. Masih rendahnya pemilik UTTP/Pedagang dam mengikuti tera/tera ulang UTTP
vii. Belum adanya pengawas kemetrologian
viii. Sarana dan Prasarana Perdagangan yang masih perlu ditingkatkan.

b. Bidang Pasar Daerah

i. Kondisi bangunan pasar daerah yang perlu banyak perbaikan
ii. Kurangnya SDM pengelola pasar daerah sehingga banyak yang diisi dengan tenaga kontrak
iii. Permasalahan parkir di beberapa pasar daerah yang mengganggu akses lalu lintas
iv. Banyaknya pedagang kaki lima di sekitar beberapa pasar daerah.

c. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan bidang ketenagakerjaan antara lain meliputi :

i. Kualifikasi dan kompetensi angkatan kerja kita, hal ini berdampak pada kemampuan daya saing dalam memperoleh kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar negeri.
ii. Rendahnya mutu dan kompetensi SDM : karena belum optimalnya fungsi BLK pemerintah maupun swasta dalam menyiapkan tenaga kerja yang berdaya saing.
iii. Sistem Pendidikan Nasionl terkait dengan system Ketenagakerjaan Nasional belum link and match (masih output oriented belum job oriented).
iv. Banyak lulusan Sekolah Menengah Umum dan Perguruan Tinggi yang menganggur (usia muda).

v. Banyak kesempatan kerja yang tidak terserap, di kabupaten Pacitan hanya bisa terisi rata-rata 30% (job fair). Sedangkan di luar negeri banyak lowongan pekerjaan (skilled labour) yang tidak terisi dan minimnya kesempatan kerja, yang *match* antara persediaan tenaga kerja dengan kesempatan kerja.
vi. Minimnya pendidikan/ keterampilan kewirausahaan (enterpreuner) bagi angkatan kerja sehingga kurang mampu membuka lapangan kerja.
vii. Belum optimalnya informasi pasar kerja dan pelayanan penempatan tenaga kerja, baik dalam dan luar negeri.
viii. Belum optimalnya efektivitas tata kelola kelembagaan, pembinaan, dan mediasi dalam penerapan hubungan industrial.
ix. Sarana dan prasarana pendukung
x. Kurangnya kerja sama antar wilayah dan sektor dalam pengembangan kawasan transmigrasi
xi. Kurangnya sosialisasi transmigrasi lokal dan regional

2.4. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa rancangan tersebut sesuai tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan dengan melakukan penyesuaian terhadap detil kegiatan.

Review ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja dari rancangan awal RKPD terhadap hasil analisa kebutuhan sesuai tugas pokok dan fungsi dengan mengacu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Rancangan awal RKPD yang ada berasal dari usulan program dan kegiatan tahun yang lalu dan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024, sedangkan program dan kegiatan hasil analisa kebutuhan adalah program-program dan kegiatan yang diusulkan setelah dilakukan dilakukan pembahasan yang lebih mendalam dengan melakukan sinkronisasi dan isu-isu penting terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi terhadap tugas pokok dan fungsi dinas serta kinerja kegiatan.

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian terhadap usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait dengan kebutuhan dan harapan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, perguruan tinggi, maupun dari hasil kajian kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan.

Usulan dari masyarakat diperoleh melalui mekanisme Musrenbang yang dimulai dari Musrenbang tingkat kelurahan, tingkat kecamatan serta mengakomodir pokok-pokok pikiran dari Dewan.PerencanaanProgram /kegiatan kegiatan pada Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan
3. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
4. Program standardisasi dan perlindungan konsumen
5. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri

6. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
7. Program penempatan tenaga kerja
8. Program hubungan industrial
9. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

a. Usulan dari masyarakat dengan mekanisme Musrenbang

Usulan dari masyarakat kepada Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja secara garis besar sudah diakomodir dalam program dan kegiatan dalam Renja Tahun 2024 diantaranya adalah usulan dari Kecamatan, namun mengingat sangat terbatasnya anggaran di Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja, usulan dari masyarakat belum seluruhnya dapat diakomodir sesuai usulan terbanyak dan melihat kebutuhan yang paling penting dan mendasar dari masyarakat.

b. Usulan dari pokok-pokok pikiran anggota Dewan

Sedangkan pokok-pokok pikiran dari Dewan telah diakomodir dalam Renja 2025 karena sesuai dengan program dan kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan

RANWAL RKPD TAHUN 2025

DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PACITAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5
					Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja			12.264.190.467,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.522.661.400,00
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			2.522.661.400,00
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang Mengacu Pada Rencana Tenaga Kerja (RTK)	100 %	10.000.000,00
2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja	1 Dokumen	10.000.000,00
2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro			
						Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	10.000.000,00
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pertumbuhan produktivitas tenaga kerja yang diberi bimbingan konsultasi produktivitas Persentase tenagakerja terampil dan kompeten	40 % 55 %	2.242.661.400,00
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	340 Orang	2.242.661.400,00
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	340 Orang	2.242.661.400,00
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan melalui AKL dan AKAD	66 %	245.000.000,00
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan fasiltas pembinaan	250 Orang	245.000.000,00
2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja			
						Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	250 Orang	245.000.000,00
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama (PKB) Persentase perusahaan yang telah memiliki peraturan perusahaan (PP)	50 % 96 %	25.000.000,00
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan	Jumlah peserta sosialisasi Hubungan Industrial, penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada perusahaan	140 orang	25.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
					Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			
2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
						Jumlah Perselisihan yang Dicegah	3 Perkara	25.000.000,00
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			9.741.529.067,00
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			9.731.529.067,00
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah Nilai SAKIP perangkat daerah	80,06 Nilai >B Nilai	8.204.266.363,00
3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	23 Dokumen 23 Dokumen 10 Dokumen	102.357.845,00
3	30	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	39.000.000,00
3	30	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	12.077.300,00
3	30	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	13.000.000,00
3	30	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	38.280.545,00
3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan doakumen keuangan perangkat daerah	59 dokumen 59 Dokumen 14 Dokumen	5.213.384.559,00
3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/bulan	5.193.384.559,00
3	30	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	20.000.000,00
3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan kebutuhan dasar operasional perangkat daerah Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi Prosentase Operasional Dasar Perangkat Daerah yang Terpenuhi	12 Bulan 100 persen 100 Persen	480.075.694,00
3	30	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	104.755.864,00
3	30	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	89.267.000,00
3	30	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	26.052.830,00
3	30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	260.000.000,00
3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan Tersediannya sarana dan prasarana kerja perangkat daerah	100 Persen 100 Persen 12 Bulan	65.000.000,00
3	30	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	65.000.000,00
3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah yang dibutuhkan Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan Tersedianya jasa penunjang perangkat daerah	100 Persen 100 Persen 12 Bulan	2.243.448.304,00
3	30	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000,00
3	30	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	338.999.736,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
3	30	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.899.448.568,00
3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik Prosentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik Terpeliharanya barang milik daerah	80 persen 80 Persen 12 Bulan	99.999.961,00
3	30	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65 Unit	59.999.961,00
3	30	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	40.000.000,00
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	69,22 %	35.000.000,00
3	30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah pelaku usaha pergudangan yang dibina Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG Persentase penerbitan TDG	5 Pelaku usaha 3,94 Persen 100 Persen	35.000.000,00
3	30	02	2.02	0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang			
						Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	5 Dokumen	35.000.000,00
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	11,33 %	842.262.704,00
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana perdagangan yang di bangun/revitalisasi dan dipelihara Jumlah sarana perdagangan yang dibangun / revitalisasi dan dipelihara	5 Unit 5 Unit	842.262.704,00
3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			
						Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	15 Unit	842.262.704,00
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase pemantauan bapokting yang diawasi peredarannya Persentase pemantauan bapokting yang diawasi peredarannya	100 % 100 %	85.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah sarana perdagangan / pasar daerah yang dipantau harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting Jumlah sarana Perdagangan/pasar daerah yang dipantau Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	15 Pasar 15 unit	85.000.000,00
3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			
						Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	365 Laporan	35.000.000,00
3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	50.000.000,00
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir baru	8,3 %	450.000.000,00
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor Jumlah Penyelenggaraan Promosi dagang melalui pameran dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor	1 Kali 3 kali	450.000.000,00
3	30	05	2.01	0003	Pameran Dagang Lokal			
						Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	1 Pelaku Usaha	450.000.000,00
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	39,13 %	40.000.000,00
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang, pengawasan / penyuluhan metrologi legal	500 unit 550 / 2 / 50 Unit	40.000.000,00
3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang			
						Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	700 Unit	40.000.000,00
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk	13,52 %	75.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri Jumlah Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1 Kali 5 orang	75.000.000,00
3	30	07	2.01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			
						Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	5 UMKM	75.000.000,00
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			10.000.000,00
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigrasi Swakarsa	100 %	10.000.000,00
3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta penyuluhan Tranmigrasi	50 Orang	10.000.000,00
3	32	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	10.000.000,00
							J U M L A H	**12.264.190.467,00**

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi 4 (empat) pendekatan yaitu teknokratis, politis, partisipatif dan top-down/bottom up. Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja berusaha maksimal mengadopsi atau menjalankan perencanaan yang baik dan berkualitas. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Nasional terdiri dari 5 prioritas, yaitu :

a. Pembangunan Manusia dan Masyarakat ;
b. Pembangunan Sektor Unggulan;
c. Pemerataan dan Kewilayahan ;
d. Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan;
e. Pembangunan Ekonomi.

Sedangkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pacitan ditujukan selain untuk mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan Nasional juga harus sejalan dengan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Pacitan sesuai

dalam RKPD Kabupaten Pacitan tahun 2025 yaitu “Membangun Ekosistem Produktif, Perluasan Pasar dan Pemulihan Sarana dan Prasarana Sosial”. Agar tercapai sinergi pusat – daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalaian dan evaluasi, maka prioritas pembangunan Kabupaten Pacitan yaitu sama dengan Prioritas pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan diterjemahkan kedalam Sasaran Pembangunan di Kabupaten Pacitan yang sesuai dan sejalan dengan sasaran Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan adalah :

a. Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan

   Upaya Pembangunan / Rehabilitasi bertujuan untuk memenuhi sarana dan prasarana aktifitas perdagangan yang memadai, kemudahan akses transportasi dan prasarana yang memadai menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi dan kelancaran, ketertiban peredaran barang dan jasa. Pembangunan perdagangan dilakukan untuk meningkatkan volume perdagangan di daerah. Perdagangan sebagai penggerak perekonomian masyarakat harus mampu dijaga perkembangannya. Distribusi barang kebutuhan pokok harus selalu tersedia dengan harga terjangkau.

b. Meningkatnya Kinerja Sektor Tenaga Kerja

   Pembangunan di sektor ketenagakerjaan dimaksudkan untuk mengatasi masalah-masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Pacitan seperti pengurangan tingkat pengangguran terbuka, pencari kerja yang ditempatkan, hubungan industrial dan syarat kerja yang kondusif dan penempatan transmigrasi.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA

Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Perdagangan dan Tenaga Kerja. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja berperan sebagai penggerak perekonomian daerah melalui Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah Sektor Perdagangan dan Tenaga Kerja.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja, pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan 5 (lima) tahun.

Adapun Tujuan, sasaran, Indikator Sasaran serta Program dan Kegiatan yang akan dicapai Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja antara lain sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1	Menstabilkan ketersedian bapokting	Terjaganya ketersediaan bapokting	Neraca Kebutuhan bahan pokok kabupaten Pacitan	>0	>0	>0	200.000	210.000	220.000
			Prosentase koefisien harga antar waktu	>9	>9	>9	12	12,5	13
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Sektor unggulan	Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan	PDRB perdagangan dan eceran	2.104. 005.280	2.187. 799.547	2.271. 593.814	3.510.000. 000	3.520.000. 000	3.530.000. 000
			Cakupan Bina Kelompok Pedagang/usaha informal	6,06	7,57	9,09	17,50	17,60	17,70
			Prosentase pelaku usaha dalam pengembangan produk unggulan daerah	14,90	15,05	15,20	18,20	18,30	18,40

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8		9
		Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Hasil nilai IKM PD	83,88	84,00	84,20	90,00	90,10	90,20
3	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah dan pendapatan masyarkat	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,12	1,96	1,81	1,67	1,55	1,55
			Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan	65,67	66	66,5	77,6	77,7	77,8
			Persentase hubungan industrial dan syarat kerja yang kondusif	100	100	100	100	100	100
			Persentase Penempatan Transmigran	100	100	100	100	100	100

3.3 PROGRAM KEGIATAN

Tabel 3.2

Program dan Kegiatan

Dinas Perdaganagan dan Tenga Kerja Kabupaten Pacitan Tahun 2025

Program	Kegiatan
Program stabilisasi harga barang kebutuhan barang pokok dan barang penting	Pengendalian harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
	Penyediaan Sarana Distribusi perdagangan
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
Program pengembangan ekspor	Penyelenggaraan Promosi dagang melalui pameran dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Pameran Dagang Nasional
	Pameran Dagang Lokal
Program standardisasi dan perlindungan konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk

Program	Kegiatan
	Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan jasa pemelihraan, Biaya Pemeliharaan,

Program	Kegiatan
	Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Program perencanaan tenaga kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan klaster kompetensi
Program penempatan tenaga kerja	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kot
	Pelayanan antar Kerja
	Perluasan Kesempatan Kerja
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
	Job Fair/Bursa Kerja
Program hubungan industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdam pak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Program pembangunan Kawasan transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Penyuluhan Transmigrasi

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 RENCANA KERJA

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Penyusunan program dan kegiatan disesuaikan dengan fungsi Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan. Program ini dilengkapi dengan indikator terukur dalam pencapaian hasilnya. Program dan kegiatan Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025

DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PACITAN

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		PAGU DANA	
			TAHUN	TAHUN + 1	TAHUN	TAHUN + 1
3.30.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10**	**10**	**102.357.845,00**	**93.000.000,00**
3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	2	2	39.000.000,00	35.000.000,00
3.30.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	12.077.300,00	17.000.000,00
3.30.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	13.000.000,00	16.000.000,00
3.30.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2	2	38.280.545,00	25.000.000,00
3.30.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Penyediaan dokumen keuangan perangkat daerah**	**14**	**14**	**20,000,000.00**	**30,000,0000.00**

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		PAGU DANA	
			TAHUN	TAHUN + 1	TAHUN	TAHUN + 1
3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12	12	5.193.384.559,00	5.160.000.000,00
3.30.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	20,000,000.00	30,000,000.00
3.30.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Penyediaan kebutuhan dasar operasional perangkat daerah**	**12**	**12**	**480.075.694,00**	**438.000.000,00**
3.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	12	104.755.864,00	145.000.000,00
3.30.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12	12	89.267.000,00	Rp. 79.000.000
3.30.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	12	26.052.830,00	29.000.000,00
3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kebutuhan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	12	260.000.000,00	264.000.000,00

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		PAGU DANA	
			TAHUN	TAHUN + 1	TAHUN	TAHUN + 1
3.30.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersediannya sarana dan prasarana kerja perangkat daerah**	**12**	**12**	**65.000.000,00**	**70.000.000,00**
3.30.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	6	6	65.000.000,00	70.000.000,00
3.30.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan jasa penunjang Pemerintah Daerah**	**12**	**12**	**2.243.448.304,00**	**2.236.000.000,00**
3.30.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	12	5.000.000,00	6.000.000,00
3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	12	338.999.736,00	280.000.000,00
3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	12	1.899.448.568,00	1.950.000.000,00

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		PAGU DANA	
			TAHUN	TAHUN + 1	TAHUN	TAHUN + 1
3.30.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**12**	**12**	**99.999.961,00**	**165.000.000,00**
3.30.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65	65	59.999.961,00	65.000.000,00
3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	1	40.000.000,00	100.000.000,00
3.30.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Prosentase pelaku usaha yang memiliki izin sesuai ketentuan**	**72.31**	**72.31**	**35.000.000,00**	**80.000.000,00**
3.30.02.2.02	**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	**Jumlah pelaku usaha pergudangan yang dibina**	**80**	**80**	**35.000.000,00**	**80.000.000,00**
3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah dokumen tanda daftar gudang	80	80	35.000.000,00	80.000.000,00
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Prosentase Pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan**	**11.33**	**11.33**	**842.262.704,00**	**1.100.000.000,00**

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		PAGU DANA	
			TAHUN	TAHUN + 1	TAHUN	TAHUN + 1
3.30.03.2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Jumlah sarana perdagangan yang dibangun/revitalisasi dan dipelihara**	**5**	**5**	**842.262.704,00**	**1.100.000.000,00**
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3	3	842.262.704,00	1.100.000.000,00
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Prosentase pemantauan bapokting yang diawasi peredarannya**	**100**	**100**	**85.000.000,00**	**145.000.000,00**
3.30.04.2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Jumlah sarana perdagangan / pasar daerah yang dipantau harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting**	**15**	**15**	**85.000.000,00**	**145.000.000,00**
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	365	365	35.000.000,00	85.000.000,00

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		PAGU DANA	
			TAHUN	TAHUN + 1	TAHUN	TAHUN + 1
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah operasi pasar / jumlah paket sembako pasar daerah	2 / 4200	2 / 4200	50.000.000,00	60.000.000,00
3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Prosentase pelku usaha yang menjadi eksportir baru**	**8.3**	**8.3**	**450.000.000,00**	**120.000.000,00**
3.30.05.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah penyelenggaraan pormosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor**	**3**	**3**	**450.000.000,00**	**120.000.000,00**
3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang lokal	1	1	450.000.000,00	120.000.000,00
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Prosentase UTTP yang ditera / tera Ulang UTTP yang sah**	**43.47**	**43.47**	**40.000.000,00**	**80.000.000,00**
3.30.06.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang, Pengawasan / penyuluhan metrologi legal**	**550/2/50**	**550/2/50**	**40.000.000,00**	**80.000.000,00**

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		PAGU DANA	
			TAHUN	TAHUN + 1	TAHUN	TAHUN + 1
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTTP yang di tera dan ditera ulang	650	750	40.000.000,00	80.000.000,00
3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Prosentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk**	**13.65**	**13.65**	**75.000.000,00**	**100.000.000,00**
3.30.07.2.01	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Jumlah promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri**	**5**	**5**	**75.000.000,00**	**100.000.000,00**
3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	5	5	75.000.000,00	100.000.000,00
2.07.02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Prosentase kabupaten yang menyusun rencana tenaga kerja**	**100**	**100**	**10.000.000,00**	**35.000.000,00**
2.07.02.2.01	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**		**1**	**1**	**10.000.000,00**	**35.000.000,00**
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen RTK makro	1	1	10.000.000,00	35.000.000,00

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		PAGU DANA	
			TAHUN	TAHUN + 1	TAHUN	TAHUN + 1
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**		**50** **60**	**50** **60**	**2.242.661.400,00**	**2.242.661.400,00**
2.07.03.2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**		**3400**	**3400**	**2.242.661.400,00**	**2.242.661.400,00**
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan nernasis kompetensi pada tahun n	3400	3400	2.242.661.400,00	2.242.661.400,00
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**		**66.4**	**66.4**	**245.000.000,00**	**180.000.000,00**
2.07.04.2.01	**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**		**250**	**250**	**245.000.000,00**	**180.000.000,00**
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	200	200	245.000.000,00	180.000.000,00
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI / CTKI yang diberikan fasilitas pelatihan	40	40	0.00	0.00

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		PAGU DANA	
			TAHUN	TAHUN + 1	TAHUN	TAHUN + 1
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**		**100** **60**	**100** **60**	**20,000,000.00**	**80,000,000.00**
2.07.05.2.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**		**140**	**140**	**20,000,000.00**	**80,000,000.00**
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang dicegah	80	80	20,000,000.00	80,000,000.00
3.32.03	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**		**100**	**100**	**10,000,000.00**	**15,000,000.00**
3.32.03.2.01	**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**50**	**50**		

NO REKENING	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		PAGU DANA	
			TAHUN	TAHUN + 1	TAHUN	TAHUN + 1
3.32.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	1	1	10,000,000.00	15,000,000.00

BAB V

PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan Tahun 2025, diharapkan Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat berjalan efektif dan efisien. Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja ini dipakai sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 selain tergantung dari dukungan anggaran yang memadai, juga sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin aparatur serta peran aktif masyarakat, sehingga program dan kegiatan dapat memberikan hasil (Outcome) untuk dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh masyarakat Daerah.

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.

Kepala Dinas
Perdagangan dan Tenaga Kerja
Kabupaten Pacitan

Drs. ACEP SUHERMAN, MM
Pembina Tingkat I
NIP.19681222 198803 1 001

Kabupaten Pacitan

2025

RENJA PERUBAHAN

BAPPEDALITBANG

KATA PENGANTAR

Alhamdulilah segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) ini merupakan salah satu bentuk penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Bappedalitbang 2021-2026. Renja Perubahan ini disusun untuk lebih meningkatkan kinerja Bappedalitbang agar lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai target yang sudah ditetapkan di tahun 2025.

Kepada semua pihak yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran demi tersusunnya Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2025 ini, kami ucapkan terima kasih dan semoga Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) ini dapat bermanfaat bagi semua pihak serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Pacitan.

Pacitan, 28 Juli 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN

Dr. Drs. HERU SUKRESNO, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660614 199203 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	3
	1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025	5
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II	5
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Pacitan	16
	2.3 Reviuw terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025	16
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGAT DAERAH	26
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	26
	3.2 Tujuan dan Sasaran	27
	3.3 Program dan Kegiatan Bappedalitbang Tahun 2025	29
BAB IV	PENUTUP	37

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II	7
2.2	Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025	17
3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappedalitbang	28
3.2	Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan sebagai salah satu instrumen pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama 1 (satu) tahun, dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pembinaan umum dalam bentuk perencanaan pembangunan.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD dan), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan *stakeholders* di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJPD, RPJMD dan RKPD. Oleh karena itu, Perangkat Daerah sebagai *stakeholders* di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan Perangkat Daerah , kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah. Hal ini mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 7 yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Bappedalitbang Kabupaten Pacitan melakukan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Renja Perubahan Tahun Anggaran2025.

Selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Bappedalitbang Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025 dengan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Kabupaten Pacitan serta dipergunakan sebagai dasar penilaian kinerja Bappedalitbang yang disampaikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peeraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahn Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021);
9. Perda Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2025
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 152 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 170 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026;
12. Peraturan Bupati (Perbup) tentang RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten Pacitan tahun 2025 .

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah adalah mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan 2025.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Bappedalitbang Kabupaten Pacitan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Rencana Kerja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappedalitbang Kabupaten Pacitan pada Tahun Anggaran 2025 dengan tetap memperhatikan RKPD Perubahan.
2. Rencana Kerja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappedalitbang Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025 yang mengacu pada Renstra dan RKPD Perubahan.
3. Sebagai tolok ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Pada bagian ini berisi evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan perkiraan capaian tahun berjalan atau tahun 2025 dengan mengacu APBD 2025 yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja PD sudah disahkan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini berisi telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian mengenai kaidah-kaidah pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II

Rencana Kerja (Renja) Bappedalitbang Kabupaten Pacitan pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bappedalitbang Kabupaten Pacitan selama tahun 2025 dan perkiraan target tahun 2025.

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dokumen dan indikator lainnya. Penetapan indikator ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Triwulan II Tahun 2025

Sebagai evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2025 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja : **Hasil Nilai Evaluasi AKIP PD** Tahun 2024 sebesar 74 dengan predikat BB dari target 78,20. Sedangkan nilai di tahun 2025 sebesar 72,45 dengan predikat BB dari target 74. Hasil Nilai Evaluasi AKIP PD tahun 2024 dan 2025 tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi evaluasi agar nilai evaluasi akip dapat meningkat / mencapai target yang telah ditetapkan sehingga perlu ditingkatkan melalui persiapan dan penyusunan dokumen yang menjadi bahan untuk evaluasi dengan lebih baik lagi.

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja : **Persentase Keselarasan Program RPJMD Ke dalam RKPD** sampai dengan triwulan II 100 % dari target 100 %. Keselarasan sudah mencapai 100%, artinya seluruh program pada RPJMD telah dibiayai secara proporsional dalam APBD 2025.
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 2 (dua) indikator kinerja :
   - **Persentase Ketercapaian Program Bidang Pengembangan Sumber daya Manusia** sampai dengan triwulan II terealisasi 45 % dari target 100 %. Hal ini diakibatkan karena adanya penundaan beberapa belanja pada semester I Tahun 2025 serta belum optimalnya pelaksanaaan semua kegiatan pada semester I, sehingga perlu dilakukan koordinasi dan monitoring tiap program secara lebih intens.
   - **Persentase Ketercapaian Program Bidang Perekonomian dan SDA dan Infrastruktur** terealisasi 34 % dari target 100 %. Hal ini diakibatkan karena adanya penundaan beberapa belanja pada semester I Tahun 2025 serta belum optimalnya pelaksanaaan semua kegiatan pada semester I, sehingga perlu dilakukan koordinasi dan monitoring tiap program secara lebih intens.
4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah, dengan indikator kinerja : **Persentase Hasil Kelitbangan (Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Penerapan dan Diseminasi) yang dimanfaatkan oleh PD** sampai triwulan II sudah mencapai 75 % dari target 100 %. Hal ini karena ada hasil penelitian yang belum dimanfaatkan perangkat daerah. Penelitian tersebut akan dimanfaatkan pada tahun 2026 / semester I Tahun 2026.

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bappedalitbang hingga triwulan II secara lengkap tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
1	**501.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**Nilai**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**74.00**	**5.289.739.195,00**	**0,00**	**992.113.730,00**	**0,00**	**1.318.451.234,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.310.564.964,00**	**0,00**	**43,68**	**0,00**	**2.310.564.964,00**	**0**	**0**	**BAPPEDA LITBANG**
	501.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**18.00**	**113.287.802,00**	**7,00**	**12.898.800,00**	**2,00**	**13.370.458,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,00**	**26.269.258,00**	**50,00**	**23,19**	**9,00**	**26.269.258,00**	**0**	**0**	
	501.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	18.00	113.287.802,00	7,00	12.898.800,00	2,00	13.370.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	26.269.258,00	50,00	23,19	9,00	26.269.258,00	0	0	
																			Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		50,00	23,19					F
	501.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	0.00	0,00	0.00	0,00	30	3.531.139.174,00	30,00	795.252.371,00	30	929.973.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.725.226.095,00	100,00	48,86	30,00	1.725.226.095,00	0	0	
	501.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	0.00	0,00	0.00	0,00	33	72.069.382,00	8,00	8.493.600,00	10	10.629.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	19.123.455,00	54,55	26,53	18,00	19.123.455,00	0	0	
																			Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		77,28	37,70					F
	501.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian**	**%**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100**	**75.973.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
	501.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0.00	0,00	0.00	0,00	165	75.973.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					0,00	0,00					F
	501.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Operasional Dasar Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**%**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100**	**690.407.319,00**	**24,99**	**60.245.599,00**	**24,99**	**254.811.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,98**	**315.057.099,00**	**49,98**	**45,63**	**49,98**	**315.057.099,00**	**0**	**0**	
	501.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0.00	0,00	0.00	0,00	11.00	407.581.119,00	2,00	23.533.300,00	3,00	224.447.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	247.980.300,00	45,45	60,84	5,00	247.980.300,00	0	0	
	501.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0.00	0,00	0.00	0,00	12	282.826.200,00	3,00	36.712.299,00	3,00	30.364.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	67.076.799,00	50,00	23,72	6,00	67.076.799,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					47,73	42,28					F
	501.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan**	**%**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100**	**221.089.911,00**	**0,00**	**27.510.000,00**	**8,33**	**24.675.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,33**	**52.185.300,00**	**8,33**	**23,60**	**8,33**	**52.185.300,00**	**0**	**0**	
	501.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0.00	0,00	0.00	0,00	1.00	6.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	501.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0.00	0,00	0.00	0,00	13.00	129.922.947,00	0,00	27.510.000,00	3,00	24.675.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	52.185.300,00	23,08	40,17	3,00	52.185.300,00	0	0	
	501.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0.00	0,00	0.00	0,00	1.00	55.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	501.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0.00	0,00	0.00	0,00	9.00	29.006.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					5,77	10,04					F

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
	501.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perangkat Daerah yang Dibutuhkan**	**%**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100**	**407.409.400,00**	**24,99**	**78.213.160,00**	**24,99**	**60.568.097,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,98**	**138.781.257,00**	**49,98**	**34,06**	**49,98**	**138.781.257,00**	**0**	**0**	
	501.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0.00	0,00	0.00	0,00	12	165.385.000,00	3,00	30.560.212,00	3,00	26.838.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	57.398.660,00	50,00	34,71	6,00	57.398.660,00	0	0	
	501.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0.00	0,00	0.00	0,00	12	242.024.400,00	3,00	47.652.948,00	3,00	33.729.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	81.382.597,00	50,00	33,63	6,00	81.382.597,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	50,00	34,17					F
	501.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik**	**%**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**80**	**178.362.257,00**	**7,00**	**9.500.200,00**	**51,55**	**24.422.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,55**	**33.922.500,00**	**73,19**	**19,02**	**58,55**	**33.922.500,00**	**0**	**0**	
	501.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0.00	0,00	0.00	0,00	33.00	57.947.015,00	7,00	9.500.200,00	8,00	16.572.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	26.072.500,00	45,45	44,99	15,00	26.072.500,00	0	0	
	501.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0.00	0,00	0.00	0,00	58.00	43.534.200,00	0,00	0,00	51	7.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51	7.850.000,00	87,93	18,03	51	7.850.000,00	0	0	
	501.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0.00	0,00	0.00	0,00	1.00	76.881.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	44,46	21,01					F
																				Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	40,33	27,70					
2	**501.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase keselarasan Program RPJMD Kedalam RKPD**	**%**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100**	**1.398.548.868,00**	**0,00**	**136.085.430,00**	**100**	**439.274.091,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**575.359.521,00**	**100,00**	**41,14**	**100,00**	**575.359.521,00**	**0**	**0**	**BAPPEDA LITBANG**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
	501.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Jumlah Dokumen RKPD dan Dokumen Perubahan RKPD**	**Dokumen**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**2**	**843.735.175,00**	**0,00**	**96.807.430,00**	**1,00**	**289.767.635,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**386.575.065,00**	**50,00**	**45,82**	**1,00**	**386.575.065,00**	**0**	**0**	
	501.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	0.00	0,00	0.00	0,00	2.00	61.460.315,00	2,00	28.810.085,00	0,00	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	31.330.085,00	100,00	50,98	2,00	31.330.085,00	0	0	
	501.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	0.00	0,00	0.00	0,00	14.00	375.543.390,00	13,00	67.997.345,00	1,00	262.031.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	330.028.345,00	100,00	87,88	14,00	330.028.345,00	0	0	
	501.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	3.00	406.731.470,00	0,00	0,00	1,00	25.216.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	25.216.635,00	33,33	6,20	1,00	25.216.635,00	0	0	
																			Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		77,78	48,35					F
	501.02.2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan yang Berbasis data SIPD**	**Dokumen**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**2.00**	**284.555.319,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.891.956,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.891.956,00**	**0,00**	**11,56**	**0,00**	**32.891.956,00**	**0**	**0**	
	501.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	1.00	17.387.689,00	0,00	0,00	0,00	2.483.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483.451,00	0,00	14,28	0,00	2.483.451,00	0	0	
	501.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	0.00	0,00	0.00	0,00	50.00	225.334.089,00	0,00	0,00	0,00	7.871.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.871.600,00	0,00	3,49	0,00	7.871.600,00	0	0	
	501.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	0.00	0,00	0.00	0,00	1	41.833.541,00	0,00	0,00	0,00	22.536.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.536.905,00	0,00	53,87	0,00	22.536.905,00	0	0	
																			Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		0,00	23,88					F
	501.02.2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah Dokumen Evaluasi Pembangunan Daerah**	**Dokumen**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**2.00**	**270.258.374,00**	**0,00**	**39.278.000,00**	**0,00**	**116.614.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.892.500,00**	**0,00**	**57,68**	**0,00**	**155.892.500,00**	**0**	**0**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
	501.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	0.00	0,00	0.00	0,00	4.00	138.622.604,00	1,00	30.668.000,00	1,00	36.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	66.998.000,00	50,00	48,33	2,00	66.998.000,00	0	0	
	501.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	0.00	0,00	0.00	0,00	8.00	131.635.770,00	2,00	8.610.000,00	2,00	80.284.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	88.894.500,00	50,00	67,53	4,00	88.894.500,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	50,00	57,93					F
																				Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	16,67	38,35					
3	**501.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Ketercapaian Program Bidang Pengembangan Sumber daya Manusia**	**%**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100.00**	**1.663.737.460,00**	**27,00**	**165.349.000,00**	**18,00**	**467.764.107,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,00**	**633.113.107,00**	**45,00**	**38,05**	**45,00**	**633.113.107,00**	**0**	**0**	**BAPPEDA LITBANG**
	.		**Persentase Ketercapaian Program Bidang Perekonomian dan SDA dan Infrastruktur**	**%**	**0,00**		**0.00**	**0,00**	**100.00**		**0,00**		**34,00**		**0,00**		**0,00**		**34,00**		**34,00**		**34,00**		**0**		**BAPPEDA LITBANG**
	501.03.2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Kali**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**50**	**868.750.060,00**	**14,00**	**133.211.000,00**	**12,00**	**326.326.948,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,00**	**459.537.948,00**	**52,00**	**52,90**	**26,00**	**459.537.948,00**	**0**	**0**	
	501.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	2.00	262.935.128,00	0,00	22.965.000,00	0,00	49.756.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.721.448,00	0,00	27,66	0,00	72.721.448,00	0	0	
	501.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	0.00	0,00	0.00	0,00	2.00	162.186.800,00	0,00	0,00	0,00	112.971.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.971.000,00	0,00	69,65	0,00	112.971.000,00	0	0	
	501.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	0.00	0,00	0.00	0,00	2.00	95.940.000,00	1,00	57.221.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	58.171.000,00	50,00	60,63	1,00	58.171.000,00	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
	501.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	2.00	95.810.132,00	0,00	3.352.500,00	0,00	12.697.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.049.500,00	0,00	16,75	0,00	16.049.500,00	0	0	
	501.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	0.00	0,00	0.00	0,00	2.00	116.788.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	85,63	0,00	100.000.000,00	0	0	
	501.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	0.00	0,00	0.00	0,00	2.00	135.090.000,00	2,00	49.672.500,00	0,00	49.952.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	99.625.000,00	100,00	73,75	2,00	99.625.000,00	0	0	
																			Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		25,00	55,68					F
	501.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA**	**Kali**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**40**	**463.105.200,00**	**1,00**	**23.550.000,00**	**7,00**	**112.260.433,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,00**	**135.810.433,00**	**20,00**	**29,33**	**8,00**	**135.810.433,00**	**0**	**0**	
	501.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	1	51.000.200,00	0,00	10.050.000,00	1,00	18.369.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	28.419.892,00	100,00	55,73	1,00	28.419.892,00	0	0	
	501.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	0.00	0,00	0.00	0,00	3.00	150.000.000,00	0,00	0,00	1,00	49.650.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	49.650.300,00	33,33	33,10	1,00	49.650.300,00	0	0	
	501.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	0.00	0,00	0.00	0,00	9.00	46.396.600,00	2,00	0,00	2,00	11.439.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	11.439.953,00	44,44	24,66	4,00	11.439.953,00	0	0	
	501.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	1	67.642.000,00	0,00	13.500.000,00	1,00	18.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	32.220.000,00	100,00	47,63	1,00	32.220.000,00	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
		Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)																								
	501.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	0.00	0,00	0.00	0,00	2.00	102.848.200,00	0,00	0,00	0,00	937.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937.284,00	0,00	0,91	0,00	937.284,00	0	0	
	501.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	0.00	0,00	0.00	0,00	8.00	45.218.200,00	0,00	0,00	2,00	13.143.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	13.143.004,00	25,00	29,07	2,00	13.143.004,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	50,46	31,85					F
	501.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Kali**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**40**	**331.882.200,00**	**2,00**	**8.588.000,00**	**6,00**	**29.176.726,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,00**	**37.764.726,00**	**20,00**	**11,38**	**8,00**	**37.764.726,00**	**0**	**0**	
	501.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	1	36.746.000,00	0,00	0,00	1,00	11.362.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	11.362.118,00	100,00	30,92	1,00	11.362.118,00	0	0	
	501.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	0.00	0,00	0.00	0,00	2.00	103.339.800,00	0,00	0,00	1,00	1.287.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.287.378,00	50,00	1,25	1,00	1.287.378,00	0	0	
	501.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	0.00	0,00	0.00	0,00	8.00	42.589.400,00	3,00	8.588.000,00	3,00	10.027.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	18.615.230,00	75,00	43,71	6,00	18.615.230,00	0	0	
	501.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	3.00	149.207.000,00	0,00	0,00	1,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6.500.000,00	33,33	4,36	1,00	6.500.000,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	64,58	20,06					F

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					30,67	31,20					
4	**505.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase Hasil Kelitbangan (Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Penerapan dan Diseminasi) yang dimanfaatkan oleh PD**	**%**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100.00**	**634.621.700,00**	**75,00**	**319.136.000,00**	**0,00**	**63.044.716,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,00**	**382.180.716,00**	**75,00**	**60,22**	**75,00**	**382.180.716,00**	**0**	**0**	**BAPPEDA LITBANG**
	505.02.2.02	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Jumlah Hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang dimanfaatkan**	**Dokumen**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**3.00**	**223.498.000,00**	**2,00**	**115.307.000,00**	**0,00**	**14.634.744,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**129.941.744,00**	**66,67**	**58,14**	**2,00**	**129.941.744,00**	**0**	**0**	
	505.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	3.00	223.498.000,00	2,00	115.307.000,00	0,00	14.634.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	129.941.744,00	66,67	58,14	2,00	129.941.744,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					66,67	58,14					F
	505.02.2.03	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Jumlah Hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Dimanfaatkan**	**Dokumen**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**4.00**	**247.441.600,00**	**6,00**	**201.816.000,00**	**0,00**	**13.437.217,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**215.253.217,00**	**150,00**	**86,99**	**6,00**	**215.253.217,00**	**0**	**0**	
	505.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	4.00	247.441.600,00	6,00	201.816.000,00	0,00	13.437.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	215.253.217,00	150,00	86,99	6,00	215.253.217,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					150,00	86,99					F
	505.02.2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Jumlah Hasil Kelitbangan Bidang Inovasi dan Teknologi yang Dimanfaatkan**	**Dokumen**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**1.00**	**163.682.100,00**	**0,00**	**2.013.000,00**	**0,00**	**34.972.755,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.985.755,00**	**0,00**	**22,60**	**0,00**	**36.985.755,00**	**0**	**0**	
	505.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	1.00	163.682.100,00	0,00	2.013.000,00	0,00	34.972.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.985.755,00	0,00	22,60	0,00	36.985.755,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					72,22	55,91					
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)																					40,00	36,62					
Total																					**8.986.647.223,00**		**3.901.218.308,00**				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
Persentase Realisasi Anggaran																								43.41%		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1. Masyarakat 2. Internal Pemda 3. SKM 4. Sarana prasarana tersedia & memadai																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1. Komitmen yang tidak ditepati 2. Belum optimalnya pelaksanaan monev program pembangunan 3. Adanya penundaan pelaksanaan kegiatan karena efisiensi anggaran																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : 1. Berkomitmen sesuai perencanaan 2. Lebih mengoptimalkan evaluasi program 3. Percepatan pelaksanaan kegiatan																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Mengoptimalkan Sistem Informasi Perencanaan yang tersedia dalam upaya mendukung proses perencanaan yang efektif dan efisien																										

2.2 Tindak Lanjut Analisis Kinerja Bappedalitbang

Bappedalitbang Kabupaten Pacitan mengupayakan agar target program yang telah ditetapkan dapat tercapai di laporan kinerja periode berikutnya, melalui penguatan kegiatan antara lain :

1. Evaluasi kinerja secara berkala
2. Melalui desk OPD , untuk menentukan strategi pencapaian target kinerja OPD yang paling tepat
3. Melalui desk penganggaran kepada OPD agar sesuai target
4. Melalui pencermatan perencanaan anggaran agar 100 % program terbiayai secara proposional.

2.3 Reviuw Terhadap Rancangan Perubahan RKPD 2025

Rencana kerja perubahan tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rancangan Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) tahun 2025 dan evaluasi hasil pelaksanaan renja sampai dengan triwulan II dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat Daerah.

Bappedalitbang telah melakukan reviuw dan analisa kebutuhan terhadap dokumen rancangan perubahan tahun 2025 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2025 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap rancangan perubahan tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025
Kabupaten Pacitan

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikator	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Kebutuhan Dana
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Kab. Pacitan**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**100**	**5.127.405.572**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Kab. Pacitan**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**100**	**5.127.405.572**
1	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Pacitan**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah**	**18**	**112.447.802**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Pacitan**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah**	**18**	**112.447.802**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18	112.447.802	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18	112.447.802
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Pacitan**	**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah**	**40**	**3.506.297.221**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Pacitan**	**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah**	**40**	**3.506.297.221**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 org/bln	3.448.387.839	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 org/bln	3.448.387.839
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD		Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	40 laporan	57.909.382	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD		Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	40 laporan	57.909.382

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikator	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Kebutuhan Dana
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Pacitan**	**Presentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian**	**100**	**75.973.950**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Pacitan**	**Presentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian**	**100**	**75.973.950**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	165	75.973.950	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	165	75.973.950
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Pacitan**	**Presentase Operasional Dasar Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**100**	**635.395.510**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Pacitan**	**Presentase Operasional Dasar Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**100**	**635.395.510**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	11	332.569.310	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	11	332.569.310
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	302.826.200	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	302.826.200
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Pacitan**	**Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan**	**100**	**204.653.253**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Pacitan**	**Presentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan**	**100**	**204.653.253**
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	13	149.153.253	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	13	149.153.253
	Pengadaan aset tak berwujud		Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	1	55.500.000	Pengadaan aset tak berwujud		Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	1	55.500.000
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Pacitan**	**Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perangkat Daerah yang Dibutuhkan**	**100**	**362.506.622**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Pacitan**	**Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perangkat Daerah yang Dibutuhkan**	**100**	**362.506.622**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	145.382.222	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	145.382.222
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	217.124.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	217.124.400

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikator	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Kebutuhan Dana
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Pacitan**	**Presentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik**	**80**	**230.131.214**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Pacitan**	**Presentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik**	**80**	**230.131.214**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	34	69.047.015	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	34	69.047.015
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	58	43.534.200	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	58	43.534.200
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	117.549.999	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	117.549.999
B	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Kab. Pacitan**	**Persentase Keselarasan Program RPJMD Kedalam RKPD**	**100**	**1.412.131.155**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Kab. Pacitan**	**Persentase Keselarasan Program RPJMD Kedalam RKPD**	**100**	**1.412.131.155**
8	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Kab. Pacitan**	**Jumlah Dokumen RKPD dan Dokumen Perubahan RKPD**	**2**	**860.371.690**	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Kab. Pacitan**	**Jumlah Dokumen RKPD dan Dokumen Perubahan RKPD**	**2**	**860.371.690**
	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2	32.053.015	Pelaksanaan Konsultasi Publik		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2	32.053.015
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten / Kota	14	336.261.630	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten / Kota	14	336.261.630
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota yang yang ditetapkan (RPJPD, RPJMD/RKPD)	3	492.057.045	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota yang yang ditetapkan (RPJPD, RPJMD/RKPD)	3	492.057.045

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikator	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Kebutuhan Dana
9	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Kab. Pacitan**	**Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan yang Berbasis data SIPD**	**1**	**250.518.804**	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Kab. Pacitan**	**Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan yang Berbasis data SIPD**	**1**	**250.518.804**
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	17.387.689	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	17.387.689
	Pembinaan dan Pemanfaaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD		Jumlah Orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi	100	195.334.089	Pembinaan dan Pemanfaaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD		Jumlah Orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi	100	195.334.089
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah		Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah Yang Diterbitkan	1	37.797.026	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah		Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah Yang Diterbitkan	1	37.797.026
10	**Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Kab. Pacitan**	**Jumlah Dokumen Evaluasi Pembangunan Daerah**	**3**	**301.240.661**	**Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Kab. Pacitan**	**Jumlah Dokumen Evaluasi Pembangunan Daerah**	**3**	**301.240.661**
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	7	139.604.891	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	7	139.604.891
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	8	161.635.770	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	8	161.635.770

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
C	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Kab. Pacitan**	**Presentase Ketercapaian Program Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia** **Presentase Ketercapaian Program Bidang Perekonomian dan SDA dan Infrastruktur**	**100**	**1.663.737.460**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERECANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Kab. Pacitan**	**Presentase Ketercapaian Program Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia** **Presentase Ketercapaian Program Bidang Perekonomian dan SDA dan Infrastruktur**	**100**	**1.663.737.460**
11	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Kab. Pacitan**	**Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**50**	**868.750.060**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Kab. Pacitan**	**Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**50**	**868.750.060**
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	257.935.128	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	257.935.128
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2	152.188.800	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2	152.188.800
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2	95.940.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2	95.940.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	110.810.132	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	110.810.132

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Pagu Indikator	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capai an	Kebutuhan Dana
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2	116.788.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2	116.788.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2	135.090.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2	135.090.000
12	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian & SDA (Sumber Daya Alam)**	**Kab. Pacitan**	**Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA**	**40**	**463.105.200**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian & SDA (Sumber Daya Alam)**	**Kab. Pacitan**	**Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA**	**40**	**463.105.200**
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	51.000.200	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	51.000.200
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3	150.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3	150.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	9	46.396.600	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	9	46.396.600
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	67.642.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	67.642.000

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2	102.848.200	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2	102.848.200
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra / Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	8	45.218.200	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra / Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	8	45.218.200
13	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Kab. Pacitan**	**Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**40**	**331.882.200**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Kab. Pacitan**	**Jumlah Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**40**	**331.882.200**
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	36.746.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1	36.746.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2	103.339.800	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2	103.339.800
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra / Renja dengan RKPD / RPJMD pada Bidang Infrastruktur	8	42.589.400	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra / Renja dengan RKPD / RPJMD pada Bidang Infrastruktur	8	42.589.400

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD & RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	149.207.000	Koordinasi Penyusunan Dokkumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD & RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3	149.207.000
D	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Kab. Pacitan**	**Persentase Hasil Kelitbangan (Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Penerapan dan Diseminasi) yang dimanfaatkan oleh PD**	**98**	**713.221.700**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Kab. Pacitan**	**Persentase Hasil Kelitbangan (Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Penerapan dan Diseminasi) yang dimanfaatkan oleh PD**	**98**	**713.221.700**
14	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Kab. Pacitan**	**Tersedianya Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**98**	**223.498.000**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Kab. Pacitan**	**Tersedianya Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**98**	**223.498.000**
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	3	223.498.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	3	223.498.000
15	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Kab. Pacitan**	**Tersedianya Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**98**	**297.441.600**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Kab. Pacitan**	**Tersedianya Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**98**	**297.441.600**
	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	4	297.441.600	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	4	297.441.600
16	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Kab. Pacitan**	**Tersedianya DokumenPengembangan Inovasi dan Teknologi**	**98**	**192.282.100**	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Kab. Pacitan**	**Tersedianya DokumenPengembangan Inovasi dan Teknologi**	**98**	**192.282.100**
	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi & Inovasi		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	192.282.100	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	192.282.100

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
	Total Pagu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota				5.127.405.572	Total Pagu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota				5.127.405.572
	Total Pagu Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah				1.412.131.155	Total Pagu Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah				1.412.131.155
	Total Pagu Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				1.663.737.460	Total Pagu Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				1.663.737.460
	Total Pagu Program Penelitian dan Pengembangan Daerah				713.221.700	Total Pagu Program Penelitian dan Pengembangan Daerah				713.221.700
	Total Pagu RKPD				8.916.495.887	Total Pagu RKPD				8.916.495.887

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka menindak lanjuti Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025, sehingga Kepala Daerah menginstruksikan untuk mengkaji ulang terhadap anggaran yang sudah disusun agar dilakukan efisiensi belanja yang bersifat seremonila, perjalanan dinas, honorarium serta mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.

Maka dari itu dilakukan efisiensi belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan sebesar Rp. 1.047.466.729,00 dari pagu awal Rp. 10.034.113.952,00 menjadi Rp. 8.986.647.223,00 Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut :

Perencanaan pembangunan pada tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Namun seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap PD membuat dan memiliki Renja Perangkat Daerah, yang telah disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan mengacu pada Undang-

Undang tersebut, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappedalitbang Kabupaten Pacitan yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappedalitbang

Mengacu terhadap Visi dan Misi Kabupaten Pacitan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, maka untuk mendorong tercapainya Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Pacitan, maka posisi dan peran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan terletak pada Misi 4 : Menciptakan Birokrasi Pemerintah Yang Inovatif, Profesional Dan Melayani. Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif, Profesional Dan Responsif dengan 4 Sasaran yaitu :

a. Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif
b. Pengembangan Kapasitas (ASN) Pemerintah Daerah

c. Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel dan Transparan

d. Meningkatnya Kemandirian Desa

Untuk mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Pacitan dari sisi perencanaan penganggaran maka perencanaan melalui SIPD akan ditingkatkan sampai dengan pra RKA sehingga dapat mengetahui rincian kebutuhan riil dana pembangunan di Kabupaten Pacitan dan dapat mengetahui kebutuhan-kebutuhan belanja pada masing-masing Perangkat Daerah. Dengan adanya SPBE, diharapkan bisa meningkatkan kinerja masing-masing Perangkat Daerah, karena akan memudahkan pengelolaan data sekaligus pengawasan pelaksanaan kegiatannya.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappedalitbang

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Pada Tahun Ke -					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan Perencanaan Yang Berkualitas	Persentase Perencanaan Kinerja	72	75	77	79	82	84
	Persentase Rekomendasi Kelitbangan Yang Digunakan Dalam Rumusan Perencanaan Pembangunan Daerah	97	97	100	100	100	100

Sasaran Renstra	Indikator Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun Ke -					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Meningkatnya Perencanaan, Pengendalian, Sinkronisasi dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	80	90	95	96	97	98
2. Meningkatnya Hasil Kelitbangan	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Digunakan Dalam Rumusan Perencanaan Pembangunan Daerah	97	97	100	100	100	100

3.3 Program dan Kegiatan Bappedalitbang

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang daerah dibidang Perencanaan dan sebagaimana dengan tujuan dan sasaran Bappedalitbang Kabupaten Pacitan seperti yang tertuang dalam Renstra 2021-2026. Sedangkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bappedalitbang Kabupaten Pacitan tahun 2025 dimaksud disajikan sebagaimana Tabel 3.2.

Tabel 3.2
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

KODE					PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERLEBIH / (BERKURANG)	
								Rp	Rp	Rp	%
5	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**5.547.125.968**	**5.289.739.195**	**(257.386.773)**	
5	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**124.225.730**	**113.287.802**	**(10.937.928)**	
5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen	124.225.730	113.287.802	(10.937.928)	
5	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**59 Dokumen**	**3.614.848.454**	**3.603.208.556**	**(11.639.898)**	
5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang	3.531.139.174	3.531.139.174	0	
5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	40 Laporan	83.709.280	57.909.382	(11.639.898)	
5	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**75.973.950**	**75.973.950**	**0**	
5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	247 Paket	75.973.950	75.973.950	0	
5	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**912.751.866**	**690.407.319**	**(222.344.547)**	
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	438.511.266	407.581.119	(30.930.147)	
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	474.240.600	282.826.200	(191.414.400)	

KODE					PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERLEBIH / (BERKURANG)	
								Rp	Rp	Rp	%
5	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**221.089.911**	**204.653.253**	**0**	
5	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	-	6.660.000	-	0	
5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	13 Unit	129.922.947	129.922.947	0	
5	01	01	2.07	0008	Pengadaan Aset tak berwujud	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	-	55.500.000	55.500.000	0	
5	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	29.006.964	29.006.964	0	
5	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**419.873.800**	**407.409.400**	**(12.464.400)**	
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	165.385.000	165.385.000	0	
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	254.488.800	242.024.400	(12.464.400)	
5	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**178.362.257**	**178.362.257**	**0**	
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	57.947.015	57.947.015	0	
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	66 Unit	43.534.200	43.534.200	0	

KODE					PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERLEBIH / (BERKURANG)	
								Rp	Rp	Rp	%
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	76.881.042	76.881.042	0	
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**			**1.706.987.964**	**1.398.548.868**	**(308.439.116)**	
5	**01**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**			**1.011.814.595**	**843.735.175**	**(167.879.420)**	
5	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik		118.327.835	61.460.315	(56.867.520)	
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	13 Berita Acara	417.687.290	375.543.390	(42.143.900)	
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dok	475.599.470	406.731.470	(68.868.000)	
5	**01**	**02**	**2.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**			**349.325.619**	**284.555.319**	(64.770.300)	
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dok	38.947.489	17.387.689	(21.559.800)	
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	100 Orang	235.504.089	225.334.089	(10.170.000)	
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	74.874.041	41.833.541	(33.040.500)	

KODE					PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERLEBIH / (BERKURANG)	
								Rp	Rp	Rp	%
5	**01**	**02**	**2.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**			**346.047.770**	**270.258.374**	**(75.789.396)**	
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	7 Laporan	202.000.000	138.622.604	(63.377.396)	
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	10 Laporan	144.047.770	131.635.770	(12.412.000)	
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**			**2.030.000.000**	**1.663.737.460**	**(366.262.540)**	
5	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**			**1.050.000.000**	**868.750.060**	**(181.249.940)**	
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dok	294.083.785	262.935.128	(31.148.657)	
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	188.146.800	162.186.800	(25.960.000)	
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	124.580.000	95.940.000	(28.640.000)	
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dok	146.489.415	95.810.132	(50.679.283)	

KODE					PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERLEBIH / (BERKURANG)	
								Rp	Rp	Rp	%
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	131.800.000	116.788.000	(15.012.000)	
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	164.900.000	135.090.000	(29.810.000)	
5	**01**	**03**	**2.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**			**565.947.000**	**463.105.200**	**(102.841.800)**	
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dok	60.210.000	51.000.200	(9.209.800)	
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan	151.165.000	150.000.000	(1.165.000)	
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	19 Laporan	91.974.080	46.396.600	(45.577.480)	
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJP, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dok	77.060.000	67.642.000	(9.418.000)	
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Laporan	103.897.000	102.848.200	(848.800)	

KODE					PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERLEBIH / (BERKURANG)	
								Rp	Rp	Rp	%
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	16 Laporan	81.840.920	45.218.200	(36.622.720)	
5	**01**	**03**	**2.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**			**414.053.000**	**331.882.200**	**(82.170.800)**	
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dok	53.380.000	36.746.000	(16.614.000)	
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	104.375.000	103.339.800	(1.035.200)	
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	16 Laporan	79.499.000	42.589.400	(36.909.600)	
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	16 Laporan	176.819.000	149.207.000	(27.612.000)	

KODE					PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERLEBIH / (BERKURANG)	
								Rp	Rp	Rp	%
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**			**750.000.000**	**634.621.700**	**(115.378.300)**	
5	**05**	**02**	**2.02**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**			**246.500.000**	**223.498..000**	**(23.002.000)**	
5	05	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	3 Dok	246.500.000	223.498..000	(23.002.000)	
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			**278.500.000**	**247.441.600**	**(31.058.400)**	
5	05	02	2.03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	5 Dok	278.500.000	247.441.600	(31.058.400)	
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi			**225.000.000**	**163.682.100**	**(61.317.900)**	
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	5 Dok	225.000.000	163.682.100	(61.317.900)	

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2025 merupakan terjemahan dan operasionalisasi sebagaimana yang tercantum dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah yang berkontribusi untuk pencapaian tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja dibuat terkait dengan Visi dan Misi Organisasi untuk memenuhi target kinerja dari program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Bappedalitbang selama Tahun Anggaran 2025, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun organisasi. Di samping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreativitas aparatur dalam pelaksanaan disiplin dan loyalitas yang tinggi demi mengemban Visi dan Misi Organisasi untuk menuju Aparatur Pemerintah yang profesional, bersih dan berwibawa sebagai pelayan masyarakat yang terbaik.

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN

Dr. Drs. HERU SUKRESNO, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660614 199203 1 008

BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN

RENJA PERUBAHAN

2025

RENCANA KERJA PERUBAHAN

BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa mencurahkan limpahan rahmat dan anugerah-NYA sehingga dapat tersusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan , disamping itu untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan dengan harapan dapat menjadi tolak ukur keberhasilan SKPD. Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan serta koreksi atas penyusunan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan.

Pacitan, Juni 2025
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN

Drs.DARYONO,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19651117 198703 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i
DAFTAR ISI..... iii
BAB PENDAHULUAN..... 1
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Landasan Hukum..... 2
1.3 Maksud dan Tujuan..... 3
1.4 Sistematika Penulisan..... 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN TAHUN LALU 5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra 5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 71
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi 71
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 72
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 115
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional..... 115
3.2 Tujuan dan Sasaran 115
3.3 .Program dan Kegiatan..... 119
BAB IV PENUTUP..... 132
4.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan 132
4.2 Rekomendasi 132

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu.

Tabel 2.2. Perbandingan target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.

Tabel 2.3. Perbandingan realisasi kenerja Tahun ini dengan tahun lalu.

Tabel 2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Target Jangka Menengah dengan Target RPJMD Akhir.

Tabel 2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 dengan Standart Nasional.

Tabel 2.6. Analisis Penyebab Keberhasilan/peningkatan dan Kegagalan/penurunan Kinerja serta Solusi yang dilakukan.

Tabel 2.7. Analisis Efisiensi Per Sasaran.

Tabel 2.8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.

Tabel 2.9. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023.

Tabel 2.10. Reviuw terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025.

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022-2026 .

Tabel 3.2. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2025.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu unsur penunjang dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah. Untuk menunjang Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan Daerah yang berdaya guna dan berhasil perlu disusun perencanaan pembangunan daerah yang salah satunya adalah Rencana Kerja (RENJA) SKPD. Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam prosesnya penyusunan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renja SKPD, oleh karena itu penyusunan Renja SKPD dapat dikerjakan secara stimultan/ pararel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Renja SKPD memuat hasil evaluasi Renja tahun lalu dan memuat tujuan dan sasaran Renja serta yang berpedoman pada Rencana Strategis SKPD. Renja SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP). Pelaksanaan Renja SKPD dalam tahun berjalan dilakukan Pengukuran Kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan dalam suatu laporan Kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Renja SKPD disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah(RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat. Dalam menyusun Renja SKPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, perkiraan maju serta penyalarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas target Renstra SKPD dan RPJMD tahun bersangkutan Renja SKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem Perencanaan Daerah karena Renja SKPD menerjemahkan perencanaan Strategis Jangka Menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) dalam rencana program dan penganggaran tahunan Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi, Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan. Renja BKD Tahun Anggaran 2025 akan lebih konkrit dan terukur. Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagian tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi Pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju,

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4287;
2. Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004) Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 170 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Memberikan informasi tentang Rencana Program dan Kegiatan tahunan;
b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
c. Menyelaraskan program dengan penganggaran;
d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan;
e. Menyelaraskan program dengan penganggaran;

Tujuan antara lain :

a. Menjabarkan Rencana Strategis ke dalam program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
b. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan BKD Kabupaten Pacitan
c. Sebagai Upaya mewujudkan efesiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan pada BKD Kabupaten Pacitan;

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana kerja Badan keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud Tujuan dan
1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Renja Sampai Dengan Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV : Penutup

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
5.2 Rencana Tindak Lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan review terhadap hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD merupakan kegiatan yang bersifat reguler dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana komitmen, kemampuan dan hambatan dan permasalahan yang dihadapi SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, merealisasikan pencapain target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dan prakiraan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) tahun berjalan. Untuk dapat mengendalikan tingkat efesiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan media atau sarana dalam mengukur keluaran dengan kinerja yang dihasilkan sehingga penetapan ukuran atau indikator kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan anggaran dengan metode penganggaran berbasis kinerja (performance budgeting). Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan menggunakan informasi kinerja yang diharapkan dapat menjadi acuan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan dalam menyusun Program Kegiatan. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan, selain mempunyai tugas dan fungsi SKPD koordinator juga melakukan fungsi pengelolaan keuangan dan aset-aset dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan .BKD dalam hal ini juga selaku PPKD mempunyai tugas antara lain menyusun Rancangan APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		-10		-11		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
1	**502.01.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**Nilai**	**0**	**0**	**00.00**	**0**	**77.00.00**	**17.885.592.550,00**	**0**	**3.844.460.212,00**	**80**	**4.573.710.550,00**	**0**	**5.381.524.348,00**	**0**	**8.111.602.147,00**	**80**	**21.911.297.257,00**	**103,9**	**122,51**	**80**	**21.911.297.257,00**	**0**	**0**	**Badan Keuangan Daerah**
	502.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**Dok**	**23.00**	**0**	**00.00**	**0**	**23**	**151.265.000,00**	**6**	**0**	**6**	**22.439.000,00**	**7**	**30.150.670,00**	**8**	**127.305.965,00**	**27**	**179.895.635,00**	**117,39**	**118,93**	**27**	**179.895.635,00**	**117.39.00**	**0**	
	502.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0	05.00	0	2	55.945.000,00	2	0	0	1.639.000,00	2	3.438.370,00	1	50.739.900,00	5	55.817.270,00	250	99,77	10	55.817.270,00	0	0	
	502.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		0	00.00	0	1	5.000.000,00	1	0	0	0	0	4.322.800,00	0	620.000,00	1	4942800	100	98,86	1	4.942.800,00	0	0	
	502.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dokumen		0	00.00	0	1	5.000.000,00	0	0	1	0	1	0	1	9.861.400,00	3	9861400	300	197,23	3	9.861.400,00	0	0	

			Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																									
	502.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		0	00.00	0	1	10.320.000,00	1	0	0	0	0	0	0	10.129.300,00	1	10129300	100	98,15	1	10.129.300,00	0	0	
	502.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen		0	00.00	0	1	10.000.000,00	0	0	1	0	1	0	1	14.779.365,00	3	14779365	300	147,79	3	14.779.365,00	0	0	
	502.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		0	00.00	0	14	65.000.000,00	2	0	4	20.800.000,00	3	22.389.500,00	5	41.176.000,00	14	84365500	100	129,79	14	84.365.500,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					191,67	128,6					1=1
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
	502.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan keuangan Perangkat Daerah**	**Dok**	**59.00.00**	**0**	**00.00**	**0**	**59**	**6.892.998.170,00**	**14**	**1.008.015.799,00**	**15**	**1.760.519.283,00**	**15**	**1.953.720.772,00**	**15**	**1.709.810.258,00**	**59**	**6.432.066.112,00**	**100**	**93,31**	**59**	**6.432.066.112,00**	**100**	**0**	
	502.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		0	00.00	0	12	6.416.653.633,00	3	960.390.199,00	3	1.730.959.283,00	3	1.754.661.372,00	1	1.461.172.758,00	10	5.907.183.612,00	83,33	92,06	10	5.907.183.612,00	0	0	
	502.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		0	00.00	0	1	331.335.037,00	1	10.647.600,00	0	0	0	154.438.200,00	0	148.806.700,00	1	313892500	100	94,74	1	313.892.500,00	0	0	

	502.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen		0	00.00	0	1	145.009.500,00	1	36.978.000,00	0	29.560.000,00	0	44.621.200,00	0	99.830.800,00	1	210990000	100	145,5	1	210.990.000,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					94,44	110,77					1=2
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
	502.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian**	**%**	**100.00.00**	**0**	**00.00**	**0**	**100**	**744.275.000,00**	**100**	**154.190.000,00**	**100**	**0**	**100**	**397.866.000,00**	**100**	**290.749.900,00**	**100**	**842.805.900,00**	**100**	**113,24**	**100**	**842.805.900,00**	**100**	**0**	
	502.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0	00.00	0	220	13.695.000,00	0	0	110	0	0	0	0	31.100.000,00	110	31.100.000,00	50	227,09	110	31.100.000,00	0	0	
	502.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		0	00.00	0	110	277.700.000,00	0	4.950.000,00	110	0	0	272.616.000,00	0	0	110	277566000	100	99,95	110	277.566.000,00	0	0	
	502.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		0	00.00	0	110	452.880.000,00	54	149.240.000,00	0	0	60	125.250.000,00	0	259.649.900,00	114	534139900	103,64	117,94	114	534.139.900,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					84,55	148,33					1=3
Predikat kinerja(%)																					Tinggi	Sangat Tinggi					
	502.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase operasional dasar perngkat daerah yang terpenuhi**	**%**	**100.00.00**	**0**	**00.00**	**0**	**100**	**302.005.036,00**	**100**	**64.403.958,00**	**100**	**61.186.906,00**	**100**	**118.905.527,00**	**100**	**212.162.812,00**	**100**	**456.659.203,00**	**100**	**151,21**	**100**	**456.659.203,00**	**100**	**0**	
	502.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		0	00.00	0	3	10.385.000,00	1	0	2	0	0	10.277.500,00	0	10.370.000,00	3	20.647.500,00	100	198,82	3	20.647.500,00	0	0	
	502.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0	00.00	0	10	43.698.536,00	3	600.000,00	3	0	2	30.871.300,00	0	2.110.000,00	8	33581300	80	76,85	8	33.581.300,00	0	0	

	502.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		0	00.00	0	2	13.544.000,00	1	0	0	0	1	13.261.700,00	0	3.864.000,00	2	17125700	100	126,44	2	17.125.700,00	0	0	
	502.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0	00.00	0	2	87.840.000,00	2	35.794.500,00	0	17.223.500,00	0	6.353.500,00	0	69.496.000,00	2	128867500	100	146,71	2	128.867.500,00	0	0	
	502.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0	00.00	0	2	9.917.500,00	1	0	1	0	0	0	0	11.345.735,00	2	11345735	100	114,4	2	11.345.735,00	0	0	
	502.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		0	00.00	0	2	136.620.000,00	2	28.009.458,00	0	43.963.406,00	0	58.141.527,00	0	114.977.077,00	2	245091468	100	179,4	2	245.091.468,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					96,67	140,44					1=4
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
	502.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**%**	**100.00.00**	**0**	**00.00**	**0**	**100**	**20.037.430,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.819.000,00**	**200**	**3.010.029.180,00**	**200**	**3.027.848.180,00**	**200**	**15.110,96**	**200**	**3.027.848.180,00**	**200**	**0**	
	502.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0	00.00	0	6	20.037.430,00	0	0	0	0	5	17.819.000,00	1	170.249.180,00	6	188.068.180,00	100	938,58	6	188.068.180,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					100	938,58					1=5
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
	502.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah yang dibutuhkan**	**%**	**100.00.00**	**0**	**00.00**	**0**	**100**	**9.583.016.914,00**	**100**	**2.609.820.855,00**	**100**	**2.706.164.511,00**	**100**	**2.781.535.229,00**	**100**	**2.641.184.872,00**	**100**	**10.738.705.467,00**	**100**	**112,06**	**100**	**10.738.705.467,00**	**100**	**0**	
	502.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Laporan		0	12.00	0	12	9.202.414.514,00	3	2.520.197.757,00	3	2.616.244.866,00	3	2.690.887.195,00	3	2.572.479.128,00	12	10.399.808.946,00	100	113,01	24	10.399.808.946,00	0	0	

			Disediakan																									
	502.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		0	12.00	0	12	11.336.000,00	3	1.380.000,00	3	2.070.000,00	3	1.380.000,00	3	3.886.000,00	12	8716000	100	76,89	24	8.716.000,00	0	0	
	502.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0	12.00	0	12	369.266.400,00	3	88.243.098,00	3	87.849.645,00	3	89.268.034,00	3	64.819.744,00	12	330180521	100	89,42	24	330.180.521,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					100	93,11					1=6
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
	502.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**%**	**80.00.00**	**0**	**00.00**	**0**	**80**	**191.995.000,00**	**80**	**8.029.600,00**	**80**	**23.400.850,00**	**80**	**81.527.150,00**	**80**	**120.359.160,00**	**80**	**233.316.760,00**	**100**	**121,52**	**80**	**233.316.760,00**	**100**	**0**	
	502.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0	56.000.00	0	56	135.645.000,00	10	8.029.600,00	8	23.400.850,00	15	59.556.150,00	23	110.059.160,00	56	201.045.760,00	100	148,21	112	201.045.760,00	0	0	
	502.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0	01.00	0	1	30.000.000,00	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0	2	0	0	0	
	502.01.2.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0	06.00	0	8	26.350.000,00	0	0	0	0	6	21.971.000,00	2	10.300.000,00	8	32271000	100	122,47	14	32.271.000,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					100	90,23					1=7

Predikat kinerja(%)																					San gat Tin ggi	Sang at Tingg i						
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					817 ,39	15.82 1,23	817.3 9/1					
Predikat kinerja(%)																					San gat Tin ggi	Sang at Tingg i						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																												
2	**502.02.0 0**	**PROGRAM PENGELOLAA N KEUANGAN DAERAH**	**Jumlah Perda dan Perbup tentang APBD yang ditetapkan dalam satu tahun**	**Perda**	**7**	**0**	**00.0 0**	**0**	**7**	**283.707.22 3.327,00**	**2**	**26.170.46 6.100,00**	**2**	**25.933.16 6.909,00**	**2**	**19.947.78 1.059,00**	**1**	**41.672.60 7.984,00**	**7**	**113.724.02 2.052,00**	**100**	**40,08**	**7**	**113.724.02 2.052,00**	**100**	**0**	**Badan Keuang an Daerah**
	.		**Jumlah Perda dan Perbup tentang Pertanggungj awaban APBD yang ditetapkan dalam satu tahun**	**Perda**	**2**		**00.0 0**	**0**	**02.00**		**0**		**0**		**2**		**1**		**3**		**150**		**3**		**150**		**Badan Keuang an Daerah**
	502.02.2. 01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Prosentase OPD yang menyusun Rencana Anggaran tepat waktu**	**%**	**100.0 0.00**	**0**	**00.0 0**	**0**	**100**	**1.636.391. 500,00**	**100**	**269.507.1 92,00**	**100**	**376.574.5 30,00**	**0**	**329.365.8 75,00**	**10 0**	**941.234.1 48,00**	**100**	**1.916.681. 745,00**	**100**	**117,1 3**	**100**	**1.916.681. 745,00**	**100**	**0**	
	502.02.2. 01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokum en		0	00.0 0	0	2	583.222.85 5,00	2	116.400.0 00,00	0	116.400.0 00,00	0	111.186.5 00,00	0	556.600.4 00,00	2	900.586.90 0,00	100	154,4 2	2	900.586.90 0,00	0	0	
	502.02.2. 01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokum en		0	00.0 0	0	2	70.728.005 ,00	0	0	0	0	2	13.298.25 0,00	0	56.948.50 0,00	2	70246750	100	99,32	2	70.246.750 ,00	0	0	
	502.02.2. 01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokum en		0	00.0 0	0	43	11.788.000 ,00	40	0	0	0	0	0	0	11.674.15 0,00	40	11674150	93, 02	99,03	40	11.674.150 ,00	0	0	
	502.02.2. 01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokum en		0	00.0 0	0	43	9.991.500, 00	0	0	34	0	40	0	10	9.981.000, 00	84	9981000	195 ,35	99,89	84	9.981.000, 00	0	0	
	502.02.2. 01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokum en		0	00.0 0	0	43	8.892.000, 00	40	0	0	0	0	0	0	8.845.100, 00	40	8845100	93, 02	99,47	40	8.845.100, 00	0	0	

	502.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen		0	00.00	0	43	5.025.500,00	0	0	34	0	40	4.792.000,00	10	0	84	4792000	195,35	95,35	84	4.792.000,00	0	0	
	502.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen		0	00.00	0	2	422.851.190,00	2	149.357.192,00	0	11.100.000,00	0	60.047.625,00	0	149.625.789,00	2	370130606	100	87,53	2	370.130.606,00	0	0	
	502.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen		0	00.00	0	2	502.892.450,00	2	0	2	245.324.530,00	2	136.291.500,00	1	143.809.209,00	7	525425239	350	104,48	7	525.425.239,00	0	0	
	502.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen		0	00.00	0	1	21.000.000,00	0	3.750.000,00	0	3.750.000,00	0	3.750.000,00	1	3.750.000,00	1	15000000	100	71,43	1	15.000.000,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					147,42	101,21					1=1
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
	502.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Prosentase rata rata penyerapan anggaran OPD**	**%**	**100.00.00**	**0**	**00.00**	**0**	**100**	**471.080.000,00**	**19,03**	**111.767.873,00**	**19,81**	**70.853.600,00**	**23,09**	**105.278.100,00**	**20,9**	**256.858.650,00**	**82,83**	**544.758.223,00**	**82,83**	**115,64**	**82,83**	**544.758.223,00**	**82.83**	**0**	
	502.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen		0	00.00	0	2	114.955.000,00	1	17.859.000,00	0	18.734.000,00	0	16.286.000,00	1	74.956.750,00	2	127.835.750,00	100	111,21	2	127.835.750,00	0	0	
	502.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer	Dokumen		0	00.00	0	12	36.780.000,00	3	8.229.700,00	3	5.550.000,00	3	12.194.800,00	3	10.534.000,00	12	36508500	100	99,26	12	36.508.500,00	0	0	

			Lainnya																									
	502.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen		0	00.00	0	2	153.877.500,00	0	58.677.000,00	1	24.591.600,00	0	45.792.450,00	1	83.676.500,00	2	212737550	100	138,25	2	212.737.550,00	0	0	
	502.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen		0	00.00	0	2	13.070.000,00	1	0	0	0	0	7.830.850,00	1	4.725.000,00	2	12555850	100	96,07	2	12.555.850,00	0	0	
	502.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang		0	00.00	0	86	152.397.500,00	0	27.002.173,00	40	21.978.000,00	0	23.174.000,00	46	82.966.400,00	86	155120573	100	101,79	86	155.120.573,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					100	109,32					1=2
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
	502.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Prosentase OPD yang laporan keuangan daerahnya sesuai dengan SAP**	**%**	**00.00**	**0**	**00.00**	**0**	**100**	**278.920.000,00**	**100**	**51.535.659,00**	**100**	**106.039.537,00**	**100**	**52.540.300,00**	**100**	**214.436.150,00**	**100**	**424.551.646,00**	**100**	**152,21**	**100**	**424.551.646,00**	**0**	**0**	

	502.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen		0	00.00	0	5	84.860.000,00	0	37.055.600,00	3	22.207.000,00	1	29.959.600,00	1	57.112.650,00	5	146.334.850,00	100	172,44	5	146.334.850,00	0	0	
	502.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen		0	00.00	0	2	153.400.000,00	0	14.480.059,00	0	82.052.537,00	0	22.580.700,00	2	58.722.000,00	2	177835296	100	115,93	2	177.835.296,00	0	0	
	502.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen		0	00.00	0	5	40.660.000,00	0	0	3	1.780.000,00	0	0	2	98.601.500,00	5	100381500	100	246,88	5	100.381.500,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					100	178,42					1=3
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
	502.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**prosentase terpenuhinya belanja transfer dan belanja tidak terduga**	**%**	**100.00.00**	**0**	**00.00**	**0**	**100.00.00**	**281.020.831.827,00**	**41,1**	**25.737.655.376,00**	**8,69**	**25.304.699.242,00**	**24,61**	**19.385.596.784,00**	**22,68**	**40.010.079.036,00**	**97,08**	**110.438.030.438,00**	**97,08**	**39,3**	**97,08**	**110.438.030.438,00**	**97.08.00**	**0**	
	502.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan		0	00.00	0	1	268.863.748.800,00	0	24.470.050.000,00	0	23.696.281.000,00	0	16.593.058.000,00	1	35.065.314.142,00	1	99.824.703.142,00	100	37,13	1	99.824.703.142,00	0	0	

	502.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan		0	00.00	0	1	6.000.000.000,00	0	15.341.906,00	0	1.372.029.583,00	0	352.854.473,00	1	4.647.001.963,00	1	6387227925	100	106,45	1	6.387.227.925,00	0	0	
	502.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan		0	00.00	0	1	6.157.083.027,00	0	1.252.263.470,00	0	236.388.659,00	0	2.439.684.311,00	1	297.762.931,00	1	4226099371	100	68,64	1	4.226.099.371,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					100	70,74					1=4
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sedang					
	502.02.2.05	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Prosentase kelancaran penggunaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah**	**%**	**100.00.00**	**0**	**00.00**	**0**	**100**	**300.000.000,00**	**100**	**0**	**100**	**75.000.000,00**	**100**	**75.000.000,00**	**100**	**250.000.000,00**	**100**	**400.000.000,00**	**100**	**133,33**	**100**	**400.000.000,00**	**100**	**0**	
	502.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen		0	00.00	0	1	300.000.000,00	0	0	1	75.000.000,00	0	75.000.000,0	0	250.000.000,00	1	400.000.000,00	100	133,33	1	400.000.000,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					100	133,33					1=5
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					479,91	557,61	479.91/1				
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

3	**502.03.00**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase barang/aset daerah yang teregistrasi**	**%**	**100**	**0**	**00.00**	**0**	**100**	**800.000.000,00**	**100**	**235.073.500,00**	**100**	**130.225.900,00**	**0**	**70.140.191,00**	**100**	**607.883.320,00**	**100**	**1.043.322.911,00**	**100**	**130,42**	**100**	**1.043.322.911,00**	**100**	**0**	**Badan Keuangan Daerah**
	502.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase OPD dengan data aset yang valid**	**%**	**100.00.00**	**0**	**00.00**	**0**	**100**	**800.000.000,00**	**0**	**235.073.500,00**	**0**	**130.225.900,00**	**0**	**70.140.191,00**	**100**	**607.883.320,00**	**100**	**1.043.322.911,00**	**100**	**130,42**	**100**	**1.043.322.911,00**	**100**	**0**	
	502.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen		0	00.00	0	2	45.638.505,00	2	19.374.850,00	0	3.843.500,00	0	0	0	17.095.500,00	2	40.313.850,00	100	88,33	2	40.313.850,00	0	0	
	502.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen		0	00.00	0	9	67.933.040,00	0	7.540.000,00	9	5.210.000,00	0	17.640.200,00	0	21.115.000,00	9	51505200	100	75,82	9	51.505.200,00	0	0	
	502.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan		0	00.00	0	43	42.057.140,00	0	18.703.650,00	0	3.855.000,00	0	0	40	21.836.500,00	40	44395150	93,02	105,56	40	44.395.150,00	0	0	
	502.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan		0	00.00	0	43	109.015.335,00	0	995.000,00	0	6.750.000,00	40	15.036.991,00	0	201.516.470,00	40	224298461	93,02	205,75	40	224.298.461,00	0	0	
	502.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen		0	00.00	0	15	159.489.215,00	5	10.800.000,00	5	62.887.400,00	0	19.606.000,00	5	39.330.000,00	15	132623400	100	83,16	15	132.623.400,00	0	0	
	502.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan		0	00.00	0	15	306.461.765,00	5	166.560.000,00	5	36.580.000,00	0	6.757.000,00	5	272.544.850,00	15	482441850	100	157,42	15	482.441.850,00	0	0	
	502.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang		0	00.00	0	43	69.405.000,00	40	11.100.000,00	0	11.100.000,00	0	11.100.000,00	0	34.445.000,00	40	67745000	93,02	97,61	40	67.745.000,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					84,88	116,24					1=1
Predikat kinerja(%)																					Tinggi	Sangat Tinggi					
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					100	130,42	100/1				

																					Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																												
4	**502.04.00**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD**	**%**	**11,76**	**0**	**00.00**	**0**	**11.13**	**2.274.000.000,00**	**2,92**	**341.068.830,00**	**6,14**	**282.576.600,00**	**11,31**	**801.883.766,00**	**2,67**	**1.226.908.441,00**	**23,04**	**2.652.437.637,00**	**207,01**	**116,64**	**23,04**	**2.652.437.637,00**	**195.92**	**0**	**Badan Keuangan Daerah**
	502.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Jumlah pendapatan pajak daerah**	**Milyar**	**37.40.00**	**0**	**00.00**	**0**	**37.40.00**	**2.274.000.000,00**	**6,11**	**341.068.830,00**	**12,88**	**282.576.600,00**	**23,72**	**801.883.766,00**	**5,61**	**1.226.908.441,00**	**48,32**	**2.652.437.637,00**	**129,2**	**116,64**	**48,32**	**2.652.437.637,00**	**129.02.00**	**0**	
	502.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen		0	00.00	0	12	1.207.338.500,00	3	228.654.100,00	3	83.027.600,00	3	542.560.000,00	3	418.027.000,00	12	1.272.268.700,00	100	105,38	12	1.272.268.700,00	0	0	
	502.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen		0	00.00	0	1	150.000.000,00	0	16.574.730,00	0	9.825.000,00	0	83.351.072,00	5	47.463.041,00	5	157213843	500	104,81	5	157.213.843,00	0	0	
	502.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan		0	00.00	0	255	214.159.500,00	62	46.510.000,00	21	38.790.000,00	83	62.434.100,00	92	79.857.000,00	258	227591100	101,18	106,27	258	227.591.100,00	0	0	
	502.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan		0	00.00	0	3	300.000.000,00	0	10.780.000,00	0	53.400.000,00	0	17.112.000,00	3	322.124.400,00	3	403416400	100	134,47	3	403.416.400,00	0	0	
	502.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen		0	00.00	0	646285	81.442.500,00	642.353,00	2.820.000,00	2.166,00	41.059.000,00	837	20.792.000,00	935	53.916.900,00	646.291,00	118587900	100	145,61	646.291,00	118.587.900,00	0	0	
	502.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan		0	00.00	0	646285	51.059.500,00	642.353,00	0	2.166,00	10.768.000,00	837	16.932.000,00	935	166.491.900,00	646.291,00	194191900	100	380,32	646.291,00	194.191.900,00	0	0	
	502.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen		0	00.00	0	1	116.340.000,00	0	25.380.000,00	0	24.640.000,00	0	29.392.594,00	1	38.090.000,00	1	117502594	100	101	1	117.502.594,00	0	0	

	502.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen		0	00.00	0	1	3.660.000,00	0	0	0	0	0	0	1	3.660.000,00	1	3660000	100	100	1	3.660.000,00	0	0	
	502.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen		0	00.00	0	11	35.000.000,00	0	4.500.000,00	0	5.238.000,00	0	4.500.000,00	11	20.761.000,00	11	34999000	100	100	11	34.999.000,00	0	0	
	502.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan		0	00.00	0	1	85.000.000,00	0	5.850.000,00	0	11.869.000,00	0	24.810.000,00	1	50.823.400,00	1	93352400	100	109,83	1	93.352.400,00	0	0	
	502.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan		0	00.00	0	1	30.000.000,00	0	0	0	3.960.000,00	0	0	1	25.693.800,00	1	29653800	100	98,85	1	29.653.800,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					136,47	135,14					1=1
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					129,2	116,64	129.2/1				
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																											
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)																					132,18	81,93					
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Tinggi					
Total																					**304.666.815.877,00**			**139.331.079.857,00**			
Persentase Realisasi Anggaran																									**45.73%**		
Predikat																									**Sangat Rendah**		

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel. 2.2
Perbandingan target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatkan kemandirian fiskal melalui peningkatan PAD	Prosentase Pertumbuhan PAD	6,45	4,92	76,27
Meningkatnya Penerimaan Daerah	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan	12,48 %	12,71%	101,84
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah	Opini BPK	WTP	WTP	100
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Persentase Penetapan Perda dan Perbup APBD tepat waktu	100	100	100
	Persentase Penetapan Perda dan Perbup Pertanggung Jawaban APBD tepat waktu	100	100	100
Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase tertib pelaporan barang milik daerah	100	100	100
	Persentase barang/aset daerah yang teregistrasi	100	100	100
Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Hasil Nilai IKM Perangkat Daerah	83,74	83,75	100,01

1. Tujuan meningkatkan kemandirian fiskal melalui peningkatan PAD

   Indikator Kinerja Prosentase Pertumbuhan PAD

   Dengan rumus :

$$\frac{PADn - PADn-1}{PADn-1} x100\%$$

$PADn$: realisasi PAD tahun berjalan

$PADn-1$: realisasi PAD tahun lalu

$Realisasi\ PAD\ tahun\ berjalan - Realisasi\ PAD\ tahun\ lalu\ Realisasi\ PAD\ tahun\ lalu\ x100\%$

$$\frac{\text{Rp. 223.800.013.868,92} - \text{Rp. 213.300.354.867,05}}{\text{Rp 213.300.354.867,05}} x\ 100\% = 4{,}92\%$$

Dari hasil pengukuran untuk tujuan dari target yang ditetapkan sebesar 6,45% tercapai sebesar 4,92% dengan tingkat capaian sebesar 76,27%.

Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah menjadi salah satu Strategi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. Beberapa strategi yang perlu dilakukan, meliputi antara lain:

a. Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, yang bertujuan meningkatkan pendapatan pajak daerah.
b. Menjalin kerjasama dengan pihak swasta, BUMN dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah.
c. Melakukan monitoring rutin dan evaluasi.
d. Meningkatkan komitmen seluruh Stakeholder agar dapat terlaksananya Strategi peningkatan PAD.

2. Sasaran Meningkatnya Penerimaan Daerah

a. Indikator Kinerja Sasaran Rasio PAD terhadap Total Pendapatan

Dengan rumus :

$$\frac{PADn}{\text{Pendapatan Tahun } n} x100\%$$

$\frac{\text{Rp } 223.800.013.868,92}{\text{Rp } 1.760.764.804.578,92} x\ 100\% = 12,71\%$

Indikator Kinerja Sasaran Rasio PAD terhadap Total Pendapatan pada tahun 2024 BKD Kabupaten Pacitan menargetkan 12,48% dan realisasi yang diperoleh adalah 12,71 % dengan capaian sebesar 101,84% atau katagori capaian baik

b. Indikator Kinerja Program Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dengan rumus :

$\frac{\text{Pajak Daerah Tahun n}}{PA\ \ n} x 100\%$

$\frac{\text{Rp } 52.335.361.284,27}{\text{Rp } 223.800.013.868,92} x\ 100\% = 23,38\%$

Indikator Kinerja Program Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2024 BKD Kabupaten Pacitan menargetkan 11,13% dan realisasi yang diperoleh adalah 23,38% dengan capaian sebesar 210,06% atau katagori capaian baik.

Langkah-langkah kongkrit yang dilakukan seperti peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, peningkatan sarana dan fasilitas pendukung dalam pengelolaan pajak daerah, mengintensifkan pengawasan dan pemeriksaan melakukan penagihan, koordinasi dengan instansi terkait dan melakukan pendataan ulang/pemeliharaan basis data serta penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat terutama masyarakat pedesaan perlu terus dilakukan. Untuk mewujudkan tujuan/sasaran, maka ditempuh melalui :

- ✓ Meningkatnya Ketetapan Pajak Daerah
- ✓ Meningkatnya Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah

3. Tujuan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah

Dengan rumus :

Indikator Kinerja Opini BPK : Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah kabupaten Pacitan Tahun 2023

Indikator Kinerja Opini BPK pada Tahun 2024 Badan keuangan Daerah Kabupaten Pacitan menargetkan memperoleh WTP dan realisasi yang diperoleh tercapai 100% dengan capaian sebesar 100% atau kategori capaian sangat baik dalam capaian kinerja pada sasaran tersebut di tahun 2024 apabila dibandingkan dengan Tahun 2023, yang hasilnya sama yaitu 100%. Untuk realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2024 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis tercapai yaitu memperoleh WTP. Peningkatan capaian kinerja Tahun 2024, menandakan bahwa kinerja Badan keuangan Daerah Kabupaten Pacitan berhasil mempertahankan opini WTP sehingga Tujuan dapat tercapai.Berbagai upaya yang dilakukan agar Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah

- ✓ Mensosialisasikan berbagai Regulasi terkait dengan Pengelolaan Keuangan Dearah;
- ✓ Menyelenggarakan perencanaan dan pengendalian Anggaran yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- ✓ Mengaplikasikan software pengelolaan keuangan yang terintegrasi disemua SKPD;
- ✓ Melaksanakan sosialisasi tata cara Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- ✓ Meningkatkan SDM Pengelolaan Keuangan khususnya Petugas Akuntansi mengenai ilmu akuntansi yang berdasar Standar Akuntansi Pemerintahan;
- ✓ Meningkatkan koordinasi diantara Pengelola Keuangan dan Aset di OPD, untuk dapat menyajikan Laporan Keuangan yang akuntabel.

4. Sasaran Meningkatnya pengelolaan keuangan Daerah

a. Indikator kinerja sasaran Persentase Penetapan Perda dan Perbup APBD tepat waktu.

Dengan Rumus :

Jumlah penetapan Perda dan Perbup APBD tepat waktu X100

Jumlah Perda dan Perbup APBD yang ditetapkan tahun bersangkutan

Rp 7 x 100%

Rp 7 = 100%

Indikator kinerja sasaran Persentase Penetapan Perda dan Perbup APBD tepat waktu pada tahun 2024 BKD Kabupaten Pacitan menargetkan 100% dan realisasi yang diperoleh adalah 100% dengan capaian sebesar 100%.

b. Indikator Kinerja Sasaran Persentase Penetapan Perda dan Perbup Pertanggung Jawaban APBD tepat waktu

Dengan Rumus :

Jumlah penetapan Perda dan Perbup Pertanggungjawaban APBD tepat waktu tahun n X100

Jumlah Perda dan Perbup Pertanggungjawaban APBD tepat waktu yang ditetapkan tahun bersangkutan

Rp 2 x 100%

Rp 2 = 100%

Indikator Kinerja Sasaran Persentase Penetapan Perda dan Perbup Pertanggung Jawaban APBD tepat waktu pada tahun 2024 BKD Kabupaten Pacitan menargetkan 100% dan realisasi yang diperoleh adalah 100% dengan capaian sebesar 100% .

c. Indikator Kinerja Jumlah Perda dan Perbup tentang APBD yang ditetapkan dalam satu tahun.

Dengan Rumus :

Indikator Kinerja Jumlah Perda dan Perbup tentang APBD yang ditetapkan dalam satu tahun

Indikator Kinerja Jumlah Perda dan Perbup tentang APBD yang ditetapkan dalam satu tahun pada tahun 2024 BKD Kabupaten Pacitan menargetkan 7 dan realisasi yang diperoleh adalah 7 dengan capaian sebesar 100%.

d. Indikator Kinerja Jumlah Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban APBD yang ditetapkan dalam satu tahun

Dengan Rumus :

Indikator Kinerja Jumlah Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban APBD yang ditetapkan dalam satu tahun

$\frac{\text{Rp} \quad 2}{} x\ 100\%$

Rp 2 = 100%

Indikator Kinerja Jumlah Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban APBD yang ditetapkan dalam satu tahun yang ditetapkan dalam satu tahun pada tahun 2024 BKD Kabupaten Pacitan menargetkan 2 dan realisasi yang diperoleh adalah 2 dengan capaian sebesar 100%.

Berbagai upaya yang dilakukan agar meningkatnya pengelolaan keuangan daerah

- ✓ Mensosialisasikan berbagai Regulasi terkait dengan Pengelolaan Keuangan Dearah;
- ✓ Menyelenggarakan perencanaan dan pengendalian Anggaran yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- ✓ Meningkatkan SDM Pengelolaan Keuangan khususnya Petugas Akuntansi mengenai ilmu akuntansi yang berdasar Standar Akuntansi Pemerintahan;
- ✓ Meningkatkan koordinasi diantara Pengelola Keuangan di OPD, untuk dapat menyajikan Laporan Keuangan yang akuntabel.

5. Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah

a. Prosentase tertib pelaporan barang milik daerah

Dengan Rumus :

Jumlah OPD tertib pelaporan barang milik daerah/Jumlah OPD yang ada

$\frac{Rp \quad 40}{Rp \quad 40} x\ 100\%$

= 100%

Indikator Kinerja sasaran Prosentase tertib pelaporan barang milik daerah pada tahun 2024 BKD Kabupaten Pacitan menargetkan 100% dan realisasi yang diperoleh adalah 100% dengan capaian sebesar 100% .

b. Indikator Kinerja Program Persentase barang/aset daerah yang teregistrasi

Rumus : Jumlah OPD barang/aset daerahnya yang teregistrasi dibandingkan Jumlah OPD yang ada

$\frac{Rp \quad 40}{Rp \quad 40} x\ 100\%$

= 100%

Indikator Kinerja Program Persentase barang/aset daerah yang teregistrasi pada tahun 2024BKD Kabupaten Pacitan menargetkan 100% dan realisasi yang diperoleh adalah 100% dengan capaian sebesar 100% . Berbagai upaya yang dilakukan agar terwujudnya pengelolaan aset daerah yang akuntabel:

- ✓ Mensosialisasikan berbagai regulasi terkait dengan pengelolaan asset daerah;
- ✓ Mengaplikasikan software pengelolaan aset daerah yang terintegrasi disemua Organisasi Perangkat Daerah;
- ✓ Melaksanakan sosialisasi tata cara Pengelolaan Barang Daerah
- ✓ Meningkatkan SDM Pengelolaan Aset Daerah khususnya Petugas Pengurus Barang;
- ✓ Rekonsiliasi, verifikasi dan penilaian serta evaluasi aset daerah

6. Sasaran terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal.

Indikator Sasaran Hasil Nilai IKM Perangkat Daerah pada tahun 2024 BKD Kabupaten Pacitan menargetkan 83,74 dan realisasi yang diperoleh adalah 83,75 dengan capaian sebesar 100,01% atau katagori capaian baik, Hal tersebut menggambarkan bahwa masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan engan adanya mutu pelayanan dan kinerja pelayanan yang baik.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Tabel 2.3
Perbandingan realisasi kenerja Tahun ini dengan tahun lalu

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi			
			2021	2022	2023	2024
Meningkatkan kemandirian fiscal melalui peningkatan PAD	**Prosentase Pertumbuhan PAD**	**6,42**	**25,66**	**(0,21)**	**29,08**	**4,92**
Meningkatnya Penerimaan Daerah	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan	12,48	12,49	10,06	12,48	12,71
	Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	11,13	16,80	25,30%	20,36	23,38
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah	**Opini BPK**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Persentase Penetapan Perda dan Perbup APBD tepat waktu	100	100	100	100	100
	Persentase Penetapan Perda dan Perbup Pertanggung Jawaban APBD tepat waktu	100	100	100	100	100
	Jumlah Perda dan Perbup tentang APBD yang ditetapkan dalam satu tahun	7	7	9	9	7
	Jumlah Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban APBD yang ditetapkan dalam satu tahun	2	2	2	2	2
Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase tertib pelaporan barang milik daerah	100	100	100	100	100
	Persentase barang/aset daerah yang teregistrasi	100	100	100	100	100

Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Hasil Nilai IKM Perangkat Daerah	83,74	-	80,32	83,74	83,75
	Nilai Sakip Perangkat Daerah	77	-		79,60	80

1. Tujuan Meningkatkan kemandirian fiskal melalui peningkatan PAD
   Indikator Kinerja Prosentase Pertumbuhan PAD

   a. Indikator Kinerja Prosentase Pertumbuhan PAD

   Dari hasil pengukuran untuk tujuan meningkatkan kemandirian fiskal melalui peningkatan PAD indicator kinerja prosentase pertumbuhan PAD target yang ditetapkan sebesar 6,42% tercapai sebesar 4,92% dengan tingkat capaian sebesar 76,27%, Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun sebelumnya ada tren naik turun terkait pertumbuhan PAD.

   Penjelasan terkait pertumbuhan PAD adalah sebagai berikut :

   a) Peningkatan PAD itu sendiri, baik dari pajak daerah, retribusi daerah maupun lain-lain PAD yang sah.
   b) Pendapatan Kapitasi Puskesmas yang semula masuk pada komponen Lain2 Pendapatan Daerah yang Sah sekarang menjadi komponen Pendapatan Asli Daerah pada rekening Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah karena Puskesmas melaksanakan pengelolaan keuangan secara BLUD sehingga pendapatan kapitasinya dicatatkan sebagai Pendapatan BLUD.
   c) Regulasi :

      - Peraturan Bupati Pacitan Nomor 108 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan

Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pacitan;

- Peraturan Bupati Pacitan Nomor 109 Tahun 2022 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pacitan;
- Peraturan Bupati Pacitan Nomor 123 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pacitan;
- Peraturan Bupati Pacitan Nomor 136 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pacitan;
- Peraturan Bupati Pacitan Nomor 171 Tahun 2022 Tentang Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pacitan.

2. Sasaran Meningkatnya Penerimaan Daerah

a. Indikator Kinerja Sasaran Rasio PAD terhadap Total Pendapatan pada tahun 2024 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan menargetkan 12,48% dan realisasi yang diperoleh adalah 12,71% dengan capaian sebesar 101,84 % atau katagori capaian baik, jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 12,28 % mengalami peningkatan, peningkatan tersebut dipengaruhi oleh Dana Transfer Pusat.

b. b.Indikator Kinerja Program Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan pada tahun 2024 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan menargetkan 11,13% dan realisasi yang diperoleh adalah 23,28% dengan capaian sebesar 209,16% atau katagori capaian baik, jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 sebesar 20,36% indikator kinerja rasio pajak daerah pada tahun 2024 mengalami Peningkatan.

3. Tujuan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah.

   Indikator Kinerja Opini BPK Pada tahun 2024 BKD Kabupaten Pacitan menargetkan WTP dan realisasi yang diperoleh adalah WTP dengan capaian sebesar 100% atau katagori capaian baik, jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 adalah WTP indikator kinerja opini BPK pada tahun 2024 mengalami sama dengan capaian kinerja tahun 2023.

   Komitmen Pemerintah Kabupaten Pacitan senantiasa berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.

4. Sasaran Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah.

   a. Indikator Kinerja Persentase Penetapan Perda dan Perbup APBD tepat waktu pada tahun 2024 BKD Kabupaten Pacitan menargetkan 100% dan realisasi yang diperoleh adalah 100% dengan capaian sebesar 100% atau katagori capaian baik, jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 adalah 100% indikator kinerja P ersentase Penetapan Perda dan Perbup APBD tepat waktu pada tahun 2024 mengalami sama dengan capaian kinerja tahun 2023.

   b. Indikator Kinerja Persentase Penetapan Perda dan Perbup APBD tepat waktu pada tahun 2024 BKD Kabupaten Pacitan menargetkan 100% dan realisasi yang diperoleh adalah 100% dengan capaian sebesar 100% atau katagori capaian baik, jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 adalah 100% indikator kinerja Persentase Penetapan Perda dan Perbup APBD tepat waktu pada tahun 2023 mengalami sama dengan capaian kinerja tahun 2024.

   c. Indikator Kinerja Program Jumlah Perda dan Perbup tentang APBD yang ditetapkan dalam satu tahun pada tahun 2024 BKD Kabupaten Pacitan menargetkan 7 dan realisasi yang diperoleh

adalah 7 dengan capaian sebesar 100% Jika dibandingkan dengan capaian Kinerja Tahun 2023 sebesar 9 pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 2 Perbup tentang APBD yang ditetapkan dalam satu tahun pada tahun 2024 BKD.

d. Indikator Kinerja Program Jumlah Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban APBD yang ditetapkan dalam satu tahun yang ditetapkan dalam satu tahun pada tahun 2024 BKD Kabupaten Pacitan menargetkan 2 dan realisasi yang diperoleh adalah 2 dengan capaian sebesar 100%.

5. Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah.

a. Indikator sasaran Prosentase tertib pelaporan barang milik daerah pada tahun 2024 BKD Kabupaten Pacitan menargetkan 100% dan realisasi yang diperoleh adalah 100% dengan capaian sebesar 100% atau katagori capaian baik, jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 adalah 100% Prosentase tertib pelaporan barang milik daerah pada tahun 2024 mengalami sama dengan capaian kinerja tahun 2023.

b. Indikator Program Persentase barang/aset daerah yang teregistrasi pada tahun 2024 BKD Kabupaten Pacitan menargetkan 100% dan realisasi yang diperoleh adalah 100% dengan capaian sebesar 100% atau katagori capaian baik, jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 adalah 100% Persentase barang/aset daerah yang teregistrasi pada tahun 2024 mengalami sama dengan capaian kinerja tahun 2023.

7. Sasaran terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal.

Indikator Sasaran Hasil Nilai IKM Perangkat Daerah pada tahun 2024 BKD Kabupaten Pacitan menargetkan 83,74 dan realisasi yang diperoleh adalah 83,75 dengan capaian sebesar 100,01% atau katagori capaian baik, jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 adalah 83,74 Hasil Nilai IKM Perangkat Daerah pada

tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023, Hal tersebut menggambarkan bahwa masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan enggan adanya mutu pelayanan dan kinerja pelayanan yang baik.

A. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 sampai dengan akhir periode Renstra

Tabel 2.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Target Jangka Menengah dengan Target RPJMD Akhir

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD/ RENSTRA	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN
Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah daerah yang optimal	Hasil Nilai IKM Perangkat Daerah	83,78	83,75	99,96
Meningkatkan kemandirian fiscal melalui peningkatan PAD	**Prosentase Pertumbuhan PAD**	**2,82**	**4,92**	**174,46**
Meningkatnya Penerimaan Daerah	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan	12,96	12,71	98,07
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah	**Opini BPK**	**WTP**	**WTP**	**WTP**
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Persentase Penetapan Perda dan Perbup APBD tepat waktu	100	100	100
	Persentase Penetapan Perda dan Perbup Pertanggung Jawaban APBD tepat waktu	100	100	100
Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase tertib pelaporan barang milik daerah	100	100	100

	Persentase barang/aset daerah yang teregistrasi	100	100	100

1. Target Hasil Nilai IKM Perangkat Daerah pada akhir tahun RENSTRA Badan Keuangan Daerah yaitu sebesar 83,78. Pada tahun 2024 mencapai sebesar 83,75% atau dengan tingkat kemajuan sebesar 99,96 % dari target di akhir Renstra.
2. Target Prosentase Pertumbuhan PAD yang telah ditetapkan pada akhir tahun RENSTRA Badan Keuangan Daerah yaitu sebesar 2,82%. Pada tahun 2024 mencapai sebesar 4,92% atau dengan tingkat kemajuan sebesar 174,46 % dari target di akhir Renstra.
3. Target Rasio PAD terhadap Total Pendapatan yang telah ditetapkan pada akhir tahun RENSTRA Badan Keuangan Daerah yaitu sebesar 12,96%. Pada tahun 2024 mencapai sebesar 12,71% atau dengan tingkat kemajuan sebesar 98,07 % dari target di akhir Renstra, selain dipengaruhi oleh Dana Tranfer juga dibutuhkan usaha dan kerja keras untuk mewujudkan target tersebut sampai pada akhir periode Renstra.
4. Target Opini BPK yang telah ditetapkan pada akhir tahun RENSTRA Badan Keuangan Daerah yaitu WTP. Pada tahun 2024 mencapai sebesar WTP atau dengan tingkat Capaian 100% dari target di akhir Renstra. Komitmen Pemerintah Kabupaten Pacitan senantiasa berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.
5. Target Persentase Penetapan Perda dan Perbup APBD tepat waktu yang telah ditetapkan pada akhir tahun RENSTRA Badan Keuangan Daerah yaitu sebesar 100%. Pada tahun 2024 mencapai sebesar 100% atau dengan tingkat kemajuan sebesar 100% dari target di akhir Renstra.

6. Target Persentase Penetapan Perda dan Perbup Pertanggung Jawaban APBD tepat waktu pada akhir tahun RENSTRA Badan Keuangan Daerah yaitu sebesar 100%. Pada tahun 2024 mencapai sebesar 100% atau dengan tingkat kemajuan sebesar 100% dari target di akhir Renstra.
7. Prosentase tertib pelaporan barang milik daerah pada akhir tahun RENSTRA Badan Keuangan Daerah yaitu sebesar 100%. Pada tahun 2024 mencapai sebesar 100% atau dengan tingkat kemajuan sebesar 100% dari target di akhir Renstra.
8. Persentase barang/aset daerah yang teregistrasi pada akhir tahun RENSTRA Badan Keuangan Daerah yaitu sebesar 100%. Pada tahun 2024 mencapai sebesar 100% atau dengan tingkat kemajuan sebesar 100% dari target di akhir Renstra.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standart Nasional

Salah satu komponen analisis capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja instansi adalah membandingkan capaian kinerja dengan standar nasional.

Tabel 2.5
Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan Standart Nasional

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Standart Nasional	Ket
Meningkatkan kemandirian fiscal melalui peningkatan PAD	Prosentase Pertumbuhan PAD	4,92	-	
Meningkatnya Penerimaan Daerah	*Rasio PAD terhadap Total Pendapatan*	*12,71*	-	
	Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	*23,38*	-	

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah	Opini BPK	WTP	WTP	
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	*Persentase Penetapan Perda dan Perbup APBD tepat waktu*	*100*	-	
	Persentase Penetapan Perda dan Perbup Pertanggung Jawaban APBD tepat waktu	*100*	-	
Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Prosentase tertib pelaporan barang milik daerah*	*100*	-	
	Persentase barang/aset daerah yang teregistrasi	*100*	-	
Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah daerah yang optimal	*Hasil Nilai IKM Perangkat Daerah*	*83,75*	*88,39*	

a. Indikator Kinerja Opini BPK pada tahun 2024 Kabupaten Pacitan menargetkan WTP dan realisasi yang diperoleh adalah WTP dengan capaian sebesar 100% atau katagori capaian baik, jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 adalah WTP indikator kinerja opini BPK pada tahun 2024 mengalami sama dengan capaian kinerja tahun 2023 kemudian apabila dibandaingkan dengan standart Provinsi/Nasional realisasinya sama yaitu memperoleh WTP (Wajar Tanpa Penegecualian).

b. Indikator Sasaran Hasil Nilai IKM Perangkat Daerah pada tahun 2024 BKD Kabupaten Pacitan menargetkan 83,74 dan realisasi yang diperoleh adalah 83,75 dengan capaian sebesar 100,01% atau katagori capaian baik, jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 adalah 80,74 Hasil Nilai IKM Perangkat Daerah pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023, Hal tersebut menggambarkan bahwa masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan dengan adanya mutu pelayanan dan kinerja pelayanan yang baik, kemudian apabila capaian kinerja Hasil Nilai IKM Perangkat Daerah dibandingkan dengan propinsi/Nasional capaian kinerja Hasil Nilai IKM Perangkat Daerah Lebih Rendah BKD Pacitan Lebih rendah sebesar 88,14.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/peningkatan dan Kegagalan/ penurunan Kinerja serta Solusi yang dilakukan

Tabel 2.6

Analisis Penyebab Keberhasilan/peningkatan dan Kegagalan/penurunan Kinerja serta Solusi yang dilakukan

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi Yang Dilakukan
Meningkatkan kemandirian fiscal melalui peningkatan PAD	Prosentase Pertumbuhan PAD		
Meningkatnya Penerimaan Daerah	*Rasio PAD terhadap Total Pendapatan*	*a. Sistem pembayaran pajak daerah masih konvensional* *b. Regulasi Perda* *c. terkait Retribusi*	*a. Pembayaran pajak daerah melalui pembayaran non tunai dan digital dengan sistem online dengan perluasan*

		Daerah masih produk lama belum diperbaharui sehingga mempengaruhi peningkatan pendapatan dari retribusi daerah	*kanal pembayaran dan kerjasama dengan bank RKUD. Sudah dimulai tahun 2022 dengan Pembayaran PBB Secara Online bekerjasama dengan Bank Jatim* *b. Penyempurnaan payung hukum retribusi daerah baik Perda maupun Perbup disesuaikan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Tahun 2022 dimulai dengan penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.*
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah	Opini BPK		
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	*Persentase Penetapan Perda dan Perbup APBD tepat waktu*	*Perubahan Regulasi dalam Penyusunan Laporan keuangan dengan waktu pelaksanaan terlalu singkat dan tidak ada cukup waktu untuk memahami implementasinya sehingga dalam*	*Sering melakukan Asistensi dan Rekonsiliasi secara rutin/inten dengan dirangkaikan pembinaan / Sosialisasi /Bintek Pengelola keuangan.*

		pelaksanaannya kurang maksimal	
	Persentase Penetapan Perda dan Perbup Pertanggung Jawaban APBD tepat waktu	*a. Kemampuan SDM Menyusun Laporan keuangan (Terkait Basic pendidikan bukan Akuntansi d. Perubahan Format Laporan Pertanggungjawaban* *b. Adanya Temuan Audit BPK yang harus segera dibahas/ditindaklanjuti dalam proses penyusunan perda pertanggungjawaban* *c. Adanya Hasil Evaluasi Gubernur harus segera dibahas/ditindaklanjuti dalam proses penyusunan perda pertanggungjawaban*	*a. Memanfaatkan SDM yang ada dengan tetap selalu mengingatkan serta ikut mengecek setiap transaksi yang terjadi di SKPD* *b. Berkoordinasi dengan Kominfo untuk melakukan pembenahan di Tahun 2024* *c. Bekerjasama dengan dengan Institusi Akademik (Sekolah Vokasi UNS Surakarta) untuk mnyusun Perubahan Regulasi yang akan digunakan untuk pedoman dalam menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Kebijakan Akuntansi pemerintah* *d. Koordinasi dengan Tim Narasumber Pengembang Aplikasi Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Pelaporan* *e. Koordinasi dengan OPD dan Inspektorat kabupaten selaku APIP dalam penyelesaian Tindak lanjut* *f. Koordinasi dengan Tim BPKAD Provisi*

			Jawa Timur Terkait Proses Evaluasi Gubernur atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Biro Hukum sekretariat Propinsi Jawa Timur Nomor Register untuk penetapan Perda
Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Prosentase tertib pelaporan barang milik daerah*	*a. Aset tetap (Kartu Inventaris Barang (KIB) A, Kartu Inventaris Barang (KIB) B, Kartu Inventaris Barang (KIB) C, Kartu Inventaris Barang (KIB) D, dan Kartu Inventaris Barang (KIB) E) yang tidak informatif* *b. Kode barang / register barang yang belum diisi sesuai dengan ketentuan* *c. Kapitalisasi dan penyusutan aset yang belum didukung dengan aplikasi* *d. Pelaporan barang milih daerah yang belum dilaporkan secara periodik* *e. Kepemilikan / pengamanan aset yang belum didukung dengan bukti yang kuat, yaitu sertifikat*	*a. Mengadakan monitoring dan evaluasi serta pendampingan dengan perangkat daerah untuk melengkapi informasi aset tetap di aplikasi, agar aset yang disajikan lebih valid.* *b. Menyesuaikan kodefikasi / register barang sesuai dengan nomenklatur dan kondisi aset perangkat daerah terbaru yang diimplementasikan ke dalam aplikasi sehingga perangkat daerah tinggal mencetak kodefikasi / register barang tanpa perlu menulis secara manual.* *c. Bekerjasama dengan pihak pengembang aplikasi untuk mengimplementasikan kapitalisasi dan*

		dan papan kepemilikan aset	*penyusutan aset perangkat daerah kedalam aplikasi, sehingga data aset lebih akuntabel dan handal serta pelaporan barang milik daerah selesai tepat waktu.* *d. Dalam rangka pelaporan yang sesuai dengan ketentuan dan selesai tepat waktu, salah satu hal yang dilakukan adalah mengadakan rekonsiliasi secara periodik (setiap tiga bulan) dengan perangkat daerah. Sehingga pelaporan / pertanggungjawaban barang selesai tepat waktu* *e. Pengajuan permohonan tertulis kepada Dinas Permukiman dan Pertanahan untuk mensertifikatkan tanah pemda di Kartu Inventaris Barang A yang belum bersertifikat dan mengalokasikan anggaran belanja papan nama tanah, agar tanah pemda jelas indentitasnya dan kepemilikannya*

6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran efektivitas mengukur hasil akhir dari suatu pelayanan dikaitkan dengan outputnya (cost of outcome). Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin kontribusi output yang dihasilkan berperan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Suatu organisasi dapat dikatakan tumbuh dan berkembang apabila dalam organisasi tersebut menunjukkan tanda-tanda, antara lain :

a. Organisasi makin mampu meningkatkan produktivitas;

b. Kinerja organisasi makin efisien.

Untuk mencapai sasaran organsasi secara optimal perlu dilakukan upaya yang sungguh-sungguh serta terus menerus dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dan dana yang tersedia dalam bentuk perencanaan program kegiatan yang baik. Rincian analisis efisiensi per sasaran dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.7
Analisis Efisiensi Per Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian	EFISIENSI
1	**Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal**				**23.272.777.563,00**	**22.228.831.282,00**	**83,74**	**83,75**	**1,0001194**	**4,50%**
		Nilai IKM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah	23.272.777.563,00	22.228.831.282,00	83,74	83,75	1,0001194	4,50%
2	**Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah**				**296.362.492.363,00**	**292.087.608.080,00**	**100,00**	**100,00**	**1,0000000**	1,44%
		Prosentase penetapan perda dan perbup APBD tepat waktu	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Perda dan Perbup tentang APBD yang ditetapkan dalam satu tahun	295.390.492.363,00	291.124.798.211,00	100,00	100,00	**1,0000000**	1,44%
		Prosentase penetapan perda dan perbup pertanggungjawaban APBD tepat waktu		Jumlah Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban APBD yang ditetapkan dalam satu tahun	972.000.000,00	962.809.869,00	100,00	100,00	**1,0000000**	0,95%
3	**Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah**				**1.072.000.000,00**	**1.051.007.611,00**	**100,00**	**100,00**	**1,0000000**	**1,96%**
		Prosentase tertib pelaporan BMD	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang/aset daerah yang teregistrasi	1.072.000.000,00	1.051.007.611,00	100,00	100,00	**1,0000000**	1,96%
4	**Meningkatnya Penerimaan Daerah**				**3.112.338.500,00**	**3.106.167.637,00**	**12,48**	**12,71**	**1,0184295**	**2,04%**
		Rasio PAD terhadap total pendapatan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3.112.338.500,00	3.106.167.637,00	12,48	12,71	**1,0184295**	2,04%

Tingkat efisiensi sasaran

a. Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal dengan indicator kinerja Hasil Nilai IKM Perangkat Daerah tercapai sebesar 83,75% dengan tingkat efisiensi 4,50%.
b. Meningkatnya Penerimaan Daerah dengan indikator kinerja Rasio PAD terhadap Total Pendapatan tercapai sebesar 12,71% tingkat efisiensi 2,04%.
c. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dengan indikator kinerja Persentase Penetapan Perda dan Perbup APBD tepat waktu dan Persentase Penetapan Perda dan Perbup Pertanggung Jawaban APBD tepat waktu, Masing-masing tercapai 100% tingkat efisiensi 1,44% .
d. Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan indikator kinerja Prosentase tertib pelaporan barang milik daerah tercapai sebesar 100% dengan tingkat efisensi sebesar 1,96 %.

7. Analisis Program/ kegiatan yang Menunjang keberhasilan/ kegagalan Pencapaian Kinerja

Sasaran strategis

a. Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal
b. Meningkatnya Penerimaan Daerah
c. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah
d. Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 4 (Empat) program dan 14 kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.8

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	**502.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**Nilai**	**77.00**	**23.272.777.563,00**	**80**	**22.228.831.282,00**	**103,9**	**95,51**	**Badan Keuangan Daerah**
	502.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**Dok**	**23**	**180.770.000,00**	**27**	**179.895.635,00**	**117,39**	**99,52**	
	502.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	55.945.000,00	5	55.817.270,00	250	99,77	
	502.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	5.000.000,00	1	4.942.800,00	100	98,86	
	502.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	9.980.000,00	3	9.861.400,00	300	98,81	

	502.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	10.320.000,00	1	10.129.300,00	100	98,15	
	502.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	15.005.000,00	3	14.779.365,00	300	98,50	
	502.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	14	84.520.000,00	14	84.365.500,00	100	99,82	
	502.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan keuangan Perangkat Daerah**	**Dok**	**59**	**7.215.292.398,00**	**59**	**6.654.928.713,00**	**100**	**92,23**	
	502.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	12	6.625.202.997,00	10	6.130.046.213,00	83,33	92,53	
	502.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	378.833.401,00	1	313.892.500,00	100	82,86	
	502.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	211.256.000,00	1	210.990.000,00	100	99,87	
	502.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian**	**%**	**100**	**844.490.000,00**	**100**	**842.805.900,00**	**100**	**99,80**	

	502.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	220	31.150.000,00	110	31.100.000,00	50	99,84	
	502.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	110	277.700.000,00	110	277.566.000,00	100	99,95	
	502.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	110	535.640.000,00	114	534.139.900,00	103,64	99,72	
	502.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase operasional dasar perngkat daerah yang terpenuhi**	**%**	**100**	**432.712.833,00**	**100**	**430.681.791,00**	**100**	**99,53**	
	502.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	20.770.500,00	3	20.647.500,00	100	99,41	
	502.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	35.008.333,00	8	33.581.300,00	80	95,92	
	502.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	17.439.000,00	2	17.125.700,00	100	98,20	
	502.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	128.880.000,00	2	128.867.500,00	100	99,99	
	502.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	11.463.000,00	2	11.345.735,00	100	98,98	

	502.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	219.152.000,00	2	219.114.056,00	100	99,98	
	502.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**%**	**100**	**3.118.532.365,00**	**200**	**3.027.848.180,00**	**200**	**97,09**	
	502.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	189.006.610,00	6	188.068.180,00	100	99,50	
	502.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	12.00	2.929.525.755,00	12	2.839.780.000,00	100	96,94	
	502.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah yang dibutuhkan**	**%**	**100**	**11.146.253.967,00**	**100**	**10.759.854.125,00**	**100**	**96,53**	
	502.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	10.760.651.567,00	12	10.395.257.604,00	100	96,60	

	502.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	11.336.000,00	12	8.716.000,00	100	76,89	
	502.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	374.266.400,00	12	355.880.521,00	100	95,09	
	502.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**%**	**80**	**334.726.000,00**	**80**	**332.816.938,00**	**100**	**99,43**	
	502.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	56	201.396.000,00	56	201.045.760,00	100	99,83	
	502.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	99.680.000,00	1	99.500.178,00	100	99,82	
	502.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	33.650.000,00	8	32.271.000,00	100	95,90	

2	**502.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Jumlah Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban APBD yang ditetapkan dalam satu tahun**	**Perda**	**2.00**	**293.538.948.363,00**	**3**	**117.581.618.080,00**	**150**	**40,06**	**Badan Keuangan Daerah**
	.		**Jumlah Perda dan Perbup tentang APBD yang ditetapkan dalam satu tahun**	**Perda**	**7**		**7**		**100**		**Badan Keuangan Daerah**
	502.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Prosentase OPD yang menyusun Rencana Anggaran tepat waktu**	**%**	**100**	**2.062.918.000,00**	**100**	**2.039.877.745,00**	**100**	**98,88**	
	502.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	908.862.855,00	2	900.586.900,00	100	99,09	
	502.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	70.728.005,00	2	70.246.750,00	100	99,32	
	502.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	43	11.788.000,00	40	11.674.150,00	93,02	99,03	
	502.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	43	9.991.500,00	84	9.981.000,00	195,35	99,89	
	502.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	43	8.892.000,00	40	8.845.100,00	93,02	99,47	
	502.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	43	5.025.500,00	84	4.792.000,00	195,35	95,35	

	502.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	497.177.690,00	2	493.326.606,00	100	99,23	
	502.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	529.452.450,00	7	525.425.239,00	350	99,24	
	502.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen	1	21.000.000,00	1	15.000.000,00	100	71,43	
	502.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Prosentase rata rata penyerapan anggaran OPD**	**%**	**100**	**546.080.000,00**	**82,83**	**538.258.223,00**	**82,83**	**98,57**	
	502.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	2	129.955.000,00	2	125.335.750,00	100	96,45	

	502.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	12	36.780.000,00	12	36.508.500,00	100	99,26	
	502.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	2	213.877.500,00	2	212.737.550,00	100	99,47	
	502.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	2	13.070.000,00	2	12.555.850,00	100	96,07	
	502.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	86	152.397.500,00	86	151.120.573,00	100	99,16	

	502.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Prosentase OPD yang laporan keuangan daerahnya sesuai dengan SAP**	**%**	**100**	**425.920.000,00**	**100**	**424.551.646,00**	**100**	**99,68**	
	502.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	5	146.860.000,00	5	146.334.850,00	100	99,64	
	502.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	2	178.400.000,00	2	177.835.296,00	100	99,68	
	502.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	5	100.660.000,00	5	100.381.500,00	100	99,72	
	502.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**prosentase terpenuhinya belanja transfer dan belanja tidak terduga**	**%**	**100.00**	**292.927.574.363,00**	**97,08**	**114.178.930.466,00**	**97,08**	**38,98**	
	502.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	1	275.498.766.300,00	1	275.192.893.142,00	100	99,89	

	502.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	1	9.915.066.238,00	1	6.387.227.925,00	100	64,42	
	502.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	1	7.513.741.825,00	1	7.104.799.399,00	100	94,56	
	502.02.2.05	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Prosentase kelancaran penggunaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah**	**%**	**100**	**400.000.000,00**	**100**	**400.000.000,00**	**100**	**100,00**	
	502.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	100	100,00	
3	**502.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase barang/aset daerah yang teregistrasi**	**%**	**100**	**1.072.000.000,00**	**100**	**1.051.007.611,00**	**100**	**98,04**	**Badan Keuangan Daerah**
	502.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase OPD dengan data aset yang valid**	**%**	**100**	**1.072.000.000,00**	**100**	**1.051.007.611,00**	**100**	**98,04**	
	502.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	2	45.638.505,00	2	40.313.850,00	100	88,33	
	502.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	9	72.033.040,00	9	51.505.200,00	100	71,50	

	502.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	43	47.457.140,00	40	44.395.150,00	93,02	93,55	
	502.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	43	220.817.590,00	40	224.298.461,00	93,02	101,58	
	502.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	15	140.069.215,00	15	137.813.900,00	100	98,39	
	502.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	15	478.084.510,00	15	484.936.050,00	100	101,43	
	502.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	43	67.900.000,00	40	67.745.000,00	93,02	99,77	
4	**502.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD**	**%**	**11.13**	**3.012.338.500,00**	**23,04**	**3.106.167.637,00**	**207,01**	**103,11**	**Badan Keuangan Daerah**
	502.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Jumlah pendapatan pajak daerah**	**Milyar**	**37.40**	**3.112.338.500,00**	**48,32**	**3.106.167.637,00**	**129,2**	**99,80**	

	502.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	12	1.616.580.000,00	12	1.615.410.700,00	100	99,93	
	502.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	1	150.000.000,00	5	149.577.843,00	500	99,72	
	502.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	255	221.622.000,00	258	221.410.100,00	101,18	99,90	
	502.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	3	404.284.000,00	3	403.416.400,00	100	99,79	
	502.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	646285	114.373.000,00	646.291,00	113.367.900,00	100	99,12	
	502.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	646285	338.559.500,00	646.291,00	336.951.900,00	100	99,53	
	502.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	1	113.260.000,00	1	112.982.594,00	100	99,76	
	502.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	1	3.660.000,00	1	3.660.000,00	100	100,00	
	502.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	11	35.000.000,00	11	34.999.000,00	100	100,00	

	502.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	1	85.000.000,00	1	84.737.400,00	100	99,69	
	502.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	1	30.000.000,00	1	29.653.800,00	100	98,85	

Sasaran Strategis

a. Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal dengan indikator kinerja Hasil Nilai IKM Perangkat Daerah Prosentase Capaian kinerja sebesar 100,01% yang didukung oleh 1 (satu) program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota masing-masing program didukung oleh 7 (Tujuh) kegiatan, sehingga total ada 7 kegiatan untuk mencapai indikator sasaran Tersebut.
b. Meningkatnya Penerimaan Daerah dengan indikator kinerja Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Prosentase capaian kinerja sebesar 101,84 % yang didukung oleh 1 (satu) Proram Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan 1 Kegiatan.
c. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dengan Indikator Kinerja Persentase Penetapan Perda dan Perbup APBD tepat waktu dan Persentase Penetapan Perda dan Perbup Pertanggung Jawaban APBD tepat waktu Prosentase Capaian Kinerja masing masing sebesar 100% didukung 1 Program dan 5 Kegiatan.
d. Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah deengan Indikator Kinerja Prosentase tertib pelaporan barang milik daerah Prosentase Capaian sebesar 100% didukung 1 Program dan 1 Kegiatan.

8. Analisis Capaian Kinerja Kepala Badan Keuangan Daerah di Peroleh dari Capaian Kinerja Bawahannya.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	% CAPAIAN	Ket
Meningkatnya Penerimaan Daerah	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan	12,48	12,71	101,84	Kepala Badan Keuangan Daerah
	Rasio Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	11,13	23,38	210,06	Kepala Bidang Pendapatan dan Pajak Daerah

Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Persentase Penetapan Perda dan Perbup APBD tepat waktu	100	100	100	Kepala Badan Keuangan Daerah
	Persentase Penetapan Perda dan Perbup Pertanggung Jawaban APBD tepat waktu	100	100	100	Kepala Badan Keuangan Daerah
	Jumlah Perda dan Perbup tentang APBD yang ditetapkan dalam satu tahun	7	7	100	Kepala Bidang Anggaran
	Jumlah Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban APBD yang ditetapkan dalam satu tahun	2	2	100	Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan
Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase tertib pelaporan barang milik daerah	100	100	100	Kepala Badan Keuangan Daerah
	Persentase barang/aset daerah yang teregistrasi	100	100	100	Kepala Bidang Pengeloalaan Barang Milik Daerah
Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Hasil Nilai IKM Perangkat Daerah	83,74	83,75	100,01	Kepala Badan Keuangan Daerah
Meningkatnya Nilai Sakip Perangkat Daerah	Hasil Nilai Sakip Perangkat Daerah	77	80	103,89	Sekretaris Badan Keuangan Daerah

Keberhasilan dari kinerja unit kerja yang didukung oleh kinerja individu itu sangat tergantung dari leadership, pentingnya kepemimpinan dalam pengelolaan kinerja menuntut atasan untuk mampu memimpin dialog kinerja bersama bawahan, menyampaikan ekspektasi kinerja dan strategi pencapaian kinerja, dan selama pelaksanaan kinerja diharapkan dapat memberikan umpan balik kepada pegawai yang dipimpinnya .

9. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia

Pencapaian Sasaran tidak terlepas dari adanya dukungan Sumber Daya. Faktor sumberdaya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Begitu pula kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang ada didalamnya. Badan Keuangan Daerah Kab.Pacitan didukung oleh 93 orang ASN 43 Orang NON ASN 50 Orang.

Data sumber daya manusia aparatur dilihat dari tingkat pendidikan baik yang ASN dan NON ASN sebagaimana tertuang dalam Tabel berikut :

Uraian	*Laki-Laki*	*Perempuan*	*Total*
S-II	*6*	*5*	*11*
S-I/D-IV	*23*	*24*	*47*
D3	*6*	*3*	*9*
SMA	*15*	*8*	*23*
SMP	*3*		*3*
<SMP			

Dari gambaran tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kondisi sumber daya manusia pada Badan Keuangan Daerah Kab.Pacitan di dominasi oleh kualifikasi pendidikan D IV dan Strata I berjumlah 47 orang atau 50,54%, kemudian diikuti oleh pendidikan SMA berjumlah 23 orang atau 24,73%, pendidikan S2 berjumlah 11 orang atau 11,83%, dan DIII berjumlah 9 orang atau 9,68%. Serta SMP berjumlah 3 Orang atau 3,23% Untuk mengatasi keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki, Badan Keuangan Daerah Kab.Pacitan melakukan optimalisasi personil dengan menambah beban tugas terhadap personil yang ada dan mengusulkan tambahan pegawai baik CPNS maupun P3K.

10. Realisasi Anggaran

Pada P-APBD tahun anggaran 2024, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 323.819.608.426,00 realisasi Rp. 318.473.614.610,00 dengan capaian 98,35%. Besaran alokasi dan realisasi anggaran Badan Keuangan Daerah pada tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel.2.9

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	**502.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**23.272.777.563,00**	**22.228.831.282,00**	**95,51**
	502.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**180.770.000,00**	**179.895.635,00**	**99,52**
	502.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55.945.000,00	55.817.270,00	99,77
	502.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000,00	4.942.800,00	98,86
	502.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.980.000,00	9.861.400,00	98,81
	502.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10.320.000,00	10.129.300,00	98,15
	502.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	15.005.000,00	14.779.365,00	98,50

	502.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	84.520.000,00	84.365.500,00	99,82
	502.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan keuangan Perangkat Daerah**	**7.215.292.398,00**	**6.654.928.713,00**	**92,23**
	502.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6.625.202.997,00	6.130.046.213,00	92,53
	502.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	378.833.401,00	313.892.500,00	82,86
	502.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	211.256.000,00	210.990.000,00	99,87
	502.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian**	**844.490.000,00**	**842.805.900,00**	**99,80**
	502.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	31.150.000,00	31.100.000,00	99,84
	502.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	277.700.000,00	277.566.000,00	99,95
	502.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	535.640.000,00	534.139.900,00	99,72
	502.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase operasional dasar perngkat daerah yang terpenuhi**	**432.712.833,00**	**430.681.791,00**	**99,53**
	502.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20.770.500,00	20.647.500,00	99,41

	502.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35.008.333,00	33.581.300,00	95,92
	502.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17.439.000,00	17.125.700,00	98,20
	502.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	128.880.000,00	128.867.500,00	99,99
	502.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11.463.000,00	11.345.735,00	98,98
	502.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	219.152.000,00	219.114.056,00	99,98
	502.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**3.118.532.365,00**	**3.027.848.180,00**	**97,09**
	502.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	189.006.610,00	188.068.180,00	99,50
	502.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2.929.525.755,00	2.839.780.000,00	96,94
	502.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah yang dibutuhkan**	**11.146.253.967,00**	**10.759.854.125,00**	**96,53**
	502.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10.760.651.567,00	10.395.257.604,00	96,60
	502.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11.336.000,00	8.716.000,00	76,89
	502.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	374.266.400,00	355.880.521,00	95,09

	502.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**334.726.000,00**	**332.816.938,00**	**99,43**
	502.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	201.396.000,00	201.045.760,00	99,83
	502.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	99.680.000,00	99.500.178,00	99,82
	502.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	33.650.000,00	32.271.000,00	95,90
2	**502.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Jumlah Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban APBD yang ditetapkan dalam satu tahun**	**296.362.492.363,00**	**292.087.608.080,00**	**98,56**
	.		**Jumlah Perda dan Perbup tentang APBD yang ditetapkan dalam satu tahun**			
	502.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Prosentase OPD yang menyusun Rencana Anggaran tepat waktu**	**2.062.918.000,00**	**2.039.877.745,00**	**98,88**
	502.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	908.862.855,00	900.586.900,00	99,09
	502.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	70.728.005,00	70.246.750,00	99,32
	502.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	11.788.000,00	11.674.150,00	99,03
	502.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	9.991.500,00	9.981.000,00	99,89
	502.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	8.892.000,00	8.845.100,00	99,47

	502.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	5.025.500,00	4.792.000,00	95,35
	502.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	497.177.690,00	493.326.606,00	99,23
	502.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	529.452.450,00	525.425.239,00	99,24
	502.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	21.000.000,00	15.000.000,00	71,43
	502.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Prosentase rata rata penyerapan anggaran OPD**	**546.080.000,00**	**538.258.223,00**	**98,57**
	502.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	129.955.000,00	125.335.750,00	96,45
	502.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	36.780.000,00	36.508.500,00	99,26
	502.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	213.877.500,00	212.737.550,00	99,47
	502.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	13.070.000,00	12.555.850,00	96,07
	502.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	152.397.500,00	151.120.573,00	99,16

	502.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Prosentase OPD yang laporan keuangan daerahnya sesuai dengan SAP**	**425.920.000,00**	**424.551.646,00**	**99,68**
	502.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	146.860.000,00	146.334.850,00	99,64
	502.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	178.400.000,00	177.835.296,00	99,68
	502.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	100.660.000,00	100.381.500,00	99,72
	502.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**prosentase terpenuhinya belanja transfer dan belanja tidak terduga**	**292.927.574.363,00**	**288.684.920.466,00**	**98,55**
	502.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	275.498.766.300,00	275.192.893.142,00	99,89
	502.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	9.915.066.238,00	6.387.227.925,00	64,42
	502.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	7.513.741.825,00	7.104.799.399,00	94,56
	502.02.2.05	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Prosentase kelancaran penggunaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah**	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	**100,00**
	502.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00

3	**502.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase barang/aset daerah yang teregistrasi**	**1.072.000.000,00**	**1.051.007.611,00**	**98,04**
	502.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase OPD dengan data aset yang valid**	**1.072.000.000,00**	**1.051.007.611,00**	**98,04**
	502.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	45.638.505,00	40.313.850,00	88,33
	502.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	72.033.040,00	51.505.200,00	71,50
	502.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	47.457.140,00	44.395.150,00	93,55
	502.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	220.817.590,00	224.298.461,00	101,58
	502.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	140.069.215,00	137.813.900,00	98,39
	502.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	478.084.510,00	484.936.050,00	101,43
	502.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	67.900.000,00	67.745.000,00	99,77
4	**502.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD**	**3.112.338.500,00**	**3.106.167.637,00**	**99,80**
	502.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Jumlah pendapatan pajak daerah**	**3.112.338.500,00**	**3.106.167.637,00**	**99,80**

	502.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1.616.580.000,00	1.615.410.700,00	99,93
	502.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	150.000.000,00	149.577.843,00	99,72
	502.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	221.622.000,00	221.410.100,00	99,90
	502.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	404.284.000,00	403.416.400,00	99,79
	502.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	114.373.000,00	113.367.900,00	99,12
	502.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	338.559.500,00	336.951.900,00	99,53
	502.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	113.260.000,00	112.982.594,00	99,76
	502.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	3.660.000,00	3.660.000,00	100,00
	502.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	35.000.000,00	34.999.000,00	100,00
	502.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	85.000.000,00	84.737.400,00	99,69

	502.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	30.000.000,00	29.653.800,00	98,85
	BADAN KEUANGAN DAERAH			**323.819.608.426,00**	**318.473.614.610,00**	**98,35**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Beberapa hal yang dianggap penting dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawab Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan antara lain :

a. Mengelola dan menggali sumber pendapatan asli daerah secara profesional dan maksimal dengan memberdayakan masyarakat melalui penyuluhan wajib pajak daerah serta mengadakan pertukaran informasi antar daerah untuk mengkaji sumber Pendapatan Asli Daerah yang dimungkinkan dapat dilaksanakan di Kabupaten Pacitan;
b. Melaksanakan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi terhadap APBD;
c. Melaksanakan pengaturan dan pengoordinasiaan, penelitian dan pengesahan DPA OPD dan DPPA OPD;
d. Menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) berdsarkan surat permintaan membayar (SPM) dari Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah;

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Terdapat beberapa isu – isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah antara lain:

1. Isu Internal

    1. Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.
    2. Koordinasi yang solid dengan instansi pengelola retribusi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Pacitan.
    3. Peningkatan pendapatan asli daerah.

4. Peningkatan mutu pelayanan administrasi pengelolaan pajak daerah yang tertib dan akurat, baik itu SDM maupun sarana dan prasarana.
5. Regulasi peraturan daerah tentang pengelolaan pajak daerah demi peningkatan pendapatan pajak daerah.
6. Peningkatan mobilisasi pelayanan pajak daerah dalam rangka menjangkau wajib pajak.
7. Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari seberapa banyak asset/kekayaan yang dihasilkan/ dicapai oleh daerah itu dalam tiap-tiap tahun anggaran, oleh sebab itusecara professional, sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.
8. Penyusunan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tepat waktu.
9. Mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah.
10. Penatausahaan aset daerah secara tertib

2. Isu Eksternal
   a. Seiring kemajuan zaman, pemerintah daerah dituntut untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara mengikuti perkembangan teknologi agar para aparatur berdaya saing tinggi dan memiliki kemampuan yang sejajar dengan daerah lain agar daerah dapat berkembang dengan pesat.
   b. Peraturan Perundang-undangan Gerakan reformasi nasional telah mendorong dilaksanakannyaberbagai perubahan-perubahan penting dalam praktek penyelenggaraan good governance dengan menerapkan prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Badan

keuangan Daerah Kabupaten Pacitan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh BKD Kabupaten Pacitan , terkait program prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan. Berikut ini disajikan hasil review terhadap Rancangan Awal Renja Perubahan BKD Kabupaten Pacitan Tahun 2025, yang disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel. 2.10. Reviuw terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
						Badan Keuangan Daerah							321.671.553.458,00	311.841.523.458,00	312.802.695.013,00							338.111.000.000,00		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							321.671.553.458,00	311.841.523.458,00	312.802.695.013,00							338.111.000.000,00		
	5	02				KEUANGAN							321.671.553.458,00	311.841.523.458,00	312.802.695.013,00							338.111.000.000,00		
1	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah				>B Nilai	>B Nilai	22.713.616.466,00	20.973.916.466,00	19.866.854.582,00							25.849.000.000,00		
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-			23 Dok 23 Dokumen	23 Dokumen	155.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	SKPD		200.000.000,00		BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00	90.000.000,00	63.363.600,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			55.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	9.625.200,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			15.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	9.497.200,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			15.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

	5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	9.996.700,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			15.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			15.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi				14 Laporan	14 Laporan	65.000.000,00	65.000.000,00	99.673.700,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP			85.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

							Kinerja SKPD												2045)				
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan keuangan Perangkat Daerah	-			59 Dok 59 Dokumen	59 Dokumen	8.186.600.591,00	8.154.800.591,00	8.154.800.591,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	SKPD		7.140.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				49 Orang/bulan	49 Orang/bulan	7.824.271.651,00	7.737.589.681,00	6.884.796.403,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			6.500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	219.516.940,00	274.398.910,00	274.398.910,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan			450.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

																			RPJP 2045)				
	5	0 2	0 1	2. 02	00 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	142.812.000,00	142.812.000,00	175.377.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			190.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	0 2	0 1	2. 05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	-			100 %	100 %	364.440.000,00	653.100.000,00	653.100.000,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	SKPD		730.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	0 2	0 1	2. 05	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	15.400.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan			95.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

																			RPJP 2045)				
	5	0 2	0 1	2. 05	00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100 Orang	50.000.000, 00	201.700.000 ,00	212.220.000 ,00	Kab. Pacita n, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Integras i Orientas i Pemban gunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indones ia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			310.000.000 ,00	BADA N KEUA NGAN DAERA H
	5	0 2	0 1	2. 05	00 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	60 Orang	299.040.000 ,00	436.000.000 ,00	266.900.000 ,00	Kab. Pacita n, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	Integras i Orientas i Pemban gunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indones ia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			325.000.000 ,00	BADA N KEUA NGAN DAERA H
	5	0 2	0 1	2. 06		Administra si Umum Perangkat Daerah	Prosentase operasional dasar perngkat daerah yang terpenuhi	-			100 %	100 %	228.081.568 ,00	240.619.060 ,00	240.619.060 ,00			-	Integras i Orientas i Pemban gunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indones ia Baru (RPJMN dan RPJP	SKPD		466.500.000 ,00	BADA N KEUA NGAN DAERA H

																			2045)				
	5	0 2	0 1	2. 06	00 01	Penyediaan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								Komponen									Instalasi
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	9.969.900,0 0	9.969.900,0 0	9.969.900,0 0	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			27.000.000, 00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	0 2	0 1	2. 06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	23.428.068, 00	29.315.560, 00	56.501.634, 00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			65.000.000, 00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	0 2	0 1	2. 06	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	9.988.600,0 0	9.988.600,0 0	9.988.600,0 0	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			37.000.000, 00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	0 2	0 1	2. 06	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	49.994.000,00	56.644.000,00	79.044.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			125.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	14.592.000,00	14.592.000,00	18.725.515,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			22.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	120.109.000,00	120.109.000,00	76.209.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			190.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	-			100 %	100 %	2.013.898.088,00	115.134.496,00	115.134.496,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	SKPD		4.250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	9 Unit	2.000.000.000,00	84.104.300,00	49.950.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			4.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				12 Unit	3 Unit	13.898.088,00	31.030.196,00	31.030.196,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah yang dibutuhkan	-			100 %	100 %	11.603.806.219,00	11.467.922.319,00	11.467.922.319,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	SKPD		12.527.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	11.208.765.419,00	11.062.881.519,00	10.950.326.224,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			11.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8.309.000,00	8.309.000,00	8.309.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			27.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	386.731.800,00	396.731.800,00	392.081.800,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			1.500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	-			80 %	80 %	161.790.000,00	147.340.000,00	147.340.000,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	SKPD		535.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				50 Unit	56 Unit	102.395.000,00	102.395.000,00	102.395.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			225.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	39.545.000,00	25.095.000,00	25.095.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	29 Unit	19.850.000,00	19.850.000,00	25.980.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			60.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
2	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Jumlah Perda dan Perbup tentang APBD yang ditetapkan dalam satu tahun Jumlah Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban APBD yang ditetapkan dalam satu tahun				7 2 PPerda dan Perbup Perda	7 2 PPerda dan Perbup Perda	296.629.783.992,00	288.229.453.992,00	290.151.102.141,00							306.917.000.000,00	

	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Prosentase OPD yang menyusun Rencana Anggaran tepat waktu	-			100 %	100 %	1.892.573.100,00	1.892.573.100,00	1.892.573.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	SKPD		2.050.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																	
							Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	1.067.390.100,00	1.067.390.100,00	989.690.100,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			600.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																	

							Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	63.643.800,00	63.643.800,00	67.969.800,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			70.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																	
							Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				39 Dokumen	39 Dokumen	11.740.000,00	11.740.000,00	11.740.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			60.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																	

							Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				39 Dokumen	39 Dokumen	7.832.900,00	7.832.900,00	7.832.900,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			60.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																	
							Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi				39 Dokumen	39 Dokumen	9.467.700,00	9.467.700,00	9.467.700,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			60.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																	

							Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				39 Dokumen	39 Dokumen	6.024.700,00	6.024.700,00	4.524.700,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			60.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																	
							Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	363.265.200,00	363.265.200,00	330.477.200,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			390.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																	

							Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	342.208.700,00	342.208.700,00	292.833.320,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			530.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																	
							Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			60.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	2.01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan																	

							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				4 Dokumen	4 Dokumen	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			160.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Prosentase rata rata penyerapan anggaran OPD	-			100 %	100 %	347.785.000,00	347.785.000,00	347.785.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	SKPD		760.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																	

							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	90.285.000,00	90.285.000,00	84.453.780,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			60.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	2.02	0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah																	

							Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			60.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	34.065.476,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			60.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																	

							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				39 Dokumen	39 Dokumen	125.000.000,00	125.000.000,00	150.939.322,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			230.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																	
							Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				2 Dokumen	2 Dokumen	12.500.000,00	12.500.000,00	6.051.100,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			40.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																	

							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				39 Orang	39 Orang	85.000.000,00	85.000.000,00	76.982.800,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			160.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Prosentase OPD yang laporan keuangan daerahnya sesuai dengan SAP	-			100 %	100 %	232.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	SKPD		550.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																	

							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				5 Dokumen	5 Dokumen	72.000.000,00	72.000.000,00	59.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			125.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	130.000.000,00	130.000.000,00	155.009.600,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	2.03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah																	

							Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	27.490.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			125.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase terpenuhinya belanja Transfer dan belanja tidak terduga	-			100 %	100 %	293.857.425.892,00	285.457.095.892,00	285.457.095.892,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	SKPD, Masyarakat		303.007.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																	

							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				12 Laporan	12 Laporan	273.678.905.200,00	269.278.575.200,00	269.230.883.210,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Desa	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			292.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000.000,00	6.000.000.000,00	8.832.220.256,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			11.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota																	

							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	10.178.520.692,00	10.178.520.692,00	9.358.470.877,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			7.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Prosentase kelancaran penggunaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	-			100 %	100 %	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	SKPD		550.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah																	

							Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			550.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
3	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase barang/aset daerah yang teregistrasi				100 %	100 %	636.093.000,00	686.093.000,00	589.943.130,00							1.340.000.000,00	
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD dengan data aset yang valid	-			100 %	100 %	636.093.000,00	686.093.000,00	686.093.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	SKPD		1.340.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga																	

							Jumlah Standar Harga yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	34.892.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	03	2.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			60.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																	

							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			60.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																	

							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			60.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				40 Laporan	40 Laporan	100.000.000,00	150.000.000,00	125.127.400,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			140.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																	

							Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	210.000.000,00	210.000.000,00	173.257.130,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			225.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																	
							Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				4 Laporan	4 Laporan	146.093.000,00	146.093.000,00	152.566.400,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																	

							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				40 Orang	40 Orang	90.000.000,00	90.000.000,00	54.100.200,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			120.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
4	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD				11,39 %	11,39 %	1.692.060.000,00	1.952.060.000,00	2.194.795.160,00							4.005.000.000,00	
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah pendapatan pajak daerah	-			38.6 Milyar	38.6 Milyar	1.692.060.000,00	1.952.060.000,00	1.952.060.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	SKPD, Masyarakat		4.005.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																	

							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	793.000.000,00	787.530.000,00	1.309.157.200,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			1.200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	200.000.000,00	138.411.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			275.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																	

							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				4 Laporan	4 Laporan	250.000.000,00	254.046.700,00	188.321.370,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			60.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			60.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																	

							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	100.979.000,00	100.979.000,00	81.717.500,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			275.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	107.062.000,00	87.004.700,00	87.257.900,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			900.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																	

							Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				5 Obyek Pajak	5 Obyek Pajak	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			60.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																	
							Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	89.307.000,00	89.307.000,00	53.157.100,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			325.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																	

							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				10 Layanan	10 Layanan	76.826.000,00	102.353.500,00	79.299.900,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			60.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																	
							Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			60.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah																	

							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1 Dokumen	12 Dokumen	79.186.000,00	79.185.800,00	64.800.190,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			225.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																	

							Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			110.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Laporan	12 Laporan	40.200.000,00	146.153.300,00	87.173.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			160.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																	

							Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			160.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	JUMLAH												**321.671.553.458,00**	**311.841.523.458,00**	**312.802.695.013,00**							**338.111.000.000,00**	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAEARAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan ini mengacu pada RPJPD, RPJMD, RKPD, serta Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah yang harus disinkronisasikan dengan kebijakan nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dimana terdapat 9 (sembilan) bidang pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 -2025

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah mengacu pada Pembangunan Transparansi dan Akuntabitas Kinerja pemerintah serta meningkatkan Partisipasi Publik. Perlunya Akuntabilitas guna untuk mencegah dan memberantas korupsi. Kegiatan keuangan Badan Keuangan Daerah dapat menjadi penguatan sector keuangan. Hal tersebut diatas menunjukkan adanya keterkaitan antara Prioritas pembangunan Nasional dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan

3.2 Tujuan dan Sasaran

Merujuk terhadap landasan ideal normatif dalam penyusunan Renstra yakni Permendagri No 86 Tahun 2017 menjelaskan, pada dasarnya tahapan selanjutnya dari penyusunan Renstra adalah rangkaian perumusan tujuan dan sasaran OPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD yang telah disusun. Tujuan dan sasaran dalam Renstra BKD merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja OPD sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan Kabupaten Pacitan.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Oleh karena itu, syarat utama Tujuan dan Sasaran OPD adalah *measurable* dan *tangible*. *Measurable* dalam perumusan Tujuan dan Sasaran OPD adalah dalam perumusannya, Tujuan dan Sasaran OPD harus dapat diukur. Hal tersebut sesuai yang kita kenal dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilevel Indikator Tujuan dan Indikator Kinerja OPD yang melekat pada label Indikator Sasaran RPJMD. Sedangkan *Tangible* yang dimaksud adalah Tujuan dan Sasaran OPD hasilnya nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Baik nyata dalam representasi keberhasilan pencapaian IKU dan IKD maupun nyata dalam kegagalan pencapaian IKU dan IKD.

Tujuan penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah dan penyusunan kebijakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis ialah target-target yang ingin dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, yaitu :

1. Meningkatkan kemandirian fiscal melalui peningkatan PAD
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah

Adapun sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan ialah :

1. Meningkatnya Penerimaan Daerah
2. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah

4.2 *Logical Framework (Cascading)* Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan penyusunan tujuan dan sasaran Badan Keuangan Daerah Telah memperhatikan proses cascading antara Perangkat daerah dengan RPJMD khususnya pada misi III dan Misi IV sebagaimana dapat diukur linearitasnya pada gambar berikut :

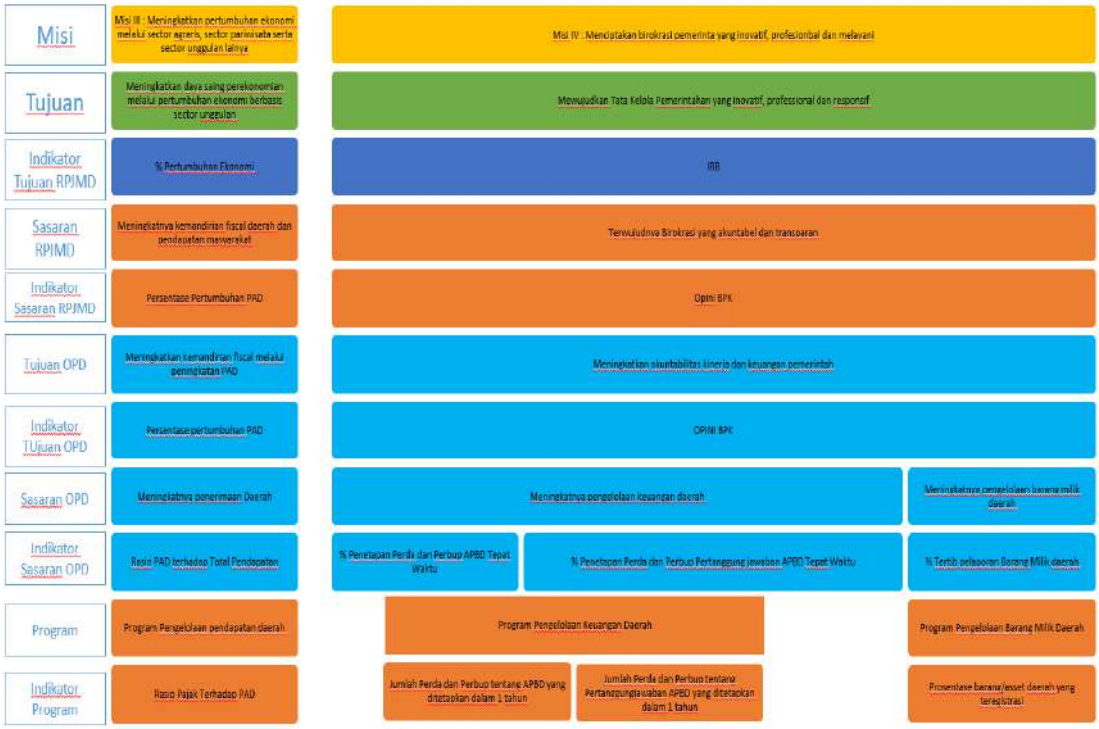
Misi
Misi III : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sector agraris, sector pariwisata serta sector unggulan lainya
Misi IV : Menciptakan birokrasi pemerinta yang inovatif, profesionbal dan melayani
Tujuan
Meningkatkan daya saing perekonomian melalui pertumbuhan ekonomi berbasis sector unggulan
Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang inovatif, professional dan responsif
Indikator Tujuan RPJMD
% Pertumbuhan Ekonomi
IRB
Sasaran RPJMD
Meningkatnya kemandirian fiscal daerah dan pendapatan masyarakat
Terwujudnya Birokrasi yang akuntabel dan transparan
Indikator Sasaran RPJMD
Persentase Pertumbuhan PAD
Opini BPK
Tujuan OPD
Meningkatkan kemandirian fiscal melalui peningkatan PAD
Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah
Indikator TUjuan OPD
Persentase pertumbuhan PAD
OPINI BPK
Sasaran OPD
Meningkatnya penerimaan Daerah
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah
Meningkatnya pengelolaan barang milik daerah
Indikator Sasaran OPD
Rasio PAD terhadap Total Pendapatan
% Penetapan Perda dan Perbup APBD Tepat Waktu
% Penetapan Perda dan Perbup Pertanggung jawaban APBD Tepat Waktu
% Tertib pelaporan Barang Milik daerah
Program
Program Pengelolaan pendapatan daerah
Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Indikator Program
Rasio Pajak Terhadap PAD
Jumlah Perda dan Perbup tentang APBD yang ditetapkan dalam 1 tahun
Jumlah Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban APBD yang ditetapkan dalam 1 tahun
Prosentase barang/aset daerah yang teregistrasi

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022-2026

Uraian		Indikator	Target KinerjaSasaranpadaTahunKe				
			2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kemandirian fiskal melalui peningkatan PAD		% Pertumbuhan PAD	-3,37%	4,40%	6,45%	3,55%	2,82%
	Meningkatnya Penerimaan Daerah	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan	11,20%	11,63%	12,48%	12,66%	12,96%
Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Persentase Penetapan Perda dan Perbup APBD tepat waktu	100	100	100	100	100
		Persentase Penetapan Perda dan Perbup Pertanggung Jawaban APBD tepat waktu	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Tertib Pelaporan Barang Milik Daerah	100	100	100	100	100

3.3 Program dan Kegiatan

Prioritas dan Fokus Pembangunan BKD dengan Peningkatan kualitas pelayanan publik, antara lain melalui :

1. Penerapan dan optimalisasi pelayanan
2. Inovasi dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan
3. Penyelenggaraan pelayanan dengan meningkatan upaya partisipasi publik, kolaborasi dengan stakeholder terkait dan keterbukaan informasi
4. Pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah meliputi :
   a) Mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah daerah yang sesuai kaidah perundangan melalui program pengelolaan keuangan daerah;
   b) Mewujudkan peningkatan manajemen dan administrasi Barang Milik Daerah melalui program Pengelolaan BMD;
   c) Peningkatan kinerja dan akuntabiltas penyelenggaran pemerintahan pada perangkat daerah melalui program Penunjang Urusan pemerintahan urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
5. Dalam Rangka mendukung program sistem pemerintahan berbasis elektronik Badan Keuangan pada tahun 2022 merencanakan untuk kegiatan
   a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
   b. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah.
   c. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah.

Tabel 3.2
Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2025

Perangkat Daerah : Badan Keuangan Daerah

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. PACITAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN KEUANGAN DAERAH							**321.671.553.458,00**	**311.841.523.458,00**	**312.802.695.013,00**	**-8.868.858.445,00**							**338.111.000.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**321.671.553.458,00**	**311.841.523.458,00**	**312.802.695.013,00**	**-8.868.858.445,00**							**338.111.000.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**321.671.553.458,00**	**311.841.523.458,00**	**312.802.695.013,00**	**-8.868.858.445,00**							**338.111.000.000,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**				**>B Nilai**	**>B Nilai**	**22.713.616.466,00**	**20.973.916.466,00**	**19.866.854.582,00**	**3.135.383.534,00**							**25.849.000.000,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah*				23 Dok 23 Dokumen	23 Dokumen	155.000.000,00	195.000.000,00	202.156.400,00	47.156.400,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	SKPD		200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00	90.000.000,00	63.363.600,00	13.363.600,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			55.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	9.625.200,00	-374.800,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			15.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	9.497.200,00	-502.800,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			15.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	9.996.700,00	-3.300,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			15.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			15.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				14 Laporan	14 Laporan	65.000.000,00	65.000.000,00	99.673.700,00	34.673.700,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			85.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Laporan keuangan Perangkat Daerah*				59 Dok 59 Dokumen	59 Dokumen	8.186.600.591,00	8.154.800.591,00	7.334.572.313,00	-852.028.278,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	SKPD		7.140.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				49 Orang/bulan	49 Orang/bulan	7.824.271.651,00	7.737.589.681,00	6.884.796.403,00	-939.475.248,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			6.500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	219.516.940,00	274.398.910,00	274.398.910,00	54.881.970,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			450.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	142.812.000,00	142.812.000,00	175.377.000,00	32.565.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			190.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian*				100 %	100 %	364.440.000,00	653.100.000,00	494.520.000,00	130.080.000,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	SKPD		730.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	15.400.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			95.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	201.700.000,00	212.220.000,00	162.220.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			310.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	60 Orang	299.040.000,00	436.000.000,00	266.900.000,00	-32.140.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			325.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Prosentase operasional dasar perngkat daerah yang terpenuhi*				100 %	100 %	228.081.568,00	240.619.060,00	250.438.649,00	22.357.081,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	SKPD		466.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	9.969.900,00	9.969.900,00	9.969.900,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			27.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	23.428.068,00	29.315.560,00	56.501.634,00	33.073.566,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			65.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	9.988.600,00	9.988.600,00	9.988.600,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			37.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	49.994.000,00	56.644.000,00	79.044.000,00	29.050.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			125.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	14.592.000,00	14.592.000,00	18.725.515,00	4.133.515,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			22.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	120.109.000,00	120.109.000,00	76.209.000,00	-43.900.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			190.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan*				100 %	100 %	2.013.898.088,00	115.134.496,00	80.980.196,00	-1.932.917.892,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	SKPD		4.250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	9 Unit	2.000.000.000,00	84.104.300,00	49.950.000,00	-1.950.050.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			4.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				12 Unit	3 Unit	13.898.088,00	31.030.196,00	31.030.196,00	17.132.108,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah yang dibutuhkan*				100 %	100 %	11.603.806.219,00	11.467.922.319,00	11.350.717.024,00	-253.089.195,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	SKPD		12.527.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	11.208.765.419,00	11.062.881.519,00	10.950.326.224,00	-258.439.195,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			11.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8.309.000,00	8.309.000,00	8.309.000,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			27.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	386.731.800,00	396.731.800,00	392.081.800,00	5.350.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			1.500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik*				80 %	80 %	161.790.000,00	147.340.000,00	153.470.000,00	-8.320.000,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	SKPD		535.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				50 Unit	56 Unit	102.395.000,00	102.395.000,00	102.395.000,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			225.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	39.545.000,00	25.095.000,00	25.095.000,00	-14.450.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	29 Unit	19.850.000,00	19.850.000,00	25.980.000,00	6.130.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			60.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Jumlah Perda dan Perbup tentang APBD yang ditetapkan dalam satu tahun Jumlah Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban APBD yang ditetapkan dalam satu tahun**				**7 2 PPerda dan Perbup Perda**	**7 2 PPerda dan Perbup Perda**	**296.629.783.992,00**	**288.229.453.992,00**	**290.151.102.141,00**	**10.287.216.008,00**							**306.917.000.000,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Prosentase OPD yang menyusun Rencana Anggaran tepat waktu*				100 %	100 %	1.892.573.100,00	1.892.573.100,00	1.735.535.720,00	-157.037.380,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	SKPD		2.050.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	1.067.390.100,00	1.067.390.100,00	989.690.100,00	-77.700.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			600.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	63.643.800,00	63.643.800,00	67.969.800,00	4.326.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			70.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																		
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				39 Dokumen	39 Dokumen	11.740.000,00	11.740.000,00	11.740.000,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			60.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				39 Dokumen	39 Dokumen	7.832.900,00	7.832.900,00	7.832.900,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			60.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				39 Dokumen	39 Dokumen	9.467.700,00	9.467.700,00	9.467.700,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			60.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				39 Dokumen	39 Dokumen	6.024.700,00	6.024.700,00	4.524.700,00	-1.500.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			60.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	363.265.200,00	363.265.200,00	330.477.200,00	-32.788.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			390.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	342.208.700,00	342.208.700,00	292.833.320,00	-49.375.380,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			530.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			60.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				4 Dokumen	4 Dokumen	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			160.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Prosentase rata rata penyerapan anggaran OPD*				100 %	100 %	347.785.000,00	347.785.000,00	352.492.478,00	4.707.478,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	SKPD		760.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	90.285.000,00	90.285.000,00	84.453.780,00	-5.831.220,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			60.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			60.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	34.065.476,00	-934.524,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			60.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				39 Dokumen	39 Dokumen	125.000.000,00	125.000.000,00	150.939.322,00	25.939.322,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			230.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																		
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				2 Dokumen	2 Dokumen	12.500.000,00	12.500.000,00	6.051.100,00	-6.448.900,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			40.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				39 Orang	39 Orang	85.000.000,00	85.000.000,00	76.982.800,00	-8.017.200,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			160.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Prosentase OPD yang laporan keuangan daerahnya sesuai dengan SAP*				100 %	100 %	232.000.000,00	232.000.000,00	241.499.600,00	9.499.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	SKPD		550.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				5 Dokumen	5 Dokumen	72.000.000,00	72.000.000,00	59.000.000,00	-13.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			125.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	130.000.000,00	130.000.000,00	155.009.600,00	25.009.600,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	27.490.000,00	-2.510.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			125.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Prosentase terpenuhinya belanja Transfer dan belanja tidak terduga*				100 %	100 %	293.857.425.892,00	285.457.095.892,00	287.421.574.343,00	-6.435.851.549,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	SKPD, Masyarakat		303.007.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				12 Laporan	12 Laporan	273.678.905.200,00	269.278.575.200,00	269.230.883.210,00	-4.448.021.990,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA DESA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			292.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000.000,00	6.000.000.000,00	8.832.220.256,00	-1.167.779.744,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			11.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	10.178.520.692,00	10.178.520.692,00	9.358.470.877,00	-820.049.815,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			7.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	*Prosentase kelancaran penggunaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah*				100 %	100 %	300.000.000,00	300.000.000,00	400.000.000,00	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah	SKPD		550.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	400.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			550.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase barang/aset daerah yang teregistrasi**				**100 %**	**100 %**	**636.093.000,00**	**686.093.000,00**	**589.943.130,00**	**703.907.000,00**							**1.340.000.000,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Persentase OPD dengan data aset yang valid*				100 %	100 %	636.093.000,00	686.093.000,00	589.943.130,00	-46.149.870,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	SKPD		1.340.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	34.892.000,00	-5.108.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			60.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			60.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			60.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				40 Laporan	40 Laporan	100.000.000,00	150.000.000,00	125.127.400,00	25.127.400,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			140.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	210.000.000,00	210.000.000,00	173.257.130,00	-36.742.870,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			225.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				4 Laporan	4 Laporan	146.093.000,00	146.093.000,00	152.566.400,00	6.473.400,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				40 Orang	40 Orang	90.000.000,00	90.000.000,00	54.100.200,00	-35.899.800,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah Penguatan dan Pemeliharaan Kualitas Infrastruktur Daerah			120.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
4.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD**				**11,39 %**	**11,39 %**	**1.692.060.000,00**	**1.952.060.000,00**	**2.194.795.160,00**	**2.312.940.000,00**							**4.005.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Jumlah pendapatan pajak daerah*				38.6 Milyar	38.6 Milyar	1.692.060.000,00	1.952.060.000,00	2.194.795.160,00	502.735.160,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	SKPD, Masyarakat		4.005.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	793.000.000,00	787.530.000,00	1.309.157.200,00	516.157.200,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			1.200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	200.000.000,00	138.411.000,00	88.411.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			275.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				4 Laporan	4 Laporan	250.000.000,00	254.046.700,00	188.321.370,00	-61.678.630,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			60.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			60.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	100.979.000,00	100.979.000,00	81.717.500,00	-19.261.500,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			275.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	107.062.000,00	87.004.700,00	87.257.900,00	-19.804.100,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			900.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																		
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				5 Obyek Pajak	5 Obyek Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			60.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	89.307.000,00	89.307.000,00	53.157.100,00	-36.149.900,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			325.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				10 Layanan	10 Layanan	76.826.000,00	102.353.500,00	79.299.900,00	2.473.900,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			60.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																		
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			60.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1 Dokumen	12 Dokumen	79.186.000,00	79.185.800,00	64.800.190,00	-14.385.810,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			225.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			110.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Laporan	12 Laporan	40.200.000,00	146.153.300,00	87.173.000,00	46.973.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			160.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			160.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	J U M L A H								**321.671.553.458,00**	**311.841.523.458,00**	**312.802.695.013,00**	**-8.868.858.445,00**							**338.111.000.000,00**	

BAB IV

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 sangat tergantung kepada kerjasama dan dukungan serta komitmen dan kemauan yang kuat dari seluruh komponen, sehingga seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka dilakukan Rencana Kerja. Pada pelaksanaan penggunaan anggaran kegiatan perlu dievaluasi antara penganggaran anggaran kegiatan dan realisasi hasil anggaran untuk mencapai output yang dipergunakan sehingga dapat dinilai keberhasilan dari pelaksanaan sub kegiatan. Kiranya rencana kerja ini dapat menjadi pedoman bagi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan untuk menyusun anggaran, program, kegiatan dan sub kegiatan serta menjadi standar dalam pengukuran kinerja yang telah ditetapkan.

A. Kaidah Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan Perubahan Tahun 2025 sebagai salah satu sarana tata kelola organisasi yang dapat dipergunakan, untuk :

a) Menjaga konsistensi antara perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran dengan pelaksanaan serta dokumen perencanaan ;
b) Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan
c) Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan ;
d) Mengalokasikan anggaran untuk mendukung target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun ;
e) Menentukan indikator kinerja dan tingkat capaian strategis.

B. Rekomendasi.

Dengan tersusunnya Renja Perubahan ini, maka rekomendasi untuk pelaksanaan Tahun 2025 sebagai berikut :

a) Melakukan verifikasi dan pendampingan kepada para pengelola keuangan mulai dari penyusunan program, perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan ;
b) Melakukan koordinasi dan membangun komunikasi antar pegawai, antar bidang dan antar Perangkat Daerah sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan dengan lebih cepat dan tepat ;
c) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja yang dijabarkan dan diwujudkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada masing- masing bidang.

Pacitan, Juni 2025
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN

Drs.DARYONO,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19651117 198703 1 012

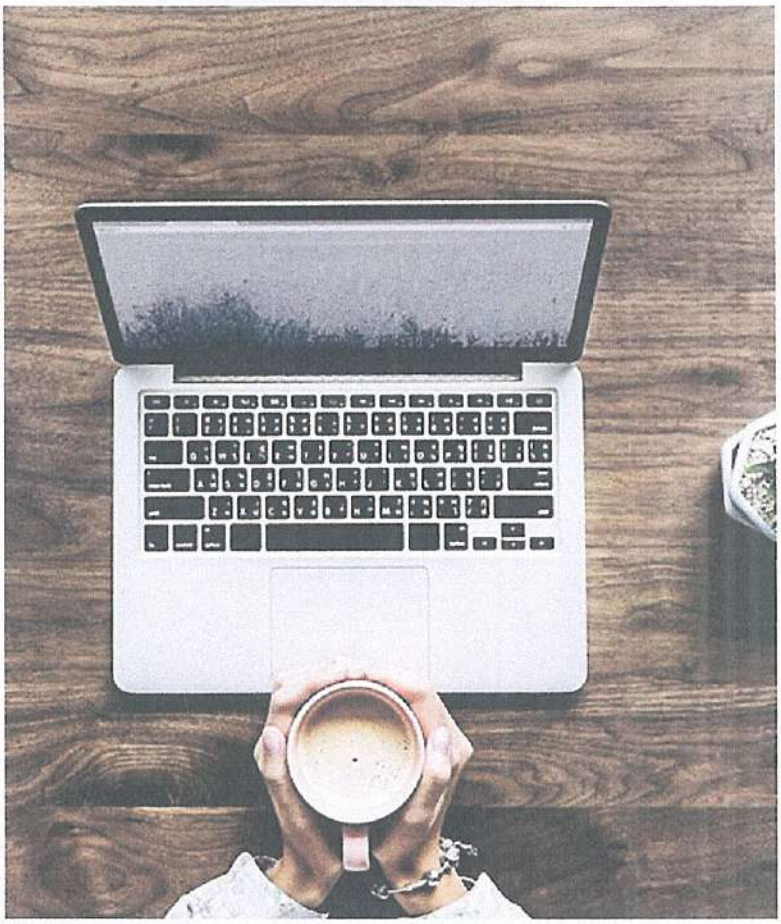

RENCANA KERJA PERUBAHAN

TAHUN 2025

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PACITAN

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan Tahun 2025 dapat disusun dengan pedoman dan mekanisme yang ada.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Rencana Kerja, ditetapkan rencana capaian kinerja yang ada pada tingkat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam perencanaan Organisasi Perangkat Daerah. Penyusunan rencana kerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan Tahun 2025, diharapkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan dapat terwujud.

Pacitan, Juli 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN PACITAN

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Drs. RUDY HARYANTO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196509101990031016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI i

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 15

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 17

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 20

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 31

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 32

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 32

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 32

3.3. Program dan Kegiatan 35

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH 53

BAB V PENUTUP 70

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, dilaksanakan melalui pengawasan aparatur, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan kualitas pelayanan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Proses penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai ketentuan Undang-undang mengemukakan bahwa Rencana Kerja (Renja) OPD merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026 OPD dan akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2011 dimana fungsi Renja OPD menerjemahkan dan mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke dalam program dan kegiatan OPD sedemikian rupa sehingga berkontribusi pada pencapaian tujuan dan program OPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra OPD serta sebagai proses penyusunan RAPBD. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembanguan dan Keuangan Daerah ada perubahan dalam penyusunan program dan kegiatan apabila mengacu pada peraturan tersebut.

Berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 154 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

1. **Tugas Pokok**

   Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan bidang pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian, mutasi dan promosi Aparatur Sipil Negara (ASN), pengembangan kompetensi aparatur, dan penilaian kinerja aparatur.

2. **Fungsi**

   Badan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

   a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan

pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian;

b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi mutasi dan promosi Aparatur Sipil Negara (ASN);

c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengembangan kompetensi aparatur;

d. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi penilaian kinerja aparatur; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari :

a. Sekretariat;
b. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian;
c. Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara;
d. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur;
e. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur; dan
f. UPT Badan

Adapun Susunan Organisasinya sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahi;
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Mutasi dan Promosi
4. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur
5. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, Bidang Pendidikan dan Pengembangan Kompetensi Aparatur, Kelompok Jabatan Fungsional.

Sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi maka di bidang pemerintahan sekarang ini telah terjadi perubahan yang besar sekali, diantaranya adalah diwujudkannya tata kepemerintahan yang baik (*good governance)*. Upaya

mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa selalu menjadi obsesi bagi rakyat dan pemerintahan di zaman modern sekarang ini. Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang telah dicapai, diperlukan adanya perwujudan dan kemampuan serta kesungguhan aparatur negara untuk menjadi insan yang berkualitas, profesional dan bertanggungjawab dalam menangani berbagai permasalahan sehingga keberhasilan yang telah dicapai dapat terus dipelihara dan ditingkatkan serta diarahkan pada peningkatan Sumber daya Manusia. Peningkatan SDM dan profesionalisme pada Aparatur Negara terus ditingkatkan guna mewujudkan Aparatur Negara yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan disusun berdasarkan peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
c. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
d. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
e. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang formasi PNS.
f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian PNS.
g. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang pengadaan PNS;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perubahan Pengangkatan tenaga Honorer menjadi CPNS jo Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2012 tentang perubahan ke dua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005.
i. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang penilaian prestasi kerja PNS.

j. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 Tentang cuti PNS.
k. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural.
l. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang pengurusan SK penetapan jabatan fungsional.
m. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.
n. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai.
o. Peraturan Materi Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
r. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun berjalan memiliki relevansi, efektif dan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan, terutama dalam menyikapi perubahan regulasi dan permasalahan yang dinamis.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai panduan implementasi perubahan, mewujudkan tujuan organisasi secara terarah, sebagai alat monitoring dan evaluasi serta untuk memastikan bahwa dokumen tersebut menjadi dasar bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (RKA-PD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah dan gambaran umum Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan ketentuan peraturan yang mengatur tentang kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari peyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan Pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD dan perkiraan capaian tahun berjalan

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD

Berisi Kajian terhadap capain kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Berisi uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan, permasalahan dan hambatan dan solusi terhadapa pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

2.4 Review terhadap rancangan Awal RKPD.

Berisikan uraian proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan barang.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang

diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan)

BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan

BAB IV : Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan

BAB V : Penutup

Berisikan penjelasan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana organisasi perangkat daerah dalam menjalankan program/kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan. Selain itu evaluasi juga dilaksanakan untuk mengetahui faktor-faktor keberhasilan dan faktor-faktor penghambat atau kendala yang menyebabkan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan belum terealisasi sesuai dengan target yang ditentukan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pokok-pokok materi yang disajikan antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Secara terinci sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Evaluasi terhadap Hasil Renja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sampai dengan Bulan Juni Tahun 2025

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
503	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**Nilai**	**80.00**	**4.455.135.221,00**	**78.50**	**2.382.893.488,00**	**98,12%**	**53.49%**
503	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**29.00**	**80.000.000,00**	**14.00**	**11.356.000,00**	**48.28%**	**14.2%**
503	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4.00	60.000.000,00	5.00	6.716.600,00	125%	11.19%
			0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	9.00	20.000.000,00	7.00	4.639.400,00	77.78%	23.2%
										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	50,70	17,20
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Rendah	Sangat Rendah
503	01	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**31.00**	**3.609.438.421,00**	**13.00**	**2.052.438.485,00**	**41.94%**	**56.86%**
503	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	32.00	3.534.438.421,00	32.00	2.039.173.485,00	100%	57.69%
			0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12.00	65.000.000,00	6.00	13.265.000,00	50%	20.41%
			0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12.00	10.000.000,00	6.00	0,00	50%	0%
										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	40,00	26,03
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
503	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan barang milik daerah sesuai ketentuan perundangan**	**Dokumen**	**6.00**	**12.500.000,00**	**4.00**	**1.984.000,00**	**66.67%**	**15.87%**
503	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	6.00	12.500.000,00	1.00	1.984.000,00	16.67%	15.87%
										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	16,67	15,87
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
503	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian**	**%**	**100.00**	**190.500.000,00**	**48.00**	**9.760.000,00**	**48%**	**5.12%**
503	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	32.00	190.500.000,00	0.00	9.760.000,00	0%	5.12%
										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	0,00	5,12
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
503	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**%**	**100.00**	**117.385.175,00**	**48.00**	**24.224.650,00**	**48%**	**20.64%**
503	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3.00	28.000.000,00	2.00	7.380.950,00	66.67%	26.36%
			0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	25.000.000,00	0.00	6.250.000,00	0%	25%
			0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30.00	64.385.175,00	2.00	10.593.700,00	6.67%	16.45%
										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	24,45	22,60
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
503	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**%**	**100.00**	**69.896.825,00**	**8.00**	**111.330.000,00**	**48%**	**159.28%**
503	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8.00	69.896.825,00	5.00	111.330.000,00	62.5%	159.28%
										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	62,50	159,28

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Rendah	Sangat Tinggi
503	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan**	**%**	**100.00**	**282.516.400,00**	**48.00**	**149.012.273,00**	**48%**	**52.74%**
503	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1.00	12.000.000,00	0.00	1.047.000,00	0%	8.73%
			0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12.00	111.238.000,00	5.00	58.139.848,00	41.67%	52.27%
			0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	159.278.400,00	5.00	89.825.425,00	41.67%	56.4%
										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	27,78	39,13
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
503	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**%**	**80.00**	**92.898.400,00**	**20.00**	**22.788.080,00**	**25%**	**24.53%**
503	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	21.00	37.896.400,00	4.00	14.506.800,00	19.05%	38.28%
			0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15.00	25.002.000,00	0.00	8.281.280,00	0%	33.12%
			0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1.00	30.000.000,00	0.00	0,00	0%	0%
										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	6,35	23,80
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
503	**02**			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	**Rasio Nilai aspek Perencanan, Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian dari Indeks Sistem Merit**	**Nilai**	**78.00**	**1.585.000.000,00**	**0.00**	**643.620.673,00**	**0%**	**40.61%**
					Rasio Nilai Aspek Mutasi dan Promosi dari Indek Sistem Merit	**Nilai**	**74.50**		**0.00**		**0%**	
					Rasio Nilai aspek Evaluasi Kinerja ASN dari Indek Sistem Merit	**Nilai**	**117.00**		**110.00**		**94.02%**	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
503	**02**	**2.01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Jumlah Dokumen Pengadaan pemberhentian dan Informasi Kepegawaian yang diselesaikan**	**Dokumen**	**4928.00**	**720.000.000,00**	**1514.00**	**404.670.440,00**	**30.72%**	**56.2%**
503	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	1.00	30.000.000,00	1.00	2.460.000,00	100%	8.2%
			0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	1.00	450.000.000,00	0.00	183.577.880,00	0%	40.8%
			0005	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Dokumen	400.00	30.000.000,00	184.00	14.868.060,00	46%	49.56%
			0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	2.00	155.000.000,00	0.00	200.000.000,00	0%	129.03%
			0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1.00	40.000.000,00	0.00	3.764.500,00	0%	9.41%
			0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Arsip yang dipelihara		500.00	15.000.000,00	0.00	0,00	0%	0%
					Jumlah dokumen Laporan data Kepegawaian yang di selesaikan		12.00		0.00		0%	
					Jumlah Kartu Identitas Pegawai yang diterbitkan		1200.00		0.00		0%	
					Jumlah Dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	Dokumen	500.00		0.00		0%	
										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	16,22	39,50
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
503	**02**	**2.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**	**Jumlah dokumen Mutasi dan Promosi ASN yang diselesaikan**	**Laporan**	**10.00**	**350.000.000,00**	**2.00**	**43.103.278,00**	**20%**	**12.32%**
503	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	100.00	50.000.000,00	168.00	7.623.000,00	168%	15.25%
			0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	1200.00	50.000.000,00	775.00	18.022.000,00	64.58%	36.04%
			0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Pola Karir yang terselesaikan		1.00	250.000.000,00	0.00	17.458.278,00	0%	6.98%
					Jumlah Laporan Hasil Seleksi Terbuka JPT Pratam		6.00		0.00		0%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	200.00		0.00		0%	
										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	46,52	19,42
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
503	**02**	**2.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Jumlah Dokumen pengembangan kompetensi yang diselesaikan**	**Laporan**	**1.00**	**50.000.000,00**	**0.00**	**14.306.000,00**	**0%**	**28.61%**
503	02	2.03	0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		100	50.000.000,00	0.00	14.306.000,00	0%	28.61%
					Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Orang	100.00		0.00		0%	
										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	0,00	28,61
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
503	**02**	**2.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja yang diselesaikan**	**Dokumen**	**212.00**	**465.000.000,00**	**46.00**	**181.540.955,00**	**21.7%**	**39.04%**
503	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	1.00	219.070.000,00	3.00	133.528.625,00	300%	60.95%
			0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	2.00	36.775.000,00	4.00	2.678.000,00	200%	7.28%
			0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan	Orang	40.00	128.955.000,00	16.00	19.975.000,00	40%	15.49%
			0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Orang	4.00	40.000.000,00	4.00	13.851.330,00	100%	34.63%
			0005	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang	150.00	40.200.000,00	0.00	11.508.000,00	0%	28.63%
										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	128,00	29,40
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
504	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Rasio nilai aspek Kompetensi dari Indeks Sistem Merit**	**Nilai**	**30.50**	**910.000.000,00**	**0.00**	**145.644.000,00**	**0%**	**16%**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
504	**02**	**2.01**		**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi Teknis**	**Orang**	**50.00**	**440.000.000,00**	**6.00**	**16.315.000,00**	**12%**	**3.71%**
504	02	2.01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen	2.00	20.000.000,00	2.00	0,00	100%	0%
			0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	50.00	400.000.000,00	1.00	16.315.000,00	2%	4.08%
			0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintah	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan,Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang,dan	Dokumen	1.00	20.000.000,00	10.00	0,00	1000%	0%
										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	367,33	1,36
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
504	**02**	**2.02**		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Jumlah ASN yang mendapatatkan Pengembangan Kompetensi Manajerial Fungsional dan Sertifikasi ASN**	**Orang**	**13.00**	**470.000.000,00**	**7.00**	**129.329.000,00**	**53.85%**	**27.52%**
504	02	2.02	0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Orang	5.00	50.000.000,00	14.00	6.386.000,00	280%	12.77%
			0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III		13.00	420.000.000,00	0.00	122.943.000,00	0%	29.27%
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	3.00		5.00		166.67%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
			Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)							148,89	21,02
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)							Sangat Tinggi	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja seluruh program(%)							38,30	38,26
Predikat kinerja seluruh program(%)							Sangat Rendah	Sangat Rendah
Total				**6.950.135.221,00**		**3.172.158.161,00**		
Persentase Realisasi Anggaran						**45.64%**		
Predikat						**Sangat Rendah**		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan bulan Juni tahun 2025 atau Semester pertama, dapat diketahui bahwa capaian target dan realisasi Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan masih berada dalam kategori sangat rendah. Hal ini dapat dilakukan analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

1) **Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator sasaran Nilai SAKIP Perangkat Daerah ditargetkan pada tahun 2025 dengan nilai 80,00 di mana telah dilaksanakan penilaian SAKIP dan mendapatkan nilai 78,50. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa indikatator sasaran Nilai SAKIP Perangkat Daerah terealiasi dengan Tingkat ketercapaian sebesar 98,12%. Adapun kegiatan dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota adalah sebagai berikut:

a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan indikator kinerja Jumlah dokumen Perencanaan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 29 Dokumen. Pada semester pertama Dokumen yang terealisasi sebanyak 14 Dokumen dikarenakan timeline penyusunan dokumen-dokumen tersebut ada di semester selanjutnya.

b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi keuangan diukur dengan indikator Jumlah dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah ditargetkan tahun 2025 menyelesaikan 31 dokumen administrasi keuangan, sedangkan realisasi kinerjanya 13 dokumen sehingga predikat kinerja kegiatan tergolong masih rendah.

c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah diukur dengan indikator kinerja Dokumen Barang Milik Daerah yang terselesaikan tahun 2024 ditargetkan menyelesaikan 6 dokumen administrasi barang milik daerah sedangkan realisasinya 4 dokumen,

sehingga target yang masih belum tercapai akan akan diselesaikan pada semester kedua.

d) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah diukur dengan indikator Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi dengan target kinerja 100%, sedangkan realisasinya 48% pada semester pertama.

e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah diukur dengan indikator kinerja Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dengan target 100% sedangkan realisasinya sebesar 48% di semester pertama.

f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diukur dengan indikator kinerja Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan dengan target 100%, sedangkan realisasinya adalah 48% di semester pertama.

g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diukur dengan indikator kinerja Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik dengan target 80%, sedangkan realisasinya adalah 25% di semester pertama.

2) **Realisasi Program Kepegawaian Daerah**

Program Kepegawaian Daerah didukung dengan 3 (tiga) indikator antara lain :

a) Rasio Nilai aspek Perencanan, Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian dari Indeks Sistem Merit, pada indikator ini ditargetkan tahun 2025 adalah adalah 78,00 namun pada semester pertama belum dapat dikukur realisasinya. Namun indikator tiap kegiatan telah dapat diukur, namun predikat kinerja maupun anggaran masih tergolong sangat rendah, karena kegiatan akan dilaksanakan pada semester kedua.

b) Rasio Nilai Aspek Mutasi dan Promosi dari Indeks Sistem Merit

Selain indikator diatas Program Kepegawaian Daerah juga didukung dengan indikator Rasio Nilai Aspek Mutasi dan Promosi dari Indeks Sistem Merit yang ditargetkan sebesar 74,50. Realisasi kegiatan dan anggaran pada semester pertama masih tergolong sangat rendah karena kegiatan akan dilaksanakan di semester kedua.

c) Rasio Penilaian Kinerja Apratur dari Indeks Sistem Merit

Sedangkan indikator pendukung program kepegawaian daerah yang lain adalah Rasio Penilaian Kinerja Aparatur dari Indeks Sistem Merit. Pada aspek ini adalah pengelolaan Pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 117. Pada semester pertama realisasi capaian masih sangat rendah karena kegiatan akan dilaksanakan pada semester kedua.

3) **Realisasi Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan indikator Rasio nilai aspek Kompetensi dari Indeks Sistem Merit ditargetkan sebesar 30,50. Pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis mendapatkan predikat capaian kinerja sedang, meskipun realisasi anggarannya masih tergolong sangat rendah. Sedangkan kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional realisasi kinerja dan anggarannya masih tergolong sangat rendah, karena akan dilaksanakan pada semester kedua.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berpedoman terhadap tugas dan fungsinya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan mengemban tugas melakukan pengelolaan manajemen ASN yang efektif dan efisien yang berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Sehingga dalam pelaksanaan tugas menghadapi isu – isu strategis yang harus ditentukan arah kebijakannya agar tidak salah dalam menentukan strategi dalam menghadapi isu – isu strategis tersebut.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia antara lain :

1. Adanya Kekurangan Jumlah Pegawai Negeri Sipil dikarenakan setiap tahun terdapat ASN yang purna tugas.
2. Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan belum maksimal sehingga berpengaruh pada Indek Profesionalitas ASN yang rendah;
2. Penegakan disiplin PNS dan Kinerja PNS yang belum berjalan optimal karena kurangnya pembinaan PNS dan adanya perubahan peraturan dari Pemerintah Pusat;
3. Pengukuran Kinerja sudah melembaga akan tetapi pelaksanaannya belum berjalan optimal karena aturan yang dinamis;
4. Belum adanya manajemen talenta dan rencana suksesi untuk penempatan ASN sesuai dengan kompetensi dan kinerja ASN.
5. Belum terlaksananya Uji Kompetensi setiap PNS sehingga kesulitan untuk menentukan jabatan berdasarkan kompetensi yang dimiliki.
6. Rekonsiliasi data kepegawaian Kabupaten dengan data kepegawaian di provinsi masih menemui kendala teknis.
7. Adanya penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional sehingga merubah sistem kerja ASN;

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai ada beberapa hal yang menjadi tantangan maupun peluang dalam pengembangan pelayanan satuan kerja perangkat daerah:

1. Tantangan
   a. Tantangan Internal
      - Sumber daya manusia yang kompeten masih kurang.
      - Prasarana pelayanan masih kurang.
      - Terbatasnya anggaran yang dikelola.
      - Kurangnya kesempatan mengikuti diklat administrasi bagi pegawai.
   b. Tantangan Eksternal
      - Aturan dari pemerintah pusat yang berubah secara dinamis sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan
      - Pemerintah pusat masih menghandle beberapa penjadwalan kegiatan sehingga mempengaruhi pelasakaan kegiatan di daerah.

2. Peluang
   a. Peluang Internal
      - Adanya Sarana dan Prasana kegiatan.
      - Adanya Sumber Daya Manusia yang menguasai TI
      - Adanya pendanaan operasional.
      - Adanya komitmen pegawai untuk dapat memberikan pelayanan yang baik.
      - Terdapat sistem kerja adanya kerjasama tim kerja.
   b. Peluang Eksternal
      - Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah.
      - Adanya perkembangan teknologi informasi sehingga mempemudah pelaksanaan tugas dan fungsi.
      -

Formulasi isu-isu penting yang harus ditindaklanjuti pada rencana kerja 1 (satu) tahun ke depan adalah :

1. Meningkatkan Pengembangan Sumber Daya Aparatur melalui Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Teknis dan Fungsi, Fungsional serta Pengembangan Kompetensi PNS dari Jalur Pendidikan serta Pembekalan CPNSD melalui Pelatihan Dasar (Latsar) serta melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, sehingga ASN memenuhi Pengembangan Kompetensi minimal 20 JP dalam setahun;
2. Pemenuhan jumlah ASN yang ideal secara kualitas dan kuantitas melalui Seleksi Penerimaan ASN berdasarkan perhitungan formasi yang akurat;
3. Melakukan Pembinaan ASN yang dilakukan dengan sebaik – baiknya berdasarkan perpaduan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja;
4. Melaksanakan Pembinaan ASN yang bermasalah sebagai wujud perhatian Pemerintah Daerah kepada ASN yang bermasalah sehingga Kinerja ASN akan meningkat;
5. Rotasi PNS dengan mempertimbangkan proyeksi kebutuhan dan formasi pegawai sehingga Formasi pegawai yang tepat akan terwujud serta kejelasan tupoksi pada masing – masing jabatan;
6. Memberikan reward dan punishment yang adil dan obyektif sehingga Kinerja Aparatur meningkat;

7. Melakukan pengangkatan PNS dalam jabatan yang memenuhi kapabilitas intelektual maupun moralitas, sedangkan persyaratan akseptabilitas berkaitan dengan dukungan lingkungan kerja terhadap calon akseptabilitas berkaitan dengan efektifitas kemampuan kepemimpinan, kemampuan membangun jejaring;
8. Melaksanakan Asessment pada setiap ASN sehingga bisa diketahui kemampuan teknis dan kompetensi masing – masing ASN;
9. Melaksanakan sinkronisasi data mandiri sesuai dengen petunjuk teknis serta memanfaatkan Sumber Daya Aparatur di Bidang Teknologi Informasi sehingga data kepegawaian bisa sinkron.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada dasarnya tidak ada perbedaan mencolok antara Rancangan awal RKPD dengan hasil kebutuhan analisis Rencana Kerja. Namun selama Tahun Anggaran 2025, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sebagaimana Organisasi Perangkat Daerah lainnya di Tingkat pusat maupun daerah, telah mengalami efisiensi anggaran yang berpengaruh kepada pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran.

Program/ Kegiatan Priorotas pada tahun 2025 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Pengembangan Kompetensi Aparatur, khususnya penyelenggaraan Latihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang direkrut pada Tahun 2024.

Selain itu pada awal tahun 2025 telah terselenggara Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II yang menjadi isu nasional terhadap penataan Jasa Teknis/ Tenaga Honorer. Kemudian adanya kekosongan untuk Pejabat eselon II pada tahun 2025 juga menjadi perhatian khusus pada Rencana Kegiatan Perangkat Daerah untuk tahun 2025. Banyaknya JPT Pratama (eselon II) yang pensiun menjadi sebab kekosongan jabatan tertinggi di lingkup perangkat daerah tersebut, sedangkan proses untuk mengisi kekosongan tersebut harus menggunakan seleksi terbuka JPT Pratama yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Seleksi terbuka JPT Pratama dilaksanakan untuk menjamin yang terpilih menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) merupakan pilihan dari hasil seleksi terbuka yang obyektif dan transparan. Selain

pelaksanaan seleksi terbuka JPT Pratama, implementasi pelaksanaan Manajemen Talenta juga menjadi prioritas di tahun 2025.

Selain itu yang menjadi salah satu tugas dan fungsi di bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian dan Fasilitasi Profesi ASN adalah penyusunan proyeksi kebutuhan CASN . Selain KORPRI ada beberapa lembaga yang menjadi kewenangan di BKPSDM salah satunya Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI). PWRI merupakan lembaga yang beranggotakan para purna/pensiunan Pegawai yang aktif melaksanakan organisasi tersebut. PWRI merupakan lembaga yang aktif mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Pacitan melalui BKPSDM.

Sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah terhadap PNS yang bermasalah direncanakan akan diadakan pembinaan mental bagi PNS sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya. Untuk meningkatkan pengawasan terhadap penilaian kinerja akan diadakan evaluasi Sasaran Kerja Pegawai untuk mengukur tingkat keberhasilan Penilaian Kinerja Pegawai. Berikut Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Pacitan

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD 2025				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Analisis Kebutuhan Tahun 2025				Catatan Penting
	Lokasi Output Kegiatan	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi Output Kegiatan	Hasil Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				**10.227.605.148,00**	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**7.078.335.221,00**	
KEPEGAWAIAN				**6.028.209.174,00**	**KEPEGAWAIAN**				**6.168335.221,00**	
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				**1.535.000.000,00**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**				**1.810.000.000,00**	
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				**510.000.000,00**	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**				**1.120.000.000,00**	
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan pemberhentian dan Informasi Kepegawaian yang diselesaikan	1 Dokumen	25.000.000,00	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan pemberhentian dan Informasi Kepegawaian yang diselesaikan	1 Dokumen	30.000.000,00	
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan pemberhentian dan Informasi Kepegawaian yang diselesaikan	2 Dokumen	250.000.000,00	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan pemberhentian dan Informasi Kepegawaian yang diselesaikan	1 Dokumen	850.000.000,00	Pelaksanaan Seleksi CASN
Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan pemberhentian dan Informasi Kepegawaian yang diselesaikan	450 Dokumen	75.000.000,00	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan pemberhentian dan Informasi Kepegawaian yang diselesaikan	400 Dokumen	30.000.000,00	
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	-	50.000.000,00	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan pemberhentian dan Informasi Kepegawaian yang	2 Lembaga	155.000.000,00	

		yang diselesaikan					diselesaikan			
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan pemberhentian dan Informasi Kepegawaian yang diselesaikan	1 Dokumen	100.000.000,00	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan pemberhentian dan Informasi Kepegawaian yang diselesaikan	1 Dokumen	40.000.000,00	
Pengelolaan Data Kepegawaian	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan pemberhentian dan Informasi Kepegawaian yang diselesaikan	1 Dokumen	10.000.000,00	Pengelolaan Data Kepegawaian	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan pemberhentian dan Informasi Kepegawaian yang diselesaikan	500 Dokumen	15.000.000,00	
Mutasi dan Promosi ASN				**600.000.000,00**	**Mutasi dan Promosi ASN**				**300.000.000,00**	
Pengelolaan Mutasi ASN	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Mutasi dan Promosi ASN yang diselesaikan	1500 Dokumen	75.000.000,00	Pengelolaan Mutasi ASN	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Mutasi dan Promosi ASN yang diselesaikan	500 Dokumen	50.000.000,00	
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Mutasi dan Promosi ASN yang diselesaikan	1900 Dokumen	75.000.000,00	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Mutasi dan Promosi ASN yang diselesaikan	1500 Dokumen	50.000.000,00	
Pengelolaan Promosi ASN	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Mutasi dan Promosi ASN yang diselesaikan	400 Dokumen	450.000.000,00	Pengelolaan Promosi ASN	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen Mutasi dan Promosi ASN yang diselesaikan	4 Dokumen	200.000.000,00	

Pengembangan Kompetensi ASN				**100.000.000,00**	**Pengembangan Kompetensi ASN**				**50.000.000,00**	
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen pengembangan kompetensi yang diselesaikan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	25.000.000,00	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen pengembangan kompetensi yang diselesaikan	30 Orang	25.000.000,00	-
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen pengembangan kompetensi yang diselesaikan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	75.000.000,00	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen pengembangan kompetensi yang diselesaikan	100 Orang	50.000.000,00	-
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				**325.000.000,00**	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**				**340.000.000,00**	
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja yang diselesaikan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6227 Dokume n	100.000.000,00	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja yang diselesaikan	1 Dokumen	110.000.000,00	-
Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja yang diselesaikan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 Orang	75.000.000,00	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja yang diselesaikan	2 Orang	40.000.000,00	-
Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja yang diselesaikan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 Orang	0,00	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja yang diselesaikan	150 Orang	35.000.000,00	-
Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja yang diselesaikan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Orang	75.000.000,00	Pembinaan Disiplin ASN	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja yang diselesaikan	40 Orang	115.000.000,00	-
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja yang diselesaikan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Laporan	75.000.000,00	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja yang diselesaikan	4 Laporan	40.000.000,00	-
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				**4.199.395.974,00**	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**910.000.000,00**	

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				**4.199.395.974,00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**				**910.000.000,00**	
Pengembangan Kompetensi Teknis				**475.000.000,00**	**Pengembangan Kompetensi Teknis**				**440.000.000,00**	
Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi Teknis	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	25.000.000,00	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi Teknis	2 Dokumen	20.000.000,00	-
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi Teknis	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Orang	450.000.000,00	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi Teknis	75 Orang	400.000.000,00	Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Teknis

Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi Teknis	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	0,00	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi Teknis	1 Dokumen	20.000.000,00	
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				**3.724.395.974,00**	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**				**470.000.000,00**	
Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Manajerial Fungsional dan Sertifikasi ASN	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	100.000.000,00	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang mendapatatkan Pengembangan Kompetensi Manajerial Fungsional dan Sertifikasi ASN	5 Orang	50.000.000,00	
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan,	Jumlah ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Manajerial	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1233 Laporan	3.614.395.974,00	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan,	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	420.000.000,00	

dan Prajabatan	Fungsional dan Sertifikasi ASN				dan Prajabatan					
-				4.493.209.174,00	-				4.358.335.221,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**4.493.209.174,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**4.358.335.221,00**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**95.000.000,00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**40.000.000,00**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Dokumen	20.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	20.000.000,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	20.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	0 Dokumen	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	20.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0,00	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	35.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	20.000.000,00	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**3.699.395.974,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**3.652.638.421,00**	

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang/ bulan	3.614.395.974,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	30 Orang/b ulan	3.577.638.421,00	-
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	20.000.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen	65.000.000,00	-
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	20.000.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen	10.000.000,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	20.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	0,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19 Laporan	25.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	19 Laporan	0,00	-
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				**20.000.000,00**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				**15.000.000,00**	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah sesuai ketentuan perundangan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Laporan	20.000.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah sesuai ketentuan perundangan	6 Laporan	15.000.000,00	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**35.000.000,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**90.000.000,00**	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150 Dokumen	35.000.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan	32 Dokumen	90.000.000,00	-

	kepegawaian						kepegawaian			
Administrasi Umum Perangkat Daerah				**155.000.000,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**120.000.000,00**	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	25.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	3 Paket	25.000.000,00	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	25.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	0	0,00	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	25.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	2 Paket	25.000.000,00	-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Paket	15.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	0	0,00	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31 Laporan	70.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	30 Laporan	70.000.000,00	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**55.000.000,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**69.896.825,00**	
Pengadaan Mebel	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Unit	25.000.000,00	Pengadaan Mebel	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase ketersediaa n sarana dan prasarana yang dibutuhkan	6 Unit	25.000.000,00	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Unit	30.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase ketersediaa n sarana dan prasarana	8 Unit	69.896825,00	-

	dibutuhkan						yang dibutuhkan			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**317.063.200,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**290.853.575,00**	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	20.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	1 Laporan	12.937.175,00	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	130.863.200,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	12 Laporan	112.638.000,00	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	166.200.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	12 Laporan	165.278.400,00	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**116.750.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**79.946.400,00**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21 Unit	43.750.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	21 Unit	24.944.400,00	-

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Unit	23.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	15 Unit	25.002.000,00	-
Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	50.000.000,00	Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	1 Unit	30.000.000,00	-
				10.227.605.148,00					**7.078.335.221,00**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Beberapa usulan dari masyarakat yang menjadi kewenangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan antara lain usulan dana hibah untuk BKPSDM salah satunya Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI). PWRI merupakan lembaga yang beranggotakan para purna/pensiunan Pegawai yang aktif melaksanakan organisasi tersebut. PWRI merupakan lembaga yang aktif mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Pacitan melalui BKPSDM.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Pacitan. Usulan Program dan kegiatan dari masyarakat bisa dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Nama PD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**				
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	2 Lembaga	- Dana Hibah untuk operasional PWRI - Fasilitasi HUT KORPRI

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang terkait dengan sasaran makro pembangunan dan prioritas pembangunan pada pemerintah daerah bertujuan semakin meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah. Dengan Sasarannya semakin kuatnya kelembagaan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan indikator meningkatnya kepuasan masyarakat dan menurunnya kasus pengaduan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah sehingga pada prioritas pembangunan target kinerja adalah terwujudnya rasio jumlah ASN terhadap jumlah penduduk 1 : 30 terealisasi. Ketersediaan aparatur yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan diberlakukannya penyederhanaan birokrasi menjadi tantangan utama bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan dalam menjalankan pengelolaan Manajemen ASN secara efektif dan efisien. Dengan manajemen sistem merit yang baik maka Profesionalisme ASN akan terwujud. Perubahan regulasi yang dinamis utamanya dengan diberlakukannya permenpan RB nomor 06 tahun 2022 harus segera disikapi dengan mengatur sistem kerja dengan diterbitkannya permenpan RB nomor 07 tahun 2022.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Untuk mendukung prioritas pembangunan daerah sesuai tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Daerah menetapkan sasaran dan tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan bisa dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Terwujudnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang Optimal	Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
			Terwujudnya Manajemen Aparatur Sipil Negara yang efektif dan efisien	Nilai Indeks Sistem Merit

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya aparatur), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang / jasa.

Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pegembangan Sumber Daya Manusia tidak mengalami banyak perubahan dari tahun – tahun sebelumnya. Hal ini sehubungan dengan diterapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga terdapat tidak perubahan dalam perencanaan penganggaran hanya saja menyesuaiakan pagu anggaran yang diperoleh. Terdapat beberapa kegiatan yang merupakan prioritas dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah sekaligus penjabaran dari visi dan misi Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pegembangan Sumber Daya Manusia yang belum terfasilitasi pada saat perencanaan Jangka Pendek Perangkat Daerah. Kegiatan tersebut sangat perlu karena berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan yang lain.

Terdapat 3 Program pada rencana tahun 2025 ini dan tertuang dalam 14 Kegiatan dan 37 sub Kegiatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan tersebar pada umumnya di Kabupaten Pacitan ada juga yang dilaksanakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur. Untuk Rancangan akhir Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Perangkat Daerah tahun 2025 ini program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pegembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan membutuhkan Pagu Anggaran sebesar **Rp. 6.548.963.177,00**

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan visi dan misi Bupati terpilih yaitu Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia. BKPSDM Kabupaten Pacitan mendukung misi ke empat yaitu menciptakan birokrasi pemerintah yang inovatif, Profesional dan Melayani yang kemudian dituangkan dalam Program dan Kegiatan yang terdapat pada Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah. Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2025 pada Badan Kepegawaian dan Pegembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Pacitan dapat dilihat dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2

Program dan Kegiatan BKPSDM Kab. Pacitan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
													Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					7.078.335.221,00					12.713.941.265,00
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					7.078.335.221,00					12.713.941.265,00
5	03				KEPEGAWAIAN					6.168.335.221,00					6.417.856.265,00
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.358.335.221,00					4.555.256.265,00
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					40.000.000,00					85.000.000,00
5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
						-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Dokumen	20.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	15.000.000,00
5	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
													Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokume n	15.000.000,00
5	03	01	2.01	000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
						-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	15.000.000,00
5	03	01	2.01	000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
						-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua	9 Laporan	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	11 Laporan	40.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
													Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Daerah	Kel/Desa			Umum		Daerah		
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.652.638.421,00					3.742.613.865,00
5	03	01	2.02	000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
						-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang/bul an	3.577.638.421,00	Pendap atan Transfer Antar Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/b ulan	3.627.613.865,00
5	03	01	2.02	000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										
						-	Jumlah Dokumen Penatausah aan dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	65.000.000,00	Pendap atan Transfer Antar Daerah		Jumlah Dokumen Penatausah aan dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD	12 Dokume n	75.000.000,00
5	03	01	2.02	000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD										
						-	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaa n Akuntansi SKPD	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaa n Akuntansi SKPD	24 Dokume n	10.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
													Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
						-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000,00
5	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
						-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19 Laporan	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8 Laporan	20.000.000,00
5	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada					15.000.000,00					15.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
													Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Perangkat Daerah										
5	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
						-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Laporan	15.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	15.000.000,00
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					90.000.000,00					50.000.000,00
5	03	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										
						-	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32 Dokumen	90.000.000,00	-		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	40 Dokumen	50.000.000,00
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				100%	120.000.000,00				100%	150.000.000,00
5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	25.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	35.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
													Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
						-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Paket	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0,00
5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
						-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	25.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	25.000.000,00
5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
						-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Paket	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0,00
5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
													Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Laporan	70.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	90.000.000,00
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					69.896.825,00					90.000.000,00
5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel										
						-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Unit	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	25.000.000,00
5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Unit	69.896.825,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	90.000.000,00
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					290.853.575,00					312.442.400,00
5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	12.937.175,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000 Laporan	5.500.000,00
5	03	01	2.08	000	Penyediaan Jasa										

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
													Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	112.638.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	130.000.000,00
5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
						-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	165.278.400,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	176.942.400,00
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					79.946.400,00					110.200.000,00
5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
													Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21 Unit	24.944.400,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	40.000.000,00
5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Unit	25.002.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	20.200.000,00
5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
						-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	50.000.000,00
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					1.810.000.000,00					1.862.600.000,00
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi					1.120.000.000,00				4853 Dokumen	790.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
													Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Kepegawaian ASN										
5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN										
						-	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	30.000.000,00
5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK										
						-	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	850.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	460.000.000,00
5	03	02	2.01	0005	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN										

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
													Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						-	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400 Dokumen	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	311 Dokumen	40.000.000,00
5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN										
						-	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Lembaga	155.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	165.000.000,00
5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian										
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	30.000.000,00
5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian										
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500 Dokumen	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 Dokumen	65.000.000,00
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN					300.000.000,00				2941 Dokumen	773.600.000,00
5	03	02	2.02	000	Pengelolaan Mutasi										

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
													Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1	ASN										
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500 Dokumen	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1400 Dokumen	206.000.000,00
5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN										
						-	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1500 Dokumen	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1500 Dokumen	216.000.000,00
5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN										
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	41 Dokumen	351.600.000,00
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN					50.000.000,00				80 Dokumen	25.000.000,00
5	03	02	2.03	0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN										

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
													Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						-	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	40Orang	25.000.000,00
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					340.000.000,00				6735 Dokumen	274.000.000,00
5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur										
						-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	110.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5411 Dokumen	109.000.000,00
5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai										
						-	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Orang	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	40 Orang	25.000.000,00
5	03	02	2.04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai										

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
													Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150 Orang	35.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50.000.000,00
5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN										
						-	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Orang	115.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	40 Orang	30.000.000,00
5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN										
						-	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	4 Laporan	60.000.000,00
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					910.000.000,00					6.296.085.000,00
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					910.000.000,00					6.296.085.000,00
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis					440.000.000,00				100 Orang	373.500.000,00
5	04	02	2.01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan										

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
													Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum										
						-	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	45.000.000,00
5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan										

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
													Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum										
						-	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 Orang	400.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	45 Orang	303.500.000,00
5	04	02	2.01	0003	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Admin istrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum										
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi umum		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi		25.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
													Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					470.000.000,00				320 Orang	5.922.585.000,00
5	04	02	2.02	0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota										
						-	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/ Kota	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Orang	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/ Kota	18 Orang	50.000.000,00
5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi										

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Lokasi Output Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
													Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan										
						-	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	420.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 Laporan	5.872.585.000,00
TOTAL										**7.078.335.221,00**					**12.713.941.265,00**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. RENCANA KERJA

Kedudukan Rencana Kerja adalah sebagai kerangka dasar dalam melaksanakan operasional tugas pokok dan fungsi organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan, dalam rangka pencapaian visi dan misi yang pada gilirannya akan dapat mewujudkan Aparatur yang Profesional. Pengeloaan Manajemen ASN yang tepat, efektif dan efisien akan menciptakan sumber daya aparatur yang tangguh, berkualitas dan berkarakter sesuai dengan tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Rencana Kerja merupakan instrument untuk menciptakan arah kebijakan yang ditetapkan disesuaikan dengan fungsi masing-masing.

Meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas masyarakat, swasta dan pemerintah dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dengan program kegiatan tahunan yang akan dibahas dalam serangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah secara berjenjang. Susunan program dan kegiatan serta pendanaan pada tahun 2025 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan bisa dilihat pada tabel 4.1

4.2 PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pendanaan Program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan merupakan cara penyusunan pendanaan perumusan prioritas serta penghitungan alokasi untuk masing-masing program. Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya.

Tabel 4.1

Program, Kegiatan dan Pendanaan BKPSDM Kab. Pacitan

Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang	SUMBER DANA	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
				RKPD 2025	APBD 2025	RENJA PERUBAHAN 2025			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		**7.078.335.221,00**	**6.950.135.221,00**	**6.548.963.177,00**	**-529.372.044,00**			**12.713.941.265,00**
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**		**7.078.335.221,00**	**6.950.135.221,00**	**6.548.963.177,00**	**-529.372.044,00**			**12.713.941.265,00**
	5.03	**KEPEGAWAIAN**		**6.168.335.221,00**	**6.040.135.221,00**	**5.631.369.507,00**	**-536.965.714,00**			**6.417.856.265,00**
1,	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	**4.358.335.221,00**	**4.455.135.221,00**	**4.374.476.725,00**	**196.921.044,00**			**4.555.256.265,00**
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	40.000.000,00	80.000.000,00	69.544.822,00	29.544.822,00			85.000.000,00
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000,00	60.000.000,00	54.654.120,00	34.654.120,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15.000.000,00

	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15.000.000,00
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15.000.000,00
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	14.890.702,00	-5.109.298,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		40.000.000,00

	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	3.652.638.421,00	3.609.438.421,00	3.537.075.958,00	-115.562.463,00			3.742.613.865,00
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.577.638.421,00	3.534.438.421,00	3.466.314.535,00	-111.323.886,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3.627.613.865,00
	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	65.000.000,00	65.000.000,00	62.171.727,00	-2.828.273,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		75.000.000,00
	5.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD								
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	8.589.696,00	-1.410.304,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10.000.000,00
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM		10.000.000,00

			Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					(DAU)		
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		20.000.000,00
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	15.000.000,00	12.500.000,00	10.581.728,00	-4.418.272,00			15.000.000,00
	5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000,00	12.500.000,00	10.581.728,00	-4.418.272,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15.000.000,00

	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	90.000.000,00	190.500.000,00	184.642.000,00	94.642.000,00			50.000.000,00
	5.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	90.000.000,00	190.500.000,00	184.642.000,00	94.642.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50.000.000,00
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	120.000.000,00	117.385.175,00	108.422.609,00	-11.577.391,00			150.000.000,00
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25.000.000,00	28.000.000,00	46.083.201,00	21.083.201,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		35.000.000,00
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25.000.000,00	25.000.000,00	24.977.768,00	-22.232,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25.000.000,00
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.000.000,00	64.385.175,00	37.361.640,00	-32.638.360,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)		90.000.000,00
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	69.896.825,00	69.896.825,00	90.198.836,00	20.302.011,00			90.000.000,00
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	69.896.825,00	69.896.825,00	90.198.836,00	20.302.011,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)		90.000.000,00
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	290.853.575,00	282.516.400,00	245.963.372,00	-44.890.203,00			312.442.400,00
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.937.175,00	12.000.000,00	10.098.212,00	-2.838.963,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5.500.000,00
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	112.638.000,00	111.238.000,00	97.586.760,00	-15.051.240,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		130.000.000,00
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	165.278.400,00	159.278.400,00	138.278.400,00	-27.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)		176.942.400,00
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	79.946.400,00	92.898.400,00	128.047.400,00	48.101.000,00			110.200.000,00
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24.944.400,00	37.896.400,00	46.894.400,00	21.950.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40.000.000,00
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25.002.000,00	25.002.000,00	35.982.000,00	10.980.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		20.200.000,00
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30.000.000,00	30.000.000,00	45.171.000,00	15.171.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50.000.000,00
2,	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Rasio Nilai aspek Evaluasi Kinerja ASN dari Indeks Sistem Merit Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Rasio Nilai Aspek Mutasi dan Promosi dari Indeks Sistem Merit**	**1.810.000.000,00**	**1.585.000.000,00**	**1.256.892.782,00**	**52.600.000,00**			**1.862.600.000,00**

			Rasio Nilai aspek Perencanan, Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian dari Indeks Sistem Merit							
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	1.120.000.000,00	720.000.000,00	460.377.201,00	-659.622.799,00			790.000.000,00
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN								
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	30.000.000,00	30.000.000,00	18.975.120,00	-11.024.880,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		30.000.000,00

	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK								
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	850.000.000,00	450.000.000,00	246.592.296,00	-603.407.704,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		460.000.000,00
	5.03.02.2.01.0005	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN								
			Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	30.000.000,00	30.000.000,00	19.768.238,00	-10.231.762,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		40.000.000,00
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN								
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	155.000.000,00	155.000.000,00	135.453.000,00	-19.547.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		165.000.000,00
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian								
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	40.000.000,00	40.000.000,00	29.838.000,00	-10.162.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		30.000.000,00
	5.03.02.2.01.001	Pengelolaan Data Kepegawaian								

	1									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	15.000.000,00	15.000.000,00	9.750.547,00	-5.249.453,00	DANA BAGI HASIL (DBH)		65.000.000,00
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	-	300.000.000,00	350.000.000,00	316.467.958,00	16.467.958,00			773.600.000,00
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN								
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	38.388.966,00	-11.611.034,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		206.000.000,00
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN								
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	50.000.000,00	50.000.000,00	39.113.288,00	-10.886.712,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		216.000.000,00
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN								

			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	200.000.000,00	250.000.000,00	238.965.704,00	38.965.704,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		351.600.000,00
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-	50.000.000,00	50.000.000,00	39.650.536,00	-10.349.464,00			25.000.000,00
	5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN								
			Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	50.000.000,00	50.000.000,00	39.650.536,00	-10.349.464,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		25.000.000,00
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	340.000.000,00	465.000.000,00	440.397.087,00	100.397.087,00			274.000.000,00
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur								
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	110.000.000,00	219.070.000,00	232.427.847,00	122.427.847,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		109.000.000,00
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai								

			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	40.000.000,00	36.775.000,00	31.259.692,00	-8.740.308,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		25.000.000,00
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai								
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	35.000.000,00	40.200.000,00	36.620.480,00	1.620.480,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50.000.000,00
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN								
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	115.000.000,00	128.955.000,00	112.761.352,00	-2.238.648,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		30.000.000,00
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN								
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	40.000.000,00	40.000.000,00	27.327.716,00	-12.672.284,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		60.000.000,00
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**		**910.000.000,00**	**910.000.000,00**	**917.593.670,00**	**7.593.670,00**			**6.296.085.000,00**
1,	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**	-	**910.000.000,00**	**910.000.000,00**	**917.593.670,00**	**5.386.085.000,00**			**6.296.085.000,00**

		MANUSIA								
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	-	440.000.000,00	440.000.000,00	132.748.400,00	-307.251.600,00			373.500.000,00
	5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum								
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	20.000.000,00	20.000.000,00	12.058.000,00	-7.942.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		45.000.000,00
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum								

			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	400.000.000,00	400.000.000,00	108.632.400,00	-291.367.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		303.500.000,00
	5.04.02.2.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum								
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	20.000.000,00	20.000.000,00	12.058.000,00	-7.942.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		25.000.000,00
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	470.000.000,00	470.000.000,00	784.845.270,00	314.845.270,00			5.922.585.000,00

	5.04.02.2.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota								
			Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	33.484.560,00	-16.515.440,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50.000.000,00
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan								
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	420.000.000,00	420.000.000,00	751.360.710,00	331.360.710,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5.872.585.000,00
	JUMLAH			**7.078.335.221,00**	**6.950.135.221,00**	**6.548.963.177,00**	**28.979.860.221,87**			**12.713.941.265,00**

BAB V
P E N U T U P

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) merupakan terjemahan dan operasional yang tercantum dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah yang berkontribusi untuk pencapaian tujuan Organisasi Perangkat Daerah. Rencana Kerja dibuat terkait dengan visi dan misi organisasi untuk memenuhi target kinerja dari program dan kegiatan Perangkat Daerah. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2025 ini juga merupakan salah satu bentuk perencanaan atas program kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam 1 (satu) tahun ke depan. Di samping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas aparatur dalam pelaksanaan disiplin dan loyalitas yang tinggi demi mengemban Visi dan Misi Organisasi untuk menuju Aparatur Pemerintah yang profesional, bersih dan berwibawa sebagai pelayan masyarakat yang terbaik.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PACITAN

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Drs. RUDY HARYANTO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196509101990031016

RENCANA KERJA
TAHUN 2025
PERUBAHAN

Disusun oleh :

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan amanat Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, dimana setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD) sesuai dengan tugas dan fungsi OPD tersebut.

Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan telah menyusun Rencana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun 2025 yang memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan dan strategi pembangunan Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2025 sebagai upaya memberikan informasi yang akuntabel dan terpercaya menyangkut program dan kegiatan untuk mencapai target dan sasaran pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan .

Dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini, seluruh bidang di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan dapat menyelenggarakan kegiatan secara lebih sistematis, konsisten, dan seimbang sehingga pencapaian kinerja Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun ini dapat dengan mudah diukur.

Pacitan, Juli 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
KABUPATEN PACITAN

MUNIIRUL ICHWAN,S.STP
Pembina Utama Muda
NIP. 197805281998101001

DAFTAR ISI KATA

PENGANTAR .....

DAFTAR TABEL .....

BAB I PENDAHULUAN .....

1.1 Latar Belakang .....

1.2 Landasan Hukum .....

1.3 Maksud dan Tujuan .....

1.4 Sistematika Penulisan .....

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN .....

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan .....

2.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....

2.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Pacitan .....

BAB III RENJA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....

BAB IV PENUTUP .....

DAFTAR TABEL

BAB II
Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan TW II Tahun Berkenaan .....
BAB III
Tabel 3.1 Renja Kerja dan Pendanaan Tahun Anggaran 2025 .....

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan amanat Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, dimana setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD) sesuai dengan tugas dan fungsi OPD tersebut.

Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa danPolitik Kabupaten Pacitantelah menyusun Rencana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun 2025 yang memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan dan strategi pembangunan Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2023 sebagai upaya memberikan informasi yang akuntabel dan terpercaya menyangkut program dan kegiatan untuk mencapai target dan sasaran pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan .

Dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini, seluruh bidangdilingkunganBadanKesatuanBangsadanPolitikKabupatenPacitan dapatmenyelenggarakankegiatansecaralebihsistematis,konsisten,dan seimbang sehingga pencapaian kinerja Rencana Kerja (Renja) yang telah disusunini dapat dengan mudah diukur.

Pacitan, Juli 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PACITAN

MUNIIRUL ICHWAN, S.STP
Pembina Utama Muda
NIP.197805281998101001

DAFTAR ISI KATA

PENGANTAR **1**

DAFTAR ISI **2**

BAB I PENDAHULUAN **3**

1.1 Latar Belakang 4

1.2 Landasan Hukum 4

1.3 Maksud dan Tujuan 11

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN **13**

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **31**

BAB IV PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan TW II Tahun berkenaan 13

Tabel 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Tahun Anggaran 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan adalah Dokumen perencanaan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten PacitanTahun 2025.

Penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu kepada kebutuhan dan permasalahan Kabupaten Pacitan sesuai dengan potensi sumber daya tersedia, dalam rangka mengakomodasikan pencapaian target dan sasaran yang tercantum didalam RKPD, serta dengan menjaga kesenambungan pembangunan.

Dalam upaya menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu adanya peningkatan pengembangan dan pelatihan pegawai, baik kualitas maupun kuantitas.

Untuk menunjang pencapaian kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempedomani kebijakan umum baik kebijakan strategik bidang Kesatuan Bangsa dan Politik maupun arah kebijakan umum Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan pada Tahun Anggaran Tahun 2025 mencakup :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
   c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
   d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
      - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
      - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      - Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
   f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
      - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
      - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
   a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
      - Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja diBidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
   a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.
      - Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang PendidikanPolitik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik diDaerah.
      - Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
      - Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi

Kemasyarakatan.

a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
   - Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan diBidang Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
   a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
      - Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan diBidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

6. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.
   a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.
      - Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan diBidang Kewaspadaan Dini,Kerja Sama Intelijen,Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
      - Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan diBidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan

Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diatas dikaitkan dengan indikasi dan dari anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan sehingga Pelaksanaan Program Kegiatan dan sub kegiatan dapat berjalan dengan lancar serta sesuai sasaran, target dan tujuan yang ingin di capai dalamTahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renja OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun 2025 adalah ;

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Pacitan disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara PemerintahPusatdanPemerintahDaerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5233);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4598);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008Nomor19,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,PengendaliandanEvaluasiPelaksanaanRencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
   Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2016Nomor 114);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2017);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara EvaluasiRancanganPeraturanDaerahtentangRencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
16. Peraturan Daerah Provinsi JawaTimur Nomor 3Tahun 2014tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014- 2019;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana PembangunanJangkaPanjang(RPJP)DaerahKabupatenPacitanTahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011); dan
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2016).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor. 4 Tahun 2016

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Bab. V Ketentuan Peralihan Pasal 10.

22. PeraturanBupatiPacitanNomor3Tahun2013tentangUraianTugas, FungsidanTataKerjaBadanKesatuanBangsadanPolitikKabupaten Pacitan.
23. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 214 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan bupati Nomor 155Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan.
24. Surat Edaran Penetapan P-RKPD Tahun 2025 Nomor 36 Tahun 2025, tanggal 23 Juni 2025.
25. Penetapan RKPD Tahun 2026 Nomor 40 Tahun 2025 tanggal 10 Juli Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun 2025 dimaksud sebagaimana pedoman bagi :

a. Mengefektifkan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan Program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik.
b. Memberikan arah atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan.

2. Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang terpantau serta mensinergikan Program Strategik, yang mengacu pada penyusunan Pembangunan Daerah sebagai tolak ukur penilaian pertanggung jawaban Bupati dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renja.

3. Sasaran

Sasaran Perubahan Renja adalah acuan dan pedoman penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I

PENDAH

ULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaa

BAB III RENJA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Bab ini terdiri dari dua pokok bahasan yaitu Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2025, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Evaluasi pelaksanaan RKPD Triwulan II tahun 2025 menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun 2025 dengan memperhatikan dokumen RPJMD. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan tentang pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan permasalahan pembangunan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan.

Evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD dibagi kedalam 4 urusan pemerintahan konkuren yaitu (i) urusan pemerintahan wajib pelayan dasar. (ii) urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar. (iii) urusan pemerintahan pilihan dan (iv) penunjang urusan.

Tabel Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Badan Kesatuan Bangsa danPolitik Kabupaten PacitanTahun 2025 sebagaimana Table 2.1 berikut :

EvaluasiTerhadapHasilRKPD
KABUPATEN PACITAN
Triwulan II Tahun2025

No	Kode	Urusan/BidangUrusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13=(12/7x100))		(14=(6+12))		(15=(14/5x100))		(16)
1	**801.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil nilai SAKIP perangkat daerah**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**76.00**	**3.335.600.959,00**	**18,00**	**741.471.168,00**	**12,00**	**890.860.471,00**	**0,00**	**110.334.710,00**	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**1.742.666.349,00**	**39,47**	**52,24**	**30,00**	**1.742.666.349,00**	**0**	**0**	**BadanKesatuanBangsadanPolitik**
	801.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah**		**0,00**	**0.00**	**0,00**	**23**	**138.237.172,00**	**3,00**	**0,00**	**2,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**50.000.000,00**	**21,74**	**36,17**	**5,00**	**50.000.000,00**	**0**	**0**	
	801.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renja, Renja Perubahan, Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja Perubahan, PPRG, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan, LKJIP, Evaluasi Renja tribulan 1, Evaluasi Renja tribulan 2, Evaluasi Renja		0,00	0.00	0,00	12.00	138.237.172,00	3,00	0,00	2,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	50.000.000,00	41,67	36,17	5,00	50.000.000,00	0	0	

			tribulan 3, Evaluasi Renja tribulan 4, Renaksi Pencapaian Kinerja,																									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0.00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0	0		
Rata-rata capaian kinerjaPer SubKegiatan(%)																					41,67	36,17						F
Predikatkinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah		1	1			
801.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah**			**0,00**	**0.00**	**0,00**	**59**	**2.319.744.459,00**	**12,00**	**579.291.679,00**	**8,00**	**650.602.064,00**	**0,00**	**110.334.710,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**1.340.228.453,00**	**33,90**	**57,77**	**20,00**	**1.340.228.453,00**	**0**	**0**	
801.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			0,00	0.00	0,00	14	2.319.744.459,00	4,00	579.291.679,00	2,00	650.602.064,00	0,00	110.334.710,00	0,00	0,00	6,00	1.340.228.453,00	42,86	57,77	6,00	1.340.228.453,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerjaPer SubKegiatan(%)																					42,86	57,77						F
Predikatkinerja(%)																					Sangat Rendah	Rendah		1	1			
801.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Prosentasepegawaiyangmendapatlayanan**			**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100**	**29.964.672,00**	**24,30**	**29.455.000,00**	**16,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,30**	**29.455.000,00**	**40,30**	**98,30**	**40,30**	**29.455.000,00**	**0**	**0**	
801.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pengadaan pakaian dinas pegawai			0,00	0.00	0,00	1	29.964.672,00	1,00	29.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	29.455.000,00	100,00	98,30	1,00	29.455.000,00	0	0	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0.00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0	0		
Rata-rata capaian kinerjaPer SubKegiatan(%)																					10	98,30						F

																			0,00							
																		Predikatkinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		1	1			
	801.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase Operasional Dasar PD yang terpenuhi**			**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100**	**414.909.838,00**	**24,30**	**45.863.900,00**	**16,00**	**110.436.176,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,30**	**156.300.076,00**	**40,30**	**37,67**	**40,30**	**156.300.076,00**	**0**	**0**	
	801.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pengadaan komponen listrik/ penerangan kantor			0,00	0.00	0,00	1	16.857.902,00	0,00	0,00	2,00	10.536.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	10.536.564,00	200,00	62,50	2,00	10.536.564,00	0	0	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0.00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0	0	
	801.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor			0,00	0.00	0,00	1	69.425.777,00	0,00	21.052.800,00	2,00	1.963.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	23.015.800,00	200,00	33,15	2,00	23.015.800,00	0	0	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0.00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0	0	
	801.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Tangga			0,00	0.00	0,00	1	35.925.561,00	0,00	1.330.000,00	1,00	18.947.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	20.277.621,00	100,00	56,44	1,00	20.277.621,00	0	0	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0.00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0	0	
	801.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pengadaan logistik Kantor			0,00	0.00	0,00	1	64.586.041,00	0,00	1.843.600,00	2,00	16.665.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	18.508.672,00	200,00	28,66	2,00	18.508.672,00	0	0	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0.00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0	0	
	801.01.2.06.0005	PenyediaanBarangCetakandanPenggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan			0,00	0.00	0,00	1	58.744.557,00	0,00	11.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600.000,00	0,00	19,75	0,00	11.600.000,00	0	0	

			dan penggandaan																								
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			0.00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0	0	
	801.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi PD			0,00	0.00	0,00	12	169.370.000,00	3,00	10.037.500,00	2,00	62.323.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	72.361.419,00	41,67	42,72	5,00	72.361.419,00	0	0	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0.00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0	0	
Rata-rata capaian kinerjaPer SubKegiatan(%)																					123,61	40,54					F
Predikatkinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Rendah		6	6		
801.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan**			**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100**	**54.999.168,00**	**24,30**	**10.500.000,00**	**16,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,30**	**10.500.000,00**	**40,30**	**19,09**	**40,30**	**10.500.000,00**	**0**	**0**	
801.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kantor			0,00	0.00	0,00	1	54.999.168,00	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	19,09	0,00	10.500.000,00	0	0	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0.00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0	0	
Rata-rata capaian kinerjaPer SubKegiatan(%)																					0,00	19,09					F
Predikatkinerja(%)																					Sangat Re	Sangat Rendah		1	1		

																										nd ah

No	Kode	Urusan/BidangUrusanPemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	IndikatorKinerja Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	TargetRPJMDpadaTahun2026(PeriodeRPJMD)		Realisasi Capaian KinerjaRPJMDs/dRKPDTahunLalu(2024)		Target Kinerja dan AnggaranRKPD Tahun berjalan yangdievaluasi(Tahun2025)yangDievaluasi		RealisasiKinerjaPadaTriwulan								Realisasi Capaian Kinerja danAnggaranRKPDyangDievaluasi(Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja danRealisasiAnggaranRKPDs/dTahun 2025 (%)		RealisasiKinerjadanAnggaranRPJMD s/d Tahun 2026 (AkhirTahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja danRealisasiAnggaranRPJMDs/dTahun 2026 (%)		Perangkat DaerahPenanggungjawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13=(12/7x100))		(14=(6+12))		(15=(14/5x100))		(16)
	801.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan**		**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100**	**292.620.700,00**	**24,30**	**62.043.539,00**	**16,00**	**58.634.731,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,30**	**120.678.270,00**	**40,30**	**41,24**	**40,30**	**120.678.270,00**	**0**	**0**	
	801.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat		0,00	0.00	0,00	12	4.096.200,00	3,00	800.000,00	2,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1.300.000,00	41,67	31,74	5,00	1.300.000,00	0	0	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0.00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0	0	
	801.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi dan listrik		0,00	0.00	0,00	12	68.494.000,00	3,00	12.643.539,00	2,00	11.309.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	23.953.270,00	41,67	34,97	5,00	23.953.270,00	0	0	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			0.00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0	0	
	801.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Aktifitas/ Operasional rutin yang dilaksanakan		0,00	0.00	0,00	12	220.030.500,00	0,00	48.600.000,00	2,00	46.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	95.425.000,00	16,67	43,37	2,00	95.425.000,00	0	0	

			Perangkat Daerah																								
			JumlahLaporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			0.00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0	0	
Rata-rata capaian kinerjaPer SubKegiatan(%)																				33,34	36,69					F
Predikatkinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah		3	3		
801.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik**			**0,00**	**0.00**	**0,00**	**80**	**85.124.950,00**	**18,70**	**14.317.050,00**	**12,00**	**21.187.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,70**	**35.504.550,00**	**38,38**	**41,71**	**30,70**	**35.504.550,00**	**0**	**0**	
801.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlahpembayaran pajak, pemeliharaan roda dua dan roda empat, serta jumlah perjalanan dinas dalam daerah			0,00	0.00	0,00	1	65.896.000,00	0,00	14.317.050,00	0,00	17.762.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.079.550,00	0,00	48,68	0,00	32.079.550,00	0	0	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0.00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0	0	
801.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor, bangunan gedung tempat kerja dan bangunan gedung kantor			0,00	0.00	0,00	1	19.228.950,00	0,00	0,00	0,00	3.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425.000,00	0,00	17,81	0,00	3.425.000,00	0	0	
		Jumlah Gedung				0.00		0		0,		0,		0,		0,		0,00		0,		0,		0	0	

			Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								0 0		0 0		0 0		0 0				0 0		0 0				
Rata-rata capaian kinerjaPer SubKegiatan(%)																					0,00	33,25					F
Predikatkinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah		2	2		
Rata-rata capaian kinerjaPer Kegiatan(%)																					36,46	47,42					
Predikatkinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah					
2	**801.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase Penduduk Usia Produktifyangmendapatkanpembinaanwawasan kebangsaan**		**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**15.10**	**545.000.000,00**	**3,30**	**14.330.000,00**	**2,00**	**89.277.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,30**	**103.607.500,00**	**35,10**	**19,01**	**5,30**	**103.607.500,00**	**0**	**0**	**BadanKesatuanBangsadan Politik**
	801.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**			**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100**	**545.000.000,00**	**18,40**	**14.330.000,00**	**16,40**	**89.277.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,80**	**103.607.500,00**	**34,80**	**19,01**	**34,80**	**103.607.500,00**	**0**	**0**	
	801.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal	Jumlah dokumen bidang ideologi wawasan kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			0,00	0.00	0,00	4	545.000.000,00	1,00	14.330.000,00	2,00	89.277.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	103.607.500,00	75,00	19,01	3,00	103.607.500,00	0	0	

		Ika dan Sejarah Kebangsaan																									
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun			0.00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0	0	
Rata-rata capaian kinerjaPer SubKegiatan(%)																				75,00	19,01					F	
Predikatkinerja(%)																				Sedang	Sangat Rendah		1	1			
Rata-rata capaian kinerjaPer Kegiatan(%)																				34,80	19,01						
Predikatkinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah						
3	**801.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase Pembinaan terhadap Partai Politik**		**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100**	**1.745.767.355,00**	**0,00**	**1.138.862.373,00**	**0,00**	**57.099.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.195.962.073,00**	**0,00**	**68,51**	**0,00**	**1.195.962.073,00**	**0**	**0**	**BadanKesatuanBangsadanPolitik**
	801.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika**	**Tersusunnya Kebijakan teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika**			**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100**	**1.745.767.355,00**	**0,00**	**1.138.862.373,00**	**0,00**	**57.099.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.195.962.073,00**	**0,00**	**68,51**	**0,00**	**1.195.962.073,00**	**0**	**0**	

		Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Peman	**Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelambagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pem**																								
	801.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di D	Jumlah dokumen bidang pendidikan politik, etika budaya politik, Peningkatan Demokrasi, Fasdilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah yang			0,00	0.00	0,00	4	1.745.767.355,00	1,00	1.138.862.373,00	0,00	57.099.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.195.962.073,00	25,00	68,51	1,00	1.195.962.073,00	0	0	
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala				0.00		0		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0	0	

			Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik																								
Rata-rata capaian kinerjaPer SubKegiatan(%)																					25,00	68,51					F

No	Kode	UrusanPemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	IndikatorKinerja Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	TargetRPJMDpadaTahun2026(PeriodeRPJMD)		Realisasi Capaian KinerjaRPJMDs/dRKPDTahunLalu(2024)		Target Kinerja dan AnggaranRKPD Tahun berjalan yangdievaluasi(Tahun2025)yangDievaluasi		RealisasiKinerjaPadaTriwulan								Realisasi Capaian Kinerja danAnggaranRKPDyangDievaluasi(Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja danRealisasiAnggaranRKPDs/dTahun 2025 (%)		RealisasiKinerjadanAnggaranRPJMD s/d Tahun 2026 (AkhirTahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja danRealisasiAnggaranRPJMDs/dTahun 2026 (%)		Penangkat DaerahPenanggungjawab
										I		II		III		IV											
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13=(12/7x100))		(14=(6+12))		(15=(14/5x100))		(16)
Predikatkinerja(%)																				Sangat Rendah	Sedang		1	1			
Rata-rata capaian kinerjaPer Kegiatan(%)																				0,00	68,51						
Predikatkinerja(%)																				Sangat Rendah	Sedang						
4	**801.04**	**PROGRAMPEMBERDAYAANDANPENGAWASANORGANISASIKEMASYARAKATAN**	**Persentase pembinaan terhadap Ormas**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100**	**115.000.000,00**	**0,00**	**2.360.000,00**	**0,00**	**90.024.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.384.000,00**	**0,00**	**80,33**	**0,00**	**92.384.000,00**	**0**	**0**	**BadanKesatuanBangsadanPolitik**
	801.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang**	**Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan**		**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100**	**115.000.000,00**	**0,00**	**2.360.000,00**	**0,00**	**90.024.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.384.000,00**	**0,00**	**80,33**	**0,00**	**92.384.000,00**	**0**	**0**	

		Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	**dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**																								
	801.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah data Ormas yang dimutakhirkan dan fasilitasi bantuan Ormas		0,00	0.00	0,00	1	115.000.000,00	0,24	2.360.000,00	0,00	90.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	92.384.000,00	24,00	80,33	0,24	92.384.000,00	0	0	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			0.00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0	0	
Rata-rata capaian kinerjaPer SubKegiatan(%)																				24,00	80,33						F
Predikatkinerja(%)																				Sangat Rendah	Tinggi		1	1			
Rata-rata capaian kinerjaPer Kegiatan(%)																				0,00	80,33						
Predikatkinerja(%)																				Sangat Re	Tinggi						

																				nd ah						
5	**801.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**ProsentasePembinaanbidangsosialdanbudaya**		**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100**	**100.000.000,00**	**16,70**	**1.710.000,00**	**16,40**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,10**	**7.710.000,00**	**33,10**	**7,71**	**33,10**	**7.710.000,00**	**0**	**0**	**BadanKesatuanBangsadanPolitik**
	801.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Tersusunnya kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya**			**0,00**	**0.00**	**0,00**	**12.00**	**100.000.000,00**	**2,00**	**1.710.000,00**	**2,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**7.710.000,00**	**33,33**	**7,71**	**4,00**	**7.710.000,00**	**0**	**0**	
	801.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan diBidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosbud dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah akan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Peny			0,00	0.00	0,00	3	100.000.000,00	0,00	1.710.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.710.000,00	0,00	7,71	0,00	7.710.000,00	0	0	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan				0.00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0	0	

			Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																								
Rata-rata capaian kinerjaPer SubKegiatan(%)																					0,00	7,71					F
Predikatkinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah		1	1		
Rata-rata capaian kinerjaPer Kegiatan(%)																					33,33	7,71					
Predikatkinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah					
6	**801.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentasepotensikonflikyangditangani**		**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100**	**2.397.680.000,00**	**24,00**	**1.176.632.000,00**	**16,00**	**85.150.000,00**	**0,00**	**6.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40,00**	**1.268.382.000,00**	**40,00**	**52,90**	**40,00**	**1.268.382.000,00**	**0**	**0**	**BadanKesatuanBangsadanPolitik**
	801.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**			**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100**	**2.397.680.000,00**	**0,00**	**1.176.632.000,00**	**0,00**	**85.150.000,00**	**0,00**	**6.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.268.382.000,00**	**0,00**	**52,90**	**0,00**	**1.268.382.000,00**	**0**	**0**	
	801.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Orang Asing dan			0,00	0.00	0,00	7	1.397.680.000,00	1,00	1.055.080.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1.055.080.000,00	28,57	75,49	2,00	1.055.080.000,00	0	0	

		Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Lembaga Kerja Asing, Kewaspadaan Terbatas antar negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																								
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,serta Pe			0.00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0	0	
	801.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rakor Forkopimda yang dilaksanakan			0,00	0.00	0,00	6	1.000.000.000,00	1,00	121.552.000,00	0,00	85.150.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00	1,00	213.302.000,00	16,67	21,33	1,00	213.302.000,00	0	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				0.00		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0	0	
Rata-rata capaian kinerjaPer SubKegiatan(%)																					22,62	48,41					F
Predikatkinerja(%)																					Sangat	Sangat Rendah		2	2		

	Rendah							
Rata-rata capaian kinerjaPer Kegiatan(%)	0,00	52,90						
Predikatkinerja(%)	Sangat Rendah	Rendah						
Rata-rata capaian kinerjaPer Program(%)	24,61	46,78						
Predikatkinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah						

No	Kode	Urusan/BidangUrusanPemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	IndikatorKinerja Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	TargetRPJMDpadaTahun2026(PeriodeRPJMD)		Realisasi Capaian KinerjaRPJMDs/dRKPDTahunLalu(2024)		Target Kinerja dan AnggaranRKPD Tahun berjalan yangdievaluasi(Tahun2025)yangDievaluasi		RealisasiKinerjaPadaTriwulan								Realisasi Capaian Kinerja danAnggaranRKPDyangDievaluasi(Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja danRealisasiAnggaranRKPDs/dTahun 2025 (%)		RealisasiKinerjadanAnggaranRPJMD s/d Tahun 2026 (AkhirTahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja danRealisasiAnggaranRPJMDs/dTahun 2026 (%)		Perangkat DaerahPenanggungjawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13=(12/7x100))		(14=(6+12))		(15=(14/5x100))		(16)
Total																				8.239.048.314,00		4.410.711.922,00				
PersentaseRealisasiAnggaran																				53.53%						
Predikat																				Rendah						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : 1.Tersedianya perundang-undangan Perbup tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Narkoba, dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. 2. Terlaksananya sinergitas baik secara vertikal/horizontal. 3. Terlaksananya dukungan Perangkat Daerah 4.Tersedianya SOP dan SPP . 5. Terbangunnya koordinasi yang baik diantara stakeholder terkait penanganan kerawanan sosial

Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1. Sumber daya manusia sebagai pelaksana pencapaian kinerja, masih perlu peningkatan kualitas, kuantitas dan ketrampilan. 2. Peralatan Administrasi dan sarana mobilitas untuk kecepatan dan ketepatan sesuai situasi yang diperlukan. 3. Dana untuk pelaksananaan program, kegiatan belum proporsional. 4. Berbagai kalangan kurang memahami pentingnya eksistensi Bakesbangpol dari sisi pembangunan kesatuan bangsa,integrasi bangsa dan pembangunan program yang disetujui

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: 1. Terlaksananya penyiapan pendidikan ke Intelijenan ditingkat Kabupaten. 2. Terlaksananya giat deteksi dini dan cegah dini untuk permasalahan kewaspadaan nasional. 3. Terlaksananya persamaan persepsi/pemahaman pelaksanaan tentang kewaspadaan. 4. Terlaksananya penanggulangan dan pencegahan dini masalah keagamaan, sosial dan budaya.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : 1. Ketersediaan dan untuk pelaksanaan penyiapan intelijen sampai Desa. 2. Ketersediaan kegiatan untuk Forum keagamaan dan Forum Pembauran Kebangsaan dalam upaya cegah dini konflik. 3. Keterlaksananya membumikan pemahaman bela negara. 4. Keterlaksananya pendidikan politik dan partisipasi politik masyarakat.

Pacitan, Juni 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PACITAN

MUNIIRUL ICHWAN, S.STP
Pembina Tk.I
NIP. 197805281998101001

Berdasarkan Table Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja diatas bahwa capaian SubKegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, dapat diketahui bahwa :

1. Realisasi Sub Kegiatan sudah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitansampai dengan triwulan II tahun berkenaan.
2. Realisasi Sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan padaBadan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan sampai dengan triwulan II tahun berkenaan yaitu Dokumen Perencanaan, Dokumen Keuangan, Operasional PD yang terpenuhi, ketersediaan Sarpras, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, kegiatan bidang ideologi wawasan kebangsaan, Bela Negara,Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, Kagiatan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, Kegiatan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, dan Kegiatan Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Orang Asing dan Lembaga Kerja Asing, Kewaspadaan Terbatas antar negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,serta Penanganan Konflik di Daerah sudah memnuhi target yang di rencanakan.
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik KabupatenPacitan, yaitu:
   a) Ketersediaan dana yang ada diutamakan kepada kegiatan yang bersifat lebih mendesak.
   b) Ketersediaan dana tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan
   c) Ketersediaananggaran baru ada di perubahan RKPD.
   d) Perubahan/Penyesuaian Sistem Belanja
   e) Perubahan/Pergeseran Anggaran Belanja Kegiatan

BAB III

RENJA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan.

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Pacitan berasal hasil rumusan dari berbagai forum pembahasan di Kabupaten Pacitan.

Rencana Kerja dan Pendanaan pada RKPD disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

TABEL3.1
RENJA KERJA DAN PENDANAAN OPD
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan/ Program / Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD (2026)	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	CapaianKinerjaDanKerangkaPendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif(Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	PaguIndikatif(Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							7.517.248.314	8.239.048.314	8.584.913.846								
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							7.517.248.314	8.239.048.314,00	8.584.913.846,00							4.664.103.104,00	
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							7.517.248.314	8.239.048.314	8.584.913.846							4.664.103.104,00	
1	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Hasil Nilai SAKIP PD	76,91	0,00	76,31	76,31	76,31	3.463.800.959,00	3.335.600.959,00	3.316.335.511,00							2.695.103.104,00	

	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran ,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja PD	23 Dokumen	23	23	23	23	157.935.478,00	138.237.172,00	233.046.706,00			-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik	-		17.955.000,00	BADANKESATUANBANGSADANPOLITIK
	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23 Dokumen	23	23	23	23	157.935.478,00	138.237.172,00	233.046.706,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	- PendapatanTransfer PemerintahPusat - Dana AlokasiUmum(DAU)	-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik			17.955.000,00	BADANKESATUANBANGSADANPOLITIK
	8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	0,00	12	1	1	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana TransferUmum - Dana Bagi Hasil		Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik			-	
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah DokumenLaporanKeuangan PD	59 dokumen	59	59	-	-	2.362.944.459,00	2.319.744.459,00	2.335.124.564,00			-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik	-		2.031.751.444,00	BADANKESATUANBANGSADANPOLITIK
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	14	14	14	14	2.362.944.459,00	2.319.744.459,00	2.335.124.564,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, SemuaKel/Desa	PENDAPATANASLIDAERAH(PAD)	-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik			2.031.751.444,00	BADANKESATUANBANGSADANPOLITIK

	8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Pegawai yang mendapat Layanan	100	100	100	100	100	29.964.672,00	29.964.672,00	29.964.672,00							22.810.500,00	
	8	01	01	2.05	0002	PengadaanPakaianDinas besertaAtributKelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1Paket	1	1	1	1	29.964.672,00	29.964.672,00	29.964.672,00	Kab. Pacitan,SemuaKecamatan, SemuaKel/Desa	Dana TransferUmum - Dana Bagi Hasil	-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik			22.810.500,00	BADANKESATUANBANGSADANPOLITIK
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Operasional Dasar PD yang terpenuhi	100%	100	100	100	100	490.717.904,00	414.909.838,00	280.598.965,00			-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik	-		234.765.660,00	BADANKESATUANBANGSADANPOLITIK
	8	01	01	2.06	0001	PenyediaanKomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunanKantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1Paket	1	1	1	1	9.778.212,00	16.857.902,00	16.857.902,00	SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan, SemuaKel/Desa	Dana TransferUmum - Dana Bagi Hasil	-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik			10.663.500,00	BADANKESATUANBANGSADANPOLITIK

	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan	1Paket	1	1	1	1	0,00	69.425.777,00	59.796.651,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, SemuaKel/Desa	Dana TransferUmum - Dana Bagi Hasil	-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik			33.805.820,00	BADANKESATUANBANGSADANPOLITIK
	8	01	01	2.06	0003	PenyediaanPeralatanRumahTangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1Paket	1	1	1	1	16.413.237,00	35.925.561,00	35.925.561,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana TransferUmum - Dana Bagi Hasil	-	-			16.414.490,00	BADANKESATUANBANGSADANPOLITIK
	8	01	01	2.06	0004	PenyediaanBahanLogistikKantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1Paket	1	1	1	1	76.884.841,00	64.586.041,00	39.598.234,00	Kab. Pacitan,SemuaKecamatan, Semua Kel/Desa	Dana TransferUmum - Dana Bagi Hasil	-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik			35.090.350,00	BADANKESATUANBANGSADANPOLITIK
	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1Paket	1	1	1	1	79.850.402,00	58.744.557,00	46.835.617,00	Kab. Pacitan,SemuaKecamatan, SemuaKel/ Desa	Dana TransferUmum - Dana Bagi Hasil	-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik			29.221.500,00	BADANKESATUANBANGSADANPOLITIK
	8	01	01	2.06	0009	PenyelenggaraanRapatKoordinasidanKonsultasiSKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12	12	12	12	221.040.000,00	169.370.000,00	81.585.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, SemuaKel/ Desa	Dana TransferUmum - Dana Bagi Hasil	-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik			109.570.000,00	BADANKESATUANBANGSADANPOLITIK
	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	100				44.492.796,00	54.999.168,00	53.765.514,00			-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik	-			BADANKESATUANBANGSADANPOLITIK
	8	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana danPrasarana Gedung Kantor atau		1	1	2 Unit	2 Unit	44.492.796,00	54.999.168,00	53.765.514,00	Kab. Pacitan,SemuaKecamatan, Semu	Dana TransferUmum-Dana	-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik				BADANKESATUANBANGSA

							Bangunan Lainnya yang Disediakan									aKel/ Desa	Bagi Hasil						DAN POLITIK
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	100%	100	100			292.620.700,00	292.620.700,00	292.620.700,00			-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik	-		268.914.500,00	BADANKESATUANBANGSADANPOLITIK
	8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12	12	12	12	4.096.200,00	4.096.200,00	4.096.200,00	Kab. Pacitan,SemuaKecamatan, SemuaKel/ Desa	PENDAPATANASLIDAERAH(PAD) Dana TransferUmum - Dana Bagi Hasil	-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik			3.100.000,00	BADANKESATUANBANGSADANPOLITIK
	8	01	01	2.08	0002	PenyediaanJasaKomunikasi,SumberDayaAirdanListrik																	

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12	12	12	12	68.494.000,00	68.494.000,00	68.494.000,00	Kab. Pacitan,SemuaKecamatan, SemuaKel/Desa	Dana TransferUmum - Dana Bagi Hasil	-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik			53.704.000,00	BADANKESATUANBANGSADANPOLITIK
	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Aktifitas/ Operasional rutin yang dilaksanakan PD	12 Laporan	12	12	12	12	220.030.500,00	220.030.500,00	220.030.500,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, SemuaKel/Desa	Dana TransferUmum - Dana Bagi Hasil	-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik			212.110.500	BADANKESATUANBANGSADANPOLITIK
	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	80%	80	80	80	80	85.124.950,00	85.124.950,00	91.214.390,00			-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik	-		119.906.000,00	BADANKESATUANBANGSADANPOLITIK
	8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Pembayaran Pajak dan Pemeliharaan Roda Dua dan	12 Bulan	12	12	12	12	65.896.000,00	65.896.000,00	71.985.440,00	Kab. Pacitan,Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum- Dan	-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik			65.896.000,00	BADANKESATUANBAN

							RodaEmpat									SemuaKel/Desa	aBagiHasil							GSADANPOLITIK
	8	01	01	2.09	0009	PemeliharaanRehabilitasiGedungKantordanBangunanLainnya																		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1Unit	1	1	1	1	19.228.950,00	19.228.950,00	19.228.950,00	Kab. Pacitan,SemuaKecamatan, SemuaKel/Desa	Dana TransferUmum - Dana Bagi Hasil	-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik			54.010.000,00	BADANKESATUANBANGSADANPOLITIK
37	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase Penduduk Usia Produktif yang mendapatkan Pembinaan Wawasankebangsaan	17,29%	15,10	15,83	15,83	15,83	395.000.000,00	545.000.000,00	1.243.230.400,00							1.003.000.000,00	
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan PelaksanaanBidangIdeologiPancasila dan Karakter	Tesusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasiladan KarakterKebangsaan	100%	100	100	100	100	395.000.000,00	545.000.000,00	1.243.230.400,00			-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik	-		1.003.000.000,00	BADANKESATUANBANGSADANPOLITIK

						Kebangsaan																	
	8	01	02	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang IdeologiWawasanKebangsaan, Bela Negara, KarakterBangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	4 Dokumen	4	4	4	4	395.000.000,00	545.000.000,00	1.243.230.400,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, SemuaKel/Desa	Dana TransferUmum - Dana Bagi Hasil	-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik			1.003.000.000,00	BADANKESATUANBANGSADANPOLITIK
38	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKANMELALUIPENDI	Prosentase Pembinaan terhadap Partai Politik	100%	100	100			1.145.767.355,00	1.745.767.355,00	1.732.578.505,00							100.000.000,00	

						DIKANPOLITIK DANPENGEMBANGAN ETIKASERTABUDAYAPOLITIK																	
	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknisdan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi KelembagaanPemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum	Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, FaslitisaiKelembagaan pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, pemilihan Umum/PemilihanUmum Kepala Daerah, serta pemantauan situasiPolitik.	100%	100	100	100	100	1.145.767.355,00	1.745.767.355,00	1.732.578.505,00			-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik	-		100.000.000,00	BADANKESATUANBANGSADANPOLITIK

						Kepala Daerah ,serta Pemantauan Situasi Politik																	
	8	01	03	2.01	0001	PenyusunanProgram Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																	
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, FasilitasiKelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/PemilihanUmum Kepala Daerah,	4 Dokumen	4	4	4	4	1.145.767.355,00	1.745.767.355,00	1.732.578.505,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, SemuaKel/Desa	PENDAPATANASLIDAERAH(PAD)	-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik			35.275.500,00	BADANKESATUANBANGSADANPOLITIK

							Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun																	
	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum KepalaDaerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
							Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan diBidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, FasilitasiKelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai	240 Orang	240	240	240	240	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan,SemuaKecamatan, SemuaKel/Desa	PENDAPATANASLIDAERAH(PAD) Dana TransferUmum - Dana Bagi Hasil	-	Percepatan penerapanteknologi informasidalam pelayananpublik			64.724.500,00	BADANKESATUANBANGSADANPOLITIK

							Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik diDaerah																
	8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, FasilitasiKelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	5 Dokumen	5	5	5	5	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan,SemuaKecamatan, SemuaKel/Desa	Dana TransferUmum - Dana Bagi Hasil	-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik				BADANKESATUANBANGSADANPOLITIK

							Umum Kepala Daerah, serta Pemantau an Situasi Politik diDaerah																	
39	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase Pembinaan terhadapOrmas	100%	100	100	100	100	165.000.000,00	115.000.000,00	104.605.370,00								25.000.000,00	
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknisdan Pemantapan PelaksanaanBidangPemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Orgasnisasi Kemasyarakatan	100%	100	100	100	100	165.000.000,00	115.000.000,00	104.605.370,00			-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik	-		25.000.000,00	BADANKESATUANBANGSADANPOLITIK

	8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan diBidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	1	1	1	1	165.000.000,00	115.000.000,00	104.605.370,00	Kab. Pacitan,SemuaKecamatan, SemuaKel/Desa	PENDAPATANASLIDAERAH(PAD)DanaTransferUmum-DanaBagiHasil	-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik			25.000.000,00	BADANKESATUANBANGSADANPOLITIK
40	8	01	05			PROGRAM PEMBINAANDAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Prosentase Pembinaan Bidang Sosial dan Budaya	100%	100	100	100	100	100.000.000,00	100.000.000,00	61.737.520,00							20.000.000,00	

	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknisdan Pemantapan PelaksanaanBidangKetahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1 Tahun	1	1	1	1	100.000.000,00	100.000.000,00	61.737.520,00			-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik	-		20.000.000,00	BADANKESATUANBANGSADANPOLITIK
	8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama danPenghayat Kepercayaan di Daerah																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, FasilitasiKerukunan Umat Beragama dan Penghayat	455 orang	455 orang	455 orang	455 orang	455 orang	100.000.000,00	100.000.000,00	61.737.520,00	Kab. Pacitan,SemuaKecamatan, SemuaKel/Desa	Dana TransferUmum - Dana Bagi Hasil	-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik			20.000.000,00	BADANKESATUANBANGSADANPOLITIK

							Kepercaya an diDaerah																	
4 1	8	0 1	0 6			PROGR AM PENING KATAN KEWAS PADAA N NASION AL DAN PENING KATAN KUALIT AS DAN FASILIT ASI PENAN GANAN KONFLI K SOSIA L	Prosentase Potensi Konflik yang ditangani	100%	100	100	10 0	10 0	2.247. 680.0 00,00	2.397. 680.0 00,00	2.126. 426.5 40,00							820.00 0.000. 00	

	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknisdan Pelaksanaan Pemantapan KewaspadaanNasional dan Penanganan Konflik Sosial	Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan KonflikSosial	100%	100	100	100	100	2.247.680.000,00	2.397.680.000,00	2.126.426.540,00			-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik	-		820.000.000,00	BADANKESATUANBANGSADANPOLITIK
	8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan LembagaAsing, Kewaspadaan Perbatasanantar Negara, Fasilitasi	647 orang	647 orang	647 orang	647 orang	647 orang	1.247.680.000,00	1.397.680.000,00	1.420.180.000,00	Kab. Pacitan,SemuaKecamatan, SemuaKel/Desa	PENDAPATANASLIDAERAH(PAD) Dana TransferUmum - Dana Bagi Hasil	-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik			320.000.000,00	BADANKESATUANBANGSADANPOLITIK

							Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																	
	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Rakor Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kotayang dilaksanakan	6Kali	6	6	6	6	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	706.246.540,00	Kab. Pacitan,SemuaKecamatan, SemuaKel/Desa	PENDAPATANASLIDAERAH(PAD) Dana TransferUmum - Dana Bagi Hasil	-	Percepatan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik			500.000.000,00	BADANKESATUANBANGSADANPOLITIK
	JUMLAH												7.517.248.314,00	8.239.048.314,00	8.584.913.846,00							**4.664.103.104,00**	

BAB IV
PENUTUP

Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

A. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten PacitanTahun 2025 antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pacitan;
2. Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan ini berpedoman pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
3. Penyusunan Renja Perubahan untuk pencapaian dan penyesuaian Target yang telah ditetapkan.

B. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

1. Renja ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan KUPA /PPAS dan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun 2025;
2. Dalam Perubahan berdasarkan pembahasan bersama DPRD Kabupaten Pacitan pada tahapan KUPA/PPAS;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan laksanakan Tahun 2025.

C. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan pengendalian dan hasil dokumen Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun 2025 untuk setiap triwulannya;
2. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif stakeholder di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan.
3. Dengan disusunnya Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan pada Tahun Anggaran 2025.

Pacitan, Juli 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PACITAN

MUNIIRUL ICHWAN,S.STP
Pembina Utama Muda
NIP. 197805281998101001

2025

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PACITAN

RENJA
RENCANA KERJA PERUBAHAN

JL. Jaksa Agung Suprapto No. 08 Pacitan
Website : satpolpp.pacitankab.go.id
E-mail ; satpolpp.pacitankab@gmail.com
Telp. (0357) 882113,881130

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas izin dan perkenanNya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan Tahun 2025 telah dapat diselesaikan.

Penyusunan RENJA Perubahan ini merupakan hasil kerja Tim Penyusun, yang dilaksanakan secara bersama-sama, untuk mendapatkan hasil rumusan rencana yang optimal sesuai dengan bidang tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan.

RENJA Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan kinerja Perangkat Daerah tahunan yang memberikan gambaran mengenai kebijakan dan kegiatan prioritas yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang dilakukan secara terintegrasi, terkoordinasi dan terpadu, dan bertujuan untuk meningkatkan efesiensi, efektivitas program serta melakukan perubahan kearah perbaikan dengan tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan Tahun 2025 disusun sebagai bahan pedoman dan arah pembangunan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Pacitan secara signifikan.

Pacitan, 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PACITAN

ARDYAN WAHYUDI, S.STP., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 198112162000121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 LANDASAN HUKUM..... 6
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 12
1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN ……. 13
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU … 14
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD 15
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD 20
2.3 ANALISI PELAYANAN PD 21
2.4 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAN TUGAS DAN FUNGSI PD 24
2.5 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 2025 …….. 26
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH …… 34
3.1 TUJUAN DAN SASARAN 34
3.2 TARGET SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN TAHUN 2025… 35
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 36
BAB V PENUTUP 42

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan konsep pembangunan di Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat yang efektif dan efisien, terdapat berbagai tantangan, peluang dan kendala antara lain berupa perubahan lingkungan strategis yang dinamis seperti globalisasi yang ditandai adanya krisis keuangan global sebagai akibat berlakunya ekonomi pasar, kebijakan otonomi daerah, perubahan kondisi sosial, politik yang mengarah kepada demokratisasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengarah kepada peningkatan skala usaha dan efisiensi dalam segala bidang usaha, semakin meningkatnya kepedulian masyarakat kepada kelestarian lingkungan hidup, serta adanya keterbatasan sumber daya alam seperti energi, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui, sehingga untuk mengantisipasi kondisi tersebut, konsep pembangunan bidang urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat perlu terus ditata dan disempurnakan dengan didukung sumber daya yang handal sehingga terwujud lingkungan yang aman, tertib dan tentram.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan salah satu dasar dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah yang menjadi pedoman

kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan untuk program kerja tahunan disusun suatu rencana kerja (RENJA) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, bahwa Kepala SKPD berperan dan bertanggung jawab untuk menyiapkan rencana kerja SKPD serta keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah dengan memenuhi prinsip-prinsip teknokratis (strategis), demokratis, dan partisipatif politis, perencanaan bottom up serta perencanaan top down.

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dikemukakan bahwa Rencana Kerja SKPD sebagai penjabaran Rencana Strategis SKPD merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENJA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berisikan program dan kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA Perangkat Daerah yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan Rencana Kerja adalah wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.akan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan Tahun 2025 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026, yang tentunya

mendukung Visi dan Misi Bupati Pacitan Periode 2021-2026, sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Adapun tahapan penyusunan RENJA adalah sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan renja, meliputi :
    - Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RENJA Perangkat Daerah;
    - Orientasi mengenai RENJA Perangkat Daerah;
    - Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun RENJA Perangkat Daerah;
    - Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan rancangan awal (Ranwal) RENJA Perangkat Daerah ;
    - Perangkat Daerah menyusun rancangan awal RENJA paling lambat minggu pertama bulan Desember. Penyusunan rancangan awal RENJA berpedoman pada Rencana Strategis. Hal ini untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal RENJA dengan RENSTRA Perangkat Daerah.
    - Penyusunan rancangan awal RENJA juga berpedoman pada hasil evaluasi hasil RENJA tahun lalu dan hasil evaluasi hasil RENJA tahun berjalan. Hal ini untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal RENJA dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran RENSTRA. Penyusunan rancangan awal RENJA Perangkat Daerah

mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi RENJA tahun lalu.

- Penyempurnaan rancangan awal RENJA mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada ranwal RKPD.

3. Penyusunan Rancangan Awal RENJA;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir RENJA Perangkat Daerah;
6. Penetapan RENJA Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah menjadi pedoman PD dalam menyusun RKA Perangkat Daerah yang menjadi muara dari dokumen perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya RKA Perangkat Daerah menjadi dasar ditetapkannya dokumen pelaksanaan anggaran yaitu DPA Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
22. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
33. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 140 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan;
34. Peraturan Bupati Nomor 140 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 141) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 199 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 140 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 200) dan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 140 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 70)

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud :

Maksud penyusunan RENJA Perubahan SATPOL PP Kabupaten Pacitan Tahun 2025 adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SATPOL PP Kabupaten Pacitan Tahun 2025

.

B. Tujuan :

Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun;
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 tahun;
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannnya;
4. Memberi arah dan kesamaan pandangan, sikap dan komitmen antara pemimpin dan staf, agar melaksanakan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab;
5. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang;

1.4 Sistematika Penyusunan

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan Tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, Landasan Hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan capaian Renstra PD Tahun berjalan, analisis kinerja pelayanan PD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD serta review terhadap rancangan awal PD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran PD, program dan kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan Rumusan Program dan Kegiatan PD Tahun 2025 dan Prakiraan maju Tahun 2026

Bab V Penutup

Berisikan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah–kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanju

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan capaian Renja.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) dan pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENTRA PD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan sampai dengan Tahun 2025 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PACITAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB.PACITAN

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3 2019)	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja SKPD (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%) 2020		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**									
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil Nilai Survey Kepuasan Masyarakat**	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Hasil Nilai SAKIP PD**	>B	>B	>B	>B	>B	>B	>B	>B
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	24 dok	24 dok	24 dok	24 dok	24 dok	24 dok	24 dok	24 dok
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**									
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji, tunjangan ASN, TPP	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	59 dok	59 dok	59 dok	59 dok	59 dok	59 dok	59 dok	59 dok
1.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		100 stel	100 stel	100 stel	100 stel	100 stel	100 stel	100 stel	100 stel

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3 2019)	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja SKPD (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%) 2020		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang Diadakan	100 stel	100 stel	100 stel	100 stel	100 stel	100 stel	100 stel	100 stel
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan dan komponen jaringan listrik yang diadakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan komponen jaringan listrik yang disediakan	40 jenis	40 jenis	40 jenis	40 jenis	40 jenis	40 jenis	40 jenis	40 jenis
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan minum harian pegawai dan makan minum rapat	720 orang/kali	720 orang/kali	720 orang/kali	720 orang/kali	720 orang/kali	720 orang/kali	720 orang/kali	720 orang/kali
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi	60 kali	60 kali	60 kali	60 kali	60 kali	60 kali	60 kali	60 kali
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Telepon, Listrik dan Internet	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang siap pakai	31 unit	31 unit	31 unit	31 unit	31 unit	31 unit	31 unit	31 unit

1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3 2019)	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja SKPD (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%) 2020		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.02.2	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Gangguan ketentraman dan ketertiban terselesaikan**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perdadan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan PerlindunganMasyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3 2019)	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja SKPD (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%) 2020		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
1.05.02.2.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Jumlah PPNS yang dibina**	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang
1.05.02.2.02.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan

1.05.04.2	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	Persentase Warga Negara yang memperoleh pelyanan pemadam kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	48 kali	48 kali	48 kali	48 kali	48 kali	48 kali	48 kali	48 kali

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3 2019)	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja SKPD (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%) 2020		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan pemadaman kebakaranb	31 dokumen	31 dokumen	31 dokumen	31 dokumen	31 dokumen	31 dokumen	31 dokumen	31 dokumen
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	18 dokumen	18 dokumen	18 dokumen	18 dokumen	18 dokumen	18 dokumen	18 dokumen	18 dokumen
1.05.04.2.02	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**		6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	**Jumlah sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang terdata**	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit
1.05.04.2.04	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**Jumlah Relawan kebakaran yang diberdayakan**	36 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaranmelalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	400 orang	200 orang	400 orang	400 orang	400 orang	400 orang	400 orang	400 orang

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan menghitung persentase realisasi dibandingkan dengan target. Adapun capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

NO	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi	Capaian
1	**2**	**4**	**5**	**6**
1	Angka kriminalitas yang tertangani	1,43	1,5	Tercapai
2	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kab/kota	0,001	0,001	Tercapai
3	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	1,06	1,66	Tercapai
4	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	0,93	2,15	Tercapai
5	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	11,35	11,35	Tercapai
6	Persentase Penegakan PERDA	99	99	Tercapai
7	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	97	97	Tercapai

8	Persentase Petugas LINMAS terlatih	100	100	Tercapai
9	Persentase jumlah pembinaan, pengawasan dan penyelesaian pelanggaran PERDA dan PERKADA	97	97	Tercapai
10	Jumlah patroli petugas Satpol PP dalam 24 jam (kali)	2	2	Tercapai
11	Angka kriminalitas	**1,1**	0,99	Tercapai
12	Jumlah demo	**3**	2	Tercapai

2.3. Analisis Pelayanan PD

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis dan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan Tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut :.

A. Indikator Kinerja Angka kriminalitas yang tertangani pada Tahun 2023 sebesar 1,5 atau mencapai 104,9% dari target RPJMD Tahun 2023, Capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD Tahun 2021. Capaian kinerja tahun 2023 ini didukung **Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum**, dengan kegiatan : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

   Capaian kinerja Angka kriminalitas yang tertangani pada tahun 2023 tersebut sama dengan capaian kinerja tahun 2022;.

B. Indikator Kinerja Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten pada tahun 2023 sebesar 0,001 atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2023, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2023. Capaian kinerja cakupan pelayanan bencana kebakaran didukung dengan **Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**, dengan kegiatan :

a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
b. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
c. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

Capaian kinerja cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten Pacitan pada tahun 2023 sama dengan capaian kinerja tahun 2022;

A. Indikator Kinerja Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk pada tahun 2023 sebesar 1,66 atau mencapai 156% dari target RPJMD tahun 2023, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD 2023. Capaian kinerja Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022.

B. Indikator Kinerja Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk pada tahun 2023 sebesar 2,15%, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2023.

Capaian kinerja jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022.

C. Indikator Kinerja Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan.pada tahun 2023 sebesar 11,35% atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2023, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD 2023. Capaian kinerja Rasio Pos Siskampling per jumlah desa/kelurahan pada tahun 2023 sama dengan tahun 2022.

D. Indikator Kinerja Persentase Penegakan PERDA pada tahun 2023 sebesar 99% atau mencapai 100 % dari target RPJMD tahun 2023, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2023,

   Capaian kinerja presentase Penegak PERDA pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022.

E. Indikator Kinerja Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Pacitan pada tahun 2023 sebesar 97% atau mencapai 102,11% dari target RPJMD tahun 2023, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2023.

   Capaian kinerja presentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Pacitan pada tahun 2023 sama dengan capaian kinerja tahun 2022.

F. Indikator Kinerja Persentase Petugas LINMAS terlatih pada tahun 2023 mencapai 100% atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2023, Capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2023.

   Capaian kinerja presentase Petugas LINMAS terlatih pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022.

G. Indikator Kinerja Persentase jumlah pembinaan, pengawasan dan penyelesaian pelanggaran PERDA dan PERKADA pada tahun 2023

sebesar 97% atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2023, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2023.

Capaian kinerja persentase jumlah pembinaan, pengawasan dan penyelesaian pelanggaran PERDA dan PERKADA pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022.

H. Indikator Kinerja Jumlah patroli petugas Satpol PP dalam 24 jam (kali) pada tahun 2023 sejumlah 2 kali patroli atau mencapai 100% dari target RPJMD tahun 2023, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2022. Capaian kinerja jumlah patroli petugas Satpol PP dalam 24 jam (2 kali) pada tahun 2023 sama dengan capaian kinerja tahun 2022.

I. Indikator Kinerja angka kriminalitas pada tahun 2023 sebesar 0,99% atau mencapai 111,11% dari target RPJMD tahun 2023, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2023.

Capaian kinerja angka kriminalitas tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022.

J. Indikator kinerja jumlah demo pada tahun 2023 sebesar 2 atau mencapai 150% dari target RPJMD tahun 2023, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2021. Capaian kinerja jumlah demo pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022.

2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi PD

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar,

mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang harus ditangani pada tahun 2025 oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten pacitan adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan sumber daya aparatur SATPOL PP;
b. Peningkatan sarana dan prasarana;
c. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang berlaku;
d. Peningkatan penanganan pelanggaran PERDA;
e. Peningkatan pelayanan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
f. Peningkatan pelayanan penanganan bencana kebakaran dan kejadian membahayakan manusia;
g. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan, penanggulan dan penanganan bencana kebakaran.

2.5 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	RKPD Perubahan 2025	
					Satuan Polisi Pamong Praja				9.896.756.081,00	10.088.127.680,00	11.578.000.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.896.756.081,00	10.088.127.680,00	11.578.000.000,00
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				9.896.756.081,00	10.088.127.680,00	11.578.000.000,00
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	>B Nilai	6.001.179.597,00	5.773.436.270,00	6.945.000.000,00
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	24 Dokumen	24 Dokumen	45.000.000,00	85.000.000,00	70.000.000,00
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	35.000.000,00	61.814.000,00	35.000.000,00
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	9.506.400,00	35.000.000,00

						Realisasi Kinerja SKPD					
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	59 Dokumen	59 Dokumen	4.094.936.597,00	4.040.936.600,00	4.285.000.000,00
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	4.043.716.597,00	3.741.178.142,00	4.200.000.000,00
1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	51.220.000,00	51.219.120,00	85.000.000,00
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang mendapatkan pelayanan kepegawaian	100 %	100 %	68.972.000,00	68.972.000,00	125.000.000,00
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	117 Paket	117 Paket	68.972.000,00	68.972.000,00	125.000.000,00
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	378.475.630,00	355.842.697,00	405.000.000,00
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	51.318.630,00	82.396.468,00	85.000.000,00

1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	327.157.000,00	173.433.500,00	320.000.000,00
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	100 %	100 %	1.383.795.370,00	1.406.428.300,00	2.000.000.000,00
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.383.795.370,00	1.554.916.640,00	2.000.000.000,00
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam keadaan baik	90 %	90 %	30.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	100 %	3.570.576.484,00	4.001.595.510,00	4.145.000.000,00

1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang tertangani	100 %	100 %	1.145.000.000,00	1.445.000.000,00	1.570.000.000,00
1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum						
						Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	150.000.000,00	224.334.600,00	560.000.000,00
1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia						
						Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	117 Orang	117 Orang	200.000.000,00	72.068.040,00	210.000.000,00
1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan						
						Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,	12 laporan	12 laporan	655.000.000,00	895.857.530,00	650.000.000,00

						Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan					
1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa						
						Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	12 Laporan	135.000.000,00	93.242.460,00	140.000.000,00
1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah						
						Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	3.017.240,00	10.000.000,00
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang tertangani	100 %	100 %	2.405.576.484,00	2.400.000.000,00	2.540.000.000,00

1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	12 Laporan	902.230.500,00	600.000.000,00	990.000.000,00
1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah						
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	12 Laporan	1.503.345.984,00	2.100.000.000,00	1.550.000.000,00
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah PPNS yang berkualitas	25 orang	25 orang	20.000.000,00	20.000.000,00	35.000.000,00
1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS						
						Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	13.075.640,00	35.000.000,00
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayananpenyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	100 %	325.000.000,00	313.095.900,00	488.000.000,00

1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase warga masyarakat yang memperoleh layanan kebakaran dan non kebakaran	100 %	100 %	275.000.000,00	377.292.000,00	363.000.000,00
1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						
						Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000,00	52.178.300,00	153.000.000,00
1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran						
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	12 Dokumen	175.000.000,00	235.209.600,00	210.000.000,00
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase warga masyarakat yang diberdayakan	100 %	100 %	50.000.000,00	47.708.000,00	125.000.000,00
1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat						

						Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	125 Orang	125 Orang	50.000.000,00	25.708.000,00	125.000.000,00
J U M L A H									**9.896.756.081,00**	**10.088.127.680,00**	**11.578.000.000,00**

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan.

Sedangkan Sasaran rencana kerja merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran SATPOL PP Kabupaten Pacitan yang akan dicapai pada pereode tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2025

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN				
				Ke-1	Ke-2	Ke-3	Ke-4	Ke-5
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. .	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya penanganan gangguan trantibum	Persentase pelanggaran dan pengaduan trantibum yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Pelanggaran PERDA yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya penanganan kebakaran dan kejadian membahayakan manusia non kebakaran	Persentase Cakupan pelayanan bencana kebakaran dan non kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya tata kelola organisasi Perangkat Daerah yang baik	Hasil Nilai IKM Perangkat Daerah	83,45	83,48	85,15	85,35	85,45

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa target sasaran dan indikator sasaran pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Target Sasaran Dan Indikator Sasaran Pada Tahun 2025

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. .	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya penanganan gangguan trantibum	Persentase pelanggaran dan pengaduan trantibum yang ditangani	100%
			Persentase Pelanggaran PERDA yang tertangani	100%
		Meningkatnya penanganan kebakaran dan kejadian membahayakan manusia non kebakaran	Persentase Cakupan pelayanan bencana kebakaran dan non kebakaran	100%
		Meningkatnya tata kelola organisasi Perangkat Daerah yang baik	Hasil Nilai IKM Perangkat Daerah	85,45

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1
Rumusan Program dan Kegiatan PD Tahun 2025 dan Prakiraan maju Tahun 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)		Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	RKPD Perubahan 2025	
					Satuan Polisi Pamong Praja				9.896.756.081,00	10.088.127.680,00	11.578.000.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.896.756.081,00	10.088.127.680,00	11.578.000.000,00
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				9.896.756.081,00	10.088.127.680,00	11.578.000.000,00
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B Nilai	>B Nilai	6.001.179.597,00	5.773.436.270,00	6.945.000.000,00
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	24 Dokumen	24 Dokumen	45.000.000,00	85.000.000,00	70.000.000,00
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	35.000.000,00	61.814.000,00	35.000.000,00
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						

						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	9.506.400,00	35.000.000,00
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	59 Dokumen	59 Dokumen	4.094.936.597,00	4.040.936.600,00	4.285.000.000,00
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	4.043.716.597,00	3.741.178.142,00	4.200.000.000,00
1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	51.220.000,00	51.219.120,00	85.000.000,00
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang mendapatkan pelayanan kepegawaian	100 %	100 %	68.972.000,00	68.972.000,00	125.000.000,00
1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	117 Paket	117 Paket	68.972.000,00	68.972.000,00	125.000.000,00
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase operasional dasar Perangkat Daerah	100 %	100 %	378.475.630,00	355.842.697,00	405.000.000,00

						yang terpenuhi					
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	51.318.630,00	82.396.468,00	85.000.000,00
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	327.157.000,00	173.433.500,00	320.000.000,00
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	100 %	100 %	1.383.795.370,00	1.406.428.300,00	2.000.000.000,00
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.383.795.370,00	1.554.916.640,00	2.000.000.000,00
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam keadaan baik	90 %	90 %	30.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	60.000.000,00

1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	100 %	3.570.576.484,00	4.001.595.510,00	4.145.000.000,00
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang tertangani	100 %	100 %	1.145.000.000,00	1.445.000.000,00	1.570.000.000,00
1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum						
						Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	150.000.000,00	224.334.600,00	560.000.000,00
1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia						
						Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	117 Orang	117 Orang	200.000.000,00	72.068.040,00	210.000.000,00
1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan						
						Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan	12 laporan	12 laporan	655.000.000,00	895.857.530,00	650.000.000,00

						Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan					
1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa						
						Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	12 Laporan	135.000.000,00	93.242.460,00	140.000.000,00
1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah						
						Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	3.017.240,00	10.000.000,00
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang tertangani	100 %	100 %	2.405.576.484,00	2.400.000.000,00	2.540.000.000,00
1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						

						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	12 Laporan	902.230.500,00	600.000.000,00	990.000.000,00
1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah						
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	12 Laporan	1.503.345.984,00	2.100.000.000,00	1.550.000.000,00
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah PPNS yang berkualitas	25 orang	25 orang	20.000.000,00	20.000.000,00	35.000.000,00
1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS						
						Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	13.075.640,00	35.000.000,00
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayananpenyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	100 %	325.000.000,00	313.095.900,00	488.000.000,00
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase warga masyarakat yang memperoleh layanan kebakaran dan non kebakaran	100 %	100 %	275.000.000,00	377.292.000,00	363.000.000,00

1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						
						Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000,00	52.178.300,00	153.000.000,00
1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran						
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	12 Dokumen	175.000.000,00	235.209.600,00	210.000.000,00
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase warga masyarakat yang diberdayakan	100 %	100 %	50.000.000,00	47.708.000,00	125.000.000,00
1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat						
						Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	125 Orang	125 Orang	50.000.000,00	25.708.000,00	125.000.000,00
								J U M L A H	**9.896.756.081,00**	**10.088.127.680,00**	**11.578.000.000,00**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan RENSTRA Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Kabupaten Pacitan serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan Fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan maupun dengan instansi yang membidangi fungsi lain.

Pacitan, 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PACITAN

ARDYAN WAHYUDI, S.STP., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 198112162000121002

2025

RENCANA KERJA PERUBAHAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pacitan
Jl. Dewi Sartika No. 19 Pacitan

0357 886164

bpbd.pacitan@gmail.com

Copyright: wordexceltemplates.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan telah menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan ini dilakukan sebagai penjabaran rencana sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran.

Diharapkan Rencana Kerja Perubahan ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran 2025 dan sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan ini masih banyak kekurangan, maka masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan guna meningkatkan kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan sehingga terwujud Pemerintahan yang baik dan bersih.

Pacitan, 21 - 07 - 2025

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN PACITAN

ERWIN ANDRIATMOKO, S.STP, MM
NIP. 19790308 199711 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. LATAR BELAKANG	1
	1.2. LANDASAN HUKUM	3
	1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	5
	1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	6
	2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	6
	2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	18
	2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD	19
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	23
BAB IV	PENUTUP	33

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Pembangunan BPBD Kabupaten Pacitan merupakan bagian dari pembangunan daerah Kabupaten Pacitan sehingga dalam penanganannya menuntut arah kebijakan dan pendekatan di semua sektor.

Seiring dengan perubahan paradigma penanganan bencana di Indonesia yang telah mengalami pergeseran, yaitu penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih menekankan pada keseluruhan manajemen risiko bencana.

Sebagai respon dari perubahan paradigma penanggulangan bencana tersebut maka diterbitkan Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dimana didalam ketentuan umumnya disebutkan bahwa, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahapan penanggulangan bencana.

Dalam rangka melaksanakan mandat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menyatakan bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non-pemerintah internasional, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya, telah dibentuk Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana yang akan memberikan advokasi dan dukungan kepada pemerintah dalam upaya melaksanakan pengurangan risiko bencana (PRB) secara terencana, sistematis dan menyeluruh.

Dengan demikian upaya penanganan bencana harus bersifat cepat, tepat, terpadu, terkoordinasi dan akuntabel baik pada tahap pra bencana, saat terjadi bencana maupun pasca bencana.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang berada dalam wilayah Kabupaten Pacitan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan juga menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan digunakan sebagai bahan acuan penyusunan RKA Perubahan Tahun Anggaran 2025 dan memuat rancangan program dan prioritas kegiatan serta rencana pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/ Anggaran Pendapatan Belanja Negara dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan tujuan BPBD Kabupaten Pacitan.

Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025 ini akan menjadi bahan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2025 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. pacitankab01#@!A

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam pembuatan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Alam;
8. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/ Kota;

10. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan;
16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 131 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan;
17. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 adalah sebagai pedoman penyusunan Perubahan RKA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025 dan sebagai tolak ukur penilaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan pada Tahun 2025.

Tujuannya adalah sebagai motivasi untuk mewujudkan peningkatan kerja sesuai dengan tugas dan fungsi dalam penjabaran yang ditetapkan di dalam Rencana Strategis tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan dalam kinerja tahunan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG
1.2. LANDASAN HUKUM
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
2.2. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2025 sampai dengan triwulan II dilakukan untuk mengetahui pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025 sesuai penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2025 sampai dengan triwulan II adalah sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 s/d Triwulan II
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		-11		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
1	105.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	0	0	0.00	0	76.05	2.788.602.830,00	0	477.173.433,00	0	589.315.794,00	0	82.784.910,00	0	0	0	1.149.274.137,00	0	41,21	0	1.149.274.137,00	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	105.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah	0.00	0	0.00	0	24.00	46.240.000,00	6	285.000,00	2	1.968.000,00	0	0	0	0	8	2.253.000,00	33,33	4,87	8	2.253.000,00	0	0	
	105.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0.00	0	0.00	0	9	40.620.000,00	3	285.000,00	0	1.968.000,00	0	0	0	0	3	2.253.000,00	33,33	5,55	3	2.253.000,00	0	0	
	105.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0.00	0	0.00	0	15	5.620.000,00	4	0	3	0	0	0	0	0	7	0	46,67	0	7	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				40	2,78					F
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah		2	2		
	105.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	0.00	0	0.00	0	57.00	1.735.222.830,00	9	344.119.758,00	10	413.499.362,00	0	78.566.910,00	0	0	19	836.186.030,00	33,33	48,19	19	836.186.030,00	0	0	
	105.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0.00	0	0.00	0	13.00	1.684.282.830,00	13	333.303.508,00	13	399.954.362,00	0	78.566.910,00	0	0	13	811.824.780,00	100	48,2	13	811.824.780,00	0	0	
	105.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	0.00	0	0.00	0	12	42.540.000,00	3	10.635.000,00	3	10.635.000,00	0	0	0	0	6	21.270.000,00	50	50	6	21.270.000,00	0	0	

		Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																								
	105.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0.00	0	0.00	0	45	8.400.000,00	9	181.250,00	9	2.910.000,00	0	0	0	0	18	3.091.250,00	40	36,8	18	3.091.250,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				63,33	45					F
Predikat kinerja(%)																				Rendah	Sangat Rendah		3	3		
	105.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	0.00	0	0.00	0	100.00	126.029.220,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	105.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0.00	0	0.00	0	1.00	126.029.220,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				0	0					F
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah		1	1		
	105.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentasi operasional dasar perangkat daerah yang terpenuhi	0.00	0	0.00	0	100.00	244.060.768,00	22	56.271.548,00	18	44.337.444,00	0	0	0	0	40	100.608.992,00	40	41,22	40	100.608.992,00	0	0	
	105.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0.00	0	0.00	0	12	66.127.876,00	2	31.686.548,00	1	5.270.250,00	0	0	0	0	3	36.956.798,00	25	55,89	3	36.956.798,00	0	0	
	105.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0.00	0	0.00	0	12	41.937.892,00	3	4.833.000,00	3	10.748.950,00	0	0	0	0	6	15.581.950,00	50	37,15	6	15.581.950,00	0	0	
	105.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0.00	0	0.00	0	12.00	135.995.000,00	2	19.752.000,00	3	28.318.244,00	0	0	0	0	5	48.070.244,00	41,67	35,35	5	48.070.244,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				38,89	42,8					F
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah		3	3		
	105.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang	Prosentase penyediaan jasa penunjang	0.00	0	0.00	0	100.00	411.934.332,00	12	57.552.127,00	25	106.332.988,00	0	0	0	0	37	163.885.115,00	37	39,78	37	163.885.115,00	0	0	

		Urusan Pemerintahan Daerah	operasional perangkat daerah yang dibutuhkan																								
	105.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0.00	0	0.00	0	12	248.830.332,00	3	19.608.193,00	3	64.865.302,00	0	0	0	0	6	84.473.495,00	50	33,95	6	84.473.495,00	0	0	
	105.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0.00	0	0.00	0	12	163.104.000,00	3	37.943.934,00	3	41.467.686,00	0	0	0	0	6	79.411.620,00	50	48,69	6	79.411.620,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				50	41,32					F
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah		2	2		
	105.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	0.00	0	0.00	0	100.00	225.115.680,00	7	18.945.000,00	6	23.178.000,00	0	4.218.000,00	0	0	13	46.341.000,00	13	20,59	13	46.341.000,00	0	0	
	105.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0.00	0	0.00	0	13	83.278.145,00	3	15.845.000,00	7	22.218.000,00	0	4.218.000,00	0	0	10	42.281.000,00	76,92	50,77	10	42.281.000,00	0	0	
	105.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0.00	0	0.00	0	7	9.460.000,00	7	3.100.000,00	0	960.000,00	0	0	0	0	7	4.060.000,00	100	42,92	7	4.060.000,00	0	0	
	105.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0.00	0	0.00	0	1.00	132.377.535,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				58,97	31,23					F
Predikat kinerja(%)																				Rendah	Sangat Rendah		3	3		
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																				26,11	25,78					
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah					
2	105.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Nilai pengembangan sistem informasi, diklat,dan logistik	0	0	0.00	0	0.77	1.548.220.000,00	0	280.128.799,00	0	273.260.808,00	0	0	0	0	0	553.389.607,00	0	35,74	0	553.389.607,00	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

	105.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	0.00	0	0.00	0	100.00	135.000.000,00	9	37.730.000,00	34	23.532.600,00	0	0	0	0	43	61.262.600,00	43	45,38	43	61.262.600,00	0	0	
	105.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	0.00	0	0.00	0	12239.00	135.000.000,00	########	37.730.000,00	########	23.532.600,00	0	0	0	0	########	61.262.600,00	45,58	45,38	########	61.262.600,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				45,58	45,38					F
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah		1	1		
	105.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0.00	0	0.00	0	100.00	853.596.300,00	9	171.921.095,00	34	145.161.500,00	0	0	0	0	43	317.082.595,00	43	37,15	43	317.082.595,00	0	0	
	105.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	0.00	0	0.00	0	1.00	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	105.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	0.00	0	0.00	0	24.00	10.087.125,00	13	9.948.000,00	58	0	0	0	0	0	71	9.948.000,00	295,8	98,62	71	9.948.000,00	0	0	

	105.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	0.00	0	0.00	0	300.00	1.000.000,00	0	0	300	0	0	0	0	0	300	0	100	0	300	0	0	0	
	105.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0.00	0	0.00	0	50.00	15.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	105.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	0.00	0	0.00	0	4.00	277.120.000,00	1	70.624.095,00	1	51.378.500,00	0	0	0	0	2	122.002.595,00	50	44,03	2	122.002.595,00	0	0	
	105.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	0.00	0	0.00	0	20.00	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	105.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1	0.00	0	0.00	0	1.00	105.000.000,00	0	0	0	878.500,00	0	0	0	0	0	878.500,00	0	0,84	0	878.500,00	0	0	

			(satu) tahun																								
	105.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0.00	0	0.00	0	1.00	1.000.000,00	0	0	0	664.000,00	0	0	0	0	0	664.000,00	0	66,4	0	664.000,00	0	0	
	105.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	0.00	0	0.00	0	1.00	390.389.175,00	2	91.349.000,00	0	92.240.500,00	0	0	0	0	2	183.589.500,00	200	47,03	2	183.589.500,00	0	0	
	105.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	0.00	0	0.00	0	1.00	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				64,58	25,69					F
Predikat kinerja(%)																				Rendah	Sangat Rendah		10	10		
	105.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	0.00	0	0.00	0	95.00	97.423.700,00	84	31.805.500,00	0	15.961.500,00	0	0	0	0	84	47.767.000,00	88,42	49,03	84	47.767.000,00	0	0	
	105.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	0.00	0	0.00	0	1	800.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	105.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat	Jumlah Dokumen SK Penetapan	0.00	0	0.00	0	1	41.440.000,00	1	9.800.000,00	0	9.930.000,00	0	0	0	0	1	19.730.000,00	100	47,61	1	19.730.000,00	0	0	

		Bencana Kabupaten/ Kota	Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat																								
	105.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	0.00	0	0.00	0	1.00	7.122.000,00	3	1.058.000,00	10	3.471.500,00	0	0	0	0	13	4.529.500,00	######	63,6	13	4.529.500,00	0	0	
	105.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0.00	0	0.00	0	180.00	42.461.700,00	21	20.947.500,00	56	0	0	0	0	0	77	20.947.500,00	42,78	49,33	77	20.947.500,00	0	0	
	105.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	0.00	0	0.00	0	1.00	5.600.000,00	1	0	0	2.560.000,00	0	0	0	0	1	2.560.000,00	100	45,71	1	2.560.000,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				308,6	41,25					F
Predikat kinerja(%)																				Sangat Tinggi	Sangat Rendah		5	5		
	105.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen dasar penanggulangan bencana	0.00	0	0.00	0	1.00	462.200.000,00	0	38.672.204,00	0	88.605.208,00	0	0	0	0	0	127.277.412,00	0	27,54	0	127.277.412,00	0	0	
	105.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	0.00	0	0.00	0	27.00	125.210.000,00	0	0	0	2.213.894,00	0	0	0	0	0	2.213.894,00	0	1,77	0	2.213.894,00	0	0	
	105.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencan	Jumlah penyelesaian kegiatan	0.00	0	0.00	0	39.00	200.000.000,00	3	7.229.570,00	8	58.426.814,00	0	0	0	0	11	65.656.384,00	28,21	32,83	11	65.656.384,00	0	0	

		a Kabupaten/ Kota	pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan																								
	105.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0.00	0	0.00	0	2.00	136.990.000,00	0	31.442.634,00	0	27.964.500,00	0	0	0	0	0	59.407.134,00	0	43,37	0	59.407.134,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				9,4	25,99					F
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah		3	3		
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																				43,61	39,78					
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah					
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)																				0	38,48					
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah					
Total																				4.336.822.830,00			1.702.663.744,00			
Persentase Realisasi Anggaran																				39.26%						
Predikat																				Sangat Rendah						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pelaksanaan program dan kegiatan telah sesuai dengan yang direncanakan																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Penyerapan anggaran yang lambat dan kurang maksimal																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Lebih fokus pada pelaksanaan program dan kegiatan																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Perencanaan program dan kegiatan tepat waktu dan tepat sasaran (terukur) agar tercapai target kinerja																										

Dari tabel tersebut evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II rata-rata persentase capaian kinerja program kegiatan terlihat masih sangat rendah. Hal ini tentu ada faktor pendukung dan penghambat keberhasilan dalam pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan kinerja yaitu pelaksanaan program dan kegiatan telah sesuai dengan yang direncanakan, sedangkan faktor penghambat pencapaian kinerja yaitu penyerapan anggaran yang lambat dan kurang maksimal sehingga mempengaruhi capaian kinerja yang kurang maksimal.

Tindak lanjut yang diperlukan untuk mencapai target kinerja diharapkan pada triwulan III dan IV untuk lebih fokus dalam pelaksanaan capaian kinerja program dan kegiatan yang belum tercapai serta penyerapan anggaran yang lebih maksimal.

SUMBER DAYA MANUSIA

Tabel 2.1 Pegawai BPBD Kabupaten Pacitan Berdasarkan Klasifikasi Jenis Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	S2	3	0	3
2.	S1	21	10	31
3.	D3	1	2	3
4.	D2	0	2	2
5.	SLTA/ SMA	17	5	22
JUMLAH		**42**	**19**	**61**

Tabel 2.2 Pegawai BPBD Kabupaten Pacitan Berdasarkan Klasifikasi Dalam Jabatan

NO	ESELON	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Eselon II	1	0	1
2.	Eselon III	3	0	3
3.	Eselon IV	1	0	1
4.	Staf Pelaksana	8	3	11
5.	Non ASN	30	15	45
JUMLAH		**43**	**18**	**61**

Tabel 2.3 Pegawai BPBD Kabupaten Pacitan
Berdasarkan Pangkat

NO	GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	IVb	1	0	1
2.	IVa	3	0	3
3.	IIId	0	0	0
4.	IIIc	1	0	1
5.	IIIb	0	0	0
6.	IIIa	4	1	5
7.	IId	1	1	2
8.	IIc	0	0	0
9.	IX	2	1	3
10.	VII	1	0	1
11.	Non ASN	30	15	45
JUMLAH		**43**	**18**	**61**

2.2. KINERJA PELAYANAN PD

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan merupakan unsur pelaksana, dipimpin oleh Kepala Pelaksana Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku kepala Ex Officio Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi penanganan sebelum bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintregasi mengacu pada Peraturan Bupati Pacitan Nomor 05 tahun 2011 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan.

Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu :

1. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam penanggulangan bencana; dan

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Pelayanan Penanganan Pra Bencana

Pelayanan Penanganan Pra/Sebelum terjadinya bencana yang meliputi kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat yang meliputi :

a. Peningkatan akses Komunikasi dan Pengembangan Sistem Peringatan Dini.
b. Pendataan dan Pemetaan Wilayah Resiko Bencana.
c. Sosialisasi Penanggulangan Bencana.
d. Pembangunan / pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

2. Pelayanan Penanganan Tanggap Darurat

Pelayanan Penanganan tanggap darurat pada saat terjadinya bencana yang meliputi kegiatan tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik melalui kegiatan :

a. Pencarian (search and rescue)
b. Pertolongan melaksanakan pertolongan medis (P3K)
c. Evakuasi
d. Logistik / Dapur Umum

3. Pelayanan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pelayanan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dilaksanakan setelah terjadinya bencana yang meliputi :

a. Pendataan atas kerusakan yang terjadi
b. Melaksanakan verifikasi jenis kerusakan yang ditimbulkan
c. Mengusulkan bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi
d. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi

2.3. ANALISIS KERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan merupakan unsur pelaksana, dipimpin oleh Kepala Pelaksana Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku kepala Ex Officio Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi penanganan sebelum bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintregasi mengacu pada mengacu pada Peraturan Bupati Pacitan Nomor 131 tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan, menggantikan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 05 tahun 2011 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan.

Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

2.3.1. Pelayanan Penanganan Pra Bencana

Pelayanan Penanganan Pra/Sebelum terjadinya bencana yang meliputi kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat yang meliputi :

a. Peningkatan akses Komunikasi dan Pengembangan Sistem Peringatan Dini.
b. Pendataan dan Pemetaan Wilayah Resiko Bencana.
c. Sosialisasi Penanggulangan Bencana.
d. Pembangunan / pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana

2.3.2. Pelayanan Penanganan Tanggap Darurat

Pelayanan Penanganan tanggap darurat pada saat terjadinya bencana yang meliputi kegiatan tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik melalui kegiatan :

a. Pencarian (search and rescue)
b. Pertolongan pertama pada korban bencana
c. Evakuasi
d. Logistik / Dapur Umum

2.3.3. Pelayanan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pelayanan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dilaksanakan setelah terjadinya bencana yang meliputi :

a. Pendataan atas kerusakan yang terjadi akibat bencana
b. Melaksanakan verifikasi jenis kerusakan yang ditimbulkan akibat bencana
c. Mengusulkan bantuan sosial dana rehabilitasi dan rekonstruksi
d. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

2.4. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

- **Tingkat kinerja pelayanan BPBD**

Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance* salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut e-Government. Pelaksanaan e-Government yang telah diimplikasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta.

Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, maka BPBD Kab. Pacitan telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai arah kebijakan dari pemerintah dengan amanat peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana, diantaranya :

1. Pembagian struktur penanganan bencana sampai dengan tingkat desa (desa tangguh);
2. Pembagian wilayah penanganan bencana sesuai dengan potensi bencana yang ada;
3. Penanganan sistem informasi kebencaaan yang terpusat di BPBD Kabupaten.

- **Permasalahan dan hambatan yang dialami BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi diantaranya :**

1. Permasalahan Bidang Penanganan Pra Bencana

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sebagai berikut :

a. Kondisi geografis Kabupaten Pacitan yang rawan akan bencana alam (gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran dll)
b. Kondisi bangunan rumah penduduk dan sarana Pemerintahan banyak yang rusak dan tidak memadai. Hal ini sangat membahayakan bila terjadi bencana;
c. Pertambahan penduduk yang tinggi akan menyulitkan penanganan penanggulangan bencana;
d. Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana di Kabupaten Pacitan dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 terutama untuk kewenangan-kewenangan yang sebelumnya sudah ada di Perangkat Daerah selain BPBD;
e. Terbatasnya anggaran yang tersedia di BPBD bagi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Pacitan;
f. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di dunia;
g. Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain;
h. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam; dan
i. Masih rendahnya pemahaman masyarakat dan aparat Pemerintahan dalam menyikapi kondisi alam yang rawan bencana.

2. Permasalahan Bidang Penanganan pada saat terjadi bencana

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang ketanggapdaruratan dan logistik sebagai berikut :

a. Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan bencana di Indonesia termasuk belum terpenuhinya seluruh amanah aturan dan regulasi yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
b. Masih tersebar dan belum terbangun Sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi;
c. Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana;
d. Kurang terpadunya penyelenggaraan penanganan bencana dan masih berjalan secara sektoral;
e. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana; dan
f. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan.

3. Permasalahan Bidang Penanganan Pasca / setelah terjadi bencana

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai berikut:

a. Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler;
b. Penilaian kerusakan dan kerugian setelah terjadi bencana yang tidak akurat;
c. Keterbatasan peta wilayah yang meyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial;
d. Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekontruksi yang terpusat;
e. Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekontruksi yang berasal dari anggaran daerah.

- **Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional :**
  1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana,
  2. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada,
  3. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh,
  4. Menghargai budaya lokal,
  5. Membangun pasrtisipasi dan kemitraan publik serta swasta.
  6. Mendorong semangat gotong-royong, kesetiakawanan dan kedermawanan,
  7. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- **Adapun Tantangan yang dihadapi BPBD dalam meningkatkan pelayanan :**
  1. Kondisi geografis Kabupaten Pacitan;
  2. Minimnya anggaran;
  3. Keterbatasan kualitas personil lembaga;
  4. Keterbatasan Sarana dan Prasarana.

- **Peluang BPBD dalam meningkatkan pelayanan:**
  1. Meningkatnya klasifikasi Badan menjadi tipe A
  2. Adanya Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Bencana
  3. Adanya proses bisnis perangkat daerah;
  4. Adanya SOP;
  5. Adanya Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan;
  6. Dukungan undang-undang;
  7. Pengalaman melaksanakan program penanggulangan bencana.

- **Formulasi isu-isu penting**
  1. Penanganan Bencana bisa tersebar sampai kepada kelompok masyarakat terkecil (pembuatan desa tangguh);
  2. Adanya Standar operasional prosedur penanggulangan bencana;
  3. Sistem informasi yang terkoneksi ke seluruh wilayah rawan bencana;
  4. Koordinasi lintas sektoral yang efektif dalam penanggulangan bencana;
  5. Sarana prasarana penanggulangan bencana yang memadai.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 yang dituangkan dalam Bab ini adalah merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk Matrik Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Uraian Rencana Program dan Kegiatan yang disajikan dalam Bab ini didanai oleh APBD Kabupaten Pacitan tahun 2025.

Salah satu faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yaitu sesuai dengan kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Perangkat Daerah yang melaksanakan pemenuhan pelayanan dasar sub urusan bencana melalui program dan kegiatan sesuai dengan rencana pemenuhan pelayanan dasar. Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan, memastikan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman;
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
6. Sosial.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Penanggulangan Bencana maka wajib melaksanakan SPM Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Dalam menyusun Rencana Program Kegiatan BPBD Kabupaten Pacitan berpedoman pada Renstra BPBD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 yang merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026.

Pada Rencana Kerja Perubahan tahun 2025, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan telah merencanakan untuk melaksanakan 2 (Dua) program, 9 (Sembilan) kegiatan, 32 (Tiga Puluh Dua) subkegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.236.555.243,00 (Empat Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah).

Adapun rencana kerja dan rincian anggaran tersebut disajikan dalam tabel berikut :

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						
										Target 2025		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana
										Semula	Menjadi	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD 2025 Perubahan		
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**3.985.822.830**	**4.336.822.830**	**4.236.555.243**		
1	**05**	**001**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**74,66 Nilai**	**73,16 Nilai**	**75,75 Nilai**	**>B Nilai**	**>B Nilai**	**2.644.602.830**	**2.788.602.830**	**2.584.206.215**		
1	**05**	**001**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah**	**120 dokumen**	**24 dokumen**	**24 dokumen**	**24 dokumen**	**24 dokumen**	**11.240.000**	**46.240.000**	**46.240.000**		
1	05	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	5.620.000	40.620.000	40.620.000		Pajak Rokok
1	05	001	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15 Laporan	15 Laporan	5.620.000	5.620.000	5.620.000		Pajak Rokok
1	**05**	**001**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah**	**295 dokumen**	**59 dokumen**	**57 dokumen**	**59 dokumen**	**59 dokumen**	**1.789.222.830**	**1.735.222.830**	**1.590.900.370**		
1	05	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/ bulan	16 Orang/ bulan	1.738.282.830	1.684.282.830	1.539.960.370		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	001	2.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	42.540.000	42.540.000	42.540.000		Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1	05	001	2.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				37 Laporan	37 Laporan	8.400.000	8.400.000	8.400.000		Pajak Rokok
1	**05**	**001**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentasi operasional dasar perangkat daerah yang terpenuhi**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**234.406.135**	**244.060.768**	**207.650.850**		
1	05	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	66.977.359,	66.127.876	92.218.128,		Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	05	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	41.938.776	41.937.892	45.437.722		Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	05	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	13 Laporan	125.490.000	135.995.000	69.995.000,		Pajak Rokok
1	**05**	**001**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah yang dibutuhkan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**279.018.965**	**411.934.332**	**435.039.427**		
1	05	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	93.714.965	248.830.332	219.519.427		Pajak Rokok
1	05	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	185.304.000	163.104.000	215.520.000		Pendapatan Transfer Antar Daerah
1	**05**	**001**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**225.865.680**	**225.115.680**	**280.858.109**		

1	05	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				17 Unit	17 Unit	84.028.145	83.278.145	104.418.109		Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	05	001	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	14 Unit	9.460.000	9.460.000	9.460.000		Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Rokok
1	05	001	2.09	006	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	132.377.535	132.377.535	166.980.000		Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	**05**	**003**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Nilai pengembangan sistem informasi, diklat, dan logistik**	**0,8 Nilai**	**0,77 Nilai**	**0,79 Nilai**	**0,79 Nilai**	**0,79 Nilai**	**1.341.220.000**	**1.548.220.000**	**1.652.349.028**		
1	**05**	**003**	2.01		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**135.000.000**	**135.000.000**	**167.572.387**		
1	05	003	2.01	002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				210 Orang	12.239 Orang	135.000.000	135.000.000	167.572.387		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
1	**05**	**003**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**819.269.400**	**853.596.300**	**873.044.899**		

1	05	003	2.02	013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani				1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.000.000	1.000.000	814.600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	003	2.02	015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				50 unit	24 unit	10.087.125	10.087.125	10.087.125		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	003	2.02	018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				300 Orang	300 Orang	1.000.000	1.000.000	814.600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	003	2.02	019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				125 Keluarga	50 Keluarga	15.000.000	15.000.000	10.609.800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	003	2.02	020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				6 Kawasan	6 Kawasan	277.120.000,	277.120.000,	226.952.304		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

1	05	003	2.02	021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				20 Orang	20 Orang	3.000.000	3.000.000	1.080.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	003	2.02	022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	105.000.000,00	105.000.000,00	93.843.806		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	003	2.02	023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1.000.000	687.636		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	003	2.02	026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				1 Laporan	1 Laporan	356.062.275,	390.389.175	495.911.679		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	003	2.02	028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan				1 Kawasan	1 Kawasan	50.000.000	50.000.000	32.243.349		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

						mitigasi bencana										
1	**05**	**003**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**	**80%**	**80%**	**80%**	**95%**	**95%**	**131.750.600**	**97.423.700**	**188.774.780**		
1	05	003	2.03	001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas				1 Laporan	1 Laporan	1.600.000	800.000	320.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	003	2.03	002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 Dokumen	1 Dokumen	63.520.000	41.440.000	29.616.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	003	2.03	003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				1 orang	1 orang	13.900.000	7.122.000	4.562.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	003	2.03	009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				220 Orang	90 Orang	47.130.600	42.461.700	151.716.780		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	003	2.03	012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	5.600.000	5.600.000	2.560.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	**05**	**003**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Jumlah dokumen dasar penanggulangan bencana**	**11 dokumen**	**1 dokumen**	**1 dokumen**	**1 dokumen**	**1 dokumen**	**255.200.000**	**462.200.000**	**422.956.962**		

1	05	003	2.04	008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)				27 Orang	22 Orang	128.490.000	125.210.000	88.688.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	003	2.04	010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				1 Kegiatan	25 Kegiatan	0	200.000.000	200.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	05	003	2.04	015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				2 Dokumen	2 Dokumen	126.710.000	136.990.000	134.268.962		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
									TOTAL			**3.985.822.830**	**4.336.822.830**	**4.236.555.243**		

Perubahan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2025 dengan pagu anggaran sebelumnya sebesar Rp. 3.835.344.582 menjadi Rp. 5.025.762.647. Perubahan pagu anggaran ini digunakan untuk penambahan gaji (belanja pegawai), belanja modal, belanja perjalanan dinas luar dan dalam daerah, belanja suku cadang kendaraan dinas, pembiayaan balik nama kendaraan dinas operasional hibah dari BNPB dan untuk pengiriman air bersih.

BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 ini merupakan penjabaran rencana sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran.

Dalam rencana kerja ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan organisasi. Melalui rencana kerja ini akan dilihat indikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan, dengan berpedoman pada program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan ini disusun sebagai komitmen organisasi untuk dapat dicapai pada tahun ini dan semoga bermanfaat dalam rangka mendukung kelangsungan pembangunan di Kabupaten Pacitan. Kami sangat menyadari bahwa penyusunan rencana kerja perubahan ini, tentunya masih jauh dari kata sempurna baik secara materi maupun penyajiannya, oleh karena itu dengan kerendahan hati kami menerima saran-saran yang dapat menyempurnakan laporan ini.

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Dewi Sartika No. 19 Pacitan 63514
Telp/Fax (0357) 886164, Website : bpbd.pacitankab.go.id
e-mail : bpbd.pacitan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PACITAN
Nomor : 900.1.1.2 /404/ 408.57 / 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PACITAN

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PACITAN

Menimbang :

a. Bahwa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Perubahan merupakan Dokumen Perencanaan selama periode 1 (satu) tahun;
b. Bahwa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan disusun sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
PERTAMA	:	Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 bertujuan untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan program dan kegiatan selama periode 1 (satu) tahun.
KEDUA	:	Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 sebagaimana Diktum Pertama merupakan landasan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan.
KETIGA	:	Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2026 adalah Dokumen Perencanaan Periode 1 (satu) Tahun yang akan menjadi Pedoman dalam Pelaksanaan Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan.
KEEMPAT	:	Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KELIMA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 22 Juli 2025

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pacitan

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

ERWIN ANDRIATMOKO, S.STP, MM
Pembina Utama Muda

KECAMATAN DONOROJO

RENCANA KERJA PERUBAHAN

TAHUN 2025

KABUPATEN PACITAN

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayat-Nya sehingga Perubahan Rencana Kerja (P Renja) PD Kecamatan Donorojo Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Dokumen Renja ini disusun untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Permendagri nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam laporan ini, belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan dimasa yang akan datang.

Donorojo, 21 - 07 - 2025

Plt. CAMAT DONOROJO

NASRUL HIDAYAT, S.STP., M.Si.

NIP. 19840320 200412 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB. I PENDAHULUAN .....
1.1 Latar Belakang .....
1.2 Landasan Hukum .....
1.3 Maksud dan Tujuan .....
1.4 Sistematika Penulisan .....

BAB.II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Hasil capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.....

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....
3.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Donorojo .....

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan.....
4.2 Perubahan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun 2025.....

BAB V PENUTUP.....

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah, Perangkat Daerah harus Menyusun Rencana Kerja dan Rencana Kerja Perubahan di setiap anggaran. Pada Tahun 2025 ini Kecamatan Donorojo menyusun Perubahan Rencana Kerja (P Renja). Rencana Kerja ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan sesuai dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
2. Pergeseran pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja.

I.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P Renja) PD Kecamatan Donorojo tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019- 2024

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja (P Renja) Kecamatan Donorojo adalah sebagai arah dan pedoman bagi Aparatur Kecamatan Donorojo dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan dengan rasa tanggung jawab, disiplin, dan loyalitas yang tinggi, terukur, serta lebih proaktif, visioner dan profesional sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu Perubahan Rencana Kerja (P Renja) Kecamatan Donorojo dapat dipergunakan dalam rangka sinergitas oleh Pemerintah Desa serta sebagai acuan dalam sinkronisasi kegiatan di masing-masing desa sesuai kewenangannya.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (P Renja) Kecamatan Donorojo adalah sebagai kerangka acuan dan pedoman kerja bagi seluruh Aparatur Kecamatan Donorojo yang merupakan unsur pelaksana kegiatan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Selain itu hal penting disusunnya Perubahan Rencana Kerja (P Renja) PD adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja ini mendorong timbulnya etos kerja, sikap dan budaya kerja aparatur pemerintah daerah yang handal sesuai dengan tuntutan zaman yaitu reformasi birokrasi yang mengedepankan karakter Aparatur Sipil Negara (ASN).

I.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Donorojo

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RENJA TAHUN 2025

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

4.2 Perubahan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025.

Evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan 2025, selain itu juga memperhatikan dokumen Renstra sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian kinerja. Sampai dengan akhir bulan Triwulan II bulan Juni tahun 2025 penyerapan anggaran Kecamatan Donorojo masih rendah. Hal ini disebabkan karena ada beberapa kegiatan yang proses pengajuan administrasi pada Triwulan III dan Triwulan IV.

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1.1 untuk rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Donorojo tahun 2025 sampai dengan Triwulan II. Adapun capaian kinerja untuk masing – masing program, kegiatan maupun sub kegiatan diuraiakan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar (Rp. 2.044.302.413,00) realisasi 40,73 % sebesar (Rp. 832.548.868,00) meliputi :
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar (Rp. 43.588.800,00) realisasi sebesar 49,80 % (Rp. 21.708.600,00)
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar (Rp. 1.558.112.826,00) realisasi sebesar 44,24 % (Rp. 689.349.370,00)
   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar (Rp. 11.058.400,00) realisasi sebesar 0% (Rp. 0,00)
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar (Rp. 86.627.457,00) realisasi sebesar 50,02 % (Rp. 43.330.500,00)
   e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar (Rp. 113.925.330,00) realisasi sebesar 0% (Rp. 0,00)
   f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar (Rp. 160.155.600,00) realisasi sebesar 36,59 % (Rp. 58.596.898,00)
   g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah sebesar (Rp. 70.834.000,00) realisasi sebesar 27,62% (Rp. 19.563.500,00)

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik sebesar (Rp. 48.680.000,00) realisasi 48,93 % sebesar (Rp. 23.821.364,00) meliputi :
   a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Rp. 48.680.000,00) realisasi 48,93 % sebesar (Rp. 23.821.364,00) ;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan sebesar (Rp. 302.338.500,00) realisasi 12,65 % sebesar (Rp. 31.156.500,00) meliputi :
   a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Rp. 302.338.500,00) realisasi 12,65 % sebesar (Rp. 31.156.500,00)
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum sebesar (Rp. 30.680.000,00) realisasi 42,74 % sebesar (Rp. 17.568.500,00) meliputi :
   a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum (Rp. 30.680.000,00) realisasi 42,74 % sebesar (Rp. 17.568.500,00)
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar (Rp. 36.900.000,00) realisasi 52,41 % sebesar (Rp. 19.340.000,00) meliputi :
   a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasa Kepala Daerah (Rp. 36.900.000,00) realisasi 52,41 % sebesar (Rp. 19.340.000,00)
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar (Rp. 125.270.000,00) realisasi 37,33% sebesar (Rp 46.760.000,00) meliputi :
   a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Rp. 125.270.000,00) realisasi 37,33% sebesar (Rp 46.760.000,00)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

3.1.1 Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai oleh Kecamatan Donorojo pada Tahun 2025 adalah ***" Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif "*** dengan indikator tujuan adalah : Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan

3.1.2 Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Adapun sasaran yang ingin diwujudkan Kecamatan Donorojo adalah

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Donorojo dengan indikator sasaran adalah *" Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan "*
2. Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan indikator sasaran adalah
    - Prosentase Desa yang menindaklanjuti rekomendasi hasil fasilitasidalam satu tahun Bidang: Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Umum, Sosial Ketentraman dan Ketertiban
    - Prosentase Desa yang sudah Menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan Dokumen : perencanaan, penganggaran dan pelaporan

Tabel 3.1.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Donorojo

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET					SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET HASIL				
		TAHUN							TAHUN				
		1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)			1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
1	2	3					4	5	6				
Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	81,29	82,23	92	96	96,05	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Donorojo	Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan	81,29	82,23	92	96	96,05
							Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	Prosentase Desa yang menindaklanjuti rekomendasi hasil fasilitasidalam satu tahun Bidang : Pemerintahan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Umum, SosialKetentraman dan Ketertiban	80%	83%	100%	100%	100%
								Prosentase Desa yang sudah Menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan Dokumen : perencanaan, penganggaran dan pelaporan	80%	83%	100%	100%	100%

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

4.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Donorojo pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
   - 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
     - 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
     - 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
     - 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
     - 1.1.4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
     - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
     - 1.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
     - 1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
     - 1.2.4 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
     - 1.2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
     - 1.2.6 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
   - 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
     - 1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
   - 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
     - 1.4.1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
     - 1.4.2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
     - 1.4.3 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   - 1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
     - 1.5.1 Pengadaan Mebel
     - 1.5.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.5.3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.7.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

2.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

2.1.1 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

3.1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

4.1.1 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

5.1.1 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang Undangan

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6.1.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

6.1.2 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

4.2 ANGGARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN DONOROJO KAB. PACITAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN DONOROJO							**2.339.531.127,00**	**2.713.331.127,00**	**2.503.250.361,00**	**163.719.234,00**							**2.641.913.062,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.339.531.127,00**	**2.713.331.127,00**	**2.503.250.361,00**	**163.719.234,00**							**2.641.913.062,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.339.531.127,00**	**2.713.331.127,00**	**2.503.250.361,00**	**163.719.234,00**							**2.641.913.062,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.046.742.627,00**	**2.047.162.627,00**	**1.947.781.861,00**	**85.995.935,00**							**2.132.738.562,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	38.588.800,00	43.588.800,00	43.588.800,00	5.000.000,00			-	Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik	-		44.344.000,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	30.025.000,00	35.025.000,00	35.025.000,00	5.000.000,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik			32.780.000,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				8 Dokumen	8 Dokumen	2.691.000,00	2.691.000,00	2.691.000,00	0,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik			3.691.200,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	8 Laporan	1.996.000,00	1.996.000,00	1.996.000,00	0,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.996.000,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15 Laporan	15 Laporan	3.876.800,00	3.876.800,00	3.876.800,00	0,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.876.800,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.601.312.826,00	1.558.112.826,00	1.458.192.274,00	-143.120.552,00			-	- -	-		1.649.679.361,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14/14 Orang/bulan	14/14 Orang/bulan	1.591.001.926,00	1.547.801.926,00	1.447.881.374,00	-143.120.552,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			1.638.383.861,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	5.613.400,00	5.613.400,00	5.613.400,00	0,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik			6.599.000,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	12 Laporan	614.500,00	614.500,00	614.500,00	0,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			613.500,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				6 Dokumen	6 Dokumen	309.500,00	309.500,00	309.500,00	0,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			309.500,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				36 Laporan	36 Laporan	3.562.500,00	3.562.500,00	3.562.500,00	0,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik			3.562.500,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	12 Dokumen	211.000,00	211.000,00	211.000,00	0,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik			211.000,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	11.058.400,00	11.058.400,00	11.058.400,00	0,00			-	Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik	-		10.590.000,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	11.058.400,00	11.058.400,00	11.058.400,00	0,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik			10.590.000,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	87.514.901,00	87.490.761,00	90.027.457,00	2.512.556,00			-	Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik	-		93.810.901,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	77.154.401,00	77.130.261,00	80.530.457,00	3.376.056,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik			83.394.901,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6.520.500,00	6.520.500,00	5.657.000,00	-863.500,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik			6.576.000,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3.840.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik			3.840.000,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	114.278.100,00	115.922.240,00	113.925.330,00	-352.770,00			-	Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik	-		121.588.000,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	18 Unit	55.926.400,00	55.926.400,00	55.926.400,00	0,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik			58.366.500,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	1 Unit	18.439.100,00	18.439.100,00	18.439.100,00	0,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik			13.397.000,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0,00	41.556.740,00	39.559.830,00	39.559.830,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik			49.824.500,00	KECAMATAN DONOROJO
	7	**NON URUSAN**							**2.339.531.127,00**	**2.713.331.127,00**	**2.503.250.361,00**	**163.719.234,00**							**2.641.913.062,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**2.339.531.127,00**	**2.713.331.127,00**	**2.503.250.361,00**	**163.719.234,00**							**2.641.913.062,00**	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.339.531.127,00**	**2.713.331.127,00**	**2.503.250.361,00**	**163.719.234,00**							**2.641.913.062,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.339.531.127,00**	**2.713.331.127,00**	**2.503.250.361,00**	**163.719.234,00**							**2.641.913.062,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	123.155.600,00	160.155.600,00	160.155.600,00	37.000.000,00			-	Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik	-		141.166.800,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	6.698.000,00	6.698.000,00	6.698.000,00	0,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik			6.700.000,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	18.912.000,00	18.912.000,00	18.912.000,00	0,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			20.121.200,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	97.545.600,00	134.545.600,00	134.545.600,00	37.000.000,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik			114.345.600,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	70.834.000,00	70.834.000,00	70.834.000,00	0,00			-	Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik	-		71.559.500,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				16 Unit	16 Unit	42.147.700,00	42.147.700,00	42.147.700,00	0,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik			41.003.500,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	28.686.300,00	28.686.300,00	28.686.300,00	0,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik			30.556.000,00	KECAMATAN DONOROJO
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**24.300.000,00**	**54.300.000,00**	**48.680.000,00**	**18.000.000,00**							**42.300.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	24.300.000,00	54.300.000,00	48.680.000,00	24.380.000,00			-	Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik	-		42.300.000,00	KECAMATAN DONOROJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	24.300.000,00	54.300.000,00	48.680.000,00	24.380.000,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik			42.300.000,00	KECAMATAN DONOROJO
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**131.138.500,00**	**362.138.500,00**	**308.338.500,00**	**115.216.000,00**							**246.354.500,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	131.138.500,00	362.138.500,00	308.338.500,00	177.200.000,00			-	- -	-		246.354.500,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				76 Lembaga Kemasyarakatan	76 Lembaga Kemasyarakatan	21.204.500,00	21.204.500,00	10.764.500,00	-10.440.000,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			21.204.500,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				13 Laporan	13 Laporan	109.934.000,00	340.934.000,00	297.574.000,00	187.640.000,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			225.150.000,00	KECAMATAN DONOROJO
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**32.600.000,00**	**32.600.000,00**	**36.280.000,00**	**56.000.000,00**							**88.600.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	32.600.000,00	32.600.000,00	36.280.000,00	3.680.000,00			-	- -	-		88.600.000,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	32.600.000,00	32.600.000,00	36.280.000,00	3.680.000,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			88.600.000,00	KECAMATAN DONOROJO
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**28.200.000,00**	**64.200.000,00**	**36.900.000,00**	**18.000.000,00**							**46.200.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	28.200.000,00	64.200.000,00	36.900.000,00	8.700.000,00			-	- -	-		46.200.000,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				8 Laporan	8 Laporan	28.200.000,00	64.200.000,00	36.900.000,00	8.700.000,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			46.200.000,00	KECAMATAN DONOROJO
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**76.550.000,00**	**152.930.000,00**	**125.270.000,00**	**9.170.000,00**							**85.720.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	76.550.000,00	152.930.000,00	125.270.000,00	48.720.000,00			-	Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik	-		85.720.000,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	41.450.000,00	87.830.000,00	63.690.000,00	22.240.000,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik			49.720.000,00	KECAMATAN DONOROJO
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	35.100.000,00	65.100.000,00	61.580.000,00	26.480.000,00	Kab. Pacitan, Donorojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik Meningkatkan Stabilitas Sosial dan Politik			36.000.000,00	KECAMATAN DONOROJO
	J U M L A H								**2.339.531.127,00**	**2.713.331.127,00**	**2.503.250.361,00**	**163.719.234,00**							**2.641.913.062,00**	

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P Renja) Kecamatan Donorojo , merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Donorojo yang telah disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, merupakan pedoman untuk penyusunan Renja Perangkat Daerah, dan acuan bagi Masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus evaluasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (P Renja) tahun 2025 tidak hanya ditentukan oleh Kecamatan Donorojo saja, namun juga membutuhkan dukungan Masyarakat dan stakeholder (para pemangku kepentingan). Serta untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Pacitan terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pacitan tahun 2021-2026 yaitu ***" Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA "*** .

Donorojo, 21 - 07 - 2025
Plt. CAMAT DONOROJO

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN DONOROJO

NASRUL HIDAYAT, S.STP., M.Si.
NIP. 19840320 200412 1 001

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
KABUPATEN PACITAN
Triwulan Tahun 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
1	**701.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**Nilai**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**74.15**	**2.064.517.527,00**	**0,00**	**391.932.289,00**	**74,75**	**440.616.579,00**	**0,00**	**72.338.358,00**	**0,00**	**0,00**	**74,75**	**904.887.226,00**	**100,81**	**43,83**	**74,75**	**904.887.226,00**	**0**	**0**	**Kecamatan Donorojo**
	701.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja PD**	**Dokumen**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**7**	**43.588.800,00**	**1,00**	**6.965.400,00**	**2,00**	**14.743.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**21.708.600,00**	**42,86**	**49,80**	**3,00**	**21.708.600,00**	**0**	**0**	
	701.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	7.00	35.025.000,00	4,00	4.585.200,00	2,00	9.519.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	14.104.800,00	85,71	40,27	6,00	14.104.800,00	0	0	
	701.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	2.00	2.691.000,00	1,00	647.400,00	0,00	1.563.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2.211.000,00	50,00	82,16	1,00	2.211.000,00	0	0	
	701.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	2.00	1.996.000,00	1,00	256.000,00	0,00	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.996.000,00	50,00	100,00	1,00	1.996.000,00	0	0	
	701.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Laporan Kinerja	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	6.00	3.876.800,00	2,00	1.476.800,00	2,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3.396.800,00	66,67	87,62	4,00	3.396.800,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	63,10	77,51					F
																				Predikat kinerja(%)	Rendah	Tinggi		4	4		
	701.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**14**	**1.558.112.826,00**	**2,00**	**319.649.497,00**	**12,00**	**369.699.873,00**	**0,00**	**72.338.358,00**	**0,00**	**0,00**	**14,00**	**761.687.728,00**	**100,00**	**48,89**	**14,00**	**761.687.728,00**	**0**	**0**	
	701.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	0.00	0,00	0.00	0,00	14	1.547.801.926,00	4,00	315.537.297,00	3,00	367.951.173,00	0,00	72.338.358,00	0,00	0,00	7,00	755.826.828,00	50,00	48,83	7,00	755.826.828,00	0	0	
	701.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	12.00	5.613.400,00	3,00	2.736.600,00	3,00	451.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	3.188.400,00	50,00	56,80	6,00	3.188.400,00	0	0	
	701.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	1.00	614.500,00	0,00	494.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.500,00	0,00	80,47	0,00	494.500,00	0	0	
	701.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	2.00	309.500,00	2,00	309.500,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	309.500,00	150,00	100,00	3,00	309.500,00	0	0	
	701.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	12.00	3.562.500,00	3,00	435.100,00	3,00	1.247.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1.682.500,00	50,00	47,23	6,00	1.682.500,00	0	0	
	701.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Proknosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	12	211.000,00	3,00	136.500,00	3,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	186.000,00	50,00	88,15	6,00	186.000,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	58,33	70,25					F
																				Predikat kinerja(%)	Rendah	Sedang		6	6		
	701.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pegawai dan Dokumen Kepegawaian yang dikelola PD**	**Pegawai**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**13.00**	**11.058.400,00**	**1,00**	**0,00**	**13,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**13,00**	**0,00**	**0**	**0**	
	701.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Paket	0.00	0,00	0.00	0,00	2	11.058.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0,00	0,00					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah		1	1		
	701.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100.00**	**87.490.761,00**	**25,00**	**23.334.800,00**	**41,66**	**19.995.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,66**	**43.330.500,00**	**66,66**	**49,53**	**66,66**	**43.330.500,00**	**0**	**0**	
	701.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor	Bulan	0.00	0,00	0.00	0,00	12	77.130.261,00	3,00	20.303.300,00	3,00	17.907.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	38.210.500,00	50,00	49,54	6,00	38.210.500,00	0	0	
	701.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	0.00	0,00	0.00	0,00	12	6.520.500,00	3,00	1.711.500,00	3,00	1.548.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	3.260.000,00	50,00	50,00	6,00	3.260.000,00	0	0	
	701.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Perjalanan Dinas Kantor	Bulan	0.00	0,00	0.00	0,00	12	3.840.000,00	3,00	1.320.000,00	3,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1.860.000,00	50,00	48,44	6,00	1.860.000,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	50,00	49,33					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah		3	3		
	701.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**%**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100.00**	**133.277.140,00**	**0,00**	**0,00**	**8,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,33**	**0,00**	**8,33**	**0,00**	**8,33**	**0,00**	**0**	**0**	
	701.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Terpenuhinya Fasilitas Kerja	Unit	0.00	0,00	0.00	0,00	2.00	55.926.400,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	50,00	0,00	1,00	0,00	0	0	
	701.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Fasilitasi Perangkat Daerah	Unit	0.00	0,00	0.00	0,00	1.00	35.794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	701.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Unit	0.00	0,00	0.00	0,00	1.00	41.556.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	16,67	0,00					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah		3	3		
	701.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemenuhan Daerah**	**%**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100.00**	**160.155.600,00**	**30,00**	**30.952.592,00**	**16,66**	**27.644.306,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,66**	**58.596.898,00**	**46,66**	**36,59**	**46,66**	**58.596.898,00**	**0**	**0**	
	701.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Pelayanan Surat Menyurat Perangkat Daerah	Bulan	0.00	0,00	0.00	0,00	12	6.698.000,00	3,00	1.145.000,00	3,00	1.380.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	2.525.600,00	50,00	37,71	6,00	2.525.600,00	0	0	
	701.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jumlah Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	0.00	0,00	0.00	0,00	12	18.912.000,00	3,00	4.472.942,00	3,00	3.638.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	8.111.848,00	50,00	42,89	6,00	8.111.848,00	0	0	
	701.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	0.00	0,00	0.00	0,00	12	134.545.600,00	3,00	25.334.650,00	3,00	22.624.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	47.959.450,00	50,00	35,65	6,00	47.959.450,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	50,00	38,75					F

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah		3	3		
	701.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase barang milik daerah yang dipelihara sehingga tetap masih dalam kondisi baik**	**%**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100.00**	**70.834.000,00**	**25,00**	**11.030.000,00**	**16,66**	**8.533.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,66**	**19.563.500,00**	**41,66**	**27,62**	**41,66**	**19.563.500,00**	**0**	**0**	
	701.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / operasional	Bulan	0.00	0,00	0.00	0,00	12	42.147.700,00	3,00	11.030.000,00	3,00	8.533.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	19.563.500,00	50,00	46,42	6,00	19.563.500,00	0	0	
	701.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bulan	0.00	0,00	0.00	0,00	12.00	28.686.300,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	50,00	0,00	6,00	0,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	50,00	23,21					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah		2	2		
																				Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	58,02	30,35					
																				Predikat kinerja(%)	Rendah	Sangat Rendah					
2	**701.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan**	**%**	**0,00**	**0,00**	**8.33**	**0,00**	**100**	**54.300.000,00**	**24,99**	**1.087.500,00**	**24,00**	**22.733.864,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,99**	**23.821.364,00**	**48,99**	**43,87**	**57,32**	**23.821.364,00**	**0**	**0**	**Kecamatan Donorojo**
	701.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah Layanan Pengantar KK, KTP dan Surat Legalitas Lainnya**	**Bulan**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**12**	**54.300.000,00**	**3,00**	**1.087.500,00**	**3,00**	**22.733.864,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**23.821.364,00**	**50,00**	**43,87**	**6,00**	**23.821.364,00**	**0**	**0**	
	701.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat wilayah Kecamatan Donorojo	Bulan	0.00	0,00	0.00	0,00	12.00	54.300.000,00	3,00	1.087.500,00	3,00	22.733.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	23.821.364,00	50,00	43,87	6,00	23.821.364,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	50,00	43,87					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah		1	1		
																				Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	50,00	43,87					
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
3	**701.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan**	**%**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100**	**362.138.500,00**	**24,99**	**19.860.500,00**	**24,99**	**17.240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,98**	**37.100.500,00**	**49,98**	**10,24**	**49,98**	**37.100.500,00**	**0**	**0**	**Kecamatan Donorojo**
	701.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Desa Yang DiFasilitasi**	**Desa**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**12**	**362.138.500,00**	**1,00**	**19.860.500,00**	**12,00**	**17.240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,00**	**37.100.500,00**	**100,00**	**10,24**	**12,00**	**37.100.500,00**	**0**	**0**	
	701.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Desa	Bulan	0.00	0,00	0.00	0,00	13	21.204.500,00	3,00	8.004.500,00	3,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	8.724.500,00	46,15	41,14	6,00	8.724.500,00	0	0	
	701.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Bulan	0.00	0,00	0.00	0,00	12	340.934.000,00	4,00	11.856.000,00	2,00	16.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	28.376.000,00	50,00	8,32	6,00	28.376.000,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	48,08	24,73					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah		2	2		
																				Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	100,00	10,24					
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah					
4	**701.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan**	**%**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100**	**32.600.000,00**	**24,99**	**12.571.500,00**	**24,99**	**540.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,98**	**13.111.500,00**	**49,98**	**40,22**	**49,98**	**13.111.500,00**	**0**	**0**	**Kecamatan Donorojo**
	701.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Pemenuhan Upaya Penyelengaraan Keamanan dan Ketertiban Umum**	**Desa**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**12**	**32.600.000,00**	**1,00**	**12.571.500,00**	**12,00**	**540.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,00**	**13.111.500,00**	**100,00**	**40,22**	**12,00**	**13.111.500,00**	**0**	**0**	
	701.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Bulan	0.00	0,00	0.00	0,00	12	32.600.000,00	3,00	12.571.500,00	3,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	13.111.500,00	50,00	40,22	6,00	13.111.500,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	50,00	40,22					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah		1	1		
																				Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	100,00	40,22					
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah					
5	**701.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan**	**%**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100**	**64.200.000,00**	**24,99**	**5.240.000,00**	**24,99**	**14.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,98**	**19.340.000,00**	**49,98**	**30,12**	**49,98**	**19.340.000,00**	**0**	**0**	**Kecamatan Donorojo**
	701.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Pelayanan Bantuan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan**	**Bulan**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**12**	**64.200.000,00**	**3,00**	**5.240.000,00**	**3,00**	**14.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**19.340.000,00**	**50,00**	**30,12**	**6,00**	**19.340.000,00**	**0**	**0**	
	701.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Desa	0.00	0,00	0.00	0,00	12	64.200.000,00	1,00	5.240.000,00	12,00	14.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	19.340.000,00	100,00	30,12	12,00	19.340.000,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	100,00	30,12					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah		1	1		
																				Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	50,00	30,12					
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
6	**701.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yang termonitoring**	**%**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100**	**152.930.000,00**	**24,99**	**12.620.000,00**	**24,99**	**34.140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,98**	**46.760.000,00**	**49,98**	**30,58**	**49,98**	**46.760.000,00**	**0**	**0**	**Kecamatan Donorojo**
	701.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Bulan**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**12**	**152.930.000,00**	**3,00**	**12.620.000,00**	**3,00**	**34.140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**46.760.000,00**	**50,00**	**30,58**	**6,00**	**46.760.000,00**	**0**	**0**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
	701.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	12	87.830.000,00	3,00	8.580.000,00	3,00	18.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	27.300.000,00	50,00	31,08	6,00	27.300.000,00	0	0	
	701.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pembinaan Linmas Desa	Desa	0.00	0,00	0.00	0,00	12	65.100.000,00	1,00	4.040.000,00	12,00	15.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	19.460.000,00	100,00	29,89	12,00	19.460.000,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					75,00	30,49					F
Predikat kinerja(%)																					Sedang	Sangat Rendah		2	2		
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					50,00	30,58					
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah					
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)																					58,29	33,14					
Predikat kinerja(%)																					Rendah	Sangat Rendah					
Total																					**2.730.686.027,00**			**1.045.020.590,00**			
Persentase Realisasi Anggaran																					**38.27%**						
Predikat																					**Sangat Rendah**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Sumber dana, Prioritas Kinerja, Komitmen antar pegawai dalam melaksanakan tugas, kondisi lingkungan kerja baik, dukungan atasan

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Keterbatasan SDM, sarana prasarana yang kurang memadai

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Pemenuhan dan peningkatan SDM, pemenuhan sarana prasarana

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Pemenuhan dan peningkatan SDM, pemenuhan sarana prasarana

Pacitan, 19 Juli 2025

PLT. CAMAT DONOROJO

KABUPATEN PACITAN

NASRUL HIDAYAT, S.STP., M.Si.

Penata TK. I

NIP. 19840320 200412 1 001

LAPORAN EVALUASI APBD KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025
KECAMATAN DONOROJO
PERIODE : JUNI

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
701	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**Nilai**	**74.15**	**2.047.162.627,00**	**74.75**	**832.548.868,00**	**100.81%**	**40.67%**
701	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja PD**	**Dokumen**	**7**	**43.588.800,00**	**3.00**	**21.708.600,00**	**42.86%**	**49.8%**
701	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7.00	35.025.000,00	6.00	14.104.800,00	85.71%	40.27%
			0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2.00	2.691.000,00	1.00	2.211.000,00	50%	82.16%
			0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	2.00	1.996.000,00	1.00	1.996.000,00	50%	100%
			0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Laporan Kinerja	Dokumen	6.00	3.876.800,00	4.00	3.396.800,00	66.67%	87.62%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											63,10	77,51
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Rendah	Tinggi
701	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**14**	**1.558.112.826,00**	**14.00**	**689.349.370,00**	**100%**	**44.24%**
701	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	1.547.801.926,00	7.00	683.488.470,00	50%	44.16%
			0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12.00	5.613.400,00	6.00	3.188.400,00	50%	56.8%
			0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1.00	614.500,00	0.00	494.500,00	0%	80.47%
			0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2.00	309.500,00	3.00	309.500,00	150%	100%
			0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	12.00	3.562.500,00	6.00	1.682.500,00	50%	47.23%
			0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Proknosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Dokumen	12	211.000,00	6.00	186.000,00	50%	88.15%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											58,33	69,47
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Rendah	Sedang
701	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pegawai dan Dokumen Kepegawaian yang dikelola PD**	**Pegawai**	**13.00**	**11.058.400,00**	**13.00**	**0,00**	**100%**	**0%**
701	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Paket	2	11.058.400,00	0.00	0,00	0%	0%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											0,00	0,00
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
701	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**	**100.00**	**87.490.761,00**	**66.66**	**43.330.500,00**	**66.66%**	**49.53%**
701	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	77.130.261,00	6.00	38.210.500,00	50%	49.54%
			0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	12	6.520.500,00	6.00	3.260.000,00	50%	50%
			0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Perjalanan Dinas Kantor	Bulan	12	3.840.000,00	6.00	1.860.000,00	50%	48.44%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											50,00	49,33
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
701	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**%**	**100.00**	**133.277.140,00**	**8.33**	**0,00**	**8.33%**	**0%**
701	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Terpenuhinya Fasilitas Kerja	Unit	2.00	55.926.400,00	1.00	0,00	50%	0%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Unit	1.00	41.556.740,00	0.00	0,00	0%	0%
			0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Fasilitasi Perangkat Daerah	Unit	1.00	35.794.000,00	0.00	0,00	0%	0%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											16,67	0,00
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
701	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemenuhan Daerah**	**%**	**100.00**	**160.155.600,00**	**46.66**	**58.596.898,00**	**46.66%**	**36.59%**
701	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Pelayanan Surat Menyurat Perangkat Daerah	Bulan	12	6.698.000,00	6.00	2.525.600,00	50%	37.71%
			0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jumlah Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	18.912.000,00	6.00	8.111.848,00	50%	42.89%
			0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	134.545.600,00	6.00	47.959.450,00	50%	35.65%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											50,00	38,75
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
701	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase barang milik daerah yang dipelihara sehingga tetap masih dalam kondisi baik**	**%**	**100.00**	**70.834.000,00**	**41.66**	**19.563.500,00**	**41.66%**	**27.62%**
701	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / operasional	Bulan	12	42.147.700,00	6.00	19.563.500,00	50%	46.42%
			0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bulan	12.00	28.686.300,00	6.00	0,00	50%	0%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											50,00	23,21
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
701	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan**	**%**	**100**	**54.300.000,00**	**48.99**	**23.821.364,00**	**48.99%**	**43.87%**
701	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah Layanan Pengantar KK, KTP dan Surat Legalitas Lainnya**	**Bulan**	**12**	**54.300.000,00**	**6.00**	**23.821.364,00**	**50%**	**43.87%**
701	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat wilayah Kecamatan Donorojo	Bulan	12.00	54.300.000,00	6.00	23.821.364,00	50%	43.87%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											50,00	43,87
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											50,00	43,87
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
701	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan**	**%**	**100**	**362.138.500,00**	**49.98**	**37.100.500,00**	**49.98%**	**10.24%**
701	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Desa Yang DiFasilitasi**	**Desa**	**12**	**362.138.500,00**	**12.00**	**37.100.500,00**	**100%**	**10.24%**
701	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Desa	Bulan	13	21.204.500,00	6.00	8.724.500,00	46.15%	41.14%
			0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Bulan	12	340.934.000,00	6.00	28.376.000,00	50%	8.32%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											48,08	24,73
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											100,00	10,24
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Tinggi	Sangat Rendah

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
701	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan**	**%**	**100**	**32.600.000,00**	**49.98**	**13.111.500,00**	**49.98%**	**40.22%**
701	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Pemenuhan Upaya Penyelengaraan Keamanan dan Ketertiban Umum**	**Desa**	**12**	**32.600.000,00**	**12.00**	**13.111.500,00**	**100%**	**40.22%**
701	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Bulan	12	32.600.000,00	6.00	13.111.500,00	50%	40.22%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											50,00	40,22
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											100,00	40,22
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Tinggi	Sangat Rendah
701	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan**	**%**	**100**	**64.200.000,00**	**49.98**	**19.340.000,00**	**49.98%**	**30.12%**
701	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Pelayanan Bantuan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan**	**Bulan**	**12**	**64.200.000,00**	**6.00**	**19.340.000,00**	**50%**	**30.12%**
701	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Desa	12	64.200.000,00	12.00	19.340.000,00	100%	30.12%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	30,12
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											50,00	30,12
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
701	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yang termonitoring**	**%**	**100**	**152.930.000,00**	**49.98**	**46.760.000,00**	**49.98%**	**30.58%**
701	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Bulan**	**12**	**152.930.000,00**	**6.00**	**46.760.000,00**	**50%**	**30.58%**
701	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	12	87.830.000,00	6.00	27.300.000,00	50%	31.08%
			0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pembinaan Linmas Desa	Desa	12	65.100.000,00	12.00	19.460.000,00	100%	29.89%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											75,00	30,49
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sedang	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											50,00	30,58
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja seluruh program(%)											58,29	32,62
Predikat kinerja seluruh program(%)											Rendah	Sangat Rendah
Total								**2.730.686.027,00**		**972.682.232,00**		
Persentase Realisasi Anggaran										**35.62%**		
Predikat										**Sangat Rendah**		

Pacitan, 19 Juli 2025

PLT. CAMAT DONOROJO

KABUPATEN PACITAN

NASRUL HIDAYAT, S.STP., M.Si.

Penata TK. I

NIP. 19840320 200412 1 001

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
KABUPATEN PACITAN
Triwulan 2 Tahun 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
1	**701.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**Nilai**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**74.15**	**2.064.517.527,00**	**0,00**	**391.932.289,00**	**74,75**	**440.616.579,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,75**	**832.548.868,00**	**100,81**	**40,33**	**74,75**	**832.548.868,00**	**0**	**0**	**Kecamatan Donorojo**
	701.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja PD**	**Dokumen**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**7**	**43.588.800,00**	**1,00**	**6.965.400,00**	**2,00**	**14.743.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**21.708.600,00**	**42,86**	**49,80**	**3,00**	**21.708.600,00**	**0**	**0**	
	701.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	7.00	35.025.000,00	4,00	4.585.200,00	2,00	9.519.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	14.104.800,00	85,71	40,27	6,00	14.104.800,00	0	0	
	701.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	2.00	2.691.000,00	1,00	647.400,00	0,00	1.563.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2211000	50,00	82,16	1,00	2.211.000,00	0	0	
	701.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	2.00	1.996.000,00	1,00	256.000,00	0,00	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1996000	50,00	100,00	1,00	1.996.000,00	0	0	
	701.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Laporan Kinerja	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	6.00	3.876.800,00	2,00	1.476.800,00	2,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3396800	66,67	87,62	4,00	3.396.800,00	0	0	
																					Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)						1=1
																					Predikat kinerja(%)	Rendah	Tinggi				
	701.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**14**	**1.558.112.826,00**	**2,00**	**319.649.497,00**	**12,00**	**369.699.873,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,00**	**689.349.370,00**	**100,00**	**44,24**	**14,00**	**689.349.370,00**	**0**	**0**	
	701.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	0.00	0,00	0.00	0,00	14	1.547.801.926,00	4,00	315.537.297,00	3,00	367.951.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	683.488.470,00	50,00	44,16	7,00	683.488.470,00	0	0	
	701.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	12.00	5.613.400,00	3,00	2.736.600,00	3,00	451.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	3188400	50,00	56,80	6,00	3.188.400,00	0	0	
	701.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	1.00	614.500,00	0,00	494.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494500	0,00	80,47	0,00	494.500,00	0	0	
	701.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	2.00	309.500,00	2,00	309.500,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	309500	150,00	100,00	3,00	309.500,00	0	0	
	701.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	12.00	3.562.500,00	3,00	435.100,00	3,00	1.247.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1682500	50,00	47,23	6,00	1.682.500,00	0	0	
	701.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Proknosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	12	211.000,00	3,00	136.500,00	3,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	186000	50,00	88,15	6,00	186.000,00	0	0	
																					Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)						1=2
																					Predikat kinerja(%)	Rendah	Sedang				
	701.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pegawai dan Dokumen Kepegawaian yang dikelola PD**	**Pegawai**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**13.00**	**11.058.400,00**	**1,00**	**0,00**	**13,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**13,00**	**0,00**	**0**	**0**	
	701.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Paket	0.00	0,00	0.00	0,00	2	11.058.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
																					Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)						1=3
																					Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	701.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100.00**	**87.490.761,00**	**25,00**	**23.334.800,00**	**41,66**	**19.995.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,66**	**43.330.500,00**	**66,66**	**49,53**	**66,66**	**43.330.500,00**	**0**	**0**	
	701.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Bahan Logistik Kantor	Bulan	0.00	0,00	0.00	0,00	12	77.130.261,00	3,00	20.303.300,00	3,00	17.907.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	38.210.500,00	50,00	49,54	6,00	38.210.500,00	0	0	
	701.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	0.00	0,00	0.00	0,00	12	6.520.500,00	3,00	1.711.500,00	3,00	1.548.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	3260000	50,00	50,00	6,00	3.260.000,00	0	0	
	701.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Perjalanan Dinas Kantor	Bulan	0.00	0,00	0.00	0,00	12	3.840.000,00	3,00	1.320.000,00	3,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1860000	50,00	48,44	6,00	1.860.000,00	0	0	
																					Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)						1=4
																					Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	701.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**%**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100.00**	**133.277.140,00**	**0,00**	**0,00**	**8,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,33**	**0,00**	**8,33**	**0,00**	**8,33**	**0,00**	**0**	**0**	
	701.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Terpenuhinya Fasilitas Kerja	Unit	0.00	0,00	0.00	0,00	2.00	55.926.400,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	50,00	0,00	1,00	0,00	0	0	
	701.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Unit	0.00	0,00	0.00	0,00	1.00	41.556.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	701.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Fasilitasi Perangkat Daerah	Unit	0.00	0,00	0.00	0,00	1.00	35.794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
																					Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)						1=5
																					Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	701.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemenuhan Daerah**	**%**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100.00**	**160.155.600,00**	**30,00**	**30.952.592,00**	**16,66**	**27.644.306,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,66**	**58.596.898,00**	**46,66**	**36,59**	**46,66**	**58.596.898,00**	**0**	**0**	
	701.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Pelayanan Surat Menyurat Perangkat Daerah	Bulan	0.00	0,00	0.00	0,00	12	6.698.000,00	3,00	1.145.000,00	3,00	1.380.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	2.525.600,00	50,00	37,71	6,00	2.525.600,00	0	0	
	701.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Terpenuhinya Jumlah Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	0.00	0,00	0.00	0,00	12	18.912.000,00	3,00	4.472.942,00	3,00	3.638.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	8111848	50,00	42,89	6,00	8.111.848,00	0	0	
	701.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	0.00	0,00	0.00	0,00	12	134.545.600,00	3,00	25.334.650,00	3,00	22.624.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	47959450	50,00	35,65	6,00	47.959.450,00	0	0	
																					Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)						1=6
																					Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	701.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase barang milik daerah yang dipelihara sehingga tetap masih dalam kondisi baik**	**%**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100.00**	**70.834.000,00**	**25,00**	**11.030.000,00**	**16,66**	**8.533.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,66**	**19.563.500,00**	**41,66**	**27,62**	**41,66**	**19.563.500,00**	**0**	**0**	
	701.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / operasional	Bulan	0.00	0,00	0.00	0,00	12	42.147.700,00	3,00	11.030.000,00	3,00	8.533.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	19.563.500,00	50,00	46,42	6,00	19.563.500,00	0	0	
	701.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bulan	0.00	0,00	0.00	0,00	12.00	28.686.300,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0	50,00	0,00	6,00	0,00	0	0	
																					Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)						1=7
																					Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
																					Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	406,17	207,78	406.17/1			
																					Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Komitmen dan Tanggungjawab dari semua pihak

Faktor penghambat pencapaian kinerja : SDM dan Sarana Prasarana yang kurang memadai

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui perubahan mind set dan culture set aparaturnya

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melakukan evaluasi secara berkala

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
2	**701.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan**	**%**	**0,00**	**0,00**	**8.33**	**0,00**	**100**	**54.300.000,00**	**24,99**	**1.087.500,00**	**24,00**	**22.733.864,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,99**	**23.821.364,00**	**48,99**	**43,87**	**57,32**	**23.821.364,00**	**0**	**0**	**Kecamatan Donorojo**
	701.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah Layanan Pengantar KK, KTP dan Surat Legalitas Lainnya**	**Bulan**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**12**	**54.300.000,00**	**3,00**	**1.087.500,00**	**3,00**	**22.733.864,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**23.821.364,00**	**50,00**	**43,87**	**6,00**	**23.821.364,00**	**0**	**0**	
	701.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat wilayah Kecamatan Donorojo	Bulan	0.00	0,00	0.00	0,00	12.00	54.300.000,00	3,00	1.087.500,00	3,00	22.733.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	23.821.364,00	50,00	43,87	6,00	23.821.364,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					50,00	43,87					1=1
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah					
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					50,00	43,87	50/1				
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Komitmen dan tanggungjawab dari semua pihak																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja : SDM dan Sarana Prasarana yang kurang memadai																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Meningkatkan pelayanan publik melalui perubahan mind set																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melakukan Evaluasi Secara berkala																											
3	**701.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan**	**%**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100**	**362.138.500,00**	**24,99**	**19.860.500,00**	**24,99**	**17.240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,98**	**37.100.500,00**	**49,98**	**10,24**	**49,98**	**37.100.500,00**	**0**	**0**	**Kecamatan Donorojo**
	701.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Desa Yang DiFasilitasi**	**Desa**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**12**	**362.138.500,00**	**1,00**	**19.860.500,00**	**12,00**	**17.240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,00**	**37.100.500,00**	**100,00**	**10,24**	**12,00**	**37.100.500,00**	**0**	**0**	
	701.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Desa	Bulan	0.00	0,00	0.00	0,00	13	21.204.500,00	3,00	8.004.500,00	3,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	8.724.500,00	46,15	41,14	6,00	8.724.500,00	0	0	
	701.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Bulan	0.00	0,00	0.00	0,00	12	340.934.000,00	4,00	11.856.000,00	2,00	16.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	28376000	50,00	8,32	6,00	28.376.000,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					48,08	24,73					1=1
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah					
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					100,00	10,24	100/1				
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Rendah					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Tanggungjawab dan Komitmen dari semua pihak																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja : SDM dan Sarana Prasarana yang kurang memadai																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Meningkatkan kualitas pelayanan publik																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melakukan evaluasi secara berkala																											
4	**701.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan**	**%**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100**	**32.600.000,00**	**24,99**	**12.571.500,00**	**24,99**	**540.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,98**	**13.111.500,00**	**49,98**	**40,22**	**49,98**	**13.111.500,00**	**0**	**0**	**Kecamatan Donorojo**
	701.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Pemenuhan Upaya Penyelengaraan Keamanan dan Ketertiban Umum**	**Desa**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**12**	**32.600.000,00**	**1,00**	**12.571.500,00**	**12,00**	**540.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,00**	**13.111.500,00**	**100,00**	**40,22**	**12,00**	**13.111.500,00**	**0**	**0**	
	701.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Bulan	0.00	0,00	0.00	0,00	12	32.600.000,00	3,00	12.571.500,00	3,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	13.111.500,00	50,00	40,22	6,00	13.111.500,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					50,00	40,22					1=1
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah					
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					100,00	40,22	100/1				
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Rendah					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Komitmen dan Tanggungjawab dari semua Pihak																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja : SDM dan Sarana Prasarana yang kurang memadai																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Meningkatkan kualitas pelayanan publik																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melakukan evaluasi secara berkala																											
5	**701.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan**	**%**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100**	**64.200.000,00**	**24,99**	**5.240.000,00**	**24,99**	**14.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,98**	**19.340.000,00**	**49,98**	**30,12**	**49,98**	**19.340.000,00**	**0**	**0**	**Kecamatan Donorojo**
	701.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Pelayanan Bantuan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan**	**Bulan**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**12**	**64.200.000,00**	**3,00**	**5.240.000,00**	**3,00**	**14.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**19.340.000,00**	**50,00**	**30,12**	**6,00**	**19.340.000,00**	**0**	**0**	
	701.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Desa	0.00	0,00	0.00	0,00	12	64.200.000,00	1,00	5.240.000,00	12,00	14.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	19.340.000,00	100,00	30,12	12,00	19.340.000,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					100,00	30,12					1=1
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sangat Rendah					
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					50,00	30,12	50/1				
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Komitmen dan Tanggungjawab dari semua pihak																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja : SDM dan Sarana Prasarana yang kurang memadai																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Meningkatkan kualitas pelayanan publik																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melakukan evaluasi secara berkala																											
6	**701.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yang termonitoring**	**%**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100**	**152.930.000,00**	**24,99**	**12.620.000,00**	**24,99**	**34.140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,98**	**46.760.000,00**	**49,98**	**30,58**	**49,98**	**46.760.000,00**	**0**	**0**	**Kecamatan Donorojo**
	701.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Bulan**	**0.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**12**	**152.930.000,00**	**3,00**	**12.620.000,00**	**3,00**	**34.140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**46.760.000,00**	**50,00**	**30,58**	**6,00**	**46.760.000,00**	**0**	**0**	
	701.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	12	87.830.000,00	3,00	8.580.000,00	3,00	18.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	27.300.000,00	50,00	31,08	6,00	27.300.000,00	0	0	
	701.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pembinaan Linmas Desa	Desa	0.00	0,00	0.00	0,00	12	65.100.000,00	1,00	4.040.000,00	12,00	15.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	19460000	100,00	29,89	12,00	19.460.000,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					75,00	30,49					1=1
Predikat kinerja(%)																					Sedang	Sangat Rendah					
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					50,00	30,58	50/1				
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Komitmen dan Tanggungjawab dari semua pihak																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja : SDM dan Sarana Prasarana yang kurang memadai																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melakukan evaluasi secara berkala																											
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)																					58,29	32,56					
Predikat kinerja(%)																					Rendah	Sangat Rendah					
Total																						**2.730.686.027,00**				**972.682.232,00**	
Persentase Realisasi Anggaran																										**35.62%**	
Predikat																										**Sangat Rendah**	

Pacitan, 19 Juli 2025

PLT. CAMAT DONOROJO

KABUPATEN PACITAN

NASRUL HIDAYAT, S.STP., M.Si.

Penata TK. I

NIP. 19840320 200412 1 001

PERUBAHAN RENCANA KERJA
(RENJA)
KECAMATAN PUNUNG
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN PUNUNG

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayat-Nya sehingga Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) PD Kecamatan Punung Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Dokumen Renja Perubahan ini disusun untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Permendagri nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam laporan ini, belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan dimasa yang akan datang.

Punung, 22 Juli 2025
CAMAT PUNUNG

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN PUNUNG

PUDJI HARYONO, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19690216 199003 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I : PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 6
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Punung 11
2.3 Isu-isu Penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD 12
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD 2025 15
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 20
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan 20
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 21
3.3 Program dan Kegiatan 21
BAB IV PENUTUP 26

BAB I :
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Aanggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Punung adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Perangkat Daerah Kecamatan Punung, dan pelaksanaa tugas pelayanan publik sebagai tindak lanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan Perangkat Daerah yang dicapai pada masa satu tahun. Adapun penyusunan dokumen Renja Kecamatan Punung sangat terkait dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pacitan terpilih tahun 2021-2026 dan Renstra Kecamatan Punung, maka untuk merealisasikan strategi pencapaian Visi Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Terpilih yaitu ”***Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia***”, Kecamatan Punung dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan menitik beratkan pada misi yang ke empat yaitu Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional dan Melayani.

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Punung Tahun 2025 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, RKPD Perubahan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 serta Renstra Kecamatan Punung Tahun 2021-2026 dengan mempertimbangkan dinamika situasi, kondisi serta kebutuhan terkini terkini dari Perangkat Daerah dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun- tahun sebelumnya. Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Punung Tahun 2025 merupakan output dari proses perencanaan yang akan dijadikan sebagai pedoman dan arah bagi penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Punung guna kelancaran pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pokok Kecamatan Punung.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renja Perubahan PD Kecamatan Punung tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Derah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
18. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 170 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perengkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026;
19. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 36 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
20. Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 100.3.3.2/423/KPTS/408.12/2025 Tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Punung adalah sebagai arah dan pedoman bagi Aparatur Kecamatan Punung dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan dengan rasa tanggung jawab, disiplin, dan loyalitas yang tinggi, terukur, serta lebih proaktif, visioner dan profesional sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu Rencana Kerja

Kecamatan Punung dapat dipergunakan dalam rangka sinergitas oleh Pemerintah Desa serta sebagai acuan dalam sinkronisasi kegiatan di masing-masing desa sesuai kewenangannya.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Punung adalah sebagai kerangka acuan dan pedoman kerja bagi seluruh Aparatur Kecamatan Punung yang merupakan unsur pelaksana kegiatan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Selain itu hal penting disusunnya renja PD adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dengan adanya Rencana Kerja ini mendorong timbulnya etos kerja, sikap dan budaya kerja aparatur pemerintah daerah yang handal sesuai dengan tuntutan zaman yaitu reformasi birokrasi yang mengedepankan karakter Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berpijak pada maksud tersebut, maka tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1) Sebagai acuan Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pacitan;
2) Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Punung;
3) Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan Tahun 2025;
4) Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD

2.2 Analisis Kinerja pelayanan PD

2.3 Isu-isu Penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DAN

4.1 Rencana Kerja dan Kegiatan

4.2 Indikator Kinerja

4.3 Kelompok sasaran

4.4 Pendanaan Indikatif

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II

Pelaksanaan Renja PD Kecamatan Punung Tahun 2025 mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada Kecamatan. Tugas Pokok Kecamatan berdasar Peraturan daerah Kabupaten Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi, Serta tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan. Kecamatan adalah membantu Kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Pacitan. Adapun fungsi dari Kecamatan Punung adalah :

1. Perencanaan yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengelolaan dana, penilaian dan penyusunan rencana program di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat serta pemerintah desa.
2. Pelaksanaan yang meliputi kegiatan pelayanan dan pembinaan masyarakat dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat serta pemerintah Desa.
3. Melakukan pegawasan terhadap pelansanaan tugas-tugas pokok seperti diatas
4. Melaksanakan tugas-tugas ketata usahaan.
5. Pengkoordinasikan integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain dilingkungan kecamatan.
6. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan dinas /instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas

Renja Perubahan Kecamatan Punung tahun 2025 merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Punung, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pacitan 2021-2026 . Adapun pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Punung antaran lain :

Sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi

dalam pelaksanaanya. Oleh karena itu Renja Perubahan Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan Tahun 2025 juga harus dilakukan evaluasi Adapun hasil evaluasi terhadap Renja Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan sampai dengan triwulan II Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut :

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Rencana Tahun 2025		Realisasi TW II		Rasio Pencapaian	
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2		3	4	5		6	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**Nilai**	**72.6**	**2.157.416.048**	**76.85**	**1.198.909.770**	**105.85%**	**55.57%**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Capaian Kinerja PD**	**Dokumen**	**9**	**13.584.500**	**5**	**8.973.000**	**55.56%**	**66.05%**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	13.584.500	2	8.973.000	22.22%	66.05%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**14**	**1.766.139.230**	**7**	**919.195.738**	**50%**	**52.05%**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	16	1.754.039.230	15	915.065.738	93.75%	52.17%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	6	12.100.000	3	4.130.000	50%	34.13%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Prosentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Daerah**	**%**	**100**	**25.000.000**	**100**	**24.952.800**	**108%**	**99.81%**
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kali	1	25.000.000	1	24.952.800	100%	99.81%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Prosentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum**	**%**	**100**	**102.232.307**	**45**	**64.120.500**	**45%**	**62.72%**
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	45.357.118	2	28.995.000	50%	63.93%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	53.205.189	3	31.685.500	50%	59.55%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	3.670.000	7	3.440.000	58.33%	93.73%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**100**	**173.710.400**	**50**	**87.152.632**	**50%**	**50.17%**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	23.543.000	6	11.169.632	50%	47.44%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	150.167.400	6	75.983.000	50%	50.60%

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Pemenuhan Belanja Barang/Jasa, Modal dan Belanja Pegawai Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**76.749.611**	**60**	**68.084.300**	**55%**	**88.71%**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	8	12.550.000	4	4.360.000	50%	34.74%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	64.199.611	1	63.724.300	100%	99.26%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan**	**%**	**100**	**28.991.600**	**100**	**17.200.000**	**100%**	**59.33%**
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**Jumlah layanan yang tidak dilaksanakan oleh OPD yang diselenggarakan oleh kecamatan**	**Layanan**	**10**	**28.991.600**	**10**	**17.200.000**	**100%**	**59.33%**
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	28.991.600	6	17.200.000	50.00%	59.33%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Yang Dilaksanakan**	**%**	**100**	**112.054.000**	**45**	**45.650.000**	**45%**	**40.74%**
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang dikoordinasikan**	**Kegiatan**	**3**	**112.054.000**	**1**	**45.650.000**	**33.33%**	**40.74%**
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Desa	13	26.423.000	7	19.700.000	53.85%	74.56%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	3	85.631.000	1	25.950.000	33.33%	30.30%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan**	**%**	**100**	**29.700.000**	**52**	**20.880.000**	**52%**	**70.30%**
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dikoordinasikan**	**Kali**	**13**	**29.700.000**	**8**	**20.880.000**	**61.54%**	**70.30%**
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	4	29.700.000	2	20.880.000	50%	70.30%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan**	**%**	**100**	**12.570.000**	**60**	**4.500.000**	**60%**	**35.80%**

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang terselenggara**	**Kali**	**4**	**12.570.000**	**2**	**4.500.000**	**50%**	**35.80%**
Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	4	12.570.000	2	4.500.000	50%	35.80%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Desa yang termonitoring**	**%**	**100**	**48.070.000**	**100**	**27.120.000**	**100%**	**56.42%**
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah desa yang menerima pembinaan dan pengawasan (binwas sesuai PP 43/2014)**	**Desa**	**13**	**48.070.000**	**7**	**27.120.000**	**53.85%**	**56.42%**
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	13	14.450.000	8	3.360.000	61.54%	23.25%
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	13	16.570.000	7	12.985.000	53.85%	78.36%
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Dokumen	13	17.050.000	7	10.775.000	53.85%	63.20%
TOTAL ANGGARAN				**2.388.801.648**		**1.314.259.770**	**55.02%**	

Secara keseluruhan, realisasi anggaran Kecamatan Punung hingga Triwulan II tahun 2025 mencapai 55,02% atau sebesar Rp 1.314.259.770 dari total anggaran Rp 2.388.801.648. Capaian ini didukung oleh beberapa program yang berjalan dengan sangat baik, namun juga dihadapkan pada tantangan pada program lainnya.

Faktor keberhasilan utama dalam pencapaian kinerja hingga pertengahan tahun ini secara umum berasal dari kemampuan eksekusi yang tinggi pada program-program yang bersifat rutin dan terkelola secara internal. Kegiatan-kegiatan ini, seperti pemenuhan administrasi kepegawaian atau pemeliharaan aset fisik kantor, memiliki alur kerja yang sudah mapan dan target yang terukur dengan jelas. Karena pelaksanaannya tidak banyak bergantung pada variabel di luar kendali organisasi, proses perencanaan hingga realisasi dapat berjalan linear dan dapat diprediksi. Anggaran untuk pos-pos ini cenderung pasti dan proses pencairannya lebih sederhana, sehingga realisasi keuangan dan fisik dapat berjalan beriringan dan mencapai persentase yang tinggi sesuai jadwal.

Di sisi lain, tantangan terbesar yang menjadi faktor penghambat umumnya muncul pada kegiatan yang menuntut koordinasi ekstensif dengan pihak

eksternal dan membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat luas. Program-program semacam ini memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi karena keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh kinerja internal, tetapi juga oleh dinamika, kesiapan, dan respons dari para pemangku kepentingan di luar organisasi. Proses menyatukan jadwal, menyamakan persepsi, dan memobilisasi masyarakat membutuhkan waktu dan sumber daya yang tidak selalu bisa diprediksi secara akurat dalam dokumen perencanaan. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara target yang ditetapkan di atas kertas dengan realita di lapangan, yang menyebabkan rendahnya capaian fisik maupun penyerapan anggaran.

Beberapa program dan kegiatan menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan tingkat realisasi fisik dan keuangan yang tinggi, menandakan pelaksanaan yang efektif dan sesuai jadwal. Dari data evaluasi, dapat disimpulkan bahwa kinerja yang tinggi cenderung dicapai pada kegiatan yang bersifat rutin, administratif, dan terkelola secara internal. Kegiatan seperti pembayaran gaji, administrasi kantor, dan pemeliharaan aset yang terjadwal memiliki proses yang jelas sehingga mudah dieksekusi sesuai rencana. Sebaliknya, tantangan dan kinerja yang rendah umumnya ditemukan pada program yang memerlukan koordinasi eksternal, partisipasi masyarakat, dan memiliki proses administrasi yang kompleks. Program pemberdayaan masyarakat, yang sangat bergantung pada dinamika dan partisipasi di tingkat desa, menunjukkan kelambatan yang signifikan. Selain itu, beberapa kegiatan dengan realisasi anggaran yang sangat rendah meskipun kinerja fisiknya cukup berjalan mengindikasikan adanya potensi hambatan dalam proses penatausahaan dan verifikasi keuangan, yang perlu menjadi fokus perhatian pada triwulan berikutnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Punung

Untuk memastikan pencapaian target 100% pada akhir tahun anggaran, diperlukan sebuah strategi terpadu yang berfokus pada percepatan program berkinerja rendah sambil mengatasi hambatan internal. Prioritas utama harus diberikan pada program yang memerlukan koordinasi eksternal, terutama

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, yang capaian fisiknya baru mencapai 45%. Strategi untuk ini adalah dengan mengintensifkan komunikasi dan rapat koordinasi bersama pemerintah desa dan tokoh masyarakat, serta melakukan evaluasi ulang terhadap rencana kerja lapangan agar lebih realistis untuk dieksekusi di Triwulan III dan IV. Keberhasilan akselerasi ini juga harus didukung dengan mempercepat realisasi anggaran untuk kegiatan operasional krusial, seperti jasa pemeliharaan kendaraan dinas yang serapannya masih sangat rendah di angka 34,74%, karena ketersediaan sarana ini vital untuk menunjang kegiatan di lapangan.

Selanjutnya, perhatian khusus harus diarahkan untuk mengatasi hambatan administratif internal yang teridentifikasi dari adanya kegiatan dengan kinerja fisik yang cukup maju namun serapan anggarannya sangat rendah. Contoh yang paling jelas adalah pada Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan serapan anggaran hanya 23,25% dan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan sebesar 34,13%. Kondisi ini mengindikasikan adanya penyumbatan dalam alur kerja keuangan. Oleh karena itu, strategi yang akan diambil adalah melakukan audit proses internal untuk menyederhanakan alur verifikasi dan pembayaran, serta mengadakan rapat evaluasi keuangan secara rutin untuk memantau dan menyelesaikan setiap kendala pencairan dana secara proaktif.

2.3 Isu-isu Penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD

Seiring dengan perkembangan pembangunan saai ini ruang lingkup dan capaian tingkat kinerja pelayanan PD serta dampat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dalam rangka pencapaian Visi dan Misi kepala daerah yang dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka analisis terhadap capaian kinerja PD dengan kondisi lingkungan strategis dapat dijabarkan dengan pendekatan analisa kekuatan dan kelemahan yang meliputi kekuatan (strenghts) dan kelemahan (weaknees), serta lingkungan eksternal dimana peluang (oppourtunity) dan ancaman (threat) Yang berpengaruh tehadap kinerja Kecamatan Punung . Adapun tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan PD serta isu- isu berupa rekomendasi dan catatan setrategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program kegiatan

tahun yang direncanakan adalah capaian kinerja program kegiatan dengan melihat sejauh mana masukan , hasil dan dampak dari program kegiatan tersebut.

Kecamatan Punung sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh satuan Perangkat Daerah lain dilingkup Kabupaten Pacitan . Kecamatan Punung masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan , antara lain :

1) Prasarana dan Sarana yang tersedia kurang lengkap dan memadai;
2) Sistem kerja yang belum optimal;
3) Keterbatasan ketrampilan petugas;
4) Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan.
5) Melaksanakan Perencanaan dan pelaksanaan Partisipatif;
6) Melaksanakan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif
7) Lebih Meningkatkan Profesionalisme Kinerja Aparatur Kecamatan dan Desa
8) Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor Dan Lintas Program
9) Meningkatkan Mutu Pelayanan Prima kepada Masyarakat
10) Peningkatan Sarana dan prasarana Kecamatan dan Desa

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Punung ditentukan, isu- isu penting yaitu sebagai berikut;

1 Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Pacitan kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada diwilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka camat tetap mendasar pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah , potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten pacitan;

2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan ,terlebih pada pembangunan peningkatan instruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi Masyarakat.Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Coorperate Sosial Resposipilioty (CSR)* , maka kecamatan harus benar- benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat
3. Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu PD di Pemerintah Kabupaten Pacitan yang menyelenggarakan pelayanan publik , maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasar pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat . Harapan dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah , menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur , Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi ,serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting ,maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam peningkatan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.
5. Arah Kebijakan mengoptimalisasikan pola koordinasi, fasilitasi dan motivasi yang mantap di bidang ekonomi pembangunan dan gender, Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Aset Pertanahan

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD 2025

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat

a) Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah

b) Program prioritas pembangunan daerah dan

c) Rencana Kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS, Rencana Kecamatan Punung berdasarkan RKPD Kabupaten Pacitan sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja PD se Kabupaten Pacitan yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Punung.

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan acuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025. Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2

Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Pacitan

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kab. Pacitan	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**72.6**	**2.087.520.795**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kab. Pacitan	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**72.6**	**2.087.520.795**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Capaian Kinerja PD**	**9**	**13.584.500**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab. Pacitan	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Capaian Kinerja PD**	**9**	**13.584.500**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	13.584.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	13.584.500
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah**	**14**	**1.682.383.977**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Pacitan	**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah**	**14**	**1.682.383.977**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16	1.670.283.977	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16	1.670.283.977
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6	12.100.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6	12.100.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	**Prosentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Daerah**	**100**	**25.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kab. Pacitan	**Prosentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Daerah**	**100**	**25.000.000**
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	25.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	25.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pacitan	**Prosentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum**	**100**	**116.092.307**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Pacitan	**Prosentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum**	**100**	**116.092.307**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	59.216.290	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	59.216.290
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	53.206.017	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	53.206.017

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	3.670.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	3.670.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pacitan	**Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**173.710.400**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Pacitan	**Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**173.710.400**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	23.543.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	23.543.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	150.167.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	150.167.400
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pacitan	**Pemenuhan Belanja Barang/Jasa, Modal dan Belanja Pegawai Perangkat Daerah**	**100**	**76.749.611**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Pacitan	**Pemenuhan Belanja Barang/Jasa, Modal dan Belanja Pegawai Perangkat Daerah**	**100**	**76.749.611**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	12.550.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	12.550.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	64.199.611	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	64.199.611
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kab. Pacitan	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan**	**100**	**28.991.600**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kab. Pacitan	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan**	**100**	**28.991.600**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		**Jumlah layanan yang tidak dilaksanakan oleh OPD yang diselenggarakan oleh kecamatan**	**10**	**28.991.600**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		**Jumlah layanan yang tidak dilaksanakan oleh OPD yang diselenggarakan oleh kecamatan**	**10**	**28.991.600**
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	28.991.600	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	28.991.600

3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kab. Pacitan	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Yang Dilaksanakan**	**100**	**113.194.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kab. Pacitan	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Yang Dilaksanakan**	**100**	**113.194.000**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Pacitan	**Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang dikoordinasikan**	**3**	**113.194.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Kab. Pacitan	**Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang dikoordinasikan**	**3**	**113.194.000**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13	26.423.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13	26.423.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	86.771.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	86.771.000
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kab. Pacitan	**Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan**	**100**	**29.700.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kab. Pacitan	**Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan**	**100**	**29.700.000**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Pacitan	**Jumlah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dikoordinasikan**	**13**	**29.700.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Kab. Pacitan	**Jumlah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dikoordinasikan**	**13**	**29.700.000**
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	29.700.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	29.700.000
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kab. Pacitan	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan**	**100**	**12.570.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kab. Pacitan	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan**	**100**	**12.570.000**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Pacitan	**Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang terselenggara**	**4**	**12.570.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kab. Pacitan	**Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang terselenggara**	**4**	**12.570.000**

	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4	12.570.000	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4	12.570.000
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Kab. Pacitan	**Persentase Desa yang termonitoring**	**100**	**48.070.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Kab. Pacitan	**Persentase Desa yang termonitoring**	**100**	**48.070.000**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Pacitan	**Jumlah desa yang menerima pembinaan dan pengawasan (binwas sesuai PP 43/2014)**	**13**	**48.070.000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kab. Pacitan	**Jumlah desa yang menerima pembinaan dan pengawasan (binwas sesuai PP 43/2014)**	**13**	**48.070.000**
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13	14.450.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13	14.450.000
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13	16.570.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13	16.570.000
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	13	17.050.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	13	17.050.000

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan *good govermance dan akuntabilitas pelayanan publik.* Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Punung dalam kurun waktu tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas permerintahan umum dalam rangka mengoptimalisasikan pengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan
2. Mengoptimalisasikan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagaian urusan otomoni daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan,pengawasan,fasilitasi,penetapan,penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan

Telaah terhadap kebijakan Kabupaten Pacitan, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pacitan, dimana secara teknokratis prioritas Kabupaten Pacitan telah mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa Timur. Sebagai modal dasar bagi perwujudan visi dan misi Kecamatan Punung dalam mendukung visi dan misi Kabupaten Pacitan adalah letak geografis Kecamatan Punung yang

berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RT/RW) Kabupaten Pacitan baik dan sisi ekonomi,industri, jasa dan pariwisata.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD Kecamatan Punung yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD Kecamatan Punung 2021 – 2026 Dengan menitikberatkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Punung mempunyai ***tujuan :*** Terwujudnya Layanan Kecamatan Yang Prima, dengan indikator tujuan Indeks Pelayanan Publik Kecamatan yang diukur dalam jangka waktu satu tahun dengan ***sasaran*** Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Punung; dan Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

3.3 Program dan Kegiatan

Renja Perubahan Kecamatan Punung tahun 2025, didasarkan pada beberapa pendekatan bagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu;(1) pendekatan tehnokratis , yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga.(2) Pendekatan Top Down , yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembagunan pemerintah tingkat atasnya. (3) Pendekatan poklitis , yaitu memenuhi visi dan misi kepala daerah terpilih; (4) Pendekatan Bottom Up yaitu mempertimbangkan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya. (5) Pendekatan partisipatif , yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.

- **Program**

  Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi . Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Punung maka program- program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

  1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- **Kegiatan**

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang teleh digariskan , maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
8. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
9. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
10. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
11. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :

- Jumlah program dan jumlah kegiatan
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu) .
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang terinci menurut sumber pendanaannya .

Rumusan program dan kegiatan Tabel Rencana program dan kegiatan sebagaimana Tabel 3.1 :

TABEL 3.1

RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Sesudah	Sumber Dana	Pagu		Bertambah / Berkurang
									Sebelum	Sesudah	
7	**01**				**KECAMATAN PUNUNG**				**2.502.946.767**	**2.320.046.395**	**-182.900.372**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**72.6**		**2.173.381.167**	**2.087.520.795**	**-85.860.372**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Capaian Kinerja PD**	**9**		**18.624.500**	**13.584.500**	**-5.040.000**
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	(PAD)	18.624.500	13.584.500	-5.040.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah**	**14**		1.770.039.230	1.682.383.977	-87.655.253
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16	(DAU)	1.754.039.230	1.670.283.977	-83.755.253
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6	(PAD)	16.000.000	12.100.000	-3.900.000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Prosentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Daerah**	**100**		25.000.000	25.000.000	0
7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	(DAU)	25.000.000	25.000.000	0
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Prosentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum**	**100**		128.682.537	116.092.307	-12.590.230
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	(PAD)	45.357.118	59.216.290	13.859.172
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	(PAD)	75.165.419	53.206.017	-21.959.402
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	(PAD)	8.160.000	3.670.000	-4.490.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**		173.710.400	173.710.400	0
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	(PAD)	23.543.000	23.543.000	0
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	(PAD)	150.167.400	150.167.400	0

7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Pemenuhan Belanja Barang/Jasa, Modal dan Belanja Pegawai Perangkat Daerah**	**100**		57.324.500	76.749.611	19.425.111
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	(DAU)	12.550.000	12.550.000	0
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	(PAD)	44.774.500	64.199.611	19.425.111
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan**	**100**		**46.091.600**	**28.991.600**	**-17.100.000**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah layanan yang tidak dilaksanakan oleh OPD yang diselenggarakan oleh kecamatan**	**10**		**46.091.600**	**28.991.600**	**-17.100.000**
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	(DAU)	46.091.600	28.991.600	-17.100.000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Yang Dilaksanakan**	**100**		**157.154.000**	**113.194.000**	**-43.960.000**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang dikoordinasikan**	**3**		**157.154.000**	**113.194.000**	**-43.960.000**
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13	(DAU)	38.123.000	26.423.000	-11.700.000
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	(PAD)	119.031.000	86.771.000	-32.260.000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan**	**100**		**36.000.000**	**29.700.000**	**-6.300.000**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dikoordinasikan**	**13**		**36.000.000**	**29.700.000**	**-6.300.000**
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	(PAD)	36.000.000	29.700.000	-6.300.000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan**	**100**		**20.370.000**	**12.570.000**	**-7.800.000**

7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang terselenggara**	**4**		**20.370.000**	**12.570.000**	**-7.800.000**
7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4	(PAD)	20.370.000	12.570.000	-7.800.000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yang termonitoring**	**100**		**69.950.000**	**48.070.000**	**-21.880.000**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah desa yang menerima pembinaan dan pengawasan (binwas sesuai PP 43/2014)**	**13**		**69.950.000**	**48.070.000**	**-21.880.000**
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13	(PAD)	19.250.000	14.450.000	-4.800.000
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13	(PAD)	23.950.000	16.570.000	-7.380.000
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	13	(DAU)	26.750.000	17.050.000	-9.700.000

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Punung Tahun Anggaran 2025 merupakan terjemahan dan operasionalisasi sebagaimana yang tercantum dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah yang berkontribusi untuk pencapaian tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja dibuat terkait dengan Visi dan Misi Organisasi untuk memenuhi target kinerja dari program dan kegiatan Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Kecamatan Punung selama Tahun Anggaran 2025, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun organisasi. Di samping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreativitas aparatur dalam pelaksanaan disiplin dan loyalitas yang tinggi demi mengemban Visi dan Misi Organisasi untuk menuju Aparatur Pemerintah yang profesional, bersih dan berwibawa sebagai pelayan masyarakat yang terbaik.

Punung, 22 Juli 2025

CAMAT PUNUNG

PUDJI HARYONO, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19690216 199003 1 005

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA PERUBAHAN)

KECAMATAN PRINGKUKU KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN P R I N G K U K U
Jalan Raya Pacitan - Solo Nomor 24 Pacitan JawaTimur 63552
Telp. (0357) 511093 E-mail:camat_pringkuku@pacitankab.go.id

PENETAPAN KINERJA
KANTOR CAMAT PRINGKUKU
KABUPATEN PACITAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Penetapan Kinerja Kantor Camat Pringkuku Kabupaten Pacitan, merupakan ikhtisar Rencana Kerja yang akan di capai pada tahun 2025 sebagaimana terlampir.

Rencana Kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2025.

Pringkuku, 23 Juli 2025

MENYETUJUI
BUPATI PACITAN

INDRATA NUR BAYU AJI

CAMAT PRINGKUKU

Drs. SUWOTO, MH
Pembina Tk I
NIP. 19671002 199403 1 006

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Allhamdulilah Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah- Nya, sehingga Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan Tahun 2025 dapat disusun.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja Perubahan PD) Kecamatan Pringkuku Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Bupati Pacitan Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025. Renja tersebut merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, sehingga mampu menggambarkan rencana capaian kinerja tahunan yang memetakan sasaran, indikator dan targetnya.

Pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun menunjukan kinerja yang baik. Pada tahun 2025 ini selain mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan baik, juga telah dirumuskan program dan kegiatan baru untuk mendukung program dan kegiatan yang telah ada. Demikian pula halnya dalam perumusan tujuan ,sasaran dan indikator kinerja telah diperbaiki yang disesuaikan dengan isu-isu strategis dan perkembangan situasi di daerah dan nasional.

Dokumen Renja Perubahan ini mencakup seluruh kegiatan Kantor Kecamatan Pringkuku yang disertai indikator kinerja dari masing-masing kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2025 . Dengan disusunnya Renja Perubahan Kantor Kecamatan Pringkuku Tahun 2025 diharapkan mampu mendukung terlaksanannya kegiatan secara efisien dan efektif secara berkesinambungan terukur, terintegrasi dan sinkron antar kegiatan. Renja Perubahan tahun 2025 berfungsi sebagai acuan bagi aparat lingkup Kantor Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan dan mitra kerja dalam pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran.

Pringkuku, 23 Juli 2025

CAMAT PRINGKUKU

Drs. SUWOTO, MH
PembinaTk I
NIP. 19671002 199403 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar			ii
Daftar Isi			iii
BAB I	**PENDAHULUAN**		1
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Landasan Hukum	2
	1.3	Maksud dan Tujuan	7
	1.4	Sistematika Penulisan	7
BAB II	**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**		10
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai dengan Triwulan II	10
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan PD	12
	2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	18
	2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	21
BAB III	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**		23
BAB IV	**PENUTUP**		25

BAB I
PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Sehubungan dengan telah ditetapkanya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2025 maka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2025.

Rencana Kinerja Perubahan Kecamatan Pringkuku Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja Tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang dijabarkan didalam dokumen Rencana Strategi Kecamatan Pringkuku tahun 2021-2026.

Mengacu dari Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana setiap satuan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PD dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra PD untuk mewujudkan visi Kabupaten Pacitan di Kecamatan Pringkuku yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah. Dari dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja PD per tahun. Penyusunan Renja PD merujuk pada dokumen Renstra PD dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja dari tahun sebelumnya.

Kedudukan susunan organisasi dan tugas/fungsi Pemerintah Kecamatan dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 79 Tahun 2016 dalam arti Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah pusat berubah menjadi perangkat daerah.

Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No.79 Tahun 2016 tentang pemerintahan Daerah Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan:

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Jadi dapat dikatakan bahwa ,semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengembang tugasnya.

Disamping camat melaksanakan tugas dari Bupati atau Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintah yang meliputi :

1. Menetapkan rencana, program dan kegiatan Kecamatan Pringkuku sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan operasional;
2. Membagi tugas kepada bawahan dan mengikuti perkembangannya untuk memastikan pelasanaan tugas dapat habis dan berjalan lancar;
3. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan agar pekerjaan berjalan sesuai rencana dan menigkatkan SDM bawahan;
4. Mengkoordinasikan dan membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar tidak terjadi overlapping;
5. Meneliti hasil kerja bawahan untuk disesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan untuk menghindari kesalahan;
6. Meneliti dan menyempurnakan konsep pemberdayaan masyarakat sesuai dengan program kerja yang telah direncanakan;
7. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan program kerja;
8. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
9. Memantau dan mengendalikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Pringkuku agar situasi kondusif
10. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

11. Memantau pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di Kecamatan Pringkuku sesuai kewenangan kecamatan;
12. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang ada di Kecamatan Pringkuku sesuai dengan peruntukannya;
13. Melakukan koordinasi dengan Forkopimca dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Pringkuku agar berjalan dengan baik
14. Memantau dan memberi petunjuk teknis pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan agar berjalan sesuai program;
15. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup Kecamatan Pringkuku dan yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa/Kelurahan agar tujuan pembangunan tercapai;

Mengingat semakin komplek tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat ,terarah dan konprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat Kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik ditingkat Desa/Kelurahan ,Kecamatan dan Kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat . Sedangkan dalam perencanaan pembangunan,kemasyarakatan dan kepemerintahan Camat berkewajiban membuat Renstra.

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan merupakan Daerah yang mempunyai wilayah tertentu dan di pimpin oleh Camat. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sehubungan dengan hal itu agar Camat dapat mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Pacitan maka di pandang perlu disusun Rencana Kerja Perubahan yang sistimatis di Kecamatan Pringkuku

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pringkuku Tahun 2025 antara lain :

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4287);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
7. Undang – Undang Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Undang - Undang Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
9. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan Pertanggung jawaban Kepala Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara pertanggung jawaban Kepala Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah sebagai telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 tahun 2016
17. Undang - Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 80,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47360);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan,pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan daerah
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 / E) ;
26. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005 - 2025
28. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022.
29. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 170 Tahun 2022 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026
30. Peraturan Bupati Pacitan Nomor Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja Perubahan ini dimaksudkan untuk :

1. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintah dan Pembinaan , Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Pringkuku pada tahun 2025
2. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Pringkuku pada Tahun 2025

1.3.2 Tujuan

1. Mensinkronisasikan serta mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Pringkuku tahun 2025 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Pacitan tahun 2025
2. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas camat berikutnya.Penyusunan Renja Perubahan ini bertujuan lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Pringkuku dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4 Sistimatika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pringkuku tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perubahan PD agar substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja Perubahan PD, Proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen

RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja Propinsi / Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD ;

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang – undang peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.4 Sistimatika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 20245

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat tentang Pelaksanaan rencana program dan kegiatan,serta hasil rencana program dan kegiatan. Sesuai hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024, sampai triwulan II, secara umum capaian kinerja tercapai sesuai dengan target yang di tetapkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing - masing PD, serta ketentuan peraturan perundang - undangan yang terkait dengan kinerja. Jika PD bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap PD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing - masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma standart pelayanan PD yang bersangkutan.

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Bagian ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional /internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals)
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD, dan.
5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan .

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Bagian ini berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.
3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terhadap rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besaranya berbeda.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pringkuku Tahun 2024 mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada Kecamatan. Tugas Pokok Kecamatan berdasar Peraturan daerah Kabupaten Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan,Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi, Serta tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan. Kecamatan adalah membantu Kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Pacitan. Adapun fungsi dari Kecamatan Pringkuku adalah :

1. Perencanaan yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengelolaan dana, penilaian dan penyusunan rencana program di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat serta pemerintah desa.
2. Pelaksanaan yang meliputi kegiatan pelayanan dan pembinaan masyarakat dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat serta pemerintah Desa.
3. Melakukan pegawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pokok seperti diatas
4. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan
5. Pengkoordinasikan integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain dilingkungan kecamatan.
6. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan dinas /instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas

Renja Perubahan Kecamatan Pringkuku tahun 2025 merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Pringkuku, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pacitan 2021-2026 .

Sedangkan hasil evaluasi pelaksanaan renja Perangkat Daerah tahun 2025 sampai dengan Triwulan II :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,Alokasi Rp.1.977.507.299,00 terealisasi Rp. 823.284.381,00 (41,63%) sampai dengan bulan Juni 2025 target realisasi tidak sesuai dengan realisasi karena adanya pegawai yang pensiun
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik ,Alokasi Rp. 28.665.700,00 terealisasi Rp. 19.421.900,00 (67,75%) sampai dengan bulan Juni 2025 target sudah terrealisasi sesuai dengan realisasi
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan ,Alokasi Rp.89.735.300,00 terealisasi Rp. 22.895.600,00 (25,51%) sampai dengan bulan Juni 2025 target realisasi tidak sesuai dengan realisasi karena kegiatan belum di laksanakan
4. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum ,Alokasi Rp.89.940.000,00 terealisasi Rp. 54.315.000,00 (60,39%) sampai dengan bulan Juni 2025 target sudah terrealisasi sesuai dengan realisasi
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum ,Alokasi Rp.16.724.400,00 terealisasi Rp. 9.835.900,00 (58,81%) sampai dengan bulan Juni 2025 target sudah terrealisasi sesuai dengan realisasi
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa ,Alokasi Rp.36.043.600,00 terealisasi Rp. 14.815.800,00 (41,10%) sampai dengan bulan Juni 2025 target realisasi tidak sesuai dengan realisasi karena kegiatan belum dilaksanakan

Faktor Penyebab tidak tercapainya terpenuhinya target kinerja program kegiatan yaitu karena ada karyawan yang memasuki masa pensiun dan kegiatan yang belum dilaksanakan. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah adalah perubahan anggaran setiap tahun anggaran sesuai kebutuhan yang masing – masing perangkat daerah.

Kebijakan /tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya target kinerja program adalah selalu berkoordinasi dengan Dinas terkait mulai dari perencanaan sampai dengan penganggaran.

Organisasi Perangkat daerah berusaha melaksanakan agenda Kerja Penyusunan Rencana kerja perangkat Daerah Tahun 2025.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pringkuku

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja Pelayanan Kecamatan Pringkuku berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, yang ditetapkan Pemerintah Daerah, Kinerja Pelayanan di Kecamatan Pringkuku dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatkan pelayanan adminiatrasi perkantoran
- Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur
- Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Pringkuku sebagai berikut :

SEKRETARIS KECAMATAN

Sekretariat Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan, serta program, evaluasi dan pelaporan kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan Kecamatan. Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
b. Pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
c. Pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan.
d. Pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi danpelaporan; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi di sekretariat kecamatan adalah sebagai berikut :

Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :

a. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan, dan keuangan mempunyai tugas:

a. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan;
b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis;
c. Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data;
d. Menyiapkan bahan penyusunan laporan;
e. Menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan laporan kinerja;
f. Melaksanakan pengelolaan anggaran;
g. Melaksanakan perbendaharaan dan gaji;
h. Melaksanakan verifikasi dan akuntansi;
i. Melaksanakan pelaporan keuangan; dan
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

a. Menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran;
b. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan rumah tangga;
c. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
d. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
e. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kehumasan dan protokol;

f. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kepegawaian; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI PELAYANAN UMUM

Seksi Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang pelayanan umum. Uraian Tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan umum;
b. Mengumpulkan, mengolah dan menyusun rancangan kebijakan teknis dan data sesuai bahan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat Desa/ Kelurahan;
c. Menyajikan data penyelenggaraan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat Desa/ Kelurahan;
d. Menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, administrasi kependudukan, administrasi pertanahan dan pelayanan umum lain;
e. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
f. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang Pemerintahan. Uraian Tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;

b. Melaksanakan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;
c. Fasilitasi Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan;
e. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan;
f. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan pajak bumi dan bangunan;
g. Memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum;
h. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
i. Fasilitasi pelaksanaan batas wilayah kecamatan;
j. Melaksanakan urusan yang dilimpahakan kepada camat yang menjadi kewenangannya;
k. Fasilitasi Kerjasama antar kecamatan;\
l. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
m. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
n. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
o. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
p. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
q. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
r. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
s. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
t. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa;
u. Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan;
v. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
w. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

x. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya;
y. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI SOSIAL, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang sosial, ketentraman dan ketertiban. Uraian Tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan sosial, ketentraman dan ketertiban;
b. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan;
c. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
d. Menyiapkan bahan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
e. Menyiapkan bahan program dan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
g. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi perizinan;
h. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
i. Menyusun evaluasi dan laporan tentang sosial, ketentraman dan ketertiban;
j. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya;
k. Melaporkan pelaksanaan kegiatan sosial, ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan

l. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Camat.

SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang pembangunan dan pemberdayan masyarakat. Uraian Tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan Bina Pemerintahan Desa;
b. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
c. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga;
d. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
e. Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya;
f. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan;
g. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
h. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
i. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan;
j. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
k. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan;
l. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
m. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan;
n. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
o. Evaluasi Kelurahan;
p. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;

q. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
r. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
s. Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan;
t. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
u. Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
v. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya;
w. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.;

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabapaten Pacitan Nomor 156 tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Pringkuku terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
   - Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
   - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. Seksi Pelayanan Umum;
4. Seksi Pemerintahan;
5. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
6. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban;

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Kecamatan Pringkuku

Seiring dengan perkembangan pembangunan saai ini ruang lingkup dan capaian tingkat kinerja pelayanan PD serta dampak terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dalam rangka pencapaian Visi dan Misi kepala daerah yang dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka analisis terhadap capaian kinerja PD dengan kondisi lingkungan strategis dapat dijabarkan dengan pendekatan analisa kekuatan dan kelemahan yang meliputi kekuatan (strenghts) dan kelemahan (weaknees), serta lingkungan eksternal dimana peluang (oppourtunity) dan ancaman (threat) Yang berpengaruh tehadap kinerja Kecamatan Pringkuku .

Adapun tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan PD serta isu-isu berupa rekomendasi dan catatan setrategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program kegiatan tahun yang direncanakan adalah capaian kinerja program kegiatan dengan melihat sejauh mana masukan , hasil dan dampak dari program kegiatan tersebut.

Kecamatan Pringkuku sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh satuan Perangkat Daerah lain dilingkup Kabupaten Pacitan . Kecamatan Pringkuku masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan , antara lain :

a. Prasarana dan Sarana yang tersedia kurang lengkap dan memadai;
b. Sistem kerja yang belum optimal;
c . Keterbatasan ketrampilan petugas;
d. Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan.
e. Kompetensi sumber daya Aparatur Kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing masih belum optimal baik secara kuantitas maupun kualitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi
f. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga sulit dalam pengukuran capaian kinerja
g. Masih kurang memadainya anggaran yang diterima oleh Kecamatan dalam mendukung program dan kegiatan pelayanan maupun pembangunan di Kecamatan
h. Belum tersedianya data- data yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan program dan kegiatan

Melaksanakan Perencanaan dan pelaksanaan Partisipatif;

1. Melaksanakan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif
2. Lebih Meningkatkan Profesionalisme Kinerja Aparatur Kecamatan dan Desa
3. Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor Dan Lintas Program
4. Meningkatkan Mutu Pelayanan Prima kepada Masyarakat
5. Peningkatan Sarana dan prasarana Kecamatan dan Desa

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pringkuku ditentukan, isu-isu penting yaitu sebagai berikut;

1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Pacitan kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada diwilayah.Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka camat tetap mendasar pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah , potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pacitan;
2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan ,terlebih pada pembangunan peningkatan instruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi Masyarakat.Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan Company/Coorperate Sosial Resposipilioty (CSR) , maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat
3) Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu PD di Pemerintah Kabupaten Pacitan yang menyelenggarakan pelayanan publik , maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan

tentunya dengan tetap mendasar pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat . Harapan dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah , menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.

4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur , Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi ,serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting ,maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam peningkatan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.
5) Arah Kebijakan mengoptimalisasikan pola koordinasi,fasilitasi dan motivasi yang mantap di bidang ekonomi pembangunan dan gender,Pemerintahan,Kesejahteraan Masyarakat,Aset Pertanahan

2.4 Review Terhadap Rencana awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat

a) Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
b) Program prioritas pembangunan daerah dan
c) Rencana Kerja, pendanaan dan prakiraan maju,yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS ,Rencana Kecamatan Pringkuku berdasarkan RKPD Kabupaten Pacitan sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja PD se Kabupaten Pacitan yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Pringkuku

Rencana awal prioritas pembangunan di Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan tahun 2025 merupakan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam

rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Pringkuku dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Pacitan adalah letak geografis Kecamatan Pringkuku yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RT/RW) Kabupaten Pacitan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Pringkuku tahun 2025 mendapat total anggaran perubahan sebesar Rp. 2.138.266.824,00. Anggaran tersebut digunakan untuk 6 program 12 kegiatan, meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Rp. 1.846.557.824,00

   Program ini meliputi 6 kegiatan yaitu:

   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Rp. 14.575.600,00;
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Rp. 1.438.384.798,00
   c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Rp. 12.763.800,00
   d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Rp.154.592.380,00
   e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Rp. 176.769.250,00
   f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Rp. 49.471.996,00

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Rp. 28.665.700,00

   Program ini meliputi 2 kegiatan:

   a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Rp.13.611.200,00
   b. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, Rp.15.054.500,00

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Rp.89.735.300,00

   Program ini meliputi 1 kegiatan:

   a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Rp.89.735.300,00

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Rp. 120.540.000,00

   Program ini meliputi 1 kegiatan:

a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp.120.540.000,00

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Rp.16.724.400,00

   Program ini meliputi 1 kegiatan:

   a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, Rp.16.724.400,00

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa, Rp.36.043.600,00

   Program ini meliputi 1 kegiatan:

   a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Rp.36.043.600,00

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Pringkuku Tahun 2025 merupakan dokumen Perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pringkuku Tahun 2021 – 2026 yang mengacu pada Visi dan Misi Bupati Pacitan "Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia" dan mengacu pada evaluasi RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026 serta evaluasi RKPD Kabupaten Pacitan.

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini menjadi kebutuhan nyata bagi Pemerintah Kecamatan Pringkuku dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang pada gilirannya akan melibatkan semua pihak yang terkait.

Dalam rangka penggerakan berbagai langkah aksi dan sumber daya yang dibutuhkan dalam kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan yang sesuai dengan bidangnya masing-masing secara efektif dan efisien.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Pringkuku memiliki arti penting sebagai penyelenggaraan otonomi daerah dan peningkatan sumber daya manusia sehingga tujuan pembangunan tahun 2025 di Kecamatan Pringkuku dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Kecamatan Pringkuku ini terdapat banyak kekurangan dan untuk itu kami mengharapkan masukan, koordinasi dan kerjasama yang optimal dari berbagai pihak untuk perbaikan di dalam penyusunannya.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pringkuku Tahun 2025 ini dibuat dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Kabupaten Pacitan yang Sejahtera dan Bahagia, Aamiin.

CAMAT PRINGKUKU

Drs. SUWOTO, MH
Pembina Tk I
NIP. 19671002 199403 1 006

LAMPIRAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PRINGKUKU KAB. PACITAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN PRINGKUKU							**2.285.216.299,00**	**2.347.016.299,00**	**2.138.266.824,00**	**-146.949.475,00**							**2.531.398.104,00**	
	7	**URUSAN KEWILAYAHAN**							**2.285.216.299,00**	**2.347.016.299,00**	**2.138.266.824,00**	**-146.949.475,00**							**2.531.398.104,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.285.216.299,00**	**2.347.016.299,00**	**2.138.266.824,00**	**-146.949.475,00**							**2.531.398.104,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**				-	**80 Nilai**	**1.952.550.299,00**	**2.001.367.299,00**	**1.846.557.824,00**	**106.146.705,00**							**2.138.697.104,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				-	23 Dokumen	14.535.600,00	13.995.600,00	14.675.600,00	140.000,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	-		17.570.000,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	2.399.400,00	2.399.400,00	6.859.400,00	4.460.000,00	Kab. Pacitan, Pringkuku Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			3.017.000,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.850.600,00	2.850.600,00	1.410.600,00	-1.440.000,00	Kab. Pacitan, Pringkuku Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			4.241.000,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.985.000,00	1.985.000,00	1.985.000,00	0,00	Kab. Pacitan, Pringkuku Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			2.297.000,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	3.390.000,00	1.950.000,00	510.000,00	-2.880.000,00	Kab. Pacitan, Pringkuku Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			3.775.000,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11 Laporan	11 Laporan	3.810.000,00	3.810.000,00	3.810.000,00	0,00	Kab. Pacitan, Pringkuku Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			4.190.000,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	69 Dokumen	1.601.264.273,00	1.588.064.273,00	1.438.384.798,00	-162.889.475,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	-		1.602.119.500,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mencerna Cip dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.585.731.573,00	1.542.531.573,00	1.427.182.098,00	-158.549.475,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045).			1.585.098.000,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	4.894.300,00	4.894.300,00	4.894.300,00	0,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			5.102.900,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	4.391.200,00	4.391.200,00	2.951.200,00	-1.440.000,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			4.424.600,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	953.600,00	953.600,00	953.600,00	0,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			1.386.000,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				12 Dokumen	12 Dokumen	2.372.500,00	2.372.500,00	932.500,00	-1.440.000,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			2.602.000,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.230.700,00	2.230.700,00	790.700,00	-1.440.000,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			2.621.000,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Progresis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Progresis Realisasi Anggaran				4 Dokumen	4 Dokumen	680.400,00	680.400,00	680.400,00	0,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			665.000,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pegawai yang dikelola Perangkat Daerah*				-	21 Pegawai	26.550.000,00	26.550.000,00	12.763.800,00	-13.786.200,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	-		17.532.000,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	4 Paket	26.550.000,00	26.550.000,00	12.763.800,00	-13.786.200,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			17.532.000,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	12 Bulan	102.062.730,00	161.379.230,00	154.582.380,00	52.529.650,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	-		220.260.104,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Pesalinan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Pesalinan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	41.385.800,00	105.562.629,00	96.095.558,00	54.709.758,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			147.251.104,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	49.778.430,00	44.878.901,00	48.778.822,00	-999.608,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			88.503.660,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.598.500,00	7.638.000,00	8.098.000,00	499.500,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			15.146.000,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3.300.000,00	3.300.000,00	1.820.000,00	-1.580.000,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			5.380.000,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemenuhan Jasa Penunjang Perangkat Daerah*				-	12 Bulan	158.778.200,00	187.916.200,00	176.763.250,00	17.993.050,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	-		205.380.250,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	20.365.800,00	20.365.800,00	16.358.850,00	-4.006.950,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			20.071.850,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	138.410.400,00	167.550.400,00	168.410.400,00	22.000.000,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			165.308.400,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah yang dipelihara*				-	12 bulan	49.471.998,00	49.471.998,00	49.471.998,00	0,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	-		71.885.610,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	35.704.100,00	35.704.100,00	35.704.100,00	0,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			45.662.110,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	13.767.896,00	13.767.896,00	13.767.896,00	0,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			26.225.500,00	KECAMATAN PRINGKUKU
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan**				-	**100 %**	**38.745.700,00**	**38.989.700,00**	**29.465.700,00**	**8.292.300,00**							**47.038.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Pemenuhan Jumlah OPD/Instansi vertikal yang dikoordinasikan dalam satu tahun*				-	12 Bulan	21.291.200,00	21.531.200,00	13.611.200,00	-7.680.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prosperasi sistriwaga, kesetaraan gender, serta pengudatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	-		23.060.000,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				14 Laporan	14 Laporan	21.291.200,00	21.531.200,00	13.611.200,00	7.680.000,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prosperasi sistriwaga, kesetaraan gender, serta pengudatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			23.060.000,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Pemenuhan layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan*				-	12 Bulan	17.454.500,00	17.454.500,00	15.054.500,00	-2.400.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prosperasi sistriwaga, kesetaraan gender, serta pengudatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	-		23.860.000,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	17.454.500,00	17.454.500,00	15.054.500,00	-2.400.000,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prosperasi sistriwaga, kesetaraan gender, serta pengudatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			23.860.000,00	KECAMATAN PRINGKUKU

SIPD-RI | Dicetak pada 2025-07-15 11:01:52 Halaman 4

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	21
4.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Yang Dilaksanakan**				-	**100 %**	**146.416.300,00**	**123.936.300,00**	**89.735.300,00**	**-56.680.000,00**								**151.730.300,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Desa yang dilaksitasi*				-	13 Desa	146.416.300,00	123.936.300,00	89.735.300,00	-56.680.000,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	-		151.730.300,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	16.500.000,00	12.100.000,00	6.060.000,00	-10.440.000,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			12.100.000,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	129.916.300,00	111.836.300,00	83.675.300,00	-46.240.000,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			129.630.300,00	KECAMATAN PRINGKUKU
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Prosentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan**				-	**100 %**	**49.500.000,00**	**106.800.000,00**	**120.540.000,00**	**36.200.000,00**								**85.700.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	*Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*				-	12 Bulan	49.500.000,00	106.800.000,00	120.540.000,00	71.040.000,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	-		85.700.000,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				13 Laporan	13 Laporan	49.500.000,00	106.800.000,00	120.540.000,00	71.040.000,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			85.700.000,00	KECAMATAN PRINGKUKU
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan**				-	**100 %**	**28.184.400,00**	**22.064.400,00**	**16.724.400,00**	**-2.460.500,00**								**25.715.500,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pengurusan Kepala Daerah	*Jumlah Desa yang berkelitbat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Umum*				-	13 Desa	28.184.400,00	22.064.400,00	16.724.400,00	-11.460.000,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	-		25.715.500,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				13 Laporan	13 Laporan	28.184.400,00	22.064.400,00	16.724.400,00	-11.460.000,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			25.715.500,00	KECAMATAN PRINGKUKU
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Prosentase Desa yang termonitoring**				-	**100 %**	**59.820.100,00**	**53.063.600,00**	**36.043.600,00**	**12.696.700,00**								**82.516.800,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Desa yang terkoordinasi*				-	13 Desa	69.820.100,00	53.863.600,00	36.643.600,00	-33.176.500,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	-		62.516.800,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																			
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				20 Dokumen	20 Dokumen	41.284.400,00	30.667.900,00	19.867.900,00	-21.416.500,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			53.595.100,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum																			
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				13 Dokumen	13 Dokumen	15.635.700,00	12.875.200,00	9.275.700,00	-6.360.000,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			16.020.700,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				20 Laporan	20 Laporan	12.900.000,00	10.320.000,00	6.900.000,00	-6.000.000,00	Kab. Pacitan, Pringkuku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			12.900.000,00	KECAMATAN PRINGKUKU
	J U M L A H								**2.285.216.299,00**	**2.347.016.299,00**	**2.138.266.824,00**	**-146.949.475,00**							**2.531.398.104,00**	

2025

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN PACITAN

RENCANA KERJA PERUBAHAN

TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

KECAMATAN PACITAN

Jl. Letjend Suprapto No. 44 Pacitan

www.pacitan.pacitankab.go.id

camat_pacitan@pacitankab.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Kerja Perubahan (RENJA Perubahan) Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 dapat disusun. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman umum dan sarana evaluasi bagi penyelenggaraan tugas-tugas di Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.

Pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun menunjukan kinerja yang baik. Pada tahun 2025 ini selain mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan, juga telah dirumuskan kegiatan baru untuk mendukung program dan kegiatan yang telah ada. Demikian pula halnya dalam perumusan tujuan, sasaran dan indikator kinerja telah diperbaiki yang disesuaikan dengan isu-isu strategis dan perkembangan situasi di daerah dan nasional. Di sisi lain Renja Perubahan ini juga berisikan indikator-indikator kinerja sehingga dapat dijadikan evaluasi atau tolok ukur kinerja di akhir tahun yang sangat bermanfaat untuk mengetahui capaian kinerja Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Pacitan, Juli 2025
CAMAT PACITAN

SUCIYEM, AP., M. Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19740808 199311 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Aanggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Pacitan adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Perangkat Daerah Kecamatan Pacitan, dan pelaksanaa tugas pelayanan publik sebagai tindak lanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan Perangkat Daerah yang dicapai pada masa satu tahun. Adapun penyusunan dokumen Renja Kecamatan Pacitan sangat terkait dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pacitan terpilih tahun 2021-2026 dan Renstra Kecamatan Pacitan, maka untuk merealisasikan strategi pencapaian Visi Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Terpilih yaitu **”*Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia*”,** Kecamatan Pacitan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan menitik beratkan pada misi yang ke empat yaitu Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional dan Melayani.

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Pacitan Tahun 2025 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, RKPD Perubahan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 serta Renstra Kecamatan Pacitan Tahun 2021-2026 dengan mempertimbangkan dinamika situasi, kondisi serta kebutuhan terkini terkini dari Perangkat Daerah dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Pacitan Tahun 2025 merupakan output dari proses perencanaan yang akan dijadikan sebagai pedoman dan arah bagi penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Pacitan guna kelancaran pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pokok Kecamatan Pacitan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
i. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2011;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
o. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi JawaTimur Tahun 2019- 2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 04 Tahun 2021;
p. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;
q. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
r. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;
s. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Pacitan;
t. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 170 Tahun 2022 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;
u. Peraturan Bupati Pacitan Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026. Renja Perubahan (Rencana Kerja Perubahan) Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tahun 2025.

Berpijak pada maksud tersebut, maka tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1) Sebagai acuan Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pacitan;

2) Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pacitan;
3) Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA Perubahan) Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2025;
4) Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2025.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun 2025, disusun berdasarkan tata urutan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pacitan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pacitan

2.3. Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pacitan

2.4. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Kecamatan Pacitan

3.3. Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PACITAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Rencana Kerja Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabillitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan–tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Perubahan (RENJA Perubahan) Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan selama tahun 2024 dan Triwulan II tahun berjalan 2025 serta perkiraan target anggaran Tahun 2025.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan 2024 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2025 telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Tabel 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024 KABUPATEN PACITAN

NAMA OPD **: KECAMATAN PACITAN**

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Derah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Sampai Dengan Triwulan II			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan 2025	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaiaan Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Kecamatan Pacitan									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	74.25	70.60	74.35	72.75	99%	74.35	72.75	99%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	23 Dokumen	23 Dokumen	23 Dokumen	11 Dokumen	47,82%	23 Dokumen	23 Dokumen	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	59 Dokumen	59 Dokumen	59 Dokumen	36 Dokumen	61,02%	59 Dokumen	59 Dokumen	100%

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100%	100%	100%	98,33%	98,33%	100%	100%	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	49,98%	49,98%	100%	100%	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	100%	100%	100%	89%	89%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	100%	100%	100%	49,98%	49,98%	100%	100%	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	80%	80%	80%	36%	45%	80%	80%	80%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100%	100%	100%	24,99%	24,99%	100%	100%	100%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pemenuhan Jumlah OPD/Instansi vertikal yang dikoordinasikan dalam satu tahun	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	6 Bulan	50%	12 Bulan	12 Bulan	100%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat	Pemenuhan Layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	6 Bulan	50%	12 Bulan	12 Bulan	100%

Daerah yang ada di Kecamatan									
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Prasarana dan Sarana Umum yang dipelihara	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	6 Bulan	50%	12 Bulan	12 Bulan	100%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelimpahan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan dalam satu tahun	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	6 Bulan	50%	12 Bulan	12 Bulan	100%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Cakupan Desa dan Kelurahan yang difasilitasi	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	20 Desa	20 Desa	20 Desa	20 Desa	100%	20 Desa	20 Desa	100%
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang difasilitasi	5 Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	100%	5 Kelurahan	5 Kelurahan	100%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100%	100%	100%	108,33%	108,33%	100%	100%	100%
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pemenuhan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	5 Bulan	41,67%	12 Bulan	12 Bulan	100%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pemenuhan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	6 Bulan	50%	12 Bulan	12 Bulan	100%

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	25 Desa/ Kelurahan	25 Desa/ Kelurahan	25 Desa/ Kelurahan	25 Desa/ Kelurahan	100%	25 Desa/ Kelurahan	25 Desa/ Kelurahan	100%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang termonitoring	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang termonitoring	20 Desa	20 Desa	20 Desa	20 Desa	100%	20 Desa	20 Desa	100%

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PACITAN

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui: Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumberdaya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing–masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pacitan dapat Dilihat sebagaimana Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pacitan

No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan			80	81	86,60	96.00	90,75	86,60	86,70	96.00	-

2.3. ISU–ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN PACITAN

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya maka permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Pacitan yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut :

a. Kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing–masing masih belum optimal baik secara kuantitas maupun kualitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berbasis teknologi Informasi;
b. Belum tersedianya data–data yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan program dan kegiatan;
c. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga sulit dalam pengukuran capaian kinerja;
d. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik guna mendukung pelaksanaan

pelayanan publik yang berkualitas

e. Implementasi peraturan baru terkait pelaksanaan pembangunan daerah terkadang belum tersosialisasikan.
f. Masih adanya kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan tetapi belum mempunyai payung hukum yang jelas/kuat.
g. Perlunya peningkatan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dan Kelurahan, guna menciptakan pelayanan publik yang berkualitas di Desa dan Kelurahan
h. Belum terintegrasinya sistem pelayanan umum dengan SKPD terkait
i. Masih kurang memadainya anggaran yang diterima oleh Kecamatan dalam mendukung program dan kegiatan pelayanan maupun pembangunan di Kecamatan

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangka Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 KABUPATEN PACITAN

No	RANCANGAN AWAL SKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KINERJA	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	**KECAMATAN PACITAN**				**5.426.759.816,00**	**KECAMATAN PACITAN**				**5.426.759.816,00**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**4.954.695.615,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**4.954.695.615,00**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				**29.619.600,00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**29.619.600,00**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	11.094.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	11.094.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2 Dokumen	7.930.400,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2 Dokumen	7.930.400,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	2 Dokumen	5.461.600,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	2 Dokumen	5.461.600,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	1.162.800,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	1.162.800,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	3.970.800,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	3.970.800,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**4.442.283.465,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**4.442.283.465,00**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	4.434.331.065,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	4.434.331.065,00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	34 Dokumen	5.290.800,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	34 Dokumen	5.290.800,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.207.200,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.207.200,00	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	24 Laporan	1.454.400,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	24 Laporan	1.454.400,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**45.196.710,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**45.196.710,00**	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	32.846.710,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	32.846.710,00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	12.350.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	12.350.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				**134.758.758,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**134.758.758,00**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.504.800,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.504.800,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	32.792.458,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	32.792.458,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	35.697.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	35.697.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	9.929.500,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	9.929.500,00	
	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	29.035.000,00	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	29.035.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	16.800.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	16.800.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**56.960.982,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**56.960.982,00**	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	56.960.982,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	56.960.982,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**204.970.900,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**204.970.900,00**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	39.723.500,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	39.723.500,00	

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.000.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	160.247.400,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	160.247.400,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**40.905.200,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**40.905.200,00**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	16.300.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	16.300.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	12.180.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	12.180.000,00	
	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	1 Unit	12.425.200,00	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	1 Unit	12.425.200,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**90.355.201,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**90.355.201,00**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				**37.508.300,00**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				**37.508.300,00**	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	37.508.300,00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	37.508.300,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				**31.846.901,00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**31.846.901,00**	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	31.846.901,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	31.846.901,00	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				**6.000.000,00**	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**				**6.000.000,00**	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	6.000.000,00	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	6.000.000,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				**15.000.000,00**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**				**15.000.000,00**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	15.000.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	15.000.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				**190.631.100,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**190.631.100,00**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				**184.631.100,00**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				**184.631.100,00**	

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakat an	39.000.100,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakat an	39.000.100,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	145.631.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	145.631.000,00	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				**6.000.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**6.000.000**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakat an	6.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakat an	6.000.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				**47.056.400,00**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**47.056.400,00**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				35.056.400,00	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**				35.056.400,00	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	35.056.400,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	35.056.400,00	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12.000.000,00	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**				12.000.000,00	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12.000.000,00	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12.000.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				**65.654.800,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				**65.654.800,00**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				**65.654.800,00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**				**65.654.800,00**	
	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	12 Laporan	50.054.800,00	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	12 Laporan	50.054.800,00	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokume n	15.600.000,00	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokume n	15.600.000,00	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				78.366.700,00	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				78.366.700,00	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				78.366.700,00	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				78.366.700,00	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	50.510.700,00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	50.510.700,00	
	Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Lapran Hasil Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 laporan	27.856.000,00	Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kelurahan	Jumlah Lapran Hasil Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 laporan	27.856.000,00	

2	**KELURAHAN SIDOHARJO**					**KELURAHAN SIDOHARJO**				
	KECAMATAN				**1.270.409.748,00**	**KECAMATAN**				**1.270.409.748,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**254.520.680,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**254.520.680,00**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**2.931.000,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**2.931.000,00**
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	2.931.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	2.931.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				59.844.279,00	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				59.844.279,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.040.500,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.040.500,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.996.500,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.996.500,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	24.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	24.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	5.198.900,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	5.198.900,00
	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	26.608.379,00	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3Paket	26.608.379,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**14.532.009,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**14.532.009,00**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	14.532.009,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	14.532.009,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**159.709.200,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**159.709.200,00**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	16.360.800,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	16.360.800,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.500.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.500.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	141.848.400,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	141.848.400,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**17.504.192,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**17.504.192,00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	8.220.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	8.220.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	2.150.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	2.150.000,00
	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	3 Unit	7.134.192,00	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	3 Unit	7.134.192,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**25.889.068,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**25.889.068,00**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				**25.889.068,00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**25.889.068,00**

	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	**25.889.068,00**	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	**25.889.068,00**	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				**990.000.000,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**990.000.000,00**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				**990.000.000,00**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**990.000.000,00**	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	216.870.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	216.870.000,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	773.130.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	773.130.000,00	
3	**KELURAHAN PLOSO**					**KELURAHAN PLOSO**					
	KECAMATAN				**1.276.187.748,00**	**KECAMATAN**				**1.276.187.748,00**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**222.687.748,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**222.687.748,00**	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**5.000.000,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**5.000.000,00**	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	5.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	5.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				**56.939.748,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**56.939.748,00**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	8.500.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	8.500.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	12.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	12.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	20.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	20.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	2.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	2.000.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	14.439.748,00	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	14.439.748,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**36.000.000,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**36.000.000,00**	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	36.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	36.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**115.748.000,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**115.748.000,00**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	500.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	500.000,00	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	103.248.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	103.248.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**9.000.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**9.000.000,00**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	2.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	2.000.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	2.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	2.000.000,00	
	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	1 Unit	5.000.000,00	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	1 Unit	5.000.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**8.500.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**8.500.000,00**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				**8.500.000,00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**8.500.000,00**	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	8.500.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	8.500.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				**1.045.000.000,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**1.045.000.000,00**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				**1.045.000.000,00**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**1.045.000.000,00**	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	200.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	200.000.000,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	845.000.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	845.000.000,00	
4	**KELURAHAN BALEHARJO**					**KELURAHAN BALEHARJO**					
	KECAMATAN				**1.013.083.748,00**	**KECAMATAN**				**1.013.083.748,00**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**148.778.000,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**148.778.000,00**	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**6.132.600,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**6.132.600,00**	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	6.132.600,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	6.132.600,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				**37.163.400,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**37.163.400,00**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	11.999.500,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	11.999.500,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.163.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.163.000,00	

	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	15.000.900,00	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	15.000.900,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**12.500.000,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**12.500.000,00**	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	12.500.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	12.500.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**77.094.000,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**77.094.000,00**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.815.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.815.000,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	1.655.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	1.655.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	54.624.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	54.624.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**15.888.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**15.888.000,00**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	1.968.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	1.968.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	1.420.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	1.420.000,00	
	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	1 Unit	12.500.000,00	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	1 Unit	12.500.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**9.305.748,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**9.305.748,00**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				**9.305.748,00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**9.305.748,00**	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	17.454.240,00	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	9.305.748,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	9.305.748,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				**865.000.000,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**865.000.000,00**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				**855.000.000,00**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**855.000.000,00**	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	300.156.200,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	300.156.200,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	554.843.800,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	554.843.800,00	
5	**KELURAHAN PUCANGSEWU**					**KELURAHAN PUCANGSEWU**					
	KECAMATAN				**1.012.733.748,00**	**KECAMATAN**				**1.012.733.748,00**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**143.593.748,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**143.593.748,00**	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**6.353.200,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**6.353.200,00**	

	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	6.353.200,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	6.353.200,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				**26.995.332,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**26.995.332,00**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.285.300,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.285.300,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.149.600,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.149.600,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	13.328.800,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	13.328.800,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2.000.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	8.231.632,00	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	8.231.632,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**8.209.116,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**8.209.116,00**	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	8.209.116,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	8.209.116,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**87.012.800,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**87.012.800,00**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.500.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.500.000,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1.000.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	65.512.800,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	65.512.800,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**14.023.300,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**14.023.300,00**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	9.073.300,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	9.073.300,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	4.950.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	4.950.000,00	
	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	-	0	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	-	0	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**10.140.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**10.140.000,00**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				**10.140.000,00,00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**10.140.000,00**	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	10.140.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	10.140.000,00	

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				**860.000.000,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**860.000.000,00**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				**860.000.000,00**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**860.000.000,00**	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	300.599.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	300.599.000,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	599.401.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	599.401.000,00	
6	**KELURAHAN PACITAN**					**KELURAHAN PACITAN**					
	KECAMATAN				**1.032.833.748,00**	**KECAMATAN**				**1.032.833.748,00**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**139.654.595,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**139.654.595,00**	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**2.500.000,00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**2.500.000,00**	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	2.500.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	2.500.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				**47.710.129,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**47.710.129,00**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.500.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.500.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	19.365.282,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	19.365.282,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.200.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.200.000,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	5.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	5.000.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	10.844.847,00	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	10.844.847,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**2.500.000,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**2.500.000,00**	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.500.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.500.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**71.444.466,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**71.444.466,00**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	18.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	18.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.844.446,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.844.446,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	51.600.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	51.600.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**15.500.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**15.500.000,00**	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	10.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	10.000.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	3.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	3.000.000,00	
	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	1 Unit	2.500.000,00	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	1 Unit	2.500.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				**13.179.153,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**13.179.153,00**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				**13.179.153,00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**				**13.179.153,00**	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	13.179.153,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	13.179.153,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				**880.000.000,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**880.000.000,00**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				**880.000.000,00**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**880.000.000,00**	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	150.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	150.000.000,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	13 Pokmas / Ormas	730.000.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	13 Pokmas / Ormas	730.000.000,00	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja dari pada setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional, maka Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Pacitan guna menunjang Pembangunan Kabupaten Pacitan secara keseluruhan periode tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik;
- Pendidikan;
- Kesehatan;
- Penanggulangan Kemiskinan;
- Ketahanan Pangan;
- Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;
- Kebudayaan;
- Kreativitas dan inovasi;
- Politik, hukum dan keamanan dan ketertiban;
- Perekonomian;
- Kesejahteraan rakyat;
- Pemberdayaan Mayarakat;
- Sarana dan Prasarana;

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Pacitan sesuai dengan visi yang akan ditetapkan nantinya. Kecamatan Pacitan sebagai perangkat daerah Kabupaten Pacitan memiliki peran yang sangat penting karena sebagai pelaksana teknis kewilayahan Camat sebagai kepala Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Sebagai pelaksana teknis kewilayahan Pemerintah Kecamatan Pacitan memiliki ruang lingkup tugas: meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyrakat Desa dan/atau Kelurahan,

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Pacitan di dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah. Melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Pacitan yang meliputi hampir semua prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksananakan di Kecamatan Pacitan telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN PACITAN

Tujuan Rencana Kerja merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Dengan ditetapkannya Tujuan Rencana Kerja, maka Kecamatan Pacitan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan yaitu meningkatnya pelayanan publik di Kecamatan Pacitan, dengan indikator tujuan Nilai Indek Kepuasan Masyarakat yang diukur dalam setiap tahun.

Untuk mencapai tujuan di atas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yaitu penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Pacitan dalam jangka 1 stahun yang akan datang. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan di Kecamatan Pacitan dalam setiap tahunnya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pacitan, dan
2. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Tujuan dan sasaran Kecamatan Pacitan beserta indikator kinerjanya dapat ditunjukkan melalui Tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pacitan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET					SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET HASIL				
		TAHUN							TAHUN				
		1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)			1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
1	2	3					4	5	6				
Meningkatkan Pelayanan Publik yang Inovatif	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	80	81	82	4.51	4.51	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pacitan	Jumah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan	81,29	81,29	83,11	96,00	96.00
							Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di desa	Persentase terlaksananya fasilitasi desa dalam satu tahun	100%	100%	100%	100%	100%
								Presentase desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	100%	100%	100%	100%	100%

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN TAHUN 2025

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Pacitan merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (PD) sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Pacitan sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
    1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan
    2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan
    3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan
    4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi;
    1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan.
    2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
    3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati melalui Sekretaris Daerah
d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati meliputi;
    1. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
    2. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi;
    1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait.
    2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta
    3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
   1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait
   2. Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
   3. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati melalui Sekreataris Daerah

g. Pembinan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan

h. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

i. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

j. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Bupati.

Selain melaksanakan tugas camat, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten, Pelimpahan kewenangan Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

a) **Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :**

- **Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah**

  Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Pacitan diarahkan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Pacitan. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Pacitan merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati. Adapun visi Bupati Pacitan yaitu ***"Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA"*****,** sedangkan misi ke 4 (empat) yaitu Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional dan Melayani, yang menjadi acuan program dan kegiatan dalam renja Kecamatan Pacitan.

- **Pencapaian SPM**

  Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

  Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Pacitan diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Pelayanan yang ada di kecamatan Pacitan diukur dari hasil Survey Kepuasan masyarakat dalam satu tahun. Program yang terkait dengan ini adalah **Program Penyelenggaraan Pemeritahan dan Pelayanan Publik**

- **Pendayagunaan Potensi Ekonomi Masyarakat**

  Kecamatan Pacitan sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Pacitan memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Pacitan. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil di bidang kerajinan seperti kerajinan, peternakan, perikanan, obyek-obyek pariwisata Kabupaten. Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan kelurahan dengan memberikan akses yang lebih baik ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan infrastruktur dasar lainnyaProgram terkait dengan ini yaitu **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

- **Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

  Kecamatan Pacitan sebagai sebuah Kecamatan yang berada di jantung kota Kabupaten Pacitan memiliki berbagai potensi terjadinya konflik dan kerusuhan dalam masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya untuk mengidentifikasi sumber konflik, menyelesaikan perbedaan, dan mempromosikan dialog antara berbagai kelompok masyarakat untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia. Ini mencakup hak setiap individu untuk hidup dalam kedamaian dan tanpa ancaman kekerasan, serta hak atas perlindungan hukum yang adil serta menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis di mana warga dapat hidup dengan damai, menjalani aktivitas sehari-hari tanpa rasa takut, dan berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat secara positif. Program terkait dengan ini yaitu **Program Ketentraman dan Ketertiban Umum**

- **Penanganan Konflik Sosial**

  Penanganan konflik sosial perlu dilakukan untuk mengatasi isu-isu ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan ketidakpuasan dalam masyarakat. Penanganan konflik sosial harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, kelompok masyarakat sipil, lembaga internasional, dan pihak-pihak terlibat dalam konflik. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang lebih stabil, damai, dan adil di masyarakat. Program terkait dengan ini yaitu **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

- **Fasilitasi Pemerintahan Desa**

  Dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas pemerintah desa dalam menjalankan tugas-tugas mereka maka perlu dilakukan Fasilitasi pemerintahan desa agar kinerja pemerintah desa menjadi lebih efisien dan efektif. Fasilitasi pemerintahan desa harus dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah yang lebih tinggi, organisasi non-pemerintah, dan lembaga donor. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pemerintahan desa berjalan dengan baik dan mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Dengan demikian, fasilitasi pemerintahan desa dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan di tingkat desa Program terkait dengan ini yaitu **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

b) **Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan.**

- **Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan.**

  Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Pacitan Tahun 2025 adalah 6 Program dimana Kecamatan Pacitan melaksanakan kegiatan Bersama-sama dengan 5 kelurahan sebagai Sub Unit Organisasi Kecamatan Pacitan. Adapun rincian program dan kegiatan tercantum pada lampiran ini

- **Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.**

  Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Pacitan sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Pacitan dan melingkupi semua Desa. Adapun untuk Kelurahan Rencana Kerja tergabung dalam Rencana Kerja Kecamatan Pacitan

- **Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan.**

  Adapun pagu indikatif yang dirinci menurut sumber dana pada tahun berjalan 2025 dan tahun yang akan datang yaitu tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 3.2

TABEL 3.2

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PACITAN KAB. PACITAN
TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Kecamatan Pacitan							11.032.008.556,00	11.178.808.556,00	10.654.033.405,00							12.115.100.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							11.032.008.556,00	11.178.808.556,00	10.654.033.405,00							12.115.100.000,00	
	7	01				KECAMATAN							11.032.008.556,00	11.178.808.556,00	10.654.033.405,00							12.115.100.000,00	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah				>B Nilai	>B Nilai	5.862.930.386,00	5.973.950.850,00	5.757.122.710,00							6.642.100.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	-			23 Dokumen	23 Dokumen	29.619.600,00	70.819.600,00	70.819.600,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Pacitan		34.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	11.094.000,00	51.094.000,00	46.894.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			12.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	7.930.400,00	9.650.400,00	6.650.400,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			9.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.461.600,00	4.941.600,00	4.941.600,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			6.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.162.800,00	1.162.800,00	1.162.800,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			2.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	

							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	3.970.800,00	3.970.800,00	6.370.800,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			5.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	-			59 Dokumen	59 Dokumen	4.442.283.465,00	4.399.138.197,00	4.399.138.197,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab. Pacitan		5.010.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang /bulan	40 Orang /bulan	4.434.331.065,00	4.391.131.065,00	4.210.065.281,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			5.000.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				34 Dokumen	34 Dokumen	5.290.800,00	5.345.532,00	3.845.532,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			6.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.207.200,00	1.207.200,00	1.207.200,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			2.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				24 Laporan	24 Laporan	1.454.400,00	1.454.400,00	1.454.400,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			2.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	-			100 %	100 %	68.113.510,00	68.113.510,00	68.113.510,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab. Pacitan		61.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	4 Paket	32.846.710,00	32.846.710,00	32.846.710,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			22.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Pendataan dan				6 Dokumen	6 Dokumen	12.350.000,00	12.350.000,00	2.000.000,00	Kab. Pacitan,	PENDAPATAN ASLI	-	Integrasi Orientasi			13.000.000,00	KECAMATAN PACITAN

							Pengolahan Administrasi Kepegawaian									Pacitan, Semua Kel/Desa	DAERAH (PAD)		Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)				
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	363.411.646,00	362.481.664,00	362.481.664,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Pacitan		404.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.504.800,00	10.504.800,00	15.949.600,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			11.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	32.792.458,00	30.578.092,00	27.347.692,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			20.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	35.697.000,00	37.497.000,00	28.782.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			32.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	9.929.500,00	9.929.500,00	2.915.500,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			12.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																	
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	29.035.000,00	27.799.000,00	27.799.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			32.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	16.800.000,00	16.360.000,00	1.260.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			16.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	-			100 %	100 %	130.702.107,00	206.822.821,00	206.822.821,00			-	-	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang		256.500.000,00	KECAMATAN PACITAN

																				Urusan Pemerintah Daerah Kab. Pacitan			
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	4 Unit	0,00	9.439.440,00	41.537.643,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	-			9.500.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	6 Unit	0,00	53.122.602,00	53.122.602,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			49.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	3 Unit	56.960.982,00	22.340.970,00	22.340.970,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			63.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	715.979.366,00	752.362.366,00	752.362.366,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Pacitan		750.600.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	39.723.500,00	47.498.500,00	56.497.078,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			36.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	3.600.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			6.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	160.247.400,00	188.847.400,00	184.847.400,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			164.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	-			80 %	80 %	112.820.692,00	114.212.692,00	114.212.692,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Pacitan		126.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	

							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	10 Unit	16.300.000,00	17.700.000,00	15.418.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			17.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	18 Unit	12.180.000,00	12.180.000,00	7.800.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			13.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	12.425.200,00	12.425.200,00	16.494.800,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			13.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan				100 %	100 %	157.369.170,00	124.676.706,00	86.955.236,00							153.000.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pemenuhan Jumlah OPD/Instansi vertikal yang dikoordinasikan dalam satu tahun	-			12 Bulan	12 Bulan	37.508.300,00	30.272.300,00	30.272.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	Keg. Pemerintahan Tingkat Kecamatan Kab. Pacitan		38.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																	
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	12 Laporan	37.508.300,00	30.272.300,00	24.422.300,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			38.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Pemenuhan Layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan	-			12 Bulan	12 Bulan	98.860.870,00	76.404.406,00	76.404.406,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas	Layanan Administrasi Masyarakat Kab. Pacitan		92.000.000,00	KECAMATAN PACITAN

																		kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)				
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	31.846.901,00	24.529.505,00	11.979.505,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			38.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Prasarana dan Sarana Umum yang dipelihara	-			1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	Prasarana dan Sarana Umum Kab. Pacitan		7.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	600.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			7.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelimpahan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan dalam satu tahun	-			12 Bulan	12 Bulan	15.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat Kab. Pacitan		16.000.000,00	KECAMATAN PACITAN

																		gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			16.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Cakupan Desa dan Kelurahan yang difasilitasi				100 %	100 %	4.820.631.100,00	4.912.818.900,00	4.658.903.140,00							5.114.000.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	-			20 Desa	20 Desa	184.631.100,00	172.313.100,00	172.313.100,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	Kegiatan Pemberdayaan Desa Kab. Pacitan		192.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	39.000.100,00	34.800.100,00	30.986.100,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			40.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	145.631.000,00	137.513.000,00	142.013.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			152.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang difasilitasi	-			5 Kelurahan	5 Kelurahan	4.636.000.000,00	4.740.505.800,00	4.740.505.800,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	Keg. Pemberdayaan Kelurahan Kab. Pacitan		4.922.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000,00	4.500.000,00	300.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas			7.000.000,00	KECAMATAN PACITAN

							Pembangunan di Kelurahan												Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)				
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan				100 %	100 %	47.056.400,00	27.667.600,00	26.167.600,00								57.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-			12 Bulan	12 Bulan	35.056.400,00	15.667.600,00	15.667.600,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	Ketentraman dan Ketertiban Umum Kab. Pacitan		44.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	35.056.400,00	15.667.600,00	14.167.600,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			44.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pemenuhan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah	-			12 Bulan	12 Bulan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Trantibum Kab. Pacitan		13.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			13.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan				100 %	100 %	65.654.800,00	59.345.800,00	41.525.800,00								68.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	-			25 Desa/Kelurahan	25 Desa/Kelurahan	65.654.800,00	59.345.800,00	59.345.800,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Kab. Pacitan		68.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																		
							Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				12 Laporan	12 Laporan	50.054.800,00	43.745.800,00	29.525.800,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			52.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	15.600.000,00	15.600.000,00	12.000.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia			16.000.000,00	KECAMATAN PACITAN

																			Baru (RPJMN dan RPJP 2045)					
6	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang termonitoring				100 %	100 %	78.366.700,00	80.348.700,00	83.358.919,00								81.000.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang termonitoring	-			20 Desa	20 Desa	78.366.700,00	80.348.700,00	80.348.700,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	Pemerintahan Desa Kab. Pacitan		81.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				5 Dokumen	5 Dokumen	50.510.700,00	52.492.700,00	49.502.919,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			52.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				12 Laporan	12 Laporan	27.856.000,00	27.856.000,00	33.856.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			29.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
						Kelurahan Sidoharjo							11.032.008.556,00	11.178.808.556,00	10.654.033.405,00							12.115.100.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							11.032.008.556,00	11.178.808.556,00	10.654.033.405,00							12.115.100.000,00	
	7	01				KECAMATAN							11.032.008.556,00	11.178.808.556,00	10.654.033.405,00							12.115.100.000,00	
7	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah				>B Nilai	>B Nilai	5.862.930.386,00	5.973.950.850,00	5.757.122.710,00							6.642.100.000,00	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	-			100 %	100 %	68.113.510,00	68.113.510,00	68.113.510,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab. Pacitan		61.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	2.931.000,00	2.931.000,00	2.931.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			4.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	-			100 %	100 %	363.411.646,00	362.481.664,00	362.481.664,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Pacitan		404.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.040.500,00	2.040.500,00	2.040.500,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas			4.000.000,00	KECAMATAN PACITAN

																			Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)				
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.996.500,00	29.559.935,00	25.101.380,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			30.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	24.000.000,00	24.000.000,00	16.800.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			24.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	5.198.900,00	5.198.900,00	4.158.500,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			6.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																	
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	26.608.379,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			32.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	-			100 %	100 %	130.702.107,00	206.822.821,00	206.822.821,00			-	-	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab. Pacitan		256.500.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	3 Unit	0,00	62.916.021,00	62.916.021,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			30.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	14.532.009,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			26.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	-			100 %	100 %	715.979.366,00	752.362.366,00	752.362.366,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Pacitan		750.600.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	16.360.800,00	16.360.800,00	16.360.800,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			17.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			2.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	141.848.400,00	141.848.400,00	141.848.400,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			150.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	-			80 %	80 %	112.820.692,00	114.212.692,00	114.212.692,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Pacitan		126.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	8.220.000,00	8.220.000,00	8.220.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			9.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	3 Unit	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			4.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	7.134.192,00	7.134.192,00	7.134.192,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			8.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
8	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan				100 %	100 %	157.369.170,00	124.676.706,00	86.955.236,00							153.000.000,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Pemenuhan Layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan	-			12 Bulan	12 Bulan	98.860.870,00	76.404.406,00	76.404.406,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia	Layanan Administrasi Masyarakat Kab. Pacitan		92.000.000,00	KECAMATAN PACITAN

																		olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Baru (RPJMN dan RPJP 2045)				
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	25.889.068,00	10.750.000,00	10.750.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			16.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
9	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Cakupan Desa dan Kelurahan yang difasilitasi				100 %	100 %	4.820.631.100,00	4.912.818.900,00	4.658.903.140,00							5.114.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang difasilitasi	-			5 Kelurahan	5 Kelurahan	4.636.000.000,00	4.740.505.800,00	4.740.505.800,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kab. Pacitan			4.922.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	216.870.000,00	264.720.000,00	264.700.060,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			260.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	773.130.000,00	780.285.800,00	811.194.087,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Sidoharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			750.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
						Kelurahan Ploso							11.032.008.556,00	11.178.808.556,00	10.654.033.405,00							12.115.100.000,00	

	7					UNSUR KEWILAYAHAN							11.032.008.556,00	11.178.808.556,00	10.654.033.405,00							12.115.100.000,00	
	7	01				KECAMATAN							11.032.008.556,00	11.178.808.556,00	10.654.033.405,00							12.115.100.000,00	
10	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah				>B Nilai	>B Nilai	5.862.930.386,00	5.973.950.850,00	5.757.122.710,00							6.642.100.000,00	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	-			100 %	100 %	68.113.510,00	68.113.510,00	68.113.510,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab. Pacitan		61.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	3 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			6.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	-			100 %	100 %	363.411.646,00	362.481.664,00	362.481.664,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Pacitan		404.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	1 Paket	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			9.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	5 Paket	12.000.000,00	25.940.676,00	22.192.576,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			14.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			21.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	2 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			3.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																		
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	14.439.748,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah,			15.000.000,00	KECAMATAN PACITAN

																			Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)				
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	-			100 %	100 %	130.702.107,00	206.822.821,00	206.822.821,00			-	-	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab. Pacitan		256.500.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	6.676.872,00	6.676.872,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			7.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	2 Unit	36.000.000,00	29.822.200,00	29.822.200,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			37.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	-			100 %	100 %	715.979.366,00	752.362.366,00	752.362.366,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Pacitan		750.600.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			13.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			600.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	103.248.000,00	103.248.000,00	103.248.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			104.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	-			80 %	80 %	112.820.692,00	114.212.692,00	114.212.692,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Pacitan		126.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan				3 Unit	3 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan			3.000.000,00	KECAMATAN PACITAN

							dibayarkan Pajak dan Perizinannya												Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)				
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			3.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
11	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan				100 %	100 %	157.369.170,00	124.676.706,00	86.955.236,00							153.000.000,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Pemenuhan Layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan	-			12 Bulan	12 Bulan	98.860.870,00	76.404.406,00	76.404.406,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	Layanan Administrasi Masyarakat Kab. Pacitan		92.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			10.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
12	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Cakupan Desa dan Kelurahan yang difasilitasi				100 %	100 %	4.820.631.100,00	4.912.818.900,00	4.658.903.140,00							5.114.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang difasilitasi	-			5 Kelurahan	5 Kelurahan	4.636.000.000,00	4.740.505.800,00	4.740.505.800,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kab. Pacitan		4.922.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	

							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	8 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			250.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	845.000.000,00	896.000.000,00	797.248.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Ploso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			850.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
						Kelurahan Baleharjo							11.032.008.556,00	11.178.808.556,00	10.654.033.405,00							12.115.100.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							11.032.008.556,00	11.178.808.556,00	10.654.033.405,00							12.115.100.000,00	
	7	01				KECAMATAN							11.032.008.556,00	11.178.808.556,00	10.654.033.405,00							12.115.100.000,00	
13	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah				>B Nilai	>B Nilai	5.862.930.386,00	5.973.950.850,00	5.757.122.710,00							6.642.100.000,00	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	-			100 %	100 %	68.113.510,00	68.113.510,00	68.113.510,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab. Pacitan		61.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	6.132.600,00	6.132.600,00	6.132.600,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			7.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	-			100 %	100 %	363.411.646,00	362.481.664,00	362.481.664,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Pacitan		404.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			6.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.000.000,00	19.666.100,00	19.666.100,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			5.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	11.999.500,00	12.038.700,00	11.127.090,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah,			13.000.000,00	KECAMATAN PACITAN

																			Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)				
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.163.000,00	1.163.000,00	621.700,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			2.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																	
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	15.000.900,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			17.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	-			100 %	100 %	130.702.107,00	206.822.821,00	206.822.821,00			-	-	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab. Pacitan		256.500.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	2 Unit	0,00	11.795.600,00	11.795.600,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	12.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			13.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	-			100 %	100 %	715.979.366,00	752.362.366,00	752.362.366,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Pacitan		750.600.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	20.815.000,00	20.815.000,00	20.815.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			21.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	1.655.000,00	1.663.000,00	1.663.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			2.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum				12 Laporan	12 Laporan	54.624.000,00	54.624.000,00	54.624.000,00	Kab. Pacitan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Integrasi Orientasi Pembangunan			55.000.000,00	KECAMATAN PACITAN

							Kantor yang Disediakan									Pacitan, Baleharjo	(PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)		Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)				
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	-			80 %	80 %	112.820.692,00	114.212.692,00	114.212.692,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab. Pacitan		126.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	2 Unit	1.968.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			2.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	2 Unit	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			2.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			13.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
14	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan				100 %	100 %	157.369.170,00	124.676.706,00	86.955.236,00							153.000.000,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Pemenuhan Layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan	-			12 Bulan	12 Bulan	98.860.870,00	76.404.406,00	76.404.406,00				Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	Layanan Administrasi Masyarakat Kab. Pacitan		92.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	9.305.748,00	9.305.748,00	9.184.278,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			10.000.000,00	KECAMATAN PACITAN

15	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Cakupan Desa dan Kelurahan yang difasilitasi				100 %	100 %	4.820.631.100,00	4.912.818.900,00	4.658.903.140,00							5.114.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang difasilitasi	-			5 Kelurahan	5 Kelurahan	4.636.000.000,00	4.740.505.800,00	4.740.505.800,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kab. Pacitan		4.922.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	6 Unit	300.156.200,00	300.156.200,00	300.156.200,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			350.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	554.843.800,00	554.843.800,00	504.541.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Baleharjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			600.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
						Kelurahan Pucangsewu							11.032.008.556,00	11.178.808.556,00	10.654.033.405,00							12.115.100.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							11.032.008.556,00	11.178.808.556,00	10.654.033.405,00							12.115.100.000,00	
	7	01				KECAMATAN							11.032.008.556,00	11.178.808.556,00	10.654.033.405,00							12.115.100.000,00	
16	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah				>B Nilai	>B Nilai	5.862.930.386,00	5.973.950.850,00	5.757.122.710,00							6.642.100.000,00	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	-			100 %	100 %	68.113.510,00	68.113.510,00	68.113.510,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab. Pacitan		61.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	6.353.200,00	6.353.200,00	6.353.200,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			6.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	-			100 %	100 %	363.411.646,00	362.481.664,00	362.481.664,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Pacitan		404.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.285.300,00	1.285.300,00	1.285.300,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			2.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.149.600,00	2.149.600,00	2.149.600,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			3.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	13.328.800,00	13.328.800,00	13.328.800,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			14.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			3.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																	
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	8.231.632,00	8.231.632,00	8.231.632,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			10.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	-			100 %	100 %	130.702.107,00	206.822.821,00	206.822.821,00			-	-	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab. Pacitan		256.500.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	3.345.318,00	3.345.318,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	2 Unit	8.209.116,00	4.863.798,00	4.863.798,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			9.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	-			100 %	100 %	715.979.366,00	752.362.366,00	752.362.366,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Pacitan		750.600.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia			22.000.000,00	KECAMATAN PACITAN

																			Baru (RPJMN dan RPJP 2045)					
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			2.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	65.512.800,00	65.512.800,00	65.512.800,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			70.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	-			80 %	80 %	112.820.692,00	114.212.692,00	114.212.692,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab. Pacitan		126.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	9.073.300,00	9.073.300,00	9.073.300,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			10.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	4.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			5.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
17	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan				100 %	100 %	157.369.170,00	124.676.706,00	86.955.236,00							153.000.000,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Pemenuhan Layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan	-			12 Bulan	12 Bulan	98.860.870,00	76.404.406,00	76.404.406,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	Layanan Administrasi Masyarakat Kab. Pacitan		92.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada				12 Laporan	12 Laporan	10.140.000,00	10.140.000,00	5.340.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah,			12.000.000,00	KECAMATAN PACITAN

							Masyarakat di Wilayah Kecamatan											pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)				
18	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Cakupan Desa dan Kelurahan yang difasilitasi				100 %	100 %	4.820.631.100,00	4.912.818.900,00	4.658.903.140,00							5.114.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang difasilitasi	-			5 Kelurahan	5 Kelurahan	4.636.000.000,00	4.740.505.800,00	4.740.505.800,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kab. Pacitan		4.922.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	3 Unit	300.599.000,00	300.582.000,00	300.582.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			360.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	559.401.000,00	559.418.000,00	498.666.184,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pucangsewu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			610.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
						Kelurahan Pacitan							11.032.008.556,00	11.178.808.556,00	10.654.033.405,00							12.115.100.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							11.032.008.556,00	11.178.808.556,00	10.654.033.405,00							12.115.100.000,00	
	7	01				KECAMATAN							11.032.008.556,00	11.178.808.556,00	10.654.033.405,00							12.115.100.000,00	
19	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah				>B Nilai	>B Nilai	5.862.930.386,00	5.973.950.850,00	5.757.122.710,00							6.642.100.000,00	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	-			100 %	100 %	68.113.510,00	68.113.510,00	68.113.510,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab. Pacitan		61.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	2.492.800,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			3.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	-			100 %	100 %	363.411.646,00	362.481.664,00	362.481.664,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Pacitan		404.000.000,00	KECAMATAN PACITAN

																			Baru (RPJMN dan RPJP 2045)				
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	2.494.320,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			3.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	19.365.282,00	19.365.282,00	19.365.282,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			17.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	7.001.500,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			11.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	4.248.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			6.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																	
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.844.847,00	10.844.847,00	8.911.888,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			11.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	-			100 %	100 %	130.702.107,00	206.822.821,00	206.822.821,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab. Pacitan		256.500.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	2.500.000,00	2.500.000,00	2.496.200,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			5.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	-			100 %	100 %	715.979.366,00	752.362.366,00	752.362.366,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Pacitan		750.600.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	17.999.700,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			19.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.844.466,00	1.844.466,00	1.843.973,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			6.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	51.600.000,00	51.600.000,00	51.600.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			61.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	-			80 %	80 %	112.820.692,00	114.212.692,00	114.212.692,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab. Pacitan		126.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	9.998.920,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			11.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			4.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.500.000,00	2.500.000,00	2.499.840,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			3.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
20	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan				100 %	100 %	157.369.170,00	124.676.706,00	86.955.236,00							153.000.000,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Pemenuhan Layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan	-			12 Bulan	12 Bulan	98.860.870,00	76.404.406,00	76.404.406,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia	-		92.000.000,00	KECAMATAN PACITAN

																		olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Baru (RPJMN dan RPJP 2045)				
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	13.179.153,00	13.179.153,00	13.179.153,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			6.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
21	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Cakupan Desa dan Kelurahan yang difasilitasi				100 %	100 %	4.820.631.100,00	4.912.818.900,00	4.658.903.140,00							5.114.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang difasilitasi	-			5 Kelurahan	5 Kelurahan	4.636.000.000,00	4.740.505.800,00	4.740.505.800,00			-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kab. Pacitan			4.922.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	150.000.000,00	235.000.000,00	235.000.000,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)				151.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				13 Pokmas / Ormas	13 Pokmas / Ormas	730.000.000,00	645.000.000,00	573.516.509,00	Kab. Pacitan, Pacitan, Pacitan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah, Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)				734.000.000,00	KECAMATAN PACITAN
												J U M L A H	**11.032.008.556,00**	**11.178.808.556,00**	**10.654.033.405,00**							**12.115.100.000,00**	

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Pacitan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pacitan Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Visi dan Misi Bupati Pacitan **"Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan Bahagia"** dan mengacu pada evaluasi RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 serta Evaluasi RKPD Kabupaten Pacitan. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pacitan memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Pacitan. Renja Perubahan sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Pacitan didalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketersediaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan.
2) Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
   a. Mengimplementasikan pecapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Pacitan Tahun 2025 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Pacitan.
   b. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-Perubahan) Kecamatan Pacitan Tahun 2025 dengan Ketetapan/Plafon Anggaran yang telah ditetakan oleh Pemerintah Daerah Kab. Pacitan.
   c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Perubahan Kecamatan Pacitan Tahun 2025, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2025.
3) Rencana Tindak Lanjut.

   Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pacitan selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Pacitan. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Perubahan Kecamatan Pacitan Tahun 2025 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Disamping itu Renja Perubahan Kecamatan Pacitan juga memberikan umpan balik (feedback) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Semoga Renja Perubahan Kecamatan Pacitan Tahun 2025 ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kecamatan Pacitan serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Pacitan.

Pacitan, Juli 2025
CAMAT PACITAN

SUGIYEM, AP., M. Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19740808 199311 2 001

RENCANA KERJA PERUBAHAN
PERANGKAT DAERAH
(RENJA PERUBAHAN – PD)
TAHUN 2025

KECAMATAN KEBONAGUNG
KABUPATEN PACITAN

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD Kecamatan Kebonagung Tahun 2025 berpedoman pada dukumen RPJMD Kabupaten Pacitan dan Renstra Perubahan Kantor Kecamatan Kebonagung tahun 2021 - 2026, Renja tersebut merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, sehingga mampu menggambarkan rencana capaian kinerja tahunan yang memetakan sasaran, indikator dan targetnya.

Pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun menunjukan kinerja yang baik. Pada tahun 2025 ini selain mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan baik, juga telah dirumuskan program dan kegiatan baru untuk mendukung program dan kegiatan yang telah ada. Demikian pula halnya dalam perumusan tujuan
,sasaran dan indikator kinerja telah diperbaiki yang disesuaikan dengan isu-isu strategis dan perkembangan situasi di Daerah dan Nasional.

Dokumen Renja ini mencakup seluruh kegiatan Kantor Kecamatan Kebonagung yang disertai Indikator Kinerja dari masing-masing kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2025 . Dengan disusunnya Renja Kantor Kecamatan Kebonagung Tahun 2025 diharapkan mampu mendukung terlaksanannya kegiatan secara efisien dan efektif secara berkesinambungan terukur, terintegrasi dan sinkron antar kegaiatan. Renja tahun 2024 berfungsi sebagai acuan bagi aparat lingkup Kantor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan dan mitra kerja dalam pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran.

Kebonagung, 25 Juni 2025
Plt. CAMAT KEBONAGUNG
KABUPATEN PACITAN

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN KECAMATAN KEBONAGUNG

UDIN WAHYUDI, S.Sos, MM
Pembina
NIP. 19691119 199602 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar …….

Daftar Isi ……..

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Penelaahan

2.5 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD Program dan

3.3 Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana kerja merupakan dokumen perencanaan 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No 25 tahun 2018 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran PD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Mengacu dari Pemendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana setiap satuan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program / kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PD dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra PD untuk mewujudkan visi Kabupaten Pacitan di Kecamatan Kebonagung yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah. Dari dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja PD per tahun. Penyusunan Renja PD merujuk pada dokumen Renstra PD dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja dari tahun sebelumnya.

Kedudukan susunan organisasi dan tugas / fungsi Pemerintah Kecamatan dengan berlakunya Otonomi Daerah

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 79 Tahun 2016 dalam arti Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah pusat berubah menjadi perangkat daerah. Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah otonom karena merupakan ujung tombak pelayaran dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No.79 Tahun 2016 tentang pemerintahan Daerah Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan : "***Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah".***

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab Camat dalam mengembang tugasnya. Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati atau Walikota juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintah yang meliputi :

1. Menetapkan rencana, program dan kegiatan Kecamatan Kebonagung sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan operasional;
2. Membagi tugas kepada bawahan dan mengikuti perkembangannya untuk memastikan pelasanaan tugas dapat habis dan berjalan lancar;
3. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan agar pekerjaan berjalan sesuai rencana dan meningkatkan SDM bawahan;
4. Mengkoordinasikan dan membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar tidak terjadi *overlapping*;
5. Meneliti hasil kerja bawahan untuk disesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan untuk menghindari kesalahan;
6. Meneliti dan menyempurnakan konsep pemberdayaan masyarakat sesuai dengan program kerja yang telah direncanakan;

7. Memantau dan mengendalikan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan Program Kerja;
8. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
9. Memantau dan mengendalikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kebonagung agar situasi kondusif
10. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
11. Memantau pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di Kecamatan Kebonagung sesuai kewenangan Kecamatan;
12. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas Pelayanan Umum yang ada di Kecamatan Kebonagung sesuai dengan peruntukannya;
13. Melakukan koordinasi dengan Muspika dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Kebonagung agar berjalan dengan baik
14. Memantau dan memberi petunjuk teknis pelaksanaan pemerintahan Desa / Kelurahan agar berjalan sesuai program;
15. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup Kecamatan Kebonagung dan yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa / Kelurahan agar tujuan pembangunan tercapai;

Mengingat semakin komplek tugas Camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan konprehensif. Perencanaan Pembangunan, Pembinaan Sosial Budaya Kemasyarakatan dan Pengembangan Perekonomian di tingkat Kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik

ditingkat Desa / Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh Dinas Daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam Perencanaan Pembangunan, Kemasyarakatan dan Kepemerintahan Camat berkewajiban membuat Renstra.

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan merupakan Daerah yang mempunyai wilayah tertentu dan di pimpin oleh Camat. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sehubungan dengan hal itu agar Camat dapat mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Pacitan maka di pandang perlu disusun Rencana Kerja yang sistimatis di Kecamatan Kebonagung.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) PD Tahun 2025 Kecamatan Kebonagung adalah :

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
3. Landasan Operasional :

    1. UU NO. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dilingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
    2. UU NO. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);.
    3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4287);

4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lemabaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
7. Undang – Undang Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Undang – Undang Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
9. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan Pertanggung jawaban Kepala Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara pertanggungjawaban Kepala Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah sebagai telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 tahun 2016
17. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 80,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47360);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734) ;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan,pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan daerah
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 /) ;
26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2016 – 2021.

27. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018.
28. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi serta Tata Kerja Kecamatan Kantor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintah dan Pembinaan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Kebonagung pada Tahun 2025
2. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program / kegiatan Kecamatan Kebonagung pada Tahun 2025

1.3.2 Tujuan

1. Mensinkronisasi serta mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Kebonagung tahun 2024 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Pacitan tahun 2025
2. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

   Penyusunan Renja ini bertujuan lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Kebonagung dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran

pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4 Sistimatika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kebonagung tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistimatika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Renja Perubahan PD agar substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja Perubahan PD, Proses penyusunan Renja Perubahan PD, keterkaitan antara Renja Perubahan PD dengan dokumen RKPD, Renstra Perubahan PD, dengan Renja K / L dan Renja Propinsi / Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD ;

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang – undang peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan PD.

1.4 Sistimatika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAN RENJA PERUBAHAN PD TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan PD Tahun 2024 dan Capaian Renstra PD

Pada Bab ini memuat kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian Tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan, Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun - tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Memuat tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing - masing PD, serta ketentuan peraturan perundang - undangan yang terkait dengan kinerja. Jika PD bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap PD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing - masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma standart pelayanan PD yang bersangkutan.

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Bagian ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi PD.

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program Nasional / Internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*)
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD, dan.
5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan .

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Bagian ini berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.
3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terhadap rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besaranya berbeda.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahan terhadap kebijakan Nasional dan Propinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaah yang menyangkut arahan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

3.1.1 Tujuan dan sasaran Renja Perubahan PD

Bagian ini berisikan mengenai penjelasan :

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja PD.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaannya anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan .
b. Kaidah – kaidah pelaksanaan.
c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan PD Tahun lalu Dan Capaian Renstra Perubahan PD Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan

Pelaksanaan Renja PD Kecamatan Kebonagung Tahun 2025 mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada Kecamatan.Tugas Pokok Kecamatan berdasar Peraturan daerah Kabupaten Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan. Kecamatan adalah membantu Kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan Pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Pacitan. Adapun fungsi dari Kecamatan Kebonagung adalah:

1. Perencanaan yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengelolaan dana, penilaian dan penyusunan rencana program di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat serta pemerintah desa.
2. Pelaksanaan yang meliputi kegiatan pelayanan dan pembinaan masyarakat dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Desa.
3. Melakukan pegawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pokok seperti diatas
4. Melaksanakan tugas-tugas Ketatausahaan
5. Pengkoordinasikan integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain dilingkungan kecamatan.
6. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan dinas / instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas

Renja Perubahan Kecamatan Kebonagung tahun 2025 merupakan Penjabaran Renstra Kecamatan Kebonagung, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pacitan 2021 - 2026. Adapun pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kebonagung antaran lain;

Sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaanya. Oleh karena itu Renja Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Tahun 2025 juga harus dilakukan evaluasi. Adapun evaluasi terhadap Renja Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Tahun 2024 meliputi :

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**

   Meliputi Belanja Barang dan Jasa yang dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan dengan target 100% (**2.580.211.591)** sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi **87.9%** (**2.267.929.762)** target realisasi tidak sesuai dengan realisasi karena sisa anggaran belanja pada rekening Internet / telepon, air, listrik, dan belanja perjalanan dinas.

   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN

Dengan target realisasi 100 % yang dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan **(27.977.965)** sampai dengan Desember 2024 terealisasi 79,93 % (**21.800.000)** untuk anggaran tidak terserap mencapai / mendekati 100 % karena merupakan sisa mati yang tidak dapat diserap karena ada penyesuaian harga, dengan hanya 1 (satu) sub kegiatan yaitu : ***"Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan".***

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Dengan target realisasi yang di laksanakan selama 12 (dua belas) bulan 100% (**130.537.725,00)** dan sampai dengan Desember 2024 terealisasi 69.36 % (**89.894.500,00**) untuk anggaran tidak terserap mencapai 100 % karena merupakan sisa mati yang tidak dapat diserap karena ada penyesuaian harga, dengan 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :

- **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa :**

a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Kecamatan Kebonagung target realisasi yang di laksanakan selama 12 (dua belas) bulan 100 % (**39.946.925**) dan sampai dengan Desember 2024 terealisasi 89.89 % (**35.900.000**) target ralisasi tidak bisa tercapai di sebabkan karena masih ada sisa anggaran belanja sewa alat rumah tangga lainnya.

b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan

Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Kebonagung target realisasi yang di laksanakan selama 12 (dua belas) bulan 100 % (**89.590.800**) dan sampai dengan Desember 2024 terealisasi 59.95 % (**53.994.500**) target ralisasi tidak bisa tercapai di sebabkan karena masih ada sisa anggaran belanja sewa alat rumah tangga lainya.

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

Dengan target realisasi yang di laksanakan selama 12 (dua belas bulan dengan target realisasi 100 % (**88.644.500**) sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 76,75 % (**66.805.000**) untuk anggaran tidak terserap karena merupakan sisa mati yang tidak dapat diserap karena ada penyesuaian harga, yang terdiri 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan sebagi berikut :

Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Sub Kegiatan : Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kecamatan Kebonagung).

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Dengan target realisasi yang dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan dengan target realisasi 100 % (44.945.200,**88.644.500**) sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi (**28.692.000**) untuk anggaran tidak terserap mencapai 42,81 % karena merupakan sisa mati yang tidak dapat diserap karena ada penyesuaian harga, yang terdiri 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan sebagi berikut :

Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Sub Kegiatan : Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Kecamatan Kebonagung).
yang dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan dengan target realisasi 100 % (**31.485.400**) sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi 43.62 % (**13.490.000**).

: Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, yang dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan dengan target realisasi 100 % (**41.280.000**) sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi 37.36 % (**15.202.000**).

6. ROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Meliputi belanja Barang dan Jasa yang dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan dengan target realisasi 100 % (**9.954.000**) sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi 47.13 % (**4.613.500**) untuk anggaran tidak terserap mencapai 100 % karena merupakan sisa mati yang tidak dapat diserap karena ada penyesuaian harga, yang terdiri 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan sebagi berikut :

Kegiatan : **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.**

Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, yang dilaksanakan dalam jangka waktu

12 bulan dengan target realisasi 100 % (**5.269.800**) sampai dengan bulan Desember 2024 realisasi 84.41 % (**4.133.500**).

Sub Kegiatan : Fasilitasi pengelola keuangan desa dan pendayagunaan asset desa yang dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan dengan target realisasi 100 % (4.684.200) sampai dengan bulan Desember 2024

Faktor Penyebab tidak tercapainya terpenuhinya target kinerja program kegiatan yaitu fasilitas yang belum memadai. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah adalah perubahan anggaran setiap tahun anggaran sesuai kebutuhan yang masing – masing perangkat daerah.

Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya target kinerja program adalah selalu berkoordinasi dengan Dinas terkait mulai dari perencanaan sampai dengan penganggaran.

Organisasi Perangkat daerah berusaha melaksanakan agenda Kerja Penyusunan Rencana kerja perangkat Daerah Tahun 2025.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Kebonagung

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja Pelayanan Kecamatan Kebonagung berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, yang ditetapkan Pemerintah Daerah, Kinerja Pelayanan di Kecamatan Kebonagung dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur
- Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Kebonagung sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan, serta pogram, evaluasi dan pelaporan kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi :

1) Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan
2) Pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian
3) Pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan
4) Pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan
5) Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kearsipan di lingkungan Kecamatan
6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

a. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

a. Sub Bagian Program, Evalausi, Pelaporan dan keuangan, mempunyai tugas :

- Melakukan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala;
- Melakukan pengelolaan data;
- Melakukan menyusunan laporan kinerja;
- Mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan keuangan, meliputi : penyiapan bahan pelaksanaan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan
- Mengelola bahan tanggapan pemeriksaan ;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;

b. Sub Bagaian Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- Menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran;
- Menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan rumah tangga;
- Menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
- Melaksanakan penatalaksanaan persuratan
- Melaksanakan penatalaksanaan kehumasan
- Menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kepegawaian
- Memfasilitasi pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

- Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan umum;
- Mengumpulkan, mengolah dan menyusun rancangan kebijakan teknis dan data sesuai bahan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat Desa/Kelurahan;
- Menyajikan data penyelenggaraan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingakat Desa/Kelurahan ;
- Menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, administrasi kependudukan, dan pelayanan umum lain;
- Memfasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan.
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya, serta meregistrasi urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang bukan menjadi kewenangannya.
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
- Melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal
- Melaksanakan fasilitasi tugas forum koordinasi pimpinan kecamatan;
- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintah;
- Memfasilitasi pengurusan administrasi pertanahan di wiayah kecamatan;
- Melaksanakan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan pajak bumi dan bangunan.
- Memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum;
- Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan;
- Memfasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- Memfasilitasi pelaksanaan batas wilayah kecamatan dan kerja sama antar kecamatan
- Memfasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa ;
- Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa.
- Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.
- Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa.
- Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa.
- Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;

- Menyusun rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang menjadi kewenangannya;
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

- Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- Memfasilitasi kerja sama antar Desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- Mengkoordinir pendampingan Desa di wilayahnya
- Mengkoordinir kegiatan pemberdayaan Desa;
- Mengkoordinir pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- Mengkoordinir kegiatan pemberdayaan Desa;
- Meningkatkan partisipatif masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa;
- Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan

perdesaan.

- Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga kemasyarakatan;
- Memfasilitasi penatapan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
- Melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintahan dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
- Meningkatkan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.
- Melaksanakan kegiatan pemberdayaan Desa dan atau Kelurahan;
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan atau Kelurahan;
- Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Desa dan atau Kelurahan ;
- Melaksanakan evaluasi Desa dan atau Kelurahan
- Melaksanakan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan.
- Meningkatkan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
- Memfasilitasi sarana dan prasarna Lembaga kemasyarakatan
- Memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat.
- Memfasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna dan pengelolaan sumber daya alam;
- Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang menjadi kewenangannya.
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaannya.
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan kepda Camat melalui Sekretaris Kecamatan

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- Menyusun rencana operasional dan program kegiatan sosial, ketentraman dan ketertiban.
- Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan.
- Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitas dan pembinaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- Menyiapkan bahan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.
- Menyiapkan bahan program dan pembinaan kehidupan keagamaan, Pendidikan dan kebudayaan, Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
- Memfasilitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- Menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan Peraturan Perundangan- Undangan.
- Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi perizinan.
- Memfasilitasi kegiatan penanggulangan bencana alam.
- Menyusun evaluasi dan laporan tentang sosial, ketentraman dan ketertiban.
- Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang menjadi kewenangannya.
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan sosial, ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat di wilayah

Kecamatan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

- ❖ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabapaten Pacitan Nomor 156 tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Kebonagung terdiri dari :

a. Satu (1) orang Camat Eselon III a
b. Satu (1) orang Sekretaris Kecamatan Eselon III b
c. Lima (5) orang Kepala Seksi Eselon IV a terdiri dari :
    1. Kepala Seksi Pelayanan Umum
    2. Kepala Seksi Pemerintahan
    3. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
    4. Kepala Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban.
d. Dua (2) orang Kepala Sub Bagian Eselon IV b terdiri dari :
    1. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi PD

Seiring dengan perkembangan pembangunan saai ini ruang lingkup dan capaian tingkat kinerja pelayanan PD serta dampak terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dalam rangka pencapaian Visi dan Misi kepala daerah yang dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka analisis terhadap capaian kinerja PD dengan kondisi lingkungan strategis dapat dijabarkan dengan pendekatan analisa kekuatan dan kelemahan yang meliputi kekuatan (*strenghts*) dan kelemahan (*weaknees*), serta lingkungan eksternal dimana peluang (*oppourtunity*) dan ancaman (*threat*) yang berpengaruh tehadap kinerja Kecamatan Kebonagung. Adapun tantangan dan peluang

dalam peningkatan pelayanan PD serta isu-isu berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program kegiatan tahun yang direncanakan adalah capaian kinerja program kegiatan dengan melihat sejauh mana masukan , hasil dan dampak dari program kegiatan tersebut.

Kecamatan Kebonagung sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh satuan Perangkat Daerah lain dilingkup Kabupaten Pacitan. Kecamatan Kebonagung masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan antara lain;

1) Prasarana dan Sarana yang tersedia kurang lengkap dan memadai;
2) Sistem kerja yang belum optimal;
3) Keterbatasan ketrampilan petugas;
4) Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan.
5) Melaksanakan Perencanaan dan pelaksanaan Partisipatif;

1. Melaksanakan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif
2. Lebih Meningkatkan Profesionalisme Kinerja Aparatur Kecamatan dan Desa
3. Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor Dan Lintas Program
4. Meningkatkan Mutu Pelayanan Prima kepada Masyarakat
5. Peningkatan Sarana dan prasarana Kecamatan dan Desa

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kebonagung ditentukan, isu-isu penting yaitu sebagai berikut;

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Pacitan kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunaan segenap potensi yang ada di wilayah.

2. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka camat tetap mendasar pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pacitan;
3. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan instruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi Masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company / Coorperate Sosial Resposipilioty (CSR)*, maka Kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat
4. Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu PD di Pemerintah Kabupaten Pacitan yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasar pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.
5. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapan dengan pelayanan prima akan, memunculkan kembali kepercayaan

masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.

6. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur, Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam peningkatan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.
7. Arah Kebijakan mengoptimalisasikan pola koordinasi, fasilitasi dan motivasi yang mantap di bidang ekonomi pembangunan dan gender, Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Aset Pertanahan

2.4 Review Terhadap Rencana awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat :

a) Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
b) Program prioritas pembangunan daerah dan
c) Rencana Kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS, Rencana Kecamatan Kebonagung berdasarkan RKPD Kabupaten Pacitan sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja PD se Kabupaten Pacitan yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Kebonagung.

Rencana awal prioritas pembangunan di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan tahun 2025 merupakan kebijakan

pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan,aspirasi masyarakat dalam musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Kebonagung dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Pacitan adalah letak geografis Kecamatan Kebonagung yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RT/RW) Kabupaten Pacitan.

Tabel. 3

Usulan Program dan Kegiatan dari Para pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Pacitan

No.	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Kebonagung	Presentase Jumlah Layanan Internal	**Rp. 2.129.502.327**	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kebonagung	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	**Rp. 14.942.420**	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Kebonagung	Presentase cakupan desa / kelurahan yang dibina	**Rp. 75.415.781**	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Kebonagung	Prosentase jumlah koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	**Rp. 66.474.168**	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Kebonagung	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	**Rp. 37.780.000**	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Kebonagung	Prosentase desa yang termonitoring	**Rp. 11.220.000**	

BAB III
TUJUAN DAN SARANA RENJA PERUBAHAN PD

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala - kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan *good govermance dan akuntabilitas public.* Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi kecamatan kebonagung dalam kurun waktu tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas permerintahan umum dalam rangka mengoptimalisasikan pengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan
2. Mengoptimalisasikan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan

Telaah terhadap kebijakan Kabupaten Pacitan, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pacitan, dimana secara teknokratis prioritas Kabupaten Pacitan telah mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur Sebagai modal dasar bagi perwujudan visi dan misi Kecamatan Kebonagung dalam mendukung visi dan misi Kabupaten Pacitan adalah letak geografis Kecamatan Kebonagung yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RT/RW) Kabupaten Pacitan baik dan sisi ekonomi,industri, jasa dan pariwisata.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD Kecamatan Kebonagung yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD Kecamatan Kebonagung 2016 – 2021.

Dengan menitikberatkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan kebonagung mempunyai ***tujuan :*** Meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, keamanan, ketertiban, pertanahan dan aset serta kesejahteraan sosial dengan ***sasaran*** Terwujudnya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan berupa perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan Sosial, pengawasan dan fasilitasi di Kecamatan Kebonagung secara Optimal.

3.3. Program dan kegiatan

Renja Perubahan Kecamatan Kebonagung tahun 2025, didasarkan pada beberapa pendekatan bagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu;

1. Pendekatan tehnokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional

kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga.

2. Pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan Pemerintah tingkat atasnya.
3. Pendekatan poklitis, yaitu memenuhi visi dan misi kepala daerah terpilih;
4. Pendekatan Bottom Up. yaitu mempertimbangkan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya.
5. Pendekatan partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.

3.3.1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA Perubahan) Kantor Kecamatan Kebonagung maka program - program yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

3.3.2. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan

kebijakan yang teleh digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi KinerjaPD
   a. Belanja Bahan Habis Pakai
   b. Belanja Cetak dan Penggandaan
   c. Belanja Makanan dan Minuman
   d. Belanja Perjalanan Dinas
2. Kegiatan Administrasi Keuangan PD
   a. Belanja Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS
   b. Belanja Bahan Habis Pakai
   c. Belanja Jasa Kantor
   d. Belanja Honorarium Pegawai
   e. Belanja Jasa Pengelola BMD
   f. Belanja Cetak dan Penggandaan
   g. Belanja Makanan dan Minuman
   h. Belanja Perjalanan Dinas
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian PD
   a. Belanja Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
4. Kegiatan Administrasi Umum PD
   a. Belanja Bahan Habis Pakai
   b. Belanja Cetak dan Penggandaan
   c. Belanja Makanan dan Minuman
   d. Belanja Perjalanan Dinas
5. Kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD
   a. Belanja Barang Pakai Habis
   b. Belanja Tagihan Air
   c. Belanja Tagihan Listrik
   d. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah
   e. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan

f. Belanja Jasa Tenaga Keamanan

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD
   a. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
   b. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan
   c. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
   d. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak
   e. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-
      Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
   f. Belanja Pemeliharaan Komputer – Komputer Unit Personal Computer
   g. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
   h. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum
7. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja PD yang ada di Kecamatan
   a. Belanja Bahan Habis Pakai
   b. Belanja Cetak dan Penggandaan
   c. Belanja Makanan dan Minuman
   d. Belanja Perjalanan Dinas
8. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   a. Belanja Bahan Habis Pakai
   b. Belanja Sewa Alat Rumah Tangga
   c. Belanja Cetak dan Penggandaan
   d. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
   e. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
9. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah
   a. Belanja Bahan Habis Pakai
   b. Belanja Cetak dan Penggandaan

c. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
d. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
e. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

10. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
    a. Belanja Bahan Habis Pakai
    b. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
    c. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
11. Kegiatan Fasilitasi Keamanan dan Ketertiban Umum
    a. Belanja Bahan Habis Pakai
    b. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
    c. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Pacitan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kebonagung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemarintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7..0.1..01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**	**Kecamatan Kebonagung**	**100%**	**2.580.211.591**	**PAD**	**-**	**100%**	**2.129.502.327**
7.01.7..0.1..01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan layanan perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja	Kecamatan Kebonagung	100%	9.939.922	PAD		100%	**11.482.900**
7.01.7..0.1..01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Kebonagung	100%	1.675.502.792	PAD		100%	1.710.188.396

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan administrasi Barang Miik Daerah	Kecamatan Kebonagung	100%	157.353.000	PAD	-	100%	47.890.261,80
7.01.7..0.1..01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian	Kecamatan Kebonagung	100%	39.764.950,00	PAD	-	100%	12.277.320
7.01.7..0.1..01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentse pemenuhan layanan administrasi umum	Kecamatan Kebonagung	100%	427.930.463	PAD		100%	292.361.919,20
7.01.7..0.1..01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan jasa penunjang	Kecamatan Kebonagung	100%	79.529.400	PAD		100%	94.008.600
7.01.7..0.1..01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase BMD yang dipelihara	Kecamatan Kebonagung	100%	82.060.965	PAD		100%	44.980.034
7.01.7..0.1..01.2.13	Penataan Organisasi	Presentase pemenuhan penataan Organisasi	Kecamatan Kebonagung	100%	6.090.940	PAD		100%	64.340.000
7.01.7..0.1..02	**PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan**	**Kecamatan Kebonagung**	**100%**	15.297.880,	**PAD**		**100%**	**14.942.420**
7.01.7..0.1..02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah layanan yang terselenggara	Kecamatan Kebonagung	100%	15.297.880,	PAD		100%	14.942.420

7.01.7..0.1..03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase cakupan desa/kelurahan yang dibina**	**Kecamatan Kebonagung**	**100%**	**124.537.725**	**PAD**		**100%**	**75.415.781**
7.01.7..0.1..03.2.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah OPD/Instansi vertikal yang dikoordinasikan	Kecamatan Kebonagung	100%	39.946.925	PAD		100%	18.732.600
7.01.7..0.1..03.2.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kebonagung	100%	84.590.800	PAD		100%	56.683.181
7.01.7..0.1..05	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan**	**Kecamatan Kebonagung**	**100%**	**57.426.025**	**PAD**		**100%**	66.474.168
7.01.7..0.1..05.2.01	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Kebonagung	100%	**57.426.025**	**PAD**		**100%**	66.474.168
7.01.7..0.1..06	**PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Prosentase desa yang termonitoring**	**Kecamatan Kebonagung**	**100%**	**72.765.400**	**PAD**		**100%**	37.780.000
7.01.7..0.1..06.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Kecamatan Kebonagung	100%	31.485.400	PAD		100%	7.180.000
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Prosentase Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Kebonagung	100%	41.280.000	PAD		100%	30.600.000

7.01.6..0.1.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA**	**Prosentase program pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerntahan desa**	**Kecamatan Kebonagung**	**100%**	**9.954.000**	**PAD**		**100%**	**11.220.000**
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Prosentase Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Kebonagung	**100%**	5.269.800	**PAD**		**100%**	11.220.000

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Kebonagung Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kebonagung tahun 2021 - 2026. Renja Kecamatan Kebonagung Tahun 2025 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala pemerintahan kota (yang sudah melakukan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan propinsi dan nasional), baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang.

Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok Kecamatan Kebonagung Tahun 2025.

Kecamatan Kebonagung sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi faktor *strategi* yaitu tantangan dan peluang.

Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 224 ayat (1) dan Pasal 226 ayat (1) yang menyebutkan :

"*Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. (* Pasal 224 ayat (1)) *Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan*

Daerah kabupaten/kota. (Pasal 226 ayat (1)).

Jika dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab Camat dalam mengemban tugasnya. Adapun pelimpahan sebagaian urusan wewenang Bupati Pacitan kepada Camat untuk menangani urusan otonomi daerah, meliputi :

1. Urusan Pemerintahan
    - Menetapkan pelaksanakan tugas / pelaksana harian (Plt / Plh) Kepala desa
    - Atas nama Bupati Pacitan, memberikan ijin cuti kepada Kepala Desa
    - Menetapkan, mengesahkan dan melantik Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu setelah mendapat persetujuan Bupati.
    - Pemilian Kepala Desa yang tidak dilaksanakan secara serentak, Camat menetapkan dan mengesahkan hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa dengan terlebih dahulu melaksanakan konsultasi kepada Bupati.
    - Melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
    - Menyelesaikan permasalahan desa (non litigasi) di Bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
    - Pelayanan penertiban Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan dalam Kabupaten .
    - Penanganan awal terhadap kondisi darurat bencana alam.
    - Menandatangani rekomendasi SKP bagi Kepala Seksi yang ada di Kecamatan.
2. Urusan Perijinan
    - Menandatangani Surat Pernyataan Persetujuan Proses Perijinan
    - Memberikan rekomendasi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

- Memberikan rekomendasi terhadap Ijin Usaha Industri primer hasil hutan kayu
- Memberikan rekomendasi usaha perkebunan pada kawasan sesuai rencana tata ruang.

3. Urusan Pendidikan
    - Menyelenggarakan serah terima jabatan Kepala Taman Kanak- kanak Negeri, Kepala Sekolah dasar Negeri, Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri, Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri dan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.
4. Usaha Kesehatan
    - Melaksanakan koordinasi penanggulangan terhadap kejadian luar biasa dan kondisi darurat bidang kesehatan masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kebonagung Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Namun demikian,jika dalam perjalanannya terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada penurunan jumlah program / kegiatan maka; (a) akan dilakukan penyesuaian berupa penundaan program/kegiatan yang memiliki bobot prioritas lebih rendah ; (b) Penurunan target capaian kinerja untuk menyesuaikan Rasionalisasi Anggaran terhadap program / kegiatan yang diajukan dalam Renja Kecamatan Kebonagung tahun 2025.

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Kebonagung dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi dan misi Kabupaten Pacitan di Kecamatan Kebonagung.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang berkait dan berkepentingan) di Kecamatan Kebonagung. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Kebonagung ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran

serta visi dan misi Kabupaten Pacitan secara keseluruan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2025 atau Tahun Ketiga, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut;

1. Penetapan status hukum naskah Perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggung jawabkan ;
2. Pengkomunikasian / Sosialisasi Rencana Strategis kesemua pihak yang bersifat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi Renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat.
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra kesemua pihak berjalan kearah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat.
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan direncana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat.
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu

dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap Keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu **Kabupaten Pacitan yang Sejahtera.** Amiin.

KECAMATAN ARJOSARI
2025

RENCANA KERJA PERUBAHAN

TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN ARJOSARI
Jl. Raya Nawangan No. 14

KATA PENGANTAR

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan PD) Kecamatan Arjosari Tahun 2025 berpedoman pada Surat Edaran Bupati Pacitan Nomor 188/076/408.53/2025 Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Tahun Kabupaten. Renja Perubahan tersebut merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, sehingga mampu menggambarkan rencana capaian kinerja tahunan yang memetakan sasaran, indikator, dan targetnya.

Pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun menunjukan kinerja yang baik. Pada tahun 2025 ini selain mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan baik, juga telah dirumuskan program dan kegiatan baru untuk mendukung program dan kegiatan yang telah ada. Demikian pula halnya dalam perumusan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja telah diperbaiki yang disesuaikan dengan isu-isu strategis dan perkembangan situasi di daerah dan nasional.

Dokumen Perubahan Renja ini mencakup seluruh kegiatan Kantor Kecamatan Arjosari yang disertai indikator kinerja dari masing-masing kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2025. Dengan disusunnya Perubahan Renja Kantor Kecamatan Arjosari Tahun 2025 diharapkan mampu mendukung terlaksanannya kegiatan secara efisien dan efektif secara berkesinambungan terukur, terintegrasi dan sinkron antar kegiatan. Perubahan Renja tahun 2025 berfungsi sebagai acuan bagi aparat lingkup Kantor Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan dan mitra kerja dalam pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran.

Arjosari, Pebruari 2025

CAMAT ARJOSARI

DIDIK DARMAWAN, S.STP.,MM
Pembina Tk I
NIP. 198105022000121001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai dengan Triwulan II

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Arjosari Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang dijabarkan didalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Arjosari tahun 2021-2026

Mengacu dari Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana setiap satuan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis [Renstra] sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PD dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra PD untuk mewujudkan visi Kabupaten Pacitan di Kecamatan Arjosari yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah. Dari dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja PD per tahun. Penyusunan Renja PD merujuk pada dokumen Renstra PD dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja dari tahun sebelumnya.

Kedudukan susunan organisasi dan tugas/fungsi Pemerintah Kecamatan dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 dalam arti Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah pusat berubah menjadi

perangkat daerah. Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Peraturan Bupati Pacitan No.156 Tahun 2021 tentang pemerintahan Daerah Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan :

Kecamatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengembang tugasnya.

Disamping camat melaksanakan tugas dari Bupati atau Walikota, juga menyelenggarakan fungsi Pemerintah yang meliputi :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau Kelurahan;
5. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang ada di kecamatan;
6. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang di berikan oleh Bupati

Mengingat semakin komplek tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan konprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat Kecamatan yang dalam

pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik ditingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan, kemasyarakatan dan kepemerintahan Camat berkewajiban membuat Renstra.

Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan merupakan Daerah yang mempunyai wilayah tertentu dan di pimpin oleh Camat. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sehubungan dengan hal itu agar Camat dapat mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Pacitan maka di pandang perlu disusun Rencana Kerja Perubahan yang sistimatis di Kecamatan Arjosari.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA Perubahan PD) Tahun 2024 Kecamatan Arjosari adalah :

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
3. Landasan Operasional :
    1. UU NO. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur;
    2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah ; (Lembaran Negara RI tahun 204 Nomor : 244, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
5. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja ;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Pengendalian, Evaluasi dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, tambahan lembaranan Negara RI Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tahun 2000 tentang Perangkat Daerah (Lembaran negara RI tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembarab Negara RI Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelyanan Minimal (SPM) Lembaran Neraga RI Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6178;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 22019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran negara RI Nomor 6322;

12. Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Permendangri Nomor 67 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat aerah provisni dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penylenggaraan Urusan pemerintahan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan evaluasi Pembangaunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah entang Rancanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Sireta Negara RI Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019, tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota;
18. Peraturan Meenteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah ;
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019, tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah tahun 2021;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
23. Peraturan Daerah provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 sebagaimanq di ubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Pacitan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021;
27. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022.
28. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 170 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;
29. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
30. Surat Edaran Bupati Pacitan Nomor : 188/076/408.53/2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Kabupaten Pacitan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Perubahan Renja ini dimaksudkan untuk :

1. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintah dan Pembinaan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Arjosari pada tahun 2025
2. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Arjosari pada Tahun 2025

1.3.2 Tujuan

1. Mensinkronisasi serta mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Arjosari tahun 2025 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Pacitan tahun 2025
2. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas- tugas camat berikutnya.

Penyusunan Renja Perubahan ini bertujuan lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Arjosari dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4 Sistimatika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Arjosari tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja PD agar substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja Perubahan PD, Proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja Propinsi / Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD ;

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang – undang peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja PD.

1.4 Sistimatika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD

Pada Bab ini memuat kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan, Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun - tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Memuat tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing- masing PD, serta ketentuan peraturan perundang - undangan yang terkait dengan kinerja. Jika PD bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap PD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing - masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma standart pelayanan PD yang bersangkutan.

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Bagian ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional

/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals)

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD, dan.
5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Bagian ini berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.
3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terhadap rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besaranya berbeda.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Propinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaah yang menyangkut arahan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD

Bagian ini berisikan mengenai penjelasan :

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja PD.

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaannya anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan .
b. Kaidah – kaidah pelaksanaan.
c. Rencana tindak lan.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu Dan Capaian Renstra PD Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan

Pelaksanaan Perubahan Renja PD Kecamatan Arjosari Tahun 2025 mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada Kecamatan. Tugas Pokok Kecamatan berdasar Peraturan daerah Kabupaten Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi, Serta tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan. Kecamatan adalah membantu Kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Pacitan. Adapun fungsi dari Kecamatan Arjosari adalah :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
   a. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan
   b. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan
   c. Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan
   d. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum meliputi :
   a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
   b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masayarakat, dan
   c. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
4. Pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum :
   a. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
   b. Pelaksanaan pemeliharan prasrana dan fasilitasi pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
   c. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilyah kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
5. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah ditingkat Kecamatan;
   a. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait
   b. Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;dan
   c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
6. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau Kelurahan;
7. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang ada di kecamatan;
8. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;dan

9. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang di berikan oleh Bupati

Renja Perubahan Kecamatan Arjosari tahun 2025 merupakan penjabaran Perubahan Renstra Kecamatan Arjosari, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pacitan 2021-2026. Adapun pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Arjosari antara lain :

Sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaanya. Oleh karena itu Perubahan Renja Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Tahun 2025 juga harus dilakukan evaluasi. Adapun hasil evaluasi terhadap Renja Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan sampai dengan triwulan II Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
KABUPATEN PACITAN
Triwulan Tahun 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
1	**701.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**Nilai**	**72,30**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**72.30**	**2.173.780.668,00**	**0,00**	**452.923.337,00**	**73,65**	**683.003.846,00**	**0,00**	**83.898.269,00**	**0,00**	**0,00**	**73,65**	**1.219.825.452,00**	**101,87**	**56,12**	**73,65**	**1.219.825.452,00**	**101.87**	**0**	**Kecamatan Arjosari**
	701.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**23.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**23.00**	**35.434.000,00**	**5,00**	**2.385.200,00**	**0,00**	**21.412.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**23.797.600,00**	**21,74**	**67,16**	**5,00**	**23.797.600,00**	**21.74**	**0**	
	701.01.2	Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen	Dokumen	6.00	0,00	0.00	0,00	6	16.060.000,0	2,00	2.385.200,00	0,00	16.083.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	18.468.900,0	33,33	115,00	2,00	18.468.900,0	33.33	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
	.01.0001	Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan Perangkat Daerah							0										0				0			
	701.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1.00	0,00	0.00	0,00	1.00	4.722.000,00	0,00	0,00	0,00	1.532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532.000,00	0,00	32,44	0,00	1.532.000,00	0	0	
	701.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1.00	0,00	0.00	0,00	1.00	4.781.000,00	0,00	0,00	0,00	1.160.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.900,00	0,00	24,28	0,00	1.160.900,00	0	0	
	701.01.2.01.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	Dokumen	1.00	0,00	0.00	0,00	1.00	5.031.000,00	0,00	0,00	0,00	1.382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382.000,00	0,00	27,47	0,00	1.382.000,00	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
	4		Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD																								
	701.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1.00	0,00	0.00	0,00	1.00	4.840.000,00	0,00	0,00	0,00	1.253.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.800,00	0,00	25,90	0,00	1.253.800,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					6,67	45,02					F
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah		5	5		
	701.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**59.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**59.00**	**1.815.518.407,00**	**11,00**	**413.365.987,00**	**6,00**	**549.464.076,00**	**0,00**	**83.898.269,00**	**0,00**	**0,00**	**17,00**	**1.046.728.332,00**	**28,81**	**57,65**	**17,00**	**1.046.728.332,00**	**28.81**	**0**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
	701.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	0.00	0,00	0.00	0,00	20.00	1.801.909.007,00	16,00	411.585.087,00	16,00	535.149.576,00	0,00	83.898.269,00	0,00	0,00	16,00	1.030.632.932,00	80,00	57,20	16,00	1.030.632.932,00	0	0	
	701.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	12.00	0,00	0.00	0,00	12.00	13.609.400,00	3,00	1.780.900,00	2,00	14.314.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	16.095.400,00	41,67	118,27	5,00	16.095.400,00	41.67	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					60,84	87,74					F
Predikat kinerja(%)																					Rendah	Tinggi		2	2		
	701.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pegawai yang dikelola Perangkat Daerah**	**Orang**	**20.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**20.00**	**11.593.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	
	701.01.2.05.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2.00	0,00	0.00	0,00	2.00	11.593.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
	2																										
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					0,00	0,00					F
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah		1	1		
	701.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**	**100.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100.00**	**127.713.661,00**	**25,00**	**8.314.000,00**	**100,00**	**58.171.210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125,00**	**66.485.210,00**	**125,00**	**52,06**	**125,00**	**66.485.210,00**	**125**	**0**	
	701.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12.00	0,00	0.00	0,00	12.00	31.887.661,00	3,00	34.000,00	0,00	21.392.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	21.426.510,00	25,00	67,19	3,00	21.426.510,00	25	0	
	701.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12.00	0,00	0.00	0,00	12	95.826.000,00	3,00	8.280.000,00	0,00	36.778.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	45.058.700,00	25,00	47,02	3,00	45.058.700,00	25	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					25,00	57,11					F
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Rendah		2	2		
	701.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase Pengadaan Barang Perangkat Daerah**	**%**	**100.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100.00**	**9.632.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	
	701.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	5.00	0,00	0.00	0,00	5.00	9.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					0,00	0,00					F
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah		1	1		
	701.01.2	**Penyediaan Jasa Penunjang**	**Prosentase Pemenuhan**	**%**	**100.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100.00**	**161.079.000,**	**100,00**	**28.497.150,0**	**100,00**	**48.569.660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**77.066.810,0**	**100,00**	**47,84**	**100,00**	**77.066.810,0**	**100**	**0**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
	.08	**Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jasa Penunjang**							**00**		**0**								**0**				**0**			
	701.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12.00	0,00	0.00	0,00	12	29.639.000,00	3,00	2.607.150,00	0,00	14.049.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	16.656.810,00	25,00	56,20	3,00	16.656.810,00	25	0	
	701.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12.00	0,00	0.00	0,00	12	131.440.000,00	3,00	25.890.000,00	0,00	34.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	60.410.000,00	25,00	45,96	3,00	60.410.000,00	25	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					25,00	51,08					F
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Rendah		2	2		
	701.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**Prosentase Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**%**	**100.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100.00**	**12.810.200,00**	**0,00**	**361.000,00**	**0,00**	**5.386.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.747.500,00**	**0,00**	**44,87**	**0,00**	**5.747.500,00**	**0**	**0**	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
		Pemerintahan Daerah																									
	701.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	14.00	0,00	0.00	0,00	14.00	12.810.200,00	0,00	361.000,00	0,00	5.386.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.747.500,00	0,00	44,87	0,00	5.747.500,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					0,00	44,87					F
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah		1	1		
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					39,36	38,51					
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah					
2	**701.02**	**PROGRAM PENYELENGG**	**Presentase Penyelenggaraa**	**%**	**100,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100**	**33.471.100,0**	**25,00**	**3.553.400,00**	**25,00**	**5.173.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**8.726.400,00**	**50,00**	**26,07**	**50,00**	**8.726.400,00**	**50**	**0**	**Kecamatan**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
		ARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**n Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan**							**0**																	**Arjosari**
	701.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan**	**%**	**100.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100.00**	**16.052.600,00**	**25,00**	**3.553.400,00**	**0,00**	**2.986.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,00**	**6.539.400,00**	**25,00**	**40,74**	**25,00**	**6.539.400,00**	**25**	**0**	
	701.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	12.00	0,00	0.00	0,00	12.00	16.052.600,00	3,00	3.553.400,00	0,00	2.986.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	6.539.400,00	25,00	40,74	3,00	6.539.400,00	25	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					25,00	40,74					F
Predikat kinerja(%)																					Sangat	Sangat		1	1		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
																					Renda h	Renda h					
	701.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah Layanan Pengantar KK,KTP dan Surat Legalitas lainnya**	**Jenis**	**10.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**10.00**	**17.418.500,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**2.187.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**2.187.000,00**	**100,00**	**12,56**	**10,00**	**2.187.000,00**	**100**	**0**	
	701.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12.00	0,00	0.00	0,00	12.00	17.418.500,00	3,00	0,00	0,00	2.187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2.187.000,00	25,00	12,56	3,00	2.187.000,00	25	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					25,00	12,56					F
Predikat kinerja(%)																					Sangat Renda	Sangat Renda		1	1		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
																					h	h					
																					Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)		62,50	26,65					
																					Predikat kinerja(%)		Rendah	Sangat Rendah					
3	**701.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa danKelurahan yang dilaksanakan**	**%**	**100,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100.00**	**213.455.500,00**	**100,00**	**62.589.800,00**	**0,00**	**78.198.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**140.788.200,00**	**100,00**	**65,96**	**100,00**	**140.788.200,00**	**100**	**0**	**Kecamatan Arjosari**
	701.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Desa yang difasilitasi**	**Desa**	**17.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**17.00**	**213.455.500,00**	**17,00**	**62.589.800,00**	**0,00**	**78.198.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,00**	**140.788.200,00**	**100,00**	**65,96**	**17,00**	**140.788.200,00**	**100**	**0**	
	701.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam	Lembaga Kemasyarakatan	17.00	0,00	0.00	0,00	17.00	48.869.000,00	17,00	15.800.900,00	0,00	5.918.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	21.719.200,00	100,00	44,44	17,00	21.719.200,00	100	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
		Perencanaan Pembangunan di Desa	musyawarah Perencanaan Pembangunan didesa																								
	701.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	Laporan	12.00	0,00	0.00	0,00	12.00	164.586.500,00	3,00	46.788.900,00	0,00	72.280.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	119.069.000,00	25,00	72,34	3,00	119.069.000,00	25	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					62,50	58,39					F
Predikat kinerja(%)																					Rendah	Rendah		2	2		
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					100,00	65,96					
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Sedang					
4	**701.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN**	**Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman**	**%**	**100,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100.00**	**53.237.000,00**	**25,00**	**5.861.875,00**	**25,00**	**17.688.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**23.550.175,00**	**50,00**	**44,24**	**50,00**	**23.550.175,00**	**50**	**0**	**Kecamatan Arjosari**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
		KETERTIBAN UMUM	**dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan**																								
	701.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Laporan**	**12.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**12.00**	**53.237.000,00**	**3,00**	**5.861.875,00**	**0,00**	**17.688.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**23.550.175,00**	**25,00**	**44,24**	**3,00**	**23.550.175,00**	**25**	**0**	
	701.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	12.00	0,00	0.00	0,00	12.00	53.237.000,00	3,00	5.861.875,00	0,00	17.688.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	23.550.175,00	25,00	44,24	3,00	23.550.175,00	25	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					25,00	44,24					F
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah		1	1		
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					25,00	44,24					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah					
5	**701.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan**	**%**	**100,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100.00**	**42.534.500,00**	**25,00**	**1.721.400,00**	**25,00**	**14.059.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**15.781.200,00**	**50,00**	**37,10**	**50,00**	**15.781.200,00**	**50**	**0**	**Kecamatan Arjosari**
	701.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum**	**Desa**	**17.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**17.00**	**42.534.500,00**	**5,00**	**1.721.400,00**	**0,00**	**14.059.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**15.781.200,00**	**29,41**	**37,10**	**5,00**	**15.781.200,00**	**29.41**	**0**	
	701.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	12.00	0,00	0.00	0,00	12.00	42.534.500,00	3,00	1.721.400,00	0,00	14.059.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	15.781.200,00	25,00	37,10	3,00	15.781.200,00	25	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					25,00	37,10					F

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah		1	1		
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					29,41	37,10					
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah					
6	**701.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yang termonitoring**	**%**	**100,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**100.00**	**71.796.500,00**	**25,00**	**6.182.100,00**	**25,00**	**16.678.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**22.860.600,00**	**50,00**	**31,84**	**50,00**	**22.860.600,00**	**50**	**0**	**Kecamatan Arjosari**
	701.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Desa yang termonitoring**	**Desa**	**17.00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**17.00**	**71.796.500,00**	**17,00**	**6.182.100,00**	**0,00**	**16.678.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,00**	**22.860.600,00**	**100,00**	**31,84**	**17,00**	**22.860.600,00**	**100**	**0**	
	701.06.2	Fasilitasi Administrasi	Jumlah Dokumen yang	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	12.00	12.043.500,0	3,00	1.032.100,00	1,00	3.029.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4.061.700,00	8,33	33,73	1,00	4.061.700,00	0	0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
	.01.0002	Tata Pemerintahan Desa	Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa							0																	
	701.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	0.00	0,00	0.00	0,00	12.00	11.753.000,00	3,00	0,00	1,00	2.006.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2.006.900,00	33,33	17,08	4,00	2.006.900,00	0	0	
	701.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	17.00	0,00	0.00	0,00	17.00	48.000.000,00	3,00	5.150.000,00	1,00	11.642.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	16.792.000,00	23,53	34,98	4,00	16.792.000,00	23.53	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					21,73	28,60					F
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah		3	3		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		(16)
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																				100,00	31,84					
Predikat kinerja(%)																				Sangat Tinggi	Sangat Rendah					
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)																				66,98	43,56					
Predikat kinerja(%)																				Sedang	Sangat Rendah					
Total																				**2.588.275.268,00**			**1.431.532.027,00**			
Persentase Realisasi Anggaran																				**55.31%**						
Predikat																				**Rendah**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Sumber Dana, Prioritas Kinerja jelajavascript:;s, Komitmen antar karyawan dalam melaksanakan tugas, kondisi/suasana lingkungan kerja baik, dukungan dari atasan

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Keterbatasan SDM, Sarana Prasarana yang kurang memadai

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Pemenuhan dan Peningkatan SDM, Pemenuhan Sarana Prasarana

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Pemenuhan dan Peningkatan SDM, Pemenuhan Sarana Prasarana

Faktor Penyebab tidak tercapainya terpenuhinya target kinerja program kegiatan yaitu fasilitas yang belum memadai dan Penyerapan baru Bulan Juni. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah adalah perubahan anggaran setiap tahun anggaran sesuai kebutuhan masing – masing perangkat daerah.

Kebijakan /tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya target kinerja program adalah selalu berkoordinasi dengan Dinas terkait mulai dari perencanaan sampai dengan penganggaran.

Organisasi Perangkat daerah berusaha melaksanakan agenda Kerja Penyusunan Perubahan Rencana kerja perangkat Daerah Tahun 2025.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Arjosari

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja Pelayanan Kecamatan Arjosari berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, yang ditetapkan Pemerintah Daerah, Kinerja Pelayanan di Kecamatan Arjosari dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur
- Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Arjosari sebagai berikut :

SEKRETARIS KECAMATAN

Sekretariat Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan, serta program, evaluasi dan pelaporan kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan Kecamatan. Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
b. pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
c. pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan.
d. pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi di sekretariat kecamatan adalah sebagai berikut :

Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :

a. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan, dan keuangan mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan;
b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis;
c. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data;
d. menyiapkan bahan penyusunan laporan;
e. menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan laporan kinerja;
f. melaksanakan pengelolaan anggaran;
g. melaksanakan perbendaharaan dan gaji;
h. melaksanakan verifikasi dan akuntansi;
i. melaksanakan pelaporan keuangan; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

a. menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran;
b. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan rumah tangga;

c. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
d. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
e. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kehumasan dan protokol;
f. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kepegawaian; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

- ***SEKSI PELAYANAN UMUM***

Seksi Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang pelayanan umum. Uraian Tugas sebagai berikut:

a. menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan umum;

b. mengumpulkan, mengolah dan menyusun rancangan kebijakan teknis dan data sesuai bahan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat Desa/ Kelurahan;

c. menyajikan data penyelenggaraan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat Desa/ Kelurahan;

d. menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, administrasi kependudukan, administrasi pertanahan dan pelayanan umum lain;

e. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

f. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- ***SEKSI PEMERINTAHAN***

Seksi Pemerintahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang Pemerintahan. Uraian Tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;

b. Melaksanakan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;

c. Fasilitasi Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;

d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan;

e. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan;

f. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan pajak bumi dan bangunan;

g. Memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum;

h. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;

i. Fasilitasi pelaksanaan batas wilayah kecamatan;

j. Melaksanakan urusan yang dilimpahakan kepada camat yang menjadi kewenangannya;

k. Fasilitasi Kerjasama antar kecamatan;

l. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

m. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;

n. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;

o. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;

p. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;

q. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

r. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa;

s. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

t. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa;

u. Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan;

v. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;

w. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

x. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya;

y. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan

z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- ***SEKSI SOSIAL, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN***

Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang sosial, ketentraman dan ketertiban. Uraian Tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan sosial, ketentraman dan ketertiban;

b. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan;

c. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;

e. Menyiapkan bahan program dan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;

f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

g. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi perizinan;

h. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;

i. Menyusun evaluasi dan laporan tentang sosial, ketentraman dan ketertiban;

j. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya;

k. Melaporkan pelaksanaan kegiatan sosial, ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan

l. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Camat.

- ***SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT***

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang pembangunan dan pemberdayan masyarakat. Uraian Tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan Bina Pemerintahan Desa;

b. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif;

c. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga;

d. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

e. Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya;

f. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan;

g. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;

h. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;

i. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan;

j. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;

k. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan;

l. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;

m. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan;

n. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

o. Evaluasi Kelurahan;

p. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;

q. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;

r. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;

s. Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan;

t. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;

u. Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;

v. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya;

w. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan

x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.;

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabapaten Pacitan Nomor 156 tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Arjosari terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
   - Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
   - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

3. Seksi Pelayanan Umum;
4. Seksi Pemerintahan;
5. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
6. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban;

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi PD

Seiring dengan perkembangan pembangunan saat ini ruang lingkup dan capaian tingkat kinerja pelayanan PD serta dampak terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dalam rangka pencapaian Visi dan Misi kepala daerah yang dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka analisis terhadap capaian kinerja PD dengan kondisi lingkungan strategis dapat dijabarkan dengan pendekatan analisa kekuatan dan kelemahan yang meliputi kekuatan (strenghts) dan kelemahan (weaknees), serta lingkungan eksternal dimana peluang (oppourtunity) dan ancaman (threat) Yang berpengaruh terhadap kinerja Kecamatan Arjosari . Adapun tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan PD serta isu-isu berupa rekomendasi dan catatan setrategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program kegiatan tahun yang direncanakan adalah capaian kinerja program kegiatan dengan melihat sejauh mana masukan , hasil dan dampak dari program kegiatan tersebut.

Kecamatan Arjosari sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh satuan Perangkat Daerah lain dilingkup Kabupaten Pacitan . Kecamatan Arjosari masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan , antara lain : (1) Prasarana dan Sarana

yang tersedia kurang lengkap dan memadai; (2) Sistem kerja yang belum optimal; (3) Keterbatasan ketrampilan petugas; (4) Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan.

Melaksanakan Perencanaan dan pelaksanaan Partisipatif;

1. Melaksanakan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif
2. Lebih Meningkatkan Profesionalisme Kinerja Aparatur Kecamatan dan Desa
3. Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor Dan Lintas Program
4. Meningkatkan Mutu Pelayanan Prima kepada Masyarakat
5. Peningkatan Sarana dan prasarana Kecamatan dan Desa

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Arjosari ditentukan, isu-isu penting yaitu sebagai berikut;

(1). Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Pacitan kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada diwilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka camat tetap mendasar pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah , potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten pacitan;

(2). Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan

instruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi Masyarakat.Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Coorperate Sosial Resposipilioty (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat

(3). Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu PD di Pemerintah Kabupaten Pacitan yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasar pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapan dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.

(4). Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur, Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting ,maka aparatur yang ada harus

mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam peningkatan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

(5). Arah Kebijakan mengoptimalisasikan pola koordinasi, fasilitasi dan motivasi yang mantap di bidang ekonomi pembangunan

dan gender, Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Aset Pertanahan

2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD 2025

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat :

a). Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah

b). Program prioritas pembangunan daerah dan

c). Rencana Kerja, pendanaan dan prakiraan maju,yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS, Rencana Kecamatan Arjosari berdasarkan RKPD Kabupaten Pacitan sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja PD se Kabupaten Pacitan yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Arjosari.

Rencana awal prioritas pembangunan di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan tahun 2025 merupakan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Arjosari dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Pacitan adalah letak geografis Kecamatan Arjosari yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RT/RW) Kabupaten Pacitan

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Kabupaten Pacitan

Unit Organisasi : Kecamatan Arjosari

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**
	KECAMATAN ARJOSARI				**2.490.352.041**	**KECAMATAN ARJOSARI**				**2.490.352.041**	
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**>B**	**2.053.085.241**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**>B**	**2.053.085.241**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		***Jumlah dokumen Perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah***	***23dokumen***	**20.576.100**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		***Jumlah dokumen Perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah***	***23 dokumen***	**20.576.100**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Arjosari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	12.096.100	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Arjosari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	12.096.100	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Arjosari	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	758.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Arjosari	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	758.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Arjosari	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	2.722.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Arjosari	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	2.722.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Arjosari	Jumlah dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1.386.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Arjosari	Jumlah dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1.386.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Arjosari	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	3.604.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Arjosari	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	3.604.000	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		***Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah***	***59 dokumen***	**1.738.382.412**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		***Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah***	***59 dokumen***	**1.738.382.412**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Arjosari	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan pegawai	14 bulan	1.728.027.412	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Arjosari	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan pegawai	14 bulan	1.728.027.412	
	PenyusunanPelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Arjosari	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	12 dokumen	10.355.000	PenyusunanPelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Arjosari	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	12 dokumen	10.355.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		***Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian***	***100%***	**11.593.400**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		***Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian***	***100%***	**11.593.400**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Arjosari	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	11.593.400	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Arjosari	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	11.593.400	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		***Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi***	***100%***	**107.556.329**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		***Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi***	***100%***	**107.556.329**	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Arjosari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bulan	29.238.239	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Arjosari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bulan	29.238.239	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Arjosari	Jumlah Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	78.318.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Arjosari	Jumlah Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	78.318.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Prosentase Pemenuhan Layanan Barang Milik Daerah	80 %	**4.587.800**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Prosentase Pemenuhan Layanan Barang Milik Daerah	80 %	**4.587.800**	
	Pengadaan Mebel	KEC.Arjosari	Jumlah Paket mebel yang di sediakan	***1 paket***	**4.587.800**	**Pengadaan Mebel**	KEC.Arjosari	Jumlah Paket mebel yang di sediakan	***5 paket***	**4.587.800**	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		***Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan***	***100%***	**157.579.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		***Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan***	***100%***	**157.579.000**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Arjosari	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	29.839.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Arjosari	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	29.839.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Arjosari	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum	12 bulan	127.940.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Arjosari	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum	12 bulan	127.940.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		***Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik***	***80%***	**12.810.200**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		***Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik***	***80%***	**12.810.200**	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Arjosari	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	12.810.200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Arjosari	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	12.810.200	
2.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan**	**100%**	**8.548.100**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan**	**100%**	**8.548.100**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec.Arjosari	***Pemenuhan jumlah OPD /Instansi vertikal terkait yang dikoordinasikan dalam satu tahun***	***12 bulan***	**8.548.100**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Kec.Arjosari	***Pemenuhan jumlah OPD /Instansi vertikal terkait yang dikoordinasikan dalam satu tahun***	***12 bulan***	**8.548.100**	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanan egiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec.Arjosari	***Jumlah laporan koordinasi /sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait***	***10 dokumen***	**8.548.100**	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanan egiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	Kec.Arjosari	***Jumlah laporan koordinasi /sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait***	***10 dokumen***	**8.548.100**	

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		***Pemenuhan layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan***	***12 bulan***	**2.231.500**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**		***Pemenuhan layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan***	***12 bulan***	**2.231.500**	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Arjosari	Jumlah layanan pengantar KK,KTP, dan Surat Legalitas lainnya	10 dokumen	**2.231.500**	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Arjosari	Jumlah layanan pengantar KK,KTP, dan Surat Legalitas lainnya	10 dokumen	**2.231.500**	
3.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Prosentase cakupan desa yang difasilitasi**	**100%**	302.829.500	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**Prosentase cakupan desa yang difasilitasi**	**100%**	302.829.500	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		***Jumlah desa yang difasilitasi***	***17 Desa***	302.829.500	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		***Jumlah desa yang difasilitasi***	***17 Desa***	302.829.500	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Arjosari	Jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan dan monitoring musrenbang desa	17 Desa	47.333.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Arjosari	Jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan dan monitoring musrenbang desa	17 Desa	47.333.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Arjosari	Jumlah Kegiatan Aktualisasi Kebudayaan , Pemuda, dan Olahraga Jumlah Pembinaan PKK Desa	2 Kali 17 Desa	255.496.500	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Arjosari	Jumlah Kegiatan Aktualisasi Kebudayaan , Pemuda, dan Olahraga Jumlah Pembinaan PKK Desa	2 Kali 17 Desa	255.496.500	

4.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Presentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan**	**100%**	40.795.500	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Presentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan**	**100%**	40.795.500	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		***Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum***	***12 bulan***	40.795.500	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		***Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum***	***12 bulan***	40.795.500	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Arjosari	Jumlah Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 bulan	40.795.500	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Arjosari	Jumlah Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 bulan	40.795.500	
5.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan**	**100%**	35.652.500	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan**	**100%**	35.652.500	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		***Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum***	***17 Desa***	35.652.500	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		***Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum***	***17 Desa***	35.652.500	
	Penanganan Konflik Sosial sesuai	Kec. Arjosari	Jumlah pelayanan bantuan	17 Desa	35.652.500	Penanganan Konflik Sosial sesuai	Kec. Arjosari	Jumlah pelayanan bantuan	16 Desa	35.652.500	

	Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan			Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan			
6.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Persentase desa yang termonitoring**	**100%**	**49.531.200**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Persentase desa yang termonitoring**	**100%**	**49.531.200**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		***Jumlah Desa yang termonitoring***	***17 Desa***	**49.531.200**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		***Jumlah Desa yang termonitoring***	***17 Desa***	**49.531.200**	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Arjosari	Jumlah Pendampingan penyusunan APBDes dan APBDes Perubahan	34 dokumen	8.068.700	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Arjosari	Jumlah Pendampingan penyusunan APBDes dan APBDes Perubahan	34 dokumen	8.068.700	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	17 dokumen	3.868.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	17 dokumen	3.868.000	
	Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnyanya		Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	34 dokumen	37.594.500	Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnyanya		Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	34 dokumen	37.594.500	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan *good govermance dan akuntabilitas public.* Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi kecamatan Arjosari dalam kurun waktu tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas permerintahan umum dalam rangka mengoptimalisasikan pengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan
2. Mengoptimalisasikan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagaian urusan otomoni daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Telaah terhadap kebijakan Kabupaten Pacitan, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pacitan, dimana secara teknokratis prioritas Kabupaten Pacitan telah mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa Timur

Sebagai modal dasar bagi perwujudan visi dan misi Kecamatan Arjosari dalam mendukung visi dan misi Kabupaten Pacitan adalah letak geografis Kecamatan Arjosari yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RT/RW) Kabupaten Pacitan baik dan sisi ekonomi, industri, jasa dan pariwisata.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD Kecamatan Arjosari yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD Kecamatan Arjosari 2021 – 2026

Dengan menitikberatkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Arjosari mempunyai ***tujuan :*** Meningkatnya kualitas pelayanan public di Kecamatan Arjosari, dengan indikator tujuan Jumlah Hasil Nilai Indek Kepuasan Masyarakat yang diukur dalam jangka waktu lima tahun dengan ***sasaran*** Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Arjosari; dan Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

3.3 Program dan Kegiatan

Renja Perubahan Kecamatan Arjosari tahun 2025, didasarkan pada beberapa pendekatan bagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu;(1) pendekatan tehnokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga. (2) Pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembagunan pemerintah tingkat atasnya. (3) Pendekatan poklitis, yaitu memenuhi visi dan misi kepala daerah terpilih; (4) Pendekatan Bottom Up. yaitu mempertimbangkan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya. (5) Pendekatan partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.

- **Program**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi . Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Arjosari maka program- program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- **Kegiatan**

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang teleh digariskan, maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
8. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

9. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
10. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
11. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
12. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- **Sub Kegiatan**

Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, adapun Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
8. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
11. Pengadaan Mebel
12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
15. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
16. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
17. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
18. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
19. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
20. Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
21. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
22. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
23. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Adapun Perubahan Anggaran Tahun 2025 sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025	

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Arjosari

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
Kecamatan Arjosari																			
7					UNSUR KEWILAYAHAN				Rp. 2.588.275.268				Rp. 2.588.275.268	Rp. 2.485.764.241	Rp. 4.587.800			Rp. 2.490.352.041	Rp. 2.954.908.687,00
7	01				KECAMATAN				Rp. 2.588.275.268				Rp. 2.588.275.268	Rp. 2.485.764.241	Rp. 4.587.800			Rp. 2.490.352.041	Rp. 2.954.908.687,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 2.173.780.668				Rp. 2.173.780.668	Rp. 2.048.497.441	Rp. 4.587.800			Rp. 2.053.085.241	Rp. 2.310.821.687,00
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 35.434.000				Rp. 35.434.000	Rp. 20.576.100				Rp. 20.576.100	Rp. 34.152.500,00
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa		Rp. 16.060.000				Rp. 16.060.000	Rp. 12.096.100				Rp. 12.096.100	Rp. 13.334.000,00

7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa		Rp. 4.722.000				Rp. 4.722.000	Rp. 768.000				Rp. 768.000	Rp. 4.712.500,00
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa		Rp. 4.781.000				Rp. 4.781.000	Rp. 2.722.000				Rp. 2.722.000	Rp. 3.700.000,00
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa		Rp. 5.031.000				Rp. 5.031.000	Rp. 1.386.000				Rp. 1.386.000	Rp. 6.556.000,00
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa		Rp. 4.840.000				Rp. 4.840.000	Rp. 3.604.000				Rp. 3.604.000	Rp. 5.850.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 1.815.518.407				Rp. 1.815.518.407	Rp. 1.738.382.412				Rp. 1.738.382.412	Rp. 1.986.304.926,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa		Rp. 1.801.909.007				Rp. 1.801.909.007	Rp. 1.728.027.412				Rp. 1.728.027.412	Rp. 1.970.932.426,00
7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa		Rp. 13.609.400				Rp. 13.609.400	Rp. 10.355.000				Rp. 10.355.000	Rp. 15.372.500,00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp. 11.593.400				Rp. 11.593.400	Rp. 11.593.400				Rp. 11.593.400	Rp. 14.080.000,00
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa		Rp. 11.593.400				Rp. 11.593.400	Rp. 11.593.400				Rp. 11.593.400	Rp. 14.080.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 127.713.661				Rp. 127.713.661	Rp. 107.556.329				Rp. 107.556.329	Rp. 124.282.761,00

7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Pendapatan Transfer Antar Daerah	- Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa		Rp. 31.887.661				Rp. 31.887.661	Rp. 29.238.329				Rp. 29.238.329	Rp. 32.482.761,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa		Rp. 95.826.000				Rp. 95.826.000	Rp. 78.318.000				Rp. 78.318.000	Rp. 91.800.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp. 9.632.000				Rp. 9.632.000	Rp. 0	Rp. 4.587.800			Rp. 4.587.800	Rp. 11.125.000,00
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	- Pendapatan Transfer Antar Daerah	- Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa		Rp. 9.632.000				Rp. 9.632.000	Rp. 0	Rp. 4.587.800			Rp. 4.587.800	Rp. 11.125.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 161.079.000				Rp. 161.079.000	Rp. 157.579.000				Rp. 157.579.000	Rp. 128.966.000,00
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa		Rp. 29.639.000				Rp. 29.639.000	Rp. 29.639.000				Rp. 29.639.000	Rp. 29.635.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendapatan Transfer Antar Daerah	- Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa		Rp. 131.440.000				Rp. 131.440.000	Rp. 127.940.000				Rp. 127.940.000	Rp. 99.331.000,00

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 12.810.200				Rp. 12.810.200	Rp. 12.810.200				Rp. 12.810.200	Rp. 11.910.500,00
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa		Rp. 12.810.200				Rp. 12.810.200	Rp. 12.810.200				Rp. 12.810.200	Rp. 11.910.500,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Rp. 33.471.100				Rp. 33.471.100	Rp. 8.458.100				Rp. 8.458.100	Rp. 36.227.000,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				Rp. 16.052.600				Rp. 16.052.600	Rp. 6.226.600				Rp. 6.226.600	Rp. 17.049.500,00
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa		Rp. 16.052.600				Rp. 16.052.600	Rp. 6.226.600				Rp. 6.226.600	Rp. 17.049.500,00

7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				Rp. 17.418.500				Rp. 17.418.500	Rp. 2.231.500				Rp. 2.231.500	Rp. 19.177.500,00
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Pendapatan Transfer Antar Daerah	- Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa		Rp. 17.418.500				Rp. 17.418.500	Rp. 2.231.500				Rp. 2.231.500	Rp. 19.177.500,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Rp. 213.455.500				Rp. 213.455.500	Rp. 302.829.500				Rp. 302.829.500	Rp. 157.550.000,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				Rp. 213.455.500				Rp. 213.455.500	Rp. 302.829.500				Rp. 302.829.500	Rp. 157.550.000,00
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa		Rp. 48.869.000				Rp. 48.869.000	Rp. 47.333.000				Rp. 47.333.000	Rp. 57.362.500,00
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa		Rp. 164.586.500				Rp. 164.586.500	Rp. 255.496.500				Rp. 255.496.500	Rp. 100.187.500,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Rp. 53.237.000				Rp. 53.237.000	Rp. 40.795.500				Rp. 40.795.500	Rp. 89.330.000,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				Rp. 53.237.000				Rp. 53.237.000	Rp. 40.795.500				Rp. 40.795.500	Rp. 89.330.000,00
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa		Rp. 53.237.000				Rp. 53.237.000	Rp. 40.795.500				Rp. 40.795.500	Rp. 89.330.000,00

7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				Rp. 42.534.500				Rp. 42.534.500	Rp. 35.652.500				Rp. 35.652.500	Rp. 52.690.000,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				Rp. 42.534.500				Rp. 42.534.500	Rp. 35.652.500				Rp. 35.652.500	Rp. 52.690.000,00
7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa		Rp. 42.534.500				Rp. 42.534.500	Rp. 35.652.500				Rp. 35.652.500	Rp. 52.690.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				Rp. 71.796.500				Rp. 71.796.500	Rp. 49.531.200				Rp. 49.531.200	Rp. 308.290.000,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				Rp. 71.796.500				Rp. 71.796.500	Rp. 49.531.200				Rp. 49.531.200	Rp. 308.290.000,00
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa		Rp. 12.043.500				Rp. 12.043.500	Rp. 8.068.700				Rp. 8.068.700	Rp. 12.547.500,00
7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa		Rp. 11.753.000				Rp. 11.753.000	Rp. 3.868.000				Rp. 3.868.000	Rp. 11.242.500,00
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Pacitan, Arjosari, Semua Kel/Desa		Rp. 48.000.000				Rp. 48.000.000	Rp. 37.594.500				Rp. 37.594.500	Rp. 284.500.000,00

Jumlah		**Rp. 2.588.275.268**				**Rp. 2.588.275.268**	**Rp. 2.485.764.241**	**Rp. 4.587.800**			**Rp. 2.490.352.041**	**Rp. 2.954.908.687,00**

BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini menjadi kebutuhan nyata bagi Pemerintah Kecamatan Arjosari dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang pada gilirannya akan melibatkan semua pihak yang terkait.

Dalam rangka penggerakan berbagai langkah aksi dan sumber daya yang dibutuhkan dalam kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan yang sesuai dengan bidangnya masing-masing secara efektif dan efisien.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Arjosari memiliki arti penting sebagai penyelenggaraan otonomi daerah dan peningkatan sumber daya manusia sehingga tujuan pembangunan tahun 2025 di Kecamatan Arjosari dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Kecamatan Arjosari ini terdapat banyak kekurangan dan untuk itu kami mengharapkan masukan, koordinasi dan kerjasama yang optimal dari berbagai pihak untuk perbaikan di dalam penyusunannya.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Arjosari Tahun 2025 ini dibuat dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu **Kabupaten Pacitan yang Sejahtera dan Bahagia** Aamiin.

CAMAT ARJOSARI

DIDIK DARMAWAN,S.STP.,MM
Pembina Tk.1
NIP. 198105022000121001

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN TEGALOMBO
Jalan Raya Pacitan - Ponorogo No. 01 Tegalombo Telp. 085100100815
E-mail:camat_tegalombo@pacitankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TEGALOMBO
NOMOR: 000.7.4 / 25 /408.69/KPTS/2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERUBAHAN
KECAMATAN TEGALOMBO
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025

Menimbang : a. Bahwa guna tindak lanjut Rencana Setrategis Kecamatan Tegalombo tahun 2021-2026

b. Bahwa sesuai herarki dokumen perencanaan dengan telah disusunya Rencana Setrategis harus diterjemahkan dalam suatu Rencana Kerja setiap tahun;

c. Bahwa sebagaimana huruf a dan b diatas perlu diterbitkan Keputusan Camat Tegalombo tentang Rencana Kerja Awal Kecamatan Tegalombo tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara republik Insonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tenang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah ,tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor Nomor 1312);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan 2011 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 170 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021Nomor 171);
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 157 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (BeritaDaerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 43);
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Perubahan ke Tiga atas Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026.
14. Surat Edaran Bupati Pacitan Nomor : 188/0161/408.53/2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Kabupaten Pacitan,

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
Kesatu	:	Menetapkan Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
Kedua	:	Penetapan ini menjadi Pedoman unit kerja di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Tegalombo dalam melaksanakan kinerjanya Tahun 2025;
Ketiga	:	Keputusan ini mulai berlaku Pada tanggal di tetapkan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan di betulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tegalombo
Pada Tanggal : 18 Juli 2025
Plt. CAMAT TEGALOMBO

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN KECAMATAN TEGALOMBO

EDY WASANA,SE
Pembina
NIP. 196805051989031003

KATA PENGANTAR

Sebagai umat yang beragama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya kita semua masih diberikan kekuatan lahir dan batin, mudah-mudahan hal seperti ini akan terus diberikan Allah SWT untuk waktu-waktu mendatang.

Perubahan Rencana Kerja Perangakat Daerah Tahun 2025 merupakan tindak lanjut Surat Edaran Penyusunsn Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Pacitan tanggal 13 Desember 2023, Nomor : 188/ 3259 /408.53/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Kabupaten Pacitan.

Adapun isi Surat Edaran tersebut adalah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025 yang diawali dengan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat daerah sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah , serta tata Cara Perubahan Rencana Pembanguan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Selanjutnya dengan tersusunnya Rancangan Awal rencana kerja tahun 2025 Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penyusunan rencana kinerja tahunan dimaksud.

Semoga rencana kinerja tahunan ini dapat terealisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Tegalombo, 18 J 2025

Plt. CAMAT TEGALOMBO

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN KECAMATAN TEGALOMBO

EDY WASANA,SE
Pembina
NIP. 196805051989031003

DAFTAR ISI

LEMBAR PENETAPAN KINERJA 1
KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
BAB I PENDAHULUAN
I.1 LATAR BELAKANG 4
I.2 LANDASAN HUKUM 5
I.3 MAKSUD DAN TUJUAN …… … 5
I.4 SISTEMATIKA PENULISAN …… . 6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD …… 7
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD …….. 10
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD……18
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD…….. 20
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT …… 22
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL……. 22
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD …….. 22
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN …… 23
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP ……26

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Tegalombo RENJA 2025 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Pacitan dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2025. Renja Kecamatan Tegalombo Tahun 2025 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

I.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Dokumen Rencana Kerja Awal Perangkat Daerah Tahun 2025 antara lain :

1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang -undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peratauran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
5. Peraturan Presiden Republik Indobesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Program Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Prpinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005 – 2025;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Perubahan ke Tiga atas Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Renja Perubahan Kecamatan Tegalombo Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Tegalombo untuk Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tegalombo.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Awal Kecamatan Tegalombo Tahun 2025 adalah antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tegalombo selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2025;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Tegalombo Tahun 2025;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Tegalombo Tahun 2025; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tegalombo Tahun 2025.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sitematika penulisan dalam penyajian Renja Awal Kecamatan Tegalombo Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 LATAR BELAKANG
- 1.2 LANDASAN HUKUM
- 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD
- 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD
- 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD
- 2.4 REVIEW TERHADAPRANCANGAN AWAL RKPD
- 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
- 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD
- 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi Renja Perubahan Kecamatan Tegalombo sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Kecamatan Tegalombo melalui capain kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitam Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Kecamatan Tegalombo Tahun 2021 - 2026 , untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Kecamatan Tegalombo
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tegalombo Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Tegalombo Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Tegalombo Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025 yang mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2025, serta pencapaian Renstra Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Tegalombo tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut :

Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Tegalombo dan

Pencapaian Renstra Kecamatan Tegalombo s/d Tahun 2024 Kabupaten Pacitan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	>B	>B	79,51	75,50	72	79,81	100%	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evalausi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah**	17 dok	17 dok	23 dok	23 dok	100	23 dok	23 dok	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan renstra dan renja Tahun berjalan	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	100	5 dok	5 dok	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran Tahun Berjalan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan Rencana Kerja	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	100

		Anggaran								
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran Tahun berjalan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	100
	Koordinasi dan Penyusunan PerubahanDPA-SKPD	Julah dokumen pelaksanaan anggaran perubahan tahun berjalan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja	9 dok	9 dok	9 dok	9 dok	100	12 lap	12 lap	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	5 dok	5 Dok	5 dok	5 dok	100	4 lap	4 lap	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah**	**12 dok**	**12 dok**	**59 dok**	**59 dok**	**100**	**59 dok**	**59 dok**	**100**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen penyediaan gaji dan tunjangan	14 dok	14 dok	14 dok	14 dok	100	14 dok	14 dok	100
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen yang diverifikasi	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	100	14 dok	14 dok	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan	6 dok	6 dok	6 dok	6 dok	100	6 dok	6 dok	100
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tnggapandan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan hasil pemeriksaan	1 dok	1 dok	2 dok	2 dok	100	2 dok	2 dok	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran	Jumlah dokumen laporan yang disusun	18 dok	18 dok	18 dok	18 dok	100	18 dok	18 dok	100

	SKPD									
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen laporan keuangan dan capaian kinerja Perangkat Daerah	12 lap	12 lap	12 lap	12 lap	100	12 lap	12 lap	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen laporan barang milik daerah sesuai ketentuan perundangan**	**6 dok**	**6 dok**	**6 dok**	**6 dok**	**100**	**6 dok**	**6 dok**	**100**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Aset Milik Daerah	6 dok	6 dok	6 dok	6 dok	100	6 dok	6 dok	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 org	20 org	20 org	20 org	100%	20 paket	20 paket	20 paket
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Prosentase operasional dasar perangkat daerah yang dipenuhi**	**12 bln**	**12 bln**	**100%**	**89%**	**89%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bln	12 bln	25 buah	10 buah	80%	3 paket	3 paket	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan kantor Rumah tangga yang dibutuhkan	12 bln	12 bln	10 buah	10 buah	100%	12 paket	12 paket	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bln	12 bln	700	600	85,71	12 paket	12 paket	100%

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 bln	12 bln	24 pak	24 pak	100%	3 paket	3 paket	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	24 kali	24 kali	100%	12 lap	12 lap	100%
	Pengadaan Barang MIlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Presentase ketersediaan sarana prasarana yang dibutuhkan**	**100%**	**100%**	**100%**	**80%**	**80%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana yang dibutuhkan	100%	100%	10 buah	10 buah	100%	2 unit	2 unit	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Presentase penyediaan jasa penunjang operasional**	100%	100%	100	90	90%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap	12 lap	12	12	100%	12 lap	12 lap	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 lap	12 lap	12	12	100%	12	12	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	**Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**100%**	**100%**	**100**	**95**	**95%**	**100%**	**100%**	**100%**

	Daerah									
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 unit	15 unit	8	8	100%	**10 unit**	**10 unit**	**100%**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	10	10	10	10	100%	**10**	**10**	**100%10**
	PROGRAM PENYELEBGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan**	**100%**	**100%**	**100%**	**99%**	**99%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Instansi vertical yang koordinasi selama 1 tahun**	**12**	**12**	**12**	**3,00**	**100**	**15**	**15**	**100%**
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah sinergi pelaksanaan kegiatan	12	12	13 kali	13 kali	92,31	12	12	100%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Pemenuhan layanan administrasi Kecamatan yang dilesenggarakan**	**12**	**12**	**12**	**12**	**100%**	**12**	**12**	**100%**
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	9	7	77,78%	12 Lap	12 lap	100%

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Cakupan Desa dan Kelurahan yang difasilitasi**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**	**100**	**100**	**100%**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Desa yang difasilitasi**	**11**	**11**	**11**	**11**	**100%**	**11**	**11**	**100%**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa yang berpartisipasi dalam Forum musrenbang Desa	11	11	11	11	100%	11	11	100%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11	11	11	11	100%	11	11	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Presentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan**	**100**	**100**	**100**	**98**	**98%**	**100**	**100**	**100%**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**12**	**12**	**12**	**11**	**91,67%**	**12**	**12**	**100%**
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan	11	11	11	0,00	100%	11	11	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan**	**100**	**100**	**100**	**95**	**95%**	**100**	**100**	**100%**
	Penyelenggaraan Urusan Peerintahan Umum Sesuai Penugasan	**Jumlah Desa Yang Ditangani**	**11**	**11**	**11**	**11**	**100%**	**11**	**11**	**100%**

	Kepala Daerah									
	Penugasan Konflik Sosial sesuai Ktentyan Oeraturan Perundang-Undangan	Jumlah Desa Yang Ditangani	11	11	**11**	**11**	**100%**	11	11	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Presentase Desa Yang Termonitoring**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**	**100**	**100**	**100%**
	Fasilitasi, Rekomendasidan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah Desa Yang Termonitoring**	**11**	**11**	**11**	**11**	**100%**	**11**	**11**	**100%**
	Fasilitasi Dministrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Didampingi	11	11	100%	11	11	100%	11	11
	Koordinasi Pendampingan Desa Diwilayahnya	Jumlah Desa Yang Didampingi	11	11	100%	11	11	100%	11	11

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tegalombo

Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta target kinerja pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama (core bussiness) dan indikator kinerja pelayanan Kecamatan Tegalombo berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 Kedudukan Tugas dan Fungsi Susunan organisasi serta Tata Kerja Kecamtan sebagai berikut:

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI

1. Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Wilayah Kecamatan Tegalombo terdiri dari:
   1. Desa Kebondalem
   2. Desa Gedangan
   3. Desa Ngreco
   4. Desa Kasihan
   5. Desa Pucangombo
   6. Desa Gemaharjo
   7. Desa Ploso
   8. Desa Tegalombo
   9. Desa Kemuning
   10. Desa Tahunan
   11. Desa Tahunan Baru
3. Kecamatan mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan
4. Kecamatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
   a. penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum;
   b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
   c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

   d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan

Bupati;

e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;

g. pembinan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;

h. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan

i. melaksanaknan fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan.

5. Selain melaksanakan tugas , Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten;

6. Pelimpahan kewenangan Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Sekretariat;
2. Seksi Pelayanan Umum;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat;
5. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban.

SEKRETARIAT

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. Mengkoordinasikan dan Pembinaan pelaksanaan kegiatan.
b. Pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.
c. Pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan.
d. Pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan.
e. Pengelolaam urusan kehumasan, keprotokolan dan kearsipandi lingkungan Kecamatan; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Program,Evaluasi, Pelaporan, dan keuangan mempunyai tugas:

a. Melakukan penyusunan rencana program,kegiatan,dan anggaran;
b. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala;
c. Melakukan pengelolaan data;
d. Melakukan penyusunan laporan kinerja;
e. Mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan keuangan, meliputi: penyiapan dan pengelolaan administrasi keuangan;
f. Mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
g. Mengelola bahan tanggapan pemeriksaan; dan
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesui dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

a). Menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran;
b). Menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan rumah tangga;
c). Menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
d). Menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan persuratan dan kearsipan.
e). Menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kehumasan dan protokol.
f).Menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kepegawaian;
g). memfasilitasi pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
h). Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris tugas dan fungsinya.

SEKSI PELAYANAN UMUM

Uraian Tugas Seksi Pelayanan Umum sebagai berikut:

a) Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan umum;
b) Mengumpulkan, mengolah dan menyusun rancangan kebijakan teknis dan data sesuai bahan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat desa;
c) Menyajikan data penyelenggaraan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat desa;
d) Menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, administrasi kependudukan, administrasi pertanahan dan pelayanan umum lain;
e) Memfasilitasi percepatan pencapaian standart peleyanan minimal diwilayah kecamatan;
f) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
g) Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
h) Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya, serta meregitrasi urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang bukan kewenangannya;
i) Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan; dan
j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI PEMERINTAHAN

Uraian Tugas Seksi Pemerintahan sebagai berikut:

a) Menyusun rencana operasional dan program kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan;
b) Melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oelh instansi vertikal;
c) Melaksanakan fasilitasi tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan;
d) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi fertikal di bidang pentyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
e) Memfasilitasi pengurusan administrasi pertanahan dieilayah Kecamatan;

f) Melaksanakan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan pajak bumi dan bangunan;
g) Memvasilitasi pelaksanaan pemilihan umum;
h) Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
i) Mefasilitasi pelaksanaan batas wilayah kecamatan dan kerja sama antar kecamatan;
j) Memfasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
k) Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
l) Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
m) Menfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
n) Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
o) Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
p) Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
q) Menyusun rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
r) Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
s) Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang menjadi kewenangannya;
t) Melaporkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan kepada camat melalui Sekretaris Kecamtan;dan
u) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Uraian Tugas Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut:

a) Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
b) Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipasif;
c) Memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
d) Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
e) Mengkoordinir pendampingan Desa di wilayahnya;
f) Mengkkordinir pelaksanaan pembangunan Kawasan pedesaan di wilayah Kecamatan;
g) Mgkoordinir kegiatan Pemberdayaan Desa;

h) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa;
i) Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan Kawasan pedesaan;
j) Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban Lembaga kemasyarakatan;
k) Memfasilkitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta oenetapan dan penegasan batas Desa;
l) Melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
m) Meningkatkan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyararakat di wilayah Kecamatan;
n) Melaksanakan kegiatan pemberdayaan Desa;
o) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa;
p) Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Desa;
q) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat di wilayah kecamatan;
r) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat di wilayah kecamatan;
s) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna di wilayah kecamatan;
t) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI SOSIAL, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Uraian Tugas Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut:

a) Menyusun program kerja Pembinaan dan mengoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
b) Melaksanakan pengamanan terhadap Kantor Kecamatan serta fasilitasnya;
c) Membantu penyelesaian perselisihan antar kelompok dan penegakan HAM;
d) Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan perizinan;
e) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
f) Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan /atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan;

g) Melakukan koordinasi dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
h) Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan Peraturan Perundang-Undangan;
i) Melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
j) Melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan / atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta perlindungan masyarakat;
k) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam Pembinaan serta penyelenggaraan di bidang ketahanan ideology Negara, wawasan kebangsaan bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di wilayah kecamatan;
l) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam Pembinaan serta penyelenggaraan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen keamanan, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penangan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di wilayah kecamatan;
m) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam Pembinaan serta penyelenggaraan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembaharuan dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
n) Melaksanakan pengawasan dan Pembinaan terhadap organisasi sosial kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan;
o) Menginventarisir jenis pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan lainnya yang menyangkut kepentingan umum;
p) Melaksanakan perlindungan masyarakat dan Pembinaan anggota perlindungan masyarakat (LINMAS);
q) Menggerakkan dan membina sistem keamanan lingkungan (SISKAMLING) di masing-masing desa dalam wilayah kecamatan;
r) Menyiapkan dan menyusun bahan potensi satuan perlindungan masyarakat dalam menghadapi segala kemungkinan bencana;
s) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan penanggulangan, penyelamatan dan rehabilitasi akibat bencana;

t) Melaksanakan pengerahan dan pengendalian anggota satuan perlindungan masyarakat guna penanggulangan bencana;
u) Menyusun evaluasi dan laporan tentang ketentraman dan ketertiban umum;
v) Melaksanakan tuga lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kantor Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi kedepan berdasarkan profil kinerja Kecamatan Tegalombo dapat diperkirakan kebutuhan pelayanan yang harus dipenuhi dimasa depan. Proyeksi kedepan Kecamatan Tegalombo adalah terwujudnya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, yang didukung oleh sarana prasarana teknologi, Sumber Daya Manusia yang terampil, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang mampu mendukung kemajuan pembangunan disegala bidang.

Kapabilitas organisasi adalah konsep yang dipakai untuk menujunkkan pada kondisi lingkungan internal yang terdiri atas 2 (dua) faktor strategis, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai sasarannya. Kelemahan adalah situasi dan ketidakmampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Faktor internal yang ada pada Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan adalah susunan organisasi, kepegawaian, perlengkapan / sarana prasarana, gambaran hasil evaluasi tahun terakhir termasuk didalamnya ketercukupan anggaran dalam pelaksanaan tupoksi

Berikut tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Tegalombo dengan format tabel sebagai berikut :

Berikut tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Tegalombo dengan format tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN TEGALOMBO
KABUPATEN PACITAN

NO	Indikator	SPM/Standar Naional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	14	15
1.	Hasil survey kepauasan masyarakat			80	81	82	83	87,52%	82,23	83,11	96	
2.	Prosentase terlaksanya fasilitasi Desa dalam Satu Tahun							99%	80%	100%	100%	
3.	Prosentase desa yang sudah Menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan							100%	80%	100%	100%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tegalombo adalah :

1. Tingkat kinerja Pelayanan Kecamatan Tegalombo adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sitem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkwalitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan public.
2. Pemasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Tegalombo sebagai berikut :
   a. Terbatasnya jumlah personil di Kecamatan Tegalombo sehingga menhambat penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tegalombo.
   b. Belum semuanya terpenuhi usulan – usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Tegalombo hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Pacitan.
   c. Pembangunan Insfrastruktur di Kecamatan Tegalombo sudah cukup baik namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya khususnya untuk peningkatan jalan kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan.Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Tegalombo terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kwalitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek.
3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGS.
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

   Tantangan :

   a. Terbatasnya sarana dan prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras (shof weard – hawaerd) sehingga mempengaruhi kelancaran proses pelayanan;
   b. Jaringan internet yang sering trouble sehingga menhambat proses pelayanan;
   c. Keterbatasan sumberdaya manusia yang terkait dengan peningkatan pelayanan publik.

Peluang :

a. Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada;
b. Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang beberapa peralatan yang pengadaannya secara swadaya;
c. Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operatir pelayanan public sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan;
d. Membenahi sarana prasarana pelayanan dan fasiltas pelayanan dan fasilitas ruangan tunggu bagi pemohon melalui anggaran operasional Kecamatan.

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan public sehingga proses pelayanan public di Kecamatan Tegalombo terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

6. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah :

a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Dalam program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota Kecamatan Tegalombo meliputi Kegiatan :

- **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public meliputi kegiatan :

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
- Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

c. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Ptogram Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan meliputi segiatan :

- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

d. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum meliputi kegiatan :

- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

e. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Meliputi kegiatan :

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

f. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
  Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan Program dan Kegiatan yang diusulkan pada RKPD tahun 2025 sudah menuangkan fungsi dan tugas pokok Kecamatan Tegalombo dalam rangka mencapai tujuan, indicator sasaran, indicator program yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan program dan kegiatan disusun denagn acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah yang telah dumutakhirkan melalui surat edaran. Jumlah anggaran yang di butuhkan dibandingkan dengan rancangan akhir RKPD di masing – masing program dan kegiatan secara rinci dituangkan dalam table sebagai berikut :

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025

KABUPATEN PACITAN

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;	Kecamatan Tegalombo	Nilai SAKIP perangkat daerah	81,81	1,827.582.544	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;	Kecamatan Tegalombo	Nilai SAKIP perangkat daerah	81,81	1,827.582.544	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Tegalombo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23 dok	Rp. 12.002.400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Tegalombo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23 dok	Rp. 12.002.400	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Tegalombo	Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	59 dok	1,535.099.261	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Tegalombo	Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	59 dok	1,535.099.261	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Tegalombo	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 dok	3.500.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Tegalombo	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 dok	3.500.000	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Tegalombo	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100%	16.114.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100%	16.114.000	
	Administrasi Umum Perangkat daerah	Kecamatan Tegalombo	Prosentase operasional dasar perangkat daerah yang dipenuhi	100%	Rp.135.993.733	Administrasi Umum Perangkat daerah	Kecamatan Tegalombo	Prosentase operasional dasar perangkat daerah yang dipenuhi	100%	Rp.135.993.733	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Tegalombo	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	Rp.89.798.700	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Tegalombo	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	Rp.89.798.700	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Tegalombo	Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	Rp.35.074.450	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Tegalombo	Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	Rp.35.074.450	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Tegalombo	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100%	Rp.87.789.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Tegalombo	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100%	Rp.87.789.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh unit Kerja	Kecamatan Tegalombo	Pemeneuhan layanan administrasi Kecamatan yang diselenggarakan	100%	Rp.87.789.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak	Kecamatan Tegalombo	Pemeneuhan layanan administrasi Kecamatan yang diselenggarakan	100%	Rp.87.789.000	

	Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					Dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Tegalombo	Prosentase cakupan desa dan kelurahan yang difasilitasi	11 Desa	Rp. 100.395.413	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Tegalombo	Prosentase cakupan desa dan kelurahan yang difasilitasi	11 Desa	Rp. 100.395.413	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Tegalombo	Jumlah desa yang difasilitasi	11 Desa	Rp. 100.395.413	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Tegalombo	Jumlah desa yang difasilitasi	11 Desa	Rp. 100.395.413	
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Tegalombo	Prosentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%	Rp. 100.000.000	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Tegalombo	Prosentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	12 bulan	Rp. 100.000.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Tegalombo	Pemenuhan upaya peneyelenggaraan	12 bulan	Rp. 100.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Tegalombo	Pemenuhan upaya peneyelenggaraan	12 bulan	Rp. 100.000.000	
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Tegalombo	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di laksankan	100%	19.729.160	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Tegalombo	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang di laksanakan	100%	19.729.160	

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Tegalombo	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Umum	11 Desa	19.729.160	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Tegalombo	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Umum	11 Desa	19.729.160	
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Tegalombo	Prosentase desa yang terpenuhi	100%	Rp. 80.237.800	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Tegalombo	Prosentase desa yang terpenuhi	100%	Rp. 80.237.800	

2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan yang dibahas didalam musrenbang, mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari dusun yang melibatkan , yaitu unsur tokoh masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemsyarakatan dan mencermati RPJMD, sehingga menghasilkan usulan program yang dibawa ke forum Musrenbangdes.

Pada Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan program tingkat Desa, selanjutnya di tunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan skala prioritas yang telah sesuai dengan kebutuhan riil di masyarakat serta isu – isu penting dari masing – masing perangkat daerah yang ada pada unit pelaksana teknis di tingkat Kecamatan.

Program dan kegiatan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Tahun 2025 disusun dengan menampung usulan dari hasil pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2025 dan Musyawarah Rencana dan Pembangunan Desa 2024 kemudian disusun menjadi Rencana Kerja Kecamatan Tegalombo Tahun 2025.

Adapun usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan tahun 2024 berdasarkan hasil Musrenbang tersaji dalam table 2.4 sebagai berikut :

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN 2025
KABUPATEN PACITAN

NO		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1		2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Tegalombo	Nilai Sakip Perangkat Daerah	81,81	Laporan hasil Evaluasi SAKIP
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tegalombo	Jumlah Dokumen Perencanaan Penanggaran dan Evaluasi Kinerja PD	23 dokumen	Renja, Renja Perubahan PK, PK Perubahan RKA, DPA dan lain – lain
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Tegalombo	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan PD	59 dokumen	Dokumen Gaji, SPJ Fungsional, LRA, LO, CALK, Rekon Akuntansi, Rekon Fungsional. dll
		Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Tegalombo	Jumlah Dokumen laporan barang milik daerah sesuai ketentuan perundangan	6 dokumen	Lap Aset Tetap, Persediaan Mutasi Barang. KIB dll

		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Tegalombo	Prosentase operasional dasar perangkat daerah yang dipenuhi	100%	Alat Listrik, Perabot Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Logistik. dll
		Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Tegalombo	Prosentase ketersediaan sarana prasarana yang di butuhkan	100%	Laptop, Printer, AC, Meja Kerja. dll
		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tegalombo	Presentase penyediaan jasa penunjang operasional	100%	Listrik, Internet, Jasa Servis, Jasa Peralatan dan Perlengkapan
		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tegalombo	Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	Pemeliharaan Gedung, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Pajak Kendaraan

		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Tegalombo	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan	100%	
		Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Tegalombo	Pemenuhan Jumlah OPD/Instansi Vertikal Terkait yang Dikoordinasikan dalam Satu Tahun	12 Bulan	Koordinasi Lintas Sektor/UPT dan Instansi vertical
		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec. Tegalombo	Pemenuhan Layanan Administrasi Kecamatan Yang Diselenggarakan	12 Bulan	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Tegalombo	**% Cakupan Desa dan Kelurahan yang difasilitasi**	100%	
		Keg. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Tegalombo	Jumlah Desa yang difasilitasi	11 Desa	Pembinaan PKK, Musrenbang Desa, Fasilitasi Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Tegalombo	**% Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan**	100%	
		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Berikut tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Tegalombo dengan format tabel sebagai berikut : **Ketentraman dan Ketertiban Umum**	Kec. Tegalombo	Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 bulan	Sinergitas Dengan TNI/POLRI, Monitoring Trantibum Kewilayahan, Pembinaan Trantibum
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Tegalombo	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	100%	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Tegalombo	Jumlah Desa yang ditangani	11 desa	Pelaksanaan Tugas Forkopimca, Pelayanan Bantuan Sosial, Pembinaan Organisasi Sosial Keagamaan, Penanganan

						Bencana
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Tegalombo	Prosentaise Desa yang termonitorong	100%	
		Koordinasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Tegalombo	Jumlah yang termonitoring	11 Desa	Pendampingan Pelunasan PBB, Penyusunan & Evaluasi APBD/APBdes Perubahan, Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa/BPD, Pengisian Perangkat Desa, Pembinaan Pengelola APBDes

BAB III

TUJUAN , SASARAN , PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan Renja PD Kecamatan Tegalombo adalah **Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif** Dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Tegalombo dan Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa.

Dengan tujuan dan sasaran Operasional Perangkat Daerah tersebut perangkat daerah memiliki indikator kinerja :

I. Indikator Tujuan : Indeks Pelayanan Publik Kecamatan

II. Indikator Sasaran :

1. Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat setiap Tahun
2. Prosentase Terlaksananya Failitasi Desa Dalam Satu Tahun
3. Presentase desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

KABUPATEN PACITAN

KECAMATAN TEGALOMBO

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	"Nilai SAKIP perangkat daerah	Kecamatan Tegalombo	81.41	1.732.932.831,00	APBD		72,20	1.875.801.000
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat Daerah	Kecamatan Tegalombo	23	17.005.947,00	APBD		23	14.955.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan Keuangan Perangat daerah	Kecamatan Tegalombo	59	1.492.587.461,00	APBD		59	1.445.336.364,00
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah	Kecamatan Tegalombo	6	3.500.000,00	APBD		6	3.175.000,00

7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	"Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	Kecamatan Tegalombo	100%	16.114.000,00	APBD		100%	26.410.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	"Prosentase operasional dasar perangkat daerah yang dipenuhi	Kecamatan Tegalombo	100%	211.279.333,00	APBD		100%	205.100.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang operasional	Kecamatan Tegalombo	100%	99.400.000,00	APBD		100%	99.400.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik	Kecamatan Tegalombo	100%	66.941.030,00	APBD		100%	81.000.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	Kecamatan Tegalombo	100%	48.992.030,00	APBD		100%	85.550.000,00

7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Pemenuhan layanan administrasi Kecamatan yang diselenggarakan	Kecamatan Tegalombo	12 bln	79.940.800,00	APBD		12 bln	85.550.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Cakupan Desa dan Kelurahan yang di fasilitasi	Kecamatan Tegalombo	100%	60.007.698	APBD		12 Bln	120.000.000,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang di fasilitasi	Kecamatan Tegalombo	11	60.007.698	APBD		12 Bln	120.000.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	Kecamatan Tegalombo	100%	95.920.000	APBD		100%	115.000.000,00
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Tegalombo	12 Bulan	95.920.000	APBD		12 bulan	95.920.000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	Kecamatan Tegalombo	100%	. 19.729.162	APBD		100%	26.000.000,00

7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	Kecamatan Tegalombo	11 Desa	19.729.162	APBD		11 Desa	. 26.000.000,00
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang termonitoring	Kecamatan Tegalombo	100%	. 66.437.600	APBD		100%	86.000.000,00
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang termonitoring	Kecamatan Tegalombo	11 Desa	. 66.437.600	APBD		11 Desa	86.000.000,00

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD)Tahun 2025 ini menjadi kebutuhan nyata bagi Pemerintah Kecamatan Tegalombo dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang pada gilirannya akan melibatkan semua pihak yang terkait.

Dalam rangka penggerakan berbagai langkah aksi dan sumber daya yang dibutuhkan dalam kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan yang sesuai dengan bidangnya masing-masing secara efektif dan efisien.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Tegalombo memiliki arti penting sebagai penyelenggaraan otonomi daerah dan peningkatan sumber daya manusia sehingga tujuan pembangunan tahun 2025 di Kecamatan Tegalombo dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam Perubahan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Kecamatan Tegalombo ini terdapat banyak kekurangan dan untuk itu kami mengharapkan masukan, koordinasi dan kerjasama yang optimal dari berbagai pihak untuk perbaikan di dalam penyusunannya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tegalombo Tahun 2025 ini dibuat, semoga bermanfaat dan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Plt. CAMAT TEGALOMBO

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN KECAMATAN TEGALOMBO

EDY WASANA,SE
Pembina
NIP. 196805051989031003

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja Perubahan PD) Kecamatan Nawangan Tahun 2025 berpedoman pada dukumen RPJMD Kabupaten Pacitan dan Renstra Kantor Kecamatan Nawangan tahun 2016-2021, Renja tersebut merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, sehingga mampu menggambarkan rencana capaian kinerja tahunan yang memetakan sasaran, indikator dan targetnya.

Pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun menunjukan kinerja yang baik. Pada tahun 2025 ini selain mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan baik, juga telah dirumuskan program dan kegiatan baru untuk mendukung program dan kegiatan yang telah ada. Demikian pula halnya dalam perumusan tujuan ,sasaran dan indikator kinerja telah diperbaiki yang disesuaikan dengan isu-isu strategis dan perkembangan situasi di daerah dan nasional.

Dokumen Renja Perubahan ini mencakup seluruh kegiatan Kantor Kecamatan Nawangan yang disertai indikator kinerja dari masing-masing kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2025 . Dengan disusunnya Renja Perubahan Kantor Kecamatan Nawangan Tahun 2025 diharapkan mampu mendukung terlaksanannya kegiatan secara efisien dan efektif secara berkesinambungan terukur, terintegrasi dan sinkron antar kegaiatan. Renja Perubahan tahun 2025 berfungsi sebagai acuan bagi aparat lingkup Kantor Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan dan mitra kerja dalam pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran.

Nawangan, 21 Juli 2025
CAMAT NAWANGAN

SUKARWAN,S.Sos, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19690602 199103 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai dengan Triwulan II

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB I
PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Rencana Kinerja Perubahan Tahun 2025 merupakan tindak lanjut Surat Edaran Bupati Pacitan Nomor : 900.1.1.2/626/408.55/2025, tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dengan disepakatinya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Pacitan :

Nomor : 900/622/408.55/2025 dan Nomor :900/623/408.55/2025
170/02/KUA/DPRD/2025 170/03/PPAS/DPRD/2025

Tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Tahun Anggaran 2025 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS APBD) Tahun Anggaran 2025 tanggal 15 Juli 2025, agar setiap Perangkat Daerah segera menyusun Perubahan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2025.

Mengacu dari Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerahtentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana setiap satuan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis [Renstra] sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PD dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra PD untuk mewujudkan visi Kabupaten Pacitan di Kecamatan Nawangan yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah. Dari dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja PD per tahun. Penyusunan Renja PD merujuk

pada dokumen Renstra PD dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja dari tahun sebelumnya.

Kedudukan susunan organisasi dan tugas/fungsi Pemerintah Kecamatan dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 79 Tahun 2016 dalam arti Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah pusat berubah menjadi perangkat daerah. Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No.79 Tahun 2016 tentang pemerintahan Daerah Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah. Jadi dapat dikatakan bahwa ,semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengembang tugasnya.

Disamping camat melaksanakan tugas dari Bupati atau Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintah yang meliputi :

1. Menetapkan rencana, program dan kegiatan Kecamatan Nawangan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan operasional;
2. Membagi tugas kepada bawahan dan mengikuti perkembangannya untuk memastikan pelasanaan tugas dapat habis dan berjalan lancar;
3. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan agar pekerjaan berjalan sesuai rencana dan menigkatkan SDM bawahan;
4. Mengkoordinasikan dan membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar tidak terjadi overlapping;
5. Meneliti hasil kerja bawahan untuk disesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan untuk menghindari kesalahan;
6. Meneliti dan menyempurnakan konsep pemberdayaan masyarakat sesuai dengan program kerja yang telah direncanakan;
7. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan program kerja;
8. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
9. Memantau dan mengendalikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Nawangan agar situasi kondusif

10. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
11. Memantau pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di Kecamatan Nawangan sesuai kewenangan kecamatan;
12. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang ada di Kecamatan Nawangan sesuai dengan peruntukannya;
13. Melakukan koordinasi dengan muspika dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Nawangan agar berjalan dengan baik
14. Memantau dan memberi petunjuk teknis pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan agar berjalan sesuai program;
15. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup Kecamatan Nawangan dan yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa/Kelurahan agar tujuan pembangunan tercapai;

Mengingat semakin komplek tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat ,terarah dan konprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat Kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik ditingkat Desa/Kelurahan ,Kecamatan dan Kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat . Sedangkan dalam perencanaan pembangunan,kemasyarakatan dan kepemerintahan Camat berkewajiban membuat Renstra.

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan merupakan Daerah yang mempunyai wilayah tertentu dan di pimpin oleh Camat. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sehubungan dengan hal itu agar Camat dapat mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Pacitan maka di pandang perlu disusun Rencana Kerja Perubahan yang sistimatis di Kecamatan Nawangan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA Perubahan PD) Tahun 2025 Kecamatan Nawangan adalah :

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
3. Landasan Operasional :
    1. UU NO. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dilingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
    2. UU NO. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);.
    3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4287);
    4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lemabaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
    5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
    6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
    7. Undang – Undang Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
    8. Undang – Undang Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
    9. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan Pertanggung jawaban Kepala Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara pertanggungjawaban Kepala Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah sebagai telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 tahun 2016
17. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 80,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47360);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan LemabaranNegara Republik Indonesia Nomor 4734) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan,pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan daerah
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 / E) ;
26. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Perubahan ketiga atas peratusan Bupati Nomor 170 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026.
27. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi serta Tata Kerja Kecamatan Kantor Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja Perubahan ini dimaksudkan untuk :

1. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintah dan Pembinaan , Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Nawangan pada tahun 2025
2. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Nawangan pada Tahun 2025

1.3.2 Tujuan

1. Mensinkronisasi serta mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Nawangan tahun 2025 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Pacitan tahun 2025
2. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas camat berikutnya.

Penyusunan Renja Perubahan ini bertujuan lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Nawangan dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4 Sistimatika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Nawangan tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perubahan PD agar substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja Perubahan PD, Proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja Propinsi / Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD ;

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang – undang peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.4 Sistimatika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAN RENJA PD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD

Pada Bab ini memuat kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan, Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun - tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Memuat tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing - masing PD, serta ketentuan peraturan perundang - undangan yang terkait dengan kinerja. Jika PD bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap PD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing - masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma standart pelayanan PD yang bersangkutan.

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Bagian ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional /internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals)
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD, dan.

5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan .

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Bagian ini berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.
3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terhadap rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besaranya berbeda.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telahan terhadap kebijakan Nasional dan Propinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaah yang menyangkut arahan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD

Bagian ini berisikan mengenai penjelasan :

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja PD.

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaannya anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan .
b. Kaidah – kaidah pelaksanaan.
c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu Dan Capaian Renstra PD Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan

Pelaksanaan Renja PD Kecamatan Nawangan Tahun 2020 mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada Kecamatan. Tugas Pokok Kecamatan berdasar Peraturan daerah Kabupaten Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan,Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi, Serta tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan. Kecamatan adalah membantu Kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Pacitan. Adapun fungsi dari Kecamatan Nawangan adalah :

1. Perencanaan yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengelolaan dana, penilaian dan penyusunan rencana program di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat serta pemerintah desa.
2. Pelaksanaan yang meliputi kegiatan pelayanan dan pembinaan masyarakat dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat serta pemerintah Desa.
3. Melakukan pegawasan terhadap pelansanaan tugas-tugas pokok seperti diatas
4. Melaksanakan tugas-tugas ketata usahaan
5. Pengkoordinasikan integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain dilingkungan kecamatan.
6. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan dinas /instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas

Renja Perubahan Kecamatan Nawangan tahun 2025 merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Nawangan, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2025 . Adapun pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Nawangan antaran lain :

Sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaanya. Oleh karena itu Renja Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan Tahun 2024 juga harus dilakukan evaluasi. Adapun evaluasi terhadap Renja Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan Tahun 2024 meliputi :

LAPORAN EVALUASI APBD KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024
KECAMATAN NAWANGAN
PERIODE : DESEMBER

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
701	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**Nilai**	**73.65**	**2.044.810.983,00**	**0.00**	**1.966.719.511,00**	**0%**	**96.18%**
701	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD**	**Dokumen**	**24**	**6.019.000,00**	**24.00**	**6.019.000,00**	**100%**	**100%**
701	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	4.500.000,00	12.00	4.500.000,00	100%	100%
			0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	1.519.000,00	12.00	1.519.000,00	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	100,00
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
701	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan PD**	**Dokumen**	**59**	**1.562.044.701,00**	**59.00**	**1.491.325.361,00**	**100%**	**95.47%**
701	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	15.00	1.557.930.701,00	15.00	1.487.211.361,00	100%	95.46%
			0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	4	1.000.000,00	4.00	1.000.000,00	100%	100%
			0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1.000.000,00	1.00	1.000.000,00	100%	100%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	745.000,00	1.00	745.000,00	100%	100%
			0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	24	859.000,00	24.00	859.000,00	100%	100%
			0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	12	510.000,00	12.00	510.000,00	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	99,24
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
701	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian**	**%**	**100**	**3.454.875,00**	**0.00**	**3.454.875,00**	**0%**	**100%**
701	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	3.454.875,00	2.00	3.454.875,00	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	100,00
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
701	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase pemenuhan layanan administrasi umum**	**%**	**100**	**195.481.642,00**	**100.00**	**195.475.642,00**	**100%**	**100%**
701	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	75.847.750,00	1.00	75.847.750,00	100%	100%
			0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	93.233.892,00	3.00	93.227.892,00	100%	99.99%
			0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	6.600.000,00	2.00	6.600.000,00	100%	100%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	19.800.000,00	12.00	19.800.000,00	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	100,00
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
701	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase Pemenuhan Layanan Barang Milik Daerah**	**%**	**100**	**102.860.165,00**	**100.00**	**102.860.165,00**	**100%**	**100%**
701	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10.00	102.860.165,00	10.00	102.860.165,00	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	100,00
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
701	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase pemenuhan jasa penunjang**	**%**	**100**	**157.201.600,00**	**100.00**	**150.525.468,00**	**100%**	**95.75%**
701	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	16.157.500,00	12.00	9.481.368,00	100%	58.68%
			0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	34.086.500,00	12.00	34.086.500,00	100%	100%
			0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	106.957.600,00	12.00	106.957.600,00	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	86,23
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Tinggi
701	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**%**	**80**	**17.749.000,00**	**100.00**	**17.059.000,00**	**125%**	**96.11%**
701	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Unit	13	17.749.000,00	13.00	17.059.000,00	100%	96.11%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	96,11
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
701	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan**	**%**	**100**	**110.000.000,00**	**100.00**	**109.992.000,00**	**100%**	**99.99%**
701	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Pemenuhan Jumlah OPD/Instansi vertikal yang dikoordinasikan dalam satu tahun**	**Bulan**	**12**	**60.000.000,00**	**12.00**	**59.997.000,00**	**100%**	**100%**
701	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	12	60.000.000,00	12.00	59.997.000,00	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	100,00
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
701	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Pemnuhan Layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan**	**Bulan**	**12**	**50.000.000,00**	**12.00**	**49.995.000,00**	**100%**	**99.99%**
701	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	50.000.000,00	12.00	49.995.000,00	100%	99.99%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	99,99
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
701	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat**	**%**	**100**	**215.300.000,00**	**100.00**	**215.300.000,00**	**100%**	**100%**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan**							
701	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah desa yang difasilitasi**	**Desa**	**9**	**215.300.000,00**	**9.00**	**215.300.000,00**	**100%**	**100%**
701	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	215.300.000,00	12.00	215.300.000,00	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	100,00
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											100,00	100,00
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
701	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan**	**%**	**100**	**94.000.000,00**	**100.00**	**93.997.000,00**	**100%**	**100%**
701	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Bulan**	**12**	**94.000.000,00**	**12.00**	**93.997.000,00**	**100%**	**100%**
701	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	12	94.000.000,00	12.00	93.997.000,00	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	100,00
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											100,00	100,00
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
701	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan**	**%**	**100**	**62.000.000,00**	**100.00**	**61.996.000,00**	**100%**	**99.99%**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				PEMERINTAHAN UMUM								
701	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum**	**Desa**	**9**	**62.000.000,00**	**9.00**	**61.996.000,00**	**100%**	**99.99%**
701	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	12	62.000.000,00	12.00	61.996.000,00	100%	99.99%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	99,99
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											100,00	99,99
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
701	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yang termonitoring**	**%**	**100**	**117.930.655,00**	**100.00**	**117.927.655,00**	**100%**	**100%**
					Persentase desa yang termonitoring	**%**	**100.00**		**100.00**		**100%**	
701	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah desa yang termonitoring**	**Desa**	**9**	**117.930.655,00**	**9.00**	**117.927.655,00**	**100%**	**100%**
					Jumlah desa yang termonitoring	**Desa**	**9.00**		**9.00**		**100%**	
701	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	18	70.000.000,00	18.00	69.999.000,00	100%	100%
			0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	12	47.930.655,00	12.00	47.928.655,00	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Realisasi		Rasio Pencapaian	
			Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)							100,00	100,00
Predikat kinerja Per Program(%)							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja seluruh program(%)							85,71	99,45
Predikat kinerja seluruh program(%)							Tinggi	Sangat Tinggi
Total				**2.644.041.638,00**		**2.565.932.166,00**		
Persentase Realisasi Anggaran						**97.05%**		
Predikat						**Sangat Tinggi**		

Sedangkan hasil evaluasi pelaksanaan renja Perangkat Daerah tahun 2025 sampai dengan Triwulan II :

LAPORAN EVALUASI APBD KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025
KECAMATAN NAWANGAN
PERIODE : JUNI

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
701	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**		**73.10**	**1.869.535.351,00**	**0.00**	**734.795.099,00**	**0%**	**39.3%**
701	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD**		**24**	**11.019.000,00**	**10.00**	**2.531.000,00**	**41.67%**	**22.97%**
701	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		12.00	9.500.000,00	7.00	1.976.800,00	58.33%	20.81%
			0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12	1.519.000,00	6.00	554.200,00	50%	36.48%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											54,17	28,65
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Rendah	Sangat Rendah
701	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan PD**		**59**	**1.550.219.069,00**	**21.00**	**648.178.594,00**	**35.59%**	**41.81%**
701	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan pegawai		14	1.546.105.069,00	10.00	647.048.844,00	71.43%	41.85%
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		19.00		0.00		0%	
			0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		4	1.000.000,00	1.00	340.600,00	25%	34.06%
			0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	1.000.000,00	0.00	324.750,00	0%	32.48%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1	745.000,00	0.00	208.800,00	0%	28.03%
			0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		24	859.000,00	12.00	255.600,00	50%	29.76%
			0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		12	510.000,00	6.00	0,00	50%	0%
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0		0.00		0%	
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											28,06	27,70
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
701	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian**		**100**	**4.573.200,00**	**0.00**	**0,00**	**0%**	**0%**
701	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2	4.573.200,00	0.00	0,00	0%	0%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											0,00	0,00
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
701	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase pemenuhan layanan administrasi umum**		**100**	**110.745.293,00**	**100.00**	**30.480.100,00**	**100%**	**27.52%**
701	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12	6.635.000,00	6.00	0,00	50%	0%
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2		0.00		0%	
			0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor		12	77.710.293,00	6.00	22.249.600,00	50%	28.63%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
						Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6		0.00		0%	
			0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan Jumlah pengadaan penggandaan dokumen	12	6.600.000,00	6.00	2.410.500,00	50%	36.52%
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2		0.00		0%	
			0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	19.800.000,00	6.00	5.820.000,00	50%	29.39%
									Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	28,57	23,64
									Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
701	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase Pemenuhan Layanan Barang Milik Daerah**	**100**	**28.641.108,00**	**100.00**	**0,00**	**100%**	**0%**
701	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	28.641.108,00	0.00	0,00	0%	0%
									Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	0,00	0,00
									Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
701	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase pemenuhan jasa penunjang**	**100**	**141.605.081,00**	**100.00**	**48.040.705,00**	**100%**	**33.93%**
701	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	15.515.481,00	6.00	4.598.705,00	50%	29.64%
			0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	9.232.000,00	7.00	2.692.000,00	58.33%	29.16%
			0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	116.857.600,00	6.00	40.750.000,00	50%	34.87%
									Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	52,78	31,22

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Rendah	Sangat Rendah
701	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase Barang Milik Daerah yang dipelihara**		**80**	**22.732.600,00**	**80.00**	**5.564.700,00**	**100%**	**24.48%**
701	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		13	22.732.600,00	3.00	5.564.700,00	23.08%	24.48%
										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	23,08	24,48
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
701	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan**	**%**	**100.00**	**90.000.000,00**	**100.00**	**31.670.549,00**	**100%**	**35.19%**
701	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Pemenuhan Jumlah OPD/Instansi vertikal yang dikoordinasikan dalam satu tahun**		**12**	**45.000.000,00**	**6.00**	**17.875.200,00**	**50%**	**39.72%**
701	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		12	45.000.000,00	6.00	17.875.200,00	50%	39.72%
					Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Monitoring Musrenbang Desa		11		0.00		0%	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		0		0.00		0%	
										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	25,00	39,72
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
701	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Pemnuhan Layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan**		**12**	**45.000.000,00**	**6.00**	**13.795.349,00**	**50%**	**30.66%**
701	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah layanan Pengantar KK, KTP, dan Surat Legalitas lainnya		10	45.000.000,00	0.00	13.795.349,00	0%	30.66%
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12		6.00		50%	
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											25,00	30,66
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
701	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan**		**100**	**95.000.000,00**	**100.00**	**21.500.800,00**	**100%**	**22.63%**
701	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah desa yang difasilitasi**		**9**	**95.000.000,00**	**9.00**	**21.500.800,00**	**100%**	**22.63%**
701	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		11	95.000.000,00	6.00	21.500.800,00	54.55%	22.63%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											54,55	22,63
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											100,00	22,63
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Tinggi	Sangat Rendah
701	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan**		**100**	**64.750.000,00**	**0.00**	**24.591.400,00**	**0%**	**37.98%**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
701	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**12**	**64.750.000,00**	**0.00**	**24.591.400,00**	**0%**	**37.98%**
701	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		12	64.750.000,00	8.00	24.591.400,00	66.67%	37.98%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											66,67	37,98
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sedang	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											0,00	37,98
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
701	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan**		**100**	**62.000.000,00**	**0.00**	**13.605.800,00**	**0%**	**21.94%**
701	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum**		**9**	**62.000.000,00**	**0.00**	**13.605.800,00**	**0%**	**21.94%**
701	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		12	62.000.000,00	8.00	13.605.800,00	66.67%	21.94%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											66,67	21,94
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sedang	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											0,00	21,94
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
701	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yang termonitoring**		**100**	**105.930.655,00**	**100.00**	**28.586.715,00**	**100%**	**26.99%**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
						Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
701	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah desa yang termonitoring**	**9**	**105.930.655,00**	**9.00**	**28.586.715,00**	**100%**	**26.99%**
701	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pendampingan penyusunan APBDes dan APBDes Perubahan	30	70.000.000,00	0.00	22.525.160,00	0%	32.18%
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	18		13.00		72.22%	
					Jumlah Pendampingan Desa di Wilayah	30		0.00		0%	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0		0.00		0%	
			0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12	35.930.655,00	7.00	6.061.555,00	58.33%	16.87%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)										32,64	24,53
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)										100,00	26,99
Predikat kinerja Per Program(%)										Sangat Tinggi	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja seluruh program(%)										50,00	30,67
Predikat kinerja seluruh program(%)										Sangat Rendah	Sangat Rendah
Total							**2.287.216.006,00**	**854.750.363,00**			
Persentase Realisasi Anggaran								**37.37%**			
Predikat								**Sangat Rendah**			

Dari Table di atas menunjukan target realisasi per Program, Kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan realisasi karena pelaksanaan dalam satu tahun dan yang di tampilkan pada table baru realisasi triwulan II (Dua).

Faktor Penyebab tidak tercapainya terpenuhinya target kinerja program kegiatan yaitu fasilitas yang belum memadai dan adanya Efisiensi. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah adalah perubahan anggaran seriap tahun anggaran sesuai kebutuhan yang masing – masing perangkat daerah.

Kebijakan /tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya target kinerja program adalah selalu berkoordinasi dengan Dinas terkait mulai dari perencanaan sampai dengan penganggaran.

Organisasi Perangkat daerah berusaha melaksanakan agenda Kerja Penyusunan Rencana kerja perangkat Daerah Tahun 2025.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Nawangan

Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi ke depan berdasarkan profil kinerja Kecamatan Nawangan dapat diperkirakan kebutuhan pelayanan yang harus dipenuhi dimasa depan. Proyeksi ke depan Kecamatan Nawangan adalah terwujudnya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, yang didukung oleh sarana dan prasarana teknologi, Sumber Daya Manusia yang terampil, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang mampu mendukung kemajuan pembangunan di segala bidang.

Kapabilitas organisasi adalah konsep yang dipakai untuk menunjukkan pada kondisi lingkungan internal yang terdiri atas 2 (dua) faktor strategis, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai sasarannya. Kelemahan adalah situasi dan ketidakmampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Faktor internal yang ada pada Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan adalah susunan organisasi, kepegawaian, perlengkapan/sarana prasarana, gambaran hasil evaluasi tahun terakhir termasuk didalamnya ketercukupan anggaran dalam pelaksanan tupoksi.

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja Pelayanan Kecamatan Nawangan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, yang ditetapkan Pemerintah Daerah, Kinerja Pelayanan di Kecamatan Nawangan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatkan pelayanan adminiatrasi perkantoran
- Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur
- Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Nawangan sebagai berikut :

- **SEKRETARIS KECAMATAN**

Sekretariat Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan, serta program, evaluasi dan pelaporan kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan Kecamatan. Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
b. pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
c. pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan.
d. pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi di sekretariat kecamatan adalah sebagai berikut :

Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :

a. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan

dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan, dan keuangan mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan;
b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis;
c. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data;
d. menyiapkan bahan penyusunan laporan;
e. menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan laporan kinerja;
f. melaksanakan pengelolaan anggaran;
g. melaksanakan perbendaharaan dan gaji;
h. melaksanakan verifikasi dan akuntansi;
i. melaksanakan pelaporan keuangan; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

k. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

l. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

m. menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran;
n. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan rumah tangga;
o. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
p. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
q. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kehumasan dan protokol;
r. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kepegawaian; dan
s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **SEKSI PELAYANAN UMUM**

Seksi Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang pelayanan umum. Uraian Tugas sebagai berikut:

a. menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan umum;

b. mengumpulkan, mengolah dan menyusun rancangan kebijakan teknis dan data sesuai bahan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat Desa/ Kelurahan;
c. menyajikan data penyelenggaraan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat Desa/ Kelurahan;
d. menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, administrasi kependudukan, administrasi pertanahan dan pelayanan umum lain;
e. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
f. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **SEKSI PEMERINTAHAN**

Seksi Pemerintahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang Pemerintahan. Uraian Tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
b. Melaksanakan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;
c. Fasilitasi Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan;
e. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan;
f. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan pajak bumi dan bangunan;
g. Memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum;
h. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
i. Fasilitasi pelaksanaan batas wilayah kecamatan;

j. Melaksanakan urusan yang dilimpahakan kepada camat yang menjadi kewenangannya;
k. Fasilitasi Kerjasama antar kecamatan;
l. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
m. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
n. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
o. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
p. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
q. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
r. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
s. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
t. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa;
u. Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan;
v. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
w. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
x. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya;
y. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **SEKSI SOSIAL, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang sosial, ketentraman dan ketertiban. Uraian Tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan sosial, ketentraman dan ketertiban;
b. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan;
c. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
e. Menyiapkan bahan program dan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
g. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi perizinan;
h. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
i. Menyusun evaluasi dan laporan tentang sosial, ketentraman dan ketertiban;
j. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya;
k. Melaporkan pelaksanaan kegiatan sosial, ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
l. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Camat.

- **SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang pembangunan dan pemberdayan masyarakat. Uraian Tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan Bina Pemerintahan Desa;
b. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
c. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga;
d. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
e. Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya;
f. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan;
g. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;

h. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
i. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan;
j. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
k. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan;
l. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
m. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan;
n. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
o. Evaluasi Kelurahan;
p. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
q. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
r. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
s. Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan;
t. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
u. Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
v. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya;
w. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabapaten Pacitan Nomor 156 tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Nawangan terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan, membawahi : - Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan; - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. Seksi Pelayanan Umum;
4. Seksi Pemerintahan;
5. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
6. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban;

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi PD

Bertitik tolak dari pengertian isu – isu strategis di atas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Nawangan , maka permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Nawangan yang berhsil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut :

a. Kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing masih belum optimal;
b. Belum tersedianya data – data yang tersusun secara sistematis danakurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan program dan kegiatan;
c. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan programdan kegiatan, sehingga sulit dalam pengukuran capaian kinerja;
d. Munculnya kegiatan baru dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang tidak ada dalam Renja dimana kegiatan tersebut merupakan permintaan dari Pemerintah Daerah maupun legislatif
e. Implementasi peraturan baru terkait pelaksanaan pembangunan daerah terkadang belum tersosialisasikan;
f. Masih adanya kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan tetapi belum mempunyai payung hukum yang jelas/kuat.

Selain itu, perlu peningkatan koordinasi dengan pemerintah desa, mengingat desa merupakan pelayanan awal sebelum ke tingkat kecamatan. Identifikasi permasalahan dapat dilihat di tabel berikut:

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Bidang Pelayanan	Permasalahan	Keterangan
1. Sekretariat	1. Kurangnya sarana dan prasarana PD	1. Pemenuhan Belanja Barang/ Jasa, Modal dan Belanja Pegawai PD
2. Pelayanan Umum	2. Kurangnya Kompetensi SDM Pelayanan, sarpras pelayanan	2. Pemenuhan Pelayanan Pengantar KK, KTP dan Surat legalitas lainnya
3. Pelayanan pemberdayaan	3. - Belum optimalnya Pemberdayaan masyarakat desa	3. - Pembinaan PKK Desa

Bidang Pelayanan	Permasalahan	Keterangan
masyarakat dan ekonomi. 4. Pelayanan Kesejahteraan Sosial 5. Pelayanan Bidang Pemerintahan 6. Pelayanan Trantib	- Belum optimalnya perencanaan pembangunan di desa 4. Angka Kemiskinan masih tinggi 5. Belum optimalnya administrasi desa, tingkat ketepatan waktu pembayaran PBB 6. Belum ada anggaran pengembangan Linmas	- Pelaksanaan musrenbang Kecamatan dan Desa 4. Pelayanan bantuan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan 5. Pendampingan Penyusunan APBDes, APBDes Perubahan dan Penarikan PBB 6. Pembinaan Linmas Desa

2.3.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Nawangan tidak terlepas dari visi dan misi yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Adapun visi Kabupaten Pacitan adalah: **"Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA".**

Adapun strategi yang dilaksanakan guna pencapaian visi dengan melaksanakan 4 misi yakni :

1. Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup;
2. Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak Pada Nilai-Nilai Agama dan Budaya Bangsa;
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, serta Sektor Unggulan Lainnya;
4. Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional dan Melayani.

Kecamatan Nawangan dalam melaksanakan Program Prioritas guna mendukung misi ke 4 Yaitu: Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional dan Melayani, dengan kegiatan;

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
9. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
10. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.
11. Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
12. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
13. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
14. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
16. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
17. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Adapun permasalahan yang ditemui pada lingkup Kecamatan Nawangan secara garis besar dapat dilihat pada tabel 2.3.1.1

Tabel 2.3.1.1

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah

1.	Belum optimalnya pelayanan Publik kepada masyarakat	Masih belum meratanya pelayanan terhadap masyarakat	SDM yang masih terbatas kualitas maupun kuantitasnya Sarana prasara dan anggaran yang masih terbatas

Berdasarkan permasalahan diatas, yang menjadi faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terplilih dapat dilihat pada tabel 2.3.1.2

Tabel 2.3.1.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Pencapaian Visi Misi

Visi : Masyarakat Pacitan Bahagia dan Sejahtera

No	Misi, Tujuan, Sasaran KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Misi 4: Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, profesional dan Melayanai Tujuan: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Profesional dan Responsif, Sasaran: Meningkatnya layanan Publik yang Inovatif	Pelayanan belum optimal dikarenakan terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi	Kondisi geografis wilayah, sarana prasarana yang ada belum sesuai kebutuhan	Memiliki potensi yang dapat dikelola, dan kebijakan pemerintah

2.3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Renstra Kementerian dan Renstra Pemerintah Kabupaten Pacitan menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Nawangan dalam menentukan

arah pengembangan pelayanan dan Kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Kementerian serta Pemerintah Kabupaten Pacitan yang menjadi acuan Kecamatan Nawangan dalam menyusun Renstratentunya yang mengampu semua sektor atau urusan pemerintahan daerah sesuai kondisi dan potensi di wilayah Kecamatan Nawangan .

2.3.3 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam 5 (lima) tahun ke depan Kecamatan Nawangan tidak ada rencana kegiatan yang berkaitan dengan membangun tata ruang wilayah dan tidak ada kajian lingkungannya.

2.3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan pembangunan di tingkat kecamatan, dan memperhatikan faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan dan berdasarkan hasil review terhadap visi-misi kepala daerah, maka dapat dirumuskan isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Nawangan adalah belum optimalnya kualitas pelayanan.

Metode penentuan isu-isu strategis Kecamatan Nawangan antara lain dilakukan dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dengan melibatkan para Pejabat Struktural Kecamatan Nawangan yang memiliki pengalaman untuk merumuskan isu-isu strategis. Dengan forum tersebut maka isu-isu strategis di Kecamatan Nawangan dapat terangkum dengan rinci dan jelas.

2.4 Review Terhadap Rencana awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat

a). Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
b). Program prioritas pembangunan daerah dan
c). Rencana Kerja, pendanaan dan prakiraan maju,yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS ,Rencana Kecamatan Nawangan berdasarkan RKPD Kabupaten Pacitan sifatnya sebagai

pendukung dari pelaksanaan Renja PD se Kabupaten Pacitan yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Nawangan

Rencana awal prioritas pembangunan di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan tahun 2025 merupakan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Nawangan dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Pacitan adalah letak geografis Kecamatan Nawangan yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RT/RW) Kabupaten Pacitan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan *good govermance dan akuntabilitas public.* Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi kecamatan Nawangan dalam kurun waktu tahun 2016 - 2025 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas permerintahan umum dalam rangka mengoptimalisasikan pengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan
2. Mengoptimalisasikan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagaian urusan otomoni daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan,pengawasan,fasilitasi,penetapan,penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan

Telaah terhadap kebijakan Kabupaten Pacitan, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pacitan, dimana secara teknokratis prioritas Kabupaten Pacitan telah mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa Timur

Sebagai modal dasar bagi perwujudan visi dan misi Kecamatan Nawangan dalam mendukung visi dan misi Kabupaten Pacitan adalah letak geografis Kecamatan Nawangan yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah

(RT/RW) Kabupaten Pacitan baik dan sisi ekonomi,industri, jasa dan pariwisata

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD Kecamatan Nawangan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD Kecamatan Nawangan 2016 – 2021

Dengan menitikberatkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Nawangan mempunyai ***tujuan :*** Meningkatkan pelayanan public di Kecamatan Nawangan, dengan indikator tujuan Nilai Indek Kepuasan Masyarakat yang diukur dalam jangka waktu lima tahun dengan ***sasaran*** Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Nawangan; dan Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

3.4 Program dan Kegiatan

Renja Perubahan Kecamatan Nawangan tahun 2021, didasarkan pada beberapa pendekatan bagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,yaitu;(1) pendekatan tehnokratis , yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga.(2) Pendekatan Top Down , yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembagunan pemerintah tingkat atasnya. (3) Pendekatan poklitis , yaitu memenuhi visi dan misi kepala daerah terpilih; (4) Pendekatan Bottom Up.yaitu mempertimbangkan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya. (5) Pendekatan partisipatif , yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.

- **Program**

  Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi . Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Nawangan maka program- program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

  1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
  3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

4. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- **Kegiatan**

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang teleh digariskan , maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
8. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
9. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
10. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
11. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
12. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- **Sub Kegiatan**

Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, adapun Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
9. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
12. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
13. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
14. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
15. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
16. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
18. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
19. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
20. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
21. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
22. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
23. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
24. Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
25. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
26. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
27. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Adapun Perubahan program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan prakiraan maju yang diverifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini :

renja perubahan

BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini menjadi kebutuhan nyata bagi Pemerintah Kecamatan Nawangan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang pada gilirannya akan melibatkan semua pihak yang terkait.

Dalam rangka penggerakan berbagai langkah aksi dan sumber daya yang dibutuhkan dalam kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan yang sesuai dengan bidangnya masing-masing secara efektif dan efisien.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Nawangan memiliki arti penting sebagai penyelenggaraan otonomi daerah dan peningkatan sumber daya manusia sehingga tujuan pembangunan tahun 2025 di Kecamatan Nawangan dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Kecamatan Nawangan ini terdapat banyak kekurangan dan untuk itu kami mengharapkan masukan, koordinasi dan kerjasama yang optimal dari berbagai pihak untuk perbaikan di dalam penyusunannya.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Nawangan Tahun 2025 ini dibuat dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu **“Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA”.** Aamiin.

CAMAT NAWANGAN

SUKARWAN,S.Sos, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19690602 199102 1 006

RENCANA KERJA
(RENJA) PERUBAHAN
KECAMATAN BANDAR
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN BANDAR
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayat-Nya sehingga Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) PD Kecamatan Bandar Tahun 2024 dapat terselesaikan.

Dokumen Renja Perubahan ini disusun untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Permendagri nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam laporan ini, belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dari berbagaipihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan dimasa yangakan datang.

Bandar, 23 Juli 2025
CAMAT BANDAR

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN KECAMATAN BANDAR

WURIYANTO.S.Pd.M.Sc
Pembina TK I
NIP.19700720 199803 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR			1
DAFTAR ISI			2
BAB. I	PENDAHULUAN		3
	1.1	Latar Belakang	3
	1.2	Landasan Hukum	4
	1.3	Maksud dan Tujuan	5
	1.4	Sistematika Penulisan	7
BAB.II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		8
	2.1	Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan apaian Renstra PD	8
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan PD	11
	2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	22
	2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	23
	2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	24
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH		27
	3.1	Telaahan,sasaran,Program dan Kegiatan	27
	3.2	Tujuan dan sasaran Renja PD	27
	3.3	Program dan Kegiatan	28
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT		33
	4.1	Rencana Kerja dan Kegiatan	33
	4.2	Indikator Kinerja	33
	4.3	Kelompok sasaran	33
	4.4	Pendanaan Indikatif	33
BAB V	PENUTUP		34

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Rencana Kinerja Perubahan Tahun 2025 merupakan tindak lanjut Surat Edaran Bupati Pacitan Nomor : 900.1.1.2/626/408.55/2025, tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Mengacu dari Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana setiap satuan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis [Renstra] sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PD dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra PD untuk mewujudkan visi Kabupaten Pacitandi Kecamatan Bandar yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah. Dari dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja PD per tahun. Penyusunan Renja PD merujuk pada dokumen Renstra PD dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja dari tahun sebelumnya.

Kedudukan susunan organisasi dan tugas/fungsi Pemerintah Kecamatan dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 79Tahun 2016 dalam arti Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah pusat berubah menjadi perangkat daerah. Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilanpemerintah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan

masyarakat seperti disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No.79 Tahun2016 tentang pemerintahan Daerah Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang

Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Jadi dapat dikatakan bahwa ,semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besartanggung jawab camat dalam mengembang tugasnya.

Disamping camat melaksanakan tugas dari Bupati atau Walikota, juga menyelenggarakantugas Umum Pemerintah yang meliputi :

1. Menetapkan rencana, program dan kegiatan Kecamatan Bandar sebagai acuan dalammelaksanakan kegiatan operasional;
2. Membagi tugas kepada bawahan dan mengikuti perkembangannya untuk memastikanpelasanaan tugas dapat habis dan berjalan lancar;
3. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan agar pekerjaan berjalan sesuai rencana dan menigkatkan SDM bawahan;
4. Mengkoordinasikan dan membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas agar tidakterjadi overlapping;
5. Meneliti hasil kerja bawahan untuk disesuaikan dengan standar yang telah ditetapkanuntuk menghindari kesalahan;
6. Meneliti dan menyempurnakan konsep pemberdayaan masyarakat sesuai denganprogram kerja yang telah direncanakan;
7. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan program kerja;
8. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraanketentraman dan ketertiban umum;
9. Memantau dan mengendalikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diKecamatan Bandar agar situasi kondusif
10. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penerapan dan penegakanperaturan perundang-undangan;
11. Memantau pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan diKecamatan Bandar sesuai kewenangan kecamatan;
12. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitaspelayanan umum yang ada di Kecamatan Bandar sesuai dengan peruntukannya;
13. Melakukan koordinasi dengan muspika dalam rangka penyelenggaraan pemerintahandi Kecamatan Bandar agar berjalan dengan baik
14. Memantau dan memberi petunjuk teknis pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahanagar berjalan sesuai program;

15. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup Kecamatan Bandar dan yang belum dapat dilaksanakan pemerintahanDesa/Kelurahan agar tujuan pembangunan tercapai;

Mengingat semakin komplek tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat ,terarah dan konprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan danpengembangan perekonomian di tingkat Kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik ditingkat Desa/Kelurahan ,Kecamatan danKabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat . Sedangkan dalam perencanaan pembangunan,kemasyarakatan dan kepemerintahan Camat berkewajiban membuat Renstra.

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No. 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan merupakan Daerah yang mempunyai wilayah tertentu dan di pimpin oleh Camat. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sehubungan dengan hal itu agar Camat dapat mendukung suksesnya pelaksanaanPemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Pacitan maka di pandang perlu disusun Rencana Kerja Perubahan yang sistimatis di Kecamatan Bandar.

I.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renja Perubahan PD Kecamatan Bandar tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar PelayananMinimal (SPM);

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Derah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 1114).

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;

18. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 170 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perengkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026.

19. Peraturan Bupati Pacitan NO. 36 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2025

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Bandar adalah sebagai arah dan pedoman bagi Aparatur Kecamatan Bandar dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan dengan rasa tanggung jawab, disiplin, dan loyalitas yang tinggi, terukur, serta lebih proaktif, visioner dan profesional sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu Rencana Kerja Kecamatan Bandar dapat dipergunakan dalam rangka sinergitas oleh Pemerintah Desa serta sebagai acuan dalam sinkronisasi kegiatan di masing-masing desa sesuai kewenangannya.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Bandar adalah sebagai kerangka acuan dan pedoman kerja bagi seluruh Aparatur Kecamatan Bandar yang merupakan unsur pelaksana kegiatan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Selain itu hal penting disusunnya renja PD adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dengan adanya Rencana Kerja ini mendorong timbulnya etos kerja, sikap dan budaya kerja aparatur pemerintah daerah yang handal sesuai dengan tuntutan zaman yaitu reformasi birokrasi yang mengedepankan karakter Aparatur Sipil Negara (ASN).

I.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD

2.2. Analisis Kinerja pelayanan PD

2.3. Isu-isu Penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

2.5 Penelaah usulan program dan kegiatan masyarakat .

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DAN

4.1 Rencana Kerja dan Kegiatan

4.2 Indikator Kinerja

4.3 Kelompok sasaran

4.4 Pendanaan Indikatif

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II

Pelaksanaan Renja PD Kecamatan Bandar Tahun 2025 mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada Kecamatan. Tugas Pokok Kecamatan berdasar Peraturan daerah KabupatenPacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi, Serta tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan. Kecamatan adalah membantu Kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan sesuaikewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Pacitan. Adapun fungsi dari Kecamatan Bandar adalah :

1. Perencanaan yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengelolaan dana, penilaiandan penyusunan rencana program di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat serta pemerintah desa.
2. Pelaksanaan yang meliputi kegiatan pelayanan dan pembinaan masyarakat dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat serta pemerintah Desa.
3. Melakukan pegawasan terhadap pelansanaan tugas-tugas pokok seperti diatas
4. Melaksanakan tugas-tugas ketata usahaan
5. Pengkoordinasikan integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain dilingkungankecamatan.
6. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan dinas /instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas

Renja Perubahan Kecamatan Bandar tahun 2025 merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Bandar, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pacitan 2021-2026 . Adapun pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bandar antaran lain :

Sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaanya. Oleh karena itu Renja Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Tahun 2025 juga harus dilakukan evaluasi. Adapun evaluasi terhadap Renja Perubahan Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Tahun 2025 meliputi :

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

   meliputi belanja Barang dan Jasa yang dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan dengan target realisasi 100 % (1.867.199.557,00) sampai dengan bulan Juni 2025 realuisasi sebesar 43.37% (809.817.301,00)

2. **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

   target realisasi 100 % (60.000.000,00) dan sampai dengan Juni 2025 terealisasi 51.77% (31.063.400,00).

3. **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
   target realisasi 100% (111.028.900,00) dan sampai dengan Juni 2025 terealisasi 34.52% (38.324.000,00).

4. **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**
   target realisasi 100% (125.978.100,00) dan sampai dengan Juni 2025 terealisasi 15.59%% (19.645.800,00).

5. **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**
   targetrealisasi 100% (60.892.000,00) dan sampai dengan Juni 2025 terealisasi 38.27% (23.303.600,00).

6. **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**
   target realisasi 100% (56.498.000,00) dan sampai dengan Juni 2025 terealisasi 41 % (23.162.400,00).

Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Program ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2025 (sampai Triwulan III) dan perkiraan capaian tahun berjalan atau tahun 20245 dengan mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun 2025, ada 6 (enam) program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar (Rp. 1.867.199.557,00) realisasi 52.01 % sebesar (Rp. 971.069.914,00) meliputi :
    a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 15.185.000,00 realisasi sebesar 39.1 % (5.937.000,00)
    b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp.1.570.170.728,00 realisasi sebesar 56.25 % (Rp.883.276.567,00)
    c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar (Rp. 21.210.800,00) realisasi sebesar 0 %
    d. Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar (Rp.84.463.929,00) realisasi sebesar 14.17 % (Rp.11.968.800,00)
    e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar (Rp.108.272.800,00) realisasi sebesar 41.62 % (Rp.62.281.650,00)
    f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahsebesar (Rp. 68.096.300,00) realisasi sebesar 36.67 % (Rp.24.903.200,00)
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik sebesar Rp. 60.000.000,00 realisasi 52.84 % sebesar (Rp. 31.704.000,00) meliputi :
    a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Rp. 18.000.000,00 realisasi sebesar 99.85 % (Rp. 17.972.400,00)
    b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Rp. 42.000.000,00) realisasi 32.69 % sebesar (Rp. 13.731.600,00) ;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan sebesar (Rp. 111.028.900,00) realisasi 39.37 % sebesar (Rp. 43.708.000,00) meliputi :
    a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa sebesar Rp.111.028.900,00) realisasi sebesar 39.37 % (Rp. 43.708.000,00)
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum sebesar (Rp. 125.978.100,00) realisasi 10.07 % sebesar (Rp. 12.691.800,00) meliputi :
    a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Rp. 125.978.100,00) realisasi 10.07 % sebesar (Rp. 12.691.800,00)

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Rp. 60.892.000,00) realisasi 41.58%sebesar (23.490.400,00) meliputi:
    a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan KepalaDaerah(Rp60.892.000) realisasi 41.58%sebesar (23.490.400,00).
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Rp 56.498.000,00 realisasi 41 % sebesar (Rp. 23.162.400,00) meliputi:
    a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa Rp 56.498.000,00 realisasi 41.58% sebesar (Rp. 23.162.400,00)

LAPORAN EVALUASI APBD KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025
KECAMATAN BANDAR
PERIODE : JUNI

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
701	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**Nilai**	**70.95**	**1.867.199.557,00**	**0.00**	**809.817.301,00**	**0%**	**43.37%**
701	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**23.00**	**15.185.000,00**	**15.00**	**5.873.200,00**	**65.22%**	**38.68%**
701	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15.00	11.000.000,00	6.00	3.203.200,00	40%	29.12%
			0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8.00	4.185.000,00	2.00	2.670.000,00	25%	63.8%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											32,50	46,46
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
701	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**59.00**	**1.570.170.728,00**	**48.00**	**720.949.604,00**	**81.36%**	**45.92%**
701	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bulan	16.00	1.533.598.528,00	0.00	704.689.604,00	0%	45.95%
			0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	30.00	3.187.000,00	16.00	0,00	53.33%	0%
			0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Dokumen	29.00	33.385.200,00	3.00	16.260.000,00	10.34%	48.7%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											21,22	31,55
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
701	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian**	**%**	**100.00**	**21.210.800,00**	**0.00**	**0,00**	**0%**	**0%**
701	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1.00	21.210.800,00	0.00	0,00	0%	0%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											0,00	0,00
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
701	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase operasional dasar**	**%**	**100.00**	**84.463.929,00**	**63.70**	**15.628.200,00**	**63.7%**	**18.5%**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Perangkat Daerah yang terpenuhi							
701	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6.00	31.195.244,00	4.00	1.948.300,00	66.67 %	6.25%
			0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	5.00	43.598.185,00	3.00	8.699.900,00	60%	19.95 %
			0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3.00	9.670.500,00	2.00	4.980.000,00	66.67 %	51.5%
										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	64,45	25,90
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Rendah	Sangat Rendah
701	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat yang dibutuhkan**	**%**	**100.00**	**108.072.800,00**	**100.00**	**39.408.497,00**	**100%**	**36.46 %**
701	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik yang disediakan	Laporan	12.00	12.340.000,00	6.00	5.208.497,00	50%	42.21 %
			0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12.00	95.732.800,00	6.00	34.200.000,00	50%	35.72 %
										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	50,00	38,97
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
701	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik**	**%**	**100.00**	**68.096.300,00**	**38.40**	**27.957.800,00**	**38.4%**	**41.06 %**
701	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diperlihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	11.00	52.056.800,00	6.00	23.172.200,00	54.55 %	44.51 %
			0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4.00	16.039.500,00	0.00	4.785.600,00	0%	29.84 %
										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	27,28	37,18
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
701	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARA**	**Presentase Penyelenggaraan**	**%**	**100.00**	**60.000.000,00**	**50.00**	**31.063.400,00**	**50%**	**51.77 %**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan**							
70 1	**0 2**	**2.0 1**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dikoordinasikan**	**%**	**100.00**	**18.000.000,00**	**126.00**	**17.972.400,00**	**126%**	**99.85 %**
70 1	0 2	2.0 1	000 1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Laporan	2.00	18.000.000,00	2.00	17.972.400,00	100%	99.85 %
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100,00	99,85
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
70 1	**0 2**	**2.0 2**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah Layanan yang dilaksanakan**	**Jenis**	**17.00**	**42.000.000,00**	**17.00**	**13.091.000,00**	**100%**	**31.17 %**
70 1	0 2	2.0 2	000 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	42.000.000,00	6.00	13.091.000,00	50%	31.17 %
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											50,00	31,17
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
70 1	**0 3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan**	**%**	**100.00**	**111.028.900,00**	**9.00**	**38.324.000,00**	**9%**	**34.52 %**
70 1	**0 3**	**2.0 1**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Desa yang difasilitasi**	**Desa**	**8.00**	**111.028.900,00**	**8.00**	**38.324.000,00**	**100%**	**34.52 %**
70 1	0 3	2.0 1	000 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12.00	111.028.900,00	6.00	38.324.000,00	50%	34.52 %
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											50,00	34,52
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											100,00	34,52

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Tinggi	Sangat Rendah
701	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan**	**%**	**100.00**	**125.978.100,00**	**49.32**	**19.645.800,00**	**49.32 %**	**15.59 %**
701	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Bulan**	**12.00**	**125.978.100,00**	**6.00**	**19.645.800,00**	**50%**	**15.59 %**
701	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	12.00	125.978.100,00	6.00	19.645.800,00	50%	15.59 %
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											50,00	15,59
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											50,00	15,59
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
701	05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan**	**%**	**100.00**	**60.892.000,00**	**50.00**	**23.303.600,00**	**50%**	**38.27 %**
701	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum**	**Desa**	**8.00**	**60.892.000,00**	**5.00**	**23.303.600,00**	**62.5%**	**38.27 %**
701	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Laporan	12.00	46.000.000,00	6.00	14.411.600,00	50%	31.33 %
			0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	12.00	14.892.000,00	6.00	8.892.000,00	50%	59.71 %
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											50,00	45,52
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											62,50	38,27
Predikat kinerja Per Program(%)											Rendah	Sangat Rendah
701	06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yang termonitoring**	**%**	**100.00**	**56.498.000,00**	**63.00**	**23.490.400,00**	**63%**	**41.58 %**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
701	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah desa yang termonitoring**	**Desa**	**8.00**	**56.498.000,00**	**6.00**	**23.490.400,00**	**75%**	**41.58%**
701	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	12.00	34.000.000,00	7.00	12.900.000,00	58.33%	37.94%
			0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	6.00	22.498.000,00	4.00	10.590.400,00	66.67%	47.07%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											62,50	42,51
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											75,00	41,58
Predikat kinerja Per Program(%)											Sedang	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja seluruh program(%)											36,89	37,52
Predikat kinerja seluruh program(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Total								**2.281.596.557,00**		**945.644.501,00**		
Persentase Realisasi Anggaran										**41.45%**		
Predikat										**Sangat Rendah**		

Pacitan, 17 Juli 2025

CAMAT BANDAR

KABUPATEN PACITAN

WURIYANTO, S.Pd. M.Sc.

Pembina

NIP. 19700720 199803 1 007

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yangn direncanakan;
3. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
4. Impilkasi yang timbul terhadap target capain program Renstra Perangkat Daerah; dan
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dalam penyusunan rencana kerja melibatkan semua komponen Perangkat daerahagar perencanaan dan pengaggaran sesuai dengan tujuan dan indikator setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan OPD .

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Adapun Kinerja Kantor Kecamatan Bandar berdasarkan Indikator Kinerjayang sudah ditentukan dalam NSPK (Norma Standart Prosedur dan Kriteria) dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pacitan No. 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah, yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan Kabupaten Pacitan.

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI

Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan dipimpin oleh Camat. Kecamatan Bandar membawahi wilayah kerja sebagai berikut:

1. Desa Bandar
2. Desa Kledung

3. Desa Ngunut
4. Desa Petungsinarang
5. Desa Tumpuk
6. Desa Watupatok
7. Desa Bangunsari
8. Desa Jeruk

Kecamatan mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan. Kecamatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum;
b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertibanumum;
d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
g. pembinan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
h. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
i. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Selain melaksanakan tugas camat, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten, Pelimpahan kewenangan Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai Peraturan

Perundang-Undanganyang berlaku.

Susunan Organisasi

Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari:

a. Sekretariat;
b. Seksi Pelayanan Umum;
c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Sosial;
e. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing organisasi di kecamatanadalah sebagai berikut :

- **SEKRETARIS KECAMATAN**

Sekretariat Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan, serta program, evaluasi dan pelaporan kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan Kecamatan. Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
b. pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dankepegawaian;
c. pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan.
d. pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi danpelaporan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengantugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi di sekretariat kecamatan adalahsebagai berikut :

Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :

a. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan, dan keuangan

mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dankegiatan;
b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis;
c. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data;
d. menyiapkan bahan penyusunan laporan;
e. menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan laporan kinerja;
f. melaksanakan pengelolaan anggaran;
g. melaksanakan perbendaharaan dan gaji;
h. melaksanakan verifikasi dan akuntansi;
i. melaksanakan pelaporan keuangan; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

a. menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran;
b. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan rumah tangga;
c. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan perlengkapan danbarang milik daerah;

d. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan persuratan dan kearsipan;

e. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kehumasan dan protokol;

f. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kepegawaian; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **SEKSI PELAYANAN UMUM**

Seksi Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang pelayanan umum. Uraian Tugas sebagaiberikut:

a. menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan umum;

b. mengumpulkan, mengolah dan menyusun rancangan kebijakan teknis dan data sesuai bahan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat Desa/ Kelurahan;

c. menyajikan data penyelenggaraan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat Desa/ Kelurahan;

d. menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, administrasi kependudukan, administrasi pertanahan dan pelayananumum lain;

e. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

f. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **SEKSI PEMERINTAHAN**

Seksi Pemerintahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang Pemerintahan. Uraian Tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatanpenyelenggaraan pemerintahan;

b. Melaksanakan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan MerupakanKewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;

c. Fasilitasi Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;

d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan;

e. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan;

f. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaranpenarikan pajak bumi dan bangunan;

g. Memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum;

h. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;

i. Fasilitasi pelaksanaan batas wilayah kecamatan;

j. Melaksanakan urusan yang dilimpahakan kepada camat yang menjadi kewenangannya;

k. Fasilitasi kerjasama antar kecamatan;

l. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa;

m. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;

n. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;

o. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan AsetDesa;

p. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;

q. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

r. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan PermusyawaratanDesa;

s. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

t. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah denganPembangunan Desa;

u. Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan;

v. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;

w. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang DesaSerta Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

x. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadikewenangannya;

y. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di wilayahKecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan

z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengantugas dan fungsinya.

- **SEKSI SOSIAL, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang sosial, ketentraman dan ketertiban. Uraian Tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan sosial,ketentraman dan ketertiban;

b. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyelenggaraankegiatan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan;

c. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;

e. Menyiapkan bahan program dan pembinaan kehidupan keagamaan,pendidikan dan kebudayaan;

f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

g. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi perizinan;

h. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;

i. Menyusun evaluasi dan laporan tentang sosial, ketentraman dan ketertiban;

j. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadikewenangannya;

k. Melaporkan pelaksanaan kegiatan sosial, ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan

l. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan olehCamat.

- **SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pembangunan danPemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang pembangunan dan pemberdayan masyarakat. Uraian Tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan Bina Pemerintahan Desa;

b. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif;

c. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa DenganPihak Ketiga;

d. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

e. Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya;
f. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan;
g. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
h. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
i. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan;
j. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
k. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan;
l. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
m. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan;
n. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan/Desa;
o. Evaluasi Kelurahan/Desa;
p. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
q. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
r. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
s. Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan;
t. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
u. Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
v. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadikewenangannya;
w. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaanmasyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD

Seiring dengan perkembangan pembangunan saai ini ruang lingkup dan capaian tingkat kinerja pelayanan PD serta dampat terhadap penyelenggaraan tugas danfungsi PD dalam rangka pencapaian Visi dan Misi kepala daerah yang dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka analisis terhadap capaian kinerja PD dengan kondisi lingkungan strategis dapat dijabarkan dengan pendekatan analisa kekuatan dan kelemahan yang meliputi kekuatan (strenghts) dan kelemahan (weaknees), serta lingkungan eksternal dimana peluang (oppourtunity) dan ancaman (threat) Yang berpengaruh tehadap kinerja Kecamatan Bandar . Adapun tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan PD serta isu-isu berupa rekomendasi dan catatan setrategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program kegiatan tahun yang direncanakan adalah capaian kinerja program kegiatan dengan melihat sejauh mana masukan , hasil dan dampak dari program kegiatan tersebut.

Kecamatan Bandar sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh satuan Perangkat Daerah lain dilingkup Kabupaten Pacitan . Kecamatan Bandar masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan , antara lain

: (1) Prasarana dan Sarana yang tersedia kurang lengkap dan memadai; (2) Sistem kerja yang belum optimal; (3) Keterbatasan ketrampilan petugas; (4) Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan.

Melaksanakan Perencanaan dan pelaksanaan Partisipatif;

1. Melaksanakan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif
2. Lebih Meningkatkan Profesionalisme Kinerja Aparatur Kecamatan dan Desa
3. Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor Dan Lintas Program
4. Meningkatkan Mutu Pelayanan Prima kepada Masyarakat
5. Peningkatan Sarana dan prasarana Kecamatan dan Desa

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bandar ditentukan, isu-

isupenting yaitu sebagai berikut;

(1). Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Pacitan kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada diwilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka camat tetap mendasar pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah , potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten pacitan;

(2). Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan ,terlebih pada pembangunan peningkatan instruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi Masyarakat.Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Coorperate Sosial Resposipilioty (CSR)* , maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat

(3). Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu PD di Pemerintah Kabupaten Pacitan yang menyelenggarakan pelayanan publik , maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasar padaprosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat . Harapan dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah , menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampumendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.

(4). Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur , Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi ,serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting ,makaaparatur yang ada harus

mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam peningkatan kemampuan sumber daya aparatur dan

penambahan jumlah aparatur.

(5). Arah Kebijakan mengoptimalisasikan pola koordinasi, fasilitasi dan motivasi di bidang ekonomi pembangunan dan gender, Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Aset Pertanahan

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD 2025

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yangmemuat

a). Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah

b). Program prioritas pembangunan daerah dan

c). Rencana Kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS, Rencana Kecamatan Bandar berdasarkan RKPD Kabupaten Pacitan sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja PD se Kabupaten Pacitan yang melaksanakan program dankegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Bandar

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan acuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025. Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program dan kegiatan masyarakat Kecamatan Bandar merupakan hasil dari Musrenbang tingkat desa yang merupakan forum musyawarah perencanaan tahunan di tingkat desa untuk membahas dan menyepakati usulan kegiatan pembangunan hasil musyawarah di tingkat dusun. Hasil dari musrenbangdesa akan diusulkan di tingkat Kecamatan. Tujuan umum pelaksanaan kegiatan musrenbang desa yaitu mendorong partisipasi masyarakat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan di tingkat desa. Sedangkan tujuan khususnyaadalah :

- Menyepakati prioritas kebutuhan dan kegiatan yang termasuk urusan

pembangunan yang menjadi wewenang Desa yang menjadi bahan penyusunanRencana Kerja SKPD Desa.

- Prioritas kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh warga Desa yang dibiayai melalui dana swadaya masyarakat dan dikoordinasikan oleh lembaga di Desa setempat.
- Prioritas kegiatan Desa yang akan dilaksanakan Desa sendiri yang dibiayai melalui dana bantuan dari pemerintah daerah
- Prioritas kegiatan pembangunan Desa yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD kota atau APBD propinsi.
- Menyepakati Tim Delegasi Desa yang akan memaparkan persoalan yang ada di Desanya di forum musrenbang kecamatan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ;

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan *good govermance dan akuntabilitas pelayanan publik.* Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Bandar dalam kurun waktu tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas permerintahan umum dalam rangka mengoptimalisasikan pengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan danpenegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadiruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan
2. Mengoptimalisasikan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagaian urusan otomoni daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan,pengawasan,fasilitasi,penetapan,penyelenggaraan dankewenangan lain yang dilimpahkan

Telaah terhadap kebijakan Kabupaten Pacitan, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pacitan, dimana secara teknokratis prioritas Kabupaten Pacitan telah mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa Timur

Sebagai modal dasar bagi perwujudan visi dan misi Kecamatan Bandar dalam mendukung visi dan misi Kabupaten Pacitan adalah letak geografis Kecamatan Bandar yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RT/RW) Kabupaten

Pacitan baik dan sisi ekonomi,industri, jasa dan pariwisata

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD Kecamatan Bandar yang dikaitkan dengansasaran target kinerja Renstra PD Kecamatan Bandar 2021 – 2026

Dengan menitikberatkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Bandar mempunyai ***tujuan :*** Meningkatkan pelayananpublic di Kecamatan Bandar, dengan indikator tujuan Nilai Indek KepuasanMasyarakat yang diukur dalam jangka waktu lima tahun dengan ***sasaran*** Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Bandar; dan Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

3.3 Program dan Kegiatan

Renja Perubahan Kecamatan Bandar tahun 2025, didasarkan pada beberapa pendekatan bagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu;(1) pendekatan tehnokratis , yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga.(2) Pendekatan Top Down , yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembagunan pemerintah tingkat atasnya. (3) Pendekatan poklitis , yaitu memenuhi visi dan misi kepala daerah terpilih; (4) Pendekatan Bottom Up yaitu mempertimbangkan peta permasalahan pemerintahtingkat di bawahnya. (5) Pendekatan partisipatif , yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.

- **Program**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi . Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Bandar maka program- program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

➢ **Kegiatan**

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang teleh digariskan , maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
8. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh UnitKerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
9. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
10. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
11. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan KepalaDaerah
12. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain

meliputi :

- Jumlah program dan jumlah kegiatan
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar keberbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu) .
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang terinci menurut sumber pendanaannya .

Jika Rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya . Tabel Rencana program dan kegiatan sebagaimana Tabel 4.1 :

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025

REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Bandar

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun n - 1	Tahun N										Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
Kecamatan Bandar																			
7					UNSUR KEWILAYAHAN				Rp. 2.254.700.813	Rp. 26.895.744			Rp. 2.281.596.557	Rp. 2.143.103.613	Rp. 26.895.744			Rp. 2.169.999.357	Rp. 2.303.398.715,00
7	01				KECAMATAN				Rp. 2.254.700.813	Rp. 26.895.744			Rp. 2.281.596.557	Rp. 2.143.103.613	Rp. 26.895.744			Rp. 2.169.999.357	Rp. 2.303.398.715,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 1.840.303.813	Rp. 26.895.744			Rp. 1.867.199.557	Rp. 1.830.774.613	Rp. 26.895.744			Rp. 1.857.670.357	Rp. 1.950.398.715,00
7	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 15.185.000				Rp. 15.185.000	Rp. 10.355.800				Rp. 10.355.800	Rp. 10.300.000,00
7	01	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa		Rp. 11.000.000				Rp. 11.000.000	Rp. 6.170.800				Rp. 6.170.800	Rp. 8.000.000,00
7	01	01	2,01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Pendapatan Transfer Antar Daerah	- Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa		Rp. 4.185.000				Rp. 4.185.000	Rp. 4.185.000				Rp. 4.185.000	Rp. 2.300.000,00
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 1.570.170.728				Rp. 1.570.170.728	Rp. 1.568.970.728				Rp. 1.568.970.728	Rp. 1.725.648.715,00
7	01	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa		Rp. 1.533.598.528				Rp. 1.533.598.528	Rp. 1.533.598.528				Rp. 1.533.598.528	Rp. 1.718.148.715,00

7	01	01	2,02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Pendapatan Transfer Antar Daerah	- Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa		Rp. 3.187.000				Rp. 3.187.000	Rp. 1.987.000				Rp. 1.987.000	Rp. 4.000.000,00
7	01	01	2,02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa		Rp. 33.385.200				Rp. 33.385.200	Rp. 33.385.200				Rp. 33.385.200	Rp. 3.500.000,00
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp. 21.210.800				Rp. 21.210.800	Rp. 21.210.800				Rp. 21.210.800	Rp. 15.200.000,00
7	01	01	2,05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa		Rp. 21.210.800				Rp. 21.210.800	Rp. 21.210.800				Rp. 21.210.800	Rp. 15.200.000,00
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 57.568.185	Rp. 26.895.744			Rp. 84.463.929	Rp. 57.568.185	Rp. 26.895.744			Rp. 84.463.929	Rp. 49.250.000,00
7	01	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Pendapatan Transfer Antar Daerah	- Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa		Rp. 4.299.500	Rp. 26.895.744			Rp. 31.195.244	Rp. 4.299.500	Rp. 26.895.744			Rp. 31.195.244	Rp. 12.000.000,00
7	01	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa		Rp. 43.598.185				Rp. 43.598.185	Rp. 43.598.185				Rp. 43.598.185	Rp. 31.000.000,00
7	01	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa		Rp. 9.670.500				Rp. 9.670.500	Rp. 9.670.500				Rp. 9.670.500	Rp. 6.250.000,00
7.	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 108.072.800				Rp. 108.072.800	Rp. 104.572.800				Rp. 104.572.800	Rp. 75.000.000,00
7	01	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa		Rp. 12.340.000				Rp. 12.340.000	Rp. 12.340.000				Rp. 12.340.000	Rp. 15.000.000,00
7	01	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Dana Bagi Hasil (DBH)	- Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa		Rp. 95.732.800				Rp. 95.732.800	Rp. 92.232.800				Rp. 92.232.800	Rp. 60.000.000,00

7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 68.096.300				Rp. 68.096.300	Rp. 68.096.300				Rp. 68.096.300	Rp. 75.000.000,00
7	01	01	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa		Rp. 52.056.800				Rp. 52.056.800	Rp. 52.056.800				Rp. 52.056.800	Rp. 60.000.000,00
7	01	01	2,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 16.039.500				Rp. 16.039.500	Rp. 16.039.500				Rp. 16.039.500	Rp. 15.000.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Rp. 60.000.000				Rp. 60.000.000	Rp. 52.020.000				Rp. 52.020.000	Rp. 105.000.000,00
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				Rp. 18.000.000				Rp. 18.000.000	Rp. 18.000.000				Rp. 18.000.000	Rp. 25.000.000,00
7	01	02	2,01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa		Rp. 18.000.000				Rp. 18.000.000	Rp. 18.000.000				Rp. 18.000.000	Rp. 25.000.000,00
7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				Rp. 42.000.000				Rp. 42.000.000	Rp. 34.020.000				Rp. 34.020.000	Rp. 80.000.000,00
7	01	02	2,02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa		Rp. 42.000.000				Rp. 42.000.000	Rp. 34.020.000				Rp. 34.020.000	Rp. 80.000.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Rp. 111.028.900				Rp. 111.028.900	Rp. 88.660.900				Rp. 88.660.900	Rp. 80.000.000,00
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				Rp. 111.028.900				Rp. 111.028.900	Rp. 88.660.900				Rp. 88.660.900	Rp. 80.000.000,00
7	01	03	2,01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa		Rp. 111.028.900				Rp. 111.028.900	Rp. 88.660.900				Rp. 88.660.900	Rp. 80.000.000,00

7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Rp. 125.978.100				Rp. 125.978.100	Rp. 82.278.100				Rp. 82.278.100	Rp. 30.000.000,00
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				Rp. 125.978.100				Rp. 125.978.100	Rp. 82.278.100				Rp. 82.278.100	Rp. 30.000.000,00
7	01	04	2,01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa		Rp. 125.978.100				Rp. 125.978.100	Rp. 82.278.100				Rp. 82.278.100	Rp. 30.000.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				Rp. 60.892.000				Rp. 60.892.000	Rp. 44.872.000				Rp. 44.872.000	Rp. 85.000.000,00
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				Rp. 60.892.000				Rp. 60.892.000	Rp. 44.872.000				Rp. 44.872.000	Rp. 85.000.000,00
7	01	05	2,01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa		Rp. 46.000.000				Rp. 46.000.000	Rp. 29.980.000				Rp. 29.980.000	Rp. 55.000.000,00
7	01	05	2,01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa		Rp. 14.892.000				Rp. 14.892.000	Rp. 14.892.000				Rp. 14.892.000	Rp. 30.000.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				Rp. 56.498.000				Rp. 56.498.000	Rp. 44.498.000				Rp. 44.498.000	Rp. 53.000.000,00
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				Rp. 56.498.000				Rp. 56.498.000	Rp. 44.498.000				Rp. 44.498.000	Rp. 53.000.000,00
7	01	06	2,01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa		Rp. 34.000.000				Rp. 34.000.000	Rp. 27.040.000				Rp. 27.040.000	Rp. 30.000.000,00

7	01	06	2,01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Pacitan, Bandar, Semua Kel/Desa		Rp. 22.498.000				Rp. 22.498.000	Rp. 17.458.000				Rp. 17.458.000	Rp. 23.000.000,00
							Jumlah		**Rp. 2.254.700.813**	**Rp. 26.895.744**			**Rp. 2.281.596.557**	**Rp. 2.143.103.613**	**Rp. 26.895.744**			**Rp. 2.169.999.357**	**Rp. 2.303.398.715,00**

Kab. Pacitan, ...
Camat Bandar

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN BANDAR

WURIYANTO, S.Pd, M.Sc
NIP. 197007201998031007

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 RENCANA KERJA DAN KEGIATAN

Keseluruhan Rencana Kerja dan kegiatan yang akan dikelola oleh Kecamatan Bandar selama 5 tahun dari tahun (2021 - 2026) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi misi Kabupaten Pacitan selama 5 tahun kedepan .

Rencana Kerja merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untukmendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu .

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan rencana kerja tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari rencana kerja yang dilaksanakan oleh satua atau beberapa satuan kerja sebagaibagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada satu tujuan, dengan kata lain rencana kerja perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelaskelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya .

4.2 INDIKATOR KINERJA

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja pembangunan . Dengan berpedoman indikator kinerja maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan dan penyelesaiannya .

4.3 KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Bandar adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi/UPT dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan . Dan salah satu point pentingnya adalah menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dan transparasi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap system dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam perubahan Renstra KecamatanBandar tahun 2021 - 2026 .

4.4 PENDANAAN INDIKATIF

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bandar bersumber pada dana APBD Kabupaten Pacitan, namun bagi instansi lain seperti UPT Pertanian dan Peternakan,UPT TK/SD, UPT kehutanan bisa mendapatkan dana dari APBDPropinsi maupun DAK dari instansi induknya .

BAB V
PENUTUP

Catatan penting Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Perangkat DaerahKecamatan Bandar memuat gambaran umum dan prioritas pembangunan daerah, yang merupakan pedoman untuk menyusun rancangan anggaran kecamatan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasi dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Penyusunan rencana kerja perubahan , merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah yang harus dioperasionalisasikan melalui rencana kerja perubahan tahun 2025, kecamatan ini baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, berbagai bentuk strategi yang telah terpilih baik berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen rencana kerja ini harus diimplementasikan secara tertulis dan jelas ke dalam Rencana Kerja Perubahan tahun 2025.Renja ini merupaka bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati Pacitan terpilih untukpembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan dan satu tahun masa transisi .

Kidah-kaidah dalam penyusunan Renja Perubahan mempertimbangkan upaya yang harus ditempuh dengan tidak mudah dan akan mendapat banyak tantangan serta kendala yang melintang, maka Kecamatan Bandar sebagai salah satu SKPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berusaha semaksimal mungkin dengan menggunakan rencana kerja ini sebagai pedom an dalam perencanaan pembangunan ke depan, mengingat rencana kerja ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat Kecamatan Bandar , tetapi juga bagi semua pihak yang berkepentingan dalam proses perencanaan pembangunan diwilayah Kecamatan Bandar .

Rencana tindak lanjut Renja Perubahan ini merupakan dasar evaluasi dan laporanpelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan Bandar, dengan demikian setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kecamatan Bandar telah mempunyai pedoman/acuan/arahan yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan, sehingga bisa terukurdan terprogram dengan baik .

Bandar, 23 Juli 2025

CAMAT BANDAR

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN KECAMATAN BANDAR

WURIYANTO,S.Pd.M.Sc

Pembina Tk. I

NIP. 19700720 199803 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN TULAKAN
Jalan Raya Tulakan No. 06
Phone: 0821 3270 6274

RENJA 2025 PERUBAHAN

KECAMATAN TULAKAN

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan Potensi, Peluang dan Kendala yang ada. Dengan Program Kerja organisasi dapat membangun strateginya sebagai bagian penting dari organisasi yang berorientasi pada hasil.

Rencana kerja yang baik harus memenuhi persyaratan minimal antara lain data yang lengkap dan benar, mengetahui objek yang dibangun, Program mudah dipahami dan dapat dilaksanakan, bersifat pemecahan masalah dan pencapaian tujuan pembangunan dan dilaksanakan oleh pihak yang memahami dan menyusun Program Kerja.

Dengan adanya penyusunan Rencana Kerja Perubahan diharapkan tersedianya data dan program yang akurat sehingga setiap tahapan pelaksanaan dapat dikendalikan sehingga lebih efektif dan efisien untuk mencapai yang dikehendaki.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.

Tulakan, 21 Juli 2025

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN KECAMATAN TULAKAN

DJOKO HARIJANTO, SP, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19681222 199703 1 001

PARAF HIERARKI		
JPT PRATAMA	PARAF	TANGGAL
1.		
2.		
KABAG/ADMINISTRATOR/JF		
1.		
2.		
KASUBAG/PENGAWAS/JF		
PELAKSANA		

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL 1

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN 4

1.1. Latar Belakang 4

1.2. Landasan Hukum 5

1.3. Maksud dan Tujuan 10

1.4. Sistematika Penulisan 10

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 ... 12

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tulakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025..... 12

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tulakan 20

2.3. Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tulakan 33

2.4. Review terhadap RKPD 35

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 38

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TULAKAN 43

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 43

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tulakan 44

3.3. Program dan Kegiatan 47

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TULAKAN ... 55

4.1. Rencana Kerja dan Kegiatan..... 55

4.2. Indikator Kinerja..... 55

4.3. Kelompok Sasaran 55

4.4 Pendanaan Indikatif 56

BAB V PENUTUP 57

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana kerja merupakan merupakan rencana kerja tahunan yang menjabarkan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA). Renja SKPD Kecamatan Tulakan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kinerja Perubahan Tahun 2025 merupakan tindak lanjut Surat Edaran Bupati Nomor: 900.1.1.2/626/408.55/2025, tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dengan disepakatinya Perubahan Anggaran KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggatan 2025 yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Pacitan.

Nomor: 900/622/408.55/2025	dan	Nomor: 900/623/408.55/2025
170/02/KUA/DPRD/2024		170/03/PPAS/DPRD/2025

Tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (IKU-APBD) TAhun Anggaran 2024 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS APBD) AThun Anggaran 2025 tanggal 15 Juli 2025, agar setiap Perangkat Daerah segera Perubahan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2025.

Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan dengan memperhatikan Visi Misi Kabupaten Pacitan "Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA" Kecamatan Tulakan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan menitik beratkan pada misi yang keempat yaitu Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional dan Melayani.

Dalam konteks pelaksanaan pembangunan Kecamatan Tulakan dituntut untuk mampu melaksanakan tugas dan kewenangan yang telah diberikan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan yang ada di Kecamatan Tulakan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Ini semua demi kesejahteraan masyarakat Kecamatan Tulakan.

Proses penysusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan berdasarkan kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Tulakan dengan tetap memperhatikan program prioritas, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan, sehingga dapat memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditetapkan.

2.1 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
3. Landasan Operasional :
    1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam hal Ihwal Kewenangan Pemerintah Daerah dalam menentukan dan Menetapkan Peraturan Daerahnya;
    2. Undang-Undang no. 12 Tahun 1950 Tentang pemerintah daerah Kabupaten di Jawa Timur (di undangkan Pada Tanggal 08Agustus 1950);
    3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
    4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 05038)
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evakuasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
20. Peraturan Presiden Nomor ....Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023;
21. Instruksi Presiden nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
37. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Jawa Timur Tahun 2025;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;
39. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2021;
40. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 170 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029;
41. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan, Nomor : 188/3259/408.53/2023 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Kabupaten Pacitan.
42. Surat Edaran Bupati Pacitan, Nomor: 188/076/408.53/2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Kabupaten Pacitan.

2.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencaaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam mewujudkan efisiensi dalam pembangunan daerah.

Tujuannya adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan oleh berbagai pihak yang akan melaksanakan kegiatan di Kecamatan Tulakan sehingga sehingga terwujud sinergitas antar pemangku kewenangan yang ada di Kecamatan tulakan. Dan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi Kabupaten dalam pelaksanaan pembanguna di Kecamatan Tulakan serta dapat dijadikan bahan evaluasi bagi Camat dalam melaksanakan tugas dan fungsinnya pada tahun ini.

2.3 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Perangkat Daerah Perubahan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Tahun 2025, disusun berdasarkan tata urutan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tulakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tulakan
2.3. Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tulakan
2.4. *Review* terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TULAKAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tulakan
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TULAKAN
BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi dari hasil evaluasi dapat teridentifkasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh SKPD dan pemasalahan-permasalahan yang mengjamabat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan pada tahun mendatang.

Rencana Strategis Kecamatan Tulakan Tahun 2025-2029 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut merupakan panduan Kecamatan Tulakan dalam melaksanakan program dan kegiatannya.Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024, Kecamatan Tulakan melaksanakan program dan kegiatan dengan dukungan anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Pacitan, kemudian pada saat anggaran perubahan tahun 2024 menjadi sebesar Rp. 3.312.374.641,- sudah termasuk belanja operasional dan belanja modal dengan tingkat realisasi sebesar 93,9% atau sebesar Rp. 3.110.253.455,-. Tahun anggaran 2024 Kecamatan Tulakan melaksanakan 6 program, 11 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan total dana sebesar Rp. 2.707.011.786,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.578.583.745,- atau (95,20%) dengan kegiatan sebagai berikut:
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target sebesar Rp. 13.573.635,- hanya terealisasi sebesar Rp. 12.058.965,- atau 88,84 %.
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dari target sebesar Rp. 1.938.068.435,- terealisasi sebesar Rp. 1.918.363.786,- atau 96,22%.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah target Rp. 59.433.840,- terealisasi Rp. 59.422.740,- atau 99,98%

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah target realisasi sebesar Rp. 282.433.140,- dan terealisasi sebesar Rp. 249.514.309,- atau 88,34%.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah target realisasi sebesar Rp. 208.321.190,- dan terealisasi Rp. 194.878.775,- atau 93,55%.

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan target realisasi Rp. 149.571.045,- dan terealisasi sebesar Rp. 144.345.170,- atau 96,51%.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dengan total target dana sebesar Rp. 46.196.980,- dan hanya terealisasi sebesar Rp. 35.809.520,- atau sebesar 77,51%.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan target realisasi Rp. 198.737.205,- dan terealisasi sebesar 87,64% atau Rp. 174.168.035,-.
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum target sebesar Rp. 109.922.795,- dan terealisasi sebesar Rp. 94.030.700,- atau 85,54%.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum target sebesar Rp. 133.661.830,- hanya terealisasi sebesar Rp. 128.165.005,- atau sebesar 95,89%.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan target Rp. 116.844.045,- dan terealisasi sebesar Rp. 99.496.450,- atau sebesar Rp. 85,15%.

Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan pada tahun Anggaran 2025 memiliki pagu murni sebesar Rp. 2.793.554.074,- dan dengan adanya efisiensi anggaran menjadi sebesar 2.569.671.404,- dengan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 1.035.860.368,- atau 37.08%. diharapkan realisasi belanja tahun 2025 dapat tercapai dan dapat menyerap anggaran sesuai dana yang diberikan.

Berikut akan disajikan Tabel Capaian hasil rekapitulasi Evaluasi Hasil RKPD Kecamatan Tulakan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025:

Tabel 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

dan Pencapaian Renstra Perangkat s/d Tahun 2025 Kabupaten Pacitan

Semester I 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcomes*)/ Kegiatan (*Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat) Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu 2024			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**2.310.303.140,00**	**2.188.293.435,00**	**2.707.011.785,00**	**2.578.583.745,00**	**95,26%**	**2.428.950.073,00**	**980.886.588,00**	**40.38%**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja PD**	**11.660.351,00**	**11.625.879,00**	**13.573.635,00**	**12.058.965,00**	**88,84%**	**15.247.011,00**	**3.121.818,00**	**20.47%**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	748.400,00	745.000,00	1.124.985,00	1.106.500,00	96,36%	13.479.336,00	-	-
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	495.500,00	480.000,00	397.380,00	319.000,00	80,28%		-	-
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	495.500,00	492.000,00	392.940,00				-	-
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	511.100,00	508.100,00	374.625,00	319.000,00	85,15%		-	-

7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	495.100,00	490.900,00	368.520,00				-	-
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.371.751,00	8.366.479,00	10.471.185,00	10.314.465,00	98,50%		-	-
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	544.400,00	543.400,00	444.000,00			1.767.675,00	0	0
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah**	**1.953.483.239,00**	**1.838.196.080,00**	**1.993.678.968,00**	**1.918.363.786**	**96,22%**	**1.906.404.579,00**	**847.844.679,00**	**44.48%**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.938.068.435,00	1.822.788.880,00	1.974.632.334,00	1.903.057.226,00	96,38%	1.890.811.767,00	244.332.722	44.65%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	283.308,00	281.000,00	722.722,00				0	0
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15.131.496,00	15.126.200,00	18.323.880,00	15.306.560,00	83,53 %	15.592.812,00	3.551.957,00	22.78%
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase Pegawai Yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian**	**41.558.400,00**	**41.540.640,00**	**41.558.400,00**	**41.540.640,00**	**99,96%**	**47.541.633,00**	**0**	**0**
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	41.558.400,00	41.540.640,00	41.558.400,00	41.540.640,00	99,96%	47.541.633,00	0	0
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase operasional Dasar Perangkat Daerah yang Terpenuhi**	**112.130.385,00**	**109.427.377,00**	**282.433.140,00**	**249.514.309,00**	**88,34%**	**145.987.889,00**	**38.309.200,00**	**26.24%**
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	57.201.960,00	57.032.977,00	213.478.200,00	210.984.198,00	98,83%	87.273.953,00	21.314.190,00	24.42%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jmlah Paket bahan Logistik Kantor yang disediakan	17.213.325,00	17.203.100,00	15.486.720,00	15.484.500,00	99,99%	15.520.686,00	5.141.010,00	33.12%

7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan	3.335.100.00	3.331.300.00	13.433.220.00	12.300.611.00	91,57%	10.073.250.00	5.814.000.00	57.72%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.380.000.00	31.860.000.00	40.035.000.00	10.745.000.00	26,84%	33.120.000.00	6.040.000.00	18.24%
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibutuhkan**	**141.450.770.00**	**137.595.004.00**	**208.321.190,00**	**194.878.775,00**	**93,55%**	**219.122.290,00**	**76.834.711,00**	**35.06%**
7.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.518.770.00	15.730.368.00	27.662.590,00	20.112.399,00	72,71%	21.938.890.00	8.177.836.00	37.28%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	121.932.000.00	121.864.636.00	180.658.600,00	174.766.376,00	96,74%	197.183.400.00	68.656.875.00	34.82%
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase barang milik Daerah dalam Kondisi Baik**	**50.019.995.00**	**49.908.455.00**	**149.571.045,00**	**144.345.170,00**	**96,51%**	**94.646.671,00**	**14.736.180,00**	**15.57%**
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.949.585.00	28.926.350.00	35.438.315,00	30.240.755,00	85,33%	37.277.582.00	6.352.350.00	17.04%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	21.070.410.00	20.982.105.00	114.132.730,00	114.104.415,00	99,98 %	57.369.089,00	8.383.830.00	14.61%
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kecamatan**	**14.203.640.00**	**12.456.593.00**	**46.196.980,00**	**35.809.520,00**	**77,51%**	**23.918.556,00**	**2.813.970,00**	**11.76%**
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Pemenuhan Layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan**	**14.203.640.00**	**12.456.593.00**	**46.196.980,00**	**35.809.520,00**	**77,51%**	**23.918.556,00**	**2.813.970,00**	**11.76%**

7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanakan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Layanan Pengantar KK, KTP, dan Surat Legalitas lainnya	14.203.640.00	12.456.593.00	46.196.980,00	35.809.520,00	77,51%	23.918.556.00	2.813.970,00	11.76%
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Cakupan Desa yang difasilitasi**	**118.892988.00**	**111.698.963.00**	**198.737.205,00**	**174.168.035,00**	**87,64%**	**176.549.948,00**	**20.789.810,00**	**11.78%**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Desa yang difasilitasi**	**118.892988.00**	**111.698.963.00**	**198.737.205,00**	**174.168.035,00**	**87,64%**	**176.549.848,00**	**20.789.810,00**	**11.78%**
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Monitoring Musrenbang Desa	11.370.690.00	10.728.200.00	12.569.970,00	11.342.500,00	90,23%	9.635.241,00	6.365.000,00	66.06%
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Aktualisasi kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Jumlah Pembinaan PKK Desa	107.522.298.00	100.970.783.00	186.167.235,00	162.825.535,00	87,46%	166.914.607,00	14.424.810,00	8.64%
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**164.792.179.00**	**158.800.282.00**	**109.922.795,00**	**94.030.700,00**	**85,54%**	**77.844.506,00**	**9.480.000,00**	**12.18%**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Rapat/Pembinaan Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat**	**164.792.179.00**	**158.800.282.00**	**109.922.795,00**	**94.030.700,00**	**85,54%**	**77.844.506,00**	**9.480.000,00**	**12.18%**
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan tokoh Masyarakat	Jumlah Rapat/Pembinaan Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat	164.792.179.00	158.800.282.00	109.922.795,00	94.030.700,00	85,54%	77.844.506,00	9.480.000,00	12.18%
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentse Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan**	**25.657.719.00**	**22.945.700.00**	**133.661.830,00**	**128.165.005,00**	**95,89%**	**41.058.937,00**	**15.890.000,00**	**38.70%**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum**	**25.657.719.00**	**22.945.700.00**	**133.661.830,00**	**128.165.005,00**	**95,89%**	**41.058.937,00**	**15.890.000,00**	**38.70%**

7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Seusai Ketentuan Perundang-Undangan	Jumlah Pelayanan Bantuan Kesejahteraan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan	25.657.719.00	22.945.700.00	133.661.830.00	128.165.005.00	95.89%	41.058.937.00	15.890.000.00	38.70%
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA**	**Persentase Desa yang Termonitoring**	**95.948.769.00**	**87.959.131.00**	**116.844.045,00**	**99.496.450,00**	**85,15%**	**45.232.154,00**	**6.000.000,00**	**13.26%**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah desa yang termonitoring**	**95.948.769.00**	**87.959.131.00**	**116.844.045,00**	**99.496.450,00**	**85,15%**	**45.232.154,00**	**6.000.000,00**	**13.26%**
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pendampingan Penyusunan APBDes, APBDes perubahan dan Penarikan PBB	95.948.769.00	87.959.131.00	116.844.045.00	99.496.450.00	85.15%	45.232.154.00	6.000.000.00	13.26%

Sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2024 sekaligus dasar penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tulakan Tahun 2025–2029, disampaikan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan dengan cukup baik. Dari total anggaran perubahan sebesar Rp. 3.312.374.641,- telah direalisasikan sebesar Rp. 3.110.253.455,- atau 93,9%, mencerminkan kinerja pelaksanaan yang efektif dan mendekati target. Pada tahun tersebut, Kecamatan Tulakan melaksanakan 6 program, 11 kegiatan, dan 25 sub kegiatan yang seluruhnya didanai dari APBD Kabupaten Pacitan.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menjadi program terbesar dengan anggaran Rp. 2.707.011.786,- dan realisasi Rp. 2.578.583.745,- atau 95,20%. Mayoritas kegiatan dalam program ini telah terlaksana dengan baik, meskipun terdapat dua kegiatan yang realisasinya masih di bawah 90%, yaitu Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja (88,84%) serta Administrasi Umum (88,34%). Program lainnya mencatat capaian bervariasi, seperti Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Umum sebesar 77,51%, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 87,64%, Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 85,54%, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 95,89%, dan Pembinaan serta Pengawasan Pemerintahan Desa 85,15%.

Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh perencanaan yang baik, koordinasi internal yang solid, dukungan APBD Kabupaten yang memadai, serta kinerja SDM yang profesional. Sementara itu, beberapa faktor yang memengaruhi belum optimalnya serapan anggaran pada beberapa kegiatan antara lain kurangnya sarana prasarana yang memadai, serta penyesuaian kebutuhan di lapangan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 telah berjalan sesuai arah perencanaan. Beberapa kegiatan yang tidak mencapai target anggaran lebih disebabkan oleh efisiensi dan optimalisasi pelaksanaan, bukan karena hambatan pelaksanaan. Evaluasi ini menjadi pijakan penting dalam menyusun Rencana Strategis Tahun 2025–2029 agar kebijakan dan program pembangunan lima tahun ke depan dapat disusun secara lebih terarah, akuntabel, dan berdampak langsung pada pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat diketahui Evaluasi Terhadap Hasil Renja Kecamatan Tulakan sampai dengan Triwulan ke 2 tahun 2025, berikut analisis dari tabel tersebut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, beberapa kegiatan yang menunjang sasaran kinerja telah dilaksanakan

dengan baik dan sesuai anggaran kas. Terdapat beberapa kegiatan yang masih belum dilaksanakan dikarenakan kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan 3.

2. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, seluruh kegiatan terserap dengan baik dan sesuai anggaran kas.
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sudah mencapai target kinerja 17 desa yang dilakukan pengawasan dan pembinaan sampai dengan triwulan II ini sudah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap 17 desa tersebut.
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, seluruh kegiatan terserap dengan baik dan sesuai anggaran kas.
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, seluruh kegiatan terserap dengan baik dan sesuai anggaran kas.
6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, seluruh kegiatan terserap dengan baik dan sesuai anggaran kas.

Penyerapan yang di evaluasi dari Anggaran Tahun 2025 pada Semester I ada perubahan anggaran karena adanya efisiensi anggaran dan beberapa perubahan kebutuhan dan penambahan fasilitasi sarana prasarana yang dibutuhkan pada tahun berjalan.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN TULAKAN

Adapun Kinerja Kantor Kecamatan Tulakan berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria) dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pacitan No. 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah, yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan Kabupaten Pacitan.

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI

Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan dipimpin oleh Camat. Kecamatan Tulakan membawahi wilayah kerja sebagai berikut :

1. Desa Jetak
2. Desa Nglaran

3. Desa Wonoanti
4. Desa Padi
5. Desa Jatigunung
6. Desa Kalikuning
7. Desa Gasang
8. Desa Ngile
9. Desa Bubakan
10. Desa Losari
11. Desa Tulakan
12. Desa Bungur
13. Desa Kluwih
14. Desa Ngumbul
15. Desa Wonosidi
16. Desa Ketro
17. Desa Ketro Harjo

Kecamatan mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan. Kecamatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum;

a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
g. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan

h. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang -Undangan.

Selain melaksanakan tugas camat, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten, Pelimpahan kewenangan Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari:

a. Sekretariat;
b. Seksi Pelayanan Umum;
c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Sosial;
e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian;
f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing organisasi di kecamatan adalah sebagai berikut :

- ***SEKRETARIS KECAMATAN***

Sekretariat Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan, serta program, evaluasi dan pelaporan kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan Kecamatan. Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
b. pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;

c. pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan.
d. pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi di sekretariat kecamatan adalah sebagai berikut :

Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :

a. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan :

Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan, dan keuangan mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan;
b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis;
c. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data;
d. menyiapkan bahan penyusunan laporan;
e. menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan laporan kinerja;
f. melaksanakan pengelolaan anggaran;
g. melaksanakan perbendaharaan dan gaji;
h. melaksanakan verifikasi dan akuntansi;
i. melaksanakan pelaporan keuangan; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

a. menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran;
b. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan rumah tangga;
c. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
d. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
e. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kehumasan dan protokol;
f. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kepegawaian; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- ***SEKSI PELAYANAN UMUM***

Seksi Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang pelayanan umum. Uraian Tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan umum;
b. mengumpulkan, mengolah dan menyusun rancangan kebijakan teknis dan data sesuai bahan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat Desa/ Kelurahan;
c. menyajikan data penyelenggaraan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat Desa/ Kelurahan;
d. menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, administrasi kependudukan, administrasi pertanahan dan pelayanan umum lain;

e. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
f. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- ***SEKSI PEMERINTAHAN***

Seksi Pemerintahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang Pemerintahan. Uraian Tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
b. Melaksanakan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;
c. Fasilitasi Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan;
e. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan;
f. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan pajak bumi dan bangunan;
g. Memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum;
h. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
i. Fasilitasi pelaksanaan batas wilayah kecamatan;
j. Melaksanakan urusan yang di limpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya;
k. Fasilitasi Kerja sama antar kecamatan;

l. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
m. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
n. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
o. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
p. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
q. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
r. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
s. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
t. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa;
u. Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan;
v. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
w. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
x. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya;
y. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- ***SEKSI SOSIAL, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN***

Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang sosial, ketentraman dan ketertiban. Uraian Tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan sosial, ketentraman dan ketertiban;
b. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan;
c. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
d. Menyiapkan bahan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
e. Menyiapkan bahan program dan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
g. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi perizinan;
h. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
i. Menyusun evaluasi dan laporan tentang sosial, ketentraman dan ketertiban;
j. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya;
k. Melaporkan pelaksanaan kegiatan sosial, ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
l. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Camat.

- ***SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT***

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Uraian Tugas sebagai berikut :

a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan Bina Pemerintahan Desa;
b. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
c. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga;
d. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
e. Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya;
f. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan;
g. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
h. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
i. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan;
j. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
k. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan;
l. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
m. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan;
n. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
o. Evaluasi Kelurahan;

p. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;

q. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;

r. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;

s. Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan;

t. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;

u. Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;

v. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya;

w. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan

x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

(1) Pada masing-masing unit kerja di Lingkungan Kecamatan dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(4) Kelompok jabatan fungsional dapat di koordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional.

(5) Jumlah tenaga fungsional ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

Kantor Kecamatan Tulakan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan Publik di bidang Pemerintahan. Dalam

melaksanakan pelayanan masyarakat / melayani masyarakat Kantor Kecamatan Tulakan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan penilaian tingkat kepuasan masyarakat yang akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Mengingat jenis pelayanan yang ada di Kantor Kecamatan Tulakan hanya bersifat legalisasi, maka penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) hanya menggunakan kuesioner (pendapat responden tentang Pelayanan Publik) yang datang ke Kantor Kecamatan untuk mendapatkan pelayanan. Indeks Kepuasan Masyarakat ini terdiri atas 9 (sembilan) unsur yang dapat diberlakukan untuk semua jenis pelayanan.

Tabel 2

Nilai Rata-rata per Unsur Pelayanan Tahun 2025 Semester 1

Unsur ke	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata
1	Kesesuaian persyaratan Pelayanan	3,72
2	Kemudahan Prosedur pelayanan	3,69
3	Kecepatan Waktu Pelayanan	3,61
4	Biaya /Tarif Pelayanan	3,98
5	Kesesuaian Produk Pelayanan	3,68
6	Kompetensi/Kemampuan Petugas	3,73
7	Perilaku Petugas	3,82
8	Kualitas Sarana prasarana	3,95
9	Penanganan pengaduan	3,69
	NILAI KEPUASAN MASYARAKAT	**93,1**

Pelaksanaan pelayanan publik (*public service*) di Kantor Kecamatan Tulakan secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang sangat baik. Hal ini terbukti ke-9 unsur pelayanan semua nilai rata-rata 93,1 (Sembilan Puluh Tiga koma Satu).

1. Nilai SKM Unit Pelayanan Kantor Kecamatan Tulakan setelah dikonversikan (93,1) Ini dapat disimpulkan bahwa Kinerja Unit Pelayanan Publik Kantor Kecamatan Tulakan adalah SANGAT BAIK.

2. Untuk bisa mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima diperlukan komitmen untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas, baik oleh pengambilan keputusan (*top manager*), pimpinan unit pelaksana dan pelaksana pelayanan publik, untuk selalu berupaya memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah, terbuka, sederhana, dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif. Di sisi lain pelanggan (masyarakat) diharapkan ikut membantu dalam arti melengkapi syarat berkas-berkas layanan serta tidak bersifat apatis terhadap upaya-upaya peningkatan pelayanan.

Tabel 3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN TULAKAN
KABUPATEN PACITAN
SEMESTER 1 TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
					TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2024	TAHUN 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Tulakan	Jumlah Nilai Hasil Survei kepuasan Masyarakat setiap tahun			85,9	86,4	86,9	96,00	86,9	93,1	100%	96.97%	
2.	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa	Prosentase terlaksananya Fasilitasi Desa dalam Satu Tahun			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Prosentase desa yang sudah Menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen : Perencanaan,penganggaran dan pelaporan			100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	50%	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN TULAKAN

Seiring dengan perkembangan pembangunan saat ini ruang lingkup dan capaian tingkat kinerja pelayanan PD serta dampak terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dalam rangka pencapaian Visi dan Misi kepala daerah yang dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka analisis terhadap capaian kinerja PD dengan kondisi lingkungan strategis dapat dijabarkan dengan pendekatan analisa kekuatan dan kelemahan yang meliputi kekuatan (*strenghts*) dan kelemahan (*weaknees*), serta lingkungan eksternal dimana peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) Yang berpengaruh terhadap kinerja Kecamatan Tulakan. Adapun tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan PD serta isu-isu berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program kegiatan tahun yang direncanakan adalah capaian kinerja program kegiatan dengan melihat sejauh mana masukan, hasil dan dampak dari program kegiatan tersebut.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tulakan tidak lepas dari isu-isu strategis yang berkembang dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Tulakan, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Tulakan ada beberapa hal yang menjadi hambatan. Adapun keterangannya dapat dilihat di tabel berikut:

BIDANG PELAYANAN	HAMBATAN	KETERANGAN
1. **Sekretariat**	- Kurangnya sarana dan prasarana PD	- Pemenuhan Belanja Barang/ Jasa, Modal dan Belanja Pegawai PD
2. **Pelayanan Umum**	- Kurangnya Kompetensi SDM Pelayanan, Sarpras pelayanan	- Pemenuhan Pelayanan Penganta KK, KTP dan Sura Legalitas lainnya
3. **Pelayanan Pemberdayaan**	- Belum optimalnya	- Pelaksanaan Musrenbang

Masyarakat dan Ekonomi	Pemberdayaan Masyarakat Desa - Belum optimalnya perencanaan pembangunan di desa	Kecamatan dan Desa - Pembinaan PKK Desa
4. Pelayanan Kesejahteraan Sosial	- Angka Kemiskinan masih tinggi	- Pelayanan bantuan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan
5. Pelayanan Bidang Pemerintahan	- Belum optimalnya administrasi desa, tingkat ketepatan waktu pembayaran PBB	- Pendampingan Penyusunan APBDes, APBDes Perubahan dan Penarikan PBB
6. Pelayanan Trantib	- Belum ada anggaran pengembangan LInmas	- Pembinaan Linmas Desa

Selanjutnya dari beberapa hambatan yang disebutkan di atas menjadi isu-isu strategis yang dialami oleh Kecamatan Tulakan. Yaitu mengenai optimalnya kualitas pelayanan.

Pelayanan publik yang diberikan sektor publik oleh pelayan publik harus memberikan kepuasan yang optimal bagi masyarakat yang dilayani. Pelayanan yang memberikan kepuasan kepada masyarakat menjadi indikator keberhasilan dari setiap organisasi/sektor publik seperti Kecamatan Tulakan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, dalam upaya memberikan pelayanan publik yang maksimal, setiap organisasi publik perlu memiliki paradigma dalam

mekanisme pelayanan yaitu, pelayanan yang efisien, efektif, dan menempatkan masyarakat sebagai pengguna jasa yang harus dilayani sebaik-baiknya.

Pelayanan publik yang berkualitas baik oleh pemerintah kecamatan akan memberikan citra instansi pemerintah kecamatan yang baik di mata masyarakatnya dan akan memberikan kepuasan pada masyarakat. Kepuasan masyarakat yang diperoleh dari pelayanan yang diberikan pemerintah kecamatan haruslah secara terus-menerus, berkesinambungan dan meningkat seiring dengan tuntutan kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang juga semakin meningkat dan kompleks. Artinya bahwa cara dan sistem pelayanan yang saat ini direspons dengan rasa puas oleh masyarakat belum tentu sama responsnya oleh masyarakat pada waktu besok dan seterusnya. Diperlukan perubahan dan penyesuaian sistem dan cara pelayanan publik yang tepat, sesuai dengan kebutuhan terkini, sebagai wujud kreativitas pemerintah kecamatan dalam mengoptimalkan pelayanan publik.

2.4. REVIEW TERHADAP RKPD PERUBAHAN

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Tulakan Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan [embangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Tulakan Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Tulakan dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan RKPD Perubahan Tahun 2025 dapat dilihat Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4

Review Terhadap RKPD Perubahan Tahun 2025

Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec.Tulakan	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B	2.271.277.403	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kec.Tulakan	Nilai SAKIP perangkat daerah	>B	2.271.277.403	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Tulakan	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah	23 Dokumen	14.345.081	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Tulakan	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah	23 Dokumen	14.345.081	
	Administrasi Keuangan	Kec.Tulakan	Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	59 dokumen	1.733.666.790	Administrasi Keuangan	Kec.Tulakan	Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	59 dokumen	1.733.666.790	
	Administrasi Kepegawaian	Kec.Tulakan	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100%	57.309.633	Administrasi Kepegawaian	Kec.Tulakan	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100%	57.309.633	
	Administrasi umum perangkat daerah	Kec.Tulakan	Prosentase operasional dasar perangkat daerah yang dipenuhi	100%	141.419.586	Administrasi umum perangkat daerah	Kec.Tulakan	Prosentase operasional dasar perangkat daerah yang dipenuhi	100%	141.419.586	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Tulakan	Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	100%	237.222.010	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Tulakan	Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	100%	237.222.010	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Tulakan	Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik	80%	87.314.303	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Tulakan	Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik	80%	87.314.303	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Kec.Tulakan	Tingkat kepuasan masyarakat	100%	17.438.556	**PROGRAM PENYELENGGARAAN**	Kec.Tulakan	Tingkat kepuasan	100%	17.438.556	

	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		terhadap layanan kecamatan			**PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		masyarakat terhadap layanan kecamatan			
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec.Tulakan	Pemenuhan layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan	12 bulan	17.438.556	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec.Tulakan	Pemenuhan layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan	12 bulan	17.438.556	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec.Tulakan	Prosentase cakupan desa dan kelurahan yang difasilitasi	100%	137.699.848	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kec.Tulakan	Prosentase cakupan desa dan kelurahan yang difasilitasi	100%	137.699.848	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec.Tulakan	Jumlah desa yang difasilitasi	17 desa	137.699.848	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec.Tulakan	Jumlah desa yang difasilitasi	17 desa	137.699.848	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec.Tulakan	Prosentase penyelenggaraanko ordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%	64.884.506	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kec.Tulakan	Prosentase penyelenggaraanko ordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%	64.884.506	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec.Tulakan	Pemenuhan upaya penyelenggaraan umum	12 bulan	64.884.506	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec.Tulakan	Pemenuhan upaya penyelenggaraan umum	12 bulan	64.884.506	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec.Tulakan	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	100%	33.138.937	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kec.Tulakan	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	100%	33.138.937	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec.Tulakan	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	17 desa	33.138.937	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec.Tulakan	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	17 desa	33.138.937	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec.Tulakan	Persentase desa yang termonitoring	100%	45.232.154	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Kec.Tulakan	Persentase desa yang termonitoring	100%	45.232.154	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Tulakan	Jumlah Desa yang termonitoring	17 desa	45.232.154	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Tulakan	Jumlah Desa yang termonitoring	17 desa	45.232.154	

2.5. PENELAAHAN USUSLAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program dan kegiatan masyarakat Kecamatan Tulakan merupakan hasil dari Musrenbang tingkat desa yang merupakan forum musyawarah perencanaan tahunan di tingkat desa untuk membahas dan menyepakati usulan kegiatan pembangunan hasil musyawarah ditingkat dusun. Hasil dari Musrenbang desa akan diusulkan di tingkat Kecamatan. Tujuan umum pelaksanaan kegiatan Musrenbang desa yaitu mendorong partisipasi masyarakat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan di tingkat desa. Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
- Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa; dan
- Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.

Hasil Musrenbang RKP-Desa dari 17 (tujuh belas) desa di wilayah Kecamatan Tulakan tersebut kemudian dimusyawarahkan dalam Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan, untuk selanjutnya hasil dari Musrenbang tersebut diusulkan pada Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten. Usulan program dan kegiatan masyarakat Kecamatan Tulakan Tahun 2025 seperti nampak pada tabel berikut ini:

Tabel 5
Usulan Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun 2025
Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	7.01 KECAMATAN										
1	**7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	>B								
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja PD	23 Dokumen					
							7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19 dokumen	Kecamatan Tulakan	Tinggi
							7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kecamatan Tulakan	Tinggi
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	59 Dokumen					
							7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan pegawai	20 orang/bulan	Kecamatan Tulakan	Tinggi
							7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	45 Laporan	Kecamatan Tulakan	Tinggi
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100%					
							7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	Kecamatan Tulakan	Tinggi

				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%					
							7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	Kecamatan Tulakan	Tinggi
							7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	Kecamatan Tulakan	Tinggi
							7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	Kecamatan Tulakan	Tinggi
							7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	Kecamatan Tulakan	Tinggi
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	100%					
							7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	Kecamatan Tulakan	Tinggi
							7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum	12 laporan	Kecamatan Tulakan	Tinggi
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	80%					
							7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11 unit	Kecamatan Tulakan	Tinggi
							7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	Kecamatan Tulakan	Tinggi
2	**7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	100%								

				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Pemenuhan Layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan	12 Bulan					
							7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	Kecamatan Tulakan	Tinggi
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase cakupan desa yang difasilitasi	100%								
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Yang Difasilitasi	17Desa					
							7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	17 Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Tulakan	Tinggi
							7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Kecamatan Tulakan	Tinggi
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100%								
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 bulan					
							7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	Kecamatan Tulakan	Tinggi
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	100%								

				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	17 Desa					
							7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	Kecamatan Tulakan	Tinggi
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang termonitoring	100%								
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang termonitoring	17 Desa					
							7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	85 Dokumen	Kecamatan Tulakan	Tinggi

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TULAKAN

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja dari pada setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional, maka Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Tulakan guna menunjang Pembangunan Kabupaten Pacitan secara keseluruhan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang (sementara) adalah sebagai berikut :

- Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik;
- Pendidikan;
- Kesehatan;
- Penanggulangan Kemiskinan;
- Ketahanan Pangan;
- Infrastruktur;
- Iklim investasi dan Iklim usaha;
- Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;
- Kebudayaan dan Pariwisata;
- Kreativitas dan inovasi;
- Politik, hukum dan keamanan dan ketertiban;
- Perekonomian;
- Kesejahteraan rakyat.

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Pacitan sesuai dengan visi yang akan ditetapkan nantinya. Kecamatan Tulakan sebagai perangkat daerah Kabupaten Pacitan memiliki peran yang sangat penting karena sebagai pelaksana teknis kewilayahan Camat sebagai kepala Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Sebagai pelaksana teknis kewilayahan Pemerintah Kecamatan Tulakan memiliki ruang lingkup tugas : Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di

kecamatan, koordinasi atas kegiatan instansi – instansi di wilayah kecamatan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, pelayanan dan sebagainya.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut di atas, maka Kecamatan Tulakan di dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah. Melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Tulakan yang meliputi hampir semua prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang di laksanakan di Kecamatan Tulakan telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN TULAKAN

Tujuan Rencana Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun. Dengan ditetapkannya Tujuan Rencana Strategis, maka Kecamatan Tulakan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan yaitu meningkatkan pelayanan publik yang inovatif, dengan indikator tujuan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang diukur dalam jangka waktu lima tahun. Sehingga dalam Rencana Kerja Kecamatan Tulakan Tahun 2025 ini yang diukur adalah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun lalu 2023 dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun berjalan tahun 2024 dan target yang akan dicapai pada tahun 2024 dan tahun 2025.

Untuk mencapai tujuan di atas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yaitu penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Tulakan dalam jangka lima (5) tahun yang akan datang. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan di Kecamatan Tulakan dalam setiap tahunnya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan, dan.

2. Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa.

Tujuan dan sasaran Kecamatan Tulakan beserta indikator kinerjanya dapat ditunjukkan melalui Tabel berikut :

Tabel 6
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tulakan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET					SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET HASIL				
		TAHUN							TAHUN				
		1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)			1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
1	2	3					4	5	6				
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	83,5	84	3,78	3,79	3,80	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Tulakan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan	**85,9**	**86,4**	**86,9**	**96,00**	**96,01**
							Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di desa	Presentase Rekomendasi Hasil Fasilitasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	100%
								Presentase desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	100%	100%	100%	100%	100%

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Tulakan merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (PD) sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Tulakan sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Camat mempunyai fungsi; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

- ***Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah***

  Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Tulakan diarahkan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Pacitan. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Tulakan merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati. Adapun visi Bupati Pacitan yaitu "**Masyarakat Pacitan BAHAGIA dan SEJAHTERA",** sedangkan misi ke 4 (empat) yaitu Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional dan Melayani, yang menjadi acuan program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Tulakan.

- ***Pencapaian MDGs***

  Millinium Development Golds merupakan kesepakatan dari negara-negara di dunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ketiga yang kondisi ekonominya masih di bawah standar, dililit kemiskinan

dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara-negara yang ikut menanda tangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MGDs.

- ***Berantas Kemiskinan***

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sangat serius dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius.

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Pacitan. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Tulakan. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun anggaran 2025 dan 2026 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi di mana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses di bidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- ***Pencapaian SPM***

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggung jawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik

adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Tulakan diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Pelayanan yang ada di Kecamatan Tulakan diukur dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat dalam satu tahun. Program yang terkait dengan ini adalah **"Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik"**.

- ***Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah***

Kecamatan Tulakan sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Pacitan memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Pacitan. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan, peternakan, perikanan, obyek-obyek pariwisata Kabupaten. Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Tulakan

melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini

b) Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan.

- ***Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan.***

Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Tulakan Tahun 2025 adalah 6 Program dengan 11 Kegiatan, adapun rincian program dan kegiatan tercantum pada lampiran ini.

- ***Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.***

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Tulakan sifat penyebarannya adalah di seluruh wilayah Kecamatan Tulakan dan melingkupi semua Desa/Kelurahan.

- ***Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan.***

Adapun pagu indikatif yang dirinci menurut sumber dana pada tahun berjalan 2025 dan tahun yang akan datang yaitu tahun 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN TULAKAN KAB. PACITAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN TULAKAN							**2.731.754.074,00**	**2.793.554.074,00**	**2.566.671.404,00**	**-165.082.670,00**							**2.905.773.236,96**	
	7	**URUSAN KEWILAYAHAN**							**2.731.754.074,00**	**2.793.554.074,00**	**2.566.671.404,00**	**-165.082.670,00**							**2.905.773.236,96**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.731.754.074,00**	**2.793.554.074,00**	**2.566.671.404,00**	**-165.082.670,00**							**2.905.773.236,96**	
1	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**				**=B Nilai**	**=B Nilai**	**2.452.706.794,00**	**2.408.950.072,00**	**2.271.277.403,00**	**22.586.775,96**							**2.475.365.561,96**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan capaian kinerja Perangkat Daerah				25 Dokumen	25 Dokumen	16.246.975,00	19.047.041,00	14.345.081,00	4.108.106,96				Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah. Relasinya atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045). Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah. Relasinya atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			12.873.835,00	KECAMATAN TULAKAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				19 Dokumen	19 Dokumen	8.485.901,00	10.475.938,00	13.577.938,00	4.108.106,96	Kab. Pacitan Tulakan, Semua kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah. Relasinya atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045). Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah. Relasinya atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			11.791.865,00	KECAMATAN TULAKAN
	7.01.01.2.01.0002	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	1.767.075,00	1.767.075,00	1.767.075,00	0,00	Kab. Pacitan Tulakan, Semua kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah. Relasinya atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045). Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah. Relasinya atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			1.767.075,00	KECAMATAN TULAKAN
	7.01.01.2.02	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah				50 Dokumen	50 Dokumen	1.068.928.379,00	1.006.464.979,00	1.153.668.780,00	215.997.785,00				Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah. Relasinya atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045). Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah. Relasinya atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			2.020.797.317,00	KECAMATAN TULAKAN
	7.01.01.2.03.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/Orang	10 Orang/Orang	1.034.017.787,00	1.005.011.787,00	1.149.979.506,00	215.962.719,00	Kab. Pacitan Tulakan, Semua kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah. Relasinya atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045). Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah. Relasinya atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			2.007.537.227,00	KECAMATAN TULAKAN
	7.01.01.2.03.0002	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran (SAP)																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran (SAP) dan Laporan Realisasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran (SAP)				65 Laporan	65 Laporan	19.592.812,00	19.592.812,00	15.592.812,00	0,00	Kab. Pacitan Tulakan, Semua kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah. Relasinya atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045). Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah. Relasinya atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			19.100.000,00	KECAMATAN TULAKAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentasi pegawai yang mendapatkan layanan kepegawai				100 %	100 %	37.769.421,00	37.561.893,00	37.394.893,00	16.590.000,00				Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah. Relasinya atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045). Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah. Relasinya atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			53.989.360,00	KECAMATAN TULAKAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pekerjaan Jalan wilayah Desa kelurahan				2 Paket	2 Paket	[illegible]	42.[illegible]	57.[illegible]	[illegible]	Kab. Pandeglang, Tulakan, Samuja, Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Integrasi Direktur Pembangunan Pusat dan Daerah Regions atau Wilayah Baru (IPLBR) dan RPJP (2025); Integrasi Direktur Pembangunan Pusat dan Daerah Regions atau Wilayah Baru (IPLBR) dan RPJP (2025)			[illegible]	KECAMATAN TULAKAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase aparatur dan Masyarakat Daerah yang mendapat				100 %	100 %	139.[illegible]	145.[illegible]	141.[illegible]	[illegible]				Integrasi Direktur Pembangunan Pusat dan Daerah Regions atau Wilayah Baru (IPLBR) dan RPJP (2025); Integrasi Direktur Pembangunan Pusat dan Daerah Regions atau Wilayah Baru (IPLBR) dan RPJP (2025)			139.[illegible]	KECAMATAN TULAKAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Pengadaan dan Pemeliharaan Barang yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. Pandeglang, Tulakan, Samuja, Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Integrasi Direktur Pembangunan Pusat dan Daerah Regions atau Wilayah Baru (IPLBR) dan RPJP (2025); Integrasi Direktur Pembangunan Pusat dan Daerah Regions atau Wilayah Baru (IPLBR) dan RPJP (2025)			[illegible]	KECAMATAN TULAKAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Barang Cetakan dan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan yang Disediakan				18 Paket	12 Paket	19.[illegible]	19.[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. Pandeglang, Tulakan, Samuja, Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Integrasi Direktur Pembangunan Pusat dan Daerah Regions atau Wilayah Baru (IPLBR) dan RPJP (2025); Integrasi Direktur Pembangunan Pusat dan Daerah Regions atau Wilayah Baru (IPLBR) dan RPJP (2025)			19.[illegible]	KECAMATAN TULAKAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. Pandeglang, Tulakan, Samuja, Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Integrasi Direktur Pembangunan Pusat dan Daerah Regions atau Wilayah Baru (IPLBR) dan RPJP (2025); Integrasi Direktur Pembangunan Pusat dan Daerah Regions atau Wilayah Baru (IPLBR) dan RPJP (2025)			[illegible]	KECAMATAN TULAKAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang tersediakan				100 %	100 %	194.[illegible]	216.[illegible]	237.[illegible]	[illegible]				Integrasi Direktur Pembangunan Pusat dan Daerah Regions atau Wilayah Baru (IPLBR) dan RPJP (2025); Integrasi Direktur Pembangunan Pusat dan Daerah Regions atau Wilayah Baru (IPLBR) dan RPJP (2025)			[illegible]	KECAMATAN TULAKAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kab. Pandeglang, Tulakan, Samuja, Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Integrasi Direktur Pembangunan Pusat dan Daerah Regions atau Wilayah Baru (IPLBR) dan RPJP (2025); Integrasi Direktur Pembangunan Pusat dan Daerah Regions atau Wilayah Baru (IPLBR) dan RPJP (2025)			[illegible]	KECAMATAN TULAKAN
	7.01.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pengaman Lingkungan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AWAL PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Berlendah/Berlurung (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Pengurusan Limbah Hasil yang Dikelolaan				12 Laporan	12 Laporan	170.985.494,00	167.185.400,00	217.185.400,00	46.500.000,00	Kab. Pulau Taliabu, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); DANA ALOKASI UMUM (DAU); PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH		Integrasi Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah, Respons atas Indikasi Baru (RPJMN dan RPJP Lain); Integrasi Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah, Respons atas Tren Indikasi Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			90.984.400,00	KECAMATAN TULAKAN
	7.01.01.2.09	Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemanfaatan Barang Milik Daerah Lainnya dan Pemanfaatan Daerah	Persentase barang milik daerah yang sudah dan				80 %	85 %	124.814.716,00	91.913.400,00	87.913.400,00	38.900.497,00							49.026.725,00	KECAMATAN TULAKAN
	7.01.01.2.10 (lima)	Penyediaan dan Pemeliharaan Biaya Pemanfaatan dan Pajak Bangunan Pendapatan Tanah dan Bangunan Daerah lainnya																		
			Jumlah Pengadaan Pemanfaat Jasa dan Rehabilitasi Gedung Kantor yang Dipelihara dan Dikelola Kegiatan				11 Unit	11 Unit	37.777.920,00	37.777.920,00	35.925.064,00	700.973,00	Kab. Pulau Taliabu, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Integrasi Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah, Respons atas Tren Indikasi Baru (RPJMN dan RPJP 2045); Integrasi Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah, Respons atas Tren Indikasi Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			35.960.509,00	KECAMATAN TULAKAN
	7.01.01.2.11 (lima)	Pemeliharaan Rumah Dinas dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Rumah Dinas dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Lainnya				5 Unit	5 Unit	65.997.126,00	67.165.066,00	61.165.066,00	34.268.025,00	Kab. Pulau Taliabu, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Integrasi Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah, Respons atas Tren Indikasi Baru (RPJMN dan RPJP 2045); Integrasi Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah, Respons atas Tren Indikasi Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			60.600.725,00	KECAMATAN TULAKAN
2	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**23.918.936,00**	**23.018.536,00**	**17.438.500,00**	**4.718.224,00**							**29.630.760,00**	
	7.01.02.2.01	Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan yang Baik, Dokumentasi dan Lini Kerja Perangkat Daerah yang Baik di Kecamatan	Persentase layanan Administrasi kecamatan yang diselenggarakan				12 Bulan	12 Bulan	24.918.936,00	24.018.536,00	18.438.500,00	5.480.224,00			Mengenai pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) aparat, termasuk pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan kesejahteraan gender serta pengurusan jaminan pensiun (pensiun dini) dan gaji ke 13, dan pemberdayaan ekonomi.	Integrasi Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah, Respons atas Tren Indikasi Baru (RPJMN dan RPJP 2045); Integrasi Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah, Respons atas Tren Indikasi Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			24.918.760,00	KECAMATAN TULAKAN
	7.01.02.2.02 (dua)	Pelayanan Bantuan Pelaksana Pelayan publik Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Pelayanan Bantuan Pelaksana Pelayan publik Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	23.918.936,00	23.018.536,00	17.438.500,00	5.480.224,00	Kab. Pulau Taliabu, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengenai pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) aparat, termasuk pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan kesejahteraan gender serta pengurusan jaminan pensiun (pensiun dini) dan gaji ke 13, dan pemberdayaan ekonomi.	Integrasi Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah, Respons atas Tren Indikasi Baru (RPJMN dan RPJP 2045); Integrasi Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah, Respons atas Tren Indikasi Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			24.918.760,00	KECAMATAN TULAKAN
3	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase cakupan desa yang difasilitasi**				**100 %**	**100 %**	**156.903.115,00**	**176.569.846,00**	**137.669.846,00**	**21.234.873,00**							**139.137.910,00**	
	7.01.03.2.01	Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi				17 Desa	17 Desa	156.903.115,00	176.569.846,00	137.669.846,00	20.765.713,00				Integrasi Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah, Respons atas Tren Indikasi Baru (RPJMN dan RPJP 2045); Integrasi Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah, Respons atas Tren Indikasi Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			139.137.910,00	KECAMATAN TULAKAN
	7.01.03.2.03 (tiga)	Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Memberdayakan dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan di Desa				17 Lembaga Kemasyarakatan	17 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Pulau Taliabu, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Integrasi Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah, Respons atas Tren Indikasi Baru (RPJMN dan RPJP 2045); Integrasi Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah, Respons atas Tren Indikasi Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			17.000.000,00	KECAMATAN TULAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS					TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	(kurang/lebih Bertambah (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.04.01.0003	Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	96.067.664,00	968.364.847,00	1.186.084.607,00	38.756.213,00	Kab. Pesisir Tulakan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah. Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah. Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			117.730.816,00	KECAMATAN TULAKAN
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				100 %	100 %	50.944.500,00	77.894.500,00	64.884.506,00	10.089.994,00							59.934.496,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pemantauan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				12 Bulan	12 Bulan	50.944.500,00	77.894.500,00	64.884.506,00	5.040.500,00					Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah. Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah. Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			59.934.496,00	KECAMATAN TULAKAN
	7.01.04.2.01.0002	Pembinaan Ketenteraman Masyarakat Tanpa Agama dan Tanah Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Kerukunan Hidup Antar Umat Agama dan Tanah Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	50.944.500,00	77.894.500,00	64.884.506,00	5.040.500,00	Kab. Pesisir Tulakan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)			Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah. Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah. Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			59.934.496,00	KECAMATAN TULAKAN
5	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan				100 %	100 %	41.058.937,00	41.058.937,00	33.138.937,00	8.941.063,00							40.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Kewenangan Kepada Daerah	Jumlah desa yang fasilitasi oleh penyelenggaraan pemerintahan umum				17 Desa	17 Desa	41.058.937,00	41.058.937,00	33.138.937,00	7.920.000,00					Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah. Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah. Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			40.000.000,00	KECAMATAN TULAKAN
	7.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Laporan Kerja Sama yang Dilakukan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				12 Laporan	12 Laporan	41.058.937,00	41.058.937,00	33.138.937,00	7.920.000,00	Kab. Pesisir Tulakan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah. Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah. Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			40.000.000,00	KECAMATAN TULAKAN
6	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang terbimbing				100 %	100 %	45.232.154,00	45.232.154,00	45.232.154,00	0,00							52.078.595,00	
	7.01.06.2.01	Pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi Pengelolaan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terbimbing				17 Desa	17 Desa	45.232.154,00	45.232.154,00	45.232.154,00	0,00					Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah. Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045) Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah. Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045)			52.078.595,00	KECAMATAN TULAKAN
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Desa yang Dibantu dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				85 Dokumen	85 Dokumen	45.232.154,00	45.232.154,00	45.232.154,00	0,00	Kab. Pesisir Tulakan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah. Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045). Integrasi Orientasi Pembangunan Pusat dan Daerah. Respons atas Visi Indonesia Baru (RPJMN dan RPJP 2045).			52.078.595,00	KECAMATAN TULAKAN
		JUMLAH							2.791.794.074,00	2.793.354.074,00	2.848.671.408,00	-162.082.970,00							2.885.773.296,00	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. RENCANA KERJA DAN KEGIATAN

Keseluruhan Rencana Kerja dan kegiatan yang akan dikelola oleh Kecamatan Tulakan selama 5 tahun dari tahun (2025-2029) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi misi Kabupaten Pacitan selama 5 tahun ke depan .

Rencana Kerja merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang di koordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu .

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan rencana kerja tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan di mana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari rencana kerja yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada satu tujuan, dengan kata lain rencana kerja perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya .

4.2. INDIKATOR KINERJA

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan dan penyelesaiannya .

4.3. KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Tulakan adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi/UPT dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Dan salah satu poin pentingnya adalah menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dan transparasi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan

dalam perubahan Renstra Kecamatan Tulakan tahun 2025-2029 .

4.4. PENDANAAN INDIKATIF

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tulakan bersumber pada dana APBD Kabupaten Pacitan, namun bagi instansi lain seperti UPT Pertanian dan Peternakan, UPT TK/SD, UPT kegunaan bisa mendapatkan dana dari APBD Provinsi maupun DAK dari instansi induknya.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Tulakan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tulakan Tahun 2025-2029 yang mengacu pada Visi dan Misi Bupati Pacitan **"Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA"** dan mengacu pada evaluasi RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Tulakan Tahun 2025 yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Tulakan. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Tulakan di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketersediaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan.
2) Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
   a. Kecamatan Tulakan berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Tulakan Tahun 2025 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Pacitan.
   b. Kecamatan Tulakan berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKA) Perubahan Kecamatan Tulakan Tahun 2025 dengan Ketetapan / Plafon Anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
   c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Perubahan Kecamatan Tulakan Tahun 2025, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2025.
3) Rencana Tindak Lanjut.

   Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Tulakan selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2025 juga

berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Tulakan. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Perubahan Kecamatan Tulakan Tahun 2025 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Di samping itu Renja Perubahan Kecamatan Tulakan juga memberikan umpan balik (*feedback*) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Semoga keberadaan Renja Perubahan Kecamatan Tulakan Tahun 2025 ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kecamatan Tulakan serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Pacitan.

Pacitan, 21 Juli 2025
CAMAT TULAKAN

DJOKO HARIJANTO, SP, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19681222 199703 1 001

PARAF HIERARKI		
JPT PRATAMA	PARAF	TANGGAL
1.		
2.		
KABAG/ADMINISTRATOR/JF		
1.		
2.		
KASUBAG/PENGAWAS/JF		
PELAKSANA		

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN TULAKAN
Alamat : Jalan Raya Tulakan No. 06 ,Ponsel 0821 3270 6274
Laman : www.tulakan.pacitankab.go.id E-mail : camat_tulakan@pacitankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TULAKAN
NOMOR: 100.3.3/29/408/.70/2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERUBAHAN KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025

Menimbang :

a. Bahwa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) merupakan Dokumen Perencanaan selama periode 1 (satu) tahun;
b. Bahwa Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Kecamatan Tulakan disusun sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang;
c. Bahwa sebagaimana huruf a dan b diatas perlu diterbitkan Keputusan Camat Tulakan tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tulakan Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-undang Nomor 25nTahun 2004 tentang SIstem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagiamana teah diubah beberapa kali terakhhir tentang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Unang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggataan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6323);

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangla Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Xara Perecanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Keja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kebupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 9);
9. Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jang MEnengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerag Kabupaten PAcitan (Lembaran Daerah Kabupaten PAcitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 170 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 omor 171);

12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 157 Tahub 2023 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah KAbupaten Pacitan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 43);
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Perubahan ke Tiga atas Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026.
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
15. Surat Edaran Nomor 000.7/499/408.53/2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025.
16. Surat edaran Bupati Pacitan Nomor 900.1.1.2/626/408.55/2025 Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Tulakan Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan.

Kedua : Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Tulakan Tahun 2025 sebagimana dictum Kesatu merupakan landasan Kecamatan Tulakan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

Ketiga : Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Periode 1 tahun

yang akan menjadi Pedoman dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Tulakan.

Keempat : Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Tulakan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabiila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Tulakan
Pada Tanggal: 21 Juli 2025

CAMAT TULAKAN

DJOKO HARIJANTO, SP, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19681222 199703 1 001

PARAF HIERARKI		
JPT PRATAMA	PARAF	TANGGAL
1.		
2.		
KABAG/ADMINISTRATOR/JF		
1.		
2.		
KASUBAG/PENGAWAS/JF		
PELAKSANA		

KECAMATAN NGADIROJO

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA)

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat taufik dan hidayahNya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Ngadirojo Tahun 2025.

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Ngadirojo ini adalah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan yang baik oleh Kecamatan Ngadirojo . Apabila dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini terdapat kekurangan, kami sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan Rencana Kerja Perubahan ini.

Akhirnya kami berharap mudah-mudahan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini bisa menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan dapat terealisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Ngadirojo, 18 Juli 2025

CAMAT NGADIROJO

NANANG HARDWIJONO, S.Sos.M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19720520 199203 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		.....	2
DAFTAR ISI		.....	3
BAB I	PENDAHULUAN		
	I.1	LATAR BELAKANG	4
	1.2	LANDASAN HUKUM	4
	1.3	MAKSUD DAN TUJUAN	6
	1.4	SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		
	2.1	EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II	8
	2.2	ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	13
	2.3	ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	18
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH		
	3.1	TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	20
	3.2	TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH	20
	3.3	PROGRAM DAN KEGIATAN	21
BAB IV	PENUTUP	.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kinerja Perubahan Tahun 2025 merupakan tindak lanjut Surat Edaran Bupati Pacitan Nomor: 188/076/408.53/2025, tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Kabupaten Pacitan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 343 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Perubahan RKPERANGKAT DAERAH dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Ranwal Renja Perangkat daerah Tahun 2025 Kecamatan Ngadirojo adalah:

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
3. Landasan Operasional :
    1. UU NO. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur;
    2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
    3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
    4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah ; (Lembaran Negara RI tahun 204 Nomor : 244, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
    5. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja ;

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Pengendalian, Evaluasi dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, tambahan lembaranan Negara RI Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tahun 2000 tentang Perangkat Daerah (Lembaran negara RI tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembarab Negara RI Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelyanan Minimal (SPM) Lembaran Neraga RI Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6178;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 22019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran negara RI Nomor 6322;
12. Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025;
13. Permendangri Nomor 67 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat aerah provisni dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penylenggaraan Urusan pemerintahan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan evaluasi Pembangaunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah entang Rancanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Sireta Negara RI Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019, tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota;
18. Peraturan Meenteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah ;
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019, tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah tahun 2021;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
23. Peraturan Daerah provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2025 sebagaimanq di ubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPERANGKAT DAERAH) Kabupaten Pacitan tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Pacitan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021;
27. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022.
28. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 170 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;
29. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
30. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan, Nomor : 188/3001/408.53/2022 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat daerah tahun 2025 Kabupaten Pacitan

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud :

1. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintah dan Pembinaan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Ngadirojo pada tahun 2025.
2. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Ngadirojo pada Tahun 2025.

Tujuan

1. Mengsinkronisasi serta mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Ngadirojo tahun 2025 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Pacitan tahun 2025.

2. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas camat berikutnya. Penyusunan Renja Perubahan ini bertujuan lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Ngadirojo dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 LANDASAN HUKUM

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD

KABUPATEN PACITAN

Triwulan Tahun 2025

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		-10		-11		(12=(8+9+10+11))		(13 = (12/7x100))		(14 = (6+12))		(15 = (14/5x100))		-16
1	701	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**Nilai**	**0**	**0**	**70,20**	**2.373.879.768**	**70,20**	**2.654.783.919**	**0**	**499.796.290**	**72,75**	**634.288.372**					**72,75**	**1.464.069.658**	**103,63%**	**55,15%**	**143,15**	**2.295.436.656,00**	**0**	**0**	**Kecamatan Ngadirojo**
	701.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**23**	**0**	**23**	**13.835.555**	**23**	**29.163.423**	**11**	**120.000**	**0**	**0**					**11**	**120.000**	**47,83%**	**0,41%**	**46**	**9.820.950,00**	**200**	**0**	
	701.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		0	14	8.337.110	19	27.994.827	10	120.000	0	0					**10**	**120.000**	**52,63%**	**0,43%**	14	6.512.900,00	0	0	
	701.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		0	1	1.202.730	0	0	0		0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	1	1.154.500,00	0	0	
	701.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		0	1	865.245											**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	1	483.600,00	0	0	
	701.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		0	1	892.245											**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	1	844.000,00	0	0	
	701.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen		0	1	853.395											**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	1	482.800,00	0	0	

	701.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		0	4	820.095											**0**	**0**	**0,00%**	**0,00%**	4	343.150,00	0	0	
	701.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		1	1	864.735	4	1.168.596	1	0	0	0					**1**	**0**	**25,00%**	**0,00%**	1	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					100	60,43					F
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Rendah		7	7		
	701.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**59**	**0**	**59**	**1.939.435.217**	**59**	**1.946.611.926**	**13**	**402.426.005**	**8**	**592.887.602**					**21**	**995.313.607**	**35,59%**	**51,13%**	**118**	**1.816.979.655,00**	**200**	**0**	
	701.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	0	0	20	1.918.886.592	21	1.922.705.822	21	402.306.005	21	592.887.602					21	**995.193.607**	100	93,84	20	1.800.587.855,00	0	0	
	701.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		0	1	886.080			0	0	0	0					**0**	**0**	100	84,6	1	749.650,00	0	0	
	701.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen		0	1	1.141.005			0	0	0	0					**0**	**0**	100	0	1	0	0	0	
	701.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan		0	12	17.003.450	24	21.239.920	6	120.000	1	0					**7**	**120.000**	100	86,71	12	14.743.000,00	0	0	
	701.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen		0	12	1.518.090	12	2.666.184	3	120.000,00	1	0					**4**	**120.000**	100	59,23	12	899.150,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																					100	64,88					F
Predikat kinerja(%)																					Sangat Tinggi	Rendah		5	5		

701.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**%**	**100**	**0**	**100**	**29.050.920**	**100**	**160.337.000**	**0**	**0**	**0**	**0**					**100**	**26.947.500,00**	**100**	**92,76**	**200**	**26.947.500,00**	**200**	**0**	
701.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0	2	29.050.920	2	160.337.000	0	0	0	0					**0**	26.947.500,00	100	92,76	2	26.947.500,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				100	92,76					F
Predikat kinerja(%)																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		1	1		
701.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi**	**%**	**100**	**0**	**100**	**59.045.772**	**100**	**40.036.900**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**		**100**	**54.602.350,00**	**100**	**92,47**	**200**	**54.602.350,00**	**200**	**0**	
701.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	6	9.430.222	1	16.549.400	0	0	6	0			0		**6**	6.055.850,00	100	64,22	6	6.055.850,00	0	0	
701.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	0	2	8.374.610	1	11.809.700	0	0	0	0					**0**	8.365.650,00	100	99,89	2	8.365.650,00	0	0	
701.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	3	29.601.480	1	11.677.800	0	0	0	0					**0**	29.506.900,00	100	99,68	3	29.506.900,00	0	0	
701.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0	0	2	11.639.460			0	0	0	0					**0**	10.673.950,00	100	91,7	2	10.673.950,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				100	88,87					F
Predikat kinerja(%)																				Sangat Tinggi	Tinggi		4	4		
701.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Jumlah kebutuhan Barang PD yang terealisasi**	**%**	**100**	**0**	**100**	**90.207.370**	**100**	**118.681.500**	**50**	**68.100.000**	**0**	**0**					**100**	**84.995.800,00**	**100**	**94,22**	**200**	**84.995.800,00**	**200**	**0**	
701.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	53	90.207.370	2	118.681.500	1	68.100.000	0	0					**1**	84.995.800,00	100	94,22	53	84.995.800,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				100	94,22					F
Predikat kinerja(%)																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		1	1		
701.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase pemenuhan jasa penunjang**	**%**	**100**	**0**	**100**	**171.930.819**	**100**	**193.181.670**	**25**	**29.150.285**	**25**	**41.400.770**					**100**	**162.773.901,00**	**100**	**94,67**	**200**	**162.773.901,00**	**200**	**0**	
701.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		0	12	21.579.219	12	21.596.070	3	3.900.285	3	4.600.770					**6**	15.679.901,00	100	72,66	12	15.679.901,00	0	0	
701.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		0	3	7.326.000	6	7.700.000	0	0	0	0					**0**	3.865.000,00	100	52,76	3	3.865.000,00	0	0	
701.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		0	12	143.025.600	12	163.885.600	3	25.250.000	3	36.800.000					**6**	143.229.000,00	100	100,14	12	143.229.000,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				100	75,19					F
Predikat kinerja(%)																				Sangat Tinggi	Tinggi		3	3		
701.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah yang di pelihara**	**%**	**100**	**0**	**100**	**70.374.115**	**100**	**166.771.500**	**0**	**0**	**0**	**0**					**100**	**139.316.500,00**	**100**	**197,97**	**200**	**139.316.500,00**	**200**	**0**	
701.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	0	0	11	52.294.785	11	133.178.700	0	0	0	0					**0**	26.000.000,00	100	49,72	11	26.000.000,00	0	0	
701.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	1	18.079.330	1	33.592.800	0	0	0	0					**0**	113.316.500,00	100	626,77	1	113.316.500,00	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				100	338,25					F
Predikat kinerja(%)																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		2	2		
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																				100	105,25					
Predikat kinerja(%)																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					

2	**701**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Nilai**	**100**	**0**	**87**	**23.764.620**	**96**	**31.317.760**	**92,17**	**3.834.000**	**94,66**	**4.490.000**	**0**	**4.582.500,00**	**86,92**	**12.242.900,00**	**86,92**	**22.893.500,00**	**100,02**	**84,87**	**170,33**	**22.893.500,00**	**170,33**	**0**	**Kecamatan Ngadirojo**
	701.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Laporan Lintas Sektor/UPT dan Instansi vertikal**	**Laporan**	**12**	**0**	**12**	**11.882.310**	**12**	**15.515.752**	**3**	**2.700.000**	**3**	**4.490.000**					**12**	**8.654.200,00**	**100**	**72,83**	**24**	**8.654.200,00**	**200**	**0**	
	701.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan		0	1	11.882.310	12	15.515.752	3	2.700.000	3	4.490.000					**6**	8.654.200,00	100	72,83	1	8.654.200,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	100	72,83					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sedang		1	1		
	701.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Pemenuhan Layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan**	**Bulan**	**12**	**0**	**12**	**15.091.700**	**12**	**15.802.008**	**3**	**1.134.000**	**3**	**0**					**12**	**14.239.300,00**	**100**	**94,35**	**24**	**14.239.300,00**	**200**	**0**	
	701.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		0	12	15.091.700	12	15.802.008	3	1.134.000	3	0					**6**	14.239.300,00	100	94,35	12	14.239.300,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	100	94,35					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		1	1		
																				Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	100	83,59					
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Tinggi					
3	**701**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan**	**%**	**100**	**0**	**100**	**287.735.080**	**100**	**249.398.496**	**25**	**24.459.000**	**50**	**66.830.600**					**100**	**271.018.400,00**	**100**	**94,19**	**200**	**271.018.400,00**	**200**	**0**	**Kecamatan Ngadirojo**
	701.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Desa yang difasilitasi**	**Desa**	**18**	**0**	**18**	**287.735.080**	**18**	**249.398.496**	**5**	**24.459.000**	**4**	**66.830.600**					**18**	**271.018.400,00**	**100**	**94,19**	**36**	**271.018.400,00**	**200**	**0**	
	701.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan		0	4	30.820.815	4	35.369.884	4	14.184.000	0	0					**4**	21.410.650,00	100	69,47	4	21.410.650,00	0	0	
	701.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		0	12	256.914.265	12	214.028.612	3	10.275.000	3	66.830.600					**6**	249.607.750,00	100	97,16	12	249.607.750,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	100	83,32					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Tinggi		2	2		
																				Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	100	94,19					
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					

4	**701**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan**	**%**	**100**	**0**	**100**	**356.597.420**	**100**	**203.517.152**	**25**	**25.950.000**	**25**	**46.614.000**					**100**	**330.996.725,00**	**100**	**92,82**	**200**	**330.996.725,00**	**200**	**0**	**Kecamatan Ngadirojo**
	701.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Bulan**	**12**	**0**	**12**	**356.597.420**	**12**	**203.517.152**	**3**	**25.950.000**	**3**	**46.614.000**					6	**330.996.725,00**	**100**	**92,82**	**24**	**330.996.725,00**	**200**	**0**	
	701.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan	Jumlah Laporan Pelaksanaan	Laporan		0	12	356.597.420	12	203.517.152	3	25.950.000	3	46.614.000					6	330.996.725,00	100	92,82	12	330.996.725,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	100	92,82					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		1	1		
																				Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	100	92,82					
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
5	**701**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan**	**%**	**0**	**0**	**100**	**28.151.940**	**100**	**14.920.300**	**0**	**0**	**0**	**0**					**100**	**22.348.150,00**	**100**	**79,38**	**200**	**22.348.150,00**	**0**	**0**	**Kecamatan Ngadirojo**
	701.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum**	**Desa**	**18**	**0**	**18**	**28.151.940**	**18**	**14.920.300**	**0**	**0**	**0**	**0**					**18**	**22.348.150,00**	**100**	**79,38**	**118**	**22.348.150,00**	**655,56**	**0**	
	701.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-	Laporan		0	12	28.151.940	12	14.920.300	0	0	0	0					0	22.348.150,00	100	79,38	12	22.348.150,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	100	79,38					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Tinggi		1	1		
																				Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	100	79,38					
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Tinggi					
6	**701**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yang termonitoring**	**%**	**100**	**0**	**100**	**115.208.755**	**100**	**167.428.576**	**25**	**13.656.000**	**25**	**19.049.000**					**100**	**113.051.560,00**	**100**	**98,13**	**125**	**113.051.560,00**	**125**	**0**	**Kecamatan Ngadirojo**
	701.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah desa yang termonitoring**	**Desa**	**18**	**0**	**18**	**115.208.755**	**18**	**167.428.576**	**5**	**13.656.000**	**5**	**19.049.000**					**18**	**113.051.560,00**	**100**	**98,13**	**118**	**113.051.560,00**	**655,56**	**0**	
	701.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen		0	12	35.756.220	12	35.272.852	3	8.694.000	3	0					6	34.865.300,00	100	97,51	12	34.865.300,00	0	0	
	701.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen		0	12	36.799.620	12	36.031.968	3	3.042.000	3	0					6	36.549.460,00	100	99,32	12	36.549.460,00	0	0	
	701.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan		0	12	42.652.915	12	96.123.756	3	1.920.000	3	19.049.000					6	41.636.800,00	100	97,62	12	41.636.800,00	0	0	
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	100	98,15					F
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		3	3		
																				Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	100	98,13					
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
																				Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)	99,4	91,02					
																				Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
																				Total			**3.188.546.973,00**		**3.055.744.991,00**		
																				Persentase Realisasi Anggaran					**95,84%**		
																				Predikat					**Sangat Tinggi**		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran kegiatan dan Adanya konsistensi dalam perencanaan sampai pada pelaksanaan program dan kegiatan

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Adanya revisi/penambahan/pergeseran anggaran antar belanja maupun antar kegiatan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Mengoptimalkan program/kegiatan serta rincian belanja yang sudah ada untuk mengakomodir kebutuhan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Diperlukan perencanaan yang lebih detail dan cermat serta mengevaluasi program/kegiatan ditahun sebelumnya serta tetap konsisten dalam pelaksanaan Renja ditahun berikutnya

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun Kinerja Kantor Kecamatan Ngadirojo berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK (Norma Standart Prosedur dan Kreteria) dan SPM ,maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan No.156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi,Serta Tata Kerja Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan, yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan .

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI

1. Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Wilayah Kecamatan Ngadirojo terdiri dari:
   1. Desa Sidomulyo
   2. Desa Hadiwarno
   3. Desa Hadiluwih
   4. Desa Tanjungpuro
   5. Desa Pagerejo
   6. Desa Wiyoro
   7. Desa Ngadirojo
   8. Desa Bogoharjo
   9. Desa Cokrokembang
   10. Desa Bodag
   11. Desa Tanjunglor
   12. Desa Nogosari
   13. Desa Cangkring
   14. Desa Wonoadi Kulon
   15. Desa Wonoadi Wetan
   16. Desa Wonokarto
   17. DesaWonosobo
   18. DesaWonoasri
3. Kecamatan mempunyai tugas Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, serta Pemberdayaan Masyarakat Desa dan/atauKelurahan
4. Kecamatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
   a) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai peraturan perundang undangan ;
   b) Pengoordinasian kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
   c) Pengoordinasian upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
   d) Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
   e) Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
   f) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan Oleh Organisasi Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
   g) Pembinan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatanDesa dan/atau

Kelurahan;

h) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;

i) pelangsanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan.

5. ***Selain melaksanakan tugas , Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten;***

6. ***Pelimpahan kewenangan Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.***

SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Sekretariat;
2. Seksi Pelayanan Umum;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat;
5. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban;

SEKRETARIAT

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;

b. Pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;

c. Pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan.

d. Pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan;

e. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kearsipan di lingkungan kecamatan;

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat kecamatan, terdiri dari :

a. Sub Bagian Program, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan ;

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

Sub Bagian Program,Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan mempunyai tugas:

a. Melakukan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
b. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala;
c. Melakukan pengelolaan data;
d. Melakukan penyusunan laporan kinerja;
e. Mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan keuangan, meliputi : penyiapan dan pengelolaan admijistrasi keuangan;
f. Mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan urusan akutansi dan pelapoan keuangan;
g. Mengelola bahan tanggapan pemeriksaan; dan
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

a. Menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran;
b. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan rumah tangga;

c. Menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan perlengkapan dan barang milik Daerah;
d. Menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
e. Menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kehumasan dan protokol;
f. Menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kepegawaian;
g. Memfasilitasi pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara; dan
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI PELAYANAN UMUM

Uraian Tugas Seksi Pelayanan Umum sebagai berikut:

a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan umum;
b. Mengumpulkan, mengolah dan menyusun rancangan kebijakan teknis dan data sesuai bahan pelayanan umum, baik tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa/ Kelurahan;
c. Menyajikan data penyelenggaraan pelayanan umum, baik Tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa/ Kelurahan;
d. Menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan, administrasi kependudukan, administrasi pertanahan dan pelayanan umum lain;
e. Memfasilitasi percepatan pencapaiaan standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
f. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instnasi fertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
g. Melakukan koordinasi dengan ihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelaanan umum;
h. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya, serta meregistrasi urusan yang dilimpahkan kepada camat yang bukan menjadi kewenangannya;
i. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelaahan kepada masayarakat di wilayah kecamatan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan; dan
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI PEMERINTAHAN

Uraian Tugas Seksi Pemerintahan sebagai berikut:

a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
b. Melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instnsi fertikal;
c. Melaksanakan fasilitasi tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaragaan kegiatan pemerintahan;
e. Memfasilitasi pengurusan administrasi pertahanan di wilayah kecamatan;
f. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan pajak bumi dan bangunan;
g. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan umum;
h. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;

i. Memfasilitasi pelaksanaan batas wilayah Kecamatan dan kerja sama antar kecamatan

j. Memfasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa;

k. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa fan peraturan kepala desa;

l. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;

m. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa;

n. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;

o. Memfasilitasi pelaksnaan pemilihan kepala desa

p. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi dan permusyawaratan desa;

q. Menyusun rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;

r. Memfasilitasi singkrnisasi pernecanaan pembangunjan daerah dengan pembangunan desa;

s. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang menjadi kewenangannya

t. Melaporkan pelaksanaan pemerintahan di wilayah kecamatan kepada Camat melalui Sekretaris kecamatan; dan

u. Melaksanakan tugas lain yang diberikanu oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

SEKSI SOSIAL KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Uraian Tugas Seksi Sosial sebagai berikut:

a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan sosial, ketentraman dana ketertiban;

b. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan;

c. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitas dan pembinaan terhadap penyandang masala kesejahteraan sosial;

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat

e. Menyiapkan bahan program dan pembinaan kehidupan keagamaan, Pendidikan dan kebudayaan, Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;

f. Memfasilitasi penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum;

g. Menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan Peraturan Perundungan-Undangan;

h. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi periziznan;

i. Memfasilitasi kegiatan penanggulangan bencana alam;

j. Menyusun evaluasi dan laporan tentang sosial, ketentraman dan ketertiban;

k. Melaksanakan urusan yang dilimpahakan kepada Camat yang menjadi kewenangannya

l. Melaporkan pelaksanaan kegiatan sosial, ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Camat mealui Sektretaris Kecamatan; dan

m. Melaksakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Camat.

SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Uraian Tugas Seksi Pemberdayaan dan Perekonomian sebagai berikut:

a. Menyusun rencana operasional dan program kegitan penyelenggaraan pembangunan dan pemberdaya masyarakat

b. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

c. Memfasilitasi kerja sama antar Desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;

d. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;

e. Mengoordinir pendampingan Desa di wilayahnya;

f. Mengoordinir pelaksanaan pembangunan Kawasan pedesaan di wilayah kecamatan;

g. Mengoordinir kegiatan pemberdayaan Desa;

h. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa;

i. Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan Kawasan perdesaan;

j. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban Lembaga kemasyarakatan;

k. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;

l. Melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;

m. Meningkatkan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;

n. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan Desa dan / atau Kelurahan

o. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan/atau Kelurahan;

p. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Desa dan/ atau Kelurahan;

q. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Desa dan/ atau Kelurahan ;

r. Melaksanakan evaluasi Desa dan/ atau Kelurahan ;

s. Meksanakan pemberdyaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan;

t. Menyelenggarakan lembaga kemasyarakatan;

u. Meningkatkan kapasitas lemba ga kemasyarakatan;

v. Memfasilitasi sarana dan prasarana lembaga kemusyawarat;

w. Memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakar;

x. Memfasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna dan pengelolaan sumber daya alam

y. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang menjadi kewenangnnya;

z. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan

å. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

(1) Pada masing-masing unit kerja di Lingkungan Kecamatan dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(4) Kelompok jabatan fungsional dapat dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.

(5) Jumlah tenaga fungsional ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Bagian ini berisikan uraian mengenai :

Seiring dengan perkembangan pembangunan saat ini ruang lingkup dan capaian tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah serta dampak terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi kepala daerah yang dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka analisis terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah dengan kondisi lingkungan strategis dapat dijabarkan dengan pendekatan analisa kekuatan dan kelemahan yang meliputi kekuatan (strenghts) dan kelemahan (weaknees), serta lingkungan eksternal dimana peluang (opportunity) dan ancaman (threat) Yang berpengaruh terhadap kinerja Kecamatan Ngadirojo. Adapun tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan Perangkat Daerah serta isu- isu berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program kegiatan tahun yang direncanakan adalah capaian kinerja program kegiatan dengan melihat sejauh mana masukan, hasil dan dampak dari program kegiatan tersebut.

Kecamatan Ngadirojo sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh satuan Perangkat Daerah lain dilingkup Kabupaten Pacitan. Kecamatan Ngadirojo masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa hambatan, antara lain : (1) Prasarana dan Sarana yang tersedia kurang lengkap dan memadai; (2) Sistem kerja yang belum optimal; (3) Keterbatasan ketrampilan petugas; (4) Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan.

Melaksanakan Perencanaan dan pelaksanaan Partisipatif :

1. Melaksanakan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif
2. Lebih Meningkatkan Profesionalisme Kinerja Aparatur Kecamatan dan Desa
3. Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor Dan Lintas Program
4. Meningkatkan Mutu Pelayanan Prima kepada Masyarakat
5. Peningkatan Sarana dan prasarana Kecamatan dan Desa.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ngadirojo ditentukan, isu- isu strategis yaitu sebagai berikut :

(1). Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Pacitan kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada diwilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka camat tetap mendasar pada asas kepatutan dan peraturan perundangundangan yang berlaku, memiliki posisi kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah , potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pacitan; (2). Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan instruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi Masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan Company / Coorperate Social Resposipilioty (CSR) , maka kecamatan harus benar- benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. (3). Meningkatnya kualitas pelayanan secara prima adalah faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu mengoptimalkan kualitas pelayanan publik yang senantiasa dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam, sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang akan mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pelayanan di daerah Kecamatan Ngadirojo. Harapan dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat. (4). Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur, Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam peningkatan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur. (5). Arah Kebijakan mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi dan motivasi yang mantap di bidang ekonomi pembangunan dan gender, Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Aset Pertanahan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan good govermance dan akuntabilitas publik. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi kecamatan Ngadirojo dalam kurun waktu tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalisasikan pengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan
2. Mengoptimalisasikan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan Telaah terhadap kebijakan Kabupaten Pacitan, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pacitan, di mana secara teknokratis prioritas Kabupaten Pacitan telah mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa Timur Sebagai modal dasar bagi perwujudan visi dan misi Kecamatan Ngadirojo dalam mendukung visi dan misi Kabupaten Pacitan adalah letak geografis Kecamatan Ngadirojo yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RT/RW) Kabupaten Pacitan baik dan sisi ekonomi, industri, jasa dan pariwisata

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PERANGKAT DAERAH

Tujuan Renja PERANGKAT DAERAH Kecamatan Ngadirojo adalah terselenggaranya tata kelola di kecamatan Ngadirojo yang baik. Dengan sasaran meningkatnya tata kelola Kecamatan Ngadirojo yang transparan dan akuntabel. Dengan tujuan dan sasaran Operasional Perangkat Daerah tersebut perangkat daerah memiliki indikator kinerja :

1. Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional Perangkat Daerah dengan program prioritas pembangunan program pelayanan administrasi perkantoran;

2. Tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja sesuai standar daerah dengan program prioritas pembangunan peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Tingkat disiplin aparatur dengan program prioritas pembangunan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

3.3 Program dan Kegiatan

Perangkat Daerah Kecamatan Ngadirojo mempunyai 6 Program, 12 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan yaitu :

1	2	3	4
No	**Program**	**Kegiatan**	**Sub Kegiatan**
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPERANGKAT DAERAH
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
			.
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1	2	3	4

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daera	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
1	2	3	4

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
3.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHA**		
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
6.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
1	2	3	4

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

a. Faktor- faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

diantaranya terkait dengan :

1. Pencapaian Visi misi kepala daerah
2. Pencapaian SDGs
3. Pengentasan kemiskinan
4. Pencapaian NSPK dan SPM
5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah
6. Pengembangan daerah terisolir

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Jumlah program dan jumlah kegiatan Kecamatan Ngadirojo mempunyai 6 program, 12 kegiatan dan 23 Sub Kegiatan.

Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan tersebut menyebar di semua Seksi .

Total kebutuhan dana/ pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

Total Pagu anggaran tahun 2025 Perubahan Rp 3.124.459.308,00

c. Jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal maka dilaksanakan Renja perubahan.

d. RKPD baik jenis program / kegiatan , pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025 ini menjadi kebutuhan nyata bagi Pemerintah Kecamatan Ngadirojo dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang pada gilirannya akan melibatkan semua pihak yang terkait.

Dalam rangka penggerakan berbagai langkah aksi dan sumber daya yang dibutuhkan dalam kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan yang sesuai dengan bidangnya masing-masing secara efektif dan efisien.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Ngadirojo memiliki arti penting sebagai penyelenggaraan otonomi daerah dan peningkatan sumber daya manusia sehingga tujuan pembangunan tahun 2025 di Kecamatan Ngadirojo dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Kecamatan Ngadirojo ini terdapat banyak kekurangan dan untuk itu kami mengharapkan masukan, koordinasi dan kerjasama yang optimal dari berbagai pihak untuk perbaikan di dalam penyusunannya.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Ngadirojo Tahun 2025 ini dibuat, semoga bermanfaat dan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

CAMAT NGADIROJO

NANANG HARDWIONO, S.Sos.M.Si
Pembina Tk I
NIP 19720520 199203 1 010

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN NGADIROJO KAB. PACITAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN NGADIROJO							**2.785.566.203,00**	**3.321.366.203,00**	**3.124.459.308,00**	**338.893.105,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.785.566.203,00**	**3.321.366.203,00**	**3.124.459.308,00**	**338.893.105,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.785.566.203,00**	**3.321.366.203,00**	**3.124.459.308,00**	**338.893.105,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.371.034.802,00**	**2.654.783.919,00**	**2.550.517.366,00**	**-2.371.034.802,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	18.723.423,00	29.163.423,00	8.653.423,00	-10.070.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				19 Dokumen	19 Dokumen	17.554.827,00	27.994.827,00	8.144.827,00	-9.410.000,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	1.168.596,00	1.168.596,00	508.596,00	-660.000,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.985.298.209,00	1.946.611.926,00	1.870.397.414,40	-114.900.794,60			-	- -	-		0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.961.392.105,00	1.922.705.822,00	1.859.762.909,00	-101.629.196,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				47 Laporan	47 Laporan	21.239.920,00	21.239.920,00	9.528.321,40	-11.711.598,60	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	12 Dokumen	2.666.184,00	2.666.184,00	1.106.184,00	-1.560.000,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	24.994.200,00	160.337.000,00	160.337.000,00	135.342.800,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	24.994.200,00	160.337.000,00	160.337.000,00	135.342.800,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN NGADIROJO

	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	57.136.900,00	40.036.900,00	28.991.700,00	-28.145.200,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	16.549.400,00	16.549.400,00	8.855.100,00	-7.694.300,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	11.809.700,00	11.809.700,00	11.809.700,00	0,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	28.777.800,00	11.677.800,00	8.326.900,00	-20.450.900,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	29.561.300,00	118.681.500,00	114.172.558,60	84.611.258,60			-	- -	-		0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	29.561.300,00	118.681.500,00	114.172.558,60	84.611.258,60	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	157.461.270,00	193.181.670,00	201.193.770,00	43.732.500,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	21.596.070,00	21.596.070,00	29.608.170,00	8.012.100,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	29.400.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	-21.700.000,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	106.465.200,00	163.885.600,00	163.885.600,00	57.420.400,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	97.859.500,00	166.771.500,00	166.771.500,00	68.912.000,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	64.266.700,00	133.178.700,00	133.178.700,00	68.912.000,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	33.592.800,00	33.592.800,00	33.592.800,00	0,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN NGADIROJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**31.817.760,00**	**31.317.760,00**	**22.125.260,00**	**-31.817.760,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	15.515.752,00	15.515.752,00	15.515.752,00	0,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	12 Laporan	15.515.752,00	15.515.752,00	15.515.752,00	0,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	16.302.008,00	15.802.008,00	6.609.508,00	-9.692.500,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	16.302.008,00	15.802.008,00	6.609.508,00	-9.692.500,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN NGADIROJO
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**116.677.513,00**	**249.398.496,00**	**239.985.296,00**	**-116.677.513,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	116.677.513,00	249.398.496,00	239.985.296,00	123.307.783,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	33.293.484,00	35.369.884,00	24.929.884,00	-8.363.600,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	83.384.029,00	214.028.612,00	215.055.412,00	131.671.383,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN NGADIROJO
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**98.987.252,00**	**203.517.152,00**	**182.472.896,00**	**-98.987.252,00**							**0,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	98.987.252,00	203.517.152,00	182.472.896,00	83.485.644,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	98.987.252,00	203.517.152,00	182.472.896,00	83.485.644,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN NGADIROJO

5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**34.120.300,00**	**14.920.300,00**	**6.075.200,00**	**-34.120.300,00**							**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	34.120.300,00	14.920.300,00	6.075.200,00	-28.045.100,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				12 Laporan	12 Laporan	34.120.300,00	14.920.300,00	6.075.200,00	-28.045.100,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN NGADIROJO
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**132.928.576,00**	**167.428.576,00**	**123.283.290,00**	**-132.928.576,00**							**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	132.928.576,00	167.428.576,00	123.283.290,00	-9.645.286,00			-	- -	-		0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	47.272.852,00	35.272.852,00	28.648.152,00	-18.624.700,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	36.031.968,00	36.031.968,00	9.931.968,00	-26.100.000,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				12 Laporan	12 Laporan	49.623.756,00	96.123.756,00	84.703.170,00	35.079.414,00	Kab. Pacitan, Ngadirojo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN NGADIROJO
	J U M L A H								**2.785.566.203,00**	**3.321.366.203,00**	**3.124.459.308,00**	**338.893.105,00**							**0,00**	

RENCANA KERJA
(RENJA)-PERUBAHAN
TAHUN 2025

KECAMATAN SUDIMORO
KABUPATEN PACITAN
JL. RAYA SUDIMORO No 22 SUDIMORO

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayat-Nya sehingga Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perubahan PD Kecamatan Sudimoro Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Dokumen Renja Perubahan ini disusun untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Permendagri nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam laporan ini, belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan dimasa yang akan datang.

Sudimoro, 21 Juli 2025

CAMAT SUDIMORO

M.TAUFIK EFFENDI,S.STP,M.Si

Pembina tingkat 1

NIP. 19830416 200212 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

BAB. I PENDAHULUAN..... 3

1.1 Latar Belakang 3

1.2 Landasan Hukum..... 4

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB.II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 8

2.1 Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan apaian Renstra PD..... 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD 11

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi P 22

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 23

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarak 24

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 27

3.1 Telaahan,sasaran,Program dan Kegiatan 27

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD 27

3.3 Program dan Kegiatan 27

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT 30
4.1 Rencana Kerja dan Kegiatan 30
4.2 Indikator Kinerja 30
4.3 Kelompok sasaran 30
4.4 Pendanaan Indikatif 30
BAB V PENUTUP..... 31

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif sehingga diharapkan akan sesuai dengan keadaan, harapan dan keinginan serta kebutuhan masyarakat Indonesia. Sistem ini memakai tata cara yang dapat mengakomodir semua *Stake holder* menuju pada satu tujuan bersama. Dengan demikian perencanaan pembangunan yang telah disusun akan diperlukan sebagai panduan (guide line) berbagai pihak yang berperan untuk menyatukan gerak langkah mencapai tujuan yang ditetapkan. Penyusunan perencanaan pembangunan dari aspek waktu meliputi pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Pacitan Tahun 2005 – 2025 yang telah ditetapkan adalah sebagai dokumen induk perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan pendekatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata daerah, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di daerah. Visi pembangunan daerah dimaksud harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang diinginkan.

Berdasarkan amanat RPJP Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005 – 2025 maka arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan penetapan program pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.

Secara garis besar bahwa RPJMD memuat tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Organisasi Perangkat daerah, Lintas Organisasi Perangkat Daerah dan program kewilayahan. Maka RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021- 2026 memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan di Kabupaten Pacitan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Sudimoro Tahun 2024 dilakukan melalui proses inventarisasi, penajaman, penyelarasan, klasifikasi, sinkronisasi dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam di tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan Desa. Proses ini diharapkan menghasilkan perencanaan yang partisipatif dan aspiratif (battom up planing) , komprehensif,

mengakomodir berbagai kepentingan dari para pihak, berbagai sektor dan berbagai tujuan yang akhirnya bermuara pada satu tujuan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian Renja Perangkat Daerah merupakan acuan berbagai pihak dalam pelaksanaan pembangunan diberbagai aspek yang diterjemahkan dalam berbagai program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan mengacu pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi baik nasional maupun pemerintah daerah.

Kecamatan selaku Perangkat Daerah kewilayahan mempunyai kewenangan atributif dan kewenangan delegatif. Kewenangan atributif melekat sebagai unsur wilayah penyelenggara urusan umum pemerintahan, sedangkan kewenangan delegatif karena adanya pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat. Selain itu karena posisi kewilayahannya kecamatan juga sebagai penghubung atau menjembatani desa dan kabupaten.

Rencana Kerja Kecamatan Sudimoro disusun sebagai langkah-langkah pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujud suatu pelayanan yang baik, handal dan prima guna memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi-fungsi yang diemban oleh Kecamatan Sudimoro selaku Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka Rencana Kerja Kecamatan perlu disusun dengan baik dan optimal, perlu dukungan Sumber Daya Manuaia yang memadai, Anggaran yang cukup dalam rangka penguatan kelembagaan kecamatan.

I.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renja PD Kecamatan Sudimoro tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2011;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019- 2024
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Sudimoro adalah sebagai arah dan pedoman bagi Aparatur Kecamatan Sudimoro dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan dengan rasa tanggung jawab, disiplin, dan loyalitas yang tinggi, terukur, serta lebih proaktif, visioner dan profesional sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu Rencana Kerja Kecamatan Sudimoro dapat dipergunakan dalam rangka sinergitas oleh Pemerintah Desa serta sebagai acuan dalam sinkronisasi kegiatan di masing-masing desa sesuai kewenangannya.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Sudimoro adalah sebagai kerangka acuan dan pedoman kerja bagi seluruh Aparatur Kecamatan Sudimoro yang merupakan unsur pelaksana kegiatan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Selain itu hal penting disusunnya renja PD adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dengan adanya Rencana Kerja ini mendorong timbulnya etos kerja, sikap dan budaya kerja aparatur pemerintah daerah yang handal sesuai dengan tuntutan zaman yaitu reformasi birokrasi yang mengedepankan karakter Aparatur Sipil Negara (ASN).

I.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD

2.2. Analisis Kinerja pelayanan PD

2.3. Isu-isu Penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

2.5 Penelaah usulan program dan kegiatan masyarakat .

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DAN

4.1 Rencana Kerja dan Kegiatan

4.2 Indikator Kinerja

4.3 Kelompok sasaran

4.4 Pendanaan Indikatif

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SEMESTER I

2.1 Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Semester 1

Renja Perubahan Kecamatan Sudimoro tahun 2025 merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Sudimoro, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pacitan 2021-2026.

Sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaanya. Oleh karena itu Renja Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan tahun berjalan 2024 juga harus dilakukan evaluasi. Adapun evaluasi terhadap Renja Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan Tahun 2024.

Program ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2025 (sampai Triwulan II) dan perkiraan capaian tahun berjalan atau tahun 2025 dengan mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun 2025, ada 6 (enam) program sebagai berikut :

LAPORAN EVALUASI APBD KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025
KECAMATAN SUDIMORO
PERIODE : JUNI

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
701	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**Nilai**	**74.87**	**1.748.087.043,00**	**74.10**	**859.044.733,00**	**98.97 %**	**49.14 %**
701	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD**	**Dokumen**	**24.00**	**3.547.000,00**	**10.00**	**2.047.000,00**	**41.67 %**	**57.71 %**
701	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15.00	2.047.000,00	8.00	2.047.000,00	42.11 %	100%
			0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	9.00	1.500.000,00	2.00	0,00	40%	0%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											41,06	50,00
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
701	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Keuangan PD**	**Dokumen**	**59.00**	**1.476.070.943,00**	**24.00**	**738.548.165,00**	**40.68 %**	**50.03 %**
701	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	12.00	1.468.864.543,00	10.00	738.129.165,00	90.91 %	50.25 %
			0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	2.00	2.125.500,00	1.00	0,00	50%	0%
			0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2.00	1.998.900,00	0.00	0,00	0%	0%
			0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	27.00	3.082.000,00	10.00	419.000,00	37.04 %	13.6 %
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											44,49	15,96
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rend	Sangat Rend

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
											ah	ah
701	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase pemenuhan layanan administrasi umum**	**%**	**100.00**	**103.923.500,00**	**100.00**	**43.954.100,00**	**100%**	**42.29%**
701	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8.00	56.759.500,00	4.00	19.689.600,00	50%	34.69%
			0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	25.000.000,00	1.00	5.000.000,00	100%	20%
			0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2.164.000,00	1.00	1.624.500,00	50%	75.07%
			0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	20.000.000,00	6.00	17.640.000,00	50%	88.2%
										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	62,50	54,49
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Rendah	Rendah
701	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase pemenuhan jasa penunjang**	**%**	**100.00**	**144.599.000,00**	**100.00**	**66.170.068,00**	**100%**	**45.76%**
701	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	25.083.000,00	6.00	16.990.068,00	50%	67.74%
			0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	119.516.000,00	6.00	49.180.000,00	50%	41.15%
										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	50,00	54,45
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Rendah	Rendah
701	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**%**	**100.00**	**19.946.600,00**	**100.00**	**8.325.400,00**	**100%**	**41.74%**
701	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	13	19.946.600,00	3.00	8.325.400,00	23.08%	41.74%
										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	23,08	41,74
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sang	Sang

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
											at Rendah	at Rendah
701	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan**	**%**	**100.00**	**110.000.959,00**	**0.00**	**27.077.900,00**	**0%**	**24.62%**
701	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Pemenuhan Jumlah OPD/Instansi vertikal yang dikoordinasikan dalam satu tahun**	**Bulan**	**12.00**	**30.000.959,00**	**3.00**	**12.564.000,00**	**25%**	**41.88%**
701	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	12	30.000.959,00	4.00	12.564.000,00	33.33%	41.88%
										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	33,33	41,88
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
701	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Pemenuhan Layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan**	**Bulan**	**12.00**	**80.000.000,00**	**3.00**	**14.513.900,00**	**25%**	**18.14%**
701	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	80.000.000,00	5.00	14.513.900,00	41.67%	18.14%
										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	41,67	18,14
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
701	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan**	**%**	**100.00**	**85.500.000,00**	**0.00**	**34.378.300,00**	**0%**	**40.21%**
701	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Desa yang difasilitasi**	**Desa**	**10.00**	**85.500.000,00**	**0.00**	**34.378.300,00**	**0%**	**40.21%**
70	0	2.0	000	Peningkatan	Jumlah Laporan	Laporan	12	85.500.000,0	4.00	34.378.300,	33.33	40.21

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	3	1	3	Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			0		00	%	%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											33,33	40,21
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											0,00	40,21
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
701	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan**	**%**	**100.00**	**62.473.000,00**	**0.00**	**13.052.800,00**	**0%**	**20.89%**
701	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Bulan**	**12.00**	**62.473.000,00**	**4.00**	**13.052.800,00**	**33.33%**	**20.89%**
701	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	12	62.473.000,00	3.00	13.052.800,00	25%	20.89%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											25,00	20,89
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											33,33	20,89
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
701	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan**	**%**	**100.00**	**49.000.000,00**	**0.00**	**11.561.600,00**	**0%**	**23.6%**
701	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum**	**Desa**	**10.00**	**49.000.000,00**	**0.00**	**11.561.600,00**	**0%**	**23.6%**
701	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	12	49.000.000,00	3.00	11.561.600,00	25%	23.6%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian	
							Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
(1)				(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											25,00	23,60
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											0,00	23,60
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
701	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yang Termonitoring**	**%**	**100.00**	**104.985.500,00**	**0.00**	**10.340.200,00**	**0%**	**9.85 %**
701	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah desa yang termonitoring**	**Desa**	**10.00**	**104.985.500,00**	**0.00**	**10.340.200,00**	**0%**	**9.85 %**
701	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	30	65.000.000,00	10.00	2.337.000,00	33.33 %	3.6%
			0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		12	39.985.500,00	3.00	8.003.200,00	25%	20.02 %
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											29,17	11,81
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											0,00	9,85
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja seluruh program(%)											16,50	28,05
Predikat kinerja seluruh program(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Total								**2.160.046.502,00**	**955.455.533,00**			
Persentase Realisasi Anggaran									**44.23%**			
Predikat									**Sangat Rendah**			

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sudimoro tahun 2025 berdasarkan program dan kegiatan ada 6 (Enam) Program yang terbagi menjadi 11 (Sebelas) kegiatan , sebagaimana dalam lampiran berikut :

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD

Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Sudimoro

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
Kecamatan Sudimoro																			
7					UNSUR KEWILAYAHAN				Rp. 2.147.281.502	Rp. 12.765.000			Rp. 2.160.046.502	Rp. 2.079.594.227	Rp. 12.765.000			Rp. 2.092.359.227	Rp. 2.431.753.000,00
7	01				KECAMATAN				Rp. 2.147.281.502	Rp. 12.765.000			Rp. 2.160.046.502	Rp. 2.079.594.227	Rp. 12.765.000			Rp. 2.092.359.227	Rp. 2.431.753.000,00
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 1.735.322.043	Rp. 12.765.000			Rp. 1.748.087.043	Rp. 1.647.234.768	Rp. 12.765.000			Rp. 1.659.999.768	Rp. 1.747.000.000,00
7	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 3.547.000				Rp. 3.547.000	Rp. 3.547.000				Rp. 3.547.000	Rp. 5.000.000,00
7	01	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa		Rp. 2.047.000				Rp. 2.047.000	Rp. 2.047.000				Rp. 2.047.000	Rp. 3.000.000,00
7	01	01	2,01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa		Rp. 1.500.000				Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000				Rp. 1.500.000	Rp. 2.000.000,00
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 1.476.070.943				Rp. 1.476.070.943	Rp. 1.412.838.668				Rp. 1.412.838.668	Rp. 1.368.500.000,00
7	01	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa		Rp. 1.468.864.543				Rp. 1.468.864.543	Rp. 1.407.432.268				Rp. 1.407.432.268	Rp. 1.360.000.000,00
7	01	01	2,02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa		Rp. 2.125.500				Rp. 2.125.500	Rp. 2.125.500				Rp. 2.125.500	Rp. 2.500.000,00
7	01	01	2,02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa		Rp. 1.998.900				Rp. 1.998.900	Rp. 1.998.900				Rp. 1.998.900	Rp. 2.500.000,00
7	01	01	2,02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa		Rp. 3.082.000				Rp. 3.082.000	Rp. 1.282.000				Rp. 1.282.000	Rp. 3.500.000,00
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 91.158.500	Rp. 12.765.000			Rp. 103.923.500	Rp. 86.403.500	Rp. 12.765.000			Rp. 99.168.500	Rp. 193.500.000,00
7	01	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Dana Alokasi Umum (DAU)	- Kab. Pacitan, Tegalombo, Semua Kel/Desa		Rp. 43.994.500	Rp. 12.765.000			Rp. 56.759.500	Rp. 40.439.500	Rp. 12.765.000			Rp. 53.204.500	Rp. 120.000.000,00
7	01	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa		Rp. 25.000.000				Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000				Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000,00
7	01	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa		Rp. 2.164.000				Rp. 2.164.000	Rp. 2.164.000				Rp. 2.164.000	Rp. 3.500.000,00
7	01	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa		Rp. 20.000.000				Rp. 20.000.000	Rp. 18.800.000				Rp. 18.800.000	Rp. 45.000.000,00
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 144.599.000				Rp. 144.599.000	Rp. 124.499.000				Rp. 124.499.000	Rp. 130.000.000,00
7	01	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa		Rp. 25.083.000				Rp. 25.083.000	Rp. 25.083.000				Rp. 25.083.000	Rp. 30.000.000,00
7	01	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa		Rp. 119.516.000				Rp. 119.516.000	Rp. 99.416.000				Rp. 99.416.000	Rp. 100.000.000,00
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 19.946.600				Rp. 19.946.600	Rp. 19.946.600				Rp. 19.946.600	Rp. 50.000.000,00
7	01	01	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa		Rp. 19.946.600				Rp. 19.946.600	Rp. 19.946.600				Rp. 19.946.600	Rp. 50.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								Tahun - 1	Tahun N										Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Rp. 110.000.959				Rp. 110.000.959	Rp. 75.500.959				Rp. 75.500.959	Rp. 119.753.000,00
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				Rp. 30.000.959				Rp. 30.000.959	Rp. 15.000.959				Rp. 15.000.959	Rp. 66.420.000,00
7	01	02	2,01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa		Rp. 30.000.959				Rp. 30.000.959	Rp. 15.000.959				Rp. 15.000.959	Rp. 66.420.000,00
7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				Rp. 80.000.000				Rp. 80.000.000	Rp. 60.500.000				Rp. 60.500.000	Rp. 53.333.000,00
7	01	02	2,02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa		Rp. 80.000.000				Rp. 80.000.000	Rp. 60.500.000				Rp. 60.500.000	Rp. 53.333.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Rp. 85.500.000				Rp. 85.500.000	Rp. 202.300.000				Rp. 202.300.000	Rp. 270.000.000,00
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				Rp. 85.500.000				Rp. 85.500.000	Rp. 202.300.000				Rp. 202.300.000	Rp. 270.000.000,00
7	01	03	2,01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa		Rp. 85.500.000				Rp. 85.500.000	Rp. 202.300.000				Rp. 202.300.000	Rp. 270.000.000,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Rp. 62.473.000				Rp. 62.473.000	Rp. 35.473.000				Rp. 35.473.000	Rp. 145.000.000,00
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				Rp. 62.473.000				Rp. 62.473.000	Rp. 35.473.000				Rp. 35.473.000	Rp. 145.000.000,00
7	01	04	2,01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa		Rp. 62.473.000				Rp. 62.473.000	Rp. 35.473.000				Rp. 35.473.000	Rp. 145.000.000,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				Rp. 49.000.000				Rp. 49.000.000	Rp. 32.600.000				Rp. 32.600.000	Rp. 50.000.000,00
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				Rp. 49.000.000				Rp. 49.000.000	Rp. 32.600.000				Rp. 32.600.000	Rp. 50.000.000,00
7	01	05	2,01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa		Rp. 49.000.000				Rp. 49.000.000	Rp. 32.600.000				Rp. 32.600.000	Rp. 50.000.000,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				Rp. 104.985.500				Rp. 104.985.500	Rp. 86.485.500				Rp. 86.485.500	Rp. 100.000.000,00
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				Rp. 104.985.500				Rp. 104.985.500	Rp. 86.485.500				Rp. 86.485.500	Rp. 100.000.000,00
7	01	06	2,01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa		Rp. 65.000.000				Rp. 65.000.000	Rp. 55.500.000				Rp. 55.500.000	Rp. 40.000.000,00
7	01	06	2,01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	- PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa		Rp. 39.985.500				Rp. 39.985.500	Rp. 30.985.500				Rp. 30.985.500	Rp. 60.000.000,00
							Jumlah		**Rp. 2.147.281.502**	**Rp. 12.765.000**			**Rp. 2.160.046.502**	**Rp. 2.079.594.227**	**Rp. 12.765.000**			**Rp. 2.092.359.227**	**Rp. 2.431.753.000,00**

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi targget kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
4. Impilkasi yang timbul terhadap target capain program Renstra Perangkat Daerah; dan
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dalam penyusunan rencana kerja melibatkan semua komponen Perangkat daerah agar perencanaan dan pengaggaran sesuai dengan tujuan dan indikator setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan OPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Adapun Kinerja Kantor Kecamatan Sudimoro berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK (Norma Standart Prosedur dan Kriteria) dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pacitan No. 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah, yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan Kabupaten Pacitan.

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI

Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan dipimpin oleh Camat. Kecamatan Sudimoro membawahi wilayah kerja sebagai berikut:

1. Desa Pagerkidul
2. Desa Pagerlor
3. Desa Sukorejo
4. Desa Sudimoro
5. Desa Ketanggung
6. Desa Klepu
7. Desa Sembowo
8. Desa Karangmulyo
9. Desa Gunungrejo
10. Desa Sumberejo

Kecamatan mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan. Kecamatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum;

b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
g. pembinan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
h. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
i. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Selain melaksanakan tugas camat, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten, Pelimpahan kewenangan Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari:

a. Sekretariat;
b. Seksi Pelayanan Umum;
c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Sosial;
e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian;
f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing organisasi di kecamatan adalah sebagai berikut :

- ***SEKRETARIS KECAMATAN***

Sekretariat Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan, serta program, evaluasi dan pelaporan kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan Kecamatan. Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
b. pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
c. pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan.
d. pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi di sekretariat kecamatan adalah sebagai berikut :

Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :

a. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan, dan keuangan mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan;
b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis;
c. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data;
d. menyiapkan bahan penyusunan laporan;
e. menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan laporan kinerja;
f. melaksanakan pengelolaan anggaran;
g. melaksanakan perbendaharaan dan gaji;
h. melaksanakan verifikasi dan akuntansi;
i. melaksanakan pelaporan keuangan; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

a. menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran;
b. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan rumah tangga;
c. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
d. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
e. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kehumasan dan protokol;
f. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kepegawaian; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- ***SEKSI PELAYANAN UMUM***

Seksi Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang pelayanan umum. Uraian Tugas sebagai berikut:

a. menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan umum;
b. mengumpulkan, mengolah dan menyusun rancangan kebijakan teknis dan data sesuai bahan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat Desa/ Kelurahan;
c. menyajikan data penyelenggaraan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat Desa/ Kelurahan;

d. menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, administrasi kependudukan, administrasi pertanahan dan pelayanan umum lain;
e. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
f. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- ***SEKSI PEMERINTAHAN***

Seksi Pemerintahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang Pemerintahan. Uraian Tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
b. Melaksanakan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;
c. Fasilitasi Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan;
e. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan;
f. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan pajak bumi dan bangunan;

g. Memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum;
h. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
i. Fasilitasi pelaksanaan batas wilayah kecamatan;
j. Melaksanakan urusan yang dilimpahakan kepada camat yang menjadi kewenangannya;
k. Fasilitasi Kerjasama antar kecamatan;
l. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
m. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
n. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
o. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
p. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
q. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
r. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
s. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
t. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa;
u. Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan;
v. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
w. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

x. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya;

y. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan

z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- ***SEKSI SOSIAL, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN***

Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang sosial, ketentraman dan ketertiban. Uraian Tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan sosial, ketentraman dan ketertiban;

b. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan;

c. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

d. Menyiapkan bahan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;

e. Menyiapkan bahan program dan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;

f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

g. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi perizinan;

h. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;

i. Menyusun evaluasi dan laporan tentang sosial, ketentraman dan ketertiban;

j. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya;

k. Melaporkan pelaksanaan kegiatan sosial, ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan

l. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Camat.

- ***SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT***

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang pembangunan dan pemberdayan masyarakat. Uraian Tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan Bina Pemerintahan Desa;

b. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif;

c. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga;

d. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

e. Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya;

f. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan;

g. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
h. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
i. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan;
j. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
k. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan;
l. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
m. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan;
n. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
o. Evaluasi Kelurahan;
p. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
q. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
r. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan;
s. Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan;
t. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
u. Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
v. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya;
w. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD

Seiring dengan perkembangan pembangunan saai ini ruang lingkup dan capaian tingkat kinerja pelayanan PD serta dampat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dalam rangka pencapaian Visi dan Misi kepala daerah yang dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka analisis terhadap capaian kinerja PD dengan kondisi lingkungan strategis dapat dijabarkan dengan pendekatan analisa kekuatan dan kelemahan yang meliputi kekuatan (strenghts) dan kelemahan (weaknees), serta lingkungan eksternal dimana peluang (oppourtunity) dan ancaman (threat) Yang berpengaruh tehadap kinerja Kecamatan Sudimoro . Adapun tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan PD serta isu- isu berupa rekomendasi dan catatan setrategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program kegiatan tahun yang direncanakan adalah capaian kinerja program kegiatan dengan melihat sejauh mana masukan , hasil dan dampak dari program kegiatan tersebut.

Kecamatan Sudimoro sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh satuan Perangkat Daerah lain dilingkup Kabupaten Pacitan . Kecamatan Sudimoro masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan , antara lain

: (1) Prasarana dan Sarana yang tersedia kurang lengkap dan memadai; (2) Sistem kerja yang belum optimal; (3) Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan.

Melaksanakan Perencanaan dan pelaksanaan Partisipatif;

1. Melaksanakan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif
2. Lebih Meningkatkan Profesionalisme Kinerja Aparatur Kecamatan dan Desa
3. Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor Dan Lintas Program
4. Meningkatkan Mutu Pelayanan Prima kepada Masyarakat
5. Peningkatan Sarana dan prasarana Kecamatan

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sudimoro ditentukan, isu- isu penting yaitu sebagai berikut;

(1). Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Pacitan kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada diwilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka camat tetap mendasar pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah , potensi wilayah, dan potensi

masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten pacitan;

(2). Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan ,terlebih pada pembangunan peningkatan instruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi Masyarakat.Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Coorperate Sosial Resposipilioty (CSR)* , maka kecamatan harus benar- benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat

(3). Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu PD di Pemerintah Kabupaten Pacitan yang menyelenggarakan pelayanan publik , maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasar pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat . Harapan dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah , menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.

(4). Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur , Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi ,serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting ,maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam peningkatan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

(5). Arah Kebijakan mengoptimalisasikan pola koordinasi, fasilitasi dan motivasi yang mantap di bidang ekonomi pembangunan dan gender, Pemerintahan, Kesejahteraan Masyarakat, Aset Pertanahan

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat

a). Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah

b). Program prioritas pembangunan daerah dan

c). Rencana Kerja, pendanaan dan prakiraan maju,yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS ,Rencana Kecamatan Sudimoro berdasarkan RKPD Kabupaten Pacitan sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja PD se Kabupaten Pacitan yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Sudimoro

Rencana awal prioritas pembangunan di Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan tahun 2021 merupakan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya,hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Sudimoro dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Pacitan adalah letak geografis Kecamatan Sudimoro yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RT/RW) Kabupaten Pacitan.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan program dan kegiatan masyarakat Kecamatan Sudimoro merupakan hasil dari Musrenbang tingkat desa yang merupakan forum musyawarah perencanaan tahunan di tingkat desa untuk membahas dan menyepakati usulan kegiatan pembangunan hasil musyawarah di tingkat dusun. Hasil dari musrenbang desa akan diusulkan di tingkat Kecamatan. Tujuan umum pelaksanaan kegiatan musrenbang desa yaitu mendorong partisipasi masyarakat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan di tingkat desa. Selain itu untuk meningkatkan dan memelihara budaya lokal terutama gotong royong, maka berdasarkan kegiatan masyarakat direncanakan adanya semenisasi yang hal lainnya akan dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat. Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- Menyepakati prioritas kebutuhan dan kegiatan yang termasuk urusan pembangunan yang menjadi wewenang Desa yang menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Desa.
- Prioritas kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh warga Desa yang dibiayai melalui dana swadaya masyarakat dan dikoordinasikan oleh lembaga di Desa setempat.
- Prioritas kegiatan Desa yang akan dilaksanakan Desa sendiri yang dibiayai melalui dana bantuan dari pemerintah daerah
- Prioritas kegiatan pembangunan Desa yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD kota atau APBD propinsi.
- Menyepakati Tim Delegasi Desa yang akan memaparkan persoalan yang ada di Desanya di forum musrenbang kecamatan.

- Kegiatan lainnya melalui semenisasi.
- Fasilitasi Kecamatan terhadap Hasil Musrenbang RKP-Desa dari 10 (sembilan) desa di wilayah Kecamatan Sudimoro tersebut kemudian dimusyawarahkan dalam Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan, untuk selanjutnya hasil dari Musrenbang tersebut diusulkan pada Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Menjelaskan tentang hasil penelaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi PD .

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Resntra PD .

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisikan penjelasan mengenai :

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, diantaranya terkait dengan ;
   1. Perencanaan visi dan misi kepala daerah
   2. Pencapaian SDGS ;
   3. Pengentasan Kemiskinan
   4. Pencapaian NSPK dan SPM
   5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
   - Jumlah program dan jumlah kegiatan
   - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu)
   - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang terinci menurut sumber pendanaannya .

c. Jika Rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD baik jenis program/kegiatan, pagi indikatif, maupun kombinasi keduannya .
d. Tabel Rencana program dan kegiatan sebagaimana Tabel 4.1 :

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUDIMORO KAB. PACITAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN SUDIMORO							**2.098.246.502,00**	**2.160.046.502,00**	**1.992.359.227,00**	**-105.887.275,00**							**2.431.753.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.098.246.502,00**	**2.160.046.502,00**	**1.992.359.227,00**	**-105.887.275,00**							**2.431.753.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**2.098.246.502,00**	**2.160.046.502,00**	**1.992.359.227,00**	**-105.887.275,00**							**2.431.753.000,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-				-	-	**1.766.787.043,00**	**1.748.087.043,00**	**1.676.599.768,00**	**-19.787.043,00**							**1.747.000.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	3.547.000,00	3.547.000,00	3.547.000,00	0,00			-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				15 Dokumen	15 Dokumen	2.047.000,00	2.047.000,00	2.047.000,00	0,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9 Laporan	9 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.000.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	1.519.270.943,00	1.476.070.943,00	1.412.838.668,00	-106.432.275,00			-	-	-		1.368.500.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.512.064.543,00	1.468.864.543,00	1.407.432.268,00	-104.632.275,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.360.000.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.125.500,00	2.125.500,00	2.125.500,00	0,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.500.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	4 Laporan	1.998.900,00	1.998.900,00	1.998.900,00	0,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.500.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				20 Laporan	20 Laporan	3.082.000,00	3.082.000,00	1.282.000,00	-1.800.000,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.500.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	103.923.500,00	103.923.500,00	99.168.500,00	-4.755.000,00			-	-	-		193.500.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	56.759.500,00	56.759.500,00	53.204.500,00	-3.555.000,00	Kab. Pacitan, Tegalombo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			120.000.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.164.000,00	2.164.000,00	2.164.000,00	0,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.500.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	18.800.000,00	-1.200.000,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			45.000.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	120.099.000,00	144.599.000,00	141.099.000,00	21.000.000,00			-	-	-		130.000.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	25.083.000,00	25.083.000,00	25.083.000,00	0,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	95.016.000,00	119.516.000,00	116.016.000,00	21.000.000,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	19.946.600,00	19.946.600,00	19.946.600,00	0,00			-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	15 Unit	19.946.600,00	19.946.600,00	19.946.600,00	0,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN SUDIMORO

2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	-				-	-	**70.000.959,00**	**110.000.959,00**	**75.500.959,00**	**49.752.041,00**							**119.753.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	30.000.959,00	30.000.959,00	15.000.959,00	-15.000.000,00			-	-	-		66.420.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	12 Laporan	30.000.959,00	30.000.959,00	15.000.959,00	-15.000.000,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			66.420.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	40.000.000,00	80.000.000,00	60.500.000,00	20.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		53.333.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	80.000.000,00	60.500.000,00	20.500.000,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		53.333.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
3,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-				-	-	**80.000.000,00**	**85.500.000,00**	**87.300.000,00**	**190.000.000,00**							**270.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	80.000.000,00	85.500.000,00	87.300.000,00	7.300.000,00			-	-	-		270.000.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00	85.500.000,00	87.300.000,00	7.300.000,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			270.000.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
4,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	-				-	-	**62.473.000,00**	**62.473.000,00**	**35.473.000,00**	**82.527.000,00**							**145.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	62.473.000,00	62.473.000,00	35.473.000,00	-27.000.000,00			-	-	-		145.000.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	62.473.000,00	62.473.000,00	35.473.000,00	-27.000.000,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			145.000.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
5,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	-				-	-	**49.000.000,00**	**49.000.000,00**	**31.000.000,00**	**1.000.000,00**							**50.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	49.000.000,00	49.000.000,00	31.000.000,00	-18.000.000,00			-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				12 Laporan	12 Laporan	49.000.000,00	49.000.000,00	31.000.000,00	-18.000.000,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
6,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	-				-	-	**69.985.500,00**	**104.985.500,00**	**86.485.500,00**	**30.014.500,00**							**100.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	69.985.500,00	104.985.500,00	86.485.500,00	16.500.000,00			-	-	-		100.000.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				30 Dokumen	30 Dokumen	30.000.000,00	65.000.000,00	55.500.000,00	25.500.000,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	39.985.500,00	39.985.500,00	30.985.500,00	-9.000.000,00	Kab. Pacitan, Sudimoro, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-			60.000.000,00	KECAMATAN SUDIMORO
	J U M L A H								**2.098.246.502,00**	**2.160.046.502,00**	**1.992.359.227,00**	**-105.887.275,00**							**2.431.753.000,00**	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 RENCANA KERJA DAN KEGIATAN

Keseluruhan Rencana Kerja dan kegiatan yang akan dikelola oleh Kecamatan Sudimoro selama 5 tahun dari tahun (2021 - 2026) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi misi Kabupaten Pacitan selama 5 tahun kedepan .

Renccana Kerja merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoodinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu .

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan rencana kerja tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari rencana kerja yang dilaksanakan oleh satua atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada satu tujuan, dengan kata lain renccana kerja perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya .

4.2 INDIKATOR KINERJA

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja pembangunan . Dengan berpedoman indikator kinerja maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan dan penyelesaiannya .

4.3 KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Sudimoro adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi/UPT dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan . Dan salah satu point pentingnya adalah menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dan transparasi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap system dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam perubahan Renstra Kecamatan Sudimoro tahun 2021 - 2026 .

4.4 PENDANAAN INDIKATIF

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sudimoro bersumber pada dana APBD Kabupaten Pacitan, namun bagi instansi lain seperti UPT Pertanian dan Peternakan,UPT TK/SD, UPT bisa mendapatkan dana dari APBD Propinsi maupun DAK dari instansi induknya .

BAB V PENUTUP

Catatan penting Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Sudimoro memuat gambaran umum dan prioritas pembangunan daerah, yang merupakan pedoman untuk menyusun rancangan anggaran kecamatan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasi dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan , merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah yang harus dioperasionalisasikan melalui Rencana Kerja Perubahan tahun 2025, kecamatan ini baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, berbagai bentuk strategi yang telah terpilih baik berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen rencana kerja ini harus diimplementasikan secara tertulis dan jelas ke dalam Rencana Kerja Perubahan tahun 2025. Renja ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati Pacitan terpilih untuk pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan dan satu tahun masa transisi .

Kidah-kaidah dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan mempertimbangkan upaya yang harus ditempuh dengan tidak mudah dan akan mendapat banyak tantangan serta kendala yang melintang, maka Kecamatan Sudimoro sebagai salah satu SKPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berusaha semaksimal mungkin dengan menggunakan rencana kerja ini sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan ke depan, mengingat rencana kerja ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat Kecamatan Sudimoro , tetapi juga bagi semua pihak yang berkepentingan dalam proses perencanaan pembangunan diwilayah Kecamatan Sudimoro

Rencana tindak lanjut Rencana Kerja Perubahan ini merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan Sudimoro, dengan demikian setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kecamatan Sudimoro telah mempunyai pedoman/acuan/arahan yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan, sehingga bisa terukur dan terprogram dengan baik .

Sudimoro, 21 Juli 2025

CAMAT SUDIMORO

M.TAUFIK EFFENDI,S.STP,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19830416 200212 1 003